Laporan Tahunan | Annual Report
2023

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Harmoni

HADIRKAN SEMANGAT KOLABORASI MEMBANGUN NEGERI
Spirit of Collaboration in Advancing the Nation

HARMONI

Hadirkan Semangat Kolaborasi Membangun Negeri

Spirit of Collaboration in Advancing the Nation

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/Indonesia Eximbank) terus mendorong proses transformasi bisnis yang telah berlangsung sejak 2020, dengan melaksanakan perbaikan fundamental secara komprehensif baik bersifat organik maupun inorganik dalam berbagai aspek. Salah satu fokus transformasi LPEI adalah penguatan seluruh aspek pembiayaan, mulai dari proses *underwriting* sampai dengan pencairan dan *monitoring*. LPEI juga terus menyeimbangkan komposisi portofolio secara bertahap, serta meningkatkan peran dalam ekosistem ekspor terkait pelaksanaan mandat penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi, termasuk fokus pada pengembangan UMKM ekspor. Dengan demikian, LPEI terus memastikan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan dan memberikan dampak pada pembangunan nasional.

Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/ LPEI) continues to encourage the business transformation process that has been ongoing since 2020, by implementing comprehensive fundamental improvements both organic and inorganic in various aspects. One of the focuses of Indonesia Eximbank's transformation is strengthening all aspects of financing, from the underwriting process to disbursement and monitoring. Indonesia Eximbank also continues to balance its portfolio composition in stages, as well as increasing Indonesia Eximbank's role in the export ecosystem regarding the implementation of guarantee mandates, insurance and consulting services, including a focus on developing export MSMEs. In this way, Indonesia Eximbank continues to ensure sustainable business growth and have an impact on national development.

Kinerja 2023

2023 Performance

Sepanjang tahun 2023, LPEI telah menjalankan seluruh mandat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

In 2023, Indonesia Eximbank has carried out all mandates as stipulated in the Republic of Indonesia Act No. 2 of 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Pembiayaan
Financing

Rp73,82
triliun | trillion

***Outstanding* Pembiayaan**
Outstanding Financing

Penugasan Khusus Ekspor (PKE)
National Interest Account (NIA)

Rp4.993
milliar | billion

***New Disbursement* 8 Program PKE**
New Disbursement of 8 NIA Programs

Penjaminan
Guarantee

Rp7.381
milliar | billion

Outstanding
Penjaminan Komersial
Outstanding
Commercial Guarantee

Asuransi
Insurance

Rp12.019
milliar | billion

Volume Asuransi
Insurance Volume

Trade Finance

Rp16,1
triliun | trillion

Volume Trade Finance
Trade Finance Volume

Jasa Konsultasi
Advisory Services

389
Eksportir Baru |
New Exporter

739
Desa Devisa Baru |
New Go Export Village

Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Performance

LPEI bagi Lingkungan Hidup

Indonesia Eximbank for the Environment

penyaluran pembiayaan sektor UMKM berorientasi ekspor

Rp14.49 triliun | trillion

Disbursement on the export-oriented MSME sector

Intensitas Emisi Konsumsi Listrik

0,08 Ton CO_2eq/M²

Electricity Consumption Emission Intensity

LPEI mengumpulkan 103,5 kg (botol) plastik bekas yang di donasikan ke Mortier.

103,5 kg

Indonesia Eximbank collected 103,5 kg (bottles) of used plastic which was donated to Mortier.

LPEI bagi Sosial Masyarakat

Indonesia Eximbank for Social Communities

20 talent | talents

LPEI ikut serta dalam ajang **Kemenkeu Mengajar ke-8**.

participated in the 8th Ministry of Finance Teaching event.

Desa Devisa Batik Aromaterapi asal Jawa Timur mengekspor produknya ke Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang.

Aromatherapy Batik Go Export Village from East Java exporting its product to United States, Malaysia, Singapore, Korea, Japan.

LPEI memberikan pelatihan dan pendampingan kepada

Indonesia Eximbank provided training and assistance to

>4.500 pelaku UMKM | MSMEs

LPEI bagi Nasabah

Indonesia Eximbank for Customers

Inovasi pada sejumlah produk dan layanan, antara lain Produk *Trade Finance*

Innovation in a number of products and services

Auto Purchase LC/SKBDN Intra LPEI

Inovasi pada sejumlah produk dan layanan, antara lain Produk *Trade Finance*

Innovation in a number of products and services

Approved Payable Financing

Kesinambungan Tema

Theme Continuity

2019

Mendukung Peran dan Mandat Melalui Revitalisasi Fondasi

Revitalizing Our Foundation in Fostering Our Role and Mandate

LPEI terus berupaya mengoptimalkan perannya menjadi lembaga yang berstatus sui generis mampu berkontribusi besar bagi peningkatan ekspor nasional dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola Perusahaan yang Baik, serta manajemen risiko yang baik dan kehati-hatian guna mencapai pertumbuhan berkelanjutan. dukungan LPEI terhadap peningkatan ekspor nasional selama tahun 2019, dilakukan melalui penyaluran fasilitas pembiayaan, penjaminan dan asuransi; penyediaan tingkat suku bunga yang terjangkau bagi eksportir terutama untuk segmen ukM berorientasi ekspor (ukME); pembiayaan kepada komoditi ekspor potensial dan jasa; serta penambahan jumlah eksportir baru (ukME) melalui program Coaching Program For New Exporters dari kegiatan jasa konsultasi. LPEI juga memberikan catatan positif, khususnya dalam hal dampak ekonomi dan sosial (developmental impacts) yang diberikan. Berdasarkan hasil pengukuran dampak ekonomi dan sosial (developmental impacts), fasilitas pembiayaan yang disalurkan LPEI dapat berkontribusi terhadap kenaikan ekspor sebesar 3,6 kali Pembiayaan dan kenaikan Produk domestik Bruto (PdB) sebesar 2,7 kali Pembiayaan.

Indonesia Eximbank continued to optimize its role as an institution sui generis that is able to contribute to the sustainable growth of national exports while upholding the principles of good governance, rigorous risk management, and prudence. the Company 's support in enhancing national export during 2019 is manifested through financing, guaranteeing, and insurance facilities, provided competitive interest rate to exporters particularly in the export-oriented SMEs segment, financing to potential export commodities and services, and contributed in increasing the number of new exporters by holding a coaching program as part of Indonesia Eximbank's advisory segment. Indonesia Eximbank also delivered positive outcome, specifically in terms of developmental impacts in both economy and social aspects. Based on the measurement of developmental impacts, Indonesia Eximbank was able to contribute through financing facility an increase in export by 3.6 times Financing and an increase of gross domestic Product (gdP) by 2.7 times Financing.

2020

Menjadi Penggerak Pembangunan di Masa Pandemi & Beraspirasi menuju Resiliensi dengan *Agility*

Propelling the Nation during the Pandemic & Aspires toward Resilience with Agility

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mengimbangi masa pandemi di tahun 2020 melalui penguatan fondasi dengan misi "Regain Our Footing". tujuannya agar LPEI tetap menjadi penggerak pembangunan di masa pandemi. LPEI juga berupaya menjadi Lembaga yang penuh aspirasi menuju resiliensi dengan ketangkasan. Oleh karenanya di tahun 2020, LPEI memfokuskan pada tiga aspek agar mampu cepat beradaptasi dan tetap tangkas dalam situasi sulit. ketiga aspek tersebut yaitu melakukan restrukturisasi dan efisiensi, menjalankan mandat dan bisnis secara selektif termasuk Jasa konsultasi, dan penguatan proses Internal. ketiga aspek ini kemudian dituangkan menjadi sembilan prioritas utama, serta sekaligus menjadi strategi pengembangan bisnis LPEI di tahun 2020.

Indonesia Eximbank navigated the crisis in 2020 by strengthening its foundation through its "Regain Our Footing" mission in order to continue propelling the nation during the pandemic. Indonesia Eximbank also aspires toward resilience with agility. to that end, in 2020 Indonesia Eximbank focused on three improvement areas that would accelerate its capability to adapt and staying agile amid a difficult situation. These areas were restructuring and efficiency, selective exercise of mandate and business activities including the advisory Services, and internal process strengthening. these aspects have been translated into nine key priorities that also formed Indonesia Eximbank's business development strategies in 2020.

2021

Penguatan Mandat Institusi untuk Meningkatkan Ekspor dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Empowering Institutional Mandate in Supporting Export and National Economic Recovery

Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyediakan penjaminan atas kredit modal kerja yang disalurkan oleh perbankan kepada pelaku usaha korporasi melalui program Penjaminan Pemerintah atau JaMINaH dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. terkait dengan hal tersebut, LPEI memiliki tiga peran penting dalam rangka meningkatkan Pemulihan Ekonomi Nasional dan ekspor nasional sebagai Special Mission Vehichle (SMV) kementerian keuangan yang meliputi Penjaminan Pemerintah untuk pelaku usaha korporasi; pelaksana pada program investasi pemerintah; dan penugasan khusus ekspor atau PkE dengan tujuan menyediakan pembiayaan ekspor.

Indonesia Eximbank has been given the mandates by the government to provide guarantees for working capital loans disbursement by banks to corporate business practitioners through the government guarantee program or JaMINaH in the framework of national economic recovery. as such, Indonesia Eximbank has three key roles in order to improve the national economic recovery and enhance the national exports as a Special Mission Vehicles (SMV) of the Ministry of Finance which includes government guarantees for corporate business players; the executor of government investment programs; and export-specific assignments or PKE with the aim at providing export financing.

2022

Supporting Export Ecosystem Strengthening Collaborations

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) secara aktif membangun kerjasama dengan berbagai institusi dan lembaga baik pemerintah daerah maupun pusat dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga mampu mengembangkan produk berorientasi ekspor, serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional. LPEI berperan sebagai fasilitator dan akselerator guna menjembatani kepentingan aktivitas dan pelaku ekspor dengan instansi terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan ekspor serta mempermudah aktivitas ekspor yang mengalami hambatan regulasi di negara tujuan ekspor. Selain itu, LPEI memberikan dukungan berupa layanan finansial dan layanan non-finansial kepada pelaku UMKM berorientasi ekspor..

Indonesia Eximbank actively collaborates with various local and central government institutions and agencies to enhance the capabilities of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) for developing export-driven products and fostering a favorable business environment to boost national exports. Serving as a mediator and expediter, Indonesia Eximbank connects exporters and export-related agencies to address barriers and facilitate export operations that encounter regulatory impediments in the destination countries. Additionally, Indonesia Eximbank extends financial and non-financial assistance to MSME communities with a focus on export-oriented ventures.

2023

HARMONI
Hadirkan Semangat Kolaborasi Membangun Negeri
Spirit of Collaboration in Advancing the Nation

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/Indonesia Eximbank) terus mendorong proses transformasi bisnis yang telah berlangsung sejak 2020, dengan melaksanakan perbaikan fundamental secara komprehensif baik bersifat organik maupun inorganik dalam berbagai aspek. Salah satu fokus transformasi LPEI adalah penguatan seluruh aspek pembiayaan, mulai dari proses *underwriting* sampai dengan pencairan dan *monitoring*. LPEI juga terus menyeimbangkan komposisi portofolio secara bertahap, serta meningkatkan peran dalam ekosistem ekspor terkait pelaksanaan mandat penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi, termasuk fokus pada pengembangan UMKM ekspor. Dengan demikian, LPEI terus memastikan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan dan memberikan dampak pada pembangunan nasional.

Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI) continues to encourage the business transformation process that has been ongoing since 2020, by implementing comprehensive fundamental improvements both organic and inorganic in various aspects. One of the focuses of Indonesia Eximbank's transformation is strengthening all aspects of financing, from the underwriting process to disbursement and monitoring. Indonesia Eximbank also continues to balance its portfolio composition in stages, as well as increasing Indonesia Eximbank's role in the export ecosystem regarding the implementation of guarantee mandates, insurance and consulting services, including a focus on developing export MSMEs. In this way, Indonesia Eximbank continues to ensure sustainable business growth and have an impact on national development.

Daftar Isi
Contents

01 Ikhtisar Utama
Highlights

IKTISAR KEUANGAN
Financial Highlights 10

IKHTISAR OBLIGASI
Bonds Highlights 13

PERISTIWA PENTING 2023
Events Highlights in 2023 15

PENGHARGAAN
Awards 19

02 Laporan Manajemen
Management Reports

LAPORAN DEWAN DIREKTUR
Board of Directors Report 22

DEWAN DIREKTUR
Board of Directors 36

LAPORAN DIREKTUR EKSEKUTIF-DIREKTUR PELAKSANA
Executive Director & Managing Directors Report 38

DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
Executive Director & Managing Directors 56

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Report from the Sharia Supervisory Board 58

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Sharia Supervisory Board 61

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN 2023 OLEH DEWAN DIREKTUR
Statement of Accountability of 2023 Annual Report by the Board of Directors 62

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN 2023 OLEH DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA
Statement of Accountability of 2023 Annual Report by the Executive Director & Managing Directors 63

03 Profil Perusahaan
Company Profile

IDENTITAS PERUSAHAAN
Corporate Identity 66

SKALA USAHA
Business Scale 66

JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASIONAL
Business Network and Operational Areas 67

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
Brief History of the Company 68

JEJAK LANGKAH
Milestones 71

VISI, MISI, & NILAI PERUSAHAAN
Vision, Mission, & Corporate Value 74

BUDAYA KERJA LEMBAGA
Corporate Culture 76

ANGGOTA BOARD OF MANAGEMENT
Members of Board of Management 78

BIDANG USAHA
Business Activities 80

PRODUK DAN JASA
Products and Services 82

STRUKTUR ORGANISASI
Organization Structure 84

KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI
Membership in Associations 86

PROFIL DEWAN DIREKTUR
Profile of the Board of Directors 87

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN
Independence Statement of Independent Commissioner 94

INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN DIREKTUR
Information on Changes in Composition of the Board of Directors 94

PROFIL DIREKTUR PELAKSANA
Managing Directors' Profile 95

INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKTUR PELAKSANA
Information on Changes in the Composition of Managing Directors 100

PROFIL MANAJEMEN SENIOR
Profile of Senior Management 100

DEMOGRAFI PEGAWAI
Employees Demography 105

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
Shareholders Composition 106

STRUKTUR GRUP LPEI
Grup Structure of Indonesia Eximbank 108

ENTITAS ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI, PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA, DAN PENYERTAAN SAHAM LAINNYA
Subsidiaries, Associated Companies, Joint Ventures, and Other Equity Investments 109

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM
Share Issuance and Listing Chronology 111

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK BERSIFAT UTANG
Chronology of Issuance and Listing of Debt Securities 111

INFORMASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DAN AKUNTAN PUBLIK
Public Accountant and Public Accountant Firm 114

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG
Name and Address of Supporting Professionals Institutions 115

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN
Information on Company Website 117

AKSES INFORMASI
Information Disclosure 119

04 Analisis & Pembahasan Manajemen
Management Discussion & Analysis

TINJAUAN PEREKONOMIAN
Economic Review 122

TINJAUAN INDUSTRI PEMBIAYAAN EKSPOR
Export Financing Industry Review 127

ASPEK PEMASARAN
Marketing Aspect 131

STRATEGI BISNIS
Business Strategy 133

TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMEN USAHA
Business Segment Operational Review 137

TINJAUAN KEUANGAN
Financial Review 178

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Consolidated Statements of Cash Flow 190

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
Solvency and Receivables Collectability 191

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN ATAS STRUKTUR MODAL
Capital Structure and Management Policy on Capital Structure 193

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
Material Commitment for Capital Goods Investment 195

REALISASI INVESTASI ATAU BELANJA BARANG MODAL TAHUN 2023
Investment Realization or Capital Expenditures In 2023 196

PERBANDINGAN ANTARA TARGET & REALISASI TAHUN 2023 SERTA PROYEKSI 2024
Comparison Between 2023 Target & Realization as Well as 2024 Projection 197

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
Material Information Subsequent Events 198

PROSPEK USAHA
Business Prospect 201

KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA
Dividend Policy and Distribution 204

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN ATAU MANAJEMEN
Share Ownership Program for Employee/Management 205

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL
Material Information regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolation of Businesses, Acquisitions, and Debt/Capital Restructuring 205

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI
Realization of Use of Funds Proceeding from Public Offering of Bond 206

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
Transaction with Conflicts of Interest and Affiliates Transactions with Related Parties 206

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN
Regulatory Changes that Have a Material Impact on the Institution 208

PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Changes in Accounting Policies Application 209

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA
Contribution to the State 209

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
Business Continuity Information 210

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology 212

05 Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance 222

STRUKTUR DAN ARSITEKTUR GCG
GCG Structure and Architecture 236

KERANGKA TATA KELOLA (STRUKTUR, PROSES, DAN HASIL TATA KELOLA)
GCG Framework (Governance Structure, Process, and Outcome) 239

PENILAIAN GCG
GCG Assessment 241

RAPAT PENGESAHAN
Ratification Meetings 242

DEWAN DIREKTUR
Board of Directors 245

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA
Executive Director and Managing Directors 259

PENILAIAN PENERAPAN GCG TERHADAP ASPEK DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF - DIREKTUR PELAKSANA
Assessment of GCG Implementation on the Aspect of the Board of Directors and Executive Directors - Managing Directors 283

KEBIJAKAN NOMINASI BAGI DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR PELAKSANA
Nomination Policy for the Board of Directors and Managing Directors 287

REMUNERASI DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR PELAKSANA
Remuneration of The Board of Directors and Managing Directors 288

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Sharia Supervisory Board 295

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR
Supporting Organs of the Board of Directors 304

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
Remuneration and Nomination Committee 316

KOMITE PEMANTAU RISIKO
Risk Monitoring Committee 323

ORGAN PENDUKUNG DIREKTUR EKSEKUTIF
Supporting Organs of the Executive Director 330

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Committee 331

KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK
Product Development Committee 336

KOMITE KEBIJAKAN DAN PEDOMAN
Policy and Guidelines Committee 340

KOMITE ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT
Assets and Liabilities Management Committee 344

KOMITE TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI
Information Systems Technology Committee 348

KOMITE PENGADAAN
Procurement Committee 352

KOMITE JASA KONSULTASI
Advisory Services Committee 358

KOMITE PEMBIAYAAN
Financing Committee 365

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources Committee 377

SEKRETARIS DEWAN DIREKTUR
Secretary to the Board of Directors 380

SEKRETARIS LEMBAGA
Corporate Secretary 382

UNIT AUDIT INTERNAL
Internal Audit Unit 385

AKUNTAN PUBLIK
Public Accountant 393

FUNGSI KEPATUHAN
Compliance Function 395

SISTEM MANAJEMEN RISIKO
Risk Management System 402

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Internal Control System 423

PERKARA HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN
Legal Cases and the Settlement 429

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
Access to Company Information and Data 431

KODE ETIK
Code of Conduct 432

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA
Performance-Based Long-Term Compensation Policy 438

TRANSPARANSI MANAJEMEN TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM
Management Transparency on Share Ownership 438

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
Whistleblowing System 440

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI DAN ANTI GRATIFIKASI
Anti-Corruption and Anti-Gratification Policies 448

KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)
Anti-Money Laundering (AML) and Prevention of Terrorism Financing (PPT) Policy 455

TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN LEMBAGA
Financial and Non-Financial Transparency of The Institution 458

BUYBACK OBLIGASI DAN SAHAM
Bond and Stock Buybacks 459

PENGADAAN BARANG DAN JASA
Procurement of Goods and Services 460

KEBIJAKAN PENCEGAHAN *INSIDER TRADING*
Insider Trading Prevention Policy 464

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA
Strategic Plan of the Institution 464

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR
Distribution of Fund To Related Parties and Large Exposures 467

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEPENTINGAN POLITIK
Funding for Social Activities and Political Interests 468

PENERAPAN PEDOMAN GCG
GCG Guidelines Application 467

06 Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report

PROFIL LAPORAN KEBERLANJUTAN
Sustainability Report Profile 480

KERANGKA DAN STRATEGI KEBERKELANJUTAN
Framework and Strategy 488

STRATEGI KEBERLANJUTAN LPEI
Indonesia Eximbank Sustainability Strategy 494

IKHTISAR ASPEK KEBERLANJUTAN
Sustainability Aspect Performance 504

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN
Sustainability Governance 506

KINERJA KEBERLANJUTAN
Sustainability Performance 514

KOMITMEN PEMBERIAN LAYANAN TERBAIK DAN SETARA KEPADA SEMUA NASABAH
Commitment to Providing the Best and Equal Service to All Custo mers 535

ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Occupational Health and Safety Aspects 551

LPEI BAGI MASYARAKAT SEKITAR
Indonesia Eximbank for the Surrounding Community 580

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK, LAYANAN, DAN NASABAH
Responsibility Towards Products, Services, and Customers 591

TANGGAPAN UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA
Feedback on Previous Year's Report 600

LAMPIRAN UMPAN BALIK
Feedback Form 601

07 Laporan Keuangan 2023
Financial Statements 2023

Ikhtisar Utama

Performance Highlights

Iktisar Keuangan
Financial Highlights

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	2023	2022	2021	2020	2019	CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Total Aset	51.349.279	83.815.752	89.040.921	92.084.560	108.701.725	Total Assets
Portofolio Tresuri - Bruto	8.957.378	14.711.957	17.877.638	14.110.026	18.466.036	Treasury Portfolio - Gross
Portofolio Pembiayaan dan Piutang - Bruto	73.823.211	83.636.003	83.963.162	90.408.073	97.806.606	Financing and Receivables Portfolio - Gross
Tagihan Derivatif	85	-	6	-	1.410	Derivatives Receivable
Piutang Asuransi dan Penjaminan	75.059	288.989	285.656	34.631	1.410	Insurances Receivable and Guarantee
Aset Reasuransi	2.933	3.544	2.615	1.284	4.853	Reinsurances Assets
Tagihan Akseptasi	153.230	150.917	458.630	558.417	658.289	Acceptances Receivable
Total Liabilitas	42.587.812	56.947.507	58.920.543	67.288.011	89.762.973	Total Liabilities
Efek-Efek Utang yang Diterbitkan - Bruto	21.992.750	25.311.700	27.743.500	36.524.500	45.209.502	Debt Securities Issued - Gross
Pinjaman yang Diterima	18.352.943	29.297.065	28.799.571	28.599.773	41.492.912	Fund Borrowings
Utang Asuransi	5.534	6.306	4.055	2.563	2.150	Insurances Payable
Utang Penjaminan	18.427	61.715	62.363	560	497	Guarantee Payable
Liabilitas Asuransi	6.672	7.961	6.390	3.230	6.515	Insurances Liabilities
Total Ekuitas	8.761.467	26.868.245	30.120.378	24.796.549	18.938.752	Total Equity

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	2023	2022	2021	2020	2019	CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan Operasional - Neto	1.182.281	961.951	1.421.725	1.157.483	1.709.727	Total Operating Income - Net
Pendapatan Bunga	4.052.097	3.711.851	4.263.520	5.102.881	7.061.466	Interest Income
Beban Bunga	(3.128.893)	(2.936.114)	(3.057.215)	(4.262.993)	(5.646.218)	Interest Expense
Pendapatan Bunga Bersih	923.204	775.737	1.206.305	839.888	1.415.248	Net Interest Income
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	(16.932.394)	(2.107.596)	(257.752)	(423.080)	(6.681.341)	Provision for Impairment Losses on Financial Assets Value
Penyisihan Kerugian Estimasi Klaim Penjaminan	2.994	(652)	(114)	(1.946)	6.802	Provision for Impairment Losses on Estimated Guarantee Claim
Beban Operasional - Neto	(794.033)	(762.488)	(758.763)	(676.887)	(691.234)	Total Operating Expense - Net
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Neto	10.488	16.420	3.943	6.152	21.188	Non-Operating Income (Expense) - Net
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(16.530.664)	(1.892.365)	409.039	61.722	(5.634.858)	Profit (Loss) Before Tax
Laba (Rugi) Setelah Pajak	(18.114.327)	(3.114.554)	387.396	288.388	(4.710.849)	Profit (Loss) After Tax
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain –Neto	7.549	(26.784)	14.890	109.837	15.982	Other Comprehensive Income(Expense) - Net
Laba (Rugi) Komprehensif	(18.106.778)	(3.141.338)	402.286	398.225	(4.694.867)	Comprehensive Income (Loss)

KOMITMEN & KONTINJENSI	2023	2022	2021	2020	2019	COMMITMENT & CONTINGENCIES
Irrevocable L/C Masih Berjalan	125.656	395.071	379.096	164.415	280.657	Outstanding Irrevocable L/C
Penjaminan yang Diberikan	10.895.141	12.428.806	13.136.226	9.908.992	10.127.895	Guarantee Facility
Asuransi Ekspor	11.760.016	16.782.700	10.938.409	8.108.726	8.178.647	Export Insurance

RASIO KEUANGAN (%)	2023	2022	2021	2020	2019	FINANCIAL RATIO (%)
Kecukupan Modal (CAR) - Risiko Kredit	18,43	32,93	38,19	29,47	17,62	Credit Risk - Capital Adequacy Ratio (CAR)
Kecukupan Modal (CAR) - Risiko kredit, pasar, dan operasional	17,88	32,74	37,19	28,07	17,32	Credit, Market & Operational Risk -Capital Adequacy Ratio (CAR)
NPF Bruto	43,48	26,61	21,03	26,08	23,39	NPF Gross
NPF Neto	4,54	10,39	7,12	11,49	13,96	NPF Net
Pengembalian atas Aktiva (ROA)	(22,74)	(2,19)	0,46	0,06	(4,84)	Return on Assets (ROA)
Pengembalian atas Ekuitas (ROE)	(71,71)	(10,49)	1,54	1,41	(21,63)	Return on Equity (ROE)
Pendapatan Bunga Bersih Terhadap Aktiva Produktif (NIM)	1,04	0,78	1,17	0,77	1,18	Net Interest Margin (NIM)
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	483,24	148,57	90,87	98,86	179,63	Operating Expenses to Operating Income
Posisi Devisa Neto	12,09	1,74	7,07	16,96	9,7	Net Open Position
Kewajiban terhadap Ekuitas (kali)	4,86	2,12	1,96	2,71	4,74	Debt to Equity (times)
Kewajiban terhadap Aset (kali)	0,83	0,68	0,66	0,73	0,83	Debt to Assets (times)
Rasio Lancar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Current Ratio
Laba bersih terhadap pendapatan (margin laba bersih)	(4,47)	(0,84)	0,09	0,06	(0,67)	Net Profit Margin

Ikhtisar Kinerja Saham
Stock Performance Highlights

LPEI merupakan SMV (*Special Mission Vehicle*) dari Kementerian Keuangan RI yang mana seluruh sahamnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan modal yang tidak terbagi atas saham. Dengan statusnya tersebut, maka tidak terdapat informasi lebih lanjut mengenai pergerakan harga saham, volume transaksi dan nilai kapitalisasi pasar atas saham LPEI, yang dapat disampaikan dalam laporan ini.

Indonesia Eximbank is a Special Mission Vehicle (SMV) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, where all of its shares (100%) are owned by the Government of the Republic of Indonesia with an undivided capital. As such, there is no further information available regarding the movement of stock prices, transaction volume, and market capitalization value of LPEI shares that can be provided in this report.

Aksi Korporasi Terhadap Saham
Corporate Actions Regarding Shares

LPEI tidak melakukan penyajian informasi terkait pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), serta pemberian atau pengeluaran dividen saham, saham bonus, termasuk tidak melakukan penurunan nilai nominal saham, penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

Indonesia Eximbank does not provide information regarding stock splits, reverse stock splits, issuance or distribution of stock dividends, bonus shares, including no reduction in the nominal value of shares, temporary suspension of stock trading, and delisting.

Ikhtisar Obligasi
Bond Highlights

LPEI telah menerbitkan obligasi dan sukuk korporasi yang belum jatuh tempo hingga 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

Indonesia Eximbank has issued corporate bonds and sukuk that have not matured until 31 December 2023, as follows:

Daftar obligasi korporasi Indonesia Eximbank | Indonesian Eximbank's Corporate Bonds

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang *Outstanding* per 31 Desember 2023 Total Outstanding as of 31 December 2023 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga perTahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
1	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase IV of 2017	D	1.007	9,20	23-Feb-17	23-Feb-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	1.266	9,40	23-Feb-17	23-Feb-27	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase V of 2017	C	1,706	8,25	15-Aug-17	15-Aug-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
3	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Bonds III Phase VI of 2018	C	206	6,90	14-Feb-18	14-Feb-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
4	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Bonds IV Phase I of 2018	C	1.756	8,30	06-Jun-18	6-Jun-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
5	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV PhaseII of 2018	D	1.324	8,75	05-Sep-18	5-Sep-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
6	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV PhaseIII of 2018	D	380	9,75	08-Nov-18	8-Nov-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
7	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV PhaseIV of 2019	C	1.473	8,90	23-Apr-19	23-Apr-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	278	9,25	23-Apr-19	23-Apr-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	349	9,50	23-Apr-19	23-Apr-29	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		F	625	9,80	23-Apr-19	23-Apr-34	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
8	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV PhaseV of 2019	C	315	8,70	09-Jul-19	9-Jul-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	737	9,20	09-Jul-19	9-Jul-28	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang Outstanding per 31 Desember 2023 Total Outstanding as of 31 December 2023 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga perTahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
9	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV PhaseVI of 2019	C	6	8,10	03-Sep-19	03-Sep-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	714,5	8,50	03-Sep-19	03-Sep-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
10	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV PhaseVII of 2019	C	25,5	8,10	29-Oct-19	29-Oct-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	112	8,50	29-Oct-19	29-Oct-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	219,75	8,75	29-Oct-19	29-Oct-29	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
11	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV PhaseVIII of 2019	B	1.551	7,90	06-Dec-19	06-Dec-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	22,5	8,20	06-Dec-19	06-Dec-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
	Jumlah Obligasi | Total Bonds		**14.073,25**					

Daftar sukuk Indonesia Eximbank | Indonesian Eximbank's Sukuk

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang *Outstanding* per 31 Desember 2023 Total Outstanding as of 31 December 2023 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga perTahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
1	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah I Phase II of 2018	D	155	9,75	08-Nov-18	8-Nov-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2019 Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah I Phase III of 2019	C	66	8,90	23-Apr-19	23-Apr-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
	Jumlah Sukuk | Total Sukuk		**221**					

Medium Term Notes | Medium Term Notes

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang *Outstanding* per 31 Desember 2023 Total Outstanding as of 31 December 2023 (Rp Miliar/Billion)	Tingkat Bunga perTahun Interest Rate Per Year	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
1	Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank 2017		7.699	3,875	06-Apr-17	6-Apr-24	Singapore Exchange Securities Trading	BBB (Fitch) Baaa2 (Moody's)
	Jumlah Sukuk | Total Sukuk		**7.699**					

Peringkat Lembaga | Institution Rating

No.	Lembaga Pemeringkat Rating Agency	Peringkat Rating	*Outlook*
1	Moody's	Baa2	Stable
2	Fitch	BBB	Stable
3	Pefindo	idAAA	Stable

Peristiwa Penting Tahun 2023
Event Highlights In 2023

8 Januari / January

***Signing* dengan EXIM Bank Malaysia**
Penandatanganan Perjanjian Nota Kesepahaman Kerja Sama Investasi dan Keuangan dengan Export-Import Bank of Malaysia Berhad.

Signing with EXIM Bank Malaysia
The signing of a Memorandum of Understanding Agreement on Investment and Financial Cooperation with the Export-Import Bank of Malaysia Berhad.

12 Januari / January

Peresmian Desa Devisa Kopi Gayo
Peresmian Desa Devisa Kopi Gayo Kab. Bener Meriah bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Inauguration of Gayo Coffee Go Export Village
The inauguration of Gayo Coffee Go Export Village, Bener Meriah Regency with the Directorate General of State Assets (DJKN).

19 Januari / January

Kunjungan Kerja DPR RI
Kunjungan Kerja Spesifik DPR RI ke Pelaku Usaha Penerima PKE UKM di Boyolali.

Working Visit of DPR RI
DPR RI's Specific Working Visit to PKE UKM Recipient Businesses in Boyolali.

28-31 Maret / March

Partisipasi dalam AFMGM 2023 Bali
Membawa Mitra Binaan untuk Showcasing dalam acara AFMGM (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting) 2023 di Bali.

Participation in the 2023 AFMGM Bali
Bringing Fostered Partners for Showcasing at the 2023 AFMGM (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting) in Bali.

3-5 April / April

Kunjungan Kerja BAKN
Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di Solo.

BAKN Working Visit
Working Visit of State Financial Accountability Board in Solo.

9-12 Mei / May

Pameran Interzum Jerman
LPEI dengan Kementerian Perdagangan RI mendukung peluang eksportir Indonesia menjajaki pasar produk hasil olahan kayu melalui pameran Interzum 2023, di Jerman.

Interzum Exhibition Germany
Indonesia Eximbank with the Indonesian Ministry of Trade supported the opportunity for Indonesian exporters to explore the wood products market through the Interzum 2023 exhibition, in Germany.

9 Juni
June

***Signing* MoU dengan Indonesia Re**
LPEI Bersama Indonesia Re melakukan penandatanganan MoU terkait penyaluran kegiatan usaha untuk mendukung ekspor nasional.

Signing MoU with Indonesia Re
LPEI and Indonesia Re signed an MoU related to the distribution of business activities to support national exports.

21 Juni
June

Seminar bertajuk ESG & Economic Outlook
Seminar "Addressing Key Challenges in Climate Change" berkolaborasi dengan Moody's Analytics yang membahas tentang penerapan prinsip Environmental, Social, Governance (ESG) dalam aspek keuangan dan ekonomi berkelanjutan.

Seminar on ESG & Economic Outlook
Seminar "Addressing Key Challenges in Climate Change" in collaboration with Moody's Analytics which discusses the application of Environmental, Social, Governance (ESG) principles in sustainable finance and economic aspects.

20 Juli
July

Sosialisasi Turunan UU HKPD dan Desa Devisa Udang Jembrana
Sosialisasi Turunan UU HKPD dan Desa Devisa Udang Jembrana bersama Komisi XI Bali - I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., MM.

Socialization of HKPD Law Derivatives and Jembrana Shrimp Go Export Village
Socialization of HKPD Law Derivatives and Jembrana Shrimp Go Export Village with Commission XI Bali - I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., MM.

2 Agustus
August

***Signing* dengan PT Sarana Multi Infrastruktur**
Penandatanganan PKS Penerbitan Bank Garansi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan LPEI.

Signing with PT Sarana Multi Infrastruktur
The signing of the Bank Guarantee Issuance Agreement between PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) and Indonesia Eximbank.

21 Agustus
August

Sosialisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA)
LPEI bersama dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI melakukan sosialisasi kepada debitur/ nasabah LPEI yang masuk ke dalam sektor dan kriteria Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yaitu pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Socialization of Foreign Exchange Export Proceeds (DHE) generated from Natural Resources
Indonesia Eximbank, together with the Ministry of Finance and the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, conducted socialization to the debtors/ customers of Indonesia Eximbank who are included in the sector and criteria for Foreign Exchange Export Proceeds (DHE) of Natural Resources (SDA), namely mining, plantations, forestry and fisheries.

22 Agustus
August

Partisipasi dalam Kegiatan AFMGM 2023 Jakarta
Showcasing UKM Mitra Binaan dalam kegiatan AFMGM (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting) 2023 di Jakarta.

Participation in AFMGM 2023 Jakarta Activities
Showcasing Assisted Partner SMEs at the 2023 AFMGM (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting) in Jakarta.

6 September
September

Kemenkeu Satu Goes to Campus
Kemenkeu Goes to Campus ke Universitas Airlangga Surabaya.

Kemenkeu Satu Goes to Campus
Ministry of Finance Goes to Campus to Airlangga University Surabaya.

7 September
September

Signing Nota Kesepakatan antara LPEI dengan DigiAsia dan BlitzNet
LPEI meneken perjanjian kemitraan strategis dengan Digiasia Bios dan Blitznet, dalam upaya untuk memperkuat posisi UKM Indonesia di pasar Internasional, dengan menciptakan platform yang menghubungkan penjual dan pembeli bahan baku di Indonesia.

Signing of Memorandum of Agreement between LPEI and DigiAsia and BlitzNet
Indonesia Eximbank signed a strategic partnership agreement with Digiasia Bios and Blitznet, in an effort to strengthen the position of Indonesian SMEs in the international market, by creating a platform that connects sellers and buyers of raw materials in Indonesia.

28 September
September

Peresmian Desa Devisa Tenun Sikka, NTT
Kolaborasi antar-SMV bersama PT SMI, Peresmian Desa Devisa Tenun Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Inauguration of Sikka Weaving Go Export Village, NTT
SMV, in collaboration with PT SMI, Inaugurating of Sikka Weaving Go Export Village, East Nusa Tenggara.

5 Oktober
October

Kemenkeu Satu Goes to Campus
Kemenkeu Goes to Campus ke Universitas Hasanuddin Makassar.

Kemenkeu Satu Goes to Campus
Ministry of Finance Goes to Campus to Hasanuddin University Makassar.

7-11 Oktober
October

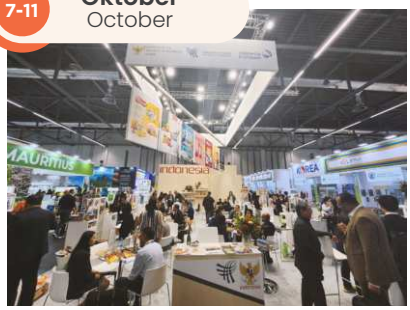

Pameran Anuga, Jerman
LPEI dukung eksportir binaan untuk mengikuti pameran makanan & minuman terbesar di dunia, Pameran Anuga (Allgemeine Nahrungs- und Genußmittel- Ausstellung) di Jerman.

Anuga Exhibition, Germany
Indonesia Eximbank supports fostered exporters to join the world's largest food & beverage exhibition, Anuga Exhibition (Allgemeine Nahrungs- und Genußmittel- Ausstellung) in Germany.

19-22 Oktober
October

Trade Expo Indonesia (TEI) 2023
LPEI berpartisipasi dalam Pameran Internasional Trade Expo Indonesia (TEI) 2023

Trade Expo Indonesia (TEI) 2023
Indonesia Eximbank participates in the Trade Expo Indonesia (TEI) 2023 International Exhibition,

19 Oktober
October

***Signing* dengan PT Dirgantara Indonesia**
Dukungan PKE alat Transportasi Strategis Nasional kepada PT Dirgantara Indonesia untuk pemenuhan pesanan 6 unit pesawat terbang NC212i oleh Department of National Defence/ Armed Forces of the Philippines (DND/AFP) Filipina.

Signing with PT Dirgantara Indonesia
National Strategic Transportation Equipment PKE support to PT Dirgantara Indonesia for the fulfillment of an order for 6 units of NC212i aircraft by the Department of National Defense/ Armed Forces of the Philippines (DND/ AFP) of the Philippines.

17 Oktober
October

Peluncuran Buku Road to Germany
Kolaborasi LPEI dengan KBRI Berlin meluncurkan buku kajian "Road to Indonesia Eximbank ".

Road to Germany Book Launch
Indonesia Eximbank's collaboration with the Indonesian Embassy in Berlin launched the "Road to Germany" study book.

10 November
November

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
Anggota Direksi PT SMI, Anggota Direksi PT Geo Dipa Energi, dan Anggota Dewan Direktur LPEI
Pelantikan Dewan Direktur LPEI dan Anggota Direksi PT SMI dan Geo Dipa.

Inauguration and Oath-taking of
Members of the Board of Directors of PT SMI, Members of the Board of Directors of PT Geo Dipa Energi, and Members of the Board of Directors of Indonesia Eximbank
Inauguration of Indonesia Eximbank Board of Directors and Members of the Board of Directors of PT SMI and Geo Dipa.

13 November
November

Stellar Workplace Award 2023
LPEI mendapat dua penghargaan pada Stellar Workplace Award 2023 dalam kategori Stellar Workplace Recognition in Commitment & Stellar Workplace Recognition in Satisfaction Award 2023 yang diselenggarakan oleh konsultan One GML.

Stellar Workplace Award 2023
LPEI received two awards at the Stellar Workplace Award 2023 in the category of Stellar Workplace Recognition in Commitment & Stellar Workplace Recognition in Satisfaction Award 2023 organized by One GML consultant.

16 November
November

***Signing* dengan Bank Jatim**
LPEI menjalin kemitraan strategis dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) untuk mendongkrak kinerja ekonomi Indonesia.

Signing with Bank Jatim
Indonesia Eximbank established a strategic partnership with Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) to boost Indonesia's economic performance.

22 November
November

Gebyar Jawa Timur
LPEI bekerja sama dengan Pemprov Jatim dan Bank Jatim dalam meningkatkan layanan ekspor melalui program pembiayaan bersama (*co-financing*), penjaminan kredit ekspor serta pengembangan komunitas ekspor.

Gebyar Jawa Timur
Indonesia Eximbank collaborates with the East Java Provincial Government and Bank Jatim to improve export services through co-financing programs, export credit guarantees and export community development.

20-22 November
November

Pertisipasi di Ajang AEBF 2023
LPEI hadir dalam pertemuan tahunan Asian Exim Banks' Forum (AEBF) ke-28 di Sydney, Australia.

Participation in AEBF 2023 Event
Indonesia Eximbank attended the 28th Asian Exim Banks' Forum (AEBF) annual meeting in Sydney, Australia.

23 November
November

Pelaksanaan TJSL "We Care" SMV Kemenkeu
Sinergi SMV Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan TJSL bertajuk We Care (Waste Management for Circular) di Yogyakarta.

SMV Ministry of Finance's TJSL "We Care" Implementation
Ministry of Finance's SMV synergy in TJSL activity titled We Care (Waste Management for Circular) in Yogyakarta.

4 Desember
December

***Signing* dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**
LPEI dan Pemprov Sumatera Barat berkolaborasi meningkatkan kapasitas pelaku usaha berorientasi ekspor.

Signing with West Sumatra Provincial Government
Indonesia Eximbank and the West Sumatra Provincial Government collaborate to increase the capacity of export-oriented businesses.

6 Desember
December

***Signing* dengan PermataBank**
Penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama terkait Penjaminan Kredit dan Pembiayaan Bersama (Co-Financing).

Signing with PermataBank
The signing of the extension of the Cooperation Agreement related to Credit Guarantee and Co-Financing.

18 Desember
December

***Signing* dengan Bank BCA**
LPEI dan BCA Kembangkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo untuk Ciptakan Devisa Pariwisata.

Signing with BCA Bank
Indonesia Eximbank and BCA Develop Labuan Bajo Super Priority Tourism Destination to Create Tourism Foreign Exchange.

28 Desember
December

***Signing* dengan ASEI**
LPEI dan Asuransi Asei Indonesia (ASEI) dorong pertumbuhan ekspor nasional dengan asuransi ekspor.

Signing with ASEI
Indonesia Eximbank and Asuransi Asei Indonesia (ASEI) encourage national export growth with export insurance.

Penghargaan
Awards

Stellar Workplace (SWP) Award 2023

- Stellar Workplace Recognition in Commitment;
- Stellar Workplace Recognition in Satisfaction.

One GML dan Kontan Business & Investment Media

8 November 2023

Laporan Manajemen

Management Report

Laporan Dewan Direktur

Board of Directors Report

Rijani Tirtoso

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of BOD concurrently Executive Director

Dewan Direktur memberikan penghargaan kepada Manajemen atas usaha transformasi yang dilakukan secara berkesinambungan dalam memperkuat fundamental lembaga untuk mencapai aspirasinya di masa depan. Dewan Direktur juga mengapresiasi upaya-upaya Manajemen yang terus melaksanakan mandat dalam mendorong ekspor nasional baik itu penyaluran pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi, serta penugasan khusus ekspor (PKE).

The Board of Directors commended Management on its ongoing transformation efforts to improve the institution's fundamentals in order to accomplish its long-term goals. The Board of Directors additionally recognizes Management's continued efforts to carry out its responsibility in supporting national exports, which include finance, guarantee, insurance, and advisory services, as well National Interest Account (NIA).

Para pemangku kepentingan saham yang terhormat,

Mengawali laporan ini, izinkan saya mewakili jajaran Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI" atau "Lembaga") lainnya memanjatkan rasa syukur yang tulus kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya yang telah memampukan LPEI menjalankan seluruh mandat yang diberikan selama tahun 2023.

Bersama dengan ini, perkenankanlah kami menyampaikan ringkasan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Direktur terkait pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

PANDANGAN TERHADAP PERKEMBANGAN MAKROEKONOMI GLOBAL YANG DINAMIS DAN EKONOMI NASIONAL TETAP TERJAGA

Sepanjang tahun 2023, perekonomian dunia masih diliputi ketidakpastian yang tinggi. Ekonomi dunia mengalami divergensi pertumbuhan yang semakin lebar. Di kelompok negara maju, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) meningkat dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, Uni Eropa mengalami stagnasi. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Jerman mengalami kontraksi tipis. Sedangkan di kelompok negara *emerging* dan berkembang, pemulihan ekonomi Tiongkok berjalan lambat, disebabkan

Dear distinguished shareholders and stakeholders,

To begin this report, allow me, on behalf of the Board of Directors of the Indonesian Export Financing Institution ("Indonesia Eximbank" or "Institution"), to express our heartfelt gratitude to the Almighty God for His blessings and grace, which have enabled Indonesia Eximbank to carry out all of its mandates in 2023.

Herewith, please allow us to submit a summary report on the implementation of our duties and responsibilities as the Board of Directors on the implementation of the supervisory function of Indonesia Eximbank's operational activities for the financial year ended 31 December 2023.

VIEW ON DYNAMIC GLOBAL MACROECONOMIC AND NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

In 2023, the world economy is still shrouded in high uncertainty. The world economy is experiencing widening growth divergence. In the group of developed countries, the United States (US) economic growth increased from the previous year. On the other hand, the European Union experienced stagnation. In fact, German economic growth experienced a slight contraction. Meanwhile, in the group of emerging and developing countries, China's economic recovery is

melemahnya konsumsi dan kontraksi yang terjadi di sektor properti.

Ketegangan geopolitik juga kembali meningkat di Kawasan Timur Tengah. Sedangkan, perang di Ukraina juga masih berlangsung. Selain itu, peristiwa cuaca ekstrem seperti kekeringan yang terjadi di Kawasan Asia akibat El Nino telah mendorong Pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan di masing-masing negara, termasuk dengan melakukan pembatasan ekspor bahan makanan. Hal-hal tersebut memicu *supply chain disruption*, terutama pada komoditas energi dan bahan pangan. Sehingga, mendorong ketidakstabilan harga komoditas dunia dan menyebabkan *gradual disinflation* berjalan lambat.

Tingkat inflasi yang belum kembali ke target sasaran mendorong Bank Sentral di negara maju, termasuk *Federal Reserve* (Fed) untuk mempertahankan suku bunga acuan tinggi dalam waktu lebih lama (*higher for longer*). Akibatnya, ruang gerak Bank Sentral di negara *emerging* dan berkembang untuk menurunkan suku bunga acuannya menjadi terbatas. Meski sebetulnya, tingkat inflasi di beberapa negara sudah berada di kisaran sasaran.

Bersamaan dengan hal tersebut, Pemerintah di negara maju (khususnya AS) menerbitkan obligasi ke pasar keuangan global guna membiayai beban fiskal yang tinggi untuk melaksanakan berbagai program sosial, perang, dan transisi ekonomi hijau. Hal tersebut memicu kenaikan *yield* obligasi jangka panjang (*US Treasury*). Selain itu, persepsi risiko yang memburuk menimbulkan fenomena *strong dollar*. Dengan demikian, terjadi realokasi aset portfolio dari negara *emerging* dan berkembangan ke negara maju, termasuk Indonesia.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, IMF mengestimasikan ekonomi dunia tahun 2023 tumbuh 3,2%, melambat dari tahun sebelumnya (2022: 3,5%). Di sisi perdagangan internasional, volume perdagangan tahun 2023 diperkirakan hanya sebesar 0,3% yoy, jauh lebih lambat dari periode sebelumnya (2022: 5,6% yoy) dan masih di bawah tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan secara historis (2000 – 2019) yang berada di level 4,9% yoy.

Perkembangan tersebut dipengaruhi *shifting* dalam *trade patterns* yang meningkat sejak dimulainya perang di Ukraina pada Februari 2022. Arus perdagangan global sedang bergerak dalam arus *friend – shoring* atau alih mitra perdagangan

progressing slowly, due to weakening consumption and contraction in the property sector.

Geopolitical tensions have also increased again in the Middle East Region. Whereas the war in Ukraine is still ongoing. In addition, extreme weather events such as the drought that occurred in the Asian region due to El Nino have encouraged the Government to ensure food security in each country, by placing restrictions on food exports. These conditions trigger supply chain disruption, especially in energy and food commodities. Thus, driving instability in world commodity prices and causing the slowdown of gradual disinflation.

The inflation rate that has not returned to its target encourages Central Banks in developed countries, including the Federal Reserve (Fed), to maintain high benchmark interest rates for longer. As a result, the space for Central Banks in emerging and developing countries to reduce their benchmark interest rates is limited. Although in fact, the inflation rate in several countries is already within the target range.

At the same time, governments in developed countries (especially the US) issued bonds to global financial markets to finance the high fiscal burden of implementing various social programs, war and green economic transition. This triggered an increase in long-term bond yields (US Treasury). In addition, worsening risk perceptions caused the strong dollar phenomenon. Thus, there is a reallocation of portfolio assets from emerging and developing countries to developed countries, including Indonesia.

Taking these dynamics into account, the IMF estimates that the world economy grew 3.2% in 2023, slowing from 2022 of 3.5%. In terms of the international trade side, trade volume in 2023 was estimated at only 0.3% yoy, much slower than the previous period of 2022, which was 5.6% yoy, and still below the historical average annual growth rate (2000 – 2019) which was at the level of 4.9% yoy.

This development is affected by shifts in trade patterns which have increased since the start of the war in Ukraine in February 2022. Global trade flows are moving in the direction of friend-shoring or switching trade partners between countries that have similar

antarnegara yang memiliki kesamaan kepentingan politik dan ekonomi. Selain itu, *cross – border trade restrictions* juga meningkat dari 1.100 pembatasan perdagangan pada tahun 2019 menjadi 3.200 pada tahun 2022 dan 3.000 pembatasan perdagangan baru pada tahun 2023.

political and economic interests. In addition, cross-border trade restrictions also increased from 1,100 trade restrictions in 2019 to 3,200 in 2022 and 3,000 new trade restrictions in 2023.

Di dalam negeri, ekonomi Indonesia tetap resilien di tengah tantangan perekonomian dunia sepanjang tahun 2023. Secara *full year*, pertumbuhan ekonomi Indonesia diestimasikan sebesar 5,05%, terutama ditopang konsumsi seiring terjaganya daya beli di tengah terkendalinya tingkat inflasi dan investasi yang ekspansif sejalan dengan keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dari sisi eksternal, nilai ekspor Indonesia tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 11,33% yoy. Hal tersebut disebabkan melemahnya *demand* dari mitra dagang utama seperti Tiongkok (-0,32% yoy), Jepang (-22,48% yoy), Malaysia (-22,50% yoy), Singapura (-22,85% yoy), dan Thailand (-28,74% yoy) dan penurunan harga komoditas.

Domestically, the Indonesian economy remains resilient amidst world economic challenges throughout 2023. In full year, Indonesia's economic growth is estimated at 5.05%, mainly supported by consumption in line with maintained purchasing power amidst controlled inflation rates and expansive investment in line with sustainability of National Strategic Project (PSN). From the external side, Indonesia's export value in 2023 decreased by 11.33% yoy. This development was due to (a) weakening demand from major trading partners such as China (-0.32% yoy), Japan (-22.48% yoy), Malaysia (-22.50% yoy), Singapore (-22.85% yoy), and Thailand (-28.74% yoy), and (b) decline in commodity prices.

Di pasar keuangan, Bank Indonesia (BI) telah melakukan penyesuaian BI Rate guna merespon pengetatan kebijakan moneter Fed yang telah mengerek *Fed Funds Rate* (FFR) hingga 525 bps sejak Maret 2022 ke level 5,25% - 5,50% pada Desember 2023. Secara kumulatif, BI Rate telah disesuaikan sebesar 225 bps dari 3,5% bulan Juli 2022 menjadi 6,00% pada Desember 2023 untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian dunia dan memitigasi dampaknya terhadap *imported inflation*.

In the financial market, Bank Indonesia (BI) has adjusted the BI Rate in response to the Fed's tightening monetary policy which has raised the Fed Funds Rate (FFR) by 525 bps since March 2022 to a level of 5.25%-5.50% in December 2023. Cumulatively, the BI Rate has been adjusted by 225 bps, from 3.5% in July 2022 to 6.00% in December 2023 to strengthen the stabilization of the Rupiah exchange rate amidst high uncertainty in the world economy and mitigate its impact on imported inflation.

Sementara itu, kinerja sektor perbankan menunjukkan resiliensi dan tetap berdaya saing didukung tingkat profitabilitas *Return on Asset* (ROA) sebesar 2,74% dan *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 4,81%. Dari sisi permodalan juga relatif tinggi, tercermin dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di level 27,65%. Rasio – rasio tersebut menunjukkan bahwa bantalan mitigasi risiko sudah cukup solid di tengah dinamika ekonomi dunia yang berubah dengan cepat.

Meanwhile, the banking sector performance shows resilience and remains competitive, supported by a profitability level of Return on Assets (ROA) of 2.74% and Net Interest Margin (NIM) of 4.81%. In terms of capital, it is also relatively high, reflected in the Capital Adequacy Ratio (CAR) at the level of 27.65%. These ratios show that the risk mitigation cushion is quite solid amidst rapidly changing world economic dynamics.

Di tengah prospek suku bunga acuan yang *higher for longer*, kinerja intermediasi perbankan tetap baik, tercermin dari penyaluran kredit yang tumbuh *double digit* sebesar 10,38% yoy, ditopang pertumbuhan Kredit Investasi sebesar 12,26% yoy dan Kredit Modal Kerja sebesar 10,05% yoy. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga tumbuh moderat sebesar 3,73% yoy, di mana giro menjadi kontributor pertumbuhan sebesar 4,57% yoy.

Amidst the prospect of higher for longer benchmark interest rates, banking intermediation performance remains good, reflected in loan disbursement which grew double digits by 10.38% yoy, supported by growth in Investment Loans at 12.26% yoy and Working Capital Loans at 10.05%. % yoy. Meanwhile, Third Party Funds grew moderately by 3.73% yoy, where current account contributed to growth of 4.57% yoy.

Secara keseluruhan, indikator-indikator makroekonomi nasional menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih relatif baik didukung oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, serta juga ditopang oleh aktivitas konsumsi masyarakat yang masih kuat dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali. Sementara itu, sistem keuangan domestik terjaga baik dan mampu mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Overall, national macroeconomic indicators confirm that Indonesia's economic fundamentals are still relatively good, supported by various factors, including appropriate fiscal and monetary policies, and also supported by public consumption activities which are still strong with a relatively controlled inflation rate. Meanwhile, the domestic financial system is well maintained and able to support inclusive and sustainable economic recovery and growth.

PENGAWASAN ATAS PERUMUSAN SERTA IMPLEMENTASI STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA

Dewan Direktur menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengelolaan Lembaga yang dijalankan oleh Direktur Eksekutif dan jajaran Direktur Pelaksana, sesuai dalam batasan yang ditentukan UU No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Keterlibatan aktif Dewan Direktur dalam mengawasi kinerja LPEI sudah dimulai sejak tahap perumusan strategi dan kebijakan strategis Lembaga hingga menelaah dan memberikan persetujuan atas RKAT 2023.

Untuk setiap tingkat perencanaan tersebut, kami memberikan arahan dan masukan terhadap penyusunan RKAT 2023 dan meninjau pelaksanaannya secara berkala untuk memastikan bahwa LPEI berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, kami juga memastikan penyusunan RKAT LPEI telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sesuai dengan arahan Menteri Keuangan RI, serta selaras dengan rencana jangka panjang LPEI dan kebijakan Kementerian Keuangan RI.

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan strategis untuk mendukung tercapainya target-target kinerja yang telah dicanangkan dalam RKAT 2023, Dewan Direktur menjalankan fungsi pengawasan melalui berbagai mekanisme hubungan kerja dengan Direktur Eksekutif dan jajaran Direktur Pelaksana, seperti melalui pelaksanaan rapat gabungan bersama Direktur Pelaksana atau pejabat struktural lain dan peserta lainnya yang dianggap perlu, pemberian saran atau rekomendasi tertulis yang telah didukung dengan analisis risiko yang memadai, atau dengan meninjau laporan-laporan yang disampaikan oleh komite-komite di

SUPERVISION OF THE FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF INSTITUTIONAL STRATEGIES AND POLICIES

The Board of Directors oversees and advises the Institution's management, which is carried out by the Executive Director and Managing Directors in accordance with Law No. 2 of 2009 concerning Indonesian Export Financing Institutions. The Board of Directors' active involvement in monitoring Indonesia Eximbank's performance began with the formulation of the Institution's strategy and strategic policies and continued with the review and approval of the 2023 RKAT.

For each level of planning, we provide guidance and input on the development of the 2023 RKAT and review its implementation on a regular basis to ensure that Indonesia Eximbank is on track to meet targets and promote long-term growth. Furthermore, we ensure that the preparation of Indonesia Eximbank's RKAT is guided by the 2020-2024 National Medium Term Development Plan (RPJMN) as directed by the Indonesian Minister of Finance, and that it is consistent with Indonesia Eximbank's long-term plans and the Indonesian Ministry of Finance policies.

In order to ensure the effectiveness of the implementation of strategic policies to support the achievement of performance targets set out in the 2023 RKAT, the Board of Directors conducts its oversight function through various working relationship mechanisms with the Executive Director and Managing Directors, such as holding joint meetings with the Managing Director or other structural officers and other participants deemed necessary, providing written suggestions or recommendations that have been supported by adequate risk analysis, reviewing reports submitted by committees under the Board

bawah Dewan Direktur atau memanfaatkan sarana komunikasi tertulis lainnya.

Berdasarkan hasil pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan operasional LPEI di tahun 2023, kami berpandangan bahwa Manajemen LPEI telah menjalankan seluruh strategi dan berbagai inisiatif strategis dengan penuh tanggung jawab serta telah sesuai dengan arahan RKAT 2023 yang dititikberatkan pada 3 (tiga) prioritas utama yang bertujuan untuk: (1) Menghasilkan devisa; (2) Menghemat devisa dalam negeri yang dilakukan melalui penyediaan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi kepada industri dan penyedia jasa yang menghasilkan bahan baku dan jasa yang sebelumnya diimpor; dan (3) Meningkatkan kapasitas produksi nasional melalui penyediaan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi dalam pengembangan industri pengolahan dan penyedia jasa di dalam negeri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa berorientasi ekspor.

Dengan mengarahkan perhatian pada ketiga fokus utama di atas, Dewan Direktur menilai Manajemen LPEI telah menunjukkan kepiawaian yang tinggi dalam menerjemahkan dan mensinergikan seluruh prioritas strategi dan berbagai langkah-langkah strategis yang telah digagaskan di awal tahun secara hati-hati.

Selain itu, kami juga berpandangan bahwa Direktur Eksekutif dan jajaran Direktur Pelaksana lainnya telah menunjukkan konsistensi yang kuat untuk melanjutkan upaya transformasi yang sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang (RJP) LPEI tahun 2023 yaitu *"fixing the fundamental"*, Dewan Direktur menilai jajaran Manajemen LPEI telah mengambil langkah-langkah strategis yang tepat dalam rangka memperbaiki model bisnis Lembaga baik melalui kolaborasi dengan ekosistem ekspor hingga melakukan penguatan kapabilitas infrastruktur Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung pengembangan model bisnis baru.

Berkat komitmen dan disiplin tinggi dari Manajemen LPEI dan seluruh karyawan dalam mengeksekusi strategi dan berbagai langkah strategis di tahun 2023, kami memberikan apresiasi atas keberhasilan LPEI dalam melaksanakan sejumlah penugasan Pemerintah, baik dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ataupun yang termasuk dalam koridor Penugasan Khusus Ekspor (PKE) untuk membiayai transaksi/proyek yang secara komersil sulit dilaksanakan namun dianggap perlu oleh Pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009.

of Directors, or utilizing other written communication facilities.

Based on the results of comprehensive supervision of Indonesia Eximbank's operational activities in 2023, we have observed that the management of Indonesia Eximbank has implemented all strategies and various strategic initiatives with full responsibility and is in accordance with the 2023 RKAT direction which focuses on 3 (three) key priorities which aim to: (1) Generate foreign exchange; (2) Saving domestic foreign exchange by providing financing, guarantee and insurance to industries and service providers that produce raw materials and services that are previously imported; and (3) Increasing national production capacity through providing financing, guarantee and insurance in the development of domestic processing industries and service providers to produce export-oriented goods and/or services.

By focusing on the three key priorities listed above, the Board of Directors believes that Indonesia Eximbank Management has demonstrated exceptional expertise in carefully translating and synergizing all strategic priorities and various strategic measures implemented at the start of the year.

Furthermore, we believe that the Executive Director and Managing Directors have demonstrated strong consistency in carrying out the transformation efforts that were initiated in previous years. According to the 2023 Indonesia Eximbank Long Term Plan (RJP), titled "fixing the fundamentals," the Board of Directors believes that Indonesia Eximbank Management has taken appropriate strategic measures to improve the Institution's business model, including collaboration with the export ecosystem and strengthening Information Technology (IT) infrastructure capabilities to support the development of new business models.

We recognize that Indonesia Eximbank has carried out a number of government assignments successfully, either in the context of promoting National Economic Recovery (PEN) or those included in the Export National Interest Account (NIA) (or the Special Export Assignment/"PKE") corridor to finance transactions/projects that are commercially challenging to implement but are deemed necessary by the Government as regulated in Article 18 of Law Number 2 of 2009.

Dewan Direktur menyambut baik kinerja PKE selama 2023 yang berhasil merealisasikan *new disbursement* sebesar Rp4.993 miliar, terdiri dari fasilitas PKE UKM sebesar Rp266 miliar, PKE Trade Finance sebesar Rp2.894 miliar, PKE Mandalika sebesar Rp248 miliar, PKE Kawasan sebesar Rp1.124 miliar, PKE Alat Transportasi sebesar Rp291 miliar dan PKE Daerah Pariwisata Superprioritas sebesar Rp170 miliar. Sehingga, total *outstanding* pembiayaan PKE posisi 31 Desember 2023 telah mencapai Rp3.951 miliar.

The Board of Directors appreciates PKE's performance in 2023, which has succeeded in realizing new disbursement of Rp4,993 billion, consisting of PKE Export-Oriented SME of Rp266 billion, PKE Trade Finance amounting to Rp2,894 billion, PKE Mandalika for the amount of Rp248 billion, and PKE Regions of Rp1,124 billion, PKE Transportation Equipment of Rp291 billion, and PKE Super Priority Tourism Destinations (SPTD) of Rp170 billion. Thus, the total outstanding PKE financing as of 31 December 2023 has reached Rp3,951 billion.

Hingga 31 Desember 2023 total kelolaan dana PKE tercatat sebesar Rp1.000 miliar dan dialokasikan untuk mendanai 7 program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yaitu: (1) PKE Kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah; (2) PKE dalam rangka Pengembangan Pariwisata KEK Mandalika; (3) PKE Industri Penerbangan; (4) PKE UKM Berorientasi Ekspor; (5) PKE Trade Finance; (6) PKE Alat Transportasi, dan (7) PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Up to 31 December 2023, the total managed PKE funds were recorded at Rp1,000 billion and allocated to fund 7 Export National Interest Account (PKE) programs, namely: (1) PKE Regions-Africa, South Asia, and the Middle East; (2) PKE Mandalika SEZ Tourism Development; (3) PKE Aviation Industry; (4) PKE Export-Oriented SME; (5) PKE Trade Finance; and (6) PKE Transportation Equipment, and (7) PKE Pharmaceutical and Medical Device Industry.

Demikian halnya terkait pelaksanaan penugasan PEN, Dewan Direktur juga memberikan dukungan penuh terhadap strategi penguatan kerja sama dengan mitra Perbankan yang telah dijalankan oleh Manajemen LPEI. Hingga akhir Desember 2023, setidaknya sebanyak 16 Bank sudah menjalin kerja sama dengan LPEI untuk mengikuti program Penjaminan Pemerintah (JAMINAH) baik dalam bentuk penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Regarding the implementation of PEN assignments, the Board of Directors also provides full support for the strategy to strengthen cooperation with banking partners that has been implemented by Indonesia Eximbank Management. Until the end of December 2023, at least as many 16 Banks have collaborated with Indonesia Eximbank to participate in the Government Guarantee Program (JAMINAH) either by signing a Memorandum of Understanding (MoU) or Cooperation Agreement (PKS).

Secara keseluruhan, total *outstanding* program penjaminan PEN yang disalurkan LPEI tercatat sebesar Rp3.152 miliar pada posisi akhir Desember 2023.

At the end of December 2023, the total outstanding PEN guarantee program distributed by Indonesia Eximbank was recorded at Rp3,152 billion.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa seluruh aktivitas pengelolaan LPEI telah dilakukan dengan baik sesuai kentuan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh implementasi sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang efektif.

Overall, the Board of Commissioners believes that all Indonesia Eximbank management activities have been carried out in accordance with applicable laws and regulations, and are supported by the implementation of an effective risk management and internal control system.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKTUR EKSEKUTIF BESERTA JAJARAN DIREKTUR PELAKSANA ATAS PENGELOLAAN LEMBAGA TAHUN 2023

Dewan Direktur memberikan penilaian positif terhadap kinerja Manajemen LPEI atas kesungguhan dan itikad baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Menurut pandangan kami, Direktur Eksekutif beserta jajaran Direktur Pelaksana

PERFORMANCE ASSESSMENT TO THE EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS ON INSTITUTION MANAGEMENT IN 2023

The Board of Directors gives Indonesia Eximbank Management a positive assessment for its seriousness and good faith in carrying out its duties and responsibilities effectively. In our opinion, the Executive

telah bertindak *agile* serta menunjukkan respons yang tepat dalam menghadapi tantangan dan dinamika eksternal yang terus berubah.

Penilaian positif kami kepada Manajemen juga didasarkan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi aspek keuangan dan non-keuangan sebagaimana tercantum di dalam RKAT tahun 2023. Di bawah arahan Manajemen, *yield* pembiayaan LPEI mengalami perbaikan sehingga tercatat menjadi lebih baik (IDR: 4,8%; Valas: 4,3%), dibandingkan dengan tahun sebelumnya (IDR: 4,3%; Valas: 3,5%). Sementara itu terdapat perbaikan kualitas aset sebesar Rp1,55 triliun dibandingkan target nya sebesar Rp3,01 triliun, hal ini disebabkan adanya *collections* sebesar Rp882,78 miliar dan perbaikan kolektibilitas sebesar Rp668,74 miliar. Dengan kondisi tersebut, rasio NPL *gross* dan NPL neto masing-masing dibukukan sebesar 43,5% dan 4,5% per 31 Desember 2023 atau lebih baik dibandingkan targetnya sebesar 24,0% dan 10,3%.

Ditinjau dari sisi kinerja keuangan, total aset per 31 Desember 2023 dibukukan sebesar Rp51,35 triliun atau tercapai 64,9% dari target. Penurunan aset tersebut dipengaruhi oleh realisasi pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan target. Selain itu, pelunasan dari segmen korporasi yang mencapai Rp25,6 triliun turut memengaruhi penurunan *outstanding* pembiayaan sehingga dibukukan menjadi Rp73,82 triliun per 31 Desember 2023, turun 11,73% jika dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2022 yang sebesar Rp83,64 triliun.

Sementara dari sisi kinerja *top lines,* pendapatan bunga dan usaha syariah LPEI mengalami peningkatan 9,17% sehingga dibukukan menjadi Rp4,05 triliun pada 2023, dari Rp3,71 triliun di tahun sebelumnya. Namun kinerja *bottom lines* justru menunjukkan adanya koreksi yang cukup dalam pada rugi bersih tahun berjalan sehingga dibukukan menjadi Rp18,11 triliun, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain berfokus pada pengukuran kinerja keuangan, Dewan Direktur juga mengawasi keberlangsungan aktivitas bisnis LPEI sesuai dengan mandat yang diberikan Pemerintah. Dalam menjalankan peran pengawasan atas penugasan LPEI, Dewan Direktur memberikan apresiasi atas upaya-upaya terbaik yang telah dilakukan Manajemen sehingga angka penyaluran pembiayaan PKE selama 2023 dibukukan menjadi Rp3.951 miliar, meningkat 13,19% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Director and Managing Directors have acted agilely and demonstrated appropriate responses when facing challenges and changing external dynamics.

Our positive assessment of the Management is also based on the achievement of Key Performance Indicators (KPI), which include financial and non-financial aspects as stated in the 2023 RKAT. Under the Management's direction, Indonesia Eximbank's financing yield has improved, recorded to be better (IDR: 4.8%; Forex: 4.3%), compared to the previous year (IDR: 4.3%; Forex: 3.5%). Meanwhile, there was an improvement in asset quality of Rp1.55 trillion compared to the set target of Rp3.01 trillion, this was due to collections of Rp882.78 billion and an improvement in collectibility of Rp668.74 billion. Under these conditions, the gross NPL and net NPL ratios were recorded at 43.5% and 4.5% respectively as of 31 December 2023 or better than the set targets of 24.0% and 10.3%.

From a financial performance perspective, total assets as of 31 December 2023 were recorded at Rp51.35 trillion, or 64.9% of the set target. The decrease in assets was influenced by the realization of financing, which was lower than the target. In addition, repayment from the corporate segment, which reached Rp25.6 trillion, also influenced the decrease in outstanding financing to Rp73.82 trillion as of 31 December 2023, decreased 11.73% when compared to the position at the end of December 2022 of Rp83.64 trillion.

Meanwhile, in terms of top-line performance, Indonesia Eximbank's interest and sharia business income increased by 9.17%, reaching Rp4.05 trillion in 2023 from Rp3.71 trillion in the previous year. However, the bottom line performance actually showed that there was a fairly deep correction in the net loss for the year, recorded at Rp18.11 trillion, an increase compared to the previous year.

In addition to focusing on measuring financial performance, the Board of Directors also supervises the continuity of Indonesia Eximbank's business activities in accordance with the mandate given by the Government. In carrying out its supervisory role over Indonesia Eximbank assignments, the Board of Directors expressed its appreciation for the best efforts that have been made by Management so that the PKE financing distribution figure for 2023 was recorded at Rp3,951 billion, an increase of 13.19% compared to

Sementara itu, penyaluran total penjaminan komersial dan volume asuransi per 31 Desember 2023 masing-masing mencapai Rp7.381 miliar dan Rp12.091 miliar, atau tercapai 64,43% dan 95,75% dari target RKAT 2023. Sedangkan volume *Trade Finance* per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp16,1 triliun atau melebihi targetnya yang sebesar Rp15,5 triliun.

Pada aspek non-finansial, Dewan Direktur turut mengapresiasi capaian pelaksanaan mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional. Dewan Direktur mendukung penuh segala upaya yang telah ditunjukkan Manajemen LPEI untuk memastikan terlaksananya mandat program Jasa Konsultasi dalam rangka meningkatkan aktivitas ekspor nasional. Pada tahun 2023, LPEI telah menunjukkan kontribusinya dalam membangun dan memperkuat ekosistem ekspor melalui pelaksanaan sejumlah kegiatan ataupun acara yang bertujuan mencetak eksportir-eksportir baru dari kalangan pelaku usaha UKM Indonesia, antara lain Program *Coaching Program for New Exporter* (CPNE) yang telah dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia, kegiatan Rumah Ekspor, hingga penambahan Desa Devisa Baru.

Setelah menelaah hasil akhir pencapaian kinerja tahun 2023 yang beragam, Dewan Direktur memandang bahwa secara keseluruhan LPEI belum dapat memberikan kinerja terbaiknya di tahun 2023 karena masih ditemukan adanya *gap variance* pada beberapa indikator kinerja yang realisasinya belum memenuhi target terutama dalam hal perbaikan kualitas aset dan profitabilitas. Akan tetapi, kami tetap memberikan apresiasi yang tinggi atas segala upaya dan kerja keras yang ditunjukkan oleh Manajemen dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah sepanjang tahun ini. Penilaian positif tetap kami berikan karena Dewan Direktur menyadari bahwa kinerja LPEI yang berorientasi ekspor sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal global yang sepanjang tahun 2023 masih diwarnai oleh ketidakpastian tinggi.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKTUR EKSEKUTIF BESERTA JAJARAN DIREKTUR PELAKSANA

Perlambatan ekonomi global diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga 2024 mendatang karena dipengaruhi oleh sejumlah tantangan signifikan seperti berlanjutnya kebijakan suku bunga acuan

the previous year's realization. Meanwhile, the total disbursement of commercial guarantee and insurance volume as of 31 December 2023, respectively, reached Rp7,381 billion and Rp12,091 billion, or achieved 64.43% and 95.75% of the 2023 RKAT target. Whereas Trade Finance volume as of 31 December 2023 was recorded at Rp16.1 trillion, or exceeded the target of Rp15,5 trillion.

In the non-financial aspect, the Board of Directors also appreciates the achievements in implementing the mandate based on Law Number 2 of 2009 on Indonesian Export Financing Institutions and Government Regulation Number 43 of 2019 concerning Basic Policies for National Export Financing. The Board of Directors fully supports all efforts that have been demonstrated by Indonesia Eximbank Management to ensure the implementation of the mandate of the Advisory Services program in order to increase national export activities. In 2023, Indonesia Eximbank has demonstrated its contribution to building and strengthening the export ecosystem by implementing a number of activities or events aimed at producing new exporters from Indonesian SME business actors, including the Coaching Program for New Exporters (CPNE), which has been implemented in several cities in Indonesia, Export House activities, and the addition of a New Go Export Village.

After reviewing the final results of various performance achievements in 2023, the Board of Directors considers that overall, Indonesia Eximbank has not been able to provide its best performance in 2023 since there are still variance gaps in several performance indicators whose realization has not met the target, especially in terms of improving asset quality and profitability. However, we still give high appreciation for all the efforts and hard work shown by the Management in facing the challenges that were not easy throughout this year. We continue to give a positive assessment because the Board of Directors is aware that Indonesia Eximbank's export-oriented performance is greatly influenced by global external conditions, which were still characterized by high uncertainty throughout 2023.

VIEW ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS

The global economic slowdown is expected to continue until 2024 since it is influenced by a number of significant challenges, such as the continuation of high benchmark interest rate policies, even though

tinggi meskipun laju inflasi di banyak negara sudah mulai menunjukkan moderasi yang konsisten. Selain itu, ketidakpastian akibat perang dan konflik yang terjadi di sejumlah kawasan juga diyakini masih akan menjadi sentimen negatif yang berpotensi meningkatkan disrupsi rantai pasok pada skala global. Sementara dari pasar Asia, perlambatan ekonomi Tiongkok yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi kinerja ekspor mitra-mitra dagang utamanya, termasuk Indonesia.

the inflation rate in many countries has begun to show consistent moderation. Moreover, it is believed that the uncertainty caused by war and conflict in a number of regions will still create negative sentiment, which has the potential to increase supply chain disruption on a global scale. Meanwhile, from the Asian market, the economic slowdown in China, which is the second largest economy in the world, needs to be looked out for because it has the potential to affect the export performance of its main trading partners, including Indonesia.

Di tengah temaram terhadap proyeksi perkembangan ekonomi global ke depan, pertumbuhan perdagangan global pada tahun 2024 diperkirakan hanya separuh dari rata-rata pertumbuhan perdagangan global pada dekade sebelum pandemi. Sementara itu, biaya pinjaman di negara-negara berkemban, terutama negara-negara dengan peringkat kredit yang buruk kemungkinan akan tetap tinggi karena suku bunga global masih bertahan di level tertinggi dalam empat dekade terakhir.

In the midst of the dim outlook on future global economic development projections, global trade growth in 2024 is estimated to be only half of the average global trade growth in the decade before the pandemic. Meanwhile, borrowing costs in developing countries, especially those with poor credit ratings, are likely to remain high because global interest rates have remained at their highest levels for the last four decades.

Kendati dihadapkan dengan berbagai *global shocks*, ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap akan berdaya tahan kuat untuk melanjutkan pertumbuhan yang solid sebesar 5,2% (yoy) dan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan belanja pemerintah baik untuk kepentingan persiapan pemilihan umum ataupun peningkatan belanja infrastruktur.

Despite facing various global shocks, the Indonesian economy is projected to remain resilient to maintain solid growth of 5.2% (yoy), and inflation will remain under control within the target range of 2.5 ± 1% in 2024. Indonesia's economic growth will be supported by strong domestic consumption and government spending, both for the purposes of preparing for general elections and increasing infrastructure spending.

Dengan mempertimbangkan potensi perekonomian nasional dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, Dewan Direktur menaruh optimisme yang besar terhadap perbaikan kinerja LPEI di tahun 2024. Kami telah memberikan persetujuan atas RKAT Tahun 2024 yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman bagi Manajemen LPEI dalam bekerja. Menurut pandangan kami, seluruh uraian strategi dan IKU yang sudah disepakati dalam RKAT Tahun 2024 telah disajikan dalam angka yang realistis serta telah mempertimbangkan *unique value preposition* yang dimiliki LPEI serta sudah memperhatikan kondisi-kondisi eksternal yang berpotensi memengaruhi kinerja Lembaga.

By considering the potential of the national economy while still taking into account future risks, the Board of Directors is highly optimistic about improving Indonesia Eximbank's performance in 2024. We have given approval to the 2024 RKAT, which will later be used as a guideline for Indonesia Eximbank Management in doing their work. In our perspective, all descriptions of strategies and KPIs that have been agreed upon in the 2024 RKAT have been presented in realistic figures, have taken into account Indonesia Eximbank's unique value proposition, and have considered external conditions that have the potential to influence the Institution's performance.

Dalam menghadapi tahun 2024 yang masih akan diwarnai dengan beragam tantangan, Dewan Direktur telah memberikan arahan dan masukan strategis kepada jajaran Direktur untuk melanjutkan upaya

In facing 2024, which will still be characterized by various challenges, the Board of Directors has provided guidance and strategic input to the Directors to continue striving to improve financial performance

penyehatan kinerja keuangan demi memperkuat peran LPEI untuk ikut serta memajukan kinerja ekspor nasional. Untuk dapat mewujudkan aspirasi tersebut, Dewan Direktur memberikan dukungan penuh terhadap implementasi 9 (sembilan) prioritas utama di tahun 2024, antara lain peningkatan kolaborasi ekosistem ekspor, pertumbuhan segmen UKM dan Usaha Menengah Berorientasi Ekspor (UMBE) termasuk pengembangan secara digital, peningkatan sektor industri bernilai tambah, percepatan *collection* dan eksekusi inorganik, efisiensi biaya operasional dan pendanaan, penguatan GRC (*governance, risk and compliance*), modernisasi IT dan *core system*, penguatan organisasi & SDM untuk mendukung bisnis model baru, penguatan komunikasi dan *stakeholder engagement*.

in order to strengthen Indonesia Eximbank's role in participating in advancing national export performance. To be able to realize these aspirations, the Board of Directors provides full support for the implementation of 9 (nine) key priorities in 2024, including increasing collaboration in the export ecosystem, growth of the SME and Export-Oriented Medium Enterprises (UMBE) segments, including digital development, increasing the value of the of the industrial sector, accelerating collection and inorganic execution, operational and funding cost efficiency, strengthening GRC (governance, risk, and compliance), modernizing IT and core systems, strengthening organization & human resources to support new business models, and strengthening communication and stakeholder engagement.

Melihat perkembangan usaha ke depan yang cukup positif dan besarnya mandat yang diberikan Pemerintah kepada Lembaga, Dewan Direktur memandang perlu agar Manajemen LPEI melakukan *assessment* terhadap penguatan aspek kelembagaan untuk memastikan kapasitas organisasi telah memenuhi kebutuhan pelaksanaan mandat dengan *size* yang makin besar. Di waktu yang bersamaan, kami juga mendorong Direktur Eksekutif serta Direktur Pelaksana lain untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan antisipatif terhadap berbagai risiko yang ada, terutama yang berasal dari dinamika ekonomi global.

Recognizing the quite positive future business developments and the large mandate given by the Government to the Institution, the Board of Directors considers it necessary for Indonesia Eximbank Management to conduct an assessment of strengthening institutional aspects to ensure that the organization's capacity meets the needs for implementing mandates of an increasingly large size. At the same time, we also encourage the Executive Director and Managing Directors to continue to improve their caution and anticipation of various existing risks, especially those originating from global economic dynamics.

PANDANGAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan GCG oleh Manajemen LPEI, kami berpandangan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG") di LPEI telah terlaksana secara konsisten dan berkesinambungan pada semua lini usaha dan tingkatan organisasi. Dewan Direktur senantiasa menempatkan penilaian terhadap penerapan GCG sebagai salah satu fokus pengawasan utama karena kami memahami bahwa praktik GCG yang kuat adalah fondasi utama bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan pencapaian tujuan jangka panjang Lembaga.

VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

As an organ in charge of supervising the implementation of GCG by Indonesia Eximbank Management, we perceive that the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) at Indonesia Eximbank has been conducted consistently and continuously at all business lines and organizational levels. The Board of Directors always places assessment of GCG implementation as one of the main supervisory focuses because we understand that strong GCG practices are the main foundation for sustainable growth and achieving the Institution's long-term goals.

Dalam rangka mempertahankan citra dan reputasi LPEI sebagai SMV Pemerintah yang memiliki peran strategis untuk meningkatkan ekosistem ekspor nasional, Dewan Direktur memantau keberlangsungan kegiatan usaha Lembaga secara berkala untuk memastikan kesesuaian pengelolaan bisnisnya dengan perundang-undangan yang berlaku dan

In order to maintain Indonesia Eximbank's image and reputation as a Government SMV that has a strategic role in improving the national export ecosystem, the Board of Directors regularly monitors the sustainability of the Institution's business activities to ensure the conformity of its business management with applicable laws and best practice GCG principles.

best practice prinsip-prinsip GCG. Langkah ini juga dilakukan untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, termasuk Pemegang Saham, karyawan, mitra LPEI, dan masyarakat secara luas. Dengan penerapan GCG yang baik, kami yakin bahwa Lembaga dapat terus memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan dan berkontribusi positif bagi peningkatan kinerja ekspor yang berkelanjutan di Indonesia.

This measure is also taken to protect the interests of stakeholders, including shareholders, employees, Indonesia Eximbank partners, and the community at large. By implementing good GCG, we are confident that the Institution can continue to provide sustainable added value for all stakeholders and contribute positively to improving sustainable export performance in Indonesia.

Pada kesempatan ini, Dewan Direktur sekaligus ingin menyampaikan apresiasi kepada Direktur dan jajarannya atas berbagai upaya yang sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG Lembaga. Pada tahun 2023, kami menyambut baik inisiatif tindak lanjut oleh Manajemen terhadap beberapa aspek perbaikan yang diperoleh dari hasil penilaian GCG tahun 2022, sedangkan hasil penilaian GCG tahun 2023 masih dalam proses evaluasi oleh pihak independen.

On this occasion, the Board of Directors would also like to express its appreciation to the Director and his staff for the various efforts that have been made to improve the quality of the Institution's GCG implementation. In 2023, we appreciate follow-up initiatives by the Management regarding several aspects of improvement obtained from the results of the 2022 GCG assessment, while the results of the 2023 GCG assessment are still in the process of being evaluated by independent parties.

Atas pencapaian penerapan GCG yang sudah baik ini, kami senantiasa mengingatkan Direksi untuk tidak berpuas diri dan tetap berusaha meningkatkan kualitas penerapan GCG secara berkelanjutan dengan melakukan *benchmarking* terhadap *best practices* baik yang berlaku di Indonesia maupun di luar negeri. Dewan Direktur juga mendorong Manajemen untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional Lembaga serta membangun budaya kesadaran terhadap risiko dan kepatuhan. Dalam hal masih ditemukan adanya beberapa kelemahan yang kurang signifikan terkait implementasi GCG, Dewan Direktur melihat bahwa semua *room of improvements* tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen LPEI.

Due to the achievement of effective GCG implementation, we always remind the Board of Directors not to be complacent and to continue to strive to improve the quality of GCG implementation in a sustainable manner by benchmarking against best practices both in Indonesia and abroad. The Board of Directors also encourages the Management to continue to improve compliance with the Institution's operational systems and procedures and build a culture of risk awareness and compliance. In the event that there are still some less significant weaknesses related to GCG implementation, the Board of Directors perceives that all room for improvement can be resolved with normal actions by Indonesia Eximbank Management.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

Sebagai bagian dari inisiatif penguatan GCG, Dewan Direktur mendukung penuh keberadaan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*/"WBS") di LPEI guna mewujudkan terciptanya budaya kerja yang positif, bersih, dan bertanggung jawab. Kehadiran WBS memungkinkan terlaksananya mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan pelapor. Dengan adanya WBS, Dewan Direktur mendorong seluruh insan LPEI dan juga para pemangku kepentingan lainnya untuk segera melaporkan segala bentuk kejadian penipuan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh karyawan ataupun kecurigaan lainnya yang mengarah terhadap pelanggaran secara rahasia

VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

As part of the initiative to strengthen GCG, the Board of Directors fully supports the existence of the whistleblowing system (WBS) at Indonesia Eximbank in order to create a positive, clean, and responsible work culture. The presence of the WBS facilitates the implementation of reporting mechanisms that ensure the reporter's confidentiality. With the WBS, the Board of Directors encourages all Indonesia Eximbank personnel and stakeholders to immediately report all forms of fraud and/or abuse of authority committed by employees or other suspicious activities that lead to violations confidentially and responsibly, without any fear or the slightest doubt. Throughout 2023, the Board of Directors ensures

dan bertanggung jawab, tanpa ada rasa takut atau keraguan sedikitpun. Sepanjang tahun 2023, Dewan Direktur memastikan pengelolaan WBS telah berjalan efektif dan seluruh laporan pengaduan yang masuk telah diproses secara objektif sesuai dengan kebijakan internal yang berlaku.

that WBS management is effective and that all incoming complaint reports have been processed objectively in accordance with applicable internal policies.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN DIREKTUR

Dalam menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasihat kepada jajaran Manajemen terkait operasional LPEI, Dewan Direktur dibantu oleh 3 (tiga) komite pendukung di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan di tahun 2023, Dewan Direktur berpendapat bahwa seluruh komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan efektif sesuai piagam yang berlaku bagi masing-masing komite. Setelah meninjau laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan secara berkala oleh setiap komite dengan seksama, Dewan Direktur memberikan penilaian positif terhadap kinerja ketiga komite tersebut dengan dasar penilaian sebagai berikut:

PERFORMANCE ASSESSMENT TO COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its supervisory role and providing advice to the Management on Indonesia Eximbank operations, the Board of Directors is assisted by 3 (three) supporting committees under it, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee. Based on the results of the assessment conducted in 2023, the Board of Directors assesses that all committees have carried out their duties and responsibilities well and effectively in accordance with the charter that applies to each committee. After carefully reviewing the task implementation reports submitted periodically by each committee, the Board of Directors gave a positive assessment of the performance of the three committees on the basis of the following assessment:

Komite Audit

Dewan Direktur menilai bahwa Komite Audit telah membantu terlaksananya fungsi pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal, serta melakukan supervisi, memberikan konsultasi, dan berkolaborasi dalam menanggapi tindak lanjut temuan auditor eksternal. Lebih dari itu, Komite Audit juga telah memfasilitasi peningkatan kapabilitas dan kapasitas fungsi Internal Audit dan meningkatkan kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu). Pada tahun 2023, Komite Audit telah menyelenggarakan 29 kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata seluruh anggota adalah 89%.

Audit Committee

The Board of Directors considers that the Audit Committee has assisted in conducting its oversight function over the effectiveness of the internal control system, as well as providing supervision, offering consultation, and collaborating in responding to follow-up actions on the external auditor's findings. Furthermore, the Audit Committee has facilitated the capability and capacity improvement of the Internal Audit function, as well as increased cooperation with the Inspector General of the Ministry of Finance. In 2023, the Audit Committee held 29 meetings, with an average attendance rate of 89% among all members.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko sudah membantu Dewan Direktur dalam mengawasi fungsi manajemen risiko di LPEI khususnya untuk memastikan telah terselenggaranya prinsip Tata Kelola yang baik dan tersedianya sistem manajemen risiko yang memadai. Pada tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 19 kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 99%.

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee has assisted the Board of Directors in overseeing the risk management function at Indonesia Eximbank, especially to ensure that good corporate governance principles are implemented and an adequate risk management system is available. In 2023, the Risk Monitoring Committee held 19 meetings, with an attendance rate of 99% among all members.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite ini sudah berkontribusi dalam mendukung penguatan organisasi termasuk memperbaiki kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM). Selama

Remuneration and Nomination Committee

This committee has contributed to supporting organizational strengthening, including improving Human Resources (HR) policies. During 2023, the

tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan 5 kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 100%.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN DIREKTUR

Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan pada komposisi Dewan Direktur LPEI.

APRESIASI

Atas nama Dewan Direktur, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah selaku pemegang saham utama Lembaga atas kepercayaan dan berbagai bentuk dukungan yang telah diberikan sehingga LPEI senantiasa mampu menjalankan peran strategis sebagai *Special Mission Vehichle* (SMV) yang memiliki mandat untuk mendorong ekspor nasional. Tidak lupa kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh insan LPEI atas kerja keras dan dedikasinya sehingga keberlangsungan operasional LPEI tetap dapat berjalan dengan baik meskipun berbagai tantangan datang silih berganti sepanjang tahun ini.

Demikian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Direktur kami sampaikan. Kami optimis Manajemen akan mampu melanjutkan langkah perbaikan dan penguatan internal di samping pelaksanaan mandat dan peran LPEI dalam ekosistem ekspor di tahun mendatang. Semoga LPEI dapat terus memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi para pemegang saham, karyawan, nasabah, mitra usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di masa mendatang.

Remuneration and Nomination Committee held 5 meetings, with an attendance rate of 100% among all members.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2023, there were no changes to the composition of the Indonesia Eximbank Board of Directors.

APPRECIATION

On behalf of the Board of Directors, we would like to express our heartfelt gratitude to the Government, the Institution's primary shareholder, for its trust and support in ensuring that Indonesia Eximbank can always carry out its strategic role as a Special Mission Vehicle (SMV) with a mandate to promote national exports. We would also like to express sincere appreciation to all Indonesia Eximbank employees for their hard work and dedication to ensuring that Indonesia Eximbank's operations continue to run smoothly despite the numerous challenges faced this year.

Hereby, we submit a report on the implementation of our duties and responsibilities as the Board of Directors. We are optimistic that the Management will be able to continue to improve and strengthen internally while fulfilling Indonesia Eximbank's mandate and role in the export ecosystem in the upcoming year. Hopefully, Indonesia Eximbank can continue to provide added value and greater benefits for shareholders, employees, customers, business partners, and all stakeholders in the future.

Atas nama Dewan Direktur
On behalf of the Board of Directors

Rijani Tirtoso
Ketua Dewan Direktur
Chairman of the Board of Directors

Dewan Direktur
Board of Directors

D. James Rompas
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Rijani Tirtoso
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

Yon Arsal
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Arus Gunawan
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Suminto
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Kasan
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Laporan Direktur Eksekutif - Direktur Pelaksana

Executive Director & Managing Directors Report

Rijani Tirtoso

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of BOD concurrently Executive Director

Sejalan dengan dinamika global yang berkembang dan perlambatan ekonomi dunia di masa pasca pandemi, LPEI memastikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola Lembaga telah dilakukan dengan baik. Hasil kinerja tahun 2023 adalah langkah yang diambil dalam rangka prinsip kehati-hatian dan penguatan fundamental lembaga yang diperlukan agar dapat fokus sesuai dengan *value proposition* LPEI yaitu *beyond financing, developmental impact*, dan *sustainability*.

In line with the evolving global dynamics and the world economic slowdown post-pandemic, Indonesia Eximbank ensures that the principle of prudence and institutional governance has been carried out well. The 2023 performance outcomes are efforts done within the framework of the prudence principle and strengthening the fundamentals of the institution, allowing it to focus on achieving its future aspirations.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan penuh rasa syukur, perkenankanlah saya atas nama Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI" atau "Lembaga") menyampaikan laporan ringkasan kinerja LPEI untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Dalam laporan ini kami menyampaikan berbagai tantangan dan perubahan situasi yang dihadapi Lembaga serta implementasi prioritas strategi dan langkah-langkah strategis yang telah ditempuh Manajemen agar pelaksanaan mandat sesuai Undang-undang senantiasa berjalan dengan baik sesuai harapan pemegang saham.

EKONOMI NASIONAL TETAP RESILIEN DI TENGAH KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL YANG TINGGI

Dinamika perekonomian dunia tahun 2023 dibayangi oleh meningkatnya tensi geopolitik yang memperburuk prospek ekonomi di tengah upaya pemulihan ekonomi lanjutan pasca pandemi COVID-19. Situasi ini menyebabkan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Lebih lanjut, perlambatan ekonomi dunia juga tertahan oleh langkah pengetatan moneter yang ditempuh bank-

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

With our heartfelt appreciation, please allow me, on behalf of the Executive Director and Managing Directors of the Indonesian Export Financing Institution ("Indonesia Eximbank" or "Institution"), to submit a summary report of Indonesia Eximbank's performance for the fiscal year ending December 31, 2023. In this report, we describe the various challenges and changes in the institution's situation, as well as the implementation of strategic priorities and strategic measures put in place by Management to ensure that the mandate is always carried out in accordance with laws and regulations and meets shareholder expectations.

NATIONAL ECONOMY REMAINS RESILIENT AMIDST HIGH GLOBAL ECONOMIC UNCERTAINTY

In 2023, the dynamics of the world economy are overshadowed by increasing geopolitical tensions which worsen the economic outlook amidst efforts for continued economic recovery after the COVID-19 pandemic. This situation causes increased uncertainty in global financial markets. Furthermore, the world economic slowdown was also restrained by the monetary tightening measures taken by central banks

bank sentral untuk menurunkan inflasi, dengan jalan menaikkan suku bunga hingga mencapai level yang sangat tinggi, terutama di Amerika Serikat (AS). Hal ini menyebabkan tingginya arus modal masuk ke negara maju, sementara di negara *emerging* dan berkembang berjuang memperkuat respons kebijakan untuk menjaga stabilitas eksternal dari dampak rambatan, seperti arus modal keluar dari negara berkembang dan *emerging* hingga pelemahan nilai tukar.

to reduce inflation, by raising interest rates to very high levels, especially in the United States (US). This causes high capital inflows to developed countries, while emerging and developing countries are struggling to strengthen policy responses to maintain external stability from spillover impacts, such as: capital outflows from developing and emerging countries and weakening exchange rates.

Bank Sentral AS kembali menunjukkan sikap *hawkish* untuk mempertahankan suku bunga acuan di level tinggi untuk jangka waktu yang lama (*higher for longer*) sehingga tetap bertahan di kisaran 5,25%-5,5% pada posisi 31 Desember 2023. Suku bunga tersebut merupakan level tertinggi selama lebih dari 22 tahun terakhir. Sebagai konsekuensinya, kondisi likuiditas global menjadi lebih ketat sehingga *cost of fund* membengkak. Di sisi lain, ruang kebijakan fiskal di banyak negara juga semakin terbatas seiring dengan meningkatnya beban utang luar negeri yang sudah menumpuk sebagai warisan pandemi dan diperparah dengan terjadinya pelemahan nilai tukar mata uang lokal akibat penguatan US Dollar.

In terms of the global financial market, the US Fed has once again demonstrated a hawkish stance by keeping its benchmark interest rate at a high level for an extended period of time (higher for longer), leaving it in the range of 5.25%-5.5% as of 31 December 2023. The interest rate has been at its peak for over 22 years. As a result, global liquidity conditions have tightened, driving up funding costs. On the other hand, the space for fiscal policy in many countries is becoming increasingly limited in response to the growing burden of foreign debt, which has accumulated as a result of the pandemic and has been exacerbated by the weakening of local currency exchange rates as the US Dollar has strengthened.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika eksternal yang berkembang pada skala global dan tantangan yang menyertainya, IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi global sepanjang tahun 2023 melambat ke level 3,2% *year-on-year* (yoy) dari sebesar 3,4% (yoy) di tahun sebelumnya. Tingginya biaya pinjaman dan penarikan dukungan fiskal termasuk dampak jangka Panjang pandemi COVID-19, invasi Rusia ke Ukraina, lemahnya pertumbuhan produktivitas hingga meningkatnya fragmentasi ekonomi berada di balik perlambatan ini. Produktivitas dan aktivitas manufaktur yang melemah terkonfirmasi dari rasio *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur di sejumlah negara yang mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga akhir 2023, seperti di kawasan Eropa, termasuk Jepang, Prancis, Italia, Inggris, Thailand, Malaysia, Turki, Kanada, dan Afrika Selatan.

Given the development of various external dynamics on a global scale, as well as the challenges that come with them, the IMF forecasts that global economic growth will fall to 3.2% (yoy) in 2023, down from 3.4% (yoy) the previous year. High borrowing costs and withdrawal of fiscal support including the long-term impact of the COVID-19 pandemic, Russia's invasion of Ukraine, weakening productivity growth and increasing economic fragmentation are the reasons behind this slowdown. Weakening productivity and manufacturing activities is confirmed by the Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) ratio in a number of countries which experienced deep contractions until the end of 2023, including Japan, France, Italy, England, Thailand, Malaysia, Turkey, Canada, and South Africa,

Di tengah situasi ekonomi global yang melambat dan penuh ketidakpastian, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dan stabil sebesar 5,05% (yoy) pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat baik dari sektor swasta maupun pemerintah, serta didukung dengan investasi yang stabil.

Despite the global economic slowdown and uncertainty, the Indonesian economy remained strong and stable with the growth rate at 5.05% (yoy) in 2023. The domestic growth is supported by strong domestic consumption from both the private and government sectors, as well as supported by stable investment.

Kendati fundamental ekonomi domestik cukup tangguh dari berbagai *global shocks*, tidak dapat dipungkiri perlambatan ekonomi dunia telah memengaruhi kinerja ekspor dan impor Indonesia. Secara kumulatif sepanjang 2023 nilai ekspor Indonesia tercatat hanya mencapai USD258,82 miliar atau di bawah capaian ekspor tahun sebelumnya yang tercatat USD291,90 miliar. Ekspor Indonesia tahun 2023 masih didominasi oleh ekspor nonmigas yang mencapai USD242,89 miliar (setara 93,85%), sementara lainnya adalah sektor migas tercatat sebesar USD15,92 miliar (setara 6,15%). Meskipun secara nominal ekspor Indonesia mengalami penurunan, kinerja ekspor Indonesia dari sisi volume masih tumbuh 8,55% (yoy) pada 2023. Perlambatan nilai ekspor tersebut sejalan dengan moderasi harga komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit dan batu bara.

Although Indonesia's domestic economic fundamentals are quite resilient to various global shocks, it is undeniable that the global economic slowdown has had an impact on export and import performance. Cumulatively, Indonesia's total export value in 2023 only reached USD258.82 billion, which was lower than the previous year's export achievement of USD291.90 billion. Indonesia's exports in 2023 was still dominated by non-oil and gas exports of USD242.89 billion (equivalent to 93.85%), while the oil and gas sector recorded at USD15.92 billion (equivalent to 6.15%). Despite the fact that Indonesia's nominal exports have decreased, its volume export performance in 2023 has increased by 8.55% (yoy). The slowing down in export value is consistent with the moderated prices of Indonesia's main commodities, such as palm oil and coal.

Masih terkonsentrasinya tujuan ekspor Indonesia pada sejumlah negara dan lesunya perekonomian negara mitra dagang utama telah menyebabkan penurunan kinerja ekspor tahun 2023. Tujuan ekspor Indonesia masih terkonsentrasi ke negara Tiongkok dengan *share* 25,09% (nilai ekspor turun 1,37% yoy pada 2023), Amerika Serikat dengan *share* 8,98% (nilai ekspor turun 17,50% yoy pada 2023), Jepang dengan *share* 8,03% (nilai ekspor turun 16,35% yoy pada 2023), India dengan *share* 7,84% (nilai ekspor turun 13,16% yoy). Adapun ekspor Indonesia menuju kawasan ASEAN yang mencapai *share* 20,38%, juga mencatatkan penurunan nilai ekspor di level 14,01% (yoy) pada tahun 2023.

The continued concentration of Indonesia's export destinations in a number of countries and the sluggish economy of major trading partner countries have caused a decline in export performance in 2023. Indonesia's export destinations remained concentrated in China with a share of 25.09% (export value down 1.37% yoy in 2023), the United States with a share of 8.98% (export value down 17.50% yoy in 2023), Japan with a share of 8.03% (export value fell 16.35% yoy in 2023), India with a share of 7.84% (export value fell 13.16% yoy). Meanwhile, Indonesia's exports to the ASEAN region reached a share of 20.38%, a decline in export value of 14.01% yoy in 2023.

Dari sisi impor Indonesia tahun 2023 tercatat sebesar USD221,89 miliar, terkontraksi 6,55% (yoy) dibandingkan tahun 2022. Penyumbang kontraksi impor terbesar yaitu produk bahan bakar mineral (HS27), sementara produk dengan kenaikan impor tertinggi adalah kelompok produk: peralatan listrik (HS85) dan peralatan mekanik (HS84). Sama seperti ekspor, secara volume, impor Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 8,04% yoy, sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Adapun asal impor terbesar Indonesia juga masih didominasi oleh negara Tiongkok dan Singapura dengan *share* masing-masing 28,34% dan 8,30% terhadap total impor Indonesia.

In terms of import perspective, Indonesia's imports in 2023 recorded of USD221.89 billion, contracted 6.55% (yoy) from 2022. The largest contributor to import contraction was mineral fuel products (HS27), while the products with the highest increase in imports were product groups: electrical equipment (HS85) and mechanical equipment (HS84). Similar to exports, Indonesia's imports, in terms of volume, recorded a positive growth of 8.04% year on year, in line with the strong domestic demand. China and Singapore continued to dominate Indonesia's imports, accounting for 28,34% and 8.30%, respectively, of Indonesia's total imports.

Dengan kinerja ekspor dan impor nasional yang secara nominal mengalami tekanan di tahun 2023, Neraca Perdagangan Indonesia tercatat masih mencatatkan surplus sebesar USD36,93 miliar pada tahun 2023.

Sementara pada indikator makroekonomi lainnya terlihat bahwa stabilitas pasar keuangan nasional tetap terjaga didukung oleh kebijakan Bank Indonesia yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dan ditetapkan secara *forward looking* dan *pre-emptive* guna mencapai sasaran inflasi dan pertumbuhan kredit perbankan yang meningkat dan didukung stabilitas sistem keuangan yang tetap kuat serta ditopang oleh likuiditas yang memadai, permodalan yang kuat dan risiko kredit yang rendah. Kredit perbankan tercatat tumbuh 10,38% pada tahun 2023 dengan kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/ CAR) yang terjaga di level 27,65%.

Ke depan, dinamika perekonomian global diprakirakan berubah cepat dengan ketidakpastian yang masih tinggi sehingga perlu diwaspadai, diantisipasi, dan direspons dengan tepat. Bauran kebijakan diharapkan dapat meredam dampak tekanan global guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat.

PERAN DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA DALAM MERUMUSKAN STRATEGI BISNIS DAN PENETAPAN TARGET-TARGET LEMBAGA

Sebagaimana dimanatkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, seluruh jajaran Direktur bertanggung jawab secara kolegial dalam merumuskan strategi dan menetapkan arah kebijakan strategis Lembaga yang selanjutnya dituangkan lebih detail pada Rencana Kerja Anggaran dan Tahunan (RKAT) 2023 yang mengusung tema "*Fixing the Fundamentals*". Selama proses penyusunan tersebut, kami telah melalui proses konsultasi yang intensif dengan Dewan Direktur serta turut mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi makroekonomi, aspirasi Pemegang Saham serta mengacu pada Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2020-2024.

Despite pressure on the nominal performance of national exports and imports in 2023, Indonesia's trade balance managed to record a USD36.93 billion surplus in December 2023.

Meanwhile, other macroeconomic indicators show that national financial market stability is maintained, bolstered by Bank Indonesia's policy, to maintain stability and is determined in a forward looking and pre-emptive manner to achieve inflation targets and increased banking credit growth and is supported by strong financial system stability and by adequate liquidity, strong capital and low credit risk. Banking credit was recorded to grow 10.38% in 2023 with capital adequacy ratio (CAR) maintained at 27.65%.

In the future, the dynamics of the global economy are predicted to change rapidly with uncertainty remaining high, thus, we need to be alert, anticipated and responded appropriately. The policy mix is expected to reduce the impact of global pressures in order to support Indonesia's strong economic growth.

ROLE OF THE EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS IN FORMULATING INSTITUTION'S BUSINESS STRATEGIES AND SETTING TARGETS

According to Law No. 2 of 2009 on the Indonesian Export Financing Institution, all levels of Directors are collectively responsible for formulating strategies and determining the direction of the Institution's strategic policies, which were then outlined in greater detail in the 2023 Budget and Annual Work Plan (RKAT), with the theme "Fixing the Fundamentals." During the preparation process, we conducted extensive consultations with the Board of Directors and took into account a variety of factors such as macroeconomic conditions, shareholder aspirations, and the Long Term Plan (RJP) for 2020-2024.

Untuk memastikan eksekusi seluruh strategi dan langkah-langkah strategis yang ditempuh Manajemen senantiasa berjalan dengan baik sesuai kebutuhan Lembaga, kami melakukan *close monitoring* terhadap risiko-risiko yang dihadapi di lapangan dan mengidentifikasi pencapaian target kinerja RKAT 2023 baik melalui rapat koordinasi dengan unit-unit kerja terkait yang diselenggarakan terjadwal ataupun dengan meninjau berbagai laporan pencapaian kinerja yang disampaikan oleh unit-unit bisnis. Di samping itu, kami juga dapat menerbitkan Peraturan Direksi atau peraturan lain yang dipandang perlu untuk memberikan arahan lebih rinci tentang tata cara operasional Lembaga agar implementasi strategi di seluruh organisasi senantiasa berjalan efektif dan konsisten baik dalam tindakan maupun keputusan yang diambil Manajemen.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS LEMBAGA TAHUN 2023

Dalam menghadapi perubahan lanskap global yang begitu cepat, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah menunjukkan respons yang sigap dalam menentukan langkah-langkah mitigasi yang selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut ke dalam rumusan strategi tahun 2023. Selama periode pelaporan, LPEI masih melanjutkan fokusnya pada penerapan strategi yang bertujuan untuk memperkuat bisnis melalui berbagai inisiatif transformasi yang sudah diterapkan sejak tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai bagian dari strategi bisnis Lembaga untuk melaksanakan mandat, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah mengeksekusi sejumlah inisiatif strategis antara lain bisnis model baru dan memulai inovasi masa depan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan mandat finansial maupun non finansial. Hasilnya per 31 Desember 2023, LPEI berhasil mencatatkan realisasi pembiayaan sebesar Rp73,82 triliun, produksi penjaminan komersial sebesar Rp7.381 miliar, volume asuransi sebesar Rp12.091 miliar, volume Trade Finance ekuivalen Rp16,1 triliun, dan rasio pembiayaan UKM mencapai 19,6%. Dari pembiayaan yang diberikan LPEI memiliki daya ungkit (*developmental impact*) sebesar 3,95 yang artinya pembiayaan yang diberikan LPEI meningkatkan nilai ekspor Indonesia sebesar Rp291,6 triliun rupiah dan menyerap tenaga kerja hingga 53 orang setiap Rp1 miliar pembiayaan.

To ensure that all strategies and strategic measures implemented by Management run smoothly and in accordance with the Institution's needs, we closely monitor the risks encountered in the field and identify the achievement of the 2023 Budget and Annual Work Plan performance targets through coordination meetings with related work units, which are scheduled on a regular basis, or by reviewing various performance achievement reports submitted by business units. Furthermore, we are able to issue Board of Directors Regulations or other regulations as needed to provide more detailed direction regarding the Institution's operational procedures, ensuring that strategy implementation throughout the organization remains effective and consistent in both actions and decisions made by management.

INSTITUTION STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES IN 2023

In the face of rapid changes in the global landscape, the Executive Director and Managing Directors responded quickly in determining mitigation measures, which were then translated into the formulation of strategies for 2023. During the reporting period, Indonesia Eximbank maintained its focus on implementing business-building strategies through various transformation initiatives that have been in place for several years.

As part of the Institution's business strategy to implement the mandate, the Executive Director and Managing Directors have carried out a number of strategic initiatives including new business models and initiating future innovations in order to enhance the delivery of both financial and non-financial mandates. As a result, as of 31 December 2023, Indonesia Eximbank had successfully realized Rp73.82 trillion in financing, Rp7,381 billion in commercial guarantee production, Rp12,091 billion in insurance volume, Rp16.1 trillion in trade finance volume, and the SME financing ratio of 19.6%. From the financing provided, Indonesia Eximbank has a developmental impact of 3.95, which means that the financing provided by Indonesia Eximbank increases the value of Indonesian exports by Rp291.6 trillion rupiah and absorbs up to 53 workers for every Rp1 billion of financing.

Sementara itu dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan mandat Penugasan Khusus Ekspor (PKE), Manajemen telah secara selektif menyalurkan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan ekspor nasional yang meliputi ekspor barang, jasa, dan/atau kegiatan pendukung untuk ekspor. Pada tahun 2023, LPEI telah menjalankan mandat ini dengan menyalurkan pembiayaan untuk PKE UKM sebesar Rp266 miliar, PKE Trade Finance sebesar Rp2.894 miliar, PKE Mandalika sebesar Rp248 miliar, PKE Kawasan sebesar Rp1.124 miliar, PKE Alat Transportasi sebesar Rp291 miliar dan PKE Daerah Pariwisata Superprioritas sebesar Rp170 miliar.

Meanwhile, to support the successful implementation of the Export National Interest Account (NIA) (or the Special Export Assignment/"PKE") mandate, the Management has selectively channeled export financing for transactions or projects that are commercially difficult to implement but are deemed necessary by the Government to support national export policies, such as the export of goods, services, and/or supporting activities for exports. In 2023, Indonesia Eximbank has implemented the mandate by disbursing financing for PKE Export-Oriented SME amounting to Rp266 billion, PKE Trade Finance amounting to Rp2,894 billion, PKE Mandalika amounting to Rp248 billion, PKE Regions amounting to Rp1,124 billion, PKE Transportation Equipment amounting to Rp291 billion and PKE Super Priority Tourism Destinations (SPTD) amounting to Rp170 billion.

Kemudian dalam rangka mencetak eksportir-eksportir baru yang berkualitas, LPEI terus berfokus pada pelaksanaan mandat Jasa Konsultasi melalui Program *Coaching Program for New Exporters* (CPNE) dan pengembangan Desa Devisa. Dalam menjalankan program-program tersebut kami menggandeng Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) serta asosiasi atau komunitas ekspor. Selain berfokus pada pelaksanaan mandat, Manajemen juga mengerahkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk memperbaiki kualitas aset Lembaga, yang didukung melalui berbagai program kerja dan kegiatan. Pada tahun 2023, kami telah melakukan sejumlah inisiatif yang bertujuan untuk memperbaiki posisi NPL Lembaga baik secara organik melalui upaya restrukturisasi, *collections*, dan hapus buku, ataupun dengan mencari alternatif penyelesaian NPL secara inorganik. Selain berbagai upaya tersebut dalam menurunkan NPL, LPEI juga memperkuat *coverage* dengan penambahan provisi sehingga membuat rasio NPL neto sebesar 4,54%.

Furthermore, in order to produce new quality exporters, Indonesia Eximbank is focusing on implementing the Consultation Services mandate through the Coaching Program for New Exporters (CPNE) and developing the Go Export Village Program. In carrying out these programs, we work with Ministries/Institutions (K/L) and Regional Governments (Pemda), as well as export associations or communities. In addition to focusing on implementing its mandate, the Management utilizes all of its potential and resources to improve the quality of the Institution's assets, which is supported by a variety of work programs and activities. In 2023, we carried out a number of initiatives aimed at improving the Institution's NPL position, either organically through restructuring, collections, and write-off efforts or by exploring inorganic NPL settlement alternatives. In addition to these efforts to reduce NPLs, Indonesia Eximbank also strengthened coverage with additional provisions, resulting in a net NPL ratio of 4.54%.

Dengan secara konsisten menerapkan seluruh strategi dan langkah-langkah strategis yang sudah disepakati dalam RKAT 2023, kami berharap daya ungkit LPEI dapat terus meningkat sehingga kontribusi yang diberikan terhadap kinerja ekspor nasional pun mengalami peningkatan yang lebih baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam mengimplementasikan seluruh strategi tersebut, kami memastikan pelaksanaan strategi bisnis LPEI dipantau secara ketat, serta disesuaikan dengan

By consistently implementing all of the strategies and strategic measures agreed upon in the 2023 RKAT, we hope that Indonesia Eximbank's leverage will continue to increase, resulting in a greater contribution to national export performance than in previous years. In implementing all of these strategies, we ensure that Indonesia Eximbank's business strategy is closely monitored and adjusted in response to market conditions. If necessary, Management can make

kondisi pasar. Apabila diperlukan, Manajemen dapat melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan strategi dan kebijakan strategis Lembaga untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan operasional LPEI.

changes to the Institute's strategy and strategic policies to ensure Indonesia Eximbank's operational continuity.

ANALISA KINERJA LEMBAGA TAHUN 2023

INSTITUTION PERFORMANCE ANALYSIS IN 2023

Perbandingan Kinerja dan Realisasi Target Tahun 2023

Melalui berbagai strategi yang telah dijalankan secara *prudent* di tahun 2023 dan didukung oleh perencanaan bisnis yang matang, LPEI mampu menjaga keberlangsungan operasionalnya meski tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan serta berhasil merealisasikan mandat-mandat dari Pemerintah dengan hasil yang baik.

Comparison of Performance and Realization of Targets in 2023

Indonesia Eximbank was able to maintain operational continuity despite facing numerous challenges in 2023 as a result of various strategies that were prudently implemented and supported by mature business planning, and has successfully realized government mandates with good results.

Secara keseluruhan performa keuangan Lembaga kembali mengalami tekanan di tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat dari rugi tahun berjalan tahun 2023 yang dibukukan senilai Rp18,11 triliun, naik signifikan dibandingkan rugi tahun berjalan di tahun sebelumnya sebesar Rp3,11 triliun. Kinerja keuangan LPEI selama 2023 mengalami koreksi yang cukup dalam sepanjang tahun ini. Laba sebelum biaya CKPN tercatat sebesar Rp402 miliar atau naik 87% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Hal ini utamanya disebabkan oleh kenaikan total *income* sebesar 23% sementara kenaikan biaya hanya 5% dibandingkan tahun lalu. Namun demikian laba bersih yang telah di audit Desember 2023 mencatat kerugian sebesar Rp18,11 triliun dikarenakan pembentukan CKPN sebesar Rp16,9 triliun atas portfolio Loan at Risk (LAR).

Overall, the Institution's financial performance was once again under pressure in 2023, as evidenced by the loss for the current year in 2023, which was recorded at Rp18.11 trillion, a significant increase compared to the previous year of Rp3.11 trillion. Indonesia Eximbank's financial performance in 2023 experienced a significant correction throughout the year. Profit before the Allowance for Impairment Losses (CKPN) was recorded at Rp402 billion or increase 87% higher than last year. This was mainly due to an increase in total income of 23% while costs increased by only 5% compared to last year. However, the audited net profit in December 2023 recorded a loss of Rp18.11 trillion due to the fulfillment of CKPN formation of Rp16.9 trillion on the Loan at Risk (LAR) portfolio.

Sementara pada sisi kinerja *top lines*, LPEI berhasil mencatatkan peningkatan pendapatan bunga dan usaha syariah sebesar 19% (yoy) pada 2023 sehingga dibukukan menjadi Rp923,2 miliar dan pada periode yang sama beban bunga dibukukan sebesar Rp3,13 triliun naik 6,54% (yoy) dibandingkan dengan tahun lalu. Selain itu, pendapatan operasional lainnya juga mengalami peningkatan sekitar 39,13% (yoy) sehingga dibukukan menjadi Rp259,08 miliar.

Meanwhile, in terms of top-line performance, Indonesia Eximbank was able to increase interest income and sharia business by 19% (yoy) in 2023 to Rp923.2 billion, while interest expense was recorded at Rp3.13 trillion, up 6.54% (yoy) from the previous year. Furthermore, other operational income increased by around 39.13% (yoy), recorded at Rp259.08 billion.

Ditinjau dari segi kinerja aset, jumlah pembiayaan dan piutang yang mengalami penurunan nilai per 31 Desember 2023 sehingga dibukukan sebesar Rp40,20 triliun, yang terdiri dari pembiayaan dan piutang dalam rupiah masing-masing sebesar Rp25,14 triliun dan Rp29,43 triliun, serta pembiayaan dan

From an asset performance standpoint, the amount of financing and receivables that experienced impairment as of December 31, 2023 was recorded at Rp40.20 trillion, consisting of financing and receivables in rupiah amounting to Rp25.14 trillion and Rp29.43 trillion, respectively, as well as financing and

piutang dalam dolar Amerika Serikat masing-masing sebesar Rp15,06 triliun dan Rp16,6 triliun. LPEI telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang yang mengalami penurunan nilai/bermasalah pada 31 Desember 2023 sebesar Rp27,77 triliun.

receivables in US dollars amounting to Rp15.06 trillion and Rp16.6 trillion. Indonesia Eximbank has set aside Rp27.77 trillion in reserve for impairment losses on impaired/non-performing financing and receivables as of December 31, 2023.

Sementara itu, pada 31 Desember 2023, saldo pembiayaan dan piutang yang direstrukturisasi oleh LPEI dibukukan mencapai Rp42,89 triliun serta cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang tersebut telah dibentuk sebesar Rp29,8 triliun. Adapun skema restrukturisasi kredit meliputi perpanjangan dan penjadwalan kembali jangka waktu kredit, penurunan suku bunga kredit dan skema restrukturisasi lain.

On December 31, 2023, Indonesia Eximbank's outstanding balance for restructured financing and receivables was Rp42.89 trillion, with an allowance for impairment losses of Rp29.8 trillion for impaired/non-performing financing and receivables. The financing restructuring scheme includes loan maturity date extensions and rescheduling, interest rate reductions, and other restructuring schemes.

Selain berfokus pada upaya penyehatan kinerja keuangan Lembaga yang menjadi prioritas utama di tahun ini, Manajemen juga memperhatikan capaian pelaksanaan mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional. Sehubungan dengan realisasi kinerja penyelesaian mandat oleh LPEI terutama dalam hal pembiayaan ekspor, penjaminan ekspor, asuransi ekspor dan jasa konsultasi serta program penugasan khusus lainnya dalam mendorong ekspor, berikut ini adalah uraiannya:

In addition to focusing on efforts to improve the Institution's financial performance, which is this year's main priority, the Management is also concerned with the accomplishments of implementing the mandate established by Law Number 2 of 2009 on Indonesian Export Financing Institutions and Government Regulation Number 43 of 2019 on Basic Policy for National Export Financing. The following describes Indonesia Eximbank's mandate completion performance, particularly in terms of export financing, export guarantee, export insurance, and advisory services, as well as other special assignment programs aimed at encouraging exports:

Pada tahun 2023, LPEI mencatatkan *outstanding* pembiayaan sebesar Rp73,82 triliun atau turun 11,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada segmen korporasi. Namun demikian, LPEI membukukan penarikan pembiayaan yang mencapai Rp16,1 triliun di tahun 2023, yang terdiri dari penarikan pembiayaan dari debitur eksisting sebesar Rp11,9 triliun, dan debitur baru sebanyak Rp4,2 triliun.

In 2023, Indonesia Eximbank recorded outstanding financing of Rp73.82 trillion or a decrease of 11.7% compared to the previous year. This decrease was mainly due to the decline in the corporate segment. However, Indonesia Eximbank recorded financing withdrawals of Rp16.1 trillion in 2023, consisting of financing withdrawals from existing debtors of Rp11.9 trillion, and new debtors of Rp4.2 trillion.

Dalam hal penjaminan, LPEI membukukan realisasi penjaminan mencapai Rp10,90 triliun per Desember 2023 yang terdiri dari Penjaminan Umum sebesar Rp7,38 triliun dan Penjaminan PEN sebesar Rp3,42 triliun. Nilai Penjaminan Umum dan Penjaminan PEN menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 14,82% (yoy) dan 14,72% (yoy), jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

In terms of guarantees, Indonesia Eximbank recorded the realization of guarantees totaling of Rp10.90 trillion as of December 2023, consisting of General Guarantees of Rp7.38 trillion and PEN Guarantees of Rp3.42 trillion. The General Guarantee and PEN Guarantee values showed a decrease of 14.82% (yoy) and 14.72% (yoy), respectively, compared to the previous year's achievements.

Kemudian terkait produk Asuransi, LPEI membukukan realisasi nilai pertanggungan atas penutupan risiko yang tercantum dalam polis asuransi LPEI mencapai Rp12,02 triliun. Nilai tersebut turun sebesar 1,91% (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Moreover, regarding insurance products, Indonesia Eximbank recorded the realization of the insured value for closing risks listed in Indonesia Eximbank's insurance policy at Rp12.02 trillion. This value decreased by 1.91% (yoy) compared to the previous year.

Lalu pada pelaksanaan mandat non finansial, yakni Jasa Konsultasi, LPEI berhasil mencetak sebanyak 389 eksportir baru melalui program CPNE. Selain itu jumlah peserta CPNE yang mendapatkan fasilitas pembiayaan LPEI sebanyak 31 debitur sampai dengan akhir Desember 2023.

Furthermore, in the implementation of non-financial mandates, namely Advisory Services, Indonesia Eximbank succeeded in producing 389 new exporters through the CPNE program. In addition, the number of CPNE participants who received Indonesia Eximbank financing facilities was 31 debtors by the end of December 2023.

Selain itu, LPEI juga berhasil menambah sebanyak 739 Desa Devisa baru pada 2023. Semua Desa Devisa tersebut sudah menghasilkan berbagai macam produk-produk unggulan ekspor, seperti kakao, kerajinan, beras, kopi, tenun, garam, rumput laut, gula semut, lada hitam, udang, rempah dan lainnya.

In addition, Indonesia Eximbank was successful in adding 739 new Go Export Village in 2023. All Go Export Village produce high-quality export products such as cocoa, crafts, rice, coffee, weaving, salt, seaweed, ant sugar, black pepper, shrimp, spices, and others.

Secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan target RKAT 2023, terlihat bahwa LPEI menutup tahun 2023 dengan capaian kinerja keuangan dan operasional yang beragam pada semua lini bisnis. Semua pencapaian yang telah diraih LPEI di tahun ini akan dijadikan sebagai landasan bagi Manajemen untuk semakin meneguhkan komitmen dalam menerapkan pengelolaan bisnis yang senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian baik dalam hal manajemen risiko maupun pengendalian internal serta mengutamakan Tata Kelola yang Baik pada setiap kegiatan usaha yang dijalankan.

Overall, when compared to the 2023 RKAT target, Indonesia Eximbank completed 2023 with a variety of financial and operational performance achievements across all business lines. All of Indonesia Eximbank's accomplishments this year will serve as a foundation for the Management to further strengthen its commitment to implementing business management that always prioritizes the principle of prudence in terms of risk management and internal control, as well as prioritizing Good Corporate Governance in all business activities.

Tantangan dan Langkah-Langkah Mitigasinya

Sejalan dengan dinamika global yang berkembang dan perlambatan ekonomi dunia yang semakin nyata di masa pasca pandemi, LPEI menilai kondisi tersebut telah memberikan dampak terhadap proses transformasi yang sedang berjalan khususnya terkait dengan perbaikan kualitas aset, penguatan infrastruktur, dan model bisnis baru. Merespons situasi yang dihadapi, sepanjang tahun 2023 LPEI tetap menjalankan mandat dengan menyalurkan fasilitas pembiayaan secara selektif, penyaluran penjaminan, asuransi serta *trade finance*, percepatan perbaikan kualitas aset, kolaborasi dengan ekosistem ekspor, manajemen risiko yang mumpuni, konsolidasi internal baik dari sisi proses bisnis, tata kelola, pengembangan Sumber Daya Manusia dan memperkuat Teknologi Sistem Informasi.

Challenges and Mitigation Measures

In line with the development of global dynamics and the world economic slowdown, which is becoming more apparent in the post-pandemic period, Indonesia Eximbank believes that this condition has had an impact on the Institution's ongoing transformation process, particularly in terms of improving asset quality, strengthening infrastructure, and developing new business models. In response to the situation faced in 2023, Indonesia Eximbank remained focused on providing selective financing facilities, equitable distribution of mandates by increasing the distribution of guarantees, insurance, and trade finance, accelerating asset quality improvement, collaboration with the export ecosystem, qualified risk management, internal consolidation both in terms of business processes, governance, Human Resources development, and strengthening Information Systems Technology.

Sepanjang tahun 2023, Manajemen melihat sejumlah tantangan yang memengaruhi kinerja bisnis. Faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi global, penurunan harga komoditas, kenaikan suku bunga, tren yang mengarah pada *era renewable energy & ESG* yang berdampak pada penurunan kredit ekspor dibandingkan tahun sebelumnya.

Throughout 2023, management realize several challenges that affect business performance. External challenges such as global economic slowdown, interest rates incline, declining commodity prices, trends leading to the era of renewable energy & ESG that affected export credit decline on an annual basis.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, LPEI terus membangun fundamental bisnis yang lebih kuat, dengan cara memperkuat kolaborasi di dalam ekosistem ekspor, membangun pendekatan model bisnis baru, melakukan perbaikan kualitas aset, memperkuat *value proposition* produk LPEI di pasar, serta mengeksekusi initiatif strategis di berbagai area utama secara berkesinambungan.

In the face of various challenges, LPEI continue to build stronger business fundamentals, by strengthening collaboration within the export ecosystem, building new businesses model approach, improving asset quality, strengthening the value proposition of LPEI products in the market, and executing strategic initiatives in key areas simultaneously.

KOMITMEN TERHADAP IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dalam menjalankan aktivitas bisnis dan operasionalnya, LPEI berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG") sebagai fondasi kokoh dalam mewujudkan visi dan misi Lembaga. Penerapan GCG yang optimal menjadi salah satu prioritas Lembaga karena diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan bisnis pada jangka panjang.

COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Indonesia Eximbank is fully committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) principles as a solid foundation for achieving the Institution's vision and mission in all of its business and operational activities. One of the Institution's priorities is optimal GCG implementation, which is thought to have a positive long-term impact on business development.

Sepanjang tahun 2023, kami memastikan implementasi GCG di LPEI telah berjalan secara efektif pada setiap lini bisnis dan tingkatan organisasi dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 2/2009 (Pasal 17) tentang LPEI dan PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. Wujud nyata dari disiplin tinggi dan konsistensi seluruh insan LPEI dalam mengaktualisasikan praktik GCG tercermin dari *governance outcome* yang positif di tahun 2023, antara lain keberhasilan dalam menjalankan penugasan mandat, tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan atau etika bisnis oleh karyawan, nihil sanksi administratif yang dikenakan oleh regulator terhadap Lembaga, serta berjalannya sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang terintegrasi.

We ensure that the implementation of GCG in 2023 in Indonesia Eximbank is carried out effectively at each business line and organizational level, as guided by Law No. 2 of 2009 (Article 17) on Indonesia Eximbank and PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Indonesia Eximbank Know Your Customer Principles. Positive governance outcomes in 2023 reflect the true manifestation of all Indonesia Eximbank personnel's high discipline and consistency in implementing GCG practices, including success in carrying out mandated assignments, no violations of compliance or business ethics discovered by employees, zero administrative sanctions imposed by regulators on the Institution, and the implementation of an integrated internal control and risk management system.

Kemampuan LPEI dalam menghasilkan *governance outcome* yang positif tersebut tentunya juga didukung oleh kecukupan *governance structure* yang memadai sebagaimana tercermin dari ketersediaan perangkat kebijakan dan pedoman

Indonesia Eximbank's ability to produce positive governance outcomes is obviously also supported by the adequacy of a sufficient governance structure, as reflected in the availability of complete internal policies and guidelines as well as the existence of

internal yang lengkap serta eksistensi organ-organ pendukung, seperti Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite serta satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal di samping penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, audit eksternal, dan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal.

supporting organs, such as the Sharia Supervisory Board and committees, as well as work units that carry out their internal control functions in addition to implementing compliance functions, internal audit, external audit, and risk management, including the internal control system.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG, Perseroan secara berkala melakukan *review* terhadap struktur, organ, dan mekanisme tata kelola yang diterapkan Lembaga. Di tahun 2023, LPEI telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan dan menyempurnakan kualitas penerapan GCG, salah satunya dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh pihak independen. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Manajemen memastikan tindak lanjut terhadap semua temuan yang diperoleh dengan menerapkan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh pihak penilai, auditor internal, auditor eksternal, dan juga arahan Dewan Direktur.

To improve the quality of GCG implementation, the Institution conducts periodic reviews of its structure, organs, and governance mechanisms. In 2023, Indonesia Eximbank launched several initiatives to improve and perfect the quality of GCG implementation, one of which was an evaluation of GCG implementation by independent parties. Based on the results of this assessment, Management ensures that all findings are followed up on by implementing corrective measures in accordance with the recommendations made by the assessor, internal auditor, external auditor, and the Board of Directors.

Di sisi lain, pengelolaan risiko yang terkendali dan terukur juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesuksesan praktik GCG. Dengan mengacu pada *best practice*, LPEI telah mengadopsi sistem manajemen risiko yang terintegrasi di seluruh lini bisnis dengan menggunakan pendekatan *Three Lines of Defense model.* Didukung oleh budaya sadar risiko tinggi yang dimiliki oleh seluruh karyawan, LPEI memiliki kemampuan untuk mengelola risiko-risiko utama yang dihadapi secara cermat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena itu, kami memastikan setiap keputusan bisnis yang diambil LPEI senantiasa memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang sudah ditetapkan oleh Lembaga.

On the other hand, controlled and measurable risk management is an essential component of the success of GCG practices. Using best practices, Indonesia Eximbank implemented an integrated risk management system across all business lines based on the Three Lines of Defense model approach. Supported by a culture of high risk awareness shared by all employees, Indonesia Eximbank is able to carefully manage the main risks it faces by prioritizing the precautionary principle. As a result, we ensure that every business decision made by Indonesia Eximbank takes into account the institution's risk appetite and tolerance.

Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yang konsisten dan pengelolaan risiko secara hati-hati dan cermat, kami meyakini LPEI dapat menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan dan memberikan nilai tambah bagi para *stakeholders.*

We believe that by consistently implementing GCG principles and exercising careful and thorough risk management, Indonesia Eximbank can generate long-term sustainable economic value and add value to stakeholders.

KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Sebagai salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan RI yang menjalankan mandat untuk meningkatkan ekspor nasional melalui PEN (Pembiayaan Ekspor Nasional), Manajemen memastikan seluruh derap langkah bisnis LPEI telah

COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE

As one of the Special Mission Vehicles (SMV) under the Indonesian Ministry of Finance tasked with increasing national exports through PEN (National Export Financing), the Management ensures that all Indonesia Eximbank business measures follow the

mengindahkan arahan Pemerintah termasuk dalam mendukung upaya mitigasi risiko iklim yang kini tengah ramai didiskusikan di tingkat global. Peran serta LPEI untuk menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi semua makhluk hidup di Bumi diwujudnyatakan melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang lebih bertanggung jawab dengan mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) pada setiap proses operasional bisnis. Melalui transformasi model organisasi dan implementasi inisiatif strategis berbasis LST, kami terus berusaha mengintensifkan upaya-upaya keberlanjutan untuk menghadirkan masa depan yang lebih cerah bagi bisnis LPEI.

Government's lead, including supporting climate risk mitigation efforts that are currently being widely discussed on a global scale. Indonesia Eximbank's role in providing a better life for all living things on Earth is realized by implementing more responsible business practices that incorporate Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations into every business operational process. We continue to strive to intensify sustainability efforts by transforming the organizational model and implementing ESG-based strategic initiatives in order to present a brighter future for the Indonesia Eximbank business.

Pada pilar lingkungan hidup, LPEI berkomitmen untuk turut andil dalam mendorong dekarbonisasi dan mendukung tercapainya *Net Zero Emission* (NZE) Indonesia pada tahun 2060 mendatang. Dengan tekad penuh tersebut, LPEI telah merumuskan dan memberlakukan Kebijakan ESG dan Manual Operasional ESG sebagai pedoman penyaluran pembiayaan hijau khusus untuk sektor-sektor yang berkelanjutan dan memenuhi kriteria Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

In terms of the environmental pillar, Indonesia Eximbank is committed to supporting decarbonization and Indonesia's goal of achieving Net Zero Emissions (NZE) by 2060. With this full commitment, Indonesia Eximbank developed and implemented the ESG Policy and ESG Operational Manual as guidelines for green financing disbursement, focusing on sectors that are sustainable and meet the criteria for Environmentally Friendly Business Activities (KUBL).

Di sisi lain dalam rangka penghematan energi, LPEI juga telah secara konsisten menerapkan budaya *Green Office*, yaitu dengan menghimbau seluruh karyawan untuk mematikan dan melepas peralatan elektronik pribadi saat pulang kantor atau saat tidak digunakan, mematikan lampu dan AC saat selesai bertugas di kantor, serta mengajak karyawan untuk menghemat pemakaian air di area *pantry* maupun toilet. Kami meyakini kontribusi nyata sekecil apapun yang sudah dijalankan pasti akan memberikan dampak yang baik bagi kelestarian lingkungan hidup.

On the other hand, Indonesia Eximbank has consistently implemented a Green Office culture to conserve energy. This entails encouraging all employees to deactivate and remove personal electronic devices when they leave the office or when they are not in use, to turn off the lights and air conditioning when they have completed their work in the office, and to encourage employees to conserve water in the pantry and restroom areas. We are convinced that any contribution, regardless of its size, will positively influence environmental sustainability.

Selain berfokus pada peningkatan portofolio Keuangan Berkelanjutan, pada pilar ekonomi dan sosial, LPEI juga menunjukkan tekad penuh untuk menjaga ritme pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab dengan memperhatikan keseimbangan antara pencapaian kinerja keuangan yang tumbuh menguntungkan dan penyaluran dampak positif yang maksimal bagi masyarakat dan para pelaku UMKM khususnya yang berorientasi ekspor melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang sudah diselaraskan dengan pencapaian Tujuan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/"SDGs"*).

In addition to focusing on increasing the Sustainable Finance portfolio on the economic and social pillars, Indonesia Eximbank also shows full determination to maintain the responsible business growth rhythm by paying attention to the balance between achieving profitable financial performance and channeling maximum positive impacts for society and export-oriented MSMEs, particularly through the Corporate Social Responsibility (CSR) Program, which has been aligned with the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs).

Untuk mendukung terciptanya ekosistem ekspor yang berkelanjutan, pada tahun 2023, LPEI kembali menitikberatkan fokus TJSL pada pengembangan Program Desa Devisa yang berbasis *community development,* kegiatan *Coaching Program for New Exporter* (CPNE), Rumah Ekspor, dan *business matching*. Pada program Desa Devisa, LPEI terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai Desa di seluruh Indonesia melalui kegiatan pemberdayaan potensi wilayah masing-masing dalam bentuk kluster-kluster usaha dan membukakan pasar ekspor bagi produk-produk yang dihasilkan. Selama tahun pelaporan 2023, tidak kurang 689 desa dengan total 63.836 petani/petambak tercakup dalam 739 kelompok program Desa Devisa yang dijalankan. Tidak hanya itu, LPEI juga kembali merealisasikan sebanyak 78 program pemberdayaan CPNE yang diikuti oleh 1.307 peserta. Melalui Program CPNE ini, kami berhasil melahirkan 389 eksportir baru dari berbagai sektor usaha.

To help create a sustainable export ecosystem, Indonesia Eximbank emphasized CSR in 2023 by developing a Community Development-based Go Export Village Program, a Coaching Program for New Exporters (CPNE), an Export House, and business matching activities. Indonesia Eximbank's Go Export Village program has proven successful in improving community welfare in various villages across Indonesia by empowering each region's potential through business clusters and opening up export markets for locally manufactured products. In the 2023 reporting year, the Institution implemented the Go Export Village Program in 689 villages, serving a total of 63,836 farmers/fishermen/craftsmen from 739 groups. Furthermore, Indonesia Eximbank implemented 78 CPNE empowerment programs, which were attended by 1,307 participants. Through the CPNE Program, we were able to produce 389 new exporters from a variety of industries.

Sementara terkait implementasi tata kelola keberlanjutan, LPEI memastikan seluruh departemen dan fungsi kerja sudah memahami visi dan misi keberlanjutan Lembaga. Dengan memiliki pemahaman yang baik mengenai praktik Keuangan Berkelanjutan, kami menilai masing-masing unit kerja telah menunjukkan partisipasi aktif dalam membantu proses pencapaian tujuan dan indikator keberlanjutan LPEI sesuai dengan arahan yang tercantum dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2023.

Meanwhile, when it comes to implementing sustainability governance, Indonesia Eximbank ensures that all departments and work functions understand the Institute's sustainability vision and mission. We assess that each work unit has actively contributed to the process of achieving Indonesia Eximbank's sustainability goals and indicators in accordance with the directions stated in the 2023 Sustainable Finance Action Plan (RAKB).

Secara keseluruhan, LPEI menyadari bahwa penerapan praktik bisnis yang dilandaskan pada prinsip Keuangan Berkelanjutan tidak selalu berjalan mulus karena kerap dihadapkan dengan sejumlah tantangan ataupun kendala yang tidak terhindarkan baik dari sisi internal maupun eksternal. Hal ini tentulah berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi program-program strategis yang tercantum dalam RAKB. Maka dari itu dalam merespons tantangan keberlanjutan yang dihadapi, LPEI berusaha meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai akan pentingnya pengintegrasian aspek LST ke dalam proses bisnis dengan memberikan sesi pelatihan dan *sharing session* terkait penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan kepada seluruh karyawan.

Overall, Indonesia Eximbank believes that implementing business practices based on Sustainable Finance principles does not always proceed smoothly because it is frequently confronted with a number of unavoidable challenges or obstacles from both internal and external sources. This undoubtedly influences the successful implementation of the strategic programs outlined in the RAKB. As a result, in response to the sustainability challenges, Indonesia Eximbank aims to raise employee awareness and understanding of the importance of incorporating ESG aspects into business processes by offering training and sharing sessions on the implementation of Sustainable Finance principles to all employees.

PROSPEK USAHA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 mendatang dinamika ekonomi global diproyeksi masih akan terus berlanjut dengan sejumlah risiko pelemahan *(downside risks)* yang mengikuti, seperti kebijakan suku bunga tinggi oleh bank-bank sentral, risiko inflasi yang berpotensi kembali melonjak akibat disrupsi rantai pasok yang semakin parah karena meningkatnya fragmentasi ekonomi global akibat perang yang merajalela di sejumlah negara termasuk kekhawatiran terjadinya *risk-off sentiment* dari kalangan investor global di tengah penantian hasil keputusan pemilihan umum kepala negara yang digelar oleh puluhan negara di 2024 mendatang, termasuk Indonesia.

Di tengah ketidakpastian dan perlambatan global, fundamental ekonomi Indonesia diyakini tetap resilien dari serangkaian *global shocks*, ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, konsumsi, dan investasi di tengah pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan masih dalam posisi yang lemah. Dari sisi industri perbankan, Bank Indonesia diproyeksikan tetap akan mempertahankan *BI rate* di level 6% setidaknya hingga akhir kuartal I/2024 sambil menanti arah kebijakan The Fed AS yang juga sudah memberikan sinyal pemangkasan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin pada 2024.

Dengan mempertimbangkan berbagai data makroekonomi global dan nasional yang ada, Manajemen meyakini LPEI memiliki ruang gerak yang dinamis untuk menyehatkan kembali kinerja keuangannya sehingga pada 2024 mendatang diharapkan dapat melanjutkan pertumbuhan usaha yang berbalik positif dan berkelanjutan walaupun tetap harus berhati-hati dan waspada dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Di samping itu, kami juga akan terus memanfaatkan peluang dan momentum pemulihan ekonomi nasional agar LPEI dapat berkontribusi lebih besar dalam menguatkan kinerja ekspor nasional melalui pelaksanaan seluruh mandat strategis. Uraian strategi dan target-target bisnis yang hendak dicapai di tahun mendatang sudah dituangkan dalam pokok-pokok RKAT tahun 2024.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKTUR EKSEKUTIF

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Lembaga, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dibantu oleh komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Pengembangan Produk, Komite Kebijakan dan

BUSINESS PROSPECTS IN 2024

In 2024, global economic dynamics are projected to continue with a number of downside risks, such as high interest rate policies by central banks and the risk of inflation potentially surging again due to increasingly severe supply chain disruption due to increasing fragmentation of the global economy due to wars in a number of countries, including concerns about risk-off sentiment among global investors amidst the wait for the results of the general election for heads of state to be held by dozens of countries in 2024, including Indonesia.

In the midst of global uncertainty and a slowdown, Indonesia's economic fundamentals are expected to remain resilient to a series of global shocks, supported by strong domestic demand, consumption, and investment despite global economic growth remaining weak. In the banking industry, Bank Indonesia is expected to keep the BI rate at 6% until the end of the first quarter of 2024 while waiting for the US Fed's policy direction, which has also signaled a 75 basis point cut in its benchmark interest rate for 2024.

By considering various existing global and national macroeconomic data, the Management believes that Indonesia Eximbank has dynamic room to revive its financial performance, with the goal of continuing positive and sustainable business growth in 2024, though it must remain cautious and vigilant in the face of global economic uncertainty. Furthermore, we will continue to capitalize on the opportunities and momentum of the national economic recovery so that Indonesia Eximbank can make a greater contribution to improving national export performance by implementing all strategic mandates. A description of the strategy and business targets to be achieved in the coming year has been outlined in the main points of the 2024 RKAT.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF EXECUTIVE DIRECTOR'S COMMITTEES

The Executive Director and Managing Directors are assisted in carrying out the duties and responsibilities of managing the Institution by the committees under them, which include the Risk Management Committee, Product Development Committee, Policy

Pedoman, Komite Assets & Liabilities Management, Komite Teknologi Sistem Informasi, Komite Pengadaan, Komite Jasa Konsultasi, Komite Pembiayaan, dan Komite Sumber Daya Manusia.

Untuk tahun 2023, Manajemen memberikan penilaian positif terhadap kontribusi dan kinerja yang telah diberikan oleh seluruh komite dengan berlandaskan pada tolok ukur penilaian sebagai berikut:

Komite Manajemen Risiko

Direktur Eksekutif menilai bahwa Komite Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sejumlah langkah signifikan telah dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko, termasuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif mengenai kebijakan, strategi, dan panduan implementasi Manajemen Risiko beserta perubahannya. Selama tahun 2023, komite ini telah menyelenggarakan 17 kali rapat dengan rata-rata tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 95%.

Komite Pengembangan Produk

Komite Pengembangan Produk telah memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi LPEI terkait pengembangan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan industri ekspor. Selama tahun 2023, komite ini telah menyelenggarakan 15 kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 100%.

Komite Kebijakan dan Pedoman

Pada tahun 2023, Komite Kebijakan dan Pedoman telah memberikan rekomendasi yang bermanfaat kepada Direktur Eksekutif terkait rancangan peraturan internal LPEI dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan internal serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi. Komite ini juga telah menyelenggarakan 47 kali rapat selama 2023 dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 100%.

Komite Assets dan Liabilities Management

Sejumlah tindakan penting telah diambil oleh Komite Assets dan Liabilities Management, di antaranya memberikan rekomendasi penting kepada Direktur Eksekutif terkait penetapan kebijakan manajemen risiko, kebijakan, batasan, dan pedoman strategi manajemen aset dan liabilitas. Selama tahun 2023, komite ini telah menyelenggarakan 25 kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 90%.

and Guidelines Committee, Assets and Liabilities Management Committee, Information Systems Technology Committee, Procurement Committee, Advisory Services Committee, Financing Committee, and Human Resources Committee.

For 2023, the Management provides a positive assessment of the contribution and performance provided by all committees based on the following assessment benchmarks:

Risk Management Committee

The Executive Director determines whether the Risk Management Committee fulfilled its duties and responsibilities in accordance with the specified criteria. The Risk Management Committee has taken a number of significant steps, including making recommendations to the Executive Director on risk management policies, strategies, and implementation guidelines, as well as changes to them. During 2023, this committee held 17 meetings, with a 95% attendance rate among all members.

Product Development Committee

The Product Development Committee has made useful recommendations to Indonesia Eximbank regarding the development of new products that meet market demands and the development of the export industry. In 2023, this committee held 15 meetings, with 100% attendance by all members.

Policy and Guidelines Committee

In 2023, the Policy and Guidelines Committee made useful recommendations to the Executive Director regarding the draft of Indonesia Eximbank's internal regulations, supervision of their implementation, and developing solutions to the obstacles encountered. This committee also held 47 meetings in 2023, with 100% attendance from all members.

Assets and Liabilities Management Committee

The Assets and Liabilities Management Committee made significant recommendations to the Executive Director on risk management policies, as well as policies, limits, and strategic guidelines for asset and liability management. This committee met 25 times in 2023, with a 90% attendance rate among all members.

Komite Teknologi Sistem Informasi

Pada tahun 2023, Komite Teknologi Sistem Informasi telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal penyusunan rencana pengembangan teknologi sistem informasi berikut dengan pengawasan dan evaluasi atas pengembangan dan penerapan teknologi sistem informasi. Sepanjang tahun ini, Komite Teknologi Sistem telah menyelenggarakan 12 kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 70%.

Information Systems Technology Committee

In 2023, the Information Systems Technology Committee made recommendations to the Executive Director on how to prepare information systems technology development plans, as well as supervise and evaluate information systems technology development and implementation. This year, the System Technology Committee met 12 times, with a 70% attendance rate among all members.

Komite Pengadaan

Direktur Eksekutif menilai bahwa Komite Pengadaan telah memberikan sejumlah rekomendasi yang tepat dan bermanfaat bagi manajemen terkait dengan penyelenggaraan proses pengadaan yang optimal. Selama tahun 2023, komite ini telah menyelenggarakan 68 kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 94%.

Procurement Committee

The Executive Director believes that the Procurement Committee has made several appropriate and useful recommendations to management regarding the optimal implementation of the procurement process. This committee held 68 meetings in 2023, with a 94% attendance rate.

Komite Jasa Konsultasi

Pada tahun 2023, Komite Jasa Konsultasi telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait persetujuan prinsip untuk program jasa konsultasi dengan tetap memperhatikan *good judgment,* mitigasi risiko, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite ini telah menyelenggarakan 11 kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata seluruh anggota adalah 99%.

Advisory Services Committee

In 2023, the Advisory Services Committee made recommendations to the Executive Director regarding in-principle approval for the advisory services program, taking into account good judgment, risk mitigation, and ensuring compliance with applicable laws and regulations. The Committee held 11 meetings, with an average attendance rate of 99% among all members.

Komite Pembiayaan

Pada tahun 2023, Direktur Eksekutif menilai bahwa Komite Pembiayaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite ini telah menyelenggarakan 275 kali rapat segmen UKM dan 288 kali rapat segmen Non-UKM dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 100%.

Financing Committee

In 2023, the Executive Director determined that the Financing Committee carried out its duties and responsibilities effectively in accordance with applicable regulations. This committee held 275 SME segment meetings and 288 Non-SME segment meetings, with 100% attendance from all members.

Komite Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2023, Komite Sumber Daya Manusia telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal penetapan arah, perubahan, dan penyempurnaan kebijakan SDM yang berkualitas. Komite ini telah menyelenggarakan 3 kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 100%.

Human Resources Committee

Throughout 2023, the Human Resources Committee made recommendations to the Executive Director on the direction, changes, and refinement of quality HR policies. This committee has held three meetings, with 100% attendance from all members.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

Sepanjang tahun 2023, tidak terjadi perubahan pada komposisi anggota Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI.

APRESIASI

Mewakili segenap jajaran Manajemen LPEI, izinkanlah saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Direktur dan Pemegang Saham, serta juga kepada regulator dan para Pemangku Kepentingan lainnya atas dukungan beserta kerja sama yang telah terjalin erat sampai dengan hari ini. Apresiasi yang tinggi juga kami berikan kepada seluruh karyawan atas kerja sama tim yang sudah terjalin solid sehingga LPEI mampu melewati berbagai aral dan tantangan yang dihadapi di tahun 2023.

Demikian laporan atas kegiatan kepengurusan LPEI ini kami sampaikan. Akhir kata, kami berharap semoga LPEI dapat terus melanjutkan langkah perbaikan dan penguatan internal di samping tetap memperhatikan capaian pelaksanaan mandat yang maksimal. Dengan begitu, LPEI dapat semakin mengukuhkan peran strategis untuk membantu Pemerintah dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional yang sehat dan berkelanjutan serta sekaligus mendukung perekonomian nasional.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS MEMBERS

Throughout 2023, there were no changes to the composition of the members of the Executive Director and Managing Directors of Indonesia Eximbank.

APPRECIATION

As a representative of all levels of Indonesia Eximbank Management, I would like to express my heartfelt appreciation to the Board of Directors and Shareholders, as well as the regulators and other stakeholders, for their ongoing support and cooperation. We also express our heartfelt gratitude to all employees for their exceptional teamwork, with the goal of enabling Indonesia Eximbank to overcome the various obstacles and challenges that arose in 2023.

We are pleased to present the management report for Indonesia Eximbank. Finally, we hope that Indonesia Eximbank keeps striving to take measures to improve and strengthen internally while focusing on achieving maximum mandate implementation. As a result, Indonesia Eximbank can strengthen its strategic role in assisting the government to improve healthy and sustainable national export performance while also supporting the national economy.

Atas nama Direksi
On behalf of the Board of Directors

Rijani Tirtoso
Direktur Eksekutif
Executive Director

Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana
Executive Director & Managing Directors

Dikdik Yustandi
Direktur Pelaksana Bisnis
Managing Director of Business

Rijani Tirtoso
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

Maqin U. Norhadi
Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis
Managing Director of Business Development

Sam Malee
Direktur Pelaksana
Manajemen Risiko dan Kredit
Managing Director of Credit
and Risk Management

Chesna F. Anwar
Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga,
Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia
Managing Director of Corporate Secretary,
Compliance and HC

Agus Windiarto
Direktur Pelaksana Keuangan,
Operasional dan Teknologi Informasi
Managing Director of Finance,
Operations and IT

Laporan Dewan Pengawas Syariah
Report from the Sharia Supervisory Board

Kanny Hidaya, SE.,MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah turut serta dalam upaya mendorong dan memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap seluruh produk, kebijakan, dan kegiatan usaha Syariah yang dilakukan LPEI telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, ketentuan fatwa DSN-MUI, dan undang-undang yang berlaku sehingga pelaku ekspor Indonesia mendapatkan layanan dan manfaat terbaik.

The Sharia Supervisory Board participates in efforts to promote and ensure the implementation of the supervisory function of all Sharia products, policies and business activities conducted by Indonesia Eximbank that comply with Sharia principles, the provisions of the DSN-MUI fatwa and applicable laws, so that Indonesian exporters receive the best services and benefits.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Bismillaahirrahmaanirrahim

Kepada seluruh Stakeholders dan Pemangku Kepentingan lainnya yang Kami hormati,

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita ucapkan atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta dimampukan dalam menjalankan tugas dan amanah yang dititipkan kepada kami. Shalawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Pada kesempatan ini izinkan Kami selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) LPEI untuk menyampaikan resume laporan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kami selama tahun 2023 dalam memberikan nasihat dan saran kepada Direktur Eksekutif LPEI beserta jajarannya, serta mengawasi seluruh aktivitas Syariah LPEI agar sesuai dengan prinsip Syariah dan kerangka Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance.*

Berbicara tentang Syariah di LPEI tidaklah lepas dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Alhamdulillah LPEI juga telah dirancang untuk dapat memberikan beragam layanan berdasarkan prinsip syariah untuk membantu eksportir di Indonesia.

To all distinguished Stakeholders and other Stakeholders,

Praise be to Allah Subhanahu wa Ta'ala, we always say, for all His graces and guidance to all of us, and for enabling us to carry out the duties and mandates entrusted to us. Shalawat and greetings are also conveyed to the Lord of the Prophet Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

On this occasion, allow us as the Sharia Supervisory Board (DPS) of Indonesia Eximbank to present a summary report on the implementation of our duties and responsibilities during 2023 in providing advice and suggestions to the Executive Director of Indonesia Eximbank and its staff, as well as overseeing all Sharia activities of Indonesia Eximbank to be in accordance with Sharia principles and the framework of Good Corporate Governance.

The mention of Sharia in Indonesia Eximbank cannot be separated from the mandate of Law No. 2 of 2009 on the Indonesian Export Financing Agency, and Alhamdulillah, Indonesia Eximbank has also been designed to be able to provide a variety of services based on Sharia principles to help exporters in

Pemenuhan terhadap prinsip Syariah dan *best practice*-nya telah dilakukan DPS bersama dengan seluruh rekan-rekan di LPEI seperti pada produk *Trade Credit Insurance* (TCI) Syariah dan *Marine Cargo Insurance* (MCI) Syariah, sehingga dapat memberikan keunggulan bagi LPEI, baik komparatif maupun kompetitif.

Selama tahun 2023, DPS mengapresiasi berbagai inisiasi yang dilakukan seluruh jajaran Direksi dan rekan-rekan LPEI dalam mengimplementasikan dan menyempurnakan kesesuaian prinsip syariah terhadap produk, kebijakan, prosedur, dan aktivitas usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dijalankan oleh LPEI. Sebagaimana telah diatur pada fatwa DSN-MUI serta peraturan perundang-undangan terkait LPEI yang berlaku, DPS berusaha menjaga inisiasi-inisiasi yang dilakukan tersebut melalui penerbitan opini DPS LPEI , pelaksanaan uji petik, dan diskusi pada forum Meeting DPS yang dilakukan secara rutin setiap bulannya.

Kami berharap seluruh inisiasi, komitmen dan upaya pengembangan yang dilakukan Manajemen LPEI untuk Syariah LPEI di tahun 2023 dapat terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah, dan inayah serta meridai dan menjaga kita semua di LPEI dan Negara tercinta dalam menjalankan seluruh aktivitas kita. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Indonesia. Compliance with Sharia principles and best practices has been undertaken by DPS in conjunction with all of Indonesia Eximbank's colleagues, such as in the Sharia Trade Credit Insurance (TCI) and Sharia Marine Cargo Insurance (MCI) products, to give Indonesia Eximbank both comparative and competitive advantages.

During 2023, the DPS appreciated the various initiatives taken by all levels of Indonesia Eximbank's Board of Directors and colleagues to implement and enhance the suitability of Sharia principles for Indonesia Eximbank's Sharia-based products, policies, procedures and business activities undertook by Indonesia Eximbank. In accordance with the DSN-MUI fatwa and the applicable laws and regulations relating to Indonesia Eximbank, DPS endeavours to maintain the initiatives undertaken through the issuance of DPS Indonesia Eximbank opinions, the implementation of petition tests and discussions at the DPS Meeting forum, which is held regularly every month.

We hope that all the initiatives, commitments and development efforts made by the Indonesia Eximbank management for Indonesia Eximbank Sharia in 2023 can be continued in the years ahead. May Allah Subhanahu wa Ta'ala always provide taufik, hidayah, and inayah, as well as blessings, and safeguards us all in Indonesia Eximbank and our beloved country in carrying out all our activities. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakatuh

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

Kanny Hidaya, SE.,MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

Dr. Yulizar D. Sanrego MEc
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

Kanny Hidaya, SE., MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2023 oleh Dewan Direktur

Statement of Accountability of 2023 Annual Report by the Board of Directors

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Lembaga.

We, the signatories, hereby stated that all information contained in the 2023 Annual Report of Indonesia Eximbank has been comprehensively presented and that we are fully accountable for the accuracy of the contents of the Institution's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, April 2024

DEWAN DIREKTUR
BOARD OF DIRECTORS

Rijani Tirtoso
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

Suminto
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Yon Arsal
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Kasan
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Arus Gunawan
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

D. James Rompas
Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2023 oleh Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana

Statement of Accountability of 2023 Annual Report by the Executive Director & Managing Directors

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Lembaga.

We, the signatories, hereby stated that all information contained in the 2023 Annual Report of Indonesia Eximbank has been comprehensively presented and that we are fully accountable for the accuracy of the contents of the Institution's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, April 2024

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA
EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTORS

Rijani Tirtoso
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

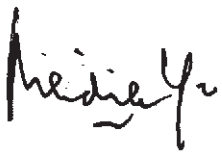

Dikdik Yustandi
Direktur Pelaksana Bisnis
Managing Director of Business

Maqin U. Norhadi
Direktur Pelaksana
Pengembangan Bisnis
Managing Director of Business Development

Agus Windiarto
Direktur Pelaksana
Keuangan, Operasional,
& Teknologi Informasi
Managing Director of Finance, Operations, & IT

Sam Malee
Direktur Pelaksana
Manajemen Risiko & Kredit
Managing Director
of Credit and Risk Management

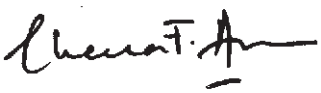

Chesna F. Anwar
Direktur Pelaksana
Sekretariat Lembaga, Kepatuhan,
& Sumber Daya Manusia
Managing Director of Corporate Secretary, Compliance, & HC

Profil Perusahaan

Company Profile

Identitas Perusahaan
Corporate Identity

Nama Perusahaan
Company's Name

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Indonesia Eximbank

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

01 September 2009

Bidang Usaha
Line of Business

Lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk melaksanakan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) melalui penyediaan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi, serta Jasa Konsultasi baik secara konvensional, maupun berdasarkan prinsip syariah baik di dalam, maupun di luar negeri.
A Financial Institution established specifically to provide the National Export Financing in the form of Financing, Guarantee and Insurance as well as Advisory Services conventionally and on sharia principle-based, domestically or overseas.

Jenis/Badan Hukum Perusahaan
Legal Status of Entity

Lembaga Keuangan Khusus yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009
Special Financial Institution established under the Act No. 2 of 2009.

Kepemilikan Saham
Share Ownership

100% milik Pemerintah Indonesia dan tidak terbagi atas saham.
100% Government-owned and not divided into shares.

Perubahan Identitas Perusahaan
Identity Changes of Entity

Sejak didirikan tanggal 1 September 2009, tidak pernah terjadi perubahan identitas seperti perubahan nama dan status hukum.
Since its establishment on 1 September 2009 there were no changes on the Company's identity, name or legal status

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully-Paid In Capital

Rp33.280.843.825.687

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp4.321.586.000.000

Bursa Efek
Stock Exchange

Obligasi LPEI dicatat dan diperdagangkan pada:
1. Bursa Efek Indonesia (IDX) dan
2. Bursa Efek Singapura (SGX)
LPEI bonds are listed and traded on:
1. Indonesia Stock Exchange (IDX); and
2. Singapore Stock Exchange (SGX)

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4957.
Act of the Republic of Indonesia No. 2 of 2009 on Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Addition of the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4957.

Kode Obligasi di BEI
Bond Codes on the IDX

BEXI

Skala Usaha
Business Scale

Jumlah Aset
Total Assets

Rp51,35

triliun | trillion

Rugi/Laba Bersih
Net Loss/Profit

(Rp18,11)

triliun | trillion

Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

Rp42,59

triliun | trillion

Jumlah Ekuitas
Total Equity

Rp8,76

triliun | trillion

Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasional
Business Network and Operational Areas

Situs Web Perusahaan
Corporate Website

www.indonesiaeximbank.go.id

Alamat E-mail Perusahaan
Corporate E-mail Address

corpsec@indonesiaeximbank.go.id

Alamat Kantor
Office Address

Prosperity Tower Lantai 1, District 8,
Sudirman Central Business District (SCBD)
Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190,
Indonesia
Tel. (62-21) 395 03600
Fax. (62-21) 395 03699

Kantor Wilayah
Regional Offices

Kantor Wilayah I
Prosperity Tower Lantai 1, District 8,
Sudirman Central Business District (SCBD)
Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190,
Indonesia
Tel. (62-21) 395 03600
Fax. (62-21) 395 03600

Kantor Wilayah II
LPEI Kantor Cabang Surakarta,
Gedung Indonesia Eximbank
Jl. Dr. Radjiman No. 457, Bumi, Laweyan,
Surakarta 57148, Jawa Tengah
Tel. : 0271-740999

Kantor Wilayah III
Intiland Tower 2nd Floor, Suite 1
Jl. Panglima Sudirman 101-103,
Surabaya 60271, Indonesia
Tel. : (62-31) 534 9382
Fax. : (62-31) 534 9383

Kantor Cabang
Branch Offices

Medan
B&G Tower, J.W. Marriott 6th Floor, Unit 607-610
Jl. Putri Hijau No. 10, Medan 20111, Indonesia
Tel. : (62-61) 800 10098
Fax. : (62-81) 800 10096

Makassar
Wisma Kalla Building 6th Floor
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar 90125,
Indonesia
Tel. : (62-411) 852 916
Fax. : (62-411) 852 917

Surakarta
Gedung Indonesia Eximbank
Jl. Dr Radjiman No. 457, Bumi, Laweyan
Surakarta 57148, Jawa Tengah
Tel. : 0271-740999

Kantor Pemasaran
Representative Offices

Balikpapan
Grand Sudirman Building
Panin Tower, Main Lobby 203
Jl. Jend. Sudirman No. 7, Balikpapan 76411,
Indonesia
Tel. : (62-542) 721 9810
Fax. : (62-542) 721 9820

Batam
Graha Pena Batam Building 7th Floor, Unit 704
Jl. Raya Batam Center, Batam 29461, Indonesia
Tel. : (62-778) 461 414
Fax. : (62-778) 460 125

Denpasar
Jl. Raya Puputan No. 160 Renon, Denpasar
80235, Indonesia
Tel. : (62-361) 262 612
Fax. : (62-361) 262 613

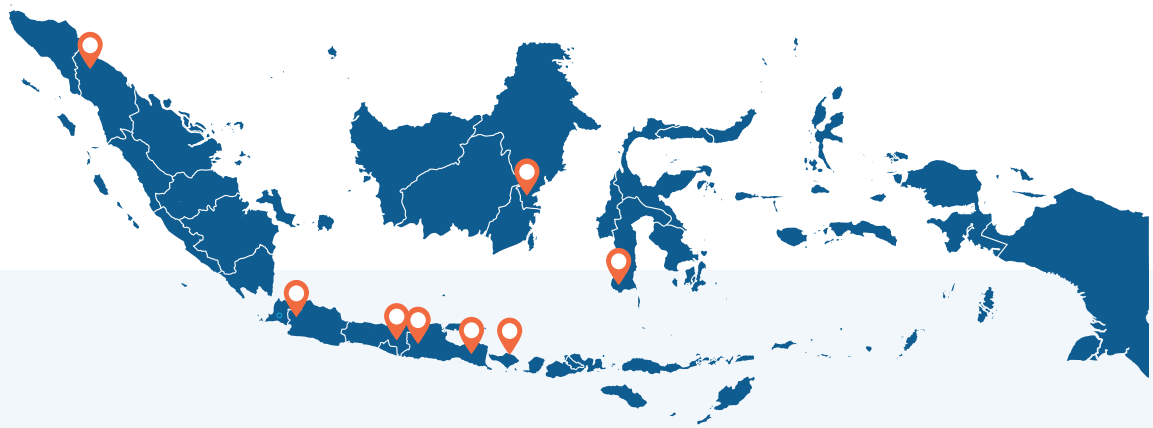

Jumlah Pegawai
Number of Employees

563

Kantor Pusat
Head Office

1

Kantor Wilayah
Regional Offices

3

Kantor Cabang
Branch Offices

3

Kantor Pemasaran
Representative Offices

3

Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History of the Company

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI" atau "Indonesia Eximbank") merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah naungan Kementerian Keuangan RI untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional.

Indonesia Eximbank is a specialised financial institution established by the Government of Indonesia as a Special Mission Vehicle (SMV) under the auspices of the Indonesian Ministry of Finance to support the implementation of national export financing activities.

Pendirian LPEI mengacu pada UU No. 2 Tahun 2009 ("UU No. 2/2009") tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dengan modal awal pembentukan ditetapkan paling sedikit Rp4 triliun. Modal tersebut merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

The establishment of Indonesia Eximbank pursuant to the Act No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank, with an initial capital of at least Rp4 trillion. The capital is a state treasury that is separated and not divided into shares.

LPEI resmi beroperasi pada tanggal 1 September 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 336/KMK.06/2009 pada tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penetapan Tanggal Operasionalisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Indonesia Eximbank officially operated on 1 September 2009 in accordance with the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 336/KMK.06/2009 on 24 August 2009 concerning the Determination of the Operationalisation of Indonesia Eximbank.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 2/2009, LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) dengan menerapkan skema pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Penyaluran PEN dapat dilakukan dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan/atau Asuransi yang diberikan kepada badan usaha termasuk perseorangan berbentuk badan hukum, maupun yang tidak berbentuk badan hukum, serta kepada badan usaha yang berdomisili di dalam, maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia dan termasuk perorangan. Selain itu, PEN yang disalurkan LPEI juga dapat dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

As mandated in article 5 paragraph (1) of Act No. 2/2009, Indonesia Eximbank functions to support the national export program through National Export Financing (PEN) by implementing financing, guarantee and insurance schemes. The distribution of PEN can be carried out in the form of Financing, Guarantee, and/or Insurance provided to business entities including individuals in the form of legal entities, as well as those that are not in the form of legal entities, as well as to business entities, including individuals, domiciled inside and outside the territory of the Republic of Indonesia. In addition, PEN channeled by Indonesia Eximbank can also be carried out in either conventional financings or Sharia-based financing.

Dalam menjalankan fungsinya, LPEI memiliki tugas untuk:

- Menyalurkan pembiayaan, penjaminan dan/atau asuransi dalam rangka ekspor, maupun menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor;
- Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional; dan
- Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Di samping melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan, LPEI juga dapat memberikan bimbingan dan Jasa Konsultasi kepada Bank, Lembaga Keuangan, Eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 2/2009.

Sebagai Lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah, organ tertinggi dalam struktur tata kelola LPEI dipimpin oleh Dewan Direktur yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI. Sementara itu pelaksana operasional LPEI menjadi tanggung jawab penuh Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana.

Sebagai lembaga yang mendapatkan amanat untuk menjadi katalis ekspor Indonesia, eksistensi LPEI di Indonesia diyakini telah berkontribusi dalam mendukung kegiatan ekspor Indonesia terutama dalam membantu para pelaku ekspor khususnya UMKM yang berorientasi ekspor agar semakin berdaya saing dengan usaha yang berkelanjutan dan dapat mendukung penguatan ekonomi nasional. Selain itu, LPEI juga terus memperluas jalinan kerja sama dengan pihak-pihak yang kredibel untuk memperkuat posisinya dalam meningkatkan bisnis asuransi untuk mendorong ekspor nasional.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA LPEI

Sejak pertama kali didirikan tanggal 1 September 2009, LPEI tidak pernah mengubah identitasnya baik dalam hal perubahan nama ataupun status hukum.

In carrying out its functions, the duties of Indonesia Eximbank are as follows:

- Disbursement of financing, guarantee and/or insurance for exports or producing goods and services and/or other businesses supporting export;
- Providing financing for the transactions or projects that falls into the category that cannot be financed by banks, but has the prospects to increase the national exports; and
- Assisting in overcoming the barriers encountered by the Banks or Financial Institutions in providing financing for Exporters that are commercially potential and/or important in Indonesia's economic development.

In addition to carrying out financing distribution, Indonesia Eximbank also provides Advisory Services to the Banks, Financial Institutions, Exporters, export goods producers, particularly in the micro, small and medium enterprises segment, and cooperatives; and carries out other activities that support the duties and authorities of Indonesia Eximbank that are in line with Act No. 2/2009.

As a specialised institution established by the Government, the sole organ of Indonesia Eximbank's governance structure is led by the Board of Directors who is responsible for formulating and establishing policies, as well as supervising the operations of Indonesia Eximbank. Meanwhile, the operational implementation of Indonesia Eximbank is the responsibility of the Executive Director. The Executive Director is assisted by a maximum of 5 (five) Managing Directors in the implementation of his/her duties.

As an institution that has the mandate to become a catalyst for Indonesian exports, Indonesia Eximbank's existence in Indonesia is believed to have contributed to supporting Indonesia's export activities, especially in helping exporters, especially export-oriented MSMEs, to be more competitive with sustainable businesses and can support the strengthening of the national economy. In addition, Indonesia Eximbank's also continues to expand its cooperation with credible parties to strengthen its position in increasing the insurance business to encourage national exports.

INFORMATION ON NAME CHANGE OF INDONESIA EXIMBANK

Since its establishment on 1 September 2009 there were no changes on the Company's identity, name or legal status.

Jejak Langkah
Milestones

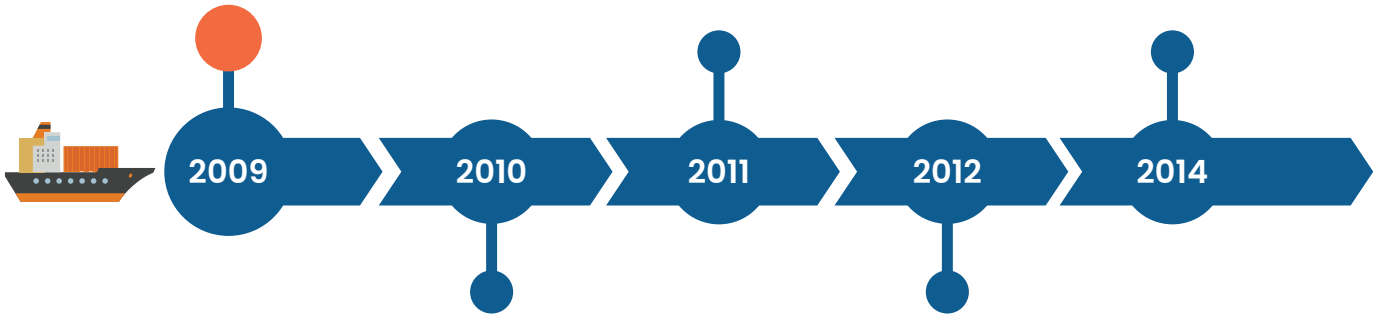

2009

Pemerintah Indonesia mendirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berdasarkan UU No. 2/2009 dan membubarkan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

The Government of Indonesia established the Indonesian Export Financing Institution (Indonesia Eximbank) under Act No. 2/2009 and dissolved PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

2010

- Penerbitan obligasi pertama LPEI, yaitu Obligasi Indonesia Eximbank I, senilai Rp3,00 triliun.
- Penerimaan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,00 triliun.

- The first bond issuance, Indonesia Eximbank I Bonds, amounted to Rp3.00 trillion.
- State Capital Participation amounted to Rp2.00 trillion.

2011

Peluncuran program Pendidikan Calon Pegawai Angkatan I sebagai salah satu strategi pemenuhan SDM Lembaga.

Launch of the first batch of Employees Candidate Education program as one of the strategies to address the Institution's HR fulfilment.

2012

- LPEI menerbitkan Euro Medium Terms Notes (EMTN) Programme 2012 Reg. S Only senilai USD500 juta.
- LPEI memberikan fasilitas *Overseas Project Financing* pertama kepada PT Waskita Karya atas proyek pembangunan bandara Suai Timor Leste.

- Indonesia Eximbank issued Euro Medium Terms Notes (EMTN) Programme 2012 Reg. S Only amounted to USD500 million.
- Indonesia Eximbank provided the first Overseas Project Financing to PT Waskita Karya for the development of Suai Timor Leste airport

2014

Penerimaan PMN sebesar Rp1,00 triliun untuk meningkatkan kapasitas kegiatan usaha LPEI dalam mendukung program ekspor nasional.

Received State Capital Participation of Rp1.00 trillion to Indonesia Eximbank to increase the capacity of its business activities in supporting the national export programs.

- Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp4,00 triliun yang terdiri atas Rp2,00 triliun untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2,00 triliun untuk penugasan khusus.
- LPEI mendapatkan Penugasan Khusus dari pemerintah sebagai berikut:
  - Pembiayaan ekspor gerbong penumpang kereta api.
  - Pembiayaan ekspor pesawat udara.
  - Mendorong ekspor ke negara kawasan Afrika.

- The government provided the State Capital Participation of Rp4.00 trillion, consisted of Rp2.00 trillion for operational capacity improvement and Rp2.00 trillion for the National Interest Account.
- Indonesia Eximbank received the National Interest Account for:
  - Export financing for the passengers' train carriages.
  - Export financing of aircrafts.
  - Fostering export to the African countries.

- LPEI menerima Penugasan Khusus Ekspor Pesawat Udara.
- Meluncurkan National Export Dashboard.
- Meluncurkan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).

- Indonesia Eximbank received the Export National Interest Account for Aircrafts.
- Launching National Export Dashboard.
- Launching University Network for Indonesia Export Development (UNIED).

2015

- LPEI meluncurkan Coaching Program for New Exporters (CPNE).
- LPEI meluncurkan produk asuransi baru, Marine Cargo Insurance untuk memberikan perlindungan atas pengiriman barang ekspor.
- Melalui program *Corporate Social Responsibility*, LPEI berkontribusi dalam Program Penghijauan Berbasis Agroforestry dengan menanam 10 ribu bibit pohon Sengon di Wonogiri, Jawa Tengah.
- Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,00 triliun kepada LPEI untuk meningkatkan kapasitas kegiatan usahanya dalam mendukung program ekspor nasional.
- LPEI menerima Penugasan Khusus Ekspor kereta ke Bangladesh.

- Indonesia Eximbank launched Coaching Program for New Exporters (CPNE).
- Indonesia Eximbank launched a new insurance product, Marine Cargo Insurance to provide protection for the delivery of export goods.
- Through its Corporate Social Responsibility, Indonesia Eximbank contributed to the Agroforestry-Based Green Program by planting 10 thousand of sengon tree seedlings in Wonogiri, Central Java.
- The Government granted the State Capital Participation of Rp1.00 trillion to Indonesia Eximbank to increase the capacity of its business activities in supporting the national export programs.
- Indonesia Eximbank received the Export National Interest Account for train carriages to Bangladesh.

2016

2017

- LPEI meluncurkan fasilitas KURBE (Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor) sebagai dukungan terhadap paket kebijakan ekonomi jilid XI.
- LPEI membuka Kantor Pemasaran di Batam dan Denpasar sebagai upaya untuk menjangkau potensi ekspor UKM di wilayah Sumatera dan Bali.
- Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp3,20 triliun yang terdiri atas Rp1,00 triliun untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2,20 triliun untuk penugasan khusus.

- Indonesia Eximbank launched the Export Oriented Small Business Loan (KURBE) facility in support of the Government's economic policy package series XI.
- Indonesia Eximbank established the Marketing at Batam and Denpasar in an effort to reach the export potential of SMEs in Sumatra and Bali.
- The Government granted the State Capital Participation of Rp3.20 trillion of which Rp1.00 trillion to increase business capacity and Rp2.00 trillion for the National Interest Accounts.

2018

- Penerimaan PMN total sebesar Rp10 triliun untuk penugasan umum, Penugasan Khusus Ekspor dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Terlibat dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi COVID-19 melalui:
  - Restrukturisasi debitur yang terdampak COVID-19
  - Program JAMINAH (Penjaminan Pemerintah)
- Penerimaan Penugasan Khusus Ekspor (NIA) dari Pemerintah, sebagai berikut:
  - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
  - UKM berorientasi ekspor
  - Industri Penerbangan
  - PKE Trade Finance

- Received State Capital Participation of Rp10 trillion for general assignments, Export National Interest Accounts and National Economic Recovery Programs.
- Engaged in Accelerating National Economic Recovery due to the COVID-19 Pandemic through:
  - Restructuring debtors affected by COVID-19
  - JAMINAH Program (Government Guarantee)
- Indonesia Eximbank received the National Interest Account for:
  - Special Economic Zones Development
  - Export-oriented SMEs
  - Aviation Industry
  - NIA Trade Finance

- **Peluncuran Project NAWASENA sebagai inisiatif strategi transformasi LPEI**
- **Penandatanganan Nota Kesepakatan antara LPEI dengan DigiAsia dan BlitzNet**
- **Peluncuran X-Learn.**

- **Launch of Project NAWASENA as an initiative of Indonesia Eximbank transformation strategy**
- **Signing of Memorandum of Agreement between LPEI and DigiAsia and BlitzNet**
- **Launch of X-Learn.**

2019

- Peresmian relokasi kantor pusat LPEI ke Prosperity Tower, SCBD, Jakarta.
- Peluncuran "Desa Devisa", program Jasa Konsultasi dalam bentuk pengembangan masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekspor, dengan Desa Devisa pertama: Desa Devisa Koperasi Kerta Semaya Samaniya (KSS) dan Desa Devisa Koperasi Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI).
- Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp2,50 triliun yang terdiri atas Rp1,50 triliun untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp1,00 triliun untuk penugasan khusus.
- LPEI menerima Penugasan Khusus Ekspor Pariwisata.

- Inauguration of the relocation of Indonesia Eximbank head office in Prosperity Tower, SCBD, Jakarta.
- The launch of "Go Export Village", an Advisory program on community development aimed at increasing exports, with the first Go Export Village: Kerta Semaya Samaniya Cooperative Go Export Village (KSS) and Indonesian People's Handicraft Industry Development Association Cooperative Go Export Village (APIKRI).
- The Government granted State Capital Participation of Rp2.50 trillion, consisted of Rp1.50 trillion to increase business capacity and Rp1.00 trillion for the National Interest Accounts.
- Indonesia Eximbank received the Export National Interest Accounts for Tourism.

2020

Penerimaan PMN total sebesar Rp5 triliun untuk penugasan umum dan Penugasan Khusus Ekspor.

Received State Capital Participation of Rp5 trillion for general assignments and Export National Interest Accounts.

2021

2022

- LPEI meluncurkan Program "Rumah Ekspor".
- LPEI mendirikan anak perusahaan pertama PT Indonesia Eximbank Prima Aset.
- LPEI meluncurkan program X-Way of Working (XWOW).
- LPEI meluncurkan *corporate culture* baru APIK (*Agile*, Profesionalisme, Integritas, Kreatif).

- Indonesia Eximbank launched "Rumah Ekspor" Program.
- Indonesia Eximbank established first subsidiary PT Indonesia Eximbank Prima Aset.
- Indonesia Eximbank launched X-Way of Working (XWOW) program.
- Indonesia Eximbank launched new corporate culture APIK (Agile, Professionalism, Integrity, Creative).

2023

Visi, Misi, & Nilai Perusahaan
Vision, Mission, & Corporate Value

Visi
Vision

Menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global.

To become an Eximbank that is credible and excels in promoting national export with high competitiveness on the global level.

Penjelasan Pernyataan Visi
- LPEI memiliki kemampuan untuk mengemban tugas dan fungsi sebagai mana diamanatkan dalam UU No. 2/2009 dan memposisikan LPEI menjadi mitra ekonomi global yang dapat dipercaya.
- LPEI ikut berperan dalam menjadikan eksportir Indonesia sebagai pelaku usaha yang disegani di tataran global, karena mampu menghasilkan produk dan jasa ekspor yang berkelas dunia.

Explanation of Vision Statement
- Indonesia Eximbank has the ability to carry out its duties and functions as mandated in Act No. 2/2009 and position Indonesia Eximbank as a trusted global economic partner.
- Indonesia Eximbank has the roles in promoting Indonesian exporters as respectful business players in the global markets with world-class export products and services.

Review Visi dan Misi
Visi dan Misi LPEI telah disetujui oleh Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI. Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan Visi, Misi, Nilai-nilai, dan Komitmen terhadap pemangku kepentingan.

Vision and Mission Review
Indonesia Eximbank's Vision and Mission have been approved by the Board of Directors and Managing Directors of Indonesia Eximbank. In 2023, there were no changes to the Vision, Mission, Values, and Commitment to stakeholders.

Misi
Mission

- **Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan.**
- **Memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia.**
- **Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya.**

- Encourage the sustainability of conducive business climate for the sustainable growth of national export.
- Provide national export financing services and consultancy services as the solution to the needs of Indonesian export.
- Improve the ability of business perpetrators, including the small and medium enterprises, to produce superior and competitive export- oriented products.

Penjelasan Pernyataan Misi

- LPEI menjadi penggerak dalam melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lain untuk menciptakan lingkungan ekspor yang kondusif guna mendukung pertumbuhan ekspor Indonesia yang berkelanjutan.
- Memberikan layanan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi bernilai tambah terhadap kebutuhan ekspor yang spesifik.
- LPEI mendapatkan mandat untuk menggerakkan pelaku usaha di Indonesia, termasuk usaha kecil dan menengah yang mampu menghasilkan produk berorientasi ekspor yang berdaya saing.

Explanation of Mission Statement

- Indonesia Eximbank is the driving force in the coordination with other government agencies in the creation of conducive export environment towards sustainable growth of Indonesia's exports.
- Providing high-quality financing, guarantee, insurance and consultation services as a value-added solution to specific export needs.

- Indonesia Eximbank has a mandate to mobilize businesses in Indonesia, including the Small and Medium Enterprise sector, to be capable of producing competitive export-oriented products.

Budaya Kerja Lembaga
Corporate Culture

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi LPEI telah dilakukan penyesuaian terhadap nilai budaya LPEI untuk dapat menjadi dasar dan acuan bagi seluruh Eximbanker dalam bersikap dan berprilaku guna mendukung dan meningkatkan kinerja dan produktivitas melalui proses penyelarasan bersama seluruh Dewan Direktur dan Manajemen serta Pejabat Struktural, yang disebut dengan *Redefining Us* melalui tahapan proses:

1. Diagnostic Findings & Condition Assessment
2. *Senior Leaders' Workshop*
3. *Leaders Workshop Detailing*
4. *Small Group Fine-tuning*
5. Persetujuan Rabom

Nilai budaya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ditetapkan dalam PDE Nomor 0010/PDE/07/2022 tentang Nilai-Nilai Budaya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia pada tanggal 11 Juli 2022. Adapun nilai budaya LPEI adalah APIK (*Agile, Professional,* Integritas, Kreatif) dengan penjelasan sebagai berikut:

To support the Institution's Vision and Mission, adjustments have been made to the Institution's cultural values. This Cultural values refers to attittude, beliefs, belief pattern and also goals in behavior to sustain work Excellence. This adjustments was through a joint alignment process of the entire Board of Directors and Management and Structural Officers, which is called Redefining Us by going through 5 stages of the process:

1. Diagnostic Findings & Condition Assessment
2. Senior Leaders' Workshop
3. Leaders Workshop Detailing
4. Small Group Fine-tuning
5. Final Approval from Management

Culture value of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/Indonesia Eximbank) has been enacted in Regulation of Executive Director concerning Nilai-Nilai Budaya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia on Number 0010/PDE/07/2022. Indonesia Eximbank culture value known as APIK (*Agile,* Profesional, Integritas, Kreatif):

Agile
Agile

Setiap Eximbanker harus bertindak secara tangkas, gesit, dan lincah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Each Eximbanker must act with agility to present service excellence to the stakeholders.

Profesional
Professional

Setiap Eximbanker harus bekerja dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi.

Each Eximbanker must work thoroughly and accurately based on the best competence, full responsibility, and high commitment.

Integritas
Integrity

Setiap Eximbanker harus berpikir, berkata, berperilaku, bertindak dengan baik dan benar, serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Each Eximbanker must think, speak, behave, act properly and correctly, and always adhere to the code of ethics and moral principles.

Kreatif
Creative

Setiap Eximbanker secara bersama-sama melakukan perbaikan dengan penciptaan gagasan atau terobosan yang solutif guna mendukung pelaksanaan mandat Lembaga.

Each Eximbanker colaborates together in order to make improvements by creating solutions or breakthrough ideas to support the implementation of the Institution's mandate.

Pada penerapannya, Budaya LPEI wajib dimengerti, dipahami, dan diterapkan dengan baik oleh setiap Eximbanker. Lebih lanjut, dalam mendukung program penguatan nilai Budaya LPEI dilakukan berdasarkan pilar-pilar penerapan Budaya LPEI antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Budaya eksekusi secara berkolaborasi
   Utamakan perilaku disiplin dan fokus dalam mengeksekusi target untuk pelaksanaan mandat Undang-undang dengan mengasah kemampuan secara tepat guna dan tepat sasaran.

2. Budaya berkinerja tinggi
   Pencapaian unggul melalui disiplin *monitoring* kinerja secara sistematis, membangun sistem penilaian kinerja yang dapat diandalkan dan objektif.

3. Budaya sadar tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan
   Disiplin taat asas, meningkatkan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional Lembaga serta membangun, budaya kesadaran terhadap risiko dan kepatuhan.

4. Budaya pembelajaran berkelanjutan
   Pedoman Perilaku yang mengedepankan pembaharuan kapabilitas yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar melalui berbagai metode, seperti *sharing knowledge, coaching* & *mentoring* dengan berbasis kompetensi.

Furthermore, to support the LPEI cultural value strengthening program, it is reffered to the pillars of Indonesia Eximbank Culture Implementation which are included in but not limited to:

1. Collaborative execution culture
   Prioritize disciplined behavior and focus on executing targets for the implementation of the mandate of the Law (Act of the Republic of Indonesia Number 2 of 2009) by honing skills in an effective and proper manner.

2. Performance driven culture
   Excellent achievement through the systematic performance monitoring discipline, building a reliable and objective performance appraisal system.

3. Governance, risk, & compliance culture
   Adherence to principles, improves compliance with the Institution's operational systems and procedures, and builds awareness culture to risk and compliance.

4. Earning culture
   A code of conduct that emphasizes renewal capabilities according to market trends and needs through various methods, such as sharing knowledge, competency-based coaching & mentoring.

Anggota Board of Management
Members of Board of Management

Anwar Harsono
Chief of Keuangan, Treasuri, dan Strategi
Chief of Finance, Treasury and Strategy

Titiek Setiyowati
Chief of Risiko Bisnis
Chief of Business Risk

I Nyoman Gede Suarja
Chief of Audit Internal
Chief of Internal Audit

Wahyu P. Wibowo
Chief of SDM, Hukum, dan Kepatuhan
Chief of HC, Legal, and Compliance

Anton Herdianto
Chief of Wilayah
Chief of Region

Bidang Usaha
Business Activities

BIDANG USAHA BERDASARKAN AMANAT UNDANG-UNDANG

Berdasarkan mandat UU No. 2/2009, LPEI dibentuk untuk mendukung Program Ekspor nasional dengan memberikan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yang terdiri dari penyediaan Pembiayaan, Penjaminan, dan/atau Asuransi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, LPEI melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a) Pembiayaan yang diberikan dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan modal kerja ekspor dan/atau pembiayaan investasi ekspor.
b) Penjaminan yang diberikan dapat berupa:
   - Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
   - Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
   - Penjaminan bagi Bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia; dan
   - Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.
c) Asuransi dapat diberikan dalam bentuk:
   - Asuransi atas risiko kegagalan ekspor;
   - Asuransi atas risiko kegagalan bayar;
   - Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau
   - Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

Selain melakukan kegiatan usaha konvensional, LPEI juga dapat memberikan PEN berdasarkan prinsip syariah.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE MANDATE OF THE LAW

As mandated by Law No. 2/2009, Indonesia Eximbank was established to support the National Export Program by providing the National Export Financing (PEN), which consists of Financing, Guarantee and/or Insurance. Therefore, the business sectors carried out are:

a) The financing disbursements are provided in the form of export working capital financing and investment export financing.
b) The guarantees are provided in the form of:
   - Guarantee for Indonesian exporters on payments received from the overseas buyer of goods and/or services;
   - Guarantee for Indonesian importer of goods and services abroad for the payment of which has been provided to Indonesian exporters to finance export contracts on the sale of goods and/or services or fulfilment of work or services carried out by the Indonesian companies;
   - Guarantee to Bank's partner in providing financing export transaction that has been provided to the Indonesian Exporters; and/or
   - Guarantee in the framework of tenders related to the implementation of projects that partly or entirely support export activities.
c) Insurances are provided in the form of:
   - Insurance to cover the risk of failure on export;
   - Insurance to cover the risk of payment failure;
   - Insurance to cover the investment by Indonesian companies abroad, and/or
   - Insurance to cover the political risk in the country's export destinations.

Other than conventional business activities, Indonesia Eximbank also provides the National Export Financing of the Sharia principles-based.

Di samping menyalurkan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi kepada nasabah, LPEI juga dapat memberikan bimbingan dan jasa konsultasi kepada Bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, serta melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor (Eximbank) di negara lain, antara lain penyediaan *Counter Guarantee* (kontra garansi), *Joint Guarantee* (penjaminan bersama), pembiayaan substitusi impor, serta pembiayaan impor bahan baku yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Tidak hanya itu, LPEI juga dapat menjalankan Penugasan Khusus Pemerintah atau *National Interest Account,* yaitu penugasan yang diberikan pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan Pembiayaan Ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pendanaan LPEI diperoleh dari:
a. Penerbitan surat berharga;
b. Pinjaman jangka pendek, menengah, dan/atau panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank dan serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam, maupun luar negeri, dan Pemerintah;
c. Hibah;
d. Penempatan dana oleh Bank Indonesia; dan
e. Penyertaan Modal Negara.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, LPEI menjalankan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2/2009.

Apart from providing financing, guarantee, and insurance to customers, Indonesia Eximbank also provides mentoring and advisory services to Banks, Financial Institutions, exporters, export goods manufacturers, as well as carries out other activities commonly conducted by the Export Financing Institution (Eximbank) in other countries, among others counter guarantee, joint guarantee, import substitution financing, as well as imports of raw materials financing implemented to meet the national needs.

Indonesia Eximbank is also able to carry out the Government Special Assignment or the National Interest Account. This is an assignment from the government to Indonesia Eximbank to provide Export Financing for transactions or projects that are commercially difficult to implement, but considered necessary by the Government to support the export policies or programs.

Indonesia Eximbank source of funds can be obtained from:
a. The issuance of securities/bonds;
b. Short-term, medium and/or long-term borrowings from foreign governments, multilateral institutions, banks and financial institutions, and the Government;
c. Grants;
d. Placements by Bank Indonesia, and;
e. Government Capital Injection

BUSINESS ACTIVITIES IN 2023

In 2023, Indonesia Eximbank carries out all its business activities in accordance with those stipulated in Act No. 2/2009.

Produk Dan Jasa
Products And Services

PEMBIAYAAN

i. Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE)
   1) PMKE
      1. PMKE Transaksional
      2. PMKE Jangka Pendek
      3. PMKE Revolving
      4. PMKE Term Loan
      5. PMKE Fixed Loan

   2) Trade Finance
      a. Trust Receipt Financing
      b. Pembiayaan Pre-Ekspor
      c. Pembiayaan Wesel Ekspor (PWE)
      d. Buyer's Credit
      e. Account Payable (AP) Financing
      f. Account Receivable (AR) Financing
      g. Supply Chain Financing
      h. *Approved Payable Financing*
      i. *Correspondent Bank Bill Discounting (CBBD)*
      j. *Auto purchase*
      k. *Documentary Collection*

   3) Non- Cash Loan/Financing
      a. Penerbitan LC/SKBDN
      b. LC/SKBDN Sight/Ussance

ii. Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE)
   a. Pembiayaan Investasi
   b. Plasma Perkebunan
   c. Plasma Pertambakan

iii. Produk Pembiayaan Lain:
   a. Buyer's Credit;
   b. Plasma Perkebunan;
   c. Plasma Pertambakan;
   d. Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE)

iv. Akad Syariah Produk Pembiayaan Ekspor Nasional, antara lain:
   a. Akad Murabahah;
   b. Akad Musyarakah;
   c. Akad Musyarakah Mutanaqishah;
   d. Akad Ijarah Munthahiya Bittamlik (IMBT);
   e. Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh;
   f. Akad Hawalah bil Ujrah; dan
   g. Akad Kafalah bil Ujrah.
   h. Akad Tabarru

FINANCING

i. Export Working Capital Financing (PMKE)
   1) PMKE
      a. PMKE Transactional
      b. PMKE Short-Term
      c. PMKE Revolving
      d. PMKE Term Loan
      e. PMKE Fixed Loan

   2) Trade Finance
      a. Trust Receipt Financing
      b. Pre-Export Financing
      c. Export Bills Financing (PWE)
      d. Buyer's Credit
      e. Account Payable (AP) Financing
      f. Account Receivable (AR) Financing
      g. Supply Chain Financing
      h. Approved Payable Financing
      i. Correspondent Bank Bill Discounting (CBBD)
      j. Auto purchase
      k. Documentary Collection

   3) Non-Cash Loan/Financing
      a. LC/SKBDN Issuance
      b. LC/SKBDN Sight/Ussance

ii. Export Investment Financing (PIE);
   a. Investment Financing
   b. Plantation Plasma;
   c. Aquaculture Plasma;

iii. Other Financing Products:
   a. Buyer's Credit;
   b. Plantation Plasma;
   c. Aquaculture Plasma;
   d. Export Oriented Microfinancing (KURBE)

iv. National Export Financing Product Sharia Contract, such as:
   a. Murabahah Contract;
   b. Musyarakah Contract;
   c. Musyarakah Mutanaqishah Contract;
   d. Ijarah Munthahiya Bittamlik (IMBT) Contract;
   e. Wakalah bil Ujrah and Qardh Contract;
   f. Hawalah bil Ujrah Contract; and
   g. Kafalah bil Ujrah Contract;
   h. Tabarru Contract.

PENJAMINAN

1. Penjaminan Proyek;
2. Jaminan Kepabeanan; dan
3. Penjaminan Kredit/Pembiayaan
   a. Sovereignity Basis
   b. Commercial Basis

ASURANSI

1. Proteksi Piutang Dagang;
2. *Marine Cargo;* dan
3. Asuransi Investasi Luar Negeri.

JASA KONSULTASI

1. Pelatihan Ekspor *(Coaching Program for New Exporter* - CPNE);
2. Marketing Handholding;
3. *Community Development* (Desa Devisa)
4. Rumah Ekspor.
5. Program Kemitraan

PROGRAM KEMITRAAN

Penugasan Khusus dan Penugasan Pemerintah Lainnya

1. PKE Penerbangan
2. Alat Transportasi
3. KEK Mandalika
4. Pariwisata SP
5. UKM
6. Kawasan
7. Trade Finance
8. Industri Farmasi
9. Penjaminan Kredit PEN
10. Penugasan Investasi Pemerintah

TATA KELOLA DHE

1. Optimus
2. Prime
3. DARE

GUARANTEE

1. Project Guarantee;
2. Custom Bond; and
3. Credit Guarantee/Financing
   a. Sovereignty Basis;
   b. Commercial Basis.

INSURANCE

1. Trade Credit Insurance;
2. Marine Cargo; and
3. Overseas Investment Insurance.

ADVISORY SERVICES

1. Export Coaching (Coaching Program for new Exporter - CPNE);
2. Marketing Handholding;
3. Community Development (Go Export Village);
4. Rumah Ekspor; and
5. Partnership Program.

PARTNERSHIP PROGRAM

National Interest Account and Other Assignments

1. PKE Aviation
2. Transportation Special Assignment
3. PKE Mandalika
4. SP Tourism
5. SME
6. Regions
7. Trade Finance
8. Pharmaceutical Industry
9. PEN Credit Guarantee
10. Government Investment Assignment

DHE GOVERNANCE

1. Optimus
2. Prime
3. DARE

Struktur Organisasi
Organization Structure

Pada bulan Januari 2024, LPEI mengeluarkan struktur organisasi yang baru berlaku efektif per 1 Februari 2024 melalui PDE No. 0001/PDE/01/2024, dengan rincian sebagai berikut:

In January 2024, Indonesia Eximbank established a new organizational structure effective as of 1 February 2024 through PDE No. 0001/PDE/01/2024, as follows:

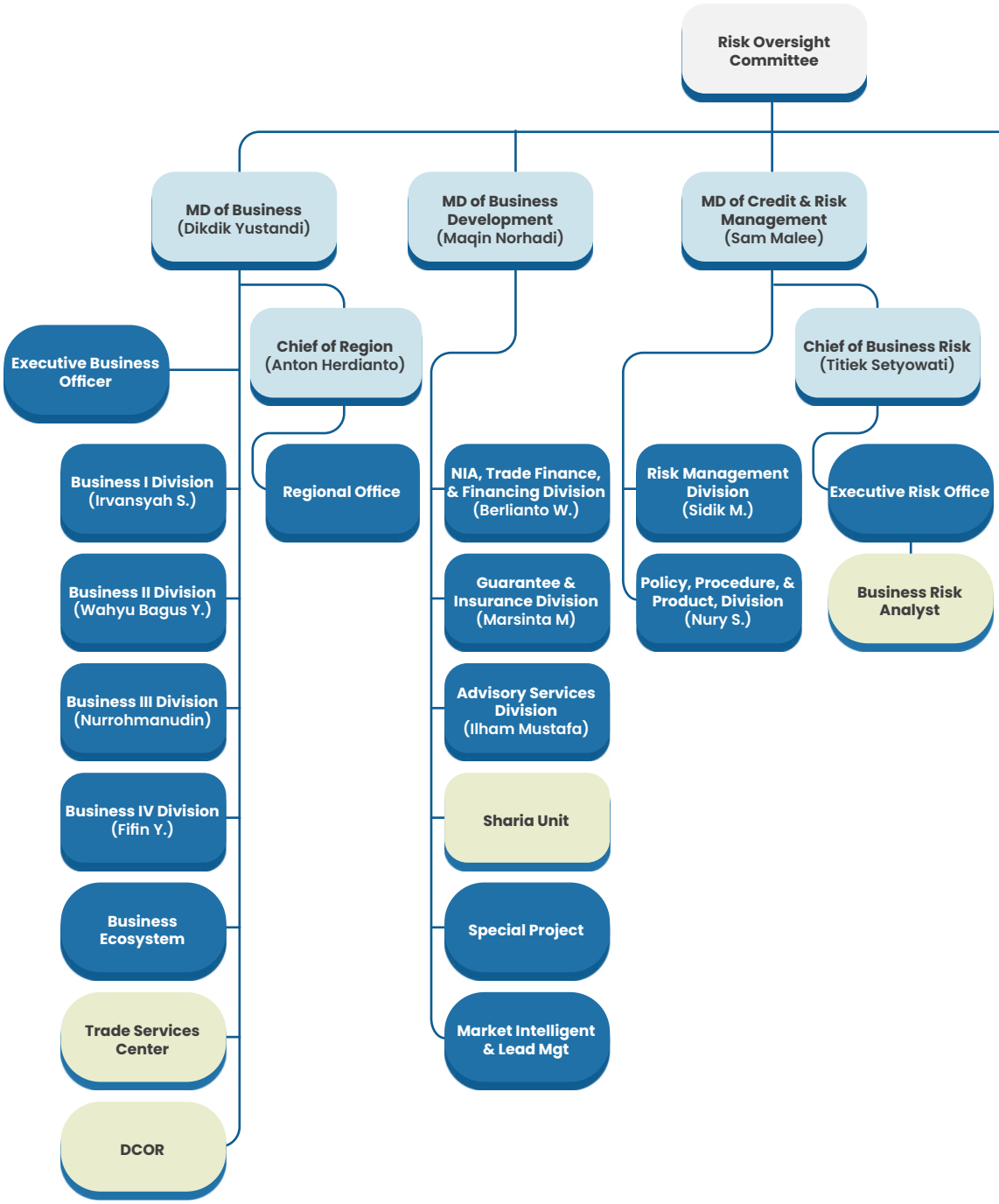

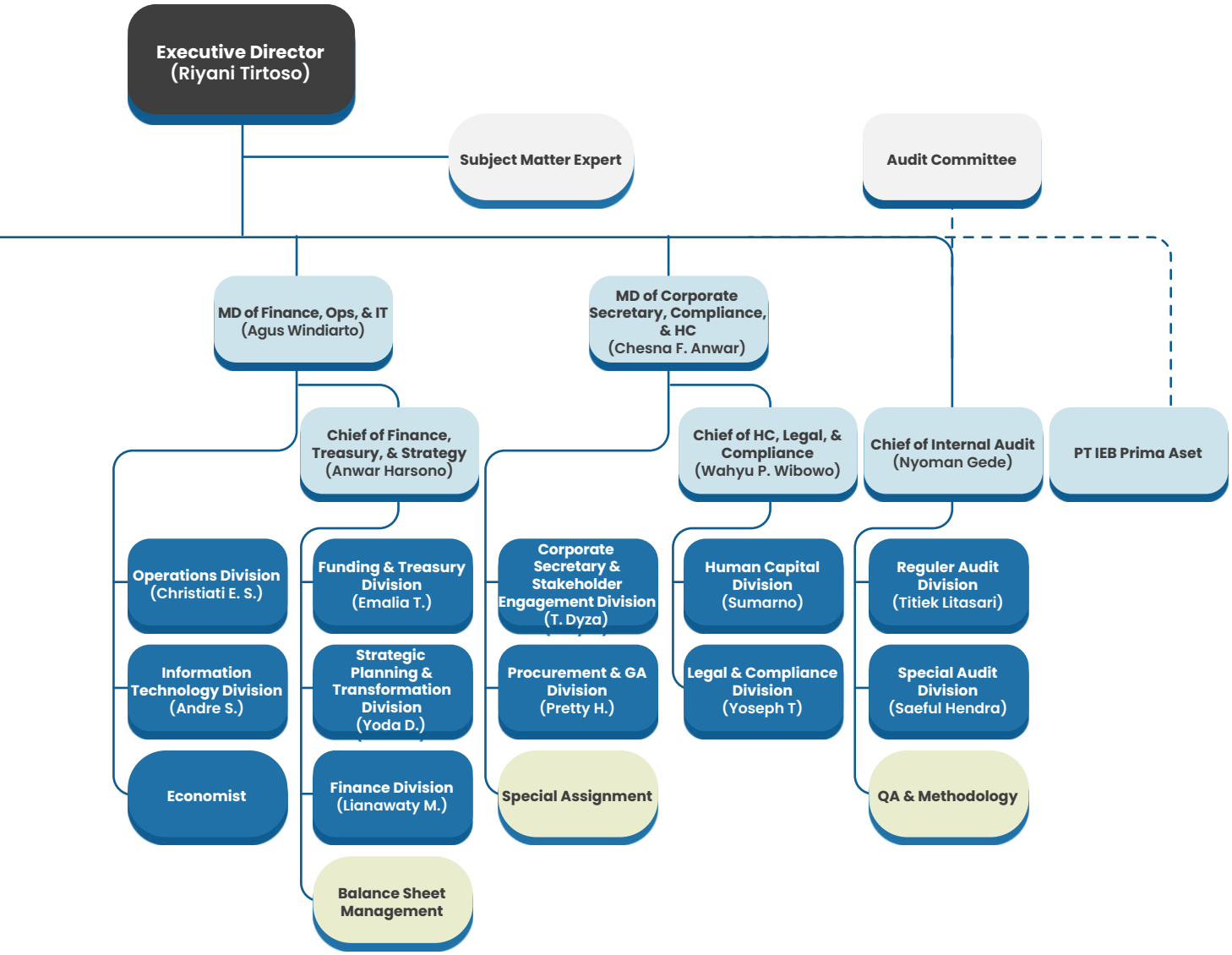
Executive Director
(Riyani Tirtoso)
Subject Matter Expert
Audit Committee
MD of Finance, Ops, & IT
(Agus Windiarto)
MD of Corporate Secretary, Compliance, & HC
(Chesna F. Anwar)
Chief of Finance, Treasury, & Strategy
(Anwar Harsono)
Chief of HC, Legal, & Compliance
(Wahyu P. Wibowo)
Chief of Internal Audit
(Nyoman Gede)
PT IEB Prima Aset
Operations Division
(Christiati E. S.)
Information Technology Division
(Andre S.)
Economist
Funding & Treasury Division
(Emalia T.)
Strategic Planning & Transformation Division
(Yoda D.)
Finance Division
(Lianawaty M.)
Balance Sheet Management
Corporate Secretary & Stakeholder Engagement Division
(T. Dyza)
Procurement & GA Division
(Pretty H.)
Special Assignment
Human Capital Division
(Sumarno)
Legal & Compliance Division
(Yoseph T)
Reguler Audit Division
(Titiek Litasari)
Special Audit Division
(Saeful Hendra)
QA & Methodology

Keanggotaan dalam Asosiasi
Membership in Associations

Berikut ini adalah daftar keanggotaan LPEI dalam asosiasi industri, termasuk namun tidak terbatas:

The following is a list of Indonesia Eximbank's memberships in industry associations, which include but not limited to:

No	Nama Forum Forum Name	Keterangan Description	Tahun Bergabung Year of Joining
1	AEBF	*Asian EXIM Banks Forum* (AEBF) merupakan forum yang beranggotakan Eximbank-Eximbank di Asia dan Oceania. Forum AEBF diadakan sebagai upaya dalam meningkatkan kerja sama dan menciptakan bagi anggota Eximbank dalam rangka meningkatkan perdagangan dan investasi global. Asian EXIM Banks Forum (AEBF) is a forum with members of Eximbanks from Asia and Oceania. AEBF Forum was established to improve collaboration and creation of global trading and investment for Eximbank members.	1999
2	G-NEXID	*Global Network of Export-Import Banks and Development Finance Institutions* (G-NEXID) merupakan organisasi *non-profit* yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral antara anggota dengan tujuan mempromosikan perdagangan dan investasi pada negara *South-South* (negara berkembang). Global Network of Export-Import Banks and Development Finance Institutions (G-NEXID) is a non-profit organization aims at improving bilateral and multilateral collaboration between members with the goals to promote the trading and investment of developed countries.	2007
3	Berne Union	*Berne Union* adalah organisasi internasional untuk lembaga global *export credit and investment insurance* (ECA) yang bertujuan untuk mendukung perkembangan produk dan skema fasilitas asuransi kredit dan asuransi investasi. Berne Union is an international organization for global export credit and investment insurance (ECA) institutions that aims a supporting the development of credit and investment insurance facilities product and scheme.	2015
4	Aman Union	Aman Union merupakan *forum commercia*l dan n*on-commercial risk insurers* dan *reinsurers* bagi negara-negara anggota *Organization of Islamic Cooperation* (OIC). Aman Union is a commercial and non-commercial forum for insurers and reinsurers of members countries of Organization of Islamic Cooperation (OIC).	2018
5	AAUI	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) merupakan organisasi yang menjadi wadah perkumpulan seluruh perusahaan asuransi umum dan reasuransi di Indonesia. Indonesian General Insurance Association (AAUI) is an organization catered as a forum of all general insurance and reinsurance companies in Indonesia.	2017
6	FCI	*Factor Chain International* (FCI) merupakan asosiasi internasional yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda yang menaungi Bank dan/atau Lembaga Keuangan pelaku usaha *Factoring* yang menawarkan solusi *cross-border receivables finance* kepada membernya untuk mengembangkan bisnis *trade finance*. Factor Chain International (FCI) is an international association with head office in Amsterdam, Holland that manage the Banks and/or Financial Institutions engage in Factoring that offers cross-border receivables finance solution to its members to develop trade finance business.	2019

Profil Dewan Direktur
Profile of the Board of Directors

Rijani Tirtoso

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

Warga Negara Indonesia, berusia 62 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian Citizenship, 62 years old, domiciled in Jakarta

Riwayat Pendidikan • Master of Business Administration, University of Illinois At Urbana-Champaign (1994); • Sarjana (S-1) Keahlian Tanah, Institut Pertanian Bogor, Indonesia (1984).	**Educational Background** • Master of Business Administration University of Illinois At Urbana-Champaign, 1994 • Bachelor Degree in Soil Experts, Institute of Agriculture Bogor, Indonesia, 1984
Dasar Hukum Pengangkatan Menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif sejak 7 Januari 2022 berdasarkan KMK No. 552/KMK.06/2021.	**Appointment Basis** Chairman of the Board of Directors and Executive Director since 7 January 2022 pursuant to KMK No. 552/KMK.06/2021.
Riwayat Karier • Anggota Dewan Direktur LPEI (Desember 2019 – 6 Januari 2022); • Project Advisor of Business Process Reenginering Bank Mandiri (2019); • SEVP Retail Risk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2019); • SEVP Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008-2015); • Group Head Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008); dan • Group Head Corporate Credit Risk Management, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2008).	**Career Background** • Member of the Board of Directors of Indonesia Eximbank (December 2019 – 6 January 2022); • Project Advisor of Business Process Reenginering Bank Mandiri (2019); • SEVP Retail Risk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2019); • SEVP Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008-2015); • Group Head Internal Audit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008); and • Group Head Corporate Credit Risk Management, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2008).
Rangkap Jabatan Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di LPEI ataupun di perusahaan lain.	**Concurrent Position** She has no concurrent positions in Indonesia Eximbank or other companies.
Hubungan Afiliasi Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	**Affiliations** She does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan Export Credits 2040: Future priorities for an evolving landscape, The ASEAN Energy Business Forum, November 20-25 2023, Sydney Australia	**Workshop and/or Training** Export Credits 2040: Future priorities for an evolving landscape, The ASEAN Energy Business Forum, 20-25 November 2023, Sydney Australia

Suminto

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian Citizenship, 51 years old, domiciled in Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Doktor di bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Ritsumeikan Asia Pacific, Jepang (2012);
- Magister Sains Keuangan Pembangunan dari Universitas Hiroshima, Jepang (2002); dan
- Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (1995).

Educational Background
- Doctorate degree in Development Economics from Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan (2012)
- Master degree in Development Finance from Hiroshima University, Japan (2002)
- Bachelor degree in International Relations from Airlangga University (1995).

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak tanggal 1 September 2018 berdasarkan KMK No. 554/KMK.06/2018 dan diangkat kembali berdasarkan KMK No. 375 Tahun 2023.

Appointment Basis
Member of the Board of Directors since 1 September 2018 pursuant to KMK No. 554/KMK.06/2018 and reappointed pursuant to KMK No. 375 Year 2023

Riwayat Karier
- Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan RI (Agustus 2021 – Oktober 2022);
- Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional (Oktober 2019-Juli 2021);
- Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara (Juli 2018- Oktober 2019);
- Kepala Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) (2020-2021);
- Direktur Eksekutif, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (2019-2021);
- Gubernur dan Ketua Dewan Gubernur, International Fund for Agricultural Development (IFAD) (2019 – 2021);
- Deputi G20 Finance (2019-2021);
- Pelaksana Tugas Direktur Pinjaman dan Hibah (2017-2018);
- Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Februari 2015–Juli 2018);
- Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian (Oktober 2014–Februari 2015);
- Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang, Direktorat Strategi dan Portofolio Utang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (Januari 2013–Oktober 2014); dan
- Berbagai penugasan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI

Career Background
- Expert Staff for Financial Services and Capital Market, Ministry of Finance of RI (August 2021-October 2022)
- Expert Staff of Finance Minister for Macro Economy and International Finance (October 2019-July 2021)
- Expert Staff of Finance Minister for Government Expenditures (July 2018-October 2019)
- Head of Secretariat, National Islamic Economic and Finance Committee (KNEKS) (2020-2021)
- Director, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (2019-2021)
- Governor and Chairman of Governing Council Bureau, International Fund for Agricultural Development (IFAD), (2019 – 2021)
- G20 Finance Deputy (2019-2021)
- Acting Director for Loans and Grants, Ministry of Finance (2017-2018)
- Director of Islamic Financing, Directorate General of Financing and Risk Management (February 2015-July 2018)
- Director of Islamic Financing, Directorate General of Debt Management (October 2014-February 2015)
- Deputy Director of Debt Planning and Strategy, Directorate General of Debt Management (January 2013-October 2014); and
- Various assignments in the Directorate General of Budget, Directorate General of Treasury, Secretariat General, Directorate General of Debt Management, and Directorate General of Financing and Risk Management.

Rangkap Jabatan
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI (November 2022 – sekarang)

Concurrent Position
Director General of Financing and Risk Management, Ministry of Finance of RI (November 2022 – present)

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliations
He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

Pendidikan dan/atau Pelatihan
Climate Change Policy: Economics and Politics, Harvard Kennedy School Executive Education, 2-6 Oktober 2023

Workshop and/or Training
Climate Change Policy: Economics and Politics, Harvard Kennedy School Executive Education, 2-6 October 2023

Yon Arsal

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian Citizenship, 51 years old, domiciled in Jakarta

Riwayat Pendidikan • Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Kobe, Jepang (2007); • Magister Ilmu Administrasi Fiscal, Universitas Indonesia (2004); • Master of Arts Economic, Universitas Kobe, Jepang (2004); • Ekonomi, Universitas Padjadjaran (1995).	**Educational Background** • Doctorate of Economics, Kobe University, Japan (2007); • Master of Science in Fiscal Administration, University of Indonesia (2004); • Master of Arts Economic, Kobe University, Japan (2004); • Bachelor of Economics, Padjadjaran University (1995).
Dasar Hukum Pengangkatan Menjabat sebagai anggota Dewan Direktur sejak 2 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 155 Tahun 2023	**Appointment Basis** Member of the Board of Directors since 2 May 2023 pursuant to KMK No. 155 Year 2023
Riwayat Karier • Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif, Lembaga Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Kementerian Keuangan RI (Mei 2026 – Januari 2020); • Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, Kementerian Keuangan RI (Februari 2016 – Mei 2016); • Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan, Kementerian Keuangan RI (September 2013 - Februari 2016); • Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan, Kementerian Keuangan RI (Juni 2011 - September 2013).	**Career Background** • Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director, Institute of Potential, Compliance and Revenue Directors, Ministry of Finance (May 2026 - January 2020); • Analyst for Tax Extensification and Intensification, Ministry of Finance (February 2016 - May 2016); • Head of Sub-directorate of Tax Potential, Ministry of Finance (September 2013 - February 2016); • Head of Policy Impact Sub-directorate, Ministry of Finance (June 2011 - September 2013).
Rangkap Jabatan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Kementerian Keuangan RI (Januari 2020 - sekarang)	**Concurrent Position** Expert Staff for Tax Compliance, Ministry of Finance (January 2020 - now)
Hubungan Afiliasi Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan pengendali.	**Affiliations** He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan Sepanjang tahun 2023 tidak mengikuti pelatihan	**Workshop and/or Training** No training during 2023

Kasan

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian Citizenship, 57 years old, domiciled in Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Doktor Ilmu Ekonomi Pertanian, di bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (2012);
- Magister Manajemen, di bidang Manajemen Internasional dari Universitas Indonesia (1998); dan
- Sarjana Pertanian di bidang Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya dari Institut Pertanian Bogor (1989)

Educational Background
- Doctorate of Agriculture Economics Science, in Agricultural Economy from Institute of Agriculture Bogor (2012)
- Master of Management, in International Management from University of Indonesia (1998)
- Bachelor of Agriculture, in Agricultural Economy and Resources from Institute of Agriculture Bogor (1989)

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai anggota Dewan Direktur sejak 8 Juni 2020 berdasarkan KMK No. 274/KMK.06/2020 dan diangkat kembali berdasarkan KMK No. 332 Tahun 2023.

Appointment Basis
Member of the Board of Directors since 8 June 2020 pursuant to KMK No. 274/KMK.06/2020 and reappointed pursuant to KMK No. 332 Year 2023

Riwayat Karier
- Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Mei 2021 – Mei 2022);
- Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan RI (April 2020 - Mei 2021);
- Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (2019 – 2020);
- Anggota Board of Directors International Rubber Consortium Limited (IRco) – The International Tripartite Rubber Council (ITRC), (2018 – 2020);
- Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI (Januari 2017 - April 2020);
- Staf Ahli bidang Hubungan Internasional, Kementerian Perdagangan RI (2016);
- Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan, Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI (2010-2016); dan
- Berbagai penugasan di lingkungan Kementerian Perdagangan RI.

Career Background
- Head of Trade Analysis and Development Agency, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (May 2021 – May 2022);
- Director General National Export Development, Ministry of Trade of RI (April 2020 - May 2021);
- Member of the Supervisory Board for the Palm Oil Plantations Fund Management Agency, (2019-2020);
- Member of Board of Directors International Rubber Consortium Limited (IRco) – The International Tripartite Rubber Council (ITRC), (2018 – 2020);
- Head of Trade Research & Development of Indonesia (2017-April 2020);
- International Expert Staff, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (2016);
- Director of Centre for Foreign Trade Policy (TREDA), Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (2010-2016); and
- Various assignments in the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia.

Rangkap Jabatan
- Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI (Juni 2022 - Sekarang).
- Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan RI (1 November 2023 – sekarang)

Concurrent Position
- Head of Trade Policy Agency, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (June 2022 - present);
- Acting Head of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (1 November 2023 - present).

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliations
He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

Pendidikan dan/atau Pelatihan
Export Credits 2040: Future priorities for an evolving landscape, The ASEAN Energy Business Forum, November 20 – 25 2023, Sydney Australia

Workshop and/or Training
Export Credits 2040: Future priorities for an evolving landscape, The ASEAN Energy Business Forum, 20-25 November 2023, Sydney Australia

Arus Gunawan

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian Citizenship, 58 years old, domiciled in Jakarta

Riwayat Pendidikan Sarjana Teknik Elektro, Institut Sains dan Teknologi Nasional (1993)	**Educational Background** Bachelor of Electrical Engineering, Institute of National Science and Technology (1993)
Dasar Hukum Pengangkatan Menjabat sebagai anggota Dewan Direktur sejak 25 November 2020 berdasarkan KMK No. 530/KMK.06/2020	**Appointment Basis** Member of the Board of Directors since 25 November 2020 pursuant to KMK No. 530/KMK.06/2020
Riwayat Karier • Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian RI (Januari 2021-April 2023); • Inspektur Jenderal, Kementerian Perindustrian RI (Maret 2020-Januari 2021); • Inspektur Wilayah I, Inspektorat Jenderal, Kementerian Perindustrian RI (November 2018-Maret 2020); • Direktur Pengembangan Wilayah Industri I, Kementerian Perindustrian RI (Desember 2016-November 2018); • Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Kementerian Perindustrian RI (Januari 2016-Desember 2016); dan • Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (2014 – 2016).	**Career Background** • Head of Industrial Human Resources Development Agency, Ministry of Industry RI (January 2021-April 2023); • Inspector General, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (March 2020-January 2021); • Inspector I, Inspectorate General, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (November 2018-March 2020); • Director of Industrial Area Development I, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (December 2016-November 2018); • Director of Machinery and Agricultural Machinery Equipment Industry, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia (January 2016-December 2016); and • Secretary to Inspectorate General, the Ministry of Industry of the Republic Indonesia (2014 - 2016).
Rangkap Jabatan Staf Ahli Menteri Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri, Kementerian Perindustrian (April 2023 – sekarang)	**Concurrent Position** Expert Staff to the Minister for Industrial Deepening, Deployment, and Equalisation, Ministry of Industry (April 2023 - present)
Hubungan Afiliasi Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	**Affiliations** He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan Sepanjang tahun 2023 tidak mengikuti pelatihan	**Workshop and/or Training** No training during 2023

D. James Rompas

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Warga Negara Indonesia, berusia 65 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian Citizenship, 65 years old, domiciled in Jakarta

Riwayat Pendidikan Sarjana Ekonomi, Universitas Jayabaya, Jakarta (1984).	**Educational Background** Bachelor Degree of Economics, University of Jayabaya, Jakarta (1984).
Dasar Hukum Pengangkatan Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur berdasarkan No. KMK 552/KMK.06/2021	**Appointment Basis** Member of the Board of Directors pursuant to KMK No. 552/KMK.06/2021
Riwayat Karier • Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (23 Desember 2019 – 6 Januari 2022); • Komisaris Utama PT IEB Prima Aset (Januari 2022 – Agustus 2023); • Wakil Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga (2006-2016); • Direktur Bisnis PT Bank Niaga (2000-2006); • Direktur Manajemen Risiko PT Bank Niaga (1999-2000).	**Career Background** • Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director, Indonesia Eximbank (23 December 2019 – 6 January 2022); • President Commissioner of PT IEB Prima Aset (January 2022 – August 2023); • Vice President Director PT Bank CIMB Niaga (2006-2016); • Business Banking Director PT Bank Niaga (2000-2006); • Risk Management Director PT Bank Niaga (1999-2000).
Rangkap Jabatan Tidak ada rangkap jabatan	**Concurrent Position** No concurrent position
Hubungan Afiliasi Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	**Affiliations** He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan Sepanjang tahun 2023 tidak mengikuti pelatihan	**Workshop and/or Training** No training during 2023

Felia Salim *

Anggota Dewan Direktur
Member of the Board of Directors

Warga Negara Indonesia, berusia 66 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian Citizenship, 66 years old, domiciled in Jakarta

Riwayat Pendidikan • The Aspen Institute Fellow, Colorado, USA (2014); • MIT Sloan School of Management Fellow, USA (2010); • Georgetown University Fellow, Washington DC, USA (2003); dan • Sarjana Fakultas Ekonomi dan Politik, Carleton University, Ottawa Canada (1983).	**Educational Background** • The Aspen Institute Fellow, Colorado, USA (2014); • MIT Sloan School of Management Fellow, USA (2010); • Georgetown University Fellow, Washington DC, USA (2003); and • Bachelor Degree of Economics and Politic Faculty, Carleton University, Ottawa Canada (1983).
Dasar Hukum Pengangkatan Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur sejak 25 Juli 2018 berdasarkan KMK No. 522/KMK.06/2018	**Appointment Basis** Member of the Board of Directors since 25 July 2018 pursuant to KMK No. 522/KMK.06/2018
Riwayat Karier • Wakil Direktur Utama/Direktur Transformasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2006–2015); • Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang bertanggung jawab memimpin Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan (2003-2005); • Ketua Komite sekretariat keuangan berlanjut sebagai Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2002); dan • Direktur Bursa Efek Jakarta (1994-1999).	**Career Background** • Vice President Director/Transformation Director of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. (2004–2015); • Independent Commissioner of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk who is responsible for leading the Risk and Compliance Management Committee (2003-2005); • Chairman of the financial secretariat committee and as Deputy Chairman of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (1999-2002); and • Director of Jakarta Stock Exchange (1994-1999).
Rangkap Jabatan Anggota Dewan Direktur dan AndGreen Fund (2017 - sekarang)	**Concurrent Position** Member of the Board of Directors and AndGreen Fund (2017 - present
Hubungan Afiliasi Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	**Affiliations** She does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan -	**Workshop and/or Training** -

*) Beliau efektif menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur LPEI hingga 19 Juni 2023
She is effective as a Member of the Board of Directors of Indonesia Eximbank until 19 June 2023

Pernyataan Independensi Komisaris Independen
Independence Statement of Independent Commissioner

LPEI merupakan lembaga keuangan khusus (*sui generis*) yang didirikan berdasarkan UU No. 2/2009 yang mengatur bahwa Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI sehingga LPEI tidak menggunakan terminologi Komisaris Independen dalam struktur organ tata kelolanya. Anggota Dewan Direktur LPEI berasal dari unsur pejabat dari instansi atau lembaga dan unsur dari dalam atau dari luar LPEI. Pada tahun 2023, seluruh anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi.

Indonesia Eximbank is a special financial institution (*sui generis*) established pursuant to Law No. 2/2009 which stipulates that the Board of Directors is the sole organ of Indonesia Eximbank so that Indonesia Eximbank does not use the terminology of Independent Commissioner in its governance organ structure. Members of the Board of Directors come from officials from agencies or institutions and elements from within or outside LPEI. In 2023, all members of the Board of Directors, Executive Directors, and Managing Directors, have signed a Statement of Independence.

Informasi Perubahan Komposisi Dewan Direktur
Information on Changes in Composition of the Board of Directors

Sepanjang tahun 2023, telah terjadi perubahan pada komposisi Dewan Direktur LPEI dengan kronologis sebagai berikut:

Throughout 2023, there were changes in the composition of the LPEI Board of Directors as follows:

Periode Period **1 Januari – 19 Juni 2023** 1 January – 19 June 2023	**Periode** Period **19 Juni – 27 Juli 2023** 19 June - 27 July 2023	**Periode** Period **27 Juli – 1 September 2023** 27 July – 1 September 2023	**Periode** Period **1 September – 23 Oktober 2023** 1 September -23 October 2023
Rijani Tirtoso Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	**Rijani Tirtoso** Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	**Rijani Tirtoso** Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	**Rijani Tirtoso** Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director
Suminto Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	**Suminto** Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	-	**Suminto** Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors
Felia Salim Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	-	-	-
Kasan Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	-	-	**Kasan** Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors
Arus Gunawan Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	**Arus Gunawan** Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	**Arus Gunawan** Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	**Arus Gunawan** Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors
Daniel James Rompas Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	**Daniel James Rompas** Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	**Daniel James Rompas** Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	**Daniel James Rompas** Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors
Yon Arsal Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	**Yon Arsal** Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	**Yon Arsal** Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	**Yon Arsal** Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors

Profil Direktur Pelaksana
Managing Directors' Profile

Dikdik Yustandi

Direktur Pelaksana
Bidang Pembiayaan
Managing Director of Financing

Warga Negara Indonesia, berusia 61 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian Citizenship, 61 years old, domiciled in Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen, Universitas Satyagama, Jakarta (1997); dan
- Sarjana Perikanan, Institut Pertanian Bogor (1987).

Educational Background
- Master of Management, University of Satyagama, Jakarta (1997); and
- Bachelor degree, Fishery Faculty, Institute of Agriculture Bogor (1987).

Dasar Hukum Pengangkatan
Menjabat sebagai Direktur Pelaksana sejak 1 September 2019 berdasarkan KDD No. 0010/KDD/08/2019

Appointment Basis
Serves as Managing Director since 1 September 2019 pursuant to KDD No. 0010/KDD/08/2019

Riwayat Karier
- Direktur Pelaksana, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (31 Agustus 2019 - Sekarang);
- Direktur Pelaksana, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (29 Maret – 31 Agustus 2019);
- Senior Executive Vice President Large Corporate Banking, Corporate Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Maret 2018 - 28 Maret 2019);
- Komisaris, Bank Syariah Mandiri (15 Januari 2018-29 Maret 2019);
- Senior Vice President Corporate Banking 2, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Februari 2016 - 26 Maret 2018);
- Director Marketing and Distribution PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Oktober 2014 - Febuari 2016);
- General Manager Bank Mandiri Group Hong Kong, Corporate Banking III, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Desember 2010 - Oktober 2014); dan
- Regional Manager VIII Surabaya, Regional Network Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Januari 2010 - November 2010).

Career Background
- Managing Director, Indonesia Eximbank (31 August 2019 - Present);
- Managing Director, Indonesia Eximbank (29 March 2019 – 31 August 2019);
- Senior Executive Vice President Large Corporate Banking, Corporate Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (March 2018 - 28 March 2019);
- Commissioner, Bank Syariah Mandiri (15 January 2018-29 March 2019);
- Senior Vice President Corporate Banking 2, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Feb 2016 - 26 March 2018);
- Director Marketing and Distribution PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (October 2014 - February 2016);
- General Manager Bank Mandiri Group Hong Kong, Corporate Banking III, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (December 2010 - October 2014); and
- Regional Manager VIII Surabaya. Regional Network Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (January 2010 - November 2010).

Rangkap Jabatan
Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di LPEI ataupun di perusahaan lain.

Concurrent Position
He has no concurrent positions in Indonesia Eximbank or other companies.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliations
He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.

Pendidikan dan/atau Pelatihan
- 23 February 2023 - Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI
- 17 April 2023 - Kick off Penyusunan Buku Putih LPEI

Workshop and/or Training
- 23 February 2023 - Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI
- 17 April 2023 - Kick off the preparation of the LPEI White Book

Maqin U. Norhadi

Direktur Pelaksana
Bidang Pengembangan Bisnis
Managing Director of Business Development

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian Citizenship, 53 years old, domiciled in Jakarta

Riwayat Pendidikan Master of Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1999)	**Educational Background** Master of Management, University of Gadjah Mada, Yogyakarta (1999)
Dasar Hukum Pengangkatan Menjabat sebagai Direktur Pelaksana sejak 12 April 2021 berdasarkan KDD No. 0004/KDD/04/2021	**Appointment Basis** Serves as Managing Director since 12 April 2021 pursuant to KDD No. 0004/KDD/04/2021
Riwayat Karier • Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (1 Januari 2022 - Sekarang); • Direktur Pelaksana II, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) (12 April 2021 - 31 Desember 2021); • Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Mei 2020 – Februari 2021); • Ketua Komite Manajemen Risiko PT Kereta Commuter Indonesia (Juni 2020 – Februari 2021); • Presiden Komisaris PT Kereta Commuter Indonesia (Juni 2020 – Februari 2021); • Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Februari 2020 – Mei 2020); dan • Regional Chief Executive Officer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (March 2016 - April 2020). • Senior Vice President Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014 – 2015) • Senior Vice President Credit Risk Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012– 2014) • Vice President Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006– 2011)	**Career Background** • Managing Director of Business Development, Indonesia Eximbank (1 January 2022 - Present) • Managing Director, Indonesia Eximbank (12 April 2021 - 31 December 2021) • Managing Director of Commerce PT Kereta Api Indonesia (Persero) (May 2020 – February 2021) • Chairman of Risk Management Committee PT Kereta Commuter Indonesia (June 2020 – February 2021) • President Commissioner PT Kereta Commuter Indonesia (June 2020 – February 2021) • Member of the Board of Commissioner PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (February 2020 – May 2020) • Regional Chief Executive Officer of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (March 2016 – April 2020) • Senior Vice President Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014 – 2015) • Senior Vice President Credit Risk Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012– 2014) • Vice President Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006 – 2011)
Rangkap Jabatan Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di LPEI ataupun di perusahaan lain.	**Concurrent Position** He has no concurrent positions in Indonesia Eximbank or other companies.
Hubungan Afiliasi Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	**Affiliations** He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan 23 February 2023 - Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI	**Workshop and/or Training** 23 February 2023 - Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI

Chesna F. Anwar

Direktur Pelaksana
Bidang Hubungan Kelembagaan
Managing Director of Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, berusia 61 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian Citizenship, 61 years old, domiciled in Jakarta

Riwayat Pendidikan Sarjana Ekonomi dari University of Maryland, Amerika Serikat (1983)	**Educational Background** Bachelor of Economics from University of Maryland, United State of America (1983)
Dasar Hukum Pengangkatan • Menjabat sebagai Direktur Pelaksana V sejak 1 September 2019 berdasarkan KDD No. 0014/KDD/08/2019; • Merangkap sebagai Sekretaris Lembaga sejak 03 Januari 2022 berdasarkan KDE No.0003/KDE/01/2022.	**Appointment Basis** • Serves as Managing Director V since 1 September 2019 pursuant to KDD No. 0014/KDD/08/2019; • Concurrently, serves as Corporate Secretary since 3 January 2022 pursuant to KDE No. 0003/KDE/01/2022
Riwayat Karier • Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (1 Januari 2022 - Sekarang); • Direktur Pelaksana V, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) (1 Mei 2019 - 31 Desember 2021); • Direktur Kepatuhan, Standard Chartered Bank Indonesia (2010-April 2019); • Direktur Internal Affairs, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2006-2010); • Direktur Kepatuhan, Citibank, N.A. (2004-2005); • Senior Compliance Officer, Citibank, N.A (Juni 2001 – Desember 2004); • Security Service Country Manager, Citibank, N.A (Januari 1997 – Mei 2001); • Operation Head, Global Securities Service, Citibank, N.A (Juli 1994 – Desember 1996); • Branch Manager Pondok Indah & Head Preferred Banking, Bank Universal (Desember 1992 – Juni 1994); • Manager Priority Banking, Standard Chartered Bank (Mei 1991 – Juni 1992); dan • Manager Custodial Services, Standard Chartered Bank (Mei 1990 – Februari 1991).	**Career Background** • Managing Director of Institutional Relations, Indonesia Eximbank (1 January 2022 - Present); • Managing Director V, Indonesia Eximbank (1 May 2019 - 31 December 2021); • Compliance Director, Standard Chartered Bank Indonesia (2010-April 2019); • Internal Affairs Director, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2006-2010); • Compliance Director, Citibank, N.A. (2004-2005); • Senior Compliance Officer, Citibank, N.A (June 2001 - December 2004); • Security Service Country Manager, Citibank, N.A (January 1997 – May 2001); • Operation Head, Global Securities Service, Citibank, N.A (July 1994 - December 1996); • Branch Manager Pondok Indah & Head Preferred Banking, Bank Universal (December 1992 - June 1994); • Manager Priority Banking, Standard Chartered Bank (May 1991 - June 1992); and • Manager Custodial Services, Standard Chartered Bank (May 1990 - February 1991).
Rangkap Jabatan Sekretaris Lembaga (2022-sekarang)	**Concurrent Position** Corporate Secretary (2022-present)
Hubungan Afiliasi Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	**Affiliations** She does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan • Pelatihan Juru Bicara Lembaga • 23 February 2023 - Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI	**Workshop and/or Training** • Institutional Spokesperson Training • 23 February 2023 - Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI

Agus Windiarto

Direktur Pelaksana
Bidang Keuangan & Operasional
Managing Director of Finance & Operations

Warga Negara Indonesia, berusia 60 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian Citizenship, 60 years old, domiciled in Jakarta

Riwayat Pendidikan • Master in Business Administration (MBA), Middlesex University, London, UK (1998); dan • Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1988).	**Educational Background** • Master of Business Administration (MBA) from Middlesex University, London, UK (1998); and • Bachelor of Economics from Krisnadwipayana University, Jakarta (1988)
Dasar Hukum Pengangkatan • Menjabat sebagai Direktur Pelaksana V sejak 1 September 2019 berdasarkan KDD No. 0012/KDD/08/2019; dan • Merangkap sebagai Plt. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko dan Kredit sejak tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan KDD No. 0003/KDD/12/2022.	**Appointment Basis** • Serves as Managing Director V since 1 September 2019 pursuant to KDD No. 0012/KDD/08/2019; and • Concurrently serving as Acting Managing Director of Credit & Risk Management since 13 December 2022 pursuant to KDD No. 0003/KDD/12/2022.
Riwayat Karier • Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (1 Januari 2022 – Sekarang); • Direktur Pelaksana III, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) (29 Maret 2019 – 31 Desember 2021); • Plt. Direktur Pelaksana LPEI (Januari-9 Maret 2019); • Kepala Divisi Corporate Planning and Finance LPEI (Januari 2018-Januari 2019); • Kepala Divisi Akunting dan SIE (Mei 2013-Desember 2017); • Plt. Kepala Divisi Tresuri (Februari 2013-April 2013); • Kepala Divisi Manajemen Perencanaan dan Strategis (2011-2013); dan • Kepala Divisi Perencanaan, Riset, dan Pengembangan (Februari 2010-Desember 2011).	**Career Background** • Managing Director of Finance & Operation, Indonesia Eximbank (1 January 2022 - Present); • Managing Director III Indonesia Eximbank (29 March 2019 - 31 December 2021); • Acting Managing Director of Indonesia Eximbank (January - 9 March 2019); • Head of Corporate Planning and Finance of Indonesia Eximbank (January 2018 - January 2019); • Head of Accounting and SIE Division (May 2013-December 2017); • Acting as Head of Treasury Division (February 2013-April 2013); • Head of Planning and Strategic Division (2011-2013); and • Head of Planning, Research and Development Division (February 2010-December 2011).
Rangkap Jabatan Plt. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko dan Kredit di LPEI (2022-sekarang)	**Concurrent Position** Acting Managing Director of Credit & Risk Management of Indonesia Eximbank (2022-present)
Hubungan Afiliasi Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	**Affiliations** He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan • 7 November 2022 - 27th CEO Annual Meeting of The Asian Exim Banks Forum (AEBF) 15-17 Nov 2022, Malaysia • 23 February 2023 - Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI	**Workshop and/or Training** • 7 November 2022 - 27th CEO Annual Meeting of The Asian Exim Banks Forum (AEBF) 15-17 Nov 2022, Malaysia • 23 February 2023 - Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI

Sam Malee

Direktur Pelaksana
Bidang Manajemen Risiko & Kredit
Managing Director of Credit & Risk Management

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, berdomisili di Jakarta
Indonesian Citizenship, 57 years old, domiciled in Jakarta

Riwayat Pendidikan Master of Commerce In Funds Management, The University of New Wales Sydney Australia (2001)	**Educational Background** Master of Commerce In Funds Management, The University of New Wales Sydney Australia (2001)
Dasar Hukum Pengangkatan Menjabat sebagai Direktur Pelaksana V sejak 14 Maret 2024 berdasarkan KDD No. 0002/KDD/03/2024.	**Appointment Basis** Serves as Managing Director V since 14 March 2024 pursuant to KDD No. 0002/KDD/03/2024.
Riwayat Karier • Group Head Corporate Risk, PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2020 - 2023) • Executive Credit Officer A-Wholesale Risk, PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2019 - 2020) • Executive Credit Officer B-Corporate Risk, PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2017 - 2019) • Department Head Corporate Risk 3 & 6, PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2016 - 2017) • Department Head (Risk Model Validator, Credit Risk Analytics, Portfolio Credit Risk Management), PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2008 - 2016)	**Career Background** • Group Head Corporate Risk, PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2020 - 2023) • Executive Credit Officer A-Wholesale Risk, PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2019 - 2020) • Executive Credit Officer B-Corporate Risk, PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2017 - 2019) • Department Head Corporate Risk 3 & 6, PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2016 - 2017) • Department Head (Risk Model Validator, Credit Risk Analytics, Portfolio Credit Risk Management), PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. (2008 - 2016)
Rangkap Jabatan Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di LPEI ataupun di perusahaan lain.	**Concurrent Position** He has no concurrent positions in Indonesia Eximbank or other companies.
Hubungan Afiliasi Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Direktur, anggota Direktur Pelaksana lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	**Affiliations** He does not have any affiliate relationships with members of the Board of Directors, members of the Executive Directors or the Controlling and Major Shareholders.
Pendidikan dan/atau Pelatihan -	**Workshop and/or Training** -

Informasi Perubahan Komposisi Direktur Pelaksana
Information on Changes in the Composition of Managing Directors

Selama tahun buku 2023, tidak terdapat perubahan pada susunan atau komposisi Direktur Pelaksana LPEI karena alasan apapun.

During the financial year 2023, there was no change in the composition of Indonesia Eximbank's Managing Director for any reason.

Profil Manajemen Senior
Profile of Senior Management

Salomi Adriana

Secondment pada
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)
Secondment at PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun, berdomisili di Jakarta	Indonesian Citizenship, 53 years old, domiciled in Jakarta
Berlatar pendidikan Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994).	She holds a Master of Management from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1997) and a Bachelor of Economics from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1994).
Beliau mulai bergabung di LPEI sejak tahun 2009 dan diangkat sebagai manajemen senior berdasarkan KDE No.: KDE 0009/KDE/02/2022 sejak 1 Januari 2022.	She joined Indonesia Eximbank in 2009 and appointed as senior management based on KDE No. KDE 0009/KDE/02/2022 since 1 January 2022: KDE 0009/KDE/02/2022 since 1 January 2022.
Beliau sudah mengikuti pelatihan Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI.	She has attended the Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI training.

Anwar Harsono

Chief of Finance, Treasury, & Strategy

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, berdomisili di Jakarta.	Indonesian citizen, 51 years old, domiciled in Jakarta.
Berlatar pendidikan Magister Finance dari Cleveland State University (2003) dan Sarjana Accounting dari Universitas Trisakti, Jakarta (1997).	He holds a Master of Finance from Cleveland State University (2003) and a Bachelor of Accounting from Trisakti University, Jakarta (1997)
Beliau mulai bergabung di LPEI sejak tahun 2020 dan diangkat sebagai manajemen senior berdasarkan KDE 0064/KDE/09/2020 sejak 1 Oktober 2020.	He joined Indonesia Eximbank in 2020 and appointed as senior management based on KDE No. 0064/KDE/09/2020 since 1 October 2020.
Beliau sudah mengikuti pelatihan Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI dan Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko.	He has attended the Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI training and Refreshment of Risk Management Certification.

Wahyu P. Wibowo

Chief of HC, Legal, & Compliance

Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun, berdomisili di Jakarta.	Indonesian citizen, 59 years old, domiciled in Jakarta.
Berlatar pendidikan S2 Strategic Management dari Konstanz University (2004), S2 Manajemen dari Swiss German University (2004), dan S1 Social Philosophy dari STF Driyarkara Jakarta (1991).	He holds a Master of Strategic Management from Konstanz University (2004), a Master of Management from Swiss German University (2004), and a Bachelor of Social Philosophy from STF Driyarkara Jakarta (1991).
Beliau mulai bergabung di LPEI sejak tahun 2020 dan diangkat sebagai manajemen senior berdasarkan PJ.0030/HCH/02/2022 (17 Februari 2022 – 16 Februari 2025).	He joined Indonesia Eximbank in 2020 and appointed as senior management based on PJ.0030/HCH/02/2022 (17 February 2022 - 16 February 2025).
Beliau sudah mengikuti pelatihan Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI, Sosialisasi Aku Anti Korupsi, People Matters TevhHR Pulse Indonesia, HR & Workplace Indonesia Summit 2023, dan Sosialisasi mengenai Pencegahan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan.	He has attended the Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI training, socialization of Aku Anti Korupsi, People Matters TevhHR Pulse Indonesia, HR & Workplace Indonesia Summit 2023, and Socialization on Prevention of Financial Services Sector Crime.

Titiek Setiyowati

Chief of Business Risk

Warga Negara Indonesia, berusia 61 tahun, berdomisili di Jakarta.	Indonesian citizen, 61 years old, domiciled in Jakarta.
Berlatar pendidikan Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Jember, Jawa Timur (1989).	She holds a Bachelor of Agricultural Social Economics from Jember University, East Java (1989).
Beliau mulai bergabung di LPEI sejak tahun 2021 dan diangkat sebagai manajemen senior berdasarkan PJ No: PJ.0086/HCH/12/2022 (6 Desember 2022 – 31 Desember 2024).	She joined Indonesia Eximbank in 2021 and appointed as senior management based on PJ No. 0086/HCH/12/2022 (6 December 2022 - 31 December 2024).
Beliau sudah mengikuti pelatihan ERM dan Cyber Security How To Mitigate and Protect, Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko, Closing Execution Gap With The 4 Diciplines of Execution for BOM LPEI, Sosilisasi Aku Anti Korupsi, Credit Skill - End To End Proses Pembiayaan, dan ESG – Risk Management Addressing Key Challenges in Climate Change.	She has attended ERM and Cyber Security How To Mitigate and Protect training, Risk Management Certification Refreshment, Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI training, socialization of Aku Anti Korupsi, Credit Skill - End To End Financing Process, and ESG - Risk Management Addressing Key Challenges in Climate Change.

I Nyoman Gede Suarja

Chief of Internal Audit

Warga Negara Indonesia, berusia 62 tahun, berdomisili di Jakarta.	Indonesian citizen, 62 years old, domiciled in Jakarta.
Berlatar pendidikan S2, Manajemen, Universitas Gadjah Mada (1999) dan S1, Economy, Universitas Brawijaya (1987).	He holds a Master of Management from Gadjah Mada University (1999) and a Bachelor of Economics from Brawijaya University (1987).
Beliau mulai bergabung di LPEI sejak tahun 2021 dan diangkat sebagai manajemen senior berdasarkan PJ No: PJ.0146.01/HCH/12/2023 (1 Januari 2024 – 31 Maret 2024).	He joined Indonesia Eximbank in 2021 and appointed as senior management based on PJ No. 0146.01/HCH/12/2023 (1 January 2024 - 31 March 2024).
Beliau sudah mengikuti pelatihan Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI dan Sosialisasi Aku Anti Korupsi, BARa Risk Forum "Perbankan Indonesia dalam mendukung Indonesia menuju Low Carbon Economy".	He has attended in Closing Execution Gap with the 4 Disciplines of Execution for BOM LPEI and socialization of Aku Anti Korupsi, BARa Risk Forum "Perbankan Indonesia dalam mendukung Indonesia menuju Low Carbon Economy".

Anton Herdianto

Chief of Region

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun, berdomisili di Jakarta.	Indonesian citizen, 55 years old, domiciled in Jakarta.
Berlatar pendidikan S2, Keuangan & Akuntansi, Universitas Indonesia (2001) dan S1, Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1993).	He holds a Master of Finance & Accounting, University of Indonesia (2001) and a Bachelor of Accounting, Universitas Padjadjaran (1993).
Beliau mulai bergabung di LPEI sejak tahun 2022 dan diangkat sebagai manajemen senior berdasarkan KDE No.: KDE 0041/KDE/06/2022.	He joined Indonesia Eximbank since 2022 and appointed as senior management based on KDE No.: KDE 0041/KDE/06/2022.
Beliau sudah mengikuti pelatihan Penguatan Pemahaman Gratifikasi Sosialisasi Aku Anti Korupsi dan Credit Skill - End To End Proses Pembiayaan.	He has attended training on Strengthening Gratification Understanding, socialization of Aku Anti Korupsi and Credit Skill - End To End Financing Process.

Komposisi Manajemen Senior per 1 Februari 2024

Senior Management Composition as of 1 February 2024

No.	Nama, Umur Name, Age	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Jenjang Pendidikan Education
1.	Titiek Litasari, 51	Kepala Divisi Audit Umum Reguler Audit Division Head	1 Januari 2021 1 January 2021	S2, Manajemen Keuangan Master Degree, Financial Management
2.	Saeful Hendra, 44	Kepala Divisi Audit Khusus Special Audit Division Head	2 Juli 2021 2 July 2021	S2, Bisnis Master Degree, Business
3.	Andre Sucahya, 41	Kepala Divisi Teknologi Informasi Information Technology Division Head	1 Oktober 2022 1 October 2022	S1, Teknologi Informasi Bachelor Degree, Information Technology
4.	Christiati E. Sianipar, 55	Kepala Divisi Operasional Operations Division Head	28 Mei 2021 28 May 2021	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting
5.	Lianawaty Mihardja, 44	Kepala Divisi *Finance* Finance Division Head	26 Oktober 2021 26 October 2021	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accountancy
6.	Emalia Tisnamisastra, 52	Kepala Divisi Pendanaan & Tresuri Funding & Treasury Division Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S1, Ekonomi Bachelor Degree, Economics
7.	Yoda Ditria, 42	Kepala Divisi *Perencanaan Strategi & Transformasi* Strategic Planning & Transformation Division Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S2, Manajemen Master Degree, Management
8.	Nury Sriandjani, 57	Kepala Divisi Prosedur, Kebijakan, & Produk Policy, Procedure, Product Division Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S2, Manajemen Internasional Master Degree, International Management
9.	Sidik Mahanda, 42	Kepala Divisi *Manajemen Risiko* Risk Management Division Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S2, Manajemen Master Degree, Management
10.	Farid Maruf, 60	Eksekutif Risiko Executive Risk Officer	1 Februari 2024 1 February 2024	S1, Pertanian Bachelor Degree, Agricultural
11.	Firdaus Effendi, 43	Eksekutif Risiko Executive Risk Officer	1 Februari 2024 1 February 2024	S1, Manajemen Bachelor Degree, Management
12.	Roza Rita Retta Hutabarat	Eksekutif Risiko Executive Risk Officer	1 Februari 2024 1 February 2024	
13.	Heru Budiyanto	Eksekutif Risiko Executive Risk Officer	1 Februari 2024 1 February 2024	
14.	Suharyanto, 58	Head Spesialis Ekosistem Bisnis Business Ecosystem Head Specialist	1 Februari 2024 1 February 2024	S2, Manajemen Master Degree, Management
15.	Irvansyah Setiady, 36	Kepala Divisi Bisnis I Business I Division Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S2, Keuangan Master Degree, Finance
16.	Wahyu Bagus Yuliantok, 38	Kepala Divisi Bisnis II Business II Division Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S1, Teknik Sipil Bachelor Degree, Civil Engineering
17.	Nurrohmanudin, 39	Kepala Divisi Bisnis III Business III Division Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S2, Ekonomi Master Degree, Economy
18	Fifin Yolanda E. Tan, 44	Kepala Divisi Bisnis IV Business IV Division Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S2, Manajemen & Finance Master Degree, Management & Finance
19	Sofyan Irianto N., 59	Head Spesiali Eksekutif Bisnis Executive Business Officer Head Specialist	1 Februari 2024 1 February 2024	S2, Manajemen Master Degree, Management
20.	Ninik Martini, 57	Head Spesiali Eksekutif Bisnis Executive Business Officer Head Specialist	1 Februari 2024 1 February 2024	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accountancy

No.	Nama, Umur Name, Age	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Jenjang Pendidikan Education
21.	Damianus Ledjo Hufat, 60	Head Spesiali Eksekutif Bisnis Executive Business Officer Head Specialist	1 Februari 2024 1 February 2024	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting
22.	Alexander Halim, 47	Kepala Kantor Area Medan Medan Area Office Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting
23.	R. Bambang Sadnur Cahyo, 56	Kepala Kantor Wilayah I Region I Office Head	1 Juli 2022 1 July 2022	S2, Manajemen Master Degree, Management
24.	Irwan Prasetiyawan, 45	Kepala Kantor Wilayah II Region II Office Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S1, Manajemen Bachelor Degree, Management
25.	Ahmad Bambang Bintoro, 57	Kepala Kantor Wilayah III Region III Office Head	1 September 2023	S2, Manajemen Bachelor Degree, Management
26.	Ilham Mustafa, 40	Kepala Divisi Jasa Konsultasi Advisory Services Division Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S1, Hukum Bachelor Degree, Legal
27.	Marsinta Mutiara Marpaung, 49	Kepala Divisi Penjaminan & Asuransi Guarantee & Insurance Division Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S1, Perbankan Bachelor Degree, Banking
28.	Rini Satriani, 40	Head Spesialis Intelijen Pasar & Manajemen Prospek Market Intelligence & Lead Management Head Specialist	1 Februari 2024 1 February 2024	Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Master Degree, Economics Planning and Development Policy
29.	Berlianto Wibowo, 39	Kepala Divisi PKE, Pembiayaan Perdagangan, & Pembiayaan NIA Trade Finance, & Financing Division Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S1, Manajemen Bisnis Bachelor Degree, Business Management
30.	Saur Maria Sidabutar, 52	Head Spesialis Proyek Khusus Special Project Head Specialist	1 Februari 2024 1 February 2024	S2, Public Relations Master Degree, Public Relations
31.	T. Dyza Rovina Aziz Rochadi, 52	Kepala Divisi Sekretariat Lembaga & Hubungan Kelembagaan Corporate Secretary & Stakeholder Engagement Division Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S2, Keuangan dan Perbankan Master Degree, Finance and Banking
32.	Pretty Halim, 49	Kepala Divisi Pengadaan & Umum Procurement & GA Division Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S2, *Applied Finance* Master Degree, Applied Finance
33.	Komarruzaman, 54	Head Spesialis Penugasan Khusus Special Assignment Head Specialist	1 Februari 2024 1 February 2024	S3, Ekonomi Doctorate Degree, Enonomics
34.	Sumarno, 52	Kepala Divisi *Sumber Daya Manusia* Human Capital Division Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S2, Ilmu Manajemen Master Degree, Management Science
35.	Yoseph Tri Purnomosidi, 54	Kepala Divisi Hukum & Kepatuhan Legal & Compliance Division Head	1 Februari 2024 1 February 2024	S2, Manajemen Master Degree, Management
36.	Rusdi Dahardin, 58	Head Spesialis Eksekutif Risiko Executive Risk Officer Head Specialist	1 Februari 2024 1 February 2024	S1, Akuntansi Bachelor Degree, Accounting
37.	Rudi Rinardi, 51	Head Spesialis Penagihan & Penjualan Aset I Collection & Asset Sales I Head Specialist	1 Februari 2024 1 February 2024	S1, Administrasi Niaga Bachelor Degree, Commerce Administration
38.	Basa Nova Agustina Marpaung, 36	Head Spesialis Penagihan & Penjualan Aset I Collection & Asset Sales I Head Specialist	1 Februari 2024 1 February 2024	S2, Manajemen Master Degree, Management
39.	Onot Sujatmiko, 42	Head Spesialis Pencarian Investor & Restrukturisasi Investor Finding & Restructurization Head Specialist	1 Februari 2024 1 February 2024	S1, Ekonomi Manajemen Bachelor Degree, Economy Management

Demografi Karyawan
Employees Demography

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition Based on Gender

Jenis Kelamin	2022 Orang | Person	2023 Orang | Person	Gender
Laki-laki	327	322	Male
Perempuan	222	241	Female
Jumlah Pegawai	**549**	**563**	**Total Employees**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan
Employee Composition Based on Position

Jabatan	2022 Orang | Person	2023 Orang | Person	Position
Senior Executive Vice President	7	6	Senior Executive Vice President
Kepala Divisi/Kepala Kantor Wilayah	44	38	Division Head
Kepala Departemen	114	110	Department Head
Eksekutif	233	244	Executives
Pelaksana	151	165	Executors
Jumlah Pegawai	**549**	**563**	**Total Employees**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia
Employee Composition Based on Age

Jabatan	2022 Orang | Person	2023 Orang | Person	Position
X & Baby Boomers	75	134	X & Baby Boomers
Millenials & Gen Z	474	429	Millenials & Gen Z
Jumlah Pegawai	**549**	**563**	**Total Employees**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition Based on Education

Tingkat Pendidikan	2022 Orang | Person	2023 Orang | Person	Education
Doktor	1	1	Doctorate
Master	144	144	Master Degree
Sarjana	403	417	Bachelor Degree
Diploma	1	1	Diploma
Jumlah Pegawai	**549**	**563**	**Total Employee**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan
Employee Composition Based on Employment Status

Status Ketenagakerjaan	2022 Orang | Person	2023 Orang | Person	Employment Status
Tetap	516	515	Permanent
Probation	4	6	Probation
PKWT	29	42	PKWT
Jumlah Pegawai	**549**	**563**	**Total Employees**

Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

Komposisi Pemegang Saham per 1 Januari 2023
Shareholder Composition as of January 1, 2023

Pemegang Saham Shareholders	**Jumlah Saham** Number of Shares	**Kepemilikan Secara Langsung** Direct Ownership (%)	**Kepemilikan Secara Tidak Langsung** Indirect Ownership (%)
Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham Shareholder Owns 5% or More Shares			
Pemerintah Republik Indonesia Government of RI	LPEI tidak terbagi atas saham No shares allocation	100%	
Kelompok Pemegang Saham Masyarakat yang Memiliki Kurang Dari 5% Saham Public Shareholders Who Have Less Than 5% Shares			
Masyarakat (di bawah 5%) Public (below 5%)	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Memiliki Saham Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners Owning Shares			
Dewan Direktur/fungsi Dewan Komisaris Board of Directors/Board of Commissioners	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Direktur Pelaksana/fungsi Direksi Managing Directors/ Board of Directors function	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Total		**100%**	

Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2023
Shareholder Composition as of December 31, 2023

Pemegang Saham Shareholders	**Jumlah Saham** Number of Shares	**Kepemilikan Secara Langsung** Direct Ownership (%)	**Kepemilikan Secara Tidak Langsung** Indirect Ownership (%)
Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham Shareholder Owns 5% or More Shares			
Pemerintah Republik Indonesia Government of RI	LPEI tidak terbagi atas saham No shares allocation	100%	
Kelompok Pemegang Saham Masyarakat yang Memiliki Kurang Dari 5% Saham Public Shareholders Who Have Less Than 5% Shares			
Masyarakat (di bawah 5%) Public (below 5%)	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Memiliki Saham Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners Owning Shares			
Dewan Direktur/fungsi Dewan Komisaris Board of Directors/Board of Commissioners	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Direktur Pelaksana/fungsi Direksi Managing Directors/ Board of Directors function	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Total		**100%**	

Kepemilikan Saham Secara Langsung maupun Tidak Langsung oleh Anggota Dewan Direktur dan Anggota Direktur Pelaksana pada Posisi 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023

Tidak ada satupun anggota Direktur Pelaksana ataupun anggota Dewan Direktur LPEI yang tercatat sebagai pemegang saham LPEI baik secara langsung maupun tidak langsung per posisi 1 Januari 2023 dan 31 Desember 2023.

Direct or Indirect Shareholding by Members of the Board of Directors and Members of the Managing Director as of 31 December 2023 and 1 January 2023

None of the members of the Managing Director or members of the Board of Directors of Indonesia Eximbank are listed as shareholders of Indonesia Eximbank either directly or indirectly as of 1 January 2023 and 31 December 2023.

Komposisi Pemegang Saham berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2023
Shareholders Composition by Classification as of 31 December 2023

Klasifikasi Classification	**Jumlah Pemegang Saham** Number of Shareholders	**Persentase** Percentage
Kepemilikan institusi lokal Local institutional ownership	-	-
Kepemilikan institusi asing Foreign institutional ownership	-	-
Kepemilikan individu lokal Local individual ownership	-	-
Kepemilikan individu asing Foreign individual ownership	-	-

Informasi Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Hingga Pemilik Individu

Information on Major and/or Controlling Shareholders, Either Directly or Indirectly Up to Individual Owners

Pemegang saham mayoritas LPEI adalah Pemerintah Republik Indonesia 100% (seratus persen) yang modalnya tidak terbagi atas saham.

The majority shareholder of Indonesia Eximbank is the Government of the Republic of Indonesia 100% (one hundred percent) whose capital is not divided into shares.

Struktur Grup LPEI
Grup Structure of Indonesia Eximbank

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

IEB
PRIMA ASET

Hingga berakhirnya tahun 2023, LPEI memiliki 1 (satu) entitas anak yang menjadi bagian dari portofolio Lembaga.

Until end of 2023, Indonesia Eximbank has 1 (one) subsidiary that is part of the Institution's portfolio.

Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama, dan Penyertaan Saham Lainnya

Subsidiaries, Associated Companies, Joint Ventures, and Other Equity Investments

Entitas Anak

Hingga akhir tahun pelaporan 2023, LPEI memiliki 1 (satu) entitas anak perusahaan bernama PT IEB Prima Aset yang didirikan pada tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT IEB Prima Aset disingkat PT IEBPA No. 154 di Jakarta dan persetujuan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0081370. Ah.01.01. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT IEB Prima Aset pada tanggal 20 Desember 2021.

Penyertaan modal PT IEB Prima Aset telah disetujui oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 6 Desember 2021 melalui Surat Keputusan No. S-1097/MK.06/2021 dengan nilai Rp50 miliar. Dana tersebut rencananya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional PT IEB Prima Aset.

PT IEB Prima Aset bergerak di bidang jasa konsultasi, termasuk konsultasi atas kegiatan yang berorientasi ekspor. Kepemilikan LPEI pada PT IEB Prima Aset mencapai 99,98%, sementara sisa kepemilikan sebesar 0,02% dimiliki oleh Koperasi Konsumen Pegawai LPEI.

Subsidiaries

Until the end of reporting year 2023, Indonesia Eximbank has 1 (one) subsidiary named PT IEB Prima Aset which was established on December 17, 2021 based on the Deed of Establishment of Limited Liability Company PT IEB Prima Aset abbreviated as PT IEBPA No. 154 in Jakarta and approval of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number Ahu-0081370.Ah.01.01. of 2021 regarding the Ratification of the Establishment of Limited Liability Company PT IEB Prima Aset on 20 December 2021.

PT IEB Prima Asset's capital injection has been approved by the Minister of Finance on 6 December 2021, No S-1097/MK.06/2021 amounted to Rp50 billion. This fund will be used to finance the PT IEB Asset's operational activities.

PT IEB Prima Asset is engaged in consulting services, including consulting on export-oriented activities. LPEI ownership in PT IEB Prima Asset is 99.98%. The remaining 0.02% ownership is owned by the LPEI Employee Consumer Cooperative.

Nama Perusahaan Name of Company	PT IEB Prima Aset
Alamat Address	Gedung Prosperity lantai 33 District 8, SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
Bidang Usaha Line of Business	Jasa konsultasi, termasuk konsultasi atas kegiatan yang berorientasi ekspor Advisory services, including advisory on export-oriented activities
Kepemilikan Saham Share Ownership	· LPEI (99,98%); · Koperasi Konsumen Pegawai LPEI (0,02%). · PT Eximbank (99.98%) · PT Eximbank Employee Consumer Cooperative (0.02%)
Jenis Badan Hukum Type of Legal Entity	Perseroan Terbatas (PT)
Total Aset per 31 Desember 2023 Total Assets as of 31 December 2023	Rp51,35 triliun
Status Operasi Operational Status	Beroperasi In operation

Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Hingga akhir 2023, LPEI tidak memiliki entitas asosiasi dan ventura bersama.

Associates and Joint Ventures

Until the end of 2023, Indonesia Eximbank does not have any associate entities and joint ventures.

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham
Share Issuance and Listing Chronology

Hingga periode akhir tahun buku 2023, LPEI tidak pernah menerbitkan saham di bursa efek manapun sehingga informasi mengenai kronologis penerbitan dan pencatatan saham tidak relevan diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2023.

Until the end of the 2023 financial year, Indonesia Eximbank has never issued shares on any stock exchange so that information regarding the chronology of issuance and listing of shares is not relevant to be disclosed in the 2023 Annual Report and Sustainability Report.

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Bersifat Utang
Chronology of Issuance and Listing of Debt Securities

Selama tahun 2023, LPEI tidak melakukan penerbitan efek bersifat utang. Adapun *outstanding* efek miliki LPEI per tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

Throughout 2023, Indonesia Eximbank did not issue any debt securities. The outstanding securities owned by Indonesia Eximbank as of financial year 2023 are as follows:

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang *Outstanding* per 31 Desember 2023 Total Outstanding as of 31 December 2023 (Rp Miliar | Rp Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
Obligasi dalam mata uang Rupiah | Bonds denominated in Rupiah								
1.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds III Phase IV of 2017	D	1.007	9,20%	23-Feb-17	23-Feb-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	1.266	9,40%	23-Feb-17	23-Feb-27	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds III Phase V of 2017	C	1.706*	8,25%	15-Aug-17	15-Aug-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
3.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds III Phase VI of 2018	C	206	6,90%	14-Feb-18	14-Feb-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
4.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase I of 2018	C	1.756	8,30%	06-Jun-18	6-Jun-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
5.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase II of 2018	D	1.324	8,75%	05-Sep-18	5-Sep-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang *Outstanding* per 31 Desember 2023 Total Outstanding as of 31 December 2023 (Rp Miliar | Rp Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
6.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase III of 2018	D	380	9,75%	08-Nov-18	8-Nov-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
7.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase IV of 2019	C	1.473**	8,90%	23-Apr-19	23-Apr-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	278	9,25%	23-Apr-19	23-Apr-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	349	9,50%	23-Apr-19	23-Apr-29	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		F	625	9,80%	23-Apr-19	23-Apr-34	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
8.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase V of 2019	C	315 ***	8,70%	09-Jul-19	9-Jul-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	737	9,20%	09-Jul-19	9-Jul-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
9.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VI of 2019	C	6	8,10%	03-Sep-19	3-Sep-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	714,5	8,50%	03-Sep-19	3-Sep-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
10.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VII of 2019	C	25,5	8,10%	29-Oct-19	29-Oct-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		D	112	8,50%	29-Oct-19	29-Oct-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		E	219,75	8,75%	29-Oct-19	29-Oct-29	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
11.	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase VIII of 2019	B	1.551	7,90%	06-Dec-19	6-Dec-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
		C	22.5	8,20%	06-Dec-19	6-Dec-26	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
Jumlah Obligasi | Total Bonds			**14.073,25**					

Catatan | Notes:
* Angka terutang full yang tercatat di bursa sebesar Rp1.786 miliar | The full amount payable recorded on the stock exchange is Rp1,786 billion
** Angka terutang full yang tercatat di bursa sebesar Rp1.523 miliar | The full amount payable recorded on the stock exchange is Rp1,523 billion
*** Angka terutang full yang tercatat di bursa sebesar Rp330 miliar | The full amount payable recorded on the stock exchange is Rp330 billion

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang *Outstanding* per 31 Desember 2023 Total Outstanding as of 31 December 2023 (Rp Miliar | Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
Sukuk dalam mata uang Rupiah | Sukuk denominated in Rupiah								
1.	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Sukuk Mudharabah I Phase II of 2018	D	155	9,75%	08-Nov-18	8-Nov-25	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2019 Indonesia Eximbank Shelf Sukuk Mudharabah I Phase III of 2019	C	66	8,90%	23-Apr-19	23-Apr-24	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
Jumlah Sukuk | Total Sukuk			**221**					

No.	Nama Efek Securities Names	Jumlah yang *Outstanding* per 31 Desember 2023 Total Outstanding as of 31 December 2023 (Rp Juta | Rp Million)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate Per Annum	Tanggal Penerbitan Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
1	Euro Medium Term Note (EMTN) Programme IEB – 2017 (USD500,000,000)	7.698.500	3,875%	7 April 2017	6 April 2024	Singapore Exchange Securities Trading Limited	BBB (Fitch) Baaa2 (Moody's)

Informasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik

Public Accountant and Public Accountant Firm

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Alamat Address	Jl. Jend. Sudirman, Kav 59, Plaza ABDA Lt 10-11 RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta 12190 Tel.: (62 21) 51401340 https://www.rsm.global/
Nama Akuntan Publik Name of Public Accountant	Bimo Iman Santoso, S.E., Ak, CPA, CA.
Jasa yang diberikan Services Provided	**Jasa Audit:** a. Audit Umum Tahun Buku 2023 termasuk melakukan review pembukuan Kantor Wilayah dan Penugasan Khusus. Secara garis besar, PIHAK PERTAMA yang ditunjuk bertanggung jawab untuk melakukan: 1) Review mendalam sesuai dengan prosedur audit umum atas saldo dari seluruh rekening dan komponen-komponen lain yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian PIHAK PERTAMA, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (termasuk penerapan PSAK 71), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Standar Audit yang relevan dengan PIHAK PERTAMA, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan-peraturan lainnya. 2) Review mengenai asumsi-asumsi yang digunakan, data-data yang disiapkan dan digunakan PIHAK PERTAMA untuk menentukan nilai *discounted future cashflow* dalam rangka penentuan cadangan kerugian penurunan nilai secara individual. b. Review atas penerbitan publikasi laporan keuangan konsolidasian & Unit Usaha Syariah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. c. Memorandum Hasil Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Management Letter) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. d. Audit atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. e. Audit atas Laporan Keuangan PT IEB Prima Aset untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. f. Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. **Audit Services:** a. General Audit of Financial Year 2023 including reviewing the books of Regional Offices and Special Assignments. In general, the appointed FIRST PARTY is responsible for conducting: 1) In-depth review in accordance with general audit procedures of the balances of all accounts and other components affecting the FIRST PARTY's consolidated financial statements, based on Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statement of Financial Accounting Standards(including the application of PSAK 71), Statement of Sharia Financial Accounting Standards, Auditing Standards relevant to the FIRST PARTY, Minister of Finance Regulations, Financial Services Authority Regulations and other regulations. 2) Review of the assumptions used, data prepared and used by the FIRST PARTY to determine the discounted future cashflow value in order to determine the allowance for impairment losses on an individual basis. b. Review of the publication of consolidated financial statements & Sharia Business Unit for the year ended 31 December 2023. c. General Audit Memorandum on Consolidated Financial Statements (Management Letter) for the year ended 31 December 2023. d. Audit of compliance with Laws and Regulations and Internal Control for the year ended 31 December 2023. e. Audit of the Financial Statements of PT IEB Prima Aset for the year ended 31 December 2023. f. Audit of the Partnership Program Financial Statements for the year ended 31 December 2023. **Jasa Non-Audit:** a. Penerapan prosedur yang disepakati untuk Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) triwulan IV tanggal 31 Desember 2023. b. Asurans terbatas atas laporan pinjaman Industrial Efficiency and Pollution Control (IEPC) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. c. Asurans terbatas atas Laporan Pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) oleh PIHAK PERTAMA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. d. Review atas Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. e. Review atas Pengendalian Internal Operasional dan Teknologi Informasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. f. Review atas Informasi Keuangan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. g. Review atas Informasi Keuangan Syariah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. **Non-Audit Services:** a. Implementation of the agreed procedure for the fourth quarter Activity Report on the Application of Prudential Principles (KPPK) dated 31 December 2023. b. Limited assurance on the Industrial Efficiency and Pollution Control (IEPC) loan report for the year ended 31 December 2023. c. Limited assurance of the PEN Government Investment Implementation Report to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) by the FIRST PARTY for the year ending 31 December 2023. d. Review of the Main Performance Indicator (IKU) Report for the year ending 31 December 2023. e. Review of Operational Internal Control and Information Technology for the year ending 31 December 2023. f. Review of Special Assignment for Export (PKE) Financial Information for the year ending 31 December 2023. g. Review of Sharia Financial Information for the year ending 31 December 2023.
Periode Penugasan Assignment Period	19 September 2023 s.d. 31 Mei 2024 19 September 2023 – 31 May 2024
Biaya Fee	Rp4.484.000.000,-

Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Name and Address of Supporting Professionals Institutions

Berikut ini adalah lembaga dan profesi penunjang pasar modal untuk penerbitan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan LPEI:

The following are capital market supporting professionals institutions for the issuance of Indonesia Eximbank Shelf Bonds and Sukuk:

No	Nama Pihak Names	Alamat Address	Peran Assignments
a	PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Equity Tower 30th Floor SCBD, Lot.9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (021) 509 68469 Fax. (021) 509 68468	Lembaga Pemeringkat Efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Rating Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank
b	PT. Bursa Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel. (021) 515 0515 Fax. (021) 515 0330	Lembaga Pencatatan Emisi Efek Indonesia Eximbank Listing Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank
c	PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Tel. (021) 515 2855 Fax. (021) 5299 1199	Lembaga Kustodi dan Penyelesaian di Pasar Modal atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Custodian Agency and Settlement in the Capital Market for Securities issued by Indonesia Eximbank
d	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Plaza Mandiri, Lantai 22 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38. Jakarta 12190 Tel. (021) 527 5370 Fax. (021) 526 8201	Wali Amanat atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Trustee for Securities issued by Indonesia Eximbank
e	Konsultan Hukum Warens & Partners	Millenium Centennial Center Lantai 1, Unit C Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta Selatan	Konsultan Hukum atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Law Firm for Securities issued by Indonesia Eximbank
f	Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH	JL. Panglima Polim V/11 Kebayoran Baru Jakarta 12160 Tel : (021) 724 4650 Fax : (021) 726 5090	Notaris Emisi atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Notary for Securities issued by Indonesia Eximbank
g	KAP "Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali"	Sentra Bisnis Harapan Indah Blok SS 11 No. 6–7 Jl. Harapan Indah Raya, Bekasi, 17132 Tel. (021) 88866199 Fax. (021) 88865750	Auditor Penjatahan atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Allocation Auditor for Securities issued by Indonesia Eximbank

Berikut ini adalah lembaga dan profesi penunjang pasar modal untuk penerbitan EMTN LPEI:

The following are capital market supporting institutions and professionals for the issuance of Indonesia Eximbank EMTN:

No	Nama Pihak Names	Alamat Address	Peran Assignments
1	HSBC Corporate Trust and loan Agency	Level 30, HSBC Main Building 1 Queen's Road Central Hong Kong Tel. (852) 2822 4443	Wali Amanat dan Agen Pembayar atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Trustee and Paying Agent for Securities issued by Indonesia Eximbank
2	Herbert Smith LLP	50 Raffles Place #24-01, Singapore Land Tower Singapore 048623 Tel. (65) 6868 8085	Konsultan Hukum Internasional atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank International legal councel for Securities issued by Indonesia Eximbank
3	Hiswara Bunjamin & Tandjung	23rd Floor, Gedung BRI II Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Tel. (021) 5744 010	Konsultan Hukum Domestik atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Domestic legal councel for Securities issued by Indonesia Eximbank
4	Ernst & Young (Purwantono, Suherman & Surja)	Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 7th Floor Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 10290 Tel. (021) 5289 4171	Auditor atas efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Auditor for Securities issued by Indonesia Eximbank
5	Fitch Ratings Singapore Pte Ltd	One Raffles Quay, South Tower #22-11 Singapore 048583 Tel. (65) 6796 7200	Lembaga Pemeringkat Efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Rating Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank
6	Moody's Investors Service Singapore Pte Ltd	50 Raffless Place 23-06 Singapore Land Tower Singapore 048623 Tel. (65) 6398 8300	Lembaga Pemeringkat Efek yang diterbitkan Indonesia Eximbank Rating Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank
7	Singapore Exchange Securities Trading Limited	SGX Centre Office 2 Shenton Way, #02-02 SGX Centre 1 Singapore 068804 Tel. (65) 6236 8888	Lembaga Pencatatan Emisi Efek Indonesia Eximbank Listing Agency for Securities issued by Indonesia Eximbank

Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on Company Website

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI senantiasa menjaga standar keterbukaan informasi sebagai salah satu komitmen dan wujud penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Maka dari itu, LPEI secara rutin menyampaikan keterbukaan informasi kondisi keuangan dan non-keuangan melalui situs web resmi Lembaga yang dapat diakses di: www.indonesiaeximbank.go.id.

Seluruh informasi yang dipublikasikan pada situs web LPEI tersedia dalam 2 (dua) pilihan bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Laman web tersebut juga dipastikan dapat diakses oleh pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. Situs web LPEI memuat informasi terkini dan relevan yang selalu diperbaharui secara berkala dan dikelola secara profesional oleh unit kerja terkait.

Secara keseluruhan, situs web LPEI telah memenuhi berbagai ketentuan yang relevan baik eksternal, maupun internal, termasuk:

a. Undang-Undang RI No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
b. Undang-Undang RI No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

In carrying out its business activities, Indonesia Eximbank always maintains information disclosure standards as one of the commitments and manifestations of the implementation of good corporate governance principles. Therefore, the Company routinely submits information disclosure on financial and non-financial conditions through the Company's website which can be accessed at: www.indonesiaeximbank.go.id.

All information published on the Indonesia Eximbank website is available in 2 (two) languages, Indonesian and English languages. The website is also ensured to be accessible to stakeholders and the general public. The Company's website contains current and relevant information that is regularly updated and professionally managed by the relevant working units.

Overall, Indonesia Eximbank website has fulfilled various relevant provisions both externally and internally, including:

a. Law of the Republic of Indonesia No. 14/2008 on Public Information Transparency.
b. Law of the Republic of Indonesia No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions.

Selain mengacu pada perundang-undangan terkait keterbukaan informasi yang berlaku, komponen situs web LPEI juga telah memenuhi cakupan informasi yang wajib dimuat dalam situs web Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015, terkecuali untuk item-item yang spesifik bagi Perusahaan Publik.

Secara garis besar, informasi pada situs web LPEI terdiri dari:

- Informasi umum tentang LPEI yang terdiri dari Profil Perusahaan, Visi dan Misi, Sejarah Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, Jaringan Kantor dan Wilayah Kerja.
- Informasi terkait kegiatan bisnis, produk-produk, serta informasi seputar kegiatan pengadaan.
- Informasi seputar kegiatan LPEI dalam bentuk *News Release, News update*, sambutan/pidato manajemen, publikasi digital, *event*, serta pengumuman pengadaan lelang pengadaan produk jasa yang diselenggarakan oleh LPEI.
- Informasi terkait Hubungan Investor yang terdiri dari Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Keberlanjutan, Informasi Efek, Peringkat Efek, dan Obligasi.
- Informasi terkait aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dari waktu ke waktu, LPEI berkomitmen untuk terus menyempurnakan situs web yang dimiliki agar menjadi lebih informatif, mudah diakses, mudah dinavigasi serta ramah bagi penggunanya.

In addition to referring to the legislation related to information disclosure, the Indonesia Eximbank website have also fulfilled the scope of information that must be contained on the Company's website in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015, except for items that pertain specifically to Public Companies.

In general, the information on the website consists of:

- General information about Indonesia Eximbank consisting of Company Profile, Vision and Mission, Corporate History, Corporate Governance, Board of Directors, Executive Director and Managing Director, Office Network and Operating Regions.
- Information related to business activities, products, and information about procurement activities.
- Information on Indonesia Eximbank's activities in the form of News Releases, News updates, management speeches, digital publications, events, and announcements of procurement auctions for service product procurement organized by Indonesia Eximbank.
- Information related to Investor Relations consisting of Annual Reports, Financial Statements, Sustainability Reports, Securities Information, Securities Ratings, and Bonds.
- Information related to Corporate Social Responsibility activities.

Indonesia Eximbank regularly strives to enhance the user experience of its website by making it more informative, user-friendly, accessible, and easy to navigate.

Akses Informasi
Information Disclosure

Sebagai perusahaan yang menerbitkan obligasi di BEI, LPEI berkewajiban untuk melakukan pelaporan informasi melalui media surat-menyurat dan *e-reporting* kepada pihak regulator, serta juga wajib dipublikasikan pada situs web LPEI. Berkenaan dengan komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan informasi, maka LPEI telah menyediakan media komunikasi selain situs web yang dapat memudahkan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai LPEI secara tepat waktu dan akurat. Seluruh Informasi dan laporan LPEI dapat diperoleh melalui kanal komunikasi berikut ini:

1. **Siaran Pers**
   LPEI secara berkala menerbitkan Siaran Pers sebagai bentuk transparansi informasi kepada publik mengenai aksi korporasi penting dan stratejik yang dilakukan LPEI.

2. **Media Sosial**
   LPEI membagikan berbagai informasi kepada publik melalui akun media sosial:

indonesiaeximbank.go.id | Indonesia Eximbank | @indonesiaeximbank | EximbankID | Indonesia-eximbank

3. **Intranet**
   LPEI memiliki portal informasi internal yaitu intranet. Intranet dapat diakses oleh seluruh karyawan untuk membantu menjalankan aktivitas.

As a company that issues bonds on IDX, Indonesia Eximbank is obliged to report information through correspondence and e-reporting to the regulator, and must also be published on the Company's website. With regard to the commitment to transparency and information disclosure, Indonesia Eximbank has provided communication media in addition to the website that can facilitate stakeholders to obtain various information about Indonesia Eximbank in a timely and accurate way. All information and reports can be obtained through the following communication channels:

1. **Press Release**
   Indonesia Eximbank regularly issues press releases as transparency of information to the public regarding important and strategic corporate actions carried out by the institution.

2. **Social Media**
   Indonesia Eximbank also actively provides information to the public through the following accounts:

3. **Intranet**
   Indonesia Eximbank has an internal information portal, namely intranet. Intranet can be accessed by all employees to help carry out activities.

Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis

Tinjauan Perekonomian
Economic Review

Risiko dan Ketidakpastian Tinggi Masih Menyelimuti Perekonomian Global

Berakhirnya pandemi tidak serta merta mampu mengembalikan kinerja perekonomian global seperti sedia kala. *Scarring effect* yang ditinggalkan dari dampak pandemi telah menyisakan sejumlah tantangan yang pada akhirnya berujung pada melebarnya divergensi pertumbuhan ekonomi antar-negara di berbagai belahan dunia. Hal ini terjadi karena kemampuan setiap negara dalam mengatasi beban pandemi yang sangat beragam sehingga proses pemulihan yang dialami masing-masing negara.

Sepanjang tahun 2023, Amerika Serikat (AS) berhasil mencatatkan pemulihan ekonomi yang lebih cepat dengan mencatat pertumbuhan yang relatif tinggi, sedangkan sebagian besar negara-negara berkembang mengalami penurunan dan stagnasi, kecuali Indonesia dan Singapura. Di negara berkembang, pertumbuhan Tiongkok melambat dipengaruhi oleh pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti, sedangkan kinerja ekonomi India dan ASEAN-5 tetap baik.

High Risk and Uncertainty Still Cover the Global Economy

The end of the pandemic will not immediately return global economic performance back to normal. The scarring effect left by the impact of the pandemic has left a number of challenges which have ultimately led to widening divergence in economic growth between countries in various parts of the world. This happens because the ability of each country to overcome the burden of the pandemic varies greatly so that the recovery process experienced by each country.

Throughout 2023, the United States (US) managed to record a faster economic recovery by recording relatively high growth, while most developing countries experienced decline and stagnation, except Indonesia and Singapore. In developing countries, China's growth slowed down, influenced by weakening consumption and declining performance in the property sector, while the economic performance of India and ASEAN-5 remained good.

Sumber: tradingeconomics.com
Source: tradingeconomics.com

Melambatnya pertumbuhan ekonomi yang dialami negara-negara maju dan juga negara berkembang menandai bahwa proses pemulihan ekonomi global di tahun 2023 berjalan lebih berat tatkala dihadapkan pada beragam tantangan baru yang lebih kompleks, seperti meningkatnya tensi geopolitik Rusia-Ukraina dan munculnya konflik baru di Timur Tengah hingga fenomena El Nino berkepanjangan yang menjadi penyebab utama kenaikan harga komoditas global. Kombinasi dari situasi tersebut pada gilirannya berimbas pada peningkatan inflasi yang melambung tinggi di negara-negara maju, seperti Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Jepang.

The slowing economic growth experienced by developed countries and developing countries indicates that the global economic recovery process in 2023 is more difficult when faced with a variety of new, more complex challenges, such as increasing geopolitical tensions between Russia and Ukraine and the emergence of new conflicts in the Middle East to the prolonged El Nino phenomenon is the main cause of the increase in global commodity prices. The combination of these situations in turn had an impact on increasing inflation which soared in developed countries, such as Europe, the United States (US), and Japan.

Dalam rangka mengendalikan lonjakan inflasi, AS dan negara-negara maju lainnya serempak menempuh kebijakan pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan di level tinggi untuk periode yang lebih lama (*higher for longer*). Pada tahun 2023, The Fed AS telah menaikkan *Fed Fund rate (FFR)* sehingga berakhir di level 5,50-5,75% pada Desember 2023. Kecenderungan yang sama juga terjadi di Eropa dengan suku bunga European Central Bank (ECB) dan Bank of England (BoE) yang hingga saat ini masih dipertahankan di level tinggi masing-masing sebesar 4,50% dan 5,25%.

In an effort to control the surge in inflation, the US and other developed countries simultaneously pursued a monetary tightening policy by raising the benchmark interest rate to a high level for a longer period (higher for longer). In 2023, the US Fed has raised the Fed Funds rate (FFR) so that it ends at the level of 5.50-5.75% in December 2023. The same trend also occurs in Europe with the interest rates of the European Central Bank (ECB) and the Bank of England (BoE) which until now is still maintained at high levels of 4.50% and 5.25% respectively.

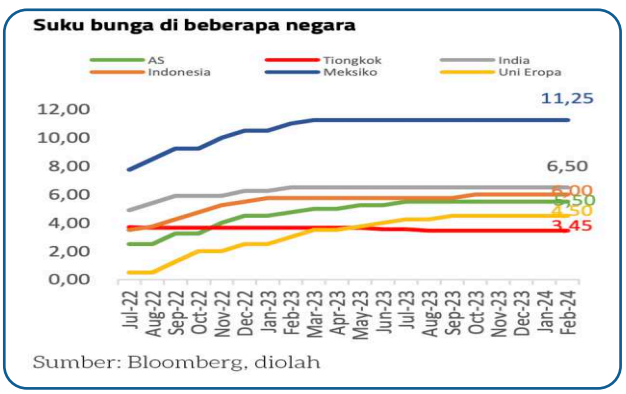

Sumber: Bloomberg, diolah

Kendati kebijakan *higher for longer* terbukti efektif untuk mengendalikan inflasi global, namun di sisi lain kebijakan suku bunga acuan tinggi yang diterapkan di negara-negara maju telah mengakibatkan terjadinya volatilitas di pasar keuangan negara-negara lain. Penyaluran kredit menjadi semakin ketat dan dampaknya mempertajam penurunan penyaluran kredit secara global. Di sisi lain, kebijakan pengetatan moneter yang ditempuh negara-negara maju juga mendorong tingginya aliran modal asing keluar dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sehingga melemahkan mata uang lokal terhadap US Dollar. Kondisi ini tentunya menimbulkan masalah baru bagi perkembangan ekonomi negara-negara berkembang di tahun 2023.

Even though the higher for longer policy has proven effective in controlling global inflation, the high benchmark interest rate policy implemented in developed countries has resulted in volatility in the financial markets of other countries. Loan disbursement is becoming tighter and the impact is sharpening the decline in loan distribution globally. On the other hand, the tightening monetary policy adopted by developed countries also encourages high flows of foreign capital out of developing countries, including Indonesia, thereby weakening the local currency against the US Dollar. This condition certainly creates new problems for the economic development of developing countries in 2023.

Dari sisi perkembangan *Purchasing Manager Index* (PMI) Manufaktur, mayoritas negara-negara di dunia terutama yang mempunyai peran vital bagi perekonomian global masih berada pada posisi yang melandai atau bahkan mengalami tekanan. Hal ini tercermin dari data aktivitas manufaktur sejumlah negara, seperti AS, Eropa, dan beberapa negara ASEAN yang terkontraksi di akhir 2023. Demikian halnya aktivitas manufaktur di Kawasan Asia juga mengalami pelemahan pada Desember 2023 akibat pemulihan ekonomi Tiongkok yang tidak merata sehingga menghambat kenaikan permintaan yang luas.

In terms of the development of the Manufacturing Purchasing Manager Index (PMI), the majority of countries in the world, especially those that have a vital role in the global economy, are still in a sloping position or even experiencing pressure. This is reflected in data on manufacturing activity in a number of countries, such as the US, Europe and several ASEAN countries, which contracted at the end of 2023. Likewise, manufacturing activity in the Asian region also experienced a weakening in December 2023 due to China's uneven economic recovery, which hampered the increase in demand. wide.

Kombinasi dari kinerja PMI Manufaktur yang beragam di negara-negara maju maupun negara berkembang berdampak pada skor akhir PMI Manufaktur global yang melemah ke 49 pada Desember 2023, dari 49,3 pada November. Artinya, PMI Manufaktur global berada pada zona kontraksi. Rendahnya angka PMI Manufaktur ini mengkonfirmasi bahwa perekonomian global masih belum pulih meskipun era pandemi sudah selesai.

The combination of diverse Manufacturing PMI performance in developed and developing countries resulted in the final global Manufacturing PMI score weakening to 49 in December 2023, from 49.3 in November. This means that the global Manufacturing PMI is in the contraction zone. This low Manufacturing PMI figure confirms that the global economy is still not recovering even though the pandemic era is over.

Kecenderungan pelemahan aktivitas manufaktur global yang makin terlihat perlu diwaspadai secara cermat karena berpotensi menurunkan frekuensi perdagangan internasional. Menyikapi situasi global yang berkembang, Indonesia sebagai salah satu negara eksportir yang diandalkan di dunia telah menerapkan berbagai upaya dan langkah-langkah strategis dalam menghadapi penurunan permintaan dari mitra dagang utama sehingga kinerja ekspor dan impor nasional tetap terjaga di level optimal.

The increasingly visible trend of weakening global manufacturing activity needs to be alert since it has the potential to reduce the frequency of international trade. Responding to the developing global situation, Indonesia as one of the most reliable exporting countries in the world has implemented various efforts and strategic measures to deal with decreasing demand from its main trading partners so that national export and import performance remains maintained at optimal levels.

Ekonomi Indonesia Tetap Resilien dan Tumbuh Positif di Tahun 2023

Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut hingga penghujung 2023, di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun dan ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi. Respons bauran kebijakan Bank Indonesia, yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional oleh Pemerintah, Bank Indonesia, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), diyakini menjadi kunci yang memungkinkan ekonomi Indonesia tetap berkinerja positif di tengah berbagai tekanan global.

Di tengah risiko volatilitas kondisi global, Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) tahun 2023 telah menunjukkan kinerja yang optimal sebagai *shock absorber* dalam upaya meredam dampak gejolak perekonomian global. Dengan kerja keras APBN, Indonesia mampu menunjukkan resiliensinya dari dampak rambatan kondisi global sehingga mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 5,05% (yoy) pada 2023.

Indonesian Economy Remains Resilient and Grows Positively in 2023

Indonesia's economic continues to recover until the end of 2023, amidst declining world economic growth and high financial market uncertainty. Bank Indonesia's policy mix response, which synergizes with national economic policies by the Government, Bank Indonesia and the Financial System Stability Committee (KSSK), is believed to be the key to enabling the Indonesian economy to continue to perform positively amidst various global pressures.

In the midst of the risk of volatility in global conditions, the 2023 State Revenue and Expenditure Budget (APBN) has demonstrated optimal performance as a shock absorber in an effort to reduce the impact of global economic turmoil. With the hard work of the APBN, Indonesia was able to show its resilience from the impact of global conditions so that it was able to record positive economic growth of 5.05% (yoy) in 2023.

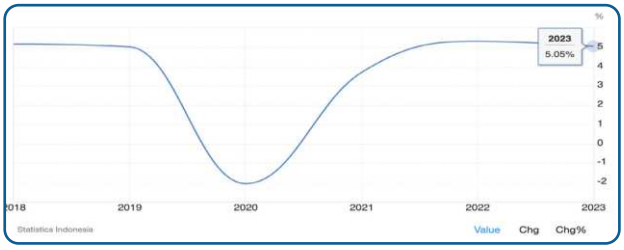

Sumber: tradingeconomics.com
Source: tradingeconomics.com

Di samping itu, tingkat inflasi selama *full year* 2023 juga terjaga dan terkendali di level 2,61%. Laju inflasi tahun 2023 ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir dan pencapaian tersebut relatif lebih baik dibandingkan inflasi yang dialami negara-negara maju maupun negara tetangga.

Furthermore, the inflation rate for the full year 2023 was also maintained and under control at the level of 2.61%. The inflation rate in 2023 is the lowest in the last two decades and this achievement is relatively better than the inflation experienced by developed countries and neighboring countries.

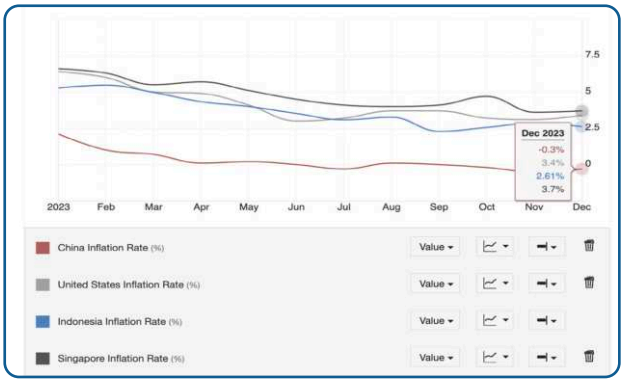

Sumber: tradingeconomics.com
Source: tradingeconomics.com

Pencapaian positif lainnya pada indikator makroekonomi nasional terefleksi dari kinerja neraca perdagangan Indonesia yang berhasil mencatatkan surplus dalam 43 bulan beruntun, didukung oleh PMI manufaktur Indonesia yang terus berada di zona ekspansif selama 28 bulan berturut-turut. Sebagaimana dilaporkan oleh S&P, PMI Manufaktur Indonesia naik ke angka 52,2 pada Desember 2023, tertinggi dalam tiga bulan terakhir, termasuk dibandingkan November 2023 (51,7). Kondisi sektor manufaktur di Indonesia yang terus membaik hingga akhir 2023 lantaran didukung dari beragam kebijakan strategis pemerintah yang telah berjalan secara *on the right track*.

Another positive achievement in national macroeconomic indicators was reflected in the performance of Indonesia's trade balance which managed to record a surplus for 43 consecutive months, supported by Indonesia's manufacturing PMI which continued to be in the expansionary zone for 28 consecutive months. As reported by S&P, Indonesia's Manufacturing PMI rose to 52.2 in December 2023, the highest in the last three months, compared to November 2023 (51.7). The condition of the manufacturing sector in Indonesia continues to improve until the end of 2023 because it is supported by various strategic government policies which have been running on the right track.

Sementara dari sisi moneter, Bank Indonesia menempuh kebijakan pengetatan moneter sejalan dengan arah kebijakan suku bunga The Fed AS yang persisten tinggi. Bank Indonesia telah secara konsisten menaikkan *BI rate* secara bertahap sejak Agustus 2022 lalu sampai dengan akhir Desember 2023 hingga berakhir di level 6%. Keputusan Bank Indonesia dalam menaikkan suku bunganya tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang *pro-stability* dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah serta sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan.

Meanwhile, from the monetary side, Bank Indonesia is pursuing a monetary tightening policy in line with the direction of the US Fed's persistently high interest rate policy. Bank Indonesia has consistently raised the BI rate in stages from August 2022 until the end of December 2023 that ended at the level of 6%. Bank Indonesia's decision to increase interest rates remains consistent with the focus of pro-stability monetary policy in order to strengthen the stabilization of the Rupiah exchange rate as well as as a pre-emptive and forward looking measures to ensure inflation remains controlled within the predetermined target range.

Sepanjang tahun 2023, stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga didukung kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia di tengah kuatnya dolar AS. Nilai tukar Rupiah pada akhir 2023 tercatat menguat 1,11% (*point to point*) dibandingkan dengan akhir tahun 2022. Perkembangan ini lebih baik dibandingkan dengan apresiasi mata uang kawasan, seperti Baht Thailand dan Peso Filipina masing-masing sebesar 1,03%, dan 0,62%. Stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga di tengah fenonema *strong dollar* berdampak positif pada minimalnya *imported inflation* serta mendukung stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

In 2023, the stability of Rupiah exchange rate was maintained supported by the stabilization policy pursued by Bank Indonesia amidst the strong US dollar. The Rupiah exchange rate at the end of 2023 was recorded to have strengthened 1.11% (point to point) compared to the end of 2022. This development is better than the regional currencies appreciation, such as the Thai Baht and Philippine Peso at 1.03%, and 0.62% respectively. Maintaining the stability of the Rupiah exchange rate amidst the strong dollar phenomenon has a positive impact on minimizing imported inflation and supports overall economic stability.

Dalam jangka menengah hingga panjang, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus membaik ditopang oleh konsumsi swasta yang meningkat sejalan dengan terjaganya daya beli, dukungan kebijakan fiskal dan moneter, serta makin besarnya peran generasi muda milenial. Investasi akan meningkat seiring dengan peningkatan ekspor dan juga berlanjutnya PSN serta pembangunan megaproyek IKN (Ibukota Nusantara). Kinerja ekspor juga akan makin meningkat seiring dengan perbaikan prospek ekonomi global dan makin maraknya program hilirisasi di berbagai sektor.

In the medium to long term, Indonesia's economic growth will continue to improve, supported by increasing private consumption in line with maintained purchasing power, support from fiscal and monetary policies, and the increasing role of the young millennial generation. Investment will increase along with the increase in exports and also the continuation of PSN and the construction of the IKN (Nusantara Capital) megaproject. Export performance will also increase in line with improving global economic prospects and the increasing proliferation of downstream programs in various sectors.

Tinjauan Industri Pembiayaan Ekspor
Export Finance Industry Review

Kinerja Ekspor Indonesia

Selama tahun 2023, aktivitas perdagangan Indonesia terjaga sebagaimana tercermin dari neraca perdagangan Indonesia yang secara total kembali mencatatkan surplus sebesar USD36,93 miliar. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, namun surplus neraca perdagangan di tahun 2023 menunjukkan daya tahan eksternal perekonomian nasional di tengah peningkatan risiko global, termasuk moderasi harga komoditas dan perlambatan ekonomi negara mitra dagang utama seperti Tiongkok.

Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar USD258,82 miliar, mengalami penurunan sebesar 11,33% dari capaian ekspor tahun sebelumnya yang tercatat USD291,90 miliar. Meski secara nominal ekspor Indonesia mengalami penurunan, namun dari sisi volume, ekspor Indonesia tahun 2023 masih tumbuh 8,55% (yoy).

Indonesian Export Performance

In 2023, Indonesia's trade activities were maintained as reflected in Indonesia's trade balance which in total again recorded a surplus of USD36.93 billion. Even though it has decreased compared to 2022, the trade balance surplus in 2023 shows the external resilience of the national economy amidst increasing global risks, including moderation in commodity prices and the economic slowdown of major trading partner countries such as China.

Indonesia's export value in 2023 was recorded at USD258.82 billion, a decrease of 11.33% from the previous year's export achievement which was recorded at USD291.90 billion. Even though in nominal terms Indonesia's exports have decreased, in terms of volume, Indonesia's exports in 2023 still grew by 8.55% (yoy).

Perkembangan Nilai Ekspor
Export Value Development
(Billion USD Miliar USD)

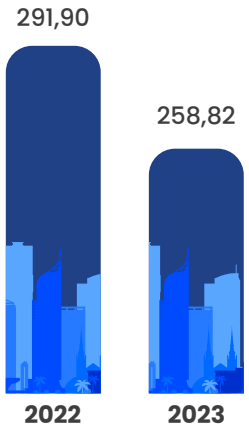

Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Statistik Resmi (15 Januari 2024)
Source: BPS-Statistics Indonesia, Official Statistic News (15 January 2024)

Perlambatan nilai ekspor tersebut sejalan dengan moderasi harga komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit dan batu bara sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

The slowdown in export value is in line with the moderation in prices of Indonesia's leading commodities, such as palm oil and coal as can be shown in the graph below:

Harga komoditas unggulan secara umum mengalami penurunan
Leading commodity prices generally experienced a decline

Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Statistik Resmi (15 Januari 2024)
Source: BPS-Statistics Indonesia, Official Statistic News (15 January 2024)

Selain terdampak oleh moderasi harga komoditas unggulan, penurunan nilai ekspor Indonesia di 2023 juga dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi yang terjadi di sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia. Berikut ini adalah daftar 5 (lima) komoditas utama ekspor nasional yang berkontribusi besar terhadap nilai ekspor tahun 2023:

In addition to being affected by the moderation in prices of leading commodities, the decline in the value of Indonesia's exports in 2023 is also influenced by the economic slowdown that is occurring in a number of Indonesia's main trading partner countries. The following is a list of 5 (five) main national export commodities that contributed greatly to export value in 2023:

Golongan Barang Goods Category	**Nilai (Miliar USD)** Value (Billion USD)	**Share Terhadap Total Ekspor (%)** Share of Total Exports (%)	**Perubahan (%)** Change (%)
Bahan bakar mineral Mineral fuels	59,49	22,99	(16,20)
Lemak dan minyak hewani/nabati Animal/vegetable fats and oils	28,45	10,99	(19,07)
Besi dan baja Iron and steel	26,70	10,32	(3,94)
Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya Electrical machinery and equipment and their parts	14,35	5,54	(1,38)
Kendaraan dan bagiannya Vehicles and their parts	11,15	4,31	1,63

Sepanjang 2023, ekspor Indonesia masih terkonsentrasi di negara Tiongkok dengan *share* 25,66%, Amerika Serikat dengan pangsa pasar sekitar 9,57%, dan India dengan share 8,35%. Sementara itu, ekspor Indonesia menuju ASEAN dan Uni Eropa masing-masing memiliki share 18,35% dan 6,78% terhadap total ekspor Indonesia di tahun 2023.

In 2023, Indonesia's exports were still concentrated in China with a share of 25.66%, the United States with a market share of around 9.57%, and India with a share of 8.35%. Meanwhile, Indonesian exports to ASEAN and the European Union have a share of 18.35% and 6.78% respectively, of Indonesia's total exports in 2023.

Pangsa Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama Ekspor
Share of Export Value by Export Destination Country
(%)

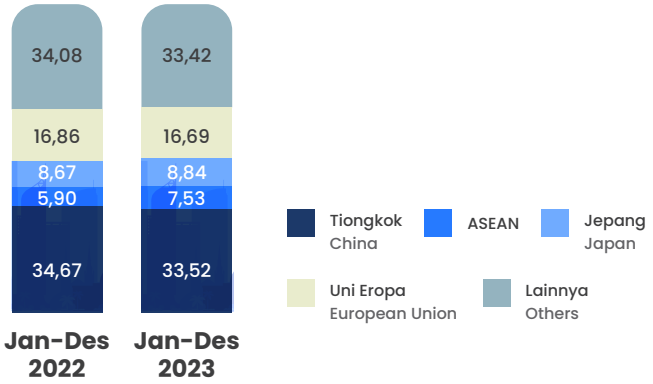

Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Statistik Resmi (15 Januari 2024)
Source: BPS-Statistics Indonesia, Official Statistic News (15 January 2024)

Secara kumulatif Januari—Desember 2023, pangsa ekspor nonmigas ke negara dan kawasan tujuan utama mengalami penurunan jika dibanding periode yang sama tahun lalu, kecuali pangsa ekspor nonmigas ke Tiongkok.

Cumulatively, from January to December 2023, the share of non-oil and gas exports to main destination countries and regions decreased compared to the same period last year, except for the share of non-oil and gas exports to China.

Sementara itu, impor Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai USD221,89 miliar, turun 6,55% (yoy) dibandingkan tahun 2022. Penyumbang perlambatan impor terbesar yaitu mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya, sementara mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya menyumbang kenaikan impor.

Meanwhile, Indonesia's imports throughout 2023 reached USD221.89 billion, down 6.55% (yoy) compared to 2022. The largest contributor to the slowdown in imports was electrical and mechanical equipment and their components (spare parts and/or parts), while electrical equipment and mechanical equipment contributed to the increase in imports.

Perkembangan Nilai Impor
Import Value Development
(Miliar USD Billion USD)

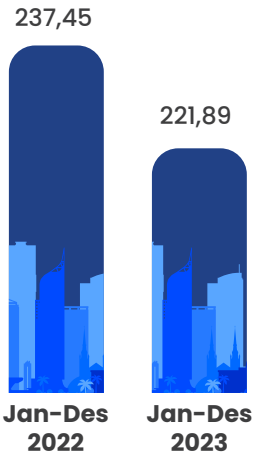

Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Statistik Resmi (15 Januari 2024)
Source: BPS-Statistics Indonesia, Official Statistic News (15 January 2024)

Sama seperti ekspor, secara volume, impor Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 8,04% (yoy), sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Secara sektoral, impor barang modal dan barang konsumsi mencatatkan pertumbuhan positif, sementara impor bahan baku mengalami penurunan.

Similar to exports, in terms of volume, Indonesia's imports still recorded positive growth of 8.04% (yoy), in line with strong domestic demand. Sectorally, imports of capital goods and consumer goods recorded positive growth, while imports of raw materials experienced a decline.

Impor terbesar Indonesia juga masih didominasi oleh negara Tiongkok dan Jepang dengan *share* masing-masing 33,42% dan 8,84% terhadap total impor Indonesia.

Indonesia's largest imports are still dominated by China and Japan with shares of 33.42% and 8.84% respectively of Indonesia's total imports.

Pangsa Nilai Impor Berdasarkan Utama Asal Impor
Share of Import Value Based on Main Import Origin
(%)

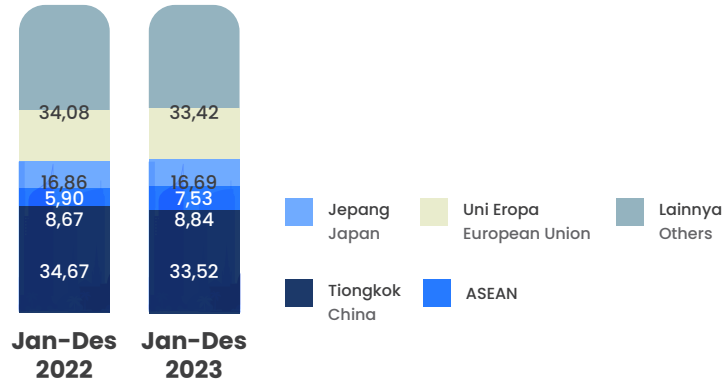

Sumber: Badan Pusat Statistik, Berita Statistik Resmi (15 Januari 2024)
Source: BPS-Statistics Indonesia, Official Statistic News (15 January 2024)

Dibandingkan tahun 2022, secara kumulatif sepanjang tahun 2023 pangsa impor nonmigas dari Tiongkok mengalami penurunan, sementara pangsa impor nonmigas dari Kawasan Uni Eropa dan Jepang mengalami peningkatan.

Compared to 2022, cumulatively throughout 2023 the share of non-oil and gas imports from China has decreased, while the share of non-oil and gas imports from the European Union and Japan has increased.

Kontribusi LPEI terhadap ekspor barang Indonesia pada akhir desember 2023 adalah sebesar 7,2% atau Rp292 trilliun. Dengan sektor pembiayaan tertinggi adalah untuk sektor Manufaktur dengan porsi mencapai sekitar 50% dari total pembiayaan.

Indonesia Eximbank's contribution to Indonesian goods exports at the end of December 2023 was 7.2% or Rp292 trillion. The highest financing sector is for the Manufacturing sector with a portion reaching 50% of total financing.

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

Sebagai SMV dari Kementerian Keuangan RI, LPEI menerima mandat langsung dari Pemerintah untuk membantu penyediaan pembiayaan, penjaminan dan/atau asuransi untuk transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan akan tetapi dianggap sangat penting oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional. Selain itu, LPEI juga berperan besar dalam mendukung bisnis pelaku-pelaku UMKM yang berorientasi ekspor agar produk-produknya menjadi lebih kompetitif dan dapat terserap di pasar internasional.

Dalam menjalankan seluruh mandat tersebut, LPEI telah menerapkan serangkaian strategi pemasaran yang tepat, antara lain:

1) **Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan Ekspor**
   Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, LPEI menerapkan skema pembiayaan konvensional dan syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penyaluran pembiayaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan nasabah terutama untuk mendukung kegiatan ekspor serta membiayai segmen UKME dan pembiayaan korporasi dengan memperhatikan pengelolaan risiko secara sehat.

2) **Meningkatkan Penyaluran Penjaminan**
   Dalam upaya meningkatkan penyaluran penjaminan ekspor, LPEI berkoordinasi dengan regulator terutama dalam hal penyesuaian beberapa ketentuan peraturan untuk memperluas ruang gerak penjaminan yang diberikan dan juga menyediakan penjaminan bagi UKME agar mudah memperoleh akses pembiayaan.

   Beberapa jenis penjaminan yang diberikan LPEI, meliputi penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang/jasa di luar negeri, penjaminan bagi importir barang/jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan, penjaminan bagi bank yang menyediakan pembiayaan transaksi ekspor kepada eksportir Indonesia, serta penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor. Selain itu, LPEI juga menyalurkan

As an SMV (Special Mission Vehicle) of the Indonesian Ministry of Finance, Indonesia Eximbank receives a direct mandate from the Government to assist in providing financing, guarantee and/or insurance for transactions or projects that are commercially difficult to implement but are considered very important by the Government to support national export policies or programs. Furthermore, Indonesia Eximbank also plays a significant role in supporting export-oriented MSME businesses so that their products become more competitive and can be absorbed in the international market.

In carrying out all of these mandates, Indonesia Eximbank has implemented series of appropriate marketing strategies, including:

1) **Enhancing Export Financing Disbursement**
   By prioritizing the principle of prudence, Indonesia Eximbank implements conventional and sharia financing schemes both domestically and abroad. The financing disbursement is adjusted to customer needs, especially to support export activities as well as finance the Export Oriented SME segment and corporate financing by taking into account sound risk management.

2) **Enhancing Guarantee Disbursement**
   In an effort to increase the export guarantee disbursement, Indonesia Eximbank is coordinating with regulators, especially in terms of adjusting several regulatory provisions to expand the scope for guarantees provided and also providing guarantees for Export Oriented SMEs to easily obtain access to financing.

   Several types of guarantees provided by Indonesia Eximbank include guarantees for Indonesian exporters for payments received from buyers of goods/services abroad, guarantees for importers of Indonesian goods/services abroad for payments that have been settled, guarantees for banks that provide export transactions financing to Indonesian exporters, as well as guarantees for tenders related to projects implementation that fully or partly support exports activities. Moreover, Indonesia Eximbank also disburses Government Guarantees for National Economic Recovery

Penjaminan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui program penjaminan korporasi padat karya (JAMINAH) untuk perbankan agar pemberian kredit dapat terus berjalan sehingga pemulihan ekonomi dapat lebih cepat.

through the labor-intensive corporate guarantee program (JAMINAH) for banks loans disbursement to accelerate economic recovery.

3) Meningkatkan Penyaluran Asuransi

Aktivitas peningkatan penyaluran asuransi ekspor dilakukan dengan berkoordinasi dengan regulator terutama dalam hal penyesuaian beberapa ketentuan peraturan untuk memperluas ruang gerak asuransi disamping penyediaan asuransi bagi UKM agar mudah memperoleh akses pembiayaan. Asuransi ekspor LPEI, meliputi asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi atas risiko kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan perusahaan Indonesia di luar negeri, dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

Penjaminan yang diberikan LPEI meliputi penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang/jasa di luar negeri, penjaminan bagi importir barang/jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan, penjaminan bagi bank yang menyediakan pembiayaan transaksi ekspor kepada eksportir Indonesia, serta penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.

LPEI juga menyediakan Penjaminan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui program penjaminan korporasi padat karya (JAMINAH) untuk perbankan agar pemberian kredit dapat terus berjalan sehingga pemulihan ekonomi dapat lebih cepat.

3) Enhancing Insurance Disbursement

Activities to increase export insurance disbursement are carried out in coordination with regulators, especially in terms of adjusting several regulatory provisions to expand the scope for insurance in addition to providing insurance for SMEs' easy access financing. Indonesia Eximbank export insurance, includes insurance for the risk of export failure, insurance for the risk of payment failure, insurance for investments made by Indonesian companies abroad, and/or insurance for political risks in a country that is the export destination.

The guarantees provided by Indonesia Eximbank include guarantees for Indonesian exporters for payments received from buyers of goods/services abroad, guarantees for importers of Indonesian goods/services abroad for payments that have been settled, guarantees for banks that provide export financing transactions to Indonesian exporters, as well as guarantees for tenders related to projects implementation that fully or in partly support exports activities.

Indonesia Eximbank also provides Government Guarantees ifor National Economic Recovery through the labor-intensive corporate guarantee program (JAMINAH) for banks loans disbusement to accelerate economic recovery.

4) Peningkatan Peran Jasa Konsultasi

Pelaksanaan Jasa Konsultasi difokuskan pada peningkatan kapasitas *business advisory* serta perluasan akses pasar baik secara konvensional maupun *digital commerce.* Dalam menjalankan mandat kegiatan usaha ini, LPEI memberikan bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank/lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

4) Enhancing the Role of Advisory Services

The implementation of Advisory Services is focused on business advisory capacity improvement and market access expansion, both conventionally and in digitally commerce. In conducting the mandate of this business activity, Indonesia Eximbank provides guidance and advisory services to the banks, financial institutions, exporters, producers of export goods, particularly micro, small, medium enterprises and cooperatives to help overcome obstacles faced by the banks/financial institutions in providing financing for exporters who are commercially have sufficient potential and/or are crucial for the development of the Indonesian economy.

Dalam rangka meningkatkan kualitas jasa konsultasi, LPEI terus berusaha meningkatkan kapasitasnya baik secara komprehensif maupun tematik yang dapat diaplikasikan melalui pemangku kepentingan eksternal.

In order to improve the quality of advisory services, Indonesia Eximbank continues to strive to increase its capacity both comprehensively and thematically to be applied through external stakeholders.

Strategi Bisnis
Business Strategy

Di tengah kondisi perekonomian global dan nasional yang dinamis selama 2022, LPEI senantiasa tetap fokus dalam menjalankan mandat *Enabling Export* dan *Empowering Nation*. Selain itu, di waktu yang bersamaan, LPEI juga terus berupaya memperbaiki kondisi bisnis maupun kinerja keuangan agar optimal dalam mendorong peningkatan ekspor nasional yang kokoh dan berkelanjutan serta bermanfaat luas.

Dalam melaksanakan mandat *Enabling Export* dan *Empowering Nation*, LPEI telah melakukan revitalisasi dengan menerapkan lima *key guiding principles* yaitu:
1. Pertumbuhan bisnis yang progresif melalui ekosistem ekspor.
2. Menyelesaikan isu terkait *Loan to Asset Ratio* (LAR) dan meningkatkan kualitas aset.
3. Berinvestasi pada keterampilan dan kemampuan di masa depan.
4. Memperkuat peran LPEI sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
5. Terus memperkuat *Balance Sheet*.

Amidst the dynamic global and national economic conditions during 2023, Indonesia Eximbank remains focused on carrying out its mandate of Enabling Export and Empowering the Nation. At the same time, Indonesia Eximbank also continues to strive to improve business conditions and financial performance by promoting towards strong and sustainable national export with extensive benefits.

In implementing the mandate of Enabling Export and Empowering the Nation, Indonesia Eximbank has revitalized by implementing five key guiding principles:
1. Progressive business growth through the export ecosystem.
2. Resolving issues related to Loan to Asset Ratio (LAR) and improving asset quality.
3. Investing in future skills and abilities.
4. Strengthening Indonesia Eximbank's role as a Special Mission Vehicle (SMV) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
5. Continue to strengthen the Balance Sheet.

Kerangka Strategi LPEI
Indonesia Eximbank Strategic Framework

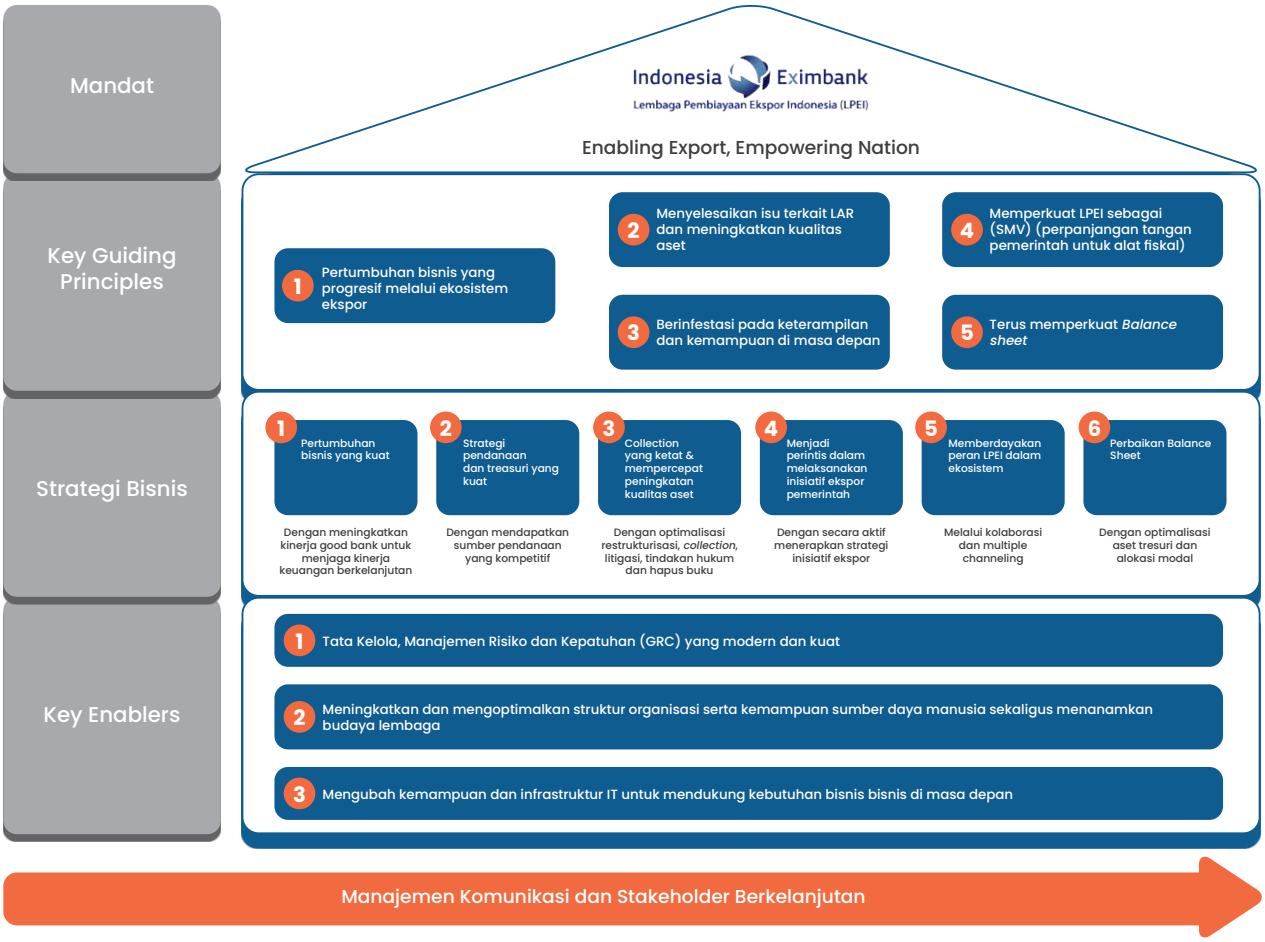

Sedangkan untuk periode 2023, LPEI mengusung tema "*fixing fundamental*" yang tercermin dalam gambar berikut ini:

Penjelasan secara garis besar strategi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Bisnis Sesuai Mandat
   Strategi pertumbuhan bisnis ke depan akan dilakukan melalui *hybrid approach* dengan mulai membesarkan portofolio yang berfokus pada *developmental impact*. Dalam pertumbuhan bisnis ke depan akan dilakukan pemerataan mandat antara pertumbuhan pembiayaan, penjaminan, asuransi serta penguatan jasa konsultasi untuk dapat mengakselerasi edukasi nasabah hingga proses ekspor. Strategi pertumbuhan sesuai mandat antara lain sebagai berikut :
   a. Peningkatan *performance Good* bank dilakukan dengan beberapa cara yaitu :
      - Mengubah posisi di pasar menjadi *collabolator* bukan competitor salah satunya bekerja sama dengan bank *commercial* ataupun LJK lainnya termasuk *Special Mission Vehicle* (SMV) Kemenkeu untuk produk pembiayaan komersial,

Meanwhile, for the 2023 period, Indonesia Eximbank carries the theme "fixing fundamentals" which is reflected in the following image:

The general explanation of the 2023 strategy is as follows:

1. Business Growth According to Mandate
   The future business growth strategy will be conducted through a hybrid approach by starting to expand the portfolio with a focus on developmental impact. In future business growth, there will be an even disbursement of mandates between growth in financing, guarantee, insurance as well as strengthening advisory services to be able to accelerate customer education to the export process. Growth strategies according to the mandate include the following:
   a. Improving good bank performance is carried out in several ways, namely:
      - Changing position in the market to become a non-competitor collabolator through cooperation with commercial banks or other Financial Services including the Ministry of Finance's Special Mission Vehicle (SMV) for commercial financing products,

pembiayaan NIA, Syariah, Penjaminan maupun Asuransi;
- Mengembangkan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk meningkatkan penetrasi produk syariah yang tepat untuk kebutuhan pasar serta mendampingi pembiayaan konvensional dalam penyediaan produk termasuk pengembangan produk penjaminan dan asuransi berbasis Syariah;
- Mengembangkan produk *trade finance* untuk membantu nasabah ekspor dengan fokus pada *co-financing, supply chain financing* dan *account receivable financing*;
- Melakukan penyediaan produk yang *bundling* dengan pembiayaan termasuk produk *arrangement* kredit sindikasi untuk produk penjaminan dan asuransi;
- Memasukkan *average balance* sebagai salah satu sasaran utama pada unit bisnis;
- Mendorong pertumbuhan segmen UKM yang memiliki marjin yang lebih baik;
- Melakukan *repricing up* sesuai *market rate*; dan
- Tidak ada *downgrade* debitur yang berasal dari debitur diluar *watchlist*.

b. Fokus kepada sektor tertentu untuk meningkatkan *developmental impact*
c. Penguatan Jasa Konsultasi dengan melakukan:
   - Penambahan jumlah Desa Devisa
   - Pertumbuhan jumlah eksportir baru dan/ atau menjaga keberlanjutan usaha ekspor
   - Meningkatkan kualitas produk UMKM melalui program kurasi ekspor
   - Program Kemitraan diselaraskan dengan prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan, terintegrasi dan bersinergi dengan program-program di Kementerian Keuangan, serta mendukung bisnis inti LPEI
   - Menciptakan inovasi produk baru sebagai potensi *income generator*

NIA financing, Sharia, guarantees and insurance;
- Developing a Sharia Business Unit (SBU) to increase penetration of sharia products that are appropriate for market needs as well as accompanying conventional financing in providing products including developing Sharia-based guarantee and insurance products;
- Developing trade finance products to help export customers with a focus on co-financing, supply chain financing and account receivable financing;
- Providing products bundled with financing, including syndicated credit arrangement products for guarantee and insurance products;
- Include average balance as one of the main targets for business units;
- Encouraging the growth of the SME segment which has better margins;
- Repricing up according to market rate; and
- There are no debtor downgrades originating from debtors outside the watchlist.

b. Focus on certain sectors to increase developmental impact
c. Strengthening Advisory Services by:
   - Increase in the number of Go Export Village
   - Growth in the number of new exporters and/ or maintaining the sustainability of export businesses
   - Improving the quality of MSME products through export curation programs
   - The Partnership Program is aligned with priority sustainable development goals, integrated and synergized with programs at the Ministry of Finance, and supports Indonesia Eximbank 's core business
   - Creating new product innovations as potential income generators

Redefined Strategy – Strategi dan Prioritas 2023

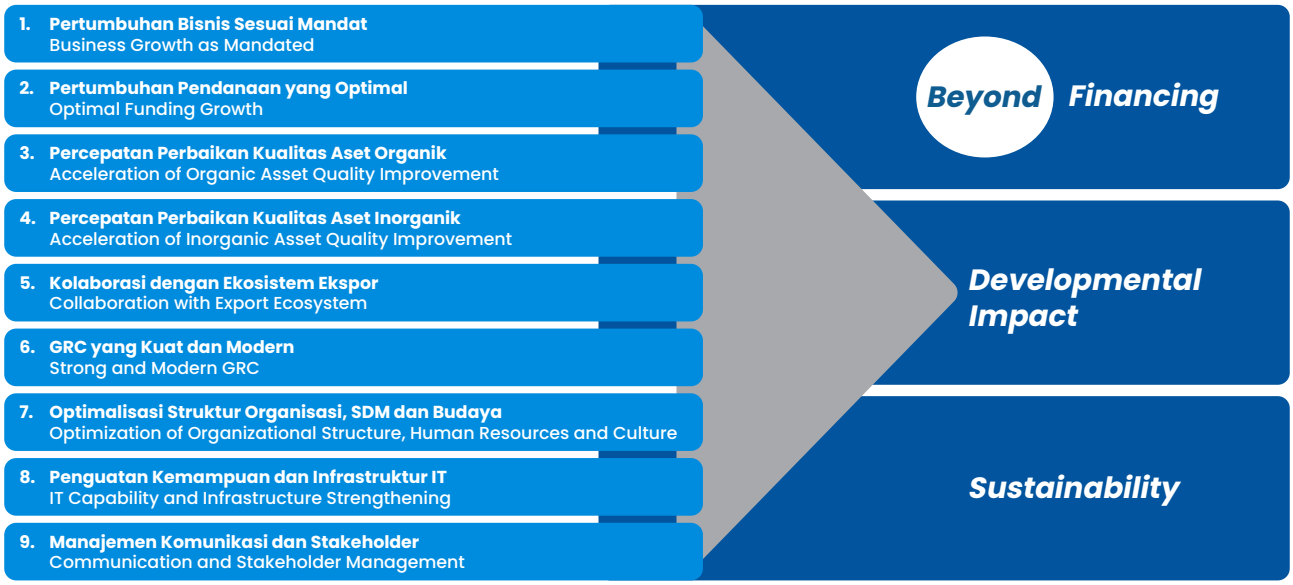

Selaku lembaga yang *Sui Generis* atau memiliki misi khusus dan unik untuk menjalankan misi pembangunan serta mendorong ekspor nasional, LPEI juga terus memperkuat value *proposition*-nya ke dalam strategi bisnis sehingga lebih adaptif terhadap dinamika global. Adapun *value proposition* yang dimiliki LPEI dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:

As an institution that is Sui Generis or has a special and unique mission to carry out development missions and encourage national exports, Indonesia Eximbank also continues to strengthen its value proposition in its business strategy so that it is more adaptive to global dynamics. The value proposition owned by Indonesia Eximbank is explained in the following chart:

LPEI *Value Proposition*

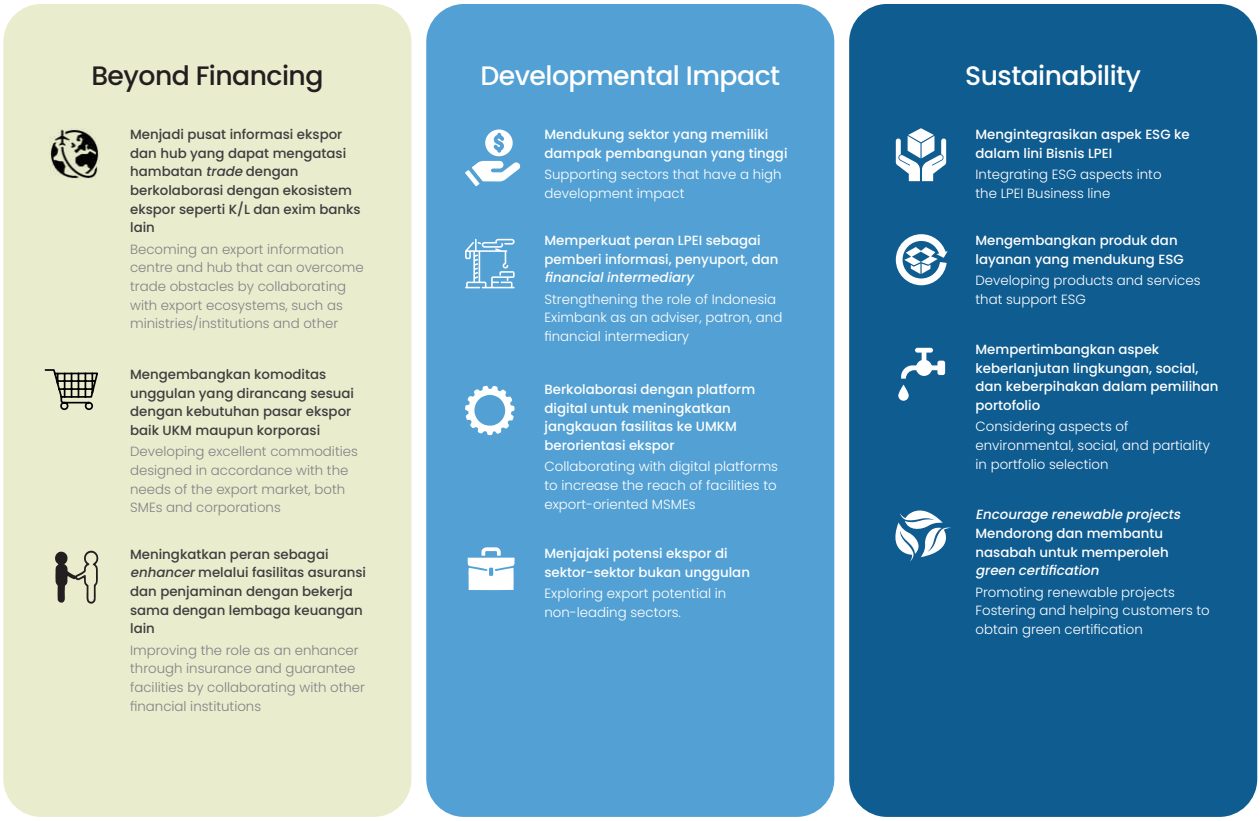

Tinjauan Operasional per Segmen Usaha
Business Segment Operational Review

01 **Pembiayaan**
Financing

02 **Penjaminan**
Guarantee

03 **Asuransi**
Insurance

04 **Trade Finance**
Trade Finance

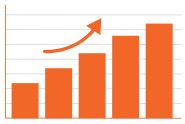

05 **Treasury**
Treasury

06 **Jasa Konsultansi**
Advisory Services

07 **Penugasan Khusus**
National Interest Account

01 Pembiayaan
Financing

Dengan menjalankan Pembiayaan, LPEI berkomitmen untuk membantu para eksportir nasional memenuhi kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan guna meningkatkan daya saing produk mereka di pasar internasional. Dalam menjalankan mandat ini, LPEI menyalurkan pembiayaan untuk segmen korporasi, UKM, dan Syariah.

Through its Financing mandate, Indonesia Eximbank is committed to assisting national exporters in meeting their funding needs to enhance the competitiveness of their products in international markets. In fulfilling this mandate, Indonesia Eximbank channels financing for corporate, SME, and Sharia segments.

Langkah LPEI untuk memperbaiki kualitas pembiayaannya diupayakan melalui berbagai implementasi strategi yang tepat sasaran sesuai segmentasi penerima manfaat. Sesuai dengan mandat yang diberikan, LPEI menjalankan kegiatan usaha pembiayaan yang inovatif dan dapat menjangkau seluruh segmen nasabah untuk mendukung kegiatan ekspor nasional. LPEI menyediakan fasilitas pembiayaan konvensional maupun yang belandaskan pada prinsip syariah kepada korporasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Indonesia Eximbank's measures to improve the quality of its financing are pursued through implementing various targeted strategies according to beneficiary segmentation. In accordance with the mandate given, Indonesia Eximbank carries out innovative financing business activities and can reach all customer segments to support national export activities. Indonesia Eximbank provides conventional and sharia-based financing facilities to corporations and Small and Medium Enterprises (SMEs).

Pada pelaksanaannya, LPEI memberikan fasilitas pembiayaan ekspor dalam bentuk Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE), Kredit Investasi Ekspor (KIE), dan *Trade Finance* untuk segmen usaha Korporasi maupun Usaha Kecil dan Menengah berorientasi Ekspor (UKME) yang berbentuk atau tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan yang melakukan kegiatan ekspor atau kegiatan penunjang ekspor dengan domisili di dalam atau di luar negeri.

In terms of its implementation, Indonesia Eximbank provides export financing facilities by establishing Export Working Capital Credit (KMKE), Export Investment Credit (KIE), and Trade Finance for the Corporate business segment and Export-oriented Small and Medium Enterprises (UKME) which are legal entities or non-legal entities, including individuals who engage export activities or export supporting activities while domiciled inside or outside the country.

Dengan memberikan akses pembiayaan yang setara dan seluas-luasnya kepada para pelaku usaha yang berorientasi ekspor, LPEI telah berpartisipasi langsung dalam mewujudkan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional, mempercepat peningkatan ekspor nasional, membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan

By providing equal and widest access to financing to export-oriented business, Indonesia Eximbank has participated directly in realizing the creation of a business climate that is conducive to increasing national exports, accelerating the increase in national exports, helping to improve national production capabilities that are highly competitive and have excellence for exports, as well as encouraging the

memiliki keunggulan untuk ekspor, serta mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.

development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and cooperatives to develop export-oriented products.

Melalui kegiatan usaha pembiayaan yang dijalankan, LPEI berkomitmen untuk terus membantu para eksportir nasional dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan guna meningkatkan daya saing produk mereka di pasar internasional. Di saat yang bersamaan, LPEI juga berfokus untuk memperbaiki kualitas pembiayaannya yang cenderung meningkat agar tetap terkendali di rentang yang sehat.

Through the financing business activities, Indonesia Eximbank is committed to continuing to assist national exporters in meeting the financing needs required to increase the competitiveness of their products in the international market. At the same time, Indonesia Eximbank is also focused on improving the quality of its financing, which tends to increase so that it remains controlled in a sound range.

PEMBIAYAAN KORPORASI

Pembiayaan korporasi merupakan jenis pembiayaan yang bersifat produktif dan diberikan oleh LPEI kepada para perusahaan swasta yang melakukan kegiatan ekspor langsung (*direct export*) maupun secara tidak langsung (*indirect export*).

CORPORATE FINANCING

Corporate financing is a type of productive financing and is provided by Indonesia Eximbank to private companies that carry out direct or indirect export activities.

Penyaluran pembiayaan bagi segmen korporasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional debitur perusahaan dalam melakukan aktivitas ekspor langsung maupun tidak langsung dengan skema pembiayaan kredit investasi ekspor, seperti pembiayaan *CAPEX*, dan *project financing* serta Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) maupun transaksi *trade financing* (*pre* dan *post Shipment Financing*).

The financing disbursement for the corporate segment basically aims to increase the operational capabilities of corporate debtors in conducting direct and indirect export activities with export investment credit financing schemes, such as CAPEX financing, and project financing as well as Export Working Capital Credit (KMKE) and trade financing transactions (pre and post Shipment Financing).

Dengan menawarkan berbagai produk pembiayaan tersebut, LPEI berusaha hadir untuk menjawab tingginya kebutuhan debitur perusahaan terhadap akses modal untuk mendukung aktivitas ekspor maupun impor mereka. Hal inilah yang membuat produk pembiayaan LPEI menjadi salah satu produk unggulan yang membawa manfaat besar dan berkelanjutan serta berperan sebagai katalis pendorong roda perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan pendapatan devisa negara yang lebih optimal.

By offering these various financing products, Indonesia Eximbank is trying to be present to answer the high needs of corporate debtors for access to capital to support their export and import activities. This is what makes the Indonesia Eximbank financing product one of the superior products that brings great and sustainable benefits and acts as a catalyst to drive the wheels of the national economy, especially in increasing the country's foreign exchange earnings more optimally.

Strategi dan Tantangan Tahun 2023

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur korporasi yang berorientasi, LPEI berfokus pada sektor industri yang sehat, berdaya tahan, dan bertumbuh serta memiliki *developmental impact* yang tinggi. Pelaksanaan seluruh aktivitas pembiayaan LPEI terhadap segmen korporasi senantiasa mengacu pada mandat yang termaktub di dalam UU LPEI No. 02 tahun 2009.

Strategy and Challenges in 2023

In channeling financing to oriented corporate debtors, Indonesia Eximbank focuses on industrial sectors that are sound, resilient and growing and have a high developmental impact. The implementation of all Indonesia Eximbank financing activities for the corporate segment always refers to the mandate contained in the Indonesia Eximbank Act No. 2 of 2009.

Pada tahun 2023, LPEI telah menerapkan serangkaian strategi prioritas yang relevan untuk memastikan operasional pembiayaan di segmen korporasi dapat berjalan dengan baik dan berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja yang maksimal, antara lain:

1) Penetrasi melalui kawasan industri;
2) Menjalin kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan;
3) Target market kantor wilayah adalah pelaku ekspor yang merupakan sektor unggulan daerah;
4) Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah setempat untuk memberikan pelatihan kepada UMKM lokal;
5) Berinisiatif dengan perbankan asing untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada *supplier* perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia; dan
6) Menyediakan program *product bundling* untuk memberikan fasilitas yang lebih unggul.

In 2023, Indonesia Eximbank has implemented a series of relevant priority strategies to ensure financing operations in the corporate segment can run well and contribute positively to maximum performance improvement, including:

1) Penetration through industrial areas;
2) Establish collaboration with financial service institutions;
3) The regional office's target market is exporters who are the region's leading sector;
4) Collaborating with local government agencies to provide training to local MSMEs;
5) Take the initiative with foreign banks to provide financing support to suppliers of foreign companies operating in Indonesia; And
6) Providing a product bundling program to provide superior facilities.

Dalam menjalankan mandat pembiayaan untuk segmen korporasi, LPEI kerap dihadapkan dengan berbagai tantangan, salah satunya yang menjadi fokus perhatian Lembaga di 2023 adalah inkonsistensi *quality control* pada pelaku ekspor UMKM. Untuk mengatasi tantangan tersebut, LPEI telah memberikan pendampingan berupa jasa konsultasi kepada para UMKM binaan.

In implementing its financing mandate for the corporate segment, Indonesia Eximbank is often faced with various challenges, one of which is the focus of the Institution's attention in 2023, is the inconsistency of quality control for MSME exporters. To overcome these challenges, Indonesia Eximbank has provided assistance in the form of advisory services to assisted MSMEs.

Kinerja Pembiayaan Korporasi Tahun 2023

Outstanding nilai pembiayaan segmen Korporasi tercatat sebesar Rp57,01 triliun di akhir Desember 2023, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp66,38 triliun. Dari jumlah tersebut, portofolio pembiayaan segmen Korporasi mayoritas disalurkan untuk industri/sektor Perindustrian (48,54%), Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian (18,02%), Pertambangan (15,88%), Pengangkutan, Pergudangan, Komunikasi (6,09%), Perdagangan, Restoran dan Hotel (3,50%), Konstruksi (2,90%), Jasa-jasa Dunia Usaha (2,43%), Listrik, Gas dan Air (2,07%), dan Lain-lain (0,56%).

Apabila dilihat berdasarkan jenis fasilitas, pembiayaan korporasi yang disalurkan LPEI di tahun 2023 masih didominasi oleh KMKE (53,80%) dan KIE (46,20%).

Pada tahun 2023, kualitas pembiayaan korporasi mulai menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan penurunan NPL *net* menjadi 4,54% per tahun di 2023 dari sebelumnya 10,39% di tahun 2022.

Rencana Strategis di Tahun 2024

Sejalan dengan prospek positif terhadap perekonomian nasional, maka LPEI memandang tahun 2024 dengan penuh optimisme dan bersiap untuk menyambut peluang bisnis yang terbuka lebar melalui penerapan sejumlah inisiatif strategis utama, seperti berfokus pada penyaluran pembiayaan berbasis ekosistem. Dengan menjalankan inisiatif tersebut, LPEI memberikan pembiayaan kepada pelaku *direct exporter* dan juga kepada para *supplier*, vendor, serta kontraktor yang terlibat. Pengembangan bisnis komersial juga akan didorong ke sektor UKME & UMBE.

PEMBIAYAAN UKM

LPEI menjalankan penugasan khusus ekspor (PKE) yang diberikan Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan ekspor bagi UKM. LPEI menyediakan pembiayaan untuk segmentasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor mengingat peran UKM yang yang begitu besar sebagai motor ekonomi rakyat dan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Pembiayaan UKM memiliki arti yang sangat penting bagi LPEI sejalan dengan mandat dari Pemerintah untuk menyediakan porsi pembiayaan segmen UKM sebesar 30%.

Strategi dan Tantangan Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan untuk segmen UKM, LPEI telah berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk

Corporate Financing Performance in 2023

The outstanding value of financing for the Corporate segment was recorded at Rp57.01 trillion at the end of December 2023, a decrease compared to the previous year of Rp66.38 trillion. Of this amount, the majority of the Corporate segment's financing portfolio is channeled to industry/industrial sectors (48.54%); Agriculture, Hunting and Agricultural Facilities (18.02%); Mining (15.88%); Freight, Warehousing, Telecommunications (6.09%); Trade, Restaurants and Hotels (3.50%); Construction (2.90%); Business Services (2.43%); Electricity, Gas and Water (2.07%); and Others (0.56%)

From type of facility perspective, corporate financing disbursed by Indonesia Eximbank in 2023 was still dominated by KMKE (53.80%) and KIE (46.20%).

In 2023, the quality of corporate financing began to show improvement, marked by a decrease in net NPL to 4.54% per year in 2023 from the previous 10.39% in 2022.

Strategic Plan in 2024

In line with the positive prospects for the national economy and the transformation process, Indonesia Eximbank perceives 2024 with full optimism and is prepared to welcome business opportunities through implementing a number of key strategic initiatives, such as focusing on ecosystem-based financing disbursement. By carrying out this initiative, Indonesia Eximbank provides financing to direct exporters and also to the suppliers, vendors and contractors involved. Commercial business development will also be encouraged in the Export-oriented SME & UMBE sectors.

SME FINANCING

Indonesia Eximbank carries out the Export National Interest Account (PKE) given by the Government to provide export financing for SMEs. Indonesia Eximbank provides financing for the export-oriented Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) segmentation considering the enormous role of SMEs as the motor of the people's economy and one of the backbones of the Indonesian economy. SME financing is pivotal for Indonesia Eximbank in line with the mandate from the Government to provide a 30% portion of the SME segment financing.

Strategy and Challenges in 2023

In order to increase financing disbursement for the SME segment, Indonesia Eximbank has collaborated with relevant Ministries and Institutions (K/L) to

memberikan jangkauan pelayanan yang lebih luas sehingga dapat menjaring para pelaku usaha UKM yang memiliki potensi ekspor. Di sisi lain, LPEI juga mengarahkan fokusnya pada perbaikan kualitas pembiayaan UKM. Untuk mendukung fokus tersebut, LPEI telah menggunakan *early warning system* pembiayaan UKM melalui disiplin monitoring pembiayaan serta kunjungan berkala untuk memantau kinerja debitur, serta memberikan pendampingan untuk memperbaiki kinerja debitur. Adapun strategi lainnya yang diterapkan LPEI di 2023 agar kinerja pembiayaan UKM dapat berjalan optimal, antara lain:

1. Pembiayaan melalui mekanisme *value chain* yang melibatkan debitur korporasi dan komersial LPEI. Strategi ini diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas pelaku UMKM yang menjadi rekanan bisnis debitur-debitur korporasi dan komersial LPEI
2. Penyaluran pembiayaan untuk mendukung pelaku ekspor baru dari alumni CPNE
3. Penyaluran pembiayaan kepada UMKM yang berasal dari peserta program binaan K/L

Dalam menyalurkan pembiayaan UKM, LPEI menyadari adanya sejumlah tantangan yang dihadapi di lapangan, seperti:

1. Konsistensi kualitas dan kuantitas produksi
2. Bisnis UMKM yang rentan terhadap dinamika pasar
3. Pelaku UMKM umumnya masih terkonsentrasi dengan jumlah buyer yang masih sedikit dan tujuan negara yang tidak beragam

Untuk menghadapi tantangan yang masih penuh dinamika pada tahun 2023, LPEI telah menetapkan sejumlah strategi antara lain sebagai berikut:

1. Unit bisnis memastikan pertumbuhan portofolio pembiayaan UMKM yang sehat dengan melakukan penetrasi pada sektor industri unggulan di setiap wilayah
2. Prioritas pertumbuhan portofolio pembiayaan UMKM adalah penetrasi pelaku ekspor dari ekosistem debitur korporasi

Unit bisnis memastikan struktur fasilitas yang sesuai dengan kondisi dan pola usaha debitur UMKM.

provide a wider range of services so that it can attract potential export oriented SME business. On the other hand, Indonesia Eximbank also focuses on improving the quality of SME financing. To support this focus, Indonesia Eximbank has used an early warning system for SME financing through disciplined financing monitoring and periodic visits to monitor debtor performance, as well as providing assistance to improve debtor performance. Other strategies implemented by Indonesia Eximbank in 2023 so that SME financing performance can run optimally include:

1. Financing through a value chain mechanism involving Indonesia Eximbank's corporate and commercial debtors. This strategy is implemented with the aim of increasing the capabilities of MSME players who are business partners of Indonesia Eximbank's corporate and commercial debtors.
2. Financing disbursement to support new exporters from CPNE graduates.
3. Financing disbursement to MSMEs from K/L assisted program participants.

In disbursing SME financing, Indonesia Eximbank is aware of a number of challenges faced in the field, such as:

1. Consistency of production quality and quantity
2. Vulnerability of MSME businesses to market dynamics
3. MSME players are generally still concentrated with a small number of buyers and limited country destinations.

To face challenges that are still full of dynamics in 2023, Indonesia Eximbank has established a number of strategies, including the following:

1. The business unit ensures sound growth of the MSME financing portfolio by penetrating leading industrial sectors in each region
2. The growth priority of the MSME financing portfolio is the penetration of exporters from corporate debtor ecosystem.

The business unit ensures that the facility structure is appropriate to the conditions and business models of MSME debtors.

Kinerja Pembiayaan UKM Tahun 2023

Pada tahun 2023, kinerja *outstanding* pembiayaan UKME tercatat mencapai Rp12,86 triliun, menurun 6,54% dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp13,76 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan pembiayaan di sektorJasa Dunia Usaha.

Perkembangan pembiayaan LPEI di segmen UKME untuk sektor Pertanian, Perburuan, dan Sarana Pertanian menunjukkan peningkatan porsi pada 2023 dibanding tahun 2022 menjadi 21,71% dari sebelumnya 15,77%, dan sektor Pengangkutan, Pergudangan, Komunikasi yang naik menjadi 2,90% dari sebelumnya 2,00%.

Dari sisi kualitas pembiayaan UKME, LPEI juga terus berusaha memperbaiki kualitas aset dengan mendorong penurunan NPL *net* menjadi 6,61% di 2023 dari sebelumnya 14,93% di tahun 2022.

Rencana Strategis Tahun 2024

Rencana kerja untuk pembiayaan UKM di tahun 2024 mendatang difokuskan untuk :

1. Penetrasi pembiayaan UMKM melalui ekosistem ekspor
2. Unit bisnis memprioritaskan pertumbuhan UMKM di sektor unggulan setiap daerah

Pertumbuhan terfokus pada sektor yang memiliki *high developmental impact*.

PEMBIAYAAN SYARIAH

LPEI menyediakan pembiayaan dengan skema berdasarkan prinsip syariah untuk mendukung pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia khususnya pembiayaan berorientasi ekspor yang memiliki keunggulan baik komparatif maupun kompetitif. Pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan syariah LPEI merupakan implementasi dari mandat Undang-Undang No. 2 tahun 2009.

Fokus target *market* dari pembiayaan Syariah LPEI adalah pembiayaan Produk Halal, pembiayaan untuk ekspor ke negara OKI, dan *co-financing* dengan lembaga keuangan Syariah lainnya.

Produk pembiayaan Syariah di LPEI mencakup pembiayaan Modal Kerja dan Investasi dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai akad antara lain akad Murabahah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT).

SME Financing Performance in 2023

In 2023, the outstanding performance of Export-oriented SME financing was recorded at Rp12.86 trillion, a decrease of 6.54% compared to 2022 which amounted to Rp13.76 trillion. This was influenced by a decrease in financing in the Business Services sector.

The development of Indonesia Eximbank financing in the Export-oriented SME segment for the Agriculture, Hunting and Agricultural Facilities sectors showed an increase in the share in 2023 compared to 2022 to 21.71% from the previous 15.77%, and the Transport, Warehousing, Communications sector which rose to 2.90% from previously 2.00%.

In terms of the quality of Export-oriented SME financing, Indonesia Eximbank also continues to strive to improve asset quality by reducing net NPL to 6.61% in 2023 from the previous 14.93% in 2022.

2024 Strategic Plan

The work plan for SME financing in 2024 is focused on:

1. Penetration of MSME financing through the export ecosystem
2. Business units prioritize the growth of MSMEs in the leading sectors of each region.

The growth is focused on sectors that have high developmental impacts.

SHARIA FINANCING

Indonesia Eximbank provides financing with sharia scheme as support in the development of the sharia economic ecosystem in Indonesia, particularly export-oriented financing that has both comparative and competitive advantages. The implementation of Indonesia Eximbank's sharia financing business activities is an implementation of the mandate of Act No. 2 of 2009.

The target market focus of Indonesia Eximbank Sharia financing is Halal Product financing, financing for exports to OIC countries, and co-financing with other Sharia financial institutions.

Sharia financing products at Indonesia Eximbank include Working Capital and Investment financing and can be implemented using various contracts including Murabahah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), and Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) contracts.

Selain produk pembiayan Modal Kerja dan Investasi, LPEI juga memberikan layanan berdasarkan prinsip Syariah untuk *Trade Finance*, Penjaminan, dan Asuransi.

Strategi dan Tantangan Tahun 2023

Dalam menyediakan pembiayaan syariah, LPEI menitikberatkan fokusnya pada perbaikan infrastruktur pembiayaan syariah, seperti sistem dan teknologi informasi, tata kelola, perbaikan struktur dokumentasi akad pembiayaan syariah dan persiapan pencatatan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh OJK IKNB Syariah. Selain itu, LPEI juga terus berusaha memperbaiki dan memperkuat kualitas aset pembiayaan syariah melalui fokus penetrasi target pasar pada negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), eksportir produk halal, dan melanjutkan *joint financing* dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya, serta memperkuat permodalan Syariah di LPEI.

Pada tahun 2023, LPEI juga mencermati adanya sejumlah tantangan yang dihadapi pembiayaan syariah, di antaranya masih adanya produk berdasarkan prinsip syariah yang harus disiapkan infrastrukturnya dan secara *cost of fund* UUS mengalami kendala dalam mencari sumber pendanaan dengan *pricing* yang kompetitif.

Sepanjang tahun 2023, LPEI telah menerapkan berbagai inisiatif strategis dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, di antaranya:

1. Memetakan prioritas produk Syariah yang harus dikembangkan terlebih dahulu;
2. Menjaga fokus pembiayaan ke segmen produk halal, pembiayaan untuk negara OKI, dan *co-financing* dengan lembaga keuangan lain; dan
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya dalam pemasaran produk Syariah baik pembiayaan Syariah, penjaminan Syariah dan asuransi Syariah.

Kinerja Pembiayaan Syariah Tahun 2023

Pada tahun 2023, kinerja pembiayaan LPEI di segmen Syariah mencapai Rp9,94 triliun atau mengalami penurunan sebesar 13,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh penurunan pada sektor Pertanian, Perburuan, dan Sarana Pertanian.

In addition to Working Capital and Investment financing products, Indonesia Eximbank also offers services based on Sharia principles for Trade Finance, Guarantees and Insurance.

Strategy and Challenges in 2023

In providing sharia financing, Indonesia Eximbank focuses on improving sharia financing infrastructure, The focus of sharia financing was to emphasize on improving sharia financing infrastructure, such as information systems and technology, governance, improvement of documentation structure of sharia financing agreements and preparation of the listing of Sharia Business Units (SBU) by OJK IKNB Syariah. Furhermore, Indonesia Eximbank also continues to strive to improve and strengthen the quality of sharia financing assets by focusing on penetrating target markets in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) member countries, halal product exporters, and continuing joint financing with other sharia financial institutions, as well as strengthening sharia capitalization at Indonesia Eximbank.

In 2023, Indonesia Eximbank also observed a number of challenges facing sharia financing, including the existence of products based on sharia principles whose infrastructure must be prepared and in terms of cost of funds SBU experienced problems in finding sources of funding with competitive pricing.

Throughout 2023, Indonesia Eximbank has implemented various strategic initiatives and mitigation measures needed to overcome the challenges faced, including:

1. Mapping Sharia product priorities that must be developed first;
2. Maintaining financing focus on the halal product segment, financing for OIC countries, and co-financing with other financial institutions; and
3. Establish cooperation with other sharia financial institutions in marketing sharia products, including sharia financing, sharia guarantee and sharia insurance.

Sharia Financing Performance in 2023

In 2023, Indonesia Eximbank's financing performance in the Sharia segment reached Rp9.94 trillion or a slight decrease of 13.35% compared to the previous year. This happened due to a decline in the agricultural sector, hunting and agricultural facilities.

Pada tahun 2023, NPL *net* pada segmen pembiayaan syariah tercatat sebesar 10,74%, turun dari sebelumnya sebesar 68,37% di tahun 2022.

Rencana Strategis Tahun 2024

Rencana strategis LPEI untuk pembiayaan syariah pada tahun 2024 mendatang adalah sebagai berikut:

1. Peran UUS menjadi lebih spesifik sebagai *product owner;*
2. Pemasaran produk Syariah dilakukan oleh Unit Bisnis LPEI;
3. Mengembangkan produk Syariah sesuai dengan strategi lembaga;
4. Terus menjalin hubungan dengan pihak eksternal baik lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan; dan
5. Menjaga fokus pembiayaan ke segmen produk halal, pembiayaan untuk negara OKI, dan *co-financing* dengan lembaga keuangan lain.

In 2023, net NPL in the sharia financing segment was recorded at 10.74%, down from the previous 68.37% in 2022.

Strategic Plan for 2024

Indonesia Eximbank 's strategic plan for sharia financing in 2024 is as follows:

1. The role of SBU becomes more specific as product owner;
2. Sharia product marketing is carried out by the Indonesia Eximbank Business Unit;
3. Develop Sharia products in accordance with the Institution's strategy;
4. Continue to build relationships with external parties, both financial institutions and non-financial institutions; and
5. Maintain financing focus on the halal product segment, financing for OIC countries, and co-financing with other financial institutions.

02 Penjaminan
Guarantee

Pada tahun 2023, bisnis penjaminan LPEI berfokus pada penjaminan proyek dengan pola Kontra Bank Garansi (KBG) yang diterbitkan oleh asuransi-asuransi rekanan LPEI. Nilai realisasi penjaminan LPEI tercapai lebih dari 71,5% berupa penjaminan proyek melalui skema KBG.

In 2023, Indonesia Eximbank's guarantee business focused on project guarantees with Counter Bank Guarantee (KBG) scheme issued by Indonesia Eximbank's partner insurers. The realization value of Indonesia Eximbank's guarantees exceeded 71.5%, consisting mainly of project guarantees through KBG schemes.

Penjaminan merupakan salah satu pilar produk mandat yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekspor nasional, sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2009 Pasal 7 dan 13. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah No. 43/2020, Pemerintah menunjuk LPEI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai SMV yang bertugas melaksanakan program Penjaminan Pemerintah (JAMINAH) yang pada tahun 2022 sudah memasuki Gen 2 sebagai perpanjangan dari Program JAMINAH Gen 1 yang telah berakhir pada 17 Desember 2021. Sampai akhir tahun 2023 tercatat 5 (lima) bank sudah memanfaatkan dan mengimplementasikan program Jaminah Gen 2 dan diperkirakan akan terus meningkat ke depannya.

Guarantee is one of the pillars of Indonesia Eximbank's mandate given by the Government in order to promote the national export growth, as mandated in Republic of Indonesia Act No. 2 of 2009 Articles 7 and 13. Furthermore, through Government Regulation No. 43/2020, the Government appointed Indonesia Eximbank and PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) as SMVs tasked with implementing the Government Guarantee Program (JAMINAH) which in 2022 entered Gen 2 as an extension of the JAMINAH Gen 1 Program that ended on 17 December 2021. By the end of 2023, 5 (five) banks have utilized and implemented the Jaminah Gen 2 program and it is estimated that this will continue to improve in the future.

Kegiatan usaha LPEI dalam bisnis segmen penjaminan meliputi penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang/jasa di luar negeri. Lalu penjaminan bagi importir barang/jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan. Para pelaku usaha lokal memperoleh bank garansi yang diterbitkan LPEI dalam mengerjakan proyek-proyek di dalam negeri yang berorientasi ekspor, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, bank garansi yang diterbitkan oleh LPEI juga dapat digunakan oleh beberapa pengusaha lokal untuk mengerjakan proyek-proyek di luar negeri yang semuanya bermuara kepada perolehan devisa negara.

Indonesia Eximbank 's business activities in the guarantee segment include guarantees for Indonesian exporters for payments received from buyers of goods/services abroad. Furthermore, guarantees for importers of Indonesian goods/services abroad for the payments that have been settled. Local businesses obtain bank guarantees issued by Indonesia Eximbank to work on export-oriented domestic projects, both directly and indirectly. Moreover, bank guarantees issued by Indonesia Eximbank can also be used by several local entrepreneurs to work on projects abroad, all of which lead to earning foreign exchange for the country.

Di samping membantu para pengusaha lokal, fasilitas penjaminan LPEI juga dapat dimanfaatkan oleh sektor perbankan di Indonesia dalam bentuk *credit enhancer*. Dengan adanya jaminan tersebut, Bank menjadi lebih aman dalam menyalurkan pembiayaan kepada para debitur eksportirnya karena penjaminan kredit LPEI memberikan *coverage* yang signifikan kepada perbankan dalam memitigasi risiko gagal bayar dari debiturnya, baik bunga maupun utang pokoknya.

In addition to helping local entrepreneurs, Indonesia Eximbank guarantee facilities can also be utilized by the banking sector in Indonesia in the form of credit enhancers. With this guarantee, the Bank becomes safer in channeling financing to its exporter debtors because the Indonesia Eximbank credit guarantee provides significant coverage to banks in mitigating the risk of default from their debtors, both interest and principal debt.

Strategi dan Tantangan Tahun 2023

Pada tahun 2023, bisnis penjaminan LPEI kembali melanjutkan fokus pada penjaminan proyek dengan pola Kontra Bank Garansi (KBG) yang diterbitkan oleh asuransi-asuransi rekanan LPEI. Hal ini terlihat dari realisasi penjaminan LPEI tahun 2023 yang tercapai lebih dari 71,5% berupa penjaminan proyek melalui skema KBG. Selain itu, LPEI juga terus berusaha memperluas target *market* penjaminan kredit dengan penerima jaminan Lembaga Keuangan Non-Bank, mengingat potensi di pasar yang masih cukup besar.

Strategy and Challenges in 2023

In 2023, Indonesia Eximbank's guarantee business continue to focus on project guarantees with Counter Bank Guarantee (CBG) scheme issued by Indonesia Eximbank's partner insurance companies. This can be seen from the realization of Indonesia Guarantee of more than 71.5% in 2023 on CBG project guarantees. Moreover, Indonesia Eximbank also continued to try to expand the target market for credit guarantees with Non-Bank Financial Institution guarantee recipients, considering the potential in the market remained quite large.

Di samping menitikberatkan perhatian pada eksekusi strategi di atas, LPEI juga telah mengimplemetasikan sejumlah strategi dan berbagai insiatif strategis lainnya di tahun 2023, antara lain:

1) Berkolaborasi dengan Bank dan L/K Partner untuk meningkatkan peran LPEI sebagai *credit enhancer;*

In addition to focusing attention on the execution of the above strategies, Indonesia Eximbank has also implemented a number of strategies and various other strategic initiatives in 2023, including:

1) Collaborating with Banks and Ministries/Institutions Partners to upgrade Indonesia Eximbank's role as a credit enhancer;

2) Sosialisasi berkala kepada calon *bank partner* untuk meningkatkan jumlah PKS;
3) Meningkatkan bisnis Penjaminan Proyek melalui skema fasilitas dan Kontra Garansi;
4) Meningkatkan *product holding* debitur eksisting;
5) Aliansi strategis dengan Lembaga Keuangan/ Asuransi/Penjaminan untuk *referal* potensi penjaminan;
6) Mengembangkan dan memasarkan produk penjaminan syariah, *custom bond,* dan *bundling cofinancing* penjaminan;
7) Optimalisasi *servicing* yang dilakukan oleh Korporasi & Kanwil;
8) Mengembangkan sistem *Front-End* Penjaminan untuk otomatisasi penerbitan sertifikat dan monitoring;
9) Menyempurnakan manual operasional Penjaminan; dan
10) Meningkatkan kapasitas SDM melalui sertifikasi & *training* mengenai Penjaminan, *Leadership & Sales.*

Seluruh strategi yang diterapkan di atas juga bertujuan untuk mengimbangi tantangan yang dihadapi bisnis penjaminan di tahun 2023, antara lain:
1) Beberapa perusahaan asuransi yang selama ini menjadi kontributor yang signifikan dalam bisnis penjaminan proyek KBG mengalami kendala internal seiring perubahan *risk appetite* bisnis penjaminan sehingga tidak dapat menerbitkan KBG sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
2) Proyek-proyek yang telah direncanakan untuk mulai dikerjakan pada tahun 2024 mengalami penundaan karena berbagai hal, sehingga penerbitan bank garansi yang dibutuhkannya pun mengalami penundaan.

Pada tahun 2023, tidak ada produk penjaminan baru yang dikeluarkan LPEI, akan tetapi Lembaga melakukan produk *bundling* dalam bentuk *co-financing* dan penjaminan.

Kinerja Penjaminan Tahun 2023

Volume penjaminan importir/luar negeri tahun 2023 tercatat sebesar Rp669 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya senilai Rp91,54 miliar. Adapun negara-negara yang menjadi tujuan transaksi utama selama 2023, antara lain Australia (Rp289 miliar), Korea Selatan (Rp234 miliar), Thailand (Rp232 miliar), Bangladesh (Rp225 miliar), Filipina (Rp222 miliar), Vietnam (Rp43,4 miliar), Singapura (Rp17,5 miliar), dan India (Rp7,46 miliar).

2) Periodic dissemination to prospective partner banks to expand the number of Cooperation Agreement (PKS);
3) Expanding the Project Guarantee business through facility and Counter Guarantee schemes;
4) Increasing product holding of existing debtors;
5) Strategic alliances with Financial/Insurance/ Guarantee Institutions for potential guarantee referrals;
6) Develop and market sharia guarantee products, custom bonds and bundling cofinancing guarantees;
7) Optimization of servicing carried out by Corporations & Regional Offices;
8) Developing a Front-End Guarantee system to automate certificate issuance and monitoring;
9) Improve the Guarantee operational manual; And
10) Expanding HR capacity through certification & training regarding Guarantee, Leadership & Sales.

All the strategies implemented above also aim to offset the challenges faced by the guarantee business in 2023, including:
1) Several insurance companies which have been significant contributors in the CBG project guarantee business experienced internal problems due to changes in the risk appetite of the guarantee business so they were unable to issue CBG as in previous years.
2) Projects that had been planned to begin work in 2024 experienced delays due to various reasons, so that the issuance of the required bank guarantees was also delayed.

In 2023, there were no new guarantee products issued by Indonesia Eximbank, however, the Institution implemented bundling products in the form of co-financing and guarantees.

Guarantee Performance in 2023

The volume of guarantees for importers/overseas in 2023 was recorded at Rp669 billion, an increase from the previous year of Rp91.54 billion. The main transaction country destinations during 2023 included Australia (Rp289 billion), South Korea (Rp234 billion), Thailand (Rp232 billion), Bangladesh (Rp225 billion), Philippines (Rp222 billion), Vietnam (Rp43.4 billion), Singapore (Rp17.5 billion), and India (Rp7.46 billion).

Sementara itu volume penjaminan *business as usual* (BAU)/non-PEN tahun 2023 dibukukan mencapai Rp8,73 triliun. Apabila dibagi berdasarkan produk, penjaminan proyek merupakan kontributor terbesar dengan porsi sekitar 79,15% atau senilai Rp6,91 triliun, lalu diikuti oleh penjaminan kredit dengan porsi 19,80% atau senilai Rp1,73 triliun, dan terakhir penjaminan importir dengan porsi 1,05% atau senilai Rp91,54 miliar.

Kemudian, volume penjaminan BAU tahun 2023 tercatat di angka Rp7,74 triliun dengan porsi penjaminan proyek sebesar 74,68% atau setara Rp5,78 triliun, porsi penjaminan importir sebesar 16,43% atau Rp1,27 triliun, dan terakhir porsi penjaminan kredit sebesar 8,89% atau Rp688,5 miliar.

Meanwhile, the volume of business as usual (BAU)/ non-National Export Financing guarantees in 2023 was recorded at Rp8.73 trillion. Based on product classification, project guarantees were the largest contributor with a portion of around 79.15% or Rp6.91 trillion, followed by credit guarantees of 19.80% or Rp1.73 trillion, and importer guarantee of 1.05% or worth Rp91.54 billion.

Furthermore, the BAU guarantee volume in 2023 was recorded at Rp7.74 trillion with the project guarantee portion of 74.68% or the equivalent of Rp5.78 trillion, the importer guarantee portion of 16.43% or Rp1.27 trillion. and the credit guarantee portion was 8.89% or Rp688.5 billion.

Jenis Penjaminan Type of Guarantee	**Realisasi** Realization 2023	**Target 2024**	**Aktual Pencapaian** Actual Achievement Feb 2024
Proyek Project	Rp7,05 triliun | trillion	9,07 triliun | trillion	Rp6,38 triliun | trillion
Kredit Credit	Rp688,5 miliar | billion	1,10 triliun | trillion	Rp728 miliar | billion

Pada tahun 2023, nilai penjaminan proyek menjadi kontributor terbesar dengan *outstanding* sebesar Rp6,38 triliun. Imbal Jasa Penjaminan (*fee*) gabungan yang dihasilkan di tahun 2023 adalah sebesar Rp94 miliar.

In 2023, the project guarantee value was the largest contributor with an outstanding of Rp6.38 trillion. The combined Guarantee Services Fee generated in 2023 was Rp94 billion.

Rencana Strategis Tahun 2024

LPEI menyambut optimis tahun 2024 mendatang dengan berfokus pada 2 (dua) rencana strategis utama, antara lain:

a) Ekstensifikasi
- Perluasan kerja sama dengan lembaga keuangan terutama perbankan internasional, perbankan (Buku II dan III) termasuk BPD terkait *co-financing* dan penjaminan kredit;
- Sosialisasi dengan perbankan dengan kriteria CAR terbatas untuk memanfaatkan program penjaminan LPEI (ATMR 0); dan
- Memperbanyak kerja sama dengan pihak asuransi terkait produk Kontra Bank Garansi.

b) Intensifikasi
- Perluasan Fitur Produk Penjaminan dengan Pengembangan *Product Champion* Penjaminan Kredit yang dapat mendorong pelaku usaha UMKM ekspor mendapatkan akses permodalan dengan *pricing* yang kompetitif;

Strategic Plan for 2024

Indonesia Eximbank is optimistic in welcoming 2024 by focusing on 2 (two) main strategic plans, including:

a) Extensification
- Expanding cooperation with financial institutions, especially international banking, banking (Books II and III) including BPD (Village Consultative Body) regarding co-financing and credit guarantees;
- Socialization with banks on limited CAR criteria to utilize the Indonesia Eximbank guarantee program (RWA 0); and
- Increase cooperation with insurance companies regarding Counter Bank Guarantee products.

b) Intensification
- Expansion of Guarantee Product Features by Developing a Credit Guarantee Product Champion to encourage export oriented MSME businesses to gain access to capital at competitive pricing;

- Melakukan sosialisasi produk Penjaminan kepada semua unit bisnis;
- *Product Package* berupa *co-financing* dan penjaminan kredit dengan unit bisnis;

- Kerja sama dengan unit pembiayaan terkait peningkatan *product holding* (kombinasi pembiayaan, asuransi dan/atau penjaminan) atas debitur *existing;* dan
- Digitalisasi *custom bond* (jaminan kepabeanan) untuk memperluas jangkauan *potential customer* dan layanan yang cepat sesuai kebutuhan dari pelaku usaha.

- Socialize Guarantee products to all business units;
- Providing Product Package in the form of co-financing and credit guarantees with business units;

- Collaboration with the financing unit regarding increasing product holding (a combination of financing, insurance and/or guarantees) for existing debtors; and
- Digitization of custom bonds to expand the reach of potential customers and provide fast services according to the needs of business players.

03 Asuransi
Insurance

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dan persaingan ketat kompetisi ekspor Indonesia di pasar global, LPEI berhasil memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan aktivitas ekspor nasional melalui layanan Asuransi.

Amid various challenges and tough competition faced by Indonesian exports in the global market, Indonesia Eximbank has significantly contributed to supporting the increase in national export activities through its insurance services.

Dalam rangka menjalankan Pembiayaan Ekspor Nasional, LPEI tidak hanya memberikan Pembiayaan dan Penjaminan melainkan juga menyediakan layanan Asuransi. Mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 pasal 3, Asuransi yang diberikan memberikan perlindungan atas risiko kegagalan ekspor; asuransi atas risiko kegagalan bayar; asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

In order to carry out National Export Financing, Indonesia Eximbank not only provides financing and guarantees but also provides insurance services. Pursuant to Act No. 2 of 2009 article 3, Insurance provides protection against the risk of export failure; insurance against the risk of default; insurance for investments made by Indonesian companies overseas; and/or insurance against political risks in a country of export destination.

Layanan Asuransi yang diberikan oleh LPEI berfokus untuk membantu para eksportir baik yang merupakan tertanggung eksisting maupun tertanggung baru. LPEI berkomitmen akan terus memperkuat bisnis asuransi melalui ekosistem ekspor dan bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bank maupun Non-Bank, Kementerian/Lembaga, asosiasi usaha dan *Export Credit Agency* negara lain.

The insurance services provided by Indonesia Eximbank focus on assisting exporters, both existing and new insureds. Indonesia Eximbank is committed to continuing to strengthen the insurance business through the export ecosystem and collaborating with Bank and Non-Bank Financial Institutions, Ministries/ Institutions, business associations and Export Credit Agencies in other countries.

Sampai dengan akhir 2023, LPEI tidak meluncurkan produk baru, akan tetapi Lembaga menawarkan produk *bundling* dalam bentuk Pembiayaan PKE UKM dan *Trade Credit Insurance* (TCI) serta paket Produk *Trade Finance* dan TCI. Produk TCI merupakan produk unggulan LPEI, di mana produk tersebut mendukung perluasan pangsa pasar para Eksportir Indonesia untuk memasuki negara baru dan bekerja sama dengan *buyer* baru.

In 2023, Indonesia Eximbank did not launch any new products, however, the Institution offered bundling products in the form of PKE SME Financing and Trade Credit Insurance (TCI) as well as Trade Finance and TCI Product packages. TCI products are Indonesia Eximbank's superior products, to support the expansion of market share for Indonesian exporters to enter new countries and collaborate with new buyers.

Strategi dan Tantangan Tahun 2023

Dalam menjalankan bisnis Asuransi, LPEI kerap dihadapkan dengan sejumlah tantangan eksternal, seperti kondisi perekonomian dan politik dunia yang belum sepenuhnya stabil di masa pemulihan pandemi sehingga memberikan risiko ketidakpastian tinggi yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat sehingga pada gilirannya juga berimbas pada menurunnya volume transaksi.

Menyadari bahwa beberapa risiko dan tantangan bersifat melekat *(inherent)* dengan pengelolaan bisnis Asuransi, maka LPEI telah menempuh langkah-langkah strategis yang tepat di tahun 2023 untuk mendukung kelancaran pelaksanaan mandat penyediaan PKE melalui layanan Asuransi LPEI, antara lain:

1) Berkolaborasi dengan Bank dan L/K *Partner* untuk meningkatkan peran LPEI sebagai penyedia produk asuransi dalam rangka mitigasi risiko;
2) Sosialisasi berkala kepada calon *bank partner* untuk meningkatkan jumlah PKS;
3) Meningkatkan *portfolio Trade Credit Insurance* dengan cara kerja sama dengan Broker Asuransi;
4) Meningkatkan *product holding* debitur eksisting;
5) Aliansi strategis dengan Lembaga Keuangan/ Asuransi/Penjaminan untuk *referal* potensi Asuransi;

Strategy and Challenges in 2023

In implementing the Insurance business, Indonesia Eximbank is often faced with a number of unavoidable external challenges, such as world economic and political conditions which are not yet completely stable during the pandemic recovery period, thus, providing a high risk of uncertainty which has an impact on reducing people's purchasing power, which in turn also has an impact on decreasing volume. transaction.

Realizing that several risks and challenges are inherent in managing the Insurance business, Indonesia Eximbank has taken appropriate strategic measures in 2023 to support the smooth implementation of the mandate to provide PKE through Indonesia Eximbank Insurance services, including:

1) Collaborate with Banks and Ministries/Institutions Partners to upgrade Indonesia Eximbank's role as an insurance product provider in the context of risk mitigation;
2) Periodic dissemination to prospective partner banks to expand the number of Cooperation Agreement (PKS);
3) Expanding the Trade Credit Insurance portfolio by collaborating with Insurance Brokers;
4) Increase product holding of existing debtors;
5) Strategic alliance with Financial/Insurance/ Guarantee Institutions for potential referrals;

6) Mengembangkan produk Asuransi syariah;
7) Optimalisasi *servicing* yang dilakukan oleh Korporasi & Kantor wilayah;
8) Menyempurnakan manual operasional Asuransi; dan
9) Meningkatkan kapasitas SDM melalui sertifikasi & *training* mengenai Produk Asuransi, *Leadership & Sales.*

6) Develop sharia insurance products;
7) Optimization of servicing carried out by Corporations & Regional Offices;
8) Improve the Insurance operational manual; and
9) Expanding HR capacity through certification & training regarding Insurance Products, Leadership & Sales.

Kinerja Asuransi Tahun 2023

Produk Asuransi LPEI khususnya asuransi Proteksi Piutang Dagang dan Asuransi *Marine Cargo Insurance* berkontribusi dalam mendukung kegiatan ekspor Indonesia dengan memberikan perlindungan atas transaksi ekspor yang ditujukan untuk *buyer* di luar negeri. Proteksi asuransi yang diberikan oleh LPEI mencakup proses pengangkutan sampai dengan pembayaran diterima oleh eksportir Indonesia. Hingga akhir 2023, LPEI telah memberikan pelayanan terhadap 764 *buyer* yang tersebar di 82 negara.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dan persaingan ketat kompetisi ekspor Indonesia di pasar global, LPEI berhasil memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan aktivitas ekspor nasional melalui layanan Asuransi yang nilai transaksinya dibukukan mencapai Rp12,02 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp11,7 triliun.

Insurance Performance in 2023

Indonesia Eximbank Insurance products, especially Trade Receivables Protection insurance and Marine Cargo Insurance, contribute to supporting Indonesian export activities by providing protection for export transactions intended for overseas buyers. The insurance protection provided by Indonesia Eximbank covers the transportation process until payment is settled by the Indonesian exporter. In 2023, Indonesia Eximbank has provided services to 764 buyers spread across 82 countries.

In the midst of various challenges faced and intense competition for Indonesian exports in the global market, Indonesia Eximbank succeeded in making a real contribution in supporting the increase in national export activities through insurance services, the transaction value of Rp12.02 trillion, an increase from the previous year of Rp11.7 trillion.

Berikut ini adalah realisasi pencapaian kinerja lini bisnis Asuransi tahun 2023:

The following is the realization of the performance achievements of the Insurance business line in 2023:

Jenis Layanan Asuransi Type of Insurance Services	**Realisasi 2023** 2023 Realization	**Realisasi 2022** 2022 Realization
Proteksi Piutang Dagang Trade Credit Insurance	Rp11,17 triliun	Rp9,74 triliun
Marine Cargo	Rp849,91 miliar	Rp2,13 triliun

Pada tabel di atas terlihat bahwa layanan Asuransi LPEI masih berfokus pada Asuransi TCI yang memberikan kontribusi senilai Rp11,17 triliun dari total keseluruhan portofolio Asuransi. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9,74 triliun. Sedangkan layanan Asuransi *Marine Cargo Insurance* mencatatkan volume sebesar Rp0,85 triliun pada 2023, menurun dari tahun 2022 senilai Rp2,13 triliun.

The above table showed that Indonesia Eximbank Insurance services still focused on TCI Insurance which contributes Rp11.17 trillion to the total insurance portfolio. This amount showed an increase compared to the previous year of Rp9.74 trillion. Meanwhile, Marine Cargo Insurance services recorded a volume of Rp0.85 trillion in 2023, a decrease from Rp2.13 trillion in 2022.

Rencana Strategis Tahun 2024

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, LPEI turun mendukung dengan menyediakan produk asuransi berbasis syariah. Selain itu, LPEI ingin selalu hadir dalam rantai ekspor Indonesia dengan menyediakan produk *Pre Shipment Insurance* di tahun 2024 nanti. Selain itu, LPEI terus berupaya meningkatkan pelayanan dan produk untuk mendukung peningkatan ekspor nasional.

Secara bisnis, di tahun 2024 akan tetap menjalankan strategi peningkatan bisnis asuransi baik dari sisi *customer based* dan volume transaksi. Untuk mendukung strategi bisnis di tahun 2024, beberapa fokus target LPEI adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kapasitas Reasuransi dan Partner Reasuransi;
2) Penyempurnaan proses *underwriting*;
3) Pengembangan produk Asuransi yang berbasis syariah; dan
4) Perluasan kerja sama ekosistem asuransi.

Strategic Plan for 2024

Along with the development of the sharia economy in Indonesia, Indonesia Eximbank stepped in to support it by providing sharia-based insurance products. In addition, Indonesia Eximbank wants to always be present in the Indonesian export chain by providing Pre Shipment Insurance products in 2024. Moreover, Indonesia Eximbank continues to strive to improve services and products to support the improvement of national exports.

From a business perspective, in 2024 we will continue to implement a strategy to increase the insurance business both in terms of customer base and transaction volume. To support business strategies in 2024, Indonesia Eximbank's has established the following target focuses:

1) Increasing Reinsurance Capacity and Reinsurance Partners;
2) Improvement of the underwriting process;
3) Development of sharia-based insurance products; And
4) Expansion of insurance ecosystem cooperation.

04 Trade Finance
Trade Finance

Melalui penyediaan layanan Trade Finance yang terintegrasi, LPEI berusaha menciptakan nilai tambah bagi para eksportir dan pemasok sekaligus memberikan peluang perusahaan untuk berekspansi sehingga berdampak kepada peningkatan aktivitas ekonomi Indonesia terutama dari aktivitas ekspor.

By providing integrated Trade Finance services, Indonesia Eximbank seeks to create added value for exporters and suppliers while providing opportunities for companies to expand, thereby impacting the increase of Indonesia's economic activities, especially in exports.

LPEI membentuk Unit kerja *Trade Finance* dalam menyediakan layanan *Trade Finance* untuk membantu para eksportir meningkatkan penjualan dan kontribusinya terhadap nilai ekspor nasional. *Trade Finance* merupakan sebuah *one stop solution services* yang menyediakan fasilitas pembiayaan, baik untuk *pre-shipment* (termasuk di dalamnya *post-import*) hingga *post-shipment*, sesuai dengan kebutuhan nasabah atau calon nasabah.

Dalam menyediakan layanan *Trade Finance,* LPEI senantiasa memperhatikan aspek pengelolaan risiko, seperti risiko komersial dan operasional, risiko-risiko dalam transaksi *cross-border* serta memanfaatkan jaringan yang luas untuk memitigasi risiko dan optimasi pendanaan berbasis *Trade Finance* sehingga diharapkan diperoleh biaya dan *pricing* yang lebih efisien.

Melalui penyediaan layanan *Trade Finance* yang terintegrasi, LPEI berharap dapat memberikan nilai tambah bagi eksportir dan pemasok sekaligus memberikan peluang perusahaan untuk berekspansi sehingga berdampak kepada peningkatan aktivitas ekonomi Indonesia terutama dari aktivitas ekspor.

Indonesia Eximbank established a Trade Finance business unit to provide Trade Finance services to facilitate exporters to increase sales and contribute to the value of national exports. Trade Finance is a one-stop solution service that provides financing facilities, both pre-shipment (including post-import) and post-shipment, according to the needs of customers or prospective customers.

In providing Trade Finance services, Indonesia Eximbank always pays attention to risk management aspects, such as commercial and operational risks, risks in cross-border transactions and utilizes an extensive network to mitigate risks and optimize financing based on trade finance to obtain a more efficient cost of funds and pricing structure.

By providing integrated Trade Finance services, Indonesia Eximbank hopes to provide added value for exporters and suppliers while providing opportunities for companies to expand so that it has an impact on increasing Indonesian economic activity, especially from export activity.

Strategi dan Tantangan Tahun 2023

Strategi

- Intensifikasi:
  Optimalisasi distribution *channel, cross selling, blended financing*
- Ekstensifikasi:
  Perluasan pasar, Kolaborasi Ekosistem berkelanjutan, *Co-financing*
- Perbaikan *Pricing*
  Pengenaan struktur *pricing* dan *fee* yang optimal serta bersaing
- *Business Solution Center*
  Peningkatan layanan kepada nasabah secara komprehensif, solusi produk dan pembentukan unit sindikasi (*arranger*)
- Perbaikan Tata Kelola
  Penyempurnaan tata kelola berkelanjutan

Tantangan:

1. Pembentukan limit baru di Q2 dan Q3 sehingga *disbursement* kurang maksimal
2. *Pricing* komersial yang dianggap kurang bersaing

Strategy and Challenges in 2023

Strategy

- Intensification:
  Optimizing distribution channels, crossselling, blended financing
- Extensification:
  Market expansion, sustainable ecosystem collaboration, joint financing
- Price Improvements
  Imposition of optimal and competitive pricing and fee structures
- Business Solutions Center
  Comprehensive improvement of services to customers, product solutions and formation of an arranger
- Improved Governance
  Improving sustainable governance

Challenge:

1. Establishment of new limits in Q2 and Q3 so that disbursement is less than optimal
2. Setting commercial prices that are considered less competitive

Kinerja *Trade Finance* Tahun 2023

- TFC membukukan pendapatan bunga sebesar Rp196 miliar dan pendapatan *fee* sebesar Rp7,5 miliar dari transaksi di tahun 2023.
  Dibandingkan tahun sebelumnya,
  Secara total pendapatan mengalami peningkatan sebesar 215% YoY.
- Pada tahun 2023, *Trade Finance* men-*generate* volume transaksi sebesar Rp16,07 triliun, turun 4,7% secara YoY.
- Namun demikian, *customer based* meningkat. Dari yang sebelumnya sejumlah 66 nasabah pada tahun 2022 menjadi 80 Nasabah di tahun 2023. Di mana 65% merupakan nasabah segmen UKM dan UMBE, dengan 35% merupakan nasabah korporasi.

Trade Finance Performance in 2023

- TFC posted interest income of Rp196 billion and fee income of Rp7.5 billion from transactions in 2023.

  Compared to the previous year, in total, revenue increased by 215% YoY.

- In 2023, Trade Finance generated a transaction volume of 16,065 trillion, down 4.7% YoY.

- However, there was an increase in customer base, from previously 66 customers in 2022 to 80 customers in 2023. Of which 65% are SME and UMBE segment customers, and 35% being corporate customers.

Rencana Strategis 2024

Produk/Program Baru

- *Approved Payable Financing*
- Program Paket PRIMA dan PRIMEX
- Layanan DHE SDA (Reksus, Optimus, Prime & Dare)

Penyempurnaan Produk

- Penyesuaian *pricing* produk TF
- Penyempurnaan PTO dan SPP TF

Sinergi dengan Lembaga Keuangan lainnya

- Sosialisasi program *Co-Financing* kepada seluruh Kanwil BNI
- Implementasi perluasan *partner* layanan CMS (BCA dan Danamon)
- Penambahan partner *Co-Financing* (Bank Jatim dan Permata)

Internal Enhancement

- Sertifikasi CITF, CDCS, CTFC
- *Commodity, industry, and product knowledge training*

Strategic Plan for 2024

New Products/Programs

- Approved Payable Financing
- PRIMA and PRIMEX Package Programs
- DHE SDA Services (Reksus, Optimus, Prime & Dare)

Product Improvement

- Adjustment of TF product pricing
- Improvement of PTO and SPP TF

Synergy with other Financial Institutions

- Socialization of the Co-Financing program to all BNI Regional Offices
- Implementation of expansion of CMS service partners (BCA and Danamon)
- Addition of Co-Financing partners (Bank Jatim and Permata)

Internal Enhancement

- CITF, CDCS, CTFC certification
- Commodity, industry, and product knowledge training

05 Treasury
Treasury

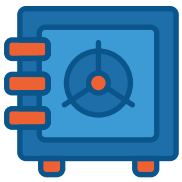

Berkat implementasi strategi yang tepat, Divisi Financial Institution and Treasury mampu menjaga pertumbuhan beban bunga tetap berada di bawah kenaikan suku bunga di pasar. Selain itu, Divisi Financial Institution and Treasury juga berhasil menambah jumlah bank koresponden baik dalam negeri maupun luar negeri yang dapat menerima penempatan LPEI.

Due to the implementation of appropriate strategies, the Financial Institution and Treasury Division have managed to keep interest expense growth below the rise in interest rates in the market. Additionally, the Financial Institution and Treasury Division have successfully increased the number of domestic and international correspondent banks capable of receiving placements from Indonesia Eximbank.

LPEI memiliki Divisi Financial Institution and Treasury yang berperan penting dalam operasional LPEI karena memiliki kewenangan strategis dari masing-masing departemen berikut.

1. ***Dealing Room***
   - Mengelola Likuiditas Lembaga, baik jangka pendek dan jangka panjang.
   - Melakukan penempatan dana pada instrumen yang memiliki risiko terkendali dan likuid.
   - Melakukan transaksi jual beli valuta asing untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah.
   - Pengelolaan Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) secara *prudent*.

2. ***Financial Institution***
   - Fokus terhadap *Counterparty Bank* atau Lembaga Keuangan Non Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).
   - Melakukan *set up* & *annual review interbank limit*.
   - Melakukan penggalangan dana melalui *loan market bilateral (term loan, revolving loan, BA Financing)*, *syndication/club deal* dan *capital market* yaitu penerbitan obligasi valas.
   - Melakukan hubungan korespondensi; *Set Up & Annual Review* RMA, melakukan KYC/AML *Due Diligence* dan *Nostro Account maintaining*.

Indonesia Eximbank has established Financial Institution and Treasury Division which plays an important role in Indonesia Eximbank's operations due to its strategic authority from each of the following departments.

1. **Dealing Room**
   - Manage short term and long term liquidity.
   - Place funds in controlled risk and liquid instruments.
   - Execute foreign exchange buying and selling transactions to accommodate customer needs.
   - Prudent management of the Net Open Position (PDN) Ratio.

2. **Financial Institutions**
   - Focus on Counterparty Banks or Non-State/ Regional Owned Enterprises (BUMN/D) Financial Institutions.
   - Conduct set up & annual review of interbank limits.
   - Conduct fundraising through bilateral loan markets (term loans, revolving loans, BA Financing), syndication/club deals and capital markets, namely the issuance of foreign currency bonds.
   - Perform correspondence relations; Set Up & Annual Review RMA, perform KYC/AML Due Diligence and maintain Nostro Account.

3. Pendanaan

- Fokus terhadap *Counterparty* Bank atau Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).
- Melakukan *set up & annual review interbank limit*.
- Melakukan penggalangan dana melalui *loan market bilateral* (*term loan, revolving loan, BA Financing*, Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek), *syndication/club deal* dan *capital market* yaitu penerbitan obligasi rupiah.
- Melakukan hubungan korespondensi; *Set Up & Annual Review* RMA, melakukan KYC/AML *Due Diligence dan Nostro Account maintainin*g.

3. Funding

- Focus on Counterparty Banks or State/Regional Owned Enterprise (BUMN/D) Financial Institutions.
- Conduct set up & annual review of interbank limits.
- Conduct fundraising through bilateral loan markets (term loans, revolving loans, BA Financing, Short Term Loan Facilities), syndication/club deals and capital markets, namely the issuance of rupiah bonds.
- Perform correspondence relations; Set Up & Annual Review RMA, perform KYC/AML Due Diligence and maintain Nostro Account.

Strategi dan Tantangan Tahun 2023

Strategi:

1. *Rebalancing Maturity Profile* – strategi ini bertujuan untuk mengelola profil jatuh tempo yang lebih terukur sehingga menghindari penumpukan jatuh tempo kewajiban di waktu yang bersamaan. Adapun rencana yang telah dilakukan antara lain:
   - Melakukan negosiasi tingkat suku bunga atas seluruh pinjaman eksisting.
   - Masuk pasar dalam rangka penggalangan dana yaitu melalui instrumen sindikasi, bilateral, *stand by facility*, dll.
   - Mengoptimalkan pengelolaan sumber dana melalui penambahan baik dari jumlah bank dan *limit money market*.

Strategy and Challenges in 2023

Strategy:

1. Rebalancing Maturity Profile – this strategy aims to manage a more measurable maturity profile so as to avoid the accumulation of overdue liabilities at the same time. The measures that have been put into include:
   - Negotiating interest rates on all existing loans.
   - Going to the market in to raise funds through syndicated, bilateral, stand by facility, and other instruments.
   - Optimizing the management of funding sources by increasing both the number of banks and money market limits.

- Melakukan pelunasan dipercepat dalam rangka mengelola kecukupan sumber dana yang lebih optimal.

2. Menambah jumlah kreditur *on-shore* – strategi ini dilakukan dalam rangka diversifikasi sumber dana yang lebih efisien. Strategi ini dilakukan dengan cara:
   - Meningkatkan hubungan koresponden dengan bank asing eksisting untuk mendapatkan sumber dana *on-shore*.
   - Mengintensifkan pembukaan hubungan koresponden dengan bank baru untuk mendapatkan sumber dana *on-shore*.

Tantangan :

1. Trend kenaikan suku bunga

Kinerja Treasury Tahun 2023

Dengan strategi dan rencana yang telah dilakukan, maka pada tahun 2023 pencapaian Divisi FIT antara lain:

1. Dengan trend suku bunga yang meningkat pada tahun 2023, pertumbuhan beban bunga tetap di bawah laju tren pertumbuhan suku bunga di pasar.
2. LPEI melakukan penggalangan dana (USD450 juta), bilateral baik dalam dan luar negeri serta diperolehnya kreditur baru baik konvensional dan syariah.
3. Bertambahnya jumlah bank koresponden baik dalam negeri maupun luar negeri yang dapat menerima penempatan LPEI.
4. Melakukan *reprofiling* melalui pelunasan dipercepat sebesar USD250 juta yang seharusnya jatuh tempo pada tahun 2023.
5. Terpenuhinya seluruh kewajiban jatuh tempo (pinjaman dan obligasi) secara tepat waktu dan tepat jumlah di tahun 2023.
6. Pinjaman yang diterima posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp29,297 miliar atau mencapai 93,95% dari target sebesar Rp31.182 miliar yang terdiri atas pinjaman dalam valas sebesar Rp22,154 miliar dan rupiah sebesar Rp7,143 miliar. Total pinjaman yang diterima meningkat sebesar 1,73% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
7. Terpenuhinya kewajiban hutang jatuh tempo valas sebesar USD630 juta, Obligasi Jatuh Tempo sebesar Rp3,09 triliun, jatuh tempo pinjaman rupiah sebesar Rp2 triliun. Selain itu, LPEI melakukan pelunasan dipercepat sebesar USD250 atas fasilitas sindikasi serta pembelian kembali (*buyback*) Obligasi dengan tujuan untuk disimpan

- Accelerating repayment to better manage the adequacy of funding sources.

2. Increasing the number of on-shore creditors – this strategy is implemented as a part of more efficient diversification of funding sources through:
   - Increasing correspondent relationships with existing foreign banks to obtain on-shore funding sources.
   - Intensifying the opening of correspondent relationships with new banks to obtain on-shore funding sources.

Challenge :

1. Trend of increasing interest rates

Treasury Performance in 2023

The strategies and plans that have been implemented in 2023 allowed the FIT Division to obtain the following achievements:

1. Despite the trend of interest rates increases in 2023, Interest expense growth remains below the market's interest rate growth trend.
2. Indonesia Eximbank succeeded in raising bilateral funds (USD450 million), either domestically or internationally, as well as attracting new conventional and Sharia lenders.
3. Increase in the number of correspondent banks, either domestic or international, that can accept Indonesia Eximbank placements.
4. Reprofiling by accelerating the repayment of USD250 million which due in 2023.
5. Fulfillment of all maturing obligations (loans and bonds) on time and in the exact amounts in 2023.
6. Borrowing received as of 31 December 2023 amounted to Rp29.297 billion or reached 93.95% of the target of Rp 31,182 billion, consisting of foreign currency loans of Rp22.154 billion and rupiah amounting to Rp7.143 billion. Total loans received increased by 1.73% compared to the same period the previous year.
7. Fulfillment of obligations for mature foreign currency debts of USD630 million, matured bond obligations of Rp3.09 trillion, matured rupiah loans of Rp2 trillion. In addition, Indonesia Eximbank made an accelerated repayment of USD250 for the syndication facility as well as the buyback of bonds

kemudian dapat dijual kembali sebesar Rp145 miliar dengan:

a. Diperolehnya pinjaman bilateral dalam bentuk *multicurrency* (IDR dan USD) dari 13 Bank, termasuk di antaranya 1 Bank Syariah.
b. Serta pengelolaan *Treasury Asset* yang optimal untuk menjaga likuiditas yang efisien.

8. Pendapatan *Treasury* atas pengelolaan portfolio *Treasury* mencapai Rp494 miliar sampai dengan 31 Desember 2023.

Rencana Strategis 2024

1. *Available funding lines* dikelola secara memadai dalam pengelolaan risiko likuiditas dan mendukung ekspansi pembiayaan dengan biaya yang efisien.
2. Perluasan sumber pendanaan baru tidak hanya bertumpu pada *wholesale funding* namun juga menyasar *retail funding.*
3. *Interest Income* yang optimal dan *interest expense* yang efisien dari pengelolaan portofolio *treasury.*
4. Keragaman *counterparties* untuk mendukung operasional penyaluran pembiayaan, penetrasi pasar bagi *new exporter* dan perluasan bisnis asuransi dan penjaminan.

with the aim of saving them and then reselling them for Rp145 billion by:

a. Obtaining multicurrency (IDR and USD) bilateral loans from 13 banks, including 1 Sharia Bank.
b. Optimal Treasury Asset management to maintain efficient liquidity.

8. Treasury income from treasury portfolio management reached Rp494 billion as of 31 December 2023.

Strategic Plan for 2024

1. Appropriate management of available funding lines to manage liquidity risk and support funding expansion at an efficient cost.
2. Expansion of new funding sources not only relies on wholesale funding but also targets retail funding.
3. Optimal interest income and efficient interest expense from treasury portfolio management.
4. Diversity of counterparties to support financing, market penetration for new exporters and expansion of the insurance and guarantee business.

06 Jasa Konsultasi
Advisory Services

LPEI memberikan bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung program ekspor nasional. Di samping itu, LPEI juga memiliki program unggulan yang menjadi *Unique Value Preposition*, yaitu *Coaching Program for New Exporters* (CPNE) dan Desa Devisa.

Indonesia Eximbank provides guidance and consulting services to banks, financial institutions, exporters, producers of export goods, especially micro, small, and medium-sized enterprises, to support national export programs. Furthermore, LPEI also offers prominent programs that serve as Unique Value Propositions, namely the Coaching Program for New Exporters (CPNE) and Go Export Village.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional (KD PEN), LPEI dapat menyediakan Jasa Konsultasi kepada pihak terkait dalam rangka memberikan bantuan dan mengatasi hambatan ekspor serta mendukung penyediaan Pembiayaan Ekspor Nasional. Jasa Konsultasi yang diberikan LPEI berupa aktivitas konsultasi, pemberdayaan, pengembangan kapasitas, advokasi, dan/atau jasa konsultasi lainnya yang termasuk di dalamnya kegiatan dari pendampingan calon eksportir baru.

Pursuant to the provisions of Act No. 2 of 2009 and Republic of Indonesia Government Regulation No. 43 of 2019 on the fundamental principles of national export financing policy in Indonesia (KD PEN), Indonesia Eximbank can provide Advisory Services to related parties in order to provide assistance and overcome export obstacles and support the provision of National Export Financing. The advisory services provided by Indonesia Eximbank are in the form of consulting activities, empowerment, capacity enhancement, advocacy, and/or other consultancy services which include activities such as mentoring potential new exporters.

Dalam menyediakan Jasa Konsultasi, LPEI menjalankan fungsinya dengan memberikan bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung program ekspor nasional. Pada lini usaha ini, LPEI juga memiliki program unggulan yang menjadi *Unique Value Preposition*, yaitu *Coaching Program for New Exporters* (CPNE) dan Desa Devisa.

In providing Advisory Services, Indonesia Eximbank carries out its function by providing guidance and consulting services to banks, financial institutions, exporters, producers of export goods, especially micro, small and medium enterprises to support national export programs. In this business line, Indonesia Eximbank also has established a superior program which has become a Unique Value Preposition, namely the Coaching Program for New Exporters (CPNE) and Go Export Village.

Kegiatan Jasa Konsultasi melalui CPNE merupakan program khusus rintisan eksportir baru yang memberikan pelatihan dan mempersiapkan para pelaku UKM untuk menjadi eksportir baru melalui sosialisasi, pelatihan, pameran, bimbingan, dan

The Advisory Services activity through CPNE is a special pilot program for new exporters that provides training and prepares SMEs to become new exporters through socialization, training, exhibitions, mentoring and other activities to clusters (community of

kegiatan lainnya kepada *cluster* (komunitas pelaku usaha) dan *non-cluster* (individu UKM). Melalui CPNE, LPEI terus berupaya mencetak eksportir-eksportir baru di seluruh Indonesia dengan memberikan pendampingan secara intensif kepada pelaku UMKM berorientasi ekspor hingga dapat menjual produknya ke pasar luar negeri.

business actors) and non-clusters (individual SMEs). Indonesia Eximbank aims to use CPNE to intensively assist export-oriented MSMEs until they are able to sell their products in foreign markets and create new exporters across the country.

LPEI juga memfasilitasi para peserta CPNE mengikuti pameran berskala internasional sebagai sarana untuk meningkatkan peluang bisnis agar dapat "*go international*". Jasa Konsultasi juga mengadakan sosialisasi terkait ekspor dengan tema khusus pada kegiatan yang berada di Rumah Ekspor dengan tujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan dan memotivasi para pelaku usaha untuk melakukan ekspor.

CPNE participants are enabled by Indonesia Eximbank to take part in global exhibitions to enhance their prospects of going global. Furthermore, the Advisory arranges themed socialization events regarding exports at the Export House, aimed at providing information, knowledge, and inspiring businesses to participate in exports.

Selain itu, LPEI juga melakukan kegiatan *community development* dengan mendirikan Desa Devisa di daerah yang memiliki komoditas unggulan dan berpotensi dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Moreover, Indonesia Eximbank provides community development services through coaching Go Export Village in regions that have great commodities and the potential for development, for the purpose of uplifting the welfare of the surrounding community.

Strategi dan Tantangan Tahun 2023

Fokus penyediaan layanan Jasa Konsultasi LPEI di tahuh 2023 masih tertuju pada upaya pembentukan komunitas ekspor, penciptaan eksportir baru, peningkatan jumlah Desa Devisa, dan penguatan kolaborasi dengan K/L dan SMV lainnya. Secara

Strategy and Challenges in 2023

The focus of providing Indonesia Eximbank Advisory Services in 2023 remains concentrating on efforts to form an export community, create new exporters, increase the number of Go Export Village, and strengthen collaboration with other Ministries/

khusus untuk dapat mewujudkan target peningkatan jumlah Desa Devisa dan eksportir baru, LPEI telah menerapkan 4 (empat) strategi utama dan sejumlah inisiatif strategis turunan lainnya di tahun 2023, antara lain:

1. ***Research Based***
   - Divisi Jasa Konsultasi fokus terhadap 5 (lima) komoditas dan 3 (tiga) industri;
   - Divisi Jasa Konsultasi fokus terhadap 10 (sepuluh) Provinsi pengembangan wilayah; dan
   - Divisi Jasa Konsultasi fokus terhadap 3 (tiga) negara prioritas dan 8 (delapan) negara tujuan ekspor.

2. **Kolaborasi**
   - Kolaborasi pelaksanaan CPNE bersama kemenkeu satu, K/L, Pemda dan Asosiasi;
   - Kolaborasi pelaksanaan Desa Devisa dengan Kemenkeu satu, K/L dan Debitur LPEI; dan
   - Kolaborasi pelaksanaan *Marketing Handholding* K/L dan diaspora.

3. **Digitalisasi**
   - Pengembangan platform digital sebagai *marketplace*, pusat informasi, edukasi, dan kebutuhan pembiayaan ekspor;
   - Monitoring dan *Database* mitra binaan LPEI; dan
   - *Helpdesk* Jasa Konsultasi.

4. ***Sustainability***
   - Optimalisasi Program Kemitraan untuk Divisi Jasa Konsultasi sebagai pengusul dan Divisi Bisnis & Risk sebagai pemutus;
   - Pembinaan alumni CPNE untuk mendapatkan fasilitas LPEI; dan
   - Perhitungan *Developmental Impact*.

Implementasi seluruh strategi di atas tentunya juga sudah memperhitungkan sejumlah tantangan utama yang dihadapi LPEI dalam menjalankan program-program unggulan pada layanan Jasa Konsultasi, di antaranya:

Institutions and SMVs. Specifically, to be able to realize the target of increasing the number of Go Export Village and new exporters, Indonesia Eximbank has implemented 4 (four) main strategies and a number of other derivative strategic initiatives in 2023, including:

1. **Research Based**
   - Advisory Services Division focuses on 5 (five) commodities and 3 (three) industries;
   - Advisory Services Division focuses on 10 (ten) regional development provinces; and
   - The Advisory Services Division focuses on 3 (three) priority countries and 8 (eight) export destination countries.

2. **Collaboration**
   - Collaboration in implementing CPNE with the first Ministry of Finance, Ministries/Institutions, Regional Government and Associations;
   - Collaboration in the implementation of the Go Export Village with the Ministry of Finance, Ministries/Institutions and Indonesia Eximbank Debtors; and
   - Collaboration in the implementation of Ministries/Institutions Marketing Handholding and the diaspora.

3. **Digitalization**
   - Development of a digital platform as a marketplace, center for information, education and export financing needs;
   - Monitoring and database of Indonesia Eximbank 's fostered partners;
   - Consultation Services Helpdesk.

4. **Sustainability**
   - Optimization of the Partnership Program for the Advisory Services Division as the proposer and the Business & Risk Division as the decision maker;
   - Guiding CPNE alumni to obtain Indonesia Eximbank facilities;
   - Developmental Impact Calculation.

The implementation of all the strategies above takes into account a number of main challenges faced by Indonesia Eximbank in implementing superior programs in Advisory Services, including:

1) **Pemetaan pelaku UMKM dan Wilayah yang potensial untuk dilakukan pendampingan CPNE serta Desa Devisa**
   LPEI memperluas koordinasi dengan *stakeholder* terkait serta melibatkan pihak swasta yang memiliki program serupa.

2) **Standardisasi implementasi yang belum sinkron dalam pelaksanaan pengembangan UMKM antara *stakeholder* daerah dengan LPEI**

   LPEI melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan *stakeholder* daerah dan menyampaikan pro dan kontra agar dapat tercapai kesepakatan bersama.

3) ***Monitoring* atas terlaksananya program**
   LPEI melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait di daerah untuk melakukan *monitoring* bersama.

Kinerja Jasa Konsultasi Tahun 2023

Berkat implementasi strategi dan rencana bisnis yang matang, Jasa Konsultasi LPEI berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian di 2023, antara lain:

- CPNE telah dilakukan di 10 Kota (Medan, Semarang, Bandung, Bali, Yogyakarta, Surabaya, Aceh, Mataram, Banjarmasin, dan Jakarta), sebanyak 78 kali pelatihan yang dihadiri oleh 1.307 UKM, dan telah menghasilkan 389 eksportir baru.

- *Community Development* sampai dengan 31 Desember 2023 telah menghasilkan total 739 Desa Devisa Baru yang berdampak langsung dan tidak langsung kepada 63.836 petani, pengrajin, dan petambak penerima manfaat.
- *Marketing handholding* sampai dengan 31 Desember 2023, telah dilaksanakan 29 *Business Matching.*
- Rumah Ekspor sampai dengan 31 Desember 2023, telah dilaksanakan 4 kegiatan *Focus Group Discussion* dengan tema khusus sesuai dengan fokus industri LPEI yang menghadirkan narasumber dan *expert* pada industri tersebut. Rumah Ekspor telah dilaksanakan di 2 Kota (Solo dan Jakarta) yang dihadiri oleh 73 UKM secara *hybrid (online & offline)*.

1) **Mapping potential MSME actors and areas for assistance with CPNE and Go Export Village**
   Indonesia Eximbank expands coordination with relevant stakeholders and involves private parties who have similar programs.

2) **Implementation standardization is not yet synchronized in the implementation of MSME development between regional stakeholders and Indonesia Eximbank**
   Indonesia Eximbank conducts discussions first with regional stakeholders and conveys the pros and cons so that a mutual agreement can be reached.

3) **Monitoring the implementation of the program**
   Indonesia Eximbank coordinates with relevant stakeholders in the regions to carry out joint monitoring.

Advisory Services Performance in 2023

Thanks to the implementation of a mature strategy and business plan, Indonesia Eximbank Advisory Services succeeded in recording a number of achievements in 2023, including:

- CPNE has been conducted in 10 cities (Medan, Semarang, Bandung, Bali, Yogyakarta, Surabaya, Aceh, Mataram, Banjarmasin, and Jakarta), 78 training sessions have been organized with the participation of 1,307 SMEs, and has produced 389 new exporters.
- As of 31 December 2023, the Community Development has produced a total of 739 New Go Export Village with direct and indirect impact on 63,836 beneficiary farmers, craftsmen and fish farmers.
- As of 31 December 2023, under Marketing handholding, 29 business matching have been conducted.
- As of 31 December 2023, Export Houses carried out 4 Focus Group Discussion with the themes in accordance with Indonesia Eximbank's industry focus which presents speakers and experts in the industry. Export Houses has been implemented in 2 cities (Solo and Jakarta) attended by 73 SMEs in a hybrid manner (online & offline), and joint training was held at the Jakarta Export House as a result of collaboration between Indonesia Eximbank and PT Sarinah (Persero).

Rencana Strategis 2024

LPEI telah menetapkan rencana strategis dan program-program Jasa Konsultasi yang akan dijalankan di tahun 2024, antara lain:

1. ***Coaching Program for New Exporter* (CPNE)**
   Program ini akan didorong dengan:
   a. Perluasan kerja sama dengan Pemerintah, baik Pusat (Kementerian/Lembaga (BI, OJK) maupun Provinsi/Daerah (Dinas-dinas terkait).
   b. Menjalin Kerja sama dengan BUMN, Perbankan, dan sektor swasta yang mempunyai program serupa.
   c. Memperluas Kerja sama dengan penyedia jasa pelatihan ekspor baik untuk memperluas jangkauan binaan maupun *income generator* Lembaga.
   d. Pengembangan sistem digital yang dapat diakses lebih luas untuk program-program *coaching*.

2. ***Marketing Handholding***
   a. Intensifikasi komunikasi dengan *stakeholder existing* seperti kedutaan besar RI dan ITPC/ Perwadag di negara tujuan ekspor serta Diaspora.
   b. Menentukan fokus negara tujuan ekspor dan memperluas kerja sama dengan *stakeholder* terkait (kedutaan besar RI dan ITPC/Perwadag di negara tujuan ekspor serta Diaspora).
   c. Melakukan pemetaan daftar *buyer* nasabah *existing* baik pembiayaan maupun asuransi, untuk dapat direferensikan sebagai *list buyer* mitra binaan.
   d. Memanfaatkan *platform e-commerce baik global maupun Platform yang* saat ini dikembangkan oleh internal LPEI.

3. **Desa Devisa**
   Strategi pengembangan pelayanan berupa kolaborasi program dan pemetaan dengan beberapa *stakeholders* sebagai berikut:
   a. Program Desa Devisa dalam rangka Kemenkeu Satu (DJKN, DJBC, DJP, PKN STAN, LPEI, SMV, BLU, dan lain lain).
   b. Program Desa Ekspor (LPEI, Kemenko Ekuin, Kemendes).
   c. Program OVOP/*One Village One Product* (LPEI dan Ditjen IKMA Kemenperin).

Strategic Plan for 2024

Indonesia Eximbank has established strategic plans and Advisory Services programs that will be implemented in 2024, including:

1. **Coaching Program for New Exporters (CPNE)**
   This program will be driven by:
   a. Expanding cooperation with the Government, both Central (Ministries/Institutions (BI, OJK) and Provincial/Regional (Related Services).
   b. Establishing collaboration with state-owned enterprises (BUMN), banking and the private sector which have similar programs.
   c. Expanding cooperation with export training service providers both to expand the reach of the Institution and the Institution's income generator.
   d. Development of a digital system that can be accessed more widely for coaching programs.

2. **Marketing Handholding**
   a. Intensify communication with existing stakeholders such as the Indonesian embassy and ITPC (Indonesian Trade Promotion Center)/ Perwadag (Trade Representative) in export destination countries and the Diaspora.
   b. Determine the focus of export destination countries and expand cooperation with relevant stakeholders (Indonesian embassies and ITPC/ Perwadag in export destination countries and the Diaspora).
   c. Mapping existing customer buyer lists for both financing and insurance, so that they can be referenced as a list of buyers for fostered partners.
   d. Utilizing e-commerce platforms, both global and platforms currently being developed internally by Indonesia Eximbank.

3. **Go Export Village**
   The service development strategy is a collaboration program and mapping with several stakeholders as follows:
   a. Go Export Village Program within the framework of the Ministry of Finance One (DJKN, DJBC, DJP, PKN STAN, Indonesia Eximbank, SMV, BLU, and so on)
   b. Export Village Program (Indonesia Eximbank, Coordinating Ministry for Economic Affairs, Ministry of Village).
   c. OVOP/One Village One Product Program (Indonesia Eximbank and Directorate General of IKMA, Ministry of Industry).

d. Program dengan *Stakeholders* lainnya seperti BUMN, Perbankan, dan Sektor swasta yang memiliki program serupa.

4. Program Kemitraan

Strategi pengembangan pelayanan berupa pemberian fasilitas Program Kemitraan kepada Mitra Binaan LPEI melalui mitra penyalur antara lain:

a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perusahaan Modal Ventura, dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.
b. Debitur *existing* LPEI.
c. Entitas lainnya seperti Koperasi, dan lain lain.

d. Programs with other stakeholders such as BUMN, banking, and the private sector which have similar programs.

4. Partnership Program

The service development strategy provides Partnership Program facilities to Indonesia Eximbank's Foster Partners through channel partners, including:

a. Financial Services Institution such as Rural Banks (BPR), Venture Capital Companies, and/or other Financial Institutions.
b. Indonesia Eximbank existing debtors.
c. Other entities such as cooperatives, and so on.

07 Penugasan Khusus Ekspor
National Interest Account

Dengan menjalankan mandat Penugasan Khusus Ekspor (PKE), LPEI membantu para pengusaha eksportir nasional agar dapat memasarkan barang/jasa yang ditawarkan dari Indonesia ke pasar non-tradisional dan/atau memiliki *country risk* yang tinggi.

Through the national Interest Account (NIA) mandate, Indonesia Eximbank assists national export entrepreneurs in marketing goods/services offered from Indonesia to non-traditional and/or high country risk markets.

Penugasan Khusus Ekspor (PKE) atau *National Interest Account* (NIA) adalah penugasan yang diberikan oleh Pemerintah agar LPEI mampu memperkuat peranannya dalam mendukung para pelaku usaha ekspor dengan memberikan pembiayaan ekspor. Melalui penugasan khusus ini, LPEI membantu para pengusaha eksportir nasional agar dapat memasarkan barang/jasa yang ditawarkan dari Indonesia ke pasar non-tradisional dan/atau memiliki *country risk* yang tinggi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 183/PMK.08/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, disebutkan bahwa ruang lingkup PKE yang disediakan LPEI, antara lain meliputi penyediaan pembiayaan ekspor (*Financing, Insurance, dan Guarantee*) atas transaksi atau proyek kepada pelaku ekspor yang sulit mendapat pembiayaan dari bank/lembaga keuangan komersial atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan ekspor nasional.

The Special Export Assignment (PKE) or National Interest Account (NIA) is an assignment given by the Government to Indonesia Eximbank to strengthen its role in supporting export business actors by providing export financing. Through this special assignment, Indonesia Eximbank assists national exporters to be able to market goods/services offered from Indonesia to non-traditional markets and/or those with high country risk.

Pursuant to Minister of Finance Regulation (PMK) No. 183/PMK.08/2021 dated 14 December 2021 on Special Assignments to Indonesian Export Financing Institutions, it is stated that the scope of PKE provided by Indonesia Eximbank, among other things, includes the provision of export financing (Financing, Insurance, and Guarantee) for transactions or projects to exporters who have difficulties in obtaining financing from commercial banks/financial institutions for transactions or projects that are commercially difficult to implement, but are deemed necessary by the Government to support national export policies.

Sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat 8 (delapan) yang masih berjalan dan memiliki *outstanding*, sebagai berikut :

1. **PKE Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin dan Eropa Timur (PKE Kawasan)**
   Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 460 tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023, Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan kepada Pelaku Usaha yang memiliki penjualan ekspor ke kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp1.600 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2028.
2. **PKE Pariwisata Mandalika (PKE Mandalika)**
   Berdasarkan KMK No. 387/KMK.08/2022 tanggal 23 September 2022, Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan kepada Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp1.600 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2024.
3. **PKE Usaha Kecil dan Menengah (PKE UKM)**
   Berdasarkan KMK No. 409/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021, Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan

As of 31 December 2023, there are 8 (eight) PKEs that are ongoing or with an outstanding, as listed below:

1. **PKE Regions Africa, South Asia, Middle East, Latin America and Eastern Europe (PKE Region)**
   The government mandated LPEI to disburse finance to enterprises with export sales to Africa, South Asia, and the Middle East under Minister of Finance Decree (KMK) No. 460 of 2023, issued 22 December 2023. The funding for this program are Rp1,600 billion, with an assignment period of up to December 2028.
2. **PKE Mandalika Tourism (PKE Mandalika)**
   Under KMK No. 387/KMK.08/2022, issued 23 September 2022, the Government mandated LPEI to disburse finance to businesses in the context of growing tourism in the Mandalika Special Economic Zone. The funds allotted for this initiative are Rp1,600 billion, with an assignment period of up to December 2024.
3. **PKE for Small and Medium Enterprises (SME)**
   Under KMK No. 409/KMK.08/2021, dated 21 September 2021, the Government mandated LPEI to channel finance to business players in order

kepada Pelaku Usaha dalam rangka mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berorientasi Ekspor untuk seluruh sektor ekonomi/ komoditas. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp1.000 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2025.

4. **PKE Trade Finance (PKE TFC)**
   Berdasarkan KMK No. 494/KMK.08/2022 tanggal 14 Desember 2022, Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyediakan fasilitas Trade Finance dalam rangka mendukung pemulihan ekspor nasional. difokuskan untuk mendukung sektor industri atau komoditas unggulan ekspor agar dapat tetap tumbuh di tengah tantangan global akibat pandemi COVID-19. Terdapat 14 (empat belas) komoditas/produk unggulan tersebut antara lain produk karet, produk kopi (termasuk kopi *specialty*), furnitur, produk alas kaki, makanan olahan (termasuk produk ikan, udang, *seafood*), tekstil dan produk tekstil, produk perhiasan/permata, produk teh dan rempah-rempah, produk kayu, produk kerajinan, produk elektronika, produk kimia, produk otomotif (termasuk suku cadang kendaraan bermotor), dan produk dari kulit samak. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp1.000 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2024.
5. **PKE Alat Transportasi (PKE ATP)**
   Berdasarkan KMK No. 406/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021, Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan kepada Pelaku Usaha dalam rangka mendukung pengembangan industri manufaktur dengan produk/komoditas strategis antara lain perkapalan, perkeretaapian, kedirgantaraan, alat transportasi khusus, komponen alat transportasi dan/atau jasa pendukung alat transportasi. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp1.500 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2026.
6. **PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas (PKE DPSP)**
   Berdasarkan KMK No. 272/KMK.08/2022tanggal 5 Juli 2022, Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan kepada Pelaku Usaha dalam rangka mendukung sektor pariwisata yang menjadi fokus pemerintah termasuk pelaku usaha yang turut melakukan pengembangan infrastruktur marina & penunjang pariwisata pada destinasi pariwisata super prioritas. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp500 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2024.

to boost the Export-Oriented Small and Medium Enterprises (UKM) Sector for all economic/ commodity sectors. The funds allotted for this initiative are Rp1,000 billion, with an assignment period of up to December 2025.

4. **PKE Trade Finance (PKE TFC)**
   Under KMK No. 494/KMK.08/2022, dated 14 December 2022, the government mandated LPEI to provide Trade Finance facilities to help the recovery of national exports, focused on aiding the industrial sector or leading export commodities to ensure their continued growth in the face of global obstacles caused by the COVID-19 epidemic. Rubber products, coffee products (including specialty coffee), furniture, footwear, processed food (including fish, shrimp, and seafood products), textiles and textile products, jewelry/ gems, tea and spice products, wood products, craft products, electronic products, chemical products, automotive products (including motor vehicle parts), and leather products are among the 14 leading export commodities/products. The funds allotted to this program are Rp1,000 billion, with an assignment period of up to December 2024.
5. **PKE Transport Equipment (ATP)**
   Based on KMK No. 406/KMK.08/2021, dated 21 September 2021, the government mandated Indonesia Eximbank to channel financing to businesses in order to support the development of the manufacturing industry with strategic products/commodities such as shipping, railways, aerospace, special transportation equipment, transportation equipment components, and/ or transportation support services. The funds allocated for this initiative are Rp1,500 billion, with an assignment period of up to December 2026.
6. **PKE Super Priority Tourism Destinations (PKE DPSP)**
   Based on KMK No. 272/KMK.08/2022 dated 5 July 2022, the Government mandated LPEI to channel financing to businesses in order to support the tourism sector which is the government's focus, including enterprises who are involved in developing marina & tourism supporting infrastructure in the Super Priority Tourism Destinations. The funds allocated for this program are Rp500 billion with an assignment period of up to December 2024.

7. **PKE Industri Farmasi & Alat Kesehatan (PKE IFA)**
   Berdasarkan KMK No. 145 Tahun 2023 tanggal 18 April 2023, Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan kepada Pelaku Usaha dalam rangka mendukung ketahanan dan kemandirian industri farmasi khususnya bahan baku obat dengan tujuan menghasilkan devisa, menghemat devisa dalam negeri, dan/atau meningkatkan kapasitas produksi nasional. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp500 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2027.
8. **PKE Industri Penerbangan (PKE Industri Penerbangan)**
   Berdasarkan KMK No. 428/KMK.08/2020 tanggal 23 September 2020, Pemerintah memberikan mandat kepada LPEI untuk menyalurkan pembiayaan kepada Pelaku Usaha dalam rangka mendukung untuk penguatan sektor ekonomi transportasi dan pergudangan, khususnya jasa angkutan udara dengan kriteria pelaku ekspor sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam KMK. Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp1.000 miliar dengan jangka waktu penugasan sampai dengan Desember 2021. Sesuai jangka waktu penugasannya, PKE Industri Penerbangan sudah selesai namun hinggal 31 Desember 2023 masih memiliki *outstanding*.

7. **PKE Pharmaceutical & Medical Device Industry (PKE IFA)**
   Based on KMK No. 145 of 2023 dated 18 April 2023, the Government mandated LPEI to channel financing to enterprises in order to support the resilience and independence of the pharmaceutical industry, especially medicinal raw materials with the aim of generating foreign exchange, saving domestic foreign exchange, and/or increasing national production capacity. The funds allocated for this program are Rp500 billion with an assignment period of up to December 2027.
8. **PKE Aviation Industry (PKE Aviation Industry)**

   Based on KMK No. 428/KMK.08/2020 dated 23 September 2020, the Government mandated LPEI to channel financing to enterprises in order to support strengthening the transportation and warehousing economic sector, especially the air transportation services with exporters fulfilling the criteria in accordance with the requirements stated in the KMK. The funds allocated for this program are Rp1,000 billion with an assignment period of up to December 2021. According to the assignment period, the Aviation Industry PKE has been completed but as of 31 December 2023 there is still an outstanding balance.

Strategi dan Tantangan Tahun 2023

Fokus strategi pelaksanaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) pada tahun 2022 adalah "Proaktif dalam Bersinergi Menjalankan Mandat", dengan mengoptimalkan fungsi *product specialist*, *business development* dan *stakeholder relationship*. Adapun ringkasan strategi tersebut sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelaksanaan fungsi *Product Owner* dan *Business Enabler*
   - Meningkatkan *customer base* sesuai dengan *target market* masing-masing program PKE;
   - Melakukan sosialisasi bulanan bersama Kementerian/Lembaga serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/Kota dalam rangka menggali potensi *pipeline*;
   - Melakukan disiplin *periodic pipeline-monitoring* dan mengimplementasikan *Pipeline Monitoring Dashboard*;
   - Melakukan *joint-marketing* bersama-sama dengan *business unit* dalam memasarkan program PKE;
   - Memastikan pelaksanaan program PKE telah sesuai dengan ketentuan PMK dan KMK PKE;

2023 Strategies and Challenges

The focus of the strategy for the implementation of the Special Export Assignment (PKE) in 2022 is "Proactive in Synergizing to Carry out the Mandate", by optimizing the functions of product specialists, business development, and stakeholder relationships. The summary of the strategy is as follows:

a. Improve the implementation of the Product Owner and Business Enabler functions
   - Increase the customer base in accordance with the target market of each PKE program;
   - Conduct monthly socialization with Ministries/ Institutions and Provincial/City Industry and Trade Offices in order to explore the potential pipeline;
   - Conduct periodic pipeline-monitoring discipline and implement Pipeline Monitoring Dashboard;
   - Conduct joint-marketing together with business units in marketing the PKE program;
   - Ensure the implementation of PKE program is in accordance with the provisions of PMK and KMK PKE;

- Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan program PKE.

b. Meningkatkan pelaksanaan fungsi *Stakeholder Relationship*
   - Melakukan pendampingan kepada Kementerian/Lembaga pengusul dalam penyusunan usulan program PKE baru dan perumusan Rencana Strategis PKE;
   - Memberikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan Komite PKE Kementerian/Lembaga yang menggunakan Dana Operasional PKE (antara lain sosialisasi, FGD Renstra, site visit, dll);
   - Melakukan *monitoring-evaluation* dan pelaporan periodik atas pelaksanaan program PKE.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Penugasan Khusus secara umum di tahun 2023, antara lain:

1. Proses bisnis dan tata kelola pelaksanaan program Penugasan Khusus yang terus dievaluasi dan memerlukan penyempurnaan.
2. Optimalisasi ulitisasi atau pemanfaatan PKE yang sudah ditetapkan.

Diversifikasi atas penyaluran fasilitas pembiayaan ekspor tidak hanya melalui dukungan pembiayaan namun juga dalam bentuk penjaminan, dan atau asuransi.

Kinerja Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Tahun 2023

Dari seluruh penugasan khusus yang dilaksanakan LPEI sejak diterbitkannya masing-masing KMK (Program PKE) sampai dengan 31 Desember 2023, telah dilakukan *disbursement* dengan akumulasi sebesar Rp13,3 triliun dan total outstanding sebesar Rp4,3 triliun dengan rincian sebagai berikut:

- Coordinate with external parties related to the implementation of PKE program.

b. Improve the implementation of the Stakeholder Relationship function
   - Provide assistance to proposing Ministries/ Institutions in the preparation of new PKE program proposals and the formulation of the PKE Strategic Plan;
   - Provide support for the implementation of PKE Committee activities of Ministries/Institutions that use PKE Operational Funds (including socialization, FGD Renstra, site visits, etc.);
   - Conduct monitoring-evaluation and periodic reporting on the implementation of the PKE program.

The challenges faced in the implementation of Special Assignments in general in 2023 include:

1. The business process and governance of the Special Assignment program implementation continue to be evaluated and require improvement.
2. Optimization of ulitization or utilization of PKE that has been determined.

Diversification of the distribution of export financing facilities not only through financing support but also in the form of guarantees, and or insurance.

Performance of Special Export Assignment (PKE) 2023

Of all the special assignments carried out by Indonesia Eximbank since the issuance of each KMK (PKE Program) until 31 December 2023, disbursements have been made with an accumulation of Rp13.3 trillion and a total outstanding of Rp4.3 trillion with the following details:

Program PKE Program PKE	**Berlaku Hingga** Program Period	**Alokasi Dana** Funds Allocation **(IDR Juta |** IDR Million**)**	**Limit** Plafond **(IDR Juta |** IDR Million**)**	***Disbursement*** **(IDR Juta |** IDR Million**)**	**Akumulasi *Disbursement*** Accumulated Disbursement **(IDR Juta |** IDR Million**)**	***Oustanding*** **(IDR Juta |** IDR Million**)**
PKE PENERBANGAN Aviation (KMK No.428/2020)	31 Des 2021	1.000.000	994.404	-	994.404	994.404
PKE ALAT TRANSPORTASI Transportation Equipment (KMK No.406/2021)	31 Des 2026	1.500.000	1.067.755	291.347	357.136	351.189
PKE UKM SME (KMK No.409/2021)	31 Des 2025	1.000.000	599.901	265.574	967.845	359.969

Program PKE Program PKE	**Berlaku Hingga** Program Period	**Alokasi Dana** Funds Allocation **(IDR Juta | IDR Million)**	**Limit** Plafond **(IDR Juta | IDR Million)**	***Disbursement*** **(IDR Juta | IDR Million)**	**Akumulasi *Disbursement*** Accumulated Disbursement **(IDR Juta | IDR Million)**	***Oustanding*** **(IDR Juta | IDR Million)**
PKE DP SUPERPRIORITAS DP Super Priority (KMK No.272/2022)	31 Des 2024	500.000	500.000	170.000	170.000	170.000
PKE PARIWISATA MANDALIKA Mandalika Tourism (KMK No.387/2022)	31 Des 2024	1.600.000	1.363.000	247.944	1.354.081	1.349.081
PKE INDUSTRI FARMASI & ALKES Pharmaceutical & Medical Device (KMK No.145/2023)	31 Des 2027	500.000	-	-	-	-
PKE KAWASAN Region (KMK No.460/2023)	31 Des 2028	1.600.000	1.253.857	1.124.464	3.401.425	464.853
PKE TRADE FINANCE (KMK No.494/2022)	31 Des 2024	1.000.000	1.369.994	2.893.931	6.061.731	611.310
Jumlah | Total		**8.700.000**	**7.148.911**	**4.993.260**	**13.306.622**	**4.300.806**

Rencana Strategis 2024

Fokus strategi pelaksanaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) pada tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) besaran strategi utama, yaitu Ekstensifikasi dan Intensifikasi yang mana masing-masing fokusnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

2024 Strategic Plan

The strategic focus of the implementation of the Special Export Assignment (PKE) in 2024 is divided into 2 (two) main strategic levels, namely Extensification and Intensification, each of which can be explained as follows:

Strategi Strategy	**Fokus** Focus	***Action Plan***
Ekstensifikasi Extensification	Penambahan jumlah *customer base* (pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas PKE)	• Kolaborasi dengan unit di internal LPEI yang membidangi *business intelligence* dalam melakukan *leads mapping* (*control tower concept*), agar *product solution* berupa fasilitas PKE sesuai dengan kebutuhan pelaku ekspor yang di-*approach* oleh LPEI. • Peningkaan kolaborasi dengan K/L, Asosiasi, ATDAG, Cabang Himbara di Luar Negeri untuk sebagai salah satu *leads channel* yang memperluas probabilitas pemanfaatan PKE oleh pelaku ekspor. • Penetrasi market baru non-tradisional (Amerika Latin dan Eropa Timur) • Kolaborasi dengan seluruh sarana fiskal atau institusi yang relevan dengan dukungan Komite PKE sebagai penghubung
	Increase in the number of customer base (businesses who utilize PKE facilities)	• Collaboration with Indonesia Eximbank's internal unit in charge of business intelligence in carrying out leads mapping (control tower concept), so that the product solution in the form of PKE facilities is in accordance with the needs of export actors approached by Indonesia Eximbank. • Increased collaboration with Ministries/Institutions, Associations, ATDAG, Himbara Branches Abroad to act as a lead channel that expands the probability of utilizing PKE by exporters. • Penetration of new non-traditional markets (Latin America and Eastern Europe) • Collaboration with all relevant fiscal facilities or institutions with the support of the PKE Committee as a liaison
Intensifikasi Intensification	Mengoptimalkan ekosistem ekspor sebagai upaya akselerasi penyaluran pemanfaatan Program PKE	Pendekatan kepada *supplier* atau sistem rantai pasok debitur LPEI segmen pembiayaan korporasi melalui skema *value chain financing* dalam rangka akuisisi debitur baru (*new customer*) segmen pembiayaan UKM
	Optimizing the export ecosystem as an effort to accelerate the distribution of PKE Program utilization	Approach to suppliers or Indonesia Eximbank debtor supply chain systems in the corporate financing segment through a value chain financing scheme in the context of acquiring new debtors (new customers) in the SME financing segment

Strategi Strategy	**Fokus** Focus	***Action Plan***
	Diversifikasi atas penyaluran fasilitas Pembiayaan Ekspor tidak hanya melalui dukungan pembiayaan, namun juga dalam bentuk penjaminan dan/atau asuransi	• Kolaborasi dengan perbankan/lembaga jasa keuangan dalam memberikan fasilitas pembiayaan ekspor melalui skema *blended financing* • Melakukan skema *co-financing* dengan Bank KBMI 2 dan 3 serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) • Berkomunikasi aktif dengan perbankan/lembaga jasa keuangan bersama dengan regulator berdasarkan regulasi terkait penjaminan kredit dalam rangka *leverage* potensi pembiayaan ekspor yang disalurkan melalui pemanfaatan penjaminan dari LPEI dalam kerangka program PKE
	Diversification of the distribution of Export Financing facilities not only through financing support, but also in the form of guarantees and/or insurance	• Collaboration with banks/financial service institutions in providing export financing facilities through a blended financing scheme • Carrying out a co-financing scheme with Bank KBMI 2 and 3 and Regional Development Bank (BPD) • Communicate actively with banking/financial service institutions together with regulators based on regulations related to credit guarantees in order to leverage potential export financing channeled through the use of guarantees from Indonesia Eximbank within the framework of the PKE program
	Penyesuaian relevansi fitur produk atas masing-masing Program PKE	• Penambahan sektor ekonomi yang dapat didukung oleh PKE ATP yaitu sektor jasa dan konstruksi terkait alat transportasi (misalnya untuk mengakomodir pekerjaan pembangunan infrastruktur di luar negeri) • Penambahan bentuk fasilitas yang dapat diberikan dalam hal PKE UKM yaitu fasilitas penjaminan kredit dan/atau asuransi LPEI • Ketentuan asuransi kredit dalam PKE UKM menjadi opsional (tidak *mandatory*) dan proporsional disesuaikan dengan kemampuan pemenuhan *fixed assets* dan penilaian risiko dari LPEI • Evaluasi atas ketentuan dalam PKE TFC antara lain komoditas unggulan yang didukung dan jangka waktu
	Adjusting the relevance of product features for each PKE Program	• Additional economic sectors that can be supported by PKE ATP, namely the services and construction sectors related to transportation (for example to accommodate infrastructure development work abroad) • Additional forms of facilities that can be provided in the case of UKM PKE, namely credit guarantee facilities and/or Indonesia Eximbank insurance • Credit insurance provisions in PKE UKM are optional (not mandatory) and proportionally adjusted to the ability to fulfill fixed assets and risk assessments from Indonesia Eximbank • Evaluation of the provisions in the PKE TFC, including the superior commodities supported and the time period
	Pengembangan Program PKE sesuai fokus pemerintah	• Penyesuaian Program PKE dengan program yang dimiliki oleh K/L • Penyamaan persepsi/pemahaman informasi/regulasi (POJK, SEOJK) mengenai perlakuan dan implikasi kredit yang dijamin LPEI yang bersifat *sovereign* dengan melibatkan OJK dan Perbankan/lembaga jasa keuangan • Mengoptimalkan fungsi Komite Harmonisasi • Mendorong dukungan kepada pelaku ekspor dalam melakukan penetrasi pasar/ negara tujuan ekspor baru melalui sinergi penyaluran fasilitas PKE dan hibah LDKPI • Adjustment of the PKE Program with programs owned by K/L • Unified perception/understanding of information/regulations (POJK, SEOJK) regarding the treatment and implications of credit guaranteed by Indonesia Eximbank which is sovereign by involving OJK and banking/financial services institutions • Optimize the function of the Harmonization Committee • Encourage support to export players in penetrating new markets/export destination countries through synergy in the distribution of PKE facilities and LDKPI grants

AX-2347

TINJAUAN KEUANGAN
Financial Review

Diskusi dan analisa keuangan berikut ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian LPEI dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan *(a member firm of the* RSM *network)* dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian LPEI dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus di mana untuk unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian lainnya disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia sedangkan untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang direstrukturisasi, dihitung berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga setelah Restrukturisasi dalam Perhitungan CKPN.

The following financial discussion and analysis has been prepared based on the Consolidated Financial Statements of Indonesia Eximbank and Subsidiaries ended on 31 December 2023 and 31 December 2022. The Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (a member firm of the RSM network) and obtained a fair opinion in all material matters, Indonesia Eximbank's financial position as of 31 December 2023 and 31 December 2022 as well as financial performance from that date are presented in accordance with the special purpose financial reporting framework in which the other elements of consolidated financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) while the Allowance for Impairment Losses (CKPN) for restructured National Interest Account financing is calculated based on the Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-194/MK.08/2023 concerning Determination of the Use of Discount Rate Assumptions Based on Interest Rates after Restructuring in CKPN Calculations.

Laporan Posisi Keuangan
Statement of Financial Position

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Kas	85	38	47	123,68	Cash
Giro pada Bank Indonesia	553	426	127	29,81	Current Account with Bank Indonesia
Giro pada Bank - Neto	108.256	180.646	(72.390)	(40,07)	Current Account with Banks - Net
Penempatan pada Bank - Neto	7.414.248	12.560.255	(5.146.007)	(40,97)	Placements with Banks - Net
Efek-Efek	1.433.923	1.970.120	(536.197)	(27,22)	Securities
Tagihan Derivatif	85	-	85	100	Derivative Receivable
Pembiayaan dan Piutang	73.823.211	83.636.003	(9.812.792)	(11,73)	Financing and Receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) – Pembiayaan dan Piutang	(32.633.997)	(17.882.949)	(14.751.048)	82,49	Allowance for Impairment Losses - Financing and Receivables
Piutang Lainnya - Neto	-	281.667	(276.667)	(100,00)	Other receivables
Pajak Dibayar Dimuka	-	865	(865)	(100,00)	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar Dimuka	20.458	15.394	5.064	32,90	Prepaid Expenses
Piutang Asuransi dan Penjaminan - Neto	75.059	288.989	(213.930)	(74,03)	Insurance and Guarantees Receivables - Net
Aset Reasuransi	2.933	3.544	(611)	(17,24)	Reinsurance Assets
Tagihan Akseptasi - Neto	153.230	150.917	2.313	1,53	Acceptances Receivables- Net

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Aset Tetap - Neto	914.635	997.835	(83.200)	(8,34)	Fixed Assets - Net
Aset Pajak Tangguhan – Neto	-	1.552.978	(1.552.978)	(100,00)	Deferred Tax Assets - Net
Aset Lain-Lain	36.600	59.024	(22.424)	(37,99)	Other Assets
Jumlah Aset	**51.349.279**	**83.815.752**	**(32.466.473)**	**(38,74)**	**Total Assets**

ASET

LPEI membukukan penurunan total aset sebesar 38,74% dari Rp83,82 triliun di akhir Desember 2022 menjadi Rp51,35 triliun di tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada pos pembiayaan dan piutang serta pembentukan CKPN atas piutang bermasalah.

Penempatan pada bank terbagi ke dalam 2 (dua) jenis kegiatan usaha LPEI, yaitu penugasan umum dan penugasan khusus. Kedua jenis penempatan pada bank sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan masing-masing sebesar Rp38 juta dan Rp358 juta di tahun 2023 mencapai Rp1,43 triliun dan Rp5,98 triliun. Kedua jumlah tersebut masing-masing mengalami penurunan sebesar 34,30% dan 42,37% dari sebelumnya sebesar Rp2,18 triliun dan Rp10,38 triliun di tahun 2022.

Penjelasan lebih rinci terkait pembiayaan dan piutang adalah sebagai berikut:

ASSET

Indonesia Eximbank recorded a decrease in total assets of 38.74% from Rp83.82 trillion at the end of December 2022 to Rp51.35 trillion in 2023. This decrease was mainly caused by a decrease in financing and receivables.

The placements with the bank are divided into 2 (two) types of Indonesia Eximbank business activities, namely general assignments and special assignments. The two types of placements with banks before deducting allowance for impairment losses amounting to Rp38 million and Rp358 million respectively in 2023, standing at Rp1.43 trillion and Rp5.98 trillion. These two amounts decreased by 34.30% and 42.37% respectively from Rp2.18 trillion and Rp10.38 trillion in 2022.

A more detailed explanation regarding financing and receivables is as follows:

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Penempatan pada Bank					**Placements with Banks**
Penugasan Umum	1.432.644	2.180.664	(748.020)	(34,30)	General Assignment
Penugasan Khusus	5.982.000	10.380.100	(4.398.100)	(42,37)	National Interest Account
Jumlah	**7.414.644**	**12.560.764**	**(5.146.120)**	**(40,97)**	**Total (gross)**

Jika dilihat berdasarkan jenis dan mata uang, pada akhir Desember 2023, LPEI tidak lagi menempatkan dana di Bank dalam bentuk deposito berjangka dalam mata uang Dollar AS sedangkan di tahun lalu pada periode yang sama LPEI memiliki deposito berjangka dalam mata uang Dollar AS senilai Rp1,06 triliun.

Based on type and currency, at the end of December 2023, Indonesia Eximbank was no longer place funds in the Bank in the form of time deposits in US Dollars, whereas last year in the same period, Indonesia Eximbank's US Dollars time deposits was at Rp1.06 trillion.

Sementara itu deposito berjangka dalam mata uang Rupiah juga berkurang 37,69% dari Rp10,61 triliun menjadi Rp6,61 triliun per 31 Desember 2023. Di sisi lain, penempatan *Call Money* dalam Dollar AS mencatat penurunan sebesar 9,77% dari Rp887,35 miliar pada posisi 31 Desember 2022 menjadi Rp800,64 miliar di akhir 2023.

Meanwhile, time deposits in Rupiah also decreased by 37.69% from Rp10.61 trillion to Rp6.61 trillion as of 31 December 2023. Furthermore, Call Money placements in US Dollars recorded a decrease of 9.77% from Rp887.35 billion as of 31 December 2022 to Rp800.64 billion at the end of 2023.

Penjelasan lebih rinci terkait penempatan di Bank adalah sebagai berikut:

Detailed explanation regarding placements at the Bank is as follows:

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Deposito berjangka - Rupiah	6.614.000	10.614.827	(4.000.827)	(37,69)	Time Deposits - Rupiah
Deposito berjangka - Dollar AS	-	1.058.590	(1.058.590)	(100,00)	Time Deposits - US Dollar
Call Money - Dollar AS	800.644	887.347	(86.703)	(9,77)	Call Money - US Dollar
Jumlah	**7.414.644**	**12.560.764**	**(5.146.120)**	**(40,97)**	**Total**

LPEI melakukan penilaian terhadap penempatan pada bank secara kolektif dengan menggunakan informasi dan analisis kualitatif dan kuantitatif berdasarkan pengalaman historis dan penilaian kredit termasuk informasi masa depan.

Indonesia Eximbank assesses banks placements collectively using qualitative and quantitative information and analysis based on historical experience and credit assessments including future information.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

Management believes that the allowance for impairment losses established is adequate to cover possible losses that may arise due to uncollectible placements with banks.

Tidak terdapat penempatan pada bank yang digunakan sebagai jaminan pada 31 Desember 2023 dan 2022.

There are no placements with banks pledged as collateral as of 31 December 2023 and 2022.

Pembiayaan dan Piutang

Secara kumulatif, jumlah pembiayaan dan piutang LPEI sebelum cadangan kerugian penurunan (*gross*) mengalami penurunan sebesar 11,73% sehingga dibukukan menjadi Rp73,82 triliun di akhir tahun 2023 dibandingkan posisi yang sama pada periode sebelumnya senilai Rp83,64 triliun. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya porsi pembiayaan penugasan umum sebesar 12,82% di akhir Desember 2023 sehingga tercatat menjadi Rp69,87 triliun. Di sisi lain, LPEI membukukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk pembiayaan dan piutang mencapai Rp32,63 triliun per 31 Desember 2023 dan Rp17,88 triliun pada tahun sebelumnya.

Financing and Receivables

Cumulatively, Indonesia Eximbank's total financing and receivables before allowance for impairment losses (gross) decreased by 11.73% to Rp73.82 trillion in 2023 compared to the same position in the previous period of Rp83.64 trillion. This decrease was in line with the reduction in the portion of general assignment financing by 12.82% to Rp69.87 trillion in 2023. On the other hand, Indonesia Eximbank posted reserves for impairment losses for financing and receivables reaching Rp32.63 trillion as of 31 December 2023 and Rp17.88 trillion in the previous year period.

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Penugasan Umum					General Assignment
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	59.935.321	68.673.657	(8.738.336)	(12,72)	Financing and Receivables
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	9.937.139	11.469.720	(1.532.581)	(13,36)	Financing and Shariah Receivables
Sub -Total	69.872.460	80.143.377	(10.270.917)	(12,82)	Sub-Total
Penugasan Khusus					National Interest Account
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	3.949.482	3.489.399	460.083	13,19	Financing and Receivables
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	1.269	3.227	(1.958)	(60,68)	Financing and Shariah Receivables
Sub -Total	3.950.751	3.492.626	458.125	13,12	Sub-Total
Jumlah	**73.823.211**	**83.636.003**	**(9.812.792)**	**(11,73)**	**Total**

Ditinjau dari sisi kolektabilitasnya, rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*/"NPF") bruto dibukukan sebesar 43,48% di akhir 2023, meningkat terhadap posisi 31 Desember 2022 sebelumnya yang sebesar 26,61%. Kenaikan NPF bruto ini utamanya disebabkan oleh menurunnya kualitas pembiayaan atas beberapa debitur.

In terms of collectability, the gross non-performing financing (NPF) ratio was recorded at 43.48% in 2023, an increase compared to the previous position on 31 December 2022 which was 26.61%. The increase in gross NPF was mainly due to the downgrade of several debtors.

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Lancar	33.990.912	41.670.009	(7.679.097)	(18,43)	Current
Dalam perhatian khusus	7.734.501	19.706.942	(11.972.441)	(60,75)	Special mention
Kurang lancar	7.068.091	4.949.842	2.118.249	42,79	Substandard
Diragukan	5.292.395	1.946.657	3.345.738	171,87	Doubtful
Macet	19.737.312	15.362.553	4.374.759	28,48	Loss
Jumlah	73.823.211	83.636.003	(9.812.792)	(11,73)	Total
Non Performing Finance (NPF)	32.097.798	22.259.052	9.838.746	44,20	Non Performing Finance (NPF)
NPF (%) - bruto	43,48%	26,61%			NPF (%) - gross

Sementara itu NPF neto atau dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, mengalami penurunan seiring pembetukan CKPN atas debitur NPF. Jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah neto mencapai Rp3,35 triliun atau turun 61,42% dari tahun 2022 yang sebesar Rp8,69 triliun. Hal ini berdampak kepada penurunan rasio NPF neto dari 10,39% di tahun 2022 menjadi 4,54% di tahun 2023.

Meanwhile, NPF-net or deducted by allowance for impairment losses, has inclined in line with an increase in gross NPF. The total non-performing financing and receivables-net reached Rp3.35 trillion or decrease of 61.42% from 2022 of Rp8.69 trillion. This has an impact on the decrease of NPF ratio-net from 10.39% in 2022 to 4.54% in 2023.

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Lancar	33.252.898	41.145.447	(7.892.549)	(19,18)	Current
Dalam perhatian khusus	4.584.243	15.919.979	(11.335.736)	(71,20)	Special mention
Kurang lancar	2.095.683	3.320.468	(1.224.785)	(36,89)	Substandard
Diragukan	1.256.390	1.161.370	(95.020)	(8,18)	Doubtful
Macet	-	4.205.790	(4.205.790)	(100,00)	Loss
Total Pembiayaan dan piutang yang diberikan - Neto	41.189.214	65.753.054	(24.563.840)	(37,36)	Total Financing and Receivables - Net
NPF Neto	3.352.073	8.687.628	(5.335.555)	(61,42)	NPF Neto
NPF (%) - neto	4,54%	10,39%			NPF (%) - net

LPEI menyalurkan pembiayaan dan piutang ke berbagai sektor usaha dengan porsi terbesar kepada sektor perindustrian *manufaktur* yang selama dua tahun terakhir masing-masing sebesar 49,30% dan 46,92% di tahun 2023 dan 2022. Sektor lain yang memiliki kontribusi terbesar adalah pertanian, perburuan dan sarana pertanian dengan kontribusi 17,94% serta sektor pertambangan 12,67% di tahun 2023. Dari ketiga sektor tersebut, sektor perindustrian dan pertambangan masing-masing mengalami penurunan 7,27% dan 23,09% menjadi Rp36,39 triliun dan Rp9,35 triliun.

Indonesia Eximbank distributes financing and receivables to various business sectors with the largest portion going to the industrial manufacture sector with 49.30% and 46.92% in 2023 and 2022, respectively. Other sectors that have the largest contribution are agriculture, hunting and agricultural services with a contribution of 17.94% and the mining sector 12.67% in 2023. Among these three sectors, the industrial and mining sectors experienced a decrease of 7.27% and 23.09% respectively to Rp36.39 trillion and Rp9.35 trillion.

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023		2022		Perubahan | Change		Description
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	
Perindustrian	36.391.482	49,30	39.243.536	46,92	(2.852.054)	(7,27)	Manufacturing
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	13.240.963	17,94	13.927.315	16,65	(686.352)	(4,93)	Agriculture, haunting and agriculture services
Konstruksi	2.056.641	2,79	3.318.116	3,97	(1.261.475)	(38,02)	Construction
Listrik, gas, dan air	1.181.055	1,60	2.255.513	2,70	(1.074.458)	(47,64)	Electricity, gas, and water
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	4.788.918	6,49	5.279.768	6,31	(490.850)	(9,30)	Transportation,
Perdagangan	3.338.871	4,52	3.259.276	3,90	79.595	2,44	Trading
Jasa dunia usaha	2.995.214	4,06	3.532.352	4,22	(729.038)	(20,64)	Business services
Pertambangan	9.349.915	12,67	12.156.937	14,54	(2.615.122)	(21,51)	Mining
Jasa-jasa sosial/ masyarakat	34.074	0,05	397.481	0,48	(363.407)	(91,43)	Social
Lain-lain	446.078	0,60	265.709	0,32	180.369	67,88	Others
Jumlah	**73.823.211**	**100,00**	**83.636.003**	**100,00**	**(9.812.792)**	**(11,73)**	**Total**

Dari jumlah keseluruhan penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor tersebut, total pembiayaan dan piutang bermasalah dibukukan mencapai Rp32,10 triliun per 31 Desember 2023, naik 44,20% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp22,26 triliun.

Total pembiayaan dan piutang bermasalah tersebut setara dengan 43,48% dan 26,61% dari total pembiayaan dan piutang (*gross*) yang disalurkan oleh LPEI ke semua sektor usaha sebesar Rp73,82 triliun di tahun 2023 dan Rp83,64 triliun di tahun 2022.

From the financing disbursement based on these sectors, the total non-performing financing and receivables were recorded at Rp32.10 trillion as of December 31 2023, an increase of 44.20% compared to the previous year of Rp22.26 trillion.

The total non-performing financing and receivables was equivalent to 43.48% and 26.61% of the total financing and receivables (gross) disbursed by Indonesia Eximbank to all business sectors of Rp73.82 trillion in 2023 and Rp83.64 trillion in 2022.

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	Gross		Perubahan | Change		Description
	2023	2022	Nominal	%	
Perindustrian	20.410.523	12.258.651	8.151.872	66,50	Manufacturing
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	4.719.281	4.355.512	363.769	8,35	Agriculture, haunting and agriculture services
Konstruksi	68.175	410.925	(342.750)	(83,41)	Construction
Listrik, gas, dan air	429.295	-	429.295	-	Electricity, gas, and water
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	529.972	602.901	(72.929)	(12,10)	Transportation, warehousing and communication hotels
Perdagangan, Restoran dan hotel	1.983.167	1.963.878	19.289	0,98	Trading, restaurants and hotels
Jasa dunia usaha	441.647	1.123.187	(681.540)	(60,68)	Business services
Pertambangan	3.357.288	1.526.414	1.830.874	119,95	Mining
Jasa-jasa sosial/masyarakat	34.071	17.584	16.487	93,76	Social,services/society
Lain-lain	124.379	-	124.379	-	Others
Jumlah Pembiayaan Bermasalah	32.097.798	22.259.052	9.838.746	44,20	Total Non Performing Financing
NPF (%) - Bruto	43,48%	26,61%			NPF (%) - Gross

LIABILITAS

Per 31 Desember 2023, liabilitas LPEI mengalami penurunan 25,22% dari sebesar Rp56,95 triliun pada periode sebelumnya menjadi Rp42,59 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya nilai pinjaman yang diterima.

LIABILITIES

As of December 31 2023, Indonesia Eximbank's liabilities decreased by 25.22% from Rp56.95 trillion in the previous period to Rp42.59 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in the value of fund borrowings.

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Liabilitas Segera	69.131	46.046	23.085	50,13	Current Liabilities
Liabilitas Devisa Hasil Ekspor	120.928	-	120.928	100	Foreign Exchanghe Export Proceeds Liabilities
Liabilitas Akseptasi	153.852	151.161	2.691	1,78	Acceptances Payable
Utang Pajak	16.279	11.267	5.012	44,48	Taxes Payable
Efek-Efek Utang yang Diterbitkan - Neto	21.981.313	25.290.672	(3.309.359)	(13,09)	Debt Securities Issued - Net
Liabilitas Derivatif	1.477	56	1.421	2.537,50	Derivatives Payable

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Pinjaman yang Diterima	18.352.943	29.297.065	(10.944.122)	(37,36)	Fund Borrowings
Utang Asuransi	5.534	6.306	(772)	(12,24)	Insurance Payable
Utang Penjaminan	18.427	61.715	(43.288)	(70,14)	Guarantee Payable
Liabilitas Asuransi	6.672	7.961	(1.289)	(16,19)	Insurance Liabilities
Estimasi Klaim Penjaminan	448.911	478.657	(29.746)	(6,21)	Estimated Guarantee Claim
Liabilitas Imbalan Kerja	142.522	144.514	(1.992)	(1,38)	Liability for Employee Benefits
Liabilitas Sewa	5.337	5.553	(216)	(3,89)	Lease Liabilities
Liabilitas Lain-Lain	1.264.486	1.446.534	(182.048)	(12,59)	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas	**42.587.812**	**56.947.507**	**(14.359.695)**	**(25,22)**	**Total Liabilities**

Dari sisi komponen liabilitas, terdapat 6 (enam) seri obligasi LPEI yang jatuh tempo di tahun 2023 senilai Rp3,075 miliar dan 1 (satu) seri sukuk LPEI senilai Rp14 miliar. Pembayaran semua efek bersifat utang ini berasal dari dana operasional.

In terms of liability components, there are 6 (six) series of Indonesia Eximbank bonds maturing in 2023 of Rp3,075 billion and 1 (one) series of Indonesia Eximbank medium term notes of Rp14 billion. Payment for all of these Debt Securities comes from operational funds.

Daftar obligasi LPEI jatuh tempo tahun 2023

List of Indonesia Eximbank bonds maturing in 2023

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang *Outstanding* per 31 Desember 2023 Total Outstanding as of 31 December 2023 (Rp Miliar | Billion)	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate per Year	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
1	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds III Phase III of 2016	D	1.038	8,50	22 November 2016 22 November 2016	22 November 2023 22 November 2023	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
2	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds III Phase VI of 2018	B	1.650	6,70	14 Februari 2018 14 February 2018	14 Februari 2023 14 February 2023	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
3	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase I of 2018	B	35	7,70	6 Juni 2018 6 June 2018	6 Juni 2023 6 June 2023	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
4	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase II of 2018	C	275,7	8,40	5 September 2018 5 September 2018	5 September 2023 5 September 2023	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang *Outstanding* per 31 Desember 2023 Total Outstanding as of 31 December 2023 **(Rp Miliar | Billion)**	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate per Year	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
5	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III Tahun 2018 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds IV Phase III of 2018	C	28	9,25	8 November 2018	8 November 2023	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
6	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I Tahun 2020 Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering Bonds V Phase I of 2020	-	48	7,60	8 Juli 2020 8 July 2020	8 Juli 2023 8 July 2023	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
	Jumlah Obligasi Total Bonds		**3.074,7**					

Daftar sukuk LPEI jatuh tempo tahun 2023

List of Indonesia Eximbank sukuk maturing in 2023

No.	Nama Efek Securities Names	Seri Series	Jumlah yang *Outstanding* per 31 Desember 2023 Total Outstanding as of 31 December 2023 **(Rp Miliar | Billion)**	Tingkat Bunga per Tahun Interest Rate per Year	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Bursa Exchange	Peringkat Rating
1	Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018 Indonesia Eximbank Sukuk Mudharabah I Phase II of 2018	C	14	9,25	8 November 2018	8 November 2023	PT Bursa Efek Indonesia	idAAA (Pefindo)
	Jumlah Sukuk **Total Sukuk**	(Pefindo)	**14**					

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Pinjaman					Borrowings
Sindikasi	4.576.529	8.474.260	(3.897.731)	(45,99)	Syndicated
Bilateral	12.298.134	19.329.517	(7.031.383)	(36,38)	Bilateral
Pinjaman Syirkah	1.478.280	1.493.288	(15.008)	(1,01)	Syirkah Fund
Jumlah	**18.352.943**	**29.297.065**	**(10.944.122)**	**(37,36)**	**Total**

Selain karena dipengaruhi oleh obligasi dan sukuk yang jatuh tempo, penurunan liabilitas LPEI di akhir 2023 utamanya juga dipengaruhi oleh penurunan pinjaman yang diterima yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp10,94 triliun atau sebesar 37,36%. Penurunan pinjaman yang diterima utamanya berasal dari penurunan pinjaman bilateral sebesar 36,38% dari Rp19,33 triliun di tahun 2022 menjadi Rp12,30 triliun di tahun 2023.

In addition to being influenced by maturing bonds and sukuk, the decrease in Indonesia Eximbank's liabilities at the end of 2023 was also mainly influenced by a significant decrease in loans received of Rp10.94 trillion or 37.36%.The decrease in loans received mainly came from a decrease in bilateral loans by 36.38% from Rp19.33 trillion in 2022 to Rp12.30 trillion in 2023.

Di sisi lain, LPEI membukukan kenaikan Liabilitas Segera hingga 50,13%, yakni dari Rp46,05 miliar di tahun lalu menjadi Rp69,13 miliar di akhir Desember 2023. Di tahun 2023, LPEI juga mencatatkan liabilitas devisa hasil ekspor sebesar Rp120,93 miliar sebagai tindak lanjut atas PP No. 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

On the other hand, Indonesia Eximbank posted an increase in Current Liabilities of up to 50.13%, from Rp46.05 billion last year to Rp69.13 billion at the end of December 2023. In 2023, Indonesia Eximbank also recorded an export proceeds foreign exchange liability of Rp120.93 billion as a follow-up to Government Regulation No. 36 of 2023 concerning Export Proceeds Foreign Exchange from Concession Activities, Management and/or Processing of Natural Resources.

Jumlah ekuitas LPEI di akhir Desember 2023 adalah sebesar Rp8,76 triliun, turun 67,39% dari Rp26,87 triliun di tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh kerugian di tahun 2023.

Indonesia Eximbank's total equity at the end of December 2023 amounted to Rp8.76 trillion, down 67.39% from Rp26.87 trillion in the previous year. This decrease was mainly caused by losses in 2023.

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Kontribusi modal Pemerintah					Government Capital Contribution
Penugasan Umum	23.589.123	23.589.123	-	-	General Assignment
Penugasan Khusus	14.013.308	14.013.308	-	-	National Interest Account
	37.602.431	**37.602.431**	**-**	**-**	
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak tangguhan	(23.492)	(3.391)	(20.101)	(592,77)	Unrealized (loss)/gain gain of financial assets at fair value through other comprehensive income. net of deferred tax
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasti - Setelah Pajak Tangguhan	150.248	122.598	27.650	22,55	Remeasurement of defined benefit obligation. net of deferred tax
Saldo Laba					Retained earnings
Telah Ditentukan Penggunaanya					**Appropriated:**
Cadangan Umum	322.161	322.161	-	-	General reserve
Cadangan Tujuan	758.235	758.235	-	-	Specific reserve
	1.080.396	**1.080.396**	**-**	**-**	
Belum ditentukan penggunaannya	(30.048.117)	(11.933.790)	(18.114.327)	(151,79)	Unappropriated
Kepentingan non-pengendali	1	1	-	-	Non-controlling interest
Jumlah Ekuitas	**8.761.467**	**26.868.245**	**(18.106.778)**	**(67,39)**	**Total Equity**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Pendapatan dan Beban Operasional					**Income and Expenses from Operations**
Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah	4.052.033	3.711.542	340.491	9,17	Interest Income and Income from Sharia
Pendapatan Usaha dari Ujrah	64	309	(245)	(79,29)	Income from Ujrah
Beban Bunga	(3.128.893)	(2.936.114)	(192.779)	6,57	Interest Expense
Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah - Neto	923.204	775.737	147.467	19,01	Interest Income and Income from Sharia - Net

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Pendapatan Operasional Lainnya					**Other Operating Income**
Pendapatan dari Asuransi	21.675	23.129	(1.454)	(6,29)	Income from Insurance
Premi Reasuransi	(9.089)	(10.053)	964	(9,59)	Reinsurance Premiums
Penurunan (Kenaikan) pada Liabilitas Asuransi	1.059	(1.444)	2.503	(173,34)	Decrease (increase) in Insurance Liabilities
(Penurunan) Kenaikan pada Aset Reasuransi	(494)	903	(1.397)	(154,71)	(Decrease) Increase In Reinsurance Assets
Beban Klaim Asuransi dan Lainnya	(933)	(994)	61	(6,14)	Claim Expense from Insurance and Other
Pendapatan Dari Penjaminan	90.527	115.552	(25.025)	(21,66)	Income from Guarantee
Keuntungan/(Kerugian)Transaksi Mata uang asing - Neto	6.828	(35.302)	42.130	(119,34)	Gain/(Loss) on Foreign Exchange transactions - net
Provisi dan Komisi Selain dari Pembiayaan dan Piutang	52.779	51.176	1.603	3,13	Non financing and receivables related fees and commission
Lain-lain	84.586	(43.247)	(41.339)	95,59	Others
Pendapatan Operasional Lainnya - Neto	259.077	186.214	72.863	39,13	Total Other Operating Income - Net
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	(16.932.394)	(2.107.596)	(14.824.798)	703,40	Provision for Impairment Losses on Financial Assets
Penyisihan Kerugian Estimasi Klaim Penjaminan	2.994	(652)	3.646	(559,20)	Provision for Impairment Losses on Estimated Guarantee Claim
Beban Operasional Lainnya					**Other Operating Expenses**
Gaji dan Tunjangan	(482.289)	(468.623)	(13.666)	2,92	Salaries and benefits
Umum dan Administrasi	(299.239)	(270.380)	(28.859)	10,67	General and administrative
Lain-Lain	(12.505)	(23.485)	10.980	(46,75)	Others
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(794.033)	(762.488)	(31.545)	4,14	Total Other Expenses
Rugi Operasional	(16.541.152)	(1.908.785)	(14.632.367)	766,58	Loss from Operations
Pendapatan Bukan Operasional - Neto	10.488	16.420	(5.932)	(36,13)	Non-Operating Income – Net
Rugi Sebelum Beban Pajak	(16.530.664)	(1.892.365)	(14.638.299)	773,55	Loss Before Tax Expense
Beban Pajak	(1.583.663)	1.222.189	(2.805.852)	29,58	Tax Expense
Rugi Tahun Berjalan	(18.114.327)	(3.114.554)	(14.999.773)	481,60	Loss for the Year
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain – Neto Setelah Pajak	7.549	(26.784)	34.333	(128,18)	Other Comprehensive Income (Loss) - Net of Tax
Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(18.106.778)	(3.141.338)	(14.965.440)	476,40	Total Comprehensive Loss for the Year
Rugi Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada:					Loss for the Year Attributable to:
- Pemilik entitas induk	(18.114.327)	(3.114.554)	(14.999.773)	481,60	- Equity holder of the parent entity
- Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	- Non controlling interest
Jumlah Rugi Komprehensif yang diatribusikan kepada:					Total Comprehensive Loss Attibuted to:
- Pemilik entitas induk	(18.106.778)	(3.141.338)	(14.965.440)	476,40	- Equity holder of the parent entity
- Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	- Non controlling interest

Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah

Pada tahun 2023, pendapatan bunga dan usaha syariah LPEI mengalami peningkatan 9,17% menjadi Rp4,05 triliun, dari Rp3,71 triliun di tahun sebelumnya.

Interest Income and Income From Sharia

In 2023, Indonesia Eximbank's interest income and income from sharia increased by 9.17% to be recorded at Rp4.05 trillion, from Rp3.71 trillion in the previous

Dari jumlah tersebut, penugasan umum memberikan kontribusi dominan sebesar 89,92% atau mencapai Rp3,64 triliun, meningkat 10,20% dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,31 triliun. Sementara itu pendapatan dari penugasan khusus berkontribusi sekitar 10,08% sehingga menjadi Rp408,32 miliar pada 2023, sedikit membukukan pertumbuhan sekitar 0,79% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp405,13 miliar. Adapun pendapatan dari pembiayaan dan piutang mencatatkan kenaikan 11,76% menjadi Rp3,07 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,75 triliun. Hal inilah yang menjadi faktor utama kenaikan pendapatan bunga dan usaha syariah LPEI di tahun 2023.

year. Of this amount, general assignment provided a dominant contribution of 89.92% or reaching Rp3.64 trillion, an increase of 10.20% from the previous year of Rp3.31 trillion. Meanwhile, income from national interest account contributed around 10.08% to Rp408.32 billion in 2023, posting a slight growth of around 0.79% from the previous year of Rp405.13 billion. Meanwhile, income from financing and receivables recorded an increase of 11.76% to Rp3.07 trillion compared to the previous year of Rp2.75 trillion. This was the main factor in the increase in Indonesia Eximbank's interest income and income from sharia in 2023.

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Penugasan Umum					**General Assignment**
Pembiayaan dan piutang	2.966.022	2.657.499	308.523	11,61	Financing and receivables
Pendapatan Usaha Syariah	488.450	594.439	(105.989)	(17,83)	Income from sharia
Penempatan pada bank	168.267	27.829	140.438	504,65	Placements with banks
Efek-efek	18.860	25.967	(7.107)	(27,37)	Securities
Giro pada bank	2.117	682	1.435	210,41	Current accounts with banks
Sub-total	3.643.716	3.306.416	337.300	10,20	Sub-total
Penugasan Khusus					**National Interest Account**
Deposito berjangka	212.983	268.294	(55.311)	(20,62)	Time deposit
Pembiayaan dan piutang	108.621	93.493	15.128	16,18	Financing and receivables
Pendapatan Usaha Syariah	141	148	(7)	(4,73)	Income from sharia
Efek-efek	83.971	42.830	41.141	96,06	Securities
Giro pada bank	2.601	361	2.240	620,50	Current accounts with banks
Sub-total	408.317	405.126	3.191	0,79	Sub-total
Jumlah	**4.052.033**	**3.711.542**	**340.491**	**9,17**	**Total**

Beban Bunga

Sejalan dengan peningkatan pendapatan, beban usaha LPEI selama 2023 turut membukukan kenaikan sekitar 6,57% atau menjadi sebesar Rp3,13 triliun dibandingkan tahun 2022 senilai Rp2,94 triliun. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan pada beban bunga atas pinjaman yang diterima.

Interest Expense

In line with the increase in income, Indonesia Eximbank's operating expenses in 2023 also recorded an increase of around 6.57% or to Rp3.13 trillion compared to 2022 of Rp2.94 trillion. This increase was mainly influenced by an increase in interest expenses on fund borrowings

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Efek-efek utang yang diterbitkan	1.690.105	1.898.703	(208.598)	(10,99)	Debt securities issued
Pinjaman yang diterima	1.438.788	1.037.411	401.377	38,69	Fund borrowing
Jumlah	**3.128.893**	**2.936.114**	**192.779**	**6,57**	**Total**

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya dibukukan sebesar Rp259,08 triliun di tahun 2023, meningkat 39,13% dari tahun lalu sehingga menjadi Rp186,21 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan lain-lain, peningkatan provisi dan komisi dan penurunan liabilitas asuransi.

Other Operating Income

Other operating income was recorded at Rp259.08 trillion in 2023, an increase of 39.13% from last year to Rp186.21 trillion. This increase was mainly due to an increase in other income, an increase in fees and commission and a decrease in insurance liabilities.

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

LPEI melaporkan kenaikan signifikan hingga 703,40% atas pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan sehingga dibukukan menjadi Rp16,93 triliun, dari sebesar Rp2,11 triliun di tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan atas CKPN ini dipengaruhi oleh peningkatan pembiayaan dan piutang bermasalah sebesar 44,20% menjadi Rp32,10 triliun di tahun 2023 dari Rp22,26 triliun pada 2022. Rasio *NPF gross* LPEI pada posisi 31 Desember 2023 adalah sebesar 43,48% meningkat terhadap posisi 31 Desember 2022 sebelumnya yang sebesar 26,61%.

Provision for Impairment Losses on FinancialAssets

Indonesia Eximbank reported a significant increase of 703.40% in the allowance for impairment losses (CKPN) on financial assets to Rp16.93 trillion, from Rp2.11 trillion in the previous year. This significant increase in CKPN was influenced by an increase in non-performing financing and receivables by 44.20% to Rp32.10 trillion in 2023 from Rp22.26 trillion in 2022. Indonesia Eximbank's gross NPF ratio as of 31 December 2023 was 43.48%, an increase compared to position 31 December 2022 previously amounted to 26.61%.

Beban Operasional Lainnya

Secara kumulatif selama 2023, LPEI membukukan kenaikan beban operasional sebesar 4,14% menjadi Rp794,03 miliar dari sebesar Rp762,49 miliar. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan beban gaji dan tunjangan, umum dan administrasi selama periode pelaporan.

Other Operating Expenses

Cumulatively, in 2023, Indonesia Eximbank posted an increase in operating expenses of 4.14% to Rp794.03 billion from Rp762.49 billion. This increase was in line with the increase in salaries and benefits, general and administrative expenses during the reporting period.

Rugi Operasional

Kenaikan jumlah pendapatan pembiayaan dan piutang yang disertai dengan meningkatnya pendapatan operasional lainnya di tahun 2023 yang dikombinasikan dengan peningkatan beban pembentukan CKPN dan beban operasionalnya berdampak rugi operasional yang signifikan menjadi Rp16,54 triliun di tahun 2023 dibandingkan Rp1,91 triliun pada tahun sebelumnya.

Lost From Operations

An increase in the income from financing and receivables accompanied by an increase in other operating income in 2023, combined with an increase in the allowance for impairment losses and operating expenses resulted in a significant loss from operations of Rp16.54 trillion in 2023 compared to Rp1.91 trillion in the previous year.

Rugi Tahun Berjalan

LPEI membukukan lonjakan kenaikan rugi tahun berjalan selama 2023 sekitar 481,60% sehingga menjadi Rp18,11 triliun dari tahun sebelumnya senilai Rp3,11 triliun. Hal ini utamanya terjadi karena peningkatan beban pembentukan CKPN dan beban pajak.

Loss (Profit) for the Year

Indonesia Eximbank recorded a surge in losses for the year in 2023 of around 481.60% to Rp18.11 trillion from the previous year of Rp3.11 trillion. This mainly occured due to an increase in the allowance for impairment losses and tax expense.

Rugi Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Dengan memperhitungkan pendapatan komprehensif lain – neto setelah pajak sebesar Rp7,55 miliar, maka total rugi penghasilan komprehensif tahun berjalan

Comprehensive Income (Loss) for the Year

Taking into account other comprehensive gain- net of tax of Rp7.55 billion, the total comprehensive loss for the year recorded by Indonesia Eximbank

yang dibukukan LPEI mencapai Rp18,11 triliun di tahun 2023, meningkat 476,40% dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp3,14 triliun.

reached Rp18.11 trillion in 2023, an increase of 476.40% compared to the previous year of Rp3.14 trillion.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	8.547.359	(371.945)	8.919.304	2.398,02	Net Cash Provided by (Used In) Operating Activities
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	494.494	(1.459.883)	1.954.377	133,87	Net Cash Provided by (Used In) Investing Activities
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(14.267.016)	(2.708.648)	(11.558.368)	426,72	Net Cash Used In Financing Activities
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas	(5.218.335)	(4.575.778)	642.557	14,04	Net Decrease In Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	12.741.875	17.317.653	(4.575.778)	(26,42)	Cash and Cash Equivalent at Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	7.523.540	12.741.875	(5.218.335)	(40,95)	Cash and Cash Equivalent at End of Year

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dibukukan mencapai Rp8,55 triliun pada posisi akhir Desember 2023, sedangkan untuk periode yang sama di tahun sebelumnya LPEI mencatatkan penggunaan kas bersih senilai Rp371,94 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan pembiayaan dan piutang syariah.

Cash Flows from Operating Activities

Net cash provided by operating activities was recorded at Rp8.55 trillion at the end of December 2023, while for the same period in the previous year Indonesia Eximbank recorded net cash used in operating activities of Rp371.94 billion. This was mainly due to the repayment of sharia financing and receivables.

Arus Kas dari Kegiatan Investasi

LPEI mencatatkan kenaikan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi sekitar 133,87% per 31 Desember 2023 sehingga menjadi Rp494,49 miliar. Sementara di tahun sebelumnya LPEI membukukan penggunaan kas bersih senilai Rp1,46 triliun. Hal ini terjadi karena penjualan efek-efek di tahun 2023.

Cash Flows from Investing activities

Indonesia Eximbank recorded an increase in net cash provided by investing activities of 133.87% as of 31 December 2023 to Rp494.49 billion. Meanwhile, in the previous year, Indonesia Eximbank recorded net cash used in investing activities of Rp1.46 trillion. This happened due to the sale of securities in 2023.

Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

Jumlah kas bersih yang digunakan LPEI untuk mendanai aktivitas pendanaan di akhir Desember 2023 dibukukan mencapai Rp14,27 triliun, meningkat hingga 426,72% dari Rp2,71 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan karena pembayaran pinjaman yang diterima.

Cash Flows from financing activities

The amount of net cash used in financing activities by Indonesia Eximbank at the end of December 2023 was recorded at Rp14.27 trillion, an increase of 426.72% from Rp2.71 trillion. The increase was due to loan payments received.

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Posisi kas dan setara kas per 31 Desember 2023 dibukukan sebesar Rp7,52 triliun atau lebih rendah 40,95% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12,74 triliun. Hal ini disebabkan karena penurunan penempatan pada bank di tahun 2023.

Cash and cash equivalents at the end of the year

The position of cash and cash equivalents as of 31 December 2023 was recorded at Rp7.52 trillion or 40.95% lower compared to the previous year of Rp12.74 trillion. This was due to a decrease in placements with banks in 2023.

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Solvency and Receivables Collectability

Kemampuan Membayar Utang

LPEI melakukan pengelolaan risiko likuiditas secara cermat dan hati-hati dengan memonitor profil jatuh tempo utang, menjaga saldo kecukupan kas, dan menyiapkan sumber pendanaan untuk pembayaran utang jatuh tempo. Untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan dan kemampuan membayar LPEI atas kewajibannya yang akan jatuh tempo dapat dilihat dari hasil pengukuran rasio-rasio likuiditas dan solvabilitas Lembaga.

Sementara dari sudut pandang eksternal, penilaian kemampuan LPEI dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek tercermin dari peringkat (*rating*) yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat PT Pefindo. Pefindo telah memberikan peringkat idAAA atau peringkat terbaik atas semua efek utang yang diterbitkan oleh LPEI baik berupa obligasi korporasi dan sukuk.

Berdasarkan klasifikasi Pefindo, peringkat idAAA menandakan bahwa LPEI memiliki kemampuan superior untuk memenuhi semua kewajiban yang didukung oleh status LPEI sebagai sebuah lembaga pemerintah, serta memiliki profil permodalan yang kuat, dan posisinya yang solid dalam menyediakan pembiayaan ekspor meski dihadapkan tantangan atas kualitas aset dan profitabilitas yang masih lemah. Peringkat atas efek utang yang ditetapkan Pefindo dapat dilihat di bagian Ikhtisar Obligasi, pada Bab Profil Perusahaan, di dalam Laporan Tahunan ini.

Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan

Pembiayaan lancar LPEI mengalami penurunan sebesar 32,02% sehingga tercatat menjadi Rp41,73 triliun di tahun 2023. Di saat bersamaan, pembiayaan bermasalah menunjukkan peningkatan 44,20% menjadi Rp32,10 triliun di akhir Desember 2023. Hal ini berpengaruh terhadap kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai yang meningkat 111,81% menjadi Rp28,75 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Solvency

Indonesia Eximbank manages liquidity risk carefully and cautiously by monitoring the debt maturity profile, maintaining sufficient cash balances, and preparing funding sources for payment of maturing debt. To measure the level of financial health and Indonesia Eximbank 's ability to pay its maturing obligations, it can be seen from the results of measuring the Institution's liquidity and solvency ratios.

Meanwhile, from an external perspective, the assessment of Indonesia Eximbank's ability to fulfill all its obligations, both long and short term, is reflected in the rating determined by the rating agency PT Pefindo. Pefindo has given an idAAA rating or the best rating for all debt securities issued by Indonesia Eximbank, both in the form of corporate bonds and sukuk.

Based on Pefindo's classification, the idAAA rating indicates that Indonesia Eximbank has a superior ability to fulfill all obligations supported by Indonesia Eximbank 's status as a government institution, as well as having a strong capital profile, and a solid position in providing export financing, despite challenges with weak asset quality and profitability. The ratings on debt securities determined by Pefindo can be seen in the Bond Overview section, in the Company Profile Chapter, in this Annual Report.

Financing Collectability Level

Indonesia Eximbank's current financing decreased by 32.02% to Rp41.73 trillion in 2023. At the same time, non-performing financing showed an increase of 44.20% to Rp32.10 trillion at the end of December 2023. This had an impact on the increase in allowance for impairment losses which increased 111.81% to Rp28.75 trillion compared to the previous year.

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Uraian	2023	2022	Perubahan | Change		Description
			Nominal	%	
Pembiayaan Lancar	41.725.413	61.376.951	(19.651.538)	(32,02)	Performing Financing
Lancar	33.990.912	41.670.009	(7.679.097)	(18,43)	Current
Dalam perhatian khusus	7.734.501	19.706.942	(11.972.441)	(60,75)	Special Mention
Pembiayaan Bermasalah	32.097.798	22.259.052	9.838.746	44,20	Non Performing Financing
Kurang lancar	7.068.091	4.949.842	2.118.249	42,79	Substandard
Diragukan	5.292.395	1.946.657	3.345.738	171,87	Doubtful
Macet	19.737.312	15.362.553	4.374.759	28,48	Loss
Total Pembiayaan dan Piutang	73.823.211	83.636.003	(9.812.792)	(11,73)	Total Financing and Receivable
CKPN NPF	(28.745.725)	(13.571.424)	(15.174.300)	111,81	CKPN NPF
NPF gross	43,48%	26,61%			NPF gross
NPF neto	4,54%	10,39%			NPF neto

Mengacu pada pasal 55 No. 3, POJK No. 9 tahun 2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang menggantikan POJK No. 40 tahun 2015, LPEI wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa membaik dengan menjaga agar nilai pembiayaan bermasalah berada pada level yang terkendali.

Referring to article 55 No. 3, POJK No. 9 of 2022 concerning Supervision of Indonesian Export Financing Institutions which replaces POJK No. 40 of 2015, Indonesia Eximbank is obliged to assess, monitor and take necessary steps so that asset quality always improves by keeping the value of non-performing financing at a controlled level.

Rasio Kecukupan Permodalan

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau *Capital to Adequacy Ratio* (CAR) LPEI secara konsolidasian dengan memperhitungkan risiko kredit, pasar dan operasional pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 17,88%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 32,74%. Posisi permodalan ini memberikan dukungan terhadap pengembangan portofolio pembiayaan LPEI di masa mendatang.

Capital Adequacy Ratio

Indonesia Eximbank's consolidated minimum capital adequacy ratio (CAR) taking into account credit, market and operational risks as of 31 December 2023 was 17.88%, a decrease compared to the previous year of 32.74%. This capital position supports the development of Indonesia Eximbank's financing portfolio in the future.

Uraian	2023	2022	Description
Kecukupan Permodalan			Capital Adequacy
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	17,88%	32,74%	Capital to Adequacy Ratio (CAR)
Kualitas Aset			Asset Quality
Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Pembiayaan - *gross*	43,48%	26,61%	Non-Performing Loans to Total Financing - gross (Gross NPL)
Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Pembiayaan - *net*	4,54%	10,39%	Non-Performing Loans to Total Financing - net (Net NPL
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	7.523.540	12.741.875	Cash and Cash Equivalent at End of Year
Rentabilitas			Earnings
Tingkat Pengembalian Atas Aset	(22,74%)	(2,19%)	Return on Assets (ROA)
Tingkat Pengembalian Atas Ekuitas	(71,71%)	(10,49%)	Return on Equity (ROE)
Marjin Bunga Bersih	1,04%	0,78%	Net Interest Margin (NIM)

Uraian	2023	2022	Description
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	483,24%	148,57%	Operating Expense to Operating Income (BOPO)
Rasio Kepatuhan			Compliance Ratio
Posisi Devisa Neto (PDN)	12,09%	1,74%	Net Open Position (NOP)
Utang terhadap Ekuitas (DER) (kali)	4,86 kali | times	2,12 kali | times	Debt to Equity Ratio - x

Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF)

LPEI menghadapi tantangan pengelolaan pembiayaan dan piutang bermasalah yang meningkat di tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rasio *NPF gross* LPEI yang menjadi 43,48% di tahun 2023 dibandingkan 26,61% dan 10,39% pada 2022. Namun demikian LPEI berhasil menurunkan rasio NPF Neto menjadi 4,54% di tahun 2023 dari sebelumnya 10,39% pada tahun 2022.

Rentabilitas

Pada tahun 2023, rugi bersih tahun berjalan LPEI meningkat tajam hingga 481,60% sehingga dibukukan menjadi Rp18,11 triliun dibandingkan rugi tahun berjalan periode 2022 senilai Rp3,11 triliun. Rugi tahun berjalan yang berada di zona negatif ini tidak terlepas dari beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang tercatat mencapai Rp16,93 triliun, meningkat dari sebesar Rp2,11 triliun di tahun sebelumnya. Faktor lainnya yang mengakibatkan peningkatan kerugian LPEI di 2023, antara lain peningkatan beban pajak pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp1,58 triliun.

Non-Performing Financing (NPF) Ratio

Indonesia Eximbank faces challenges in managing non-performing financing and receivables, which have increased in 2023. This was reflected on the increase in Indonesia Eximbank's gross NPF ratios of 43.48% respectively, in 2023 compared to 26.61% and 10.39% in 2022. However, Indonesia Eximbank managed to reduce its Net NPF ratio to 4.54% in 2023 from 10.39% in 2022.

Profitability

In 2023, Indonesia Eximbank's net loss for the year increased sharply to 481.60%, recorded at Rp18.11 trillion compared to the current year's loss for the 2022 period of Rp3.11 trillion. The loss for the year, which is in the negative zone, is inseparable from the allowance for impairment losses on financial assets of Rp16.93 trillion, an increase from Rp2.11 trillion in the previous year. Other factors that caused Indonesia Eximbank's losses to increase in 2023 include an increase in the tax expense in 2023 to Rp1.58 trillion.

Struktur Modal dan Kebijakan atas Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Struktur Permodalan

LPEI membukukan penurunan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) di tahun 2023 yang dibukukan menjadi 17,88% turun dari 32,74% pada tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh pembentukan CKPN atas pembiayaan bermasalah di tahun 2023 yang terefleksi dari kenaikan rasio *NPF gross*.

Capital Structure

Indonesia Eximbank recorded a decrease in the minimum capital requirement ratio (CAR) in 2023 of 17.88% decrease from 32.74% in 2022. This was influenced by the formation of CKPN on non-performing financing in 2023 which was reflected in the increase in gross NPF ratio.

Rasio KPMM yang memperhitungkan risiko kredit diperoleh sebesar 18,43% pada 2023, menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 32,93%. Selain itu, rasio KPMM untuk risiko kredit, pasar, dan operasional juga menjadi lebih rendah menjadi sebesar 17,88% pada 2023, turun dari 32,74% pada tahun 2022 pembentukan CKPN atas pembiayaan bermasalah.

The CAR ratio which includes credit risk was 18.43% in 2023, down from 32.93% in 2022. In addition, the CAR ratio for credit, market, and operational risks also became lower to 17.88% in 2023, down from 32.74% in 2022.

Uraian (Rp Juta)	2023	2022	Description (Rp Million)
Modal			Capital
Modal Inti	8.611.218	26.745.646	Core Capital
Modal Pelengkap	343.385	524.562	Supplementary Capital
Modal Inti dan Pelengkap	8.954.603	27.270.208	Core and Supplementary Capital
Total Modal untuk Risiko Kredit, Pasar, dan Operasional	8.954.603	27.270.208	Total Capital for Credit, Market, and Operational Risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit	48.578.757	82.808.170	Risk Weighted Assets (RWA) Credit Risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar	1.078.982	472.528	Risk Weighted Assets (RWA) Market Risk
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Operasional	431.871	-	Risk Weighted Assets (RWA) Operational Risk
Rasio Kecukupan Modal yang Tersedia untuk Risiko Kredit	18,43%	32,93%	CAR with Credit Risk
Rasio Kecukupan Modal yang Tersedia untuk Risiko Kredit, Pasar, dan Operasional	17,88%	32,74%	CAR With Credit, Market, and Operational Risk
Rasio Kecukupan Modal yang Diwajibkan	10%-<11%	8,00%	Required CAR

Selama tahun 2023 dan 2022, LPEI tidak menerima penambahan PMN dari Pemerintah. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI adalah sebesar Rp37,60 triliun.

Throughout 2023 and 2022, Indonesia Eximbank's did not receive any additional PMN from the Government. Thus, as of 31 December 2023 and 2022, the capital contribution from the Government of the Republic of Indonesia to Indonesia Eximbank's amounted to Rp37.60 trillion.

Dasar Penetapan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan minimal Rp4 triliun. Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan mekanisme yang berlaku jika modal LPEI berkurang dari Rp4 triliun. Penambahan modal LPEI untuk menutup kekurangan modal ditetapkan dengan PP.

Basis for Determining Management Policy on Capital Structure

Pursuant to Act No. 2 of 2009 dated 12 January 2009 on Indonesia Eximbank, Indonesia Eximbank's initial capital is set at a minimum of Rp 4 trillion. The government covers the shortfall from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) funds based on the applicable mechanism when Indonesia Eximbank 's capital is reduced from Rp4 trillion. Topping up Indonesia Eximbank's capital to cover the shortfall is stipulated in the PP.

LPEI telah beberapa kali menerima kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam bentuk PMN sebagai perwujudan dukungan kuat Pemerintah RI kepada LPEI. PMN yang telah disetorkan kepada LPEI di antaranya sebesar Rp2 triliun pada tahun 2010, Rp1 triliun pada tahun 2014; Rp1 triliun pada tahun 2015; Rp4 triliun pada tahun 2016; Rp3,2 triliun

Indonesia Eximbank has received several capital contributions from the Government of the Republic of Indonesia in the form of PMN as a manifestation of the Indonesian Government's strong support for Indonesia Eximbank. The PMN deposited to Indonesia Eximbank includes Rp2 trillion in 2010, Rp1 trillion in 2014; Rp1 trillion in 2015; Rp4 trillion in 2016; Rp3.2 trillion

pada tahun 2017; Rp2,5 triliun pada tahun 2019; Rp10 triliun pada tahun 2020; dan Rp5 triliun pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, LPEI tidak menerima PMN dari Pemerintah.

in 2017; Rp2.5 trillion in 2019; Rp10 trillion in 2020; and Rp5 trillion in 2021. In 2022, Indonesia Eximbank did not receive PMN from the Government.

Tahun Year	**PMN Peningkatan Kapasitas Usaha** Business Capacity Enhancement	**PMN Penugasan Khusus** Special Assignment	**PMN dalam Rangka PEN** PEN	**Total PMN**	**Dasar Hukum** Legal Basis
	(Rp miliar) (Rp billion)	**(Rp miliar)** (Rp billion)	**(Rp miliar)** (Rp billion)	**(Rp miliar)** (Rp billion)	
2010	2.000			2.000	Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2010 Government Regulation No. 73 Year 2010
2014	1.000			1.000	Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2014 Government Regulation No. 86 Year 2014
2015	1.000			1.000	Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2015 Government Regulation No. 67 Year 2015
2016	2.000	2.000		4.000	Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2016 Government Regulation No. 81 Year 2016
2017	1.000	2.200		3.200	Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2017 Government Regulation No. 55 Year 2017
2019	1.500	1.000		2.500	Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2019 Government Regulation No. 44 Year 2019
2020	4.000	1.000		5.000	Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2020 Government Regulation No. 40 Year 2020
2020			5.000	5.000	Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2020 Government Regulation No. 78 Year 2020
2021	2.500	2.500		5.000	Peraturan Pemerintah No.117 tahun 2021 Government Regulation No. 117 Year 2021
Jumlah	**15.000**	**8.700**	**5.000**	**28.700**	**Total**

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment for Capital Goods Investment

Di sepanjang tahun 2023, LPEI tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, LPEI tidak menyajikan informasi terkait tujuan dari ikatan tersebut; sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; mata uang yang menjadi denominasi; dan langkah yang direncanakan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Throughout 2023 Indonesia Eximbank did not have any material commitments for capital expenditures with various parties. therefore Indonesia Eximbank did not provide information regarding the purpose of the bond; the source of fund expected to be used to meet the commitment; the currency denominated; and the steps planned to protect against the risk of the related foreign currency positions.

Realisasi Investasi atau Belanja Barang Modal Tahun 2023

Investment Realization or Capital Expenditures in 2023

Realisasi belanja modal LPEI mengalami peningkatan signifikan sebesar 71,68% di tahun 2023 sehingga dibukukan menjadi Rp22,56 miliar dibandingkan belanja modal tahun sebelumnya sebesar Rp13,14 miliar. LPEI melakukan belanja modal untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari dengan menggunakan sumber pendanaan dari kas internal dan menggunakan mata uang Rupiah.

Indonesia Eximbank's capital expenditure realization experienced a significant increase of 71.68% in 2023, recorded at Rp22.56 billion compared to the previous year's capital expenditure of Rp13.14 billion. Indonesia Eximbank carries out capital expenditure to support daily operational activities using funding sources from internal cash and using the Rupiah currency.

Berikut ini adalah rincian informasi investasi belanja barang modal LPEI selama dua tahun terakhir:

The following is detailed investment information on Indonesia Eximbank's capital expenditures for the last two years:

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Investasi Barang Modal	2023	2022	Capital Expenditure
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	993	2.676	Office Furniture and and fixtures
Aset Dalam Penyelesaian	17.732	4.208	Construction in progress
Aset Hak Guna	3.834	6.256	Right of use asset
Jumlah Investasi Barang Modal	**22.559**	**13.140**	**Total Capital Expenditure**

Perbandingan antara Target & Realisasi Tahun 2023 serta Proyeksi 2024

Comparison between Target & Realization in 2023 as well as 2024 Projection

Pencapaian kinerja keuangan dan operasional LPEI di tahun 2023 digunakan sebagai bahan evaluasi dan pijakan bagi Manajemen untuk menyusun prospek usaha dan target-target bisnis yang lebih optimis pada 2024 mendatang. Sepanjang tahun 2023, profitabilitas LPEI masih mengalami tekanan karena tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan eksternal, walau begitu LPEI tetap dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal sebagai SMV Kementerian Keuangan RI.

Indonesia Eximbank's financial and operational performance achievements in 2023 are used as evaluation material and a basis for the Management to develop more optimistic business prospects and business targets in 2024. Throughout 2023, Indonesia Eximbank's profitability was still under pressure because it was faced with various external challenges, however, Indonesia Eximbank was still able to carry out its role and function optimally as the SMV of the Indonesian Ministry of Finance.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023, serta proyeksi tahun 2024 mendatang:

The following is a comparison between targets and realization in 2023, as well as projections for 2024:

(Dalam Rp Juta | In Rp Million)

Indikator	2023			Proyeksi 2024 2024 Projection	Indicator
	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievements		
Jumlah Aset	79.152.363	51.349.422	64,87%	63.644.178	Total Assets
Jumlah Pembiayaan	83.607.176	73.823.211	88,30%	71.500.754	Total Financing
Jumlah Penjaminan (termasuk PEN)	13.522.023	10.895.141	80,57%	11.963.049	Total Guarantee (including PEN)
Jumlah Asuransi (volume)	12.552	12.019	48,87%	13.186.873	Total Insurance
Jumlah Ekuitas	27.010.912	8.761.467	32,44%	35.230.220	Total Equity
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	152.633	(18.114.327)	(11867,90%)	163.200	Net (Loss) Profit

Semua target dan rencana bisnis LPEI untuk 2024 mendatang sudah dituangkan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2024 yang penyusunannya telah mempertimbangkan berbagai faktor dan dinamika eksternal yang diproyeksikan masih akan terus berkembang serta juga memperhatikan kapasitas dan sumber daya internal yang dimiliki sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan.

All Indonesia Eximbank business targets and plans for 2024 have been outlined in the 2024 Annual Work Plan and Budget (RKAT), the preparation of which has taken into account various external factors and dynamics which are projected to continue to develop and also pays attention to internal capacity and resources as a foundation. in facing challenges.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information Subsequent Events

a. Jaringan Kantor

Kantor LPEI berlokasi di Prosperity Tower, District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta - 12190. Pada tanggal 31 Desember 2023, LPEI mempunyai tiga kantor wilayah yaitu Kantor Wilayah I; Kantor Wilayah II membawahi Kantor Cabang Balikpapan; dan Kantor Wilayah III membawahi Kantor Cabang Makassar dan Kantor Cabang Denpasar. LPEI juga memiliki Kantor Area Medan yang membawahi Kantor Cabang Batam.

b. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit dan Pegawai

Susunan Direktur Pelaksana LPEI setelah tanggal neraca 31 Desember 2023 sesuai dengan Surat Keputsan Dewan Direktur Lambaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0001/KDD/02/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Lembaga pembiayaan Ekspor Indonesia, masa jabatan Agus Windiarto selaku pejabat Plt. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2024. Dan sesuai dengan Surat keputusan Dewan Direktur No. 0002/KDD/03/2024 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 14 Maret 2024 menetapkan Sam Malee sebagai Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sejak 14 Maret 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024.

Peranan dan tanggung jawab pembidangan Manajemen LPEI berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No.0001/PDE/01/2024 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang mulai berlaku tanggal 1 Februari 2024 adalah sebagai berikut:

- Direktur Eksekutif membawahi Direktur Pelaksana Bisnis, Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis, Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit, Direktur Pelaksana Manajemen Keuangan, Operasional & Teknologi Informasi, Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia, Head of Kepatuhan, SDM, & Transformasi Organisasi, dan Subject Matter Experts.

a. Office Network

LPEI office is located at the Prosperity Tower, District 8, Jenderal Sudirman Street Lot 52-53, Jakarta - 12190. As of December 31, 2023, LPEI has three Regional Offices, namely Regional Office I; Regional Office II oversees the Balikpapan Branch Office; and Regional Office III oversees the Makassar Branch Office and Denpasar Branch Office. LPEI also has a Medan Area Office which oversees the Batam Branch Office.

b. Board of Directors, Managing Directors, Audit Committee and Employees

The Managing Directors of LPEI after balance sheet date December 31, 2023 is in accordance with the Decree of the Board of Directors of the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0001/KDD/02/2024 regarding concerning Extension of the Term of Office of the Acting Managing Director of the Indonesian Export Financing Institution, Agus Windiarto's term of office as Plt. Managing Director for Risk & Credit Management extended until March 31, 2024. And in accordance with Decree of the Board of Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0002/KDD/03/2024 regarding Appointment of Managing Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated March 14, 2024, Sam Malee was assigned as a Managing Directors since March 14, 2024 until August 31, 2024.

The roles and responsibilities of Management of LPEI based on the Board of Executive Directors Decision Letter No. 0001/PDE/01/2024 regarding the Guidelines and Work Procedures of the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, which came into force on February 1, 2024, are as follows:

- Executive Director is responsible for Managing Director of Business, Managing Director of Business Development, Managing Director of Credit & Risk Management, Managing Director of Finance, Operational & IT and Managing Director of Corporate Secretary, Compliance & Human Capital, Chief of Compliance, HR & Organization Transformation, and Subject Matter Experts

• Direktur Eksekutif membawahi Direktur Pelaksana Bisnis, Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis, Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit, Direktur Pelaksana Manajemen Keuangan, Operasional & Teknologi Informasi, Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia, Head of Kepatuhan, SDM, & Transformasi Organisasi, dan Subject Matter Experts.	• Managing Director of Business is responsible for Business Division I, II, III and IV, Business Ecosystem, Executive Business Officer, Trade Services Center, Designated Compliance & Risk Operations and Chief of Region.
• Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis membawahi Divisi Penugasan Khusus Ekspor, Pembiayaan Perdagangan dan Pembiayaan, Divisi Penjaminan & Asuransi, Divisi Jasa Konsultasi, Unit Usaha Syariah, Proyek Khusus, dan Intelejen Pasar & Manajemen Prospek.	• Managing Director of Business Development is responsible for NIA, Trade Finance & Financing Division, Guarantee & Insurance Division, Advisory Services Division, Sharia Unit, Special Projects and Market Intelligence & Lead Management.
• Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit membawahi Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kebijakan, Prosedur & Produk, dan Eksekutif Analisa Risiko.	• Managing Director of Credit & Risk Management is responsible for Risk Management, Policy, Procedure & Product Division and Chief of Business Risk.
• Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi membawahi Divisi Operasional, Divisi Teknologi Infoemasi, Ekonom dan Chief of Keuangan, Tresuri, & Strategi.	• Managing Director of Finance, Operations & IT is responsible for Operating Division, Inforrmation Technology Division, Economist, and Chief of Finance, Treasury & Strategy.
• Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya manusia membawahi Divisi Sekretariat Lembaga dan Hubungan Kelembagaan, Divisi Pengadaan & Umum, Penugasan Umum, Divisi Hukum dan Chief of SDM, Hukum & Kepatuhan.	• Managing Director of Corporate Secretary, Compliance & Human Capital is responsible for Corporate Secretary & Stakeholder Engagement Division, Procurement & GA Division, Special Assignment and Chief of Human Capital, Legal, & Compliance.
• Chief of Wilayah membawahi Kantor Wilayah I, II dan II dan Kantor Area Medan.	• Chief of Region is responsible for Regional Office I, II and III and Medan Area Office
• Chief of Risiko Bisnis membawahi Eksekutif Analisa Risiko	• Chief of Business Risk is responsiblefor Executive Risk Officer
• Chief of SDM, Hukum & Kepatuhan membawahi Divisi Hukum dan Kepatuhan dan Divisi Sumber Daya Manusia.	• Chief of HC, Legal & Compliance is responsible for Legal & Compliance Division and Human Capital Division
• Chief of Keuangan, Tresuri, & Strategi membawahi Divisi Perencanaan Strategi & Transformasi, Divisi Pendanaan & Tresuri, Divisi Keuangan dan Manajemen Neraca.	• Chief of Finance, Treasury & Strategy is responsible for Strategic Planning & Transformation Division, Funding & Treasury Division, Finance Division and Balance Sheet Management
• Chief of Audit Internal membawahi Divisi Audit Umum, Divisi Audit Khusus dan Manajemen Mutu & Metodologi.	• Chief of Internal Audit is responsible for Regular Audit Division, Special Audit Division and QA & Methodology

c. Kasus Hukum

Terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian yaitu adanya informasi kasus hukum atas dugaan tindak pidana dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang melibatkan beberapa debitur LPEI, baik yang masih dalam tahap pelaporan/penyelidikan awalmaupun tahap penyidikan oleh institusi penegak hukum Indonesia. Namundemikian, mengingat kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebutdiindikasikan bukan merupakan tindak pidana korporasi, maka dampak hukum akan tertuju kepada pertanggungjawaban perorangan dan bukan kepada Lembaga (LPEI). Berdasarkan premis tersebut dan mengingat pembiayaan kepada debituryang terkait dengan kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebut sudah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara memadai, sehingga manajemen berpendapat bahwa kasus hukum yang sedang dihadapi LPEI dipandang tidak akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian LPEI 31Desember 2023.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang melibatkan beberapa debitur LPEI tersebut masih dalam tahap pelaporan/ penyelidikan awal maupun tahap penyidikan. Selain itu,terdapat ketidak pastian mengenai apakah terdapat kerugian keuangan dan non keuangan lebih lanjut terhadap LPEI sebagai konsekuensi kasus tersebut. Manajemen telah menyiapkan Langkah langkah mitigasi atas dampak keuangan maupun non-keuangan atas kasus hukum dugaan tindak pindana tersebut. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dampak dari proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebut belum dapat diperkirakan.

c. Legal Case

There were important subsequent event, regarding information of legal case alleged unlawful acts in providing financing facilities involving several LPEI's debtors, both are still in the initial reporting/inquiry stage and the investigation stage at Indonesian law enforcement agencies. However, considering that the legal case is related to alleged unlawful acts committed by individual persons, the legal impact will be directed at individual persons and not atthe Institution as a separate legal entity. Based on this premise and considering that adequate allowance for impairment losses have been provided for the financing to debtors related to legal case of alleged unlawful acts, management believes that the legal case currently being faced by LPEI is deemed not to have a material impact on LPEI's consolidated financial statements as of December 31, 2023.

Until the issuance date of the consolidated financial statements, the process of legal case for alleged unlawful acts in providing financing facilities involving several LPEI's debtors both are still in the initial reporting/inquiry stage and investigation stage. In addition, there is uncertainty whether there will be further any financial and non-financial losses to LPEI as a consequence of this case. Management has prepared mitigation steps for the financial and non-financial impacts of this legal case for alleged unlawful acts. Until the issuance date of the consolidated financial statements, the impact of the legal case for alleged unlawful acts cannot be estimated accordingly.

PROSPEK USAHA
Business Prospect

Pelemahan ekonomi global diproyeksikan terus berlanjut hingga 2024 mendatang seiring dengan tingginya risiko ketidakpastian dari pasar keuangan dengan asumsi The Fed AS yang masih akan melanjutkan kebijakan suku bunga *higher for longer.* Tidak hanya itu, ketegangan geopolitik yang diperkirakan terus berlanjut di sejumlah kawasan serta moderasi harga komoditas yang sempat melonjak di masa pandemi juga menjadi isu utama yang masih akan menyelimuti arah perkembangan ekonomi global ke depan.

The weakening of the global economy is projected to continue until 2024 in line with the high risk of uncertainty from financial markets with the assumption that the US Fed will continue its higher interest rate policy for longer. Not only that, geopolitical tensions which are expected to continue in a number of regions as well as moderation in commodity prices which have soared during the pandemic are also the main issues that will still cloud the direction of future global economic development.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, World Bank dan IMF memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 akan kembali melanjutkan penurunan dengan posisi yang masih lemah dan rentan dari berbagai *downside risks.* International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 akan sebesar 3,1% (yoy), sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global hanya tumbuh 2,4% (yoy), lebih rendah dari kinerja perekonomian global 2023.

By considering these factors, the World Bank and IMF project that the global economic growth rate in 2024 will continue to decline with a position that is still weak and vulnerable to various downside risks. The International Monetary Fund (IMF) projects that global economic growth in 2024 will be 3.1% (yoy), while the World Bank predicts that the global economy will only grow 2.4% (yoy), lower than the performance of the global economy in 2023.

Di tengah kondisi pelemahan ekonomi global tersebut, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 tetap optimistis. Perekonomian nasional diyakini tetap resilien dari berbagai tekanan global dan akan mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 5% (yoy) didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional, APBN juga akan terus dioptimalkan oleh Pemerintah untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional guna mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang lebih inklusif, lebih hijau, dan berkelanjutan.

In the midst of the weakening global economy, projections for Indonesia's economic growth in 2024 remain optimistic. The national economy is believed to remain resilient from various global pressures and will be able to maintain growth above 5% (yoy) driven by increased household consumption and government spending. In maintaining national economic and financial stability, the Government will continue to optimize the APBN to provide stimulus for the national economy to encourage accelerated economic transformation that is more inclusive, greener and sustainable.

Menyambut tahun 2024 dengan berbagai dinamika eksternal yang diproyeksikan berkembang beserta tantangan dan risiko yang mengikutinya, LPEI berkomitmen untuk memperkuat peran strategisnya dalam mendukung kinerja ekspor nasional sambil terus berusaha memperbaiki fundamental bisnisnya dengan melanjutkan strategi transformasi yang sudah diterapkan sejak 2020 agar ke depan LPEI dapat tumbuh lebih sehat dan kuat. Sejalan dengan

Welcoming 2024 with various external dynamics that are projected to develop along with the challenges and risks that follow, Indonesia Eximbank is committed to strengthening its strategic role in supporting national export performance while continuing to strive to improve its business fundamentals by continuing the transformation strategy that has been implemented since 2020 to grow healthier and stronger. In line with positive projections for national economic growth,

proyeksi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, LPEI juga menaruh optimisme yang sama atas prospek usaha di tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, LPEI menetapkan strategi dan prioritas yang menjadi acuan dalam mengembangkan bisnis di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Bisnis sesuai Mandat Strategi pertumbuhan bisnis ke depan akan dilakukan melalui *hybrid approach* dengan mulai membesarkan portofolio yang berfokus pada *developmental impact*.
2. Strategi Pendanaan dan *Treasury* yang optimal Strategi untuk mengoptimalisasikan sumber pendanaan yang ada maupun diversifikasi sumber pendanaan yang lebih murah.
3. Percepatan perbaikan dan peningkatan kualitas asset Optimalisasi anak perusahaan (PT IPA) dalam mempercepat perbaikan kualitas aset, collection yang ketat, restrukturisasi, *recovery* dan melaksanakan hapus buku.
4. Menjadi perintis dalam melaksanakan inisiatif ekspor pemerintah Menjadi perintis (*pioneer*) dalam melaksanakan inisiatif ekspor Pemerintah dengan memprioritaskan sektor industri dan menyelaraskan strategi ESG sesuai dengan rencana strategis Kementerian dan Lembaga.
5. Kolaborasi dengan ekosistem ekspor
   Berperan dan berkolaborasi dengan ekosistem ekspor untuk LPEI dapat lebih *outreach* mendekati pasar.
6. Perbaikan *Balance Sheet*
   Memperkuat fungsi *Treasury* serta penerapan ALMA yang menjadi salah satu langkah dalam perbaikan kualitas neraca.
7. Tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang kuat dan modern penyusunan kebijakan dan manajemen risiko sesuai dengan perundangan dan *leading practices*, dan memiliki *risk capacity* sesuai dengan selera risiko.
8. Meningkatkan dan mengoptimalkan struktur organisasi serta kemampuan sumber daya manusia sekaligus menanamkan budaya Lembaga.
9. Memperbaiki kemampuan dan infrastruktur IT untuk mendukung kebutuhan bisnis di masa depan.
10. Komunikasi kepada *stakeholder* untuk mengkomunikasikan inisiatif yang dilakukan dan menambah *added value* LPEI bagi *stakeholder*.

Dukungan aspek finansial melalui pembiayaan, penjaminan dan asuransi akan diberikan oleh LPEI selain mendorong dan meningkatkan kelas

Indonesia Eximbank also shares the same optimism regarding business prospects in 2024. In relation to this, Indonesia Eximbank has determined strategies and priorities that will become a reference in developing business in 2024, namely as follows:

1. Business Growth in accordance with the Mandate. Future business growth strategies will be carried out through a hybrid approach by starting to expand the portfolio which focuses on developmental impact.
2. Optimal funding and treasury strategy. Strategy to optimize existing funding sources and diversify cheaper funding sources.
3. Accelerating repair and improvement of asset quality. Optimization of subsidiaries (PT IPA) in accelerating asset quality improvement, strict collection, restructuring, recovery and carrying out write-offs.
4. Be a pioneer in implementing the government's export initiatives. Be a pioneer in implementing the Government's export initiatives by prioritizing the industrial sector and aligning ESG strategies in accordance with the strategic plans of Ministries and Institutions.
5. Collaboration with the export ecosystem
   Play a role and collaborate with the export ecosystem so that Indonesia Eximbank can reach closer to the market
6. Balance Sheet Improvements
   Strengthening the treasury function and implementing ALMA is one of the steps in improving the quality of the balance sheet
7. Strong and modern governance, risk management and compliance (GRC).
   Preparing policies and risk management in accordance with legislation and leading practices, and having risk capacity in accordance with risk appetite.
8. Improve and optimize organizational structure and human resource capabilities while instilling institutional culture.
9. Improve IT capabilities and infrastructure to support future business needs
10. Communication with stakeholders to convey initiatives undertaken and added value to Indonesia Eximbank for stakeholders.

Support for financial aspects through financing, guarantees and insurance will be provided by Indonesia Eximbank in addition to encouraging and

UKM Indonesia melalui program jasa konsultasi. Di samping itu, LPEI akan melanjutkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga ataupun pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan edukasi untuk para calon eksportir serta *community development* melalui program Desa Devisa yang bertujuan untuk terus mendorong kontribusi UKM Indonesia dalam rangka peningkatan ekspor.

improving the quality of Indonesian SMEs through advisory service programs. Moreover, Indonesia Eximbank will continue collaboration with ministries/ institutions or other stakeholders in order to increase education for prospective exporters as well as community development through the Go Export Village program which aims to continue to encourage the contribution of Indonesian SMEs in order to increase exports.

Dalam memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional yang diperkirakan terus bertumbuh di jalur yang diharapkan, LPEI akan mulai lebih fokus memperbesar porsi pembiayaan untuk UKM ekspor (UKME) dan usaha menengah berorientasi ekspor (UMBE) dalam portofolionya. Demikian pula penguatan lini bisnis asuransi, penjaminan, dan jasa konsultasi juga berjalan beriringan demi meningkatkan kinerja pendapatan jasa (*fee income*).

In taking advantage of the momentum of national economic recovery which is expected to continue to grow along the expected path, Indonesia Eximbank will begin to focus more on increasing the portion of financing for export SMEs (UKME) and export-oriented medium enterprises (UMBE) in its portfolio. Likewise, strengthening the insurance, guarantee and advisory services business lines also goes hand in hand in order to increase the performance of fee income.

Dengan mengarahkan fokus pada beberapa prioritas strategi di 2024, LPEI percaya performa keuangannya akan membaik dan keberadaannya di tengah masyarakat serta para eksportir dapat memberikan nilai tambah. Dalam menjalankan seluruh kegiatan usaha yang dimandatkan Pemerintah, LPEI berkomitmen untuk selau hadir mengisi kekosongan *market gap* layanan keuangan untuk tujuan ekspor ke negara berisiko tinggi, atau untuk memberikan kenyamanan bagi pelaku ekspor yang tengah mencoba pasar baru, misalnya ke beberapa negara Afrika atau ke negara-negara berkembang di Asia Timur.

By focusing on several strategic priorities in 2024, Indonesia Eximbank believes its financial performance will improve and its presence in the community and exporters can provide added value. In carrying out all business activities mandated by the Government, Indonesia Eximbank is committed to always being present to fill the market gap in financial services for the purpose of exporting to high-risk countries, or to provide comfort for exporters who are trying new markets, for example to several African countries or to other developing countries in East Asia.

Pada kuartal pertama tahun 2024, LPEI telah berhasil membantu 104 eksportir Indonesia untuk mendapatkan *buyer* baru dari berbagai negara dengan kesepakatan bisnis dengan nilai mencapai Rp1 miliar. Selain menghubungkan dengan calon pembeli internasional, LPEI juga akan terus berusaha memberikan pemahaman dan wawasan kepada pelaku UKM tentang identifikasi peluang bisnis baru serta pembentukan kerja sama yang berkelanjutan.

In the first quarter of 2024, Indonesia Eximbank has succeeded in helping 104 Indonesian exporters to find new buyers from various countries with business deals worth up to Rp1 billion. In addition to connecting with potential international buyers, Indonesia Eximbank will also continue to strive to provide understanding and insight to SMEs regarding the identification of new business opportunities and the formation of sustainable cooperation.

Pencapaian tersebut tentunya menjadi langkah awal yang baik untuk mengarungi perjalanan panjang 2024. LPEI akan terus berusaha menyalurkan pembiayaan kepada sektor yang memiliki daya ungkit dan *developmental impact* terhadap ekspor, pendapatan dan penambahan lapangan kerja, serta konsisten melaksanakan mandat yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk dan mendorong ekspor nasional.

This achievement is certainly a good first step to navigate the long journey of 2024. Indonesia Eximbank will continue to strive to channel financing to sectors that have leverage and developmental impact on exports, income and additional employment opportunities, as well as consistently implementing the mandate given by the government to increase product competitiveness. and encourage national exports.

Kebijakan Dividen dan Pembagiannya
Dividend Policy and Distribution

Kebijakan Dividen

Mengacu kepada pasal 21 Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan PMK No. 260/PMK.06/2015, surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kegiatan digunakan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan *tantiem*, dan bagian laba Pemerintah. Persentase alokasi surplus ditetapkan sebagai cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar 90% dari surplus dan jasa produksi dan tantiem serta bagian laba Pemerintah sebesar 10% dari surplus. Besarnya persentase untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan *tantiem*, serta bagian laba Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI.

Dividend Policy

Referring to article 21 of Act No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank and and Regulation of the Minister of Finance No. 260/PMK.06/2015, the surplus gained by Indonesia Eximbank within 1 (one) year operation shall be used for general reserves, special purpose reserve, performance bonus and tantiem, and the Government's profit share. The surplus allocating percentage shall be determined as follows: general reserves and special purpose reserve shall be 90% of the surplus and performance bonus and tantiem, as well as the Government's profit share shall be 10% of the surplus. The percentages amount for general reserves, special purpose reserves, performance bonus and tantiem, as well as the Government's profit share shall be determined by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Pembagian Dividen dalam Dua Tahun Terakhir

Tahun 2023

Tidak terdapat pembagian dividen pada tahun 2023

Tahun 2022

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-662/MK.06/2022 tanggal 14 Agustus 2022, Menteri Keuangan RI menetapkan penggunaan surplus usaha LPEI tahun buku 2021 sebesar Rp23,63 miliar sebagai bagian laba pemerintah.

Dividend Distribution in the Last Two Years

2023

There is no dividend payment in 2023.

2022

Pursuant to the Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-662/MK.06/2022 dated 14 August 2022, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia stipulated the use of LPEI's operating surplus for the 2021 fiscal year of Rp23.63 billion as part of the government's profit.

Program Kepemilikan Saham Karyawan atau Manajemen
Share Ownership Program for Employee/Management

LPEI melaporkan tidak terdapat program kepemilikan saham oleh pegawai dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) mengingat kedudukan LPEI sebagai lembaga yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah.

Indonesia Eximbank reports that given its position as a wholly government-owned entity, it does not have an employee and/or management stock ownership program (ESOP/MSOP).

Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger/ Consolation of Businesses, Acquisitions, and Debt/Capital Restructuring

Investasi

LPEI melakukan aktivitas investasi terkait pembelian efek-efek. Efek-efek terdiri atas efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal, berupa surat berharga yang diterbitkan pemerintah dan surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi.

Penilaian efek-efek didasarkan atas klasifikasi nya sebagai berikut:

1. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain.
2. Pendapatan diakui dalam laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs diakui pada laba rugi.

LPEI melakukan investasi berupa efek utang yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam mata uang Rupiah senilai Rp1,17 triliun termasuk di dalamnya *Green Bond* yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk dan efek utang yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam mata uang asing sebesar Rp277,15 miliar.

LPEI tidak melakukan ekspansi, divestasi, akuisisi dan restrukturisasi di sepanjang tahun 2023. Oleh karena itu, Indonesia Eximbank tidak menyajikan informasi terkait hal tersebut seperti tanggal, nilai, dan objek transaksi; nama pihak yang melakukan transaksi; sifat hubungan afiliasi (jika ada); penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan pemenuhan ketentuan terkait

Investment

Indonesia Eximbank conducts investment activities related to the purchase of securities. Securities consist of securities traded in the capital market, in the form of securities issued by the government and securities issued by corporations.

Securities valuation is based on its classification as follows:

1. Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in other comprehensive income.
2. Income is recognized in profit or loss using the effective interest method. Foreign exchange gain or loss is recognized in profit or loss.

Indonesia Eximbank invested in debt securities issued by the Government in Rupiah currency amounting to Rp1.17 trillion including Green Bond issued by PT Bank Negara Indonesia Tbk and debt securities issued by the Government in foreign currency amounting to Rp277.15 billion.

Indonesia Eximbank did not conduct any expansion, divestment, acquisition and restructuring throughout 2023. Therefore, Indonesia Eximbank does not present information related to these matters such as the date, value, and object of the transaction; the name of the party conducting the transaction; the nature of the affiliate relationship (if any); an explanation of the fairness of the transaction; and the fulfillment of related provisions.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Realization of Use of Funds Proceeding from Public Offering of Bond

LPEI tidak menyajikan informasi terkait penggunaan dana hasil penawaran umum karena LPEI tidak melakukan penerbitan efek bersifat utang di sepanjang tahun 2023.

Indonesia Eximbank did not provide information regarding the use of proceeds from the public offering because Indonesia Eximbank did not issue debt securities in 2023.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Transaksi Afiliasi dengan Pihak-pihak Berelasi

Transaction with Conflicts of Interest and Affiliates Transactions with Related Parties

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

LPEI menyatakan tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun pelaporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Material Transactions Containing Conflicts of Interest

Indonesia Eximbank stated that it did not engage in any transactions involving conflicts of interest during the reporting year ended on 31 December 2023.

Tujuan Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

Dalam kegiatan normal usaha, LPEI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama, serta bertujuan untuk memperoleh pendapatan baik yang sifatnya berulang maupun tidak berulang.

Purpose of Transactions with Affiliated or Related Parties

In the normal course of business, Indonesia Eximbank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the terms and conditions agreed by the parties, and are aimed at obtaining income, both recurring and non-recurring.

Penjelasan lengkap terkait transaksi material dengan pihak berelasi selama tahun 2023 terdapat pada Catatan No. 39 atas Laporan Keuangan Tahunan *Audited* LPEI untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

A full explanation of the material transactions with related parties during 2023 can be found in Note No. 39 on Indonesia Eximbank's Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023.

Pernyataan Direksi atas Transaksi Afiliasi Tahun 2023

Direksi berpendapat seluruh transaksi afiliasi yang dilakukan LPEI dengan pihak-pihak berelasi sepanjang tahun 2023 sudah dilaksanakan pada nilai yang wajar (*arm's length*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila transaksi serupa dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi serta telah sesuai dengan *best practice* yang berlaku universal.

Directors' Statement on Affiliate Transactions in 2023

The Board of Directors believes that all affiliate transactions carried out by Indonesia Eximbank with related parties in 2023 have been conducted at a fair value (arm's length) in accordance with the same terms and conditions as if similar transactions were carried out with unaffiliated parties and were in accordance with applicable best practices.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Mengawasi Jalannya Prosedur Transaksi Afiliasi

Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Audit menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan transaksi-transaksi material dengan nominal tertentu yang dilakukan LPEI dengan pihak-pihak berelasi. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya mitigasi risiko untuk mencegah kemungkinan terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang berpotensi merugikan LPEI di kemudian hari.

Kebijakan LPEI terkait Mekanisme *Review* atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Mekanisme *review* yang diterapkan LPEI dalam menganalisa dan meninjau transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan secara internal dengan melibatkan organ-organ pengawas seperti Komite Audit dan Dewan Komisaris. Selain itu, transaksi-transaksi tersebut juga dianalisa kembali oleh Akuntan Publik yang independen melalui proses audit eksternal. Mekanisme ini tertuang dalam PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pemenuhan peraturan dan ketentuan mengenai transaksi dengan pihak-pihak berelasi dipastikan telah memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Uraian lengkap akan hal ini juga telah disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan LPEI untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2023.

The role of the Board of Commissioners and Audit Committee in Supervising the implementation of Affiliate Transaction Procedures

The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, carries out a supervisory function over the implementation of material transactions of a certain nominal value carried out by Indonesia Eximbank with related parties. This measure was taken as a risk mitigation effort to prevent the possibility of transactions containing conflicts of interest that could potentially harm Indonesia Eximbank in the future.

Indonesia Eximbank Policy on Review Mechanisms for Transactions and fulfillment of Related Regulations and Provisions

The review mechanism implemented by Indonesia Eximbank in analyzing and reviewing transactions with related parties is carried out internally by involving supervisory organs such as the Audit Committee and the Board of Commissioners. Furthermore, these transactions are also analyzed again by an independent Public Accountant through an external audit process. This mechanism is contained in PSAK 7 (revised 2014) concerning "Related Party Disclosures".

Fulfillment of rules and regulations regarding transactions with related parties is ensured to comply with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, namely PSAK 7 (revised 2014) concerning "Related Party Disclosures".

A complete description of this matter has also been presented in the Indonesia Eximbank Annual Financial Statement for the financial year ended 31 December 2023, which is an integral part of the 2023 Annual Report and Sustainability Report.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan

Changes in Legal Regulations that have a Significant Influence on the Institution

LPEI senantiasa melakukan kajian terhadap peraturan baru maupun amendemen dari peraturan yang telah ada sebelumnya untuk mengindentifikasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari perubahan peraturan tersebut dan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Adapun perubahan peraturan dan atau peraturan baru yang berpengaruh/berkaitan langsung dengan LPEI pada tahun 2023 di antaranya sebagai berikut:

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2023 tentang Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2023 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Lembaga Pembiayaan Ekspsor Indonesia.

Indonesia Eximbank continuously reviews new regulations and amendments to existing regulations to identify the possible impacts of changes to these regulations and compliance with these regulations. The changes to regulations and/or new regulations that affect/are directly related to Indonesia Eximbank in 2023 include the following:

1. Financial Services Authority (OJK) Circular Number 4/SEOJK.05/2023 on Monthly Reports of Indonesian Export Financing Institutions;
2. Financial Services Authority Regulation (PJOK) Number 8 of 2023 on Implementation of Anti-Money Laundering Programs, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector;
3. Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 on the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities;
4. Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 on Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector;
5. Financial Services Authority Regulation Number 3 of 2023 on Increasing Literacy and Financial Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the public;
6. Financial Services Authority Circular Number 5/SEOJK.05/2023 on Minimum Capital Requirements for Indonesian Export Financing Institutions.

Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies Application

Perubahan Kebijakan Akuntansi
LPEI telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

1) Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang material;
2) Amandemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
3) Amandemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi dan penjelasannya;
4) Amandemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang pajak tangguhan dari aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal; dan
5) Amandemen PSAK 107: "Akuntansi Ijarah" tentang kebijakan penerapan untuk ijarah multijasa atas akad sewa.

Dampak Terhadap Laporan Keuangan
Penerapan standar akuntansi baru ini tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Changes in Accounting Policies
Indonesia Eximbank has implemented accounting standards that are effective for financial statements starting on or after 1 January 2023, which are considered relevant to the consolidated financial statements:

1) Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" regarding Disclosure of Accounting Policies which changes the term "significant" to "material" and provides an explanation of material accounting policies;
2) Amendment to PSAK 16: "Fixed Assets" regarding results before intended use;
3) Amendment to PSAK 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" regarding the definition of accounting estimates and explanations;
4) Amendment to PSAK 46: "Income Taxes" regarding deferred taxes on assets and liabilities arising from single transactions; and
5) Amendment to PSAK 107: "Ijarah Accounting" regarding implementation policies for multi-service ijarah on rental contracts.

Impact on Financial Statements
Implementation of new accounting standards has no significant impact to the consolidated financial statements.

Kontribusi Kepada Negara
Contribution to the State

Pada tahun 2023, LPEI tidak melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Pemerintah. Hal ini dikarenakan LPEI membukukan rugi di tahun 2022.

In 2023, Indonesia Eximbank did not make Non-Tax State Revenue (PNBP) payments to the Government. This is due to a loss posted in 2023 by Indonesia Eximbank.

Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

LPEI berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan Lembaga agar keberlangsungan usaha *(going concern)* pada jangka panjang tetap terjaga dan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Manajemen LPEI memiliki keyakinan penuh atas sumber daya dan kemampuan internal yang dimiliki sebagai modal untuk menjalankan kegiatan usaha dengan lebih baik di waktu-waktu mendatang. Berbagai tantangan ke depan tetap ada namun Manajemen menilai tidak ada ketidakpastian material yang berpotensi menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan LPEI untuk mempertahankan keberlangsungan bisnisnya.

Indonesia Eximbank is committed to continuing to improve and enhance the Institution's financial performance so that long-term business continuity (going concern) is maintained and can grow sustainably. Indonesia Eximbank management's belief in its internal resources and capabilities to carry out business activities better in the future. Various challenges ahead remain, but Management assesses that there is no material uncertainties that may cast significant doubt on Indonesia Eximbank's ability to continue as a going concern.

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Lembaga

Sebagai SMV dari Kementerian Keuangan RI, LPEI hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 2/2009. Selain itu, LPEI juga tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Kepailitan. Hingga akhir 2023, LPEI juga tidak sedang menghadapi hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha dengan mempertimbangkan kondisi kinerja operasional dan keuangan LPEI pada tahun 2023.

Matters that have the potential to significantly affect the business continuity of the Institution

As an SMV of the Indonesian Ministry of Finance, Indonesia Eximbank may only be dissolved by law as regulated in Article 39 of Act No. 2/2009. In addition, Indonesia Eximbank also cannot be declared bankrupt under the provisions of the Bankruptcy Law. Until the end of 2023, Indonesia Eximbank was also not faced with matters that have a significant impact on its business continuity, taking into account the state of Indonesia Eximbank's operational and financial performance in 2023.

Asesmen Manajemen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Lembaga

Manajemen telah melakukan kajian terhadap *outlook* ekonomi ke depan baik untuk jangka pendek maupun menengah serta menilai pengaruhnya terhadap kondisi operasional dan keuangan LPEI di masa mendatang. Hal ini juga menjadi salah satu pembahasan dalam rencana kerja tahunan Lembaga. Meski demikian, Manajemen tidak bisa mengetahui akan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Lembaga untuk melanjutkan usahanya.

Management's Assessment of Matters with the Potential to Materially Affect the Institution's Business Continuity

Management has conducted a study of the short- and medium-term economic outlook and its impact on Indonesia Eximbank's future operating and financial conditions. This is also one of the discussions in the Institute's annual work plan. However, management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Asesmen

Dalam melakukan penilaian terhadap keberlanjutan bisnis pada jangka panjang, LPEI mencermati sejumlah inidikator makroekonomi nasional yang tercantum di dalam APBN 2023 dan juga mempertimbangkan rilis resmi mengenai perkembangan makroekonomi global yang diterbitkan oleh sejumlah lembaga internasional, seperti IMF, World Bank, dan OECD.

LPEI menaruh perhatian terhadap pembahasan aspek perekonomian dunia, seperti pertumbuhan PDB negara-negara di dunia terutama yang merupakan tujuan ekspor Indonesia di samping juga mencermati perkembangan harga komoditas utama dan faktor-faktor yang memengaruhi perdagangan dunia.

Secara internal, LPEI telah melakukan analisa pendekatan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT) untuk menganalisis kinerja operasional dan kinerja keuangan Lembaga serta memastikan terlaksananya tata kelola yang baik di internal Lembaga.

Assumptions Made by Management in Performing the Assessments

In assessing long-term business sustainability, Indonesia Eximbank pay close attention to a number of national macroeconomic indicators listed in the 2023 State Budget (APBN) and also considers official releases regarding global macroeconomic developments published by a number of international institutions, such as the IMF, World Bank and OECD.

Indonesia Eximbank takes notice to discussions of aspects of the world economy, such as GDP growth of countries in the world, especially those that are Indonesia's export destinations, as well as paying close attention to developments in main commodity prices and factors that influence world trade.

Internally, Indonesia Eximbank analyzes the operational and financial performance of the institution as well as the implementation of the institution's internal governance using the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Challenges (SWOT) approach.

Teknologi Informasi
Information Technology

Keberhasilan LPEI dalam menjalankan kegiatan usaha yang efisien dan optimal tidak dapat dipisahkan dari peran strategis Teknologi Informasi (TI) dalam mewujudkan layanan yang unggul kepada para nasabah. LPEI melihat bahwa keberadaan infrastruktur TI yang *robust* dan aman merupakan salah satu kunci keberhasilan yang berpengaruh dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran LPEI.

Komitmen LPEI terhadap pengembangan TI yang berkelanjutan dibuktikan melalui investasi secara signifikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang mencakup *hardware* dan *software* serta memastikan kecukupan *IT talent* berkompetensi tinggi yang diharapkan dapat membantu LPEI lebih cepat beradaptasi dalam mengembangkan fitur-fitur produk layanan berbasis TI terbaru.

Karena itu, dalam meraih tujuan pertumbuhan dan keberlanjutan, upaya transformasi digital telah menjadi salah satu prioritas utama LPEI melalui Divisi TSI. Berbagai upaya pengembangan sistem dan modernisasi infrastruktur akan terus ditingkatkan seiring dengan tingginya kebutuhan nasabah di era digital.

Fokus dan Inisiatif Strategis Divisi TSI Tahun 2023

Divisi Teknologi Informasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sepanjang tahun ini sesuai dengan rencana bisnis yang ditetapkan di awal tahun. Pada tahun 2023, Divisi Teknologi Informasi berfokus pad kegiatan pembaharuan, pengembangan, pemeliharaan *hardware* serta *software* digunakan untuk mendukung kegiatan operasional LPEI agar berjalan dengan baik sehingga tidak menghambat proses bisnis serta pencapaian kinerja Lembaga. Sampai dengan Semester II Tahun 2023 realisasi anggaran yang dipersiapkan untuk *hardware* dan *software* sebesar ±74%.

Adapun realisasi pada tahun 2023 telah disesuaikan dengan rencana bisnis Lembaga antara lain berfokus pada penguatan kemampuan dan infrastruktur TI, seperti:

Indonesia Eximbank's success in implementing efficient and optimal business activities cannot be separated from the strategic role of Information Technology (IT) in providing superior service to customers. Indonesia Eximbank perceives that the existence of a robust and secure IT infrastructure is one of the keys to success which is influential in supporting the achievement of Indonesia Eximbank's goals and objectives.

Indonesia Eximbank's commitment to sustainable IT development is proven through significant investment in the field of information and communication technology, which includes hardware and software as well as ensuring sufficient IT talent with high competence which is expected to help Indonesia Eximbank adapt more quickly in developing the latest IT-based service product features.

Therefore, in achieving growth and sustainability goals, digital transformation efforts have become one of Indonesia Eximbank's main priorities through the Information Technology Division. Various efforts to develop systems and modernize infrastructure will continue to be improved in line with the increasing needs of customers in the digital era.

Information Technology Division Strategic Focus and Initiatives in 2023

The Information Technology Division has implemented its duties and responsibilities well throughout this year in accordance with the business plan established at the beginning of the year. In 2023, the Information Technology Division focused on updating, developing, maintaining hardware and software used to support Indonesia Eximbank's operations to ran well so that they do not hinder business processes and the achievement of the Institution's performance. As of Semester II 2023, the actual budget allocated for hardware and software is ±74%.

The realization in 2023 has been adjusted to the Institution's business plan, which included focusing on strengthening IT capabilities and infrastructure, such as:

1. Mengembangkan IT Platform yang terintegrasi yang sejalan dengan fokus bisnis
2. Memodernisasi *core system* untuk menunjang proses bisnis
3. Mengembangkan kapasitas *system security* yang dapat mendukung proses bisnis

Selain itu, demi mendukung program *green office* di LPEI, Divisi Teknologi Informasi juga telah menerapkan sejumlah inisiatif strategis lainnya sebagai langkah nyata untuk mendukung pengembangan digitalisasi pada seluruh kegiatan operasional, antara lain sebagai berikut:

a. Pengurangan penggunaan kertas *(paperless policy)* untuk mendukung *environment* kerja yang ramah lingkungan.
b. Penyediaan *infrastructure* dan *tools* pendukung konsep kerja secara *mobile* dan kolaborasi yang mendukung program *Green Office* sehingga dapat secara signifikan mengurangi kebutuhan jumlah ruang kerja, kertas, dan infrastruktur jaringan sebagai efisiensi kebutuhan energi.
c. Inisiatif untuk penggunaan *technology cloud* yaitu *Infrastructure as a Service (IaaS)* dan *Software as a Service (SaaS)* sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan penggunaan energi untuk operasional *datacenter*.
d. Implementasi teknologi *hyperconverged infrastructure* (HCI) pada perangkat keras di *Disaster Recovery Center* (DRC) yang lebih efisien dalam segi kebutuhan energi, panas, dan *space area* dalam mendukung skalabilitas operasional.

Realisasi *IT Strategic Plan* Tahun 2023

Dalam prosesnya terdapat penyelarasan inisiatif pada tahun 2023, atas hal tersebut Divisi Teknologi Informasi telah melakukan prioritas IT *project* untuk tahun 2023, di mana pelaksanaan IT *project* diharuskan selaras dengan IT *Health Check* serta kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Inisiatif/IT *Project* pada IT *Health Check* disesuaikan dengan arahan strategis Lembaga, di mana dibagi atas 8 strategis yakni:

1. *Core Banking*
2. *Customer Touchpoints*
3. *Supporting Application*
4. *Data*
5. *Infrastructure*

1. Develop an integrated IT Platform that is in line with business focus
2. Modernize the core system to support business processes
3. Develop security system capacity that can support business processes.

Furthermore, in order to support the green office program at Indonesia Eximbank, the Information Technology Division has also implemented a number of other strategic initiatives as concrete steps to support the development of digitalization in all operational activities, including the following:

a. Reducing paper use (paperless policy) to support an environmentally friendly work environment.
b. Providing infrastructure and tools to support mobile and collaborative working concepts that support the Green Office program so that it can significantly reduce the need for work space, paper and network infrastructure to increase energy needs.
c. Initiatives for using cloud technology, namely Infrastructure as a Service (IaaS) and Software to reduce the need for energy use for datacenter operations.
d. Implementation of hyperconverged infrastructure (HCI) technology on hardware at the Disaster Recovery Center (DRC) which is more efficient in terms of energy, heat and space area requirements to support operational scalability.

Information Technology Division Strategic Focus and Initiatives in 2023

In implementing the process, there is alignment of initiatives in 2023. Thus, the Information Technology Division has prioritized IT projects for 2023, where the implementation of IT projects is required to be in line with the IT Health Check as well as budget needs and availability.

Initiatives/IT Projects in IT Health Check are adjusted to the Institute's strategic direction, which is divided into 8 strategies, namely:

1. Core Banking
2. Customer Touchpoints
3. Supporting Applications
4. Data
5. nfrastructure

6. *Security* (Keamanan)
7. Organisasi TI
8. Tata Kelola TI

Dari ke depan strategi tersebut telah ditentukan *roadmap-roadmap* guna mendukung pencapaian Rencana Jangka Panjang (RJP) LPEI ke depan.

Tata Kelola Teknologi Informasi Tahun 2023

Tata kelola teknologi informasi berfokus pada *People*, *Process*, dan *Technology* yang mana mengacu pada kerangka Tata Kelola TI berstandar internasional. Implementasi tata kelola TI seyogyanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan yang mencakup proses kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses untuk memastikan keberlanjutan organisasi TI. Dengan mengacu pada Tata Kelola TI LPEI, Manajemen telah menyusun *baseline building block* yang memisahkan proses-proses strategi, perencanaan, pengembangan, operasional, serta pemantauan. Selanjutnya direpresentasikan ke struktur organisasi dalam menjalankan proses-proses yang diadopsi menjadi aktivitas-aktivitas TI.

Rencana Strategis Tahun 2024

Melanjutkan tahapan "*fixing fundamental*", pada tahun 2024 tema strategis LPEI adalah *Rebalancing toward "Enabling Export Empowering Nation"* yang diterjemahkan ke dalam 9 prioritas utama Lembaga berikut:

6. Security (Security)
7. IT Organization
8. IT Governance

These strategies have determined roadmaps to support the achievement of Indonesia Eximbank's Long Term Plan (RJP) in the future.

Information Technology Governance in 2023

Information technology governance focuses on People, Process and Technology which refers to the international standard IT Governance framework. The implementation of IT governance should be an integral part of corporate governance which includes leadership processes, organizational structure and processes to ensure the sustainability of the IT organization. By referring to Indonesia Eximbank's IT Governance, Management has prepared a baseline building block that separates strategy, planning, development, operational and monitoring processes. This is then represented in the organizational structure in carrying out the processes adopted into IT activities.

Strategic Plans for 2024

Continuing the "fixing fundamentals" stage, in 2024 Indonesia Eximbank's strategy theme is Rebalancing towards "Enabling Exports Empowering Nation" which is translated into the following 9 main priorities of the Institution:

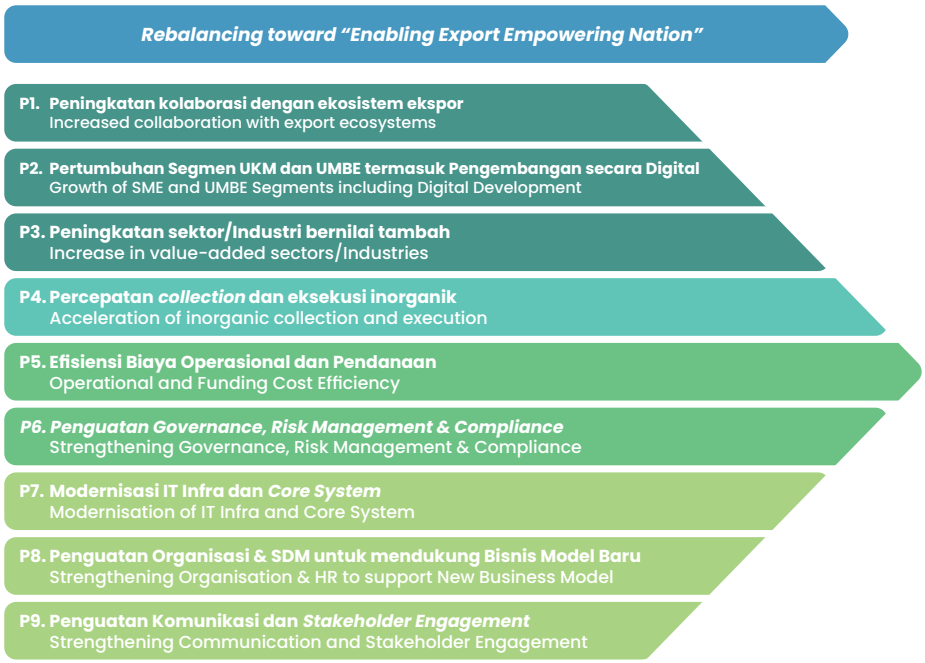

Sembilan prioritas utama Lembaga tahun 2024 di atas, diimplementasikan ke dalam inisiatif strategi Lembaga saat ini dan model bisnis ke depan sebagai berikut:

1. **Pengembangan model bisnis baru melalui kolaborasi dengan ekosistem Ekspor**
   Selain melakukan penguatan bisnis saat ini, LPEI juga memulai pengembangan model bisnis ke depan melalui kolaborasi dengan ekosistem ekspor. Strategi ini berfokus pada pengembangan *relationship* secara efektif dengan berbagai *economic actor ecosystem export* dengan menggunakan instrumen keuangan maupun non keuangan melalui berbagai jenis jaringan penyaluran.

   Penerapan bisnis model berbasis ekosistem ini diharapkan menjadi model bisnis baru LPEI ke depan yang dapat memperkuat bisnis model saat ini dalam menjalankan mandat baik itu dalam segmen korporasi, UKM, dan UMBE serta mendorong peningkatan industri bernilai tambah.

2. **Penguatan Teknologi dan Infrastruktur**
   Dalam memperkuat kapabilitas IT, dimulai dari pondasi yaitu *core system*. Modernisasi *core system* ini akan diikuti dengan integrasi *surrounding system*, pengembangan digital *channel*, dan persiapan teknologi untuk mendukung bisnis model berbasis ekosistem.

3. **Penguatan Organisasi untuk mendukung bisnis model baru**
   Pada tahun 2024, LPEI memiliki 5 fokus *human capital management*, untuk mendukung penguatan organisasi yang sesuai dengan bisnis model baru sebagai berikut:
   a. *Organization Design*
      Struktur organisasi berbasis sektoral yang *lean, agile* dan kolaboratif dengan ekosistem ekspor
   b. *People and capabilities*
      Pengembangan kapasitas dan kapabilitas dengan fokus sesuai bisnis model baru
   c. *Productivity*
      Peningkatan produktivitas *per relationship manager*
   d. *Performance management & reward system*
      Penerapan *performance driven* dalam *reward*
   e. *Culture*
      Alignment budaya APIK dengan bisnis model baru

The nine main priorities of the Institute for 2024 above are implemented into the Institute's current strategic initiatives and future business models as follows:

1. Development of new business models through collaboration with the Export ecosystem
   In addition to strengthening the current business, Indonesia Eximbank is also starting to develop future business models through collaboration with the export ecosystem. This strategy focuses on developing effective relationships with various economic actors in the ecosystem export using financial and non-financial instruments through various types of distribution networks.

   The implementation of this ecosystem-based business model is expected to become Indonesia Eximbank's new business model in the future which can strengthen the current business model in carrying out its mandate in the corporate, SME and UMBE segments as well as encouraging the increase in value-added industries.

2. Strengthening Technology and Infrastructure
   In strengthening IT capabilities, Indonesia Eximbank starts the process from the foundation, namely the core system. This core system modernization will be followed by integration of surrounding systems and digital development channels, and technology preparation to support ecosystem-based business models.

3. Strengthening the Organization to support new business models
   In 2024, Indonesia Eximbank will have 5 human capital management focuses, to support strengthening the organization in accordance with the new business model as follows:
   a. Organization Design
      Lean, agile and collaborative sector-based organizational structure with an export ecosystem
   b. People and capabilities
      Capacity and capability development with a focus on new business models
   c. Productivity
      Increased productivity per relationship manager
   d. Performance management & reward system
      Implementation of performance driven rewards
   e. Culture
      Alignment of APIK culture with new business models

Melalui strategi di atas, diharapkan organisasi LPEI akan semakin kuat dan siap untuk mendukung bisnis model baru yang berbasis ekosistem ekspor.

Through the above strategy, it is hoped that the Indonesia Eximbank organization will become stronger and ready to supporting new business models based on the export ecosystem.

4. **Perbaikan Kualitas Aset**
   Strategi perbaikan kualitas aset secara umum dilakukan melalui 2 cara, yakni perbaikan kualitas aset secara organik dan inorganik.

   Usaha penurunan NPL *gross* secara organik difokuskan pada percepatan *collection*, restrukturisasi, hapus buku, lelang, dan upaya lainnya. Sedangkan untuk menurunkan NPL *net* dilakukan selain usaha-usaha tersebut diatas akan dilakukan juga dengan menambah CKPN NPL dan meningkatkan *outstanding* pembiayaan *good bank*.

   Sementara itu selain perbaikan kualitas aset secara organik, LPEI juga tetap mengusahakan perbaikan secara inorganik.

4. **Improvement of Asset Quality**
   The strategy for improving asset quality is generally carried out in 2 ways, namely improving asset quality organically and inorganically.

   Efforts to organically reduce gross NPL are focused on accelerating collections, restructuring, write-offs, auctions and other efforts. Besides the efforts mentioned above, reducing net NPL will also be conducted by increasing CKPN NPL and increasing outstanding good bank financing.

   In addition to organically improving asset quality, Indonesia Eximbank also continues to strive for inorganic improvements.

5. **Optimalisasi Pendanaan dan Likuiditas**
   Tahun 2024, akan terus dilakukan optimalisasi pendanaan dan likuiditas yang akan dipantau secara rutin melalui ALCO. Adapun di tahun 2024, diharapkan sesuai rencana akan menerima PMN sebesar Rp10 triliun dan Pinjaman Pemerintah (*Government Loan*) jangka pendek sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan untuk menggantikan pendanaan yang jatuh tempo.

5. **Optimization of Funding and Liquidity**
   In 2024, funding and liquidity optimization will continue to be carried out which will be monitored regularly through ALCO. As for 2024, it is hoped that according to the plan, we will receive PMN of Rp10 trillion and short-term Government Loans of Rp10 trillion which will be used to replace maturing funding.

6. **Manajemen Risiko dan GRC**
   LPEI terus memperkuat proses manajemen risiko Lembaga dan juga melakukan terus melakukan inovasi terkait manajemen risiko, yang tertuang dalam strategi inisiatif manajemen risiko sebagai berikut:
   a. Penguatan manajemen risiko
      Strategi LPEI dalam penguatan manajemen risiko, meliputi aspek sumber daya manusia, proses, dan *policy*
   b. Respon terhadap risiko baru
      Selain penguatan manajemen risiko atas aktivitas saat ini, perubahan model bisnis yang sedang dilakukan memerlukan juga manajemen risiko yang baik agar dapat berjalan baik prosesnya
   c. *Digitalisasi risk management*
      Dengan semakin granularnya identifikasi risiko, maka diperlukan teknologi dalam proses *risk management* dan monitoringnya, sehingga proses akan lebih efektif.

6. **Risk Management and GRC**
   Indonesia Eximbank continues to strengthen the Institution's risk management process and also continues to innovate related to risk management, which is stated in the risk management initiative strategy as follows:
   a. Strengthening risk management
      Indonesia Eximbank's strategy for strengthening risk management includes aspects of human resources, processes and policies
   b. Response to new risks
      Apart from strengthening risk management for current activities, changes to the business model that are being carried out also require good risk management so that the process can run well
   c. Digitalization of risk management
      As risk identification becomes increasingly granular, technology is needed in the risk management and monitoring process, so that the process will be more effective.

d. *Enabled risk maturity*
Sebagai tahapan untuk meningkatkan manajemen risiko ke level yang lebih lanjut, maka akan dilakukan aktivitas sebagai berikut:
- *Integrated Management action trigger*
  Mekanisme dan proses penanganan/ mitigasi atas suatu kejadian yang berpotensi menimbulkan dampak material terhadap LPEI. *Trigger* dilakukannya suatu *Management Action* akan didasarkan pada *threshold* spesifik yang terintegrasi terhadap aspek-aspek GRC
- *Risk adjusted performance management*
  Manajemen kinerja dengan mempertimbangkan faktor risiko sebagai aspek adjustment terhadap pencapaian bisnis yang telah diperoleh dalam penerapan hal tersebut dilakukan melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:
  a. *Strategic alignment*
     Penyelerasan strategi tata Kelola dengan strategi Lembaga, *Risk Management* dan arahan regulator
  b. *Governance & organization*
     Mempersiapkan organisasi dan standar tata kelola
  c. *Risk & control management*
     Melakukan proses dengan mempertimbangkan risiko, *management of risk & control* dan juga *monitoring* secara periodik
  d. *Tools & technology*
     Memanfaatkan *tools* dan teknologi dalam proses bisnis
  e. *Three lines model*
     Menjadikan *three lines* model sebagai pedoman tata kelola
  f. *GRC culture*
     Membudayakan perilaku yang didasarkan pada GRC

7. Komunikasi kepada *stakeholder*
Strategi komunikasi LPEI pada tahun 2024 adalah akan melakukan peningkatan komunikasi yang efektif dengan berbagai *stakeholder*, dengan cara sebagai berikut:
a. Kegiatan Internal
   Strategi komunikasi melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh LPEI, di antaranya sebagai berikut:
   - Linkedin *campaign*: Bangga jadi Eximbanker (APIK)

d. Enabled risk maturity
As a stage to improve risk management to a further level, the following activities will be carried out:
- Integrated Management action triggers
  Mechanisms and processes for handling/ mitigating an incident that has the potential to have a material impact on Indonesia Eximbank. The trigger for carrying out a Management Action will be based on a specific threshold that is integrated into GRC aspects.
- Risk adjusted performance management
  Performance management by considering risk factors as an adjustment aspect to the business achievements that have been obtained in implementing this is carried out through the following principles:
  a. Strategic alignment
     Alignment of Governance strategy with Institution strategy, Risk Management and regulator direction
  b. Governance & organization
     Prepare organizational and governance standards
  c. Risk & control management
     Implementing the process by considering risk, management of risk & control, as well as monitoring periodically
  d. Tools & technology
     Utilizing tools and technology in business processes
  e. Three lines model
     Implementing the three lines model as a governance guideline
  f. GRC (Governance, Risk, dan Compliance culture)
     Cultivate behavior based on GRC

7. Communication to stakeholders
Indonesia Eximbank's communication strategy in 2024 is to increase effective communication with various stakeholders, in the following way:

a. Internal Activities
   Communication strategies through activities organized by Indonesia Eximbank, including the following:
   - Linkedin campaign: Proud to be an Eximbanker (APIK)

- Pemutakhiran data eksportir untuk kegiatan *business gathering*, distribusi informasi, profil di media

b. Pemerintah/Lembaga/Asosiasi
Strategi komunikasi melalui kolaborasi dengan Pemerintah/Lembaga/Asosiasi, di antaranya dengan kegiatan sebagai berikut:
- Berperan sebagai narasumber di acara terkait (*thought leadership*)
- Kegiatan Desa Devisa
- Kegiatan TEI, Pameran, BIK, BPS-BI, Seminar
- Kajian dengan universitas lokal/*Whitepaper*
- Penulisan artikel opini dari pakar/ akademisi
- Promosi kegiatan IEB *Goes to Campus*
- *Internship opportunity*

c. Media
Strategi komunikasi melalui pengembangan jaringan dengan media, di antaranya dengan kegiatan sebagai berikut:
- *Press conference*
- Media trip
- Media *interview*
- *Newsroom visit*
- Siaran pers/*human interest story*
- *Story pitch* (*Profiling*)
- Pelatihan jurnalis 'literasi ekspor'
- Mengadakan acara media secara berkala
- *1-on-1* meeting dengan redaktur

d. Publik
Strategi komunikasi melalui kegiatan yang terbuka untuk publik di antaranya sebagai berikut:
- Literasi ekspor
- Kolaborasi bersama *influencers* pelaku UMKM - Youtube & *Podcast series*
- Kolaborasi bersama komunitas
- Pameran/*expo*
- *Business matching*
- *Coaching clinic*
- Kompetisi dan acara penghargaan (*award*) bekerja sama dengan pihak ketiga
- Pemutakhiran data eksportir

- Updating exporter data for business gathering activities, information distribution, profiles in the media

b. Government/Institution/Association
Communication strategy through collaboration with Government/Institutions/Assocations, including the following activities:
- Act as a key speaker at related events (thought leadership)
- Go Export Village Activities
- TEI activities, exhibitions, BIK, BPS-BI, seminars
- Study with local universities/Whitepaper
- Writing opinion articles from experts/ academics
- Promotion of IEB Goes to Campus activities
- Internship opportunities

c. Media
Communication strategy through network development with the media, including the following activities:
- Press conferences
- Media trips
- Media interviews
- Newsroom visits
- Press releases/human interest stories
- Story pitch (Profiling)
- Journalist training on 'export literacy'
- Hold regular media events
- 1-on-1 meeting with the editor

d. Public
Communication strategies through activities open to the public include the following:
- Export literacy
- Collaboration with MSME influencers - Youtube & Podcast series
- Collaboration with the community
- Exhibition/expo
- Business matching
- Coaching clinics
- Competitions and award events in collaboration with third parties
- Updating exporter data

e. Nasabah
   Strategi komunikasi yang melibatkan nasabah untuk memperkuat hubungan dan menarik aspirasi akan kebutuhan nasabah dengan kegiatan sebagai berikut:
   - *Business Gathering*
   - *Sharing business/Workshop*
   - Informasi regular ekspor *update*

Selain itu pada tahun 2024, LPEI akan meneruskan *branding campaign* dari tahun sebelumnya "lokal yang mendunia" yang berfokus pada profil mitra yang bertransformasi dari pelaku usaha lokal menjadi eksportir menjadi "berani mendunia" yang berfokus pada meningkatkan profil pelaku usaha dan mitra dengan mengangkat keberhasilan ekspor yang difasilitasi LPEI "*beyond financing*".

e. Customer
   Communication strategies that involve customers to strengthen relationships and attract aspirations regarding customer needs with the following activities:
   - Business Gatherings
   - Sharing business/workshops
   - Regular export information updates

Furthermore, in 2024, Indonesia Eximbank will continue conducting last year's branding campaign "globally local" which focused on the profile of partners who transformed from local business actors to exporters to "dare to go global" which focuses on raising the profile of business actors and partners by elevating export success facilitated by Indonesia Eximbank "beyond financing".

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) telah berhasil mengimplementasikan pedoman, kerangka kerja, dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*/"GCG") dengan efektif dan efisien dalam operasionalnya. LPEI memiliki komitmen tinggi untuk mengimplementasikan prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Implementasi GCG di LPEI berdampak positif terhadap akuntabilitas perusahaan, transaksi yang adil dan independen, serta keandalan dan peningkatan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik.

Indonesia Eximbank (LPEI) has effectively and efficiently implemented Good Corporate Governance (GCG) guidelines, frameworks, and principles throughout its operations. Indonesia Eximbank is committed to consistently and sustainably implementing GCG principles. GCG implementation at Indonesia Eximbank has positively impacted corporate accountability, fair and independent transactions, as well as reliability and enhancement of the quality of information provided to the public.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai Lembaga Keuangan Khusus milik Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki mandat memajukan ekspor nasional, LPEI senantiasa menjunjung tinggi implementasi prinsip-prinsip GCG serta berupaya untuk terus memelihara integritas dan komitmen tinggi dalam penerapan GCG demi mencapai tujuan sebagai sebuah entitas yang adaptif dan berkembang secara berkesinambungan.

Secara konsisten LPEI mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan Lembaga dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*), mendukung tercapainya Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada Lembaga Jasa Keuangan.

COMMITMENT TO CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

As a Special Financial Institution owned by the Government of the Republic of Indonesia mandated to advance national exports, Indonesia Eximbank consistently upholds the implementation of GCG principles and strives to maintain integrity and high commitment in GCG implementation to achieve its goal as an adaptive and sustainably developing entity.

Consistently, Indonesia Eximbank prioritizes ethics and integrity in managing the institution with the aim of promoting performance improvement, ensuring the fulfilment of stakeholders' rights, supporting the achievement of the Company's vision, mission, and values, as well as enhancing compliance with applicable laws and regulations in the financial services institution.

Dalam penerapan GCG, LPEI tidak hanya sekadar memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan saja, tetapi bersungguh-sungguh menerapkannya dalam segala kegiatan operasional yang dijalankan dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN GCG

Implementasi GCG di LPEI dilaksanakan berlandaskan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 ("UU No. 2/2009") tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pasal 17 yang menyatakan bahwa:
   (1) Dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.
   (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran.

2. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 208/PMK.06/2021 ("PMK No. 208/2021") tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI, pasal 3 yang menyatakan bahwa:

In the implementation of GCG, Indonesia Eximbank not only complies with laws and regulations but also earnestly applies them in all operational activities, always considering GCG principles.

GCG LEGAL REFERENCES

GCG implementation in Indonesia Eximbank is carried out based on the prevailing laws and regulations, among others:

1. Act No. 2 of 2009 on the Indonesian Export Financing Agency (LPEI), Article 17 states that:

   (1) In carrying out its duties, Indonesia Eximbank shall apply the principles of good corporate governance, the principles of risk management implementation, and the principle of knowing the customer.
   (2) The implementation of good corporate governance principles as referred to in paragraph (1) includes the principles of openness, accountability, responsibility, independence, and fairness.

2. The Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 ("PMK No. 208/2021") on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank in Article 3 which emphasizes that:

(1) LPEI wajib menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara efektif.
(2) Pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam:
   a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana;
   b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite serta satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
   c. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
   d. penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian internal;
   e. pengadaan barang dan jasa;
   f. penyusunan rencanajangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
   g. transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan; dan
   h. pelaporan internal dan benturan kepentingan.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 9/POJK.05/2022 ("POJK No. 9/2022) tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesi a, pasal 9 yang menyatakan bahwa:
   (1) LPEI wajib melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
   (2) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      a. keterbukaan;
      b. akuntabilitas;
      c. tanggung jawab;
      d. kemandirian; dan
      e. kewajaran.
   (3) Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam:
      a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan Dewan Pengawas Syariah;
      b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
      c. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;

(1) Indonesia Eximbank must apply the principles of good governance in every business activity at all levels or organizational effectively.

(2) The implementation of risk management principles as referred to in paragraph (1) shall include:
   a. implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Executive Director, Managing Director;
   b. the completeness and implementation of the duties of the Sharia Supervisory Board and committees and work units that carry out the internal control function;
   c. implementation of compliance, internal audit, and external audit functions;
   d. implementation of Risk Management including internal control system;
   e. procurement of goods and services;
   f. preparation of long-term plans and annual work plans and budgets;
   g. transparency of financial and non-financial conditions; and
   h. internal reporting and conflict of interest.

3. Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 9/POJK.05/2022 ("POJK No. 9/2022) on the Supervision of Indonesia Eximbank, Article 9 which states that:
   (1) Indonesia Eximbank must implement the principles of Good Corporate Governance in every business activity at all levels or levels of the organization.
   (2) The principles of Good Corporate Governance as referred to in paragraph (1) include:
      a. openness;
      b. accountability
      c. responsibility
      d. independence; and
      e. fairness.
   (3) The implementation of the principles of Good Corporate Governance as referred to in paragraph (1) must at least be realized in:
      a. implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Executive Director, Managing Director, and Sharia Supervisory Board;
      b. the completeness and implementation of the duties of committees and work units that carry out the internal control function;
      c. implementation of compliance, internal audit, and external audit functions;

d. penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
e. rencana bisnis LPEI;
f. transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan; dan
g. pelaporan internal dan benturan kepentingan.

d. implementation of Risk Management, including internal control system;
e. business plan of Indonesia Eximbank;
f. transparency of financial and non-financial conditions; and
g. internal reporting and conflict of interest

PRINSIP-PRINSIP GCG

LPEI berkomitmen untuk menerapkan standar tinggi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mencegah konflik kepentingan, meningkatkan kinerja secara optimal, dan meningkatkan akuntabilitas. Seluruh insan LPEI senantiasa berupaya meningkatkan mutu implementasi prinsip-prinsip GCG dalam semua aspek kegiatan bisnis dan operasional. Sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan tercatat di pasar modal, LPEI menyadari bahwa penerapan dan pengembangan GCG memberikan manfaat signifikan, sejalan dengan perkembangan praktik terbaik dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan di industri jasa keuangan.

Penerapan GCG di LPEI senantiasa didasarkan pada integritas yang kuat, sehingga prinsip-prinsip Tata Kelola dapat diimplementasikan di setiap level organisasi, dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan operasional LPEI sehingga keberlangsungan dan konsistensi lembaga dapat terjaga. Mengacu pada ketentuan dalam PMK No. 208/2021, penerapan tata kelola di LPEI didasarkan pada prinsip-prinsip dasar GCG, yang meliputi aspek Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran, sebagaimana diuraikan pada bagan berikut ini:

GCG PRINCIPLES

Indonesia Eximbank is committed to upholding high standards when applying GCG principles. These principles serve as guidelines for making responsible decisions, avoiding conflicts of interest, maximizing performance, and increasing accountability. All individuals at Indonesia Eximbank work tirelessly to improve the quality of GCG principle implementation in all aspects of business and operational activities. As a Special Mission Vehicle (SMV) owned by the Government of the Republic of Indonesia and listed on the capital market, Indonesia Eximbank recognizes that the application and development of GCG bring significant benefits, in line with best practices in Corporate Governance implementation in the financial services industry.

The implementation of GCG in Indonesia Eximbank is always based on strong integrity, so that governance principles can be implemented at every level of the organization and applied in all activities and operations of Indonesia Eximbank to ensure the institution's sustainability and consistency. According to the provisions in PMK No. 208/2021, the implementation of governance in Indonesia Eximbank is based on the basic principles of GCG, which include aspects of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, as shown in the diagram below:

Prinsip GCG GCG Principles	**Penjelasan Berdasarkan PMK No. 208/2021** Explanation Based on PMK No. 208/2021	**Penerapan di LPEI** Implementation at Indonesia Eximbank
Keterbukaan	Suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum.	1. LPEI menyediakan informasi terkini yang relevan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas melalui situs web yang mudah diakses, yaitu: https://www.indonesiaeximbank.go.id/. Publikasi seluruh informasi tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait transparansi informasi dan peraturan perusahaan; 2. LPEI menerbitkan laporan yang dipublikasikan secara berkala dan tepat waktu, antara lain Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Semester, Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit, dan Laporan Tahunan; 3. LPEI mengadakan kegiatan paparan publik dengan media cetak dan elektronik, serta forum investor.

Prinsip GCG GCG Principles	**Penjelasan Berdasarkan PMK No. 208/2021** Explanation Based on PMK No. 208/2021	**Penerapan di LPEI** Implementation at Indonesia Eximbank
Transparency	A state of implementation of Indonesia Eximbank's business activities that ensures transparency in the decision-making process regarding the implementation of Indonesia Eximbank's business activities in accordance with the provisions of laws and regulations and generally accepted practices.	1. Indonesia Eximbank provides up-to-date relevant information for stakeholders and the general public through an easily accessible website, namely: https://www.indonesiaeximbank.go.id/. The publication of all information remains in compliance with applicable laws and regulations regarding information transparency and company regulations. 2. Indonesia Eximbank issues reports published regularly and timely, including Quarterly Financial Reports, Semi-Annual Financial Reports, audited Annual Financial Reports, and Annual Reports. 3. Indonesia Eximbank conducts public presentations through print and electronic media, as well as investor forums.
Akuntabilitas	Suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum.	1. LPEI memiliki sistem pengelolaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja dari masing-masing organ Lembaga; 2. LPEI menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders;* 3. Direktur Eksekutif secara berkala menyampaikan sejumlah laporan kepada Dewan Direktur, seperti pelaporan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan evaluasi kinerja keuangan Lembaga, penyampaian laporan keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan Pedoman Kode Etik bagi semua pegawai LPEI.
Accountability	A state of implementation of Indonesia Eximbank's business activities that can explain the functions of each party related to Indonesia Eximbank in accordance with the provisions of laws and regulations and generally accepted practices.	1. Indonesia Eximbank has a management system that supports the clarity of functions, implementation, and performance accountability of each organ of the Institution. 2. Indonesia Eximbank sets business objectives and strategies to be accountable to stakeholders; 3. The Executive Director periodically submits a number of reports to the Board of Directors, such as reporting the Annual Budget Plan (RKAT) and financial performance evaluations of the Institution, presenting financial reports at the Annual General Meeting of Shareholders, establishing the Internal Audit Unit (SKAI) and appointing external auditors, as well as enforcing the Code of Ethics Guidelines for all Indonesia Eximbank employees.
Pertanggungjawaban	Suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI.	1. Dalam rangka menjaga kelangsungan atau keberlanjutan usaha pada jangka panjang, LPEI memastikan kepatuhan penyelenggaraan operasional dan bisnisnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. LPEI menyalurkan dampak ekonomi yang berkelanjutan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (TJSL) terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
Responsibility	A state of implementation of Indonesia Eximbank's business activities that can affirm and explain the role and status of each party related to Indonesia Eximbank for each policy making and implementation process at Indonesia Eximbank.	1. To ensure the long-term sustainability of its business operations, Indonesia Eximbank ensures compliance with applicable laws and regulations in the conduct of its operations and business. 2. Indonesia Eximbank channels sustainable economic impacts through Corporate Social Responsibility and Environmental Responsibility activities towards the community and the surrounding environment.
Kemandirian	Suatu keadaan di mana LPEI dikelola secara profesional yang bebas dari benturan kepentingan dan/atau pengaruh atau tekanan dari setiap pihak mana pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum,	1. LPEI memastikan bahwa pengelolaan Lembaga dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain; 2. Direktur Eksekutrif dan Dewan Direktur memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil, meski demikian kedua organ tersebut dimungkinkan untuk mendapatkan saran dari komite-komite yang berada di bawah supervisinya dan/atau konsultan eksternal yang independen.
Independence	A state where Indonesia Eximbank is managed professionally that is free from conflicts of interest and/or influence or pressure from any party that is not in accordance with the provisions of laws and regulations and generally accepted practices.	1. Indonesia Eximbank ensures that the management of the Institution is conducted independently so that each organ does not dominate each other and cannot be intervened by other parties. 2. Executive Director and the Board of Directors have independent opinions in every decision made, although both organs are allowed to receive advice from committees under their supervision and/or independent external consultants.

Prinsip GCG GCG Principles	**Penjelasan Berdasarkan PMK No. 208/2021** Explanation Based on PMK No. 208/2021	**Penerapan di LPEI** Implementation at Indonesia Eximbank
Kewajaran	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. LPEI senantiasa melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya; 2. LPEI terus berupaya membangun hubungan industrial yang harmonis dengan seluruh karyawan secara adil dan wajar; 3. LPEI memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat untuk kepentingan LPEI serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
Fairness	Fairness and equality in fulfilling the rights of each party arising under the agreement and in accordance with the provisions of laws and regulations.	1. Indonesia Eximbank always protects the interests of shareholders and other stakeholders. 2. Indonesia Eximbank continues to strive to build harmonious industrial relations with all employees fairly and reasonably. 3. Indonesia Eximbank provides opportunities for all stakeholders to provide input and express opinions for the benefit of Indonesia Eximbank and opens access to information in accordance with the principle of openness.

Dalam upaya memastikan implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik di LPEI, Dewan Direktur telah menyusun *Board Manual* sebagai panduan bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. LPEI menggunakan panduan GCG sebagai acuan dalam mengelola kegiatan bisnisnya untuk memastikan keselarasan dengan kepentingan *stakeholder*. Keselarasan antara *stakeholder* dan LPEI diperlukan untuk menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan Lembaga yang pada gilirannya dapat menghasilkan peningkatan sifat kerja unggul dan profesionalisme di setiap insan LPEI. Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan seluruh karyawan LPEI telah menyetujui penerapan prinsip-prinsip tersebut di dalam Lembaga, dengan tujuan menciptakan pertumbuhan dan ketahanan yang berkelanjutan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

To ensure that good governance principles are followed at Indonesia Eximbank, the Board of Directors developed a Board Manual to guide the Board of Directors, Executive Director, and Managing Directors in carrying out their respective duties and responsibilities. To ensure alignment with stakeholder interests, Indonesia Eximbank manages its business activities in accordance with GCG guidelines. Alignment between stakeholders and Indonesia Eximbank is required to foster mutual trust and a positive environment within the institution, which can lead to improved work ethics and professionalism among all Indonesia Eximbank employees. The Board of Directors, Executive Director, and all Indonesia Eximbank employees have agreed to implement these principles within the institution with the goal of achieving sustainable growth and resilience in its business activities.

PENERAPAN GCG TAHUN 2023

Dengan merujuk pada PMK No. 208/PMK.06/2021, penerapan aspek-aspek berikut ini mencerminkan implementasi prinsip GCG di LPEI, yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana;
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite serta satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian internal;
5. Pengadaan barang dan jasa;
6. Penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan;

GCG IMPLEMENTATION IN 2023

In accordance with PMK No. 208/PMK.06/2021, the implementation of Indonesia Eximbank's GCG principles is manifested in:

1. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Executive Director, Managing Director;
2. Completeness and implementation of the duties of the Sharia Supervisory Board and committees and work units that carry out internal control functions;
3. Implementation of compliance, internal audit, and external audit functions;
4. Implementation of Risk Management including internal control system;
5. Procurement of goods and services;
6. Preparation of long-term plans as well as annual work plans and budgets;

7. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan; dan
8. Pelaporan internal dan benturan kepentingan.

Selama tahun 2023, LPEI telah menjalankan penerapan GCG melalui beberapa kegiatan seperti berikut:

1. Penyusunan dan publikasi *Annual Report* LPEI tahun 2023;
2. Pembentukan dan pengukuhan DCOR *Officer* LPEI;
3. Pelaksanaan penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik LPEI periode tahun 2022 oleh BPKP;

4. Pelaksanaan *self assessment* faktor tata kelola yang baik LPEI tahun 2023 menggunakan parameter SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan LPEI tahun 2023;
5. Pemenuhan pelaporan LHKPN periode tahun 2023 secara tepat waktu dan terpenuhi 100%;
6. Penyusunan piagam komite *Governance, Risk* dan *Compliance* (GRC) LPEI;
7. Sosialisasi berkelanjutan terkait pengendalian gratifikasi, *Whistleblowing System* (WBS), dan APU PPT kepada pegawai LPEI;
8. Pelaksanaan survei WBS dan Gratifikasi kepada seluruh Manajemen dan pegawai LPEI;

9. Sosialisasi dan diseminasi regulasi baru yang berdampak kepada LPEI;
10. Pelaksanaan program pengendalian Gratifikasi LPEI tahun 2023.
11. Penyampaian Laporan Realisasi RKAT Triwulan I, II dan III 2023 kepada Menteri Keuangan;
12. Penyampaian Laporan Pengawasan RKAT Semester I 2023 kepada Menteri Keuangan;
13. Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan I, II dan III 2023 kepada Menteri Keuangan;

14. Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan I, II dan III 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan;

15. Pelaksanaan sebanyak 16 kali rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2023;
16. Penyampaian laporan Dewan Pengawasan Syariah kepada Direktur Eksekutif periode laporan Triwulan I, II, III dan IV tahun 2023;
17. Sosialisasi Penguatan Bisnis LPEI melalui Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada KAP Rekanan LPEI;

7. Transparency of financial and non-financial conditions; and
8. Internal reporting and conflicts of interest.

Throughout 2023, Indonesia Eximbank has implemented GCG through several activities as follows:

1. Preparation and publication of Indonesia Eximbank 2023 Annual Report;
2. Establishment and inauguration of Indonesia Eximbank's DCOR Officer;
3. Implementation of an assessment of the implementation of the principles of good governance of Indonesia Eximbank for the period of 2022 by BPKP;
4. Implementation of self-assessment of LPEI good governance factors in 2023 using SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 parameters as part of the Indonesia Eximbank Health Level Report in 2023;

5. Fulfillment of LHKPN reporting for the 2023 period in a timely manner and 100% fulfilled;
6. Preparation of Indonesia Eximbak Governance, Risk and Compliance (GRC) committee charter;
7. Continuous socialization related to gratification control, Whistleblowing System (WBS), and AML/CFT to Indonesia Eximbank employees;
8. Implementation of WBS and Gratification surveys to all Indonesia Eximbank Management and employees;
9. Socialization and dissemination of new regulations affecting Indonesia Eximbak;
10. Implementation of Indonesia Eximbank Gratification control program in 2023.
11. Submission of the 2023 Quarterly RKAT Realization Report I, II and III to the Minister of Finance;
12. Submission of the 2023 RKAT Semester I Supervision Report to the Minister of Finance;
13. Submission of Financial Reports for the first, second and third quarters of 2023 to the Minister of Finance;
14. Submission of Financial Statements for the first, second and third quarters of 2023 to the Financial Services Authority;
15. Conducting 16 Sharia Supervisory Board meetings during 2023;
16. Submission of the Sharia Supervisory Board report to the Executive Director for the first, second, third and fourth quarter of 2023;
17. Socialization of Strengthening Indonesia Eximbank Business through the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) to KAP Partners of Indonesia Eximbank;

18. Pengkinian peraturan internal dan penguatan *framework* Strategi *Anti Fraud* LPEI;
19. Pembentukan komite GRC LPEI yang diatur dalam peraturan internal Komite *Governance, Risk* & *Compliance* (GRC *Committee*) LPEI;
20. Penyusunan kebijakan/peraturan internal LPEI, antara lain:
    a. Tata Kelola yang Baik LPEI;
    b. Operasional Manajemen Risiko *Enterprise* LPEI;
    c. Pengelola Rekanan Pengadaan Barang/Jasa LPEI;
    d. Penyusunan RKAT, Rencana Bisnis dan RJP LPEI;
    e. Tata Naskah Dinas LPEI;
    f. Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI;
    g. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LPEI;
    h. Komite Perusahaan Anak LPEI;
    i. Layanan Pengaduan Nasabah LPEI;
    j. Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI.

18. Updating internal regulations and strengthening Indonesia Eximbank Anti Fraud Strategy framework;
19. Establishment of Indonesia Eximbank GRC committee as stipulated in the internal regulation of Indonesia Eximbank Governance, Risk & Compliance Committee (GRC Comittee);
20. Preparation of Indonesia Eximbank internal policies/regulations, among others:
    a. Good Governance of Indonesia Eximbank;
    b. Enterprise Risk Management Operations of Indonesia Eximbank;
    c. Management of Indonesia Eximbank Goods/ Services Procurement Vendor;
    d. Preparation of RKAT, Business Plan and RJP of Indonesia Eximbank;
    e. LPEI Office Manuscript;
    f. Assessment of Indonesia Eximbank Health Level;
    g. Implementation of Indonesia Eximbank Compliance Function;
    h. Committee of Subsidiary Company of Indonesia Eximbank;
    i. Indonesia Eximbank Customer Complaint Service;
    j. Indonesia Eximbank Board of Directors Work Procedure Guidelines.

Fokus dan Penerapan GCG di Tahun 2024

Fokus pelaksanaan GCG di LPEI pada tahun 2024 masih akan berorientasi pada peningkatan Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) dan Proses Tata Kelola (*Governance Process*).

Peningkatan Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) pada aspek infrastruktur peraturan internal akan dilakukan melalui upaya penyederhanaan dan penyelarasan semua peraturan internal di LPEI. Selain itu, juga akan dibentuk Peraturan Penyusunan Peraturan (Kebijakan, Standar Pedoman Operasional, dan Petunjuk Teknis) sebagai kerangka peraturan dan panduan untuk pembentukan aturan internal. Di sisi lain, perbaikan pada Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) juga akan melibatkan optimalisasi struktur organisasi agar lebih efisien sesuai dengan kebutuhan Lembaga.

Sementara itu upaya peningkatan Proses Tata Kelola (*Governance Process*) akan dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap organ dan unit kerja di Lembaga, terutama pada unit-unit yang berfokus pada pelaksanaan pengendalian internal seperti Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, dan SKAI. Upaya peningkatan Proses Tata Kelola (*Governance Process*) juga akan

Focus and Implementation of GCG in 2024

The focus of GCG implementation at Indonesia Eximbank in 2024 will continue to be oriented towards enhancing Governance Structure and Governance Process.

Improvements to the Governance Structure regarding internal regulation infrastructure will be achieved through efforts to streamline and align all internal regulations at Indonesia Eximbank. Additionally, a Regulation Development Policy (Policy, Operational Guideline Standards, and Technical Instructions) will be established as a framework for regulations and guidelines for the formation of internal rules. On the other hand, improvements to the Governance Structure will also involve optimizing the organizational structure to be more efficient according to the institution's needs.

Meanwhile, efforts to enhance the Governance Process will involve optimizing the implementation of tasks and functions of each organ and unit within the institution, especially in units focused on internal control implementation such as the Risk Management Unit, Compliance Unit, and Internal Audit Unit. Improvements to data and reporting processes will also be a focus of the Governance Process

difokuskan pada perbaikan data dan pelaporan, yang tentu memerlukan dukungan dari sistem informasi yang memadai.

enhancement, which will require adequate support from information systems.

GCG ROADMAP

GCG ROADMAP

Tahun Year	Kegiatan Activity
2009	• Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melalui UU No. 2/2009. • Penetapan Peraturan Menteri Keuangan RI tentang: Pembinaan dan Pengawasan; Prinsip Tata Kelola; Manajemen Risiko; dan Prinsip Mengenal Nasabah di LPEI. • Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI. • Establishment of the Indonesia Eximbank through Act No. 2/2009. • Stipulation of Regulation of the Minister of Finance concerning: Guidance and Supervision; Governance Principles; Risk management; and Know Your Customer Principles at Indonesia Eximbank. • Issuance of Regulation of the Minister of Finance concerning Procedures for the Proposal, Appointment, and Dismissal of the Indonesia Eximbank Managing Director
2010	• Terbitnya regulasi tentang Kebijakan Akuntansi LPEI. • Ditetapkannya regulasi internal mengenai Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif (PDD). • Issuance of regulations concerning the Indonesia Eximbank Accounting Policies • Stipulation of internal regulations regarding the Work Guidelines for the Board of Directors and Executive Directors (PDD)
2011	• Pengembangan regulasi internal mengenai Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif. • Penetapan tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa LPEI. • Development of internal regulations regarding the Work Guidelines for the Board of Directors and Executive Directors. • Determination of Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement SOP
2012	• Diterbitkannya peraturan internal mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) LPEI. • Evaluasi terhadap implementasi Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan. • Pelaksanaan Pelaporan Keuangan LPEI yang telah sesuai dengan standardisasi. • Issuance of internal regulations regarding the Whistleblowing System • Evaluation of the implementation of the Procedure for Submission of Suspicious Financial Transaction Reports and Cash Financial Transaction Reports for Financial Service Providers • Implementation of standardized Financial Reporting.
2013	• Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI sesuai dengan regulasi, dan ditetapkannya pedoman internal penyusunan LHKPN. • Penyempurnaan Peraturan Internal tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI. • Compilation of State Administrators Wealth Reports (LHKPN) for Indonesia Eximbank Officials in accordance with regulations, and the establishment of internal guidelines for the preparation of LHKPN • Improvement of the Internal Regulations concerning Procedures for the Proposal, Appointment, and Dismissal of the Managing Director
2014	• Penyempurnaan Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan atas Pembagian Tugas dan Wewenang Kewajiban Pelaporan kepada Pihak Eksternal LPEI. • Implementasi Pengendalian Internal Verifikasi Audit Pembiayaan Bermasalah LPEI. • Ditetapkannya Ketentuan Internal Perihal Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Internal LPEI. • Completion of Provisions and Implementation Procedures on the Division of Duties and Authorities of Reporting Obligations to External Parties. • Implementation of Internal Control Verification of Troubled Financing Audit. • Stipulation of Internal Provisions Regarding Assessment of the Effectiveness of the Internal Control System.
2015	• *Review* Kebijakan Regulator (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Perihal Pembinaan dan Pengawasan LPEI. • Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai LPEI. • Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI berdasarkan Surat Himbauan dari KPK. • Regulatory Policy Review (Financial Services Authority Regulations) Regarding Indonesia Eximbank Guidance and Supervision. • Indonesia Eximbank Employee Training and Development Program. • Gratuity Control within the Indonesia Eximbank Environment based on an Appeal Letter from the KPK.
2016	• Penetapan Regulasi Internal Perihal Disiplin Pegawai LPEI. • Penyempurnaan tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. • Sosialisasi teknis Penyampaian Dan Pengelolaan LHKPN. • Stipulation of Internal Regulations Regarding Discipline for Indonesia Eximbank Employees • Improvements on Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Administrators' Assets • Technical socialization of LHKPN Submission and Management.
2017	• Penyempurnaan regulasi Kewajiban Penyampaian LHKPN bagi Pejabat LPEI. • Pengisian peraturan internal tentang Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI. • Ditetapkannya regulasi mengenai Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. • Refinement of regulations on the Obligation to Submit LHKPN for Indonesia Eximbank Officials • Completion of internal regulations regarding the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs (APU & PPT) of Indonesia Eximbank. • Stipulation of regulations regarding the Board of Directors' Responsibilities for Financial Statements

Tahun Year	Kegiatan Activity
2018	• Diterbitkannya peraturan internal mengenai *Know Your Employee* di LPEI. • Ditetapkannya Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI. • Penyempurnaan peraturan mengenai Komite Manajemen Risiko LPEI; Komite Pengembangan Produk LPEI; Komite Personalia LPEI. • Penyempurnaan Manual Operasional Pengadaan Barang atau Jasa LPEI. • Penyempurnaan Regulasi Internal perihal Disiplin Pegawai LPEI. • Implementasi Program sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pegawai LPEI. • Issuance of internal regulations regarding Know Your Employee at Indonesia Eximbank • Stipulation of Limit of Authority for Approval for Use of Indonesia Eximbank Budget • Improvement of regulations regarding the Risk Management Committee; Product Development Committee; Personnel Committee • Improvement of the Goods/Services Procurement Operational Manual • Improvement of Internal Regulations regarding Employee Discipline • Implementation of the Risk Management Certification Program for Employees
2019	• Penyempurnaan peraturan mengenai Komite Pembiayaan LPEI; Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor LPEI; Komite Teknologi Sistem Informasi; Komite Asset dan Liability LPEI; Komite Kebijakan Bisnis LPEI; & Komite Manajemen Risiko LPEI. • Penyempurnaan mengenai peraturan internal Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI. • Sosialisasi dari Unsur *Top Management* (*Tone of The Top*) dengan tema Budaya Kerja; Kode Etik dan Anti Gratifikasi. • Pengisian peraturan internal tentang Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI. • Penyempurnaan Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan atas Pembagian Tugas dan Wewenang Kewajiban Pelaporan kepada Pihak Eksternal LPEI. • Ditetapkannya Peraturan Internal mengenai Strategi *Anti-Fraud* LPEI • Melanjutkan Program sertifikasi Manajemen Risiko bagi seluruh Pegawai di LPEI. • Diterbitkannya Piagam Audit Internal dan *updating* peraturan internal mengenai Penerapan Fungsi Audit Internal LPEI. • Diterbitkannya Piagam Kepatuhan mengenai penerapan Fungsi Kepatuhan di LPEI. • Completion of regulations regarding the Financing Committee; Export Special Assignment Financing Committee; Information System Technology Committee; Asset and Liability Committee; Business Policy Committee; & Risk Management Committee • Improvement of the internal regulations for Gratification Control within the Indonesia Eximbank • Socialization of Top Management Elements (Tone of The Top) with the theme of Work Culture; Code of Ethics and Anti-Gratification • Completion of internal regulations regarding the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs (APU & PPT) • Completion of Provisions and Implementation Procedures on the Division of Duties and Authorities of Reporting Obligations to External Parties • Stipulation of Internal Regulations regarding Anti-Fraud Strategy • Continuing the Risk Management certification program for all Employees at Indonesia Eximbank • Issuance of the Internal Audit Charter and Updating of internal regulations regarding the Implementation of the Internal Audit Function • Issuance of the Compliance Charter regarding the implementation of the Compliance Function at Indonesia Eximbank
2020	• Penerbitan Peraturan Tata Tertib Kerja Dewan Direktur (*Board Manual*). • Penyempurnaan dan/atau Perubahan Peraturan mengenai proses bisnis di antaranya Komite Manual Produk Penugasan Khusus LPEI; Komite Assets & Liabilities Management LPEI; Manual Operasional Pembiayaan LPEI; *Standard Operating Procedure Credit File*; Komite Pembiayaan LPEI; Komite Pembiayaan Khusus LPEI; Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI; • Perpanjangan Sementara Fasilitas Pembiayaan; Tata Cara Pelaksanaan AYDA; Adendum Perpanjangan Fasilitas Sementara *Global Line*; Pencairan Fasilitas Debitur; Tindak Lanjut Pengelolaan Debitur terdampak COVID-19. • Penerbitan Kebijakan dan Prosedur mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan dilakukan sosialisasi kepada seluruh Unit Bisnis dan Support. • Penyempurnaan Peraturan mengenai Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI. • Penggunaan *New Employee Self Service System*. • Perubahan susunan Dewan Direktur, dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Direktur LPEI. • Penerbitan Kebijakan Pengelolaan Dana Program Kemitraan Eks PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). • Penerapan dan penyempurnaan *Digital Signature*. • Implementasi POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. • Implementasi PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI. • Sosialisasi mengenai Tata Kelola Pembiayaan kepada seluruh pegawai Unit Bisnis dan Support di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. • Penyempurnaan Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI. • Penerbitan Kebijakan Kegiatan Ekspor, Penunjang Ekspor dan Kegiatan Lain terkait Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI. • Penerbitan Manual Produk Penjaminan Kredit Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. • Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor LPEI. • Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus *Trade Finance* dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI. • Penerbitan Manual Produk Investasi Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI • Penerbitan Peraturan Mengenai Penerapan *Know Your Employee* (KYE) LPEI. • Penerbitan Peraturan mengenai Penegakan Disiplin dan Penentuan Sanksi atas Pelanggaran LPEI. • Penerbitan Keputusan Direktur Eksekutif Perihal Komite Etik dan Disiplin Pegawai. • Pengembangan *Computer Based Training* (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga.

Tahun Year	Kegiatan Activity
	• Issuance of Work Rules for the Board of Directors (Board Manual) • Improvements/Changes to Regulations regarding business processes including the Special Assignment Product Manual Committee; Assets & Liabilities Management Committee; Financing Operational Manual; Standard Operating Procedures for Credit Files; Financing Committee; Special Financing Committee; Limit • Authority to Approve the Use of Budget; • Temporary Extension of Financing Facilities; AYDA Implementation Procedures; Global Line Temporary Facility Extension Addendum; Disbursement of Debtor Facilities; Follow-up on the Management of Debtors Affected by COVID-19 • Issuance of Policies and Procedures regarding the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs and socialization to all Business and Support Units • Completion of Regulations regarding the Guidelines and Work Procedures of the Organization • Use of the New Employee Self Service System • Changes in the composition of the Board of Directors, with the dismissal and appointment of members of the Board of Directors • Issuance of Policy on Fund Management of the Ex-PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) Partnership Program • Digital Signature implementation and enhancement • Implementation of POJK Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policies on the Impact of the Spread of COVID-19 for Non-Bank Financial Services Institutions • Implementation of PMK Number 58/PMK.06/2020 concerning Indonesia Eximbank Guidance and Supervision • Dissemination of Financing Governance to all Business and Support Unit employees at the Head Office and Regional Offices • Completion of the Indonesia Eximbank Sharia Supervisory Board Charter • Issuance of Policy on Export Activities, Export Support and Other Activities related to Government Guarantees for Corporate Business Actors in the Framework of Implementing the Indonesia Eximbank National Economic Recovery Program • Issuance of Government Credit Guarantee Product Manual for Corporate Business Actors in the Implementation of the National Economic Recovery Program • Issuance of Special Assignment Product Manuals to Support the Export-Oriented Small and Medium Enterprises Sector Indonesia Eximbank • Issuance of a Trade Finance Special Assignment Product Manual to Support National Economic Recovery • Issuance of Government Investment Product Manual in the Context of National Economic Recovery • Issuance of Regulations Regarding the Implementation of Indonesia Eximbank's Know Your Employee (KYE). • Issuance of Regulations regarding Discipline Enforcement and Determination of Sanctions for Violations • Issuance of the Executive Director's Decision Regarding the Committee on Ethics and Employee Discipline • Development of Computer Based Training (CBT) Code of Ethics and Institutional Work Culture
2021	• Penyempurnaan peraturan tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI. • Penerbitan peraturan tentang Penyesuaian Organisasi LPEI. • Penetapan Anggota Komite Penjaminan Bagi Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan PEN. • Penerbitan manual Produk Program Penugasan Khusus dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor LPEI. • Penerbitan manual produk terkait Program Kemitraan LPEI. • Pembentukan dan peresmian *Governance, Risk, Compliance* (GRC) *Champion* LPEI. • Penguatan sistem pengendalian internal dengan peluncuran *Whistleblowing System* (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. • Sosialisasi berkelanjutan terkait WBS dan Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI bersama Itjen Kemenkeu dan Pusintek Kemenkeu. • Pelatihan Tata Cara Pengisian LHKPN dan Perubahan Peraturan KPK tentang LHKPN. • Pelatihan *Computer Based Training* (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga kepada seluruh pegawai LPEI. • Penerbitan Standar Pedoman Operasional Penyusunan Peraturan Edisi 1. • Penetapan anggota Komite Pembiayaan Program Penugasan Khusus Ekspor dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor. • Penetapan anggota Komite Pembiayaan *Supplier Chain Financing*. • Implementasi dan penunjukan *Person in Charge* (PIC) pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK. • Penunjukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sistem pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) KPK. • Pelaksanaan dan penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL). • Pelaksanaan penilaian independen prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh pihak eksternal. • Sosialisasi Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) oleh konsultan independen kepada seluruh pegawai LPEI. • Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/Rekanan, dan Nasabah/Debitur perihal larangan permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (Vendor), Mitra, dan Nasabah. • Sosialisasi melalui *flyer* terkait larangan praktik Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI. • Pembentukan dan Peresmian *Special Purpose Vehicle* (SPV) LPEI. • Penerapan Manajemen Risiko melalui sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko dan sertifikasi kompetensi kerja pegawai LPEI. • Penerbitan peraturan tentang Komite Pengadaan LPEI. • Penerbitan Manual Operasional Teknologi Sistem Informasi LPEI. • Penetapan struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko LPEI.

Tahun Year	Kegiatan Activity
	• Completion of regulations regarding the Organizational Guidelines and Work Procedures. • Publication of regulations regarding Organization Adjustments. • Determination of Guarantee Committee Members for Corporate Business Actors for the Implementation of PEN. • Publication of a manual for the Special Assignment Program Product in Supporting the Export-Oriented Small and Medium Enterprises Sector of Indonesia Eximbank. • Publication of product manuals related to the Partnership Program. • Establishment and inauguration of the Indonesia Eximbank Governance, Risk, Compliance (GRC) Champion. • Strengthening the internal control system by launching a Whistleblowing System (WBS) and Gratification Control in collaboration with the Ministry of Finance. • Ongoing dissemination regarding WBS and Gratification to all employees together with the Inspector General of the Ministry of Finance and the Ministry of Finance's Pusintek. • Training on Procedures for Filling in LHKPN and Amendment to KPK Regulations on LHKPN. • Computer Based Training (CBT) Code of Ethics and Institutional Work Culture for all employees. • Publication of Standard Operational Guidelines for Regulatory Preparation Edition 1. • Appointment of members of the Financing Committee for the Special Export Assignment Program in the Framework of Supporting the Export-Oriented Small and Medium Enterprises Sector. • Appointment of members of the Supplier Chain Financing Committee. • Implementation and appointment of Person in Charge (PIC) on the OJK Consumer Protection Portal Application (APPK). • Appointment of the Gratification Control Unit (UPG) for the KPK's Online Gratification Reporting System (GOL) • Implementation and submission of gratification reports to the KPK through the Online Gratification reporting system (GOL). • Implementation of an independent assessment of the principles of good governance by external parties. • Dissemination of Good Corporate Governance by independent consultants to all employees. • Dissemination of Circular Letters to Employees, Partners/Partners, and Customers/Debtors regarding the prohibition of requesting, receiving and granting gratuities to/from Employees as well as to Partners, Goods/Services Providers (Vendors), Partners, and Customers. • Socialization through flyers regarding the prohibition of gratification practices to all employees • Establishment and Inauguration of the Special Purpose Vehicle (SPV). • Implementation of Risk Management through Risk Management competency certification and employee competency certification. • Issuance of regulations regarding the Procurement Committee. • Issuance of the Information System Technology Operational Manual. • Determination of the structure and membership of the Risk Management Committee.
2022	• Pelaksanaan *self-assessment* GCG LPEI posisi tahun 2021. • Pelaksanaan penilaian independen prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh pihak eksternal. • Pemenuhan Pelaporan LHKPN. • Penyempurnaan Struktur Organisasi LPEI. • Pembentukan jabatan Head of Manajemen Risiko & Kredit LPEI. • Pengukuhan nilai-nilai Budaya LPEI yang baru yakni *Agile*, Profesionalisme, Integritas, dan Kreatif yang diformulasikan dalam sebuah kata "APIK." • Penyusunan Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif. • Pemutakhiran Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI, Piagam Komite Renumerasi dan Nominasi LPEI, Piagam Komite Pemantau Risiko LPEI, Piagam Komite Audit LPEI, dan Piagam Audit Internal LPEI. • Penyusunan Piagam Komite Penugasan Khusus LPEI. • Pemutakhiran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai LPEI. • Pemutakhiran peraturan internal tentang Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI Wajib Lapor. • Pemutakhiran peraturan internal tentang pengendalian Gratifikasi LPEI. • Pemutakhiran peraturan internal tentang Pengadaan Barang/Jasa LPEI. • Penyampaian Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan APU-PPT semester I 2022. • Sosialisasi Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) oleh konsultan independen kepada seluruh pegawai LPEI. • Pelatihan Tata Cara Pengisian LHKPN dengan pembicara langsung dari KPK. • Pelatihan *Computer Based Training* (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga kepada seluruh pegawai LPEI. • Sosialisasi berkelanjutan terkait WBS dan Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI, termasuk sosialisasi larangan praktik Gratifikasi melalui *email blast, flyer*, dan *screensaver* kepada seluruh pegawai LPEI. • Keikutsertaan dalam *e-learning* Peningkatan Pemahaman Gratifikasi dari KPK oleh seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan. • Pelaksanaan dan penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) KPK. • Penyampaian pemenuhan rencana kerja dan realisasi atas Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) LPEI tahun 2022 kepada KPK. • Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/Rekanan, dan Nasabah/Debitur perihal larangan permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (Vendor), Mitra, dan Nasabah. • Persiapan pencatatan Unit Usaha Syariah berdasarkan POJK, dilengkapi dengan audiensi dengan OJK Bagian Pengawas Syariah. • *Focus Group Discussion* beserta sosialisasi PMK 208/2021 antara LPEI, BPKP, dan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh DJKN. • Penyusunan *roadmap* dan *framework Governance, Risk* dan *Compliance* (GRC) LPEI. • Pelaksanaan *Webinar*: Cara APIK Melawan *Fraud* dan Anti *Money Laundering*, dengan Pembicara dari PPATK dan Transparansi Internasional Indonesia.

Tahun Year	Kegiatan Activity
	• The implementation of GCG self-assessment of Indonesia Eximbank's position in 2021. • Implementation of independent assessment of good governance principles by external parties. • Fulfillment of LHKPN Reporting. • Improvement of Indonesia Eximbank's organizational structure. • Establishment of Head of Risk & Credit Management of Indonesia Eximbank. • Strengthening the new Indonesia Eximbank Cultural values of Agile, Professionalism, Integrity, and Creative formulated in a word "APIK." • Preparation of standard operational guidelines of nine committees under the Executive Director. • Updating the Charter of the Sharia Supervisory Board of LPEI, the Charter of the Remuneration and Nomination Committee of Indonesia Eximbank, the Charter of the Risk Monitoring Committee of Indonesia Eximbank, the Charter of the Audit Committee of Indonesia Eximbank, and the Charter of Internal Audit of Indonesia Eximbank. • Drafting of the Special Assignment Committee Charter of Indonesia Eximbank. • Update of Indonesia Eximbank Employee Code of Ethics and Code of Conduct. • Updating internal regulations on the Obligation of State Administration Property Report (LHKPN) for Indonesia Eximbank Officials Must Report. • Updating internal regulations on Indonesia Eximbank Gratification control. • Update of internal regulations on Procurement of Goods/Services of Indonesia Eximbank. • Submission of the Report on the Implementation of the Compliance Function and AML-CFT in the first semester of 2022. • Socialization of Good Corporate Governance by independent consultants to all Indonesia Eximbank employees. • Training on LHKPN Filling Procedures with direct speakers from the KPK. • Computer Based Training (CBT) Code of Ethics and Work Culture of the Institution to all Indonesia Eximbank employees. • Continuous socialization related to WBS and Gratification to all Indonesia Eximbank employees, including socialization of the prohibition of Gratification practices through email blasts, flyers, and screensavers to all Indonesia Eximbank employees. • Participation in e-learning Increasing Gratification Understanding from the KPK by all employees of the Compliance Unit. • Implementation and submission of gratification reports to the KPK through the KPK's Online Gratification reporting system (GOL). • Submission of the fulfillment of the work plan and realization of the 2022 Indonesia Eximbank Gratification Control Program (PPG) to the KPK. • Dissemination of Circular Letter to Indonesia Eximbank Employees, Partners/Partners, and Customers/Debtors regarding the prohibition of requesting, receiving and granting gratuities to/from Indonesia Eximbank Employees as well as to Partners, Goods/Services Providers (Vendors), Partners, and Customers. • Preparation for the recording of Sharia Business Units based on POJK, complemented by hearings with the OJK Sharia Supervisory Section. • Focus Group Discussion along with socialization of PMK 208/2021 between Indonesia Eximbank, BPKP, and the Ministry of Finance represented by DJKN. • Preparation of Indonesia Eximbank's Governance, Risk and Compliance (GRC) roadmap and framework. • Webinar: How APIK Fights Fraud and Anti Money Laundering, with Speakers from PPATK and Transparency International Indonesia.
2023	• Pembentukan dan pengukuhan DCOR *Officer* LPEI; • Pelaksanaan penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik LPEI periode tahun 2022 oleh BPKP; • Pelaksanaan *self assessment* faktor tata kelola yang baik LPEI tahun 2023 menggunakan parameter SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan LPEI tahun 2023; • Pemenuhan pelaporan LHKPN periode tahun 2023 secara tepat waktu dan terpenuhi 100%; • Penyusunan piagam komite Governance, Risk dan Compliance (GRC) LPEI; • Sosialisasi berkelanjutan terkait pengendalian gratifikasi, *Whistleblowing System* (WBS), dan APU PPT kepada pegawai LPEI; • Pelaksanaan survei WBS dan Gratifikasi kepada seluruh Manajemen dan pegawai LPEI; • Pelaksanaan program pengendalian Gratifikasi LPEI tahun 2023. • Sosialisasi Penguatan Bisnis LPEI melalui Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada KAP Rekanan LPEI; • Pengkinian peraturan internal dan penguatan *framework* Strategi *Anti Fraud* LPEI; • Pembentukan Komite GRC LPEI yang diatur dalam peraturan internal Komite *Governance, Ris*k & *Compliance* (GRC *Committee*) LPEI; • Pengkinian peraturan internal atas penerapan program Anti Pencucian uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM); • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Tata Kelola yang Baik LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Operasional Manajemen Risiko *Enterprise* LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Pengelola Rekanan Pengadaan Barang/Jasa LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Penyusunan RKAT, Rencana Bisnis dan RJP LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Tata Naskah Dinas LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Komite Perusahaan Anak LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Layanan Pengaduan Nasabah LPEI; • Penyusunan kebijakan/peraturan internal Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI. • Penyusunan dan pengkinian peraturan internal terkait penerapan PMK 208/PMK.06/2021.

Tahun Year	Kegiatan Activity
	• Establishment and inauguration of Indonesia Eximbank DCOR Officer; • Implementation of an assessment of the implementation of Indonesia Eximbank's good governance principles for the 2022 period by BPKP; • Implementation of self-assessment of LPEI good governance factors in 2023 using SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 parameters as part of the Indonesia Eximbank Health Level Report in 2023; • Fulfillment of LHKPN reporting for the period of 2023 in a timely manner and 100% fulfilled; • Preparation of Indonesia Eximbank Governance, Risk and Compliance (GRC) committee charter; • Continuous socialization related to gratification control, Whistleblowing System (WBS), and AML/CFT to Indonesia Eximbank employees; • Implementation of WBS and Gratification survey to all Indonesia Eximbank Management and employees; • Implementation of Indonesia Eximbank Gratification control program in 2023. • Socialization of Strengthening Indonesia Eximbank Business through the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) to KAP Partners of Indonesia Eximbank; • Updating internal regulations and strengthening the Indonesia Eximbank Anti Fraud Strategy framework; • Establishment of Indonesia Eximbank GRC committee which is regulated in the internal regulation of Indonesia Eximbank Governance, Risk & Compliance Committee (GRC Committee); • Updating of internal regulations on the implementation of Anti-Money Laundering, Prevention of Financing of Terrorism, & Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML PPT & PPPSPM) program; • Preparation of Indonesia Eximbank's internal Good Governance policy/regulation; • Preparation of internal policy/regulation of Indonesia Eximbank Enterprise Risk Management Operations; • Preparation of internal policies/regulations of Indonesia Eximbank Goods/Services Procurement Partner Management; • Preparation of internal policies/regulations for the preparation of RKAT, Business Plan and RJP Indonesia Eximbank; • Preparation of internal policies/regulations of Indonesia Eximbank Office Manuscripts; • Preparation of internal policy/regulation on Health Level Assessment of Indonesia Eximbank; • Preparation of internal policy/regulation on Implementation of Compliance Function of Indonesia Eximbank; • Formulation of internal policy/regulation of Indonesia EximbankEI Subsidiary Committee; • Preparation of internal policy/regulation on Indonesia Eximbank Customer Complaint Service; • Formulation of internal policies/regulations of the Indonesia Eximbank Board of Directors Work Procedure Guidelines. • Preparation and updating of internal regulations related to the implementation of PMK 208/PMK.06/2021.

SISTEM TATA KELOLA

Berdasarkan UU No. 2/2009, LPEI menerapkan sistem tata kelola "*One Board System* (Dewan Tunggal)," di mana Dewan Direktur berperan sebagai organ tunggal dalam organisasi yang bertanggung jawab dalam hal perumusan, penetapan kebijakan, dan pengawasan kegiatan operasional LPEI. Penerapan *One Board System* dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan LPEI. Namun demikian, guna mencegah terjadinya dominasi pengaruh yang berlebihan pada salah satu anggota Dewan Direktur yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif sesuai penunjukan Menteri, maka Ketua Dewan Direktur tidak memiliki hak suara dalam rapat Dewan Direktur.

GOVERNANCE SYSTEM

Based on Act No. 2/2009, Indonesia Eximbank adopts the "One Board System (Single Board)" governance system, where the Board of Directors acts as the sole organ within the organization responsible for formulating policies, making decisions, and overseeing Indonesia Eximbank operational activities. The implementation of the One Board System is deemed appropriate for Indonesia Eximbank needs. However, to prevent excessive influence domination by one member of the Board of Directors who also serves as the Chairman of the Board of Directors and Executive Director as appointed by the Minister, the Chairman of the Board of Directors does not have voting rights in Board of Directors meetings.

STRUKTUR DAN ARSITEKTUR GCG
GCG Structure and Architecture

Struktur GCG
Dewan Direktur merupakan organ tunggal di dalam organisasi Lembaga yang mengemban tugas pokok dan fungsi utama untuk merumuskan, menetapkan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI. Dengan demikian struktur GCG LPEI dapat dijelaskan dalam bagan berikut ini:

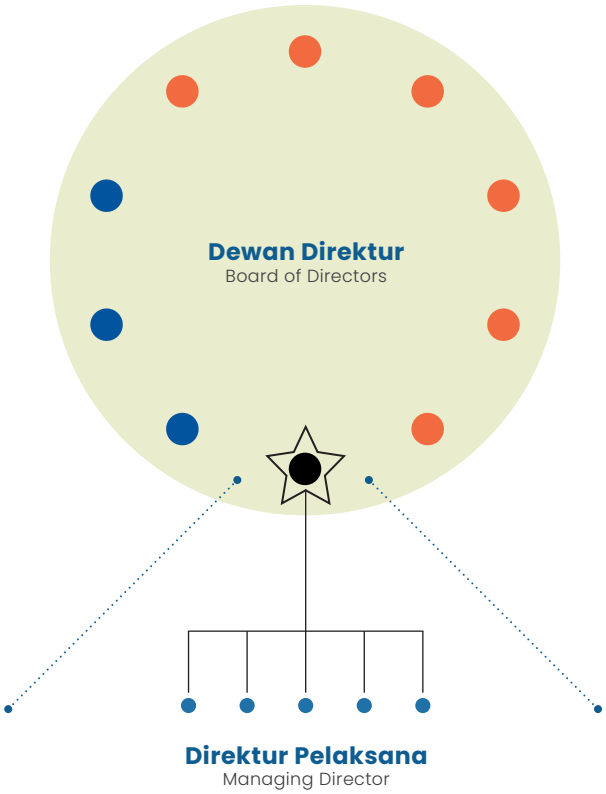

GCG Structure
The Board of Directors is the sole organ within the Institution in charge of the core tasks and main functions of policy formulation, policy establishment, and operational oversight of Indonesia Eximbank. The following chart illustrates the governance structure of Indonesia Eximbank:

Ex Officio
- Fiskal (3 orang)
- Fiscal (3 persons)
- Perdagangan (1 orang)
- Trade (1 person)
- Perindustrian (1 orang)
- Industry (1 person)
- Pertanian (1 orang)
- Agriculture (1 person)

Independen | Independent
- Berasal dari luar LPEI paling banyak 3 Orang dan 1 orang dari dalam LPEI
- Comes from outside the Indonesia Eximbank at most 3 people and 1 person from inside the Indonesia Eximbank

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director

Managing Director/Direktur Pelaksana yang terdiri dari para profesional dan membantu Direktur Eksekutif
Managing Director consists of professionals and assists the Executive Director

Mengacu pada ketentuan tersebut, komposisi Dewan Direktur berjumlah paling banyak adalah 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari:
a. 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal.
b. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan.
c. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian.
d. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.
e. Paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI.

Referring to the provisions above, the composition of the Board of Directors is no more than 10 (ten) people, consisting of:
a. 3 (three) government officials from the institution or department in charge of fiscal.
b. 1 (one) government officials from the institution or department in charge of trade.
c. 1 (one) government officials from the institution or department in charge of industry.
d. 1 (one) government officials from the institution or department in charge of agriculture.
e. A maximum of 3 (three) persons from external Indonesia Eximbank and 1 (one) person from within the Indonesia Eximbank.

Salah satu anggota Dewan Direktur yang ditunjuk oleh Menteri menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur dan merangkap jabatan sebagai Direktur Eksekutif. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Eksekutif didukung

The Minister appoints one of the Board of Directors members to serve as Chairman of the Board of Directors and Executive Director. The Executive Director is assisted in carrying out its duties by a maximum of 5

oleh maksimal 5 (lima) orang Direktur Pelaksana, di mana paling banyak 4 (empat) di antaranya berasal dari internal LPEI. Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Pelaksana dilakukan oleh Dewan Direktur berdasarkan usulan dari Direktur Eksekutif.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Direktur membentuk komite-komite pendukung di bawahnya, antara lain: 1) Komite Audit; 2) Komite Pemantau Risiko; dan 2) Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap Komite beroperasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Keputusan Direktur Eksekutif (KDE). Hal ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI.

Arsitektur GCG

Arsitektur GCG merupakan struktur atau landasan kerja yang disusun untuk mengelola dan mengatur suatu organisasi dengan mematuhi prinsip-prinsip GGC. Dengan arsitektur GCG yang efektif, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, serta memberikan nilai jangka panjang bagi *stakeholder*, dan membangun kepercayaan dari berbagai pihak yang terlibat dengan LPEI.

Arsitektur penyusunan kebijakan dan prosedur berdasarkan prinsip GCG mengamanatkan adanya Kebijakan dan Prosedur tertulis, seperti yang diperlihatkan dalam skema berikut:

(five) Managing Directors, with a maximum of 4 (four) people coming from within the Indonesia Eximbank. The Board of Directors appoints and dismisses the Managing Director based on the Executive Director's recommendation.

To enhance the effectiveness of the implementation of these duties and responsibilities, the Board of Directors establishes supporting committees, among others: 1) the Audit Committee; 2) the Risk Monitoring Committee; and 3) the Remuneration and Nomination Committee. Each committee operates in accordance with the scope of duties and responsibilities as stipulated by the Executive Directors' Decree (KDE). This is in accordance with the rules set out in Article 8 of the Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank.

GCG Architecture

The GCG architecture is a structure or framework designed to manage and govern an organization in accordance with the GCG principles. With an effective GCG architecture, it is hoped that a work environment supportive of sustainable growth can be created, providing long-term value for stakeholders and building trust among various parties involved with Indonesia Eximbank.

The architecture for policy formulation and procedures based on GCG principles mandates the existence of written Policies and Procedures, as illustrated in the following scheme:

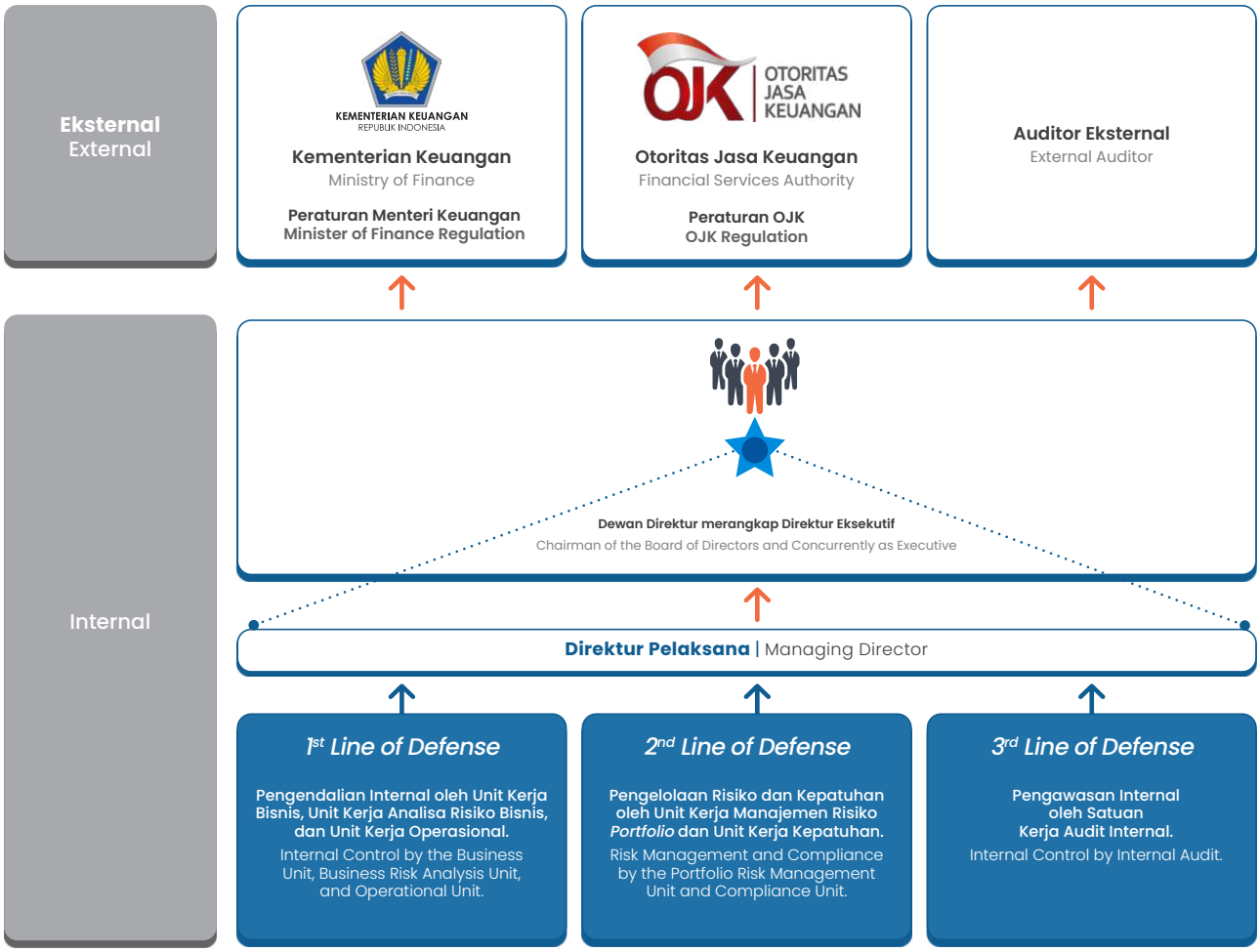
Eksternal
External
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kementerian Keuangan
Ministry of Finance
Peraturan Menteri Keuangan
Minister of Finance Regulation
OJK
OTORITAS JASA KEUANGAN
Otoritas Jasa Keuangan
Financial Services Authority
Peraturan OJK
OJK Regulation
Auditor Eksternal
External Auditor
Internal
Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif
Chairman of the Board of Directors and Concurrently as Executive
Direktur Pelaksana | Managing Director
1st Line of Defense
Pengendalian Internal oleh Unit Kerja Bisnis, Unit Kerja Analisa Risiko Bisnis, dan Unit Kerja Operasional.
Internal Control by the Business Unit, Business Risk Analysis Unit, and Operational Unit.
2nd Line of Defense
Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan oleh Unit Kerja Manajemen Risiko Portfolio dan Unit Kerja Kepatuhan.
Risk Management and Compliance by the Portfolio Risk Management Unit and Compliance Unit.
3rd Line of Defense
Pengawasan Internal oleh Satuan Kerja Audit Internal.
Internal Control by Internal Audit.

KERANGKA TATA KELOLA (STRUKTUR, PROSES, DAN HASIL TATA KELOLA)

GCG Framework (Governance Structure, Process, and Outcome)

LPEI mengimplementasikan komitmennya terhadap penerapan Tata Kelola, yang tercermin dalam komitmen Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, serta seluruh unit kerja LPEI untuk menerapkan dan menegakkan Tata Kelola LPEI. Keberhasilan implementasi GCG dapat dilihat dari konsistensi ketiga aspek sistem tata kelola, yaitu Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola, dan Hasil Tata Kelola. Informasi terkait hal tersebut dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. **Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)**
   Governance Structure yaitu terkait dengan kecukupan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Lembaga. Struktur organ Tata Kelola meliputi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, Komite-Komite, dan Satuan Kerja. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

2. **Proses Tata Kelola (*Governance Process*)**
   Governance Process merupakan efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Lembaga sehingga dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan. LPEI memastikan proses Tata Kelola telah dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan *outcome* yang memenuhi prinsip Tata Kelola.

3. **Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)**
   Governance Outcome yang memenuhi harapan pemangku kepentingan dapat dicapai melalui proses penerapan prinsip Tata Kelola yang efektif serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang memadai sesuai kebutuhan dan kompleksitas bisnis Lembaga. Dengan demikian, *Governance Outcome* merupakan hasil akhir atas penerapan

Indonesia Eximbank implements its commitment to governance, as reflected in the commitment of the Board of Directors, Executive Director, Executive Directors, and all Indonesia Eximbank work units to implement and uphold Indonesia Eximbank governance. The success of GCG implementation can be seen in the consistency of the three aspects of governance systems: Governance Structure, Governance Processes, and Governance Outcomes. Information regarding these aspects is explained in more detail as follows:

1. **Governance Structure**
   Governance Structure is related to the adequacy of the Corporate Governance Structure and Infrastructure, so that the process of implementing Good Governance Principles produces outcomes that meet the expectations of the Institution's Stakeholders. The governance organs are organized into the Board of Directors, Executive Directors, Managing Directors, Committees, and Work Units. Meanwhile, policies and procedures, management information systems, and the primary tasks and functions of each organizational structure are all part of the Governance infrastructure.

2. **Governance Process**
   Governance Process is the effectiveness of the process of implementing good governance principles, which is supported by the adequacy of Corporate Governance structure and infrastructure to produce outcomes that meet the expectations of all stakeholders. Indonesia Eximbank always ensures that the governance process is carried out using structured and systematic procedures and mechanisms to produce outcomes that meet the Governance principles.

3. **Governance Outcome**
   Governance outcomes that meet stakeholder expectations are achieved through the process of implementing Good Governance principles, which is supported by adequate Governance structures and infrastructure. Thus, the Governance Outcome is the end result of putting the Governance Process

Governance Process dan dukungan yang memadai dari *Governance Structure*. Adanya permasalahan yang muncul pada *Governance Structure* akan menimbulkan kelemahan pada *Governance Process*. Di lain pihak, adanya kelemahan pada *Governance Process* akan berdampak pada *Governance Outcome*.

into action and receiving adequate support from the Governance Structure. The presence of flaws in the Governance Structure leads to flaws in the Governance Process. On the other hand, the presence of flaws in the Governance Process affects the Governance Outcome.

PENILAIAN GCG
GCG Assessment

Dasar penilaian GCG di LPEI mengacu kepada PMK 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. Sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut, LPEI melakukan pengukuran atas pelaksanaan dan penerapan GCG secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun. Penilaian penerapan GCG di LPEI untuk periode penilaian tahun 2022 dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ditunjuk melalui Surat No. BS.0290/CEO/10/2022 Tanggal 5 Oktober 2022.

The basis for assessing GCG at Indonesia Eximbank refers to PMK 208/2021. As stipulated in this regulation, Indonesia Eximbank conducts periodic measurements of GCG implementation at least once a year. The assessment of GCG implementation at Indonesia Eximbank for the assessment period in 2022 was carried out by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) appointed through Letter No. BS.0290/CEO/10/2022 dated 5 October 2022.

Penilaian Penerapan GCG Tahun Buku 2022: Hasil, Rekomendasi, dan Tindak Lanjutnya di Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. PE.05.03/LGCG-66/D403/1/2023 yang diterima pada tanggal 3 Juli 2023, LPEI telah melakukan penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG untuk periode tahun buku 2022 dengan menggunakan 10 (sepuluh) aspek utama yang terdiri dari 155 indikator faktor uji kesesuaian dan memperoleh nilai 77,789 dengan Predikat Komposit "Baik".

The Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2022: Results, Recommendations, and Follow-up in 2023

Based on the Assessment Report from the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) No. PE.05.03/LGCG-66/D403/1/2023 received on July 3, 2023, Indonesia Eximbank conducted an evaluation of the implementation of GCG principles for the fiscal year 2022 using 10 main aspects consisting of 155 compliance indicator factors and obtained a score of 77.789 with a "Good" Composite Predicate.

Dari hasil penilaian GCG di tahun 2022, LPEI mendapatkan sebanyak 79 *Area of Improvement* (AoI). Pada tahun 2023, LPEI telah menindaklanjuti selesai 71 AoI, sementara 8 AoI lainnya masih dalam proses tindak lanjut. Realisasi tindak lanjut LPEI terhadap semua rekomendasi perbaikan yang diperoleh dari penilaian GCG tahun 2022 menandai kesungguhan LPEI dalam menyempurnakan implementasi Tata Kelola yang baik pada setiap lini bisnis dan tingkatan organisasi secara berkelanjutan.

From the results of the GCG assessment in 2022, Indonesia Eximbank identified 79 Areas of Improvement (AoI). In 2023, Indonesia Eximbank has completed the follow-up for 71 AoI, while the other 8 AoI are still undergoing follow-up processes by management. Indonesia Eximbank's follow-up actions on all improvement recommendations obtained from the 2022 GCG assessment signify its commitment to continuously enhancing the implementation of good governance across every business line and organizational level.

Penilaian Penerapan GCG Tahun Buku 2023

Penilaian atas implementasi Tata Kelola yang baik pada lingkup LPEI untuk tahun 2023 masih berlangsung dan hingga Laporan Tahunan 2023 ini dipublikasikan, hasil penilaiannya masih dalam proses akhir oleh BPKP. Ringkasan Laporan hasil penilaian GCG LPEI dapat diakses melalui situs web LPEI, yaitu https://www.indonesiaeximbank.go.id.

Assessment of GCG Implementation for Financial Year 2023

The assessment of the implementation of good governance within the scope of Indonesia Eximbank for 2023 is still ongoing, and as of the publication of the 2023 Annual Report, the assessment results are still in the final stages by BPKP. The summary report of the Indonesia Eximbank GCG assessment can be accessed through the Indonesia Eximbank website at https://www.indonesiaeximbank.go.id.

RAPAT PENGESAHAN
Ratification Meetings

Sebagai SMV dari Kementerian Keuangan RI, pengelolaan LPEI sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Menteri Keuangan RI. LPEI berkewajiban untuk menyusun Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahunnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan guna mendapatkan persetujuan melalui mekanisme Rapat Pengesahan (Fungsi RUPS). Selain memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap RKAT LPEI, pelaksanaan Rapat Pengesahan juga bertujuan untuk memperoleh persetujuan Menteri Keuangan terkait kinerja LPEI selama tahun buku.

Landasan Hukum dan Tahapan Pelaksanaan

Rapat Pengesahan Berdasarkan UU No. 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Bagian Keempat RKAT:

1) Pasal 36: Tahun Buku dan Tahun Anggaran LPEI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
2) Pasal 37:
   a) Direktur Eksekutif menyiapkan Rencana Jangka Panjang sebagai rencana strategis yang memuat sasaran yang hendak dicapai oleh LPEI dalam periode 5 (lima) tahunan.
   b) Direktur Eksekutif menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
   c) Tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ditetapkan dalam Peraturan Menteri."

Hak-hak Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI tidak terbagi atas saham dan 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Kesetaraan Perlakuan terhadap Pemegang Saham

LPEI memastikan terlaksananya prinsip kesetaraan bagi pemegang saham meskipun tidak memiliki pemegang saham minoritas. Hal ini karena seluruh (100%) saham LPEI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

As a SMV under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the management of Indonesia Eximbank is entirely under the responsibility of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Indonesia Eximbank is obligated to prepare its Long-Term Plan (RJP) and Annual Work Plan and Budget (RKAT) each year, subsequently to be submitted to the Minister of Finance for approval through the Ratification Meeting mechanism (RUPS Function). In addition to having the authority to approve Indonesia Eximbank RKAT, the implementation of the Ratification Meeting also aims to obtain the Minister of Finance's approval regarding Indonesia Eximbank performance throughout the fiscal year.

Legal References and Stages of the Ratification Meetings

Pursuant to Act No. 2 of 2009 concerning the Indonesia Eximbank's Fourth Part Work Plan and Annual Budget:

1) Article 36: Indonesia Eximbank Fiscal Year and Financial Year begin from 1 January to 31 December Annual Work Plan and Budget.
2) Article 37:
   a) The Executive Director prepares a Long-Term Plan as a strategic plan that contains the objectives to be achieved by the Company within a 5 (five) year period.
   b) The Executive Director prepares an Annual Work Plan and Budget as an annual translation of the Long-Term Plan.
   c) The procedures for the preparation, submission, and amendment of the Long- Term Plan and Work Plan and Annual Budget are stipulated in a Ministerial Regulation.

Shareholders Rights

Based on Article 19 of Law Number 2 of 2009 concerning the Indonesian Export Financing Agency, Indonesia Eximbank is not divided into shares and is wholly owned (100%) by the Government of the Republic of Indonesia.

Equality in Treatment of the Shareholders

Indonesia Eximbank ensures the implementation of the principle of equality for shareholders, even though it does not have minority shareholders. This is because the Government of the Republic of Indonesia owns 100% of Indonesia Eximbank shares.

Pelaksanaan dan Kehadiran Peserta Rapat Pengesahan Tahun 2023

Pada tahun 2023, LPEI telah melaksanakan Rapat Pengesahan RKAT dengan uraian sebagai berikut:

Tempat/Tanggal: Kamis, 04 Mei 2023
Waktu: 15.30 – selesai
Kehadiran:

a) Menteri Keuangan RI yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI
b) Dewan Direktur LPEI
c) Direktur Pelaksana LPEI

Laporan Rapat Pengesahan RKAT tersebut telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat S-507/MK.06/2023 tanggal 18 Juni 2023 Perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Kontrak Manajemen dan Program Kemitraa LPEI Tahun 2023, yang pembahasannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

Implementation and Attendance of Ratification Meetings in 2023

In 2023, Indonesia Eximbank has conducted Work Plan and Annual Budget (RKAT) Ratification Meeting with the following description:

Place/Date: Thursday, 04 May 2023
Time: 15.30 - End
Attendance:

a) Minister of Finance of the Republic of Indonesia, in this case represented by the Director General of State Assets of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
b) Board of Directors
c) Managing Directors

The report of the RKAT Ratification Meeting has been approved by the Minister of Finance through letter No. S-507/MK.06/2023 dated 18 June 2023 concerning the Ratification of the RAKT, Management Contract, and Partnership Program of the Export Financing Agency, which includes the following discussions:

Hasil Keputusan Rapat Pengesahan Tahun 2023 / Ratification Meetings Resolutions in 2023

No.	Hasil Keputusan Result	Realisasi Realization	Status
1.	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Kontrak Manajemen, dan Program Kemitraan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tahun 2023, dengan pokok-pokok sebagaimana terlampir. Ratify the Annual Work Plan and Budget (RKAT), Management Contract, and Partnership Program of the Indonesia Eximbank for 2023, with the points as attached.	Pelaksanaan poin-poin di atas telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat: BS.0052/CEO/02/2024 The implementation of the above points has been submitted to the Minister of Finance by letter: BS.0052/CEO/02/2024	Selesai Done
2.	Dalam pelaksanaan RKAT LPEI Tahun 2023 Dewan Direktur perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. RKAT Tahun 2023 agar dijadikan pedoman dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan LPEI dengan tetap melaksanakan disiplin anggaran serta memperhatikan pelaksanaan mandat berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2019 b. Strategi, prioritas dan program kerja harus dilaksanakan sesuai dengan *timeline* yang telah direncanakan dan dimonitor serta dievaluasi secara berkala c. Efisiensi dalam pelaksanaan belanja modal (CAPEX), beban administrasi dan umum, serta beban tenaga kerja agar terus dilakukan, baik pada penugasan umum maupun penugasan khusus. Khusus mengenai CAPEX, agar program kerja yang telah ditetapkan, diupayakan dapat dilaksanakan di Tahun 2023 d. Beberapa hal yang perlu menjadi prioritas LPEI di Tahun 2023, antara lain: 1) meningkatkan kinerja LPEI baik keuangan maupun non keuangan; 2) menciptakan LPEI menjadi lembaga yang sehat dan kuat; 3) menyelesaikan perbaikan kualitas aset baik secara organik maupun in-organik; 4) memperkuat integritas dan kapabilitas sumber daya manusia; 5) membangun *teamwork*, kerja sama, dan sinergi antar unit untuk mencapai kinerja yang optimal, serta menjaga persamaan persepsi dalam mencapai tujuan LPEI; 6) menindaklanjuti temuan audit internal, audit eksternal, dan arahan Kementerian Keuangan.		

No.	Hasil Keputusan Result	Realisasi Realization	Status
	e. Dewan Direktur agar memastikan: 1) seluruh strategi, prioritas dan program kerja Tahun 2023 dilaksanakan dengan baik; 2) seluruh arahan, masukan serta catatan dari Kementerian Keuangan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dalam pembahasan dilaksanakan dengan baik; 3) dalam pelaksanaan strategi, prioritas dan program kerja, LPEI mengoptimalkan sumber daya internal dan meminimalisir penggunaan konsultan; 4) komunikasi, hubungan baik, dan kerja sama dengan *stakeholders* terus dijalin dengan baik dalam rangka melakukan sinergi dan kolaborasi untuk peningkatan ekspor; 5) transformasi Information Technology (IT) difokuskan dalam rangka modernisasi *core banking system* dan melaporkan secara berkala kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 6) LPEI terus berupaya menciptakan citra baik melalui berbagai program yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku ekosistem ekspor. In implementing the Indonesia Eximbank's 2023 RKAT, the Board of Directors needs to pay attention to the following matters as follows: a. The 2023 RKAT should be used as a guideline in carrying out the management and supervision of Indonesia Eximbank by continuing to implement budget discipline and paying attention to the implementation of the mandate based on Act No. 2 of 2009 and Government Regulation No. 43 of 2019. b. Strategies, priorities and work programs must be implemented in accordance with the planned timeline and monitored and evaluated regularly c. Efficiency in the implementation of capital expenditure (CAPEX), administrative and general expenses, and labor expenses should continue to be carried out, both on general assignments and special assignments. Especially regarding CAPEX, so that the work program that has been determined, is sought to be implemented in 2023 d. Several things that need to be prioritized by Indonesia Eximbank in 2023, among others: 1) improving Indonesia Eximbank's performance, both financial and non-financial; 2) creating Indonesia Eximbank into a healthy and strong institution; 3) completing the improvement of asset quality both organically and in-organically; 4) strengthen the integrity and capability of human resources; 5) build teamwork, cooperation, and synergy between units to achieve optimal performance, and maintain a common perception in achieving Indonesia Eximbank goals; 6) following up on internal audit findings, external audits, and Ministry of Finance directives. e. Board of Directors should ensure: 1) all strategies, priorities and work programs for 2023 are well implemented; 2) all directions, inputs and notes from the Ministry of Finance on the Annual Work Plan and Budget as in the discussion are well implemented; 3) in the implementation of strategies, priorities and work programs, Indonesia Eximbank optimizes internal resources and minimizes the use of consultants; 4) communication, good relations, and cooperation with stakeholders continue to be well established in order to synergize and collaborate to increase exports; 5) Information Technology (IT) transformation is focused on the modernization of the core banking system and reports regularly to the Ministry of Finance c.q. Directorate General of State Assets; 6) Indonesia Eximbank continues to build a good image through various programs that can be felt directly by export ecosystem actors.	Pelaksanaan poin-poin di atas telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat: BS.0052/CEO/02/2024 The implementation of the above points has been submitted to the Minister of Finance by letter: BS.0052/CEO/02/2024	Selesai Done

Rapat Pengesahan Tahun 2022

Laporan Rapat Pengesahan LPEI telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat No. S-53/MK.06/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Pengesahan RKAT, Kontrak Manajemen, dan Program Kemitraan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Seluruh keputusan yang diambil dalam Rapat Pengesahan Tahun Buku 2022 telah sepenuhnya direalisasikan.

Ratification Meetings in 2022

Indonesia Eximbank's ratification meeting report has been approved by the Minister of Finance through letter No. S-53/MK.06/2022 dated 3 January 2022 concerning the Ratification of the Annual Work Plan and Budget, Management Contract, and Partnership Program of Indonesia Eximbank. All resolutions adopted in the Ratification Meeting for 2022 Financial Year have been implemented.

DEWAN DIREKTUR
Board of Directors

LPEI memiliki organ Dewan Direktur yang menjalankan fungsi setara dengan Dewan Komisaris pada perusahaan lain. Dewan Direktur bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan operasional LPEI. Hal ini selaras dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 2/2009.

DASAR HUKUM

Dewan Direktur LPEI dibentuk berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Internal
   Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0003/PDD/04/2023 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI.
2. Peraturan Eksternal
   a. UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
   b. PMK No. 58/PMK.06/2020 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.
   c. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
   d. POJK No. 9/2022 Tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

PEDOMAN TATA KERJA DEWAN DIREKTUR

Pedoman tata kerja Dewan Direktur (*Board Manual*) diatur dalam PDD No. 0003/PDD/04/2023 mengenai Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari *Board Manual* sebelumnya, yakni PDD No. 0007/PDD/12/2020. Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur mencakup berbagai aspek seperti tugas, wewenang, tanggung jawab, hak, kewajiban, etika, waktu kerja, rapat Dewan Direktur, sekretariat komite-komite, staf ahli Dewan Direktur, interaksi antara Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan prosedur kerja Direktur Eksekutif.

Indonesia Eximbank has a Board of Directors which functions equivalently to a Board of Commissioners in other companies. The Board of Directors is responsible for formulating and establishing policies, as well as overseeing the operational activities of Indonesia Eximbank. This is in line with the provisions stipulated in Article 26 paragraph (1) of Act No. 2/2009.

LEGAL REFERENCES

The Board of Directors of Indonesia Eximbank is established based on the following regulations:

1. Internal Regulations
   Board of Directors Decree No. 0003/PDD/04/2023 on the Indonesia Eximbank Board of Directors Charter (Board Manual).
2. External Regulations
   a. Act No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank.
   b. Minister of Finance Regulation (PMK) No. 58/PMK.06/2020 concerning Guidance and Supervision of the Indonesia Eximbank.
   c. PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank.
   d. POJK No. 9/POJK.05/2022 concerning Supervision of Indonesia Eximbank.

BOARD OF DIRECTORS MANUAL

The guidelines for the Board of Directors' working procedures (Board Manual) are regulated in PDD No. 0003/PDD/04/2023 concerning the Guidelines for the Board of Directors' Working Procedures of Indonesia Eximbank. These guidelines are an improvement upon the previous Board Manual, namely PDD No. 0007/PDD/12/2020. The Board of Directors' Working Procedures cover various aspects such as duties, authorities, responsibilities, rights, obligations, ethics, working hours, Board of Directors meetings, committee secretariats, Board of Directors' advisors, interaction among the Board of Directors, Executive Director, Executive Directors, and the working procedures of the Executive Director.

KOMPOSISI DEWAN DIREKTUR

Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU No. 2/2009, anggota Dewan Direktur LPEI terdiri dari unsur:

a. 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian, dan 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.
b. Paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI.

Sepanjang tahun 2023, telah terjadi beberapa kali perubahan pada komposisi Dewan Direktur LPEI, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the Article 25 paragraph (2) Act No. 2/2009, Member of the Board of Directors consists of the following elements:

a. 3 (three) officials from the institution or department in charge of fiscal, 1 (one) official from the institution or department in charge of commerce, 1 (one) official from the institution or department in charge of industry, and 1 (one) official from the institution or department in charge of agriculture.
b. At the most 3 (three) members from the external Indonesia Eximbank and 1 (one) member from the internal Indonesia Eximbank.

Throughout 2023, there have been several changes to the composition of the Indonesia Eximbank Board of Directors, as described in the following table:

Komposisi Dewan Direktur Periode 1 Januari 2023 – 27 April 2023
Composition of the Board of Directors for the Period of 1 January 2023 – 27 April 2023

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Legal Basis of Appointment
Rijani Tirtoso	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.06/2021 Decree of the Minister of Finance No. 552/KMK.06/2021
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.06/2018 Decree of the Minister of Finance No. 554/KMK.06/2018
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 274/KMK.06/2020 Decree of the Minister of Finance No. 274/KMK.06/2020
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 530/KMK.06/2020 Decree of the Minister of Finance No. 530/KMK.06/2020
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.06/2018 Decree of the Minister of Finance No. 522/KMK.06/2018
Daniel James Rompas	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.06/2021 Decree of the Minister of Finance No. 552/KMK.06/2021

Komposisi Dewan Direktur Periode 28 April 2023 – 24 Juli 2023
Composition of the Board of Directors for the Period of 28 April 2023 – 24 July 2023

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Legal Basis of Appointment
Rijani Tirtoso	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.06/2021 Decree of the Minister of Finance No. 552/KMK.06/2021
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.06/2018 Decree of the Minister of Finance No. 554/KMK.06/2018
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.06/2018 Decree of the Minister of Finance No. 522/KMK.06/2018
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 274/KMK.06/2020 Decree of the Minister of Finance No. 274/KMK.06/2020
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 530/KMK.06/2020 Decree of the Minister of Finance No. 530/KMK.06/2020
Daniel James Rompas	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.06/2021 Decree of the Minister of Finance No. 552/KMK.06/2021
Yon Arsal	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	Keputusan Menteri Keuangan No. 155 Tahun 2023 Decree of the Minister of Finance No. 155 Year 2023

Komposisi Dewan Direktur Periode 25 Juli 2023 – 31 Agustus 2023
Composition of the Board of Directors for the Period of 25 July 2023 – 31 August 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Rijani Tirtoso	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.06/2021 Decree of the Minister of Finance No. 552/KMK.06/2021
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.06/2018 Decree of the Minister of Finance No. 554/KMK.06/2018
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 274/KMK.06/2020 Decree of the Minister of Finance No. 274/KMK.06/2020
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 530/KMK.06/2020 Decree of the Minister of Finance No. 530/KMK.06/2020
Daniel James Rompas	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.06/2021 Decree of the Minister of Finance No. 552/KMK.06/2021
Yon Arsal	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 155 Tahun 2023 Decree of the Minister of Finance No. 155 Year 2023

Komposisi Dewan Direktur Periode 1 September 2023 – 13 September 2023
Composition of the Board of Directors for the Period of 1 September 2023 – 13 September 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Rijani Tirtoso	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.06/2021 Decree of the Minister of Finance No. 552/KMK.06/2021
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 530/KMK.06/2020 Decree of the Minister of Finance No. 530/KMK.06/2020
Daniel James Rompas	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.06/2021 Decree of the Minister of Finance No. 552/KMK.06/2021
Yon Arsal	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 155 Tahun 2023 Decree of the Minister of Finance No. 155 Year 2023

Komposisi Dewan Direktur Periode 14 September 2023 – 18 Oktober 2023
Composition of the Board of Directors for the Period of 14 September 2023 – 18 October 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Rijani Tirtoso	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.06/2021 Decree of the Minister of Finance No. 552/KMK.06/2021
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 530/KMK.06/2020 Decree of the Minister of Finance
Yon Arsal	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 155 Tahun 2023 Decree of the Minister of Finance No. 155 Tahun 2023
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 332 Tahun 2023 Decree of the Minister of Finance No. 332 Tahun 2023
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 530/KMK.06/2020 Decree of the Minister of Finance No. 530/KMK.06/2020
Daniel James Rompas	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.06/2021 Decree of the Minister of Finance No. 552/KMK.06/2021

Komposisi Dewan Direktur Periode 19 Oktober 2023 – 31 Desember 2023
Composition of the Board of Directors for the Period of 19 October 2023 – 31 December 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Rijani Tirtoso	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.06/2021 Decree of the Minister of Finance No. 552/KMK.06/2021
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 375 Tahun 2023 Decree of the Minister of Finance No. 375 Tahun 2023
Yon Arsal	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 155 Tahun 2023 Decree of the Minister of Finance No. 155 Year 2023
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 332 Tahun 2023 Decree of the Minister of Finance No. 332 Tahun 2023
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 530/KMK.06/2020 Decree of the Minister of Finance No. 530/KMK.06/2020
Daniel James Rompas	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.06/2021 Decree of the Minister of Finance No. 552/KMK.06/2021

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKTUR

Sebagaimana diatur dalam PMK No. 208/PMK.06/2021 mengenai Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Direktur wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik.
2. Dewan Direktur wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Direktur wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis.
4. Dewan Direktur wajib memastikan bahwa Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti:
   a. Rekomendasi satuan kerja audit internal LPEI;
   b. Hasil pengawasan Menteri;
   c. Hasil pengawasan lembaga atau otoritas lain; dan
   d. Hasil auditor eksternal.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

As regulated in Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Customer Due Diligence Principles of Indonesia Eximbank, the duties and responsibilities of the Board of Directors are outlined as follows:

1. The Board of Directors is required to ensure the implementation of good governance principles.
2. The Board of Directors must supervise the execution of tasks and responsibilities of the Executive Director and provide advice to the Executive Director.
3. In conducting supervision, the Board of Directors must direct, monitor, and evaluate the implementation of basic and strategic policies.
4. The Board of Directors must ensure that the Executive Director has followed up on:
   a. Recommendations from the internal audit unit of Indonesia Eximbank;
   b. Results of ministerial supervision;
   c. Results of supervision by other institutions or authorities; and
   d. Results of external auditors.

INDEPENDENSI DEWAN DIREKTUR

Dewan Direktur memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Setiap anggota Dewan Direktur diharuskan untuk mengungkapkan kepemilikan saham perusahaan lain, baik yang beroperasi di dalam maupun di luar negeri, serta menjelaskan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direktur lainnya. Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip

BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENCE

The Board of Directors has an obligation to carry out its duties and responsibilities independently. Each member of the Board of Directors is required to disclose ownership of shares in other companies, both domestic and foreign, as well as explain financial and family relationships with other members of the Board of Directors. Each member of the Indonesia Eximbank Board of Directors has signed a statement

tersebut, setiap anggota Dewan Direktur LPEI telah menandatangani surat pernyataan independensi dan pakta integritas, yang telah diarsipkan dengan baik oleh LPEI. Hal tersebut telah selaras dengan yang telah diamanatkan dalam PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

RAPAT DEWAN DIREKTUR

Kebijakan Pelaksanaan Rapat

Rapat Dewan Direktur LPEI diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 PMK No. 208/2021. Berdasarkan peraturan tersebut, pelaksanaan rapat Dewan Direktur diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan. Rapat Dewan Direktur terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu rapat Dewan Direktur untuk pengambilan keputusan kebijakan dan isu-isu strategis serta rapat Dewan Direktur untuk pengawasan operasional LPEI. Agenda rapat Dewan Direktur untuk pengambilan keputusan kebijakan dan isu-isu strategis diutamakan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan serta pembahasan isu-isu strategis LPEI. Sedangkan agenda rapat Dewan Direktur untuk pengawasan operasional LPEI diutamakan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan kegiatan operasional LPEI.

Rapat-rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur dan dapat diadakan baik secara tatap muka, telekonferensi, maupun melalui media elektronik lainnya. Seluruh anggota Dewan Direktur diharapkan menghadiri rapat tersebut. Dalam situasi di mana Ketua Dewan Direktur atau penggantinya tidak dapat memimpin rapat, Ketua Dewan Direktur atau penggantinya dapat menunjuk anggota Dewan Direktur lainnya untuk memimpin pelaksanaan Rapat. Apabila Ketua Dewan Direktur atau penggantinya tidak dapat memimpin rapat dan tidak melakukan penunjukan, pimpinan rapat akan dipilih secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara anggota Dewan Direktur.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota

Pada tahun 2023, Dewan Direktur telah menyelenggarakan 34 (tiga puluh empat) kali Rapat Dewan Direktur dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

of independence and integrity pact, which Indonesia Eximbank has properly archived, in an effort to put these principles into practice. This is in accordance with the mandates set forth in Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Meeting Policy

The meetings of the Board of Directors of Indonesia Eximbank are regulated in accordance with the provisions stipulated in Article 12 of Minister of Finance Regulation No. 208/2021. Based on this regulation, Board of Directors meetings are held regularly, at least once a month. The Board of Directors meetings consist of 2 (two) types, namely meetings for decision-making on policies and strategic issues and meetings for operational oversight of Indonesia Eximbank. The agenda of Board of Directors meetings for decision-making on policies and strategic issues prioritizes policy decision-making and evaluation of policy implementation, as well as discussions on strategic issues at Indonesia Eximbank. Meanwhile, the agenda of Board of Directors meetings for operational oversight of Indonesia Eximbank prioritizes the implementation of oversight tasks over Indonesia Eximbank operational activities.

These meetings are chaired by the Chairman of the Board of Directors and can be conducted either in person, via teleconference, or through other electronic media. All members of the Board of Directors are expected to attend these meetings. In situations where the Chairman of the Board of Directors or their substitute cannot lead the meeting, the Chairman of the Board of Directors or their substitute may appoint another member of the Board of Directors to chair the meeting. If the Chairman of the Board of Directors or their substitute cannot lead the meeting and does not make an appointment, the meeting Chairman will be selected through consultation to achieve consensus among the Board of Directors members.

Frequency of Meetings and Attendance Rate of Members

In 2023, the Board of Directors held 34 (thirty-four) meetings for the purpose of carrying out oversight functions, with the attendance rate of each member as described in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Rijani Tirtoso	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	34	34	100%
Suminto	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	30	16	53%
Kasan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	33	33	100%
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	34	34	100%
Yon Arsal*	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	21	18	86%
Felia Salim**	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	19	18	95%
Daniel James Rompas	Anggota Dewan Direktur Member of the Board of Directors	34	31	91%

* Masa jabatan beliau secara efektif dimulai pada 2 Mei 2023
** Masa jabatan beliau secara efektif berakhir pada 25 Juli 2023
* His term of office effectively began on 2 May 2023
** Her term of office effectively ends on 25 July 2023

Agenda Rapat

Arahan dan keputusan Dewan Direktur didokumentasikan dalam Risalah Rapat Dewan Direktur, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Meeting Agenda

Directions and decisions of the Board of Directors are documented in the Minutes of the Board of Directors' Meeting, as outlined in the following table:

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Minutes No.	Agenda	Peserta Participants
1	4 Januari 2023 4 January, 2023	MR.0001/ BOD/01/2023	Pemaparan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 Presentation of Financial Statements as of 31 December 2022	1. Rijani Tirtoso 2. Kasan 3. Arus Gunawan 4. Felia Salim 5. D. James Rompas
2	9 Januari 2023 9 January 2023	MR.0002/ BOD/01/2023	Rapat persiapan pembahasan Laporan Keuangan Tahun 2022 Meeting to prepare the discussion of the 2022 Financial Statements	1. Rijani Tirtoso 2. Kasan 3. Arus Gunawan 4. Felia Salim
3	10 Januari 2023 10 January 2023	MR.0003/ BOD/01/2023	Pembahasan Laporan Keuangan LPEI Tahun 2022 Discussion of Indonesia Eximbank Financial Statements of 2022	1. Rijani Tirtoso 2. Kasan 3. Arus Gunawan 4. Felia Salim 5. D. James Rompas
4	27 Januari 2023 27 January 2023	MR.0004/ BOD/01/2023	1. Pemaparan IT *Health Check* oleh Konsultan EY 2. Pemaparan *Sharing on Tax* oleh KAP RSM 3. Konsultasi Pengelolaan Debitur 4. Cadangan Umum dan Tujuan 1. Exposure of IT Health Check by EY Consultant 2. Presentation of Sharing on Tax by KAP RSM 3. Debtor Management Consultation 4. General Reserves and Objectives	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. D. James Rompas
5	8 Februari 2023 8 February 2023	MR.0005/ BOD/02/2023	1. Laporan Hasil Audit Keuangan: Perhitungan Kolektibilitas dan CKPN oleh KAP RSM 2. Laporan IT *Health Check* oleh Konsultan EY 3. Persetujuan Revisi Cadangan IT dan SDM 4. Persetujuan Prinsip Revisi RKAT dan RJP 5. Usulan *in-organic Initiative*: Pembentukan SMV *Special Asset Management* 1. Financial Audit Report: Calculation of Collectability and CKPN by KAP RSM 2. IT Health Check Report by EY Consultant 3. Approval of IT and HR Reserves Revision 4. Approval in Principle of Revision of RKAT and RJP 5. Proposed in-organic Initiative: Establishment of SMV Special Asset Management	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Minutes No.	Agenda	Peserta Participants
6	10 Februari 2023 10 February 2023	MR.0006/ BOD/02/2023	Kinerja Keuangan posisi 31 Januari 2023 Financial Performance as of 31 January 2023	1. Rijani Tirtoso 2. Kasan 3. Arus Gunawan 4. Felia Salim 5. D. James Rompas
7	16 Februari 2023 16 February 2023	MR.0007/ BOD/02/2023	Pembahasan Laporan Keuangan LPEI Tahun 2022 Discussion on Indonesia Eximbank 2022 Financial Statements	1. Rijani Tirtoso 2. Kasan 3. Arus Gunawan 4. Felia Salim 5. D. James Rompas
8	23 Februari 2023 23 February 2023	MR.0008/ BOD/02/2023	Pembahasan Laporan Keuangan LPEI Tahun 2022 Discussion on Indonesia Eximbank 2022 Financial Statements	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. D. James Rompas
9	6 Maret 2023 6 March 2023	MR.0009/ BOD/03/2023	1. Laporan persetujuan rancangan hasil audit laporan keuangan LPEI 2022 2. Persetujuan RKAT dan RJP 1. Report on the approval of the draft audit results of Indonesia Eximbank's 2022 financial statements 2. Approval of RKAT and RJP	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. D. James Rompas
10	9 Maret 2023 9 March 2023	MR.0010/ BOD/03/2023	1. Pemaparan hasil audit Laporan Keuangan 2022 – KAP RSM 2. Permohonan Keputusan Laporan Keuangan Audited LPEI 2022 3. Permohonan Persetujuan RKAT 2023 dan Revisi RJP III LPEI 4. Pemaparan Kinerja Keuangan posisi Februari 2023 1. Presentation of audit results of 2022 Financial Statements - KAP RSM 2. Request for Decision on Indonesia Eximbank Audited Financial Statements 2022 3. Request for Approval of the 2023 RKAT and Revision of Indonesia Eximbank's RJP III 4. Presentation of Financial Performance as of February 2023	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. D. James Rompas
11	28 Maret 2023 28 March 2023	MR.0011/ BOD/03/2023	1. Permohonan Persetujuan RPDD Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur 2. Permohonan Persetujuan RPDD Kebijakan Asuransi 3. Permohonan Persetujuan RPDD Jasa Konsultasi 4. Pemaparan Laporan Komite Audit TW IV 2022 5. Agenda lain-lain 1. Request for Approval of RPDD Guidelines for Board of Directors Work Procedures 2. Request for Approval of Insurance Policy RPDD 3. Request for Approval of RPDD for Consulting Services 4. Presentation of Audit Committee Report TW IV 2022 5. Other agenda	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. D. James Rompas
12	1 April 2023 1 April 2023	MR.0012/ BOD/04/2023	Perpanjangan masa jabatan Plt DMR Extension of the term of office of Acting DMR	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. D. James Rompas
13	10 April 2023 10 April 2023	MR.0013/ BOD/04/2023	1. Pemaparan Laporan Keuangan posisi Maret 2023 2. Pemaparan Project Orion 3. Rapat Terbatas 1. Presentation of Financial Statements as of March 2023 2. Presentation of Project Orion 3. Limited Meeting	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. D. James Rompas
14	10 Mei 2023 10 May 2023	MR.0014/ BOD/05/2023	1. Permohonan ijin prinsip *In-Organic Initiatives* (Nexus) 2. Permohonan persetujuan Laporan Keuangan April 2023 1. Application for In-Organic Initiatives (Nexus) principle permit 2. Request for approval of April 2023 Financial Statements	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. D. James Rompas
15	14 Mei 2023 14 May 2023	MR.0015/ BOD/05/2023	Pembahasan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah skema *In-Organic* Discussion on In-Organic scheme Problem Financing Settlement	1. Rijani Tirtoso 2. Kasan 3. Arus Gunawan 4. D. James Rompas

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Minutes No.	Agenda	Peserta Participants
16	24 Mei 2023 24 May 2023	MR.0016/ BOD/05/2023	1. Laporan hasil penilaian Tata Kelola LPEI Tahun 2022 oleh BPKP 2. Laporan manajemen *letter*, penilaian kepatuhan dan pengendalian internal oleh KAP RSM 3. Agenda Lain-lain 4. Ratifikasi 1. Report on the results of the assessment of Indonesia Eximbank's Governance in 2022 by BPKP. 2. Letter management report, compliance and internal control assessment by KAP RSM 3. Other Agenda 4. Ratification	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Arsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas
17	8 Juni 2023 8 June 2023	MR.0017/ BOD/06/2023	1. Laporan keuangan Mei 2023 2. Laporan agenda strategis LPEI 3. Laporan tingkat kesehatan LPEI TW I 2023 4. Laporan rencana tindak lanjut surat OJK perihal *Cyber Risk* 5. Agenda lain-lain 1. Financial Statements of May 2023 2. Indonesia Eximbank strategic agenda report 3. Indonesia Eximbank health level report TW I 2023 4. Follow-up plan report on OJK's letter regarding Cyber Risk 5. Other agenda	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Arsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim 6. D. James Rompas
18	26 Juni 2023 26 June 2023	MR.0018/ BOD/06/2023	1. Laporan hasil evaluasi terhadap pemberian jasa audit oleh KAP RSM atas Laporan Keuangan LPEI 2022 2. Pemaparan Staf Ahli Dewan Direktur: a. Skema PKE dan Progres PKE TW I 2023 b. Progres Kemenkeu Satu 3. Agenda Terbatas 1. Report on the results of the evaluation of the provision of audit services by KAP RSM on the Indonesia Eximbank Financial Statements 2022. 2. Presentation of Expert Staff of the Board of Directors: a. PKE Scheme and PKE Progress TW I 2023 b. Progress of Ministry of Finance One 3. Limited Agenda	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Arsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. Felia Salim
19	10 Juli 2023 10 July 2023	MR.0020/ BOD/07/2023	1. Persetujuan Laporan Keuangan 30 Juni 2023 2. Persetujuan atas rekomendasi KRN 3. Agenda Lain-lain 1. Approval of 30 June 2023 Financial Statements 2. Approval of KRN recommendation 3. Other Agenda	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. Felia Salim 7. D. James Rompas
20	28 Juli 2023 28 July 2023	MR.0021/ BOD/07/2023	1. Persetujuan Rancangan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dan RKAT Semester 1 2023 2. Persetujuan Hapus Buku Aktiva Tetap Kantor Cabang 3. Laporan Keputusan Rabom atas RKAT PT IEB Prima Aset 4. Laporan Surat Menkeu - Pertanggungjawaban Kinerja LPEI 2022 5. Laporan Progres Hapus Buku 2023 6. Laporan Kegiatan Jasa Konsultasi 2023 7. Laporan *Project* Nawasena 1. Approval of the Draft Report on the Supervision of Business Plan and RKAT Semester 1 2023 2. Approval to write-off Fixed Assets Book of Branch Office 3. Rabom Decision Report on RKAT PT IEB Prima Aset 4. Report on Minister of Finance Letter - Accountability of Indonesia Eximbank's Performance 2022 5. 2023 Write-off Progress Report 6. Advisory Services Activity Report 2023 7. Project Nawasena Report	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. D. James Rompas
21	10 Agustus 2023 10 August 2023	MR.0022/ BOD/08/2023	1. Persetujuan Laporan Kinerja Keuangan bulan Juli 2023 2. Persetujuan Hapus Buku 1. Approval of Financial Performance Report for July 2023 2. Approval of Writing-off	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. D. James Rompas

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Minutes No.	Agenda	Peserta Participants
22	25 Agustus 2023 25 August 2023	MR.0023/ BOD/08/2023	1. Usulan Aktivitas yang Memerlukan Persetujuan DD terkait Anak Perusahaan 2. Usulan Perubahan Komposisi Pengurus PT IEB Prima Aset 3. Usulan Persetujuan Perpanjangan Masa Jabatan Plt. DMR 4. Penetapan Keanggotaan Komite DD 5. Usulan Persetujuan Penunjukan KAP Tahun Buku 2023 6. Laporan Tingkat Kesehatan Triwulan II 2023 7. Agenda Lain-Lain 1. Proposed Activities Requiring DD Approval related to Subsidiaries 2. Proposed Change of Management Composition of PT IEB Prima Aset 3. Proposed Approval to Extend the Term of Office of Plt. DMR 4. Determination of DD Committee Membership 5. Proposed Approval of the Appointment of KAP for the Financial Year 2023 6. Health Level Report for the Second Quarter of 2023 7. Other Agenda	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. D. James Rompas
23	8 September 2023 8 September 2023	MR.0024/ BOD/09/2023	1. Kinerja Keuangan Bulan Agustus 2023 2. Persetujuan Regularisasi Penurunan *Sky Signage* LPEI 3. Persetujuan Pelaksanaan *In-organic Initiatives* Tahap I – Aset *Inbreng* 4. Penetapan Keanggotaan Komite Dewan Direktur 1. Financial Performance of August 2023 2. Approval of Indonesia Eximbank's Sky Signage Drop Regularization 3. Approval of the Implementation of In-organic Initiatives Phase I - Asset Inbreng 4. Determination of Board of Directors Committee Membership	1. Rijani Tirtoso 2. Arus Gunawan 3. D. James Rompas
24	27 September 2023 27 September 2023	MR.0025/ BOD/09/2023	1. Penetapan Keanggotaan Komite Dewan Direktur 2. Pembagian Tugas dan Rencana Kerja Dewan Direktur 3. Pengajuan Persetujuan Rancangan PDD tentang Kebijakan Tata Kelola yang Baik LPEI 4. Pengajuan Persetujuan Rancangan PDD tentang Komite Integrasi 5. *Kick-off Meeting* Laporan Keuangan Konsolidasi LPEI 6. Laporan Hasil Pemeriksaan Tata Kelola Penurunan *Sky Signage* 7. Agenda Lain-lain 1. Determination of the Board of Directors Committee Membership 2. Division of Tasks and Work Plan of the Board of Directors 3. Submission of Approval of Draft PDD on Indonesia Eximbank Good Governance Policy. 4. Submission of Approval of Draft PDD on Integration Committee 5. Kick-off Meeting of LPEI Consolidated Financial Statements 6. Sky Signage Decline Governance Audit Report 7. Other Agenda	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Arsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas
25	6 Oktober 2023 6 October 2023	MR.0026/ BOD/10/2023	1. *Kick Off Project* Nawasena 2. Kinerja Keuangan per September 2023 1. Kick Off Project Nawasena 2. Financial Performance as of September 2023	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Arsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas
26	27 Oktober 2023 27 October 2023	MR.0027/ BOD/10/2023	1. Persetujuan Rancangan RKAT dan Program Kemitraan LPEI 2024 2. Rancangan *Risk Appetite Statement* 2024 3. Laporan *Monitoring* Pembiayaan Bermasalah periode September 4. Laporan Profil Risiko Triwulan III 2023 5. Agenda Terbatas 1. Approval of the Draft RKAT and Partnership Program of Indonesia Eximbank 2024 2. Draft Risk Appetite Statement 2024 3. Monitoring Report on Non-Performing Financing for September period 4. Risk Profile Report for the third quarter of 2023 5. Limited Agenda	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Arsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas
27	8 November 2023 8 November 2023	MR.0028/ BOD/11/2023	1. Persetujuan tindak lanjut rencana aset *inbreng* 2. Persetujuan laporan keuangan Oktober 2023 1. Approval of the follow-up to the inbreng asset plan 2. Approval of the October 2023 financial Statements	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Arsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas
28	20 November 2023 20 November 2023	MR.0029/ BOD/11/2023	Laporan Progres Rencana *Inbreng* Inbreng Plan Progress Report	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Arsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Minutes No.	Agenda	Peserta Participants
29	28 November 2023 28 November 2023	MR.0030/ BOD/11/2023	1. Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2024 2. Persetujuan Rencana Bisnis tahun 2024 1. Approval of the 2024 Sustainable Finance Action Plan 2. Approval of the 2024 Business Plan	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Arsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas
30	4 Desember 2023 4 December 2023	MR.0031/ BOD/12/2023	1. Penetapan Fasilitas Kesehatan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana 2. Pembahasan Progres aksi lembaga aset *inbreng* 3. Laporan Keuangan 30 November 2023 1. Determination of Health Facilities for the Board of Directors and Managing Director 2. Discussion on the progress of the inbreng asset institution's 3. Financial Statements of 30 November 2023	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. D. James Rompas
31	9 Desember 2023 9 December 2023	MR.0032/ BOD/12/2023	Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Calon Direktur Pelaksana Fit and Proper Test for Selection of Managing Director	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. D. James Rompas
32	13 Desember 2023 13 December 2023	MR.0033/ BOD/12/2023	Laporan Hasil Pertemuan dengan Direktur KND tentang rancangan RKAT 2024 Report on the results of the meeting with the KND Director regarding the 2024 RKAT plan	1. Rijani Tirtoso 2. Suminto 3. Yon Arsal 4. Kasan 5. Arus Gunawan 6. D. James Rompas
33	15 Desember 2023 15 December 2023	MR.0034/ BOD/12/2023	Persiapan *Exit Meeting* OJK OJK Exit Meeting Preparation	1. Rijani Tirtos 2. Yon Arsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas
34	17 Desember 2023 17 December 2023	MR.0035/ BOD/12/2023	1. Persetujuan Perubahan Prognosa Keuangan LPEI Tahun 2024 2. Persetujuan Sasaran Perbaikan Kualitas Aset 3. Persetujuan Perubahan Rancangan RKAT 2024 1. Approval of Changes to Indonesia Eximbank Financial Prognosis for 2024 2. Approval of Asset Quality Improvement Targets 3. Approval of changes to the 2024 RKAT draft	1. Rijani Tirtoso 2. Yon Arsal 3. Kasan 4. Arus Gunawan 5. D. James Rompas

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN DIREKTUR

Pada tahun 2023, Dewan Direktur mengikuti program-program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengawasi penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2023, the Board of Directors participated in training programs aimed at enhancing their competencies in overseeing the implementation of the Institution's business activities, as outlined in the following table:

Nama Dewan Direktur Board of Director Name	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Judul Pelatihan Name of Training	Tempat Pelaksanaan Venue	Penyelenggara Organizer
Rijani Tirtoso	20-25 November 2023	*Export Credits* 2040*: Future priorities for an evolving landscape, The ASEAN Energy Business Forum*	Australia	Asian Exim Bank Forum
Kasan	20-25 November 2023	*Export Credits* 2040*: Future priorities for an evolving landscape, The ASEAN Energy Business Forum*	Australia	Asian Exim Bank Forum
Suminto	2-6 Oktober 2023 2-6 October 2023	*Climate Change Policy: Economics and Politics*	Daring Online	Harvard Kennedy School
Felia Salim	1 Juni 2023 1 June 2023	*ESG Reporting 'From Desire to Reality Seminar'*	Daring Online	German Chamber of Commerce

PROGRAM PENGENALAN DEWAN DIREKTUR BARU

LPEI memiliki dan menjalankan program orientasi (*Induction Program*) bagi anggota Dewan Direktur yang baru diangkat dengan tujuan agar seluruh anggota LPEI dapat lebih saling mengenal dan memiliki semangat yang sama untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagai satu tim yang solid dan efektif.

Program ini sekaligus memberikan gambaran kepada anggota Dewan Direktur baru mengenai aktivitas bisnis, rencana Lembaga ke depan, pedoman kerja dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Dewan Direktur. Melalui program orientasi ini, anggota Dewan Direktur baru diharapkan dapat bekerja selaras dengan organ Tata Kelola LPEI yang lain.

Pada tanggal 5 Juni 2023, LPEI telah menyelenggarakan Program Orientasi ini sehubungan dengan adanya anggota Dewan Direktur yang baru diangkat. Materi pembelajaran yang diberikan kepada Dewan Direktur baru, antara lain meliputi:

1. Pengenalan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur dan Organ Pendukung Dewan Direktur;
2. Pengenalan Lembaga dalam kaitannya dengan pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik di Lembaga;
3. Budaya lembaga, visi dan misi lembaga dan strategi dan prioritas Lembaga.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKTUR TAHUN 2023

Dewan Direktur bertanggung jawab merumuskan dan menetapkan serta melakukan pengawasan terhadap operasional LPEI. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan melalui pelaksanaan rapat Dewan Direktur yang diwajibkan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. Rapat Dewan Direktur menjadi wadah untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis manajemen di LPEI sekaligus memastikan ditindaklanjutinya hasil temuan audit.

Adapun selama tahun 2023, Rapat Dewan Direktur telah diselenggarakan 34 kali atau secara rata-rata sekitar dua kali per bulan. Rapat Dewan Direktur diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan/atau pengambilan keputusan. Arahan dan keputusan Dewan Direktur didokumentasikan dalam Risalah Rapat Dewan Direktur. Pelaksanaan rapat dengan pencapaian rata-

INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW BOARD OF DIRECTORS

Indonesia Eximbank conducts an induction program for newly appointed members of the Board of Directors with the aim of fostering mutual understanding among all Indonesia Eximbank members and cultivating a shared commitment to fulfilling the oversight function as a cohesive and effective team.

This program provides an overview for new Board of Directors members about Indonesia Eximbank business activities, future plans, work guidelines, and other responsibilities. Through this orientation program, new Board of Directors members are expected to harmonize their work with other governance organs within Indonesia Eximbank.

On 5 June 2023, Indonesia Eximbank organized this Orientation Program in light of the appointment of new Board of Directors members. Learning materials provided to new Board of Directors included:

1. Introduction to the duties and responsibilities of the Board of Directors and its supporting organs;
2. Introduction to the Institution in relation to the implementation of good Governance principles within the Institution;
3. Corporate Value, vision and mission, and Strategy & priority of the Institution

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023

The Board of Directors is responsible for formulating, determining, and supervising the operations of Indonesia Eximbank. One type of supervision is carried out through the implementation of Board of Director meetings, which must be held at least once per month. The Board of Directors meeting is a forum for monitoring and evaluating management's strategic policies at Indonesia Eximbank, as well as ensuring follow-up on audit findings.

In 2023, there were 34 meetings of the Board of Directors, which corresponds to an average of twice per month. Board of Director meetings are conducted with the purpose of making decisions and/or providing oversight. The Board of Directors directives and decisions are recorded in the Minutes of the Board of Directors Meeting. The Board of Directors of Indonesia Eximbank demonstrates its commitment

rata lebih dari 75% menunjukkan keseriusan Dewan Direktur dalam melakukan tugas pengawasan kepada LPEI.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN DIREKTUR

Prosedur Penilaian

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan Direktur telah membentuk beberapa komite pendukung, yaitu: 1) Komite Audit; 2) Komite Pemantau Risiko; serta 3) Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur. Dewan Direktur wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. Indikator yang digunakan dalam memberikan penilaian terhadap kinerja komite-komite meliputi kontribusi komite serta pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Direktur. Dewan Direktur mengukur kinerja komite sesuai dengan prosedur dan standar penilaian sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja masing-masing komite.

Kriteria Penilaian

Indikator yang digunakan dalam memberikan penilaian terhadap kinerja komite-komite, antara lain meliputi kontribusi komite dan pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Dewan Direktur termasuk pelaksanaan rapat internal masing-masing komite.

Hasil Penilaian

Berikut adalah hasil penilaian kinerja komite-komite di bawah Dewan Direktur pada tahun 2023:

1. Komite Audit:
   Dewan Direktur menilai bahwa Komite Audit LPEI telah membantu terlaksananya fungsi pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal, serta melakukan supervisi, memberikan konsultasi, dan berkolaborasi dalam menanggapi tindak lanjut temuan auditor eksternal. Lebih dari itu, Komite Audit juga telah memfasilitasi peningkatan kapabilitas dan kapasitas fungsi Internal Audit dan meningkatkan kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu). Selama tahun 2023, komite audit telah menyelenggarakan 29 kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata seluruh anggota adalah 89%.

to its supervisory responsibilities through the implementation of meetings that have an average rate exceeding 75%.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Assessment Procedure

To support the effectiveness of task implementation and oversight functions, the Board of Directors has formed several supporting committees, namely: 1) the Audit Committee; 2) the Risk Monitoring Committee; and 3) the Nomination and Remuneration Committee.

The appointment of the three committee members is carried out by the Executive Director based on the decision of the Board of Directors meeting. The Board of Directors must ensure that the formed committees have been carrying out their tasks effectively. To assess this, the Board of Directors has implemented specific evaluation procedures and standards for committee members, aligning with the guidelines and operational protocols of each committee.

Assessment Criteria

Indicators used in assessing the performance of the committees include, among others, the contribution of the committees and the implementation of tasks assigned by the Board of Directors, including the implementation of internal meetings of each committee.

Assessment Results

Following is the assessment results of the performance oft he committees under the Board of Directors in 2023:

1. Audit Committee:
   The Board of Directors assessed that the Indonesia Eximbank Audit Committee has assisted in overseeing the effectiveness of the internal control system, as well as supervising, consulting, and collaborating in response to the follow-up of external auditor findings. Moreover, the Audit Committee has facilitated the enhancement of capabilities and capacities of the Internal Audit function and improved cooperation with the Inspectorate General of the Ministry of Finance. During 2023, this committee also held 29 meetings with an attendance rate of 89%.

2. Komite Pemantau Risiko:
   Pada tahun 2023, Komite Pemantau Risiko sudah membantu Dewan Direktur dalam mengawasi fungsi manajemen risiko di LPEI khususnya untuk memastikan telah terselenggaranya prinsip Tata Kelola yang baik dan tersedianya sistem pengendalian risiko yang memadai. Komite ini juga bertugas memantau kecukupan kebijakan dan prosedur risiko, terutama terhadap 2 (dua) risiko utama yaitu risiko pembiayaan dan operasional, seperti *monitoring* proses kredit, risiko integritas data serta optimalisasi alokasi *resources*. Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 19 kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 99%.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi:
   Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam membantu Dewan Direktur terkait penentuan kebijakan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana, serta sudah berkontribusi dalam mendukung penguatan organisasi termasuk memperbaiki kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM). Selama tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan 5 kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 100%.

KOMISARIS INDEPENDEN

LPEI adalah lembaga keuangan yang memiliki karakteristik khusus (*sui generis*) yang pendiriannya mengacu pada UU No. 2/2009. UU tersebut secara jelas menetapkan bahwa Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI. Dalam UU LPEI, tidak ada terminologi Komisaris Independen. Anggota Dewan Direktur LPEI berasal dari unsur pejabat dari instansi atau lembaga dan unsur dari dalam atau dari luar LPEI.

Menurut UU LPEI, seseorang dapat dipilih dan diangkat sebagai Dewan Direktur LPEI apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:
a. Warga negara Indonesia;
b. Mampu melakukan perbuatan hukum;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Memiliki integritas, kepemimpinan, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi;

2. Risk Monitoring Committee:
   In 2023, the Risk Monitoring Committee assisted the Board of Directors in overseeing the risk management function at Indonesia Eximbank, especially to ensure the implementation of good governance principles and the availability of adequate risk control systems. The committee is also tasked with monitoring the adequacy of risk policies and procedures, especially regarding 2 (two) main risks: financing and operational risks, such as monitoring credit processes, data integrity risks, and resource allocation optimization. During 2023, the Risk Monitoring Committee held 19 meetings with an attendance rate of 99%.

3. Remuneration and Nomination Committee:
   The Remuneration and Nomination Committee has performed its duties well in assisting the Board of Directors in determining remuneration policies and nominations for members of the Board of Directors and Executive Directors, and has contributed to strengthening the organization, including improving Human Resources (HR) policies. During 2023, the Remuneration and Nomination Committee held 5 meetings with an attendance rate of 100%.

INDEPENDENT COMMISSIONER

Indonesia Eximbank is a financial institution with special characteristics (sui generis) whose establishment refers to Act No. 2/2009. The law stipulates that the Board of Directors is the sole organ of Indonesia Eximbank. In the law, there is no terminology for an independent commissioner. Members of the Indonesia Eximbank Board of Directors come from elements of officials from agencies or institutions and executives from internal and external Indonesia Eximbank.

According to the Law, a person could be elected and appointed as Board of Directors of Indonesia Eximbank if fulfilling the following requirements:
a. Indonesian citizen;
b. Able to carry out legal actions;
c. Physically and mentally healthy;
d. Has integrity, leadership, good behaviour, and high dedication;

e. Tidak termasuk daftar tidak lulus, baik yang disusun oleh otoritas perbankan maupun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan;
f. Tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
g. Memiliki keahlian dan pengalaman di salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup kegiatan LPEI; dan
h. Tidak pernah dinyatakan pailit.

e. Not included in the list of failures, either compiled by the banking authority or the capital market authority and financial institutions;
f. Never committed a criminal act in the banking and economic sector;
g. Having expertise and experience in one of the fields under the scope of the Company's activities; and
h. Have never been declared bankrupt.

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

Executive Director and Managing Directors

Sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI, disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional LPEI menjadi tanggung jawab penuh Direktur Eksekutif. Selain itu, Direktur Eksekutif juga bertugas mewakili LPEI baik di dalam, maupun di luar pengadilan. Menurut pasal 25 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2009, Direktur Eksekutif LPEI didefinisikan sebagai salah satu anggota Dewan Direktur yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Eksekutif.

In accordance with Article 29 paragraph (1) of Act No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank, it is stated that the implementation of Indonesia Eximbank operational activities is the full responsibility of the Executive Director. Additionally, the Executive Director is also tasked with representing Indonesia Eximbank both in and out of court. According to Article 25 paragraph (5) of Act No. 2 of 2009, the Executive Director of Indonesia Eximbank is defined as one of the members of the Board of Directors appointed by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia to serve as the Chairman of the Board of Directors and concurrently as Executive Director.

DASAR HUKUM

Penetapan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI didasarkan pada beberapa peraturan, antara lain:

1. Peraturan Internal
   a. Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0003/PDD/04/2023 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI.
   b. PDE No. 0041/PDE/11/2011 tentang Pedoman Tata Kerja Direktur Pelaksana.

2. Peraturan Eksternal
   a. UU No. 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
   b. PMK No. 58/PMK.06/2020 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.
   c. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
   d. POJK No. 9/2022 Tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

LEGAL BASIS

The establishment of Indonesia Eximbank's Executive Director and Managing Director refers to:

1. Internal Regulations
   a. Board of Directors Regulation (PDD) No. 0007/PDD/12/2020 concerning Indonesia Eximbank Board of Directors Charter.
   b. PDE No. 0041/PDE/11/2011 concerning Managing Director Charter.

2. External Regulations
   a. Act No. 2 of 2009 on Indonesia Eximbank.
   b. PMK No. 58/PMK.06/2020 on Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank.
   c. PMK No. 208/PMK.06/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank.
   d. POJK No. 9/POJK.05/2022 concerning Supervision of Indonesia Eximbank.

PEDOMAN TATA KERJA DIREKTUR EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Ketua Dewan Direktur yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif LPEI berpedoman pada aturan kerja yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0003/PDD/04/2023 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur. Pedoman dan aturan kerja tersebut mengatur berbagai hal antara lain tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, jam kerja, etika kerja, ketentuan pelaksanaan rapat, dan pelaksanaan tugas terkait rapat pengesahan.

WORKING GUIDELINES OF THE EXECUTIVE DIRECTOR

In carrying out his duties and responsibilities, the Chairman of the Board of Directors, who also serves as the Executive Director of Indonesia Eximbank, adheres to the working rules outlined in Board of Directors Regulation (PDD) No. 0003/PDD/04/2023 regarding the Guidelines for the Board of Directors' Work Procedures. These guidelines and working rules regulate various aspects, including tasks, authorities, obligations, responsibilities, division of work, working hours, work ethics, meeting implementation provisions, and tasks related to ratification meetings.

KOMPOSISI DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

Sebagaimana diatur pada pasal 16 dan pasal 17 PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari Direktur Eksekutif LPEI dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana. Direktur Pelaksana LPEI adalah pejabat eksekutif yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan operasional sehari-hari LPEI. Secara struktur organisasi, Direktur Pelaksana berada di bawah Dewan Direktur dan bertugas untuk menjalankan keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Direktur.

Sebagai pemimpin eksekutif, Direktur Pelaksana memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mengawasi berbagai kegiatan operasional LPEI. Tugas utama Direktur Pelaksana mencakup implementasi kebijakan, pengelolaan sumber daya, pemenuhan target kinerja, serta menjaga agar LPEI dapat beroperasi sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 2023, tidak terjadi perubahan pada komposisi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI sehingga susunannya tetap sebagai berikut:

COMPOSITION OF THE EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR

As regulated in Articles 16 and 17 of Minister of Finance Regulation No. 208/2021 regarding Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of the Indonesian Export Financing Agency, in carrying out daily operational tasks, the Executive Director of Indonesia Eximbank is assisted by up to 5 (five) Managing Directors. Managing Directors of Indonesia Eximbank are executive officers responsible for the management and implementation of Indonesia Eximbank daily operational policies. Structurally, Managing Directors are subordinate to the Board of Directors and are tasked with implementing decisions and policies established by the Board of Directors.

As executive leaders, Managing Directors have the responsibility to coordinate and supervise various operational activities of Indonesia Eximbank. The primary duties of Managing Directors include policy implementation, resource management, performance target fulfillment, and ensuring that Indonesia Eximbank operates in accordance with established regulations and objectives.

Throughout 2023, there were no changes in the composition of the Executive Director and Managing Directors of Indonesia Eximbank; thus, their arrangement remains as follows:

Komposisi Direktur Eksekutif Periode 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023
Composition of the Executive Directors for the Period of 1 January 2023 - 31 December 2023

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Legal Basis of Appointment
Rijani Tirtoso	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.06/2021 Decree of the Minister of Finance No. 552/KMK.06/2021
Dikdik Yustandi	Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Financing	Keputusan Dewan Direktur No. 0010/KDD/08/2019 Decree of the Board of Directors No. 0010/KDD/08/2019
Maqin Norhadi	Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Keputusan Dewan Direktur No. 0004/KDD/04/2021 Decree of the Board of Directors No. 0004/KDD/04/2021
Agus Windiarto	Direktur Pelaksana Bidang Keuangan dan Operasional Managing Director of Finance and Operations	Keputusan Dewan Direktur No. 0012/KDD/08/2019 Decree of the Board of Directors No. 0012/KDD/08/2019
	Plt. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit Acting Managing Director of Credit & Risk Management	Keputusan Dewan Direktur No. 0003/KDD/12/2022 Decree of the Board of Directors No. 0003/KDD/12/2022
Chesna Fizetty Anwar	Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director of Institutional Relations	Keputusan Dewan Direktur No. 0014/KDD/08/2019 Decree of the Board of Directors No. 0014/KDD/08/2019

PEMBAGIAN TUGAS DIREKTUR EKSEKUTIF & DIREKTUR PELAKSANA

Dalam rangka akuntabilitas, LPEI telah menetapkan pembidangan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing anggota Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana sebagaimana telah ditetapkan dalam 0009/KDE/02/2022, yaitu sebagai berikut:

DIVISION OF DUTIES BETWEEN EXECUTIVE DIRECTORS & MANAGING DIRECTORS

In order to ensure accountability, Indonesia Eximbank has established clear divisions of tasks and responsibilities for each member of the Executive Directors and Managing Directors, as stipulated in 0009/KDE/02/2022, as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Bidang Tugas** Scope of Duties
Rijani Tirtoso	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	• Membidangi seluruh unit kerja di bawah Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan. • Membidangi seluruh unit kerja di bawah Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis. • Membidangi seluruh unit kerja di bawah Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan. • Membidangi seluruh unit kerja di bawah Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit. • Membidangi seluruh unit kerja di bawah Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional. • Membidangi seluruh unit kerja di bawah Head of Compliance, Human Resources and Transformation Office. • Membidangi seluruh unit kerja di bawah Head of Audit. • In charge of all work units under the Managing Director of Financing • In charge of all work units under the Managing Director of Business Development • In charge of all work units under the Managing Director of Institutional Relations • In charge of all work units under the Managing Director of Credit & Risk Management • In charge of all work units under the Managing Director of Finance & Operations • Responsible for all work units under the Head of Compliance, HR & Transformation Office • In charge of all work units under the Head of Audit
	Head of Compliance, Human Resources and Transformation Office	• Membidangi Unit Kerja Transformation Office and Culture. • Membidangi Unit Kerja Human Resources Business Partner, Organization Development & Recruitment. • Membidangi Unit Kerja Human Resources Service and People Development. • In charge of the Transformation Office & Culture Unit • In charge of the Human Resources Business Partner Unit, Organization Development & Recruitment • In charge of Human Resources Service & People Development Unit
	Head of Audit	• Membidangi Unit Kerja Reguler Audit. • Membidangi Unit Kerja Special Audit. • Membidangi Unit Kerja QA, Follow Up and Methodology. • In charge of the Audit Regular Unit • In charge of the Special Audit Unit • In charge of QA Unit, Follow Up & Methodology
Dikdik Yustandi	Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	• Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah Head of Wilayah. • Membidangi Unit Kerja Bisnis Korporasi I. • Membidangi Unit Kerja Bisnis Korporasi II. • Membidangi Unit Kerja Bisnis BUMN. • Membidangi Unit Kerja UMKM. • In charge of all work units under the Head of Regional • In charge of Corporate Business Unit I • In charge of Corporate Business Unit II • In charge of BUMN Business Unit • In charge of MSME Unit
	Head of Wilayah Head of Regional	• Membidangi Unit Kerja Kantor Wilayah I. • Membidangi Unit Kerja Kantor Wilayah II. • Membidangi Unit Kerja Kantor Wilayah III. • In charge of Regional Office Unit I • In charge of Regional Office Unit II • In charge of Regional Office Unit III

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Scope of Duties
Maqin Norhadi	Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	• Membidangi Unit Kerja yang berada di bawah Head of Penjaminan & Asuransi. • Membidangi Unit Kerja Syariah. • Membidangi Unit Kerja Trade Finance. • Membidangi Unit Kerja Program Investasi Pemerintah. • Membidangi Unit Kerja Penugasan Khusus. • In charge of the Work Unit under the Head of Guarantee & Insurance • In charge of Sharia Unit • In charge of Trade Finance Unit • In charge of the Government Investment Program Unit • In charge of the Special Assignment Unit
	Head of Penjaminan dan Asuransi Head of Guarantee & Insurance	• Membidangi Unit Kerja Penjaminan. • Membidangi Unit Kerja Asuransi. • In charge of the Guarantee Unit • In charge of the Insurance Unit
Agus Windiarto	Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, dan Teknologi Informasi Managing Director of Finance, Operations, and IT	• Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah Head of Operasional & TI. • Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah Head of Keuangan & Perencanaan Strategis. • Membidangi Unit Kerja Pengadaan dan Umum. • In charge of all work units under the Head of Operations & IT. • In charge of all work units under the Head of Finance & Strategic Planning. • In charge of the Procurement and General Work Unit.
	Head of Keuangan dan Perencanaan Strategis. Head of Finance & Strategic Planning	• Membidangi Unit Kerja Finance. • Membidangi Unit Kerja Strategic and Corporate Planning. • Membidangi Unit Kerja MIS and Business Finance. • Membidangi Unit Kerja Middle Office Treasury. • In charge of Finance Unit • In charge of Strategic & Corporate Planning Unit • In charge of MIS & Business Finance Unit • In charge of the Treasury Middle Office Unit
	Head of Operasional dan Teknologi Informasi Head of Operations and Information Technology	• Membidangi Unit Kerja Teknologi Informasi. • Membidangi Unit Kerja Operasional. • Membidangi Unit Kerja Operasional Penjaminan. • Membidangi Unit Kerja Bisnis Operasional & Supervisi Bisnis. • In charge of all work units under the Head of Operations & IT • In charge of all units under the Head of Finance & Strategic Planning • In charge of Procurement and General Unit
	Plt. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit Acting Managing Director of Credit & Risk Management	• Membidangi Unit Kerja Credit Reviewer I. • Membidangi Unit Kerja Credit Reviewer II. • Membidangi Unit Kerja Analisa Risiko Penjaminan. • Membidangi Unit Kerja Pengembangan Produk. • Membidangi Unit Kerja Manajemen Risiko dan Portofolio. • Membidangi Unit Kerja Pemegang Limit Individu. • Membidangi Unit Kerja Kebijakan & Prosedur. • In charge of Credit Reviewer I Unit • In charge of Credit Reviewer II Unit • In charge of the Guarantee Risk Analysis Unit • In charge of the Product Development Unit • In charge of Risk & Portfolio Management Unit • In charge of the work unit of individual limit holders • In charge of the Policy & Procedure Unit
Chesna F. Anwar	Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia Managing Director of Corporate Secretary, Compliance, and HC	• Membidangi Unit Kerja Jasa Konsultasi. • Membidangi Unit Kerja Riset & Pengembangan. • Membidangi Unit Kerja Financial Institution and Treasury. • Membidangi Unit Kerja Communication and Stakeholder Engagement. • Membidangi Unit Kerja Sekretariat Lembaga. • Membidangi Unit Kerja Hukum. • Responsible for Advisory Unit • In charge of Research & Development Unit • In charge of Financial Institution & Treasury Unit • In charge of Communication & Stakeholder Engagement Unit • In charge of the Work Unit of Corporate Secretary • In charge of the Legal Unit

INDEPENDENSI DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

Direktur Eksekutif dan seluruh anggota Direktur Pelaksana LPEI dipastikan telah memenuhi aspek independensi yang dibuktikan melalui penandatanganan Surat Pernyataan Independensi yang mencakup aspek-aspek berikut ini:

INDEPENDENCE OF EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR

The Executive Director and all members of the Managing Directors of Indonesia Eximbank have fulfilled the aspect of independence, as evidenced by signing the Independence Statement Letter, which includes the following aspects:

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (untuk Dewan Direktur) dan berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri (untuk Direktur Pelaksana).
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.
5. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain (untuk Direktur Pelaksana).

1. Do not have share ownership in other companies that have the potential to cause a conflict of interest (for the Board of Directors) and are domiciled both at home and abroad (for the Managing Director).
2. Has no financial relationship and family relationship with the Board of Directors and the Managing Director, either directly or indirectly.
3. Will not use the Indonesia Eximbank for personal, family or party interests that can harm or reduce the profits of the Indonesia Eximbank, either directly or indirectly.
4. Not taking and/or receiving personal benefits from the Indonesia Eximbank other than remuneration and other facilities that have been determined by the Minister of Finance or other applicable provisions.
5. Not holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers in other companies and/or institutions (for the Managing Director).

Dewan Direktur / Board of Directors

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Surat Pernyataan

Yang berlanda tangan di bawah ini :----------

Nama : Arus Gunawan
Jabatan : Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain (baik yang berkedudukan di dalam dan/ atau di luar negeri) yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam kedudukan sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.----------
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.-
3. Tidak akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.----------
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.----------
5. Tidak memberikan, menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari Nasabah, rekanan, pejabat/pegawai Pemerintah, atau pihak ketiga lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.---

Jakarta, 30 Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan

Arus Gunawan

Indonesia Eximbank

RAPAT *BOARD OF MANAGEMENT*

Kebijakan Pelaksanaan Rapat

Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana bertugas melakukan operasional LPEI. Koordinasi antar-organ tersebut dilakukan secara intens dan sistematis melalui pelaksanaan sejumlah rapat rutin, di antaranya rapat Manajemen setidaknya satu kali dalam satu minggu, rapat ALCO satu kali dalam satu bulan, dan rapat bulanan kinerja satu kali dalam satu bulan. Selain wajib menyelenggarakan rapat dengan Direktur Pelaksana, Direktur Eksekutif juga mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Direktur untuk memastikan operasional LPEI berjalan dengan baik.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota

Selama tahun 2023, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah menyelenggarakan sebanyak 73 (Tujuh puluh tiga) kali rapat dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan dan isu-isu strategis, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

BOARD OF MANAGEMENT MEETING

Meeting Policy

The Executive Director receives assistance from the Managing Directors in managing the operations of Indonesia Eximbank. Intensive and systematic coordination among these entities is achieved through the organization of regular meetings, such as weekly sessions with the Management, monthly ALCO gatherings, and performance evaluations held monthly. In addition to holding meetings with the Managing Directors, the Executive Director also conducts coordination meetings with the Board of Directors to ensure the smooth operation of Indonesia Eximbank.

Meeting Frequency and Attendance Rate of Members

During the year 2023, the Executive Director and the Managing Directors held a total of 73 (seventy three) meetings to make decisions on policies and strategic issues, with the attendance rates of each member as described in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Persentase Kehadiran** Percentage of Attendance
Rijani Tirtoso	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	73	72	99%
Dikdik Yustandi	Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	73	72	99%
Maqin Norhadi	Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	73	70	96%
Agus Windiarto	Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, dan Teknologi Informasi Managing Director of Finance, Operations, and IT	73	71	97%
	Plt. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko dan Kredit Act. Managing Director of Risk and Credit Management	73	71	97%
Chesna F. Anwar	Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia Managing Director of Corporate Secretary, Compliance, and HC	73	71	97%

Agenda Rapat

Arahan dan keputusan yang ditetapkan dalam rapat *Board of Management* telah dituangkan dalam risalah rapat dengan uraian sebagai berikut:

Meeting Agenda

The directions and decisions established in the Board of Management meeting have been documented in the meeting minutes with the following description:

No	**Nomor Risalah** Minutes No.	**Tanggal** Date	**Agenda Pembahasan** Agenda	**Kehadiran** Attendance
1	MR.0001/ MDI/01/2023	3 Januari 2023 3 January 2023	Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 Financial Statements as of December 31, 2022	Seluruh Manajemen, kecuali Maqin U Norhadi berhalangan hadir karena cuti All Management, except Maqin U Norhadi, absent due to leave

No	Nomor Risalah Minutes No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Attendance
2	MR.0002/ MDI/01/2023	10 Januari 2023 10 January 2023	Rancangan Laporan Keuangan *in house* per 31 Desember 2022 Draft in-house Financial Statements as of 31 December 2022	Seluruh Manajemen All Management
3	MR.0004/ MDI/01/2023	17 Januari 2023 17 January 2023	1. Laporan Operasional 2. Permohonan persetujuan pengadaan 1. Operational Report 2. Request for procurement approval	Seluruh Manajemen, kecuali Dikdik Yustandi berhalangan hadir karena cuti All Management, except Dikdik Yustandi, absent due to leave
4	MR.0005/ MDI/01/2023	18 Januari 2023 18 January 2023	Pembahasan Pembiayaan Financing Discussion	Seluruh Manajemen All Management
5	MR.0006/ MDI/01/2023	24 Januari 2023 24 January 2023	1. Laporan Pembiayaan 2. Persetujuan prinsip pengadaan 3. Usulan Operasional 4. *Update* hasil audit laporan keuangan 5. Manajemen Risiko 6. Tata kelola dukumen 1. Financing Report 2. Approval of procurement principle 3. Operational Proposal 4. Update on financial statement audit results 5. Risk Management 6. Document governance	Seluruh manajemen All Management
6	MR.0007/ MDI/01/2023	31 Januari 2023 31 January 2023	1. Usulan revisi PDE 2. *Update* rencana pembiayaan 3. *Annual report* 4. *Action plan* dalam mendukung bisnis LPEI 5. Agenda kunjungan kerja Kementerian Keuangan tahun 2022 6. *Financial update* 1. PDE revision proposal 2. Update on financing plan 3. Annual report 4. Action plan in supporting Indonesia Eximbank business 5. Ministry of Finance working visit agenda in 2022 6. Financial update	Seluruh manajemen All Management
7	MR.0009/ MDI/02/2023	7 Februari 2023 7 February 2023	1. Usulan *update* perubahan internal 2. Usulan *update* manajemen risiko 3. Persetujuan Operasional 4. Laporan tingkat Kesehatan TW IV tahun 2022 5. Persetujuan prinsip pengadaan 6. Persetujuan model seragam Lembaga 1. Proposed internal change update 2. Proposed risk management update 3. Operational approval 4. Health level report TW IV year 2022 5. Approval of procurement principle 6. Approval of Institutional uniform model	Seluruh Manajemen, kecuali I Nyoman Gede Suarja berhalangan hadir karena cuti All Management, except I Nyoman Gede Suarja, absent due to leave.
8	MR.0010/ MDI/02/2023	13 Februari 2023 13 Februari 2023	Laporan Keuangan 2022 Financial Report 2022	Seluruh manajemen All Management
9	MR.0011/ MDI/02/2023	14 Februari 2023 14 February 2023	1. Kinerja Financial 2. Strategi Komunikasi Laporan Keuangan 2022 1. Financial Performance 2. Communication Strategy of 2022 Financial Report	Seluruh manajemen All Management
10	MR.0012/ MDI/02/2023	16 Februari 2023 16 February 2023	Tindak lanjut RDD Follow-up RDD	Seluruh manajemen All Management
11	MR.0013/ MDI/02/2023	21 Februari 2023 21 February 2023	1. Usulan *update* produk 2. Ijin Prinsip Pengadaan 3. Laporan Profil Risiko 4. Laporan Penanganan NPL 5. Persetujuan Perubahan PDE SPO 6. Laporan PDO 7. Financial *Highlights* 8. Ratifikasi, Agenda Lembaga, dan Laporan Pelaksanaan Komite 1. Proposed product updates 2. Procurement Principle License 3. Risk Profile Report 4. NPL Handling Report 5. Approval of PDE SPO Changes 6. PDO Report 7. Financial Highlights 8. Ratification, Agency Agenda, and Committee Implementation Report	Seluruh manajemen All Management

No	Nomor Risalah Minutes No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Attendance
12	MR.0014/ MDI/02/2023	22 Februari 2023 22February 2023	Bedah Neraca dan *Income Statement* 2022 2022 Balance Sheet and Income Statement Review	Seluruh manajemen All Management
13	MR.0015/ MDI/02/2023	23 Februari 2023 23 February 2023	Strategi Komunikasi Communication Strategy	Seluruh manajemen All Management
14	MR.0016/ MDI/02/2023	28 Februari 2023 28 February 2023	1. Izin Prinsip Pengadaan 2. Pemaparan Evaluasi Eximbank *World of Working* (XWoW) 3. Laporan Progres Pengembangan *Website* 4. Persetujuan *Sponsorship* 5. Laporan Skema Pembiayaan 6. Laporan Progres Proses Hukum 7. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan 1. Principle Procurement Permit 2. Eximbank World of Working (XWoW) Evaluation Presentation 3. Website Development Progress Report 4. Sponsorship Approval 5. Financing Scheme Report 6. Legal Process Progress Report 7. Financial Statement Audit Report	Seluruh manajemen All Management
15	MR.0017/ MDI/03/2023	2 Maret 2023 2 March 2023	Persetujuan Rancangan Revisi RKAT 2023 dan RJP Approval of Draft Revision of RKAT 2023 and RJP	Seluruh manajemen All Management
16	MR.0018/ MDI/03/2023	7 Maret 2023 7 March 2023	1. Izin Prinsip Relokasi 2. Pemaparan konsep pengelolaan risiko operasional 3. Pemaparan opini legal dan pengambilan keputusan pembiayaan 4. Laporan *Past Due Obligation* (PDO) 5. *Financial Highlight* 6. Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan LPEI 2022 1. Principle Relocation Permit 2. Presentation of operational risk management concept 3. Legal opinion and financing decision making 4. Past Due Obligation (PDO) report 5. Financial Highlight 6. Audit Report of Indonesia Eximbank Financial Statements 2022	Seluruh manajemen All Management
17	MR.0019/ MDI/03/2023	14 Maret 2023 14 March 2023	1. Usulan Strategi Pembiayaan 2. Izin Prinsip Pengadaan; 3. Strategi Komunikasi dan Penjadwalan Agenda Laporan Keuangan, Rencana Publikasi dan Audiens 4. Laporan *Past Due Obligation* (PDO) 5. *Financial Highlight* 1. Proposed Financing Strategy 2. Procurement Principle License; 3. Communication Strategy and Agenda Scheduling Financial Report, Publication Plan and Audience 4. Past Due Obligation (PDO) Report 5. Financial Highlight	Seluruh manajemen All Management
18	MR.0020/ MDI/03/2023	21 Maret 2023 21 March 2023	1. Persetujuan Rancangan PDE 2. SPP Penugasan Khusus 3. Agenda Lembaga 4. Izin Prinsip Penyedia Jasa Asuransi Kesehatan 5. Rencana Penerbitan PUB Obligasi/Sukuk Semester I/2023 6. Agenda Lembaga 1. PDE Draft Approval 2. Special Assignment SPP 3. Agency Agenda 4. Principle License for Health Insurance Service Provider 5. Issuance Plan of PUB Bonds/Sukuk Semester I/2023 6. Institution Agenda	Seluruh manajemen All Management

No	Nomor Risalah Minutes No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Attendance
19	MR.0021/ MDI/03/2023	28 Maret 2023 28 March 2023	1. Permohonan Ijin Prinsip Pengadaan 2. Usulan Sentralisasi Pengelolaan Dokumen Pembiayaan 3. Pemaparan Risiko Konsentrasi dan Limit *Top Ten Obligor* 4. Laporan Implementasi Rencana Jangka Panjang 5. Laporan *Past Due Obligation* 6. Laporan Hasil Pertemuan dengan Jamdatun 1. Application for Procurement Principle License 2. Proposal for Centralization of Financing Document Management 3. Exposure of Concentration Risk and Top Ten Obligor Limit 4. Long Term Plan Implementation Report 5. Past Due Obligation Report 6. Meeting Report with Jamdatun	Seluruh manajemen All Management
20	MR.0022/ MDI/04/2023	4 April 2023 4 April 2023	1. Izin Prinsip Pengadaan 2. Strategi Komunikasi Kerja Sama Media 3. Laporan Status Operasional 4. Laporan PT IEB Prima Aset 5. PDO *Report Update* *6. Financial Highlight* 7. Ratifikasi Rabom 1. Principle Procurement Permit 2. Communication Strategy for Media Cooperation 3. Operational Status Report 4. PT IEB Prima Aset Report 5. PDO Report Update 6. Financial Highlight 7. Rabom Ratification	Seluruh Manajemen All Management
21	MR.0023/ MDI/04/2023	11 April 2023 11 April 2023	1. Laporan Tindak Lanjut Operasional 2. Izin Prinsip Operasional 3. Usulan Penyesuaian Limit *Top 10 Obligor* 4. Pengkinian *Portfolio Guideline* LPEI 2023 5. Laporan Operasional 6. Pemaparan Pengembangan Konsep *Channel* Digitalisasi 7. Laporan Hasil Audit IKU 2022 8. Tindak Lanjut Pengadaan 9. Pemaparan Konsep *Management Letter* 1. Operational Follow-up Report 2. Operational Principle Permit 3. Proposed Adjustment of Top 10 Obligor Limit 4. Indonesia Eximbank 2023 Portfolio Guideline Update 5. Operational Report 6. Exposure of Digitalization Channel Concept Development 7. Audit Report on KPI 2022 8. Procurement Follow-up 9. Presentation of Management Letter Concept	Seluruh Manajemen All Management
22	MR.0024/ MDI/04/2023	13 April 2023 13 April 2023	*1. Leader Exchange Program* Kemenkeu Satu 2. Penyusunan Buku Putih LPEI 3. Penyelenggaraan *Kick Off* Penyusunan Buku Putih LPEI 1. Leader Exchange Program Kemenkeu Satu 2. Preparation of Indonesia Eximbank White Book 3. Kick Off the Preparation of Indonesia Eximbank White Book	Seluruh manajemen All Management

No	Nomor Risalah Minutes No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Attendance
23	MR.0025/ MDI/04/2023	18 April 2023 18 April 2023	1. Pengkinian SPP *Trade Finance* 2. Skema Imbal Dagang 3. Persetujuan operasional 4. Laporan Progres dan *Action Plan* Pinjaman Pemerintah 5. Laporan Progres dan *Action Plan* Jamdatun *6. Regular Update* 7. Persiapan Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri untuk *Area Operational* dan IT *8. Follow Up* Hasil Rapat Pra RUPS 9. Laporan Profil Risiko TW I *10. Financial Highlight* *11. Update* Penyusunan *Annual Report* Tahun 2022 12. Izin Prinsip Pengadaan 1. Trade Finance SPP Update 2. Trade Fee Scheme 3. Operational approval 4. Government Loan Progress Report and Action Plan 5. Jamdatun Progress Report and Action Plan 6. Regular Update 7. Eid Al-Fitr Long Holiday Preparation for Operational and IT Area 8. Follow Up of Pre-GMS Meeting Results 9. Risk Profile Report Q1 10. Financial Highlight 11. Update on the Preparation of 2022 Annual Report 12. Principle License for Procurement	Seluruh manajemen All Management
24	MR.0026/ MDI/05/2023	2 Mei 2023 2 May 2023	1. Implementasi RJP 2. Laporan Tindak Lanjut Penerbitan Surat Tanah Terlantar HGU *3. Sideline Meeting* ICIEC - IsDB *Group Annual Meeting* 2023 di Jeddah 4. Laporan Hasil Rekonsiliasi Kewajiban Jatuh Tempo Debitur periode 19 - 28 April 2023 5. Laporan *Project* 6. Laporan *Past Due Obligation* (PDO) *7. Financial Highlight* 8. Laporan Penanganan Penyelesaian Pembiayaan *9. Kick Off* Implementasi RJP 10. Agenda Lembaga 1. Implementation of RJP 2. Follow-up Report on the Issuance of HGU Abandoned Land Letter 3. Sideline Meeting ICIEC - IsDB Group Annual Meeting 2023 in Jeddah 4. Report on Reconciliation of Debtors' Matured Obligations for the period of 19 - 28 April 2023. 5. Project Report 6. Past Due Obligation (PDO) Report 7. Financial Highlight 8. Financing Settlement Handling Report 9. RJP Implementation Kick Off 10. Indonesia Eximbank Agenda	Seluruh manajemen All Management
25	MR.0027/ MDI/05/2023	9 Mei 2023 9 May 2023	1. Persetujuan Konsep Kampanye Komunikasi Berani Mendunia *2. Progress Report* Konsultan Strategi Komunikasi LPEI 3. Laporan Skema Penyelesaian NPL 4. Permohonan Izin Prinsip Pengadaan 5. Strategi Perbaikan OPEX 6. Laporan dan Usulan Program Kerja INS 7. Permohonan Izin Prinsip Pengadaan 1. Approval of 'Berani Mendunia' Communication Campaign Concept 2. Progress Report of Indonesia Eximbank Communication Strategy Consultant 3. Report on NPL Settlement Scheme 4. Application for Procurement Principle License 5. OPEX Improvement Strategy 6. INS Work Program Report and Proposal 7. Application for Procurement Principle License	Seluruh manajemen All Management
26	MR.0028/ MDI/05/2023	10 Mei 2023 10 May 2023	Masukan/*Input Project* Input Project	Seluruh manajemen All Management

No	Nomor Risalah Minutes No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Attendance
27	MR.0029/ MDI/05/2023	16 Mei 2023 16 May 2023	1. Pemaparan poin-poin *Management Letter*, PSA 62, dan Laporan Pengendalian Internal 2. Izin prinsip pengadaan 3. Laporan *Project* Operasionalisasi 4. Laporan Komite IT 5. Laporan IT *Security* 6. Laporan Progres Implementasi RJP 7. Pembahasan *Time Line* Pengajuan RPP 8. Progres *update* Platform Digital Ekspor Indonesia 9. *Market place project* proposal 10. MPO Ketentuan Pelaksanaan Penugasan Investasi Pemerintah 11. Skema Imbal Dagang pada Program PKE Trade Finance 12. Pengajuan Cuti anggota Rabom 13. *Update* SPO Strategi Anti *Fraud* 14. PDE tentang SPO Kepatuhan 15. PDE *Risk Control Self Assesment* 16. Laporan Komite GRC 17. Usulan Pembentukan *Designated Compliance* & *Operational Risk Officer* (DCORO) 18. *Update* Ratifikasi 19. *Financial Highlight* 1. Presentation of the points of the Management Letter, PSA 62, and Internal Control Report 2. Procurement principle license 3. Operationalization Project Report 4. IT Committee Report 5. IT Security Report 6. RJP Implementation Progress Report 7. Discussion of Time Line for RPP Submission 8. Indonesia Export Digital Platform update progress 9. Market place project proposal 10. MPO Provisions on Implementation of Government Investment Assignment 11. Trade Return Scheme on PKE Trade Finance Program 12. Leave of absence for Rabom members 13. Update on Anti Fraud Strategy SPO 14. PDE on Compliance SPO 15. PDE on Risk Control Self-Assessment 16. GRC Committee Report 17. Proposed Establishment of Designated Compliance & Operational Risk Officer (DCORO) 18. Ratification Update 19. Financial Highlight	Seluruh manajemen All Management
28	MR.0030/ MDI/05/2023	22 Mei 2023 22 May 2023	Pembahasan Pembiayaan Financing Discussion	Seluruh manajemen All Management
29	MR.0031/ MDI/05/2023	23 Mei 2023 23 May 2023	1. Permohonan Izin Prinsip Pengadaan 2. Tindak Lanjut Rencana Penyewaan Ruang Kantor LPEI 3. Laporan Pembiayaan 4. Laporan Tingkat Kesehatan LPEI TWI 5. Pemaparan *Red Flag Mechanism* 6. Ratifikasi Rabom, Laporan Komite dan Agenda Lembaga 7. PDO *Report Update* 8. *Financial Highlight* 9. Komite Pengadaan I 10. Protokol PT IPA 11. Pembahasan materi presentasi rapat dengan DJKN tentang Perbaikan aset melalui skema *in organic*. 1. Application for Principle Procurement License 2. Follow-up of Indonesia Eximbank Office Space Leasing Plan 3. Financing Report 4. Indonesia Eximbank TWI Health Level Report 5. Red Flag Mechanism Exposure 6. Ratification of Rabom, Committee Report and Institution Agenda 7. PDO Report Update 8. Financial Highlight 9. Procurement Committee I 10. PT IPA Protocol 11. Discussion of presentation material for the meeting with DJKN regarding asset improvement through in organic scheme.	Seluruh Manajemen, kecuali Wahyu Wibowo berhalangan hadir karena cuti All Management, except Wahyu Wibowo, absent due to leave

No	Nomor Risalah Minutes No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Attendance
30	MR.0032/ MDI/05/2023	30 Mei 2023 30 May 2023	1. Permohonan Izin Prinsip Pengadaan 2. Permohonan Persetujuan Rencana Hapus Buku 2023 3. Permohonan Persetujuan Konsep *Kick Off* Program Internalisasi *Operational Risk, Environment Social Governance* (ESG) dan *Governance Risk & Compliance* (GRC) 4. Laporan Hasil Penilaian Tata Kelola Lembaga Tahun 2022 5. Penetapan Anggota Tim DCORO DPN 1. Application for Principle Procurement License 2. Application for Approval of 2023 Clear Book Plan 3. Request for Approval of the Kick Off Concept of Operational Risk, Environment Social Governance (ESG) and Governance Risk & Compliance (GRC) Internalization Program 4. Report on the Assessment Results of Institutional Governance in 2022 5. Determination of DCORO DPN Team Members	Seluruh Manajemen All Management
31	MR.0033/ MDI/06/2023	6 Juni 2023 6 June 2023	1. Usulan Formulasi *Scoring* Penilaian Kinerja Vendor 2. Laporan *Timeline* Pengadaan 3. Permohonan Perubahan Ruang Lingkup Jasa KAP 4. Laporan Kinerja Keuangan Mei 2023 5. Laporan status Pembiayaan 6. Izin Prinsip Pengadaan Sistem 7. Usulan Tindak Lanjut Surat OJK perihal *Cyber Risk* 8. Agenda Lembaga 9. Laporan Progres Proyek Strategis Lembaga 1. Proposed Vendor Performance Assessment Scoring Formulation 2. Procurement Timeline Report 3. Request for Change in the Scope of KAP Services 4. Financial Performance Report May 2023 5. Financing status report 6. System Procurement Principle License 7. Proposed Follow-up of OJK Letter regarding Cyber Risk 8. Institutional Agenda 9. Institutional Strategic Project Progress Report	Seluruh Manajemen, kecuali Wahyu Wibowo berhalangan hadir karena cuti tahunan All Management, except Wahyu Wibowo, absent due to leave
32	MR.0034/ MDI/06/2023	13 Juni 2023 13 June 2023	1. Laporan Rencana Penjualan/Penyewaan Ruang Kantor *Prosperity* 2. Laporan Progres, *Design* dan *Layout* Renovasi KP 3. Komite Kebijakan *4. Stakeholeders Engagement* 5. Evaluasi KAP RSM atas Audit 2022 6. Persetujuan Izin Prinsip Audit Keuangan Tahun Buku 2023 1. Prosperity Office Space Sales/Lease Plan Report 2. Progress Report, Design and Layout of KP Renovation 3. Policy Committee 4. Stakeholeders Engagement 5. KAP RSM Evaluation of 2022 Audit 6. Approval of Principle License for Financial Audit for Financial Year 2023	Seluruh Manajemen All Management
33	MR.0035/ MDI/06/2023	20 Juni 2023 20 June 2023	1. Laporan Komite Anak Perusahaan *2. Update Stream Business* Nawasena *Project* 3. Izin Prinsip Pengadaan 4. Laporan Persiapan *Seminar Risk Management* 5. Usulan SPO Operasional Komite Perusahaan 1. Subsidiary Committee Report 2. Update on Stream Business Nawasena Project 3. Procurement Principle License 4. Risk Management Seminar Preparation Report 5. Proposed Company Committee Operational SPO	Seluruh Manajemen, kecuali Agus Windiarto berhalangan hadir karena cuti tahunan All Management, except Agus Windiarto, absent due to annual leave
34	MR.0036/ MDI/06/2023	27 Juni 2023 27 June 2023	Izin Prinsip Pengadaan Peremajaan Perangkat Pendukung *Data Center* HO Principle Permit for Procurement of Data Center Supporting Device Rejuvenation HO	Seluruh Manajemen, kecuali Anwar Harsono berhalangan hadir karena cuti tahunan, I Nyoman Gede Suarja yang berhalangan hadir karena Izin, Anton Herdianto yang berhalangan hadir karena dinas luar kota. All Management, except Anwar Harsono absent due to annual leave, I Nyoman Gede Suarja absent due to permission, Anton Herdianto absent due to out-of-town duty.

No	Nomor Risalah Minutes No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Attendance
35	MR.0038/ MDI/07/2023	10 Juli 2023 10 July 2023	Persetujuan Laporan Keuangan 30 Juni 2023 Approval of Financial Statements June 30, 2023	Seluruh Manajemen All Management
36	MR.0039/ MDI/07/2023	11 Juli 2023 11 July 2023	1. Laporan Hasil Penilaian BPKP 2. Laporan Perkembangan Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah 3. Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan 4. Laporan Pelaksanaan *Benchmarking Operational Risk Management* (ORM) *System* 5. Laporan Hasil Penilaian KJPP 6. Usulan Izin Prinsip Pengadaan 7. Komite Produk 8. Laporan *Past Due Obligation* (PDO) 9. Komite Kebijakan 1. BPKP Assessment Report 2. Progress Report on Troubled Financing Management 3. Risk Profile & Health Level Report 4. Operational Risk Management (ORM) System Benchmarking Implementation Report 5. KJPP Assessment Report 6. Proposed Procurement Principle License 7. Product Committee 8. Past Due Obligation (PDO) Report 9. Policy Committee	Seluruh Manajemen All Management
37	MR.0040/ MDI/07/2023	14 Juli 2023 14 July 2023	*Cascading* IKU Lembaga tahun 2023 Cascading the Institution's KPIs by 2023	Seluruh Manajemen, kecuali Titiek Setyowati berhalangan hadir karena cuti. All Management, except Titiek Setyowati are absent due to leave.
38	MR.0041/ MDI/07/2023	15 Juli 2023 15 July 2023	*Update Project* Nawasena Project Nawasena Update	Seluruh Manajemen, kecuali Chesna F. Anwar berhalangan hadir karena dinas luar kota, Titiek Setyowati berhalangan hadir karena cuti. All Management, except Chesna F. Anwar absent due to out-of-town duty, Titiek Setyowati due to annual leave.
39	MR.0042/ MDI/07/2023	18 Juli 2023 18 July 2023	1. Progres Pertukaran Data Kemenkeu Satu 2. Rencana Penyusunan Index Kompleksita Ekspor Indonesia 3. Izin Prinsip Pengadaan 4. Laporan Relokasi dan Renovasi KP 5. Penanganan NPL TW II tahun 2023 6. Laporan Realisasi & Pengawasan RKAT Semester I tahun 2023 7. Finalisasi *Cascading* IKU Lembaga *8. Calendar* Lembaga 1. Progress of Kemenkeu Satu Data Exchange 2. Indonesia Export Complexity Index Development Plan 3. Procurement Principle License 4. KP Relocation and Renovation Report 5. NPL handling Q2 of 2023 6. RKAT Realization & Supervision Report Semester I of 2023 7. Finalization of Institution's KPI Cascading 8. Institution Calendar	Seluruh Manajemen All Management
40	MR.0044/ MDI/07/2023	25 Juli 2023 25 July 2023	1. Persetujuan Konsep Perayaan HUT LPEI ke – 14 2. Evaluasi XWOW Pasca PPKM 3. Persetujuan rancangan PMI tahun 2023 4. Presentasi DigiAsia 5. Izin Prinsip Pengadaan 6. Laporan dan Tindak Lanjut Mekanisme *Scoring Vendor* 7. Laporan Progres PDU 8. Penambahan Modal PT IEB Prima Aset 9. Rancangan RKAT PT IPA 10. Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan LPEI TW II Thn 2023 *11. Update* Persiapan Implementasi DHE	Seluruh Manajemen, kecuali I Nyoman Gede Suarja berhalangan hadir karena cuti All Management, except I Nyoman Gede absent due to annual leave

No	Nomor Risalah Minutes No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Attendance
			1. Approval of the Concept of Indonesia Eximbank 14th Anniversary Celebration 2. Post PPKM XWOW Evaluation 3. Approval of PMI draft year 2023 4. DigiAsia presentation 5. Principle Procurement License 6. Vendor Scoring Mechanism Report and Follow-up 7. PDU Progress Report 8. Capital Increase of PT IEB Prima Aset 9. Draft RKAT of PT IPA 10. Indonesia Eximbank Risk Profile and Health Level Report Q2 of 2023 11. Update on DHE Implementation Preparation	
41	MR.0045/ MDI/07/2023	27 Juli 2023 27 July 2023	1. *Update* Persiapan Implementasi DHE 2. Laporan Kegiatan Jasa Konsultasi 2023 1. Update on DHE Implementation Preparation 2. Advisory Services Activity Report 2023	Seluruh Manajemen, kecuali I Nyoman Gede Suarja berhalangan hadir karena cuti All Management, except I Nyoman Gede absent due to annual leave
42	MR.0046/ MDI/08/2023	1 Agustus 2023 1 August 2023	1. Kebijakan Pengunduran Diri Pegawai LPEI 2. Permohonan Izin Prinsip Pengadaan 3. Komite Pengadaan I 4. Persetujuan Partisipasi LPEI dalam Trade Expo Indonesia (TEI) tahun 2023 5. Laporan Progres Penerapan ESG dan Proposal ESG Kelembagaan 6. Laporan dan Tindak Laniut Persiapan Implementasi DHE di LPEI 7. Usulan Rangkaian Agenda HUT LPEI 8. Usulan Logo Berani Mendunia 1. Indonesia Eximbank Employee Resignation Policy 2. Application for Procurement Principle License 3. Procurement Committee I 4. Approval of Indonesia Eximbank's Participation in Trade Expo Indonesia (TEI) in 2023 5. ESG Implementation Progress Report and Institutional ESG Proposal 6. Report and Follow-up on the Preparation of DHE Implementation at Indonesia Eximbank 7. Proposed Indonesia Eximbank Anniversary Agenda Series 8. Berani Mendunia Logo Proposal	Seluruh Manajemen All Management
43	MR.0048/ MDI/08/2023	8 Agustus 2023 8 August 2023	1. Persetujuan Prinsip KJPP 2. Persetujuan Prinsip Penunjukan Konsultan 3. Persetujuan Prinsip Perpanjangan Jasa Media *Monitoring* 4. Persetujuan Prinsip Perpanjangan Sewa Ruang Kantor Batam 5. Persetujuan Prinsip Perpanjangan Sewa Ruang Kantor Balikpapan 6. Persetujuan *Go Live New Corporate Website* LPEI 7. Keputusan Komite Pengadaan I 8. *Financial Report* 9. PDO *Report update* 10. Laporan Progres *Pilot Project* Kerja Sama Pengembangan *Platform Digital Export* 11. Komite Produk 12. Usulan Perayaan HUT RI ke 78 13. Laporan SDM Semester 1- 2023 1. Approval in Principle of KJPP 2. Approval in Principle of Consultant Appointment 3. Approval in Principle of Extension of Media Monitoring Services 4. Approval in Principle of Extension of Lease of Batam Office Space 5. Approval in Principle of Extension of Office Space Lease Balikpapan 6. Approval of Go Live New Corporate Website of Indonesia Eximbank 7. Decision of Procurement Committee I 8. Financial Report 9. PDO Report update 10. Pilot Project Progress Report on Cooperation in Digital Export Platform Development 11. Product Committee 12. Proposed 78th Indonesian Independence Day Celebration 13. HR Report Semester 1- 2023	Seluruh Manajemen All Management

No	Nomor Risalah Minutes No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Attendance
44	MR.0049/ MDI/08/2023	15 Agustus 2023 15 August 2023	1. Laporan Komite Pengadaan 2. Laporan Kinerja 3. *Financial Highlight* 4. Laporan Progres Persiapan HUT LPEI 5. Laporan Rencana Pelaksanaan Upacara HUT RI ke 78 1. Procurement Committee Report 2. Performance Report 3. Financial Highlight 4. Progress Report on Indonesia Eximbank Anniversary Preparation 5. Report on the Implementation Plan of the 78th Indonesian Independence Day Ceremony	Seluruh manajemen All Management
45	MR.0050/ MDI/08/2023	22 Agustus 2023 22 August 2023	1. Laporan Progres Pengadaan 2. Penempatan dan Pemanfaatan DHE SDA 3. *Update* Operasional 4. Penyusunan RKAT 2024 1. Procurement Progress Report 2. Placement and Utilization of DHE SDA 3. Operational Update 4. Preparation of 2024 RKAT	Seluruh manajemen All Management
46	MR.0051/ MDI/08/2023	25 Agustus 2023 25 August 2023	Pembahasan manajerial anak perusahaan Managerial discussion of subsidiary	Seluruh Manajemen, kecuali Agus Windiarto Suarja berhalangan hadir karena cuti, Chesna F. Anwar berhalangan hadir karena cuti. All Management, except Agus Windiarto, Chesna F. Anwar absent due to annual leave
47	MR.0052/ MDI/08/2023	29 Agustus 2023 29 August 2023	1. Usulan Sturuktur Organisasi 2. Usulan Pengadaan 3. Laporan PDO 4. *Finansial Highlight* 5. Usulan penyusunan SPO 6. Persetujuan Perubahan PDE 7. Laporan dan Tindak Lanjut Penyelenggaraan Harmoni Day, HUT LPEI ke – 14 1. Proposed Organizational Structure 2. Proposed Procurement 3. PDO Report 4. Financial Highlight 5. Proposed SPO preparation 6. Approval of PDE Amendment 7. Report and Follow-up of Harmony Day, Indonesia Eximbank 14th Anniversary	Seluruh Manajemen, kecuali Riyani Tirtoso berhalangan hadir karena izin, Anton Herdianto berhalangan hadir karena cuti. All Management, except Riyani Tirtoso absent due to permission, Anton Herdianto absent due to annual leave.
48	MR.0053/ MDI/09/2023	5 September 2023	Reguralisasi terkait Pengelolaan Aktiva Tetap Regulations related to Fixed Assets Management	Seluruh Manajemen, kecuali Anton Herdianto berhalangan hadir karena cuti All Management, except Anton Herdianto absent due to annual leave
49	MR.0054/ MDI/09/2023	6 September 2023	1. Izin Prinsip Pengadaan 2. Laporan Hasil *Benchmark* 3. *Financial Highlight* 4. PDO *report update* 1. Principle Procurement Permit 2. Benchmark result report 3. Financial Highlight 4. PDO report update	Seluruh Manajemen, kecuali Anton Herdianto berhalangan hadir karena cuti All Management, except Anton Herdianto absent due to annual leave
50	MR.0055/ MDI/09/2023	12 September 2023	1. Laporan PDO 2. Laporan Pengelolaan Aset 3. Mekanisme Kerja Baru 4. Pemaparan RKAT 2024 1. PDO Report 2. Asset Management Report 3. New Working Mechanism 4. Presentation of 2024 RKAT	Seluruh Manajemen All Management
51	MR.0056/ MDI/09/2023	19 September 2023	1. Persetujuan Prinsip Pengadaan 2. Manajemen Risiko 3. Laporan Keuangan 1. Approval in Principle of Procurement 2. Risk Management 3. Financial Report	Seluruh Manajemen All Management

No	Nomor Risalah Minutes No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Attendance
52	MR.0057/ MDI/09/2023	20 September 2023	Persetujuan Prinsip Pengadaan Approval in Principle of Procurement	Seluruh Manajemen, kecuali Anton Herdianto berhalangan hadir karena cuti All Management, except Anton Herdianto absent due to annual leave
53	MR.0058/ MDI/09/2023	26 September 2023	1. Laporan Operasional 2. Komite Kebijakan 3. Laporan Komite Pengadaan 1. Operational Report 2. Policy Committee 3. Procurement Committee Report	Seluruh Manajemen, kecuali Titiek Setyowati berhalangan hadir karena cuti All Management, except Titiek Setyowati absent due to annual leave
54	MR.0059/ MDI/10/2023	3 Oktober 2023 3 October 2023	1. Pemaparan Strategi Komunikasi 2. Laporan dan Tindak Lanjut Partisipasi LPEI dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2023 *3. Early Warning Detection Tools* *4. Financial Update* 5. Pemaparan Metodologi ALCO 6. Pemaparan Nawasena 7. Persetujuan Prinsip Pengadaan 1. Communication Strategy Exposure 2. Report and Follow-up on LPEI's Participation in Trade Expo Indonesia (TEI) 2023 3. Early Warning Detection Tools 4. Financial Update 5. Exposure of ALCO Methodology 6. Nawasena Exposure 7. Approval of Procurement Principle	Seluruh Manajemen All Management
55	MR.0060/ MDI/10/2023	10 Oktober 2023 10 October 2023	1. Laporan Pengelolaan Aset 2. Laporan Pengadaan 3. Komite dan Agenda Lembaga 1. Asset Management Report 2. Procurement Report 3. Committee and Institution Agenda	Seluruh Manajemen, kecuali Anton Herdianto berhalangan hadir karena izin All Management, except Anton Herdianto absent due to permission
56	MR.0061/ MDI/10/2023	17 Oktober 2023 17 October 2023	1. Profil Risiko *2. Update* Komite Produk 3. Laporan Trade Expo Indonesia ke-38 4. RKAT Lembaga tahun 2024 5. Komite ALCO 1. Risk Profile 2. Product Committee Update 3. 38th Trade Expo Indonesia Report 4. Institution RKAT for 2024 5. ALCO Committee	Seluruh Manajemen All Management
57	MR.0062/ MDI/10/2023	19 Oktober 2023 19 October 2023	1. Persetujuan Laporan Realisasi TW III 2023 2. Persetujuan Kerangka Rancangan RKAT 2024 1. Approval of the Realization Report Q3 of 2023 2. Approval of the 2024 RKAT Draft Framework	Seluruh Manajemen All Management
58	MR.0063/ MDI/10/2023	24 Oktober 2023 24 October 2023	1. Komite Pembiayaan I 2. Perubahan Operasional 3. Laporan *Past Due Obligation* (PDO) 4. Usulan *Risk Appetite Statement* LPEI 2024 5. Komite Produk 1. Financing Committee I 2. Operational Changes 3. Past Due Obligation (PDO) Report 4. Proposed Risk Appetite Statement Indonesia Eximbank 2024 5. Product Committee	Seluruh Manajemen All Management
59	MR.0064/ MDI/10/2023	31 Oktober 2023 31 October 2023	*1. Update* Nawasena *2. Update* Pembiayaan 3. Strategi Pengelolaan Aset 1. Nawasena Update 2. Financing Update 3. Asset Management Strategy	Seluruh Manajemen All Management
60	MR.0065/ MDI/11/2023	3 November 2023	1. Laporan dan *Update* Operasional 1. Operational Reports and Updates	Seluruh Manajemen All Management
61	MR.0066/ MDI/11/2023	7 November 2023	1. Strategi Komunikasi 2. Laporan Publikasi Bulanan Eximbank 3. Laporan Kinerja Keuangan posisi Oktober 2023 1. Communication Strategy 2. Eximbank Monthly Publication Report 3. Financial Performance Report of October 2023	Seluruh Manajemen, kecuali Maqin U Norhadi berhalangan hadir karena cuti All Management, except Maqin U Norhadi absent due to annual leave

No	Nomor Risalah Minutes No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Agenda	Kehadiran Attendance
62	MR.0067/ MDI/11/2023	8 November 2023	*Update* Pertemuan dengan Direktur IV, Inspektorat Jenderal Kemenkeu Update on Meeting with Director IV, Inspectorate General of the Ministry of Finance	Seluruh Manajemen, kecuali Maqin U Norhadi berhalangan hadir karena cuti All Management, except Maqin U Norhadi absent due to annual leave
63	MR.0068/ MDI/11/2023	14 November 2023	1. Komite Pengadaan 2. Pengelolaan Aset 3. *Operational Risk Management* (ORM) 1. Procurement Committee 2. Asset Management 3. Operational Risk Management (ORM)	Seluruh Manajemen All Management
64	MR.0069/ MDI/11/2023	17 November 2023	Pengelolaan Aset Asset Management	Seluruh Manajemen All Management
65	MR.0070/ MDI/11/2023	21 November 2023	1. Persetujuan Prinsip Pengadaan 2. Pembahasan Strategi Bisnis 3. *Risk Maturity Survey* 4. *Calendar* Lembaga 5. Komite Pengadaan I 1. Approval in Principle of Procurement 2. Discussion of Business Strategy 3. Risk Maturity Survey 4. Institution Calendar 5. Procurement Committee I	Seluruh Manajemen All Management
66	MR.0071/ MDI/11/2023	29 November 2023	1. Laporan *Project* Nawasena 2. *Financial Highlight* 3. Persetujuan Prinsip Pengadaan 4. Komite Pembiayaan I 5. Komite Kebijakan 1. Nawasena Project Report 2. Financial Highlight 3. Approval of Procurement Principle 4. Financing Committee I 5. Policy Committee	Seluruh manajemen All Management
67	MR.0072/ MDI/11/2023	30 November 2023	Pembahasan Operasional Operational Discussion	Seluruh manajemen All Management
68	MR.0073/ MDI/12/2023	4 Desember 2023 4 December 2023	Laporan Keuangan November 2023 November 2023 Financial Report	Seluruh manajemen All Management
69	MR.0074/ MDI/12/2023	5 Desember 2023 5 December 2023	1. Persetujuan Rancangan PDE 2. SPO Manajemen Risiko *Enterprise* 3. Agenda Lembaga 1. PDE Draft Approval 2. Enterprise Risk Management SPO 3. Institution Agenda	Seluruh manajemen All Management
70	MR.0075/ MDI/12/2023	12 Desember 2023 12 December 2023	1. *PDO Report Update* 2. Komite Pengadaan 3. Komite Kebijakan 4. *Update* Pembiayaan 1. PDO Report Update 2. Procurement Committee 3. Policy Committee 4. Financing Update	Seluruh manajemen All Management
71	MR.0077/ MDI/12/2023	19 Desember 2023 19 December 2023	1. Laporan Pengelolaan Pembiayaan 2. Persetujuan Prinsip Pengadaan 3. Laporan SDM 1. Financing Management Report 2. Approval of Procurement Principle 3. HR Report	Seluruh manajemen All Management
72	MR.0078/ MDI/12/2023	21 Desember 2023 21 December 2023	Tindak lanjut Rapat Koordinasi dengan DJKN Follow-up Coordination Meeting with DJKN	Seluruh manajemen All Management
73	MR.0079/ MDI/12/2023	30 Desember 2023 30 December 2023	Laporan Progres dan Persetujuan Projekct Nawasena Nawasena Project Progress Report and Approval	Seluruh manajemen All Management

PROGRAM PENGEMBANGAN DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA

Pada tahun 2023, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas setiap anggota dalam memimpin Lembaga, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

DEVELOPMENT PROGRAM OF THE EXECUTIVE DIRECTORS AND MANAGING DIRECTORS

In 2023, the Executive Director and the Managing Directors participated in various training and competency development activities aimed at enhancing the abilities and capabilities of each member in leading the institution, as outlined in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Tanggal Pelaksanaan** Date	**Judul Pelatihan** Title of Training
Rijani Tirtoso	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Chairman of the Board of Directors concurrently Executive Director	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap With The 4 Disciplines of Execution for* BOM
		9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi
Agus Windiarto	Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, dan Teknologi Informasi Managing Director of Finance, Operations, and IT	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap With The 4 Disciplines of Execution for* BOM
		9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi
Chesna F. Anwar	Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia Managing Director of Corporate Secretary, Compliance, and HC	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap With The 4 Disciplines of Execution for* BOM
		9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi
Maqin U. Norhadi	Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap With The 4 Disciplines of Execution for* BOM
		9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi
Dikdik Yustandi	Direktur Pelaksana Bisnis Managing Director of Business	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap With The 4 Disciplines of Execution for* BOM
		9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi

PROGRAM PENGENALAN DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA BARU

LPEI memiliki dan menjalankan program orientasi (*Induction Program*) bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana yang baru diangkat dengan tujuan agar seluruh anggota dapat lebih saling mengenal dan memiliki visi yang sama dalam memimpin jalannya kegiatan operasional Lembaga.

Program ini sekaligus memberikan gambaran kepada Direktur Eksekutif dan anggota Direktur Pelaksana baru mengenai aktivitas bisnis, rencana Lembaga ke depan, pedoman kerja dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana. Melalui program orientasi ini, anggota Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana baru diharapkan dapat bekerja selaras dengan organ Tata Kelola LPEI yang lain.

INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW EXECUTIVE DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR

Indonesia Eximbank conducts an Induction Program for newly appointed Executive Directors and Managing Directors with the aim of fostering mutual understanding among all members and aligning them with a common vision for leading the institution's operational activities.

This program provides insights into the institution's business activities, future plans, work guidelines, and other responsibilities of the Executive Directors and Managing Directors. Through this orientation program, newly appointed Executive Directors and Managing Directors are expected to harmonize their work with the governance organs of Indonesia Eximbank.

Sepanjang tahun 2023, tidak ada penunjukan baru yang dilakukan oleh Menteri Keuangan RI terkait posisi Direktur Eksekutif LPEI dan tidak terdapat anggota baru pada jajaran Direktur Pelaksana selama periode tahun berjalan, sehingga program pengenalan ini tidak dilaksanakan pada tahun buku 2023.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA TAHUN 2023

Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana bertugas melakukan operasional LPEI. Koordinasi antar-organ tersebut dilakukan secara intens dan sistematis melalui pelaksanaan sejumlah rapat rutin, di antaranya rapat Manajemen, yang diselenggarakan setidaknya satu kali dalam satu minggu, rapat ALCO satu kali dalam satu bulan, dan rapat bulanan kinerja satu kali dalam satu bulan. Selain wajib menyelenggarakan rapat dengan Direktur Pelaksana, Direktur Eksekutif juga mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Direktur untuk memastikan operasional LPEI berjalan dengan baik.

Selama tahun 2023, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah menyelenggarakan sebanyak 73 (Tujuh puluh tiga) kali rapat dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan dan isu-isu strategis, Direktur Eksekutif aktif melakukan komunikasi dengan Dewan Direktur sebagai organ pengawas di LPEI. Keputusan strategis diambil melalui mekanisme rapat dan didokumentasikan secara baik. Dalam pelaksanaan operasional, dibentuk pula komite di bawah Direktur Eksekutif.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKTUR EKSEKUTIF

Prosedur Penilaian

Direktur Eksekutif memiliki komite-komite yang bertugas membantu pelaksanaan pengelolaan Lembaga, antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Pengembangan Produk, Komite Kebijakan dan Pedoman, Komite Assets & Liabilities Management, Komite Teknologi Sistem Informasi, Komite Pengadaan, Komite Jasa Konsultasi, Komite Pembiayaan, dan Komite Sumber Daya Manusia.

Throughout the year 2023, no new appointments were made by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia regarding the position of Executive Director of Indonesia Eximbank, and no new members were appointed to the ranks of Managing Directors during the current year, resulting in the non-implementation of this introduction program in the fiscal year 2023.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR IN 2023

The Executive Director, assisted by the Managing Director, is responsible for managing the operational activities of Indonesia Eximbank. Coordination between these organs is conducted intensively and systematically through the implementation of several routine meetings, including Management meetings, held at least once a week, ALCO meetings once a month, and monthly performance meetings once a month. In addition to being required to hold meetings with the Managing Director, the Executive Director also conducts coordination meetings with the Board of Directors to ensure the smooth operation of Indonesia Eximbank.

During the year 2023, the Executive Director and the Managing Director held a total of 73 (seventy-three) meetings to make policy decisions and address strategic issues. The Executive Director actively communicated with the Board of Directors as the supervisory body at Indonesia Eximbank. Strategic decisions were made through meeting mechanisms and well-documented. In the implementation of operations, committees were also formed under the Executive Director.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMMITTEES UNDER THE EXECUTIVE DIRECTOR

Assessment Procedure

The Executive Director has committees tasked with assisting in the management of the institution, including the Risk Management Committee, Product Development Committee, Policy and Guideline Committee, Assets & Liabilities Management Committee, Information System Technology Committee, Procurement Committee, Consultancy Services Committee, Financing Committee, and Human Resources Committee.

Penilaian kinerja terhadap komite-komite di bawah Direktur Eksekutif dilakukan setiap tahun berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Proses penilaian ini dipimpin oleh Direktur Eksekutif dengan melibatkan partisipasi anggota komite dan pihak terkait lainnya. Hasil penilaian kinerja komite menjadi dasar untuk memberikan arahan dan rekomendasi perbaikan, serta menjadi landasan untuk penetapan remunerasi bagi anggota komite. Tujuan dari penilaian kinerja komite di bawah Direktur Eksekutif LPEI adalah memastikan pencapaian kinerja yang optimal dalam mendukung keseluruhan pencapaian tujuan LPEI.

Kriteria Penilaian

Indikator penilaian yang digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja komite-komite di bawah Direktur Eksekutif, antara lain mencakup pencapaian target kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta kontribusi komite terhadap kinerja LPEI secara keseluruhan. Kriteria penilaian kinerja komite dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing komite.

Hasil Penilaian

Berikut ini adalah hasil penilaian kinerja komite-komite di bawah Direktur Eksekutif pada tahun 2023:

1. **Komite Manajemen Risiko:**
   Direktur Eksekutif menilai bahwa Komite Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sejumlah langkah signifikan telah dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko, termasuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif mengenai kebijakan, strategi, dan panduan implementasi Manajemen Risiko beserta perubahannya. Selain itu, Komite ini juga sudah memberikan rekomendasi atas perbaikan Komite Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, dan penetapan terhadap hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang belum cukup diatur dalam prosedur. Dengan demikian, Direktur Eksekutif menilai bahwa Komite Manajemen Risiko menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan pengelolaan risiko yang efektif dan kepatuhan terhadap regulasi di LPEI. Selama tahun 2023, komite ini telah menyelenggarakan 17 kali rapat dengan rata-rata tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 95%.

Performance evaluations of the committees under the Executive Director are conducted annually based on predetermined performance targets. This assessment process is led by the Executive Director with the participation of committee members and other relevant parties. The results of the committee's performance assessment serve as the basis for providing guidance and recommendations for improvement, as well as for determining remuneration for committee members. The goal of assessing the performance of committees under the Executive Director of Indonesia Eximbank is to ensure that optimal performance is achieved in support of Indonesia Eximbank's overall objectives.

Assessment Criteria

The indicators used to measure the effectiveness of the performance of committees under the Executive Director include the achievement of performance targets, the effectiveness of task execution and responsibilities, and the committee's contribution to Indonesia Eximbank overall performance. The performance assessment criteria for committees can be tailored to the needs and characteristics of each committee.

Assessment Results

The following are the results of the performance assessment of committees under the Executive Director in 2023:

1. **Risk Management Committee:**
   The Executive Director assesses that the Risk Management Committee has fulfilled its duties and responsibilities according to the specified criteria. Several significant steps have been taken by the Risk Management Committee, including providing recommendations to the Executive Director regarding policies, strategies, and guidelines for implementing Risk Management and its changes. Additionally, the Committee has also recommended improvements to the Financing Policy Committee, Guarantee and Insurance Policy Committee, or enhancements to the periodic Risk Management implementation based on performance evaluation, and the determination of matters related to business decisions not adequately addressed in procedures. Therefore, the Executive Director assesses that the Risk Management Committee is a critical element in ensuring effective risk management and compliance with regulations at Indonesia Eximbank. During 2023, this committee held 17 meetings with a full attendance rate of 95%.

2. **Komite Pengembangan Produk:**
Komite Pengembangan Produk LPEI bertanggung jawab atas pengembangan dan penyempurnaan produk serta aktivitas bisnis LPEI. Pada tahun 2023, Komite Pengembangan Produk telah memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi LPEI terkait pengembangan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan industri ekspor. Keberhasilan Komite Pengembangan Produk dalam menjalankan tugasnya telah memberikan dampak positif bagi LPEI, yaitu mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan ekspor LPEI dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, komite ini juga telah memberikan rekomendasi dalam hal penyempurnaan atas manual produk, *Standard Operating Procedure* (SOP) dan ketentuan lainnya. Selama tahun 2023, komite ini telah menyelenggarakan 15 kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 100%.

3. **Komite Kebijakan dan Pedoman:**
Pada tahun 2023, Komite Kebijakan dan Pedoman telah memberikan rekomendasi yang bermanfaat kepada Direktur Eksekutif terkait rancangan peraturan internal LPEI dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan internal serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi. Komite ini juga aktif terlibat dalam melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi peraturan internal LPEI, serta memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam seluruh kegiatan dan kebijakan internal. Secara keseluruhan, Direktur Eksekutif menilai bahwa Komite Kebijakan dan Pedoman telah menunjukkan peranannya yang besar dalam menjaga keberlanjutan dan integritas kebijakan internal LPEI, serta mendorong keseimbangan yang optimal antara kepatuhan dan efektivitas operasional. Selama tahun 2023, komite ini telah menyelenggarakan 47 kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 100%.

4. **Komite Assets dan Liabilities Management:**
Pada tahun 2023, Direktur Eksekutif melakukan penilaian menyeluruh terhadap kinerja Komite Assets dan Liabilities Management, dan menyimpulkan bahwa komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejumlah tindakan penting telah diambil oleh Komite Assets dan Liabilities Management, di antaranya memberikan rekomendasi penting kepada Direktur Eksekutif terkait penetapan kebijakan manajemen risiko, kebijakan, batasan, dan pedoman strategi

2. **Product Development Committee:**
Indonesia Eximbank Product Development Committee is responsible for the development and enhancement of products and Indonesia Eximbank business activities. In 2023, the Product Development Committee provided valuable recommendations to Indonesia Eximbank regarding the development of new products aligned with market needs and export industry developments. The success of the Product Development Committee in performing its duties has had a positive impact on Indonesia Eximbank by driving increased export financing disbursements compared to the previous year. Additionally, the committee has provided recommendations for the refinement of product manuals, Standard Operating Procedures (SOPs), and other provisions. During 2023, this committee held 15 meetings with a full attendance rate of 100%.

3. **Policy and Guideline Committee:**
In 2023, the Policy and Guideline Committee provided beneficial recommendations to the Executive Director regarding the drafting of Indonesia Eximbank internal regulations and oversight of their implementation, as well as formulating solutions to encountered obstacles. The committee was also actively involved in strict supervision of Indonesia Eximbank internal regulations' implementation, ensuring compliance and consistency in all internal activities and policies. Overall, the Executive Director assesses that the Policy and Guideline Committee has demonstrated its significant role in maintaining the sustainability and integrity of Indonesia Eximbank internal policies, as well as promoting an optimal balance between compliance and operational effectiveness. During 2023, this committee held 47 meetings with a full attendance rate of 100%.

4. **Assets and Liabilities Management Committee:**
In 2023, the Executive Director conducted a comprehensive assessment of the Assets and Liabilities Management Committee's performance, concluding that the committee fulfilled its duties and responsibilities in accordance with applicable provisions. The committee took important actions, including providing crucial recommendations to the Executive Director related to the establishment of risk management policies, policies, limitations, and guidelines for asset and liability management strategies. This recommendation

manajemen aset dan liabilitas. Rekomendasi ini dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang relevan, mencerminkan komitmen komite untuk menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi LPEI secara keseluruhan. Penilaian ini memberikan dasar kuat untuk pengambilan keputusan yang cermat dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kinerja keuangan LPEI. Selama tahun 2023, komite ini telah menyelenggarakan 25 kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 90%.

was formulated by considering relevant external and internal conditions, reflecting the committee's commitment to maintaining a balance between assets and liabilities by taking into account factors that influence Indonesia Eximbank as a whole. This assessment provides a strong foundation for careful decision-making to maintain the stability and sustainability of Indonesia Eximbank financial performance. During 2023, the committee held 25 meetings with full member attendance at 90%.

5. **Komite Teknologi Sistem Informasi:**
Pada tahun 2023, Komite Teknologi Sistem Informasi telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal penyusunan rencana pengembangan teknologi sistem informasi berikut dengan pengawasan dan evaluasi atas pengembangan dan penerapan teknologi sistem informasi. Selain itu, komite ini juga telah memberikan arahan-arahan terkait kebijakan pengembangan teknologi sistem informasi jangka menengah dan jangka panjang, serta rencana investasi teknologi sistem informasi LPEI ke depan. Komitmen komite terlihat dalam memberikan panduan tidak hanya untuk kebijakan dan investasi, tetapi juga dalam memastikan implementasi teknologi yang sesuai dengan tujuan strategis serta kondisi internal dan eksternal LPEI. Penilaian ini menjadi dasar keputusan untuk mempertahankan dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung operasional keseluruhan LPEI. Selama tahun 2023, komite ini telah menyelenggarakan 12 kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 70%

5. **Information System Technology Committee:**
In 2023, the Information System Technology Committee provided recommendations to the Executive Director concerning the information system technology development plan, as well as oversight and assessment of its development and implementation. Additionally, the committee provided guidance on medium and long-term information system technology development policies and future investment plans. The committee's commitment is evident in providing guidance not only for policies and investments but also in ensuring technology implementation aligns with strategic objectives and internal and external conditions of Indonesia Eximbank. This assessment serves as the basis for decisions to maintain and enhance information technology infrastructure supporting Indonesia Eximbank overall operations. Throughout 2023, the committee held 12 meetings with full member attendance at 70%.

6. **Komite Pengadaan:**
Direktur Eksekutif menilai bahwa Komite Pengadaan telah memberikan sejumlah rekomendasi yang tepat dan bermanfaat bagi manajemen terkait dengan penyelenggaraan proses pengadaan yang optimal. Rekomendasi yang diberikan oleh komite ini mencakup aspek efektivitas dan efisiensi dalam hal implementasi proses pengadaan, serta memberikan masukan terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan pengadaan. Komite Pengadaan berperan besar dalam memastikan bahwa seluruh proses pengadaan LPEI sudah dilaksanakan secara efisien tanpa mengorbankan kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi, serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip integritas, keadilan, dan keberlanjutan. Selain itu, komite ini juga secara

6. **Procurement Committee:**
The Executive Director assessed that the Procurement Committee provided several appropriate and beneficial recommendations to management regarding optimal procurement processes. The committee's recommendations cover aspects of effectiveness and efficiency in implementing procurement processes and provide input on enhancing transparency and accountability in each procurement decision. The Procurement Committee plays a significant role in ensuring that all Indonesia Eximbank procurement processes are efficiently carried out without compromising quality and compliance with regulations, while upholding principles of integrity, fairness, and sustainability. Additionally, the committee actively details steps to improve

aktif terlibat dalam merinci langkah-langkah yang dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pengadaan, memastikan bahwa setiap tahapan yang dilakukan telah sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Selama tahun 2023, komite ini telah menyelenggarakan 68 kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 94%.

the quality and efficiency of procurement processes, ensuring each stage aligns with applicable regulations and policies. During 2023, the committee held 68 meetings with full member attendance at 94%.

7. **Komite Jasa Konsultasi:**
Pada tahun 2023, Komite Jasa Konsultasi telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait persetujuan prinsip untuk program jasa konsultasi dengan tetap memperhatikan *good judgment,* mitigasi risiko, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sejumlah langkah penting yang telah dilakukan oleh Komite Jasa Konsultasi, antara lain pemberian rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait Program Jasa Konsultasi selama tahun berjalan, sesuai dalam batasan yang diatur dalam RKAT. Dengan begitu, Direktur Eksekutif menilai bahwa komite ini telah berkontribusi dalam memberikan arahan yang berdampak positif terhadap perencanaan dan pelaksanaan Program Jasa Konsultasi serta memastikan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka kerja organisasi. Selama tahun 2023, komite ini telah menyelenggarakan 11 kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata seluruh anggota adalah 99%.

7. **Advisory Services Committee:**
In 2023, Advisory Services Committee provided recommendations to the Executive Director regarding the principle approval for consulting service programs while considering good judgment, risk mitigation, and compliance with applicable regulations. Important steps taken by the Advisory Services Committee include providing recommendations to the Executive Director regarding the Advisory Service Program during the current year, within the limits set in the Annual Work Plan and Budget (RKAT). Thus, the Executive Director assessed that this committee contributed positively to the planning and implementation of the Advisory Service Program and ensured its alignment with the organization's set objectives. Throughout 2023, the committee held 11 meetings with full member attendance at 99%.

8. **Komite Pembiayaan:**
Pada tahun 2023, Direktur Eksekutif menilai bahwa Komite Pembiayaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejumlah tindakan penting yang telah diimplementasikan oleh Komite Pembiayaan, antara lain pemberian keputusan terkait proposal proposal pembiayaan, penjaminan dan asuransi, serta tresuri. Selain itu, Komite ini juga sudah menunjukkan tanggung jawabnya melalui pengambilan keputusan atas proposal penanganan pembiayaan bermasalah dan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva produk sesuai dengan limit masing-masing komite pembiayaan. Dengan demikian, Komite Pembiayaan memegang peranan sentral dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan aspek-aspek krusial dalam operasional dan manajemen risiko di LPEI. Selama tahun 2023, komite ini telah menyelenggarakan 275 kali rapat segmen UKM dan 288 kali rapat segmen Non-UKM dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 100%.

8. **Financing Committee:**
In 2023, the Executive Director assessed that the Financing Committee effectively fulfilled its duties and responsibilities in accordance with applicable provisions. Several important actions implemented by the Financing Committee include making decisions regarding financing proposals, guarantees and insurance, and treasury. Additionally, the committee demonstrated its responsibility by making decisions on handling troubled financing proposals and decisions on setting the quality level of product assets according to each financing committee's limit. Thus, the Financing Committee holds a central role in decision-making processes related to crucial aspects of operational and risk management at Indonesia Eximbank. During 2023, the committee held 275 of the SME segment and 288 meetings of the Non-SME segment with with full member attendance at 100%.

9. **Komite Sumber Daya Manusia:**
   Sepanjang tahun 2023, Komite Sumber Daya Manusia telah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam hal penetapan arah, perubahan, dan penyempurnaan kebijakan SDM yang berkualitas. Selain itu Komite juga memastikan kebijakan SDM dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan strategi Lembaga berikut menentukan pengembangan nilai-nilai Lembaga (*corporate value*). Komite ini secara konsisten memberikan pandangan yang berharga dalam membantu perumusan kebijakan yang mendukung pengelolaan SDM yang efektif dan mendorong pengembangan nilai-nilai yang sesuai dengan identitas dan tujuan strategis LPEI. Selama tahun 2023, komite ini telah menyelenggarakan 3 kali rapat dengan tingkat kehadiran seluruh anggota adalah 100%.

9. **Human Resources Committee:**
   Throughout 2023, the Human Resources Committee provided recommendations to the Executive Director regarding the direction, changes, and improvement of quality HR policies. Additionally, the committee ensured HR policies were implemented according to targets and organizational strategies and determined the development of the institution's values (corporate value). This committee consistently provided valuable insights in assisting the formulation of policies supporting effective HR management and promoting the development of values aligned with Indonesia Eximbank identity and strategic objectives. Throughout 2023, the committee held 3 meetings with full member attendance at 100%.

PENILAIAN PENERAPAN GCG TERHADAP ASPEK DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF – DIREKTUR PELAKSANA

Assessment of GCG Implementation on the Aspect of the Board of Directors and Executive Directors - Managing Directors

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

Dasar kebijakan penilaian kinerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif - Direktur Pelaksana mengacu kepada mandat LPEI sebagaimana tertuang dalam UU No. 2/2009. Setiap tahun, Menteri Keuangan RI menetapkan Kontrak Manajemen yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut target yang hendak dicapai oleh Dewan Direktur termasuk Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana. IKU tersebut disusun dengan mengacu kepada mandat LPEI dan berbagai faktor strategis lainnya.

PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURE

The policy basis for assessing the performance of the Board of Directors and Executive Director - Managing Director refers to the mandate of Indonesia Eximbank as stipulated in Act No. 2/2009. Annually, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia establishes a Management Contract containing Key Performance Indicators (KPIs) along with targets to be achieved by the Board of Directors, including the Executive Director - Managing Director. These KPIs are formulated based on the mandate of Indonesia Eximbank and various other strategic factors.

PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian terhadap kinerja Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI dilakukan oleh tim penilai independen yang dibentuk oleh Menteri Keuangan RI pada saat pelaksanaan RKAT. Tim penilai tersebut menggunakan pencapaian target-target dalam IKU sebagai tolak ukur penilaian terhadap kinerja Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI.

IMPLEMENTATION OF THE ASSESSMENT AND THE PARTY CONDUCTING THE ASSESSMENT

Assessment of the performance of Indonesia Eximbank's Board of Directors and Managing Director is conducted by an independent assessment team established by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia at the time of RKAT implementation. The assessment team uses the achievement of the targets in the IKU as a benchmark for assessing the performance of Indonesia Eximbank Board of Directors and Managing Director.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA

Kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana LPEI dikelompokkan menjadi 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. **Perspektif Mandat dan Keuangan**
   Mengukur pencapaian pelaksanaan mandat dan kinerja keuangan LPEI. Pada sisi mandat di antaranya adalah pertumbuhan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan *trade finance*. Selain itu, mengukur pencapaian efektivitas pelaksanaan penugasan khusus LPEI. Pada sisi keuangan diataranya adalah laba bersih dan rasio *Net Interest Margin* (NIM) LPEI. Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa LPEI mampu menjalankan mandatnya dengan baik, yaitu mendukung pengembangan ekspor Indonesia.

PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA

The criteria used to assess the performance of the Board of Directors, Executive Director, and Managing Director of Indonesia Eximbank are grouped into 4 (four) perspectives, namely:

1. **Mandate and Financial Perspective**
   Measuring the achievement of Indonesia Eximbank's mandate implementation and financial performance. On the mandate side, it includes measuring the growth of financing, guarantees, insurance, and trade finance. Additionally, it measures the effectiveness of Indonesia Eximbank's special assignments implementation. On the financial side, it includes net profit and Indonesia Eximbank's Net Interest Margin (NIM) ratio. This criterion is important to ensure that Indonesia Eximbank can fulfill its mandate effectively, supporting the development of Indonesia's exports.

2. **Perspektif *Stakeholder* dan *Customer***
   Mengukur pencapaian LPEI dalam peningkatan peran LPEI dalam mengembangkan UMKM, kegiatan *joint program*, peningkatan peran LPEI sebagai daya ungkit ekspor nasional, dan peningkatan penyaluran fasilitas melalui kolaborasi ekosistem ekspor. Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa LPEI dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada nasabah dan dapat mencapai target-target strategisnya.

3. **Perspektif Proses Bisnis Internal**
   Mengukur pencapaian LPEI dalam memperbaiki proses bisnis internalnya, seperti perbaikan kualitas aset, penyempurnaan *risk awareness*, pemenuhan tindak lanjut temuan audit, penyelesaian aset bermasalah secara inorganik, dan penguatan teknologi, operasional, dan *Management Information System* (MIS). Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa LPEI dapat memperbaiki proses bisnis internalnya sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.

4. **Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan**
   Mengukur pencapaian LPEI dalam pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkinerja tinggi serta penguatan budaya kerja LPEI. Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa LPEI memiliki sumber daya yang berkualitas sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan ekspor Indonesia.

CAPAIAN KINERJA DEWAN DIREKTUR, DIREKTUR EKSEKUTIF, DAN DIREKTUR PELAKSANA TAHUN 2023

Capaian kinerja Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana, berdasarkan IKU pada tahun 2023, diuraikan pada tabel berikut ini:

2. **Stakeholder and Customer Perspective**
   Measuring Indonesia Eximbank's achievements in enhancing its role in developing MSMEs, joint program activities, enhancing Indonesia Eximbank's role as a lever for national exports, and increasing facility distribution through export ecosystem collaborations. This criterion is essential to ensure that Indonesia Eximbank can provide quality services to its customers and achieve its strategic targets.

3. **Internal Business Process Perspective**
   Measuring Indonesia Eximbank's achievements in improving its internal business processes, such as improving asset quality, enhancing risk awareness, fulfilling follow-up actions from audit findings, resolving problematic assets inorganically, and strengthening technology, operations, and Management Information System (MIS). This criterion is important to ensure that Indonesia Eximbank can enhance its internal business processes to significantly contribute to Indonesia's economy.

4. **Learning and Growth Perspective**
   Measuring Indonesia Eximbank's achievements in fulfilling competent and high-performing human resources and strengthening Indonesia Eximbank's work culture. This criterion is crucial to ensure that Indonesia Eximbank has high-quality human resources to make a significant contribution to the progress of Indonesia's exports.

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS OF THE BOARD OF DIRECTORS, EXECUTIVE DIRECTORS, AND MANAGING DIRECTORS IN 2023

The performance achievements of the Board of Directors and the Managing Director, based on the Key Performance Indicators (KPIs) in 2023, are outlined in the following table::

Sasaran Strategis		No	Indikator Kinerja Utama	Bobot	Realisasi	Target	Capaian
Perspektif Mandat dan Keuangan				**35%**			**87%**
IEB-1	Penugasan Umum	1	**Pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) berupa:**	**20%**	**85%**	**100%**	**85%**
			a. Pembiayaan *Good Bank*	5%	40,272	50,004	81%
			b. Produksi Penjaminan Komersial	5%	4,416	7,990	55%
			c. Volume Asuransi	5%	12,019	12,552	96%
			d. Volume Trade Finance	2.5%	16,065	15,457	104%
			e. Rasio Pembiayaan UKM	2.5%	19.6%	17.9%	109%
IEB-2	Penugasan Khusus	2	**Efektivitas Pelaksanaan Penugasan Khusus berupa:**	**10%**	**106%**	**100%**	**106%**
			a. New Disbursement Penugasan Khusus (NIA)	2.5%	4,993	4,500	111%
			b. Penciptaan atau penghematan devisa	2.5%	0.67	0.50	120%
			c. Peningkatan jumlah nasabah baru PKE kategori UKM	2.5%	37	50	74%
			d. Utilisasi program PKE	2.5%	7,149	5,220	120%
IEB-3	Perbaikan kinerja keuangan yang berkelanjutan	3	**Optimalisasi kinerja keuangan:**	**5%**	**57%**	**100%**	**57%**
			a. Net profit	2.5%	-18,114	153	0%
			b. Net Interest Margin (NIM)	2.5%	1.0%	0.9%	113%
Perspektif Stakeholder dan Customer				**20%**			**96%**
IEB-4	Penguatan Jasa Konsultasi	4	**Peningkatan peran LPEI dalam mengembangkan UMKM melalui:**	**7.5%**	**114%**	**100%**	**114%**
			a. Peningkatan jumlah eksportir baru	2.5%	389	300	120%
			b. Peningkatan jumlah Desa Devisa	2.5%	739	600	120%
			c. Jumlah peserta CPNE yang mendapatkan fasilitas pembiayaan LPEI	2.5%	31	30	103%
IEB-5	Optimalisasi Sinergi BUMN/ Lembaga Kementerian Keuangan	5	**Kegiatan *Joint Program* yang melibatkan seluruh BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan**	**2.5%**	**1**	**1**	**100%**
IEB-6	Peningkatan daya ungkit kepada ekspor nasional	6	**Peningkatan peran LPEI sebagai daya ungkit ekspor nasional:**	**7.5%**	**75%**	**100%**	**75%**
			a. *Developmental Impact* LPEI terhadap Ekspor barang	2.5%	3.95	3.8	104%
			b. *Developmental Impact* LPEI terhadap kegiatan jasa konsultasi	2.5%	3 kajian	1 kajian	120%
			c. Peningkatan % outstanding pembiayaan di wilayah Indonesia Timur	2.5%	0%	5%	0%
IEB-7	Kolaborasi dengan Ekosistem Ekspor	7	**Peningkatan penyaluran fasilitas melalui kerja sama kolaborasi ekosistem ekspor**	**2.5%**	**100%**	**100%**	**100%**
Perspektif Proses Bisnis Internal				**35%**			**84%**
Perbaikan Kualitas Aset				**25%**			**76%**
IEB-8	Perbaikan kualitas aset	8	**Terlaksananya perbaikan kualitas aset Lembaga berupa:**	***25%***	**76%**	**100%**	**76%**
			a. Rasio NPL Netto	10%	4.5%	10.3%	120%
			b. Rasio NPL Gross	10%	43.5%	24.0%	19%
			c. Optimalisasi perbaikan kualitas aset PT IPA	5%	102%	100%	102%
			- Menurunnya jumlah outstanding bad bank		*33,551*	*33,603*	*100%*
			- Recovery / Collection / AYDA		*883*	*836*	*106%*
			- Hapus Buku / Write Off		*2,181*	*2,203*	*100%*
Proses Bisnis Internal				**10%**			**103%**
IEB-9	Penyempurnaan *risk awareness dan Compliance*	9	Tingkat *maturity* penerapan manajemen risiko	2.5%	3.97	3	120%
IEB-10	Pemenuhan tindak lanjut temuan audit	10	Pemenuhan tindak lanjut temuan audit internal, eksternal, dan arahan Kementerian Keuangan	2.5%	99%	100%	99%
IEB-11	Penyelesaian aset bermasalah secara inorganik	11	Inisiatif penyelesaian aset bermasalah secara inorganik	2.5%	100%	100%	100%
IEB-12	Proses operasional yang efisien dan efektif	12	Penguatan teknologi, operasional dan *Management Information System* (MIS)	2.5%	93%	100%	93%
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan				**10%**			**103%**
IEB-13	Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan berkinerja tinggi	13	Pemenuhan kapabilitas dan *succession plan* untuk posisi kunci	5%	107%	100%	107%
IEB-14	Penguatan budaya kerja Lembaga	14	Penguatan budaya kerja: *risk awareness* , kepatuhan, integritas dan profesionalisme pada setiap pegawai	5%	100%	100%	100%
Total				**100%**			**89%**

Mengacu pada ketentuan PMK No.157/PMK.06/2018, perhitungan realisasi capaian setiap IKU ditetapkan paling banyak sebesar 120% dan paling sedikit sebesar 0%. Total bobot kontrak kinerja (IKU) adalah sebesar 100% yang terdiri dari perspektif mandat dan keuangan dengan bobot 35%; perspektif *stakeholder* dan *customer* 20%; perspektif proses bisnis internal 35% dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 10%.

Referring to the provisions of Regulation No. 157/PMK.06/2018, the calculation of the realization of each KPI achievement is set at a maximum of 120% and a minimum of 0%. The total weight of the performance contract (KPI) is 100%, consisting of a mandate and financial perspective with a weight of 35%; stakeholder and customer perspective 20%; internal business process perspective 35%; and learning and growth perspective 10%.

Berikut ini adalah pencapaian kinerja manajemen sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, yaitu:

The following is the management performance achievement up to the Fourth Quarter of 2023:

Perspektif Perspective	**Bobot (%)**	**Skor (%)**
I. Perspektif Mandat dan Keuangan Mandate and Financial Perspectives	35%	87%
II. Perspektif *Stakeholder* dan *Customer* Stakeholder and Customer Perspectives	20%	96%
III. Perspektif Proses Bisnis Internal Internal Business Process Perspective	35%	84%
IV. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Learning and Growth Perspective	10%	103%
	100%	**89%**

KEBIJAKAN NOMINASI BAGI DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR PELAKSANA

Nomination Policy for the Board of Directors and Managing Directors

KEBIJAKAN NOMINASI

Kebijakan nominasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI bertujuan untuk menjamin bahwa proses nominasi para anggota senantiasa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI yang diangkat adalah orang-orang yang kompeten, berpengalaman, dan memiliki integritas tinggi.

PROSEDUR NOMINASI

Nominasi Dewan Direktur dilakukan berdasarkan penunjukan Menteri Keuangan (KMK). Prosedur nominasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI terdiri dari beberapa tahap. Informasi tentang tahapan nominasi tersebut dijelaskan secara lebih rinci dalam pembahasan tentang suksesi Direktur Pelaksana pada Bab Tata Kelola Perusahaan Subbab Komite Remunerasi dan Nominasi.

NOMINATION POLICY

The nomination policy for the Board of Directors and Executive Directors of Indonesia Eximbank aims to ensure that the nomination process for members is always conducted transparently, accountably, and fairly. This policy also aims to ensure that the appointed members of the Board of Directors and Executive Directors of Indonesia Eximbank are competent, experienced, and have high integrity.

NOMINATION PROCEDURE

The nomination of the Board of Directors is based on the appointment of the Minister of Finance (KMK). The nomination procedure for the Indonesia Eximbank Board of Directors and Managing Directors consists of several stage. Information about the nomination stages is explained in more detail in the discussion about the succession of Managing Directors in the Corporate Governance Chapter, Remuneration and Nomination Committee Subchapter.

REMUNERASI DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR PELAKSANA

Remuneration of The Board of Directors and Managing Directors

KEBIJAKAN REMUNERASI

Kebijakan remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI mengacu pada ketentuan pasal 26 ayat (3) UU No. 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang menyatakan bahwa gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI. Lebih lanjut, kebijakan terkait besaran gaji pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 396/KMK.06/2021 tentang Penetapan Gaji Pokok, Penghasilan, dan Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Sebagaimana telah uraikan pada bagian Direktur Eksekutif pada buku laporan tahunan ini, bahwa Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur. Dengan demikian prosedur penetapan remunerasi Direktur Eksekutif sama dengan penetapan remunerasi Dewan Direktur.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Prosedur penetapan remunerasi bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI dimulai dengan adanya usulan remunerasi yang disampaikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah salah satu komite di bawah Dewan Direktur yang bertanggung jawab atas penyusunan rancangan remunerasi untuk Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI. Dalam menyusun rancangan remunerasi tersebut, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan unit kerja Sumber Daya Manusia.

Pada tahapan ini, Unit kerja Sumber Daya Manusia bertugas melakukan *benchmarking* terhadap penghasilan *Top Management* dari industri perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Inisiatif *benchmarking* dilakukan untuk memastikan bahwa usulan remunerasi yang akan diberikan kepada Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI ditetapkan secara adil dan wajar, sesuai dengan kinerja LPEI

REMUNERATION POLICY

The remuneration policy of the Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank refers to the provisions of Article 26 paragraph (3) of Act No. 2/2009 concerning Indonesia Eximbank which states that the salary, income, and other benefits for the Board of Directors and Managing Directors of Indonesia Eximbank are determined by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Furthermore, policies related to the amount of the basic salary of the Board of Directors and Managing Director have been regulated in Decree of the Minister of Finance No. 396/KMK.06/2021 concerning Determination of Basic Salary, Income, and Other Benefits for the Board of Directors and Managing Directors of Indonesia Eximbank.

As described in the Executive Director section of this annual report book, the Executive Director of Indonesia Eximbank is a member of the Board of Directors appointed by the Minister of Finance as Chairman of the Board of Directors. Thus, the procedure for determining the remuneration of the Executive Director is the same as determining the remuneration of the Board of Directors.

REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURE

The procedure for determining remuneration for the Indonesia Eximbank Board of Directors and Managing Director begins with the remuneration proposal submitted by the Remuneration and Nomination Committee. The Remuneration and Nomination Committee is one of the committees under the Board of Directors responsible for drafting the remuneration for the Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank. In preparing the draft remuneration, the Remuneration and Nomination Committee coordinates with the Human Resources work unit.

At this stage, the Human Resources work unit is tasked with benchmarking Top Management's income from the banking industry and non-bank financial institutions. The benchmarking initiative is carried out to ensure that the remuneration proposal to be given to the Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank is set fairly and reasonably, in accordance with the performance of Indonesia

serta mempertimbangkan standar remunerasi yang berlaku umum di industri sejenis.

Proses *benchmarking* dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis untuk kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menyusun rancangan remunerasi. Rancangan remunerasi tersebut kemudian diajukan kepada Dewan Direktur untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, Dewan Direktur akan mengajukan usulan tersebut kepada Menteri Keuangan RI.

Eximbank and considers the remuneration standards generally accepted in similar industries.

The benchmarking process is conducted by collecting data from various sources. After the data is collected, the data is analyzed and then used as a basis for consideration for the Remuneration and Nomination Committee in preparing the remuneration design. The draft remuneration is then submitted to the Board of Directors for discussion and approval. Furthermore, the Board of Directors will submit the proposal to the Minister of Finance of the Republic of Indoensia.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR PELAKSANA

REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MANAGING DIRECTORS

PENETAPAN REMUNERASI DALAM KAITANNYA DENGAN PENILAIAN KINERJA

Atas capaian kinerja pada tahun berjalan, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana diberikan tantiem. Hal ini sesuai Pasal 21 UU No. 2/2009 surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kegiatan digunakan untuk:

a. Cadangan umum;
b. Cadangan tujuan;
c. Jasa produksi dan tantiem; dan
d. Bagian laba pemerintah.

Ketentuan mengenai penetapan remunerasi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana berupa pemberian tantiem dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 396/KMK.06/2021 tentang Penetapan Gaji Pokok, Penghasilan, Dan Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

DETERMINATION OF REMUNERATION IN RELATION TO THE PERFORMANCE ASSESSMENT

For performance achievements in the current year, the Board of Directors, Executive Director, and Managing Director are given tantiem. This is in accordance with Article 21 of Act No. 2/2009 the surplus obtained by Indonesia Eximbank within 1 (one) year of activity is used for:

a. General reserve;
b. Purpose reserve;
c. Production services and tantiem; and
d. Government profit share.

Provisions regarding the determination of remuneration for the Board of Directors, Executive Director and Managing Director in the form of tantiem are made based on the Decree of the Minister of Finance number 396/KMK.06/2021 concerning Determination of Basic Salary, Income, and Other Benefits for the Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank.

Penetapan Jasa Produksi dan *Tantiem* dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Surplus;
b. Capaian IKU;
c. Pelaksanaan penugasan Pemerintah; dan
d. Faktor-faktor lain yang relevan.

STRUKTUR REMUNERASI

Struktur remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan panjang atau pasca kerja setiap anggota Dewan Direktur, maupun Direktur Pelaksana, berdasarkan KMK No. 396/KMK.06/2021 tentang Penetapan Gaji Pokok, Penghasilan, dan Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, adalah sebagai berikut:

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif Merangkap Ketua Dewan Direktur

Determination of Production Services and Tantiem is carried out by considering:

a. Surplus;
b. Achievement of the KPI;
c. Implementation of Government assignments; and
d. Other relevant factors.

REMUNERATION STRUCTURE

The remuneration structure of the Board of Directors and Managing Director which shows the type and amount of short and long term or post-employment benefits for each member of the Board of Directors, as well as the Managing Director, based on KMK No. 396/KMK.06/2021 concerning Determination of Basic Salary, Income, and Other Benefits for the Board of Directors and Managing Director of Indonesia Eximbank, is as follows:

Remuneration Structure and Facilities for the Executive Director and Chairman of the Board of Directors

No.	Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Keterangan Description
1	Gaji/Honorarium | Salary	Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur 100% Executive Director concurrently as Chairman of the Board of Directors 100%
2	Tunjangan | Allowances	
	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Maksimal 1x gaji Maximum 1x salary
	Santunan Purna jabatan Compensation after Tenure	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/honorarium tahunan Insurance scheme with maximum premium of 25% of annual salary/honorarium
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Diberikan sebesar biaya pemakaian (*at cost*) Provided at cost
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Diberikan *lump sum*, maksimal 30% dari gaji per bulan. Diberikan apabila tidak diberikan fasilitas rumah jabatan Provided lump sum, maximum 30% of salary per month. Provided if there is no housing allowance
3	Fasilitas | Facilities	
	Kendaraan Dinas Transportation Allowance	Disediakan 1 (satu) unit kendaraan, volume maksimal 2.500 cc dengan biaya operasional dan pemeliharaan ditanggung LPEI Provided 1 (one) unit of vehicle, maximum volume 2500 cc with operational lease and maintenance to be borne by Indonesia Eximbank
	Kesehatan Health	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 anak Provided in the form of reimbursement of medical expenses with insurance schemes, optician replacement, medical examination for couples and a maximum of 3 children
	Perkumpulan Profesi Professional Club	Maksimal 3 (tiga) perkumpulan Maximum of 3 (three) associations
	Bantuan Hukum Legal Aid	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI In the event of any acts/actions for and on behalf of his/her occupation relating to the intent and purpose of Indonesia Eximbank activities
	Club Membership Club Membership	Maksimal pada 2 (dua) *club* Maximum at 2 (two) clubs
	Biaya Representasi Representation Cost Facility	Diberikan dalam bentuk *Corporate Credit Card* Provided in the form of Corporate Credit Card
4	Ketentuan Perjalanan Dinas Bussiness Trip Policy	Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri Provided pocket money, transportation and accommodation facilities for domestic and overseas official travel

No.	Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Keterangan Description
5	Pajak PPh atas Gaji/ Honorarium dan Tunjangan Income Tax on Salary/ Honorarium and Allowances	Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI Income Tax (PPh 21) on Salaries and Benefits received by the Executive Director, Managing Director and Member of the Board of Directors are borne entirely by Indonesia Eximbank
6	Tantiem	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Stipulated through Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Direktur

Remuneration Structure and Facilities for the Board of Directors

No.	Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Ketentuan Terms
1.	Gaji/Honorarium Salary	Anggota Dewan Direktur 50%. (50% dari Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur). Members of the Board of Directors of 50% (50% from Executive Director concurrently Chairman of the Board of Directors).
2.	Tunjangan, terdiri dari: Benefits, consisting of:	
	Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	Maksimal 1 (satu) kali honorarium. Maximum 1 (one) time honorarium.
	Santunan Purna jabatan Compensation after Tenure	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/honorarium tahunan. Insurance scheme with maximum premium of 25% of annual salary/honorarium
	Tunjangan Komunikasi Communications Allowance	Diberikan sebesar biaya pemakaian (*at cost*). Provided at cost.
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium per bulan. 20% of honorarium per month.
3.	Fasilitas, terdiri dari: Facilities, consisting of:	
	Kesehatan Health	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan tindakan untuk pasangan dan maksimal 3 (tiga) anak. Provided in the form of reimbursement for medical costs under the insurance scheme, replacement glasses, medical examinations for spouses and a maximum of 3 (three) children
	Perkumpulan Profesi Professional Club	Maksimal 3 (tiga) perkumpulan. Maximum of 3 (three) associations.
	Bantuan Hukum Legal Aid	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI. In the event of any acts/actions for and on behalf of his/her occupation relating to the intent and purpose of Indonesia Eximbank activities.
4.	Ketentuan Perjalanan Dinas Bussiness Trip Policy	Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. Provided pocket money, transportation and accommodation facilities for domestic and overseas official travel.
5.	Pajak PPh atas Gaji/ Honorarium dan Tunjangan Income Tax on Salary/ Honorarium and Allowances	Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI. Income Tax (PPh 21) on Salaries and Benefits received by the Executive Director, Managing Director and Member of the Board of Directors are borne entirely by Indonesia Eximbank.
6.	Tantiem	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Stipulated through Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

Tabel Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Pelaksana

Remuneration Structure and Facilities for Managing Director

No.	Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Ketentuan Terms
1.	Gaji/Honorarium Salary	Direktur Pelaksana 90%. (90% dari Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur). Managing Director of 90% (90% from Executive Director concurrently Chairman of the Board of Directors)
2.	Tunjangan, terdiri dari: Benefits, consisting of:	
	Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	Maksimal 1 (satu) kali gaji. Maximum 1 (one) time salary.
	Santunan Purna jabatan Compensation after Tenure	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/honorarium tahunan. Insurance scheme with maximum premium of 25% of annual salary/honorarium
	Tunjangan Komunikasi Transportation Allowance	Diberikan sebesar biaya pemakaian (*at cost*). Provided at cost
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium per bulan. 20% of honorarium per month.
3.	Fasilitas, terdiri dari: Facilities, consisting of:	
	Kendaraan Dinas Official Vehicle	Disediakan 1 (satu) unit kendaraan, volume maksimal 2.500 cc dengan biaya operasional dan pemeliharaan ditanggung LPEI. 1 (one) unit of vehicle is provided, maximum volume 2,500 cc with operational and maintenance costs borne by Indonesia Eximbank.
	Kesehatan Health	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 (tiga) anak. Provided in the form of reimbursement for medical costs under the insurance scheme, replacement glasses, medical examinations for spouses and a maximum of 3 (three) children.
	Bantuan Hukum Legal Aid	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI. In the event of any acts/actions for and on behalf of his/her occupation relating to the intent and purpose of Indonesia Eximbank activities.
4.	Ketentuan Perjalanan Dinas Bussiness Trip Policy	Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. Provided pocket money, transportation and accommodation facilities for domestic and overseas official travel.
5.	Pajak PPh atas Gaji/ Honorarium dan Tunjangan Income Tax on Salary/ Honorarium and Allowances	Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI. Income Tax (PPh 21) on Salaries and Benefits received by the Executive Director, Managing Director and Member of the Board of Directors are borne entirely by Indonesia Eximbank
6.	Tantiem	Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Stipulated through Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia

BESARAN REMUNERASI TAHUN 2023

Pada tahun 2023 Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana telah menerima remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi lebih rinci tentang besaran remunerasi diuraikan pada tabel-tabel berikut ini:

REMUNERATION AMOUNT IN 2023

In 2023, the Board of Directors and Managing Directors have received remuneration in accordance with applicable regulations. More detailed information on the amount of remuneration is outlined in the following tables:

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Direktur

Remuneration Structure and Facilities for the Board of Directors

Jenis Remunerasi Type of Remuneration	**Jumlah Dewan Direktur** Total of the Board of Directors	**Jumlah yang Diterima Dewan Direktur dalam 1 tahun** Amount Received by the Board of Directors in 1 year
Gaji dan Tunjangan Salary and Benefit	5 orang | person	Rp12.245.316.045
Tantiem	5 orang | person	-
Fasilitas lain dalam bentuk natura Other facilities in kind	5 orang | person	Rp1.607.722.879
Total	5 orang | person	Rp13.853.038.924

Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Pelaksana

Remuneration Structure and Facilities for Managing Director

Jenis Remunerasi Type of Remuneration	**Jumlah Direktur Pelaksana** Total of Managing Director	**Total Remunerasi** Total Remuneration
Gaji dan Tunjangan Salary and Benefit	5 orang | person	Rp20.417.416.419,00
Tantiem	5 orang | person	-
Fasilitas lain dalam bentuk natura Other facilities in kind	5 orang | person	Rp3.120.087.553,00
Total	5 orang | person	Rp23.537.503.972,00

Kelompok Jumlah Remunerasi Anggota Dewan Direktur

Group Total Remuneration of Board of Directors

Total Remunerasi Tahun 2023 Total Remuneration in 2023	**Jumlah Orang** Total Persons
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	0
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar Between Rp1 billion to Rp2 billion	5
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Between Rp500 million to Rp1 billion	0
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	0

Kelompok Jumlah Remunerasi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Group Total Remuneration Executive Director and Managing Director

Total Remunerasi Tahun 2023 Total Remuneration in 2023	**Jumlah Orang** Total Persons
Di atas Rp2 miliar Above Rp2 billion	5
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar Between Rp1 billion to Rp2 billion	0
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Between Rp500 million to Rp1 billion	0
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	0

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

LPEI berusaha menjaga *gap* rasio gaji tertinggi dan terendah di lingkungan Lembaga sebagai bentuk transparansi dalam hal remunerasi. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang rasio gaji selama 2023:

Highest Salary and Lowest Salary Ratio

Indonesia Eximbank strives to maintain the gap between the highest and lowest salary ratios within the Institute as a form of transparency in terms of remuneration. The following is a more detailed explanation of the salary ratio during 2023:

No.	Uraian Description	Rasio Ratio	
		Gaji Pokok Basic Salary	***Take Home Pay* (THP)**
1.	Gaji karyawan terendah dibanding tertinggi Lowest employee salary compared to highest	39,06	19,46
2.	Gaji Direktur Pelaksana terendah dibanding tertinggi Managing Director salaries lowest compared to highest	1	1
3.	Gaji Dewan Direktur terendah dibanding tertinggi Board of Directors salary lowest compared to highest	1	1
4.	Gaji Direktur Pelaksana terhadap pegawai tertinggi Managing Directors salary to the highest employee	1,3	1,3

INDIKATOR KINERJA DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PELAKSANA UNTUK PENETAPAN REMUNERASI

Penetapan IKU Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dilakukan setiap awal tahun melalui mekanisme rapat pengesahan RKAT yang terdokumentasikan dalam Kontrak Manajemen antara Dewan Direktur dengan Menteri Keuangan RI, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Selanjutnya, Kontrak Manajemen tersebut diterapkan secara berjenjang (*Cascading*), di mana Direktur Pelaksana menurunkan kontrak tersebut kepada Ketua Dewan Direktur yang merangkap sebagai Direktur Eksekutif.

Penilaian kinerja Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tercermin dari pencapaian aktual terhadap indikator kinerja yang termaktub dalam Kontrak Manajemen. Kontrak Manajemen ini merupakan bagian integral dari sasaran-sasaran yang tercantum dalam RKAT. Informasi tentang Capaian IKU telah diuraikan pada subbab Penilaian Kinerja Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana.

PERFORMANCE INDICATORS OF EXECUTIVE DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR FOR REMUNERATION DETERMINATION

The determination of the KPIs of the Executive Director and Managing Director is carried out at the beginning of each year through the mechanism of the RAKT ratification meeting, which is documented in the Management Contract between the Board of Directors and the Indonesian Minister of Finance, in this case represented by the Director General of State Assets (DJKN). Furthermore, the Management Contract is applied in a cascading manner, where the Managing Director passes the contract down to the Chairman of the Board of Directors concurrently as Executive Director.

The performance assessment of the Executive Director and Managing Director is reflected in the actual achievement of the performance indicators contained in the Management Contract. This Management Contract is an integral part of the objectives set out in the RAKT. Information on the Achievement of KPIs has been described in the Performance Assessment of the Board of Directors and Managing Director subchapter.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara aktif melakukan pengawasan terhadap semua aspek, termasuk produk, kebijakan, dan kegiatan usaha Syariah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Fungsi utama DPS adalah memastikan bahwa semua aspek tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi LPEI. Dengan melakukan pengawasan ini, DPS berupaya untuk menjaga kesesuaian dan kepatuhan LPEI terhadap prinsip-prinsip syariah dalam segala aktivitasnya.

The Sharia Supervisory Board (DPS) actively supervises all aspects, including Sharia products, policies, and business activities at the Indonesian Export Financing Agency (LPEI). The main function of the DPS is to ensure that all aspects are in accordance with sharia principles as regulated by fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) and comply with laws and regulations applicable to Indonesia Eximbank. By conducting this supervision, the DPS seeks to maintain Indonesia Eximbank's sustainability and compliance with sharia principles in all its activities.

Menurut UU No. 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI diberi wewenang untuk menjalankan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip syariah ini, LPEI berkewajiban untuk menunjuk DPS. Peran DPS sangat penting, karena memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah yang konsisten di setiap tahap pengambilan keputusan oleh LPEI. Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh LPEI selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

According to Act No. 2/2009 on Indonesia Eximbank, Indonesia Eximbank is authorized to conduct business activities based on sharia principles. To ensure the implementation of these sharia principles, Indonesia Eximbank is obliged to appoint a DPS. The role of DPS is very important, as it has the primary responsibility of overseeing the consistent application of sharia principles at every stage of decision-making by Indonesia Eximbank. As part of the supervisory mechanism, the DPS is responsible for ensuring that policies and decisions taken by Indonesia Eximbank are in line with the established sharia principles.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS

Dalam Piagam DPS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagaimana tertera dalam PDD No. 0013/PDD/10/2022, ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab DPS telah diatur pada Pasal 10 dan 11. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. DPS memiliki tugas memberikan nasihat dan saran (*advisory*) kepada Direktur Eksekutif serta mengawasi seluruh kegiatan usaha syariah LPEI agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

2. DPS mempunyai tugas tanggung jawab antara lain:
   a. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;

DPS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

In the DPS Charter of Indonesia Eximbankn, as stated in PDD No. 0013/PDD/10/2022, the provisions regarding the duties and responsibilities of the DPS have been regulated in Articles 10 and 11. These articles explain the duties and responsibilities of DPS in carrying out the supervisory function of aspects related to sharia principles in the operations of Indonesia Eximbank, as described below:

1. The DPS has the task of providing advice and suggestions (advisory) to the Executive Director and overseeing all Indonesia Eximbank sharia business activities to be in accordance with Sharia Principles.
2. DPS has responsibilities, among others:

   a. Evaluate the Risk Management policy related to the fulfillment of Sharia Principles;

b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direktur Eksekutif atas pelaksanaan kebijakan Manajemen;
c. Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direktur Eksekutif dan/atau Direktur Pelaksana, pelaksana fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas pelaksanaan bisnis yang menggunakan Prinsip Syariah;
e. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas seluruh kebijakan, pedoman operasional, produk, transaksi dan laporan keuangan syariah yang dikeluarkan LPEI;
f. Mengawasi, memberikan masukan dan nasihat atas pengembangan produk syariah baru agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
g. Merekomendasikan kepada LPEI untuk mengajukan fatwa kepada DSN-MUI untuk produk syariah baru LPEI yang belum ada fatwanya;
h. Melakukan *review* secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha syariah LPEI;
i. Melakukan edukasi dan pembinaan kepada staf-staf LPEI dan nasabah-nasabah yang direkomendasikan oleh LPEI;
j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Direktur Eksekutif dengan tembusan kepada Dewan Direktur secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir periode pelaporan.

3. DPS melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Direktur Eksekutif dengan tembusan kepada Dewan Direktur.

MEKANISME PEMBERIAN SARAN DPS

DPS LPEI memiliki peran sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu fungsi pemberian nasihat dan fungsi pengawasan. Dalam rangka melaksanakan kedua fungsi tersebut, DPS memberikan nasihat dan saran,

b. Evaluating the accountability of the Executive Director for the implementation of the Management policy.
c. Risks related to the fulfillment of Sharia Principles as referred to in letter a;
d. Analyzing reports submitted by and/or requested from the Executive Director and/or Managing Director, the internal audit function and/or compliance function to determine the quality of the implementation of the fulfillment of Sharia Principles on the implementation of business using Sharia Principles;
e. Assessing and ensuring the fulfillment of Sharia Principles on all policies, operational guidelines, products, transactions and sharia financial statements issued by Indonesia Eximbank;
f. Supervise, provide input and advice on the development of new sharia products so that they are in accordance with the DSN-MUI fatwa;
g. Recommending to Indonesia Eximbank to submit fatwa to DSNMUI for Indonesia Eximbank new sharia products for which there is no fatwa;
h. Conducting periodic review at least 1 (one) time in 3 (three) months on the fulfillment of Sharia Principles on the implementation of Indonesia Eximbank sharia business activities;
i. Conducting education and guidance to Indonesia Eximbank staff and customers recommended by Indonesia Eximbank;
j. Prepare and submit the DPS Supervisory Report to the Executive Director with a copy to the Board of Directors periodically at least once every 3 (three) months and submitted no later than 7 (seven) working days after the end of the reporting period.

3. DPS reports the activities and results of the assignments it receives to the Executive Director with a copy to the Board of Directors.

SHARIA SUPERVISORY BOARD ADVISORY MECHANISM

The DPS of Indonesia Eximbank has a role in accordance with the applicable rules, namely the function of providing advice and supervisory function. In order to carry out these two functions, DPS provides advice and

serta melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah di LPEI. Mekanisme pelaksanaan pemberian nasihat, saran, dan pengawasan ini terorganisir melalui Rapat DPS, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0013/PDD/10/2022 tentang Piagam DPS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, khususnya pada Pasal 15. Mekanisme pelaksanaan Rapat DPS tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rapat DPS dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) bulan sekali atau dalam hal dianggap perlu, rapat dapat dilakukan lebih cepat sesuai kebutuhan.
2. Pemanggilan rapat disampaikan oleh Departemen Konsultasi Syariah kepada setiap DPS maksimal 2 (dua) hari sebelum rapat dilaksanakan.
3. Rapat dapat dilakukan secara fisik, telekonferensi, dan/atau media elektronik lainnya.
4. Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua DPS, dalam hal Ketua DPS tidak hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota DPS lain.
6. Pengambilan keputusan dalam Rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dianggap sah serta mengikat apabila dihadiri dan disetujui minimal 2 (dua) DPS yang sedang menjabat.
7. Keputusan rapat DPS dituangkan ke dalam lembar opini DPS/Risalah Rapat/dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan itu, sebagai bukti sah keputusan yang diambil.
8. Lembar opini DPS/Risalah Rapat dibuat oleh Departemen Konsultasi Syariah dan kemudian ditandatangani oleh ketua DPS dan seluruh anggota DPS yang hadir.
9. Lembar opini DPS/Risalah Rapat diadministrasikan dengan baik oleh Departemen Konsultasi Syariah.

suggestions, and supervises the fulfillment of sharia principles in Indonesia Eximbank. The mechanism for providing advice, suggestions, and supervision is organized through the DPS Meeting, in accordance with the provisions stipulated in Board of Directors Regulation (PDD) No. 0013/PDD/10/2022 concerning the DPS Charter of Indonesia Eximbank, specifically in Article 15. The mechanism for implementing the DPS Meeting can be described as follows:

1. DPS meetings are held periodically at least once a month or if deemed necessary, meetings can be held more quickly as needed.
2. Meeting invitations are submitted by the Sharia Consultation Department to each DPS a maximum of 2 (two) days before the meeting is held.
3. Meetings can be conducted physically, teleconference, and/or other electronic media.
4. Meetings that are not physically attended can be conducted through teleconference, video conference or other electronic media facilities that allow all meeting participants to see and hear each other directly and participate in the meeting.
5. The meeting is chaired by the DPS Chairman, in the absence of the DPS Chairman, the meeting is chaired by one of the other DPS members.
6. Decision making in the DPS Meeting is carried out based on deliberation for consensus and is considered valid and binding if attended and approved by at least 2 (two) incumbent DPS.
7. The decision of the DPS meeting is poured into the DPS opinion sheet I Minutes of Meeting I other documents that can be equated with it, as valid evidence of the decisions taken.
8. The DPS opinion sheet I Minutes of Meeting is prepared by the Sharia Consultation Department and then signed by the DPS chairman and all DPS members present.
9. The DPS opinion sheet I Minutes of Meeting is properly administered by Syariah Advisory.

KEANGGOTAAN DAN PROFIL DPS

Per 31 Desember 2023, DPS LPEI terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan dan 1 (satu) orang anggota. Informasi lebih rinci tentang profil DPS diuraikan berikut ini:

DPS MEMBERSHIP AND PROFILE

As of 31 December 2023, DPS LPEI consists of 1 (one) Chairman of the Board and 1 (one) member. More detailed information about the DPS profile is described below:

Kanny Hidaya, SE., MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

Usia Age
57 tahun | years old

Warga Negara Citizenship
Indonesia

Domisili Domicile
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0024.02/KDE/08/2023 Executive Director Decree No. 0024.02/KDE/08/2023
Periode Jabatan Term of Office	1 Agustus 2023 – 31 Juli 2026 1 August 2023 – 31 July 2026
Riwayat Pendidikan Educational Background	· Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Indonesia (1993). · Magister Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (2004) · Bachelor of Economics in Accounting, University of Indonesia (1993) · Master of Islamic Economics at Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN), Jakarta (2004)
Riwayat Karier Career Background	· Anggota Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional (2000 – sekarang) · Ketua Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2012 – Sekarang) · Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2020 – Sekarang) · Dewan Pengawas Syariah di PT Asuransi Mega Umum (2006 – Sekarang) · Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT AXA Mandiri Financial Services (2012 – 2023) · Member of Daily Executive Board – National Sharia Council (2000 – present) · Chairman of Sharia Supervisory Board – Indonesia Eximbank (2012 – Present) · Chairman of Sharia Supervisory Board - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2020 – Present) · Sharia Supervisory Board – PT Asuransi Mega Umum (2006 – Present) · Member of Sharia Supervisory Board – PT AXA Mandiri Financial Services (2012 – 2023)

Dr. Yulizar D. Sanrego MEc
Anggota DPS
Member of Sharia Supervisory Board

Usia Age
50 tahun | years old

Warga Negara Citizenship
Indonesia

Domisili Domicile
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0024.02/KDE/08/2023 Executive Director Decree No. 0024.02/KDE/08/2023
Periode Jabatan Term of Office	1 Agustus 2023 – 31 Juli 2026 1 August 2023 – 31 July 2026
Riwayat Pendidikan Educational Background	· Sarjana Ekonomi Islam (Muamalah) dari Universitas Djuanda, Indonesia. · Magister Ekonomi dan Pembiayaan Islam dari International Islamic University Malaysia. · Doktor Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. · Bachelor Degree in Islamic Economy (Muamalah) from Universitas Djuanda, Indonesia · Master's Degree in Islamic Economy & Finance from International Islamic University Malaysia · Doctorate degree in Islamic Economy from Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta
Sertifikasi Certification	· Dewan Pengawas Syariah (DPS) – BPRS, DSN-MUI & Bank Indonesia, Jakarta (2010) · Sharia Supervisory Board certificate – BPRS, DSN-MUI & Bank Indonesia, Jakarta (2010)

	Riwayat Karier Career Background	· Head Department of Islamic Economics di Tazkia Islamic Business School, Bogor - Indonesia (2005 – 2007) · Vice Chairman, Academic & Student Affairs di Tazkia Islamic Business School, Bogor-Indonesia (2006-2008) · Invited Researcher (Fellow Researcher) di Center for Central Banking Education and Studies, Bank Indonesia (PPSK-BI) (2006 – 2008) · Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) di STEI Tazkia (2009 – 2017) · Anggota Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional di Majelis Ulama Indonesia (2011 – sekarang) · Anggota Dewan Pengawas Syariah di Panin Asset Management (2011 – 2016) · Anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank CIMB Niaga Syariah (2013 – sekarang) · Ketua Dewan Pengawas Syariah di BPRS Bogor Tegar Beriman (2016 – sekarang) · Penasehat/Peneliti Ekonomi dan Keuangan Islam di Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA), Kerajaan Arab Saudi (2017-2019) · Ketua Dewan Pengawas Syariah di PBMT Ventura (2019-sekarang) · Dosen di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo (2019 – sekarang) · Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2012 – Sekarang) · Ketua Dewan Pengawas Syariah di Bank Jago (2021 – sekarang) · Head Department of Islamic Economics-Tazkia Islamic Business School, Bogor -Indonesia (2005-2007) · Vice Chairman, Academic & Student Affairs - Tazkia Islamic Business School, Bogor-Indonesia (2006-2008) · Invited Researcher (Fellow Researcher) at Centre for Central banking Education and Studies, Central Bank of Indonesia (PPSK-BI) (2006-2008) · Head of the Institute for Research and Community Empowerment (LPPM) STEI Tazkia (2009-2017) · Member of the Executive Board of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (2011 - present) · Member of Sharia Supervisory Board of Panin Asset Management (2011-2016) · Member of Sharia Supervisory Board of Bank CIMB Niaga Syariah (2013 - present) · Chairman of the Sharia Supervisory Board of BPRS Bogor Tegar Beriman (2016-present) · Advisor/Researcher on Islamic Economics and Finance, Saudi Arabian Monetary Authority - SAMA, Kingdom of Saudi Arabia (2017-2019) · Chairman of the Sharia Supervisory Board of PBMT Ventura (2019-present) · Lecturer at Darussalam Gontor University - Ponorogo (2019 - present) · Sharia Supervisory Board of Indonesia Eximbank (2012 – Present) · Chairman of Sharia Supervisory Board of Bank Jago (2021 – Present)

RAPAT DPS

Selama tahun 2023, DPS LPEI telah melaksanakan rapat sebanyak 16 (Enam Belas) kali dengan membahas sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) agenda, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

DPS MEETING

Throughout 2023, DPS of Indonesia Eximbank has conducted as many as 16 (sixteen) meetings by discussing 55 (fifty five) agendas, with the following attendance rates:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Persentase Kehadiran** Percentage of Attendance
Kanny Hidaya	Ketua Chairman	16	16	100%
Dr. Yulizar D. Sanrego	Anggota Member	16	16	100%

Dalam rapat-rapat tersebut, DPS membahas agenda-agenda sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

In these meetings, DPS discussed the agendas as described in the following table:

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	20 Januari 2023 20 January 2023	1. Penyampaian *Performance* Syariah 2022 2. Penyampaian Strategi Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2023 3. Usulan Sampel Uji Petik Kepatuhan Syariah Q1 2023 4. Pembahasan Awal Produk *Salam* LPEI 1. Submission of Sharia Performance 2022 2. Submission of Sharia Business Unit (UUS) Strategy for 2023 3. Proposed Sample of Sharia Compliance Petition Test Q1 2023 4. Initial Discussion of Salam Indonesia Eximbank Product
2	10 Februari 2023 10 February 2023	1. Lanjutan Pembahasan Akad *Salam* 2. Ratifikasi Persetujuan DPS atas Restrukturisasi Pembiayaan 3. Ketentuan Reasuransi Syariah 1. Continued Discussion of Salam Agreement 2. Ratification of DPS Approval on Financing Restructuring 3. Sharia Reinsurance Provisions
3	13 Maret 2023 13 March 2023	1. Persetujuan DPS atas Rancangan Peraturan Dewan Direktur (RPDD) Kebijakan Asuransi LPEI 2. Persetujuan DPS atas Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) Penjaminan Pembiayaan Berdasarkan Akad *Kafalah bil Ujrah* 3. Pelaporan Hasil Pengelolaan Dana *Tabarru'* kepada Peserta Asuransi Syariah LPEI 4. Informasi kepada DPS terkait Pengelolaan Dana *Tabarru'* 5. Hasil Uji Petik Kepatuhan syariah Q1 2023 6. Pengakuan "Komisi" menjadi "Diskon *Fee Wakalah*" 7. Penggunaan Istilah Rekening Debitur dalam sistem pelaporan Devisa Hasil Hasil Ekspor (DHE) 8. Penggunaan *advance premium* pada Skema Asuransi Syariah LPEI 1. DPS approval of the Draft Board of Director's Regulation (RPDD) of Indonesia Eximbank Insurance Policy 2. DPS approval of the Cooperation Agreement Document (PKS) for Financing Guarantee based on Kafalah bil Ujrah Akad. 3. Reporting of Tabarru' Fund Management Results to Indonesia Eximbank Sharia Insurance Participants 4. Information to DPS related to the Management of Tabarru' Fund 5. Results of Shariah Compliance Checklist Q1 2023 6. Recognition of "Commission" to "Wakalah Fee Discount" 7. Use of the term "Debtor Account" in the reporting system of Foreign Exchange Earnings (DHE) 8. Use of advance premium in Indonesia Eximbank Sharia Insurance Scheme
4	17 April 2023 17 April 2023	Pembahasan Pembiayaan dengan Prinsip Salam (SPP PEN berdasarkan Prinsip Syariah) Discussion of Financing with Salam Principles (SPP PEN based on Sharia Principles)
5	12 Mei 2023 12 May 2023	1. Pengajuan Sampel Uji Petik Kepatuhan Syariah Periode Q2 2023 2. Permohonan Kesediaan DPS terkait Perpanjangan Periode DPS di LPEI 3. Informasi Penyaluran Dana Sosial 4. Penyampaian Undangan kepada DPS sebagai Narasumber pada rencana Rapat *Update* Informasi 1. Submission of Sharia Compliance Check Samples for Q2 2023 Period 2. Request for DPS willingness regarding the extension of DPS period in Indonesia Eximbank 3. Information on Social Fund Disbursement 4. Submission of Invitation to DPS as a resource person at the Meeting plan of Information Update
6	12 Juni 2023 12 June 2023	1. Penyampaian Hasil Uji Petik Kepatuhan Syariah periode Q2 2023 2. Pembahasan Lanjutan Akad Salam – Pelunasan Dipercepat 3. *Update* Persiapan Laporan Hasil Pengawasan DPS Periode Semester 1 2023 4. Lembaga Keuangan Syariah Sebagai *Leader* Sindikasi atau *Club Deal* dengan Lembaga Keuangan Konvensional 5. Penyesuaian *Wording* Opini DPS tentang Akad Salam 6. Pembiayaan *Refinancing* Dengan akad *Ijarah Muntahiya Bi' Tamlik* di mana Aset calon Nasabah sedang disewa pihak lain 1. Submission of the results of the Sharia Compliance Checklist for the Q2 2023 period. 2. Continued Discussion on Salam - Accelerated Repayment Agreement 3. Update on the Preparation of DPS Supervisory Report for Semester 1 period 2023 4. Sharia Financial Institutions as Syndication Leaders or Club Deal with Conventional Financial Institutions 5. Adjustment of the Wording of the DPS Opinion on the Salam Accad 6. Refinancing with an Ijarah Muntahiya Bi' Tamlik contract where the prospective customer's assets are being leased by another party
7	16 Juni 2023 16 June 2023	Pembahasan lanjutan akad *Salam* – Penyelesaian Akad *Salam* dipercepat Continued discussion of Salam contract - Accelerated settlement of Salam contract

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda
8	18 Juli 2023 18 July 2023	1. Penyampaian *Concern* Awal terkait Penawaran Kembali Pendanaan 2. Penyampaian Usulan Sampel Uji Petik Kepatuhan Syariah Q3 2023 1. Submission of Initial Concern related to Funding Re-offering 2. Submission of Proposed Q3 2023 Shariah Compliance Check Sample
9	27 Juli 2023 27 July 2023	1. Reasuransi Asuransi Syariah LPEI – Penggunaan Reasuransi Konvensional 2. Penyampaian Informasi Awal Devisa Hasil Ekspor (DHE) 1. Indonesia Eximbank Sharia Insurance Reinsurance - Use of Conventional Reinsurance 2. Submission of Preliminary Information on Export Proceeds (DHE)
10	4 Agustus 2023 4 August 2023	1. Dokumen Hukum Polis Asuransi *Marine Cargo* Syariah 2. Diskusi Lanjutan Devisa Hasil Ekspor (DHE) 1. Legal Document of Sharia Marine Cargo Insurance Policy 2. Further Discussion of Export Proceeds (DHE)
11	12 September 2023 12 September 2023	1. Hasil Uji Petik Q3 Tahun 2023 2. Penjabaran struktur akad kerja sama LPEI – ITFC 3. Dokumentasi Legal Asuransi *Marine Cargo* Syariah 4. Struktur Kerja Sama Penjaminan Syariah 5. Re-konfirmasi terkait Ketentuan Perubahan Objek *Salam* dan Pembebanan Biaya kepada Nasabah selaku Wakil dari LPEI pada Akad *Salam* 1. Q3 of 2023 Mock Test Results 2. Elaboration of the structure of the LPEI - ITFC cooperation contract 3. Legal Documentation of Sharia Marine Cargo Insurance 4. Sharia Guarantee Cooperation Structure 5. Re-confirmation related to the Terms of Change of Salam Object and Charges to the Customer as the Representative of Indonesia Eximbank in the Salam Agreement.
12	25 September 2023 25 September 2023	1. Permohonan *Advise* terkait Proses PKPU Nasabah Syariah yang dikelola oleh PT IEB PA 2. Permohonan *Advise* terkait Restrukturisasi pembiayaan dengan Mekanisme Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas dalam Rangka Pelunasan Nasabah Syariah 3. Penggunaan *Qardh* dalam Skema Dana Talangan pada Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk Skema Syariah 4. Usulan Alternatif Skema Hak Regres pada Penjaminan Syariah LPEI 1. Request for Advise related to PKPU Process of Sharia Customer managed by PT IEB PA 2. Request for Advise related to Restructuring of financing with the Mechanism of Extending the Facility Period in the Context of Repayment of Sharia Customers 3.Use of Qardh in the Bailout Scheme on Export Proceeds from Foreign Exchange (DHE) for Sharia Scheme 4. Proposed Alternative Regress Right Scheme on Indonesia Eximbank's Sharia Guarantee.
13	16 Oktober 2023 October 16, 2023	1. Usulan Sampel Uji Petik Kepatuhan Syariah Periode Q4 2023 2. Permohonan *Advise* terkait skema *Trade Finance* dengan *Financial Institution* 3. Permohonan *Advise* terkait Produk Devisa Hasik Ekspor (DHE) 1. Proposed Shariah Compliance Check Sample for Q4 2023 Period 2. Request for Advise related to Trade Finance scheme with Financial Institution 3. Request for Advise related to Exported Foreign Exchange (DHE) Products.
14	11 November 2023 November 11, 2023	Pembahasan Pengalihan Aset UUS LPEI ke PT IEB PA Discussion on Transfer of UUS Indonesia Eximbank Assets to PT IEB PA
15	17 November 2023 November 17, 2023	1. Permohonan *Advise* terkait Skema Akad Salam 2. Ratifikasi Opini DPS tentang Kehadiran Penerima Jaminan (Makful Lahu) pada akad Kafalah dalam Majelis Akad 3. Lanjutan Permohonan *Advise* terkait Skema *Trade Finance* dengan *Financial Institution* (*Issuing L/C*) 1. Request for Advise related to Salam Akad Scheme 2. Ratification of DPS Opinion on the Presence of the Recipient of Guarantee (Makful Lahu) in the Kafalah contract in the Accord Assembly 3. Continuation of Advise Request related to Trade Finance Scheme with Financial Institution (Issuing L/C)
16	5 Desember 2023 5 December 2023	1. Penyampaian Profil Risiko UUS Triwulan III 2023 2. Pembaharuan PDE SPO *Enterprise Risk Management* LPEI 3. Hasil Uji Petik Kepatuhan Syariah Q4 2023 4. Usuan Rencana Kerja DPS 202 5. *Draft* Laporan Hasil Pengawasan DPS Q4 2023 6. *Refinancing* Aset dalam Penyewaan sebagai Objek Pembiayaan MMQ 1. Submission of UUS Risk Profile for the third quarter of 2023 2. Update of PDE SPO Enterprise Risk Management Indonesia Exim 3. Sharia Compliance Check Results Q4 2023 4. DPS Work Plan Proposal 202 5. Draft DPS Supervisory Report Q4 2023 6. Refinancing of Assets under Lease as an Object of MMQ Financing

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2023

Pada tahun 2023, beberapa anggota DPS telah mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan uraian sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2023

In 2023, several DPS members have participated in training and competency development activities to support the effectiveness of the implementation of their duties and responsibilities, with the following description:

Nama Name	**Tanggal Pelaksanaan** Date of Implementation	**Judul Program** Title Program	**Penyelenggara** Organizer
Kanny Hidaya	13-14 Oktober 2023 13-14 October 2023	*Ijtima' Sanawi* (*Annual Meeting*) DPS Ke-19 2023	DSN-MUI
Yulizar D. Sanrego	13-14 Oktober 2023 13-14 October 2023	*Ijtima' Sanawi* (*Annual Meeting*) DPS Ke-19 2023	DSN-MUI

LAPORAN DPS TAHUN 2023

DPS melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap berbagai aspek operasional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Setelah menyelesaikan proses pengawasan, DPS menyusun Laporan Hasil Pengawasan per Kuartal yang berisi pembahasan hasil rapat, opini Syariah, hasil uji petik, rekomendasi, dan penilaian terhadap ketaatan terhadap prinsip syariah. Laporan tersebut kemudian disampaikan secara resmi kepada Direktur Eksekutif sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, serta untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas implementasi prinsip syariah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Proses ini berfungsi sebagai alat penting untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas operasional LPEI.

Pada tahun 2023, DPS telah empat kali menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan per kuartal kepada Direktur Eksekutif ditembuskan kepada Dewan Direktur, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

DPS REPORT IN 2023

DPS evaluates and supervises various operational aspects related to sharia principles at the Indonesian Export Financing Agency. After completing the supervision process, DPS prepares a Supervisory Report per semester containing findings, recommendations, and assessment of compliance with sharia principles. The report is then formally submitted to the Executive Director as a form of accountability and transparency, as well as to provide information that can be used to improve the quality of the implementation of sharia principles at the Indonesia Export Financing Corporation. This process serves as an important tool to ensure suitability and compliance with sharia principles in Indonesia Eximbank operational activities.

In 2023, the DPS has submitted four quarterly Supervisory Reports to the Executive Director, copied to the Board of Directors. Executive Director and forwarded to the Board of Directors, as described in the following table:

No.	**Tanggal Laporan** Date of Report	**Judul Laporan** Title of Report
1.	3 April 2023 3 April 2023	Laporan Hasil Pengawasan DPS periode Kuartal I Tahun 2023 DPS Supervisory Report for the first quarter of 2023
2.	3 Juli 2023 3 July 2023	Laporan Hasil Pengawasan DPS periode Kuartal II Tahun 2023 DPS Supervisory Report for the second quarter of 2023
3.	2 Oktober 2023 2 October 2023	Laporan Hasil Pengawasan DPS periode Kuartal III Tahun 2023 DPS Supervisory Report for the third quarter of 2023
4.	6 Januari 2023 6 January 2023	Laporan Hasil Pengawasan DPS periode Kuartal IV Tahun 2023 DPS Supervisory Report for the fourth quarter of 2023

Sepanjang tahun 2023, DPS telah melakukan realisasi program kerja antara lain:

1. Melakukan 16 (enam belas) kali rapat yang mayoritas dilakukan secara daring untuk membahas mengenai fitur produk dan skema akad pembiayaan Salam dan IMBT, penjaminan Syariah, asuransi Syariah, DHE Syariah, skema transaksi Syariah, standar dokumen akad pembiayaan syariah, restrukturisasi pembiayaan syariah, profil risiko Syariah, Rencana Kerja DPS dan lain sebagainya.
2. Menghadiri Pra *Ijtima' Sanawi* dan *Ijtima' Sanawi* (*Annual Meeting*) DPS Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.
3. Melakukan *review* kepatuhan syariah melalui metode uji petik sampel pembiayaan syariah sebanyak 9 (sembilan) sampel nasabah.
4. Menyampaikan Laporan Pengawasan DPS kepada Direktur Eksekutif periode:
   a. Laporan Hasil Pengawasan DPS periode Kuartal I Tahun 2023.
   b. Laporan Hasil Pengawasan DPS periode Kuartal II Tahun 2023.
   c. Laporan Hasil Pengawasan DPS periode Kuartal III Tahun 2023.
   d. Laporan Hasil Pengawasan DPS periode Kuartal IV Tahun 2023.

Throughout 2023, DPS has realized work programs, among others:

1. Conducted 16 (sixteen) meetings, the majority of which were conducted online to discuss product features and schemes of Sharia financing and guarantee contracts, standard Sharia financing contract documents, Sharia financing restructuring, Sharia risk profiles, and others.
2. Attended the Pre Ijtima' Sanawi and Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) of DPS of Sharia Financial Institutions organized by the National Sharia Council, Indonesian Ulema Council.
3. Conducting a review of sharia compliance through a sample test method of sharia financing as many as 9 (nine) customer samples.
4. Submitting the DPS Supervisory Report to the Executive Director for the period:
   a. DPS Report for the first quarter of 2023.
   b. DPS Report for the second quarter of 2023.
   c. DPS Report for the third quarter of 2023.
   d. DPS Report for the fourth quarter of 2023.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN DIREKTUR
Supporting Organs of the Board of Directors

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Direktur membentuk komite-komite yang mendukung fungsi pengawasan, yaitu:
1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko; dan
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Hal ini selaras dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Informasi lebih rinci terkait komite-komite tersebut dijelaskan pada beberapa subbab berikut ini.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Direktur dalam rangka membantu Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal melalui pemantauan dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut hasil audit, dengan tugas dan fungsi dari Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit.

Dasar Hukum
Pembentukan dan peran Komite Audit telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Beberapa regulasi yang menjadi dasar pembentukan Komite Audit antara lain:
1. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017, tentang Penggunaan Jasa Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Piagam Komite Audit
Piagam Komite Audit telah disusun dan diresmikan sesuai dengan Peraturan Dewan Direktur No. 0005/PDD/09/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 6 September 2022. Piagam ini berperan sebagai

In order to improve the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Directors established committees that support the supervisory function, namely:
1. Audit Committee;
2. Risk Monitoring Committee; and
3. Remuneration and Nomination Committee.

This is in line with the provisions stipulated in article 8 paragraph (1) of PMK No. 208/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. More detailed information regarding these committees is explained in the following sections.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee established by the Board of Directors in order to assist the Board of Directors in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of the duties of external auditors and internal auditors through monitoring and evaluation of the planning, implementation, and follow-up of audit results, with the duties and functions of the Audit Committee regulated in the Audit Committee Charter.

Legal Basis
The establishment and role of the Audit Committee has been adjusted to the prevailing regulations. Some of the regulations that form the basis for the establishment of the Audit Committee include:
1. PMK No. 208/2021 on Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank.
2. POJK No. 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and Implementation Guidelines for the Audit Committee.
3. POJK No. 13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017, regarding the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Audit Committee Charter
The Audit Committee Charter has been prepared and formalized in accordance with Board Regulation No. 0005/PDD/09/2022 issued on 6 September 2022. This Charter serves as a guideline and rules of conduct

pedoman serta aturan pelaksanaan bagi anggota Komite dalam melaksanakan peran, tugas, dan tanggung jawabnya dalam mendukung Dewan Direktur.

for Committee members in carrying out their roles, duties and responsibilities in supporting the Board of Directors.

Komposisi dan Profil Komite Audit

Sesuai dengan PMK 208/2021 pasal 37 ayat (1), komposisi Komite Audit terdiri atas 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan sebagai anggota.

Composition and Profile of the Audit Committee

In accordance with PMK 208/2021 article 37 paragraph (1), the composition of the Audit Committee consists of 1 (one) member of the Board of Directors as chairman, 1 (one) Independent Party with expertise in finance or accounting as member, and 1 (one) Independent Party with expertise in law or banking as member.

Pada tahun 2023, komposisi Komite Audit mengalami perubahan sebagaimana dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini:

In 2023, the composition of the Audit Committee has changed as described in the following tables:

Komposisi Komite Audit LPEI per 1 Januari 2023 – 24 Agustus 2023

Composition of the Audit Committee of Indonesia Eximbank as of 1 January 2023 – 24 August 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Arus Gunawan	Ketua Komite Chairman of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0004/KDE/01/2022 Decree of Executive Director No. 0004/KDE/01/2022
Peter Umar Abdilla	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0004/KDE/01/2022 Decree of Executive Director No. 0004/KDE/01/2022
Yulida S Marbun	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0004/KDE/01/2022 Decree of Executive Director No. 0004/KDE/01/2022

Komposisi Komite Audit LPEI per 25 Agustus 2023 – 5 Oktober 2023

Composition of the Audit Committee of Indonesia Eximbank as of 25 August 2023 – 5 October 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Arus Gunawan	Ketua Komite Chairman of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0032/KDE/08/2023 Decree of the Executive Director No. 0032/KDE/08/2023
Yon Arsal	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0032/KDE/08/2023 Decree of the Executive Director No. 0032/KDE/08/2023
Peter Umar Abdila	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0032/KDE/08/2023 Decree of the Executive Director No. 0032/KDE/08/2023
Yulida S. Marbun	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0032/KDE/08/2023 Decree of the Executive Director No. 0032/KDE/08/2023

Komposisi Komite Audit LPEI per 6 Oktober 2023 – 31 Desember 2023

Composition of the Audit Committee of Indonesia Eximbank as of 6 October 2023 – 31 December 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Arus Gunawan	Ketua Komite Chairman of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0044/KDE/10/2023 Decree of the Executive Director No. 0044/KDE/10/2023
Kasan	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0044/KDE/10/2023 Decree of the Executive Director No. 0044/KDE/10/2023
Peter Umar Abdila	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0044/KDE/10/2023 Decree of the Executive Director No. 0044/KDE/10/2023
Yulida S. Marbun	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0044/KDE/10/2023 Decree of the Executive Director No. 0044/KDE/10/2023

Mengacu pada Keputusan Direktur Eksekutif No. 0044/KDE/10/2023, berikut ini adalah profil dari anggota Komite Audit LPEI yang menjabat hingga berakhirnya tahun buku 2023:

Pursuant to Executive Director Decree No. 0044/KDE/10/2023, the following is the profile of Indonesia Eximbank Audit Committee members serving until the end of the 2023 financial year:

Arus Gunawan
Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Usia Age	58 tahun | years old
Warga Negara Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Anggota Dewan Direktur LPEI Member of the Board of Directors of Indonesia Eximbank

Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan Sub-bab Profil Dewan Direktur.
His complete profile has been described in the Company Profile Chapter of the Board of Directors Profile Sub-chapter.

Kasan
Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Usia Age	57 tahun | years old
Warga Negara Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Anggota Dewan Direktur LPEI Member of the Board of Directors of Indonesia Eximbank

Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan Subbab Profil Dewan Direktur.
His complete profile has been described in the Company Profile Chapter of the Board of Directors Profile Subchapter.

Peter Umar Abdilla
Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Usia Age	52 tahun | years old
Warga Negara Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Diploma III Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1992) • Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (1998) • Magister Sains jurusan Ekonomi Syariah dari Universitas Indonesia (2007) • DIII Accounting at the State College of Accountancy (STAN) (1992) • Bachelor of Economics majoring in Accounting from the University of Indonesia (1998) • Master of Science majoring in Islamic Economics from the University of Indonesia (2007)
Riwayat Karier Career Background	• Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (2021 – sekarang) • Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI (1992 – 2021) • Anggota Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia (2021) • Anggota Komite Audit PT BNI Syariah (2019 – 2021) • Inspector II Inspectorate General of the Ministry of Finance (2021 - present) • Auditor General Inspectorate of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (1992 – 2021) • Member of the Audit Committee of PT Bank Syariah Indonesia (2021) • Member of the Audit Committee of PT BNI Syariah (2019 – 2021)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (2021 – sekarang) Inspector II Inspectorate General of the Ministry of Finance (2021 - present)

Yulida S Marbun **Anggota Komite Audit** Member of the Audit Committee	
Usia Age	60 tahun | years old
Warga Negara Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1987) • Magister Ekonomi Manajemen dari STIE IBEK (2000) • Bachelor in Agriculture from the Institute of Agriculture Bogor (1987) • Master of Economic Management from STIE IBEK (2000)
Riwayat Karier Career Background	• Vice President Audit Manager/Department Head di KP Direktorat Internal Audit (2008 – 2014) • Vice President LF Risk Management di Mandiri University - Bank Mandiri (2014 – 2015) • Vice President Regional Business Control Head - Region III Jakarta 1 Bank Mandiri (2015 – 2019) • Vice President Audit Manager/Department Head at Head Office Internal Audit Directorate (2008 – 2014) • Vice President LF Risk Management at Mandiri University - Bank Mandiri (2014-2015) • Vice President Regional Business Control Head - Region III Jakarta 1 Bank Mandiri (2015-2019)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak merangkap jabatan di LPEI maupun institusi lain. Does not hold concurrent positions in Indonesia Eximbank or other institutions.

Periode dan Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Audit mengikuti ketentuan yang tercantum dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Panduan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta Piagam Komite Audit. Aturan tersebut menjelaskan bahwa masa tugas Komite Audit tidak dapat melebihi masa tugas Dewan Direktur. Komite Audit hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

Anggota Komite Audit yang bukan merupakan bagian dari Dewan Direktur dapat diberhentikan oleh Dewan Direktur tanpa pemberitahuan sebelumnya jika dianggap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Pengangkatan. Jika dianggap perlu, Dewan Direktur berhak untuk mengangkat kembali anggota Komite Audit yang bukan bagian dari Dewan Direktur setelah berakhirnya masa jabatannya.

Period and Term of Office

The term of office of the Audit Committee follows the provisions stated in POJK No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Implementation Guidance of the Audit Committee, as well as the Audit Committee Charter. The regulation explains that the term of office of the Audit Committee cannot exceed the term of office of the Board of Directors. The Audit Committee can only be re-elected for one subsequent period.

Members of the Audit Committee who are not part of the Board of Directors may be dismissed by the Board of Directors without prior notice if they are deemed not to have fulfilled their obligations as described in the Letter of Appointment. If deemed necessary, the Board of Directors has the right to reappoint Audit Committee members who are not part of the Board of Directors after the expiration of their term of office.

Independensi Anggota Komite

LPEI memastikan bahwa semua anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas secara independen. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Seluruh anggota Komite Audit juga tidak memiliki hubungan afiliasi. Hubungan dimaksud, terkait dengan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham.

Independence of Member of the Audit Committee

Indonesia Eximbank ensures that all members of the Audit Committee have met the independence criteria and have the capacity to carry out their duties independently. In carrying out its duties, the Audit Committee cannot be influenced by any party.

All members of the Audit Committee also have no affiliation. The relationship is related to financial, share management and/or family relationship with the Board of Directors, Executive Director, Managing Director, and/or Shareholders.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah diatur dalam Piagam Komite Audit yang mengadopsi aturan dalam Pasal 39 PMK 208/2021. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Komite Audit, adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal melalui pemantauan dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut hasil audit.
2. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud termasuk:
   a. memberikan rekomendasi mengenai penunjukan kantor akuntan publik kepada Dewan Direktur;
   b. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.
3. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud, paling kurang dilakukan terhadap:
   a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal;
   b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku;
   c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
   d. pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal dan auditor eksternal dalam rangka pengawasan pada LPEI.
   e. Pelaksanaan tugas Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Direktur paling kurang 3 (tiga) bulan sekali.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Audit Committee have been regulated in the Audit Committee Charter which adopts the rules in Article 39 of PMK 208/2021. Based on these provisions, the duties and responsibilities carried out by the Audit Committee are as follows:

1. Assisting the Board of Directors in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of the duties of external auditors and internal auditors through monitoring and evaluating the planning, implementation, and follow-up of audit results.
2. The implementation of the duties as referred to includes:
   a. providing recommendations regarding the appointment of a public accounting firm to the Board of Directors;
   b. providing recommendations regarding the improvement of the internal control system and its implementation.
3. Monitoring and evaluation as intended, at least carried out on:
   a. the implementation of the duties of the Internal Audit Work Unit;
   b. conformity of audit implementation by the public accounting firm with applicable audit standards;
   c. conformity of financial statements with applicable financial accounting standards;
   d. implementation of follow-up on the results of the examination of the Internal Audit Work Unit and external auditors in the context of supervision at Indonesia Eximbank.
   e. The implementation of the Audit Committee's duties is reported to the Board of Directors at least once every 3 (three) months.

RAPAT KOMITE

Kebijakan Rapat

Piagam Komite Audit mengatur bahwa rapat Komite Audit wajib diselenggarakan paling kurang sama dengan ketentuan jumlah minimal penyelenggaraan rapat Dewan Direktur, yaitu diselenggarakan berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota

Selama tahun 2023 Komite Audit melangsungkan rapat sebanyak 29 kali, antara lain rapat internal Komite Audit serta rapat gabungan Komite Audit dengan internal audit dan eksternal audit. Informasi

COMMITTEE MEETING

Meeting Policy

The Audit Committee Charter stipulates that Audit Committee meetings must be held at least equal to the minimum number of Board of Director meetings, which is held periodically at least 1 (one) time a month.

Meeting Frequency and Attendance Level of Members

Throughout 2023, the Audit Committee held 29 meetings, including internal Audit Committee meetings and joint Audit Committee meetings with internal audit and external audit. Information on the

tentang tingkat kehadiran masing-masing anggota dijelaskan pada tabel berikut ini:

attendance level of each member is described in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Persentase Kehadiran** Percentage of Attendance
Arus Gunawan	Ketua Komite Chairman of the Committee	29	29	100%
Yon Arsal*	Anggota Komite Member of the Committee	6	3	50%
Kasan**	Anggota Komite Member of the Committee	8	8	100%
Peter Umar Abdila	Anggota Komite Member of the Committee	29	27	93%
Yulida S. Marbun	Anggota Komite Member of the Committee	29	29	100%

* **Masa jabatan beliau secara efektif berakhir pada 6 Oktober 2023 |** His term of office effectively ended on 6 October 2023
** **Masa jabatan beliau secara efektif dimulai pada 6 Oktober 2023 |** His term of office effectively began on 6 October 2023

Agenda Rapat

Rapat Komite Audit sepanjang tahun 2023 membahas berbagai agenda sebagai berikut:

Meeting Agenda

Throughout 2023, the Audit Committee meetings discussed various agendas as follows:

No.	**Tanggal Rapat** Date of Meeting	**Agenda Rapat** Meeting Agenda	**Peserta Rapat** Meeting Participants
1	26 Januari 2023 26 January 2023	***Update*** GRC ***Roadmap*** LPEI 2022 Update on GRC Roadmap LPEI 2022	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun
2	27 Januari 2023 27 Januari 2023	***Update*** progres Laporan Keuangan ***Audited*** Tahun 2022 – KAP RSM. Update on the progress of the 2022 Audited Financial Statements – KAP RSM.	1. Arus Gunawan 2. Yulida S. Marbun
3	27 Februari 2023 27 February 2023	Laporan SKAI SKAI Report	1. Arus Gunawan 2. Yulida S. Marbun
4	16 Maret 2023 16 March 2023	Laporan Kepatuhan Compliance Report	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun
5	29 Maret 2023 29 March 2023	***Update*** SKAI SKAI Update	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun
6	28 April 2023 28 April 2023	***Update*** Kepatuhan Compliance Update	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun
7	12 Mei 2023 12 May 2023	Laporan KAP RSM atas Hasil Audit Laporan Keuangan LPEI tahun 2022 KAP RSM Report on Audit Results of Indonesia Eximbank's Financial Statements in 2022	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun
8	19 Mei 2023 19 May 2023	Hasil Audit BPKP - Program Penjaminan Pemerintah BPKP Audit Results - Government Guarantee Program	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun
9	31 Mei 2023 31 May 2023	***Update*** Progres GRC GRC Progress Update	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun
10	19 Juni 2023 19 June 2023	***Update*** Kepatuhan Compliance Update	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun
11	26 Juni 2023 26 June 2023	***Update*** Teknologi Informasi Information Technology Update	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
12	27 Juni 2023 27 June 2023	Pemaparan *Management Letter*, PSA 62, dan Laporan Pengendalian Internal dan Target Penyelesaiannya. Presentation of Management Letter, PSA 62, and Internal Control Report and Target Completion.	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun
13	26 Juli 2023 26 July 2023	*Update* SKAI SKAI Update	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun
14	26 Juli 2023 26 July 2023	*Update* Kepatuhan Compliance Update	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun
15	16 Agustus 2023 16 August 2023	Evaluasi KAP RSM atas Audit 2022 KAP RSM Evaluation of 2022 Audit	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun
16	30 Agustus 2023 30 August 2023	Persetujuan Ijin Prinsip, Ruang Lingkup dan Anggaran untuk Audit Laporan Keuangan 2023 Approval of License in Principle, Scope and Budget for 2023 Audited Financial Statements	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun 4. Yon Arsal
17	30 Agustus 2023 30 August 2023	Pemaparan DMTL DMTL Exposure	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun 4. Yon Arsal
18	6 September 2023 6 September 2023	*Update* Divisi Kepatuhan Compliance Division Update	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun 4. Yon Arsal
19	29 September 2023 29 September 2023	*Update* SKAI SKAI Update	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun
20	29 September 2023 29 September 2023	*Update* Divisi Kepatuhan Compliance Division Update	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun
21	30 Oktober 2023 30 October 2023	Persetujuan Penunjukan KAP Approval of KAP Appointment	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun
22	30 Oktober 2023 30 October 2023	Progres SKAI SKAI Progress	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun 4. Kasan
23	30 November 2023 30 November 2003	*Update* Divisi Kepatuhan Compliance Division Update	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun 4. Kasan
24	30 November 2023 30 November 2003	*Update* Daftar *Monitoring* Temuan Audit Divisi Syariah Update of Sharia Division Audit Findings Monitoring List	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun 4. Kasan
25	7 Desember 2023 7 December 2023	Progres SKAI September 2023 SKAI Progress for September 2023	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun 4. Kasan
26	21 Desember 2023 21 December 2023	*Update* Kepatuhan September 2023 Compliance Update September 2023	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun 4. Kasan
27	28 Desember 2023 28 December 2023	Progres SKAI bulan Oktober 2023 SKAI Progress on October 2023	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun 4. Kasan
28	29 Desember 2023 29 December 2023	*Update* Divisi Kepatuhan bulan Oktober 2023 Compliance Division Update for October 2023	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun 4. Kasan
29	29 Desember 2023 29 December 2023	*Update* Divisi Kepatuhan bulan November 2023 Compliance Division Update for November 2023	1. Arus Gunawan 2. Peter Umar 3. Yulida S. Marbun 4. Kasan

RAPAT GABUNGAN DENGAN KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN DIREKTUR (*JOINT COMMITTEE*)

Selain mengadakan rapat internal secara berkala, Komite Audit juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan rapat gabungan antar-Komite Dewan Direktur (*joint committee*) untuk membahas hal-hal strategis yang perlu didiskusikan secara lintas komite. Pada tahun 2023, rapat gabungan ini sudah terselenggara sebanyak 4 kali dengan uraian sebagai berikut:

JOINT MEETING WITH COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS (JOINT COMMITTEE)

In addition to holding regular internal meetings, the Audit Committee also participates in organizing joint meetings between Board of Directors Committees (joint committee) to discuss strategic matters that need to be discussed across committees. In 2023, this joint meeting has been held 4 meetings with the following description:

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	
1.	22 Februari 2023 February 22, 2023	Pembahasan RPDD Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur Discussion of RPDD Guidelines for Board of Director Work Procedures	1. Arus Gunawan 2. Felia Salim 3. Chesna F. Anwar 4. Titiek Setiyowati 5. Wahyu P. Wibowo	6. I Nyoman Suarja 7. Putu Rahwidhiyasa 8. Benny K. Yudiaatmaja 9. Peter Umar 10. Yulida S. Marbun
2.	9 Juni 2023 June 9, 2023	Pembahasan Hapus Buku 2023 Discussion on 2023 Write-off	1. Arus Gunawan 2. Felia Salim 3. Agus Windiarto 4. Henry Sihotang 5. Titiek Setiyowati	6. I Nyoman Suarja 7. Benny K. Yudiaatmaja 8. Peter Umar 9. Yulida S. Marbun
3.	27 September 2023 September 27, 2023	1. Pembahasan RPDD Tata Kelola yang baik 2. Pembahasan RPDD Komite Integrasi 1. Discussion of RPDD Good Governance 2. Discussion of Integration Committee RPDD	1. Peter Umar 2. Yulida S. Marbun 3. Putu Rahwidhiyasa	
4.	22 November 2023 November 22, 2023	1. Pembahasan RKAB 2024 2. Pembahasan RPDD SPI dan Barang & Jasa 3. Laporan Produk dan Aktivitas baru – AP *Financing* 1. Discussion of RKAB 2024 2. Discussion of RPDD SPI and Goods & Services 3. Report on new products and activities - AP Financing	1. Arus Gunawan 2. D. James Rompas 3. Putu Rahdhiyasa	4. Benny Kastawa 5. Yulida S Marbun 6. Peter Umar

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2023

Pada tahun 2023, beberapa anggota Komite Audit telah mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan uraian sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2023

In 2023, several members of the Audit Committee have participated in training and competency development activities to support the effectiveness of the implementation of their duties and responsibilities, with the following description:

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Judul Program Title of Program	Penyelenggara Organizer
Yulida S. Marbun	10 November 2023 10 November 2023	*Market Conduct* dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pasca Penerbitan POJK No. 6/POJK.07/2022 dan UU P2SK Market Conduct and Consumer Protection in the Financial Services Sector After the Issuance of POJK No. 6/POJK.07/2022 and P2SK Law	LPPI
Peter Umar A	10 November 2023 10 November 2023	*Market Conduct* dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pasca Penerbitan POJK No. 6/POJK.07/2022 dan UU P2SK Market Conduct and Consumer Protection in the Financial Services Sector After the Issuance of POJK No. 6/POJK.07/2022 and P2SK Law	LPPI

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2023

Penjelasan tentang program kerja serta objek dan sasaran Komite Audit untuk tahun 2023, dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

COMMITTEE TASK IMPLEMENTATION REPORT 2023

An explanation of the Audit Committee's work program and objects and objectives for 2023 is provided in the table below:

No.	Program Kerja Tahun 2023 Work Program in 2023	Objek Target	Sasaran Objects
1.	Melakukan supervisi, memberikan konsultasi, dan melaksanakan *review* atas penyusunan dan realisasi atas RKAT dan IKU Indonesia Eximbank, Internal Audit, dan *Compliance*. Conducting supervision, providing consultation, and conducting reviews on the preparation and realization of the 2023 Indonesia Eximbank RKAT and IKU, Internal Audit, and Compliance.	- RKAT dan IKU 2023 INDONESIA EXIMBANK. - RKAT dan IKU 2023 Internal Audit dan *Compliance*. - 2023 Indonesia Eximbank RKAT and IKU. - 2023 Internal Audit and Compliance RKAT and IKU.	- Mengawasi pemenuhan seluruh rencana audit sudah disusun berdasarkan *assessment* risiko dan telah tercakup dalam RAT. - Mengawasi pemenuhan pelaksanaan GCG telah dilaksanakan sesuai *best practices*. - Mengawasi pemenuhan realisasi kinerja Indonesia Eximbank, Internal Audit, dan *Compliance* telah sesuai RKAT dan IKU serta mengidentifikasi kendala yang ada. - Supervising the fulfillment of all audit plans that have been prepared based on risk assessments and are covered in the RAT. - Supervising the implementation of GCG compliance has been carried out according to best practices. - Supervising the fulfillment of Indonesia Eximbank, Internal Audit, and Compliance performance realization according to RKAT and IKU and identifying existing obstacles.
2	Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal terkait secara berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan Indonesia Eximbank dan strategi pencapaiannya. Coordinating continuously with external parties related to meeting the needs of Indonesia Eximbank and its achievement strategies.	Kolaborasi dengan *stakeholder* utama Komite Audit antara lain BPK, OJK. Collaboration with key stakeholders such as the Audit Committee including BPK and OJK.	Memenuhi kebutuhan Indonesia Eximbank. Fulfill the needs of Indonesia Eximbank.
3	Melakukan supervisi, memberikan konsultasi, dan melaksanakan kolaborasi dengan pihak terkait secara detail urutan langkah mulai dari yang paling penting dan *urgent* (*critical milestones*) yang harus dipenuhi beserta *timeline* atau target waktu masing-masing *milestones* dan strategi pencapaiannya. Supervising, providing consultation, and executing collaboration with relevant parties in detail, starting from the most important and urgent steps (critical milestones) that need to be met along with the timeline or target time for each milestone and its achievement strategy.	Tanggapan dan tindak lanjut temuan Auditor Eksternal (BPK, OJK), Kantor Akuntan Publik, dan Divisi Internal Audit. Response and follow-up on findings from External Auditors (BPK, OJK), Public Accounting Firms, and Internal Audit Division.	Mengawasi pemenuhan temuan audit telah ditindaklanjuti dan sesuai komitmen. Ensuring that audit findings are addressed and followed up on in accordance with commitments.
4	- Melakukan *review* dan memberikan konsultasi konsep GRC dan *Three Lines Model* (*Three lines of Defense*). - Melakukan *review* dan memberikan konsultasi metodologi *Risk Based Audit*. - Reviewing and providing consultation on the concepts of GRC (Governance, Risk, and Compliance) and the Three Lines Model (Three lines of Defense). - Reviewing and providing consultation on the Risk Based Audit methodology.	Penguatan penerapan fungsi Audit Internal. Strengthening the implementation of the Internal Audit function.	Pemantauan terhadap pengembangan fungsi Audit Internal sesuai konsep GRC & 3-*Lines Model* dan *Risk Based Audit* yang dilakukan oleh Divisi Internal Audit. Monitoring the development of the Internal Audit function in line with the concepts of GRC & 3-Lines Model and Risk Based Audit conducted by the Internal Audit Division.

No.	Program Kerja Tahun 2023 Work Program in 2023	Objek Target	Sasaran Objects
5	Melakukan Koordinasi Asistensi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam memonitor sistem pencegahan dan penindakan (*profiling, whistle blowing*). Coordinating with the Inspectorate General of the Ministry of Finance in monitoring the prevention and enforcement system (profiling, whistleblowing).	Kolaborasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu tentang sistem pencegahan dan penindakan, IT Audit, *Data Analytic*, dan lainnya. Collaborating with the Inspectorate General of the Ministry of Finance on prevention and enforcement systems, IT Audit, Data Analytics, and others.	Memenuhi Kebutuhan Indonesia Eximbank. Meeting the needs of Indonesia Eximbank.
6	Melakukan *review* dan memberikan konsultasi dalam rangka implementasi kebijakan manajemen risiko Indonesia Eximbank. Conducting a review and providing consultancy for the implementation of risk management policies at Indonesia Eximbank.	Peran konsultansi komite audit untuk pengembangan manajemen risiko dan tata kelola Indonesia Eximbank dan IT. The audit committee's consultancy role in the development of risk management and governance at Indonesia Eximbank and IT.	- *Risk Appetite Statement* (RAS). - *Risk Profile* Indonesia Eximbank. - Implementasi kerangka kerja GRC termasuk ERM yang memadai. - Fungsi organisasi manajemen risiko yang efektif dan kapabilitas dan kapasitas SDM yang memadai. - Risk Appetite Statement (RAS). - Indonesia Eximbank Risk Profile. - Implementation of a GRC framework including adequate ERM. - Effective risk management organizational functions and sufficient human resource capabilities and capacities.
7	Melakukan *review* dan memberikan konsultasi kepada divisi kepatuhan dalam rangka implementasi Kebijakan Tata Kelola Indonesia Eximbank. Conducting a review and providing consultancy to the compliance division for the implementation Indonesia Eximbank Governance Policy.	Kegiatan pemantauan GCG oleh Divisi Kepatuhan. Monitoring activities of Corporate Governance (GCG) by the Compliance Division. Comprehensive Indonesia Eximbank	Kebijakan Tata Kelola Indonesia Eximbank yang komprehensif, antara lain: - Implementasi *Whistle Blower System*. - Sistim pengendalian dan pengawasan intern (termasuk Sistem/mekanisme *monitoring* penyaluran fasilitas pembiayaan dalam rangka mendorong ekspor nasional. - Pedoman perilaku etika. Governance Policy including: - Implementation of Whistleblower System. - Internal control and monitoring system (including system/mechanism for monitoring financing facilities disbursement to promote national exports). - Code of Ethics guidelines.
8	Melakukan *review* dan memberikan konsultasi kepada unit TSI dalam rangka implementasi Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi TSI – Indonesia Eximbank. Conducting a review and providing consultancy to the TSI unit for the implementation of TSI - Indonesia Eximbank Information Technology Governance Policy.	Tata Kelola TI oleh Unit TSI. IT Governance by the TSI Unit. Including:	- Implementasi *Network* dan *Infrastructure* Teknologi Informasi , *Application Architecture, Main Issue Data Resume*, yang memenuhi standar *Best Practices*. - Implementasi *Financial Reporting* - PSAK 71. - Implementasi MIS dan *Data Governance* yang memenuhi standar *best practices*. - Implementation of Network and Information Technology Infrastructure, Application Architecture, Main Issue Data Resume, meeting Best Practices standards. - Implementation of Financial Reporting - PSAK 71. - Implementation of Management Information System (MIS) and Data Governance meeting best practices standards.
9	Melakukan *review* dan memberikan konsultasi atas penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Divisi Internal Audit dan Spesial Audit tahun 2023. Conducting a review and providing consultation on the preparation of the Annual Examination Work Program for the Internal Audit Division and Special Audit Division for the year 2023.	Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Divisi Internal Audit dan Divisi Special Audit tahun 2023. The Annual Examination Work Program for the Internal Audit Division and Special Audit Division for the year 2023.	- Mengawasi pemenuhan seluruh Rencana Audit telah tercakup dalam RAT dan pelaksanaan investigasi berjalan sesuai ketentuan dan kebijakan. - *Audit Charter, Audit Rating*, Manual & Prosedur Audit, dan Special Audit. - Overseeing the fulfillment of all Audit Plans included in the Audit Work Plan (RAT) and ensuring that investigations are carried out in accordance with provisions and policies. - Audit Charter, Audit Rating, Audit Manuals & Procedures, and Special Audit.

No.	Program Kerja Tahun 2023 Work Program in 2023	Objek Target	Sasaran Objects
10	Mengkoordinasikan kajian dan Penyempurnaan Laporan Pengawasan RKAT Semester II 2022 dan Semester I 2023 (*Review & Consulting*). Coordinating the review and refinement of the Supervision Reports for the Second Semester of 2022 and the First Semester of 2023 RKAT (Review & Consulting).	- Laporan Pengawasan RKAT Semester II 2022. - Laporan Pengawasan RKAT Semester I 2023. - Supervision Report for the Second Semester of 2022 RKAT. - Supervision Report for the First Semester of 2023 RKAT.	Laporan Pengawasan RKAT telah sesuai dan tepat waktu. The RKAT Supervision Reports have been completed and submitted on time.
11	Melakukan *review* dan memberikan konsultasi secara detail urutan langkah mulai dari yang paling penting dan *urgent* (*critical milestones* yang harus dipenuhi beserta *timeline* atau target waktu masing-masing *milestones* dan strategi pencapaiannya). Conducting a detailed review and consultation outlining the sequence of steps starting from the most important and urgent (critical milestones that must be met along with the timeline or target time for each milestone and its achievement strategy).	Asuransi atas akuntabilitas terhadap pihak-pihak internal Indonesia Eximbank yang terlibat dalam keputusan kredit kepada debitur masalah (*post-mortem review*). Insurance on accountability towards internal stakeholders of Indonesia Eximbank involved in credit decisions to debtor issues (post-mortem review).	- *Review* investigasi untuk menentukan akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat mulai dari Proses inisiasi, Proses analisa kredit, Proses Komite dan keputusannya, Proses sebelum *disbursement* termasuk proses pemenuhan covenant dan proses pengikatan agunan, Proses *post-disbursement* dan monitoring. - Tercapainya Skenario Relaksasi Pembiayaan PL dan Restukturisasi Pembiayaan NPL. - Tercapainya Skenario Pembiayaan NIA, Penjaminan, Asuransi dan *Trade Finance*. - Review of investigations to determine the accountability of all parties involved starting from the initiation process, credit analysis process, Committee process and its decisions, pre-disbursement process including covenant fulfillment process and collateral binding process, post-disbursement process, and monitoring process. - Achievement of Relaxation Scenario for PL Financing and Restructuring of NPL Financing. - Achievement of Financing Scenarios for NIA, Guarantee, Insurance, and Trade Finance.
12	Koordinasi pelaksanaan audit laporan keuangan KAP dan evaluasi Kinerja KAP – RSM. Coordinate the implementation of financial statement audits by the Public Accounting Firm (KAP) and evaluate the Performance of KAP - RSM.	- Kinerja KAP – RSM tahun buku 2022. - Pelaksanaan audit KAP tahun buku 2022 dan 2023. - Performance evaluation of KAP - RSM for the fiscal year 2022.	- Memberi evaluasi kinerja KAP – RSM tahun buku 2021. - Melakukan koordinasi dengan KAP terkait pelaksanaan audit laporan keuangan. - Implementation of KAP audits for the fiscal years 2022 and 2023. - Providing performance evaluation of KAP - RSM for the fiscal year 2021. - Coordinate with the Public Accounting Firms (KAP) regarding the implementation of financial statement audits.
13	Supervisi dan *Review*: Penyusunan Laporan Pokok-Pokok Kegiatan Komite Audit kepada Dewan Direktur. Supervision and Review: Preparation of the Main Activities Report of the Audit Committee to the Board of Directors.	Laporan Triwulanan Pokok-Pokok Kegiatan Komite Audit. Quarterly Report of Main Activities of the Audit Committee..	Penyusunan kegiatan Komite Audit untuk setiap 3 bulanan kepada Dewan Direktur. Preparation of Audit Committee activities every three months to the Board of Directors
14	Supervisi dan *Review*: - Rapat Internal Komite Audit. - Pemantauan dan Pengawasan yang bersifat periodik dan *adhoc* terkait pelaksanaan Audit Plan Divisi Internal Audit dan Divisi Special Audit/Laporan Kasus *Fraud*, dan *Compliance*. - Rapat *Joint Committee* (KPR, KRN). - Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan *Action Plan* yang sudah disepakati.	Pengaturan Agenda Rapat dari Komite Audit kepada Rapat Dewan Direktur.	Rapat menghasilkan rekomendasi perbaikan, dalam hal ini terhadap hasil audit dan tindak lanjut perbaikan sehingga terhindar temuan berulang.

No.	Program Kerja Tahun 2023 Work Program in 2023	Objek Target	Sasaran Objects
	Supervision and Review: - Internal Audit Committee Meetings. - Periodic monitoring and supervision, as well as ad hoc oversight related to the implementation of the Internal Audit Division's Audit Plan and the Special Audit Division/Fraud Case Reports, and Compliance. - Joint Committee Meetings (KPR, KRN). - Monitoring and supervision of the implementation of agreed-upon Action Plans.	Setting the Meeting Agenda from the Audit Committee to the Board of Directors Meeting.	The meetings generate improvement recommendations, particularly regarding audit findings and follow-up actions to prevent recurring issues.
15	Melakukan *monitoring* Unit Bisnis Syariah dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).	Memahami dan memonitor Unit Bisnis Syariah dan SPV baik dari aspek tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.	Implementasi aspek tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang optimal dari Unit Bisnis Syariah dan SPV.
	Monitoring the Sharia Business Unit and Special Purpose Vehicle (SPV).	Understanding and monitoring the Sharia Business Unit and SPV in terms of governance, risk management, and control aspects.	Implementing optimal governance, risk management, and control aspects for the Sharia Business Unit and SPV.
16	Pembahasan Rencana Kerja (RKAT) Internal Audit, Kepatuhan, dan Komite Audit tahun 2023.	Melakukan pembahasan RKAT tahun 2023: - Internal Audit agar memperhatikan aspek *risk-based* dan *current issue*. - Unit Kepatuhan agar memperhatikan aspek tata kelola dan pengendalian dari manajemen. - Komite Audit agar memperhatikan arahan dari Dewan Direktur.	RKAT Internal Audit, Kepatuhan dan Komite Audit untuk tahun 2023 yang efisien dan efektif dalam memberikan nilai tambah (*deliver added value*) kepada seluruh stakeholder di Indonesia Eximbank.
	Discussion on the 2023 Internal Audit, Compliance, and Audit Committee Work Plan (RKAT).	Discussing the 2023 Work Plan: - Internal Audit to focus on risk-based aspects and current issues. - Compliance Unit to focus on governance and control aspects from management. - Audit Committee to consider directives from the Board of Directors.	Efficient and effective Internal Audit, Compliance, and Audit Committee Work Plan for 2023 that delivers added value to all stakeholders in Indonesia Eximbank.
17	Melakukan *review* Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).	Melakukan *review* Piagam Komite Audit untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi, arahan Dewan Direktur maupun praktik terkini.	Piagam Komite Audit yang relevan dan mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit yang optimal.
	Reviewing the Audit Committee Charter.	Reviewing the Audit Committee Charter to ensure compliance with regulations, directives from the Board of Directors, and current practices.	Relevant Audit Committee Charter that supports the optimal performance of the Audit Committee's duties.
18	- Melakukan fungsi supervisi dan pelaksanaan konsultasi lainnya sesuai penugasan dari Dewan Direktur. - Memberikan masukan kepada Dewan Direktur.	Tugas-tugas lainnya dari Dewan Direktur sesuai bidang tugas Komite.	Memenuhi Kebutuhan Indonesia Eximbank.
	- Performing supervisory functions and carrying out other consultations as assigned by the Board of Directors. - Providing input to the Board of Directors.	Other tasks assigned by the Board of Directors within the scope of the Committee's duties.	Fulfilling the needs of Indonesia Eximbank.
19	Mengikuti pelatihan, *workshop* dan sertifikasi lainnya.	Peningkatan kompetensi dan Profesionalisme anggota Komite.	Komite Audit yang profesional.
	Attending training, workshops, and other certifications.	Enhancing the competence and professionalism of committee members	A professional Audit Committee.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
Remuneration and Nomination Committee

Dalam upaya untuk meningkatkan implementasi prinsip GCG, khususnya dalam menjaga transparansi proses Remunerasi dan Nominasi Dewan Direktur serta Direktur Pelaksana, LPEI telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi. Fungsi utama Komite ini adalah memberikan dukungan kepada Dewan Direktur dalam perumusan kebijakan terkait Nominasi dan Remunerasi.

In an effort to improve the implementation of GCG principles, particularly in maintaining the transparency of the Remuneration and Nomination process of the Board of Directors and Managing Director, Indonesia Eximbank has established a Remuneration and Nomination Committee. The main function of this Committee is to provide support to the Board of Directors in formulating policies related to Nomination and Remuneration.

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI dilaksanakan dengan berlandaskan pada PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pasal 8 ayat (1) PMK 208/2021 mengamanatkan bahwa Dewan Direktur perlu membentuk komite-komite pendukung, salah satunya adalah Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur. Dewan Direktur wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.

LEGAL BASIS

The establishment of the Indonesia Eximbank Remuneration and Nomination Committee is carried out based on PMK No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. Article 8 paragraph (1) of PMK 208/2021 mandates that the Board of Directors needs to form supporting committees, one of which is the Remuneration and Nomination Committee. The appointment of committee members as intended is carried out by the Executive Director based on the decision of the Board of Directors meeting. The Board of Directors must ensure that the established committees carry out their duties effectively.

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI merupakan regulasi internal yang menjadi pedoman serta tata tertib kerja Komite. Dokumen ini telah ditetapkan melalui Peraturan Dewan Direktur No. 0007/PDD/12/2022 tentang Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai pedoman dan tata tertib kerja komite, yang mengatur tentang a) struktur dan keanggotaan; b) tugas, wewenang dan tanggung jawab; c) mekanisme dan ketentuan kerja, termasuk tata tertib rapat, mekanisme pengambilan keputusan rapat komite, pertanggungjawaban dan pelaporan; d) kode etik dan waktu kerja; dan e) evaluasi kinerja. Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 38 PMK 208/2021.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE CHARTER

The Indonesia Eximbank Remuneration and Nomination Committee Charter is an internal regulation that serves as a guideline and work order for the Committee. This document has been established through the Board of Directors Regulation No. 0007/PDD/12/2022 on the Remuneration and Nomination Committee Guidelines for the Indonesia Eximbank.

The Remuneration and Nomination Committee carries out its duties and responsibilities in accordance with the committee's guidelines and work rules, which regulate a) structure and membership; b) duties, authorities and responsibilities; c) work mechanisms and conditions, including meeting rules, committee meeting decision-making mechanisms, accountability and reporting; d) code of ethics and working time; and e) performance evaluation. This is in line with the provisions contained in Article 38 of PMK 208/2021.

KOMPOSISI DAN PROFIL KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sesuai dengan PMK 208/2021 pasal 37 ayat (3), komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri atas 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua, 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai anggota, dan 1 (satu) orang pejabat LPEI yang membawahi bidang sumber daya manusia sebagai anggota.

Pada tahun 2023, komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi mengalami perubahan sebagaimana dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini:

COMPOSITION AND PROFILE OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

In accordance with PMK 208/2021 Article 37 paragraph (3), the composition of the Remuneration and Nomination Committee consists of 1 (one) member of the Board of Directors as chairman, 1 (one) member of the Board of Directors as member, and 1 (one) Indonesia Eximbank official in charge of human resources as member.

The composition of Indonesia Eximbank Remuneration and Nomination Committee as of 31 December 2023, is as follows:

Periode 1 Januari – 14 September 2023

Period of 1 January – 14 September 2023

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Hukum Pengangkatan** Legal Basis of Appointment
Suminto	Ketua Komite Chairman of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0035/KDE/06/2020 Decree of Executive Director No. 0035/KDE/06/2020
Kasan	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0035/KDE/06/2020 Decree of Executive Director No. 0035/KDE/06/2020
Wahyu P. Wibowo	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0035/KDE/06/2020 Decree of Executive Director No. 0035/KDE/06/2020

Periode 15 September 2023 – 31 Desember 2023

Periode 15 September 2023 – 31 Desember 2023

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Hukum Pengangkatan** Legal Basis of Appointment
Yon Arsal	Ketua Komite Chairman of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0039/KDE/09/2023 Decree of Executive Director No. 0039/KDE/09/2023
D. James Rompas	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0039/KDE/09/2023 Decree of Executive Director No. 0039/KDE/09/2023
Wahyu P. Wibowo	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0039/KDE/09/2023 Decree of Executive Director No. 0039/KDE/09/2023

Berikut ini adalah profil dari anggota Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI:

The following is the profile of LPEI Remuneration and Nomination Committee members:

Suminto
Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Chairman of Remuneration and Nomination Committee

Usia	51 tahun
Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Rangkap Jabatan	Anggota Dewan Direktur LPEI Member of the Board of Directors of Indonesia Eximbank

Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan Subbab Profil Dewan Direktur.
His complete profile has been described in the Company Profile Chapter of the Board of Directors Profile Subchapter.

D. James Rompas **Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi** Member of Remuneration and Nomination Committee	
Usia	65 tahun
Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Rangkap Jabatan	Anggota Dewan Direktur LPEI Member of the Board of Directors of Indonesia Eximbank
Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan Subbab Profil Dewan Direktur. His complete profile has been described in the Company Profile Chapter of the Board of Directors Profile Subchapter.	

Wahyu P. Wibowo **Anggota** Member	
Usia	58 tahun
Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Rangkap Jabatan	Head of Kepatuhan, SDM & Transformasi Organisasi LPEI Head of Compliance, Human Resources & TO of Indonesia Eximbank
Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan Subbab Profil Manajemen Senior. His complete profile has been described in the Company Profile Chapter of the Board of Directors Profile Subchapter.	

PERIODE DAN MASA JABATAN

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi disesuaikan yang juga menjabat sebagai Dewan Direktur, masa jabatannya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengangkatan Dewan Direktur, yaitu 5 (lima) tahun, dan tidak dapat melebihi masa jabatannya sebagai anggota Dewan Direktur. Sedangkan anggota komite yang bukan merupakan anggota Dewan Direktur memiliki masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali paling lama selama 3 (tiga) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Direktur Eksekutif untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Hal ini telah diatur dalam PMK 208/2021 pasal 8 ayat (4).

PERIOD AND TERM OF OFFICE

Members of the Remuneration and Nomination Committee who also serve on the Board of Directors, their term of office is adjusted to the Decree of the Minister of Finance on the Appointment of the Board of Directors, which is 5 (five) years, and cannot exceed their term of office as a member of the Board of Directors. Meanwhile, committee members who are not members of the Board of Directors have a maximum term of office of 3 (three) years and can be extended once for a maximum of 3 (three) years, without prejudice to the right of the Executive Director to dismiss them at any time. This has been regulated in PMK 208/2021 Article 8 paragraph (4).

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengatur tentang independensi anggota komite, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultan lain kepada LPEI dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Direktur LPEI.

INDEPENDENCE OF COMMITTEE MEMBERS

The Remuneration and Nomination Committee Charter has regulated the independence of committee members, as described below:

1. Not an insider of a public accounting firm, legal consulting firm or other party that provides audit services, non-audit services and/or other consulting services to Indonesia Eximbank within the last 6 (six) months before being appointed as a member of the Remuneration and Nomination Committee.
2. Has no family relationship by marriage and descent to the second degree, either horizontally or vertically with the Indonesia Eximbank Board of Directors.

3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha LPEI.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi telah diatur dalam Piagam Komite yang mengadopsi aturan dalam Pasal 41 PMK 208/2021. Berdasarkan aturan tersebut, tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Direktur terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran, sasaran, dan strategi jangka panjang LPEI.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Menteri.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif.
5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
6. Merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan nominasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain memberikan usulan kriteria seleksi dan prosedur nominasi, serta menyusun sistem penilaian.
7. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Dewan Direktur.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai anggota DPS dan Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.
9. Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan kebijakan nominasi.

SUKSESI DIREKTUR PELAKSANA

Sebagai bagian dari proses regenerasi demi kelangsungan bisnis lembaga, LPEI memiliki kebijakan suksesi Direktur Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0008/PDD/12/2018 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diselaraskan dengan Pasal 29 UU No. 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

3. Has no business relationship either directly or indirectly related to the business activities of Indonesia Eximbank.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee have been regulated in the Committee Charter which adopts the rules in Article 41 of PMK 208/2021. Based on these rules, the duties and responsibilities carried out by the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

1. Assist the Board of Directors regarding remuneration and nomination policies.
2. Evaluate the remuneration policy based on Indonesia Eximbank performance, risk, fairness, objectives, and long-term strategy.
3. Provide recommendations to the Board of Directors regarding the remuneration policy of the Board of Directors, Executive Director, and Managing Director to be submitted to the Minister.
4. Provide recommendations to the Board of Directors regarding employee remuneration policies to be submitted to the Executive Director.
5. Conduct periodic evaluations of the implementation of the remuneration policy.
6. Recommend to the Board of Directors regarding employee nomination policies to be submitted to the Executive Director, including providing proposals for selection criteria and nomination procedures, as well as developing an assessment system.
7. Prepare and provide recommendations regarding the system and procedures for the selection and/or replacement of the Managing Director to be submitted to the Board of Directors.
8. Provide recommendations to the Board of Directors regarding DPS members and Independent Parties who will become members of the Committee.
9. Conduct periodic evaluations of the implementation of the nomination policy.

MANAGING DIRECTOR SUCCESSION

As part of the regeneration process for the continuity of the institution's business, Indonesia Eximbank has a Managing Director succession policy stipulated in Board of Director Regulation No. 0008/PDD/12/2018 concerning Procedures for Proposing, Appointing and Dismissing Managing Directors of the Indonesian Export Financing Agency in line with Article 29 of Act No. 2/2009 concerning the Indonesian Export Financing Agency.

Kebijakan tersebut juga mengatur komposisi Direktur Pelaksana yaitu paling banyak 5 (lima) orang dan paling banyak 4 (empat) di antaranya berasal dari internal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dalam aturan itu juga ditetapkan bahwa Direktur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul Direktur Eksekutif.

The policy also regulates the composition of the Managing Director, which is a maximum of 5 (five) people and a maximum of 4 (four) of them come from within the Indonesia Export Financing Agency. The regulation also stipulates that the Managing Director is appointed and dismissed by the Board of Directors on the proposal of the Executive Director.

Informasi tentang alur suksesi Direktur Pelaksana diuraikan lebih rinci dalam bagan berikut ini:

Information on the flow of succession of the Managing Director is described in more detail in the following chart:

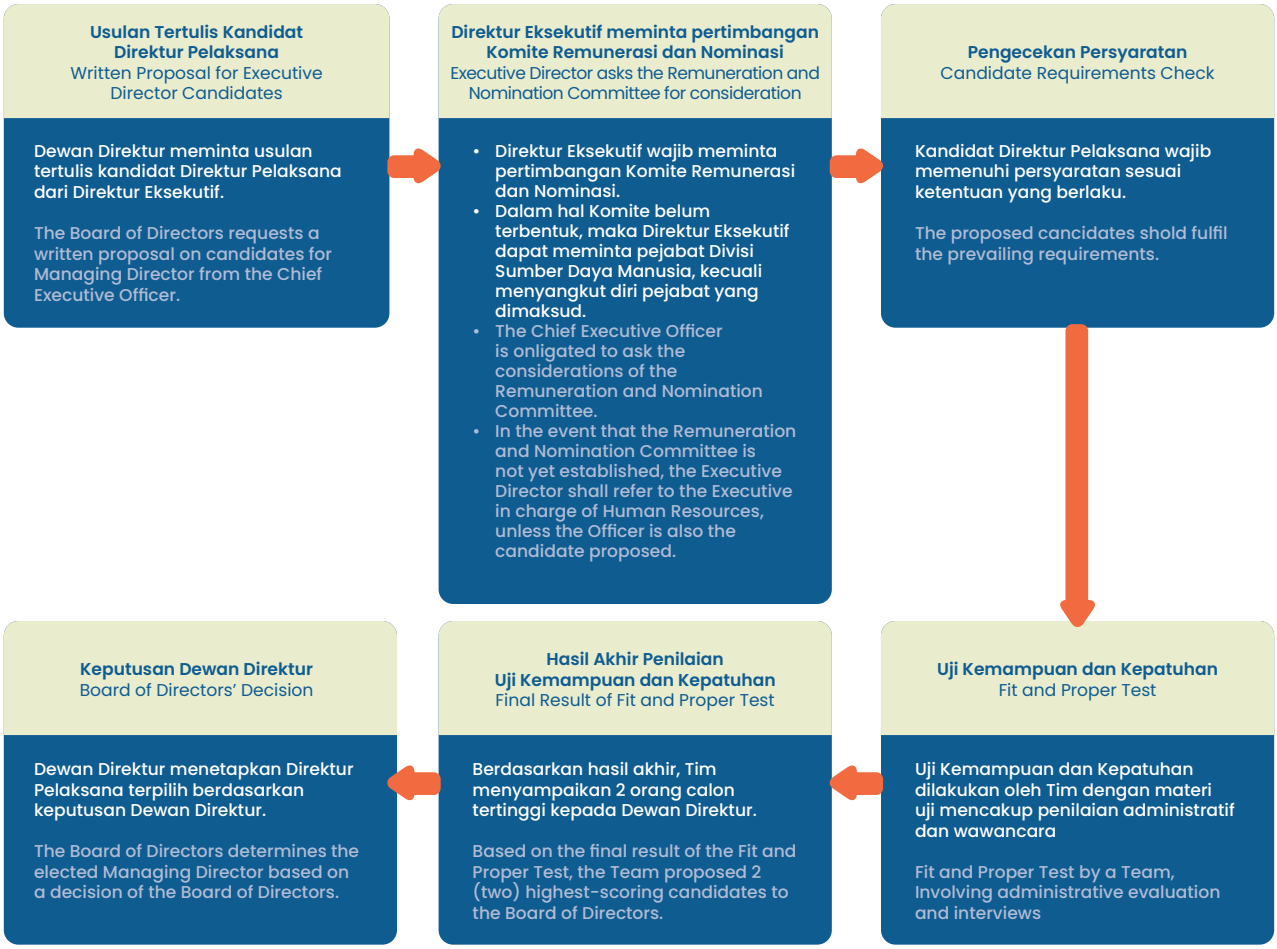

RAPAT KOMITE

Kebijakan Rapat

Sebagaimana tecantum dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi No. PDD 0007/PDD/09/2022, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyelenggarakan Rapat Komite paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang ketua dan seorang anggota. Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

COMMITTEE MEETING

Policy Meeting

As stated in the Remuneration and Nomination Committee Charter No. PDD 0007/PDD/09/2022, the Remuneration and Nomination Committee shall hold Committee Meetings at least 2 (two) times a year. Committee meetings can only be held if attended by at least the chairman and one member. The results of the committee meeting are set out in the minutes of the meeting and are well documented.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota

Selama tahun 2023 Komite Remunerasi dan Nominasi melangsungkan rapat sebanyak 5 (lima) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota dijelaskan pada tabel berikut ini:

Meeting Frequency and Attendance Level of Members

Throughout 2023, the Remuneration and Nomination Committee held 5 (five) meetings, with the attendance rate of each member described in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Persentase Kehadiran** Percentage of Attendance
Suminto*	Ketua Komite Chairman	2	2	100%
Kasan*	Anggota Komite Member of Committee	2	2	100%
Yon Arsal	Ketua Komite Chairman	3	3	100%
D. James Rompas	Anggota Komite Member of Committee	3	3	100%
Wahyu P. Wibowo	Anggota Komite Member of Committee	5	5	100%

* masa jabatan sebagai anggota Dewan Direktur berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023
term of office as a member of the Board of Directors ends on 31 August 2023

Agenda Rapat

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2023 membahas berbagai agenda sebagai berikut:

Meeting Agenda

The Remuneration and Nomination Committee meetings throughout 2023 discussed various agendas as follows:

No.	**Tanggal Rapat** Date of Meeting	**Agenda Rapat** Meeting Agenda	**Peserta Rapat** Meeting Participants
1	1 April 2023 1 April 2023	Pembahasan Review Remunerasi DE, DD dan DP LPEI Discussion on Remuneration Review of DE, DD and DP of Indonesia Eximbank	1. Suminto 2. Kasan 3. Wahyu P Wibowo
2	18 Juli 2023 18 July 2023	1. Perkenalan Komisaris Utama PT IEB Prima Aset 2. Usulan Perpanjangan Masa Kerja DPS 3. Warnasari 1. Introduction of President Commissioner of PT IEB Prima Aset 2. Proposed Extension of DPS Working Period 3. Warnasari	1. Suminto 2. Kasan 3. Wahyu P Wibowo
3	18 September 2023 18 September 2023	Short Brief Tugas, Tanggung Jawab dan rencana kerja KRN LPEI Short Brief of Duties, Responsibilities and work plan of KRN Indonesia Eximbank	1. Yon Arsal 2. D. James Rompas 3. Wahyu P Wibowo
4	27 Oktober 2023 27 October 2023	Susunan Pengurus PT IEB Prima Aset Management composition of PT IEB Prima Aset	1. Yon Arsal 2. D. James Rompas 3. Wahyu P Wibowo
5	2 November 2023 2 November 2023	Presentation Deck tentang Assesment LPEI Presentation Deck on Indonesia Eximbank Assessment	1. Yon Arsal 2. D. James Rompas 3. Wahyu P Wibowo
6	30 November 2023 30 November 2023	Presentasi Deloitte terkait usulan Struktur Organisasi dan Reward Strategy Deloitte presentation on proposed Organizational Structure and Reward Strategy	1. Yon Arsal 2. D. James Rompas 3. Wahyu P Wibowo
7	4 Desember 2023 4 December 2023	Pembentukan Panitia Seleksi dan Asuransi Kesehatan Manajemen Formation of Selection Committee and Management Health Insurance	1. Yon Arsal 2. D. James Rompas 3. Wahyu P Wibowo

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2023

Pada tahun 2023, beberapa anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan uraian sebagai berikut:

Competency Development Program in 2023

In 2023, several members of the Remuneration and Nomination Committee have participated in training and competency development activities to support the effectiveness of the implementation of their duties and responsibilities, with the following description:

Nama Name	**Tanggal Pelaksanaan** Date of Implementation	**Judul Program** Title of Program	**Penyelenggara** Organizer
Wahyu P. Wibowo	23 November 2023	*The intersection of tehcnology and the people transforming the workplace*	HR & Workplace Indonesia Summit 2023

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2023

Di tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang diemban. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Direktur guna pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan proses nominasi dan penetapan remunerasi.

Sepanjang tahun 2023 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menuntaskan program-program kerja berikut:

1. Menelaah pelaksanaan kebijakan remunerasi.
2. Pembahasan DD mengenai usulan gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya DD, DE dan DP.
3. Pembahasan Seleksi Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko.

Committee Duties Implementation Report 2023

In 2023, the Remuneration and Nomination Committee will carry out its duties in accordance with its responsibilities and functions. The Remuneration and Nomination Committee has submitted recommendations to the Board of Directors for decision making and the preparation of policies necessary for implementing the nomination process and determining remuneration.

Throughout 2023, the Remuneration and Nomination Committee has completed the following work programs:

1. Review the implementation of the remuneration policy.
2. DD's discussion on the proposed salary, income and other benefits of DD, DE and DP.
3. Discussion on Selection of Managing Director for Risk Management.

Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Pemantau Risiko LPEI dilaksanakan dengan berlandaskan pada PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pasal 8 ayat (1) PMK 208/2021 mengamanatkan bahwa Dewan Direktur perlu membentuk komite-komite pendukung, salah satunya adalah Komite Pemantau Risiko. Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur. Dewan Direktur wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko bertujuan untuk membantu Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko melalui pemantauan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi tentang Risiko kegiatan usaha dan operasional LPEI. Hal ini selaras dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 28/2021 pasal 40 ayat (1).

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Piagam Komite Pemantau Risiko LPEI merupakan regulasi internal yang menjadi pedoman serta tata tertib kerja Komite. Dokumen ini telah ditetapkan melalui Peraturan Dewan Direktur No. 0006/PDD/09/2022 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai pedoman dan tata tertib kerja komite, yang mengatur tentang a) struktur dan keanggotaan; b) tugas, wewenang dan tanggung jawab; c) mekanisme dan ketentuan kerja, termasuk tata tertib rapat, mekanisme pengambilan keputusan rapat komite, pertanggungjawaban dan pelaporan; d) kode etik dan waktu kerja; dan e) evaluasi kinerja. Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam PMK 208/2021 pasal 38.

LEGAL BASIS

The establishment of the LPEI Risk Monitoring Committee was carried out based on PMK No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles and Know Your Customer Principles for Indonesian Export Financing Institutions. Article 8 paragraph (1) PMK 208/2021 mandates that the Board of Directors needs to form supporting committees, one of which is the Risk Monitoring Committee. The appointment of committee members is carried out by the Executive Director based on the decision of the Board of Directors meeting. The Board of Directors is obliged to ensure that the committees that have been formed carry out their duties effectively.

The establishment of the Risk Monitoring Committee aims to assist the Board of Directors in ensuring the effectiveness of the implementation of Risk Management through monitoring, evaluating and providing recommendations regarding the risks of LPEI's business and operational activities. This is in line with the provisions regulated in PMK 28/2021 Article 40 paragraph (1).

RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER

The Indonesia Eximbank Risk Monitoring Committee Charter is an internal regulation that serves as guidelines and work rules for the Committee. This document has been stipulated through Board of Directors Regulation No. 0006/PDD/09/2022 concerning the Charter of the Risk Monitoring Committee of Indonesia Eximbank.

The Risk Monitoring Committee carries out its duties and responsibilities in accordance with the committee's work guidelines and rules, which regulate a) structure and membership; b) duties, authority and responsibilities; c) work mechanisms and conditions, including meeting rules, committee meeting decision-making mechanisms, accountability and reporting; d) code of ethics and working hours; and e) performance evaluation. This is in line with the provisions contained in PMK 208/2021 Article 38.

KOMPOSISI DAN PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sesuai dengan PMK 208/2021 pasal 37 ayat (2), komposisi Komite Pemantau Risiko terdiri atas 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko sebagai anggota dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota.

Pada tahun 2023, komposisi Komite Pemantau Risiko mengalami perubahan sebagaimana dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini:

COMPOSITION AND PROFILE OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

In accordance with PMK 208/2021 Article 37 paragraph (2), the composition of the Risk Monitoring Committee consists of 1 (one) member of the Board of Directors as chairman, 1 (one) Independent Party who has expertise in the field of Risk Management as a member and 1 (one)) an Independent Party person who has expertise in the financial sector as a member.

In 2023, the composition of the Risk Monitoring Committee changed as follows:

Periode 1 Januari 2023 – 23 Agustus 2023 / **Period of 1 January 2023 - 23 August 2023**

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Hukum Pengangkatan** Legal Basis of Appointment
Felia Salim	Ketua Komite	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0005.01/KDE/11/2022 Decree of the Executive Director No. 0005.01/KDE/11/2022
Putu Rahwidhiyasa	Anggota Komite	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0005.01/KDE/11/2022 Decree of the Executive Director No. 0005.01/KDE/11/2022
Kastawa Yudiaatmaja	Anggota Komite	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0005.01/KDE/11/2022 Decree of the Executive Director No. 0005.01/KDE/11/2022

Periode 24 Januari 2023 – 31 Desember 2023 / **Period of 24 January 2023 - 31 December 2023**

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Hukum Pengangkatan** Legal Basis of Appointment
D. James Rompas	Ketua Komite Chairman of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0031/KDE/08/2023 Decree of the Executive Director No. 0031/KDE/08/2023
Putu Rahwidhiyasa	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0031/KDE/08/2023 Decree of the Executive Director No. 0031/KDE/08/2023
Kastawa Yudiaatmaja	Anggota Komite Member of the Committee	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0031/KDE/08/2023 Decree of the Executive Director No. 0031/KDE/08/2023

Berikut ini adalah profil dari anggota Komite Pemantau Risiko LPEI per 31 Desember 2023:

The following is the profile of Indonesia Eximbank Risk Monitoring Committee members as of 31 December 2023:

D. James Rompas
Ketua Komite Pemantau Risiko
Chairman of Risk Monitoring Committee

Usia Age	65 tahun | years old
Warga Negara Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Anggota Dewan Direktur LPEI Member of the Board of Directors of Indonesia Eximbank

Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan Subbab Profil Dewan Direktur.
His complete profile has been described in the Company Profile Chapter of the Board of Directors Profile Subchapter.

Putu Rahwidhiyasa **Anggota Komite Audit** Member of the Audit Committee	
Usia Age	59 tahun | years old
Warga Negara Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana dari Institut Pertanian Bogor (1986) • Magister dari The University of Illinois, USA (1995) • Bachelor degree at Bogor Agricultural Institute (1986) • Masters at the University of Illinois, USA (1995)
Riwayat Karier Career Background	• Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) (Agustus 2020 – sekarang) • Berbagai jabatan dan terakhir sebagai Direktur Risk Management & Compliance, Bank Syariah Mandiri (2008 – 2020) • Berbagai jabatan di Bank Mandiri (Februari 1999 – Juli 2020) • Komisaris Rumah Sakit Puri Cinere (2003 – 2006) • Komisaris PT Merincorp Securities Indonesia (2001) • Berbagai jabatan di Bank Ekspor Impor Indonesia dan terakhir menjabat sebagai Manager di *Initial Public Offering* (IPO) Team (Oktober 1987 – Januari 1999) • Director of Sharia Business and Entrepreneurship, National Committee for Sharia Economy and Finance (KNEKS) (August 2020 - present). • Various positions and most recently as Director of Risk Management & Compliance, Bank Syariah Mandiri (2008 - 2020) • Various positions at Bank Mandiri (February 1999 – July 2020) • Commissioner of Puri Cinere Hospital (2003 - 2006). • Commissioner of PT Merincorp Securities Indonesia (2001) • Various positions at Bank Ekspor Impor Indonesia and most recently as Manager in the Initial Public Offering (IPO) Team (October 1987 - January 1999).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) (Agustus 2020 – sekarang) Director of Sharia Business and Entrepreneurship, National Committee for Sharia Economy and Finance (KNEKS) (August 2020 - present).

PERIODE DAN MASA JABATAN

Masa jabatan Komite Pemantau Risiko telah diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko No. 0006/PDD/09/2022. Ketua Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Anggota Dewan Direktur, sesuai dengan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Direktur atau sesuai yang diputuskan pada Rapat Dewan Direktur. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko memiliki masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali apabila menunjukkan kinerja yang baik.

TERM OF OFFICE

The term of office of Risk Monitoring Committee is set out in the Risk Monitoring Committee Charter No. 0006/PDD/09/2022. The Chairman of the Risk Monitoring Committee is a member of the Board of Directors, in accordance with the term of office as a member of the Board of Directors or as decided at the Board of Directors Meeting. The term of office of members of the Risk Monitoring Committee has a term of 3 (three) years, and can be extended for 1 (one) time if they show good performance.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE

Berdasarkan aturan yang berlaku, anggota Komite Pemantau Risiko harus berasal dari Pihak Independen yang tidak memiliki afiliasi terhadap LPE, Dewan Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Eksekutif, maupun Direktur Pelaksana. Hal ini penting untuk diterapkan agar Komite Pemantau Risiko dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara obyektif dan independen tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak mana pun.

INDEPENDENCE OF MEMBER OF THE COMMITTEE

Based on applicable regulations, members of the Risk Monitoring Committee must come from Independent Parties who have no affiliation with the LPE, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Executive Director or Managing Director. This is important to implement so that the Risk Monitoring Committee can carry out its duties and responsibilities objectively and independently without any conflict of interest or influence from any party.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko telah diatur dalam Piagam Komite Audit yang disusun berlandaskan Pasal 40 PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut, tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Direktur, dalam memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko melalui pemantauan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi tentang Risiko kegiatan usaha dan operasional LPEI.

2. Pelaksanaan tugas tersebut paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
   a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
   b. kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas yang disampaikan kepada Dewan Direktur secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee are regulated in the Audit Committee Charter which is prepared based on Article 40 PMK No. 208/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles and Know Your Customer Principles for Indonesia Eximbank. Based on these regulations, the duties and responsibilities carried out by the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

1. Assist the Board of Directors in ensuring the effectiveness of the implementation of Risk Management through monitoring, evaluating and providing recommendations regarding the risks of Indonesia Eximbank business and operational activities.
2. Implementation of these tasks involves at least monitoring and evaluating:
   a. implementation of the duties of the Risk Management Work Unit; and
   b. conformity between Risk Management policies and the implementation of these policies.
3. Prepare a Task Implementation Report which is submitted to the Board of Directors periodically at least once every 3 (three) months.

RAPAT KOMITE

Kebijakan Rapat

Rapat Komite Pemantau Risiko wajib diselenggarakan paling kurang sama dengan ketentuan jumlah minimal penyelenggaraan rapat Dewan Direktur, yaitu diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan. Rapat komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang ketua dan seorang anggota. Hasil rapat komite tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota

Selama tahun 2023 Komite Pemantau Risiko melangsungkan rapat sebanyak 19 kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota dijelaskan pada tabel berikut ini:

COMMITTEE MEETING

Meeting Policy

Risk Monitoring Committee meetings must be held at least in accordance with the minimum number of Board of Directors meetings, namely held periodically at least 1 (one) time a month. Committee meetings can only be held if attended by at least the chairman and one member. The results of the committee meeting are stated in the minutes of the meeting and are well documented.

Meeting Frequency and Attendance Level of Members

During 2023, the Risk Monitoring Committee held 19 meetings, with the attendance level of each member explained in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Persentase Kehadiran** Percentage of Attendance
Felia Salim*	Ketua Komite Chairman of the Committee	10	10	100%
D. James Rompas**	Ketua Komite Chairman of the Committee	9	9	100%

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Putu Rahwidhiyasa	Anggota Komite Member of the Committee	19	18	95%
Kastawa Yudiaatmaja	Anggota Komite Member of the Committee	19	19	100%

*) masa jabatan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko berakhir pada 24 Juli 2023 | term of office as Chairman of the Risk Monitoring Committee ends on 24 July 2023
**) masa jabatan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dimulai tanggal 24 Agustus 2023 | term of office as Chairman of the Risk Monitoring Committee begins on 24 August 2023

AGENDA RAPAT

Rapat Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2023 membahas berbagai agenda sebagai berikut:

MEETING AGENDA

Throughout 2023, Risk Monitoring Committee meetings discussed various agendas as follows:

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	9 Januari 2023 9 January 2023	Persiapan Laporan KPR untuk BPKP Preparation of KPR report for BPKP	1. Felia Salim 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K
2	18 Januari 2023 18 January 2023	Pemaparan Laporan Profil Risiko TW IV 2022 Presentation of Risk Profile Report Quarter IV 2022	1. Felia Salim 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K
3	8 Februari 2023 8 February 2023	1. Laporan Tingkat Kesehatan TW IV 2022 2. Laporan *Portfolio Quality* Desember 2022 1. Health Level Report Quater IV 2022 2. Portfolio Quality Report December 2022	1. Felia Salim 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K
4	8 Maret 2023 8 March 2023	Pembahasan Teknis *Risk Maturity Model Framework* Technical Discussion on Risk Maturity Model Framework	1. Felia Salim 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K
5	28 April 2023 28 April 2023	1. Laporan Profil Risiko TW I 2023 2. Penyelarasan Parameter Profil Risiko SEOJK 15 1. Risk Profile Report Quarter I 2023 2. Alignment of Risk Profile Parameters SEOJK 15	1. Felia Salim 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K
6	31 Maret 2023 31 March 2023	Laporan Tingkat Kesehatan TW I 2023 Health Level Report Quarter I 2023	1. Felia Salim 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K
7	1 Juni 2023 1 June 2023	Rapat Internal KPR KPR Internal Meeting	1. Felia Salim 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K
8	18 Juli 2023 18 July 2023	Rapat Internal KPR KPR Internal Meeting	1. Felia Salim 2. Benny K
9	21 Juli 2023 21 July 2023	Pemaparan portofolio bisnis, kualitas aset, dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Exposure of business portfolio, asset quality, and constraints faced by Regional Offices	1. Felia Salim 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K
10	24 Juli 2023 24 July 2023	1. Pemaparan Tingkat Kesehatan TW II 2023 2. Pemaparan Bisnis (bagaimana memitigasi risiko dan tantangan yang dihadapi) 1. Exposure of Health Level Quarter II 2023 2. Business Exposure (how to mitigate risks and challenges faced)	1. Felia Salim 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K
11	24 Agustus 2023 24 August 2023	1. Perkenalan Ketua dan Anggota KPR 2. Diskusi Laporan KPR Triwulan 2 2023 3. Penjadwalan rapat bulanan 1. Introduction of Chairman and KPR Members 2. Discussion of KPR Report Quarter 2 2023 3. Monthly meeting scheduling	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K
12	7 September 2023 7 September 2023	1. Pembahasan Laporan Keuangan posisi Agustus 2. Pemaparan Metode Penilaian *Risk Maturity* LPEI 3. Skenario Inbreng Tahap I 1. Discussion of August Financial Report 2. Exposure of Indonesia Eximbank Risk Maturity Assessment Method 3. Inbreng Phase I Scenario	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K
13	20 September 2023 20 September 2023	1. *Review* risalah rapat KPR 2. Pemaparan Metode Penilaian *Risk Maturity* 3. Rancangan Laporan ERM bulan Agustus 2023 1. Review of KPR meeting minutes 2. Presentation of Risk Maturity Assessment Method 3. Draft ERM Report for August 2023	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
14	4 Oktober 2023 4 October 2023	Pembahasan Kinerja Keuangan posisi September 2023 Discussion of Financial Performance as of September 2023	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K
15	25 Oktober 2023 25 October 2023	1. Ratifikasi 2. Laporan Profil Risiko Triwulan III 2023 3. Rancangan *Risk Appetite Statement* 2024 4. Laporan Monitoring Pembiayaan Bermasalah (Agustus dan September) 1. Ratification 2. Risk Profile Report for the third quarter of 2023 3. Draft Risk Appetite Statement 2024 4. Troubled Financing Monitoring Report (August and September)	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K
16	8 November 2023 8 November 2023	1. Ratifikasi 2. Pemaparan Kinerja Keuangan per Oktober 2023 3. *Update Inbreng* 4. Pembahasan RPDD Sistem Pengendalian Internal 1. Ratification 2. Financial Performance Disclosure as of October 2023 3. Inbreng Update 4. Discussion of Internal Control System RPDD	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K
17	30 November 2023 30 November 2023	1. Pemaparan Laporan Tingkat Kesehatan TW III 2023 2. Pemaparan Hasil *Risk Maturity Survey* 1. Presentation of Health Level Report Q3 2023 2. Presentation of Risk Maturity Survey Results	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K
18	7 Desember 2023 7 December 2023	Usulan penyesuaian PDD Kebijakan Pengelolaan Dana Program Kemitraan eks PT Bank Ekspor Indonesia Proposed adjustment of PDD Policy on Partnership Program Fund Management ex PT Bank Ekspor Indonesia	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K
19	21 Desember 2023 21 December 2023	1. Pemaparan IT 2. Laporan *Enterprise Risk Management* per November 1. IT Exposure 2. Enterprise Risk Management Report as of November	1. D. James Rompas 2. Putu Rahwidhiyasa 3. Benny K

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2023

Pada tahun 2023, beberapa anggota Komite Pemantau Risiko telah mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan uraian sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2023

In 2023, several members of the Risk Monitoring Committee have participated in training and competency development activities to support the effective implementation of their duties and responsibilities, with the following description:

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Judul Program Title of Program	Penyelenggara Organizer
Felia Salim	1 Juni 2023 1 June 2023	*ESG Reporting: From Desire to Reality Seminar*	German Chamber of Commerce, Hong Kong

PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2023

Rencana kerja Komite Pemantau Risiko untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan *review* dan *monitoring* dalam rapat internal KPR.
2. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko LPEI.
3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan tersebut.
4. Mengadakan diskusi periodik dengan pihak eksternal sesuai kebutuhan

RISK MONITORING COMMITTEE WORK PROGRAM IN 2023

The Risk Monitoring Committee's work plan for 2023 is as follows:

1. Carry out review and monitoring activities in internal Risk Monitoring Committee meetings.
2. Organize consulting review on Indonesia Eximbank risk management policies and implementation.
3. To monitor accounting policies and the preparation of financial statements as well as the implementation of such policies.
4. Hold periodic discussions with external parties as needed.

KERANGKA KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Untuk mendukung rencana kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2023, KPR telah menyusun kerangka kerja sebagai berikut:

FRAMEWORK OF RISK MONITORING COMMITTEE

To support Risk Monitoring Committee work plan in 2023, KPR has prepared the following framework:

		Capabilities				
Risk	**Risk Strategy & Governance**	**Risk Analytics**	**Risk Operations**	**Event Response**	**Regulatory Compliance**	**Validation**
Skill and Delivery Categories	Keseimbangan antara formulasi strategi, manajemen risiko dan objektif bisnis Balance between strategy formulation, risk management and business objectives	Memperkuat analisa risiko sehingga memberi nilai tambah bagi performa lembaga Strengthen risk analysis to add value to institutional performance	Meningkatkan proses yang efisien dalam mendukung kinerja bisnis dengan tetap memperhatikan risiko yang terukur Improving efficient processes in supporting business performance while maintaining measurable risks	Memiliki pemahaman mengenai *risk crisis* dan memiliki *contingency plan* dan *action plan* yang memadai Understand the risk crisis and have adequate contingency plans and action plans	Memahami dan menerapkan persyaratan kepatuhan yang diminta regulator Understand and implement regulatory compliance requirements	Meyakinkan bahwa strategi, *framework* manajemen risiko dan kontrolnya diterapkan secara efektif dan efisien Ensure that the strategy, risk management framework and controls are implemented effectively and efficiently.
	Design Enterprise Risk Management Framework	*Dashboard* yang terintegrasi untuk melihat parameter risiko dan finansial Integrated dashboard to view risk and financial parameters	Metode identifikasi risiko, penetapan mitigasi dan proses monitoring yang *robust* dan aplikatif Robust and applicable methods of risk identification, mitigation and monitoring processes	Memiliki *Contingency Planning* (proses, sistem, SDM) Have Contingency Planning (process, system, HR)	Pemahaman mengenai regulasi baru Understanding of new regulations	Menggunakan komite dewan direktur sebagai bagian dari *review*/validasi penerapan *risk framework*/stategi Using board of director committees as part of the review/ validation of risk framework/strategy implementation
	Pengkinian terhadap pembobotan/ parameter *Risk Profile* Update of Risk Profile weights/ parameters	Parameter untuk melihat dan menilai Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas/ Pasar Parameters to view and assess Credit Risk, Market Risk, Liquidity/Market Risk		Memiliki parameter yang terukur dalam merespon saat kondisi krisis (*Crisis Management*) Have measurable parameters in responding during crisis conditions (Crisis Management)	Memastikan penerapan kepatuhan dilaksanakan Ensure compliance practices are implemented	Pembentukan tim senior kecil untuk melakukan sidak di unit kerja yang bersifat konsultatif Formation of a small senior team to conduct inspections in consultative work units
	Peningkatan *Risk Governance* dan *Awareness* secara berkelanjutan Continuous improvement of Risk Governance and Awareness	Business trend analysis untuk melihat lebih awal risiko yang dapat terjadi Business trend analysis to see early on the risks that could occur	Memastikan unit manajemen risiko memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai Ensure the risk management unit has adequate capacity and capability		Parameter untuk mengukur dan melihat penerapan kepatuhan di seluruh lini Parameters to measure and see the implementation of compliance across the board	Menguatkan fungsi RCU di unit kerja Strengthen the RCU function in the work unit
	Review dari organisasi, kebijakan/SOP yang ada saat ini Review of current organisation, policies/SOPs	Risk Register untuk memetakan risiko operasional Risk Register to map operational risks	Implementasi ESG secara bertahap Gradual implementation of ESG			Mengembangkan KRI yang *robust* Develop a robust KRI
		Stress Testing secara berkala Stress Testing on a regular basis	Implementasi GRC *framework* Implementation of GRC framework			
		Lender of Last resort				

Organ Pendukung Direktur Eksekutif
Supporting Organs of the Executive Director

Dalam rangka implementasi prinsip tata kelola yang baik, dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktur Eksekutif telah membentuk komite-komite sesuai dengan amanat pasal 19 PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Menindaklanjuti Peraturan tersebut, Direktur Eksekutif LPEI menetapkan Peraturan Direktur Eksekutif yang mengatur struktur dan keanggotaan komite, tugas dan tata cara pengambilan keputusan. Penunjukan keanggotaan komite-komite tersebut bersifat *ex-officio* sehingga kewenangan pengambilan keputusan melekat kepada jabatan.

Dalam Peraturan Direktur Eksekutif ditetapkan bahwa terdapat 9 (sembilan) komite di LPEI yang mendukung pelaksanaan tugas Direktur Eksekutif, yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko.
2. Komite Pengembangan Produk.
3. Komite Kebijakan dan Pedoman.
4. Komite *Assets* dan *Liabilities Management*.
5. Komite Teknologi Sistem Informasi.
6. Komite Pengadaan.
7. Komite Jasa Konsultasi.
8. Komite Pembiayaan.
9. Komite Sumber Daya Manusia.

In order to implement the principles of good governance, and to support the implementation of its duties and functions, the Executive Director has formed committees in accordance with the mandate of Article 19 PMK No. 208/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles and Know Your Customer Principles for Indonesia Eximbank.

Following up on these regulations, Executive Director of Indonesia Eximbank determines Executive Director Regulations which regulate the structure and membership of committees, duties and decision-making procedures. The appointment of membership to these committees is ex-officio so that decision-making authority is attached to the position.

The Executive Director Regulation stipulates that there are 9 (nine) committees at Indonesia Eximbank that support the implementation of the Executive Director's duties, namely:

1. Risk Management Committee.
2. Product Development Committee.
3. Policy and Guidelines Committee.
4. Assets and Liabilities Management Committee.
5. Information Systems Technology Committee.
6. Procurement Committee.
7. Advisory Services Committee.
8. Financing Committee.
9. Human Capital Committee.

Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee

Sebagai salah satu komite pendukung Direktur Eksekutif, Komite Manajemen Risiko dibentuk sebagai organ pendukung yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam mengelola manajemen risiko lembaga yang dituangkan ke dalam kebijakan, strategi, dan pedoman lembaga.

As one of the supporting committees for the Executive Director, the Risk Management Committee was formed as a supporting organ whose function is to provide recommendations to the Executive Director in managing the institution's risk management as outlined in the institution's policies, strategies and guidelines.

PEDOMAN KOMITE

Komite Manajemen Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan pada tanggal 26 September 2023 dalam Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2.

COMMITTEE GUIDELINES

Risk Management Committee carries out its duties and responsibilities based on the provisions that have been regulated and stipulated on 26 September 2023 in Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 concerning Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director Edition 1 Revision 2.

Status Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Manajemen Risiko di LPEI berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif adalah sebagai berikut:

Membership and Voting Rights Status

The structure and composition of the Risk Management Committee membership at Indonesia Eximbank is based on Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 concerning Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director are as follows:

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan/atau Head of yang membidangi Manajemen Risiko Managing Director of Risk Management and/or Head of Risk Management
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Manajemen Risiko Head Division in charge of Risk Management
Anggota Tetap Permanent Members	1. Seluruh Direktur Pelaksana 2. Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis 1. All Managing Director 2. Head of finance and strategic planning
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	1. Head of selain anggota tetap 2. Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan 1. Head of other than permanent members 2. Head of Division/Division Head-level officials other than permanent members related to the discussion material
Narasumber Sources	1. Head of/Kepala Divisi yang membidangi Internal Audit 2. Head of/Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan 1. Head of/Head of Division in charge of Internal Audit 2. Head of/Head of Division in charge of compliance
***Alernate* Keanggotaan Komite Manajemen Risiko** **Alernate Membership of Risk Management Committee**	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai PMK No. 208/PMK.06/2021 - Pasal 11 In accordance with PMK No. 208/PMK.06/2021 - Article 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Managing Director in charge of institutional relations
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary and Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk Head of Division in charge of product development

PROFIL KOMITE

Profil ketua dan anggota komite, yang juga merangkap jabatan lain di LPEI, telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan.

Tugas dan Wewenang

Tugas Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

1. Penyusunan strategi dan program penerapan Manajemen Risiko;
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
3. Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*);
4. Melakukan evaluasi atas penilaian Tingkat Kesehatan Entitas Anak.

RAPAT KOMITE

Kebijakan Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Komite Manajemen Risiko wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 tahun atau setiap saat apabila dipandang perlu.

Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif mengatur tata cara pengambilan keputusan Komite, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
2. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah minimum setengah dari anggota tetap terdiri dari:
   a. Ketua dan/atau Wakil Ketua;
   b. Sekretaris; dan
   c. Anggota tetap.
3. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2023, Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sebanyak 17 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

COMMITTEE PROFILE

The profiles of the chairman and committee members, who also hold other positions at Indonesia Eximbank, have been described in the Company Profile Chapter.

Duties and Authorities

The duties of the Risk Management Committee is to provide recommendations to the Executive Director, among other things:

1. Preparation of Risk Management implementation strategies and programs;
2. Improvement or refinement of the implementation of Risk Management based on the results of the implementation evaluation;
3. Determination (justification) of matters related to business decisions that deviate from normal procedures (irregularities);
4. Evaluate the Subsidiary Entity's Health Level assessment.

COMMITTEE MEETING

Policy on Decision Making in Meetings

The Risk Management Committee is required to hold at least 4 (four) meetings a year or at any time if necessary.

Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated 26 September 2023 concerning Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director regulates the procedures for making Committee decisions, as described below:

1. Committee decisions can be made through face-to-face or online meetings.
2. The requirement for a quorum for Committee decision making is a minimum of half of the permanent members consisting of:
   a. Chairman and/or Deputy Chairman;
   b. Secretary; And
   c. Permanent member.
3. Meeting decisions must be taken based on deliberation to reach consensus.
4. All Committee decisions must be stated in the Minutes of Meeting and administered completely and orderly by the committee secretary.

Meeting Frequency and Attendance Level

Throughout 2023, the Risk Management Committee held 17 meetings, with the following attendance levels:

Peserta Rapat Meeting Participants	**Posisi di Komite** Position on Committee	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Persentase Kehadiran** Percentage of Attendance
Direktur Eksekutif Executive Director	Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	17	15	88%
Direktur Pelaksana bidang Manajemen Risiko dan Kredit Managing Director in charge of Risk Management and Credit	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Deputy Chairman concurrently Permanent Member	17	17	100%
Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan Managing Director of Financing	Anggota Tetap Permanent Member	17	16	94%
Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Anggota Tetap Permanent Member	17	16	94%
Direktur Pelaksana Bidang Keuangan dan Operasional Managing Director of Finance and Operations	Anggota Tetap Permanent Member	17	17	100%
Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director of Institutional Relations	Anggota Tetap Permanent Member	17	16	94%
Head of Keuangan dan Perencanaan Strategis Head of Finance and Strategic Planning	Anggota Tetap Permanent Member	17	16	94%

Agenda Rapat

Rapat Komite Manajemen Risiko sepanjang tahun 2023 membahas berbagai agenda sebagai berikut:

Meeting Agenda

Throughout 2023, Risk Management Committee meetings discussed various agendas as follows:

No.	**Tanggal Rapat** Date of Meeting	**Agenda Rapat** Meeting Agenda
1.	17 Januari 2023 17 January 2023	Penyampaian Laporan Profil Risiko Triwulan IV 2022 Submission of Risk Profile Report for the fourth quarter of 2022
2.	7 Februari 2023 7 February 2023	Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Triwulan IV 2022 Submission of Health Level Report for the fourth quarter of 2022
3.	7 Maret 2023 7 March 2023	Rencana Implementasi ***Operational Risk Management*** (ORM) Operational Risk Management (ORM) Implementation Plan
4.	30 Maret 2023 30 March 2023	Pemenuhan Limit Top 10 Obligor untuk Grup Harita Top 10 Obligor Limit Fulfillment for Harita Group
5.	5 April 2023 5 April 2023	Simulasi Pemenuhan Limit Top 10 Obligor Berdasarkan ***Pipeline*** yang telah disetujui Simulation of Top 10 Obligor Limit Fulfillment Based on Approved Pipeline
6.	11 April 2023 11 April 2023	Usulan Pengkinian Portofolio ***Guideline*** LPEI Tahun 2023. Proposed update of Indonesia Eximbank Portfolio Guideline in 2023.
7.	18 April 2023 18 April 2023	Penyampaian Laporan Profil Risiko Triwulan I 2023 Submission of Risk Profile Report for the first quarter of 2023
8.	12 Mei 2023 12 May 2023	Usulan Pengkinian ***Country Limit*** dan ***Industry Financing Reference*** Tahun 2023 Proposed 2023 Country Limit and Industry Financing Reference Update
9.	23 Mei 2023 23 May 2023	Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan LPEI Triwulan I 2023 Submission of Indonesia Eximbank Health Level Report for the first quarter of 2023
10.	11 Juli 2023 11 July 2023	1. Penyampaian hasil penyelarasan parameter Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan; dan 2. Laporan hasil benchmarking ORM System 1. Submission of Risk Profile and Health Level parameter alignment results; and 2. ORM System benchmarking report
11.	25 Juli 2023 25 July 2023	Laporan Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko posisi Triwulan II 2023. Report on Health Level and Risk Profile for the second quarter of 2023.

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda
12.	3 Oktober 2023 3 October 2023	Analisa *stress test* dan EWD Tools Stress test analysis and EWD Tools
13.	17 Oktober 2023 17 October 2023	Laporan Profil Risiko Triwulan III 2023 Risk Profile Report for the third quarter of 2023
14.	24 Oktober 2023 24 October 2023	1. Persetujuan Usulan Risk Appetite Statement (RAS) 2024; 2. Laporan Hasil Risk Maturity Tahap I; dan 3. Persetujuan Usulan Komponen Perhitungan CKPN Kolektif. 1. Approval of the proposed Risk Appetite Statement (RAS) 2024; 2. Report on Risk Maturity Phase I Results; and 3. Approval of the Proposed Components of Collective LLP Calculation.
15.	14 November 2023 14 November 2023	1. Persetujuan Pengkinian Portofolio Guideline 2024; dan 2. Progres Pengembangan *Operational Risk Management* (ORM) 1. Approval of Portfolio Guideline 2024 Update; and 2. Progress of Operational Risk Management (ORM) Development
16.	21 November 2023 21 November 2023	1. Laporan Tingkat Kesehatan Triwulan III 2023; 2. Laporan Hasil *Risk Maturity Survey* 1. Health Level Report for the third quarter of 2023; 2. Risk Maturity Survey Report
17.	12 Desember 2023 12 December 2023	Komponen CKPN Kolektif Collective LLP Component

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2023

Pada tahun 2023, beberapa anggota Komite Manajemen Risiko telah mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan uraian sebagai berikut:

Competency Development Program in 2023

In 2023, several members of the Risk Management Committee have participated in training and competency development activities to support the effective implementation of their duties and responsibilities, as follows:

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Judul Program Title of Program	Penyelenggara Organizer
Rijani Tirtoso	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap with the* 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
Agus Windiarto	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap with the* 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
Chesna F. Anwar	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap with the* 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
Maqin U. Norhadi	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap with the* 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
Dikdik Yustandi	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap with the* 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Judul Program Title of Program	Penyelenggara Organizer
T. Wahyu Prihadi Wibowo	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap with the* 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
	22 November 2023 23 November 2023	*People Matters TevhHR Pulse* Indonesia	PeopleMatters
	23 November 2023 23 November 2023	*HR & Workplace* Indonesia *Summit* 2023	Tender Indonesia
	5 Desember 2023 5 December 2023	Sosialisasi mengenai Pencegahan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Socialization on Prevention of Financial Services Sector Violence	OJK
Titiek Setiyowati	26 Juli 2023 26 July 2023	ERM dan *Cyber Security How to Mitigate and Protect*	Bankers Association for Risk Management (BARa)
	6 Maret 2023 6 March 2023	*Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Maret* Risk Management Certification Refreshment March	Arfaidhams Secret
	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap with the* 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
	29 Maret 2023 29 March 2023	*Credit Skill - End to End* Proses Pembiayaan	LPEI
	21 Juni 2023 21 June 2023	ESG – *Risk Management Addressing Key Challenges in Climate Change*	Moodys
Anwar Harsono	13 Juli 2023 13 July 2023	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Juli Risk Management Certification Refreshment July	Arfaidhams Secret
	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap with the* 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
Setiawan Hasjim	6 Januari 2023 6 January 2023	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Januari Risk Management Certification Refreshment January	PT. Afaidham Secret
Salomi Adriana	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap with The 4 Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	22 September 2023 22 September 2023	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko - September Risk Management Certification Refreshment - September	Arfaidhams Secret
Anton Herdianto	10-12 Juli 2023 10-12 July 2023	Penguatan Pemahaman Gratifikasi Strengthening Understanding of Gratification	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
	29 Maret 2023 29 March 2023	*Credit Skill - – End to End* Proses Pembiayaan Credit Skill - End to End Financing Process	LPEI
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
I Nyoman Gede Suarja	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap with the* 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
	7 Desember 2023 7 December 2023	BARa *Risk Forum* "Perbankan Indonesia dalam mendukung Indonesia menuju *Low Carbon Economy*"	BARA

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2023

Pada tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Report on the Implementation of Committee Duties in 2023

In 2023, the Risk Management Committee has carried out its duties in accordance with its assigned responsibilities.

Komite Pengembangan Produk
Product Development Committee

Komite Pengembangan Produk (KPP) dibentuk dengan tujuan mendukung Direktur Eksekutif dalam merancang peraturan terkait produk, program bisnis, dan kegiatan LPEI. Tugas komite ini mencakup penyempurnaan produk, program bisnis, kegiatan baru, serta penyusunan Standar Pedoman Produk (SPP) dan peraturan lain yang terkait dengan produk dan program bisnis secara menyeluruh. Hal ini mencakup juga pembahasan mekanisme pemutusan pembiayaan dengan mempertimbangkan target pasar dan/atau fitur khusus dari produk.

The Product Development Committee (KPP) was formed with the aim of supporting the Executive Director in designing regulations related to Indonesia Eximbank products, business programs, and activities. The duties of this committee include improving products, business programs, and new activities, as well as preparing Standard Product Guidelines (SPP) and other regulations related to products and business programs as a whole. This also includes discussing the financing termination mechanism by considering the target market and/or special features of the product.

Pedoman Komite

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pengembangan Produk (KPP) periode tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2.

Committee Charter

In carrying out its duties, the Product Development Committee (KPP) for the 2023 period is guided by Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated 26 September 2023 concerning Standard Operational Guidelines for Nine Committees Under the Executive Director Edition 1 Revision 2.

Struktur dan Komposisi Keanggotaan Komite

Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Pengembangan Produk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023, terbagi menjadi 2 (dua) Komite yaitu Komite A dan Komite B, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Structure and Composition of the Product Development Committee Membership

The structure and composition of the Product Development Committee membership is based on Executive Director Regulation no. 0021/PDE/09/2023, divided into 2 (two) Committees, namely Committee A and Committee B, as described below:

1. Struktur Keanggotaan Kategori Komite A

1. Membership Structure of Committee A Category

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan produk dan/atau Head of yang membidangi pengembangan produk Managing Director in charge of product development and/or Head of in charge of product development
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk Head of Division in charge of product development
Anggota Tetap Permanent Members	1. Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan bisnis 2. Head of yang membidangi penjaminan & asuransi 3. Head of yang membidangi wilayah 1. Managing Director in charge of business development; 2. Head of underwriting & insurance; 3. Head of regional management.
Anggota Tidak Tetap **Non-**Permanent Member	1. Direktur Pelaksana dan Head of selain anggota tetap 2. Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi bidang bisnis 3. Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi lain yang terkait dengan materi pembahasan 1. Managing Director and Head of other than permanent members; 2. Head of Division/Division Head level officer for business; 3. Head of Division/official level of another Division Head related to the subject matter

***Alternate* Keanggotaan Komite A** Alternate Committee A Membership	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai PMK No. 208/PMK.06/2021 – Pasal 11 In accordance with PMK 208/PMK.06/2021 – Article 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Managing Director in charge of institutional relations
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	Kepala Divisi yang membidangi kebijakan dan pedoman Head of Division in charge of policies and guidelines

2. Struktur Keanggotaan Kategori Komite B

2. Structure of Committee B Category Membership

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan produk dan/atau Head of yang membidangi pengembangan produk Managing Director in charge of product development and/or Head of in charge of product development
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	–
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk Head of Division in charge of policies and guidelines
Anggota Tetap Permanent Member	1. Kepala Divisi yang membidangi kebijakan dan pedoman 2. Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko 1. Head of Division in charge of policies and guidelines; 2. Head of Division in charge of risk management.
Anggota Tidak Tetap Non Permanent Member	Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan. Head of Division/Division Head level officer other than permanent members related to the discussion material.
Narasumber Sources	1. Head of/Kepala Divisi yang membidangi internal audit 2. Head of/Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan 3. Kepala Divisi yang membidangi hukum 1. Head of/Head of Division in charge of internal audit; 2. Head of/Head of Division in charge of compliance; 3. Head of the Division in charge of law.
***Alternate* Keanggotaan Komite B** **Alternate Committee B Membership**	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi kelembagaan Managing Director in charge of institutional affairs
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi kebijakan dan pedoman Head of Division in charge of policies and guidelines

Profil Komite

Profil ketua dan anggota Komite Pengembangan Produk, yang juga merangkap jabatan lain di LPEI, telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan.

Committee Profile

The profiles of the chairman and members of the Product Development Committee, who also hold other positions at Indonesia Eximbank, have been described in the Company Profile Chapter.

Tugas dan Wewenang

Tugas Komite Pengembangan Produk adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

1. Rancangan peraturan terkait produk atau program bisnis dan aktivitas atau kegiatan LPEI;
2. Penyempurnaan produk atau program bisnis dan aktivitas atau kegiatan LPEI;
3. Penyusunan Standar Pedoman Produk (SPP) dan ketentuan lain yang terkait dengan produk atau program bisnis secara *end to end*, termasuk jika diperlukan adanya mekanisme pemutusan pembiayaan dengan memperhatikan target *market* dan/atau fitur produk tertentu.

Duties and Authorities

The duties of Product Development Committee is to provide recommendations to the Executive Director, among other things:

1. Draft regulations related to Indonesia Eximbank products or business programs and activities;
2. Improvement of Indonesia Eximbank products or business programs and activities;
3. Preparation of Product Guidelines Standards (SPP) and other provisions related to products or business programs end to end, including if necessary a funding termination mechanism by taking into account the target market and/or certain product features.

RAPAT KOMITE

Kebijakan Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Komite Pengembangan Produk wajib menyelenggarakan rapat secara rutin. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif, Edisi 1 Revisi 2, telah mengatur tata cara pengambilan keputusan Komite, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
2. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum, oleh:
   a. Setengah dari anggota tetap, yang terdiri dari:
      1) Ketua dan/atau Wakil Ketua (untuk Komite A); Ketua (untuk Komite B)
      2) Sekretaris; dan
      3) Anggota tetap.
   b. Satu anggota tidak tetap.
3. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

COMMITTEE MEETING

Policy on Decision Making in Meetings

Product Development Committee is required to hold regular meetings. Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated 26 September 2023 concerning Standard Operational Guidelines for Nine Committees Under the Executive Director, Edition 1 Revision 2, has regulated the procedures for making Committee decisions, as described below:

1. Committee decisions can be made through face-to-face or online meetings.
2. The requirement for a quorum for Committee decision making is to be attended at a minimum by:
   a. Half of the permanent members, consisting of:
      1) Chair and/or Deputy Chair (for Committee A); Chair (for Committee B)
      2) Secretary; and
      3) Permanent members.
   b. One non-permanent member.
3. Meeting decisions must be taken based on deliberation to reach consensus.
4. All Committee decisions must be stated in the Minutes of Meeting and administered completely and orderly by the committee secretary.

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN

Selama tahun 2023 Komite Pengembangan Produk telah mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL

Throughout 2023, Product Development Committee held 15 (fifteen) meetings, with the following attendance levels as follows:

Peserta Rapat Meeting Participants	**Posisi di Komite** Position on the Committee	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Persentase Kehadiran** Percentage of Attendance
Direktur Eksekutif Executive Director	Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	5	5	100%
Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan Managing Director in charge of Financing	Anggota Tetap Permanent Member	6	6	100%
Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Anggota Tetap Permanent Member	7	7	100%
Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director for Institutional Relations	Anggota Tetap Permanent Member	5	5	100%
Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Credit & Risk Management	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	6	6	100%
Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional Managing Director of Finance & Operations	Anggota Tetap Permanent Member	5	5	100%
Head of Manajemen Risiko & Kredit Head of Credit & Risk Management	Anggota Tetap Permanent Member	7	7	100%

Peserta Rapat Meeting Participants	**Posisi di Komite** Position on the Committee	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Persentase Kehadiran** Percentage of Attendance
Head of Wilayah Head of Regional	Anggota Tetap Permanent Member	7	7	100%
Head of SKAI	Anggota Tetap Permanent Member	5	5	100%
Head of Keuangan & Perencanaan Strategis Head of Finance & Strategic Planning	Anggota Tetap Permanent Member	3	3	100%

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2023

Pada tahun 2023, anggota Komite Pengembangan Produk tidak mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2023

Di tahun 2023, Komite Pengembangan Produk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang diemban. Komite Pengembangan Produk telah menyampaikan rekomendasi terkait pengembangan produk dan bisnis LPEI yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan yang diperlukan.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2023

In 2023, members of the Product Development Committee did not participate in training and competency development activities.

IMPLEMENTATION OF COMMITTEE DUTIES IN 2023

In 2023, Product Development Committee carry out duties in accordance with the responsibilities and functions carried out. The Product Development Committee has submitted recommendations regarding Indonesia Eximbank product and business development which can be used as a basis for decision making and the preparation of necessary policies.

Komite Kebijakan dan Pedoman
Policy and Guidelines Committee

PEDOMAN KOMITE

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Kebijakan dan Pedoman periode tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2.

COMMITTEE CHARTER

In carrying out its duties, the Policy and Guidelines Committee for the 2023 period is guided by Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated 26 September 2023 concerning Standard Operational Guidelines for Nine Committees Under the Executive Director Edition 1 Revision 2.

STRUKTUR KEANGGOTAAN DAN STATUS HAK SUARA

Berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2, struktur keanggotaan Komite Kebijakan dan Pedoman ditetapkan sebagai berikut

MEMBERSHIP STRUCTURE AND VOTING RIGHTS STATUS

Based on Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated 26 September 2023 concerning Standard Operational Guidelines for Nine Committees Under the Executive Director Edition 1 Revision 1, the membership structure of the Policy and Guidelines Committee is determined as follows:

1. Struktur Keanggotaan Komite A

a. Kebijakan dan Pedoman terkait Bisnis:

1. Structure of Committee A Membership

a. Business-related Policies and Guidelines

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi Kebijakan dan Pedoman dan/atau Head of yang membidangi Kebijakan dan Pedoman Managing Director in charge of Policy and Guidelines and/or Head of Policy in charge of Policy and Guidelines
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Kebijakan dan Pedoman Head of Division in charge of Policy and Guidelines
Anggota Tetap Permanent Member	1. Direktur Pelaksana yang membidangi pembiayaan 2. Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan bisnis 3. Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan 4. Head of yang membidangi penjaminan dan asuransi 5. Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis 1. Managing Director in charge of financing; 2. Managing Director in charge of business development; 3. Managing Director in charge of institutional relations; 4. Head of underwriting & insurance; 5. Head of finance & strategic planning.
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	1. Direktur Pelaksana dan Head of selain anggota tetap 2. Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan 1. Managing Director and Head of other than permanent members; 2. Division Head/Division Head level officer other than permanent members related to the subject matter.
Narasumber **Sources**	1. Head of/Kepala Divisi yang membidangi internal audit 2. Head of/Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan 3. Kepala Divisi yang membidangi hukum 4. Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko 1. Head of/Head of Division in charge of internal audit; 2. Head of/Head of Division in charge of compliance; 3. Head of the Division in charge of law; 4. Head of Division in charge of risk management.
***Alternate* Komite A - Kebijakan dan Pedoman terkait Bisnis** Alternate Committee A – Business-related Policies and Guidelines	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai dengan PMK No. 208/PMK.06/2021 – pasal 11 In accordance with PMK 208/PMK.06/2021 – Article 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Managing Director in charge of institutional relations
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk Head of Division in charge of product development

b. Kebijakan dan Pedoman terkait Non-Bisnis:

b. Non-Business Policies and Guidelines:

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Directors
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi Kebijakan dan Pedoman dan/atau Head of yang membidangi Kebijakan dan Pedoman Managing Director in charge of Policy and Guidelines and/or Head of Policy in charge of Policy and Guidelines
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Kebijakan dan Pedoman Head of Division in charge of Policy and Guidelines
Anggota Tetap Permanent Member	1. Direktur Pelaksana yang membidangi keuangan dan operasional 2. Direktur Pelaksana Bidang dan Head of yang terkait aturan yang diajukan 3. Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis 1. Managing Director in charge of finance and operations; 2. Managing Director of Fields and head of related rules submitted; 3. Head of finance & strategic planning.
Anggota Tidak Tetap Non Permanent Member	1. Direktur Pelaksana dan Head of selain anggota tetap 2. Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan 1. Managing Director and Head of non-permanent members 2. Division Head/Division Head level officer other than permanent members related to the subject matter.
Narasumber Sources	1. Head of/Kepala Divisi yang membidangi Internal Audit 2. Head of/Kepala Divisi yang membidangi Kepatuhan 3. Kepala Divisi yang membidangi hukum 4. Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko 1. Head of/Head of Division in charge of internal audit 2. Head of/Head of Division in charge of compliance 3. Head of Legal Division 4. Head of Division in charge of risk management
***Alternate* Komite A - Kebijakan dan Pedoman terkait Non-Bisnis** Alternate Committee A - Non-Business Policies and Guidelines	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai dengan PMK No. 208/PMK.06/2021 – pasal 11 In accordance with PMK 208/PMK.06/2021 – Article 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Managing Director in charge of institutional relations
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk Head of Division in charge of product development

2. Struktur Keanggotaan Komite B Kebijakan dan Pedoman

2. Membership Structure of Committee B Policies and Guidelines

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi Kebijakan dan Pedoman dan/atau Head of yang membidangi Kebijakan dan Pedoman. Managing Director in charge of Policy and Guidelines and/or Head of Policy in charge of Policy and Guidelines
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Kebijakan dan Pedoman. Head of Division in charge of Policy and Guidelines
Anggota Tetap Permanent Member	1. Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko 2. Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan 3. Kepala Divisi yang membidangi hukum 4. Kepala Divisi yang membidangi internal audit 1. Head of Division in charge of risk management; 2. Head of Division in charge of compliance; 3. Head of Legal Division; 4. Head of Division in charge of internal audit.
Anggota Tidak Tetap Non Permanent Member	Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan Division Head/Division Head level officer other than permanent members related to the discussion material.
***Alternate* Keanggotan Komite B Kebijakan dan Pedoman** Alternate Membership Committee B Policies and Guidelines	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Managing Director in charge of institutional relations
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk Head of Division in charge of product development

PROFIL KOMITE

Profil ketua dan anggota Komite Kebijakan dan Pedoman, yang juga merangkap jabatan lain di LPEI, telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan.

TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang Komite Kebijakan dan Pedoman adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui rancangan peraturan internal LPEI dan disampaikan kepada Direktur Eksekutif untuk dilakukan penetapannya oleh Direktur Eksekutif atau Dewan Direktur.
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan internal LPEI serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi dalam bentuk *periodic meeting* ataupun pembahasan temuan audit terkait peraturan.

RAPAT KOMITE

Kebijakan Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Komite Kebijakan dan Pedoman wajib menyelenggarakan rapat secara rutin. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif, Edisi 1 Revisi 2, telah mengatur tata cara pengambilan keputusan Komite, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
2. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum, oleh:
   a. Setengah dari anggota tetap, yang terdiri dari:
      1) Ketua dan/atau Wakil Ketua (untuk Komite A); Ketua (untuk Komite B)
      2) Sekretaris; dan
      3) Anggota tetap.
   b. Satu anggota tidak tetap.
3. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2023 Komite Kebijakan dan Pedoman telah mengadakan rapat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

COMMITTEE PROFILE

The profiles of the chairman and members of the Policy and Guidelines Committee, who also hold other positions at Indonesia Eximbank, have been described in the Company Profile Chapter.

DUTIES AND AUTHORITIES

The duties and authorities of the Policy and Guidelines Committee are as follows:

1. Approve the draft Indonesia Eximbank internal regulations and submit them to the Executive Director for determination by the Executive Director or Board of Directors.
2. Supervise the implementation of Indonesia Eximbank internal regulations and formulate solutions to obstacles faced in the form of periodic meetings or discussion of audit findings related to regulations.

COMMITTEE MEETING

Policy on Decision Making in Meetings

Policy and Guidelines Committee is required to hold regular meetings. Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated 26 September 2023 concerning Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director, Edition 1 Revision 2, has regulated the procedures for making Committee decisions, as described below:

1. Committee decisions can be made through face-to-face or online meetings.
2. The requirement for a quorum for Committee decision making is to be attended at a minimum by:
   a. Half of the permanent members, consisting of:
      1) Chair and/or Deputy Chair (for Committee A); Chair (for Committee B)
      2) Secretary; And
      3) Permanent members.
   b. One non-permanent member.
3. Meeting decisions must be taken based on deliberation to reach consensus.
4. All Committee decisions must be stated in the Minutes of Meeting and administered completely and orderly by the committee secretary.

Meeting Frequency and Attendance Rate

Throughout 2023, the Policy and Guidelines Committee held 47 (forty-seven) meetings, with the following attendance levels as follows:

Peserta Rapat Meeting Participants	**Posisi di Komite** Position on the Committee	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Persentase Kehadiran** Percentage of Attendance
Direktur Eksekutif Executive Director	Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	47	44	100%
Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Risk & Credit Management	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	47	42*	100%
Head of Manajemen Risiko & Kredit Head of Risk & Credit Management	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	47	43	100%
Kepala Divisi Kebijakan & Prosedur Head of Policy & Procedure Division	Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	47	47	100%
Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan Managing Director of Financing	Anggota Tetap Permanent Member	47	38	100%
Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Anggota Tetap Permanent Member	47	47	100%
Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director of Institutional Relations	Anggota Tetap Permanent Member	47	45	100%
Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional Managing Director of Finance & Operations	Anggota Tetap Permanent Member	47	42	100%
Head of Keuangan & Perencanaan Strategis Head of Finance & Strategic Planning	Anggota Tetap Permanent Member	47	40	100%
Head of Penjaminan & Asuransi Head of Guarantee & Insurance	Anggota Tetap Permanent Member	47	2	100%
Head of Internal Audit Head of Internal Audit	Narasumber Source Person	47	34	100%
Head of Kepatuhan, SDM, & Transformasi Lembaga Head of Compliance, Human Resources, & Institutional Transformation	Narasumber Source	47	46	100%
Head of Wilayah Head of Region	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	47	7	100%

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2023

Pada tahun 2023, anggota Komite Kebijakan dan Pedoman tidak mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2023

In 2023, members of the Policy and Guidelines Committee did not participate in training and competency development activities.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2023

Di tahun 2023, Komite Kebijakan dan Pedoman melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang telah ditetapkan.

COMMITTEE TASK IMPLEMENTATION REPORT 2023

In 2023, the Policy and Guideline Committee carried out its duties in accordance with the responsibilities and functions that had been established.

Komite Assets and Liabilities Management

Assets and Liability Management Committee

PEDOMAN KOMITE

Pembentukan Komite Assets and Liabilities Management LPEI berpedoman pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0026/PDE/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Komite Assets and Liabilities Management Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Assets and Liabilities Management periode tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2.

COMMITTEE GUIDELINES

The establishment of Assets and Liabilities Management Committee of Indonesia Eximbank is guided by Executive Director Regulation No. 0026/PDE/05/2019 dated 23 May 2019 concerning the Assets and Liabilities Management Committee of Indonesia Eximbank.

In carrying out its duties, Assets and Liabilities Management Committee for the 2023 period is guided by Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated 26 September 2023 concerning Standard Operational Guidelines for Nine Committees Under the Executive Director Edition 1 Revision 2.

STRUKTUR KEANGGOTAAN DAN STATUS HAK SUARA

Berpedoman pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif, struktur dan komposisi keanggotaan Komite Assets and Liabilities Management adalah sebagai berikut:

MEMBERSHIP STRUCTURE AND VOTING RIGHTS STATUS

Guided by Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 concerning Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director, the structure and composition of the membership of the Assets and Liabilities Management Committee is as follows:

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi keuangan Managing Director in charge of finance
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi pengelolaan Aset dan Kewajiban/Asset and Liabilities Management (ALMA) Head of Division in charge of Asset & Liabilities Management (ALMA)
Anggota Tetap Permanent Member	1. Direktur Pelaksana yang membidangi pembiayaan. 2. Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan bisnis. 3. Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan. 4. Direktur Pelaksana yang membidangi manajemen risiko dan/atau Head of yang membidangi manajemen risiko. 5. Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis. 1. Managing Director in charge of financing 2. Managing Director in charge of business development 3. Managing Director in charge of institutional relations 4. Managing Director in charge of risk management and/or Head of in charge of risk management 5. Head of finance and strategic planning.
Narasumber Sources	1. Head of yang membidangi penjaminan dan asuransi. 2. Head of/Kepala Divisi yang membidangi internal audit. 3. Head of/Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan. 4. Head of/Kepala Divisi yang membidangi Operation & IT. 5. Kepala Divisi yang membidangi Financial Institution & Treasury. 6. Kepala Divisi/Pejabat setingkat Kepala Divisi dari unit kerja yang terundang. 1. Head of underwriting and insurance 2. Head of/Head of Division in charge of internal audit. 3. Head of/Head of Division in charge of compliance. 4. Head of/Head of Division in charge of operation & IT 5. Head of Division in charge of Financial Institution & Treasury 6. Head of Division/Division Head level Officer of the invited work unit.

***Alternate* Keanggotaan Komite Assets and Liabilities Management** Alternate Membership of Assets & Liabilities Management Committee	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai PMK No. 208/PMK.06/2021 – Pasal 11 In accordance with PMK No. 208/PMK.06/2021 – Article 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko Managing Director in charge of Risk Management
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi Financial Institution and Treasury Head of Division in charge of Financial Institution & Treasury

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas Komite Assets dan Liabilities Management (ALMA) adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagai berikut:
   a. Mengembangkan, mengkaji ulang serta memodifikasi strategi ALMA;
   b. Mengkaji ulang penetapan suku bunga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA;
   c. Menyampaikan informasi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA;
   d. Memutuskan strategi pendanaan dan penempatan dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan
   e. Menetapkan pemberian suku bunga (*pricing*) kepada debitur yang besarnya di bawah *Base Lending Rate* (BLR).

2. Menetapkan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities* dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal meliputi:
   a. Manajemen Likuiditas
      Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan manajemen likuiditas dan limit sesuai dengan kebijakan dan strategi ALMA meliputi:
      1) Pengelolaan sumber dana yang likuid dengan tujuan untuk dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo (*cash flow*) dan kebutuhan dana tidak terduga lainnya;
      2) Meminimalkan *idle funds* serta menjaga posisi likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. Manajemen *Gap*
      Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan kesenjangan posisi (*mismatch*) antara *assets* dan *liabilities* pada

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties of the Assets and Liabilities Management Committee (ALMA) are as follows:

1. Determine risk management policy of Indonesia Eximbank, as follows:
   a. Develop, review and modify ALMA strategies;
   b. Review the determination of interest rates (pricing) for assets and liabilities to ensure that the pricing can optimize the results of investment of funds, minimize the cost of funds, and maintain the balance sheet structure in accordance with the ALMA strategy;
   c. Convey information regarding any developments in related provisions and regulations that influence ALMA's strategy and policies;
   d. Decide on the funding strategy and placement of funds from the Indonesian Export Financing Institution; And
   e. Determine the provision of interest rates (pricing) to debtors whose amount is below the Base Lending Rate (BLR).

2. Determine policies, boundaries and strategic guidelines for managing assets and liabilities by considering internal and external conditions including:
   a. Liquidity Management
      Determine and evaluate liquidity and limit management policies in accordance with ALMA policies and strategies including:
      1) Management of liquid funding sources with the aim of being able to meet maturing obligations (cash flow) and other unexpected funding needs;
      2) Minimize idle funds and maintain liquidity position in accordance with applicable regulations.
   b. Gap Management
      Determine and evaluate policies and strategies for managing the mismatch between assets and liabilities on the balance sheet, especially

neraca khususnya pos-pos pada neraca yang sensitif terhadap tingkat bunga dengan tujuan mengoptimalkan pendapatan bunga bersih (*net interest income*) sesuai dengan antisipasi arah perubahan tingkat bunga dengan tingkat risiko yang ditetapkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

c. Manajemen *Pricing*
Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan portofolio antara lain melalui kebijakan *pricing assets* dan *liabilities* dengan tujuan mengoptimalkan *interest margin* (*spread*) dengan mempertimbangkan biaya modal, *overhead cost* dan risiko.

d. Manajemen *Forex*
Menetapkan kebijakan dan pengelolaan kesenjangan posisi (*forex gap*) antara *assets* dan *liabilities* dengan tujuan untuk menjaga tingkat risiko *forex* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RAPAT KOMITE

Kebijakan Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Komite Assets and Liabilities Management menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap saat apabila dipandang perlu.

Tata cara pelaksanaan rapat Komite Assets and Liabilities Management dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
2. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah minimum setengah dari anggota tetap terdiri dari:
   a. Ketua dan/atau Wakil Ketua;
   b. Sekretaris; dan
   c. Anggota tetap.
3. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2023 Komite Assets and Liabilities Management telah mengadakan rapat sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

those items on the balance sheet that are sensitive to interest rates with the aim of optimizing net interest income in accordance with the anticipated direction of changes in interest rates and risk levels. determined by the Indonesian Export Financing Agency.

c. Pricing Management
Determine and evaluate portfolio management policies, including through asset and liabilities pricing policies with the aim of optimizing interest margin (spread) by considering capital costs, overhead costs and risks.

d. Forex Management
Determine policies and manage the forex gap between assets and liabilities with the aim of maintaining the level of forex risk in accordance with applicable regulations.

COMMITTEE MEETING

Decision Making Policy in Meetings

Assets and Liabilities Management Committee holds at least 12 (twelve) meetings in 1 (one) year or at any time if deemed necessary.

The procedures for holding Assets and Liabilities Management Committee meetings for decision making are as follows:

1. Committee decisions can be made through face-to-face or online meetings.
2. The requirement for a quorum for Committee decision making is a minimum of half of the permanent members consisting of:
   a. Chairman and/or Deputy Chairman;
   b. Secretary; and
   c. Permanent member.
3. Meeting decisions must be taken based on deliberation to reach consensus.
4. All Committee decisions must be stated in the Minutes of Meeting and administered completely and orderly by the committee secretary.

Meeting Frequency and Attendance Level

Throughout 2023, the Assets and Liabilities Management Committee held 25 (twenty-five) meetings, with attendance levels as follows:

Peserta Rapat Meeting Participants	**Posisi di Komite** Position on the Committee	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Persentase Kehadiran** Percentage Attendance
Direktur Eksekutif Executive Director	Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	25	25	100%
Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional/Plt. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit Managing Director of Finance & Operations/Acting Managing Director of Credit & Risk Management	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	25	20	80%
Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan Managing Director of Financing	Anggota Tetap Permanent Member	25	22	88%
Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Anggota Tetap Permanent Member	25	23	92%
Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director of Institutional Relations	Anggota Tetap Permanent Member	25	21	84%
Head of Keuangan & Perencanaan Strategis Head of Finance & Strategic Planning	Anggota Tetap Permanent Member	25	25	100%
Kepala Divisi *Financial Institution & Treasury* Head of Financial Institution & Treasury Division	*Alternate* Sekretaris merangkap Anggota Tetap Alternate Secretary concurrently Permanent Member	25	22	88%

AGENDA RAPAT

Rapat Komite Assets and Liabilities Management sepanjang tahun 2023 membahas berbagai agenda antara lain:

1. Strategi Optimalisasi Likuiditas
2. Strategi Suku Bunga Pembiayaan
3. Strategi Pendanaan

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2023

Pada tahun 2023, anggota Komite Assets and Liabilities Management tidak mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2023

Di tahun 2023, Komite Assets and Liabilities Management melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang telah ditetapkan.

MEETING AGENDA

Assets and Liabilities Management Committee meetings throughout 2023 discussed various agendas, including:

1. Liquidity Optimization Strategy
2. Financing Interest Rate Strategy
3. Funding Strategy

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2023

In 2023, members of the Assets Committee and Liabilities Management did not participate in activities training and competency development.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF COMMITTEE DUTIES IN 2023

In 2023, the Risk Management Committee has carried out its duties in accordance with the responsibilities that have been set.

Komite Teknologi Sistem Informasi
Information Systems Technology Committee

PEDOMAN KOMITE

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Teknologi Sistem Informasi periode tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2.

COMMITTEE GUIDELINES

In carrying out its duties, the Information Systems Technology Committee for the 2023 period is guided by Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated 26 September 2023 concerning Standard Operational Guidelines for Nine Committees Under the Executive Director Edition 1 Revision 2.

STRUKTUR KEANGGOTAAN DAN STATUS HAK SUARA

Struktur (komposisi) keanggotaan Komite Teknologi Sistem Informasi berdasarkan pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan komite di Bawah Direktur Eksekutif adalah sebagai berikut:

MEMBERSHIP STRUCTURE AND VOTING RIGHTS STATUS

The structure (composition) of the Information Systems Technology Committee membership is based on Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 concerning Standard Operational Guidelines. Nine committees under the Executive Director are as follows:

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Head of yang membidangi teknologi sistem informasi Head of Information system technology
Sekretaris Komite (Non Anggota)	Kepala Divisi yang membidangi teknologi sistem informasi Head of Information Systems Technology Division
Anggota Tetap Permanent Member	1. Direktur Pelaksana yang membidangi manajemen risiko dan/atau Head of yang membidangi manajemen risiko 2. Direktur Pelaksana yang membidangi teknologi sistem informasi 3. Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis 1. Managing Director in charge of risk management and/or Head of in charge of risk management 2. Managing Director in charge of information system technology 3. Head of finance and strategic planning
Anggota Tidak Tetap Non Permanent Member	Direktur Pelaksana dan/atau Head of yang terkait materi Managing Director and/or Head of related material
Narasumber Sources	1. Head of/kepala divisi yang membidangi internal audit 2. Head of/kepala divisi yang membidangi kepatuhan 3. Ketua Komite Audit 4. Ketua Komite Pemantau Risiko 5. Kepala Divisi/Pejabat setingkat Kepala Divisi dari Unit Kerja terkait 1. Head of Division in charge of internal audit 2. Head of Division in charge of compliance 3. Chairman of Audit Committee 4. Chairman of Risk Monitoring Committee 5. Head of Division/Division Head level Officer of the relevant Work Unit
***Alternate* Keanggotaan Komite Teknologi Sistem Informasi** Alternate Information System Technology Committee Membership	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai PMK No. 208/PMK.06/2021 – Pasal 11 In accordance with PMK No. 208/PMK.06/2021 – Article 11
Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently Permanent Member	Kepala Divisi yang membidangi operasional Head of Division in charge of operations

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite Teknologi Sistem Informasi (TSI) adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait paling sedikit meliputi:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Information System Technology Committee (TSI) are to provide recommendations to the Executive Director regarding at least the following:

1. Rencana pengembangan TSI yang sejalan dengan kegiatan usaha LPEI.
2. Perumusan peraturan terkait TSI.
3. Kesesuaian proyek TSI yang disetujui dengan rencana pengembangan TSI.
4. Kesesuaian atas pelaksanaan proyek TSI dengan rencana proyek TSI yang disetujui.
5. Kesesuaian TSI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha LPEI.
6. Efektivitas mitigasi risiko atas investasi LPEI pada sektor TSI terhadap pencapaian tujuan bisnis LPEI.
7. Pemantauan atas kinerja TSI dan upaya peningkatan TSI.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TSI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TSI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya TSI yang dimiliki LPEI.

RAPAT KOMITE

Kebijakan Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Komite Teknologi Sistem Informasi menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun, yang terdiri dari:

a. Rapat pertama dengan agenda pembahasan Rencana Strategis Teknologi Sistem Informasi untuk satu tahun mendatang termasuk alokasi anggarannya sesuai RKAT;
b. Rapat kedua dengan agenda *monitoring* terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Teknologi Sistem Informasi yang disetujui pada rapat pertama beserta realisasi penggunaan anggaran;
c. Rapat ketiga dengan agenda laporan hasil realisasi pelaksanaan Rencana Strategis Teknologi Sistem Informasi selama tahun berjalan dan realisasi penggunaan anggaran.

Selain rapat sebagaimana tersebut di atas, rapat dapat juga dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite, atau atas permintaan manajemen atau atas usulan unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

1. Development plan of TSI in line with Indonesia Eximbank business activities.
2. Formulation of regulations related to TSI.
3. Compliance of approved TSI projects with the TSI development plan.
4. Compliance of TSI project implementation with approved TSI project plans.
5. Alignment of TSI with the needs of the management information system and the business activities of Indonesia Eximbank.
6. Effectiveness of risk mitigation for Indonesia Eximbank's investments in the TSI sector towards achieving Indonesia Eximbank's business objectives.
7. Monitoring the performance of TSI and efforts to improve TSI.
8. Efforts to resolve various TSI-related issues that cannot be resolved effectively, efficiently, and in a timely manner by user units and TSI providers.
9. Adequacy and allocation of TSI resources owned by Indonesia Eximbank.

RAPAT KOMITE

Policy on Decision Making in Meetings

The Information System Technology Committee holds meetings at least 3 (three) times a year, comprising:

a. The first meeting, focusing on discussing the Strategic Plan of Information System Technology for the upcoming year, including budget allocation as per the approved budget plan (RKAT).
b. The second meeting, dedicated to monitoring the implementation of the approved Strategic Plan of Information System Technology from the first meeting, along with the utilization of budget allocations.
c. The third meeting, intended for reporting on the realization of the implementation of the Strategic Plan of Information System Technology throughout the current year and the utilization of budget allocations.

In addition to the aforementioned meetings, additional meetings can be held whenever deemed necessary, upon the request of one or more committee members, management, or proposed by related work units presenting the material to be discussed, in coordination with the Committee Secretary.

Tata cara pelaksanaan rapat Komite Teknologi Sistem Informasi dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
2. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum:
   a. setengah dari anggota tetap terdiri dari:
      1) Ketua dan/atau Wakil Ketua;
      2) Sekretaris;
      3) Anggota tetap; dan
   b. satu anggota tidak tetap.
3. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

The procedures for conducting Information System Technology Committee meetings for decision-making are as follows:

1. Decision-making by the Committee can be conducted through physical or online meetings.
2. The quorum requirement for decision-making by the Committee is a minimum attendance of:
   a. Half of the permanent members, including:
      1) Chairman and/or Vice Chairman;
      2) Secretary;
      3) Permanent members; and
   b. One non-permanent member.
3. Decisions in the meeting must be based on consensus.
4. All Committee decisions must be documented in Meeting Minutes, which shall be meticulously and orderly prepared by the committee secretary.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2023 Komite Teknologi Sistem Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 12 (Dua Belas) kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance Rate

Throughout 2023, the Information System Technology Committee held 12 (twelve) meetings, with the following attendance level:

Peserta Rapat Meeting Participants	**Posisi di Komite** Position on the Committee	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Persentase Kehadiran** Percentage of Attendance
Direktur Eksekutif Executive Director	Ketua merangkat Anggota Tetap Chairman concurrently as a Permanent Member	12	12	100%
Head of Operation & IT	Wakil ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently as a Permanent Member	12	3	25%
Kepala Divisi Teknologi Informasi Head of Information Technology Division	Sekretaris merangkap Anggota Tetap Secretary concurrently as a Permanent Member	12	12	100%
Direktur Pelaksana bidang Manajemen Risiko Managing Director of Risk Management	Anggota Tetap Permanent Members	12	12	100%
Direktur Pelaksana bidang Keuangan dan Operasional Managing Director of Finance and Operation	Anggota Tetap Permanent Members	12	12	100%
Head of Credit & Risk	Anggota tidak tetap Non-permanent member	12	8	67%
Head of Finance & Strategic Planning	Anggota Tetap Permanent Members	12	12	100%
Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan Managing Director of Financing	Anggota tidak tetap Non-permanent member	12	5	42%
Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis Managing Director of Business Development	Anggota tidak tetap Non-permanent member	12	6	50%
Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director of Institutional Relation	Anggota tidak tetap Non-permanent member	12	5	42%
Head of Guarantee & Insurance	Anggota tidak tetap Non-permanent member	12	4	33%

Peserta Rapat Meeting Participants	**Posisi di Komite** Position on the Committee	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Persentase Kehadiran** Percentage of Attendance
Head of Region	Anggota tidak tetap Non-permanent member	12	2	17%
Head of Audit	Narasumber Source	12	11	92%
Head of Kepatuhan, SDM & Transformasi Lembaga Head of Compliance, HR & Institutional Transformation	Narasumber Source	12	9	75%

AGENDA RAPAT

Rapat Komite Teknologi Sistem Informasi sepanjang tahun 2023 membahas berbagai agenda antara lain:

1. *Update* status *project* IT 2022-2023 dan status *project Core System Trade Finance* (FTI).
2. Tindak lanjut arahan Komite TSI terkait Implementasi *Core System Trade Finance* (FTI).
3. *Update* Status *Project* IFOS-IBOS.
4. *Update* Status Perpanjangan Lisensi *Core System Trade Finance* dan Rencana Project IT RKAT 2023.
5. Tindak lanjut arahan Komite TSI 15 Maret 2023 dan *Update* Status Pelaksanaan *Funneling* Inisiatif Tahun 2023.
6. Rencana Implementasi Pemindahan Infrastruktur DRC LPEI ke DRC Kementerian Keuangan Balikpapan.
7. Rencana Peremajaan Perangkat Pendukung *Data Center Head Office* (HO).
8. *Promote* Produk Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan *Promissory Notes* (Pnotes).
9. *Update* IT *Activity*.
10. *Raoadmap* Pengembangan IT.
11. Implementasi *Security Operation Center* (SOC).
12. Laporan Penyelenggaraan IT 2023 dan rencana Kerja IT 2024.

MEETING AGENDA

The Information System Technology Committee meetings throughout the year 2023 discussed various agendas, including:

1. Update on IT project status 2022-2023 and Core System Trade Finance (FTI) project status.
2. Follow-up of TSI Committee's direction regarding the Implementation of Core System Trade Finance (FTI).
3. Update on IFOS-IBOS Project Status.
4. Update on Core System Trade Finance License Renewal Status and IT RKAT 2023 Project Plan.
5. Follow-up of TSI Committee's direction on March 15, 2023 and Update on the Status of Funneling Initiative Implementation in 2023.
6. Implementation Plan of LPEI DRC Infrastructure Transfer to DRC Ministry of Finance Balikpapan.
7. Head Office (HO) Data Center Supporting Device Rejuvenation Plan.
8. Promote Exported Foreign Exchange (DHE) Products and Promissory Notes (Pnotes).
9. IT Activity Update.
10. IT Development Raoadmap.
11. Implementation of Security Operation Center (SOC).
12. IT Implementation Report 2023 and IT Work plan 2024.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2023

Pada tahun 2023, anggota Komite Teknologi Sistem Informasi tidak mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2023

In 2023, members of the Information Systems Technology Committee did not participate in training and competency development activities.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2023

Di tahun 2023, Komite Teknologi Sistem Informasi melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang telah ditetapkan.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF COMMITTEE DUTIES IN 2023

In 2023, the Information Systems Technology Committee carried out its duties in accordance with its established responsibilities and functions.

Komite Pengadaan
Procurement Committee

PEDOMAN KOMITE

Komite Teknologi Pengadaan dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. PDE.0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif. Komite ini bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam menetapkan strategi teknologi dan sistem informasi guna mendukung perkembangan kegiatan usaha dan bisnis LPEI.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Kebijakan dan Pedoman periode tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan komite di Bawah Direktur Eksekutif, Edisi 1, Revisi 2.

COMMITTEE GUIDELINES

The Procurement Technology Committee was established based on Executive Director Regulation No. PDE.0015/PDE/08/2022 dated 9 August 2022, regarding the Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director. This committee is tasked with providing recommendations to the Executive Director on establishing technology and information system strategies to support the development of Indonesia Eximbank business activities and operations.

In carrying out its duties, the Policy and Guidelines Committee for the year 2023 adheres to Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated 26 September 2023, regarding the Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director, Edition 1, Revision 2.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE

Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Pengadaan berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 adalah sebagai berikut:

1. Struktur Keanggotaan Komite I Pengadaan (limit > Rp1.000.000.000)*

* Akumulasi limit pengadaan termasuk pekerjaan eksisting > Rp1.000.000.000

STRUCTURE AND MEMBERSHIP COMMITTEE

The structure and membership composition of the Procurement Committee, based on Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023, are as follows:

1. Membership Structure of Committee I Procurement (limit >Rp1,000,000,000)*

* Accumulated procurement limit including existing work > Rp1,000,000,000

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi pengadaan Managing Director in charge of procurement
Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non Member)	Kepala Divisi yang membidangi Pengadaan Head of Division in charge of procurement
Anggota Tetap Permanent Member	1. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko dan/atau Head of Manajemen Risiko dan Kredit 2. Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis 3. Head of yang membidangi Operation and IT 4. Direktur Pelaksana dan/atau Head of Pengusul (diutamakan Direktur Pelaksana dari unit pengusul untuk hadir jika unit pengusul memiliki head of dan Direktur Pelaksana 1. Managing Director of Risk Management and/or Head of Risk and Credit Management 2. Head of Finance & Strategic Planning 3. Head of operation & IT 4. Managing Director and/or Head of Proposer (preferably the Managing Director of the proposing unit to attend if the proposing unit has a head of and Managing Director)
Narasumber Sources	1. Head of/kepala divisi yang membidangi internal audit 2. Head of/kepala divisi yang membidangi Internal kepatuhan 3. Kepala Divisi yang membidangi hukum 4. Kepala Divisi yang mengusulkan mengenai pengadaan 1. Head of/head of division in charge of internal audit 2. Head of/Head of Division in charge of Internal Compliance 3. Head of Legal Division 4. Head of Division who proposes procurement

***Alternate* Keanggotaan Komite I Pengadaan (limit > Rp1.000.000.000)** Alternate Committee I Procurement Membership (limit > Rp1,000,000,000)	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai PMK No. 208/PMK.06/2021 – Pasal 11 In accordance with PMK No. 208/PMK.06/2021 - Article 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan Managing Director of institutional relations
Sekretaris Komite Committee Secretary	Kepala Divisi yang membidangi strategic planning Head of Division in charge of strategic planning
Anggota Tetap Permanent Member	1. Direktur Pelaksana yang membidangi keuangan dan operasional. 2. Dua Kepala Divisi yang berada di bawah Head of finance and strategic planning. 3. Dua Kepala Divisi yang berada di bawah Head of Operation and IT. 1. Managing Director of finance and operations. 2. Two Division Heads under the Head of finance and strategic planning. 3. Two Division Heads under the Head of Operation and IT.
Anggota Tidak Tetap Non Permanent Member	Tidak ada *alternate* karena sebagai owner pengusul There is no alternate because as owner proposer

2. Struktur Keanggotaan Komite II Pengadaan (limit > Rp500.000.000 – ≤ Rp1.000.000.000) *

* Akumulasi limit pengadaan termasuk pekerjaan eksisting > Rp500.000.000 – ≤ Rp1.000.000.000

2. Membership Structure of Committee II Procurement (limit > Rp500,000,000 – ≤ Rp1,000,000,000)*

* Accumulated procurement limit including existing > Rp500,000,000 – ≤ Rp1,000,000,000

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	1. Direktur Pelaksana yang membidangi pengadaan (dalam hal pengadaan barang/jasa di luar direktoratnya); atau 2. Direktur Pelaksana yang membidangi manajemen risiko dan/atau Head of yang membidangi manajemen risiko (dalam hal pengadaan barang/jasa di bawah direktorat Direktur Pelaksana yang membidangi pengadaan). 1. Managing Director of procurement (in the case of procurement of goods/services outside his/her directorate); or 2. The Managing Director of risk management and/or the Head of risk management (in the case of procurement of goods/services under the directorate of the Managing Director of Procurement).
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	1. Direktur Pelaksana yang membidangi manajemen risiko dan/atau Head of yang membidangi manajemen risiko (dalam hal Direktur yang membidangi pengadaan adalah ketua); atau 2. Direktur Pelaksana yang membidangi pengadaan (dalam hal direktur yang membidangi manajemen risiko adalah ketua). 1. Managing Director of risk management and/or Head of risk management (in the event that the Director in charge of procurement is the chairman); or 2. The Managing Director of procurement (in the case where the director in charge of risk management is the chairperson).
Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non Member)	Kepala Divisi yang membidangi Pengadaan Head of Division in charge of Procurement
Anggota Tetap Permanent Member	1. Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis 2. Head of yang membidangi Operation and IT 3. Direktur Pelaksana dan/atau Head of Pengusul (diutamakan Direktur Pelaksana dari unit pengusul untuk hadir jika unit pengusul memiliki head of dan Direktur Pelaksana) 1. Head of finance and strategic planning 2. Head of operations and IT 3. Managing Director and/or Head of Proposer (preferably the Managing Director of the proposing unit to attend if the proposing unit has a head of and Managing Director).
Narasumber Source	1. Head of/Kepala Divisi yang membidangi internal audit. 2. Head of/Kepala Divisi yang membidangi Internal kepatuhan. 1. Head of Division in charge of internal audit. 2. Head of/Head of Division in charge of Internal compliance.
***Alternate* Keanggotaan Komite II Pengadaan (> Rp500.000.000 – ≤ Rp1.000.000.000)** **Alternate Membership of Committee II Procurement (> Rp500,000,000 - ≤ Rp1,000,000,000)**	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	1. Direktur Pelaksana yang membidangi manajemen risiko dan/atau Head of yang membidangi manajemen risiko; atau 2. Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan.
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	-
Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non Member)	Divisi yang membidangi *strategic planning*. Division in charge of strategic planning.

Anggota Tetap Permanent Member	1. Dua Kepala divisi yang berada di bawah Head of keuangan dan perencanaan strategis. 2. Dua Kepala divisi yang berada di bawah Head of Operation and IT. 1. Two Heads of divisions under the Head of finance and strategic planning. 2. Two Heads of divisions under the Head of Operation and IT.
Anggota Tidak Tetap Non Permanent Member	Tidak ada *alternate* karena sebagai *owner* pengusul There is no alternate because as owner proposer

3. Struktur Keanggotaan Komite III Pengadaan (limit >Rp20.000.000 – ≤ Rp500.000.000)*

* Akumulasi limit pengadaan termasuk pekerjaan eksiting > Rp20.000.000 – ≤ Rp500.000.000

3. Membership Structure of Committee III Procurement (limit >Rp20,000,000 – ≤ Rp500,000,000)*

* Accumulated procurement limit including existing work > Rp20,000,000 – ≤ Rp500,000,000

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Head of yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis. Head of finance and strategic planning.
Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non Member)	Kepala Divisi yang membidangi pengadaan. Head of Division in charge of procurement.
Anggota Tetap Permanent Member	1. Head of yang membidangi Operation and IT. 2. Direktur Pelaksana dan/atau Head of Pengusul (diutamakan Direktur Pelaksana dari unit pengusul untuk hadir jika unit pengusul memiliki Head of dan Direktur Pelaksana). 1. Head of Operations and IT. 2. Managing Director and/or Head of Proposer (preferably the Managing Director of the proposing unit to attend if the proposing unit has a Head of and Managing Director).
***Alternate* Keanggotaan Komite III Pengadaan (>Rp20.000.000 – ≤ Rp500.000.000)** **Alternate Membership of Committee III Procurement (>Rp20,000,000 - ≤ Rp500,000,000)**	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Dua Kepala Divisi berada di bawah Head of yang sama (di luar kepala divisi pengusul). Two Division Heads under the same Head of Division (other than the proposing division head).
Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non Member)	Divisi yang membidangi *strategic planning*. Division in charge of strategic planning.
Anggota Tetap Permanent Member	1. Dua Kepala Divisi berada di bawah Head of yang sama (di luar kepala divisi pengusul). 2. Tidak ada *alternate* karena sebagai *owner* pengusul. 1. Two Division Heads under the same Head of Division (other than the proposing division head). 2. There is no alternate because it is the owner of the proposal.

4. Pengadaan ≤ Rp20.000.000

Untuk Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000 tidak termasuk ke dalam kewenangan Komite Pengadaan dan merupakan kewenangan Kepala Divisi/Kepala Kantor Wilayah/pejabat setingkat Kepala Divisi dari unit pengusul.

4. Procurement ≤ Rp20.000.000

Procurements with a value of up to Rp20,000,000 are not within the authority of the Procurement Committee and fall under the jurisdiction of the Division Head/ Regional Office Head/official equivalent to the Division Head level of the proposing unit.

TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang Komite Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan prinsip untuk Pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan sesuai yang telah ditetapkan dalam RKAT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan mempertimbangkan biaya dan anggaran.
2. Menyetujui Pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan yang belum dianggarkan dalam RKAT LPEI, termasuk untuk Pengadaan Mendesak dan/atau Pengadaan Keadaan Darurat, yang mana Komite Pengadaan harus dihadiri oleh Direktur Eksekutif.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and authorities of the Procurement Committee are as follows:

1. Provide principle approval for Procurement of Goods/Services in the current year as stipulated in the Indonesian Export Financing Agency's (LPEI) Annual Budget Plan (RKAT), considering costs and budgets.
2. Approve Procurement of Goods/Services in the current year that are not budgeted in the LPEI RKAT, including for Urgent Procurements and/or Emergency Procurements, which must be attended by the Executive Director.

3. Menetapkan susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui Keputusan Komite Pengadaan.
4. Menyetujui dan menetapkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp250.000.000 berikut perubahannya dan nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui metode Swakelola.
5. Menyetujui dan menetapkan pemenang Pengadaan Barang/Jasa yang diusulkan oleh Unit Kerja Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa LPEI atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa LPEI.
6. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait hal-hal yang belum diatur atau terkait deviasi dari Standar Pedoman Operasional pengadaan dan jasa LPEI, sebagai salah satu bahan Direktur Eksekutif untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatikan *good judgment*, mitigasi risiko, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT KOMITE

Kebijakan Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Komite Pengadaan wajib menyelenggarakan rapat secara rutin atau saat dipandang perlu. Pengambilan Keputusan dalam rapat Komite Pengadaan dilaksanakan melalui mekanisme dan tata cara sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai Sekretaris Komite adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi Pengadaan. Fungsi Sekretaris Komite tersebut berlaku efektif pada saat proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah dimulai.
2. Persetujuan izin prinsip Pengadaan Barang/Jasa dapat diajukan oleh unit kerja pengusul Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
4. Rapat tatap muka dapat dilakukan secara fisik atau melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal Komite Pengadaan belum dapat mencapai keputusan maka dapat diajukan ke Rapat *Board of Management* (RABOM) untuk dimintakan keputusan.

3. Determine the composition of the Procurement Committee through Procurement Committee Decisions.
4. Approve and determine the value of Estimated Self-Price (HPS) for Procurement of Goods/Services with a value exceeding Rp250,000,000, including any changes, and the Budget Cost Plan (RAB) for Goods/Services Procurement carried out through the Self-Implementation method.
5. Approve and determine the winner of the Procurement of Goods/Services proposed by the Indonesia Eximbank Procurement Implementing Work Unit or the Indonesia Eximbank Procurement Committee.
6. Provide recommendations to the Executive Director regarding matters that are not regulated or related to deviations from the Operational Guidelines standards for Indonesia Eximbank procurement and services, as one of the materials for the Executive Director to make decisions while considering good judgment, risk mitigation, and compliance with applicable regulations.

COMMITTEE MEETING

Policy on Decision Making in Meetings

The Procurement Committee is obligated to hold meetings regularly or as deemed necessary. Decision-making in the Procurement Committee meetings is conducted through the following mechanisms and procedures:

1. The Head of the Procurement Work Unit acts as the Committee Secretary. The Secretary's function becomes effective when the procurement process for Goods/Services has commenced.
2. Approval for the principle permit of Goods/Services Procurement may be proposed by the proposing procurement work unit.
3. Committee decisions can be made through physical or online meetings.
4. Physical meetings can be conducted in person or through teleconferencing, video conferencing, or other electronic means that allow all meeting participants to see, hear, and participate directly.
5. Decisions in the meeting must be based on consensus. If the Procurement Committee cannot reach a decision, it may be referred to the Board of Management Meeting (RABOM) for a decision.

6. Ketentuan kuorum dalam pengambilan keputusan pada Komite Pengadaan adalah sebagai berikut:
   a. Untuk Komite I dan II, dihadiri oleh setengah dari anggota tetap terdiri dari:
      i) Ketua dan/atau Wakil Ketua;
      ii) Anggota tetap.
   b. Untuk Komite III, dihadiri oleh seluruh anggota Komite III.
7. Seluruh keputusan Komite ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

6. The quorum requirement for decision-making in the Procurement Committee is as follows:
   a. For Committee I and II, attended by half of the permanent members, including:
      i) Chairman and/or Vice Chairman;
      ii) Permanent members.
   b. For Committee III, attended by all Committee III members.
7. All Committee decisions must be completely and orderly documented by the committee secretary.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2023 Komite Pengadaan telah mengadakan rapat sebanyak 68 (enam puluh delapan) kali, yang terdiri dari:

Meeting Frequency and Attendance

During the year 2023, the Procurement Committee held 68 (sixty eight) meetings, comprising:

Komite Committee	**Jumlah Rapat** Number of Meetings
Komite I	34
Komite II	34

Seluruh rapat tersebut dilaksanakan dengan tingkat kehadiran anggota memenuhi ketentuan kuorum rapat, sebagai berikut:

All meetings were conducted with the attendance of members meeting the quorum requirements for the meetings, as follows:

Rapat Komite I / **Meeting Committee I**

Peserta Rapat Meeting Participants	**Posisi di Komite** Position on the Committee	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency	**Jumlah** Kehadiran	**Persentase** Kehadiran
Direktur Eksekutif Executive Director	Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	34	34	100%
Direktur Pelaksana Bidang Keuangan dan Operasional Managing Director of Finance and Operations	Direktur Pelaksana yang membidangi pengadaan Managing Director in charge of procurement	34	34	100%
Head of Finance & Strategic Planning	Anggota Tetap Permanent Member	34	32	94,12%
Head of Credit & Risk	Anggota Tetap Permanent Member	34	31	91,18%

Rapat Komite II / **Meeting Committee II**

Peserta Rapat Meeting Participants	**Posisi di Komite** Position on the Committee	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency	**Jumlah** Kehadiran	**Persentase** Kehadiran
Direktur Pelaksana Bidang Keuangan dan Operasional Managing Director of Finance and Operations	Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	34	34	100%
Head of Finance & Strategic Planning	Anggota Tetap Permanent Member	34	29	85,29%
Head of Credit & Risk	Anggota Tetap Permanent Member	34	33	97,06%

AGENDA RAPAT

Rapat Komite Pengadaan sepanjang tahun 2023 membahas berbagai agenda antara lain:

1. Persetujuan HPS, Metode Pengadaan dan Panitia Pengadaan
2. Persetujuan Pemenang Pengadaan

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2023

Pada tahun 2023, anggota Komite Pengadaan tidak mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2023

Di tahun 2023, Komite Pengadaan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang telah ditetapkan.

MEETING AGENDA

Throughout 2023, the Procurement Committee discussed various agendas, including:

1. Approval of HPS, Procurement Method and Procurement Committee
2. Approval of Procurement Winner

Competency Development Program in 2023

In 2023, Procurement Committee members did not participate in training and competency development activities.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF COMMITTEE DUTIES IN 2023

In 2023, the Procurement Committee carried out its duties in accordance with its established responsibilities and functions.

Komite Jasa Konsultasi
Advisory Services Committee

PEDOMAN KOMITE

Pelaksanaan tugas Komite Jasa Konsultasi LPEI berpedoman pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2.

COMMITTEE GUIDELINES

The execution of duties by Indonesia Eximbank Advisory Services Committee is guided by Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated 26 September 2023, concerning the Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director, Edition 1 Revision 2.

STRUKTUR DAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE

Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Jasa Konsultasi berdasarkan pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 adalah sebagai berikut:

STRUCTURE AND COMPOSITION OF COMMITTEE MEMBERSHIP

The structure and membership composition of Advisory Services Committee are based on Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated 26 September 2023, as follows:

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director of Institutional Relations
Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non Member)	Kepala Divisi Jasa Konsultasi Head of Advisory Services Division
Anggota Tetap Permanent Member	1. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko dan/atau Head of yang membidangi Manajemen Risiko 2. Head of Keuangan dan Perencanaan Strategis 3. Head of yang membidangi Transformasi Lembaga 1. Managing Director of Risk Management and/or Head of the Risk Management Division 2. Head of Finance and Strategic Planning 3. Head of in charge of Institutional Transformation
Narasumber Sources	1. Direktur Pelaksana yang membidangi Pembiayaan 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisni 3. Head of Region 4. Head of Internal Audit 5. Kepala Divisi Reviewer 6. Kepala Divisi dari Unit Kerja terkait 1. Managing Director of Financing 2. Managing Director of Business Development 3. Head of Region 4. Head of Internal Audit 5. Head of Reviewer Division 6. Head of Division of the relevant Work Unit
***Alternate* Keanggotaan Komite Jasa Konsultasi** **Alternate Membership of Advisory Services Committee**	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai PMK No. 208/PMK.06/2021 – Pasal 11. In accordance with PMK No. 208/PMK.06/2021 - Article 11.
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Pelaksana yang Membidangi Keuangan dan Operasional. Managing Director of Finance and Operations.
Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (Non Member)	1 (satu) Kepala Divisi dalam 1 (satu) Direktorat yang sama. 1 (one) Head of Division in the same Directorate.

TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang Komite Jasa Konsultasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan prinsip untuk Program Jasa Konsultasi pada tahun berjalan sesuai yang telah ditetapkan dalam RKAT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan mempertimbangkan biaya dan anggaran.
2. Menyetujui Program Jasa Konsultasi pada tahun berjalan yang belum dianggarkan dalam RKAT LPEI.
3. Menetapkan susunan Pelaksana Jasa Konsultasi melalui Keputusan Komite Jasa Konsultasi.
4. Menyetujui nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Program Jasa Konsultasi yang dilaksanakan.
5. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait hal-hal yang belum diatur atau terkait deviasi dari Standar Pedoman Operasional Jasa Konsultasi LPEI, sebagai salah satu bahan Direktur Eksekutif untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatikan *good judgment*, mitigasi risiko, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memberi keputusan untuk program Jasa Konsultasi, antara lain:
   a. Desa Devisa;
   b. Coaching Program for New Exporters (CPNE);
   c. Program Kemitraan;
   d. Marketing Handholing; atau
   e. Kegiatan Rumah Ekspor (Fisik dan Digital).

RAPAT KOMITE

Kebijakan Rapat dan Pengambilan Keputusan

Komite Jasa Konsultasi wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 tahun yang terdiri dari:

a. Rapat pertama dengan agenda pembahasan Rencana Strategis Jasa Konsultasi untuk satu tahun mendatang termasuk alokasi anggarannya sesuai RKAT;
b. Rapat kedua dengan agenda *monitoring* terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Jasa Konsultasi yang disetujui pada rapat pertama beserta realisasi penggunaan anggaran;
c. Rapat ketiga dengan agenda laporan hasil realisasi pelaksanaan Rencana Jasa Konsultasi selama tahun berjalan dan realisasi penggunaan anggaran.

DUTIES AND AUTHORITIES

The duties and authorities of Advisory Services Committee are as follows:

1. Provide principle approval for Advisory Services Program in the current year as stipulated in Indonesia Eximbank Annual Budget Plan (RKAT), considering costs and budgets.
2. Approve the Advisory Services Program in the current year that is not budgeted in Indonesia Eximbank RKAT.
3. Determine the composition of the Advisory Services Implementing Team through Advisory Services Committee Decisions.
4. Approve the Budget Cost Plan (RAB) for the implemented Consulting Services Program.
5. Provide recommendations to the Executive Director regarding matters that are not regulated or related to deviations from the Operational Guidelines for Indonesia Eximbank Advisory Services, as one of the materials for the Executive Director to make decisions while considering good judgment, risk mitigation, and compliance with applicable regulations.
6. Make decisions for Advisory Services programs, including but not limited to:
   a. Go Export Village;
   b. Coaching Program for New Exporters (CPNE);
   c. Partnership Program;
   d. Marketing Handholding; or
   e. Export House Activities (Physical and Digital).

MEETING COMMITTEE

Meeting and Decision Making Policy

The Advisory Services Committee is required to hold meetings at least 3 (three) times a year, consisting of:

a. The first meeting to discuss the Strategic Plan of Consultation Services for the upcoming year, including budget allocation according to the RKAT.
b. The second meeting to monitor the implementation of the approved Strategic Plan of Advisory Services from the first meeting along with the realization of budget utilization.
c. The third meeting to report on the realization results of the implementation of the Advisory Services Plan during the current year and the realization of budget utilization.

Selain rapat-rapat tersebut di atas, rapat dapat juga dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Komite, atau atas permintaan manajemen atau atas usulan unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

In addition to the above meetings, meetings may also be held at any time when deemed necessary upon the request of one or more committee members, or at the request of management or upon proposals from related units presenting the material to be discussed and coordinating with the Committee Secretary.

Pengambilan Keputusan Komite Jasa Konsultasi dilaksanakan melalui mekanisme dan tata cara sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai Sekretaris Komite adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi Jasa Konsultasi. Fungsi Sekretaris Komite tersebut berlaku efektif pada saat proses Program Jasa Konsultasi.
2. Persetujuan izin prinsip Program Jasa Konsultasi dapat diajukan oleh unit kerja pengusul Jasa Konsultasi.
3. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
4. Rapat tatap muka dapat dilakukan secara fisik atau melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum setengah dari anggota tetap, terdiri dari:
   a. Ketua dan/atau Wakil Ketua;
   b. Sekretaris; dan
   c. Anggota tetap;
7. Seluruh keputusan Komite ditatausahakan dalam bentuk Risalah Rapat secara lengkap dan tertib oleh Sekretaris Komite.

Decision making in the Advisory Services Committee is carried out through the following mechanism and procedures:

1. Acting as the Committee Secretary is the Head of the Unit in charge of Advisory Services. The function of the Committee Secretary is effective during the Advisory Services Program process.
2. Approval of the principle permit for the Advisory Services Program may be proposed by the proposing unit of Advisory Services.
3. Committee decision-making can be done through face-to-face or online meetings.
4. Face-to-face meetings can be conducted physically or through teleconference, video conference, or other electronic media facilities that allow all meeting participants to see and hear each other directly and participate in the meeting.
5. Decisions of the meeting must be made based on deliberation for consensus.
6. The quorum requirement for decision-making by the Committee is attended by a minimum of half of the permanent members, consisting of:
   a. Chairman and/or Vice Chairman;
   b. Secretary; and
   c. Permanent members.
7. All decisions of the Committee are documented in the form of Meeting Minutes comprehensively and orderly by the Committee Secretary.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2023 Komite Jasa Konsultasi telah mengadakan rapat sebanyak (11) kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance Level

Throughout 2023, the Advisory Services Committee held meetings a total of 11 (eleven) times, with the attendance rate as follows:

Peserta Rapat Meeting Participants	**Posisi di Komite** Position on the Committee	**Frekuensi Rapat**	**Jumlah Kehadiran**	**Persentase Kehadiran**
Direktur Eksekutif Executive Director	Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	11	11	100%
Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan Managing Director of Institutional Relations	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	11	11	100%
Head of Manajemen Risiko Head of Risk Management	Anggota Member	11	11	100%

Peserta Rapat Meeting Participants	Posisi di Komite Position on the Committee	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Head of Finance & Strategic Finance Head of Finance & Strategic Finance	Anggota Member	11	10	91%
Head of Compliance, HR & TO Head of Compliance, HR & TO	Anggota Member	11	11	100%
Kepala Divisi Jasa Konsultasi Head of Advisory Services Division	Sekretaris Komite (non anggota) Committee Secretary (non-member)	11	11	100%

AGENDA RAPAT

Rapat Komite Jasa Konsultasi sepanjang tahun 2023 membahas berbagai agenda antara lain:

1. Desa Devisa Kopi Aceh Gayo, Desa Devisa Klaster Rotan, Desa Devisa Klaster Udang Jembrana, dan Desa Devisa Klaster Kokoa dan Kopi Sultra.
2. Program *Marketing Handholding* Q1 2023.
3. CPNE Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Desa Devisa Madura, Desa Devisa Benih Bandeng Buleleng, dan Desa Devisa Rumput Laut Takalar.
4. Desa Devisa Kopi Dairi, Desa Devisa Kakao Gunung Kidul, dan Desa Devisa Kopi Buleleng.
5. Program *Marketing Handholding* melalui kegiatan Terpadu Indonesia *Textile* dan *Fashion Week* Afrika Selatan dan *Business Matching* pada bulan Mei sampai Juni 2023, dan CPNE DIY, Bali, NTB 2023.
6. Desa Devisa Kakao Kolaka Utara, Desa Devisa Kapulaga Pangandaran, Desa Devisa Udang Bengkalis, dan BM dan Ekspor Bersama ke USA pada Bulan Juli 2023.
7. Pameran Expo Indonesia En Mexico 2023, CPNE Riau, Kalsel, Sulsel 2023, Desa Devisa Kerajinan Hulu Sungai Utara, Desa Devisa Gula Aren Pacitan, Penambahan Desa Devisa Kopi Gayo Aceh, dan Persetujuan Izin Prinsip Program Kemitraan – Bav.
8. Desa Devisa Tenun NTT, Desa Devisa Vanili NTT, Desa Devisa Bandeng Pemalang, Desa Devisa Jahe Gajah Pacitan, dan Persetujuan Prinsip *Business Matching* Agustus – September.
9. Desa Devisa *Charcoal* IKN, Pameran Anuga Jerman 2023 dan Ekspor Bersama (*Hub Building*) Meksiko, dan Desa Devisa Maggot Yogyakarta.
10. Desa Devisa Kacang Mete Lombok Utara, Desa Devisa Kopi Bandung, dan Persetujuan Izin Prinsip Pameran Internasional Global Sourcing Expo (GSE) 2023 dan Persetujuan Izin Prinsip Pameran Internasional Global Sourcing Expo (GSE) 2023.

MEETING AGENDA

Advisory Services Committee meetings throughout 2023 discussed various agendas including:

1. Aceh Gayo Coffee Go Export Village, Rattan Cluster Go Export Village, Jembrana Shrimp Cluster Go Export Village, and Cocoa and Coffee Cluster Go Export Village of Southeast Sulawesi.
2. Marketing Handholding Program Q1 2023.
3. CPNE West Java, Central Java, East Java, Madura Go Export Village, Buleleng Milkfish Seed Go Export Village, and Takalar Seaweed Go Export Village.
4. Dairi Coffee Go Export Village, Gunung Kidul Cocoa Go Export Village, and Buleleng Coffee Go Export Village.
5. Marketing Handholding Program through Integrated Indonesia Textile and Fashion Week South Africa and Business Matching activities in May to June 2023, and CPNE DIY, Bali, NTB 2023.
6. North Kolaka Cocoa Go Export Village, Pangandaran Cardamom Go Export Village, Bengkalis Shrimp Go Export Village, and BM and Joint Export to USA in July 2023.
7. Expo Indonesia En Mexico 2023, CPNE Riau, South Kalimantan, South Sulawesi 2023, Hulu Sungai Utara Handicraft Go Export Village, Pacitan Aren Sugar Go Export Village, Gayo Aceh Coffee Go Export Village, and Partnership Program Principal Permit Approval - Bav.
8. Weaving Go Export Village NTT, Vanilla Go Export Village NTT, Bandeng Go Export Village Pemalang, Ginger Elephant Go Export Village Pacitan, and Approval in Principal Permit of Business Matching August - September.
9. IKN Charcoal Go Export Village, Germany 2023 Anuga Exhibition and Mexico Joint Export (Hub Building), and Yogyakarta Maggot Go Export Village.
10. North Lombok Cashew Nut Go Export Village, Bandung Coffee Go Export Village, and Approval of Principal Permit for Global Sourcing Expo (GSE) 2023 International Exhibition and Approval of Principal Permit for Global Sourcing Expo (GSE) 2023 International Exhibition.

11. Ekspor Bersama Jeddah, Kanada & Amerika Serikat, Pameran Winter Fancy Food Show 2024, Desa Devisa Kolaborasi Exxonmobil (Kerajinan Bojonegoro, Rotan & Kerupuk Gresik), CPNE 5 Provinsi (Sumbar, Jabar, Jakarta, Jateng, Jatim 2024), dan Penambahan jumlah Desa Devisa Klaster Tenun NTT.

11. Joint Export Jeddah, Canada & USA, Winter Fancy Food Show 2024, Exxonmobil Collaboration Go Export Village (Bojonegoro Handicrafts, Rattan & Gresik Crackers), CPNE 5 Provinces (West Sumatra, West Java, Jakarta, Central Java, East Java 2024), and Increase in the number of Weaving Cluster Go Export Village NTT.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2023

Pada tahun 2023, beberapa anggota Komite Jasa Konsultasi telah mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan uraian sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2023

In 2023, several members of the Advisory Services Committee participated in training and competency development activities to support the effectiveness of carrying out their duties and responsiblities as follows:

Nama Name	**Tanggal Pelaksanaan** Date of Implementation	**Judul Program** Title of Program	**Penyelenggara** Organizer
Rijani Tirtoso	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap With The* 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
Chesna F. Anwar	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap With The* 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
Maqin U. Norhadi	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap With The* 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
Dikdik Yustandi	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap With The* 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
T. Wahyu Prihadi Wibowo	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap With The* 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
Titiek Setiyowati	26 Juli 2023 26 July 2023	ERM dan *Cyber Security How To Mitigate and Protect*	Bankers Association for Risk Management (BARa)
	6 Maret 2023 6 March 2023	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Maret Risk Management Certification Refreshment March	Arfaidhams Secret
	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap With The* 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
	29 Maret 2023 29 March 2023	*Credit Skill - End To End Proses* Pembiayaan Credit Skill - End to End Financing Process	LPEI
	21 Juni 2023 21 June 2023	ESG – *Risk Management Addressing Key Challenges in Climate Change*	Moodys
Anwar Harsono	13 Juli 2023 13 July 2023	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Juli Risk Management Certification Refreshment July	Arfaidhams Secret
	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap With The* 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI

Nama Name	**Tanggal Pelaksanaan** Date of Implementation	**Judul Program** Title of Program	**Penyelenggara** Organizer
Anton Herdianto	10 -12 Juli 2023 10 -12 July 2023	Penguatan Pemahaman Gratifikasi Strengthening Understanding of Gratification	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
	29 Maret 2023 29 March 2023	*Credit Skill - End To End Proses* Pembiayaan Credit Skill - End to End Financing Process	LPEI
I Nyoman Gede Suarja	23 Februari 2023 23 February 2023	*Closing Execution Gap With* The 4 *Disciplines of Execution for* BOM LPEI	GML
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
	7 Desember 2023 7 December 2023	BARa *Risk Forum* "Perbankan Indonesia dalam mendukung Indonesia menuju *Low Carbon Economy*"	BARA
	10 Februari 2023 10 February 2023	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Februari Risk Management Certification Refreshment February	Arfaidhams Secret
Raden Gerald Setiawan Grisanto	15 Februari 2023 15 February 2023	Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah *Batch* 1 Concept and Implementation of Sharia Finance Batch 1	Karim
	12 Mei 2023 12 May 2023	*Leading Hybrid Teams with Agile Leadership*	CIAS
	16 -17 Juni 2023 16 -17 June 2023	Komoditas dan Industri Kopi Coffee Commodities and Industry	Indonesia Coffee Academy
Sofyan Irianto N.	17 Februari 2023 17 February 2023	Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah *Batch* 2 Concept and Implementation of Sharia Finance Batch 2	Karim
	9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
	29 Maret 2023 29 March 2023	*Credit Skill - End To End* Proses Pembiayaan Credit Skill - End to End Financing Process	LPEI
	17 April 2023 17 April 2023	*Learning from The Past to Become Robust*	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
	17 Mei 2023 17 May 2023	*Leading Hybrid Teams with Agile Leadership Batch* 2	CIAS
	21 Juni 2023 21 June 2023	ESG – *Risk Management Addressing Key Challenges in Climate Change*	Moodys
	26 Juli 2023 26 July 2023	*Sales Motivation – You Can't Change What You Don't Know*	James Gwee
	11 Desember 2023 11 December 2023	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 & 3 Setara Jenjang 5 - 3 Risk Management Certification Refreshment Level 2 & 3 Equivalent Level 5 - 3	Arfaidhams Secret
Farid Maruf	17 Februari 2023 17 February 2023	Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah *Batch* 2 Concept and Implementation of Sharia Finance Batch 2	Karim
	29 Maret 2023 29 March 2023	*Credit Skill - End To End Proses* Pembiayaan Credit Skill - End to End Financing Process	LPEI
	17 April 2023 17 April 2023	*Learning from The Past to Become Robust*	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
	17 Mei 2023 17 May 2023	*Leading Hybrid Teams with Agile Leadership Batch* 2	CIAS
	21 Juni 2023 21 June 2023	ESG – *Risk Management Addressing Key Challenges in Climate Change*	Moodys
	7 September 2023 7 September 2023	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko - September Risk Management Certification Refreshment September	Arfaidhams Secret

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2023

Komite Jasa Konsultasi melakukan tugas dan tanggung jawabanya sesuai dengan PDE No. 0021/ PDE/09/2023.

Selama tahun 2023 Komite Jasa Konsultasi telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali di mana setiap keputusan rapat dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Jasa Konsultasi yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir.

Risalah Rapat didokumentasikan dan dikelola oleh Sekretaris Komite.

COMMITTEE TASK IMPLEMENTATION REPORT 2023

The Advisory Services Committee performs its duties and responsibilities in accordance with PDE No. 0021/ PDE/09/2023.

During 2023, the Advisory Services Committee held 11 (eleven) meetings where each meeting decision was set out in the Minutes of the Advisory Services Committee Meeting signed by all participants present.

The Minutes of Meeting are documented and managed by the Secretary of the Committee.

Komite Pembiayaan
Financing Committee

PEDOMAN KOMITE

Pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Pembiayaan LPEI periode berjalan berpedoman pada beberapa regulasi yang berlaku, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

A. Komite Pembiayaan Bisnis dan Komite Spesial Aset Management segmen Komersial merujuk pada:

1. Memorandum Prosedur No. MPO.0015/CEO/07/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Perubahan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0029/PDE/12/2020 dan Memorandum Prosedur No. MPO.0009/CEO/04/2021.
2. Memorandum Prosedur No. MPO 0002/CEO/03/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Komite Pembiayaan.
3. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif.
4. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0030/PDE/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Revisi 1.
5. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2.

B. Komite Pembiayaan segmen Penugasan Khusus Ekspor UKM berorientasi ekspor merujuk pada:

1. Keputusan Direktur Eksekutif No. 0089/KDE/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Anggota Komite Pembiayaan Program Penugasan Khusus Ekspor Dalam Rangka Mendukung Sektor UKM Berorientasi Ekspor.
2. MPO 0002/CEO/03/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Komite Pembiayaan.
3. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif.
4. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0030/PDE/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Revisi 1.

COMMITTEE GUIDELINES

Formation and execution of the tasks of the LPEI Financing Committees in the current period are guided by several applicable regulations, as explained below:

A. The Business Financing Committee and the Special Asset Management Committee for the Commercial segment refer to:
1. Memorandum Procedure No. MPO.0015/CEO/07/2021 dated 19 July 2021, regarding the Amendment to Executive Director Regulation No. 0029/PDE/12/2020 and Memorandum Procedure No. MPO.0009/CEO/04/2021.
2. Memorandum Procedure No. MPO 0002/CEO/03/2022 dated 24 March 2022, regarding the Financing Committee.
3. Executive Director Regulation No. 0015/PDE/08/2022 dated 9 August 2022, regarding the Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director.
4. Executive Director Regulation No. 0030/PDE/12/2022 dated 14 December 2022, regarding the Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director, Revision 1.
5. Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated 26 September 2023, regarding the Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director, Edition 1 Revision 2.

B. The Financing Committee for the Special Assignment Export SMEs segment oriented towards exports refers to:
1. Executive Director Decision No. 0089/KDE/10/2021 dated 26 October 2021, regarding the Members of the Financing Committee for Special Assignment Export Programs in Support of the Export-oriented SME Sector.
2. MPO 0002/CEO/03/2022 dated 24 March 2022, regarding the Financing Committee.
3. Executive Director Regulation No. 0015/PDE/08/2022 dated 9 August 2022, regarding the Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director.
4. Executive Director Regulation No. 0030/PDE/12/2022 dated 14 December 2022, regarding the Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director, Revision 1.

5. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2.

C. Komite Pembiayaan segmen *Supply Chain Financing* merujuk pada:
1. Keputusan Direktur Eksekutif No. 0090/KDE/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Anggota Komite Pembiayaan *Supply Chain Financing*.
2. MPO 0002/CEO/03/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Komite Pembiayaan.
3. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif.
4. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0030/PDE/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Revisi 1.
5. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2.

Unit Kerja dalam Pengambilan Keputusan Komite Pembiayaan

Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2, telah menetapkan unit kerja dalam pengambilan keputusan Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Unit Kerja Pengusul/Pengelola, terdiri dari:
   a. Unit Kerja yang memiliki fungsi mengelola Pembiayaan Konvensional Pembiayaan yang dicakup meliputi Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi konvensional.
   b. Unit Kerja yang fungsi mengelola Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Pembiayaan yang dicakup meliputi Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi berdasarkan prinsip syariah.
   c. Unit Kerja yang memiliki fungsi mengelola fasilitas untuk *Bank Line* dan *NBFI Line.*
   d. Unit Kerja yang memiliki fungsi mengelola klaim.
   e. Penyedia Jasa Penanganan Aset Bermasalah (PT IEB Prima Aset/PT IEB PA).

5. Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated 26 September 2023, regarding the Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director, Edition 1 Revision 2.

C. The Financing Committee for the Supply Chain Financing segment refers to:
1. Executive Director Decision No. 0090/KDE/10/2021 dated 26 October 2021, regarding the Members of the Supply Chain Financing Committee.
2. MPO 0002/CEO/03/2022 dated 24 March 2022, regarding the Financing Committee.
3. Executive Director Regulation No. 0015/PDE/08/2022 dated 9 August 2022, regarding the Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director.
4. Executive Director Regulation No. 0030/PDE/12/2022 dated 14 December 2022, regarding the Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director, Revision 1.
5. Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated 26 September 2023, regarding the Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director, Edition 1 Revision 2.

Work Unit in Decision Making of the Financing Committee

Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated 26 September 2023, regarding the Standard Operational Guidelines for Nine Committees under the Executive Director, Edition 1 Revision 2, has stipulated the units involved in the decision-making of the Financing Committee as follows:

1. Proposal/Management Unit, consisting of:
   a. Units responsible for managing Conventional Financing, covering Financing, Guarantees, and Conventional Insurance.
   b. Units responsible for managing Shariah-based Financing, covering Financing, Guarantees, and Insurance based on Shariah principles.
   c. Units responsible for managing facilities for Bank Line and NBFI Line.
   d. Units responsible for managing claims.
   e. Providers of Non-Performing Asset Handling Services (PT. IEB Prima Aset/PT. IEB PA).

2. Unit Kerja yang membidangi fungsi *reviewer* adalah unit yang melakukan fungsi *review*, sekaligus sebagai Sekretaris Komite Pembiayaan.

2. The unit responsible for the Reviewer Function is the unit that performs the Review function, as well as serving as the Secretary of the Financing Committee.

STRUKTUR DAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE

Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Pembiayaan berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 dijelaskan sebagai berikut:

1. Struktur Komite Pembiayaan – Bisnis (KP Bisnis)

Struktur dan Keanggotaan Komite Pembiayaan Bisnis (termasuk Komite Pembiayaan untuk Penugasan Khusus Ekspor segmen UKM berorientasi ekspor dan Komite Pembiayaan segmen *Supply Chain Financing*,

STRUCTURE AND COMPOSITION OF COMMITTEE MEMBERSHIP

The structure and composition of the Financing Committee membership based on Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 are described as follows:

1. Financing Committee Structure - Business (KP Business)

Structure and Membership of the Business Financing Committee (including the Financing Committee for Special Export Assignment for Export-Oriented SMEs segment and the Supply Chain Financing segment)

I. Komite Pembiayaan – Bisnis (KP Bisnis) | Financing Committe Business

Fungsi Bisnis | Business Function	Fungsi Risiko | Risk Function
1. Direktur Pelaksana yang membidangi Pembiayaan. Managing Director in charge of Financing 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis. Managing Director in charge of Business Development 3. Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (khusus untuk proposal Bank Line/NBFI *Line*). Managing Director in charge of Institutional Relations (specifically for Bank Line/NBFI Line proposals) 4. Head of yang membidangi *Guarantee and Insurance* Penjaminan dan Asuransi. Head of Guarantee and Insurance. 5. Head of yang membidangi Regions. Head of Regions. 6. Pemegang Limit Individu – Fungsi Bisnis. Individual Limit Owner - Business Functions	1. Direktur Eksekutif. Executive Director. 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Managing Director in charge of Risk and Credit Management. 3. Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan dan Operasional. Managing Director in charge of Finance and Operations. 4. Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (selain proposal Bank Line/NBFI Line). Managing Director in charge of Institutional Relations (other than Bank Line/NBFI Line proposals). 5. Head of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Head of Risk and Credit Management. 6. Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer I/Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer II. Head of Division in charge of Credit Reviewer I/Head of Division in charge of Credit Reviewer II. 7. Kepala Divisi yang membidangi Reviewer Penjaminan. Head of Division in charge of Guarantee Reviewers. 8. Pemegang Limit Individu – Fungsi Risiko. Individual Limit Owner – Risk Functions

II. Komite Pembiayaan – Bisnis II (Limit > Rp15 Miliar–Limit KP Bisnis I)
Financing Committee - Business II (Limit > Rp15 Billion–Limit KP Bisnis I)

Fungsi Bisnis | Business Function	Fungsi Risiko | Risk Function
1. Direktur Pelaksana yang membidangi Pembiayaan. Managing Director in charge of Financing 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis. Managing Director in charge of Business Development 3. Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (khusus untuk proposal Bank Line/NBFI *Line*). Managing Director in charge of Institutional Relations (specifically for Bank Line/NBFI Line proposals) 4. Head of yang membidangi *Guarantee and Insurance* Penjaminan dan Asuransi. Head of Guarantee and Insurance. 5. Head of yang membidangi Regions. Head of Regions. 6. Pemegang Limit Individu – Fungsi Bisnis. Individual Limit Owner - Business Functions.	1. Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Managing Director in charge of Risk and Credit Management. 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan dan Operasional. Managing Director in charge of Finance and Operations. 3. Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (selain proposal Bank Line/NBFI Line). Managing Director in charge of Institutional Relations (other than Bank Line/NBFI Line proposals). 4. Head of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Head of Risk and Credit Management. 5. Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer I/Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer II. Head of Division in charge of Credit Reviewer I/Head of Division in charge of Credit Reviewer II. 6. Kepala Divisi yang membidangi Reviewer Penjaminan. Head of Division in charge of Guarantee Reviewers. 7. Pemegang Limit Individu – Fungsi Risiko. Individual Limit Owner – Risk Functions

III. Komite Pembiayaan – Bisnis III (Limit ≤ Rp15 Miliar)
Financing Committee - Business III (Limit ≤ Rp15 Billion)

Fungsi Bisnis | Business Function	Fungsi Risiko | Risk Function
1. Kepala Divisi Unit Kerja Pengusul/Kepala Kantor Wilayah Pengusul. Head of Proposing Work Unit Division/Head of Proposing Regional Office. 2. Kepala Divisi Unit Kerja Bisnis Selain Pengusul, atau Kepala Kantor Wilayah selain Pengusul. Head of Business Unit Division other than the Proposer, or Head of Regional Office other than the Proposer. 3. Pemegang Limit Individu - Fungsi Bisnis. Individual Limit Owner - Business Functions	1. Kepala Divisi yang membidangi *Credit Reviewer* I/Kepala Divisi yang membidangi *Credit Reviewer* II. Head of Division in charge of Credit Reviewer I/Head of Division in charge of Credit Reviewer II. 2. Pemegang Limit Individu - Fungsi Risiko. Individual Limit Owner - Business Functions. 3. Kepala Divisi yang membidangi *Reviewer* Penjaminan. Head of Division in charge of Guarantee Reviewers.

2. Struktur Komite Pembiayaan – Special Asset Management (KP SAM)

2. Financing Committee Structure - Special Asset Management (KP SAM)

I. Komite Pembiayaan – SAM I (> Rp500 Miliar)
Financing Committee - SAM I (> Rp500 Billion)

Fungsi Bisnis | Business Function	Fungsi Risiko | Risk Function
1. Direktur Pelaksana yang membidangi Pembiayaan. Managing Director in charge of Financing 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis. Managing Director in charge of Business Development 3. Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (khusus untuk proposal Bank Line/NBFI *Line*). Managing Director in charge of Institutional Relations (specifically for Bank Line/NBFI Line proposals) 4. Head of yang membidangi *Guarantee and Insurance* Penjaminan dan Asuransi. Head of Guarantee and Insurance. 5. Head of yang membidangi Regions. Head of Regions.	1. Direktur Eksekutif. Executive Director. 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Managing Director in charge of Risk and Credit Management. 3. Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan dan Operasional. Managing Director in charge of Finance and Operations. 4. Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (selain proposal Bank Line/NBFI Line). Managing Director in charge of Institutional Relations (other than Bank Line/NBFI Line proposals). 5. Head of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Head of Risk and Credit Management. 6. Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer I/Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer II. Head of Division in charge of Credit Reviewer I/Head of Division in charge of Credit Reviewer II. 7. Kepala Divisi yang membidangi Reviewer Penjaminan. Head of Division in charge of Guarantee Reviewers. 8. Pemegang Limit Individu – Fungsi Risiko. Individual Limit Owner – Risk Functions

II. Komite Pembiayaan – SAM II (Limit > Rp15 Miliar–Limit KP SAM I)
Financing Committee - SAM II (Limit > Rp15 Billion-Limit KP SAM I)

Fungsi Bisnis | Business Function	Fungsi Risiko | Risk Function
1. Direktur Pelaksana yang membidangi Pembiayaan. Managing Director in charge of Financing 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis. Managing Director in charge of Business Development 3. Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (khusus untuk proposal Bank Line/NBFI *Line*). Managing Director in charge of Institutional Relations (specifically for Bank Line/NBFI Line proposals) 4. Head of yang membidangi *Guarantee and Insurance* Penjaminan dan Asuransi. Head of Guarantee and Insurance. 5. Head of yang membidangi Regions. Head of Regions. 6. Pemegang Limit Individu – Fungsi Bisnis. Individual Limit Owner - Business Functions.	1. Direktur Pelaksana/Head of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Managing Director/Head of Risk and Credit Management. 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan dan Operasional. Managing Director in charge of Finance and Operations. 3. Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (selain proposal Bank Line/NBFI Line). Managing Director in charge of Institutional Relations (other than Bank Line/NBFI Line proposals). 4. Head of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit. Head of Risk and Credit Management. 5. Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer I/Kepala Divisi yang membidangi Credit Reviewer II. Head of Division in charge of Credit Reviewer I/Head of Division in charge of Credit Reviewer II. 6. Kepala Divisi yang membidangi Reviewer Penjaminan. Head of Division in charge of Guarantee Reviewers. 7. Pemegang Limit Individu – Fungsi Risiko. Individual Limit Owner – Risk Functions

TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengambilan keputusan atas proposal:
   a. Pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan tresuri serta *Non Bank Financial Institution line, Bank Line, Treasury Line* dan Penugasan Khusus termasuk di dalamnya penetapan *account strategy* dan/atau mengubah struktur fasilitas;
   b. Upaya penyelamatan dan/atau penyelesaian aset bermasalah pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan tresuri serta *Non Bank Financial Institution line, Bank Line, Treasury Line* dan Penugasan Khusus;
   c. Pembiayaan nasabah *performing financing* yang mengalami kesulitan pembayaran kewajiban;
   d. Pengurangan dan/atau penghapusan tunggakan bunga/imbal hasil pembiayaan, denda/*ta'widh*, dan/atau biaya lain dalam penyelamatan/penyelesaian pembiayaan bermasalah;
   e. Permohonan penghentian perhitungan bunga/imbal hasil pembiayaan, denda/*ta'widh*, dan/atau biaya lain dalam penyelesaian Pembiayaan Bermasalah; dan/atau
   f. Pembayaran klaim.
2. Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva produktif (kolektabilitas), dalam hal penetapan dilakukan secara manual.
3. Melakukan pengambilan keputusan atas imbalan Pembiayaan terkait Fasilitas Penugasan Khusus apabila tidak ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
4. Menentukan Global Account Manager (GAM), dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. bagi Nasabah yang memperoleh beberapa jenis fasilitas dari beberapa unit kerja, maka GAM adalah pada Unit Kerja yang mengelola Pembiayaan.
   b. bagi Nasabah yang memperoleh fasilitas konvensional dan syariah, maka GAM adalah unit kerja yang mengelola fasilitas terbesar.
   c. penetapan *account strategy* termasuk limit *group exposure* diusulkan oleh GAM dan mendapat persetujuan dari KP - Bisnis I.
   d. dalam hal terdapat anggota Nasabah grup mengajukan fasilitas baru/tambahan, maka pemutusan Pembiayaan dilakukan jika tidak mendapat konfirmasi negatif dari GAM.

DUTIES AND AUTHORITIES

The duties and authorities of the Financing Committee are as follows:

1. Making decisions on proposals related to:
   a. Financing, guarantees, insurance, treasury, as well as Non-Bank Financial Institution lines, Bank Lines, Treasury Lines, and Special Assignments including the determination of account strategy and/or changing the facility structure;
   b. Efforts to rescue and/or to settle non-performing assets of financing, guarantees, insurance, treasury, as well as Non-Bank Financial Institution lines, Bank Lines, Treasury Lines, and Special Assignments;
   c. Performing financing for performing financing customers experiencing difficulty in meeting obligations;
   d. Reduction and/or elimination of arrears of interest/profit-sharing of financing, fines/ta'widh, and/or other costs in rescuing/resolving troubled financing;
   e. Requests for the cessation of interest/profit-sharing calculations of financing, fines/ta'widh, and/or other costs in settling Troubled Financing; and/or
   f. Payment of claims.
2. Making decisions on the determination of the level of quality of productive assets (collectability), in case the determination is done manually.
3. Making decisions on the remuneration of Financing related to Special Assignment Facilities if not determined through a Ministerial Decision.
4. Determining the Global Account Manager (GAM), with the following provisions:
   a. for Customers who obtain several types of facilities from several work units, then the GAM is in the Financing Management Unit.
   b. for Customers who obtain conventional and sharia facilities, then the GAM is the work unit that manages the largest facility.
   c. determination of account strategy including group exposure limits proposed by GAM and approved by the Business Committee I.
   d. in case there are member Customers in the group applying for new/additional facilities, then the termination of Financing is carried out if it does not receive a negative confirmation from GAM.

e. dalam hal salah satu Nasabah dalam 1 (satu) Kelompok (group) termasuk dalam kelolaan PT IEB PA maka GAM adalah pada PT IEB PA.

5. Melakukan pengambilan keputusan atas pembebanan biaya-biaya (dana talangan/ tagihan lain-lain) yang tidak dapat dipenuhi Nasabah pada waktunya, seperti biaya penutupan asuransi barang agunan, biaya Notaris/PPAT dan/ atau Konsultan Hukum, biaya penilaian agunan, dan biaya-biaya terkait lainnya; yang akan dibebankan pada rekening pinjaman Nasabah (dalam rangka pengamanan LPEI).
6. Biaya-biaya tersebut dapat dibebankan sepihak oleh LPEI pada pos biaya dan ongkos dan selanjutnya Unit Kerja Pengusul/Pengelola dimaksud harus melakukan penagihan dan penyelesaian kewajiban tersebut kepada Nasabah.
7. Penetapan penggunaan KAP, KJPP, Notaris/PPAT, konsultan hukum, konsultan manajemen, balai lelang apabila diperlukan.

RAPAT KOMITE

Kebijakan Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Komite Pembiayaan menyelenggarakan rapat secara atau apabila dipandang perlu. Tata cara pelaksanaan rapat Komite Pembiayaan dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

A. Tata Kerja Pengambilan Keputusan Komite Pembiayaan Bisnis dan Komite Special Aset Management segmen Komersial:

1. Pengambilan keputusan Komite Pembiayaan dilakukan melalui rapat tatap muka, baik secara langsung maupun melalui *teleconference* atau *video conference*. Keputusan (disposisi dan tanda tangan) dapat diberikan secara langsung melalui dokumen *hardcopy*; *electronic signature*; dan/atau melalui persetujuan *by system*.
2. Ketentuan Pengambilan Keputusan oleh Komite Pembiayaan Bisnis:
   a. Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
      - 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Bisnis, dan
      - 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko, di mana salah satu anggotanya merupakan Direktur Pelaksana.

e. in case one of the Customers in 1 (one) Group is under the management of PT IEB PA then GAM is at PT IEB PA.

5. Making decisions on charging costs (advance funds/other bills) that Customers cannot meet on time, such as collateral insurance closure costs, Notary/PPAT and/or Legal Consultant fees, collateral assessment fees, and other related costs; which will be charged to the Customer's loan account (for LPEI security).
6. These costs can be unilaterally charged by LPEI to the cost and expense account and then the relevant Proposal/Management Work Unit must carry out the collection and settlement of those obligations from the Customer.
7. Determining the use of KAP, KJPP, Notary/PPAT, legal consultants, management consultants, auction houses when necessary.

COMMITTEE MEETING

Policy on Decision Making in Meetings

The Financing Committee organizes meetings as deemed necessary. The procedures for conducting Financing Committee meetings for decision-making purposes are as follows:

A. Procedures for Decision Making by the Business Financing Committee and the Special Asset Management Committee for the Commercial Segment:

1. Decision-making by the Financing Committee is conducted through face-to-face meetings, either in person or via teleconference or video conference. Decisions (dispositions and signatures) can be provided directly through hardcopy documents, electronic signatures, and/or approval by the system.
2. The provision for Decision-Making by the Business Financing Committee are as follow:
   a. Decision-making is considered quorate if attended by at least:
      - 2 (two) members representing the Business Function, and
      - 2 (two) members representing the Risk Function, where one of them is the Executive Director.

b. Kepala Divisi yang membidangi Analisis Risiko Pembiayaan yang melakukan *review* atas (calon) Nasabah yang diajukan tidak menjadi anggota Komite Pembiayaan.
c. Dalam hal pengambilan keputusan untuk:
   - Nasabah baru dan/atau tambahan fasilitas dengan plafon group (*one obligor*) ekuivalen >Rp1 triliun dan plafon individu ekuivalen >Rp500 miliar, tidak termasuk limit Bank Line dan/atau NBFI Line;
   - Penetapan grup limit.
   - Nasabah pembiayaan dengan skema *clean* basis atau *negative pledge*;
   - Nasabah Program Bisnis;
   - Terdapat deviasi dari ketentuan *Portfolio Guidelines*;
   - Pemutusan Bank Line dengan kondisi *high risk country*; dan/atau
   - Terdapat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Standar Pedoman yang berlaku.

   Maka diajukan kepada Komite Pembiayaan Bisnis I.
d. Pengambilan keputusan oleh Komite Special Asset Management untuk menyetujui atau menolak proposal Pembiayaan didasarkan atas persetujuan seluruh anggota komite yang hadir (kuorum).

3. Ketentuan Pengambilan Keputusan oleh Komite Pembiayaan – Special Asset Management (SAM):
   a. Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
      - 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Bisnis, dan
      - 3 (tiga) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko, di mana salah satu anggotanya merupakan Direktur Pelaksana/Senior Executive Vice President (Head of).
   b. Pejabat Direktur Pelaksana dari Unit Kerja Pengusul/Pengelola yang terlibat dalam pemberian awal dan/atau tambahan fasilitas tidak menjadi anggota pada saat pengambilan keputusan KP-SAM.
   c. Kepala Divisi yang membidangi Analisis Risiko Pembiayaan yang melakukan *review* atas (calon) Nasabah yang diajukan tidak menjadi anggota Komite Special Asset Management.

b. The Heads of Division in charge of Financing Risk Analysis reviewing proposed (prospective) Customers is not a member of the Financing Committee.
c. In the event of decision-making for:
   - New Customers and/or additional facilities with group ceiling (one obligor) equivalent to > Rp1 trillion and individual limits equivalent to > Rp500 billion, excluding Bank Line and/or NBFI Line limits;
   - Determine the group's limits.
   - Financing Customers with clean basis or negative pledge schemes;
   - Business Program Customers;
   - Deviations from Portfolio Guidelines provisions;
   - Termination of Bank Line under high-risk country conditions; and/or
   - Other provisions as stipulated in the applicable Guidelines Standards.

   Then it is to be submitted to Business Financing Committee I.
d. Decision-making by the Special Asset Management Committee to approve or reject Financing proposals is based on the approval of all attending committee members (quorum).

3. The Provisions for Decision-Making by the Financing Committee – Special Asset Management (SAM) are as follow:
   a. Decision-making is considered quorate if attended by at least:
      - 2 (two) members representing the Business Function, and
      - 3 (three) members representing the Risk Function, where one of them is the Executive Director/Senior Executive Vice President (Head of).
   b. The Executive Director from the Proposing Work Units/Management involved in initial and/or additional facility provision do not become members during decision-making by the SAM-FC.
   c. Heads of Division in charge of Financing Risk Analysis reviewing the proposal from (prospective) Customers is not a member of the Special Asset Management Committee.

d. Dalam hal pengambilan keputusan untuk, antara lain:
   - Nasabah penyelamatan/penyelesaian aset bermasalah dengan plafon group (*one obligor*) ekuivalen >Rp500 miliar, tidak termasuk limit Bank Line dan/atau NBFI Line;
   - Nasabah dengan skema *clean* basis atau *negative pledge*;
   - Nasabah dengan skema Agunan Yang Diambil Alih (AYDA); dan/atau
   - Terdapat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Standar Pedoman yang berlaku.

   maka diajukan kepada Komite Pembiayaan SAM I.
4. Masing-masing anggota Komite Pembiayaan saling independen dan mempunyai kewenangan yang sama dalam memutus atau menolak suatu proposal Pembiayaan.
5. Pemutusan pembiayaan mengacu pada prinsip *one obligor*.
6. Dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan sumber pendanaan dan suku bunga/imbal hasil (*pricing*), harus merujuk pada keputusan Assets and Liabilities Management Committee (ALMA).
7. Setiap pemutusan Pembiayaan yang dilakukan oleh Komite Pembiayaan dituangkan dalam Memorandum Keputusan Pembiayaan (MKP).
8. Putusan Pembiayaan dituangkan secara tertulis, tegas, dan jelas dalam MKP yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
   - Waktu dan tempat pelaksanaan rapat;
   - Keputusan rapat, yang meliputi namun tidak terbatas pada: data informasi Nasabah, total eksposur, rekapitulasi jaminan, rekomendasi struktur pembiayaan yang diberikan, dan sebagainya.
9. Penandatanganan MKP dilakukan oleh seluruh anggota Komite Pembiayaan yang hadir (kuorum).
10. Dalam hal terdapat penolakan suatu permohonan Pembiayaan, maka penolakan tersebut diberitahukan kepada (calon) Nasabah oleh Unit Kerja Pengusul/Pengelola dan harus dilaporkan kepada pejabat pemegang kewenangan memutus di Unit Kerja Pengusul/Pengelola serta didokumentasikan secara tertib.

d. In the case of decision-making for, among others:
   - Customer rescue/settlement of nonperforming assets with a group ceiling (one obligor) equivalent to >Rp500 billion, excluding Bank Line and/or NBFI Line limits;
   - Customers with a clean basis or negative pledge scheme;
   - Customers with the Expropriated Collateral (AYDA) scheme; and/or
   - There are provisions as stipulated in the applicable Guideline Standards.

   Then it is to be submitted to Special Asset Management Committee I.
4. Each Financing Committee member is independent and has equal authority to decide or reject a Financing proposal.
5. Termination of financing follows the one obligor principle.
6. In decision-making regarding funding sources and interest rates/profit-sharing (pricing), it must refer to the decisions of the Assets and Liabilities Management Committee (ALMA).
7. Each Financing Termination decision made by the Financing Committee is documented in a Financing Decision Memorandum (MKP).
8. Financing decisions are documented in writing, clearly, and explicitly in the MKP, which must include at least:
   - Time and place of the meeting;
   - Meeting decisions, including but not limited to: Customer information data, total exposure, collateral recapitulation, recommended financing structure provided, and so on.
9. The MKP is signed by all attending Financing Committee members (quorum).
10. In case of rejection of a Financing request, the rejection is notified to the Customer by the Proposal/Management Work Unit and must be reported to the authorizing officer in the Proposal/Management Work Unit and documented systematically.

11. Pada dasarnya, keputusan penolakan yang diambil oleh Komite yang telah dituangkan dalam Memorandum Keputusan Pembiayaan tidak wajib diinformasikan secara tertulis kepada pemohon dan tidak dapat dilakukan banding. Namun demikian, apabila terdapat data atau informasi baru yang positif, maka dimungkinkan untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap keputusan terdahulu dengan mengikuti tahapan proses pemutusan Pembiayaan.
12. Unit Kerja yang membidangi Manajemen Risiko menyusun rekapitulasi pelaksanaan Komite Pembiayaan/Komite Special Asset Management kepada Dewan Direktur secara bulanan bersama dalam Laporan Bulanan Manajemen Risiko.

11. Basically, rejection decisions made by the Committee documented in the Financing Decision Memorandum are not required to be informed in writing to the applicant and cannot be appealed. However, if there is new positive data or information, a review of previous decisions may be possible following the Financing termination process.
12. The Risk Management Work Unit compiles a recapitulation of Financing Committee/Special Asset Management Committee implementation to the Board of Directors on a monthly basis together with the Risk Management Monthly Report.

B. Tata Kerja Pengambilan Keputusan Komite Pembiayaan Segmen Penugasan Khusus Ekspor sektor UKM berorientasi ekspor:
Sesuai dengan tata kerja pengambilan keputusan komite Pembiayaan (poin A).

B. Procedures for Decision Making by the Financing Committee for the Special Export Assignment Segment for Export-oriented SMEs:
In accordance with the procedures for Financing Committee decision-making (point A).

C. Tata Kerja Pengambilan Keputusan Komite Pembiayaan Segmen *Supply Chain Financing*:

Sesuai dengan tata kerja pengambilan keputusan komite Pembiayaan (poin A).

C. Procedures for Decision Making by the Financing Committee for the Supply Chain Financing Segment:
In accordance with the procedures for Financing Committee decision-making (point A).

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN

Selama tahun 2023 Komite Pembiayaan telah mengadakan beberapa rapat sebagai berikut:

Frekuensi Rapat Komite Pembiayaan Segmen UKM

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE RATE

Throughout 2023, the Financing Committee held several meetings as follows:

Frequency of SME Segment Financing Committee Meetings

Deskripsi Description	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency
Komite Pembiayaan Financing Committee	90
Komite Special Asset Management Special Asset Management Committee	151
Komite PKE UKM PKE SME Committee	54
Komite Supply Chain Financing Supply Chain Financing Committee	12
Total	**275**

Frekuensi Rapat Komite Pembiayaan Non-UKM

Non-SME Financing Committee Meeting Frequency

Deskripsi Description	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency
Pembiayaan Segmen Korporasi Corporate Segment Financing	110
Special Asset Management Korporasi Special Corporate Asset Management	76
Bank Line Counterparty (Credit Line) Bank Line Counterparty (Credit Line)	62
Non Bank Financial Institutions Counterparty (Global Line Asuransi)	23
Penjaminan Guarantee	9
Asuransi Insurance	4
Penugasan Khusus Ekspor (NIA) Special Export Assignment (NIA)	4
Total	**288**

Seluruh rapat tersebut dilaksanakan dengan tingkat kehadiran anggota memenuhi ketentuan kuorum rapat, dengan uraian sebagai berikut:

The entire meeting was conducted with the attendance of members meeting the quorum requirements, with the following details:

Komite Pembiayaan Segmen UKM

SME Segment Financing Committee

Peserta Rapat Meeting Participants	**Posisi di Komite** Position on the Committee	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency	**Jumlah Kehadiran** Jumlah Kehadiran	**Persentase Kehadiran** Persentase Kehadiran
Direktur Eksekutif Executive Director	Fungsi Risiko Risk Function	21	21	100%
Direktur Pelaksana yang membidangi Pembiayaan (DPN) Managing Director of Financing (DPN)	Fungsi Bisnis Business Function	186	186	100%
Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis (DPB) Managing Director of Business Development (DPB)	Fungsi Bisnis Business Function	161	161	100%
Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan dan Operasional (DFO) Managing Director of Finance and Operations (DFO)	Fungsi Bisnis Business Function	169	169	100%
Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit (DMR) Managing Director of Risk and Credit Management (DMR)	Fungsi Risiko Risk Function	0	0	100%
Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) Managing Director of Institutional Relations (DHK)	Fungsi Risiko Risk Function	104	104	100%
Head of yang membidangi *Guarantee & Insurance* Head of in charge of Guarantee & Insurance	Fungsi Bisnis Business Function	21	21	100%
Head of yang membidangi *Regions* Head of in charge of Regions	Fungsi Bisnis Business Function	80	80	100%
Head of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit Head of Credit and Risk Management	Fungsi Risiko Risk Function	204	204	100%
Kepala Divisi Credit Reviewer I Head of Credit Reviewer I Division	Fungsi Risiko Risk Function	20	20	100%
Kepala Divisi Credit Reviewer II Head of Credit Reviewer II Division	Fungsi Risiko Risk Function	34	34	100%
Kepala Divisi Penjaminan Head of Guarantee Division	Fungsi Bisnis Business Function	1	1	100%

Peserta Rapat Meeting Participants	**Posisi di Komite** Position on the Committee	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency	**Jumlah Kehadiran** Jumlah Kehadiran	**Persentase Kehadiran** Persentase Kehadiran
Kepala Kanwil 1 - Bambang Sadnur Head of Regional Office 1 - Bambang Sadnur	Fungsi Bisnis Business Function	22	22	100%
Kepala Kanwil 2 - Ninik Martini Head of Regional Office 2 - Ninik Martini	Fungsi Bisnis Business Function	32	32	100%
Kepala Kanwil 3 - Koerniawa Prijambodo Head of Regional Office 3 - Koerniawa Prijambodo	Fungsi Bisnis Business Function	15	15	100%
Kepala Kanwil 3 - Ahmad Bambang Bintoro Head of Regional Office 3 - Ahmad Bambang Bintoro	Fungsi Bisnis Business Function	28	28	100%
Pemegang Limit Individu - Pandu Wiguno Individual Limit Holder - Pandu Wiguno	Fungsi Bisnis Business Function	66	66	100%
Pemegang Limit Individu - Salem Assegaf Individual Limit Holder - Salem Assegaf	Fungsi Risiko Risk Function	51	51	100%
Pemegang Limit Individu - Roza Rita Retta Hutabarat Individual Limit Holder - Roza Rita Retta Hutabarat	Fungsi Risiko Risk Function	25	25	100%

Komite Pembiayaan Non-UKM

Non-SME Financing Committee

Peserta Rapat Meeting Participants	**Posisi di Komite** Position on the Committee	**Frekuensi Rapat** Meeting Frequency	**Jumlah Kehadiran** Jumlah Kehadiran	**Persentase Kehadiran** Persentase Kehadiran
Direktur Eksekutif Executive Director	Fungsi Risiko Risk Function	96	96	100%
Direktur Pelaksana yang membidangi Pembiayaan (DPN) Managing Director of Financing (DPN)	Fungsi Bisnis Business Function	212	212	100%
Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis (DPB) Managing Director of Business Development (DPB)	Fungsi Bisnis Business Function	176	176	100%
Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan dan Operasional (DFO) Managing Director of Finance and Operations (DFO)	Fungsi Bisnis Business Function	176	176	100%
Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit (DMR) Managing Director of Credit and Risk Management (DMR)	Fungsi Risiko Business Function	-	-	-
Direktur Pelaksana yang membidangi Hubungan Kelembagaan (DHK) Managing Director of Institutional Relations (DHK)	Fungsi Risiko Risk Function	111	111	100%
Head of yang membidangi *Guarantee & Insurance* Head of in charge of Guarantee & Insurance	Fungsi Bisnis Business Function	11	11	100%
Head of yang membidangi *Regions* Head of in charge of Regions	Fungsi Bisnis Business Function	41	41	100%
Head of yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit Head of Credit and Risk Management	Fungsi Risiko Risk Function	239	239	100%
Kepala Divisi Analisa Risiko Kredit I Head of Credit Risk Analysis I Division	Fungsi Risiko Risk Function	19	19	100%
Kepala Divisi Analisa Risiko Kredit II Head of Credit Risk Analysis II Division	Fungsi Risiko Risk Function	8	8	100%
Kepala Divisi Financial Institutions & Treasury Head of Financial Institutions & Treasury Division	Fungsi Bisnis	16	16	100%
Pemegang Limit Individu Pandu Wiguno Individual Limit Holder Pandu Wiguno	Fungsi Risiko Risk Function	12	12	100%
Pemegang Limit Individu Rossa Individual Limit Holder Rossa	Fungsi Risiko Risk Function	1	1	100%
Kepala Kakanwil Bambang Head of Regional Office Bambang	Fungsi Bisnis Business Function	2	2	100%
Kepala Kakanwil Ahmad Bambang Bintoro Head of Regional Office Ahmad Bambang Bintoro	Fungsi Bisnis Business Function	1	1	100%

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2023

Pada tahun 2023, anggota Komite Pembiayaan tidak mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2023

Di tahun 2023, Komite Pembiayaan telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang diemban. Komite Pembiayaan juga telah menyampaikan rekomendasi terkait pembiayaan di LPEI yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan yang diperlukan.

Competency Development Program in 2023

In 2023, members of the Financing Committee did not participate in training and competency development activities.

IMPLEMENTATION OF COMMITTEE DUTIES IN 2023

In 2023, the Financing Committee has carried out its duties in accordance with the responsibilities and functions entrusted to it. The Financing Committee has also provided recommendations regarding financing at Indonesia Eximbank that can be used as a basis for decision-making and the formulation of necessary policies.

Komite Sumber Daya Manusia
Human Resources Committee

PEDOMAN KOMITE

Komite Sumber Daya Manusia, yang semula bernama Komite Personalia, dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0008/PDE/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Komite Personalia. Komite ini dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam merumuskan kebijakan dan penyempurnaan terkait pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta strategi penerapan kebijakan SDM sesuai dengan sasaran dan strategi LPEI.

Pelaksanaan tugas Komite Sumber Daya Manusia periode berjalan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2.

COMMITTEE GUIDELINES

The Human Resources Committee, formerly known as the Personnel Committee, was established based on Executive Director Regulation No. 0008/PDE/02/2018 dated 7 February 2018, regarding the Personnel Committee. This committee was formed to provide recommendations to the Executive Director in formulating policies and improvements related to the development and management of human resources (HR) as well as the implementation strategy of HR policies in line with the objectives and strategies of Indonesia Eximbank.

The implementation of the Human Resources Committee's tasks during the current period was carried out based on Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 dated 26 September 2023, regarding the Operational Guidelines Standard Nine Committees under the Executive Director Edition 1 Revision 2.

STRUKTUR DAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE

Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 adalah sebagai berikut:

COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE AND COMPOSITION

The structure and membership composition of the Human Resources Committee based on Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 are as follows:

Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Direktur Eksekutif Executive Director
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Head of yang membidangi Sumber Daya Manusia Head of Human Resources
Sekretaris Komite (Non Anggota) Committee Secretary (non-member)	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia yang membidangi Rekrutmen dan Pengembangan Organisasi Head of Human Resources Division in charge of Recruitment and Organization Development
Anggota Tetap Permanent Member	Seluruh Direktur Pelaksana All Managing Directors
Narasumber Source	Head of yang terkait dengan materi pembahasan Head of related to the subject matter
***Alternate* Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia** **Alternate Membership of Human Resources Committee**	
Ketua merangkap Anggota Tetap Chairman concurrently Permanent Member	Sesuai PMK No. 208/PMK.06/2021 – Pasal 11 In accordance with PMK No. 208/PMK.06/2021 - Article 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap Vice Chairman concurrently Permanent Member	Kepala Divisi di bawah naungan Head of yang membidangi Sumber Daya Manusia Head of Division in charge of Human Resources
Sekretaris Komite (non anggota) Committee Secretary (non-member)	Kepala Divisi di bawah naungan Head of yang membidangi Sumber Daya Manusia Head of Division in charge of Human Resources

TUGAS DAN WEWENANG

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk membantu Direktur Eksekutif dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia meliputi:

1. Penetapan strategi untuk mempertahankan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
2. Menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan Sumber Daya Manusia dan memantau serta melaporkan pelaksanaan atas program-program terkait Sumber Daya Manusia yang dijalankan;
3. Memastikan kebijakan Sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan memperhatikan antara lain:
   a. kondisi keuangan dan anggaran sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang berlaku;
   b. kewajaran dengan *peers group*;
   c. sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga.
4. Menentukan pengembangan nilai-nilai Lembaga (*corporate values*) sebagai pedoman dalam membentuk budaya Lembaga (*corporate culture*) untuk mencapai visi dan misi LPEI.

RAPAT KOMITE

Kebijakan Rapat dan Pengambilan Keputusan

Komite Sumber Daya Manusia menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 tahun atau setiap saat apabila dipandang perlu.

Tata cara pelaksanaan rapat Komite Sumber Daya Manusia dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
2. Rapat tatap muka dapat dilakukan secara fisik atau melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
3. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum anggota tetap yang terdiri dari:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua; dan
   c. lebih dari 50 (lima puluh) persen Anggota tetap.

DUTIES AND AUTHORITIES

The Human Resources Committee is formed to assist the Executive Director in managing Human Resources, including:

1. Establishing strategies to maintain and develop high-quality Human Resources.
2. Implementing matters related to Human Resources policies and monitoring and reporting on the implementation of Human Resources-related programs.
3. Ensuring that Human Resources policies are implemented, taking into account:
   a. Financial conditions and budgets as regulated in applicable provisions.
   b. Comparability with peer groups.
   c. Long-term objectives and strategies of the institution.
4. Determining the development of institutional values (corporate values) as guidelines in shaping the institution's culture (corporate culture) to achieve the vision and mission of Indonesia Eximbank.

COMMITTEE MEETING

Meeting and Decision-Making Policies

The Human Resources Committee holds regular meetings at least 3 (three) times a year or whenever deemed necessary.

The procedures for conducting Human Resources Committee meetings for decision-making are as follows:

1. Committee decisions can be made through face-to-face or online meetings.
2. Face-to-face meetings can be conducted physically or through teleconferencing, video conferencing, or other electronic media that allow all meeting participants to see and hear each other directly and participate in the meeting.
3. Meeting decisions must be made based on consensus.
4. The quorum requirement for decision-making by the Committee is the attendance of a minimum of permanent members, consisting of:
   a. Chairman;
   b. Vice Chairman; and
   c. more than 50 (fifty) percent of permanent members.

5. Seluruh keputusan Komite ditatausahakan dalam bentuk Risalah Rapat secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

5. Meeting decisions must be made based on consensus.

FREKUENSI RAPAT, TINGKAT KEHADIRAN, DAN AGENDA RAPAT

Selama tahun 2023 Komite Sumber Daya Manusia telah mengadakan beberapa rapat sebagai berikut:

MEETING FREQUENCY, ATTENDANCE LEVEL, AND MEETING AGENDA

Throughout the year 2023, the Human Resources Committee held several meetings as follows:

No.	Tanggal Rapat Date	Agenda	Kuorum Quorum
1.	6 Juni 2023 6 June 2023	Persetujuan Prinsip Insentif Kinerja Pegawai Approval in Principle of Employee Performance Incentives	1 Ketua, 4 Anggota dan 4 Head Of 1 Chairman, 4 Members and 4 Heads Of
2.	5 September 2023 5 September 2023	Persetujuan Prinsip Insentif Khusus Pegawai Approval of Employee Special Incentive Principles	1 Ketua, 4 Anggota dan 5 Head Of 1 Chairman, 4 Members and 5 Heads Of
3.	31 Desember 2023 31 December 2023	1. Pembahasan Struktur Organisasi 2. Kelompok Jabatan 3. *Deployment Plan* Pegawai Struktural 4. Hybrid Working Arrangement 1. Discussion of Organizational Structure 2. Position Group 3. Deployment Plan for Structural Employees 4. Hybrid Working Arrangement	1 Ketua, 4 Anggota dan 5 Head Of 1 Chairman, 4 Members and 5 Head Of

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2023

Pada tahun 2023, anggota Komite Sumber Daya Manusia telah mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2023

In 2023, members of the Human Resources Committee have participated in training and competency development activities.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2023

Di tahun 2023, Komite Sumber Daya Manusia telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang diemban. Komite Pembiayaan juga telah menyampaikan rekomendasi terkait sumber daya manusia di LPEI yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan yang diperlukan.

IMPLEMENTATION OF COMMITTEE DUTIES IN 2023

In 2023, the Human Resources Committee carried out its duties in accordance with the responsibilities and functions entrusted to it. The Committee has also provided recommendations regarding human resources at Indonesia Eximbank that can be used as a basis for decision-making and the formulation of necessary policies.

Sekretaris Dewan Direktur
Secretary of the Board of Directors

Sekretaris Dewan Direktur memiliki peran dalam mendukung efisiensi pelaksanaan tugas Dewan Direktur. Tugas tersebut mencakup penyusunan dan penetapan kebijakan, serta pengawasan terhadap pengelolaan Lembaga oleh Direktur Eksekutif dan jajarannya.

The Secretary of the Board of Directors plays a role in supporting the efficiency of the Board of Directors' implementation of duties. These tasks include formulating and determining policies, as well as overseeing the management of the institution by the Executive Director and their subordinates.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN DIREKTUR

PROFILE OF THE SECRETARY OF THE BOARD OF DIRECTORS

T. Dyza R. A. Rochadi
Sekretaris Dewan Direktur
Secretary to the Board of Directors

Usia Age
50 tahun | years old

Warga Negara Citizenship
Indonesia

Domisili Domicile
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis
Peraturan Dewan Direktur No. 007/PDD/12/2020 | Board of Director Decree No. 007/PDD/12/2020

Rangkap Jabatan Concurrent Position
Kepala Divisi Communication and Stakeholders Engagement LPEI
Head of the Communication and Stakeholders Engagement Division of Indonsia Eximbank

Riwayat Pendidikan Educational Background
- Magister Keuangan dan Perbankan, Universitas Indonesia, Jakarta – Indonesia (1999)
- Sarjana Manajemen Keuangan, Universitas Trisakti, Jakarta – Indonesia (1995)
- Master of Finance and Banking, University of Indonesia, Jakarta - Indonesia (1999)
- Bachelor of Financial Management, Trisakti University, Jakarta - Indonesia (1995)

Riwayat Karier Career Background

Karier di LPEI:
- Corporate Secretary & Stakeholder Engagement Division Head (Feb 2024 - sekarang)
- Kepala Divisi Sekretariat Lembaga (Jan 2022 - Jan 2024)
- Kepala Divisi Office of the Board (Juli 2020 – Des 2021)
- Kepala Divisi Trade Finance (April 2019 – Juni 2020)
- Kepala Divisi Executive Office (Januari 2018 – April 2019)
- Kepala Divisi Internasional (Agustus 2014 – Januari 2018)
- Pj. Kepala Divisi Manajemen Risiko & Perencanaan Strategis (Agustus 2013 – Juli 2014)
- Kepala Departemen MSDM (Januari 2011 - Juli 2013)
- Kepala Departemen SDM (September 2009 – Desember 2011)

Karier di PT Bank Ekspor Indonesia (Persero):
- Sr. Manager SDM dan Umum (September 2006 - Agustus 2009)
- Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan (November 2003 – September 2006)
- RM Koresponden Bank – International (Juni 2000 – November 2003)
- RM Koresponden Bank (September 1999 – Juni 2000)

Karier di PT Bank Nusa International:
- Unit Head of Business Development Unit (April 1999 – Agustus 1999)
- Dept. Head Overseas Correspondent Banking (Januari 1999 - April 1999)
- RM of Overseas Correspondent Banking Dept (Mei 1998 - Januari 1999)
- Unit Head of International Banking Unit (Desember 1997 – Mei 1998)
- Asst. Manager of International Banking Unit (September 1996 - Desember 1997)
- Chief Assistant of Overseas Correspondent Banking & Trade Finance Unit (September 1995 - September 1996)

Carrier at Indonesia Eximbank:
- Corporate Secretary & Stakeholder Engagement Division Head (Feb 2024 - present)
- Head of Corporate Secretary Division (Jan 2022 - Jan 2024)
- Head of Office of the Board Division (July 2020 - Dec 2021)
- Head of Trade Finance Division (April 2019 - June 2020)
- Head of Executive Office Division (January 2018 - April 2019)
- Head of International Division (August 2014 - January 2018)
- Acting. Head of Risk Management & Strategic Planning Division (August 2013 - July 2014)
- Head of Human Resources Department (January 2011 - July 2013)
- Head of HR Department (September 2009 - December 2011)

Carrier at PT Bank Ekspor Indonesia (Persero):
- Sr. Manager HR and General (September 2006 - August 2009)
- Head of Corporate Secretary Department (November 2003 - September 2006)
- RM Correspondent Bank - International (June 2000 - November 2003)
- RM Correspondent Bank (September 1999 - June 2000)

Carrier at PT Bank Nusa International:
- Unit Head of Business Development Unit (April 1999 – August 1999)
- Dept. Head Overseas Correspondent Banking (January 1999 - April 1999)
- RM of Overseas Correspondent Banking Dept (May 1998 - January 1999)
- Unit Head of International Banking Unit (December 1997 – May 1998)
- Asst. Manager of International Banking Unit (September 1996 - December 1997)
- Chief Assistant of Overseas Correspondent Banking & Trade Finance Unit (September 1995 - September 1996)

Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Dewan Direktur menjadi kepala Unit Kerja Office of the Board yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi sekretariat Dewan Direktur, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan Dewan Direktur;
2. Mencatat dan mengadministrasikan rapat Dewan Direktur;
3. Mengadministrasikan korespondensi dan laporan-laporan Dewan Direktur serta komite-komite yang berada di bawah Dewan Direktur;
4. Menjalankan fungsi penghubung (*liaison*) antara Dewan Direktur dengan fungsi-fungsi eksekutif LPEI;
5. Memastikan tata kelola Dewan Direktur sesuai dengan prinsip tata kelola kelembagaan dan memenuhi aturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Direktur.

Duties and Responsibilities

The Secretary of the Board of Directors serves as the head of the Office of the Board Unit responsible for carrying out the secretariat functions of the Board of Directors, with the following tasks and responsibilities:

1. Conducting activities to support the functions and activities of the Board of Directors.
2. Recording and administering Board of Directors meetings.
3. Administering correspondence and reports of the Board of Directors and committees under the Board of Directors.
4. Acting as a liaison between the Board of Directors and the executive functions of Indonesia Eximbank.
5. Ensuring the governance of the Board of Directors in accordance with institutional governance principles and compliance with statutory regulations.
6. Performing other tasks assigned by the Board of Directors.

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2023

Pada tahun 2023, Sekretaris Dewan Direktur telah mengikuti program pengembangan kompetensi, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Competency Development Program in 2023

In 2023, the Secretary of the Board of Directors participated in a number of competency development programs, as outlined in the following table:

Tanggal Pelaksanaan Date	**Judul Program** Title	**Penyelenggara** Organizer
15 Februari 2023/15 February 2023	Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah *Batch* 1	Karim
17 Mei 2023/17 May 2023	Leading Hybrid Teams with Agile Leadership Batch 2	CIAS
25 Oktober 2023/25 October 2023	Sharing Session ESG/Keuanagn Berkelanjutan *Batch* 2 & 3	LPEI
8 Desember 2023/8 December 2023	BARa *Risk Forum* "Perbankan Indonesia dalam mendukung Indonesia menuju *Low Carbon Economy*"	BARA
18 Desember 2023/18 December 2023	Risk Operational Awareness	Arfaidhams Secret

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Di tahun 2023, Sekretaris Dewan Direktur melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Mengelola agenda Dewan Direktur dalam bentuk pengaturan penjadwalan, penyediaan materi serta penyusunan dan pendokumentasian risalah rapat;
2. Memastikan tindak lanjut atas setiap arahan Dewan Direktur;
3. Melaksanakan fungsi keprotokolan dalam agenda Dewan Direktur;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan Dewan Direktur secara tepat waktu;
5. Mengusulkan penyempurnaan regulasi internal terkait tata kerja Dewan Direktur dan tata naskah dinas lembaga;
6. Menjalin hubungan dan mewujudkan sinergi antar *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya.

Implementation of Tasks in 2023

In 2023, the Secretary of the Board of Directors discharged their duties in accordance with their responsibilities, as follows:

1. Managing the Board of Directors' agenda in the form of scheduling arrangements, provision of materials and preparation and documentation of meeting minutes;
2. Ensuring follow-up on any Board of Director directives;
3. Carry out the protocol function in the Board of Director's agenda;
4. Prepare and submit Board reports in a timely manner;
5. Proposing improvements to internal regulations related to the work procedures of the Board of Directors and the official script of the institution;
6. Establish relationships and realize synergies between Special Mission Vehicles (SMV) of the Ministry of Finance and other institutions.

Sekretaris Lembaga
Corporate Secretary

Dalam meningkatkan penerapan GCG, peran Sekretaris Lembaga (*Corporate Secretary*) diinisiasi untuk mendukung Manajemen dalam mencapai dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan hukum, serta dalam menerapkan keputusan-keputusan Manajemen.

Sekretaris Lembaga LPEI berperan sebagai penghubung antara organ perusahaan dengan pihak eksternal termasuk lembaga pemerintah dan nonpemerintah, pemegang saham, serta pelaku pasar modal lainnya. Dengan demikian, Sekretaris Lembaga tidak hanya memastikan terlaksananya kebijakan dan keputusan Manajemen, tetapi juga memegang tanggung jawab dalam menjaga keterbukaan, keterhubungan yang efektif, serta kepatuhan LPEI terhadap berbagai regulasi.

In enhancing the implementation of GCG (Good Corporate Governance), the role of the Corporate Secretary is initiated to support Management in achieving and ensuring compliance with regulatory and legal requirements, as well as in implementing Board decisions.

The Corporate Secretary of Indonesia Eximbank acts as a link between the corporate body and external parties including governmental and nongovernmental institutions, shareholders, and other capital market participants. Thus, the Corporate Secretary not only ensures the implementation of Board policies and decisions but also holds responsibility for maintaining transparency, effective communication, and Indonesia Eximbank compliance with various regulations.

Profil Sekretaris Lembaga

Profile of Corporate Secretary

Chesna F. Anwar
Sekretaris Lembaga
Corporate Secretaty

Usia Age
61 tahun | years old

Warga Negara Citizenship
Indonesia

Domisili Domicile
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis
Keputusan Direktur Eksekutif No. 0003/KDE/01/2022
Decree of Executive Director No. 0003/KDE/01/2022

Rangkap Jabatan Concurrent Position
Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia LPEI
Managing Director of Corporate Secretary, Compliance, and HC of Indonesia Eximbank

Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan Subbab Profil Direktur Pelaksana.
Her full profile has been described in the Company Profile Chapter of the Managing Director Profile Subchapter.

Struktur Organisasi Sekretaris Lembaga

Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif. Oleh karena itu, dalam struktur organisasi LPEI, Sekretaris Lembaga memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif. Kedudukan Sekretaris Lembaga dalam Struktur Organisasi LPEI dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Organizational Structure of Corporate Secretary

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Executive Director. Therefore, in the organizational structure of Indonesia Eximbank, the Corporate Secretary has a direct responsibility to the Executive Director. The position of the Corporate Secretary in the Organizational Structure of Indonesia Eximbank is described in the following chart:

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung Jawab Sekretaris Lembaga antara lain adalah:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Membantu Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan antara lain:
   - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web LPEI;
   - Penyampaian laporan kepada pemangku kepentingan dan regulator secara tepat waktu;
   - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Pengesahan; dan
   - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Dewan Direktur dan/atau Direktur Eksekutif.
3. Menjalin komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan utama seperti Kementerian Keuangan RI, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Wali Amanat, Kreditur, Debitur dan publik secara luas.

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2023

Pada tahun 2023, Sekretaris Lembaga tidak mengikuti program pengembangan kompetensi yang terkait dengan fungsi dan tugasnya sebagai Sekretaris Lembaga.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary include, among others:

1. Providing input to the Board of Directors and Executive Director regarding compliance with legal regulations.
2. Assisting the Board of Directors and Executive Director in implementing corporate governance, including:
   - Transparency of information to the public, including the availability of information on Indonesia Eximbank website.
   - Timely submission of reports to stakeholders and regulators.
   - Organization and documentation of Ratification Meetings.
   - Organization and documentation of Board of Directors and/or Executive Director meetings.
3. Establishing effective communication with key stakeholders such as the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, Trustees, Creditors, Debtors, and the general public.

Competency Development Program in 2023

In 2023, the Corporate Secretary did not participate in the competency development program related to her functions and duties as Corporate Secretary.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Di tahun 2023, Sekretaris Lembaga telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalin komunikasi dengan regulator antara lain dalam bentuk penyampaian laporan secara tepat waktu dan penyelenggaraan pertemuan dengan regulator seperti Kementerian Keuangan dan OJK.
2. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalin komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, dalam bentuk 2 (dua) Nota Kesepahaman dengan Kementerian/Lembaga/Bank serta penyelenggaraan kegiatan dan program bersama.
3. Penyusunan Siaran Pers dalam rangka Keterbukaan informasi kepada media dan publik sebanyak 52 (lima puluh dua) siaran pers.
4. Melakukan korespondensi dengan regulator, Kementerian/Lembaga, dan *stakeholder* terkait.

Implementation of Tasks in 2023

In 2023, the Corporate Secretary fulfilled their duties in accordance with their responsibilities, as follows:

1. Conducting activities to establish effective communication with regulators, including timely submission of reports and meetings with regulators such as the Ministry of Finance and OJK.
2. Establishing effective communication with key stakeholders through Memoranda of Understanding with Ministries/Agencies/Banks and organizing joint activities and programs.
3. Drafting Press Releases to ensure transparency of information to the media and the public, totalling 52 (fifty two) press releases.
4. Corresponding with regulators, Ministries/Agencies, and related stakeholders.

Unit Audit Internal
Internal Audit Unit

Dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik, keberadaan fungsi audit internal di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjadi suatu hal yang sangat strategis. Unit Audit Internal ini bukan sekadar sebuah organ dalam proses tata kelola, melainkan sebuah langkah konkret yang diambil untuk secara sistematis mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian internal di seluruh aspek operasional LPEI.

In efforts to achieve good governance, the presence of an internal audit function at Indonesia Eximbank is highly strategic. This unit is not just an organ in the governance process but a concrete step taken to systematically evaluate and develop internal controls in all operational aspects of Indonesia Eximbank.

Keberadaan Unit Audit Internal mencerminkan komitmen untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Fokus utama dari fungsi ini adalah meningkatkan efektivitas kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPEI. Hal ini mencakup peningkatan dalam pengelolaan risiko yang dihadapi oleh lembaga, serta memastikan bahwa tata kelola perusahaan berada pada tingkat yang optimal.

The presence of the Internal Audit Unit reflects a commitment to ensuring transparency, accountability, and sustainability in organizational activities. Its primary focus is to enhance the effectiveness of Indonesia Eximbank business activities, including risk management and optimizing corporate governance.

Fungsi audit internal di LPEI dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang dipimpin oleh Kepala SKAI (Head of Audit Internal) dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif. Satuan kerja tersebut membawahi Divisi Regular Audit & Methodology yang melaksanakan *assurance*, dan Divisi Special Audit yang melaksanakan investigasi dan verifikasi dalam rangka penghapusbukuan, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Divisi, serta Departemen Manajeman Mutu dan Tindak Lanjut yang melaksanakan fungsi *quality assurance* dan monitoring tindak lanjut atas pemenuhan rekomendasi Auditor Internal maupun Eksternal. Hal ini sejalan dengan aturan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0063/PDE/12/2022 tentang Pembentukan Jabatan Head of Manajemen Risiko & Kredit.

The internal audit function at Indonesia Eximbank is carried out by the Internal Audit Unit (IAU) led by the Head of IAU (Senior Executive Vice President 5) and reports directly to the Executive Director. IAU oversees the Regular Audit & Methodology Division, responsible for audit implementation tasks and non-audit assignments according to RAT, and the Special Audit Division, which conducts investigations and verifications for write-off purposes, each led by a Division Head. This structure aligns with the regulations set forth in MPO.0038/CEO/08/2020 dated 31 August 2020, regarding the Sixth Amendment to Executive Director Regulation No. 0065/PDE/11/2019 concerning Guidelines and Organizational Workings of Indonesia Eximbank.

Dengan adanya SKAI, LPEI dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dalam proses-proses operasionalnya. Selain itu, melalui evaluasi manajemen risiko, LPEI dapat lebih proaktif dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, fungsi audit internal tidak hanya menjadi sarana pengawasan, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan LPEI di masa yang akan datang.

Through IAU, Indonesia Eximbank can identify areas for improvement in its operational processes. Additionally, through risk management evaluations, Indonesia Eximbank can proactively address challenges that may arise, thus optimizing performance and adding value to all stakeholders. Therefore, the internal audit function is not only a means of oversight but also a key element in building a strong foundation for Indonesia Eximbank growth and sustainability in the future.

Dalam melakukan pengawasan internal, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) secara konsisten menerapkan metode *Risk Based Audit*, yang dijadikan pedoman untuk menjalankan fungsi Audit Internal sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Selain itu, SKAI juga merujuk pada Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal yang dirumuskan oleh Institute of Internal Auditor (IIA).

In conducting internal oversight, the Internal Audit Unit consistently applies the Risk-Based Audit method, guided by standards issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Additionally, SKAI also refers to the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing formulated by the Institute of Internal Auditors (IIA).

Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI LPEI berpedoman di antaranya pada Piagam Audit Internal. Piagam Audit Internal merupakan sebuah dokumen formal yang di dalamnya mengatur mengenai visi dan misi Audit Internal, kedudukan SKAI dalam organisasi, ruang lingkup aktivitas SKAI, kewenangan dan tanggung jawab SKAI, tanggung jawab Kepala SKAI, independensi, objektivitas dan profesionalisme, dan kode etik Auditor. Saat ini, SKAI telah memiliki piagam Audit Internal, yaitu Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) nomor PDE 0014/PDE/08/2022 yang merupakan pengkinian dari Piagam Audit tahun 2019. Piagam Audit Internal ditinjau (*reviewed*) kembali kecukupannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Internal Audit Charter

In carrying out its duties and responsibilities, Indonesia Eximbank SKAI is guided by, among others, the Internal Audit Charter. The Internal Audit Charter is a formal document in which it regulates vision and mission of Internal Audit, position of SKAI in the organization, scope of SKAI activities, authority and responsibilities of SKAI, responsibilities of Head of SKAI, independence, objectivity and professionalism, as well as Auditor's code of ethics. Currently, SKAI has an Internal Audit Charter, namely Executive Director Regulation (PDE) number PDE 0014/PDE/08/2022 which is an update of the 2019 Audit Charter. The Internal Audit Charter is reviewed for adequacy at least 1 (one) time in 3 (three) years.

Profil Kepala Audit Internal

Profile of Head of Internal Audit

I Nyoman Gede Suarja
Kepala Audit Internal
Head of Internal Audit

Usia Age
62 tahun | years old

Warga Negara Citizenship
Indonesia

Domisili Domicile
Jakarta

Dasar Hukum Pengangkatan Appointment Basis
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.PJ.0094/HCH/12/2021 tanggal 29 Desember 2021
Specified Time Work Agreement (PKWT) No. PJ.0094/HCH/12/2021 dated 29 December 2021.

Periode Jabatan Position Period
1 Januari 2022 – sekarang
1 January 2022 – present

Riwayat Pendidikan Educational Background
- Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (1999)
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya (1987)
- Master of Management – University of Gadjah Mada (1999)
- Bachelor of Economics – University of Brawijaya (1987)

Riwayat Karier Career Background
- Chief Executive di PT Bank Mandiri Europe Ltd. (April 2016 – Desember 2021)
- Managing Director di Mandiri Sekuritas (September 2013 – September 2016)
- Chief Executive di PT Bank Mandiri Europe Ltd. (April 2016 – Desember 2021)
- Managing Director of Mandiri Sekuritas (September 2013 – September 2016)

Sertifikasi Certification
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 – Arfaidhams Secret
Level 5 Risk Management Certification – Arfaidhams Secret.

Jumlah Pegawai Satuan Kerja Internal Audit

Pada 31 Desember 2023 personel Satuan Kerja Internal Audit, terdiri dari:

Number of Internal Audit Work Unit Employees

As of 31 December 2023, the personnel of the Internal Audit Unit consisted of:

Jabatan Position	**Jumlah Personel** Number of Personnel **(orang | people)**
Kepala Satuan Kerja Audit Internal	1
Kepala Divisi	2
Kepala Departemen	5
Auditor	9
Total Personel SKAI	**17**

Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Internal Audit

Sertifikasi Profesi Internal Audit yang dimiliki oleh personel SKAI per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Internal Audit Professional Qualification/Certification

Internal Audit Professional Certifications held by IAU personnel as of December 31, 2023 are as follows:

Sertifikasi Certification	**Jumlah Personel** Number of Personnel **(orang | people)**
Certified in Governance Enterprised IT (CGEI)	1
Certified Information System Auditor (CISA)	1
Certified Information Security Manager (CISE)	1
Certified Internal Auditor (CIA)	2
Manajemen Risiko Level 1 | Risk Management Level 1	4
Manajemen Risiko Level 2 | Risk Management Level 2	7
Manajemen Risiko Level 3 | Risk Management Level 3	3
Manajemen Risiko Level 4 | Risk Management Level 4	1
Manajemen Risiko Level 5 | Risk Management Level 5	1
Qualified Internal Audit – Tingkat Manajerial | Qualified Internal Audit - Managerial Level	1
Qualified Internal Audit (QIA Manajerial) | Qualified Internal Audit - Managerial Level	1
Qualified Internal Audit (QIA)	1
Qualified Internal Audit (QIA) – Tingkat Lanjutan II | Qualified Internal Audit - Advanced Level II	1
Qualified Internal Audit (QIA) – Tingkat Manajerial | Qualified Internal Audit - Managerial Level	3
Qualified Internal Audit – Tingkat Manajerial | Qualified Internal Audit - Managerial Level	2
Qualified Internal Auditor (QIA) – Tingkat Dasar | Qualified Internal Audit - Basic Level	2

Kedudukan Direktorat Internal Audit dalam Struktur Organisasi

Struktur Direktorat Internal Audit LPEI dalam organisasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Direktur dan Komite Audit. Hal ini telah ditetapkan dalam regulasi internal LPEI, yaitu Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No. 0063/PDE/12/2022 tentang Pembentukan Jabatan Head of Manajemen Risiko & Kredit.

Position of Internal Audit Directorate in the Organisational Structure

The Directorate of Internal Audit of Indonesia Eximbank is responsible to the Executive Director, and has direct access to the Board of Directors and the Audit Committee. This is specified in Indonesia Eximbank's internal regulations, particularly Executive Director Decree (KDE) No. 0063/PDE/12/2022 on the Establishment of the Head of Risk & Credit Management Position.

Dengan demikian, Satuan Kerja Audit Internal secara langsung berada di bawah kendali dan pengawasan Direktur Eksekutif sehingga dapat menjalankan fungsinya secara independen, sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal LPEI. Independensi ini memberikan keleluasaan kepada Satuan Kerja Audit Internal untuk menjalankan fungsinya secara obyektif dan tanpa benturan kepentingan yang dapat memengaruhi integritas pelaksanaan tugasnya.

Therefore, the Internal Audit Directorate is directly under the control and supervision of the Executive Director. However, this policy does not diminish the independence of the Internal Audit Directorate in carrying out its duties, as outlined in the Internal Audit Charter. This independence allows the Internal Audit Directorate to conduct internal audits objectively and without conflicts of interest that could affect the integrity of its tasks.

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Internal Audit per 31 Desember 2023

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Internal Audit per 31 Desember 2023

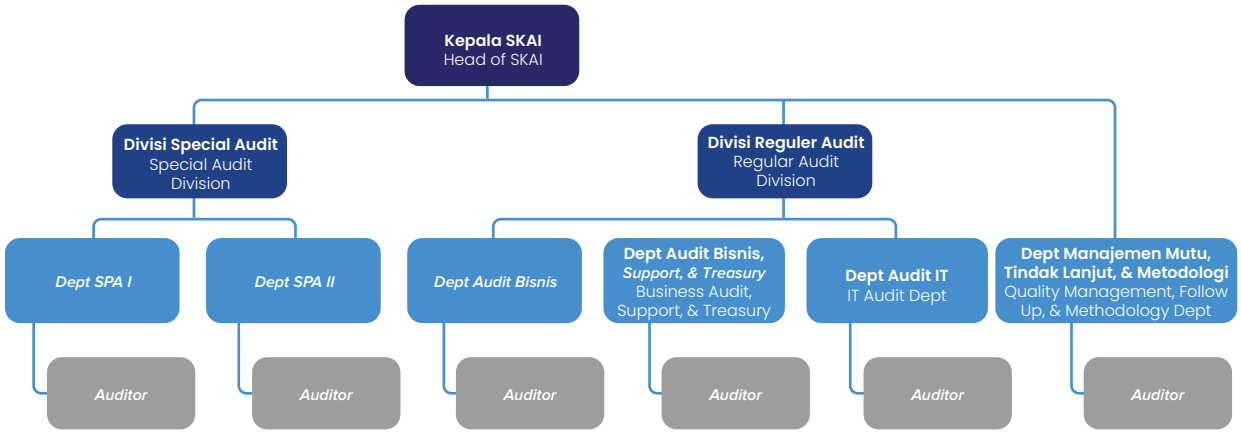

Tugas dan Tanggung Jawab

SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI dengan jabatan setara Head Of, yang membawahi dua Divisi yaitu Divisi Reguler Audit & Metodologi, Divisi Special Audit dan Departemen Manajemen Mutu dan Tindak Lanjut.

Divisi Reguler Audit & Metodologi (RAM) dimpimpin oleh Kepala Divisi yang membawahi tiga unit kerja setara departemen, yaitu Departemen Audit Bisnis, Departemen Audit Treasuri dan Fungsi Pendukung, serta Departemen Audit TI. Divisi RAM memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Fungsi asuransi (*assurance*) dilaksanakan melalui pelaksanaan audit untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas *internal control* dan *risk management*, serta menilai kualitas pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Audit yang telah disetujui oleh Direktur Eksekutif.
2. Melakukan penyusunan Rencana Audit Tahunan.
3. Melakukan pengembangan metodologi dan penyempurnaan kebijakan, Standar Prosedur dan/atau Petunjuk Teknis Audit.

Duties and Responsibilities

The Internal Audit Unit is led by the Head of SKAI with a position equivalent to Head Of, overseeing two divisions: Regular Audit and Methodology Division, Special Audit Division, and the Quality Management and Follow-Up, Department.

The Regular Audit Division (RAM) is headed by a Division Head overseeing three units equivalent to departments, namely Business Audit Department, Treasury and Support Functions Audit Department, and IT Audit Department, responsible for oversight, including:

1. Assurance functions are carried out through audit implementation to evaluate the adequacy and effectiveness of internal control and risk management, as well as to assess the quality of performance achievements according to the approved Audit Plan by the Executive Director.
2. Preparing the Annual Audit Plan.
3. Conducting methodology development and improvement of policies, Standard Procedures and/or Technical Audit Guidelines.

Divisi Spesial Audit (SPA) dipimpin oleh Kepala Divisi yang membawahi 2 unit kerja setara departemen, yaitu Departemen Special Audit 1 dan Departemen Special Audit 2. Divisi SPA memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Melakukan investigasi untuk memastikan penyebab terjadinya suatu kasus.
2. Menyediakan bukti yang cukup dan memadai untuk keperluan proses hukum, jika ditemukan adanya unsur *fraud* terkait tidak tertagihnya pinjaman Debitur dengan mempertimbangkan kajian hukum dari Tim Legal.
3. Melakukan verifikasi dalam rangka penghapusbukuan fasilitas macet Debitur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.
4. Melakukan sosialisasi sebagai *lesson learned* untuk pembelajaran dan pengetahuan akar permasalahan sebagai landasan perbaikan secara ketentuan maupun proses bisnis (operasional).

The Special Audit Division (SPA) is led by the Head of Division who oversees 2 departmental equivalent work units, namely the Special Audit 1 Department and the Special Audit 2 Department. The SPA Division has duties and responsibilities, among others:

1. Conducting investigations to ascertain the cause of a case.
2. Providing sufficient and adequate evidence for legal processes if there are indications of fraud related to unrecovered debtor loans, considering legal reviews from the Legal Team.
3. Verifying for the purpose of writing off non-performing debtor facilities in accordance with the provisions of the Minister of Finance Regulation (PMK).
4. Conducting socialization as lessons learned for learning and understanding the root causes of problems as the basis for improvement in both regulations and business processes (operations).

Departemen Manajemen Mutu dan Tindak Lanjut (QAM) dipimpin oleh Kepala Departemen dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Memastikan kualitas hasil pemeriksaan SKAI telah sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
2. Melakukan *monitoring* pemenuhan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal, serta melaporkannya secara berkala kepada manajemen.
3. Melakukan pendampingan atas Auditor eksternal yang sedang melakukan pemeriksaan (sebagai *Liaison* atau *counterpart* Auditor Eksternal).

The Quality Management and Follow-up (QAM) Department is led by a Department Head with duties and responsibilities, among others:

1. Ensuring the quality of SKAI's audit results are in accordance with applicable regulations and standards.
2. Monitoring the fulfillment of follow-up on the results of internal and external audits, and reporting them periodically to management.
3. Assisting external auditors who are conducting examinations (as Liaison or counterpart to External Auditors).

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Audit Internal

Berdasarkan pasal 31 UU No. 2/2009 mengenai LPEI, proses penunjukan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal merupakan tanggung jawab yang melekat pada Direktur Eksekutif. Ketentuan ini menetapkan bahwa Direktur Eksekutif memiliki kewenangan penuh dalam menentukan siapa yang akan menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

Appointment and Dismissal of Head of Internal Audit

Based on Article 31 of Act No. 2/2009 regarding Indonesia Eximbank, the process of appointing and dismissing the Head of the Internal Audit Unit is the responsibility inherent to the Executive Director. This provision establishes that the Executive Director has full authority in determining who will serve as the Head of the Internal Audit Unit.

Kewenangan tersebut menjadi bagian integral dari struktur organisasi yang mencerminkan hierarki dan tata kelola yang berlaku dalam Lembaga Pembiayaan

This authority is an integral part of the organizational structure that reflects the hierarchy and governance applicable within the Indonesian Export Financing

Ekspor Indonesia. Oleh karena itu, penunjukan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga memperlihatkan keputusan strategis yang berkaitan dengan kelancaran fungsi Audit Internal dan penegakan tata kelola yang baik dalam lembaga ini.

Institution. Therefore, the appointment and dismissal of the Head of the Internal Audit Unit are not merely administrative in nature, but also demonstrate strategic decisions related to the smooth functioning of the Internal Audit and the enforcement of good governance within this institution.

Bagan Pengangkatan dan Pemberhentian

Appointment and Dismissal Chart

Persyaratan Auditor Internal (Baik Secara Individu Maupun Kelompok)

LPEI memiliki komitmen tinggi pada kualifikasi dan standar tertentu dalam merekrut Auditor Internal. Tim Auditor Internal yang tergabung di dalam SKAI LPEI terdiri dari individu yang tidak hanya memiliki keahlian dan pengetahuan profesional yang solid, yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktis di bidang operasional lembaga pembiayaan, tetapi juga berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi. SKAI LPEI menjunjung tinggi sikap mental positif serta mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, hal ini menegaskan komitmen LPEI terhadap standar profesionalisme tertinggi. Dengan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai etika, tim SKAI LPEI berperan penting dalam memastikan bahwa praktik dan kebijakan di LPEI telah sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.

Internal Auditor Requirements (Both Individual and Group)

Indonesia Eximbank is committed to specific qualifications and standards in recruiting Internal Auditors. The Internal Audit Team within Indonesia Eximbank Internal Audit Unit consists of individuals who not only possess solid professional skills and knowledge, acquired through formal education and practical experience in the operational field of financing institutions, but also are dedicated to carrying out their duties with integrity and high responsibility. Indonesia Eximbank Internal Audit Unit upholds a positive mental attitude and adheres to the established codes of ethics, reaffirming Indonesia Eximbank commitment to the highest standards of professionalism. By integrating knowledge, skills, and ethical values, the Indonesia Eximbank Internal Audit Team plays a crucial role in ensuring that practices and policies within Indonesia Eximbank adhere to applicable standards and regulations.

Program Pengembangan Kompetensi Tahun 2023

Pada tahun 2023, Satuan Kerja Audit Internal telah mengikuti program Pendidikan dan pengembangan kompetensi, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Competency Development Program in 2023

In 2023, the Internal Audit Unit has participated in education and competency development programs, as described in the following table:

Tanggal Pelaksanaan Date	Judul Program Title of Program	Penyelenggara Organizer
23 Mei 2023 23 May 2023	ALMA dan Mengelola Risiko pada *Banking Book*	LPEI
23 Mei 2023 23 May 2023	*Building Competence and Future of Work*	LPEI
19 Agustus – 7 Oktober 2023 19 August – 7 October 2023	*Certified Information Systems Auditor* (CISA)	PUSILKOM UI
21 Maret 2023 21 March 2023	*Closing Execution Gap With The* 4 *Disciplines of Executio*n Pegawai LPEI *Batch* 4	Dunamis
26 Mei 2023 26 May 2023	*Develop Future Skill Through Micro Learning*	LPEI
7 – 10 Februari 2023 7 – 10 February 2023	*Fraud* Audit 1	Lembaga Pengembangan Fraud Audit (LPFA)
11 April 2023 11 April 2023	*Growth Mindset: (Unlock Your Inner Power) Batch 2*	ACT
15 Februari 2023 15 February 2023	Konsep dan Implementasi Keuangan Syariah *Batch* 1	Karim
12 Mei 2023 12 May 2023	*Leading Hybrid Teams with Agile Leadership*	CIAS
17 April 2023 17 April 2023	*Learning from The Past to Become Robust*	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
24 Mei 23 24 May 23	Ngobrol Seru Bareng LPEI - Sesi Pagi	LPEI
21 Januari 2023 21 January 2023	Penerapan *Business Judgement Rule* (BJR), Dalam Restrukturisasi Total Garuda	Garuda Indonesia
10 – 11 Mei 23 10 – 11 May 23	*Problem Soving and Decision Making*	Business Wisdom Institute (BWI)
21 – 30 Agustus 2023 21 – 30 Augusts 2023	Program Sertifikasi *Qualified Internal Audit* (QIA) - Manager	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
23 Juni 2023 23 June 2023	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko – Juni	Arfaidhams Secret
1 – 2 Agustus 2023 1 – 2 August 2023	Sertifikasi Manajemen Risiko Wajib Bidang Penjaminan – *Batch* 2	Bintang Cahaya Gempita
30 Agustus 2023 30 August 2023	*Sharing Knowledge* – Basic Penjaminan	LPEI
11 April 2023 11 April 2023	*Sharing Knowledge* Jasa Konsultasi *Batch* 7	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
9 Maret 2023 9 March 2023	Sosialisasi Aku Anti Korupsi Socialization of Aku Anti Korupsi	LPEI
1 Maret 2023 1 March 2023	*Talent Mentoring Group Session – Design Thinking*	Riza Perdana Kusuma
13 – 14 Juli 2023 13 – 14 July 2023	Teknik Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Dalam Mengukur Risiko Operasional	Arfaidhams Secret
23 – 24 Februari 2023 23 – 24 February 2023	*Think on Your Feet (Communication Skill)*	Bussiness First

Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal Tahun 2023

Di tahun 2023, Satuan Kerja Audit Internal telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Melakukan penugasan *assurance* sebanyak 10 penugasan sesuai dengan Rencana Audit Tahunan (RAT) dan 5 penugasan di luar RAT sesuai dengan *concerns management.*
2. Melakukan investigasi atas 8 kasus sesuai dengan Rencana Audit Tahunan (RAT) dan 1 kasus di luar RAT berdasarkan *concerns management.*
3. Melakukan verifikasi dalam rangka penghapusbukuan fasilitas macet debitur dengan *outstanding* sebesar Rp4,1 triliun

Implementation of Internal Audit Work Unit Activities in 2023

In 2023, the Internal Audit Unit has carried out its duties according to its responsibilities, as follows:

1. Conducting 10 assurance assignments in accordance with the Annual Audit Plan (AAP) and 5 assignments outside the AAP according to concerns management.
2. Conducting investigations into 8 cases according to the Annual Audit Plan (AAP) and 1 case outside the AAP based on concerns management.
3. Verifying for the purpose of writing off non-performing debtor facilities with outstanding amounts totaling Rp4.1 trillion.

4. Melakukan *review* internal untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan SKAI.
5. Melakukan *monitoring* tindak lanjut atas pemenuhan rekomendasi auditor eksternal dan internal.
6. Melakukan pengembangan metodologi audit dan penyusunan petunjuk teknis operasional terkait kegiatan audit.
7. Melakukan sosialisasi *lesson learned* sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2023.

Rencana Kerja Tahun 2024

Penyusunan RAT 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan *key inputs* yang meliputi Profil Risiko, Sasaran Strategis, Regulasi Eksternal, Arahan Manajemen, Hasil Audit Internal dan Eksternal, dan Rencana Kerja *2nd Lines*. Selain *key inputs* tersebut, RAT 2024 juga mempertimbangkan hasil penyusunan *roadmap* penerapan GRC 2022-2025, realisasi kinerja lembaga, dan pertimbangan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada 2024 SKAI akan melakukan penugasan Audit atas: Kantor Wilayah, Jasa Konsultasi, IT Project Management, Fungsi Kepatuhan, Aktivitas Pengadaan dan beberapa audit *mandatory*. Selain itu SKAI akan melaksanakan aktivitas audit khusus yang meliputi investigasi dan verifikasi berdasarkan rekomendasi auditor eksternal, arahan manajemen dan hasil pemeriksaan audit internal.

Adapun kegiatan rutin meliputi *monitoring* rekomendasi hasil pemeriksaan Auditor Eksternal dan Internal; *Liaison* Auditor Eksternal; pengembangan SDM, sosialisasi *lesson learned*; *review* terhadap ketentuan internal; dan *quality assurance review* akan dilaksanakan secara konsisten. SKAI juga akan melengkapi pengaturan audit dengan penyusunan petunjuk teknis.

Penerapan Fungsi Pendampingan Audit Eksternal

Pelaksanaan fungsi audit eksternal telah dilakukan terhadap pemeriksaan dan *monitoring* yang dilakukan oleh pihak regulator, yaitu:

1. Pemeriksaan tahunan oleh OJK dengan fokus pemeriksaan pada operasional pada pengelolaan pembiayaan bermasalah.
2. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan terkait tata kelola proses pembiayaan.

4. Conducting internal reviews to ensure the quality of SKAI examination results.
5. Monitoring the follow-up actions on the fulfillment of external and internal auditor recommendations.
6. Developing audit methodology and drafting operational technical guidelines related to audit activities.
7. Conducting lesson learned socialization 3 (three) times during the year 2023.

Work Plan for 2024

The preparation of the 2024 RAT was carried out by considering key inputs including Risk Profile, Strategic Objectives, External Regulations, Management Direction, Internal and External Audit Results, and 2nd Lines Work Plan. In addition to these key inputs, the 2024 RAT also considers the results of the preparation of the roadmap for the implementation of 2022-2025 GRC, the realization of institutional performance, and other considerations.

Based on the above, in 2024 SKAI will conduct Audit assignments on: Regional Offices, Advisory Services, IT Project Management, Compliance Functions, Procurement Activities and several mandatory audits. In addition, SKAI will carry out special audit activities which include investigations and verifications in accordance with external auditor recommendations, management directives and the results of internal audit results.

Routine activities include monitoring recommendations for the results of External and Internal Auditors examinations; External Auditor Liaison; human resource development, socialization of lessons learned; review of internal provisions; and quality assurance review will be implemented consistently. SKAI will also complement the audit arrangements with technical guidelines.

Audit External Assistance Function

The implementation of external audit functions has been conducted on the examination and monitoring performed by the regulatory authorities, namely:

1. Annual inspection by OJK with a focus on operational inspection on the management of non-performing financing.
2. Examination by the Finance and Development Audit Agency on the governance of the financing process.

Akuntan Publik
Public Accountant

Prosedur Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Berlandaskan pada ketentuan yang tercantum dalam PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, penunjukan audit eksternal dan penentuan biaya dilakukan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur. Proses penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Jasa Reviu Audit dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.

Dalam rangka menjalankan kewajiban audit laporan keuangan tahun 2023, LPEI telah mengambil langkah penting dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar, dan Rekan. KAP ini dipercayakan untuk melaksanakan audit menyeluruh yang melibatkan pemeriksaan dan evaluasi terhadap berbagai aspek keuangan LPEI, termasuk transaksi, catatan keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku.

Public Accountiant Firm Appointment Procedures

Based on the PMK No. 208/2021 regarding Governance Principles, Risk Management Principles, and Customer Due Diligence Principles for the Indonesian Export Financing Institution, the appointment of external audit and determination of costs are carried out by the Executive Director with the approval of the Board of Directors. The mechanism for the appointment of Public Accountant Firms is conducted through Audit Review Services Procurement, taking into account recommendations from the Audit Committee.

In order to fulfill the obligation of auditing the financial statements for the year 2023, Indonesia Eximbank has taken significant steps by appointing the Public Accountant Firm (KAP) Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar, and Partners. The said KAP is entrusted to conduct a comprehensive audit involving examination and evaluation of various financial aspects of Indonesia Eximbank, including transactions, financial records, and compliance with applicable financial regulations.

KAP dan Nama Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir

KAP and Name of Public Accountant who audited annual Financial Statements for the last 5 years

No.	Tahun Penugasan Years of Assignment	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Publik Name of Public Accountant	Biaya Jasa (Juta Rp) Service Fee (Rp million)
1.	2019	Purwanto, Sungkoro & Surja	Muhammad Kurniawan	4.400
2.	2020	Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan	Dedy Sukrisnadi	3.589
3.	2021	Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan	Bimo Iman Santoso	3.832
4.	2022	Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan	Bimo Iman Santoso	4.579
5.	2023	Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan	Bimo Iman Santoso	4.484

Jasa lain yang Diberikan KAP dan Akuntan Publik Selain Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan pada Tahun Buku Terakhir

Pada tahun buku 2023, KAP dan Akuntan Publik memberikan jasa selain Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan, yang meliputi:

1. Audit atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.
2. Penerapan prosedur yang disepakati untuk Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) triwulan IV tanggal 31 Desember 2023.

Other Services Provided by KAP and Public Accountants Other than Annual Financial Statement Audit Services in the Last Financial Year

In fiscal year 2023, KAP and Public Accountants provide services other than the Annual Financial Statement Audit Services, which include:

1. Audit of compliance with laws and regulations and internal control for the years ended on 31 December 2023.
2. Implementation of agreed procedures to the fourth quarter Prudential Principles Implementation Activity Report (KPPK) as of 31 December 2023.

3. Asurans terbatas atas laporan pinjaman *Industrial Efficiency and Pollution Control* (*IEPC*) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.
4. Asurans terbatas atas Laporan Pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) oleh LPEI untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.
5. Reviu atas Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.
6. Reviu atas Pengendalian Internal Operasional dan Teknologi Informasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.
7. Reviu atas Informasi Keuangan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.
8. Reviu atas Informasi Keuangan Syariah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan oleh AP dan/atau KAP dilakukan paling sedikit melalui:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit yang berlaku;
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan.

3. Limited assurance on Industrial Efficiency and Pollution Control (IEPC) loans report for the years ended on 31 December 2023.
4. Limited assurance on Government Investment Implementation Report (PEN) to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) by Indonesia Eximbank for the years ended on 31 December 2023.
5. Review of the Key Performance Indicators (KPI) Report for the years ended on 31 December 2023.
6. Review of Operational Internal Control and Information Technology for the years ended 31 December 2023.
7. Review of Financial Statements on the Export National Interest Account (PKE) for the years ended on 31 December 2023.
8. Review of Sharia Financial Statements for the years ended on 31 December 2023.

Effectiveness of External Audit Implementation and Compliance with Provisions

Evaluation of the implementation of the provision of audit services on annual financial information by AP and/or KAP is carried out at least through:

1. Conformity of audit implementation with applicable audit standards;
2. Adequacy of field work time;
3. Assessment of the scope of services provided and the adequacy of the audit test; and
4. Recommendations for improvement.

Fungsi Kepatuhan
Compliance Function

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, ketentuan, dan sistem, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPEI, termasuk pada ruang lingkup syariah, telah sesuai dengan kepatuhan terhadap UU tentang LPEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan LPEI terhadap komitmen kepada regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Compliance function is a series of actions or steps to ensure that policies, procedures, provisions, and systems, as well as business activities carried out by Indonesia Eximbank, including in the scope of sharia, are in accordance with compliance with the Law on Indonesia Eximbank and applicable laws and regulations, as well as ensuring Indonesia Eximbank compliance with commitments to regulators and/or other authorized supervisory authorities.

Satuan Kerja Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan LPEI dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap kegiatan usaha dan kegiatan operasional, serta terpisah dari fungsi bisnis, fungsi operasional maupun fungsi penunjang lainnya dalam kegiatan usaha LPEI.

Compliance Unit

The Compliance function at Indonesia Eximbank is carried out by the Compliance Unit, independent of business activities and operational activities, and separate from business functions, operational functions and other supporting functions in Indonesia Eximbank business activities.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di LPEI, Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai fungsi dan peran penting yang meliputi:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha LPEI;
2. mengelola Risiko Kepatuhan dan mendukung semua tingkatan organisasi dalam memenuhi Fungsi Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memastikan agar kebijakan, prosedur, ketentuan dan sistem, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPEI telah sesuai dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang LPEI dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan LPEI terhadap komitmen yang dibuat oleh LPEI kepada regulator dan/atau otoritas lain yang berwenang; dan
5. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan memastikan penerapan program APU PPT & PPPSPM di LPEI.

In the implementation of duties and responsibilities at Indonesia Eximbank, the Compliance Working Unit has important functions and roles which include:

1. Helping to improve the Compliance Culture at all levels of the organization and business activities of Indonesia Eximbank;
2. Managing Compliance Risk in coordination with all levels of the organization in fulfilling the Compliance Function with the applicable laws and regulations;
3. Ensure that policies, procedures, provisions and systems, as well as business activities carried out by Indonesia Eximbank are in accordance with compliance with the Law on Indonesia Eximbank and applicable legislation;
4. Ensuring Indonesia Eximbank compliance with commitments made by Indonesia Eximbank to regulators and/or other authorized authorities; and
5. Responsible for implementing and ensuring the implementation of the AML/CFT & PPPSPM programs at Indonesia Eximbank.

Struktur Organisasi

Organizational Structure

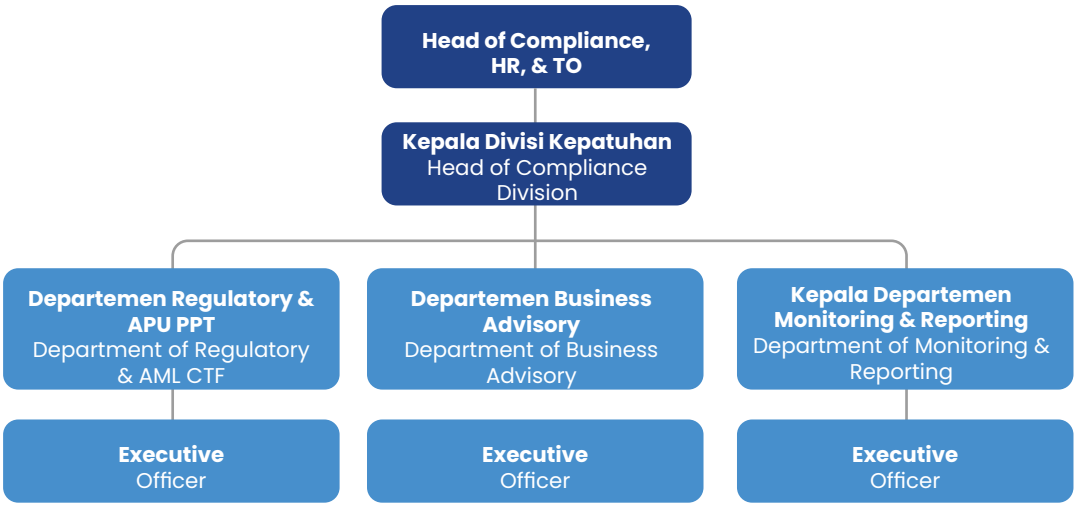

1. **Departemen Regulatory & APU PPT**
   Melakukan pengkajian dan pengujian kepatuhan lembaga terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku maupun yang akan diberlakukan untuk memastikan pemenuhannya kepada regulator serta koordinasi dalam pengelolaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam aktivitas operasional dan bisnis.

2. **Departemen Pendampingan Bisnis**
   Melakukan pendampingan terhadap unit kerja untuk memastikan kepatuhan aktivitas operasional dan bisnis dalam pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi. Termasuk di dalamnya melakukan evaluasi terhadap draft peraturan internal maupun pengkinian peraturan internal.

   Melakukan pendampingan di dalam pemenuhan penilaian tata Kelola yang Baik (oleh BPKP maupun secara *self assessment*) Bersama Departemen lainnya.

3. **Departemen Monitoring & Reporting**
   Melakukan pengelolaan risiko kepatuhan, budaya kepatuhan dan evaluasi kepatuhan atas aktivitas operasional dan bisnis lembaga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berlandaskan pada prinsip Good Corporate GovernanceGCG, serta melakukan penyusunan dan pelaporan atas pelaksanaan fungsi Kepatuhan.

1. Regulatory & AML/CFT Department
   To assess and test the institution's compliance with prevailing and future laws and regulations to ensure compliance with regulators and coordination in managing the implementation of anti-money laundering and terrorism financing prevention programs in operational and business activities.

2. **Business Advisory Department**
   Provide assistance to work units to ensure compliance of operational and business activities with laws and regulations. This includes evaluating draft internal regulations and updating internal regulations.

   Assisting in the fulfillment of good governance assessments (by BPKP or self-assessment) with other departments.

3. **Monitoring & Reporting Department**
   Performing compliance risk management, compliance culture and evaluation of compliance of operational and business activities of the institution with applicable laws and regulations based on the GCG principles, as well as preparing and reporting on the implementation of the Compliance function.

Profil Kepala Divisi Kepatuhan

Profile of Head of Compliance Division

Nama | Name	Thio Sucy
Usia | Age	55 tahun | years old
Warga Negara | Citizenship	Indonesia
Domisili | Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	KDE No.0038/KDE/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 efektif sejak 1 Maret 2021 KDE No.0038/KDE/03/2021 dated 10 March 2021 effective from 1 March 2021
Riwayat Pendidikan | Educational Background	*Bachelor of Business* dari University of Technology, Sydney - Australia (1994)
Seritifikasi **Certifications**	• *Certificate of Competence of Bank Risk Management Level 5 from Banking Professional Certification Body* (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan-LSPP) • *International Certificate in Banking Risk and Regulation* from Global Association of Risk Professionals (GARP)
Riwayat Karier **History of Career**	Memiliki pengalaman dan rekam jejak selama 26 tahun di industri perbankan, karier profesional beliau dimulai di Citibank Indonesia (1994-2009), mengawali karier sebagai Asia Pasific Management Associate di Citibank Indonesia dan meniti karier memimpin beberapa divisi dengan jabatan terakhir sebagai Vice President AMLCO, Compliance. Kemudian, beliau melanjutkan karier dengan bergabung bersama PT Bank Barclays Indonesia dengan menduduki jabatan sebagai Senior Vice President, Kepala Satuan Unit Kerja APU-PPT (2009-2010); Kepala SKAI (2010-2011). Karier beliau berlanjut dengan menjabat sebagai Audit Director, Kepala SKAI di PT Bank ANZ Indonesia (2011-2017), kemudian bergabung dengan PT Bank Commonwealth sebagai Executive Vice President, Head of Enterprise Risk Management (2017-2018), Chief of Compliance (2018) dan Direktur Kepatuhan (2018-2020), sebelum bergabung dengan LPEI dan menjabat di posisi sekarang.

Program Kerja dan Fokus Aktivitas Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2023

Program kerja dan fokus aktivitas Satuan Kerja Kepatuhan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Implementasi PMK.208/2021 tentang prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, termasuk pendampingan Penilaian *self assessment* Tata Kelola oleh BPKP.
2. Melakukan *self assessment* faktor Tata Kelola yang Baik menggunakan parameter SEOJK 15/ SEOJK.05/2022 sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan LPEI.
3. Penyesuaian kebijakan internal LPEI.
4. Pengkinian peraturan internal LPEI terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
5. Implementasi *Governance, Risk & Compliance* (GRC).
6. Pembekalan dan penyusunan program kerja DCOR *Officer* LPEI.
7. Penyusunan kerangka kerja dan program strategi *Anti-Fraud* LPEI.

Work Program and Focus of Activity of Compliance Working Unit in 2023

The work program and activity focus of the Compliance Working Unit in 2023 are as follows:

1. Implementation of PMK.208/2021 concerning the principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank, including assistance in Governance Self-Assessment by Independent Parties.
2. Conduct self-assessment of Good Governance factors using SEOJK 15/SEOJK.05/2022 parameters as part of the Indonesia Eximbank Health Level Report.
3. Adjustment of Indonesia Eximbank internal policies.
4. Updating Indonesia Eximbank internal regulations related to the Implementation of Anti-Money Laundering Program, Prevention of Financing of Terrorism, and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector.
5. Implementation of Governance, Risk & Compliance (GRC).
6. Debriefing and preparation of DCOR Officer Indonesia Eximbank work program.
7. Preparation of Indonesia Eximbank Anti-Fraud strategy framework and program.

8. Sosialisasi berkelanjutan dalam rangka penguatan budaya kepatuhan dan peningkatan *awareness* terhadap budaya dan risiko kepatuhan, termasuk penerapan Anti Gratifikasi dan *Whistle Blowing System* (WBS).

Tantangan Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka mencapai target dan melaksanakan program kerja tahun 2023, Satuan Kerja Kepatuhan menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya:

1. Proses transformasi lembaga yang sedang berlangsung di mana akan terus dilakukan penyesuaian baik dari segi struktur organisasi, penyempurnaan alur kerja, maupun pengembangan sistem teknologi pendukung serta peningkatan keterampilan (*skill set*) pegawai yang akan terus ditingkatkan seiring dengan perbaikan dalam mendukung proses transformasi lembaga.
2. Peningkatan kesadaran (*awareness*) akan pentingnya penerapan manajemen risiko dan budaya kepatuhan dalam setiap aktivitas, proses, dan bisnis di LPEI akan terus dilakukan secara berkesinambungan.
3. Terbitnya beberapa regulasi baru yang berdampak dan harus segera diterapkan oleh LPEI pada kesempatan pertama.

Strategi Fungsi Kepatuhan

Strategi fungsi kepatuhan yang diterapkan pada tahun 2023 melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Berperan Aktif dalam Komunikasi Dua Arah:
   Fungsi kepatuhan akan berperan aktif dalam menjalankan komunikasi dua arah secara berkesinambungan dan memberikan nilai tambah, baik dalam konteks internal maupun eksternal, dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sebagai Bagian dari Model 3 Lini:
   Fungsi kepatuhan akan diintegrasikan sebagai bagian dari model 3 lini, di mana pelaksanaannya sebagai fungsi lini 2 turut serta melakukan koordinasi dengan pelaksanaan fungsi *assurance* lini 2. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan dan efektivitas operasional.
3. Peningkatan Budaya dan Fungsi Kepatuhan:
   Upaya akan difokuskan pada peningkatan budaya dan fungsi kepatuhan. Dalam hal Ini mencakup pengelolaan dan pelaksanaan yang berkelanjutan terhadap *Whistleblowing System* (WBS) LPEI dan pengendalian gratifikasi. Langkah ini diambil untuk memastikan integritas dan kepatuhan yang tinggi dalam semua aspek operasional.

8. Continuous socialization in order to strengthen compliance culture and increase awareness of compliance culture and risks, including the implementation of Anti-Gratification and Whistle Blowing System (WBS).

Compliance Function Challenges

In order to achieve targets and implement work programs in 2023, the Compliance Working Unit faces a number of challenges, including:

1. The ongoing institutional transformation process in which adjustments will continue to be made both in terms of organizational structure, workflow improvement, and the development of supporting technology systems as well as improving employee skill sets that will continue to be improved along with improvements in supporting the institutional transformation process.
2. Increased awareness of the importance of implementing risk management and compliance culture in every activity, process, and business at Indonesia Eximbank will continue to be carried out on an ongoing basis.
3. The issuance of several new regulations that have an impact and must be immediately implemented by Indonesia Eximbank at the first opportunity.

Compliance Function Strategy

The compliance function strategy implemented in 2023 involves the following steps:

1. Take an Active Role in Two-Way Communication:
   The compliance function play an active role in carrying out continuous and value-added two-way communication, both in an internal and external context, with all stakeholders.
2. Implementation of the Compliance Function as Part of the 3-Line Model:
   The compliance function will be integrated as part of the 3-line model, where its implementation as a line 2 function also coordinates with the implementation of the line 2 assurance function. This aims to ensure alignment and operational effectiveness.
3. Improving Compliance Culture and Functions:
   Efforts will be focused on improving the compliance culture and function. This includes ongoing management and implementation of Indonesia Eximbank Whistleblowing System (WBS) and gratification control. This step is taken to ensure high integrity and compliance in all aspects of operations.

Rencana Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2023

1. Implementasi PMK No.208/PMK.06/2021 tentang prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dengan fokus pada penilaian tata kelola LPEI.
2. Implementasi POJK No.9/POJK.05 2022 tentang Pengawasan LPEI dan SEOJK No.15/SEOJK.05/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI.
3. Implementasi dan penerapan *Governance, Risk, & Compliance* (GRC), yang berlaku.
4. Pemenuhan komitmen dan pelaporan kepada Regulator.
5. Pelaksanaan dan evaluasi Uji Kepatuhan secara berkelanjutan.
6. Pelaksanaan Uji Petik terhadap aktivitas usaha LPEI terkait regulasi dan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan *advisory* dan kajian terhadap ketentuan internal dan inisiatif bisnis/produk sesuai degan peraturan perundang-undangan.
8. Pengembangan sistem informasi manajemen untuk memastikan kelengkapan profil nasabah yang komprehensif guna memahami profil nasabah.
9. Sosialisasi berkelanjutan dalam rangka penguatan Budaya Kepatuhan dan Peningkatan *awareness* terhadap budaya dan risiko kepatuhan.
10. Pelaksanaan evaluasi/penilaian atas hasil pelaksanaan evaluasi sosialisasi Tata Kelola yang Baik sebagai peningkatan *awareness*.
11. Pelaksanaan Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM.

Kegiatan dan Realisasi (Pencapaian) Kepatuhan Tahun 2023

1. Koordinasi dan penyusunan piagam komite Governance, Risk dan Compliance (GRC) LPEI, yang merupakan keterlibatan aktif Divisi Kepatuhan dalam mendukung *alignment* dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Internal Audit.
2. Sebagai *lead coordinator*, berkoordinasi dengan seluruh Divisi LPEI untuk pelaksanaan penilaian pertama kali oleh BPKP atas tata kelola yang baik sesuai PMK 208. Hasil penilaian tingkat kecukupan menunjukkan predikat "Baik" dengan nilai 77.79%.

Compliance Function Work Plan for 2023

1. Implementation of PMK No. 208/2021 on the principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of the Indonesian Export Financing Agency, with a focus on assessing Indonesia Eximbank governance.
2. Implementation of POJK No. 9/2022 on Indonesia Eximbank Supervision and SEOJK No. 15/2022 on Indonesia Eximbank Health Level Assessment.
3. Implementation and application of Governance, Risk, and Compliance (GRC), as applicable.
4. Fulfillment of commitments and reporting to Regulators.
5. Implementation and evaluation of Compliance Test on an ongoing basis.
6. Examination of Indonesia Eximbank business activities related to regulations and legislation.
7. Implementation of advisory and review of internal provisions and business/product initiatives in accordance with laws and regulations.
8. Development of management information system to ensure the completeness of comprehensive customer profile to understand customer profile.
9. Continuous socialization in order to strengthen Compliance Culture and increase awareness of compliance culture and risk.
10. Implementation of evaluation (assessment) on the results of the implementation of Good Governance socialization evaluation as an increase in awareness.
11. Implementation of AML, CFT and PPPSPM Program Implementation.

Activities and Realization (Achievement) of Compliance Year 2023

1. Coordination and preparation of the LPEI Governance, Risk and Compliance (GRC) committee charter, which is an active involvement of the Compliance Division in supporting alignment with the Risk Management and Internal Audit Units.
2. As lead coordinator, coordinated with all Indonesia Eximbank Divisions for the implementation of the first assessment by BPKP on good governance in accordance with PMK 208. The results of the adequacy level assessment show a predicate of "Good" with a score of 77.79%.

3. Sebagai *lead coordinator* penilaian faktor Tata Kelola yang Baik untuk periode Triwulan IV Tahun 2023 (Desember 2023) telah dilaksanakan secara *self assessment* dengan menggunakan parameter dalam SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI dengan hasil penilaian akhir pada peringkat 2 (baik).
4. Koordinator dalam pemenuhan 100% atas pelaporan LHKPN periode tahun 2022 dengan total 40 orang wajib lapor pada 31 Maret 2023
5. Berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap kewajiban pelaporan LPEI kepada pihak eksternal (regulator) dan secara rutin melakukan *reminder* kepada masing-masing PIC Pelaporan baik untuk pelaporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan dan incidental untuk memastikan ketepatan waktu pelaporan.
6. Berkontribusi secara aktif terhadap penyusunan ketentuan internal yang dilakukan melalui pemberian kajian/opini serta keterlibatan dalam rapat/diskusi.
7. Melakukan kajian dan diseminasi terhadap 30 ketentuan eksternal yang berdampak kepada LPEI.
8. Melakukan fungsi *advisory* dengan memberikan opini atau rekomendasi terkait produk/jasa dan proses tentang kesesuaian penerapannya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pelaksanaan Uji Kepatuhan dan KYC atas pengajuan baru, perpanjangan, dan perubahan *Term and Condition* serta restrukturisasi.
10. Berperan aktif melakukan komunikasi berkesinambungan, pendampingan, dan menjembatani komunikasi antara Unit Kerja di LPEI dengan OJK.
11. Pengkinian ketentuan internal Divisi Kepatuhan.

12. Pemenuhan target pengkinian data nasabah tahun 2023 dan penyampaian rencana pengkinian data nasabah tahun 2024 kepada OJK.
13. Pemenuhan kewajiban pelaporan yang berhubungan dengan penerapan APU PPT seperti SIPESAT, DTTOT, PSPM, SIPENDAR, dan LTKM/STR.
14. Pemenuhan *screening* terhadap Nasabah baru dan Nasabah eksisting dan pemenuhan *Questionnaire* AML terhadap permintaan dari Bank Koresponden untuk menilai kebijakan dan praktik penerapan APU PPT di LPEI.

3. As lead coordinator, the assessment of Good Governance factors of the fourth quarter of 2023 (December 2023) has been carried out on a self-assessment basis using the parameters in SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 concerning Indonesia Eximbank Soundness Level Assessment with the final assessment result at a rating of 2 (good).
4. Coordinator in fulfilling 100% of LHKPN reporting for the period of 2022 with a total of 40 mandatory reporters by 31 March 2023.
5. Continuously monitoring Indonesia Eximbank's reporting obligations to external parties (regulators) and routinely reminding each Reporting PIC for monthly, quarterly, semi-annual, annual and incidental reporting to ensure timeliness of reporting.
6. Actively contributing to the preparation of internal provisions through the provision of reviews/ opinions and involvement in meetings/discussions.
7. Conduct review and dissemination of 30 external regulations that affect Indonesia Eximbank.
8. Perform advisory functions by providing opinions or recommendations related to products/ services and processes on the suitability of their implementation with the prevailing laws and regulations.
9. Implementation of Compliance and KYC Test on new application, extension, and change of Term and Condition and restructuring.
10. Play an active role in continuous communication, mentoring, and bridging communication between Work Unit sat Indonesia Eximbank and OJK.
11. Updating the internal provisions of the Compliance Division.
12. Fulfillment of the 2023 customer data update target and submission of the 2024 customer data update plan to OJK.
13. Fulfillment of reporting obligations related to AML/ CFT implementation such as SIPESAT, DTTOT, PSPM, SIPENDAR, and LTKM/STR.
14. Fulfillment of screening of new and existing customers and fulfillment of AML Questionnaire against requests from Correspondent Banks to assess policies and practices of AML/CFT implementation at Indonesia Eximbank.

15. Peningkatan budaya dan fungsi Kepatuhan juga dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Kepatuhan, di antaranya melalui pengelolaan serta pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan atas *Whistleblowing System* (WBS) LPEI dan Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pegawai, manajemen dan pihak eksternal terkait.
16. Sebagai salah satu tim implementasi *Governance, Risk & Compliance* (GRC) LPEI.
17. Sebagai *lead coordinator* dalam rangka penyusunan peraturan internal, kerangka kerja dan program strategi *Anti-Fraud* LPEI.
18. Sebagai koordinator dalam melakukan komunikasi dengan regulator terkait dengan Implementasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) di LPEI.
19. Melakukan evaluasi dan membantu perumusan regulasi eksternal (PP, PBI, dan POJK) terkait dengan implementasi DHE di LPEI

Rencana Kerja Tahun 2024

1. Implementasi PMK No.208/PMK.06/2021 tentang prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dengan fokus pada penilaian tata kelola LPEI.

2. Implementasi POJK No.9/POJK.05 2022 tentang Pengawasan LPEI dan SEOJK No.15/SEOJK.05/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI.

3. Implementasi dan penerapan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC), yang berlaku.
4. Pemenuhan komitmen dan pelaporan kepada Regulator.
5. Pelaksanaan dan evaluasi Uji Kepatuhan secara berkelanjutan.
6. Pelaksanaan Uji Petik terhadap aktivitas usaha LPEI terkait regulasi dan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan advisory dan kajian terhadap ketentuan internal dan inisiatif bisnis/produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pengembangan sistem informasi manajemen untuk memastikan kelengkapan profil nasabah yang komprehensif guna memahami profil nasabah.
9. Sosialisasi berkelanjutan dalam rangka penguatan Budaya Kepatuhan dan Peningkatan *awareness* terhadap budaya dan risiko kepatuhan.
10. Pelaksanaan evaluasi/penilaian atas hasil pelaksanaan evaluasi sosialisasi Tata Kelola yang Baik sebagai peningkatan *awareness*.

15. Improvement of Compliance culture and function is also carried out directly by the Compliance Working Unit, including through the management and implementation of continuous dissemination of the Indonesia Eximbank Whistleblowing System (WBS) and Gratification Control to all employees, management and related external parties.
16. As one of Indonesia Eximbank Governance, Risk & Compliance (GRC) implementation team.
17. As lead coordinator in the preparation of internal regulations, framework and program of Indonesia Eximbank Anti-Fraud strategy.
18. As the coordinator in communicating with regulators related to the Implementation of Export Proceeds (DHE) at Indonesia Eximbank.
19. Evaluate and assist in the formulation of external regulations (PP, PBI, and POJK) related to the implementation of DHE at Indonesia Eximbank.

2024 Work Plan

1. Implementation of PMK No.208/PMK.06/2021 on the principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of the Indonesian Export Financing Agency, with a focus on assessing Indonesia Eximbank governance.
2. Implementation of POJK No.9/POJK.05/2022 concerning Indonesia Eximbank Supervision and SEOJK No.15/SEOJK.05/2022 concerning Indonesia Eximbank Health Level Assessment.
3. Implementation and application of Governance, Risk, and Compliance (GRC), as applicable.
4. Fulfillment of commitments and reporting to Regulators.
5. Implementation and evaluation of Compliance Test on an ongoing basis.
6. Examination of Indonesia Eximbank business activities related to regulations and legislation.
7. Implementation of advisory and review of internal provisions and business/product initiatives in accordance with laws and regulations.
8. Development of management information system to ensure the completeness of comprehensive customer profile to understand customer profile.

9. Continuous socialization to strengthen Compliance Culture and increase awareness of compliance culture and risk.
10. Implementation of evaluation/assessment on the results of the implementation of Good Governance socialization evaluation as an increase in awareness.

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

Dasar Hukum

1. UU No. 2/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. PMK No. 58/PMK.06/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
3. PMK No. 208/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
4. POJK No. 9/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.05/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
6. Peraturan Dewan Direktur No. 0017/PDD/12/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko *Enterprise* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
7. Peraturan Direktur Eksekutif No.0027/PDE/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Manajemen Risiko *Enterprise* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Legal Basis

1. Act No. 2/2009 dated 12 January 2009 on Indonesia Eximbank.
2. PMK No. 58/PMK.06/2020 dated 29 May 2020 concerning Guidance and Supervision of Indonesia Eximbank.
3. PMK No. 208/2021 dated 30 December 2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank.
4. POJK No. 9/2022 dated 23 June, 2022 concerning Supervision of Indonesia Eximbank.
5. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 15/SEOJK.05/2022 dated 7 September 2022 concerning Assessment of the Health Level of Indonesia Eximbank.
6. Board of Director Regulation No. 0017/PDD/12/2022 dated 2 December 2022 concerning Enterprise Risk Management Policy of Indonesia Eximbank.
7. Executive Director Regulation No.0027/PDE/12/2023 dated 7 December 2023 on Enterprise Risk Management of Indonesia Eximbank.

Gambaran Umum Manajemen Risiko LPEI

Manajemen Risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LPEI. Manajemen Risiko dirancang untuk membantu LPEI dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. LPEI memiliki komitmen yang kuat untuk terus mengoptimalkan pengelolaan risiko, menetapkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai, dan secara aktif melakukan tindak lanjut untuk mengurangi potensi risiko serta dampak kerugian yang mungkin timbul.

Dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnis sehari-hari, sistem manajemen risiko menjadi faktor penting dan merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal di LPEI. Pengelolaan risiko yang efektif dan terukur merupakan bagian strategis dari pengendalian internal LPEI yang tidak boleh terlewatkan dalam aktivitas operasional bisnis sehari-hari. LPEI meyakini bahwa penerapan sistem manajemen risiko yang tepat dan terintegrasi dalam perencanaan,

Overview of Risk Management of Indonesia Eximbank

Risk Management is a set of procedures and methodologies used to identify, measure, control and monitor risks arising from all Indonesia Eximbank business activities. Risk Management is designed to assist Indonesia Eximbank in dealing with uncertainties and changes that occur in the business environment. Indonesia Eximbank is strongly committed to continuously optimizing risk management, establishing appropriate mitigation measures, and actively following-up to reduce potential risks and the impact of losses that may arise.

In carrying out daily operational and business activities, the risk management system becomes a critical factor and an integral part of the internal control system at Indonesia Eximbank. Effective and measurable risk management is a strategic part of Indonesia Eximbank internal control that must not be overlooked in daily business operational activities. Indonesia Eximbank believes that the implementation of the appropriate and integrated risk management

pengendalian, dan pengawasan aktivitas operasional bisnis dapat meminimalisirmeminimalkan terjadinya potensi risiko yang dapat memengaruhi kondisi dan kelangsungan usaha LPEI.

system in planning, controlling, and supervising business operational activities can minimize potential risks that may affect Indonesia Eximbank condition and continuity.

Untuk memastikan pengelolaan risiko berjalan optimal, LPEI membangun budaya sadar risiko (*risk culture*) yang kuat di antara seluruh pegawai. Tujuannya adalah agar setiap pegawai, saat berperan sebagai pengambil risiko, dapat melakukan analisis mendalam terhadap eksposur risiko yang mungkin timbul akibat keputusan yang diambil, memengaruhi penerapan manajemen risiko di semua tingkatan dan tahapan.

To ensure optimal risk management, Indonesia Eximbank builds a strong risk-aware culture among all employees. The goal is for every employee, when acting as a risk-taker, to conduct in-depth analysis of the potential risk exposure resulting from the decisions made, influencing the application of risk management at all levels and stages.

LPEI menyadari bahwa beberapa risiko telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses bisnis sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan kebijakan manajemen risiko yang komprehensif dan pembangunan budaya risiko yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Guna mengimplementasikan sistem manajemen risiko secara menyeluruh, LPEI melakukan kajian mendalam atas risiko-risiko yang relevan dengan lingkup bisnisnya. Hal ini perlu dilakukan agar LPEI dapat mengelola dan memitigasi risiko-risiko yang dihadapi, sehingga dapat mencapai kinerja yang lebih solid.

Indonesia Eximbank acknowledges that some risks have become an inseparable part of daily business processes. Therefore, the implementation of comprehensive risk management policies and the development of a sustainable risk culture are essential needs that must be fulfilled. To implement risk management system comprehensively, Indonesia Eximbank conducts in-depth studies on risks relevant to its business scope. This is necessary for Indonesia Eximbank to manage and mitigate the risks faced, thus achieving more solid performance.

Fungsi Manajemen Risiko secara umum mencakup pengelolaan risiko secara kelembagaan (*enterprise risk management*) dan terintegrasi (*integrated risk management*) di seluruh jaringan kantor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dengan partisipasi seluruh pejabat dan pegawai. Pengelolaan risiko ini mencakup kegiatan usaha konvensional dan prinsip syariah. Fungsi manajemen risiko harus bersifat independen dari fungsi bisnis dan operasional, serta dari fungsi pengendalian internal.

The Risk Management function generally encompasses institutional (enterprise risk management) and integrated (integrated risk management) risk management across the network of offices of the Indonesia Eximbank, with the participation of all officials and employees. Risk management covers conventional and Shariah principles activities. The risk management function must be independent of business and operational functions, as well as internal control functions.

Penanggung Jawab Manajemen Risiko

Untuk pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang menyeluruh, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja ini bertanggung jawab melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dalam aktivitas sehari-hari LPEI.

Person in Charge of Risk Management

In implementing a comprehensive Risk Management System, the Indonesia Eximbank established a Risk Management Working Unit. This Work Unit is responsible for carrying out the Risk Management function in Indonesia Eximbank daily activities.

Wewenang dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Wewenang dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah:

1. Mengidentifikasi risiko termasuk risiko yang melekat pada kegiatan usaha LPEI.

Authorities and Responsibilities of Risk Management Work Unit

The Authorities and Responsibilities of the Risk Management Work Unit are:

1. Identify risks including risks inherent in Indonesia Eximbank business activities.

2. Menyusun metode pengukuran risiko.
3. Memantau pelaksanaan strategi Manjemen risiko yang telah disusun oleh Dewan Direktur.
4. Memantau posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal (*stress testing*) dan pengujian dengan menggunakan data historis.
5. Mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko.
6. Mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.
7. Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, jika LPEI menggunakan model untuk keperluan internal.
8. Memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direktur Eksekutif secara berkala.

2. Developing risk measurement methods.
3. Monitoring the implementation of risk management strategies that have been prepared by the Board of Directors.
4. Monitoring the overall risk position, per type of risk, and per type of functional activity, as well as testing using scenarios/assumptions of abnormal conditions (stress testing) and testing using historical data.
5. Periodically review the Risk Management process.
6. Review the proposed development or expansion of business activities.
7. Evaluate the accuracy of the model and the validity of the data used to measure Risk, if Indonesia Eximbank uses the model for internal purposes.
8. Provide recommendations to the business and operational functions and/or to the Risk Management committee, in accordance with their authority.
9. Prepare and submit risk profile reports to the Executive Director on a regular basis.

Struktur Organisasi Fungsi Manajemen Risiko Tahun 2023

Organizational Structure of Risk Management Function in 2023

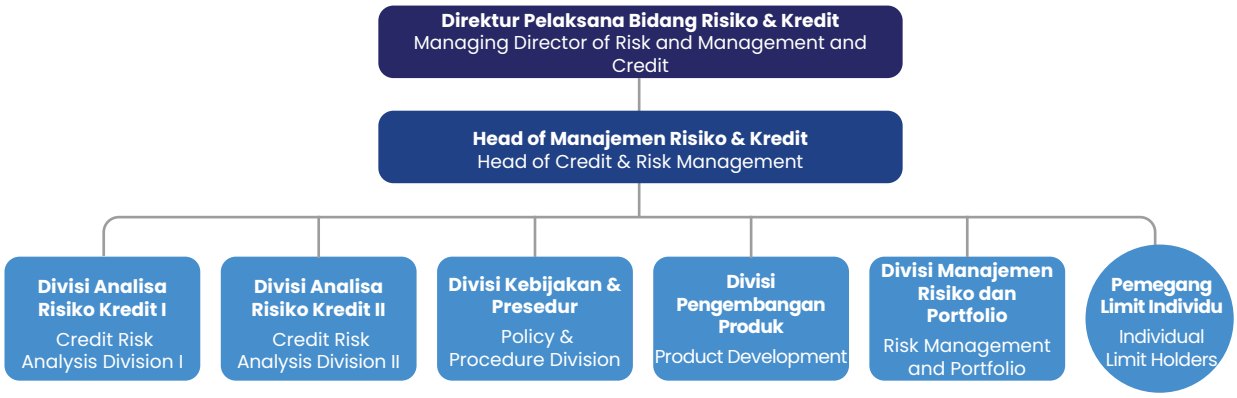

Fungsi Manajemen Risiko dipimpin oleh Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko dan Kredit serta *Head of* Manajemen Risiko dan Kredit, yang membawahi Divisi Analisa Risiko Kredit I, Divisi Analisa Risiko Kredit II, Divisi Kebijakan dan Prosedur, Divisi Pengembangan Produk, Divisi Manajemen Risiko dan Portofolio, serta Pemegang Limit Individu. Setiap Divisi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung upaya pengelolaan risiko di Lembaga Penjaminan Ekspor dan Impor Indonesia (LPEI) secara efektif dan komprehensif.

The Risk Management function is led by the Executive Director of Risk Management and Credit as well as Head of Risk Management overseeing the Credit Risk Analysis Division I, Credit Risk Analysis Division II, Policy and Procedure Division, Product Development Division, Risk Management and Portfolio Division, as well as Individual Limit Holders. Each division has tasks and responsibilities to support effective and comprehensive risk management efforts at the Indonesia Eximbank.

Divisi Analisa Risiko Kredit I dan Divisi Analisa Risiko Kredit II merupakan unit risiko yang bertanggung jawab melakukan *review* dan analisis pengendalian risiko terhadap portofolio aktivitas bisnis Lembaga Penjaminan Ekspor dan Impor Indonesia (LPEI), yang mencakup bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Unit ini juga melakukan pemantauan aktivitas bisnis untuk menciptakan pertumbuhan aset yang berkualitas dan melaksanakan upaya penanganan pembiayaan bermasalah secara optimal. Unit risiko kredit berperan dalam optimalisasi implementasi prinsip *four eyes* untuk pengambilan keputusan.

Credit Risk Analysis Division I and Credit Risk Analysis Division II are risk units responsible for reviewing and analyzing risk control against the portfolio of business activities of Indonesia Eximbank, which includes financing, guarantees, and insurance. These units also monitor business activities to create quality asset growth and implement optimal handling of troubled financing. The credit risk unit plays a role in optimizing the implementation of the four-eyes principle for decision-making.

Divisi Kebijakan dan Prosedur merupakan unit kerja yang secara teratur meninjau dan menyusun kembali kebijakan dan prosedur seiring dengan perkembangan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

The Policy and Procedure Division is a working unit that regularly reviews and revises policies and procedures in line with applicable regulations and regulations.

Divisi Pengembangan Produk adalah unit kerja yang merancang peraturan terkait produk/program bisnis dan aktivitas/kegiatan LPEI serta melakukan pengembangan atau penyempurnaan produk/program bisnis dan aktivitas/kegiatan baru.

The Product Development Division is a working unit that designs regulations related to Indonesia Eximbank business products/programs and activities, as well as developing or improving new business products/programs and activities.

Divisi Manajemen Risiko dan Portofolio adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko yang didirikan untuk mendukung implementasi proses dan sistem manajemen risiko yang efektif di LPEI.

The Risk Management Division is a risk management unit established to support the implementation of effective risk management processes and systems at Indonesia Eximbank.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Penerapan dan pemahaman mengenai Manajemen Risiko LPEI dalam konteks *Enterprise Risk Management* (ERM) dipetakan dalam sebuah kerangka kerja untuk memperkuat kaitan dengan internalisasi budaya risiko (*risk culture*) di LPEI. Adapun *framework* ERM yang diterapkan oleh LPEI adalah sebagai berikut:

Risk Management Framework

Implementation and understanding of Risk Management at Indonesia Eximbank in the context of Enterprise Risk Management (ERM) are mapped out within a framework to strengthen the connection with internalizing risk culture at Indonesia Eximbank. The ERM framework applied by Indonesia Eximbank is as follows:

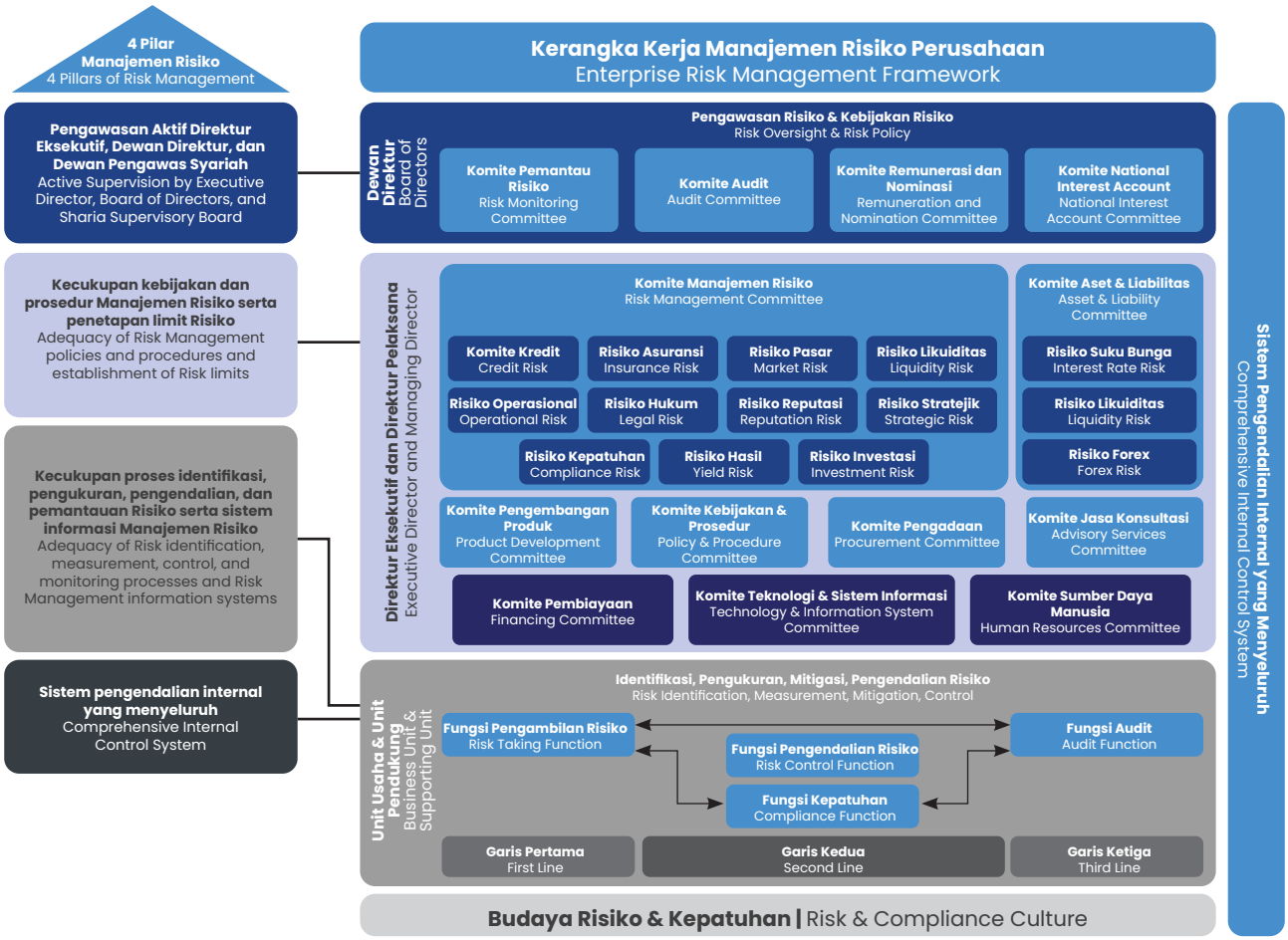

Kerangka ERM dibagi menjadi 4 (empat) pilar, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pilar 1: Pengawasan aktif Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah

Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di LPEI.

Pengawasan aktif Direktur Eksekutif dilakukan paling kurang meliputi:

a. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Enterprise dan eksposur Risiko yang diambil oleh LPEI secara keseluruhan;
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direktur Eksekutif;
c. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
e. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan

The ERM framework is divided into 4 (four) pillars, with explanations as follows:

Pillar 1: Active supervision of Executive Director, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board

The Executive Director, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board are responsible for the effectiveness of Risk Management implementation in Indonesia Eximbank.

Active oversight by the Executive Director includes at least:

a. Responsible for the implementation of Enterprise Risk Management policies and the risk exposure taken by Indonesia Eximbank as a whole;
b. Evaluating and deciding on transactions and Risk limits requiring Executive Director approval;
c. Developing a Risk Management culture throughout the organization;
d. Ensuring the improvement of human resource competencies related to Risk Management;
e. Ensuring that the Risk Management function operates independently; and

f. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
   1) keakuratan metodologi penilaian Risiko;
   2) kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
   3) ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

Pengawasan aktif Dewan Direktur paling sedikit meliputi:
a. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.
b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direktur Eksekutif atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direktur Eksekutif yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Direktur.

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Direktur secara rutin mengadakan Rapat Dewan Direktur setiap bulan. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Direktur dalam memastikan penerapan Manajemen Risiko melalui pemantauan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi tentang Risiko kegiatan usaha dan operasional LPEI, Dewan Direktur membentuk Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan ekspor nasional yang diberikan oleh LPEI.

Pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah paling sedikit meliputi:
a. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah dan
b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direktur Eksekutif atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah.

Pilar 2: Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
Prinsip-prinsip pengelolaan risiko yang terpadu dan sistematis dituangkan dalam berbagai kebijakan, prosedur dan limit risiko. Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil terhadap Risiko LPEI.

f. Conducting periodic reviews to ensure:
   1) The accuracy of Risk assessment methodologies;
   2) Adequacy of Risk Management information system implementation; and
   3) Compliance with Risk Management policies and procedures, as well as Risk limit setting.

Active oversight by the Board of Directors includes at least:
a. Formulating written and comprehensive Risk Management policies and strategies.
b. Evaluating the Executive Director's accountability for the implementation of Enterprise Risk Management policies.
c. Evaluating and deciding on Executive Director requests related to transactions and Risk limits requiring Board of Directors approval.

The Board of Directors meets on a monthly basis to carry out its supervisory duties. The Risk Monitoring Committee was established to assist the Board of Directors in carrying out its duties and functions in ensuring risk management by monitoring, evaluating, and making recommendations on the risks of Indonesia Eximbank's business activities and operations. The Risk Monitoring Committee is in charge of conducting periodic assessments and making recommendations on business risks related to national export financing provided by Indonesia Eximbank.

Active oversight by Sharia Supervisory Board includes at least:
a. Evaluating Enterprise Risk Management policies related to Sharia compliance.
b. Evaluating the Executive Director's accountability for implementing Enterprise Risk Management policies related to Sharia compliance.

Pillar 2: Adequacy of Risk Management Policies and Procedures and Establishment of Risk Limits
The principles of integrated and systematic risk management are set forth in various policies, procedures and risk limits. Risk Management procedures and the establishment of risk limits are adjusted to the level of risk that will be taken against Indonesia Eximbank's Risks.

Untuk mengevaluasi kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, Direktur Eksekutif membentuk 9 komite, diantaranya Komite Manajemen Risiko, Komite Pengembangan Produk, Komite Kebijakan dan Pedoman, Komite Assets & Liabilities Management, Komite Teknologi Sistem Informasi, Komite Pengadaan, Komite Jasa Konsultasi, Komite Pembiayaan, dan Komite Sumber Daya Manusia.

Pilar 3: Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

LPEI menjalankan proses yang komprehensif dalam mengelola risiko dengan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko yang terintegrasi dalam setiap kegiatan bisnisnya. Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dimiliki LPEI memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi risiko secara efektif. Pendekatan ini memberikan jaminan kecukupan dalam menjaga keberlanjutan operasional dan optimalisasi nilai bagi semua pemangku kepentingan.

Pilar 4: Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

LPEI menerapkan strategi model 3 (tiga) lini (*Three Line Model*) dalam sistem pengendalian internal yaitu:

1. Lini pertama (*1st line*), merupakan unit kerja yang berada pada setiap *Risk Taking Function*.
2. Lini kedua (*2nd line*), merupakan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang terdiri atas:
   a. Fungsi Manajemen Risiko yang fokus pada pengembangan metodologi terkait manajemen risiko. Termasuk di dalamnya Fungsi Analisa Risiko Bisnis sebagai *four eye principles* pada level transaksi; dan
   b. Fungsi Kepatuhan
3. Lini ketiga (*3rd line*), merupakan *Audit Function* sebagai lini terakhir yang berfungsi untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan kegiatan di seluruh unit kerja termasuk berfungsi untuk melakukan penilaian secara independen atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian internal di LPEI.

To evaluate the adequacy of Risk Management policies, procedures, and risk limit setting, the Executive Director forms nine committees, including the Risk Management Committee, Product Development Committee, Policy and Guideline Committee, Assets and Liabilities Management Committee, Information System Technology Committee, Procurement Committee, Advisory Services Committee, Financing Committee, and Human Resources Committee.

Pillar 3: Adequacy of Risk Identification, Measurement, Control and Monitoring Process and Risk Mangement Information System

Indonesia Eximbank conducts a comprehensive process in managing risks through integrated risk identification, measurement, control, and monitoring in all its business activities. The Risk Management Information System owned by Indonesia Eximbank plays a crucial role in effectively collecting and analyzing risk information. This approach provides assurance of adequacy in maintaining operational sustainability and optimizing value for all stakeholders.

Pillar 4: Comprehensive Internal Control System

Indonesia Eximbank implements the Three Line Model strategy in its internal control system, which consists of:

1. First Line (1st line): This is the operational unit located within each Risk Taking Function.
2. Second Line (2nd line): This comprises the Risk Management and Compliance functions, which include:
   a. The Risk Management function focuses on developing methodologies related to risk management. This includes the Business Risk Analysis Function as the four-eye principle at the transaction level; and
   b. The Compliance function.
3. Third Line (3rd line): This is the Audit Function, serving as the final line responsible for auditing the implementation of activities across all units. It also conducts independent assessments of the effectiveness of Risk Management and internal control implementation at Indonesia Eximbank.

JENIS RISIKO DAN UPAYA MITIGASI TAHUN 2023

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LPEI, termasuk didalamnya Risiko Penjaminan. Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko kredit, mitigasi risiko yang dikembangkan dan dilaksanakan LPEI antara lain:

1. Pengelolaan kredit dilakukan secara 3 Pilar independen (bisnis unit, *credit risk reviewer*, dan *credit operation*)
2. *Pre-Credit Process*/*Pipeline Management*
   Pemilihan target pasar telah melalui manajemen pipeline dengan menggunakan *pre-screening tools* melalui Portfolio/*Sector Guidelin*e dan *Industry Financing Reference* (IFR).
3. *Credit Process*/Inisiasi
   Proses analisis kredit dilakukan secara *four eyes principle* dengan menggunakan *Credit Rating* dan *Scoring System* untuk melakukan pengukuran terhadap risiko kredit. Potensi risiko secara individual dapat diindikasikan melalui hasil peringkat (*rating*) yang digunakan sebagai alat bantu dalam mengukur kinerja keuangan debitur serta sebagai peringatan dini (*early warning*) terhadap penurunan kinerja keuangan debitur. Selain itu, proses Keputusan Kredit dilakukan dalam Komite kredit yang melibatkan fungsi bisnis dan risiko yang dilakukan secara independen oleh masing-masing anggota komite
4. *On Disbursement*
   Keputusan Komite dilaksanakan melalui verifikasi dan implementasi/pencairan pembiayaan oleh Unit Kerja yang independen dari bisnis dan risiko (*Credit Operation*) serta pengelolaan dokumen terpisah oleh *Credit Admin*.
5. *Post Disbursement*
   Setelah pencairan, dilakukan monitoring portofolio pembiayaan melalui Laporan *Enterprise Risk Management Report* (ERMR) bulanan oleh Divisi RPM, dilakukan EWD (*Early Warning Detection*) untuk debitur yang berpotensi mengalami pemburukan, pelaksanaan monitoring PDO secara intensif, serta pemutakhiran MIS dengan *update* data core dan *dashboard*. Monitoring juga dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan *rating* menjadi *non-investment grade*, agar tidak mengarah menjadi *Non Performing Loan*.
6. *Credit Recovery*
   Untuk penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan oleh unit terpisah dan diputuskan dalam Komite Restrukturisasi, diperkuat dengan terbitnya PMK 144/PMK.06/2021 tentang Tata

TYPE OF RISK AND MITIGATION IN 2023

Credit Risk

Credit risk is the risk of customers or counterparties being unable to repay Indonesia Eximbank. To anticipate and control credit risk, Indonesia Eximbank has developed and implemented risk mitigation measures, including:

1. Loan management is carried out by 3 independent pillars (business unit, credit risk reviewer, and credit operation).
2. Pre-Credit Process/Pipeline Management:
   Market target selection is done through pipeline management using pre-screening tools via Portfolio/Sector Guidelines and Industry Financing Reference (IFR).
3. Credit Process/Initiation:
   Credit analysis is conducted using the four-eyes principle with Credit Rating and Scoring Systems for measuring credit risk. Individual risk potential is indicated through ratings used as tools to measure debtor financial performance and serve as early warnings for deteriorating debtor performance. Credit Decision processes are carried out in the Credit Committee, involving business and risk functions independently.
4. On Disbursement:
   Committee decisions are implemented through verification and financing disbursement by the Credit Operation, independent of business and risk, and document management by Credit Administration.
5. Post Disbursement:
   Following the disbursement, portfolio monitoring is done through monthly Portfolio Quality Reports (PQR) by the RPM Division, Early Warning Detection (EWD) for potentially deteriorating debtors, intensive PDO monitoring, and MIS updates with core data and dashboards. Monitoring is also conducted for debtors experiencing a downgrade to non-investment grade to prevent them from becoming Non-Performing Loans.
6. Credit Recovery:
   Non-Performing financing is handled by a separate unit and decided upon in the Restructuring Committee, reinforced by the issuance of PMK 144 regarding write-offs in 2021. With processes carried

Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang LPEI. Dengan proses yang dilakukan sejak pemilihan calon debitur hingga penyelesaian kredit bermasalah, KPMR dalam risiko kredit dinilai cukup memadai.

7. Secara operasional peraturan/kebijakan terkait kredit telah dilengkapi dengan ketentuan internal tentang Kebijakan Pembiayaan, Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Pembiayaan, Petunjuk Teknis Operasional Pembiayaan, dan Komite Pembiayaan. Kebijakan, Manual dan Petunjuk Teknis merupakan penyempurnaan dari Kebijakan dan Manual sebelumnya sebagai salah satu upaya untuk terus meningkatkan kualitas portofolio LPEI.
8. Sebagai *tools* tambahan dalam memitigasi risiko kredit ditetapkan Batas Minimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang merupakan batas maksimum pembiayaan untuk setiap individu dan grup, disamping itu BMPP digunakan sebagai salah satu upaya mengelola risiko konsentrasi pembiayaan.
9. LPEI juga memiliki batas limit *inhouse* sebagai salah satu strategi pengendalian risiko konsentrasi dan menjaga tingkat konsentrasi pembiayaan yang selama ini telah terdiversifikasi cukup baik. Perhitungan *inhouse limit* merupakan gabungan pembiayaan, retensi sendiri penjaminan, dan retensi sendiri asuransi. Pemberian fasilitas pembiayaan dilarang melebihi *inhouse limit* (pelanggaran), namun pelampauan inhouse limit akibat perubahan kurs dan/atau perubahan modal LPEI akan dilakukan penurunan outstanding secara bertahap.
10. Terkait pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), LPEI telah mengimplementasikan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang merupakan adopsi dari IFRS 9 yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB). PSAK 71 mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai dan akuntansi lindung nilai. LPEI secara berkala melakukan evaluasi penurunan nilai atas seluruh aset keuangan kecuali aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang nilai wajarnya diukur melalui laporan laba rugi (*fair value through profit and loss*).
11. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola tagihan dan/atau kewajiban yang timbul dari transaksi derivatif. Transaksi derivatif yang dilakukan hanya dapat dilaksanakan dalam rangka lindung

out from the selection of prospective debtors to the resolution of problematic credits, KPMR in credit risk is deemed adequate.

7. Operational regulations/policies related to credit have been supplemented with internal provisions on Financing Policies, Executive Director Regulations on Financing Manuals, Operational Financing Technical Instructions, and Financing Committees. These policies, manuals, and technical instructions are improvements from previous policies and manuals as part of efforts to continually improve LPEI's portfolio quality.
8. As an additional tool to mitigate credit risk, a Minimum Financing Provision Limit (BMPP) is established, representing the maximum financing limit for each individual and group, used as an effort to manage financing concentration risk.
9. Indonesia Eximbank also has in-house limit caps as a strategy to control concentration risk and maintain a well-diversified financing level. In-house limit calculations are a combination of financing, self-retained guarantees, and self-retained insurance. Exceeding the in-house limit (violation) due to changes in exchange rates and/or Indonesia Eximbank capital will result in gradual reductions in outstanding amounts.
10. Regarding the establishment of Impairment Loss Reserves (CKPN), Indonesia Eximbank has implemented PSAK 71 on Financial Instruments, an adoption of IFRS 9 issued by the International Accounting Standards Board (IASB). PSAK 71 regulates changes in requirements related to financial instruments such as classification and measurement, impairment, and hedge accounting. Indonesia Eximbank periodically evaluates impairment losses on all financial assets except for financial assets classified in groups whose fair values are measured through profit and loss.
11. As regulated by the Ministry of Finance, Indonesia Eximbank must apply the principle of prudence in managing receivables and/or obligations arising from derivative transactions. Derivative transactions are only carried out for hedging purposes. Derivative transactions conducted

nilai (*hedging*). Bentuk transaksi derivatif yang dilakukan LPEI umumnya dalam bentuk transaksi *spot*, *forward*, *futures*, dan *swap*. Dalam melakukan transaksi derivatif, LPEI ditetapkan memiliki maksimum transaksi untuk setiap pihak lawan sebesar 10% dari modal.

by Indonesia Eximbank generally include spot, forward, futures, and swap transactions. Indonesia Eximbank is set to have a maximum transaction limit of 10% of capital for each counterparty when conducting derivative transactions.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi Aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk Transaksi Derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko pasar timbul karena adanya pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki LPEI. Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko pasar antara lain dilakukan melalui:

1. Pengelolaan risiko pasar di LPEI dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu *front office, middle office*, dan *back office*.
2. Eksposur risiko pasar pada LPEI hanya pada *banking book*. Hal ini dikarenakan LPEI tidak melakukan transaksional pada *trading book*, sedangkan *trading* hanya dilaksanakan dalam rangka lindung nilai (*hedging*) dan bersifat *natural hedge*.
3. Dalam memitigasi eksposur risiko pasar dilakukan dengan pemantauan Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai Limit PDN dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yaitu sebesar 20%. Pemantauan (*monitoring*) eksposur risiko pasar senantiasa dipantau secara harian.
4. Untuk melengkapi pemantauan risiko, dilakukan juga *gap management* dan analisa sensitivitas dengan tujuan mengelola risiko pasar sebagai akibat perubahan tingkat bunga dan nilai tukar.
5. Selain hal tersebut, LPEI juga menetapkan batas transaksi (limit) khusus untuk transaksi *banking book* mencakup limit *counterparty* dan limit *dealer*.
6. Dalam mendukung infrastruktur pengelolaan risiko pasar, LPEI telah memiliki *Treasury Dealing System* (TDS) dan *market risk management tools*. Sedangkan untuk memperoleh data pasar diperoleh dari Reuters, Bloomberg dan sumber independen lainnya.
7. Secara operasional peraturan/kebijakan terkait pasar telah dilengkapi dengan Peraturan Dewan Direktur tentang Kebijakan Umum Tresuri LPEI, Peraturan Direktur Eksekutif terkait Limit Transaksi Tresuri dan Manual Produk Tresuri.

Market Risk

Market risk is the risk of losses arising from movements in market factors including interest rates and exchange rates that are contrary to Indonesia Eximbank positions. To anticipate and control market risk, measures undertaken include:

1. Market risk management at Indonesia Eximbank is divided into 3 parts: front office, middle office, and back office.
2. Market risk exposure at Indonesia Eximbank only exists in the banking book because Indonesia Eximbank does not engage in trading activities in the trading book. Trading is conducted only for hedging purposes and is naturally hedged.
3. To mitigate market risk exposure, monitoring of Net Foreign Exchange Position (NFP) is conducted in accordance with the NFP Limit specified in the Minister of Finance's Regulation, which is set at 20%. Monitoring of market risk exposure is conducted on a daily basis.
4. In addition to the above, gap management and sensitivity analysis are also conducted to manage market risk resulting from changes in interest rates and exchange rates.
5. Indonesia Eximbank also sets specific transaction limits for banking book transactions, including counterparty limits and dealer limits.
6. In supporting market risk management infrastructure, Indonesia Eximbank has the Treasury Dealing System (TDS) and market risk management tools. Market data is obtained from Reuters, Bloomberg, and other independent sources.
7. Operationally, regulations/policies related to the market are supplemented with the Board of Directors Regulation on Indonesia Eximbank General Treasury Policy, Executive Director Regulation on Treasury Transaction Limits, and Treasury Product Manual.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan LPEI untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari Aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LPEI. LPEI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban *financial* yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko likuiditas antara lain dilakukan melalui:

1. Pengelolaan risiko Likuiditas melalui *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) untuk ketersediaan atas keseluruhan *reserves* yang dipantau secara harian, mingguan, dan bulanan.
2. Penetapan dan pemantauan limit dilakukan secara berkala oleh Unit Kerja Tresuri.
3. Unit Kerja Tresuri melakukan pengelolaan aset yang aman, likuid dan menguntungkan dalam jumlah yang cukup dan dalam komposisi yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan profil risiko likuiditas.
4. Selain melalui ALCO, LPEI juga menyusun skenario likuiditas berdasarkan kondisi yang berbeda (normal, tidak normal, ekstrem) dan proyeksi arus kas harian serta profil maturitas bulanan sehingga dapat ditetapkan *contingency funding plan* untuk mengantisipasi terjadinya kondisi ekstrem dan menetapkan strategi yang sesuai dan akurat dalam mengantisipasi kondisi likuiditas di masa mendatang.
5. LPEI dapat melakukan penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan Pemerintah; Sertifikat Bank Indonesia; surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor; surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral; simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia; simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri; dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara dengan predikat AAA.
6. Dalam rangka optimalisasi Dana Penugasan Khusus, dana yang belum dapat digunakan dapat dilakukan penempatan pada instrumen keuangan yang miliki risiko terkendali dan likuid termasuk penempatan internal pada penugasan umum.
7. Selain mitigasi risiko likuiditas yang dilakukan, LPEI juga memiliki *sovereign status* yang membuat risiko inheren LPEI lebih rendah dibandingkan perbankan umumnya.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is the risk due to Indonesia Eximbank inability to fulfill its overdue liabilities from cash flow funding sources and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting Indonesia Eximbank activities and financial condition. Indonesia Eximbank manages liquidity risk in order to fulfill every financial obligation that has been promised in a timely manner, and can maintain an adequate and optimal level of liquidity.

To anticipate and control liquidity risk, among others, is done through:

1. Liquidity risk management through the Assets and Liabilities Committee (ALCO) for overall reserve availability monitored on a daily, weekly, and monthly basis.
2. Setting and monitoring limits are periodically conducted by the Treasury Unit.
3. The Treasury Unit manages safe, liquid, and profitable assets in sufficient amounts and in compositions adjusted to the business characteristics and liquidity risk profile.
4. In addition to ALCO, Indonesia Eximbank also develops liquidity scenarios based on different conditions (normal, abnormal, extreme) and projects daily cash flows and monthly maturity profiles to establish a contingency funding plan to anticipate extreme conditions and determine appropriate and accurate strategies to anticipate liquidity conditions in the future.
5. Indonesia Eximbank may place funds in the form of government securities; Bank Indonesia Certificates; securities issued by donor government; securities issued by multilateral financial institutions; deposits in rupiah or foreign currencies at Bank Indonesia; deposits in domestic and/or foreign banks; and/or securities issued by State-Owned Enterprises with idAAA predicate.
6. In order to optimize the Special Assignment Fund, funds that cannot be used can be placed in financial instruments that have controlled and liquid risks including internal placement in general assignments.
7. In addition to the liquidity risk mitigation measures, Indonesia Eximbank also has sovereign status, making its inherent risk lower compared to general banking.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional LPEI. Risiko operasional sangat berhubungan dengan kelengkapan dan tingkat efektivitas dari sistem, prosedur dan kontrol dalam lingkungan kegiatan usaha serta kemampuan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kinerja usaha LPEI. Penerapan manajemen risiko operasional dilakukan terhadap setiap aktivitas yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat serta komprehensif. Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko operasional antara lain dilakukan melalui:

1. Pengelolaan Risiko Operasional LPEI dituangkan dalam Standar Pedoman Operasional (SPO) Op*erational Risk Management* (ORM) dan SPO *Risk & Control Self-Assessment* (RCSA).
2. LPEI menetapkan 8 orang *Designated Compliance and Operational Risk* (DCOR) *Officer* untuk melakukan pengawasan terhadap risiko operasional.
3. Penerapan RCSA telah dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengukur Risiko Operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif.
4. Pada tahun 2023, sedang dilakukan proses implementasi sistem ORM untuk menunjang pengelolaan Risiko Operasional yang lebih terintegrasi.
5. Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko Operasional secara *enterprise* dilakukan secara berkala dalam Profil Risiko Operasional.
6. Salah satu *tools* dalam meminimalkan risiko operasional dalam kondisi darurat atau bencana yang diakibatkan oleh faktor alam atau perbuatan manusia yang mengganggu kegiatan usaha yaitu dengan implementasi *Business Continuity Plan*/ BCP.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Proses manajemen Risiko Hukum yang diterapkan adalah sebagai berikut:

Operational risk

Operational risk is caused by inadequacies and/or malfunctions of internal processes, human errors, system failures, or external constraints. Operational risk is closely related to the completeness and effectiveness of systems, procedures, and controls within the business environment, as well as the capabilities of human resources that can affect Indonesia Eximbank business performance. The implementation of operational risk management is carried out for every activity integrated into a system and accurate and comprehensive risk management process. To anticipate and control operational risk, measures include:

1. Indonesia Eximbank Operational Risk Management is outlined in the Operational Risk Management (ORM) Standard Operating Guidelines (SPO) and Risk & Control Self-Assessment (RCSA) SPO.
2. Indonesia Eximbank has appointed 8 Designated Compliance and Operational Risk (DCOR) Officers to monitor operational risk.
3. RCSA implementation has been conducted to identify and measure qualitative and predictive Operational Risks.
4. In 2023, the ORM system implementation process is being conducted to support a more integrated Operational Risk management.
5. Identification, measurement, control and monitoring of Operational Risk on an enterprise basis is carried out periodically in the Operational Risk Profile.
6. One of the tools in minimizing operational risks in emergency or disaster conditions caused by natural factors or human actions that disrupt business activities is the implementation of a Business Continuity Plan/BCP.

Legal Risk

Legal risk is the risk brought on by lawsuits and/or judicial shortcomings. This risk arises as a result of, among other things, a lack of supporting laws and regulations or flaws in the engagement, such as a failure to comply with the contract's legal requirements or inadequate collateral. The Legal Risk management process implemented is as follows:

1. Identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Hukum, antara lain melalui:
   a. Kajian hukum;
   b. Pemberian pendapat hukum (*legal opinion*); dan
   c. Pembuatan rancangan dokumentasi hukum (*legal drafting*) termasuk melakukan strandarisasi perjanjian.
2. Dalam mengukur/menilai Risiko Hukum, dapat menggunakan parameter atau indikator:
   a. Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan;
   b. Kelemahan dalam perikatan atau kerja sama; dan
   c. Proses penyelesaian sengketa.
3. Dalam rangka melakukan langkah-langkah pengendalian Risiko Hukum, maka dapat dilakukan beberapa hal, antara lain:
   a. Unit Kerja yang membidangi Hukum melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi hukum dan format standar perjanjian LPEI, kontrak perjanjian antara LPEI dengan nasabah, serta kontrak dan perjanjian antara LPEI dengan pihak lain, untuk menilai relevansi serta efektivitas guna mengecek validitas ketentuan dalam kontrak dan perjanjian tersebut.
   b. Unit Kerja yang membidangi hukum dapat melakukan pendampingan hukum.
   c. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Risiko Hukum, LPEI dapat dibantu oleh pihak eksternal yang ahli di bidang Hukum.
4. Dalam rangka melakukan langkah-langkah pemantauan Risiko Hukum, maka dapat dilakukan beberapa hal, antara lain:
   a. Unit kerja yang membidangi Hukum secara berkala melakukan pemantauan terhadap proses penyelesaian sengketa dan menilai potensi kerugian yang dapat dialami LPEI.
   b. Melakukan *review* secara berkala terhadap syarat dan ketentuan perjanjian yang berlaku agar tetap sah dan relevan.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat LPEI tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LPEI. Proses manajemen Risiko Kepatuhan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, antara lain:

1. Identification and analysis of several factors that may increase Legal Risk exposure, among others through:
   a. Legal review;
   b. Provision of legal opinion; and
   c. Drafting of legal documentation (legal drafting) including standardizing agreements.
2. In measuring Legal Risk Assessment, parameters or indicators may be used:
   a. Absence or changes in laws and regulations;
   b. Weaknesses in agreements or cooperation; and
   c. Dispute resolution process.
3. In order to take steps to control Legal Risk, several things can be done, among others:
   a. The Working Unit in charge of Law conducts a review of legal documentation and standard format of Indonesia Eximbank agreements, contracts between Indonesia Eximbank and customers, as well as contracts and agreements between LPEI and other parties, to assess the relevance and effectiveness to check the validity of the provisions in the contracts and agreements.
   b. The Work Unit in charge of law may provide legal assistance.
   c. In carrying out the Legal Risk control function, Indonesia Eximbank may be assisted by external parties who are experts in the field of Law.
4. In order to conduct Legal Risk monitoring steps, several things can be done, among others:
   a. The working unit in charge of Law periodically monitors the dispute resolution process and assesses the potential losses that can be experienced by Indonesia Eximbank.
   b. Conduct periodic review of the terms and conditions of the applicable agreement to keep it valid and relevant.

Compliance risk

Compliance risk is the risk associated with Indonesia Eximbank failing to adhere to and/or carry out the relevant laws and regulations. The Compliance Risk management process implemented is as follows:

1. Identify and analyze several factors that may increase Compliance Risk exposure, among others:

a. Melakukan penerapan *Customer Due Diligence* melalui proses identifikasi dan verifikasi nasabah, serta melakukan penilaian profil risiko nasabah/calon nasabah;
b. Melakukan kajian dan pemberian advis yang independen;
c. Melakukan Uji Kepatuhan terhadap proposal bisnis;
d. Melakukan penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM);
e. Melakukan uji petik kepatuhan syariah atas pemenuhan prinsip Syariah atas transaksi berdasarkan prinsip Syariah yang. Uji petik ini dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi kepatuhan Syariah – Unit Usaha Syariah.
f. Melakukan uji petik atas kecukupan dan efektivitas pelaksanaan *self-assessment* uji kepatuhan dan penerapan APU PPT PPPSPM yang dilaksanakan oleh Unit Bisnis.
g. Melakukan pemetaan dan identifikasi risiko terhadap unit kerja/aktivitas/area yang memiliki tingkat kemungkinan dan/atau dampak praktik gratifikasi.
h. Melakukan analisis transaksi keuangan nasabah untuk mengidentifikasi transaksi yang menyimpang dari profil/karakteristik/pola transaksi nasabah termasuk transaksi keuangan mencurigakan.
i. Menerapkan fungsi deteksi atas dugaan pelanggaran secara berkelanjutan melalui pengelolaan sarana *Whistleblowing System* (WBS) dan pelaporan Gratifikasi.

2. Dalam mengukur/menilai Risiko Kepatuhan, dapat menggunakan parameter atau indikator:
   a. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan oleh LPEI.
   b. Frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau rekam jejak (*track record*) ketidakpatuhan LPEI.
   c. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku bagi LPEI, atau standar bisnis yang berlaku umum. Pengukuran atas parameter ini mencakup antara lain pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan, standar akuntansi, kode etik, ataupun standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor jasa keuangan.
   d. Tindak lanjut atas pelanggaran termasuk pemenuhan atas rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya.

a. Implementing Customer Due Diligence through the process of customer identification and verification, as well as assessing the risk profile of customers/prospective customers;
b. Conducting reviews and providing independent advice;
c. Conducting Compliance Test on business proposals;
d. Implementing Anti-Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Weapons of Mass Destruction Proliferation Financing Prevention (AML PPT PPPSPM);
e. Conducting a sharia compliance test on the fulfillment of sharia principles for transactions based on sharia principles. This test is conducted by the Working Unit in charge of Sharia compliance - Sharia Business Unit.
f. Conducting a test on the adequacy and effectiveness of the implementation of self-assessment of compliance test and implementation of AML/CFT PPPSPM implemented by the Business Unit.
g. Conduct risk mapping and identification of work units/activities/areas that have a level of possibility and/or impact of gratuity practices.
h. Analyzing customer financial transactions to identify transactions that deviate from the profile/characteristics/pattern of customer transactions including suspicious financial transactions.
i. Implementing the detection function of alleged violations on an ongoing basis through the management of the Whistleblowing System (WBS) and Gratification reporting facilities.

2. In measuring/assessing Compliance Risk, may use parameters or indicators:
   a. Type and significance of violations committed by Indonesia Eximbank.
   b. Frequency of violations (including sanctions) or track record of Indonesia Eximbank non-compliance.
   c. Violations of laws and regulations, provisions applicable to Indonesia Eximbank, or generally accepted business standards. Measurement of this parameter includes, among others, violations of tax provisions, accounting standards, codes of ethics, or other standards generally applicable to the financial services sector.
   d. Follow-up on violations including the fulfillment of action plans submitted to the Financial Services Authority and/or other regulators.

3. Dalam rangka melakukan langkah-langkah pengendalian Risiko Kepatuhan, maka dapat dilakukan beberapa hal, antara lain:
   a. Menyediakan mekanisme dan sarana pengaduan melalui sarana *Whistleblowing System* (WBS).
   b. Menyediakan mekanisme dan sarana pelaporan Gratifikasi.
   c. Menunjuk petugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) LPEI sebagai perpanjangan tangan KPK dalam melaksanakan fungsi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan LPEI.
   d. Membentuk unit kerja yang membidangi kepatuhan Syariah di Unit Usaha Syariah sebagai perpanjangan tangan DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemenuhan prinsip Syariah atas produk dan aktivitas berdasarkan prinsip Syariah di lingkungan LPEI.
   e. Menyusun peraturan internal terkait dengan fungsi kepatuhan, termasuk kegiatan reviu dan pengkinian secara berkala.
   f. Menyediakan media pembelajaran terkait budaya kepatuhan termasuk prinsip Syariah, antara lain dapat berupa materi budaya kepatuhan dalam *Learning Management System* maupun media lainnya;
   g. Melakukan kegiatan uji kepatuhan, uji petik (termasuk uji petik kepatuhan Syariah yang dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kepatuhan Syariah), dan pemantauan transaksi.
   h. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemenuhan komitmen dan pelaporan wajib kepada regulator.
   i. Mengelola register risiko Kepatuhan dan register temuan audit (internal dan eksternal) Divisi Kepatuhan.
   j. Mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
4. Pemantauan terhadap Risiko Kepatuhan dilakukan antara lain dengan:
   a. Melakukan *reminder* dan pemantauan secara berkelanjutan atas kewajiban pelaporan dan komitmen LPEI kepada regulator ataupun *stakeholders* lainnya, termasuk melakukan *follow up* untuk memastikan kesesuaian dan ketepatan waktu pelaporan.
   b. Memantau peraturan internal yang terdampak oleh diberlakukannya peraturan eksternal baru.
   c. Memantau pemenuhan permintaan regulator, termasuk berkoordinasi dan melakukan tindak lanjut dengan pihak terkait.

3. In order to carry out Compliance Risk control measures, several things can be done, among others:
   a. Provide mechanisms and means of complaints through the Whistleblowing System (WBS).
   b. Providing mechanisms and means of reporting Gratuities.
   c. Appointing the Indonesia Eximbank Gratification Control Unit (UPG) officer as an extension of the KPK in carrying out the Gratification Control function within Indonesia Eximbank.
   d. Establishing a work unit in charge of Sharia compliance in the Sharia Business Unit as an extension of the DPS in carrying out the function of supervision and fulfillment of Sharia principles on products and activities based on Sharia principles within Indonesia Eximbank.
   e. Develop internal regulations related to the compliance function, including periodic review and update activities.
   f. Provide learning media related to compliance culture including Sharia principles, among others in the form of compliance culture materials in the Learning Management System or other media;
   g. Conducting compliance test activities, petition tests (including Sharia compliance petition tests conducted by the working unit in charge of Sharia compliance), and transaction monitoring.
   h. Carry out monitoring and evaluation of the fulfillment of commitments and mandatory reporting to regulators.
   i. Manage the Compliance risk register and audit findings register (internal and external) of the Compliance Division.
   j. Communicating policies to all employees at every level of the organization.
4. Monitoring of Compliance Risk is carried out among others by:
   a. Conducting reminders and continuous monitoring of Indonesia Eximbank's reporting obligations and commitments to regulators or other stakeholders, including follow-up to ensure suitability and timeliness of reporting.
   b. Monitoring internal regulations affected by the enactment of new external regulations.
   c. Monitor the fulfillment of regulatory requests, including coordination and follow-up with relevant parties.

d. Memantau pengelolaan *database* regulasi eksternal secara berkala.
e. Memantau pemenuhan catatan dan tindak lanjut hasil uji kepatuhan secara berkala.
f. Memantau realisasi pengkinian data nasabah untuk memastikan ketepatan waktu pemenuhan laporan kepada regulator sesuai komitmen yang telah disampaikan.
g. Memantau sanksi/denda atas pelanggaran yang dilakukan oleh LPEI, termasuk menjalin komunikasi aktif dengan regulator dan otoritas pengawas terkait.
h. Memantau transaksi keuangan nasabah untuk mengidentifikasi transaksi yang menyimpang dari profil/karakteristik/pola transaksi nasabah termasuk Transaksi Keuangan Mencurigakan.
i. Pemantauan secara berkelanjutan terhadap register risiko Kepatuhan dan register temuan audit (internal dan eksternal) yang terdapat pada Satuan Kerja Kepatuhan.
j. Pemantauan secara berkala atas laporan dugaan pelanggaran melalui pengelolaan sarana *Whistleblowing System* (WBS) LPEI dan pelaporan Gratifikasi.

d. Monitor the management of the external regulatory database on a regular basis.
e. Monitor the fulfillment of records and follow-up of compliance test results on a regular basis.
f. Monitor the realization of customer data updates to ensure the timeliness of the fulfillment of reports to regulators in accordance with the commitments that have been submitted.
g. Monitor sanctions/fines for violations committed by Indonesia Eximbank, including establishing active communication with regulators and relevant supervisory authorities.
h. Monitor customer financial transactions to identify transactions that deviate from the profile/characteristics/pattern of customer transactions including Suspicious Financial Transactions.
i. Continuous monitoring of the Compliance risk register and audit findings register (internal and external) in the Compliance Working Unit.
j. Periodic monitoring of reports of alleged violations through the management of Indonesia Eximbank Whistleblowing System (WBS) and Gratification reporting.

Risiko Asuransi

Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan LPEI untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko *(underwriting)*, penetapan premi atau kontribusi *(pricing)*, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Insurance Risk

Insurance Risk is the risk of LPEI's failure to fulfill obligations to policyholders, insureds, and/or participants as a result of inadequate risk selection (underwriting), premium or contribution determination (pricing), use of reinsurance, and/or claim handling.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko asuransi antara lain dilakukan melalui:

1. Risiko Asuransi yang dihadapi oleh LPEI dapat bersumber dari berbagai kegiatan usaha LPEI, antara lain jenis produk yang dimiliki, jangka waktu produk, risiko yang dijamin, dan manfaat yang diberikan perusahaan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
2. Pada tataran eksposur risiko secara portofolio, eksposur risiko asuransi senantiasa dipantau dan dilaporkan secara berkala kepada Manajemen antara lain melalui penyampaian laporan manajemen atas eksposur risiko utama, *Enterprise Risk Management Report* (ERMR) dan pembahasan melalui forum secara berkala.
3. LPEI telah memiliki Sistem Internal *Credit Risk Rating* untuk mendukung infrastruktur pengelolaan risiko asuransi dan *CARE System* sebagai pendukung operasional bisnis Asuransi.

To anticipate and control insurance risks, among others, is done through:

1. Insurance risks faced by Indonesia Eximbank may originate from various business activities of Indonesia Eximbank, including the type of product owned, the product period, the risks guaranteed, and the benefits provided by the company for policyholders, insured, or participants.
2. At the portfolio level, insurance risk exposures are monitored and reported regularly to Management through the submission of management reports on major risk exposures, Enterprise Risk Management Report (ERMR) and discussions through regular forums.
3. Indonesia Eximbank has an Internal Credit Risk Rating System to support insurance risk management infrastructure and CARE System to support Insurance business operations.

4. Secara operasional peraturan/kebijakan terkait risiko asuransi telah memiliki ketentuan internal tentang Kebijakan Asuransi, Peraturan Direktur Eksekutif tentang Standar Pedoman Produk dan Operasional Asuransi, serta Standar Pedoman tentang Komite.
5. Sebagai tambahan dalam pengendalian risiko asuransi yaitu dengan menjaga komposisi tingkat konsentrasi pertanggungan asuransi pada level sesuai limit yang telah ditentukan dan Kecukupan pencadangan klaim kegiatan asuransi sesuai dengan pembentukan Retensi Sendiri tidak melebihi 2 kali modal disetor.

Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko akibat LPEI ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Investasi, antara lain melalui identifikasi pembiayaan yang disalurkan dalam akad imbal hasil, melalui penilaian yang komprehensif terhadap antara lain karakter nasabah, kemampuan mengelola usaha nasabah, kondisi keuangan nasabah, kolateral/jaminan nasabah, dan kondisi ekonomi yang terkait dengan usaha nasabah.

Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan LPEI kepada pihak pemberi pendanaan karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima LPEI dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku pihak pemberi pendanaan kepada LPEI. Identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Imbal Hasil, antara lain dengan:

1. Mengategorikan sumber pendanaan dan pembiayaan yang memiliki akad bagi hasil dan utang piutang;
2. Mengategorikan diversifikasi eksposur pendanaan dan pembiayaan yang disalurkan dalam akad Imbal Hasil;
3. Mengidentifikasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat imbal hasil yang dibayarkan dan/atau diterima.

Aktivitas Manajemen Risiko tahun 2023

Pada tahun 2023, aktivitas Manajemen Risiko difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu:

1. Penilaian tingkat *maturity* penerapan manajemen risiko.
2. *Governance Risk & Compliance* (GRC) yang kuat dan modern, melalui:

4. Operationally, regulations/policies related to insurance risk have internal provisions on Insurance Policy, Executive Director Regulation on Standard Guidelines for Insurance Products and Operations, and Standard Guidelines on Committees.
5. In addition, insurance risk is controlled by maintaining the composition of the concentration level of insurance coverage at a level in accordance with predetermined limits and the adequacy of insurance activity claim reserves in accordance with the formation of Own Retention not exceeding 2 times the paid-up capital.

Investment Risk

Investment Risk is the risk due to LPEI bearing the loss of the customer's business financed in profit sharing-based financing. Identification and analysis of several factors that can increase the exposure of Investment Risk, among others, through the identification of financing disbursed in a profit sharing contract, through a comprehensive assessment of the character of the customer, the ability to manage the customer's business, the customer's financial condition, collateral/customer guarantee, and economic conditions related to the customer's business.

Return Risk

Return Risk is the risk due to changes in the level of return paid by Indonesia Eximbank to the funding party due to changes in the level of return received by Indonesia Eximbank from the distribution of funds, which may affect the behavior of the funding party to Indonesia Eximbank. Identification and analysis of several factors that may increase Return Risk exposure, among others by:

1. Categorizing funding and financing sources that have profit sharing and debt and credit contracts;
2. Categorizing the diversification of funding and financing exposures channeled in the yield contract;
3. Identify external factors that may affect the level of returns paid and/or received.

Risk Management Activities in 2023

In 2023, Risk Management activities are focused on several key aspects, namely:

1. Assessment of the maturity level of risk management implementation.
2. Strong and modern Governance Risk & Compliance (GRC), through:

a. Implementasi *Operational Risk Management* (ORM);
b. Meningkatkan fungsi *Early Warning Detection*; dan
c. Implementasi *new spreadsheet.*

3. Implementasi GRC *Roadmap* dan Pemberdayaan *Designated Compliance and Operational Risk* (DCOR) *Officer*.
4. Penguatan budaya kerja (*risk awareness*, kepatuhan, integritas dan profesionalisme) pada setiap pegawai.
5. Penyusunan dan pengkinian Standar Pedoman dengan ketentuan terkini, termasuk Standar Pedoman Operasional (SPO) Manajemen Risiko *Enterprise*, SPO ORM, SPO Penilaian Tingkat Kesehatan, dan SPO *Risk & Control Self-Assessment* (RCSA).
6. Penajaman mandat Lembaga dalam aktivitas bisnis.

Tantangan Manajemen Risiko di Tahun 2023

Pada tahun 2023, perkembangan aktivitas ekonomi dunia, termasuk mitra dagang utama ekspor Indonesia melanjutkan pelemahan kinerja ekspor. Indonesia semakin terdampak, pertumbuhan ekspor tumbuh negatif sejalan dengan penurunan harga komoditas ekspor unggulan. Setidaknya ada tiga tantangan yakni Risiko Likuiditas yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti harga shipping kembali mengalami pelemahan yang disebabkan masih berjalannya perang Rusia dan Ukraina serta perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok serta perang yang terjadi di Palestina memperburuk arus pengiriman ekspor impor antar negara.

Risiko makroekonomi seperti kenaikan harga energi, serta kenaikan suku bunga The Fed sangat tinggi akan berimplikasi pada penguatan Dolar yang menekan sejumlah mata uang di berbagai negara termasuk Rupiah.

Lebih lanjut, tantangan Risiko operasional disebabkan oleh cepatnya digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti digitalisasi ekonomi dan keuangan, sistem pembayaran dan proses kerja.

Selain itu, terdapat potensi Risiko Stratejik yang berkaitan dengan kondisi dalam negeri sehubungan proses politik yang akan berlangsung di Indonesia, serta pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

a. Implementation of Operational Risk Management (ORM);
b. Improving Early Warning Detection function; and
c. Implementation of new spreadsheet.

3. Implementation of GRC Roadmap and Empowerment of Designated Compliance and Operational Risk (DCOR) Officer.
4. Strengthening work culture (risk awareness, compliance, integrity and professionalism) in every employee.
5. Preparation and updating of Standard Guidelines with the latest provisions, including Standard Operational Guidelines (SPO) for Enterprise Risk Management, SPO ORM, SPO Health Level Assessment, and SPO Risk & Control Self-Assessment (RCSA).
6. Refinement of the Institute's mandate in business activities.

Risk Management Challenges in 2023

In 2023, the development of world economic activity, including the main trading partners of Indonesian exports, continued to weaken the export performance. Indonesia is increasingly affected by this condition, reflected on the decrease in the export growth, in line with the decline in the prices of leading export commodities.There are at least three challenges, including liquidity risk caused by several factors such as shipping prices that undergoing weakening due to the still running of the Russian and Ukraine War and the United States and Chinese trade war as well as the war in Palestine worsening the flow of import exports between countries.

Macroeconomic risks such as the rising energy prices, as well as the Fed's very high interest rate hike will have implications for the strengthening of the Dollar which pressures several currencies in various countries including the Rupiah.

Furthermore, operational risk challenges of are caused by rapid digitalization in various aspects of life, such as economic and financial digitalization, payment systems and work processes.

In addition, there are potential strategic risks related to domestic conditions in relation to the political process that will take place in Indonesia, as well as the relocation of the national capital to the Capital City of the Archipelago (IKN).

Terdapat juga beberapa tantangan yang menjadi perhatian di LPEI seperti cyber security risk, perubahan regulasi, dan tuntutan hukum sejalan dengan proses hukum yang sedang berjalan.

Implementasi Kebijakan Tahun 2023

Pada tahun 2023, kebijakan penerapan manajemen risiko di LPEI disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, serta ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LPEI. Dasar kebijakan penerapan manajemen risiko LPEI mencakup beberapa aspek yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 17 UU No. 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah. Penerapan prinsip manajemen risiko mencakup pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat.
2. PMK No. 208/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. Kebijakan penerapan manajemen risiko di LPEI setidaknya mencakup pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
3. POJK No. 09/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengawasan LPEI.
4. SEOJK No. 15/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang mengatur penilaian tingkat Kesehatan LPEI.
5. Peraturan Dewan Direktur No. 0017/PDD/12/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Enterprise Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. PDD tersebut berisi ketentuan manajemen risiko secara umum mencakup kerangka penerapan Manajemen Risiko.
6. Peraturan Direktur Eksekutif No.0027/PDE/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Manajemen Risiko *Enterprise* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

There are also several challenges that are of concern at Indonesia Eximbank, such as cyber security risk, regulatory changes, and lawsuits in line with the ongoing legal process.

Implementation of Policy in 2023

In 2023, the risk management implementation policy at Indonesia Eximbank was adjusted according to the institution's business objectives, policies, and the size and complexity of its operations. The basis of Indonesia Eximbank risk management implementation policy includes several aspects described as follows:

1. Article 17 of Act No. 2/2009 concerning Indonesia Eximbank stipulates that in carrying out its duties, Indonesia Eximbank is obliged to apply the principles of good corporate governance, risk management, and customer identification. The application of risk management principles includes compliance with minimum capital adequacy, active supervision, and compliance with market discipline regarding inherent risks.
2. Minister of Finance Regulation No. 208/2021 dated 30 December 2021, concerning Governance, Risk Management Principles, and Customer Identification of Indonesia Eximbank. The risk management implementation policy at Indonesia Eximbank covers at least active supervision by the Board of Directors and Executive Directors, adequacy of policies, procedures, and risk limit setting, adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes as well as risk management information systems, and comprehensive internal control systems.
3. Financial Services Authority Regulation No. 09/2022 dated 23 June 2022, concerning Indonesia Eximbank Supervision.
4. Financial Services Authority Regulation No. 15/2022 dated 7 September 2022, concerning the Assessment of the Health Level of the Indonesian Export Financing Agency, which regulates the assessment of Indonesia Eximbank health level.
5. Board of Directors Regulation No. 0017/PDD/12/2022 dated 2 December 2022, concerning the Enterprise Risk Management Policy of the Indonesian Export Financing Agency. The regulation contains provisions on risk management in general, including the risk management framework.
6. Executive Director Regulation No. 0027/PDE/12/2023 dated 7 December 2023, concerning on Enterprise Risk Management of the Indonesian Export Financing Agency.

Implementasi manajemen risiko merupakan tanggung jawab dari seluruh insan LPEI sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Manajemen juga berperan secara aktif untuk memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

The implementation of risk management is the responsibility of all individuals within Indonesia Eximbank according to their respective functions and authorities. Management also plays an active role in ensuring an adequate organizational structure, defining clear tasks and responsibilities for each unit, and ensuring the quantity and quality of Human Resources to support effective Risk Management implementation.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

LPEI secara konsisten melaksanakan peninjauan terhadap efektivitas Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen Risiko tetap relevan dengan tujuan organisasi, serta dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul. Selama proses peninjauan, setiap aspek dari sistem dievaluasi, termasuk keefektifan kontrol internal, pemantauan risiko, dan respons terhadap perubahan kondisi bisnis dan lingkungan eksternal.

Review of Risk Management System Effectiveness

Indonesia Eximbank consistently review the effectiveness of the implemented Risk Management System. Reviews are conducted to ensure that the Risk Management System remains relevant to the organization's objectives and can identify, measure, and manage potential risks. During the review process, every aspect of the system is evaluated, including the effectiveness of internal controls, risk monitoring, and responses to changes in business conditions and the external environment.

Salah satu bentuk peninjauan efektivitas dilaksanakan dalam *Risk Maturity Survey*. Penilaian *Risk Maturity Survey* 2023 mendapatkan hasil 3,97 dari 5 (semakin besar semakin baik). Dapat dikatakan bahwa pegawai LPEI secara umum berpersepsi bahwa LPEI telah dapat mendefinisikan risikonya dan mendekati kepada pengelolaan risiko yang lebih baik. Terhadap penilaian tersebut, LPEI dapat merumuskan program/inisiatif untuk meningkatkan budaya peduli risiko yang diperlukan di lingkungan LPEI.

One form of effectiveness review is carried out in the Risk Maturity Survey. The 2023 Risk Maturity Survey assessment received a result of 3.97 out of 5 (the greater the better). It can be said that Indonesia Eximbank employees generally perceive that Indonesia Eximbank has been able to define its risks and approach better risk management. Based on this assessment, Indonesia Eximbank can formulate programs/initiatives to improve the risk awareness culture needed within Indonesia Eximbank.

Hasil dari peninjauan ini membentuk dasar bagi pengambilan keputusan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen Risiko tetap adaptif, proaktif, dan efektif dalam mendukung tujuan dan strategi bisnis LPEI.

The results of these reviews form the basis for decision-making regarding necessary improvements and enhancements to ensure that the Risk Management System remains adaptive, proactive, and effective in supporting Indonesia Eximbank goals and business strategies.

Pernyataan atas Kecukupan Manajemen Risiko

Pernyataan atas kecukupan sistem manajemen risiko di LPEI telah tercermin dan merupakan bagian dari Laporan Profil Risiko Lembaga yang disampaikan secara berkala oleh Direktur Eksekutif kepada Otoritas Jasa Keuangan, khususnya terkait penilaian atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang meliputi 4 aspek sebagai berikut:

a. Aspek I, Tata Kelola Risiko;
b. Aspek II, Kerangka Manajemen Risiko;
c. Aspek III, Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen; dan

Statement on the Adequacy of Risk Management

The statement on the adequacy of the risk management system at Indonesia Eximbank has been reflected and is part of the institution's Risk Profile Report submitted periodically by the Executive Director to the Financial Services Authority, especially regarding the assessment of the Quality of Risk Management Implementation (KPMR), which includes the following 4 aspects:

a. Aspect I, Risk Governance;
b. Aspect II, Risk Management Framework;
c. Aspect III, Risk Management Process, Adequacy of Human Resources, and Information Management System; and

d. Aspek IV, Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha LPEI.

Hasil penilaian atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit tahun 2023 berada pada tingkat 3 yang bermakna "Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit cukup memadai." Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.

Analisis penilaian yang dilakukan tidak hanya secara individual tetapi juga secara keseluruhan dengan memperhatikan faktor penyebab (*root cause analysis*), keterkaitan antar rasio (*linkage analysis*) dan dampak suatu rasio terhadap rasio lain atau kinerja LPEI (*impact analysis*) dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas risiko yang dinilai dalam menentukan peringkat profil risiko. Selain hal tersebut, penilaian rasio juga dilakukan dengan memperhatikan *benchmark* pada industri/*peer group*.

Rencana Strategis Manajemen Risiko tahun 2024

LPEI telah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang manajemen risiko untuk tahun 2024, sebagai berikut:

1. Perbaikan kualitas aset Lembaga.
2. Peningkatan *Risk Maturity Lembaga*.
3. Penguatan *Operational Risk Management*.
4. Implementasi *Governance, Risk, & Compliance* (GRC) *Roadmap*, termasuk pemberdayaan *Designated Compliance and Operational Risk* (DCOR) *Officer*.
5. Penyempurnaan *Risk Management tools*.
6. Evaluasi terhadap *Market & Liquidity Risk Management*.
7. Penyempurnaan dan pengkinian ketentuan/produk sehubungan dengan transformasi yang berjalan

d. Aspect IV, Adequacy of Risk Control Systems, considering the characteristics and complexity of LPEI's operations.

The results of the assessment of the Quality of Risk Management Implementation on a composite basis in 2023 are at level 3, which means "The Quality of Risk Management Implementation on a composite basis is adequate." Although the minimum requirements are met, there are some weaknesses that require management attention and improvement.

The assessment analysis is not only done individually but also comprehensively considering root cause analysis, linkage analysis between ratios, and the impact of one ratio on another or on Indonesia Eximbank's performance, taking into account the significance and materiality of the assessed risks in determining the risk profile rating. In addition, ratio assessments are also conducted considering benchmarks in the industry/peer group.

Strategic Risk Management Plan for 2024

Indonesia Eximbank has developed an implementation plan for risk management activities for 2024, as follows:

1. Improvement of the Institution's asset quality.
2. Improvement of Risk Maturity of the Institution.
3. Strengthening Operational Risk Management.
4. Implementation of Governance, Risk, & Compliance (GRC) Roadmap, including empowerment of Designated Compliance and Operational Risk (DCOR) Officer.
5. Enhancement of Risk Management tools.
6. Evaluation of Market & Liquidity Risk Management.
7. Refinement and update of provisions/products in connection with the ongoing transformation.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang diterapkan di Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia (LPEI) memiliki tujuan yang komprehensif dalam mendukung pencapaian berbagai aspek kinerja lembaga. SPI tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan, tetapi juga dirancang untuk menjamin efektivitas dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Melalui implementasi SPI yang cermat, LPEI dapat memastikan keandalan dalam penyusunan laporan keuangan, memvalidasi kontrol operasional baik dari segi keuangan maupun operasional, serta menilai kelayakan pengendalian finansial. Selain itu, SPI juga menjadi instrumen yang efektif dalam memastikan bahwa LPEI selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, SPI berperan sebagai pilar utama dalam mencapai tujuan-tujuan yang memperkuat posisi dan integritas lembaga di mata pemangku kepentingan.

Internal Control System (ICS) implemented at Indonesia Eximbank has comprehensive objectives to support the achievement of various aspects of institutional performance. The ICS is not only aimed at enhancing value for stakeholders but also designed to ensure overall operational effectiveness and efficiency. Through careful implementation of the ICS, Indonesia Eximbank can ensure reliability in financial reporting, validate operational controls both financially and operationally, and assess the adequacy of financial controls. Additionally, the ICS serves as an effective instrument to ensure that Indonesia Eximbank always complies with applicable laws and regulations, enabling it to operate in accordance with the prevailing provisions. Thus, the ICS at Indonesia Eximbank not only functions as an internal audit tool but also as a key pillar in achieving goals that strengthen the institution's position and integrity in the eyes of stakeholders.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Setiap tahun, dilakukan penilaian secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di LPEI. Penilaian ini mengacu pada parameter yang diadopsi dari *Framework* Pengendalian Internal yang dikeluarkan oleh organisasi COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission). Adapun parameter yang dievaluasi melibatkan komponen-komponen utama, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian,
2. Penilaian Risiko,
3. Aktivitas Pengendalian,
4. Informasi dan Komunikasi, serta
5. Pemantauan.

Mengacu pada COSO *Framework* 2013, kerangka kerja Pengendalian Internal LPEI menerapkan 17 (tujuh belas) prinsip berikut ini:

1. Menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
2. Melakukan pengawasan yang bertanggung jawab.
3. Menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab.
4. Menunjukkan komitmen terhadap kompetensi.
5. Menegakkan akuntabilitas.
6. Menentukan tujuan yang sesuai.
7. Identifikasi dan analisis risiko.
8. Penilaian risiko atas *fraud*.

Framework of Internal Control System

Every year, periodic assessments are conducted on the effectiveness of the implementation of the Internal Control System at Indonesia Eximbank. This assessment refers to parameters adopted from the Internal Control Framework issued by the COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission) organization. The evaluated parameters involve the following main components:

1. Control Environment,
2. Risk Assessment,
3. Control Activities,
4. Information and Communication, and
5. Monitoring.

Referring to the COSO Framework 2013, the internal control framework at Indonesia Eximbank applies the following 17 principles:

1. Demonstrating commitment to integrity and ethical values.
2. Exercising oversight responsibility.
3. Establishing structure, authority, and responsibility.
4. Demonstrating commitment to competence.
5. Upholding accountability.
6. Setting appropriate objectives.
7. Identifying and analyzing risks.
8. Assessing risks related to fraud.

9. Identifikasi dan analisis perubahan yang signifikan.
10. Pemilihan dan pengembangan kegiatan pengendalian.
11. Pemilihan dan pengembangan pengendalian terhadap teknologi.
12. Implementasi melalui kebijakan dan prosedur.
13. Menggunakan informasi yang relevan.
14. Komunikasi secara internal.
15. Komunikasi secara eksternal.
16. Melakukan evaluasi yang berkelanjutan dan/atau evaluasi yang dilakukan terpisah.
17. Mengevaluasi dan mengkomunikasikan "*deficiencies*" (kelemahan).

Dengan menyusun evaluasi berdasarkan aspek-aspek tersebut, proses penilaian menjadi terstruktur dan komprehensif, memastikan bahwa setiap elemen dalam Sistem Pengendalian Internal dievaluasi dengan cermat dan secara komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh terhadap keberhasilan sistem tersebut, tetapi juga membantu identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Sehingga, hasil penilaian tidak hanya menjadi alat untuk memonitor efektivitas, tetapi juga sebagai landasan untuk pengembangan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis dan perubahan regulasi.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem Pengendalian Internal yang komprehensif, efektif, dan efisien perlu dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan LPEI. Penerapan Sistem Pengendalian Internal dimulai dari penetapan sasaran dan strategi di seluruh organisasi, identifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat memengaruhi sasaran dan strategi dimaksud, dan pengelolaan risiko agar tetap berada dalam batas toleransi.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal LPEI secara komprehensif adalah sebagai berikut:

1. Menjaga efektivitas dan efisiensi penggunaan aset.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak kerugian keuangan, termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

9. Identifying and analyzing significant changes.
10. Selecting and developing control activities.
11. Selecting and developing controls over technology.
12. Implementing through policies and procedures.
13. Using relevant information.
14. Communicating internally.
15. Communicating externally.
16. Conducting ongoing and/or separate evaluations.
17. Evaluating and communicating deficiencies.

By organizing evaluations based on these aspects, the assessment process becomes structured and comprehensive, ensuring that each element in the Internal Control System is carefully and comprehensively evaluated. This approach not only provides a comprehensive overview of the system's success but also helps identify areas that require improvement or enhancement. Thus, the assessment results serve not only as a tool for monitoring effectiveness but also as a foundation for sustainable development in facing business environment dynamics and regulatory changes.

Financial and Operational Controls

A comprehensive, effective, and efficient Internal Control System needs to be implemented to provide adequate assurance for achieving Indonesia Eximbak 's goals. The implementation of the Internal Control System starts with setting targets and strategies throughout the organization, identifying potential events that may affect these targets and strategies, and managing risks to stay within tolerance limits.

The comprehensive objectives of Indonesia Eximbak Internal Control System are as follows:

1. Maintaining the effectiveness and efficiency of asset utilization.
2. Ensuring the availability of more accurate reports.
3. Enhancing compliance with applicable regulations.
4. Reducing the impact of financial losses, including fraud and violations of prudential principles.
5. Improving organizational effectiveness and cost efficiency.

Dalam kerangka Sistem Pengendalian Internal LPEI, terdapat ketentuan dan kebijakan yang menuntut usaha untuk menjaga pembukuan dan menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Selain itu, terdapat kewajiban untuk mengungkapkan semua transaksi material yang dapat mempengaruhi perubahan nilai aset, kewajiban, dan modal. Tindakan ini diambil sebagai langkah preventif untuk mencegah penipuan dan menghindari penyalahgunaan keuangan.

Within the framework of Indonesia Eximbank Internal Control System, there are provisions and policies that require efforts to maintain bookkeeping and produce financial reports in accordance with applicable accounting principles. Additionally, there is an obligation to disclose all material transactions that may affect changes in asset values, liabilities, and equity. These actions are taken as preventive measures to prevent fraud and avoid financial abuse.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

LPEI berkomitmen kuat untuk selalu menjalankan praktik bisnis secara sehat dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam Sistem Pengendalian Internal di LPEI. SPI dirancang tidak hanya untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional LPEI tetapi juga untuk menjamin bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam implementasinya, kepatuhan LPEI terhadap peraturan perundang-undangan mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Kebijakan Internal LPEI
   SPI harus memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LPEI sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup penyesuaian dengan standar dan pedoman yang diterapkan oleh LPEI untuk memastikan konsistensi dan ketaatan internal.
2. Regulasi Pemerintah
   LPEI harus mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait operasional dan kebijakan pengendalian ekspor dan impor. Hal ini termasuk aturan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas dan pemerintah terkait lainnya yang memengaruhi kegiatan LPEI.
3. Standar Akuntansi Keuangan
   SPI juga harus memastikan bahwa LPEI mematuhi semua regulasi terkait keuangan, termasuk pengungkapan informasi keuangan yang akurat dan benar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
4. Perlindungan Terhadap Risiko Hukum
   SPI harus dirancang untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang berdampak bagi LPEI. Proses ini mencakup pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan penerapan langkah-langkah untuk meminimalkan potensi risiko hukum yang mungkin timbul.

Compliance with Laws and Regulations

Indonesia Eximbank is strongly committed to conducting business practices in a healthy manner and based on the prevailing laws and regulations in Indonesia. Compliance with laws and regulations is an essential element in Indonesia Eximbank Internal Control System (ICS). The ICS is designed not only to ensure the efficiency and effectiveness of Indonesia Eximbank operations but also to ensure that all activities are carried out in accordance with applicable legal provisions.

In its implementation, Indonesia Eximbank compliance with laws and regulations encompasses several aspects, including:

1. Internal Policies of Indonesia Eximbank
   The ICS must ensure that all activities carried out by Indonesia Eximbank comply with internal policies and procedures that have been established. This includes alignment with the standards and guidelines applied by Indonesia Eximbank to ensure internal consistency and compliance.
2. Government Regulations
   Indonesia Eximbank must comply with all regulations issued by the government related to export and import operations and policies. This includes rules established by supervisory authorities and other relevant government agencies that affect Indonesia Eximbank activities.
3. Financial Accounting Standards
   The ICS must also ensure that Indonesia Eximbank complies with all financial regulations, including accurate and proper financial information disclosure, in accordance with applicable Financial Accounting Standards.
4. Legal Risk Protection
   The ICS should be designed to identify and manage legal risks that may impact Indonesia Eximbank. This process includes a deep understanding of relevant laws and regulations and the implementation of measures to minimize potential legal risks.

5. Audit dan Pemantauan Kepatuhan
   Sebuah sistem audit internal yang kuat perlu diterapkan untuk secara teratur memeriksa dan memantau tingkat kepatuhan LPEI terhadap peraturan perundang-undangan. Proses ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, SPI LPEI bukan hanya berperan dalam melindungi lembaga dari risiko hukum, tetapi juga membangun integritas dan kepercayaan dari pemangku kepentingan serta otoritas pengawas. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), LPEI telah menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya temuan signifikan terkait kepatuhan LPEI terhadap peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan LPEI terhadap peraturan perundang-undangan merupakan hal yang penting untuk menjaga reputasi LPEI sebagai lembaga keuangan yang kredibel dan profesional. Kepatuhan tersebut juga merupakan bentuk komitmen LPEI dalam mendukung pertumbuhan ekspor nasional secara berkelanjutan.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

LPEI secara konsisten melakukan peninjauan terhadap efektivitas pengendalian internal melalui fungsi audit internal. Tindakan-tindakan yang diambil untuk memastikan pelaksanaan pemantauan yang efektif meliputi:

a. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi LPEI;
b. Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian internal;
c. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada LPEI dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
d. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi dan *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kajian ulang;

5. Compliance Audit and Monitoring
   A robust internal audit system needs to be implemented to regularly check and monitor Indonesia Eximbank compliance with laws and regulations. This process includes evaluating the effectiveness of internal controls and implementing necessary corrective actions.

By ensuring compliance with laws and regulations, Indonesia Eximbank ICS not only plays a role in protecting the institution from legal risks but also builds integrity and trust among stakeholders and regulatory authorities. Based on the examination conducted by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI), Indonesia Eximbank has demonstrated good compliance with applicable laws and regulations. This is evidenced by the absence of significant findings regarding Indonesia Eximbank compliance with laws and regulations.

Indonesia Eximbank compliance with laws and regulations is crucial to maintaining its reputation as a credible and professional financial institution. This compliance also demonstrates Indonesia Eximbank commitment to supporting sustainable national export growth.

Review of the Effectiveness of the Internal Control System

Indonesia Eximbank consistently reviews the effectiveness of internal control through the internal audit function. Measures taken to ensure effective monitoring include:

a. Ensuring that the monitoring function is clearly defined and well-structured within the Indonesia Eximbank organization;
b. Designating units/employees responsible for monitoring the effectiveness of internal control;
c. Establishing the appropriate frequency for monitoring activities based on the inherent risks to Indonesia Eximbank and the nature/frequency of changes in operational activities;
d. Integrating the Internal Control System into operational activities and providing routine reports such as accounting journals, management reviews, and reports on approvals of exceptions/deviations from established policies and procedures (justifications and irregularities) for subsequent review;

e. Melakukan kajian ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
f. Menetapkan informasi/*feedback* dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

Tahap pelaksanaan penilaian atas efektivitas sistem Pengendalian Internal mencakup kegiatan:

1. Proses rekapitulasi atas *self-assessment* Sistem Pengendalian Internal dari seluruh unit kerja LPEI, untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan pengendalian internal di LPEI.
2. Proses *review* dilakukan oleh Divisi Audit Internal.
3. Prosedur kompilasi dan dokumentasi hasil Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Internal.
4. Evaluasi atas *framework* penilaian atas sistem pengendalian internal.

Pernyataan Dewan Direktur atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Direktur telah meninjau kecukupan Sistem Pengendalian Internal di LPEI dan menyatakan bahwa pada tahun 2023 Sistem Pengendalian Internal berjalan dengan efektif dan memadai. LPEI telah berhasil mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal secara efektif dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional di seluruh tingkatan organisasi LPEI. Keberhasilan ini tercermin dari upaya LPEI dalam memastikan adanya:

1. Kegiatan usaha LPEI yang berjalan secara efisien dan efektif dalam penggunaan aset, maupun sumber daya lainnya dalam rangka melindungi LPEI dari risiko kerugian.
2. Informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan, yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kesesuaian pelaksanaan atas seluruh kegiatan usaha LPEI dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, otoritas pengawas, maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal; dan
4. Budaya risiko yang efektif pada organisasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di LPEI secara berkesinambungan.

e. Conducting reviews of documentation and evaluation results from units/employees assigned to monitoring;
f. Establishing feedback/information in an appropriate format and frequency.

The implementation phase of the assessment of the effectiveness of the Internal Control System includes activities:

1. Recapitulation process of the Self-Assessment of the Internal Control System from all Indonesia Eximbank units, to obtain an overview of the level of effectiveness of internal control implementation at Indonesia Eximbank.
2. Review process conducted by the Internal Audit Division.
3. Compilation procedure and documentation of the results of the Assessment of the Effectiveness of the Internal Control System.
4. Evaluation of the assessment framework for the internal control system.

Statement of the Board of Directors on the Adequacy of the Internal Control System

The Board of Directors has reviewed the adequacy of the Internal Control System at Indonesia Eximbank and stated that in 2023 the Internal Control System operated effectively and sufficiently. Indonesia Eximbank has successfully implemented the Internal Control System effectively in the conduct of business activities and operations at all levels of the Indonesia Eximbank organization. This success is reflected in Indonesia Eximbank efforts to ensure:

1. Efficient and effective business activities at Indonesia Eximbank in the use of assets and other resources to protect Indonesia Eximbank from the risk of loss.
2. Financial and management information that is accurate, complete, timely, and relevant, necessary for making appropriate and accountable decisions.
3. Compliance with all Indonesia Eximbank business activities with applicable laws and regulations, both those issued by the Government, supervisory authorities, and internal policies, regulations, and procedures; and
4. An effective risk culture throughout the organization to identify weaknesses and assess deviations early and continuously reassess the reasonableness of policies and procedures existing at Indonesia Eximbank.

Berdasarkan hasil penilaian penerapan Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan secara *self assesment* di tahun 2023, LPEI mendapatkan nilai "4,2" yang menunjukkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di LPEI termasuk dalam kategori "baik." Hasil penilaian tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan hasil *self assesment* tahun 2022 yang mendapatkan nilai "4,12" yang menunjukkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di LPEI termasuk dalam kategori "Baik."

Dewan Direktur menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah diimplementasikan tidak dapat menjamin ketiadaan risiko yang melekat pada LPEI. Meskipun demikian, LPEI berkomitmen untuk terus memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

Based on the results of the assessment of the implementation of the Internal Control System conducted through self-assessment in 2023, Indonesia Eximbank received a score of "4,2" indicating that the implementation of the Internal Control System at Indonesia Eximbank falls into the category of "Good" This assessment result is better compared to the self-assessment results in 2022, which received a score of "4.12," indicating that the implementation of the Internal Control System at Indonesia Eximbank falls into the category of "Good."

The Board of Directors acknowledges that the internal control measures implemented so far cannot guarantee the absence of risks inherent to Indonesia Eximbank. Nevertheless, Indonesia Eximbank is committed to ensuring and improving the internal control system continuously.

Perkara Hukum dan Upaya Penyelesaian
Legal Cases and the Settlement

Pada tahun 2023, LPEI menghadapi 2 (dua) Perkara Perdata dan 8 (delapan) Perkara Pajak, yang diuraikan sebagai berikut:

In 2023, Indonesia Eximbank faced 2 (two) Civil Cases and 8 (eight) Tax Cases, which are described as follows:

No.	Pokok Perkara/Gugatan Case/Problem	Tingkat Perkara Case Level	Status Penyelesaian Settlement Status	Dampak bagi LPEI Impact to Indonesia Eximbank
1.	Perkara Perdata pada tingkat PN Kalianda dengan register perkara No.45/Pdt.G/2022/PN.Kla di Kalianda Lampung	Pengadilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI	Penggugat: Maskamdani dkk	Apabila LPEI menang, maka status jaminan tetap menjadi agunan LPEI, namun jika LPEI Kalah, maka jaminan tidak lagi menjadi milik LPEI
	Civil case at the Kalianda District Court level with case register No.45/Pdt.G/2022/PN.Kla in Kalianda Lampung	Court of Cassation at the Indonesian Supreme Court	Plaintiff: Maskamdani and friends	If Indonesia Eximbank wins, then the collateral status remains Indonesia Eximbank's collateral, but if Indonesia Eximbank loses, then the collateral no longer belongs to Indonesia Eximbank.
2.	Perkara Perdata pada tingkat PN Niaga Jakarta Selatan dengan register perkara No. 373/Pdt.G/2023/PN.Jaksel Jakarta Selatan	Pengadilan Tingkat Pertama (PN Jakarta Selatan)	Penggugat: 1. PT. AMP 2. PT CKS 3. Yana Sofyan Panigoro	Apabila LPEI menang, maka status jaminan tetap menjadi agunan LPEI, namun jika LPEI Kalah, maka jaminan tidak lagi menjadi milik LPEI
	Civil case at the level of the South Jakarta Commercial Court with case register No. 373/Pdt.G/2023/PN.Jaksel South Jakarta	Court of First Instance (South Jakarta District Court)	Plaintiff: 1. PT AMP 2. PT CKS 3. Yana Sofyan Panigoro	If Indonesia Eximbank wins, then the collateral status remains Indonesia Eximbank's collateral, but if Indonesia Eximbank loses, then the collateral no longer belongs to Indonesia Eximbank.
3.	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38606/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI	Direktur Jenderal Pajak	Apabila LPEI menang, maka LPEI akan mendapatkan pengembalian bunga lebih bayar, namun jika LPEI Kalah, maka LPEI tidak akan mendapatkan pengembalian bunga
	Tax Court Decision No. Put.38606/PP/M.I/13/2012 on 11 June 2012	Judicial Review (PK) to the Indonesian Supreme Court	Director General of Taxes	If Indonesia Eximbank wins, then Indonesia Eximbank will get a refund of overpaid interest, but if Indonesia Eximbank loses, then Indonesia Eximbank will not get a refund of interest.
4.	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38612/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI	Direktur Jenderal Pajak	Apabila LPEI menang, maka LPEI akan mendapatkan pengembalian bunga lebih bayar, namun jika LPEI Kalah, maka LPEI tidak akan mendapatkan pengembalian bunga
	Tax Court Decision No. Put.38612/PP/M.I/13/2012 on 11 June 2012	Judicial Review (PK) to the Indonesian Supreme Court	Director General of Taxes	If Indonesia Eximbank wins, then Indonesia Eximbank will get a refund of overpaid interest, but if Indonesia Eximbank loses, then Indonesia Eximbank will not get a refund of interest.
5.	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.57515/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI	Direktur Jenderal Pajak	Apabila LPEI menang, maka LPEI akan mendapatkan pengembalian bunga lebih bayar, namun jika LPEI Kalah, maka LPEI tidak akan mendapatkan pengembalian bunga
	Tax Court Decision No. Put.57515/PP/M.IVB/16/2014 on 20 November 2014	Judicial Review (PK) to the Indonesian Supreme Court	Director General of Taxes	If Indonesia Eximbank wins, then Indonesia Eximbank will get a refund of overpaid interest, but if Indonesia Eximbank loses, then Indonesia Eximbank will not get a refund of interest.

No.	**Pokok Perkara/Gugatan** Case/Problem	**Tingkat Perkara** Case Level	**Status Penyelesaian** Settlement Status	**Dampak bagi LPEI** Impact to Indonesia Eximbank
6.	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.57516/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI	Direktur Jenderal Pajak	Apabila LPEI menang, maka LPEI akan mendapatkan pengembalian bunga lebih bayar, namun jika LPEI Kalah, maka LPEI tidak akan mendapatkan pengembalian bunga
	Tax Court Decision No. Put.57516/PP/M.IVB/16/2014 20 November 2014	Judicial Review (PK) to the Indonesian Supreme Court	Director General of Taxes	If Indonesia Eximbank wins, then Indonesia Eximbank will get a refund of overpaid interest, but if Indonesia Eximbank loses, then Indonesia Eximbank will not get a refund of interest.
7.	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.57518/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI	Direktur Jenderal Pajak	Apabila LPEI menang, maka LPEI akan mendapatkan pengembalian bunga lebih bayar, namun jika LPEI Kalah, maka LPEI tidak akan mendapatkan pengembalian bunga
	Tax Court Decision No. Put.57518/PP/M.IVB/16/2014 20 November 2014	Judicial Review (PK) to the Indonesian Supreme Court	Director General of Taxes	If Indonesia Eximbank wins, then Indonesia Eximbank will get a refund of overpaid interest, but if Indonesia Eximbank loses, then Indonesia Eximbank will not get a refund of interest.
8.	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59987/PP/M.IVB/15/2015 tanggal 5 Maret 2015	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI	Direktur Jenderal Pajak	Apabila LPEI menang, maka LPEI akan mendapatkan pengembalian bunga lebih bayar, namun jika LPEI Kalah, maka LPEI tidak akan mendapatkan pengembalian bunga
	Tax Court Decision No. Put.59987/PP/M.IVB/15/2015 on 5 March 2015	Judicial Review (PK) to the Indonesian Supreme Court	Director General of Taxes	If Indonesia Eximbank wins, then Indonesia Eximbank will get a refund of overpaid interest, but if Indonesia Eximbank loses, then Indonesia Eximbank will not get a refund of interest.
9.	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59988/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI	Direktur Jenderal Pajak	Apabila LPEI menang, maka LPEI akan mendapatkan pengembalian bunga lebih bayar, namun jika LPEI Kalah, maka LPEI tidak akan mendapatkan pengembalian bunga
	Tax Court Decision No. Put.59988/PP/M.IVB/16/2015 on 5 March 2015	Judicial Review (PK) to the Indonesian Supreme Court	Director General of Taxes	If Indonesia Eximbank wins, then Indonesia Eximbank will get a refund of overpaid interest, but if Indonesia Eximbank loses, then Indonesia Eximbank will not get a refund of interest.
10.	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59990/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015 Tax Court Decision No. Put.59990/PP/M.IVB/16/2015 on 5 March 2015	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI Judicial Review (PK) to the Indonesian Supreme Court	Direktur Jenderal Pajak Director General of Taxes	Apabila LPEI menang, maka LPEI akan mendapatkan pengembalian bunga lebih bayar, namun jika LPEI Kalah, maka LPEI tidak akan mendapatkan pengembalian bunga If Indonesia Eximbank wins, then Indonesia Eximbank will get a refund of overpaid interest, but if Indonesia Eximbank loses, then Indonesia Eximbank will not get a refund of interest.

SANKSI ADMINISTRATIF

Pada tahun 2023, LPEI tidak mendapat sanksi administratif dari pihak regulator.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

In 2023, Indonesia Eximbank did not receive any administrative sanctions.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

LPEI memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai transparansi dan keterbukaan dalam penyediaan informasi. Oleh karena itu, LPEI menyajikan berbagai sarana dan fasilitas untuk mempermudah para pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi dengan tepat waktu dan akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai salah satu bentuk kepatuhan kepada regulasi, LPEI juga melakukan pelaporan informasi melalui media surat-menyurat dan *e-reporting* kepada pihak regulator, serta situs LPEI. Seluruh Informasi dan laporan LPEI dapat diperoleh melalui sarana yang mudah diakses, yaitu:

1. Siaran Pers
   LPEI secara berkala menerbitkan Siaran Pers sebagai transparansi informasi kepada publik mengenai aksi korporasi penting dan strategis yang dilakukan LPEI.

2. Media Sosial
   LPEI juga aktif memberikan informasi kepada publik melalui akun:

Indonesia Eximbank is deeply committed to the values of transparency and openness in providing information. Therefore, Indonesia Eximbank provides various means and facilities to facilitate stakeholders in obtaining information in a timely and accurate manner in accordance with applicable regulations.

As a form of compliance with regulations, Indonesia Eximbank also reports information through correspondence and e-reporting to regulatory authorities, as well as the Indonesia Eximbank website. All information and reports from Indonesia Eximbank can be obtained through easily accessible channels, namely:

1. Press Releases
   Indonesia Eximbank periodically publishes press releases as a means of providing transparent information to the public about important and strategic corporate actions taken by Indonesia Eximbank.
2. Social Media
   Indonesia Eximbank also actively provides information to the public through its social media accounts.

indonesiaeximbank.go.id | Indonesia Eximbank | @indonesiaeximbank | EximbankID | Indonesia-eximbank

3. Intranet
   LPEI memiliki portal informasi internal yaitu intranet. Intranet dapat diakses oleh seluruh pegawai untuk membantu menjalankan aktivitas.

3. Intranet
   Indonesia Eximbank has an internal information portal called the intranet. The intranet can be accessed by all employees to assist in carrying out activities.

Alamat | Address:
Prosperity Tower Lantai 1 District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Jakarta 12191, Indonesia

Tel. (62 21) 395 03600
Fax. (62 21) 395 03699

Email: corpsec@indonesiaeximbank.go.id
Situs Web: www.indonesiaeximbank.go.id

Kode Etik
Code of Conduct

Kode Etik Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan landasan moral dan normatif yang menjadi panduan bagi perilaku dan tindakan seluruh anggota organisasi. Dengan cermat dan teliti, LPEI merumuskan Pedoman Kode Etik ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang berpedoman pada nilai-nilai inti perusahaan.

Pedoman Kode Etik LPEI merinci norma-norma yang mencakup berbagai aspek, termasuk etika berbisnis, etika kerja, dan perilaku sehari-hari. Kode Etik ini memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana menjalankan aktivitas bisnis dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Setiap pegawai diharapkan untuk menjadi agen positif yang mewujudkan nilai-nilai LPEI dalam perilaku sehari-hari.

Kode Etik LPEI bukan hanya sebagai panduan formal, tetapi juga sebagai fondasi bagi budaya perusahaan yang etis dan profesional. Melalui penerapan Pedoman Kode Etik ini, LPEI berusaha menciptakan sebuah lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, menghormati keberagaman, dan membangun praktik bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, Kode Etik LPEI menjadi pedoman perilaku dalam mencapai visi dan misi LPEI, mengukuhkan komitmen terhadap prinsip-prinsip GCG, dan membangun kepercayaan LPEI bersama dengan para pemangku kepentingan.

The Code of Conduct of Indonesia Eximbank serves as a moral and normative foundation that guides the behavior and actions of all members of the organization. With careful consideration, Indonesia Eximbank formulates this Code of Ethics Guideline to create a work environment guided by the core values of the company.

The Indonesia Eximbank Code of Conduct outlines norms covering various aspects, including business ethics, work ethics, and everyday behavior. This Code of Ethics provides clear guidance on conducting business activities with integrity, honesty, and responsibility. Every employee is expected to be a positive agent embodying Indonesia Eximbank values in their daily behavior.

Indonesia Eximbank Code of Conduct serves not only as a formal guide but also as a foundation for an ethical and professional corporate culture. Through the implementation of this Code of Conduct Guideline, Indonesia Eximbank seeks to create a work environment that supports collaboration, respects diversity, and builds sustainable business practices. Thus, the Indonesia Eximbank Code of Conduct serves as a behavioral guide in achieving the vision and mission of Indonesia Eximbank, reinforcing the commitment to GCG principles, and building trust with stakeholders.

Dasar Hukum Kode Etik LPEI

Legal Basis of LPEI Code of Conduct

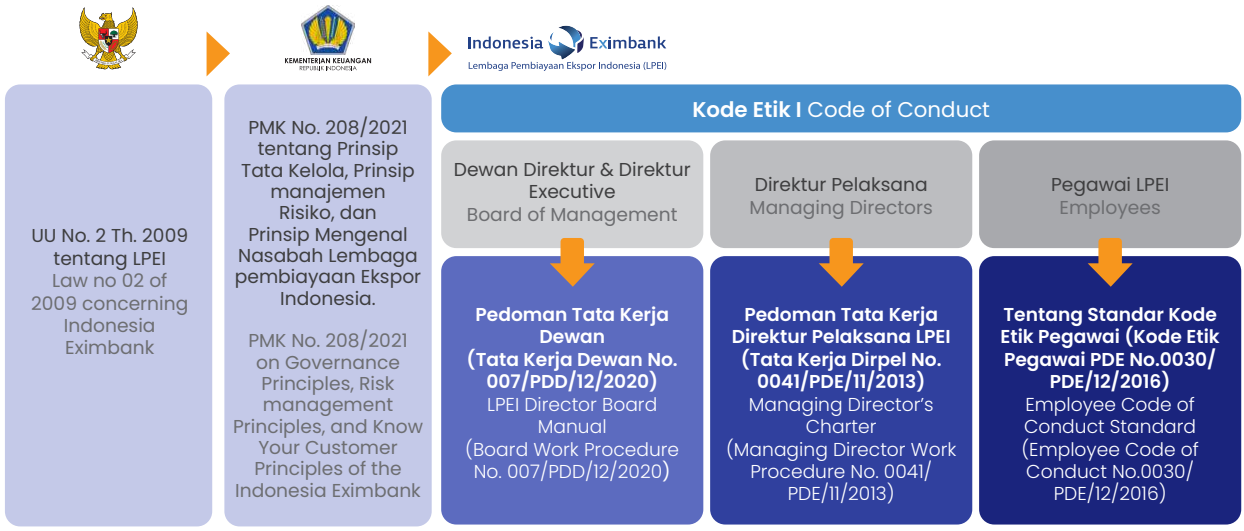

Tujuan Pengaturan Standar Kode Etik Pegawai

LPEI membuat aturan tentang Standar Kode Etik Pegawai dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga citra, martabat, integritas, kredibilitas dan independensi Pegawai dalam menjalankan tugas.
2. Pedoman perilaku kepada Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
3. Melindungi Pegawai dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul.
4. Mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran.

Standar Kode Etik Pegawai

Seluruh pegawai LPEI wajib berperilaku sesuai dengan Standar Kode Etik Pegawai, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1. Pegawai adalah setiap orang yang bekerja atau terikat dalam hubungan kerja dengan LPEI dan oleh karenanya menerima gaji dan penghasilan atau imbalan dalam bentuk lain dari LPEI dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) LPEI.
2. Standar Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai dan norma yang mengikat seluruh Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai LPEI maupun dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat sekitarnya.

Pokok-Pokok Kode Etik

Kode Etik LPEI menetapkan prinsip-prinsip utama sebagai pokok-pokok kode etik yang harus diterapkan dalam aktivitas dan perilaku sehari-hari, yaitu:

1. Patuh dan taat pada semua ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Melaksanakan pencatatan dengan benar.
3. Menghindarkan diri dari persaingan tidak sehat.
4. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
5. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan untuk menghindari konflik kepentingan.
6. Menjaga kerahasiaan para nasabah LPEI.
7. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan LPEI terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
8. Tidak menerima gratifikasi, hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi, maupun keluarga.

Purpose of Standard Setting for Employee Code of Conduct

Indonesia Eximbank establishes rules regarding the Employee Code of Conduct Standard with the following objectives:

1. To maintain the image, dignity, integrity, credibility, and independence of Employees in carrying out their duties.
2. To provide guidance on behavior to Employees in performing their duties and responsibilities professionally.
3. To protect Employees from potential legal and/or reputational risks that may arise.
4. To establish mechanisms for handling information and resolving alleged violations.

Employee Code of Conduct Standard

All Indonesia Eximbank employees are required to behave in accordance with the Employee Code of Conduct Standard, as explained below:

1. An employee is any person who works or is engaged in an employment relationship with Indonesia Eximbank and therefore receives salary and income or other compensation from Indonesia Eximbank and has the Indonesia Eximbank Employee Identification Number (NIP).
2. The Employee Code of Conduct Standard is a guideline of attitudes, behaviors, actions, values, and norms that bind all Employees in carrying out their duties and functions as Indonesia Eximbank Employees as well as in their daily interactions with the surrounding community.

Principles of the Code of Conduct

The Indonesia Eximbank Code of Conduct establishes main principles as the core of the code of conduct to be applied in daily activities and behaviors, which are:

1. Compliance with and adherence to all applicable laws and regulations.
2. Proper record-keeping.
3. Avoidance of engaging in unfair competition.
4. Not abusing authority for personal gain.
5. Avoidance of involvement in decision-making to prevent conflicts of interest.
6. Maintaining the confidentiality of Indonesia Eximbak customers.
7. Considering the adverse impacts of any policies established by Indonesia Eximbak on the economic, social, and environmental conditions.
8. Refraining from accepting gratuities, gifts, or rewards that enrich oneself or family.

9. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan citra profesinya.

Etika Manajemen LPEI

Jajaran Dewan Direktur LPEI wajib memiliki etika kerja sebagai berikut:

1. Mengikuti peraturan yang berlaku.
2. Memenuhi tanggung jawab sebagai Dewan Direktur/Direktur Pelaksana.
3. Tidak memandang rendah perlunya kepemimpinan/menghargai kepemimpinan.
4. Tanggap menyikapi masalah jangka panjang dan tidak menunggu sampai kinerja keuangan memburuk.
5. Menggunakan akal sehat.
6. Menghargai setiap pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam setiap tindakan.
7. Audit budaya tata kelola institusi yang baik.
8. Tidak menempatkan kepentingan pribadi sebagai fokus utama dalam melakukan tugasnya.
9. Melakukan evaluasi kinerja secara objektif.
10. Tidak terlibat kegiatan operasional LPEI yang berada di luar ketentuan.

Pemberlakuan Kode Etik Di Seluruh Level Organisasi

1. Standar kode etik merangkum nilai-nilai dasar etika, kewajiban, serta larangan yang harus diikuti ketika melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai LPEI. Hal ini mencakup tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan operasional LPEI dan interaksi dengan lingkungan masyarakat.
2. Standar kode etik berlaku secara mengikat untuk seluruh pegawai LPEI, termasuk anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana.
3. Standar kode etik diterapkan tanpa toleransi dan pengecualian terhadap pelanggaran, serta memuat sanksi bagi pelanggarnya.

Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Sosialisasi terkait Kode Etik dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten kepada seluruh insan LPEI melalui sejumlah media komunikasi yang beragam. Aktivitas ini dilaksanakan secara berkala untuk memastikan pemahaman dan kesadaran yang mendalam terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik. Selain itu, nilai-nilai pokok Kode Etik juga diinternalisasikan dalam setiap unit kerja melalui penyampaian yang cermat saat pelaksanaan rapat,

9. Not engaging in actions that could harm the image of their profession.

Indonesia Eximbank Management Ethics

The Board of Directors of Indonesia Eximbank must adhere to the following work ethics:

1. Adhering to applicable regulations.
2. Fulfilling responsibilities as a Board of Directors/ Executive Director.
3. Not underestimating the importance of leadership or respecting leadership.
4. Responsively addressing long-term issues and not waiting until financial performance deteriorates.
5. Using common sense.
6. Respecting every stakeholder in every action.
7. Auditing the culture of good institutional governance.
8. Not prioritizing personal interests as the main focus in carrying out duties.
9. Conducting performance evaluations objectively.
10. Not engaging in operational activities of Indonesia Eximbank that are beyond the provisions.

Enforcement of the Code of Conduct at All Levels of the Organization

1. The code of conduct standard summarizes the fundamental values of conduct, obligations, and prohibitions that must be followed when performing duties and functions as an employee of Indonesia Eximbank. This includes responsibility for carrying out Indonesia Eximbak's operational activities and interactions with the community.
2. The code of conduct standard is binding for all Indonesia Eximbank employees, including members of the Board of Directors, Executive Directors, and Managing Directors.
3. The code of conduct standard is applied without tolerance and exceptions for violations and includes sanctions for violators.

Socialization of Code of Conduct and Enforcement Efforts

Socialization related to the Code of Conduct is held continuously and consistently to all members of Indonesia Eximbank through various communication channels. This activity is carried out periodically to ensure a deep understanding and awareness of the values contained in the Code of Conduct. Furthermore, the core values of the Code of Conduct are also internalized in every unit through careful delivery

pertemuan, atau *briefing* di berbagai tingkatan organisasi.

Penerapan dan penegakan kode etik menjadi tanggung jawab unit kerja SDM dan disosialisasikan oleh unit kerja Kepatuhan melalui e-mail kepada seluruh Pegawai. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi yang bersifat inklusif, menyasar berbagai tingkatan organisasi mulai dari Dewan Direktur hingga seluruh pegawai LPEI. Proses sosialisasi ini tidak hanya bersifat konvensional, melainkan juga mengintegrasikan perkembangan sistem teknologi informasi yang terkini. Sosialisasi kode etik di tahun 2023 dilakukan terhadap seluruh pegawai di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah LPEI melalui kegiatan berikut ini:

1. Bekerja sama dengan Departemen *Corporate Learning & People Development* dalam membuat modul "Nilai-nilai Budaya Serta Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai LPEI", dan menayangkan modul pelatihan tersebut dalam aplikasi Xlearn yang cakupan materinya sebagai berikut:
   - Definisi Nilai-nilai Budaya APIK
   - Definisi Kode Etik dan Kode Perilaku
   - Tujuan: Nilai-nilai Budaya APIK, Kode Etik dan Kode Perilaku
   - Penjelasan Nilai-nilai Budaya LPEI (APIK)
   - Perilaku Utama APIK
   - Kode Etik dan Kode Perilaku Berdasarkan Nilai-nilai Budaya APIK
   - Pencegahan Pelanggaran
   - Penanganan dan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku
   - Perlindungan Harta Milik Lembaga

2. Pembentukan DCOR Officer
   DCOR Officer dibentuk untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko operasional dalam suatu organisasi. Mereka berperan sebagai agen penggerak dan platform komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran risiko di antara pegawai dan manajemen.

Dengan memahami risiko operasional dan peran mereka dalam mengelolanya, individu-individu dalam organisasi dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko dan menjaga keselamatan serta efisiensi operasional.

during meetings, gatherings, or briefings at various levels of the organization.

The implementation and enforcement of the code of conduct are the responsibility of the Human Resources unit and are socialized by the Compliance unit via e-mail to all employees. In 2023, a series of inclusive socialization activities targeting various organizational levels from the Board of Directors to all Indonesia Eximbank employees have been conducted. This socialization process is not only conventional but also integrates the latest developments in information technology systems. The code of conduct socialization in 2023 was carried out to all employees at the Headquarters and Regional Offices of Indonesia Eximbank through the following activities:

1. Collaborating with the Corporate Learning & People Development Department in creating modules on "Cultural Values as well as the Code of Ethics and Code of Conduct of LPEI Employees", and broadcasting these training modules on the Xlearn application, which covers the following topics:
   - Definition of APIK Cultural Values
   - Definition of Code of Ethics and Code of Conduct
   - Objectives: APIK Cultural Values, Code of Ethics, and Code of Conduct
   - Explanation of Indonesia Eximbank (APIK) Cultural Values
   - Main APIK Behaviors
   - Code of Ethics and Code of Conduct Based on APIK Cultural Values
   - Prevention of Violations
   - Handling and Violations of the Code of Ethics and Code of Conduct
   - Protection of Institution Assets

2. Establishment of DCOR Officers
   DCOR Officers are established to identify, measure, manage, and reduce operational risks within an organization. They act as drivers and effective communication platforms to enhance risk awareness among employees and management.

By understanding operational risks and their roles in managing them, individuals within the organization can contribute to reducing risks and maintaining operational safety and efficiency.

Fungsi utama DCOR Officer:
- Menyebarkan informasi dan edukasi tentang risiko operasional kepada seluruh anggota organisasi.
- Membangun budaya sadar risiko di mana setiap orang bertanggung jawab untuk mengelola risiko.
- Memfasilitasi komunikasi antara berbagai departemen dan level dalam organisasi tentang risiko operasional.
- Mengembangkan dan menerapkan sistem dan prosedur untuk mengelola risiko operasional.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program manajemen risiko operasional.

Manfaat pembentukan DCOR Officer:
- Meningkatkan kesadaran risiko di seluruh organisasi.
- Memperkuat budaya sadar risiko.
- Meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional.
- Mengurangi kemungkinan terjadinya insiden dan kerugian akibat risiko operasional.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.

Pembentukan DCOR Officer merupakan langkah penting dalam membangun organisasi yang tangguh dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kesadaran risiko dan kemampuan dalam mengelolanya, organisasi dapat meminimalisir potensi kerugian dan memaksimalkan kinerja operasional.

Key functions of DCOR Officers:
- Disseminating information and education about operational risks to all members of the organization.
- Building a risk-aware culture where everyone is responsible for managing risks.
- Facilitating communication between various departments and levels within the organization regarding operational risks.
- Developing and implementing systems and procedures to manage operational risks.
- Monitoring and evaluating the effectiveness of operational risk management programs.

Benefits of establishing DCOR Officers:
- Increasing risk awareness throughout the organization.
- Strengthening a risk-aware culture.
- Enhancing the organization's ability to identify and manage operational risks.
- Reducing the likelihood of incidents and losses due to operational risks.
- Improving operational efficiency and effectiveness.

Establishing DCOR Officers is a crucial step in building a resilient and sustainable organization. By increasing risk awareness and capabilities in managing them, organizations can minimize potential losses and maximize operational performance.

Mekanisme Laporan Pelanggaran Kode Etik

Mechanism of Code of Conduct Violations Report

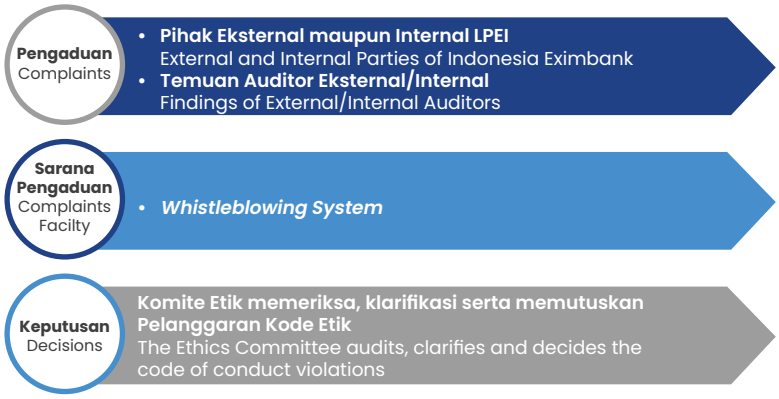

Jenis Sanksi untuk Setiap Pelanggaran Kode Etik

LPEI menunjukkan keseriusan dalam menjaga kepatuhan terhadap Kode Etik dengan menerapkan konsekuensi yang tegas terhadap pelanggaran. Rentang sanksi yang diberlakukan mulai dari tindakan kedisiplinan hingga pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan internal LPEI. Tindakan ini bukan hanya sebagai bentuk penegakan aturan, tetapi juga sebagai

Sanctions for Every Code Violation

Indonesia Eximbank demonstrates seriousness in maintaining compliance with the Code of Conduct by applying strict consequences for violations. The range of sanctions imposed ranges from disciplinary actions to termination of employment, in accordance with the provisions set forth in Indonesia Eximbank internal regulations. These actions are not only a form of rule enforcement but also an effort to create a corporate

upaya untuk menciptakan budaya perusahaan yang berintegritas dan bermoral.

culture that is both integrity-driven and morally upright.

Dalam situasi di mana pelanggaran Kode Etik menunjukkan indikasi sebagai pelanggaran hukum, LPEI memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut. Tindakan ini dapat mencakup proses hukum pidana atau perdata, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara umum di Indonesia. LPEI memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terdeteksi, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum, ditangani dengan serius dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga etika dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

In situations where violations of the Code of Conduct indicate legal violations, Indonesia Eximbank has the authority to take further legal steps. These actions may include criminal or civil legal proceedings, in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. Indonesia Eximbank ensures that any detected violations, especially those related to legal aspects, are handled seriously and in accordance with applicable legal procedures, as part of the commitment to uphold ethics and compliance with the law.

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai yang melanggar ketentuan-ketentuan inti Kode Etik, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Direktur Eksekutif mengenai Kode Etik, dianggap sebagai Pelanggaran Kode Etik. Proses pengaduan terkait Pelanggaran Kode Etik, baik yang berasal dari pihak eksternal maupun internal LPEI, akan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*). Sistem ini menciptakan kerangka kerja untuk melaporkan dan menanggapi pelanggaran Kode Etik dengan transparansi dan keadilan, memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat diidentifikasi dan ditangani secara efektif sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Any speech, writing, or actions by employees that violate the core provisions of the Code of Conduct, as outlined in the Executive Director's Regulation on the Code of Ethics, are considered Ethical Violations. The complaint process related to Ethical Violations, whether originating from external or internal parties of Indonesia Eximbank, will follow the mechanisms established in the violation reporting system (whistleblowing). This system creates a framework for reporting and responding to Ethical Violations with transparency and fairness, ensuring that each violation can be identified and effectively addressed in accordance with applicable procedures.

Direktur Eksekutif memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi kepada pegawai di semua tingkatan. Namun, dalam praktiknya, sebagian dari wewenang tersebut dapat didelegasikan tanpa hak substitusi kepada pejabat-pejabat berikut:

1. Pegawai pada kelompok jabatan Kepala Departemen berwenang untuk mengenakan sanksi ringan berupa surat peringatan atau lisan terbatas kepada pegawai yang merupakan bawahan langsungnya.
2. Pegawai pada kelompok jabatan Kepala Divisi berwenang untuk mengenakan sanksi ringan berupa surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga terbatas kepada pegawai yang berada pada unit kerjanya.
3. Kepala Divisi SDM berwenang untuk mengenakan semua sanksi ringan serta sanksi sedang berupa peringatan keras tertulis kepada seluruh pegawai

The Executive Director has the authority to impose sanctions on employees at all levels. However, in practice, some of this authority can be delegated, without substitution rights, to the following officials:

1. Employees in the Department Head position are authorized to impose minor sanctions, such as limited verbal warnings, on employees who are their direct subordinates.

2. Employees in the Division Head position are authorized to impose minor sanctions, such as first to third written warnings, on employees within their respective units.

3. The Head of the HR Division is authorized to impose all minor sanctions as well as moderate sanctions, such as written strong warnings, on all employees.

Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi Tahun 2023

Tidak terjadi pelanggaran kode etik sepanjang tahun 2023, sehingga tidak ada sanksi yang dikenakan.

Code of Conduct Violations and Sanctions in 2023

No code of conduct violations occurred during 2023, so no sanctions were imposed.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Performance-Based Long-Term Compensation Policy

Hingga akhir tahun 2023, sebagai lembaga yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah, LPEI tidak melaksanakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan karyawan, seperti program kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Stock Ownership Program*/MSOP) atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Ownership Program*/ESOP).

Until the end of 2023, as a wholly government-owned institution, Indonesia Eximbank does not provide performance-based long-term compensation to management and employees, such as Management Stock Ownership Program (MSOP) or Employee Stock Ownership Program (ESOP).

Transparansi Manajemen tentang Kepemilikan Saham

Management Transparency on Share Ownership

Kebijakan

PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, pasal 14 dan pasal 29 telah mengamanatkan bahwa Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri. Ketentuan ini juga telah diatur dalam POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, pasal 17 dan pasal 22.

Selain itu, pasal 27 PMK 208/2021 juga telah mengatur bahwa Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Kepemilikan Saham Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana, LPEI mewajibkan kepada seluruh anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana untuk menyampaikan saham perusahaan terbuka yang dimilikinya, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan

Policy

Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Customer Due Diligence Principles for the Indonesian Export Financing Institution, s 14 and 29 have mandated that the Board of Directors, Executive Directors, and Managing Directors are required to disclose their share ownership in other companies, whether domiciled domestically and/or internationally. This provision has also been regulated in Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning Supervision of the Indonesian Export Financing Institution, s 17 and 22.

Furthermore, Article 27 of PMK 208/2021 has also stipulated that Executive Directors and Managing Directors are prohibited from owning shares exceeding 25% (twenty-five percent) of the paid-up capital in other companies, either individually or jointly.

Regarding the implementation of the Share Ownership Policy for the Board of Directors, Executive Directors, and Managing Directors, Indonesia Eximbak obliges all members of the Board of Directors and Managing Directors to report their shares in publicly listed companies, both domestically and internationally, no later than 10 (ten) days from the occurrence of ownership or changes in ownership of such publicly

atas saham perusahaan terbuka tersebut. Kebijakan ini mengadopsi ketentuan yang diatur pada pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. LPEI menilai bahwa kebijakan tersebut baik untuk diterapkan walaupun LPEI bukan sebuah Perusahaan Terbuka. LPEI merupakan sebuah lembaga negara yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan Kebijakan Tahun 2023

Hingga akhir tahun 2023, tidak terdapat Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI yang memiliki saham di LPEI maupun perusahaan lainnya. Informasi ini juga telah dijelaskan dalam Bab Profil Perusahaan Subbab Komposisi Pemegang Saham. Dengan demikian LPEI tidak menerima laporan terkait kepemilikan saham Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.

listed company shares. This policy adopts provisions regulated in Article 2 of Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Share Ownership of Publicly Listed Companies. Indonesia Eximbank considers this policy beneficial to implement even though Indonesia Eximbank is not a Publicly Listed Company. Indonesia Eximbank is a state institution supervised by the Financial Services Authority.

Policy Implementation in 2023

Until the end of 2023, none of Indonesia Eximbank Board of Directors, Executive Directors and Managing Directors own shares in Indonesia Eximbank or other companies. This information has also been explained in the Company Profile Chapter of the Shareholder Composition Subchapter. Thus, Indonesia Eximbank does not receive reports related to the share ownership of the Board of Directors, Executive Directors and Managing Directors.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

Dalam rangka menunjukkan komitmen yang kuat terhadap praktik bisnis yang sehat dan selalu mengacu pada prinsip-prinsip GCG, LPEI dengan sungguh-sungguh membangun sebuah Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS). Sistem ini dirancang untuk memberikan sarana pelaporan atas setiap pelanggaran yang terkait dengan kebijakan, prosedur, serta etika dan nilai-nilai yang menjadi landasan utama LPEI. Pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang dapat merugikan LPEI umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).

In order to demonstrate a strong commitment to sound business practices and always adhere to the principles of Good Corporate Governance (GCG), Indonesia Eximbank earnestly develops a Violation Reporting System (SPP) or Whistleblowing System (WBS). This system is designed to provide a reporting mechanism for any violations related to policies, procedures, as well as ethics and values that are the cornerstone of Indonesia Eximbank. The disclosure of violations or actions that may harm Indonesia Eximbank is generally done in confidence.

Sistem pelaporan pelanggaran ini mencerminkan dedikasi LPEI dalam menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, di mana setiap individu memiliki saluran yang jelas untuk menyampaikan informasi terkait pelanggaran dan permasalahan etika. Dengan adanya mekanisme ini, LPEI berharap dapat lebih responsif dalam menanggapi dan menangani setiap isu atau pelanggaran yang mungkin muncul, sehingga dapat menjaga keberlanjutan implementasi prinsip-prinsip GCG dalam seluruh aspek operasionalnya.

This violation reporting system reflects Indonesia Eximbank's dedication to creating a transparent, accountable, and integrity-driven business environment, where every individual has a clear channel to convey information regarding violations and ethical issues. With this mechanism in place, Indonesia Eximbank hopes to be more responsive in addressing and handling any issues or violations that may arise, thus ensuring the sustainability of implementing GCG principles throughout its operational aspects.

Fungsi *Whistleblowing System*

1. Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) adalah pengungkapan yang umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*) atas tindakan atau perbuatan pelanggaran yang terindikasi dapat merugikan LPEI baik secara finansial maupun non-finansial.
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) LPEI adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi Pelapor Pelanggaran untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terjadi di LPEI.
3. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) LPEI ini berfungsi sebagai salah satu alat kontrol dan *monitoring* mengenai potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai LPEI.

Whistleblowing System Function

1. Whistleblowing is a disclosure that is generally carried out confidentially on actions or violations that are indicated to be detrimental to Indonesia Eximbank both financially and non-financially.
2. Indonesia Eximbank Whistleblowing System is a system that can be used as a medium for Whistleblowers to convey information about irregularities indicated as a violation that occurs at Indonesia Eximbank.
3. The Indonesia Eximbank Whistleblowing System serves as one of the control and monitoring tools regarding potential violations committed by Indonesia Eximbank employees.

Tujuan *Whistleblowing System*

1. Menciptakan Pegawai LPEI yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi.
2. Memperkuat penerapan prinsip tata kelola LPEI.
3. Memperkuat sistem pengendalian internal LPEI.

Purpose of Whistleblowing System

1. Creating Indonesia Eximbank employees who have high integrity and professionalism.
2. Strengthening the implementation of Indonesia Eximbank's governance principles.
3. Strengthening Indonesia Eximbank's internal control system.

Dasar Kebijakan

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
3. Peraturan Dewan Direktur No. 0015/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
4. Peraturan Dewan Direktur No. 0017/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Enterprise Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
5. Peraturan Dewan Direktur 0003/PDD/12/2021 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal.
6. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0007/PDE/072023 tentang Standar Pedoman Operasional Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
7. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0029/PDE/12/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Penerapan Strategi *Anti Fraud* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
8. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0018/PDE/03/2012 tentang Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
9. Peraturan Dirrektur Eksekutif No.0028/PDE/12/2023 tentang Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM).

Jenis-Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan, antara lain pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, *mark-up*, penggunaan narkoba, perusakan barang;
2. Pelanggaran kode etik LPEI, antara lain benturan kepentingan, pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang terlarang;
3. Pelanggaran prinsip akuntansi yang berlaku umum;
4. Kecurangan (*fraud*) dalam kegiatan usaha pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi termasuk kegiatan penyediaan sumber dana bagi LPEI, kegiatan penempatan dana, kegiatan pengadaan barang dan jasa serta kegiatan operasional lainnya;

Policy Basis

1. Act No. 2 of 2009 on the Indonesian Export Financing Agency.
2. Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of the Indonesian Export Financing Agency.
3. Board of Director Regulation No. 0015/PDD/12/2022 concerning the Compliance Function Policy and Implementation of the Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Program of the Indonesian Export Financing Corporation.
4. Board of Director Regulation No. 0017/PDD/12/2022 concerning Enterprise Risk Management Policy of Indonesia Export Financing Corporation.
5. Board of Director Regulation 0003/PDD/12/2021 concerning Internal Control System Policy.
6. Executive Director Regulation No. 0007/PDE/072023 concerning Standard Operational Guidelines for the Implementation of the Compliance Function.
7. Executive Director Regulation No. 0029/PDE/12/2023 concerning Standard Operational Guidelines for Implementing the Anti Fraud Strategy of the Indonesian Export Financing Agency.
8. Executive Director Regulation No. 0018/PDE/03/2012 concerning the Indonesian Export Financing Agency Whistleblowing System Manual.
9. Executive Director Regulation No.0028/PDE/12/2023 on the Implementation of Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism, and Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML/CFT & PPPSPM) Program.

Types of Violation

1. Violation of laws and regulations, including signature forgery, corruption, embezzlement, mark-up, drug use, destruction of goods;
2. Violation of Indonesia Eximbank's code of ethics, including conflict of interest, harassment, involvement in prohibited community activities;
3. Violation of generally accepted accounting principles;
4. Fraud in the business activities of financing, guarantee, insurance and consulting services including the activities of providing sources of funds for Indonesia Eximbank, placement of funds, procurement of goods and services and other operational activities;

5. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non finansial bagi LPEI;
6. Tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja LPEI.

Pelapor Pelanggaran

1. Pegawai LPEI.
2. Rekanan LPEI.
3. Nasabah LPEI.
4. Pihak Terafiliasi LPEI.
5. Mitra LPEI.

Unsur Pokok *Whistleblowing System*

1. Terlapor Pelanggaran.
2. Pelapor Pelanggaran.
3. Direktur Eksekutif.
4. Direktur Pelaksana.
5. Laporan Pelanggaran.
6. Verifikator.
7. Investigator.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) adalah Kepala Divisi Unit Kerja yang melaksanakan fungsi fungsi Kepatuhan di LPEI. Unit Kerja ini memiliki tanggung jawab langsung terhadap kepada Direktur Eksekutif melalui Direktur Pelaksana atau Head of atau pejabat yang berada di atas Kepala Divisi Unit Kerja yang menangani fungsi Kepatuhan. Dalam menjalankan tugasnya, Pengelola WBS dibantu oleh Petugas WBS LPEI yang memiliki kompetensi dan integritas yang memadai untuk melaksanakan aktivitas harian WBS. Penunjukan atau pengangkatan Petugas WBS LPEI tersebut dilakukan oleh Direktur Eksekutif dan/atau Direktur Pelaksana atau Head of yang memiliki tanggung jawab atas fungsi Kepatuhan, dengan rekomendasi dari Pengelola WBS.

Tugas dan tanggung jawab Pengelola WBS adalah sebagai berikut:

1. Mengelola pelaksanaan WBS.
2. Mengkoordinasikan penanganan tindaklanjut atas laporan yang masuk melalui WBS.
3. Mengkoordinasikan pemberian perlindungan terhadap Pelapor dengan unit terkait baik di Kantor Pusat maupun di luar Kantor Pusat.
4. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui WBS.
5. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap efektivitas WBS LPEI.

5. Other fraudulent actions that may cause financial or non-financial losses to Indonesia Eximbank;
6. Actions that jeopardize Indonesia Eximbank's occupational safety and health.

Whistleblower

1. Indonesia Eximbank employee.
2. Partner of Indonesia Eximbank.
3. Customer of Indonesia Eximbank.
4. Affiliated Party of Indonesia Eximbank.
5. Partner of Indonesia Eximbank.

Main Elements of Whistleblowing System

1. Reported Violation.
2. Whistleblower.
3. Executive Director.
4. Managing Director.
5. Violation Report.
6. Verifier.
7. Investigator.

Parties Managing Complaints

The Whistleblowing System (WBS) Manager is the Head of the Compliance Division at Indonesia Eximbank. This unit has direct responsibilities to the Executive Director through the Managing Director or the Head or an officer above the Head of the Compliance Division. In carrying out their duties, the WBS Manager is assisted by Indonesia Eximbank WBS Officers who possess adequate competency and integrity to carry out daily WBS activities. The appointment or selection of these Indonesia Eximbak WBS Officers is made by the Executive Director and/or the Managing Director or the Head responsible for the Compliance function, with recommendations from the WBS Manager.

The duties and responsibilities of the WBS Manager are as follows:

1. Managing the implementation of WBS.
2. Coordinating the follow-up actions on reports received through WBS.
3. Coordinating the provision of protection to the Reporter with relevant units both at the Head Office and outside the Head Office.
4. Monitoring the handling and resolution of reports received through WBS.
5. Evaluating and taking corrective actions on the effectiveness of Indonesia Eximbank WBS.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Pengelola WBS memiliki wewenang untuk:

1. Menetapkan tindak lanjut atas laporan khususnya laporan yang putusan tindak lanjutnya berada pada kewenangan Pengelola WBS.
2. Memberikan usulan kepada Penanggung Jawab WBS terkait dengan tindak lanjut penanganan Laporan yang melibatkan unsur Direktur Pelaksana ke atas.
3. Memberikan usulan kepada Penanggung Jawab WBS terkait dengan adanya permintaan perlindungan dari Pelapor.
4. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan WBS.

Tugas dan tanggung jawab Petugas WBS sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Membantu pengelolaan pelaksanaan WBS.
2. Melakukan verifikasi awal dan membantu penanganan tindaklanjut atas laporan yang masuk melalui WBS.
3. Membantu pemberian perlindungan terhadap Pelapor dengan unit terkait baik di Kantor Pusat maupun di luar Kantor Pusat.
4. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui WBS.
5. Melakukan Evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap efektivitas WBS LPEI.

Mekanisme Pelaporan

1. Pelapor Pelanggaran dapat menyampaikan Pelaporan Pelanggaran melalui sarana yang telah disediakan oleh LPEI.
2. Pelaporan Pelanggaran sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagai berikut:
   a. Nama Pegawai LPEI dan Unit Kerja yang terlibat;
   b. Jenis perbuatan yang terindikasi adanya Pelanggaran;
   c. Waktu terjadinya Pelanggaran;
   d. Lokasi terjadinya Pelanggaran.
3. Pelaporan Pelanggaran harus melampirkan bukti awal yang dapat mendukung atau menjelaskan adanya Pelanggaran yang dilakukan. Bukti awal dimaksud antara lain:
   a. Dokumen-dokumen informasi Pelanggaran;
   b. Foto-foto kejadian Pelanggaran;
   c. Rekaman (audio/video);
   d. Saksi (apabila ada), dan;
   e. Data sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut.

In carrying out their duties and responsibilities, the WBS Manager has the authority to:

1. Determine follow-up actions on reports, especially those where the decision on follow-up actions falls within the authority of the WBS Manager.
2. Propose actions to the WBS Supervisor regarding the follow-up handling of Reports involving the Managing Director and above.
3. Propose actions to the WBS Supervisor regarding requests for protection from the Reporter.
4. Take any other necessary actions in the implementation of WBS.

The duties and responsibilities of WBS Officers are at least as follows:

1. Assisting in the management of WBS implementation.
2. Conducting initial verification and assisting in the follow-up handling of reports received through WBS.
3. Assisting in providing protection to the Reporter with relevant units both at the Head Office and outside the Head Office.
4. Monitoring the handling and resolution of reports received through WBS.
5. Evaluating and taking corrective actions on the effectiveness of Indonesia Eximbank WBS.

Reporting Mechanism

1. Violation Reporters can submit Violation Reports through the channels provided by Indonesia Eximbank.
2. Violation Reports must include at least the following information:
   a. Name of the Indonesia Eximbank Employee and the involved Work Unit;
   b. Type of action indicating a Violation;
   c. Time of the Violation occurrence;
   d. Location of the Violation occurrence.
3. Violation Reports must be accompanied by initial evidence that can support or explain the committed Violation. Initial evidence includes, among others:
   a. Documents containing Violation information;
   b. Photos of the Violation incident;
   c. Recordings (audio/video);
   d. Witnesses (if any), and;
   e. Data sources for further investigation.

Kebijakan Perlindungan Bagi Pelapor Pelanggaran

1. Pelapor dari unsur Pegawai LPEI yang telah beritikad baik melaporkan dugaan pelanggaran melalui sarana WBS berhak untuk:
   a. Memperoleh informasi perkembangan laporan WBS; dan
   b. Memperoleh perlindungan yang antara lain, namun tidak terbatas pada:
      i. Kerahasiaan identitas Pelapor dan laporannya.
      ii. Perlindungan atas tekanan fisik maupun non fisik, perlindungan penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, diskriminasi, catatan yang merugikan catatan pribadi (*personal file record*).
      iii. Perlindungan apabila Pelapor bukan pihak terkait atau tidak terlibat di dalam laporan dugaan pelanggaran atau laporan dugaan pelanggaran tidak terbukti.
2. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di LPEI. Permintaan perlindungan dapat ditolak atau dibatalkan oleh LPEI jika:
   a. Pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas dan laporannya.
   b. Laporan yang dibuat oleh Pelapor tidak benar, dan berdasarkan kajian dari Petugas WBS LPEI mempunyai indikasi yang tidak sesuai dengan tujuan WBS.
3. Perlindungan juga berlaku bagi pihak yang melakukan investigasi antara lain Satuan Kerja Internal Audit maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan laporan tindak pelanggaran.

Whistleblower Protection Policy

1. Employees of Indonesia Eximbank who have acted in good faith in reporting alleged violations through the WBS facility are entitled to:
   a. Receive updates on the progress of WBS reports; and
   b. Receive protection including, but not limited to:
      i. Confidentiality of the Reporter's identity and report.
      ii. Protection against physical or non-physical pressure, protection against demotion or dismissal, unfair termination, discrimination, adverse personal record notes.
      iii. Protection if the Reporter is not a related party or not involved in the alleged violation report or if the alleged violation report is not substantiated.
2. Protection is provided while adhering to the principles of confidentiality and relevant regulations applicable at Indonesia Eximbank. Requests for protection may be refused or revoked by Indonesia Eximbank if:
   a. The Reporter fails to fulfill their obligation to maintain the confidentiality of their identity and report.
   b. The report made by the Reporter is untrue, and based on the assessment by WBS Officers of Indonesia Eximbank, it has indications that are not consistent with the purpose of WBS.
3. Protection also applies to parties conducting investigations, including Internal Audit Units and parties providing information related to violation reports.

Sarana Pelaporan Pelanggaran

LPEI menyediakan sarana Pelaporan Pelanggaran yang independen, bebas dan rahasia, baik bagi pihak eksternal maupun internal. Media atau saluran yang digunakan yaitu:

Violation Reporting Tools

Indonesia Eximbank provides an independent, free and confidential violation reporting tools, both for external and internal parties. The media or channels used are:

Situs Web	https://ayolaporlpei.kemenkeu.go.id/
Email Khusus Tim WBS	gcg@indonesiaeximbank.go.id
Email LPEI	corpsec@indonesiaeximbank.go.id (dengan subyek: ***Whistleblowing System***)

Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran

1. Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan oleh Verifikator, dengan supervisi langsung oleh Kepala Unit Kerja Kepatuhan.
2. Untuk menghindari adanya tujuan yang tidak baik dari Laporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran, maka Verifikator harus melakukan seleksi awal terhadap Laporan Pelanggaran yang diterima.
3. Apabila Pelaporan Pelanggaran tidak dilengkapi dengan bukti awal atau bukti awal yang diberikan tidak berkaitan secara langsung dengan Pelaporan Pelanggaran, maka Pelaporan Pelanggaran tersebut tidak layak untuk diproses lebih lanjut.
4. Tugas dan tanggung jawab Verifikator adalah:
   a. Mengelola sarana Pelaporan Pelanggaran LPEI.
   b. Menerima Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran.
   c. Meminta bukti awal dari Pelapor Pelanggaran melalui sarana yang tersedia.
   d. Melakukan analisa awal terhadap Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran.
   e. Mengajukan izin prinsip tindak lanjut pemrosesan Pelaporan Pelanggaran kepada Direktur Pelaksana Bidang.
   f. Melakukan proses verifikasi Pelaporan Pelanggaran sesuai izin prinsip tindak-lanjut pemrosesan yang disetujui oleh Direktur Pelaksana Bidang.
   g. Menatausahakan Pelaporan Pelanggaran secara tertib dan aman sehingga aspek kerahasiaan dapat terjaga dengan baik.

Mekanisme Penanganan Laporan Pelanggaran

Mekanisme atau prosedur umum dalam penanganan pelaporan *Whistleblowing System* (WBS) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terlapor merupakan pihak pelaku pelanggaran yang diketahui atau dialami langsung oleh pihak Pelapor Pelanggaran.
2. Pelapor menyampaikan pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor melalui sistem WISE. Laporan yang sudah masuk ke Sistem WISE tersebut akan diverifikasi oleh verifikatur, yang dalam hal ini adalah Unit Kerja Kepatuhan.
3. Petugas WBS melakukan verifikasi kelengkapan unsur pengaduan berdasarkan metode 4W + 1 H. Apabila terdapat keterangan yang masih kurang lengkap, Petugas WBS perlu meminta data atau keterangan pendukung kepada Pelapor.

Whistleblowing System Management

1. The Management of Violation Reporting is carried out by the Verifier, under the direct supervision of the Compliance Unit Head.
2. To avoid any malicious intent in Violation Reports submitted by the Violation Reporter, the Verifier must conduct initial screening of received Violation Reports.
3. If a Violation Report is not accompanied by initial evidence or if the initial evidence provided is not directly related to the Violation Report, then such Violation Report is not eligible for further processing.
4. The duties and responsibilities of the Verifier are:
   a. Managing the Violation Reporting facility of Indonesia Eximbank.
   b. Receiving Violation Reports submitted by the Violation Reporter.
   c. Requesting initial evidence from the Violation Reporter through available means.
   d. Conducting initial analysis of the Violation Reports submitted by the Violation Reporter.
   e. Seeking approval for the principle permission to proceed with the processing of the Violation Reports from the Executive Director of the relevant department.
   f. Conducting verification processes of Violation Reports in accordance with the approved principle permission for further processing granted by the Executive Director of the relevant department.
   g. Ensuring orderly and secure Violation Reporting so that confidentiality aspects can be well maintained.

Mechanism for Handling Violation Reports

The mechanism or general procedure in handling reports through the Whistleblowing System (WBS) can be outlined as follows:

1. The Reported Party (Terlapor) is the perpetrator of the violation known or directly experienced by the Reporting Party.
2. The Reporting Party submits a complaint regarding the violation committed by the Reported Party through the WISE system. The reports received in the WISE System are verified by verifiers, in this case, the Compliance Unit.
3. WBS personnel verify the completeness of the complaint elements based on the 4W + 1 H method. If there is insufficient information, WBS personnel may request additional data or information from the Reporter.

4. Setelah data dan keterangan lengkap, proses dilanjutkan ke Tahap Investigasi oleh Satuan Kerja Audit Internal sebagai Investigator.
   a. Apabila terlapor adalah Unsur Manajemen (jabatan Head of ke atas), maka verifikatur meminta persetujuan kepada Direktur Pelaksana/Head of yang membidangi fungsi Kepatuhan untuk melanjutkan ke Tahap Investigasi atau langsung disampaikan kepada Direktur Eksekutif (ketua Dewan Direktur).
   b. Apabila terlapor adalah unsur Dewan Direktur atau Direktur Pelaksana, maka laporan disampaikan kepada Direktur Eksekutif (yang selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk dilaporkan kepada Kementerian Keuangan, up. DJKN).
   c. Direktur Pelaksana/Head of yang membidangi fungsi Kepatuhan memberikan catatan tambahan (jika ada) sebelum ke Tahap Investigasi.
5. Satuan Kerja Audit Internal menginvestigasi bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan menindaklanjuti hasil investigasi terhadap terlapor, dengan menginformasikan laporan tersebut "terbukti" atau "tidak terbukti," sebagai berikut:
   a. Apabila Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka hasil investigasi diinformasikan dan diserahkan kepada Unit Kepatuhan untuk pemberhentian proses.
   b. Apabila Terlapor Manajemen LPEI terbukti melakukan pelanggaran, maka hasil investigasi diserahkan kepada Direktur Eksekutif untuk diberikan keputusan/sanksi terhadap Terlapor. Keputusan/sanksi tersebut akan didisposisikan ke Unit Kerja SDM (melalui Direktur Pelaksana/Head of yang membidangi SDM) untuk ditindaklanjuti.
   c. Apabila Terlapor bukan Manajemen LPEI terbukti melakukan pelanggaran, maka hasil investigasi diserahkan kepada Unit Kerja SDM untuk ditindaklanjuti.
6. Untuk terlapor bukan Manajemen LPEI, Unit Kerja SDM menyerahkan proses selanjutnya kepada Komite Etik/Kepegawaian untuk diberikan keputusan/sanksi atas Terlapor.

7. Komite Etik/Kepegawaian mengeluarkan keputusan/sanksi atas Terlapor dan menyerahkan Keputusan/sanksi tersebut kepada Unit Kerja SDM untuk ditindaklanjuti.

4. After obtaining complete data and information, the process proceeds to the Investigation Stage by the Internal Audit Unit as the Investigator.
   a. If the Reported Party is a Management Entity (Head of or above), the verifier seeks approval from the Executive Director/Head of the Compliance Function to proceed to the Investigation Stage or directly reports to the Executive Director (Chair of the Board of Directors).
   b. If the Reported Party is a member of the Board of Directors or an Executive Director, the report is submitted to the Executive Director (who may then consider reporting to the Ministry of Finance, specifically the Directorate General of State Assets).
   c. The Executive Director/Head of the Compliance Function provides additional notes (if any) before proceeding to the Investigation Stage.

5. The Internal Audit Unit investigates the evidence of the violation committed by the Reported Party and follows up on the investigation results against the Reported Party, informing whether the allegation is "proven" or "not proven," as follows:

   a. If the Reported Party is not proven to have committed a violation, the investigation results are informed and handed over to the Compliance Unit to cease the process.
   b. If the Reported Party, a Management Entity of Indonesia Eximbank, is proven to have committed a violation, the investigation results are handed over to the Executive Director to decide/impose sanctions on the Reported Party. The decision/sanction is then forwarded to the HR Unit (via the Executive Director/Head of the HR department) for further action.
   c. If the Reported Party, not a Management Entity of Indonesia Eximbak, is proven to have committed a violation, the investigation results are handed over to the HR Unit for further action.
6. For Reported Parties not belonging to the Management Entity of Indonesia Eximbak, the HR Unit hands over the further process to the Ethics/Personnel Committee to decide/impose sanctions on the Reported Party.
7. The Ethics/Personnel Committee issues a decision/sanction on the Reported Party and hands over the decision/sanction to the HR Unit for further action.

8. Unit Kerja SDM menindaklanjuti keputusan/sanksi baik yang diberikan oleh Direktur Eksekutif maupun Komite Etik/Kepegawaian. Setelah tindak lanjut atas keputusan/sanksi tersebut, Unit Kerja yang bertanggungjawab atas WBS membuat Laporan Penanganan Pelanggaran.

Selain prosedur yang telah diuraikan di atas, LPEI juga melakukan penguatan sistem pengendalian internal melalui peluncuran *Whistleblowing System* (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Kemenkeu (Pusintek). Langkah ini diikuti dengan koordinasi dan asistensi dari Itjen Kemenkeu terkait sistem Pencegahan dan Penindakan (*profiling, whistle blowing*), yang menghasilkan pembentukan *front office* penerimaan laporan WBS melalui https://ayolaporlpei.kemenkeu.go.id/.

Hasil Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut

Sepanjang tahun 2023, telah dilakukan monitoring secara berkala terhadap Pengelolaan sistem Pelaporan dugaan pelanggaran, dan LPEI tidak menerima laporan pengaduan pelanggaran, sehingga tidak terdapat hal terkait laporan pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti.

8. The HR Unit follows up on the decision/sanction given by the Executive Director or the Ethics/Personnel Committee. After following up on the decision/sanction, the Unit responsible for WBS creates a Violation Handling Report.

In addition to the procedures outlined above, Indonesia Eximbak also strengthens its internal control system through the launch of the Whistleblowing System (WBS) and Gratification Control in collaboration with the Ministry of Finance, represented by the Inspectorate General of the Ministry of Finance (Itjen Kemenkeu) and the Financial Information and Technology System Center of the Ministry of Finance (Pusintek). This initiative is followed by coordination and assistance from Itjen Kemenkeu regarding Prevention and Enforcement Systems (profiling, whistleblowing), resulting in the establishment of a front office for receiving WBS reports through https://ayolaporlpei.kemenkeu.go.id/.

Complaint Handling and Follow-up Results

Throughout 2023, the management of the alleged violation reporting system was monitored on a regular basis, and Indonesia Eximbank received no reports of violation complaints, so there were no violations that needed to be followed up on.

Kebijakan Antikorupsi dan Anti Gratifikasi

Anti-Corruption and Anti-Gratification Policies

LPEI berkomitmen untuk patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan tindak korupsi dan gratifikasi. Oleh karena itu, LPEI mewajibkan seluruh Dewan Direktur, Direktur Pelaksana dan seluruh pegawai LPEI untuk menjunjung tinggi persaingan usaha yang adil, nilai-nilai sportivitas dan profesionalisme serta prinsip-prinsip GCG. LPEI mengatur secara tegas atas larangan segala bentuk praktik korupsi, balas jasa, suap dan/atau gratifikasi dan telah mengimplementasikan beberapa kebijakan terkait pencegahan korupsi.

Indonesia Eximbank is committed to compliance with applicable laws and supports the Government of Indonesia in combating corruption and gratification. Therefore, Indonesia Eximbak obliges all Board of Directors, Executive Directors, and all Indonesia Eximbak employees to uphold fair competition, sportsmanship, professionalism, and principles of good corporate governance (GCG). Indonesia Eximbak explicitly prohibits all forms of corruption, bribery, and gratuities and has implemented several policies related to corruption prevention.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Dasar Kebijakan

1. Eksternal:
   a. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
   b. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   c. Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
   d. Surat Edaran No. SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN Setelah Diberlakukannya Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
   e. Pasal 57 dan lampiran PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Internal:
   a. Peraturan Dewan Direktur No. 0003/PDD/06/2022 tentang Pencabutan Peraturan Dewan Direktur No. 0001/PDD/07/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat LPEI.

REPORT OF STATE OF OFFICIAL WEALTH (LHKPN)

Legal Basis for the Policy

1. External:
   a. Law No. 28 of 1999 Concerning Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism Governance.
   b. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
   c. Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2020 concerning Amendments to Corruption Eradication Commission Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth.
   d. Circular Letter No. SE-08/01/10/2016 regarding Technical Instructions for Submission and Management of Wealth Reports After the Implementation of Corruption Eradication Commission Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth.
   e. Article 57 and attachment to Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Knowing the Customer Principles of Indonesia Eximbank.
2. Internal:
   a. Board of Directors Regulation No. 0003/PDD/06/2022 concerning the Revocation of Board of Directors Regulation No. 0001/PDD/07/2017 dated 21 July 2017 concerning the Obligation to Submit Wealth Reports of State Officials for Officials of Indonesia Eximbank.

b. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0008/ PDE/06/2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI Wajib Lapor LHKPN.

Penerapan di LPEI

Monitoring dan koordinasi atas pelaksanaan dan penerapan LHKPN di LPEI menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan dengan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemantauan dan *reminder* kepada seluruh Wajib Lapor LHKPN LPEI kepada seluruh Kepala Divisi, Head of, Direktur Pelaksana, Direktur Eksekutif, dan Dewan Direktur untuk mengisi formulir *e-Filling* LHKPN.
2. Penunjukan sebagai petugas Admin Instansi KPK.
3. Pengisian dokumen *e-Filling* melalui sistem e-LHKPN dan menyampaikan surat kepada KPK perihal rekapitulasi Wajib Lapor LHKPN LPEI.
4. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis Tata Cara Pengisian Aplikasi E-LHKPN dengan jumlah peserta sebanyak 40 pejabat wajib lapor LHKPN dan pembicara/pemateri langsung dari KPK.
5. Pendampingan teknis pengisian e-LHKPN kepada Wajib Lapor LHKPN.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dasar Kebijakan

1. Eksternal:
   a. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
   c. Lampiran PMK No. 208/2021 Tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Internal:
   a. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0013/ PDE/08/2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI.
   b. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0042/ PDE/09/2019 tentang Pakta Integritas LPEI.

b. Executive Director Regulation No. 0008/ PDE/06/2022 concerning the Obligation to Submit Wealth Reports (LHKPN) for Indonesia Eximbank Officials Required to Report LHKPN.

Implementation at Indonesia Eximbank

Monitoring and coordination of the implementation and application of Wealth Report (LHKPN) in Indonesia Eximbank is the responsibility of the Compliance Unit with the following implementation:

1. Monitoring and reminders to all Mandatory Reporters of LHKPN in Indonesia Eximbank including all Division Heads, Heads of, Executive Directors, and Board of Directors to fill out the e-Filling LHKPN form.
2. Appointment as the Admin Officer of the KPK Agency.
3. Filling out e-Filling documents through the e-LHKPN system and submitting letters to the KPK regarding the recapitulation of Mandatory Reporters of LHKPN in Indonesia Eximbank.
4. Conducting socialization and technical guidance on the Procedure for Filling out the E-LHKPN Application with a total of 40 participants, including mandatory reporters of LHKPN, with speakers directly from the KPK.
5. Technical Assistance for filling out e-LHKPN to Mandatory LHKPN Reporters.

GRATIFICATION CONTROL

Legal Basis for the Policy

1. External:
   a. Law No. 31 of 1999 Concerning the Eradication of Corruption Crime, as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime.
   b. Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2019 concerning Gratuities Reporting.
   c. Appendix to Minister of Finance Regulation No. 208/2021 Regarding the Principles of Governance, Risk Management Principles, and Customer Identification Principles of the Export Financing Institution of Indonesia.
2. Internal:
   a. Executive Director Regulation No. 0013/ PDE/08/2022 concerning Gratuities Control within Indonesia Eximbank.
   b. Executive Director Regulation No. 0042/ PDE/09/2019 concerning Indonesia Eximbank Integrity Pact.

Penerapan di LPEI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI senantiasa berupaya untuk melaksanakan tata kelola yang baik sebagai salah satu upaya untuk mendukung penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. LPEI telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang berada di bawah Satuan Kerja Kepatuhan.

Penerapan pengendalian Gratifikasi secara berkesinambungan dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik diatur sebagai berikut:

1. Sosialisasi Berkelanjutan
   Dalam rangka penguatan budaya Kepatuhan dan peningkatan *awareness*, UPG melakukan sosialisasi kepada jajaran LPEI secara berkelanjutan dalam bentuk namun tidak terbatas pada sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka/daring dengan pembicara/pemateri bersumber dari eksternal maupun oleh UPG sendiri.

   Sosialisasi Gratifikasi disampaikan pada beberapa pelatihan antara lain *New Hire Orientation* (NHO), *E-Learning*, maupun sosialisasi khusus dengan peserta seluruh jajaran LPEI atau pihak eksternal terkait. Selain itu sosialisasi Gratifikasi juga disampaikan dalam bentuk *email blast*, *flyer*, dan *screen saver*.

2. Penandatanganan Pakta Integritas
   Pakta Integritas merupakan pernyataan seluruh jajaran LPEI untuk berkomitmen menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan LPEI dengan cara tidak meminta atau menerima Gratifikasi dari pihak yang memiliki benturan kepentingan. Pakta Integritas ditandatangani oleh Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana pada saat ditetapkan dan dilakukan penandatanganan ulang setiap setahun sekali. Selain itu, Pakta Integritas juga ditandatangani oleh seluruh pegawai LPEI (selain Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana) pada saat pertama kali bekerja di LPEI.

3. Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/Rekanan, dan Nasabah/Debitur perihal larangan permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi dalam bentuk apapun untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (Vendor), Mitra, dan Nasabah LPEI terutama terkait hari raya keagamaan (Idul Fitri dan Natal).

Implementation at Indonesia Eximbank

In carrying out its business activities, Indonesia Eximbank consistently strives to implement good governance as part of its efforts to support the establishment of a clean state free from corruption, collusion, and nepotism. Indonesia Eximbank has established the Gratuity Control Unit (UPG) which operates under the Compliance Unit.

The continuous implementation of gratuity control in the context of good governance is regulated as follows:

1. Ongoing Socialization
   In order to strengthen compliance culture and increase awareness, UPG conducts continuous socialization to all levels of Indonesia Eximbank through various means including but not limited to face-to-face or online sessions with speakers from both external and internal sources.

   Gratuity socialization is provided during various training sessions such as New Hire Orientation (NHO), Relationship Manager Development Program (RMDP), and special sessions involving all levels of Eximbank. Additionally, gratuity socialization is disseminated through email blasts, flyers, and screensavers.

2. Signing of Integrity Pacts
   The Integrity Pact is a statement by all Indonesia Eximbank staff committing to uphold high moral and ethical standards, protect and preserve the image, credibility, and interests of Indonesia Eximbank by refraining from soliciting or accepting gratuities from parties with conflicting interests. The Integrity Pact is signed by the Board of Directors and Executive Directors upon establishment and re-signed annually. Furthermore, all Eximbank employees (excluding Board of Directors and Executive Directors) sign the Integrity Pact upon joining Indonesia Eximbank.

3. Dissemination of Circulars to Eximbank Employees, Partners/Vendors, and Customers/Borrowers regarding the prohibition of soliciting, receiving, and giving gratuities in any form to/from Indonesia Eximbank employees, as well as to Partners, Service Providers (Vendors), Partners, and Indonesia Eximbank Customers, especially concerning religious holidays (Eid al-Fitr and Christmas).

4. Pelaporan Gratifikasi
   Jajaran LPEI wajib melakukan penolakan atas Gratifikasi yang dianggap suap dan/atau yang melampaui batas nilai kewajaran yang ditetapkan pada kesempatan pertama dan melaporkannya kepada UPG atau langsung kepada KPK. Selama tahun 2023, terdapat sebanyak 8 (delapan) laporan Gratifikasi yang diterima oleh UPG.

   Pelaporan Gratifikasi di LPEI dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu:
   a. Pelaporan melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
   b. Pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Identifikasi dan mitigasi Risiko/Titik Rawan Gratifikasi
   Melakukan identifikasi terhadap titik rawan gratifikasi dan/atau memahami risiko terjadinya gratifikasi pada aktivitas/kewenangan/*core business* yang mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal, serta menetapkan langkah mitigasi risiko yang terukur atas hasil pemetaan/identifikasi yang dilaksanakan.

6. Penerapan Berkesinambungan
   a. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan Internal terkait gratifikasi secara berkala dengan menyesuaikan terhadap aturan eksternal.
   b. Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari penerima gratifikasi.
   c. Menyampaikan laporan gratifikasi secara berkala kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.
   d. Mengadministrasikan laporan gratifikasi secara tertib.
   e. Pengisian rencana dan realisasi kerja UPG pada sistem Gratifikasi *Online* (GOL) KPK.
   f. Pelaksanaan *e-learning* Peningkatan Pemahaman Gratifikasi dari KPK kepada seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan.

4. Reporting of Gratuities
   Indonesia Eximbank staff are required to reject gratuities deemed as bribes and/or exceeding the reasonable value limit established at the first opportunity and report them to UPG or directly to the Corruption Eradication Commission (KPK). During 2023, UPG received a total of 8 (eight) gratuity reports.

   Gratuity reports at Indonesia Eximbank are submitted through two mechanisms:
   a. Reporting through the Gratuity Control Unit (UPG).
   b. Reporting to the Corruption Eradication Commission.

5. Identification and mitigation of Gratification Risks/ Vulnerable Points
   Identify gratification vulnerable points and/or understand the risk of gratification in activities/ authorities/core business that consider internal and external factors, and determine measurable risk mitigation steps for the results of the mapping/ identification carried out.

6. Continuous Implementation
   a. Periodically drafting and/or evaluating internal regulations related to gratuities by adapting to external regulations.
   b. Receiving gratuity reports along with supporting documents from the gratuity recipients.
   c. Regularly submitting gratuity reports to the Director overseeing the Compliance function.
   d. Administering gratuity reports systematically.
   e. Filling out UPG work plans and achievements in the Corruption Eradication Commission's Gratuity Online System (GOL).
   f. Conducting e-learning sessions on Improving Understanding of Gratuities by the Corruption Eradication Commission for all Compliance Unit employees.

STRATEGI *ANTI FRAUD*

Dasar Kebijakan

1. Eksternal:
   PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

2. Internal:
   Peraturan Direktur Eksekutif No. PDE 0029/PDE/12/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Penerapan Strategi *Anti Fraud* LPEI.

Penerapan di LPEI

LPEI telah menerapkan Strategi *Anti-Fraud* yang diatur dalam PDE No. 0029/PDE/12/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Penerapan Strategi *Anti Fraud* LPEI. Implementasi strategi *Anti Fraud* LPEI melibatkan seluruh unit kerja dengan fungsi sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

a. Pilar Pencegahan
   Pilar pencegahan merupakan bagian dari Strategi Anti *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling kurang mencakup antara lain:
   1) Budaya *Anti Fraud* (*Fraud awareness*), dilakukan oleh Koordinator *Anti Fraud*, Unit Kerja Kepatuhan dan Unit Kerja Sumber Daya Manusia.
   2) Identifikasi kerawanan (*vulnerability identification*), dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, Unit Kerja Kepatuhan, Unit Kerja Transformasi & Budaya Lembaga, dan Unit Kerja Sumber Daya Manusia.
   3) Pelaksanaan *Know Your Employee*, dilakukan oleh Unit Kerja Sumber Daya Manusia.

b. Pilar Deteksi
   Pilar deteksi merupakan bagian dari Strategi *Anti Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha LPEI, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme sebagai berikut:
   1) *Whistleblowing*, dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal.
   2) *Surprise Audit*, dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal.
   3) *Surveillance System*, dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal.

ANTI FRAUD STRATEGY

Legal Basis for the Policy

1. External:
   Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Customer Due Diligence Principles of the Indonesian Export Financing Institution.
2. Internal:
   Executive Director Regulation No. 0029/PDE/12/2023 concerning the Operational Manual for Indonesia Eximbak's Anti-Fraud Strategy.

Implementation at Indonesia Eximbank

Indonesia Eximbank has implemented an Anti-Fraud Strategy which is regulated in PDE No. 0029/PDE/12/2023 concerning Standard Operational Guidelines for Implementing the Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy. The implementation of Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy involves all work units with functions in accordance with their authority, namely:

a. Prevention Pillar
   The prevention pillar is part of the Anti-Fraud Strategy which contains steps to reduce the potential risk of Fraud, which at least includes, among others:
   1) Anti-Fraud culture (Fraud awareness), carried out by the Anti-Fraud Coordinator, Compliance Work Unit and Human Resources Work Unit.
   2) Vulnerability identification, carried out by the Risk Management Work Unit, Compliance Work Unit, Institutional Transformation & Culture Work Unit, and Human Resources Work Unit.
   3) Implementation of Know Your Employee, carried out by the Human Resources Work Unit.

b. Detection Pillar
   The detection pillar is part of the Anti Fraud Strategy that contains steps in order to identify and find Fraud in Indonesia Eximbank business activities, which includes at least the following policies and mechanisms:
   1) Whistleblowing, conducted by Internal Audit Work Unit.
   2) Surprise Audit, conducted by Internal Audit Working Unit.
   3) Surveillance System, conducted by Internal Audit Working Unit.

c. Pilar Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari Strategi *Anti Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah sebagai berikut:
1) Investigasi, dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal
2) Sistem Pelaporan, dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal.
3) Pengenaan Sanksi, dilakukan oleh Unit Kerja Sumber Daya Manusia dan Unit Kerja Terkait.

d. Pilar Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari Strategi *Anti Fraud* yang dilakukan oleh Seluruh Unit Kerja. Khusus tindak lanjut yang terkait dengan penanganan kasus pidana sebagai akibat tindakan *Fraud* di koordinasikan oleh Unit Kerja yang membidangi Hukum.

Penerapan Strategi *Anti Fraud* sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko tidak terpisahkan dari cakupan penerapan Manajemen Risiko secara umum dengan penguatan aspek-aspek Manajemen Risiko yang fokus pada pengendalian *Fraud*, antara lain meliputi:
1. Pengawasan Aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif;
2. Kebijakan dan Prosedur;
3. Struktur Organisasi dan pertanggungjawaban; dan
4. Pengendalian dan Pemantauan.

Berikut adalah *Framework* penerapan Strategi *Anti Fraud* LPEI:

c. Pillar of Investigation, Reporting, and Sanctions
The pillars of investigation, reporting, and sanctions are part of the Anti Fraud Strategy which at least contains the following steps:
1) Investigation, conducted by the Internal Audit Work Unit
2) Reporting System, carried out by the Internal Audit Work Unit.
3) Imposition of Sanctions, carried out by the Human Resources Work Unit and Related Work Units.

d. Monitoring, Evaluation, and Follow-up Pillar
The monitoring, evaluation, and follow-up pillars are part of the Anti-Fraud Strategy carried out by all Work Units. Particular follow-up related to the handling of criminal cases as a result of Fraud is coordinated by the Work Unit in charge of Law.

The implementation of the Anti Fraud Strategy as part of the implementation of Risk Management is inseparable from the scope of Risk Management implementation in general by strengthening aspects of Risk Management that focus on controlling Fraud, including:
1. Active Supervision of the Board of Directors and Executive Director;
2. Policies and Procedures;
3. Organizational structure and accountability; and
4. Control and Monitoring.

The following is the Framework for implementing the Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy:

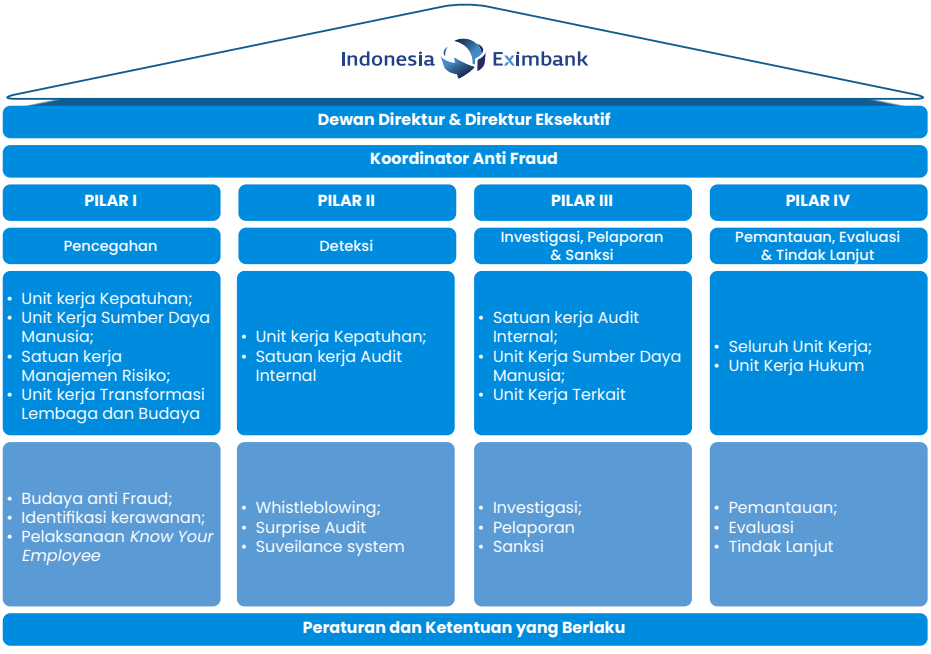

Sosialisasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi

Komitmen kuat LPEI terhadap anti korupsi menjadi fokus utama dalam upaya implementasi prinsip-prinsip GCG. Sosialisasi kebijakan anti korupsi dan anti gratifikasi menjadi sebuah rangkaian program yang dilakukan secara rutin oleh LPEI. Sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi di tahun 2023 dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis Tata Cara Pengisian Aplikasi E-LHKPN KPK dengan pembicara/pemateri langsung dari KPK
2. Pelatihan Pengendalian Gratifikasi kepada pegawai baru pada pelatihan New Hired Orientation (NHO).
3. Sosialisasi "Peningkatan *Awareness* terkait Budaya Anti Korupsi untuk Menyikapi Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia" kepada seluruh pegawai beserta jajaran Manajemen LPEI dengan narasumber Bapak Amir Arief selaku Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK.
4. Sosialisasi Gratifikasi kepada pegawai Tenaga Alih Daya (TAD) LPEI pada pelatihan Nilai Budaya, Kode Etik, & Kode Perilaku LPEI.
5. Sosialisasi Gratifikasi kepada seluruh KAP rekanan LPEI pada acara sosialisasi Penguatan Bisnis LPEI melalui Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada KAP Rekanan LPEI.
6. Pelaksanaan *e-learning* "Penguatan Pemahaman Gratifikasi" yang diselenggarakan oleh ACLC KPK kepada seluruh pegawai di Kantor Wilayah LPEI.
7. Pelaksanaan *e-learning* modul "Pengendalian Gratifikasi" kepada peserta sebanyak 486 pegawai LPEI melalui platform LMS LPEI (Xlearn).
8. Mengikuti Bimbingan teknis Aplikasi GOL KPK modul Program Pengendalian Gratifikasi kepada UPG.
9. Melakukan diseminasi pesan Anti Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS) melalui *screensaver* kepada seluruh pegawai LPEI.
10. Melakukan diseminasi pesan Anti Gratifikasi melalui *flyer* dan *e-mail blast* kepada seluruh pegawai LPEI.

Anti-Corruption and Anti-Gratification Socialization

Indonesia Eximbank's strong commitment to anti-corruption is its primary focus in implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG). The dissemination of anti-corruption and anti-gratification policies is a series of programs conducted regularly by Indonesia Eximbank. In 2023, anti-corruption and anti-gratification socialization were carried out through the following activities:

1. Conducting dissemination and technical guidance on the Procedure how to fill in the KPK E-LHKPN Application with speakers/presenters directly from the Corruption Eradication Commission (KPK).
2. Gratification Control Training to new employees at New Hired Orientation (NHO) training.
3. Socialization of "Increasing Awareness related to Anti-Corruption Culture to Respond to the Decline in Indonesia's Corruption Perception Index" to all employees and management of Indonesia Eximbank with resource person Mr. Amir Arief as Director of Anti-Corruption Socialization and Campaign of KPK.
4. Socialization of Gratification to Indonesia Eximbank Outsourced Personnel (TAD) employees at the Indonesia Eximbank Cultural Values, Code of Ethics, & Code of Conduct training.
5. Gratification socialization to all KAP partners of Indonesia Eximbank at the socialization event of Strengthening Indonesia Eximbank's Business through the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) to KAP Partners of Indonesia Eximbank.
6. Implementation of e-learning "Strengthening Understanding of Gratification" organized by ACLC KPK to all employees in the Indonesia Eximbank Regional Office.
7. Implementation of e-learning module "Gratification Control" to 486 Indonesia Eximbank employees through Indonesia Eximbank LMS platform (Xlearn).
8. Following the technical guidance of the KPK GOL Application for the Gratification Control Program module to the UPG.
9. Disseminating the Anti Gratification and Whistleblowing System (WBS) messages through screensavers to all Indonesia Eximbank employees.
10. Disseminating Anti Gratification messages through flyers and e-mail blasts to all Indonesia Eximbank employees.

Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Anti-Money Laundering (AML) And Prevention of Terrorism Financing (PPT) Policy

Penerapan Kebijakan APU-PPT

LPEI telah berkomitmen secara konsisten untuk menciptakan tata kelola yang baik dan bersih, serta mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, LPEI telah menerapkan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) secara menyeluruh. Kebijakan APU-PPT LPEI mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dalam POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Penerapan kebijakan APU-PPT yang efektif, dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), harus diintegrasikan ke dalam Sistem Pengendalian Internal dan diinternalisasi dalam Kode Etik LPEI. Pejabat senior bertanggung jawab untuk memastikan bahwa LPEI memiliki struktur pengendalian internal yang efektif dalam mencegah TPPU dan TPPT. Beberapa langkah konkret terkait hal tersebut antara lain:

1. Dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
2. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU-PPT; dan
3. Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

Dasar Kebijakan

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Implementation of AML-PPT Policy

Indonesia Eximbank has consistently committed to establishing good and clean governance practices, as well as preventing Money Laundering (ML) and Terrorism Financing (TF) crimes. In order to fulfill this commitment, Indonesia Eximbank has comprehensively implemented Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CFT) Policies. Indonesia Eximbank AML/CFT policy refers to the regulations established in Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Programs in the Financial Services Sector.

The effective implementation of AML/CFT policies, with a risk-based approach, must be integrated into the Internal Control System and internalized in Indonesia Eximbank Code of Ethics. Senior officials are responsible for ensuring that Indonesia Eximbank has an effective internal control structure in place to prevent ML and TF. Some concrete steps related to this include:

1. Having adequate policies, procedures, and internal monitoring;
2. Establishing clear authority limits and responsibilities for units involved in implementing AML/CFT programs; and
3. Conducting independent reviews to ensure the effectiveness of AML and CFT program implementation.

Legal Basis of the Policies

1. Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2009 concerning the Indonesian Export Financing Agency.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.
3. Law of the Republic of Indonesia No. 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes.
4. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
7. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
8. POJK nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan
9. POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.
11. Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
12. Surat Edaran OJK No. 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
13. Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
14. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

5. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 61 of 2021 concerning Amendments to Government Regulation No. 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.
6. Regulation of the Minister of Finance No. 58/PMK.06/2020 concerning Supervision and Oversight of the Indonesian Export Financing Agency.
7. Regulation of the Minister of Finance No. 208/2021 concerning Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of the Indonesian Export Financing Agency.
8. POJK No. 8 of 2023 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering Programs, Prevention of Terrorist Financing, and Prevention of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector.
9. Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning Supervision of the Indonesian Export Financing Agency.
10. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 37/SEOJK.05/2017 concerning Guidelines for the Implementation of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing Programs in the Non-Bank Financial Industry Sector.
11. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 38/SEOJK.01/2017 concerning Guidelines for Immediate Blocking of Customer Funds in the Financial Services Sector whose Identities are Listed in the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations.
12. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 29/SEOJK.01/2019 concerning Amendments to Circular Letter of the Financial Services Authority No. 38/SEOJK.01/2017 concerning Guidelines for Immediate Blocking of Customer Funds in the Financial Services Sector whose Identities are Listed in the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations.
13. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 31/SEOJK.01/2019 concerning Guidelines for the Immediate Blocking of Customer Funds in the Financial Services Sector whose Identities are Listed in the List of Financing for Proliferation of Weapons of Mass Destruction.
14. Regulation of the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center No. PER-02/1.02/PPATK/02/15 concerning Categories of Service Users Potentially Engaging in Money Laundering Crimes.

15. Peraturan PPATK No. 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

16. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan dalam Penerapan APU dan PPT di LPEI

Dalam pelaksanaan penerapan program APU PPT di LPEI, Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan telah dilakukannya proses identifikasi, penilaian, dan pemahaman risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), termasuk memastikan terpenuhinya kewajiban untuk:

1. Mendokumentasikan penilaian risiko APU PPT.
2. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan.
3. Mengkinikan penilaian risiko APU PPT secara berkala.
4. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko APU PPT kepada instansi yang berwenang.

15. Regulation of the Financial Transaction Reports and Analysis Center No. 1 of 2021 concerning Procedures for Submitting Reports on Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions, and Fund Transfer Financial Transactions from and to Abroad through the GOAML Application for Financial Services Providers.
16. Regulation of the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014 concerning the Integrated User Information System.

Duties and Responsibilities of the Compliance Working Unit in the Implementation of AML and CFT at Indonesia Eximbank

In the implementation of the AML/CFT Program at Indonesia Eximbank, the Compliance Unit is responsible for ensuring the identification, assessment, and understanding of the risks of money laundering and/or terrorist financing related to customers, countries or geographic areas, products, services, transactions, or distribution networks (delivery channels), including ensuring compliance with the obligations to:

1. Document the AML/CFT risk assessment.
2. Consider all relevant risk factors before determining the overall risk level, as well as the level and type of risk mitigation measures to be applied.
3. Review the AML/CFT risk assessment periodically.
4. Have adequate mechanisms for providing AML/CFT risk assessment information to competent authorities.

Transparansi Keuangan dan Non-Keuangan Lembaga

Financial and Non-Financial Transparency of the Institution

Selama tahun 2023, LPEI menyusun laporan-laporan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan telah menyampaikannya kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi. Laporan-laporan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Laporan kepada Kementerian Keuangan
   a. Laporan Rancangan RKAT.
   b. Laporan Realisasi RKAT.
   c. Laporan Pengawasaan RKAT.
   d. Laporan Pelaksanaan Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan Piutang LPEI
   e. Laporan Pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN.
   f. Laporan Keuangan Tahunan Audited.
   g. Laporan Penerapan Prinsip Manajemen Risiko.
   h. Laporan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI.
2. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
   a. Laporan Rencana Bisnis.
   b. Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
   c. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
   d. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data Nasabah.
   e. Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data Nasabah.
   f. Laporan Penerapan Prinsip Manajemen Risiko.
   g. Laporan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI.
   h. Laporan Hasil Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan.
   i. Laporan Penugasan Pemerintah kepada LPEI.
   j. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
   k. Laporan Bulanan.
3. Laporan kepada Bank Indonesia (BI)
   a. Laporan Rencana Utang Luar Negeri.
   b. Laporan Utang Luar Negeri.
   c. Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD).
   d. Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan BI RTGS.
   e. Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi.
4. Laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
   a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Throughout 2023, Indonesia Eximbank compiled reports in accordance with the regulations and laws in force and has submitted them to stakeholders as a form of openness and transparency. The reports are as follows:

1. Reports to the Ministry of Finance:
   a. RKAT Draft Report.
   b. RKAT Realization Report.
   c. RKAT Monitoring Report.
   d. Report on the Implementation of the Write-off and/or Collection of Indonesia Eximbank Receivables
   e. Report on the Implementation of PEN Government Investment.
   f. Audited Annual Financial Statements.
   g. Report on the Implementation of Risk Management Principles.
   h. Report on the Implementation of Indonesia Eximbank Good Governance Principles.
2. Reports to the Financial Services Authority (OJK):
   a. Business Plan Report.
   b. Business Plan Realization Report.
   c. Business Plan Supervision Report.
   d. Customer Data Update Activity Plan Report.
   e. Customer Data Update Activity Realization Report.
   f. Risk Management Principles Application Report.
   g. Implementation Report of Good Governance Principles of Indonesia Eximbank.
   h. Self-Assessment Report on Health Level Results.
   i. Government Assignments Report to Indonesia Eximbank.
   j. Sustainable Financial Action Plan Report.
   k. Monthly Reports.
3. Reports to Bank Indonesia (BI):
   a. Foreign Debt Plan Report.
   b. Foreign Debt Report.
   c. Foreign Exchange Transaction Report (LLD).
   d. Results of BI RTGS Compliance Assessment Report.
   e. KPPK Reports that have gone through Attestation Procedures.
4. Reports to the Corruption Eradication Commission (KPK):
   a. State Official Wealth Report (LHKPN).

Buyback Obligasi dan Saham
Bond and Stock Buybacks

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, LPEI telah melakukan kegiatan buy back obligasi sebesar Rp145 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

a. Obligasi PUB IEB III Tahap V Tahun 2017 Seri C sebesar Rp80 miliar;
b. Obligasi PUB IEB IV Tahap IV Tahun 2019 Seri C sebesar Rp50 miliar;
c. Obligasi PUB IEB IV Tahap V Tahun 2019 Seri C sebesar Rp15 miliar.

Sedangkan *buy back* saham, berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 2 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI bukan merupakan perusahaan publik dan LPEI 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang modalnya tidak terbagi atas saham.

Until the end of fiscal year 2023, Indonesia Eximbank has conducted bonds buy-back activities amounting to Rp145 billion, as follows:

a. PUB IEB III Phase V of 2017 Series C Bonds amounting to Rp80 billion;
b. PUB IEB IV Phase IV of 2019 Series C Bonds amounting to Rp50 billion;
c. PUB IEB IV Phase V of 2019 Series C Bonds amounting to Rp15 billion.

While the shares buy-back, based on Article 19 of Law Number 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank, Indonesia Eximbank is not a public company and 100% (one hundred percent) owned by the Government of the Republic of Indonesia whose capital is not divided into shares.

Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0002/PDD/02/2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa LPEI, serta Standar Operasional Pengadaan Barang/Jasa LPEI dengan nomor PDE.0005.02/PDE/06/2023 Edisi I Revisi I.

Prinsip Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Prinsip dalam pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

1. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa LPEI harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal.
2. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa LPEI harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa LPEI bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
5. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
6. Adil dan tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apa pun, dengan tetap memperhatikan kepentingan LPEI.

Goods and Services Procurement Policy

The Procurement Policy for Goods and Services refers to Board of Directors Regulation (PDD) No. 0002/PDD/02/2022 regarding the Procurement Policy for Goods and Services of Indonesia Eximbank, as well as Operational Standards for Procurement of Goods/Services of Indonesia Eximbank with number PDE.0005.02/PDE/06/2023 Edition I Revision I.

Principles in the Procurement of Goods and Services

The principles in procurement of goods and services are as follows:

1. Efficiency, meaning that the procurement of goods/services by Indonesia Eximbank should be pursued using minimum funds and resources to achieve the set quality and objectives within the designated time frame or using the allocated funds to achieve maximum results and quality.
2. Effectiveness, meaning that the procurement of goods/services by Indonesia Eximbank should align with the established needs and objectives and provide the maximum possible benefits.
3. Transparency means that all provisions and information regarding the procurement of goods/services by Indonesia Eximbank are clear and widely accessible to interested Providers of Goods/Services and the general public.
4. Openness means that the procurement of goods/services can be participated in by all interested Providers of Goods/Services and by the general public.
5. Competitive means that the procurement of goods/services must be conducted through healthy competition among as many peer Providers of Goods/Services as possible, meeting the specified requirements, thereby obtaining competitively offered goods/services without any intervention that disrupts the creation of market mechanisms in the procurement of goods/services.
6. Fair and non-discriminatory means providing equal treatment to all potential Providers of Goods/Services and not leading to advantages for any particular party through any means or reasons, while still considering Indonesia Eximbank interests.

7. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;
8. Kehati-hatian berarti senantiasa memperhatikan langkah antisipasi untuk menghindari kerugian terhadap LPEI selama proses Pengadaan Barang/ Jasa ; dan
9. Independen berarti dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan integritas yang tinggi dan terhindar dari *conflict of interest*.

Metode Pengadaan

A. Metode pemilihan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dilaksanakan sebagai berikut:
   1. Pelelangan Umum;
   2. Pemilihan Langsung;
   3. Pengadaan Langsung;
   4. Penunjukan Langsung; atau
   5. Swakelola

B. Metode pemilihan untuk pengadaan Jasa Konsultasi dilaksanakan dengan:
   1. Seleksi Umum;
   2. Seleksi Langsung;
   3. Pengadaan Langsung;
   4. Penunjukan Langsung;

Ketentuan Dalam Pengelolaan Vendor

Ketentuan pengelolaan vendor diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Pengelola Rekanan Pengadaan Barang/Jasa PDP No. 0009/MDI/II/2023.

Kode Etik Di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0002/ PDD/02/2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa LPEI, Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa LPEI harus mematuhi etika sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang dan Jasa.

b. Bekerja secara profesional dan Independen serta menjaga kerahasiaan dokumen yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

7. Accountability means it must comply with the rules and regulations related to the procurement of goods/services so that it can be held accountable.

8. Prudence means always considering precautionary measures to avoid losses to the institution during the procurement process of goods and services.

9. Independence means that the implementation of procurement of goods and services must be carried out with high integrity and free from conflicts of interest.

Procurement Method

A. The methods of selection for procurement of Other Goods/Services are conducted as follows:
   1. Public Auction;
   2. Direct Selection;
   3. Direct Procurement;
   4. Direct Appointment; or
   5. Self-managed.

B. The methods of selection for procurement of Consultancy Services are conducted with:
   1. Public Selection;
   2. Direct Selection;
   3. Direct Procurement;
   4. Direct Appointment;

Provisions in Vendor Management

Provisions for vendor management are regulated in the Operational Technical Guidelines for the PDP Goods/Services Procurement Vendor Management No. 0009/MDI/II/2023.

Code of Ethics in the Field of Goods and Services Procurement

In accordance with Board of Directors Regulation (PDD) No.0002/PDD/02/2022 concerning Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement Policy, parties related to the implementation of Indonesia Eximbank Goods and Services Procurement must comply with the following ethics:

a. Carry out tasks in an orderly manner with a profound sense of responsibility to achieve predetermined objectives, thereby facilitating the seamless and accurate accomplishment of Procurement of Goods and Services goals.
b. Work professionally and independently and ensuring the safeguarding of document confidentiality pertinent to the Procurement of Goods and Services which by nature the disclosure of which could potentially lead to irregularities within said procurement processes.

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung, maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan semua pihak yang terkait baik secara langsung, maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan LPEI dalam Pengadaan Barang/Jasa.

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, unit kerja atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan LPEI; dan
h. Tidak menerima, tidak menawarkan dan tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

c. Refrain from exerting influence, either directly or indirectly, so as to prevent unhealthy competition.

d. Acknowledge and assume accountability for all decisions made according to the written agreement of the parties.
e. Mitigate and prevent the occurrence of conflicts of interest of all parties involved, either directly or indirectly in the process of Procurement of Goods and Services.
f. Institute measures to avert the squandering and misappropriation of Indonesia Eximbank's financial resources during the procurement phases of goods and services.
g. Refrain from engaging in acts of authority abuse and collusion with the intent of personal gain, work units or other parties which can directly or indirectly detrimentally impacting Indonesia Eximbank.

h. Refrain from accepting, offering and promising to give or receive gifts, rewards, commissions, rebates or anything else from or to anyone known or reasonably suspected to be related to the Procurement of Goods and Services.

Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0002/PDD/02/2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa LPEI, Para Pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di LPEI terdiri dari:

1. Komite Pengadaan;
2. Unit Kerja Pengusul Pengadaan;
3. Unit Kerja Pelaksana Pengadaan;
4. Panitia Pengadaan; dan
5. Unit Kerja Pelaksana Pengendalian Biaya

Sistem Pengawasan

Sesuai Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0002/PDD/02/2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa LPEI Pasal 18 yaitu:

1) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa bersifat pengawasan melekat (*built in control*) pada setiap fungsi-fungsi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
2) Fungsi pengawasan Pengadaan Barang/Jasa harus tercermin dalam sistem pengendalian internal dan penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi.

Activity Implementation

According to Executive Director Regulation (PDD) No. 0002/PDD/02/2022 regarding the Procurement Policy of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Parties involved in the implementation of Procurement of Goods and Services at Indonesia Eximbank consist of:

1. Procurement Committee
2. Procurement Initiating Work Unit
3. Procurement Implementing Work Unit;
4. Procurement Committee; and
5. Cost Control Implementation Work Unit.

Surveillance System

In accordance with the Board of Director Regulation (PDD) No. 0002/PDD/02/2022 concerning Indonesia Eximbank Goods/Services Procurement Policy Article 18, namely:

1) Supervision of Goods/Services Procurement is an inherent supervision (built in control) in each function of Goods/Services Procurement in accordance with its authority and responsibility.
2) The Goods/Services Procurement supervision function must be reflected in the internal control system and the implementation of an integrated risk management system.

3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi *review* internal secara independen yang dilakukan secara berkala dan/atau insidental yang dilakukan oleh unit kerja yang membidangi audit internal.
4) Obyek pengawasan Pengadaan Barang/Jasa antara lain mencakup:
   a) pengawasan terhadap seluruh proses pemberian Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
   b) pengawasan terhadap pejabat dan pegawai LPEI, termasuk pihak ketiga yang terkait proses Pengadaan Barang/Jasa.

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan Pengadaan Barang/Jasa LPEI akan diatur pada peraturan yang lebih teknis.

3) Goods/Services Procurement supervision includes independent internal reviews conducted periodically and/or incidentally by the work unit in charge of internal audit.
4) Objects of Goods/Services Procurement supervision include, among others:
   a) supervision of the entire process of providing Goods/Services Procurement; and/or
   b) supervision of Indonesia Eximbank officials and employees, including third parties related to the Goods/Services Procurement process.

Further provisions on the supervision of Goods/Services Procurement of Indonesia Eximbank will be regulated in more technical regulations.

Kebijakan Pencegahan *Insider Trading*
Insider Trading Prevention Policy

Pembahasan tentang *insider trading* tidak relevan untuk disajikan pada Laporan Tahunan ini, karena Perseroan bukan perusahaan terbuka yang menjual saham kepada publik. Dengan demikian tidak terdapat kebijakan internal maupun regulasi terkait *insider trading* yang diterapkan oleh Perseroan.

The discussion of insider trading is not relevant to be presented in this Annual Report because the Company is not a publicly traded company selling shares to the public. Therefore, there are no internal policies or regulations related to insider trading applied by the Company.

Rencana Strategis Lembaga
Strategic Plan of the Institution

LPEI telah menyusun strategi jangka menengah, dimana didalamnya memperhatikan juga inisiatif untuk penyelesaian masalah yang masih dihadapi dan juga untuk menangkap peluang pertumbuhan bisnis ke depan. Strategi LPEI mengusung 3 (tiga) *value proposition* yaitu:

1. *Beyond financing*
   Beyond financing adalah bagaimana LPEI menciptakan program-program yang tidak hanya sekedar menyalurkan pembiayaan, tetapi lebih luas dan komprehensif. Dalam merespons kondisi geopolitik yang semakin kompleks, LPEI mengembangkan pendekatan geostrategis dengan semua ekosistem ekspor, termasuk (i) menyelaraskan strategi dengan *stakeholders* prioritas Pemerintah, ECA, dan lembaga lainnya, (ii) mengeksplorasi peluang di pasar yang menguntungkan *(favorable markets)*, dan (iii) menyediakan informasi peluang dan lanskap risiko geopolitik. Sementara itu, dalam menyikapi perkembangan teknologi digital adalah dengan memanfaatkan digitalisasi kepada para eksportir Indonesia melalui pembangunan model ekosistem bisnis termasuk *platform digital* dan optimalisasi teknologi untuk memperluas akses, informasi, dan layanan.
2. *Developmental Impact*
   Developmental impact adalah bagaimana program-program LPEI dapat memberikan nilai tambah bagi produk-produk Indonesia. Dalam hal ini, LPEI berusaha memanfaatkan bonus demografi di Indonesia untuk mengembangkan program-program yang dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah. LPEI meningkatkan penetrasi di sektor-sektor yang memiliki dampak pembangunan yang tinggi, menciptakan

Indonesia Eximbank has developed a medium-term strategy, which includes initiatives to solve the problems still faced and also to capture future business growth opportunities. Indonesia Eximbank strategy carries 3 (three) value propositions, namely:

1. Beyond financing
   Beyond financing is how Indonesia Eximbank creates programs that do not just channel financing, but are broader and more comprehensive. In responding to increasingly complex geopolitical conditions, Indonesia Eximbank develops a geostrategic approach with all export ecosystems, including (i) aligning strategies with priority stakeholders of the Government, ECAs, and other institutions, (ii) exploring opportunities in favorable markets, and (iii) providing information on geopolitical opportunities and risk landscapes. Meanwhile, in addressing the development of digital technology is to take advantage of digitalization to Indonesian exporters through the development of business ecosystem models including digital platforms and optimization of technology to expand access, information, and services.

2. Developmental Impact
   Developmental impact is how Indonesia Eximbank's programs can provide added value to Indonesian products. In this case, Indonesia Eximbank is trying to take advantage of the demographic bonus in Indonesia to develop programs that can create more and better quality jobs so that in the end it can produce value-added products. Indonesia Eximbank increases penetration in sectors that

lebih banyak eksportir berbasis UKM, termasuk pemberdayaan perempuan, serta menyediakan program pembinaan dan pendampingan.

3. Keberlanjutan (*Sustainability*)
   LPEI berinvestasi pada produk yang berkelanjutan dengan mempersiapkan eksportir dengan persyaratan ramah lingkungan dan mengeksplorasi produk ramah lingkungan sebagai komoditas ekspor.

have high development impact, creates more SME-based exporters, including women empowerment, and provides coaching and mentoring programs.

3. Sustainability
   Indonesia Eximbank invests in sustainable products by preparing exporters with green requirements and exploring green products as export commodities.

Adapun ketiga *value proposition* itu diterjemahkan kedalam inisiatif strategis di bawah ini:

The three value propositions are transformed into the strategic initiatives below:

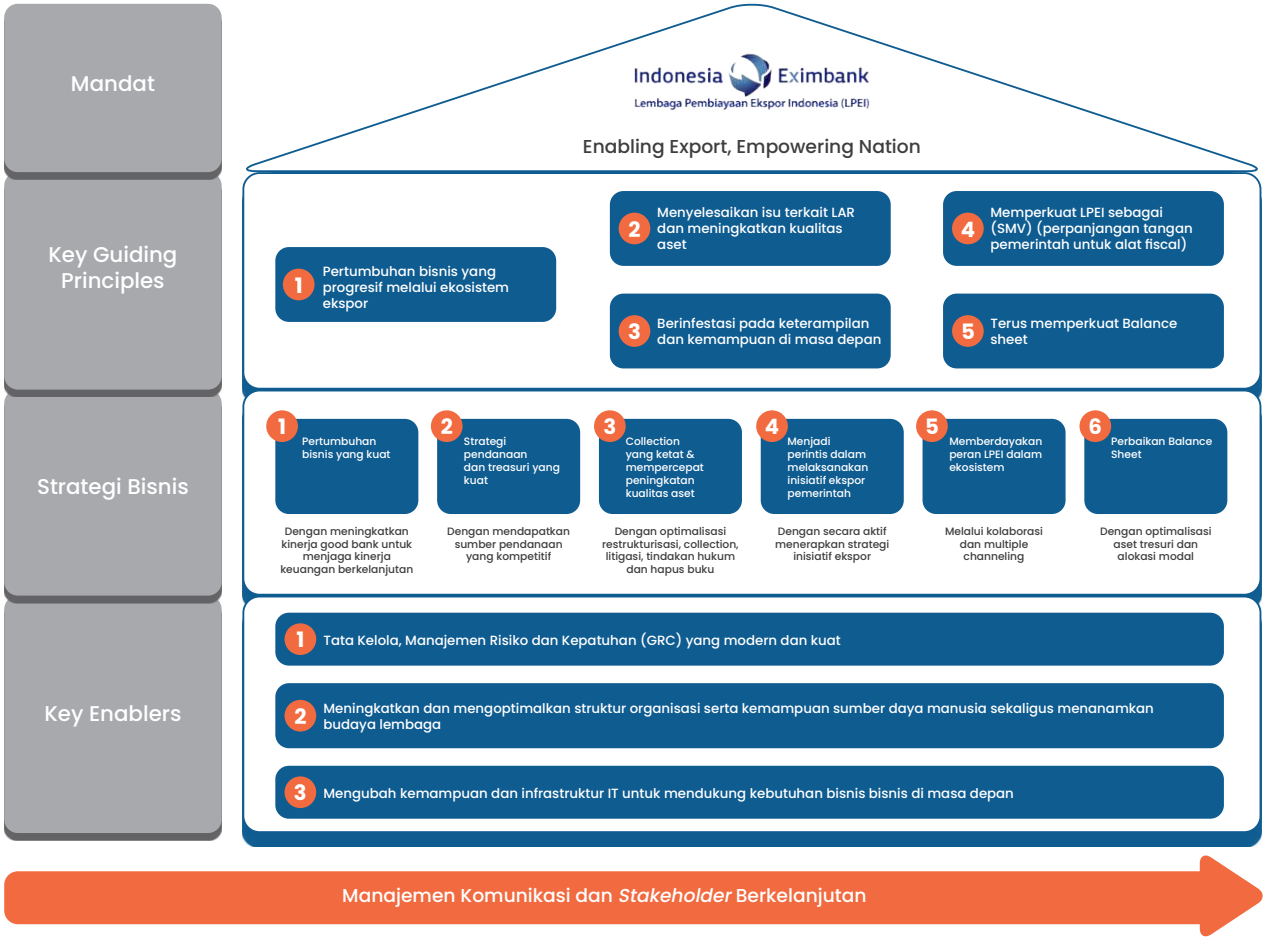

Dalam mencapai aspirasinya LPEI menyusun strategi bisnis dan *enabler* sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Bisnis yang kuat
   Strategi pertumbuhan bisnis ke depan akan dilakukan melalui *hybrid approach* dengan mulai membesarkan portofolio yang berfokus pada *developmental impact*.
2. Pendanaan dan tresuri yang kuat
   Strategi untuk mengoptimalisasikan sumber pendanaan yang ada maupun diversifikasi sumber pendanaan yang lebih murah.

To achieve its aspirations, Indonesia Eximbank has developed the following business strategies and enablers:

1. Strong Business Growth
   The future business growth strategy will be carried out through a hybrid approach by starting to grow a portfolio that focuses on developmental impact.

2. Strong funding and treasury
   Strategy to optimize existing funding sources and diversify into cheaper funding sources.

3. *Collection* yang ketat dan mempercepat peningkatan kualitas aset
   Optimalisasi anak perusahaan (PT IPA) dalam mempercepat perbaikan kualitas aset, *collection* yang ketat, restrukturisasi, *recovery* dan melaksanakan hapus buku.
4. Menjadi perintis dalam melaksanakan inisiatif ekspor pemerintah
   Menjadi perintis (*pioneer*) dalam melaksanakan inisiatif ekspor Pemerintah dengan memprioritaskan sektor industri dan menyelaraskan strategi ESG sesuai dengan rencana strategis Kementerian dan Lembaga.
5. Memberdayakan peran LPEI dalam ekosistem
   Berperan dan berkolaborasi dengan ekosistem ekspor untuk LPEI dapat lebih *outreach* mendekati pasar.
6. Perbaikan *Balance Sheet*
   Memperkuat fungsi tresuri serta penerapan ALMA yang menjadi salah satu langkah dalam perbaikan kualitas neraca.
7. Tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan yang kuat
   Penyusunan kebijakan dan manajemen risiko sesuai dengan perundangan dan *leading practices*, dan memiliki *risk capacity* sesuai dengan selera risiko.
8. Meningkatkan dan mengoptimalkan struktur organisasi serta kemampuan sumber daya manusia sekaligus menanamkan budaya Lembaga.
9. Mengubah kemampuan dan infrastruktur IT untuk mendukung kebutuhan bisnis di masa depan.
10. Komunikasi kepada *stakeholder* untuk mengkomunikasikan inisiatif yang dilakukan dan menambah *added value* LPEI bagi *stakeholder*.

Sejalan dengan strategi yang digambarkan melalui Rumah Strategi Transformasi di atas kemudian diturunkan menjadi Prioritas Tahun 2023 dengan tema strategis LPEI 2023: *Fixing the Fundamental* yang tercermin dalam gambar berikut ini:

3. Tight collection and accelerate asset quality improvement
   Optimization of subsidiaries (PT IPA) in accelerating asset quality improvement, strict collection, restructuring, recovery and carrying out write-offs.
4. Become a pioneer in implementing government export initiatives
   Become a pioneer in implementing the Government's export initiatives by prioritizing the industrial sector and aligning ESG strategies with the strategic plans of Ministries and Institutions.
5. Empowering Indonesia Eximbank's role in the ecosystem
   Play a role and collaborate with the export ecosystem for Indonesia Eximbank to outreach to the market.
6. Balance Sheet Improvement
   Strengthen treasury function and ALMA implementation as one of the steps in improving balance sheet quality.
7. Strong governance, risk management and compliance
   Establishment of policies and risk management in accordance with legislation and leading practices, and have risk capacity in accordance with risk appetite.
8. Improve and optimize the organizational structure and capabilities of human resources while instilling the culture of the Institution.
9. Transform IT capabilities and infrastructure to support future business needs.
10. Communication to stakeholders to communicate the initiatives undertaken and add added value to Indonesia Eximbank for stakeholders.

In line with the strategy described through the Transformation Strategy House above, it is then derived into the 2023 Priorities with the strategic theme of Indonesia Eximbank 2023: Fixing the Fundamental which is reflected in the following figure:

***Redefined Strategy* – Strategi dan Prioritas 2023**

Redefined Strategy – Strategy and Priority in 2023

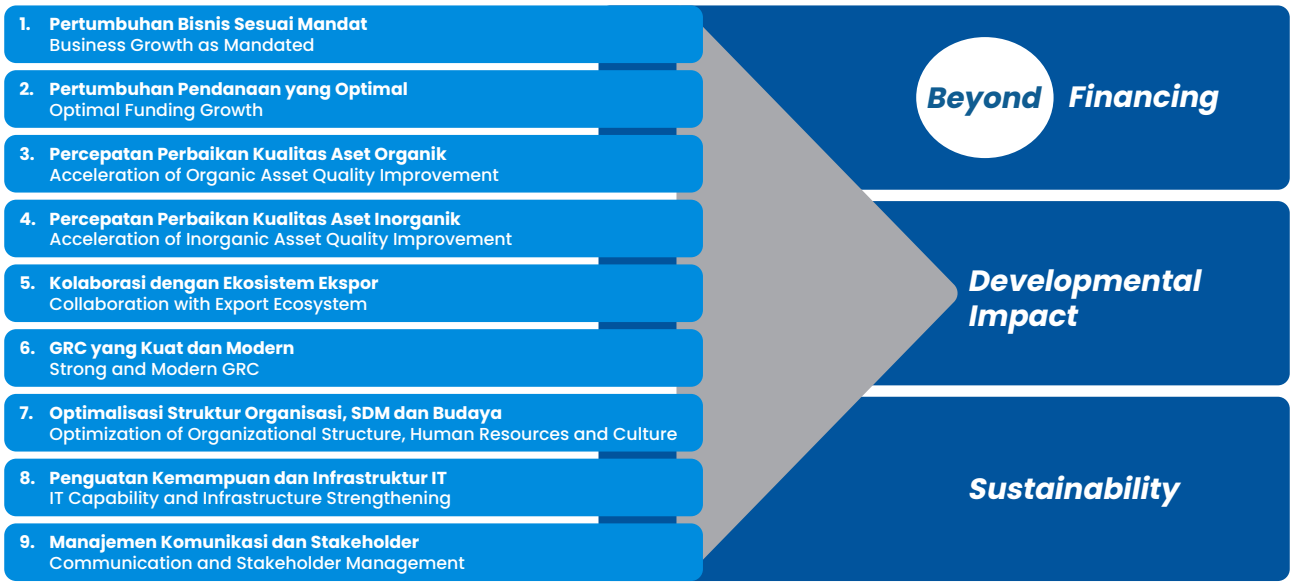

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Distribution of Funds to Related Parties and Large Exposure

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak melakukan transaksi dengan pihak terkait, LPEI terlibat dalam transaksi dengan pihak-pihak berelasi, yaitu pihak yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh LPEI.

Sepanjang tahun 2023, LPEI dapat memastikan bahwa tidak ada pelanggaran dan penyalahgunaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Laporan mengenai BMPP secara berkala telah disusun dan disampaikan kepada regulator, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK No. 140/PMK.010/2009 serta POJK No. 040/POJK.05/2015. Hal ini menunjukkan komitmen LPEI dalam mematuhi aturan serta menjaga kewajaran dan transparansi dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya.

In conducting its business activities, Indonesia Eximbank upholds integrity and compliance with applicable regulations. Although not engaging in transactions with related parties, Indonesia Eximbank is involved in transactions with related parties, namely those with ownership and/or management relationships. All transactions with related parties are conducted in accordance with the policies established by Indonesia Eximbank.

Throughout 2023, Indonesia Eximbank was able to prevent violations or misuse of the Maximum Financing Giving Limits (BMPP) provisions. Reports on BMPP were prepared and submitted to regulators on a regular basis, as required by PMK No. 140/PMK.010/2009 and POJK No. 040/POJK.05/2015. This demonstrates Indonesia Eximbank's commitment to complying with regulations while maintaining fairness and transparency in its business activities.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kepentingan Politik

Providing Funds for Social Activities and Political Interests

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk kegiatan sosial oleh LPEI diwujudkan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Informasi mengenai program CSR yang telah dilaksanakan oleh LPEI di tahun 2023 diuraikan lebih rinci dalam Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Pemberian Dana Untuk Kepentingan Politik

Selama tahun 2023 LPEI tidak melakukan praktik pemberian dana untuk kepentingan politik. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, integritas, dan kepatuhan yang menjadi landasan utama LPEI dalam menjalankan aktivitas bisnis. LPEI senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG dan menegaskan komitmennya untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya LPEI untuk menjaga independensinya dan memastikan bahwa kegiatan bisnisnya tetap berfokus pada misi dan visi Lembaga. Selain itu, LPEI senantiasa memastikan bahwa seluruh keputusan dan kebijakan yang diambil selaras dengan regulasi yang berlaku dan mendukung implementasi GCG.

Providing Funds for Social Activities

Indonesia Eximbank provides funds for social activities through its Corporate Social Responsibility (CSR) program. The Corporate Social Responsibility section of this Annual Report provides more information on the CSR programs implemented by Indonesia Eximbank in 2023.

Providing Funds for Political Purposes

Throughout 2023, the Indonesia Eximbank did not provide funds for political purposes. This policy adheres to the principles of transparency, integrity, and compliance that underpin Indonesia Eximbank's business activities. Indonesia Eximbank consistently upholds GCG principles and reiterates its commitment to refrain from engaging in political activities that may result in conflicts of interest. This policy is part of Indonesia Eximbank's efforts to maintain its independence and ensure that its business activities are consistent with the institution's mission and vision. Furthermore, Indonesia Eximbank ensures that all decisions and policies are in accordance with applicable regulations and support the implementation of GCG.

Penerapan Pedoman GCG
Implementation of GCG Guidelines

No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Application of Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana	a. Peraturan Dewan Direktur No. 0003/PDD/04/2023 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. b. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0041/PDE/11/2011 tentang Pedoman Tata Kerja Direktur Pelaksana.	a. UU No. 2/2009 tentang LPEI. b. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. c. POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
	Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Executive Director, and Managing Director	a. Board of Directors Regulation No. 0003/PDD/04/2023 concerning Guidelines for the Work Procedures of the Board of Directors of the Indonesian Eximbank. b. Executive Director Regulation No. 0041/PDE/11/2011 concerning Guidelines for the Work Procedures of the Managing Director.	a. Act No. 2/2009 concerning the Indonesian Eximbank. b. Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of the Indonesian Eximbank c. Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning Supervision of the Indonesian Eximbank.
2.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas DPS dan komite-komite serta satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal	a. Peraturan Dewan Direktur No. 0003/PDD/12/2021 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal LPEI. b. Peraturan Dewan Direktur No. 0013/PDD/10/2022 tentang Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI. c. Peraturan Dewan Direktur No. 0005/PDD/12/2023 tentang Piagam Komite Harmonisasi Ekspor LPEI. d. Peraturan Dewan Direktur No. 0005/PDD/09/2022 tentang Piagam Komite Audit LPEI. e. Peraturan Dewan Direktur No. 0007/PDD/09/2022 tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI. f. Peraturan Dewan Direktur No. 0008/PDD/09/2022 tentang Piagam Komite Penugasan Khusus LPEI. g. Peraturan Dewan Direktur No. 0006/PDD/09/2022 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko. h. Peraturan Direktur Eksekutif No. No. 0021/PDE/09/2023 tentang Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif. i. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0008/PDE/07/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Komite Governance, Risk & Compliance (GRC Comittee). j. Keputusan Direktur Eksekutif No. 0089/KDE/10/2021 tentang komite Pembiayaan Program PKE dalam rangka Mendukung Sektor Usaha UKM Berorientasi Ekspor. k. Keputusan Direktur Eksekutif No. 0090/KDE/10/2021 tentang Komite Pembiayaan Supply Chain Financing. l. Keputusan Direktur Eksekutif No. 0100/KDE/11/2021 tentang Komite Penjaminan Program Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN. m. Keputusan Direktur Eksekutif No. 0078/KDE/08/2021 tentang Anggota Komite Pembiayaan Program Penugasan Khusus Ekspor dalam Rangka Mendukung Sektor UKM Berorientasi Ekspor. n. Keputusan Direktur Eksekutif No. 0086/KDE/12/2020 tentang Komite Etik dan Disiplin Pegawai LPEI.	a. UU No. 2/2009 tentang LPEI. b. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. c. POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Application of Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
	Completeness and implementation of duties of DPS (Internal Control System) and committees as well as units carrying out internal control functions:	a. Board of Directors Regulation No. 0003/PDD/12/2021 concerning the Policy on the Internal Control System of Indonesia Eximbank. b. Board of Directors Regulation No. 0013/PDD/10/2022 concerning the Charter of the Sharia Supervisory Board of Indonesia Eximbank. c. Board of Directors Regulation No. 0005/PDD/12/2023 concerning the Charter of the Export Harmonization Committee of Indonesia Eximbank. d. Board of Directors Regulation No. 0005/PDD/09/2022 concerning the Charter of the Audit Committee of Indonesia Eximbank. e. Board of Directors Regulation No. 0007/PDD/09/2022 concerning the Charter of the Remuneration and Nomination Committee of Indonesia Eximbank. f. Board of Directors Regulation No. 0008/PDD/09/2022 concerning the Charter of the Special Assignment Committee of Indonesia Eximbank. g. Board of Directors Regulation No. 0006/PDD/09/2022 concerning the Charter of the Risk Monitoring Committee. h. Executive Director Regulation No. 0021/PDE/09/2023 concerning the Nine Committees under the Executive Director. i. Executive Director Regulation No. 0008/PDE/07/2023 concerning the Operational Guidelines Standard for the Governance, Risk & Compliance (GRC Committee). j. Executive Director Decision No. 0089/KDE/10/2021 concerning the Financing Program Committee for Supporting Export-Oriented SME Sectors. k. Executive Director Decision No. 0090/KDE/10/2021 concerning the Supply Chain Financing Committee. l. Executive Director Decision No. 0100/KDE/11/2021 concerning the Government Guarantee Program Committee for Corporate Businesses in the Implementation of the PEN Program. m. Executive Director Decision No. 0078/KDE/08/2021 concerning Members of the Special Assignment Export Sector Financing Committee to Support Export-Oriented SME Sectors. n. Executive Director Decision No. 0086/KDE/12/2020 concerning the Ethics and Employee Discipline Committee of Indonesia Eximbank.	a. Act No. 2/2009 concerning LPEI. b. Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles. c. Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning the Supervision of the Indonesian Export Financing Institution.
3.	Fungsi Kepatuhan	d. Peraturan Dewan Direktur No. 0015/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Program APU PPT LPEI. e. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0007/PDE/072023 tentang Standar Pedoman Operasional Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LPEI.	a. UU No. 2/2009 tentang LPEI. b. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. c. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. d. POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI.
	Compliance Function	d. Board of Directors Regulation No. 0015/PDD/12/2022 concerning the Compliance Function Policy and Implementation of the APU PPT Program of Indonesia Eximbank. e. Executive Director Regulation No. 0007/PDE/072023 concerning the Operational Guidelines Standard for the Implementation of the Compliance Function of Compliance Function.	a. Act No. 2/2009 concerning Compliance Function. b. Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.06/2020 concerning Supervision and Guidance of the Indonesian Export Financing Institution. c. Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Compliance Function. d. Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning the Supervision of Compliance Function.

No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Application of Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
3.1.	LHKPN	Peraturan Direktur Eksekutif No. 0008/PDE/06/2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI Wajib Lapor LHKPN.	a. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. b. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. c. UU No. 2/2009 tentang LPEI. d. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. e. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. f. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
	LHKPN (Wealth Report of State Officials):	Executive Director Regulation No. 0008/PDE/06/2022 concerning the Obligation to Submit Mandatory Wealth Report of State Officials (LHKPN) for LPEI Officials.	a. Law No. 28 of 1999 concerning Clean and Free from Corruption State Officials. b. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. c. Act No. 2/2009 concerning Indonesia Eximbank. d. Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. e. Corruption Eradication Commission Regulation No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of Wealth of State Officials. f. Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2020 concerning Amendments to Corruption Eradication Commission Regulation No. 07 of 2016 dated May 31, 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of Wealth of State Officials.

No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Application of Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
3.2.	Gratifikasi	Peraturan Direktur Eksekutif No. 0013/PDE/08/2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI.	a. UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. b. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, beserta perubahannya. c. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. d. UU No.2 Tahun 2009 tentang LPEI. e. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. f. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. g. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. h. POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI.
	Gratification	Executive Director Regulation No. 0013/PDE/08/2022 concerning Gratification Control within the Environment of Indonesia Eximbank.	a. Law No. 11 of 1980 concerning Criminal Acts of Bribery. b. Law No. 28 of 1999 concerning Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism State Officials, along with its amendments. c. Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, along with its amendments Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. d. Act No. 2 of 2009 concerning LPEI. e. Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.06/2020 concerning Supervision and Guidance of the Indonesian Export Financing Institution. f. Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles. g. Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2019 concerning Gratification Reporting. h. Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning the Supervision of Indonesia Eximbank.

No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Application of Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
3.3.	*Whistleblowing System*	a. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0018/PDE/03/2012 tentang Manual Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing system) LPEI. b. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0029/PDE/12/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Penerapan Strategi *Anti Fraud* LPEI. a. Executive Director Regulation No. 0018/PDE/03/2012 concerning the Manual of Violation Reporting System (Whistleblowing System) of Indonesia Eximbank. b. Executive Director Regulation No. 0029/PDE/12/2023 concerning the Operational Guidelines Standard for the Implementation of Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy.	a. UU No. 2/2009 tentang LPEI. b. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. c. POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI. a. Act No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank. b. Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles. c. Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning the Supervision of Indonesia Eximbank.
3.4.	Prinsip Mengenal Nasabah dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) The Principle of Knowing Customers in the Implementation of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) Program	a. Peraturan Dewan Direktur No. 0015/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Program APU PPT LPEI. b. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0028/PDE/12/2023 tentang tentang Standar Pedoman Operasional Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM). c. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0027/PDE/11/2020 Tentang Manual Operasional Penerapan Know Your Employee (KYE) LPEI. a. Board of Directors Regulation No. 0015/PDD/12/2022 concerning the Compliance Function Policy and Implementation of the Anti-Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs (APU PPT) of Indonesia Eximbank. b. Executive Director Regulation No. 0028/PDE/12/2023 concerning the Operational Guidelines Standard for the Implementation of the Anti-Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs (APU PPT & PPPSPM). c. Executive Director Regulation No. 0027/PDE/11/2020 concerning the Operational Manual for the Implementation of Know Your Employee (KYE).	a. UU No. 2/2009 tentang LPEI. b. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. c. Peraturan Kepala PPATK No. 02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. d. POJK No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank f. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. a. Act No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank. b. Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles. c. Financial Transaction Reports and Analysis Center Regulation No. 02/1.02/PPATK/02/15 concerning Categories of Service Users Potentially Committing Money Laundering Crimes.
3.4.1.	Internal: *Know Your Employee*		
3.4.2.	Eksternal: Nasabah dan Rekanan External: Customers and Contractors		

No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Application of Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
			d. Financial Services Authority Regulation No. 8 of 2023 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs in the Financial Services Sector. e. Financial Services Authority Circular Letter No. 37/ SEOJK.05/2017 concerning Guidelines for the Implementation of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Programs in the Non-Bank Financial Industry. f. Financial Transaction Reports and Analysis Center Regulation No. PER-02/1.02/PPATK/02/15 concerning Categories of Service Users Potentially Committing Money Laundering Crimes.
3.5.	Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan	a. Peraturan Dewan Direktur 0015/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Program APU PPT LPEI. b. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0028/PDE/12/2023 tentang tentang Standar Pedoman Operasional Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM).	a. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan. b. POJK No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
	Suspicious Financial Transaction Reports	a. Board of Directors Regulation 0015/PDD/12/2022 concerning the Compliance Function Policy and Implementation of the Anti-Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs (APU PPT) of Indonesia Eximbank. b. Executive Director Regulation No. 0028/PDE/12/2023 concerning the Operational Guidelines Standard for the Implementation of the Anti-Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs (APU PPT & PPPSPM).	a. Financial Transaction Reports and Analysis Center Regulation No. 1 of 2021 concerning Procedures for Submitting Suspicious Financial Transaction Reports, Cash Financial Transactions, and Fund Transfer Financial Transactions from and to Abroad through the GoAML Application for Financial Service Providers. b. Financial Services Authority Regulation No. 8 of 2023 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs in the Financial Services Sector.

No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Application of Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
3.6.	Kepatuhan pemenuhan pelaporan kepada eksternal termasuk kepada regulator	Peraturan Direktur Eksekutif No. 0067/PDE/12/2019 tentang Manual Operasional Penetapan Unit Kerja Penanggung Jawab Pelaporan LPEI.	a. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. b. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI. d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.05.2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI.
	Compliance with external reporting requirements, including to regulators	Executive Director Regulation No. 0067/PDE/12/2019 concerning the Operational Manual for the Determination of Reporting Responsibility Units of Indonesia Eximbank.	a. Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. b. Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.06/2020 concerning Supervision and Guidance of Indonesia Eximbank. c. Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning the Supervision of Indonesia Eximbank. d. Financial Services Authority Circular Letter No. 15/SEOJK.05.2022 concerning Assessment of the Health Level of Indonesia Eximbank.
3.7.	Kepatuhan penyelesaian *advance* pegawai	Peraturan Direktur Eksekutif No. 0004/PDE/04/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI	a. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. b. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. c. POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI.
	Compliance with employee advance settlement	Executive Director Regulation No. 0004/PDE/04/2023 concerning the Operational Guidelines Standard for Authorization Limitation of Budget Utilization in Indonesia Eximbank.	a. Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. b. Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.06/2020 concerning Supervision and Guidance of the Indonesian Export Financing Institution. c. Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning the Supervision of Indonesia Eximbank.
3.8.	*Anti Fraud*	Peraturan Direktur Eksekutif No. 0029/PDE/12/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Penerapan Strategi *Anti Fraud* LPEI.	PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI.
		Executive Director Regulation No. 0029/PDE/12/2023 concerning the Operational Guidelines Standard for the Implementation of Indonesia Eximbank Anti-Fraud Strategy.	Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles.

No.	**Penerapan Prinsip Tata Kelola** Application of Governance Principles	**Telah Diatur Dalam Peraturan Internal** Regulated in Internal Regulations	**Peraturan Eksternal Terkait** Related External Regulations
4.	Audit Internal dan Audit Eksternal	a. Peraturan Dewan Direktur No. 0016/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Penerapan Fungsi Audit Internal LPEI. b. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0027/PDE/12/2022 tentang Standar Pedoman Operasional Audit Internal. c. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0014/PDE/08/2022 tentang Piagam Audit Internal.	a. UU No. 2/2009 tentang LPEI. b. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. c. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. d. POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI. e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.05.2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI.
	Internal Audit and External Audit	a. Board of Directors Regulation No. 0016/PDD/12/2022 concerning the Policy for the Implementation of the Internal Audit Function of Indonesia Eximbank. b. Executive Director Regulation No. 0027/PDE/12/2022 concerning the Operational Guidelines Standard for Internal Audit. c. Executive Director Regulation No. 0014/PDE/08/2022 concerning the Charter of Internal Audit.	a. Act No. 2 of 2009 concerning Indonesia Eximbank. b. Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles. c. Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.06/2020 concerning Supervision and Guidance of the Indonesia Eximbank. d. Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning the Supervision of Indonesia Eximbank. e. Financial Services Authority Circular Letter No. 15/ SEOJK.05.2022 concerning Assessment of the Health Level of Indonesia Eximbank.
5.	Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal.	a. Peraturan Dewan Direktur No. 0017/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko *Enterprise* LPEI. b. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0032/PDE/09/2018 tentang Manual Operasional Manajemen Risiko (*Enterprise Risk Management Manual*) LPEI. c. Peraturan Dewan Direktur No. 0003/PDD/12/2021 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal LPEI.	a. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. b. PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. c. POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI. d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.05.2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI.
	Implementation of risk management including Internal Control Systems:	a. Board of Directors Regulation No. 0017/PDD/12/2022 concerning the Enterprise Risk Management Policy of Indonesia Eximbank. b. Executive Director Regulation No. 0032/PDE/09/2018 concerning the Operational Manual of Risk Management (Enterprise Risk Management Manual) of Indonesia Eximbank. c. Board of Directors Regulation No. 0003/PDD/12/2021 concerning the Internal Control System Policy of Indonesia Eximbank.	a. Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles of Indonesia Eximbank. b. Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.06/2020 concerning Supervision and Guidance of the Indonesia Eximbank. c. Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning the Supervision of Indonesia Eximbank. d. Financial Services Authority Circular Letter No. 15/ SEOJK.05.2022 concerning Assessment of the Health Level of Indonesia Eximbank.

No.	Penerapan Prinsip Tata Kelola Application of Governance Principles	Telah Diatur Dalam Peraturan Internal Regulated in Internal Regulations	Peraturan Eksternal Terkait Related External Regulations
6.	Pengadaan barang dan jasa	a. Peraturan Dewan Direktur No. 0002/PDD/06/2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa LPEI. b. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0005.02/PDE/06/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. c. Peraturan Direktur Pelaksana No. 0009/MDI/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelola Rekanan Pengadaan Barang/Jasa.	a. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. b. POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI
	Procurement of goods and services	a. Board of Directors Regulation No. 0002/PDD/06/2022 concerning the Procurement Policy of Goods/Services of Indonesia Eximbank. b. Executive Director Regulation No. 0005.02/PDE/06/2023 concerning the Operational Guidelines Standard for Procurement of Goods/Services of the Indonesian Export Financing Institution. c. Executive Director Regulation No. 0009/MDI/11/2023 concerning the Operational Technical Instructions for Managing Procurement Contractors of Goods/Services.	a. Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning the Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles. b. Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning the Supervision of Indonesia Eximbank.
7.	Penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan	Peraturan Direktur Eksekutif No. 0026/PDE/11/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Bisnis dan Rencana Jangka Panjang (RJP) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.	a. PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. b. POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI.
	Development of long-term plans as well as annual work plans and budgets	Executive Director Regulation No. 0026/PDE/11/2023 concerning the Operational Guidelines Standard for the Preparation of Annual Work Plan and Budget (RKAT), Business Plan, and Long-Term Plan (RJP) of the Indonesian Export Financing Institution.	a. Minister of Finance Regulation No. 208/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles. b. Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning the Supervision of Indonesia Eximbank.
8.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	a. Peraturan Dewan Direktur No. 0004/PDD/09/2022 tentang Kebijakan Akuntansi LPEI. b. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0018/PDE/09/2022 tentang Standar Pedoman Operasional Pelaksanaan Standar Akuntansi LPEI.	POJK No. 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
	Transparency of financial and non-financial conditions	a. Board of Directors Regulation No. 0004/PDD/09/2022 concerning the Accounting Policy of Indonesia Eximbank. b. Executive Director Regulation No. 0018/PDE/09/2022 concerning the Operational Guidelines Standard for the Implementation of Accounting Standards of Indonesia Eximbank.	Financial Services Authority Regulation No. 75/POJK.04/2017 concerning the Responsibilities of the Board of Directors for Financial Reports.
9.	Pelaporan internal dan benturan kepentingan	a. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0067/PDE/12/2019 tentang Manual Operasional Penetapan Unit Kerja Penanggung Jawab Pelaporan LPEI. b. Peraturan Direkutr Eksekutif No. 0042/PDE/09/2019 tentang Manual Pakta Integritas LPEI.	a. PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI. b. POJK No. 9/2022 tentang Pengawasan LPEI.
	Internal reporting and conflict of interest	a. Executive Director Regulation No. 0067/PDE/12/2019 concerning the Operational Manual for Determining the Responsible Reporting Unit of Indonesia Eximbank. b. Executive Director Regulation No. 0042/PDE/09/2019 concerning the Integrity Pact Manual of Indonesia Eximbank.	a. Minister of Finance Regulation No. 208/PMK.06/2021 concerning Principles of Governance, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles. b. Financial Services Authority Regulation No. 9/2022 concerning the Supervision of Indonesia Eximbank.

Laporan Keberlanjutan

Sustainability Report

Profil Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report Profile

Pada tahun 2023, LPEI mempublikasikan Laporan Keberlanjutan yang keempat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan. Laporan ini pertama kali diterbitkan pada tahun buku 2020 dengan judul "Laporan Progres Keberlanjutan LPEI 2020". Secara umum, dengan diterapkannya model penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang digabung dalam satu buku yang sama, maka semua informasi yang tercantum di dalam kedua laporan tersebut saling melengkapi dan berkaitan satu sama lain sehingga tidak diperlukan adanya pengungkapan data atau informasi yang berulang baik pada bagian Laporan Tahunan maupun Laporan Keberlanjutan.

In 2023, Indonesia Eximbank released its fourth Sustainability Report as an integral component of its Annual Report. This report was first published in the 2020 financial year under the title "LPEI Sustainability Progress Report 2020". By adopting a unified approach to compiling the Annual Report and the Sustainability Report into a single volume, all the information included in both reports complements and correlates with each other. This eliminates the necessity for redundant disclosure of data or information in both the Annual and Sustainability Reports.

Melalui publikasi Laporan Keberlanjutan ini, LPEI berharap seluruh pemangku kepentingan dapat lebih memahami komitmen besar LPEI untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/"SDGs"), yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Lembaga.

Through the publication of this Sustainability Report, Indonesia Eximbank seeks to provide all stakeholders with a comprehensive understanding of Indonesia Eximbank dedication to realizing the Sustainable Development Goals (SDGs), in alignment with the institution's vision and mission.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, LPEI berkomitmen untuk terus meningkatkan peran aktifnya dalam mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan melalui implementasi strategi yang mengintegrasikan aspek *Environmental, Social and Governance* (ESG) serta berpedoman pada prinsip *triple bottom lines* dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengukur sejauh mana kontribusi berkelanjutan LPEI kepada para pemangku kepentingannya.

Adhering to sustainable finance principles, Indonesia Eximbank is committed to further strengthening its proactive stance in fostering sustainable economic growth. This is achieved through strategies that incorporate environmental, social, and governance (ESG) considerations, and adhere to triple bottom line principles in business decision-making. This step was taken as a way to measure the extent of Indonesia Eximbank sustainable contribution to its stakeholders.

Pada akhirnya, LPEI berharap Laporan ini dapat membawa manfaat dan bisa menjadi rujukan bagi segenap pemangku kepentingan dalam memahami dan mengetahui pelaksanaan kinerja keberlanjutan Lembaga. Selain edisi cetak, dengan pertimbangan untuk menghemat penggunaan kertas, Laporan yang sama dapat diakses melalui situs LPEI, yakni www.Indonesiaeximbank.go.id.

Ultimately, Indonesia Eximbank hopes this Report will provide benefits and serve as a reference for all stakeholders in understanding and assessing the institution's sustainability performance. In addition to the printed edition, considering the conservation of paper usage, the same Report is accessible through Indonesia Eximbank website, namely www.indonesiaeximbank.go.id.

PEDOMAN, STANDAR LAPORAN, & ASSURANCE
[2-5]

Selama proses penyusunan laporan ini, LPEI berpedoman pada regulasi dan *best practice* sebagai berikut:

GUIDELINES, REPORT, & ASSURANCE STANDARDS
[2-5]

For the preparation of this report, Indonesia Eximbank is guided by the following regulations and best practices:

- Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 ("POJK 51/2017") tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik;

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.04/2021 ("SE OJK 16/2021") tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- Standar *Global Reporting Initiative* (GRI) 2021 yang dikeluarkan oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) – lembaga yang dibentuk oleh GRI untuk mengembangkan standar laporan keberlanjutan.

- Regulation No. 51/POJK.03/2017 ("POJK 51/2017") issued by the Financial Services Authority (OJK) concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Institutions, Issuers, and Public Companies;
- Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 ("SE OJK 16/2021") issued by the Financial Services Authority concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies; and
- The Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021 issued by the Global Sustainability Standards Board (GSSB) – an entity established by GRI to develop sustainability reporting standards.

Tujuan LPEI mengadopsi ketiga standar pelaporan di atas adalah untuk:

1. Menunjukkan kepatuhan Lembaga terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
2. Menunjukkan kemampuan Lembaga mengikuti rujukan berskala internasional bagi penyusunan laporan keberlanjutan agar dapat dibaca, diterima dan dimengerti secara global.

The purpose of Indonesia Eximbank adopting these three reporting standards is to:

1. Demonstrate the Institution's compliance with prevailing legislation in Indonesia.
2. Demonstrate the institution's ability to adhere to internationally recognized references for sustainability reporting, ensuring global readability, acceptance, and comprehension.

Dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2023, LPEI tetap menerapkan prinsip materialitas dalam menyampaikan isu-isu keberlanjutan yang penting bagi para pemangku kepentingan dan dalam menjalankan kegiatan usaha. Lembaga juga menyertakan indikator *disclosure* GRI Universal

In its 2023 Sustainability Report, Indonesia Eximbank remained committed to the principle of materiality, ensuring the communication of sustainability issues that are significant to stakeholders and guiding its business activities accordingly. The institution also included GRI Universal Standard disclosure indicators

Standard yang diaplikasikan pada setiap halaman yang relevan. Selain itu, LPEI juga mencantumkan indeks GRI-*Spesific Financial Diclosure*. Daftar Indeks Universal Standard 2021 termasuk GRI-*Spesific Financial Disclosure* yang diterapkan, serta indeks No. 16/SEOJK.04/2021 atau Indeks Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tersedia pada bagian Lampiran Laporan ini. [3-1]

applied to relevant pages. Additionally, Indonesia Eximbank provided a GRI-Specific Financial Disclosure index. The list of Universal Standard 2021 Indexes, including the applied GRI-Specific Financial Disclosure, and the SEOJK 16.4/2021 Index or the Regulation OJK No. 51/POJK.03/2017 Index, is available in the Annex of this report. [3-1]

PERIODE DAN SIKLUS LAPORAN

Laporan Keberlanjutan keempat ini memuat berbagai realisasi program dan inisiatif keberlanjutan yang dilakukan sebagai kelanjutan dari program serupa yang telah disampaikan pada laporan sebelumnya yang diterbitkan pada 2 Mei 2023. [2-3]

Adapun periode program yang dilaporkan adalah mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, sementara siklus pelaporan adalah setahun sekali bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

Dalam Laporan ini tidak ada perubahan signifikan maupun perubahan topik material dari laporan sebelumnya. Demikian pula, tidak terdapat pengungkapan kembali dari laporan sebelumnya, dan tidak terdapat perubahan organisasi yang bersifat signifikan. [2-4]

REPORTING PERIOD AND CYCLE

This fourth Sustainability Report encompasses various achievements of sustainability programs and initiatives carried out as a continuation of similar programs previously presented in the report issued on 2 May 2023. [2-3]

The reporting period for the programs covered in this report is from 1 January 2023, to 31 December 2023, with the reporting cycle being annually aligned with the submission of the Annual Report.

There are no significant changes or material topic alterations from the previous report in this document. Similarly, there is no reiteration of disclosures from previous reports, and there are no significant organizational changes. [2-4]

TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK DARI LAPORAN SEBELUMNYA [2-3]

Demi kepentingan peningkatan kualitas penyajian Laporan Keberlanjutan untuk periode berikutnya, LPEI mengundang partisipasi setiap pembaca untuk memberikan masukan atau saran terkait pengungkapan dalam Laporan Keberlanjutan ini dengan mengisi lembar umpan balik berikut ini atau menghubungi LPEI melalui:

RESPONSE TO FEEDBACK FROM PREVIOUS REPORTS [2-3]

In the interest of enhancing the quality of sustainability reporting for future periods, Indonesia Eximbank invites the participation of every reader to provide feedback or suggestions regarding the disclosures in this sustainability report by completing the feedback form provided below or by contacting Indonesia Eximbank through:

Corporate Secretary
Indonesia Eximbank – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Prosperity Tower Lantai 1 – District 8
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta – 12190

Tel. : +62 21 395 03600
Fax : +62 21 395 03699
Email : corpsec@indonesiaeximbank.go.id
Web : www.indonesiaeximbank.go.id

RUANG LINGKUP DAN BATASAN DALAM LAPORAN [2-29] [3-1][3-2] [3-3]

Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan LPEI hanya memuat data dan informasi dari LPEI, tidak termasuk

SCOPE AND BOUNDARIES IN THE REPORT [2-29] [3-1][3-2] [3-3]

The Sustainability Report published by Indonesia Eximbank solely encompasses data and information

entitas anak perusahaan [2-2]. Adapun seluruh data keuangan yang tersaji dalam Laporan ini dinyatakan dalam satuan mata uang Rupiah Indonesia (Rp), kecuali dinyatakan lain. Dalam melaporkan data keuangan, LPEI menggunakan teknik berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Indonesia. Sedangkan untuk data keberlanjutan, digunakan teknik pengukuran data yang berlaku secara internasional.

originating from itself, without including subsidiary entities [2-2]. All financial data presented in this Report is expressed in Indonesian Rupiah (Rp), unless otherwise stated. In reporting financial data, Indonesia Eximbank adheres to techniques based on the Indonesian Financial Accounting Standards (IFAS). Meanwhile, for sustainability data, measurement techniques conform to international standards.

Sementara data pendukung upaya pelestarian lingkungan hidup yang diterapkan dan disampaikan terbatas pada aktivitas operasional Kantor Pusat di Jakarta, dengan pertimbangan karena ruang lingkup wilayah kerja LPEI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan belum adanya keseragaman perhitungan sehingga belum dapat memaparkan penggunaan energi, konsumsi bahan bakar, konsumsi air maupun konsumsi kertas secara menyeluruh. Selain itu, LPEI juga tidak memantau, mengendalikan, dan melaporkan aktivitas para mitra usaha di luar interaksinya dengan Lembaga.

Meanwhile, the supporting data for environmental conservation efforts applied and disclosed are limited to the operational activities of the Headquarters in Jakarta. This limitation is due to the diverse geographical scope of Indonesia Eximbank operations across various regions of Indonesia and the lack of uniform calculation methods, thereby preventing comprehensive depiction of energy usage, fuel consumption, water consumption, and paper consumption. Additionally, Indonesia Eximbank does not monitor, control, or report activities of business partners beyond their interactions with the institution.

PENETAPAN KONTEN LAPORAN [102-46, 103-1, 103-2, 103-3]

Penetapan isi Laporan melewati 4 (empat) tahapan yang dipersyaratkan oleh Standar GRI, yaitu:

1. **Mengerti Konteks Kegiatan Usaha**
   Lembaga memulai proses penyusunan laporan dengan memahami hubungan kegiatan usaha dengan konteks keberlanjutan, pemangku kepentingan terkait serta mengenali informasi kritis untuk mengidentifikasi potensi dampak kegiatan usaha.
2. **Identifikasi Potensi dan Dampak**
   Lembaga mengidentifikasi dampak aktual maupun potensial kegiatan usaha yang dijalankan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, sosial maupun SDM.
3. **Menilai Signifikansi Dampak**
   Lembaga menilai dan memilah seluruh dampak aktual maupun potensial yang teridentifikasi dan memutuskan mana yang memiliki dampak terbesar, untuk kemudian ditetapkan sebagai topik material.
4. **Memprioritaskan Dampak Paling Signifikan**
   Lembaga kemudian menetapkan topik-topik material untuk dilaporkan, berdasarkan penilaian signifikansi dampak yang ditimbulkan.

Implementasi keempat tahapan penentuan isi Laporan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada 8 (delapan) prinsip dasar penyusunan sesuai GRI *Universal Standard*, yaitu:

REPORT CONTENT ASSIGNMENT [102-46, 103-1, 103-2, 103-3]

The content of the Report is determined by going through 4 (four) stages required by the GRI Standards, namely:

1. **Understand the Context of Business Activities**
   The Institution begins the report preparation process by understanding the relationship between business activities and sustainability context, relevant stakeholders and recognizing critical information to identify potential impacts of business activities.
2. **Identify Potential and Impact**
   The Institution identifies the actual and potential impacts of business activities on economic, environmental, social and human resource aspects.
3. **Assess the Significance of the Impact**
   The Institution assesses and sorts all actual and potential impacts identified and decides which have the greatest impact, to then be determined as material topics.
4. **Prioritize the Most Significant Impact**
   The Institution then assigns material topics to report, based on an assessment of the significance of the impact.

The application of the four stages of determining the contents of the Report is carried out by referring to 8 (eight) basic principles of preparation in accordance with the GRI Universal Standard, as follows:

1. ***Accuracy*** **(Akurasi)**
   Lembaga melaporkan informasi dengan benar, akurat dan cukup detail sehingga memungkinkan dilakukannya penilaian dampak kegiatan usaha.
2. ***Balance*** **(Berimbang)**
   Lembaga menyajikan informasi dengan tanpa bias dan dapat merepresentasikan keseimbangan penggambaran dampak positif maupun negatif kegiatan yang dilakukan.
3. ***Clarity*** **(Kejelasan)**
   Lembaga menyajikan informasi yang mudah diakses dan mudah dimengerti.
4. ***Comparability*** **(Dapat diperbandingkan)**
   Lembaga memilah, mengumpulkan dan menyajikan informasi secara konsisten sehingga memungkinkan dilakukannya analisa perubahan dampak kegiatan setiap saat termasuk perbandingkan dampaknya terhadap organisasi sejenis lainnya.
5. ***Completeness*** **(Kelengkapan)**
   Lembaga menyajikan informasi yang memadai sehingga memungkinkan dilakukannya asesmen dampak kegiatan selama periode pelaporan.
6. ***Sustainability Context*** **(Konteks keberlanjutan)**
   Laporan mengungkapkan kinerja Lembaga dan dampak kegiatannya pada aspek-aspek utama keberlanjutan, meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
7. ***Timeliness*** **(Ketepatan waktu)**
   Lembaga melaporkan kinerja keberlanjutan secara berkala dan tepat waktu sehingga memungkinkan pembaca membuat keputusan sesuai kebutuhan.
8. ***Verifiability*** **(Dapat diferivikasi)**
   Lembaga mengumpulkan, mencatat, memilah dan menganalisa seluruh informasi dengan seksama sehingga kualitas informasi yang disajikan dapat diperiksa.

1. **Accuracy**
   The Institution reports information correctly, accurately and in sufficient detail to enable an impact assessment of business activities.
2. **Balance**
   The Institution presents information without bias and can represent a balance of portrayal of positive and negative impacts of its activities.
3. **Clarity**
   The institution presents accessible and understandable information.
4. **Comparability**
   The Institution sorts, collects and presents information consistently to enable analysis of changes in the impact of activities at any time including comparison of the impact on other similar organizations.
5. **Completeness**
   The Institution provides adequate information to enable impact assessment of activities during the reporting period.
6. **Sustainability context**
   The report reveals the performance of the Institution and the impact of its activities on key aspects of sustainability, including environmental, social, and economic aspects.
7. **Timeliness**
   The Institution reports on sustainability performance regularly and in a timely manner, allowing readers to make informed decisions.
8. **Verifiability**
   The Institution collects, records, sorts and analyzes all information carefully to enable verification of the quality of information presented.

Bagan Alur Proses Penentuan Topik Material Laporan Keberlanjutan [3-1]
Flowchart of Sustainability Report Material Topic Determination Process [3-1]

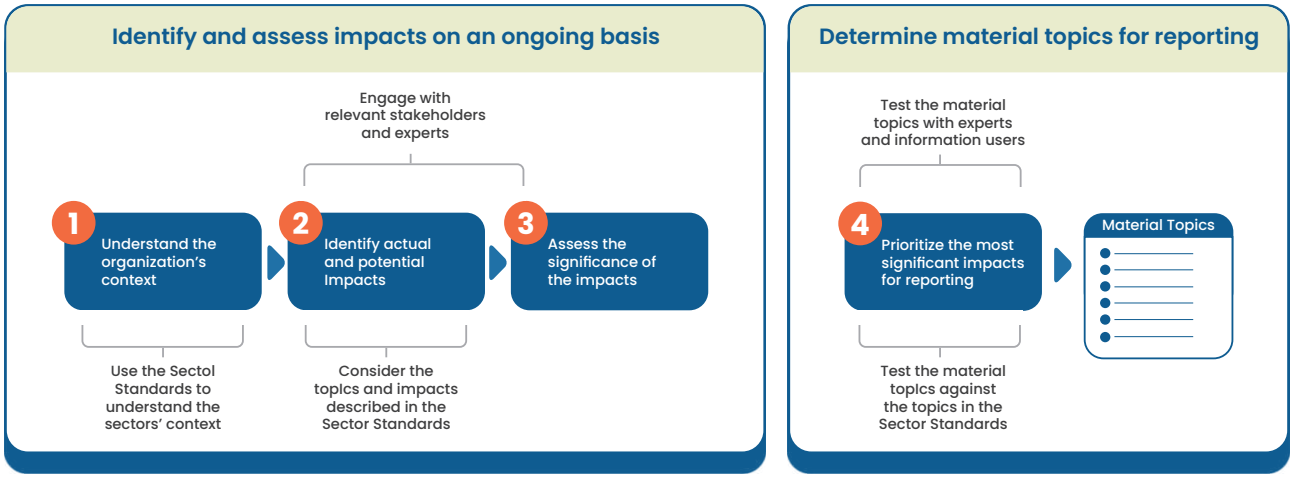

DAMPAK SIGNIFIKAN DAN UJI MATERIALITAS
[3-2]

Dalam Laporan Keberlanjutan, LPEI secara khusus menyajikan informasi mengenai topik-topik material. Topik material sendiri adalah topik-topik yang memiliki dampak paling siginfikan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Untuk dapat diperoleh hasil pemetaan topik material yang relevan dengan kegiatan usaha LPEI, maka manajemen telah melakukan kajian dampak material dengan membentuk grup diskusi internal untuk membahas dampak positif dan negatif yang timbul dari aktivitas operasional sehari-hari terhadap para pemangku kepentingan utama. Dalam proses penetapan topik material tersebut, LPEI juga mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan eksternal salah satunya melalui interaksi dengan masyarakat sekitar.

Setelah melalui rangkaian diskusi yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak pemangku kepentingan, LPEI melakukan uji materialitas terhadap sejumlah topik material yang diperkirakan layak disampaikan dalam laporan termasuk batasannya. Selanjutnya, LPEI menilai topik material yang dimaksud dengan menetapkan beberapa informasi material yang berada pada kategori 'tinggi' dan beberapa informasi lainnya berada pada kategori 'sedang' maupun 'rendah', sebagaimana digambarkan dalam diagram materialitas berikut ini:

SIGNIFICANT IMPACT AND MATERIALITY TEST
[3-2]

In the Sustainability Report, Indonesia Eximbank specifically presents information regarding material topics. Material topics are those that have the most significant impact on economic, environmental, and social aspects.

To obtain relevant mapping results of material topics related to Indonesia Eximbank business activities, management conducted a material impact assessment by forming an internal discussion group to address the positive and negative impacts arising from daily operational activities on key stakeholders. In the process of determining these material topics, Indonesia Eximbank also considered input provided by external stakeholders, including interactions with the surrounding community.

After undergoing a series of comprehensive discussions involving various stakeholders, Indonesia Eximbank conducted a materiality test on several material topics deemed suitable for inclusion in the report, including their boundaries. Subsequently, Indonesia Eximbank assessed the material topics by categorizing certain material information as 'high' and other information as 'medium' or 'low', as depicted in the following materiality diagram:

Diagram Matriks Materialitas [3-2]
Materiality Matrix Diagram [3-2]

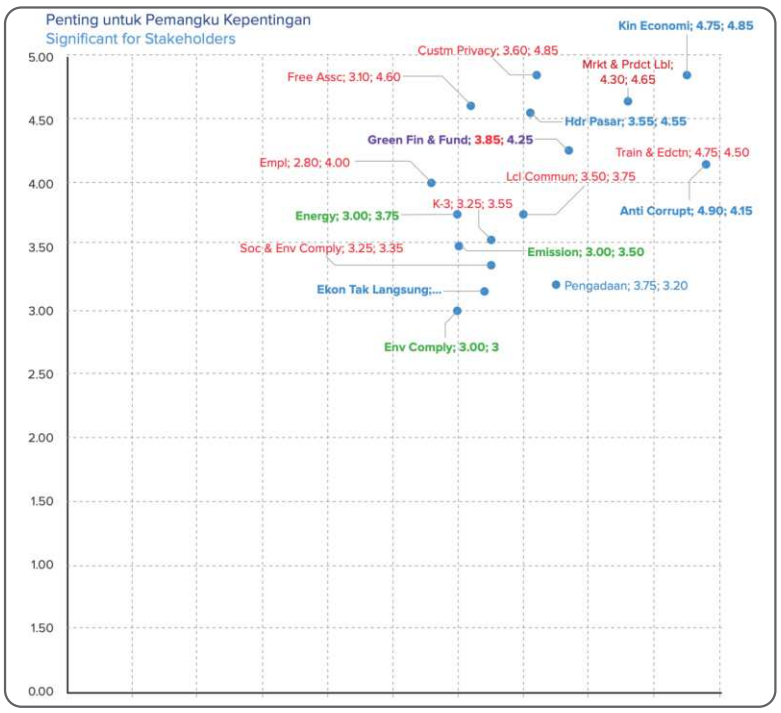

LPEI menetapkan 17 topik material yang memenuhi kriteria dampak paling material terhadap kinerja keberlanjutan dan menetapkan tidak kurang 45 indeks *disclosure* dari topik material dimaksud, yaitu sebagai berikut:

Indonesia Eximbank determines 17 material topics that meet the criteria of the most material impact on sustainability performance and determines no less than 45 disclosure indices of the material topics, as follows:

Daftar Topik Material dan *Boundary*
Material Aspects and Boundary

No.	Topik Material Material Topics	Alasan Materialitas Reasons for Materiality	Pengungkapan Indeks Index Disclosure		Batasan Boundary	
			SEOJK 16/2021	GRI Standard	Di dalam LPEI Internal	Di luar LPEI External
Ekonomi | Economics						
1.	Kinerja Keuangan/ Ekonomi Financial/Economic Performance	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F2, F3	201-1, 201-3 201-4	Pemerintah* Government	-
2.	Keberadaan Pasar Market Presence	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.20	202-1	Karyawan Employee	-
3.	Dampak ekonomi tak langsung Indirect economic impact	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.23	203-1	Pemerintah Government	Masyarakat Society
4.	Praktik Pengadaan Procurement Practices	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F2, F3	204-1	· Pemerintah · Karyawan · Government · Employee	Pemasok Suppliers
5.	Anti-Korupsi Anti-Corruption	Berdampak signifikan pada pembangunan dan pada reputasi Lembaga Significant impact on development and on the reputation of the Institution	F.1	205-2, 205-3	· Pemerintah · Karyawan · Government · Employee	Masyarakat Society
Lingkungan | Environment						
6.	Energi Energy	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.6 & F.7	302-1, 302-4	Karyawan Employee	-
7.	Emisi Emission	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.11	305-1, 305-2	Karyawan Employee	· Regulator · Nasabah · Regulator · Customer
8.	Kepatuhan Lingkungan Environmental Compliance	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders and reputation of the Institution	F.16	307-1, 308-1	-	· Regulator · Nasabah · Masyarakat · Regulator · Customer · Government
Sosial | Social						
9.	Kepegawaian Employment	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan bagi kesinambungan usaha Significant impact on stakeholders and for business continuity	F.18	401-1, 401-2	Karyawan Employee	-
10.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.21	403-1, 403-5 403-8	Karyawan Employee	Masyarakat Society
11.	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan bagi kesinambungan usaha Significant impact on stakeholders and for business continuity	F.18	404-1, 404-2 404-3	Karyawan Employee	Nasabah Customer

No.	Topik Material Material Topics	Alasan Materialitas Reasons for Materiality	Pengungkapan Indeks Index Disclosure		Batasan Boundary	
			SEOJK 16/2021	GRI Standard	Di dalam LPEI Internal	Di luar LPEI External
12.	Peraturan Perusahaan Company Regulation	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders and reputation of the Institution	F.21	405-1, 405-2	Karyawan Employee	Regulator
13.	Masyarakat Lokal Local Community	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders and reputation of the Institution	F23. F.24, F.25	413-1	-	Masyarakat Society
14.	Pemasaran dan Label Produk Marketing and Product Labeling	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders and reputation of the Institution	F.26, F.27	417-1, 417-2, 417-3	-	Nasabah Customer
15.	Privasi Pelanggan Customer Privacy	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders	F.28, F.30	418-1	-	· Nasabah · Regulator · Customer · Regulator
16.	Kepatuhan terhadap Regulasi Sosial & Lingkungan Compliance with Social & Environmental Regulations	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders and reputation of the Institution	F.16, F.24	419-1	Pemerintah Government	· Regulator · Nasabah · Masyarakat · Regulator · Customer · Society
	Financial Service Sector					
17.	Pembiayaan Berkelanjutan Sustainable Financing	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan, keberlanjutan dan pada reputasi Lembaga Significant impact on stakeholders, sustainability and on the reputation of the Institution	FS1, FS2, FS3, FS4, FS5, FS6, FS7, FS8, FS10, FS15, FS16,		· Pemerintah · Karyawan · Government · Employee	· Nasabah · Regulator · Customer · Regulator

*) Dalam penyajian tabel topik materialitas di atas, Pemerintah bertindak sebagai pemegang saham LPEI (100%)
*) In the materiality topic above, the Government acts as a shareholder of LPEI (100%).

JASA ASURANSI [2-5]

OJK dan GRI merekomendasikan penggunaan jasa asuransi oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan kualitas dan keandalan informasi yang disampaikan dalam laporan ini. Namun, hal itu bukanlah persyaratan utama agar Laporan Keberlanjutan dapat "sesuai" dengan Pedoman maupun regulasi yang berlaku. Berkenaan dengan hal ini, dapat disampaikan bahwa Laporan Keberlanjutan LPEI Tahun 2023 masih belum diverifikasi melalui proses penjaminan (*assurance*) oleh pihak independen, namun telah menjalani proses verifikasi internal. [102-48, GRI 102-56]

ASSURANCE SERVICES [2-5]

OJK and GRI recommend the use of services provided by independent third parties to ensure the quality and reliability of information conveyed in this report. However, this is not a primary requirement for the Sustainability Report to be considered "in accordance" with the applicable guidelines or regulations. In this regard, it can be stated that Indonesia Eximbank 2023 Sustainability Report has not yet been verified through an assurance process by an independent party, but has undergone internal verification. [102-48, GRI 102-56]

Kerangka dan Strategi Keberkelanjutan
Framework and Sustainability Strategy

KOMITMEN LPEI TERHADAP KEBERLANJUTAN
[2-23, 3-3]

Mengingat status LPEI sebagai salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan RI yang menjalankan mandat untuk meningkatkan ekspor nasional melalui PEN (Pembiayaan Ekspor Nasional), maka LPEI memastikan seluruh derap langkah bisnisnya senantiasa selaras sesuai arahan Pemerintah termasuk dalam mendukung upaya mitigasi risiko iklim yang kini tengah ramai dibahas pada skala global. Peran serta LPEI dalam menghadirkan kehidupan yang lebih baik di Bumi diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang lebih bertanggung jawab melalui pengintegrasian aspek ESG pada setiap proses operasional bisnis.

LPEI menyadari bahwa risiko pembiayaan dan reputasi dapat timbul dari aktivitas proyek yang mengancam kelestarian lingkungan. Risiko reputasi umumnya timbul dari proyek-proyek yang mengalami konflik atau masalah publik yang signifikan atau proyek-proyek dengan isu sosial dan lingkungan yang tidak terselesaikan dengan baik yang berujung pada pemberitaan yang negatif.

Untuk meminimalkan terjadinya risiko-risiko tersebut, LPEI memastikan penerapan prinsip sosial dan lingkungan pada setiap proyek yang dibiayai. Dalam konteks keberlanjutan, LPEI juga memastikan bahwa tujuan penyelenggaraan seluruh kegiatan usahanya tidak hanya untuk mencari keuntungan semata agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi pemegang saham, melainkan juga harus dapat membawa dampak positif dan menciptakan *multiplier effect* bagi para pelaku ekspor, masyarakat, dan juga perekonomian Indonesia.

Komitmen LPEI dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan ditunjukkan melalui program-program dan serangkaian inisiatif keberlanjutan yang telah secara konsisten dilakukan setiap tahun. Hal ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya kami untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia.

FRAMEWORK AND SUSTAINABILITY STRATEGY INDONESIA EXIMBANK COMMITMENT TO SUSTAINABILITY [2-23, 3-3]

Given Indonesia Eximbank status as one of the Special Mission Vehicles (SMV) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, mandated to enhance national exports through PEN (National Export Financing), Indonesia Eximbank ensures that all its business endeavors remain aligned with governmental directives, including supporting global discussions on climate risk mitigation, which are currently prominent. Indonesia Eximbank role in fostering a better life on Earth is realized through the implementation of more responsible business activities by integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects into every operational business process.

Indonesia Eximbank recognizes that financing and reputational risks may arise from projects that pose threats to environmental conservation. Reputation risks typically stem from projects experiencing significant conflicts or public issues, or projects with unresolved social and environmental issues leading to negative publicity.

To minimize such risks, Indonesia Eximbank ensures the application of social and environmental principles in every financed project. In the context of sustainability, Indonesia Eximbank also ensures that the objectives of all its business activities are not solely profit-driven but also aim to generate maximum economic benefits for shareholders while creating positive impacts and fostering multiplier effects for exporters, society, and the Indonesian economy.

Indonesia Eximbank commitment to realizing economic development balanced with social and environmental considerations is demonstrated through consistent sustainability programs and initiatives undertaken each year. This is also done as part of our efforts to support the achievement of SDGs in Indonesia.

Pada dasarnya, LPEI menyadari bahwa pencapaian keseimbangan kinerja keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, adalah suatu proses yang harus diupayakan dengan tekad penuh dan tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak. Oleh sebab itu, LPEI selalu berusaha menjaga hubungan yang bermartabat dan berkualitas dengan seluruh pemangku kepentingan mengingat peran mereka yang begitu besar dalam mendukung kemajuan bisnis Lembaga.

Fundamentally, Indonesia Eximbank acknowledges that achieving balanced sustainability performance covering economic, social, and environmental aspects is a process that requires full determination and the support of all parties involved. Therefore, Indonesia Eximbank continuously endeavors to maintain dignified and quality relationships with all stakeholders, considering their significant role in supporting the institution's business advancement.

Komitmen Terhadap SDGs [2-24]

Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang No.2 tahun 2009, aktivitas bisnis LPEI difokuskan untuk mendukung pengembangan segmen Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang sampai hari ini pertumbuhannya belum merata di Indonesia. Dalam menjalankan amanah mandat tersebut, LPEI memberikan bimbingan jasa konsultasi bagi para UMKMK untuk membantu mereka dalam meningkatkan kapasitasnya baik dari sisi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun produknya. Pada implementasinya di setiap area operasional, LPEI bersinergi baik di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan melibatkan filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pakar yang sesuai dibidangnya.

Commitment to SDGs [GRI 2-24]

As mandated by Law No. 2 of 2009, Indonesia Eximbank business activities are focused on supporting the development of the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) segment, as well as Cooperatives, whose growth in Indonesia has not been evenly distributed to date. In fulfilling this mandate, Indonesia Eximbank provides advisory services to MSMEs to assist them in enhancing their capacities, both in terms of strengthening Human Resources (HR) and their products. In its implementation at every operational level, Indonesia Eximbank collaborates nationally, provincially, and locally, involving philanthropy, business actors, academics, and relevant experts.

Secara keseluruhan, lanskap bisnis LPEI sudah sejalan dengan yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yaitu mewujudkan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan serta pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.

Overall, Indonesia Eximbank business landscape aligns with that outlined in the National Action Plan (RAN) for Sustainable Development Goals (SDGs), under the coordination of the National Development Planning Agency (Bappenas). This entails realizing development that ensures sustained improvement in the economic welfare of communities and fosters the sustainability of social life.

Tidak hanya LPEI di Indonesia, namun hampir seluruh negara di dunia juga telah bersepakat untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan SDGs dalam merancang program-program pembangunan di masing-masing negaranya. SDGs terdiri atas 17 rumusan tujuan pembangunan berkelanjutan skala global yang akan diterapkan dalam kurun waktu 2016-2030, sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut:

Not only in Indonesia, but nearly all countries worldwide have also agreed to implement the concept of sustainable development through SDGs in designing development programs in their respective countries. SDGs consist of 17 formulations of global-scale sustainable development goals to be implemented within the 2016-2030 period, as illustrated in the following diagram:

Rumusan SDGs lahir dari kesepakatan negara-negara anggota PBB melalui *Cooperation of Parties* (COP) ke-21 di Paris pada tahun 2015 lalu, yang kemudian pelaksanaannya dipantau melalui pertemuan tahunan di bawah koordinasi *The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).

Sebagai bentuk tindaklanjut dari UNFCCC COP21 Paris, Pemerintah resmi mengumumkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan bantuan dan kerja sama internasional. Salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan komitmen tersebut ditunjukkan melalui penerbitan POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Langkah ini ditempuh untuk mendorong para pelaku usaha terutama di sektor jasa keuangan agar ikut berkontribusi dalam menekan dampak *climate change* dalam setiap proses operasional bisnis yang dijalankan.

Pada forum COP terakhir, yakni COP28 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 30 November-12 Desember 2023, seluruh peserta konferensi termasuk Indonesia telah mengevaluasi proses kemajuan dunia dalam mengurangi emisi, membangun ketahanan terhadap *climate change*, dan strategi untuk mendapatkan pendanaan serta dukungan untuk mengatasi krisis iklim.

The formulation of the SDGs arose from the agreement of United Nations member states through the 21st Conference of Parties (COP) in Paris in 2015, which is subsequently monitored through annual meetings under the coordination of The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

As a follow-up to the UNFCCC COP21 Paris, the Government officially announced Indonesia's commitment to reduce Greenhouse Gas (GHG) emissions by 29% by 2030 through its own efforts, and up to 41% with international assistance and cooperation. One of the Government's efforts to realize this commitment is demonstrated through the issuance of Regulation No. 51/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Institutions, Issuers, and Public Companies. This step is taken to encourage businesses, especially in the financial sector, to contribute to mitigating the impacts of climate change in every aspect of their business operations.

At the latest COP forum, COP28 held in Dubai, United Arab Emirates (UAE) on 30 November - 12 December 2023, all conference participants, including Indonesia, evaluated global progress in reducing emissions, building resilience to climate impacts, and strategies to obtain funding and support to address the climate crisis.

Komitmen terhadap ESG

LPEI mengambil peran aktif sebagai agen transformasi dalam penerapan ESG, dimana hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam merespons perubahan iklim serta mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 mendatang. Dengan tekad penuh tersebut, LPEI mendorong sejumlah langkah inisiatif penerapan ESG sebagai standar kinerja operasional Lembaga yang berkelanjutan.

Selaras dengan komitmen tinggi terhadap penerapan praktik model bisnis berbasis ESG, maka selain mengejar keuntungan usaha, Lembaga juga terus berusaha untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam mendukung dan menciptakan ekosistem ekspor yang berkelanjutan, di antaranya melalui kegiatan *Coaching Program for New Exporter* (CPNE), Rumah Ekspor, dan *business matching*. Untuk itu, LPEI telah mengadakan kegiatan pelatihan/*capacity building* yang ditujukan bagi pelaku usaha baik yang baru merintis usaha ataupun yang sudah berjalan namun tidak berkelanjutan, untuk dapat menjadi pelaku usaha baru yang bertanggung jawab dan berkesinambungan yang sejalan dengan isu ESG.

Melalui program-program tersebut, LPEI berharap para peserta mendapatkan bekal ilmu dan wawasan yang lebih luas dalam mengelola bisnisnya masing-masing sehingga mereka senantiasa berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan serta tetap *resilient* dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis.

Target LPEI

Target LPEI ke depan adalah untuk menjadi lembaga perpanjangan tangan Pemerintah yang unggul, mandiri serta kredibel, dengan memiliki kapasitas serta fundamental keuangan yang sehat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekspor nasional secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan ekosistem ekspor.

Untuk dapat menuju ke arah sana, LPEI mengkalibrasi ulang model bisnis yang diterapkan saat ini serta menyesuaikan kapabilitas operasional, risiko, teknologi, dan sumber daya manusia untuk dapat mendukung model bisnis baru yang lebih fokus. Adapun *value proposition* yang diusung oleh LPEI ke depannya adalah sebagai berikut:

Commitment to ESG

Indonesia Eximbank takes an active role as a transformation agent in implementing Environmental, Social, and Governance (ESG) practices, which is aligned with the Government's commitment to respond to climate change and achieve Net Zero Emission (NZE) by 2060. With full determination, Indonesia Eximbank advocates for several initiatives in implementing ESG as the standard for sustainable institutional performance.

In line with the high commitment to adopting ESG-based business models, besides pursuing business profits, the institution also strives to provide its best contribution to supporting and creating a sustainable export ecosystem. This includes activities such as the Coaching Program for New Exporters (CPNE), Export House, and business matching. To this end, Indonesia Eximbank has conducted training and capacity-building activities aimed at entrepreneurs, whether they are new to starting a business or already established but unsustainable, to become responsible and sustainable entrepreneurs in line with ESG issues.

Through these programs, Indonesia Eximbank hopes that participants will gain broader knowledge and insights into managing their respective businesses, thus enabling them to maintain high competitiveness, possess advantages, and remain resilient in facing various business challenges.

Indonesia Eximbank Targets

The Institution aims to establish itself as a reliable and independent government-affiliated organization in the future. It seeks to achieve this by developing a robust financial foundation and building its capacity, with the goal of promoting sustainable national export growth through close collaboration with the export ecosystem.

To achieve this goal, Indonesia Eximbank realigns the existing business model and adapt operational capabilities, risks, technology, and human resources to support a new, more targeted business approach. Indonesia Eximbank's envisioned value proposition for the future is as follows:

1. ***Beyond Financing***
   Menyediakan produk-produk yang lebih spesifik dengan kelebihan/fitur yang hanya dimiliki oleh LPEI dan dapat bersinergi dengan ekosistem ekspor lainnya.
   - Menjadi pusat informasi ekspor dan hub yang dapat mengatasi hambatan *trade* dengan berkolaborasi dengan ekosistem ekspor seperti K/L dan *exim banks* lain;
   - Mengembangkan komoditas unggulan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar ekspor baik UKM maupun korporasi;
   - Meningkatkan peran sebagai *enhancer* melalui fasilitas asuransi dan penjaminan dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan lain.

2. ***Developmental Impact***
   Memberikan peningkatan *developmental impact* yang signifikan dan mampu menjadi *top of mind* dari pihak di dalam ekosistem ekspor serta *financially self sufficient*.
   - Mendukung sektor yang memiliki dampak pembangunan yang tinggi;
   - Memperkuat peran LPEI sebagai pemberi informasi, pendukung, dan *financial intermediary;*
   - Berkolaborasi dengan *platform digital* untuk meningkatkan jangkauan fasilitas ke UMKM berorientasi ekspor;
   - Menjajaki potensi ekspor di sektor-sektor bukan unggulan.

3. ***Sustainability***
   Memastikan keberlanjutan atas produk-produk atau program yang dilaksanakan ke depannya dan memiliki kebermanfaatan bagi ekosistem ekspor.
   - Mengintegrasikan aspek ESG ke dalam lini Bisnis LPEI;
   - Mengembangkan produk dan layanan yang mendukung ESG;
   - Mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan keberpihakan dalam pemilihan portofolio;
   - *Encourage renewable projects;*
   - Mendorong dan membantu nasabah untuk memperoleh *green certification.*

1. **Beyond Financing**
   Providing more specific products with advantages/ features that are only owned by Indonesia Eximbank and can synergize with other export ecosystems.
   - Become an export information center and hub that can overcome trade barriers by collaborating with export ecosystems such as Ministries/Institutions and other exim banks.
   - Developing excellent commodities designed in accordance with the needs of the export market, both SMEs and corporations.
   - Increase the role as an enhancer through insurance and guarantee facilities by collaborating with other financial institutions.

2. **Developmental Impact**
   Providing a significant increase in developmental impact and being able to be top of mind from parties in the export ecosystem and financially self-sufficient.
   - Supporting sectors that have a high development impact;
   - Strengthening the Institution's role as an informer, supporter, and financial intermediary;
   - Collaborate with digital platforms to increase the reach of facilities to export-oriented MSMEs;
   - Exploring export potential in non-superior sectors.

3. **Sustainability**
   Ensuring the sustainability of products or programs implemented in the future and having benefits for the export ecosystem.
   - Integrating ESG aspects into Indonesia Eximbank's Business lines;
   - Develop products and services that support ESG;
   - Consider aspects of environmental, social, and partiality sustainability in portfolio selection;
   - Promote renewable projects
   - Enforce and assist customers to obtain green certification

PENDEKATAN KEBERLANJUTAN [3-3]

Landasan pencapaian tujuan keberlanjutan adalah terpenuhinya harapan para pemangku kepentingan. Untuk itu, LPEI mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan menganalisis seberapa penting topik-topik keberlanjutan yang akan dikembangkan. Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk di antaranya dampak potensial yang mungkin dialami dan ditimbulkan oleh kegiatan operasional, juga *benefit* yang ditimbulkannya, selain mempertimbangkan kemampuan pemangku kepentingan dalam mempengaruhi pencapaian target kerja LPEI.

Mengingat bidang usaha LPEI adalah memberikan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi untuk meningkatkan ekspor nasional, maka dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan secara nyata yang dapat dilakukan LPEI adalah kemampuan dalam merancang, menerapkan, dan mengawasi implementasi kebijakan pemberian jasa-jasa dimaksud yang ramah lingkungan. Artinya, LPEI memiliki kemampuan untuk menyeleksi dan mengawasi para nasabah/kliennya agar senantiasa mematuhi peraturan perundangan di bidang lingkungan dan sosial. Kemampuan dimaksud direpresentasikan pada dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang disusun, diterapkan dan dievaluasi secara berkala.

SUSTAINABILITY APPROACH [GRI 3-3]

The cornerstone of achieving sustainability goals is the fulfillment of stakeholder expectations. To that end, Indonesia Eximbank identifies stakeholders and analyzes how important sustainability topics will be developed. Stakeholder identification is carried out by considering several aspects, including the potential impacts that may be experienced and caused by operational activities, as well as the benefits they cause, in addition to considering the ability of stakeholders to influence the achievement of Indonesia Eximbank's work targets.

Given that Indonesia Eximbank's business sector is to provide financing, guarantee, insurance and advisory services to enhance national exports, the support for achieving sustainability goals in real terms that can be done is Indonesia Eximbank's ability to design, implement and supervise the implementation of policies for providing these services that are environmentally friendly. Thus, Indonesia Eximbank had the ability to select and supervise its customers/clients to always comply with laws and regulations in the environmental and social aspects. These capabilities are represented in the Sustainable Finance Action Plan document which is prepared, implemented and evaluated periodically.

Strategi Keberlanjutan LPEI
Indonesia Eximbank Sustainability Strategy

Strategi keberlanjutan LPEI melandasi seluruh program yang dijalankan Lembaga agar senantiasa sejalan dengan Tujuan SDGs. LPEI mendukung penuh *Roadmap* Pemerintah RI menuju NZE di tahun 2060, dengan mengintegrasikan aspek-aspek terkait ESG dalam menjalankan mandatnya sebagai SMV Kementerian Keuangan RI.

Sebagai Lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah untuk mendukung penguatan ekosistem ekspor dan impor nasional, LPEI menyadari peran pentingnya dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui fungsi *intermediary* dan secara tidak langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs melalui penyaluran kredit yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan hidup.

Untuk memastikan maksimalnya dukungan LPEI terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan tersebut, Lembaga telah merancang dan menerapkan strategi dukungan pencapaian keberlanjutan dalam bentuk penerapan pilar-pilar Keuangan Berkelanjutan yang diamanatkan dalam POJK 51/2017, serta diselaraskan dengan prinsip-prinsip *United Nations Global Compact* (UN Global Compact) dan didukung oleh praktik tata kelola terbaik.

Dalam keseharian di area kantor, LPEI mengarahkan seluruh pegawai agar memiliki *mindset Green Office Lifestyle* dan secara konsisten menjalankan budaya ramah lingkungan dimulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi pemakaian kertas untuk keperluan administrasi pekerjaan dan sebagai gantinya terus mengoptimalkan digitalisasi dokumen, melakukan upaya penghematan energi listrik, hingga melarang penggunaan kemasan berbahan plastik atau *styrofoam* yang tidak bisa diaur ulang.

Di sisi lain, LPEI juga mendorong pelaku usaha untuk turut proaktif memperhatikan dan menerapkan ESG melalui kegiatan pendampingan dan pelatihan kepada para pelaku binaan LPEI untuk menghasilkan produk ekspor yang berdaya saing global serta ramah lingkungan. Dalam hal ini, program Desa

Indonesia Eximbank sustainability strategy underpins all programs implemented by the institution to consistently align with the SDGs. Indonesia Eximbank fully supports the Indonesian Government's Roadmap towards NZE by 2060 by integrating ESG-related aspects in fulfilling its mandate as a Special Mission Vehicle under the Ministry of Finance.

As a government-established institution tasked with strengthening the national export and import ecosystem, Indonesia Eximbank recognizes its vital role in building an inclusive and sustainable national economy through its intermediary function, indirectly contributing to the achievement of SDGs through the provision of credits utilized for business activities that yield social and environmental benefits.

To ensure maximal support towards achieving these sustainability goals, the institution has designed and implemented a strategy to support sustainability achievement through the application of pillars of Sustainable Finance mandated in Regulation No. 51/2017, aligned with the principles of the United Nations Global Compact (UN Global Compact), and supported by best governance practices.

In its daily operations, Indonesia Eximbank directs all employees to adopt a Green Office Lifestyle mindset and consistently uphold an environmentally friendly culture, starting from small actions such as reducing paper usage for administrative purposes and instead optimizing document digitization, implementing efforts to save electricity, and prohibiting the use of non-recyclable plastic or styrofoam packaging.

Furthermore, Indonesia Eximbank encourages businesses to proactively consider and implement ESG through mentoring and training activities for its mentored entrepreneurs to produce globally competitive and environmentally friendly export products. In this regard, the Go Export Village Program

Devisa mendorong peningkatan kapasitas usaha, kesejahteraan dan ekonomi, dengan menerapkan ESG di skala mikro.

LPEI meyakini kerangka kerja keberlanjutan yang telah diterapkan sejauh ini turut mendukung 17 sasaran SDG.

REALISASI *ROADMAP* RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN (RAKB) LPEI TAHUN 2023

Agar penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan di lingkup LPEI senantiasa berjalan lebih terarah dan terukur, Lembaga telah menetapkan Peta Jalan (*Roadmap*) Keuangan Berkelanjutan LPEI untuk periode 2021-2025 yang berisi rencana aksi jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) sebagai bagian dari penerapan strategi keuangan berkelanjutan.

LPEI telah membentuk unit kerja yang mendukung penerapan ESG, memiliki Kebijakan Keuangan Berkelanjutan (yaitu PDD No. 0012/10/PDD/2022), serta melakukan pelatihan maupun *sharing session* bertemakan ESG kepada pegawai LPEI. Pada tahun 2023, LPEI melakukan penyesuaian terhadap *roadmap* Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk periode 5 (lima) Tahunan untuk tahun 2021 – 2025.

Roadmap LPEI 2021-2025 (5 Tahunan)

LPEI menetapkan RAKB 2021-2025 sebagai acuan dan pedoman bagi pegawai dalam menjalankan berbagai program dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan, yakni melalui kegiatan usaha yang dijalankan LPEI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, yang sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2009.

Secara keseluruhan, dalam *Roadmap* RAKB 2021-2025, LPEI telah menetapkan 6 Sasaran Strategis utama yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan diturunkan juga ke dalam 15 Indikator Keberhasilan, sebagaimana disampaikan pada tabel berikut:

promotes business capacity building, welfare, and economic improvement by implementing ESG at the micro level.

Indonesia Eximbank believes that the sustainability framework implemented so far contributes to supporting all 17 SDG targets.

REALIZATION OF INDONESIA EXIMBANK SUSTAINABLE FINANCE ACTION PLAN (RAKB) ROADMAP IN 2023

To ensure that the implementation of Sustainable Finance principles within Indonesia Eximbank remains well-directed and measurable, the institution has established a Sustainable Finance Roadmap for the period 2021-2025, which includes short-term (one-year) and long-term (five-year) action plans as part of the sustainable finance strategy implementation.

Indonesia Eximbank has established a working unit that supports ESG implementation, has a Sustainable Finance Policy (PDD No. 0012/10/PDD/2022), and conducts training and sharing sessions on ESG topics for Indonesia Eximbank employees. In 2023, Indonesia Eximbank made adjustments to the Sustainable Finance Action Plan roadmap for the 5 (five) Annual period for 2021 - 2025.

Indonesia Eximbank Roadmap 2021-2025 (5 Yearly)

Indonesia Eximbank has established the 2021-2025 Sustainable Finance Action Plan (RAKB) as a reference and guideline for employees to carry out various programs supporting the achievement of sustainability goals, through business activities as regulated in the Company's Articles of Association, in accordance with the mandate of Law No. 2 of 2009.

Overall, in the 2021-2025 RAKB Roadmap, Indonesia Eximbank has defined 6 main Strategic Objectives to be achieved within a 5-year period and further translated them into 15 Key Performance Indicators, as presented in the following table:

No.	Sasaran Strategis Strategic Goals	Indikator Keberhasilan Success Indicators	Tahun | Year				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersusunnya Kebijakan, Manual, SOP, atas penerapan Keuangan Berkelanjutan Preparation of Policies, Manuals, SOPs, on the implementation of Sustainable Finance	1) Tersedianya dokumen kebijakan, manual, SOP yang mengacu pada peraturan nasional maupun internasional terkait pengelolaan lingkungan Availability of policy documents, manuals, SOPs that refer to national and international regulations related to environmental management.					
2	Tersedianya kapasitas sumber daya manusia untuk menjalankan Keuangan Berkelanjutan Availability of human resource capacity to manage Sustainable Finance	2) Terlaksananya pembentukan satuan kerja/unit kerja yang kompeten dalam menjalankan Keuangan Berkelanjutan. Implementation of the establishment of units/work units that are competent in carrying out Sustainable Finance.					
		3) Terlaksananya workshop sosialisasi dan pelatihan Keuangan Berkelanjutan untuk lingkup kelembagaan. Implementation of socialization workshops and training on Sustainable Finance for the institutional scope.					
		4) Terlaksananya workshop sosialisasi dan pelatihan Keuangan Berkelanjutan untuk Kegiatan Usaha. Implementation of socialization workshops and training on Sustainable Finance for Business Activities.					
3	Terbangunnya proses pemenuhan aspek lingkungan dan sosial baik di dalam lingkup kelembagaan dan Kegiatan Usaha Establishment of the process of fulfilling environmental and social aspects both within the scope of institutions and business activities	5) Terlaksananya kegiatan publikasi pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di LPEI. Implementation of publication activities on the implementation of Sustainable Finance at Indonesia Eximbank.					
		6) Tersusunnya laporan internal pemantauan penerapan Keuangan Berkelanjutan secara semesteran. Compilation of internal reports monitoring the implementation of Sustainable Finance on a semi-annual basis.					
		7) Penetapan sektor usaha yang akan menjadi pilot project Kegiatan Usaha dengan memperhatikan aspek ESG. Determination of business sectors that will become pilot projects for Business Activities by taking into account ESG aspects.					
		8) Pelaksanaan Jasa konsultasi dengan penekanan aspek ESG. Implementation of advisory services with emphasis on ESG aspects.					
		9) Penerapan due diligence serta perluasan sektoral. Application of due diligence and sectoral expansion.					
		10) Tersusunnya laporan pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan kepada OJK. Compilation of Sustainable Finance implementation report to OJK.					
		11) Laporan tingkat pemenuhan atas perbaikan penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai tanggapan dari OJK. Report on the level of fulfillment of improvements in the implementation of Sustainable Finance according to the response from OJK.					
		12) Evaluasi atas penerapan Keuangan Berkelanjutan LPEI (Kelembagaan dan Kegiatan Usaha). Evaluation of the implementation of Sustainable Finance (Institutional and Business Activities).					
4	Terlaksananya peningkatan kapasitas LPEI untuk pemenuhan aspek lingkungan dan sosial mengikuti standar internasional The implementation of capacity building of Indonesia Eximbank to fulfill environmental and social aspects following international standards	13) Terlaksananya kegiatan pelatihan, workshop tentang isu-isu lingkungan dan sosial secara berkesinambungan. Implementation of training activities, workshops on environmental and social issues on an ongoing basis.					

No.	Sasaran Strategis Strategic Goals	Indikator Keberhasilan Success Indicators	Tahun | Year				
			2021	2022	2023	2024	2025
5	Terlaksananya Keuangan Berkelanjutan secara penuh dan terintegrasi dalam proses bisnis LPEI Implementation of Sustainable Finance in full and integrated in Indonesia Eximbank business processes	14) Terpenuhinya pengakuan dari OJK tentang pemenuhan LPEI terhadap prinsip penerapan keuangan berkelanjutan. Fulfillment of recognition from OJK regarding Indonesia Eximbank fulfillment of the principles of implementing sustainable finance.					
6	Terpenuhinya pengakuan dari OJK tentang pemenuhan LPEI terhadap prinsip penerapan keuangan berkelanjutan Fulfillment of recognition from OJK regarding Indonesia Eximbank fulfillment of sustainable finance principles practices	15) Terlaksananya akselerasi penyaluran pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi terhadap Kegiatan Usaha berkelanjutan. Implementation of accelerated distribution of financing, guarantee, insurance and advisory services to sustainable business activities.					
		16) Tersedianya sumber dana bertemakan SDGs Availability of SDGs-themed funding sources					
		17) Tersedianya dan diterapkannya sinkronisasi penerapan ESG Kelembagaan bagi Badan/SMV Kementerian Keuangan Acceleration of financing, guarantees, insurance and advisory services for sustainable business activities.					

Sebagaimana terangkum dalam RAKB periode 2021-2025, LPEI juga telah menetapkan Visi dan Misi Keberlanjutan, sebagai berikut:

As outlined in the 2021-2025 RAKB, Indonesia Eximbank has also established its Vision and Mission for Sustainability, as follows:

Visi Vision

Keberlanjutan LPEI
Indonesia Eximbank Sustainability

Menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

To become an excellent and credible Eximbank in promoting highly competitive national exports at the global level by taking into account environmental and social aspects.

Misi Mission

Keberlanjutan LPEI
Indonesia Eximbank Sustainability

1. **Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.**
2. **Memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia.**
3. **Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing serta ramah lingkungan.**

1. Promoting the sustainability of a favorable business climate for sustainable national export growth by taking into account environmental and social aspects.
2. Providing quality national export financing services and advisory services as a solution to Indonesia's export needs.
3. Improve the ability of businesses, including small and medium enterprises, to manufacture excellent export-oriented products that are competitive and environmentally friendly.

Tujuan RAKB LPEI

Tujuan Penerapan Keuangan Berkelanjutan dalam lingkup Kelembagaan LPEI adalah:

a. LPEI memiliki Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang selaras dengan komitmen nasional dan menjadi landasan untuk menerapkan aspek ESG dalam kegiatan Kelembagaan;
b. LPEI memiliki personel yang mempunyai kapasitas, kepedulian dan kompeten dalam hal penilaian terhadap aspek ESG;
c. Merancang dan menetapkan kerangka kebijakan lingkungan hidup dan sosial untuk Lembaga serta internalisasi ESG dalam struktur organisasi LPEI;
d. Integrasi dan adopsi peraturan Nasional dan Internasional terkait Keuangan Berkelanjutan dan aspek ESG secara bertahap; dan
e. Merancang dan menerapkan program pengukuran, pelaporan dan verifikasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk lingkup Kelembagaan.

Sedangkan tujuan program penerapan keuangan berkelanjutan untuk lingkup Kegiatan Usaha LPEI adalah:

a) LPEI memiliki dokumen *Environmental, Social and Governance* (ESG) untuk lingkup Kegiatan Usaha;

b) Adopsi aspek lingkungan hidup dan sosial dalam proses pembiayaan LPEI untuk Kegiatan Usaha;

c) LPEI memiliki personel yang berkompeten dalam menilai aspek perlindungan lingkungan dan sosial;
d) Merancang dan menetapkan kerangka kebijakan lingkungan hidup dan sosial untuk Kegiatan Usaha serta Sosialisasi ESG untuk para debitur dan calon debitur;
e) Integrasi dan adopsi peraturan Nasional dan Internasional dan menyepakati program lingkungan hidup dan sosial di lingkup Kegiatan Usaha pada periode berikutnya; dan
f) Merancang dan menerapkan program pengukuran, pelaporan dan verifikasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan di lingkup Kegiatan Usaha.

Strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan rencana aksi keuangan berkelanjutan tersebut adalah:

a) Penyusunan kebijakan, manual, sistem dan prosedur terkait penerapan rencana aksi keuangan berkelanjutan;

Purpose of RAKB

The objectives of the implementation of Sustainable Finance within the scope of the Institutional activities are:

a. Indonesia Eximbank has a Sustainable Finance Policy that is in line with national commitments and becomes the basis for implementing ESG aspects in its Institutional Activities;
b. Indonesia Eximbank has personnel who have the capacity, care and competence in terms of assessment of ESG aspects;
c. Design and establish environmental and social policy framework for the Institution, as well as internalization of ESG in organizational structure;
d. Gradual integration and adoption of National and International regulations related to Sustainable Finance and ESG aspects; and
e. Design and implement programs for measuring, reporting and verifying the successful implementation of Sustainable Finance for institutional activities.

Meanwhile, the objectives of the sustainable finance implementation program for the scope of Indonesia Eximbank's Business Activities are:

a) Indonesia Eximbank has Environmental, Social and Governance (ESG) documents for the scope of Business Activities;
b) Adoption of environmental and social aspects in Indonesia Eximbank's financing process for Business Activities;
c) Indonesia Eximbank has competent personnel in assessing environmental and social protection aspects;
d) Designing and establishing an environmental and social policy framework for Business Activities and ESG Socialization for debtors and prospective debtors;
e) Integration and adoption of National and International regulations and agreeing on environmental and social programs within the scope of Business Activities in the next period; and
f) Design and implement programs for measuring, reporting and verifying the successful implementation of sustainable finance implementation activities within the scope of Business Activities.

The strategies implemented to achieve the objectives of the sustainable finance action plan are:

a) Preparation of policies, manuals, systems and procedures related to the implementation of sustainable finance action plans;

b) Penyesuaian struktur organisasi dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia terkait pengelolaan rencana aksi keuangan berkelanjutan;
c) Pelaksanaan integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko serta peningkatan pertumbuhan portofolio pembiayaan dan/atau pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan.

b) Adjustment of organizational structure and fulfillment of human resource needs related to the management of sustainable finance action plans;
c) Implementation of integration of social and environmental aspects into risk management and increasing the growth of financing portfolios and/or in environmentally sound business activities.

Realisasi Program RAKB 2023

Untuk tahun 2023, LPEI telah berhasil merealisasikan berbagai program dalam RAKB tahun pelaporan, sebagai kelanjutan pelaksanaan program persiapan penerapan aksi keuangan berkelanjutan di tahun sebelumnya. Beberapa program RAKB yang telah berhasil dilaksanakan di tahun 2023, sebagai bagian dari implementasi RAKB 2021-2025 adalah sebagai berikut:

RAKB 2023 Program Realization

For 2023, Indonesia Eximbank has succeeded in realizing various programs in the RAKB reporting year, as a continuation of the implementation of the preparation program for the sustainable finance actions implemented in the previous year. Some of the RAKB programs that have been successfully implemented in 2023, as part of the implementation of RAKB 2021-2025 are as follows:

Periode Period	**Aktivitas** Activity	**Indikator Pencapaian** Indicators of Achievement	**Pencapaian** Achievement
Triwulan I - 2023 **Quarter I 2023**	Penyusunan laporan pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan kepada OJK (laporan periode 2022). Preparation of Sustainable Finance implementation report to OJK (2022 period report).	Tersusunnya laporan pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan periode 2022 kepada OJK. The report on the implementation of Sustainable Finance for the 2022 period has been submitted to OJK.	Laporan Keberlanjutan LPEI 2022 telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu dan dapat diakses melalui *website* resmi LPEI. Indonesia Eximbank Sustainability Report 2022 has been submitted to OJK in a timely manner and can be accessed through Indonesia Eximbank's official website.
	Pelaksanaan workshop, sosialisasi, dan Pelatihan ESG untuk lingkup Kegiatan Kelembagaan/ Operasional LPEI (Tahap I – Kantor Pusat) Implementation of workshops, socialization, and ESG training for the scope of Indonesia Eximbank Operational Activities (Phase I - Head Office)	Terlaksananya *workshop*, sosialisasi dan pelatihan ESG dalam lingkup Kegiatan Kelembagaan yang diikuti oleh minimal 90% dari pegawai LPEI hingga Triwulan IV – 2023 Implementation of ESG workshops, socialization and training within the scope of Institutional Activities attended by at least 90% of Indonesia Eximbank employees until Quarter IV - 2023.	Telah dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui *workshop/ sharing session* ESG/Keuangan Berkelanjutan secara bertahap kepada pegawai LPEI sejak Januari 2023 dengan Pencapaian >90% pegawai per 31 Oktober 2023 (kantor pusat maupun kantor cabang/ wilayah/pemasaran). Perwakilan LPEI dari unit yang membidangi ESG maupun unit lainnya yang terkait secara aktif dan teratur mengikuti webinar/*sharing session* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal seperti OJK Institute, Moody's dan IDX Carbon di sepanjang tahun 2023. HR capacity building has been carried out through ESG/Sustainable Finance workshops/sharing sessions gradually to Indonesia Eximbank employees since January 2023 with the achievement of >90% of employees as of October 31, 2023 (headquarters and branches/regions/marketing). achievement of >90% of employees as of October 31, 2023 (head office and branch/regional/marketing offices). Indonesia Eximbank representatives from units in charge of ESG and other related units actively and regularly participate in webinars/sharing sessions organized by external parties such as OJK Institute, Moody's and IDX Carbon throughout 2023.

Periode Period	**Aktivitas** Activity	**Indikator Pencapaian** Indicators of Achievement	**Pencapaian** Achievement
Triwulan I - 2023 **Quarter I 2023**	Perluasan pemetaan sektor dari Nasabah/Mitra usaha dengan memperhatikan aspek ESG dari 7 (tujuh) sektor menjadi 10 (sepuluh) sektor.	Tersedianya perluasan pemetaan Nasabah/ mitra usaha dari 7 (tujuh) sektor menjadi 10 (sepuluh sektor yang terdapat di dalam peraturan internal LPEI terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan LPEI.	Telah dilakukan analisa terhadap *pipeline* maupun *portfolio* LPEI per 30 Juni dan 30 September 2023, dan diajukan 3 sektor tambahan penerapan ESG dalam rapat Board of Management pada tanggal 14 November 2023.
	Expansion of sectoral mapping of customers/business partners with regard to ESG aspects from 7 (seven) sectors to 10 (ten) sectors.	Availability of expansion of mapping of Customers/ business partners from 7 (seven) sectors to 10 (ten) sectors contained in Indonesia Eximbank's internal regulations related to the implementation of Indonesia Eximbank's Sustainable Finance.	An analysis of Indonesia Eximbank pipeline and portfolio as of 30 June and 30 September 2023 was conducted, and 3 additional sectors of ESG implementation were proposed in the Board of Management meeting on 14 November 2023.
Triwulan II - 2023 **Quarter II 2023**	Pelaksanaan dialog/ komunikasi dengan 50 Nasabah/mitra usaha besar LPEI terkait perluasan sektoral LPEI.	Terlaksananya dialog/ komunikasi dengan 50 Nasabah/mitra usaha utama LPEI	LPEI telah melakukan identifikasi, komunikasi Dan mendapatkan respons dari 61 Nasabah pembiayaan sehubungan dengan pengisian ESG Checklist.
	Conduct dialog/ communication with major customers/business partners (top 50) related to sectoral mapping.	Implementation of dialogue/ communication with Indonesia Eximbank major customers/ business partners (top 50)".	Indonesia Eximbank has identified, communicated and received responses from 61 financing customers in connection with the completion of the ESG Checklist .
	Pelaksanaan klasifikasi 50 Nasabah/mitra usaha LPEI ke dalam 3 kategori internal penerapan ESG.	Tersedianya klasifikasi atas 50 Nasabah/mitra usaha dalam kategori yang dimiliki LPEI yaitu Menghimbau, Mensyaratkan, dan Membatasi.	Telah dilakukan klasifikasi 61 Nasabah ke dalam kategori Menghimbau, Mensyaratkan dan Membatasi dan dilakukan pemetaan untuk Nasabah dari usulan perluasan sektor prioritas.
	Classification of 50 main Customers/ business partners into 3 (three) internal categories related to ESG Implementation.	Availability of classification of 50 customers/business partners grouped into 3 internal categories of Indonesia Eximbank's ESG implementation	Classification of 61 customers grouped into 3 internal categories of Indonesia Eximbank's ESG implementation has been carried out and mapping for customers from the proposed expansion of priority sectors.
	Pemantauan atas pelaksanaan klasifikasi Nasabah/mitra usaha LPEI.	Terpantaunya pelaksanaan klasifikasi dalam bentuk dokumen hasil klasifikasi.	Terdapat 28 Nasabah yang dihimbau untuk melengkapi hal-hal terkait penerapan aspek ESG yang belum dimiliki/masih on progress saat ini.
	Monitoring the implementation of the classification of Indonesia Eximbank customers/business partners.	The implementation of classification is monitored in the form of classification result documents.	28 customers are encouraged to progress in completing aspects related to ESG Implementation.
	Perluasan penerapan Keuangan Berkelanjutan terhadap Nasabah/mitra usaha yang telah ditetapkan bersama Unit Kerja terkait Pembiayaan/ Penjaminan/ Asuransi/Jasa Konsultasi.	Terlaksananya perluasan penerapan Keuangan Berkelanjutan bersama dengan Unit Kerja terkait Pembiayaan/Penjaminan/ Asuransi/Jasa Konsultasi dari 2 menjadi 50 Nasabah.	Selain 61 Nasabah pembiayaan yang telah dijelaskan di atas, pada tahun 2023 LPEI telah mulai memetakan pemenuhan aspek ESG serta korelasinya dengan SDGs (Sustainable Development Goals) bagi 7 desa devisa yang diberdayakan oleh LPEI sejak 2019, 2020 dan 2021.
	Expansion of the application of Sustainable Finance to Customers/business partners that have been determined with the Work Unit related to Financing/Guarantee/ Insurance/Advisory Services.	Implementation of the expansion of the application of Sustainable Finance together with the Work Unit related to Financing/Guarante/ Insurance/Advisory Services from 2 to 50 Customers.	In addition to the 61 financing customers described above, in 2023 Indonesia Eximbank has begun to map the fulfillment of ESG aspects and their correlation with SDGs (Sustainable Development Goals) for 7 Go Export Village empowered by Indonesia Eximbank since 2019, 2020 and 2021.

Periode Period	Aktivitas Activity	Indikator Pencapaian Indicators of Achievement	Pencapaian Achievement
Triwulan III – 2023 **Quarter III 2023**	Pelaksanaan workshop, sosialisasi dan Pelatihan ESG untuk lingkup kegiatan Kelembagaan/ Operasional & Kegiatan Usaha LPEI (Tahap II – Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Pemasaran).	Terlaksananya *workshop*, sosialisasi dan pelatihan ESG dalam lingkup kegiatan Kelembagaan & Kegiatan Usaha yang diikuti oleh minimal 90% dari pegawai LPEI hingga Triwulan IV – 2023.	Telah dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui workshop/ sharing session ESG/ Keuangan Berkelanjutan secara bertahap kepada pegawai LPEI sejak Januari 2023 dengan pencapaian >90% pegawai per 31 Oktober 2023 (kantor pusat maupun kantor cabang/ wilayah). Perwakilan LPEI dari unit yang membidangi ESG maupun unit lainnya yang terkait secara aktif dan teratur mengikuti webinar/sharing session yang diselenggarakan oleh pihak eksternal seperti OJK Institute, Moody's dan IDX Carbon di sepanjang tahun 2023.
	Implementation of workshops, socialization and ESG Training for the scope of Indonesia Eximbank Operational & Business Activities (Phase II - Regional Offices, Branch Offices, and Marketing Offices).	Implementation of workshops, socialization and ESG training within the scope of Indonesia Eximbank Business Activities attended by at least 90% of Indonesia Eximbank employees until Quarter IV - 2023.	HR capacity building through ESG/ Sustainable Finance workshops/ sharing sessions has been carried out gradually to Indonesia Eximbank employees since January 2023 with the achievement of >90% of employees as of 31 October 2023 (head office and branch/regional offices). Indonesia Eximbank representatives from units in charge of ESG and other related units actively and regularly participate in webinars/sharing sessions organized by external parties such as OJK Institute, Moody's and IDX Carbon throughout 2023.
	Pelaksanaan kegiatan publikasi penerapan Keuangan Berkelanjutan di LPEI.	Publikasi oleh LPEI maupun media eksternal terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan di LPEI melalui media antara lain *website*, laman resmi, media sosial, dan sebagainya.	Telah dilakukan publikasi mengenai Keuangan Berkelanjutan LPEI di media online (antaranews.com) pada tanggal 29 Maret 2023 dan publikasi di media sosial LPEI (Instagram) pada tanggal 23 Juni 2023. Selain itu LPEI telah melakukan sosialisasi mengenai ESG/ Keuangan Berkelanjutan sebanyak 4 (empat) kali kepada masyarakat bersamaan dengan acara Dhawafest, Karir Ekspo, LPDP Fest dan Temu Bisnis di triwulan I – III 2023.
	Implementation of publication activities on the implementation of Sustainable Finance at Indonesia Eximbank.	Publication by Indonesia Eximbank and external media on the implementation of Sustainable Finance at Indonesia Eximbank through media including websites, official websites, social media, and others.	There has been publication of Indonesia Eximbank Sustainable Finance in online media (antaranews.com) on 29 March 2023 and publication in LPEI's social media (Instagram) on 23 June 2023. In addition, Indonesia Eximbank has conducted socialization on ESG/ Sustainable Finance 4 (four) times to the public in conjunction with the Dhawafest, Career Expo, LPDP Fest and Business Meeting events in the first - third quarter of 2023.
	Penerapan due diligence secara internal terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan di LPEI.	*Due diligence* dilakukan secara internal dengan survei kepada Pegawai/Unit Kerja atas pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan di LPEI yang dilaporkan kepada Dewan Direktur.	Telah dilakukan survey awal yang diikuti oleh 77% pegawai di Januari 2023 dan survey lanjutan di November 2023 yang diikuti oleh 69% dari pegawai LPEI.
	Internal due diligence on the implementation of Sustainable Finance at Indonesia Eximbank.	Due diligence is conducted internally by surveying employees/work units on the achievement of Sustainable Finance implementation at Indonesia Eximbank which is reported to the Board of Directors.	An initial survey was conducted with 77% of employees in January 2023 and a follow-up survey in November 2023 with 69% of Indonesia Eximbank employees.

Periode Period	Aktivitas Activity	Indikator Pencapaian Indicators of Achievement	Pencapaian Achievement
Triwulan IV – 2023 **Quarter IV 2023**	Evaluasi atas hasil dialog/ komunikasi terkait pemetaan sektor prioritas dari Nasabah/ mitra usaha LPEI.	Tersedianya *feedback* dan perbaikan yang dapat dilakukan dalam bentuk pemenuhan aspek ESG yang tertuang dalam action plan dari Nasabah/mitra usaha (jika ada).	*Ongoing* (sebagai tindak lanjut dengan Nasabah yang dihimbau untuk memenuhi aspek ESG).
	Evaluation of the results of dialog/communication related to the mapping of priority sectors from Indonesia Eximbank customers/business partners.	The availability of feedback and improvements that can be made in the form of fulfillment of ESG aspects contained in the action plan from the Customer/ business partner (if any).	Ongoing (as a follow-up with customers who are encouraged to fulfill ESG aspects).
	Evaluasi atas penerapan Keuangan Berkelanjutan di lingkungan LPEI (ESG Kelembagaan dan ESG Kegiatan Usaha)	Tersedianya *feedback* dan perbaikan yang dapat dilakukan dalam bentuk laporan evaluasi oleh Unit Kerja ESG Kelembagaan dan ESG Kegiatan Usaha kepada *Board of Management.*	Telah dilakukan pelaporan dalam forum Rapat *Board of Management* LPEI tanggal 1 Agustus dan 14 November 2023, feedback dijadikan masukan untuk penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan LPEI 2024.
	Evaluation of the implementation of Sustainable Finance within Indonesia Eximbank (Institutional ESG and Business Activity ESG).	The availability of feedback and improvements that can be made in the form of evaluation reports by the Institutional ESG Work Unit and ESG Business Activities to the Board of Management	Reporting has been carried out in the Indonesia Eximbank Board of Management Meeting forum on 1 August and 14 November 2023, feedback is used as input for the preparation of the 2024 Indonesia Eximbank Sustainable Finance Action Plan.
	Laporan tingkat pemenuhan atas perbaikan penerapan ESG/Keuangan Berkelanjutan sesuai tanggapan dari OJK (jika ada)	Menyampaikan laporan tingkat pemenuhan atas perbaikan penerapan ESG/ Keuangan Berkelanjutan sesuai tanggapan dari OJK (jika ada)	N/A
	Report on the level of fulfillment of the improvement of the implementation of ESG/ Sustainable Finance in accordance with the response from OJK (if any)	Submit a report on the level of fulfillment of the improvement of the implementation of ESG/Sustainable Finance in accordance with the response from OJK (if any)	

Prioritas Program RAKB 2024

Sejalan dengan roadmap RAKB 2021-2025, target kegiatan prioritas LPEI tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2024 RAKB Program

In line with the 2021-2025 RAKB roadmap, Indonesia Eximbank's priority activity targets for 2024 are as follows:

No.	Target Kegiatan Prioritas Priority Target	Indikator Keberhasilan Success Indicator
1.	Pengklasifikasian 100 Nasabah pada 10 sektor prioritas dalam menerapkan ESG; Classification of 100 customers in 10 priority sectors in implementing ESG;	Tersedianya klasifikasi 100 Nasabah good bank dari 10 Sektor Prioritas serta UMKM ke dalam 3 kategori internal penerapan ESG serta *portfolio tagging.* Availability of classification of 100 good bank customers from 10 priority sectors as well as MSMEs in the category of Appealing/ Requiring/ Restricting and portfolio tagging;
2.	Review peraturan/ketentuan/standar internal terkait penerapan ESG/ Keuangan Berkelanjutan; Review of internal regulations/conditions/standards related to ESG/Sustainable Finance implementation;	Tersedianya hasil review Peraturan Internal PDE Keuangan Berkelanjutan LPEI yang updated dengan peraturan eksternal (jika ada); Availability of review results of Indonesia Eximbank Internal PDE Sustainable Finance Regulations updated with external regulations (if any);
3.	Sinkronisasi ESG framework di lingkungan Kemenkeu/ Badan/ SMV; Synchronization of ESG framework within the Ministry of Finance/Agency/SMV;	Tersedianya dan diterapkannya sinkronisasi penerapan ESG Kelembagaan bagi Badan/ SMV Kementerian Keuangan; Availability and implementation of synchronization of Institutional ESG implementation for Ministry of Finance Agencies/ SMVs;

No.	Target Kegiatan Prioritas Priority Target	Indikator Keberhasilan Success Indicator
4.	Evaluasi atas penerapan aksi Keuangan Berkelanjutan tahun berjalan; Evaluation of the implementation of Sustainable Finance actions in the current year;	Tersedianya tindak lanjut atas *feedback* yang diterima dan perbaikan bagi RAKB 2025; Provision of follow-up on feedback received and improvements for RAKB 2025;
5.	Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia tentang ESG/ Keuangan Berkelanjutan; Capacity building of Human Resources on ESG/Sustainable Finance;	Terlaksananya pelatihan pendalaman ESG bagi seluruh pegawai unit bisnis & manajemen risiko; Implementation of ESG in-depth training for all business unit & risk management employees;
6.	Menjajaki perolehan sumber dana bertemakan SDGs (*Sustainable Development Goals*); Exploring the acquisition of funding sources with the theme of SDGs (Sustainable Development Goals);	Tersedianya mitra yang dapat menyediakan sumber dana bertemakan SDGs salah satunya untuk community development Availability of partners who can provide funding sources with the theme of SDGs, one of which is for community development.

Penanggung Jawab Pelaksanaan RAKB LPEI

Pelaksanaan RAKB dan program-program keuangan berkelanjutan atau program dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan di LPEI dipimpin oleh Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit dan dilaksanakan oleh Divisi Kebijakan & Prosedur.

Person in Charge of Indonesia Eximbank RAKB Implementation

The implementation of RAKB and sustainable finance programs or programs to support the achievement of sustainability goals at Indonesia Eximbank is led by the Managing Director of Credit & Risk Management and implemented by the Policy & Procedure Division.

Ikhtisar Aspek Keberlanjutan
Sustainability Aspect Performance

ASPEK EKONOMI
LPEI mencatatkan kinerja ekonomi yang selaras dengan kondisi usaha.

ECONOMIC ASPECT
Indonesia's Eximbank recorded an economic performance that was in line with business conditions.

Keterangan Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Penyaluran kredit untuk kegiatan usaha berkelanjutan | Lending for sustainable business activities				
a) Penyaluran pembiayaan untuk UMKMK Financing distribution for MSMEs	Rp triliun Rp trillion	14,49	14,74	14,41
Jumlah | Total		14,49	14,74	14,41
Persentase total pembiayaan atas kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit Lembaga keseluruhan Percentage of total financing of sustainable business activities to total loans of the Institution	Persen (%)	19,63%	17,62%	17,16%
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	Rp triliun Rp trillion	(18,11)	(3,11)	0,39
Jumlah Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah Total Interest Income and Sharia Business	Rp triliun Rp trillion	4,05	3,71	4.26
Total Aset Total Assets	Rp triliun Rp trillion	51,35	83,82	89,04
Total Pembiayaan, Penjaminan & Asuransi Total Financing, Guarantee & Insurance	Rp triliun Rp trillion	41,26	66,32	66,56
Total Pembiayaan UKM-Ekspor Total SME-Export Financing	Rp triliun Rp trillion	14,49	14,74	14.41
Distribusi Perolehan Nilai Ekonomi Distribution of Economic Value Gains	Rp triliun Rp trillion	3.923,79	3.885,20	3.986,07
Jangkauan akses Access coverage	Wilayah Region	1 kantor pusat, 3 kantor cabang, 3 kantor wilayah, dan 3 kantor pemasaran tersebar di seluruh area Indonesia 1 head office, 3 branch offices, 3 regional offices, and 3 marketing offices throughout Indonesia	1 kantor pusat, 3 kantor cabang, 3 kantor wilayah, dan 3 kantor pemasaran tersebar di seluruh area Indonesia 1 head office, 3 branch offices, 3 regional offices, and 3 marketing offices throughout Indonesia	1 kantor pusat, 2 kantor wilayah, 3 kantor cabang, dan 3 kantor pemasaran tersebar di seluruh area Indonesia 1 head office, 2 regional offices, 3 branch offices, and 3 marketing offices throughout Indonesia

ASPEK SOSIAL / SOCIAL ASPECT

Keterangan Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
		Community and Neighborhood Empowerment		
Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Number of activities related to improving community welfare	Jumlah Number	8 Program Pengembangan Desa Devisa dan 4 program CPNE 8 Go Export Village Development Programs and 4 CPNE programs	6 Program Pengembangan Desa Devisa dan 7 program CPNE 6 Go Export Village Development Programs and 7 CPNE programs	5 Program Pengembangan Desa Devisa dan 7 program CPNE 5 Go Export Village Development Programs and 7 CPNE programs
Penyaluran bantuan sosial dalam kerangka penanganan pandemi dan bencana alam Disbursement of social assistance in handling pandemics and natural disasters	Rp juta Rp million	135,3	171,45	804,08
Realisasi investasi sosial dalam rangka program CSR Realization of social investment in terms of CSR programs	Rp miliar Rp billion	1,68	2,61	2,61
		Indonesia Eximbank *Personnel Empowerment*		
Jumlah pegawai Number of employees	Orang Person	563	549	567
Jumlah pegawai wanita Number of female employees	Orang Person	241	222	229
Rata-rata *man-days* pelatihan per tahun Average training man-days per year	*Man-days* pelatihan/ pegawai Man-days of training/ employee	5,78	6,96	4,28
Kelompok program pelatihan dan pengembangan pegawai Group of employee training and development programs	Jumlah Number	4	4	4
Rekrutmen pegawai baru Recruitment of new employees	Orang Person	60	53	56
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena berbagai alasan Termination of employment for any reason	Orang Person	46	71	45

ASPEK LINGKUNGAN HIDUP / ENVIRONMENTAL ASPECTS

Keterangan Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Pemakaian Kertas Paper Usage	Lembar Sheet	1.005.022	842.375	190.523
Intensitas konsumsi Energi Listrik Electricity Energy consumption intensity	GJoule/M^2	0,32	0,20	0,20
Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Greenhouse Gas (GHG) Emission Intensity	ton CO_2 /M^2	0,08	0,05	0,05
Kebijakan Operasional Berbasis ESG ESG-based Operational Policy	Jumlah Total	2	2	-

Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainability Governance

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [2-9] [2-11] [2-12] [2-13]

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI berkomitmen untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan sebagaimana diwajibkan oleh regulator melalui POJK 51/2017. Komitmen akan hal ini ditunjukkan melalui langkah konkret Lembaga yang secara konsisten mengintegrasikan faktor-faktor ESG pada seluruh aspek operasional maupun bisnis, termasuk ke dalam praktik tata kelola secara keseluruhan.

Sebagai salah satu upaya kami dalam mewujudkan terciptanya praktik tata kelola yang berkelanjutan, LPEI memastikan seluruh departemen dan fungsi kerja sudah memahami visi dan misi keberlanjutan Lembaga sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh tiap-tiap unit kerja bermuara di ujung yang sama yaitu membantu proses pencapaian tujuan strategis jangka pendek maupun jangka panjang LPEI sesuai dengan arahan yang tercantum dalam RAKB.

Kemudian untuk memastikan seluruh target dan kinerja keberlanjutan yang diusulkan dalam RAKB dapat terealisasi sesuai target, LPEI juga telah menetapkan pembagian tugas dan wewenang kepada beberapa Pejabat dan Unit Kerja sebagai penanggung jawab pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

PERSON IN CHARGE OF SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION [2-9] [2-11] [2-12] [2-13]

In carrying out its business activities, Indonesia Eximbank is committed to consistently applying the principles of Sustainable Finance as mandated by regulators through POJK 51/2017. This commitment is demonstrated through concrete steps taken by the institution to consistently integrate ESG factors into all operational and business aspects, including into overall governance practices.

As part of our efforts to realize sustainable governance practices, Indonesia Eximbank ensures that all departments and functions understand the institution's sustainability vision and mission. This is aimed at ensuring that all annual programs and activities conducted by each unit ultimately contribute to achieving Indonesia Eximbank short-term and long-term strategic goals as outlined in the Strategic Plan.

Furthermore, to ensure that all proposed sustainability targets and performance indicators in the Strategic Plan are achieved as targeted, Indonesia Eximbank has also assigned responsibilities and authority to several Officials and Units as accountable for the implementation of Sustainable Finance, as follows:

Unit/Pejabat Unit/Officer	**Peran dan Tanggung Jawab** Role and Responsibility
Dewan Direktur [2-11] Board of Directors [GRI 2-11]	1. Menyetujui Kebijakan terkait Keuangan Berkelanjutan. 2. Melakukan pengawasan terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan di LPEI 3. Menyetujui RAKB tahun berjalan. 1. Approve Policies related to Sustainable Finance. 2. Supervise the implementation of Sustainable Finance in Indonesia Eximbank 3. Approve the current year's RAKB.
Direktur Eksekutif LPEI Executive Director	1. Menetapkan ketentuan pengelolaan dan penerapan aspek ESG untuk lingkup Kelembagaan dan Kegiatan Usaha. 2. Menetapkan struktur organisasi (satuan kerja) termasuk kewenangan dan tanggung jawab terkait pengelolaan dan penerapan ESG. 3. Memantau kepatuhan dan memberikan arahan perbaikan pengelolaan dan pelaksanaan ESG dalam lingkup Kelembagaan dan Kegiatan Usaha. 1. Establish provisions for the management and application of ESG aspects for the scope of Institutions and Business Activities. 2. Establish the organizational structure (work unit) including authority and responsibility related to ESG management and implementation. 3. Monitor compliance and provide direction for improving ESG management and implementation within the scope of Institutions and Business Activities.
Direktur Pelaksana Managing Director	Membantu Direktur Ekskekutif dalam pelaksanaan kegiatan ESG Kelembagaan dan Kegiatan Usaha. Assist the Executive Director in the implementation of Institutions ESG activities and Business Activities

Unit/Pejabat Unit/Officer	Peran dan Tanggung Jawab Role and Responsibility
Unit yang membidangi policy & Procedure Unit in charge of policy & procedure	1. Menyusun rancangan peraturan internal untuk menunjang pengelolaan dan penerapan ESG di LPEI. 2. Melakukan pengkinian peraturan internal LPEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan pedoman ESG memenuhi ketentuan terkait lingkungan dan sosial. 1. Drafting internal regulations to support the management and implementation of ESG in Indonesia Eximbank. 2. Updating the Institution's internal regulations in accordance with applicable regulations, ensuring that ESG guidelines meet environmental and social related requirements.
Unit Kerja yang membidangi Sumber Daya Manusia Work Unit in charge of Human Resources	1. Melakukan identifikasi kebutuhan spesifik keahlian dan juga pelatihan terkait dengan satuan kerja pengelola dan penerapan ESG. 2. Memastikan kecukupan pelatihan dan pembinaan pengelola lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta ketenagakerjaan kepada pegawai LPEI. 3. Membuat program pelatihan dan pembinaan pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta ketenagakerjaan kepada pegawai LPEI. 1. Identify specific needs for expertise and also training related to the ESG management and implementation of work unit. 2. Ensure adequate training and coaching of environmental, occupational health and safety, and employment managers to employees. 3. Create training programs and guidance on environmental management, occupational health and safety, and employment for employees.
Unit Kerja yang mengkoordinasikan ESG Kelembagaan dan berkolaborasi antara unit kerja yang membidangi umum, sumber daya manusia, *transformation office and culture, operations*, IT, dan komunikasi Lembaga Work Unit that coordinates Institutional ESG and collaborates between work units in charge of general, human resources, transformation office and culture, operations, IT, and institutional communication	1. Membuat program aktivitas Kelembagaan dalam rangka memenuhi ketentuan pedoman ESG Kelembagaan terkait lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta ketenagakerjaan. 2. Melakukan identifikasi kesesuaian pedoman ESG Kelembagaan terhadap komitmen, budaya dan etika LPEI 3. Melakukan sosialisasi kepada setiap unit di LPEI atas pedoman ESG Kelembagaan. 4. Melaksanakan program aktivitas terkait ESG Kelembagaan. 5. Melakukan pelaporan kepada Direktur Eksekutif mengenai realisasi hasil implementasi ESG Kelembagaan secara semesteran. 1. Create institutional activity programs in order to meet the provisions of Institutional ESG guidelines related to the environment, occupational health and safety, and employment. 2. Identify the conformity of Institutional ESG guidelines to Indonesia Eximbank's commitment, culture and ethics 3. Conducting socialization to each unit in Indonesia Eximbank based on Institutional ESG guidelines. 4. Implement activities programs related to Institutional ESG. 5. Reporting to the Executive Director regarding the realization of the results of Institutional ESG implementation on a semi-annual basis.
Unit Kerja yang membidangi ESG Kegiatan Usaha dan berkolaborasi antara unit kerja yang membidangi bisnis termasuk jasa konsultasi, portofolio manajemen, dan komunikasi Lembaga Work Unit in charge of ESG Business Activities and collaborate between work units in charge of business including advisory services, portfolio management, and institution's communication	1. Melakukan identifikasi kesesuaian antara penerapan dengan pedoman ESG Kegiatan Usaha LPEI (Nasabah/ sektor). 2. Melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait di LPEI dan nasabah tertentu atas pedoman ESG Kegiatan Usaha. 3. Melakukan pemantauan dan pendampingan dalam pengelolaan dan penerapan ESG Kegiatan Usaha. 4. Melakukan pelaporan kepada manajemen mengenai realisasi hasil implementasi ESG Kegiatan Usaha secara triwulanan. 5. Menyusun RAKB untuk mendapatkan persetujuan Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur yang selanjutnya disampaikan kepada regulator. 6. Menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) untuk mendapatkan persetujuan Direktur Eksekutif yang selanjutnya dilaporkan kepada regulator. 1. Identify the suitability between the implementation and the ESG guidelines for Indonesia Eximbank Business Activities (Customer/sector). 2. Conducting socialization to related work units at Indonesia Eximbank and certain customers based on ESG guidelines for Business Activities. 3. Monitoring and assisting in the management and implementation of ESG Business Activities. 4. Reporting to management regarding the realization of the results of ESG implementation of Business Activities on a quarterly basis. 5. Prepare the RAKB to obtain approval from the Executive Director and Board of Directors which is then submitted to the regulator. 6. Prepare a Sustainability Report to obtain approval from the Executive Director. which is then reported to the regulator.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023

Strategi peningkatan kompetensi SDM yang berkesinambungan menjadi salah satu fondasi yang memungkinkan LPEI dalam mengeksekusi program-program strategis dan inisiatif keberlanjutan yang telah dituangkan dalam RAKB. Peningkatan pemahaman pegawai tentang prinsip dan penerapan

IMPROVING SUSTAINABLE FINANCE COMPETENCY IN 2023

Continuous improvement of human resources competence is one of the foundations that enables Indonesia Eximbank to execute strategic programs and sustainability initiatives outlined in the Strategic Plan. Enhancing employees' understanding of environmental, social, and governance principles and

pengelolaan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola pada seluruh proses kegiatan usaha yang dijalankan LPEI, senantiasa menjadi prioritas utama kami setiap tahunnya.

their application in all business processes conducted by Indonesia Eximbank remains our top priority every year.

Untuk memastikan tercapainya target keberlanjutan yang telah ditetapkan dalam RAKB 2023, LPEI kembali menyelenggarakan sejumlah kegiatan pelatihan/seminar/webinar yang relevan dengan topik ESG atau Keuangan Berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

To ensure the achievement of sustainability targets set in the 2023 Strategic Plan, Indonesia Eximbank once again organized a series of training sessions/seminars/webinars relevant to ESG or Sustainable Finance topics, as follows:

Nama Pelatihan Name of Training	**Penyelenggara** Organizer	**Tanggal Pelaksanaan** Date of Implementation	**Jumlah Peserta** Partcipants
Sharing Session Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance	Indonesia Eximbank	Bertahap/kontinu dari Februari - Oktober 2023 Phased/continuous from February - October 2023	449 orang | persons
ESG - Risk Management – *Addressing Key Challenges in Climate Change*	Moody's	21 Juni 2023	36 orang | persons
HR Green Forum - Strategy to Manage People with ESG Basic - Challenges and Opportunity	Inti Pesan	14 September 2023	1 orang | person
ESG Credit Rating & ESG Factor Impact on Carbon-Intensive Commodity Issuers	Moody's	11 Oktober 2023	135 orang | persons

PENGELOLAAN DAN MITIGASI RISIKO KEUANGAN BERKELANJUTAN [2-24]

Dalam menghadapi perkembangan pasar yang sangat dinamis dan kompetitif, LPEI menyadari bahwa keberlangsungan bisnisnya pada jangka panjang akan sangat tergantung dari kemampuan Lembaga dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada dengan memperhitungkan potensi risiko yang menyertainya.

SUSTAINABLE FINANCE RISK MANAGEMENT AND MITIGATION [GRI 2-24]

In facing the highly dynamic and competitive market developments, Indonesia Eximbank recognizes that the long-term sustainability of its business will heavily depend on the institution's ability to identify and capitalize on existing opportunities while considering the potential accompanying risks.

LPEI berkomitmen untuk terus meminimalkan dampak negatif yang timbul dari aktivitas operasional bisnis melalui penerapan sistem manajemen risiko yang terukur dan terintegrasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan *Four Eyes Principle* dalam mengidentifikasi, mengendalikan, memantau, dan melakukan mitigasi terhadap risiko yang ada, termasuk risiko ESG. Dengan mengintegrasikan aspek ESG pada semua kegiatan uaha termasuk dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi, kami berharap kinerja bisnis LPEI dapat terus meningkat sehingga keberadaan Lembaga dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi nasabah dan masyarakat luas.

Indonesia Eximbank is committed to continuously minimizing the negative impacts arising from its business operational activities through the implementation of a measured risk management system integrated with the principles of caution and the Four Eyes Principle in identifying, controlling, monitoring, and mitigating existing risks, including ESG risks. By integrating ESG aspects into all business activities, including managing the risks faced, we aim to enhance Indonesia Eximbank business performance, thus ensuring that the institution's existence provides significant benefits to all stakeholders, especially customers and the wider community.

Sebagai wujud keseriusan Lembaga dalam menangani isu lingkungan dan sosial, LPEI telah menerapkan sistem ESMS yang mencakup prosedur perencanaan, implementasi, pemantauan, dan pelaporan, serta kerangka kerja untuk perbaikan yang berkelanjutan. Melalui implementasi ESMS, LPEI dapat mengelola risiko ESG secara efektif untuk mencapai

As a manifestation of the institution's seriousness in addressing environmental and social issues, Indonesia Eximbank has implemented an Environmental and Social Management System (ESMS) that includes planning, implementation, monitoring, and reporting procedures, as well as a framework for continuous improvement. Through the implementation of ESMS,

keberlanjutan jangka panjang secara bertanggung jawab, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan LPEI senantiasa berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Indonesia Eximbank can effectively manage ESG risks to achieve long-term sustainability responsibly, while ensuring that the economic growth generated by LPEI is always in line with environmental protection and social welfare.

Setelah melalui tahapan identifikasi dan analisa yang menyeluruh, LPEI telah memetakan risiko ESG yang relevan dengan kegiatan usaha LPEI, yaitu sebagai berikut:

After thorough identification and analysis stages, Indonesia Eximbank has mapped out relevant ESG risks associated with its business activities, as follows:

Jenis dan Potensi Risiko terkait RAKB
Types and Potential Risks related to RAKB

Topik Topic	**Risiko** Risk	**Mitigasi** Mitigation
Lingkungan | Environment		
Risiko Kredit Credit Risk	Risiko yang timbul dari aktivitas penyaluran kredit karena nasabah gagal memenuhi kewajibannya sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian pembiayaan terkait dengan pemenuhan *covenant* yang terkait dengan implementasi ESG. Risks arising from lending activities because customer fails to fulfill its obligations as required in the financing agreement related to the fulfillment of covenants related to ESG implementation.	• Sebelum menyalurkan kredit, LPEI melakukan *due diligence* secara ketat terhadap profil risiko nasabah; • LPEI menerapkan ESMS dalam menyalurkan kredit ke sektor tertentu terutama yang masuk kategori berisiko tinggi; • Melakukan pemantauan dan pembinaan kepada nasabah. • Prior to lending, Indonesia Eximbank conducts strict due diligence on the customer's risk profile; • Indonesia Eximbank applies ESMS in lending to certain sectors, especially those categorized as high-risk; • Conduct monitoring and guidance to customers.
Sosial | Social		
Risiko Ketenagakerjaan Employment Risk	Risiko yang timbul dalam hal pengelolaan SDM terutama terkait pemenuhan hak-hak normatif pegawai. Risks arising in terms of HR management are mainly related to the fulfillment of employee normative rights.	· LPEI memiliki kebijakan internal yang memadai terkait pengelolaan SDM; · LPEI menjunjung tinggi komitmen terhadap keberagaman dengan memastikan terselenggaranya sistem rekrutmen dan pengembangan karier pegawai yang transparan dan objektif. • Indonesia Eximbank has adequate internal policies related to human resource management; • Indonesia Eximbank upholds a commitment to diversity by ensuring the implementation of a transparent and objective employee recruitment and career development system.
Tata Kelola | Governance		
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Risiko yang terjadi jika LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan atau regulasi terkait implementasi Aksi Keuangan Berkelanjutan sehingga Lembaga mendapatkan sanksi administratif dari regulator berupa teguran atau peringatan tertulis yang dapat memengaruhi nilai tingkat kesehatan Lembaga. Risks that occur if LPEI is unable to fulfill the provisions or regulations related to the implementation of Sustainable Financial Action so that the Institution gets administrative sanctions from the regulator in the form of reprimands or written warnings that can affect the value of the Institution's health level.	· Diperlukan komunikasi dan publikasi yang intensif terkait penerapan aspek ESG dalam Keuangan Berkelanjutan kepada *stakeholder;* · Unit kerja yang bertanggung jawab atas penerapan Keuangan Berkelanjutan di Lembaga selalu mengikuti perkembangan regulasi terkait Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dan *best practice* internasional lainnya. • Intensive communication and publication is required regarding the implementation of ESG aspects in Sustainable Finance to stakeholders; • The working unit responsible for the implementation of Sustainable Finance in the Institution always follows the development of regulations related to Sustainable Finance in Indonesia and other international best practices .
Risiko Reputasi Reputational Risk	Risiko yang timbul karena adanya pendapat atau persepsi yang berkembang di publik bahwa LPEI adalah perusahaan yang tidak memiliki kepedulian terhadap isu ekonomi berkelanjutan dan isu lingkungan hidup (jika LPEI tidak menerapkan Aksi Keuangan Berkelanjutan). Risks arising from opinions or perceptions developed in the public that LPEI is a company that does not have concern for sustainable economic issues and environmental issues (if LPEI does not implement Sustainable Financial Action).	· LPEI menerbitkan Laporan Keberlanjutan setiap tahun sebagai bentuk publikasi dan penyampaian informasi kepada *stakeholder* terkait penerapan aspek ESG dalam Keuangan Berkelanjutan*;* · LPEI mengembangkan program-program CSR yang berkelanjutan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar, salah satunya melalui program pengembangan Desa Devisa. · Indonesia Eximbank publishes a Sustainability Report every year as a form of publication and information submission to stakeholders regarding the implementation of ESG aspects in Sustainable Finance; · Indonesia Eximbank develops sustainable CSR programs as one of the ways to increase positive contributions to the surrounding community, one of which is through the Desa Devisa development program.

PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN [2-29]

LPEI sangat memahami bahwa keberhasilannya dalam mengarungi bisnis sampai dengan hari ini tentu tidak bisa lepas dari dukungan dan kepercayaan penuh yang telah diberikan oleh pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pelibatan pemangku kepentingan menjadi salah satu aktivitas penting yang dilakukan LPEI untuk memastikan setiap pihak dapat merasakan manfaat dari kehadiran Lembaga di tengah-tengah masyarakat serta meningkatkan reputasi Lembaga.

LPEI telah mengindentifikasi kelompok pemangku kepentingan kunci yang perannya sangat memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh kinerja Lembaga. Dengan adanya pemetaan yang jelas terhadap kelompok pemangku kepentingan, LPEI dapat membangun komunikasi yang efektif dan menjalin hubungan yang harmonis bersama mereka, salah satunya dengan menggali harapan dan mengelola hubungan interaksi timbal balik yang baik dengan mereka.

Berikut ini adalah daftar 8 (delapan) kelompok pemangku kepentingan utama yang secara umum memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan LPEI, antara lain:

RELATIONSHIP MANAGEMENT WITH STAKEHOLDERS [2-29]

Indonesia Eximbank deeply understands that its success in navigating the business landscape to date is undoubtedly reliant on the full support and trust provided by shareholders and other stakeholders. Therefore, stakeholder engagement is one of the crucial activities undertaken by Indonesia Eximbank to ensure that each party can experience the benefits of the institution's presence within the community and enhance the institution's reputation.

Indonesia Eximbank has identified key stakeholder groups whose roles significantly influence or are influenced by the institution's performance. With clear mapping of stakeholder groups, Indonesia Eximbank can build effective communication and foster harmonious relationships with them, including by understanding their expectations and managing good reciprocal interactions.

The following is a list of 8 (eight) main stakeholder groups that generally have a direct influence on Indonesia Eximbank sustainability:

Daftar Pemangku Kepentingan Stakeholder List	**Fokus Perhatian** Focus Attention	**Metode & Frekuensi Pelibatan** Method & Frequency of Engagement	**Tujuan** Purpose
Pemegang Saham Shareholder	• Perkembangan nilai aset. • Penentuan RKAT • Pencapaian KPI • Pelaksanaan Hak-hak pemegang saham • Pertanggung-jawaban kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial Lembaga • Development of asset value. • RKAT determination • Achievement of KPIs • Implementation of shareholder rights • Accountability of the Institute's economic, environmental and social performance	Pelaporan (Laporan Kinerja Triwulanan, Laporan Realisasi Triwulanan, Laporan Keuangan Tahunan-Audited, Laporan Pengawasan Dewan Direktur. Hal-hal lain yang bersifat penting). Reporting (Quarterly Performance Report, Quarterly Realization Report, Annual Financial Report-Audited, Supervisory Report of the Board of Directors. Others of an important nature).	Pembinaan dan pengawasan Coaching and supervision.
Investor Surat Berharga Securities Investor	• Perkembangan nilai aset. • Pencapaian target kinerja • Pertanggung-jawaban kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial Lembaga • The development of asset values. • Achievement of performance targets • Accountability for the economic, environmental and social performance of the institution	• Investor meeting • Publikasi melalui website • Investor meeting • Publication through the website	Keterbukaan informasi Information disclosure

Daftar Pemangku Kepentingan Stakeholder List	**Fokus Perhatian** Focus Attention	**Metode & Frekuensi Pelibatan** Method & Frequency of Engagement	**Tujuan** Purpose
Pegawai Employees	• Pemenuhan hak-hak pegawai • Kesetaraan kesempatan • Proses rekrutmen • Pengembangan karier • Paket remunerasi yang memadai dan bersaing • Penyelesaian Pengaduan • Fulfilment of employee rights • Equality of opportunity • Recruitment process • Career development • Adequate and competitive remuneration package • Complaint Resolution	Survei employee engagement secara berkala Regular employee engagement surveys	Sarana perbaikan pelaksanaan sistem kepegawaian dan meningkatkan kepuasan Pegawai dan pemenuhan aspek K3 Means of improving the implementation of the personnel system and increasing employee satisfaction and fulfilment of OHS aspects
Nasabah/Debitur Customer/Debtor	• Kualitas Produk • Kualitas Layanan • Product Quality • Quality of Service	Pertemuan berkala Focus Group Discussion Periodic meetings Focus Group Discussion	• Menampung dan menyelesaikan keluhan nasabah • Mengidentifikasi kepuasan nasabah dan peningkatan kualitas layanan • Pembinaan dan peningkatan hubungan bisnis dan edukasi layanan lembaga • Accommodating and resolving customer complaints, • Identify customer satisfaction and improve service quality, • Coaching and improving business relations and educating institution services.
Masyarakat, LSM dan Pemerintah Daerah Communities, NGOs and Local Government	• Dampak dan kinerja lingkungan. • Informasi mengenai kegiatan Lembaga • Kontribusi Lembaga terhadap pembangunan daerah sekitar • Environmental impact and performance. • Information on the activities of the Institution • The Institution's contribution to the development of the surrounding area	• Musrenbang • Pertemuan dengan tokoh masyarakat • Sarana Pengaduan Masyarakat • Musrenbang • Meetings with community leaders • Community Complaint Facility	• Kerja sama strategis dalam rangka tanggung jawab sosial • Partisipasi pada pelestarian lingkungan • Sosialisasi kebijakan dan program CSR. • Strategic cooperation for social responsibility. • Participation in environmental conservation • Dissemination of CSR policies and programs.
Regulator	• Pengelolaan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial. • Kepatuhan terhadap regulasi. • Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat • Management of economic, environmental and social impacts. • Regulatory compliance. • Community Assistance and Empowerment	• Komunikasi berkala • Konsultasi berkala • Periodic communication • Periodic consultations	• Memantau pemenuhan regulasi dari regulator • Pemantauan pendampingan dan penyampaian pemenuhan pelaporan kepada regulator (seperti laporan wajib kepada OJK, pelaporan LHKPN kepada KPK, Gratifikasi kepada KPK melalui sistem GOL dan pelaporan kepada PPATK) • Pendampingan atas forumforum diskusi mengenai pembahasan rancangan peraturan terkait Lembaga dan mengikuti sosialisasi peraturan yang diselenggarakan oleh Regulator • Monitor regulatory compliance from regulators • Monitoring, mentoring and submission of reporting fulfilment to regulators (such as mandatory reports to OJK, LHKPN reporting to the KPK, Gratification to the KPK through the GOL system and reporting to PPATK)

Daftar Pemangku Kepentingan Stakeholder List	Fokus Perhatian Focus Attention	Metode & Frekuensi Pelibatan Method & Frequency of Engagement	Tujuan Purpose
			• Assistance in discussion forums regarding the discussion of draft regulations related to the Institution and following the socialization of regulations organized by the Regulator
Media	• Menyampaikan informasi terkait kinerja Lembaga ke masyarakat luas. • Hubungan harmonis seluruh pihak • Sosialisasi dan penyaluran dana pembangunan • Convey information related to the performance of the Institution to the wider community. • Harmonious relationship of all parties • Socialization and distribution of development funds	• Media Monitoring harian • Media Gathering • Siaran Pers • Sesuai kebutuhan • Daily Media Monitoring • Media Gathering • Press Release • As needed	• Pemantauan • Pemberian Informasi kinerja Lembaga • Monitoring • Provision of Information on Institution performance

TANTANGAN DAN PELUANG DALAM KEUANGAN BERKELANJUTAN

LPEI menyadari bahwa penerapan praktik bisnis yang dilandaskan pada prinsip Keuangan Berkelanjutan tidak selalu berjalan mulus karena kerap dihadapkan dengan sejumlah tantangan ataupun kendala yang tidak terhindarkan baik dari sisi internal maupun eksternal. Hal ini tentulah berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi program-program strategis yang tercantum dalam RAKB.

Setelah melakukan identifikasi dan evaluasi menyeluruh, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi LPEI dalam mengimplementasikan RAKB tahun 2023, meliputi:

1) **Ketidakmerataan Pemahaman dan Wawasan Pegawai Mengenai Prinsip Keuangan Berkelanjutan**

   Dalam merespons tantangan ini, LPEI berusaha meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai akan pentingnya pengintegrasian aspek ESG ke dalam proses bisnis dengan memberikan sesi pelatihan dan *sharing session* terkait penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan. Selain itu, dalam berbagai kesempatan, Lembaga juga terus berusaha memperkenalkan aspek-aspek ESG yang relevan dengan aktivitas ekspor impor di Indonesia.

2) **Kurangnya Kesadaran Para Pemangku Kepentingan untuk Menerapkan Aspek ESG Di Bidang Usahanya**

   LPEI menilai kesadaran para pemangku kepentingan, terutama calon nasabah dan mitra kerja Lembaga masih cukup rendah untuk

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN SUSTAINABLE FINANCE

Indonesia Eximbank realizes that the implementation of business practices based on Sustainable Finance principles does not always proceed smoothly as it is often faced with a number of challenges or unavoidable constraints, both internally and externally. This undoubtedly affects the success of implementing the strategic programs outlined in the RAKB.

After conducting comprehensive identification and evaluation, there are several fundamental issues faced by Indonesia Eximbank in implementing the 2023 RAKB, including:

1) **Uneven Understanding and Insight of Employees Regarding Sustainable Finance Principles**

   In response to this challenge, Indonesia Eximbank strives to increase awareness and understanding among employees about the importance of integrating ESG aspects into business processes by providing training sessions and sharing sessions related to the application of Sustainable Finance principles. Additionally, on various occasions, the institution continues to introduce relevant ESG aspects related to export-import activities in Indonesia.

2) **Lack of Awareness Among Stakeholders to Implement ESG Aspects in Their Business Fields**

   Indonesia Eximbank assesses that the awareness of stakeholders, especially prospective customers and partners of the institution, is still relatively low in integrating ESG aspects into their daily business

mengintegrasikan aspek ESG kedalam keseharian bisnisnya. Dalam mengatasi tantangan ini, LPEI secara proaktif memberikan edukasi kepada para pemangku kepentingan terkait perkembangan bisnis saat ini, isu *climate change* yang berkembang, serta perlunya dukungan semua pihak termasuk pemangku kepentingan dalam mengatasi tantangan iklim global demi kebaikan bersama, salah satunya melalui penerapan aspek ESG yang relevan pada bidang usaha masing-masing.

operations. To address this challenge, Indonesia Eximbank proactively educates stakeholders about current business developments, evolving climate change issues, and the need for support from all parties, including stakeholders, in addressing global climate challenges for the common good, including through the application of relevant ESG aspects in their respective business fields.

3) **Kelengkapan *Soft-Structure* Terkait Keuangan Berkelanjutan Yang Belum Memadai di LPEI**
Luasnya spektrum aspek kebelanjutan bagi dunia usaha menjadi salah satu tantangan tersendiri yang dihadapi Lembaga terutama dalam menyempurnakan kebijakan-kebijalan internal yang relevan dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan. Hingga akhir 2023, LPEI masih dalam proses peninjauan kelengkapan kebijakan internal yang dimiliki serta secara bertahap berusaha menyempurnakannya dengan memasukkan unsur-unsur ESG ke dalamnya. Selain itu, LPEI juga melakukan sosialisasi berkala terhadap prosedur dan kebijakan terkait ESG kepada seluruh pegawai.

3) **Inadequate Soft-Structure Related to Sustainable Finance at Indonesia Eximbank**
The wide spectrum of sustainability aspects for the business world poses a particular challenge for the institution, especially in refining internal policies relevant to Sustainable Finance principles. By the end of 2023, Indonesia Eximbank is still in the process of reviewing the adequacy of its internal policies and gradually refining them by incorporating ESG elements into them. Additionally, the institution periodically conducts socialization regarding procedures and policies related to ESG to all employees.

Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, LPEI tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mengimplementasikan praktik bisnis yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang ketat. Dalam hal penyaluran pembiayaan, LPEI melihat adanya peluang besar untuk meningkatkan penyaluran pendanaan kepada para pemangku kepentingan yang kegiatan usahanya masuk dalam kelompok usaha berkelanjutan, terutama dalam mendukung ekspor untuk sektor UMKM. Semua peluang bisnis yang ada akan terus dimanfaatkan potensinya sebagai landasan pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan bagi LPEI di masa depan.

Despite the various challenges faced, Indonesia Eximbank continues to strive to the fullest extent possible in implementing sustainable business practices while adhering to the principles of caution and rigorous risk management. In terms of financing, Indonesia Eximbank sees significant opportunities to increase funding to stakeholders whose business activities fall within the sustainable business category, especially in supporting exports for the MSME sector. All existing business opportunities will continue to be leveraged for their potential as the foundation for responsible and sustainable business growth for Indonesia Eximbank in the future.

Kinerja Keberlanjutan
Sustainability Performance

MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN

Bagi LPEI, keberlanjutan bisnis bukan hanya sekedar kata-kata melainkan upaya dan aksi nyata yang harus dilakukan secara terukur dan terencana, serta memerlukan dukungan dari semua pihak. Karena itu, LPEI berusaha untuk membangun budaya keberlanjutan yang kuat kepada seluruh pegawai dimulai dengan menanamkan *mindset* yang benar mengenai keberlanjutan bisnis sesuai dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan sebagai pedoman utama.

Salah satu cara Lembaga dalam menyukseskan implementasi program-program keberlanjutan yang tertuang dalam RAKB diwujudkan dengan terus berusaha meningkatkan kapasitas dan kemampuan setiap pegawai melalui berbagai sesi pelatihan yang mengusung topik Keuangan Berkelanjutan dan pelaksanaan berbagai inisiatif kegiatan yang selaras dengan pencapaian agenda SDGs serta disesuaikan dengan kegiatan usaha LPEI. Komitmen LPEI dalam menginternalisasi prinsip Keuangan Berkelanjutan juga tercermin pada visi dan misi keberlanjutan Lembaga yang tercantum dalam RAKB.

LPEI meyakini seluruh aktivitas pengembangan budaya keberlanjutan yang telah dilakukan secara konsisten cukup efektif dalam memupuk semangat pegawai sehingga diharapkan setiap insan LPEI terdorong untuk mengambil bagian yang lebih besar dan berkontribusi nyata dalam menciptakan dunia yang lebih baik dimulai dari lingkungan kerja. Lembaga melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi program dan inisiatif keberlanjutan yang telah dicanangkan setiap tahun serta berkomitmen untuk memperbaiki kekurangannya di waktu mendatang. Adapun rencana tindak lanjut perbaikan tersebut menjadi bagian dari program-program yang disampaikan dalam RAKB.

SUSTAINABLE CULTURE

For Indonesia Eximbank, business sustainability is not just words but a real effort and action that must be measured and planned, and requires support from all parties. Therefore, Indonesia Eximbank strives to build a strong culture of sustainability among all employees, starting with instilling the correct mindset about business sustainability in accordance with the principles of Sustainable Finance as the main guideline.

One way the institution achieves the successful implementation of sustainability programs outlined in the RAKB is by continuously striving to enhance the capacity and capabilities of every employee through various training sessions focusing on Sustainable Finance topics and the implementation of various activities aligned with the achievement of the SDGs agenda and tailored to Indonesia Eximbank business activities. Indonesia Eximbank commitment to internalizing the principles of Sustainable Finance is also reflected in the vision and mission of the institution's sustainability outlined in the RAKB.

Indonesia Eximbank believes that all activities aimed at developing a culture of sustainability that have been consistently carried out are effective in fostering the enthusiasm of employees, thus it is hoped that every individual at Indonesia Eximbank is motivated to take greater part and make real contributions to creating a better world starting from the workplace. The institution conducts periodic evaluations of the implementation of sustainability programs and initiatives launched each year and is committed to addressing any shortcomings in the future. The follow-up improvement plans are part of the programs outlined in the RAKB.

KINERJA EKONOMI

Komitmen dan Kebijakan

Kinerja ekonomi menjadi salah satu topik material yang penting diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan karena digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana kemampuan Lembaga dalam menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi pemegang saham. Dalam upaya meningkatkan profitabilitas, LPEI telah merancang dan mengimplementasikan strategi pengembangan usaha termasuk menerapkan strategi keberlanjutan yang berlandaskan pada prinsip Keuangan Berkelanjutan untuk mendukung tercapainya target-target operasional dan bisnis serta target kinerja keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan RAKB 2023.

LPEI memastikan aktivitas usahanya dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang maksimal agar dapat didistribusikan kembali kepada para pemangku kepentingan melalui pembayaran pajak dan retribusi kepada pemerintah, pemberian dividen bagi para pemegang saham, kesejahteraan pegawai, dan kontribusi untuk kegiatan-kegiatan sosial. Dengan cara inilah, LPEI mewujudkan komitmennya untuk tumbuh dan berkembang sebagai sebuah bisnis yang berkelanjutan, yakni dengan turut memberikan kesejahteraan bagi seluruh pemangku kepentingannya.

Dalam perjalanan panjang menuju keberlanjutan usaha di masa depan, LPEI secara konsisten menerapkan 5 (lima) *key guiding principles*, yaitu:

1. Pertumbuhan bisnis yang progresif melalui ekosistem ekspor.
2. Menyelesaikan isu terkait *Loan to Asset Ratio* (LAR) dan meningkatkan kualitas aset.
3. Berinvestasi pada keterampilan dan kemampuan di masa depan.
4. Memperkuat peran LPEI sebagai SMV di bawah Kementerian Keuangan RI.
5. Terus memperkuat *Balance Sheet*.

KINERJA EKONOMI

Commitments and Policies

Economic performance is one of the important material topics to be disclosed in the Sustainability Report because it is used as an indicator to measure the extent to which the institution can generate sustainable growth for shareholders. In efforts to enhance profitability, Indonesia Eximbank has designed and implemented business development strategies, including applying sustainability strategies based on Sustainable Finance principles to support the achievement of operational and business targets as well as sustainability performance targets outlined in the Company's Business Plan (RBP) and RAKB 2023.

Indonesia Eximbank ensures that its business activities can generate maximum economic benefits that can be redistributed to stakeholders through tax and levy payments to the government, dividend payments to shareholders, employee welfare, and contributions to social activities. In this way, LPEI realizes its commitment to grow and develop as a sustainable business, namely by contributing to the welfare of all its stakeholders.

In the long journey towards business sustainability in the future, Indonesia Eximbank consistently applies 5 (five) key guiding principles, namely:

1. Progressive business growth through the export ecosystem.
2. Resolving issues related to Loan to Asset Ratio (LAR) and improving asset quality.
3. Invest in future skills and abilities.
4. Strengthening the Institution's role as a Special Mission Vehicle (SMV) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
5. Continue to strengthen the Balance Sheet.

Untuk mewujudkan mandat dan penerapan kelima *key guiding principles* tersebut, selama 2023, LPEI telah menyusun dan mengimplementasikan strategi bisnis dan *enabler* sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan Bisnis yang Kuat**
   Strategi pertumbuhan bisnis ke depan akan dilakukan melalui *hybrid approach* dengan mulai membesarkan portofolio yang berfokus pada *developmental impact.*

2. **Pendanaan dan Tresuri yang Kuat**
   Strategi untuk mengoptimalisasikan sumber pendanaan yang ada maupun diversifikasi sumber pendanaan yang lebih murah.

3. **Collection yang Ketat dan Mempercepat Peningkatan Kualitas Aset**
   Optimalisasi anak perusahaan (PT IPA) dalam mempercepat perbaikan kualitas aset, *collection* yang ketat, restrukturisasi, *recovery* dan melaksanakan hapus buku.

4. **Menjadi Perintis dalam Melaksanakan Inisiatif Ekspor Pemerintah**
   Menjadi perintis (*pioneer*) dalam melaksanakan inisiatif ekspor Pemerintah dengan memprioritaskan sektor industri dan menyelaraskan strategi ESG sesuai dengan rencana strategis Kementerian dan Lembaga.

5. **Memberdayakan Peran LPEI dalam Ekosistem**
   Berperan dan berkolaborasi dengan ekosistem ekspor untuk LPEI dapat lebih *outreach* mendekati pasar.

6. **Perbaikan *Balance Sheet***
   Memperkuat fungsi tresuri serta penerapan ALMA yang menjadi salah satu langkah dalam perbaikan kualitas neraca.

7. **Tata kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang Kuat**
   Penyusunan kebijakan dan manajemen risiko sesuai dengan perundangan dan *leading practices,* dan memiliki *risk capacity* sesuai dengan selera risiko.

8. **Memperkuat Kapasitas Internal**
   Langkah ini diterapkan dengan meningkatkan dan mengoptimalkan struktur organisasi serta kemampuan SDM sekaligus menanamkan budaya Lembaga.

To realize the mandate and implementation of the five key guiding principles, throughout 2023, Indonesia Eximbank has developed and implemented business strategies and enablers:

1. **Strong Business Growth**
   The future business growth strategy will be carried out through a hybrid approach by starting to grow a portfolio that focuses on developmental impact.

2. **Strong Funding and Treasury**
   Strategy to optimize existing funding sources and diversify cheaper funding sources.

3. **Tight Collection and Accelerate Asset Quality Improvement**
   Optimization of subsidiaries (PT IPA) in accelerating asset quality improvement, strict collection, restructuring, recovery and carrying out write-offs.

4. **Becoming a Pioneer in Implementing the Government's Export Initiative**
   Becoming a pioneer in implementing the Government's export initiative by prioritizing the industrial sector and aligning ESG strategies with the strategic plans of Ministries and Agencies.

5. **Empowering LPEI's Role in the Ecosystem**
   Play a role and collaborate with the export ecosystem for LPEI to outreach to the market.

6. **Balance Sheet Improvement**
   Strengthen treasury function and ALMA implementation as one of the steps in improving balance sheet quality.

7. **Strong Governance, Risk Management and Compliance**
   Formulation of policies and risk management in accordance with legislation and leading practices, and have risk capacity in accordance with risk appetite.

8. **Strengthening Internal Capacity**
   This step is implemented by improving and optimizing the organizational structure and HR capabilities while instilling the culture of the Institution.

9. **Mengubah Kemampuan dan Infrastruktur IT**
   Upaya ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan bisnis di masa depan.

10. **Membangun Komunikasi Dengan Stakeholders**
    Langkah ini bertujuan untuk mengkomunikasikan inisiatif yang dilakukan dan menambah *added value* LPEI bagi stakeholder.

Uraian selengkapnya mengenai *strategi bisnis dan enabler* dapat dilihat pada Bab "Diskusi dan Analisis Manajemen".

Ringkasan Kinerja Ekonomi Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, kinerja ekonomi LPEI mengalami tekanan yang cukup dalam karena dihadapkan dengan berbagai rentetan *global shocks* yang memengaruhi aktivitas ekspor impor dan juga tantangan internal lainnya. Di tengah kondisi yang kurang kondusif tersebut, dapat disampaikan bahwa realisasi RBP dan RAKB Lembaga di akhir 2023 tidak sepenuhnya tercapai.

LPEI membukukan penurunan total aset sebesar 38,74% dari Rp83,82 triliun di akhir Desember 2022 menjadi Rp51,35 triliun di tahun 2023. Sementara total liabilitas dan ekuitas masing-masing dibukukan sebesar Rp42,59 triliun dan Rp18,35 triliun, keduanya relatif mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari sisi *top lines,* total pendapatan bunga dan usaha syariah LPEI mengalami peningkatan 9,17% sehingga dibukukan menjadi Rp4,05 triliun, dari Rp3,71 triliun di tahun 2022. Kinerja sebaliknya ditunjukkan dari sisi *bottom lines,* profitabilitas LPEI masih mengalami tekanan dengan realisasi rugi bersih tahun berjalan mengalami peningkatan tajam hingga 481,60% sehingga dibukukan menjadi Rp18,11 triliun pada 2023, dibandingkan dengan rugi tahun berjalan periode 2022 senilai Rp3,11 triliun.

Sejalan dengan meningkatnya rugi bersih tahun 2023, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan juga mengalami kenaikan signifikan hingga 703,40% sehingga dibukukan menjadi Rp16,93 triliun di akhir 2023, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2,11 triliun.

9. **Transforming IT Capabilities and Infrastructure**
   This effort aims to support future business needs.

10. **Building Communication with Stakeholders**
    This step aims to communicate the initiatives undertaken and add LPEI's added value to stakeholders.

A full description of the business strategy and enablers can be found in the "Management Discussion and Analysis" chapter.

Summary of Economic Aspects Performance In 2023

Throughout 2023, Indonesia Eximbank economic performance faced significant pressure due to various global shocks affecting export-import activities and other internal challenges. In the midst of these less conducive conditions, it can be stated that the realization of the RBP and RAKB by the institution at the end of 2023 was not fully achieved.

Eximbank posted a 38.74% decrease in total assets from Rp83.82 trillion at the end of December 2022 to Rp51.35 trillion in 2023. Meanwhile, total liabilities and equity were recorded at Rp42.59 trillion and Rp18.35 trillion, respectively, both of which relatively decreased compared to the previous year.

In terms of top lines, Indonesia Eximbank's total interest income and sharia business increased by 9.17% to Rp4.05 trillion, from Rp3.71 trillion in 2022. The opposite performance was shown in terms of bottom lines, Indonesia Eximbank's profitability was still under pressure with the realization of net loss for the current year experiencing a sharp increase of 481.60% so that it was recorded at Rp18.11 trillion in 2023, compared to the current year's loss for the 2022 of Rp3.11 trillion.

In line with the increase in net loss in 2023, the formation of allowance for impairment losses (CKPN) for financial assets also increased significantly by 703.40% to Rp16.93 trillion at the end of 2023, compared to the previous year of Rp2.11 trillion.

Hasil kinerja ekonomi LPEI selama periode pelaporan 2023 dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel distribusi nilai ekonomi berikut yang disusun mengacu pada indikator kinerja ekonomi berdasarkan pedoman pelaporan keberlanjutan GRI:

The results of Indonesia Eximbank's economic performance during 2023 reporting period and the previous year can be seen in the following economic value distribution table, which is compiled with reference to the economic performance indicators based on the GRI sustainability reporting guidelines:

Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan [201-1]
Direct Economic Value Generated and Distributed

(Disajikan dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain | In billion of Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	**2023**	**2022**	**2021**
Nilai Ekonomi yang Dihasilkan (a) Economic Value Generated			
Pendapatan Bunga | Interest Income:			
- Penugasan Umum | General Assignment	3.155,27	2.711,98	2.932,55
- Penugasan Khusus | National Interest Accounts	408,18	404,98	410,23
	3.563,45	3.116,96	3.342,78
Usaha Syariah			
- Penugasan Umum | General Assignment	488,45	594,44	920,74
- Penugasan Khusus | National Interest Accounts	0,14	0,15	-
Pendapatan usaha dari Ujrah | Operating income from ujrah	0,06	0,31	-
Pendapatan operasional lainnya – bersih | Other operating income - net	259,08	186,21	215,42
Pendapatan Bukan Operasional | Non-Operating Income	10,49	16,42	3,94
Hasil penjualan aset tetap | Proceeds from the sale of fixed asset	-	0,01	0,88
Jumlah nilai ekonomi langsung diterima (a) Total direct economic value generated	4.321,67	3.914,50	4.483,76
Beban Umum, Administrasi dan Beban Lain-lain General, Administrative and Other Expenses	311,74	293,87	291,45
Gaji dan Tunjangan | Salaries and Benefits	482,29	468,62	467,31
Beban bunga | Interest Expense	3.128,89	2.936,11	3.057,22
Pembayaran Bagian Laba Pemerintah Payment of Government Profit Share	0	23,63	13,57
Pembayaran kepada Pemerintah (PPh, PPn dan PnPB) Payment to the Government (PPh, PPn and PnPB)	0,87	162,97	156,52
Jumlah Nilai Ekonomi yang Didistribusikan (b) Total Economic Value Distributed	3.923,79	3.885,20	3.986,07
Nilai Ekonomi Ditahan (a-b) Retained Economic Value (a-b)	397,88	29,30	497,69

Mendukung Ketahanan Perekonomian Nasional bersama para Mitra Kerja

LPEI melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh mitra pemasok atau para vendor, baik untuk vendor barang, produk teknologi informasi maupun vendor jasa, seperti jasa sistem operasi. Evaluasi yang dilakukan meliputi aspek kemampuan keuangan, ketenagakerjaan, maupun aspek kualitas barang dan jasa yang diberikan selama periode tertentu. Proses evaluasi ini menjadi bagian penting dari implementasi tata kelola yang baik karena menjadi salah satu penentu kemampuan LPEI dalam memberikan produk dan layanan yang berkualitas kepada nasabah.

Sejauh ini, LPEI memiliki daftar rekanan vendor dan pemasok barang maupun jasa yang telah terbukti memiliki rekam jejak yang baik dan yang terbukti memiliki rekam jejak kurang memuaskan. Daftar inilah yang dijadikan dasar oleh Lembaga dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.

Dalam menjalin kerja sama dengan para vendor, LPEI juga mensyaratkan pernyataan tidak ada benturan kepentingan dan larangan memberi atau menjanjikan untuk memberi sesuatu kepada manajemen dan karyawan yang terkait maupun tidak terkait. [2-6]

Selain itu, dalam kaitannya dengan komitmen pelestarian lingkungan, LPEI juga menghimbau seluruh pemasok rekanan untuk memiliki kemampuan mengelola dampak lingkungan di dalam kegiatan masing-masing. LPEI berencana menerapkan sistem ESG dalam proses seleksi maupun penilaian/pengelolaan kinerja para suplier atau pemasok/vendor. [308-1]

Pada tahu 2023, LPEI merealisasikan pengadaan barang dan jasa yang seluruhnya atau 100% merupakan pengadaan untuk pemasok lokal. [204-1]

Berkontribusi bagi Penerimaan Negara

LPEI memastikan penyelenggaraan kegiatan usahanya turut membantu meningkatkan perekonomian nasional melalui kontribusi pajak yang rutin diberikan sesuai periodenya. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh LPEI pada umumnya menghasilkan 2 (dua) jenis kontribusi untuk negara, yakni kontribusi finansial langsung maupun tidak langsung, dan kontribusi non-finansial.

Kontribusi finansial langsung disampaikan dalam bentuk pembayaran pajak pendapatan badan, pungutan pajak penghasilan, penghasilan bukan

Supporting National Economic Resilience with Partners

Indonesia Eximbank conducts periodic evaluations of all supplier partners or vendors, both for goods vendors, information technology product vendors, and service vendors, such as operating system services. The evaluations cover aspects of financial capability, workforce, and the quality of goods and services provided during a specific period. This evaluation process is an important part of implementing good governance as it determines Indonesia Eximbank ability to provide quality products and services to customers.

So far, Indonesia Eximbank has a list of vendor and supplier partners with proven good track records and those with less satisfactory track records. This list serves as the basis for the institution to establish partnerships with third parties.

In establishing partnerships with vendors, Indonesia Eximbank also requires a declaration of no conflict of interest and prohibits giving or promising to give anything to related or unrelated management and employees.

Additionally, in relation to environmental preservation commitments, Indonesia Eximbank also urges all supplier partners to have the ability to manage environmental impacts within their respective activities. LPEI plans to implement an ESG system in the selection process and assessment/management of supplier or vendor performance. [308-1]

In 2023, Indonesia Eximbank realized procurement of goods and services that were entirely or 100% procured from local suppliers. [204-1]

Contributing to State Revenue

Indonesia Eximbank ensures that its business activities contribute to the improvement of the national economy through regular tax contributions as required by the law. The business activities conducted by Indonesia Eximbank generally generate two types of contributions to the country, namely direct and indirect financial contributions, and non-financial contributions.

Direct financial contributions are made in the form of corporate income tax payments, income tax deductions, non-taxable income, and profit-sharing

pajak maupun pembayaran bagian laba bagi Pemerintah. Sedangkan, kontribusi finansial tidak langsung adalah berupa terealisasinya fungsi intermediari dukungan kegiatan ekspor impor yang LPEI jalankan. Kami percaya dengan berkembangnya skala ekonomi para pelaku bisnis tersebut pada akhirnya akan meningkatkan pembayaran pajak kepada negara.

payments to the Government. Meanwhile, indirect financial contributions come from the realization of the intermediary function supporting export-import activities carried out by Indonesia Eximbank. We believe that with the growth of the economic scale of these business actors, it will eventually increase tax payments to the country.

Berikut ini adalah uraian kontribusi pajak kepada negara yang telah didistribusikan LPEI yang bersumber dari nilai ekonomi dihasilkan dari aktivitas usahanya selama 3 (tiga) tahun terakhir:

The following is a description of the tax contributions to the country that have been distributed by Indonesia Eximbank, sourced from the economic value generated from its business activities over the past 3 (three) years:

Pembayaran Pajak LPEI
Indonesia Eximbank Tax Payment

(Rp miliar | Rp billion)

Keterangan Description	2023	2022	2021
Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax	Tidak terdapat pembayaran PPh Badan karena Rugi Fiskal sesuai UU PPh, PMK 215/PMK.03/2018 dan SE-25/PJ/2019 There is no payment of Corporate Income Tax due to Fiscal Loss in accordance with Income Tax Law, PMK 215/PMK.03/2018 and SE-25/PJ/2019	Tidak terdapat pembayaran PPh Badan karena Rugi Fiskal sesuai UU PPh, PMK 215/PMK.03/2018 dan SE-25/PJ/2019 There is no payment of Corporate Income Tax due to Fiscal Loss in accordance with Income Tax Law, PMK 215/PMK.03/2018 and SE-25/PJ/2019	Tidak terdapat pembayaran PPh Badan karena masih terdapat kompensasi kerugian sesuai UU PPh, PMK 215/PMK.03/2018 dan SE-25/PJ/2019 There is no corporate income tax payment because there is still loss compensation in accordance with the Income Tax Law, PMK 215/PMK.03/2018 and SE-25/PJ/2019

Selain menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku, LPEI juga mendistribusikan kontribusi non-finansial bagi negara berupa ketersediaan berbagai infrastruktur dasar ekspor sebagai realisasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan LPEI.

In addition to demonstrating compliance with applicable tax obligations, Indonesia Eximbank also distributes non-financial contributions to the country in the form of the availability of various basic export infrastructures as a realization of the implementation of corporate social responsibility programs carried out by Indonesia Eximbank.

Dalam konteks penerapan Keuangan Berkelanjutan, LPEI secara konsisten menyalurkan pendanaan untuk kelompok nasabah yang masuk dalam kategori kegiatan usaha berkelanjutan (KKUB), termasuk di antaranya sektor UMKM yang berorientasi ekspor.

In the context of Sustainable Finance implementation, Indonesia Eximbank consistently channels funding for customer groups categorized as sustainable business activities (KKUB), including among them the export-oriented MSME sector.

Sepanjang tahun 2023, jumlah pembiayaan yang disalurkan LPEI terhadap portofolio nasabah UMKM yang masuk dalam kategori Keuangan Berkelanjutan dib ukukan mencapai Rp14,49 triliun, menurun 1,7% dari posisi akhir 2022 senilai Rp14,74 triliun.

Throughout 2023, the amount of financing disbursed by Indonesia Eximbank to the portfolio of MSME customers included in the Sustainable Finance category was recorded at Rp14.49 trillion, a decrease of 1.7% compared to the end of 2022 of Rp14.74 trillion.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat realisasi indikator target-target keuangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam RAKB Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

In the table below, you can see the realization of the indicators of sustainable financial targets set in the RAKB for the year 2023, as follows:

Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Comparison of Portfolio Targets and Performance, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects Aligned with the Implementation of Sustainable Finance

(Rp miliar | Rp billion)

Tahun Year	Satuan Unit	Realisasi / Realization		
		2023	2022	2021
Penyaluran Dana (Total Kredit) Fund Disbursement (Total Credit)	Rp miliar billion	73.823	83.636	83.963
Persentase total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/ pembiayaan Lembaga Percentage of total credit/financing of sustainable business activities to total institution credit/financing	%	19,63%	17,62%	17,16%

Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Pembiayaan yang Sehat

LPEI menunjukkan dukungan penuh terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia melalui pengelolaan portofolio pembiayaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagaimana telah ditetapkan dalam POJK 51/2017. Sebagaimana diatur dalam Manual Operasional Pembiayaan, LPEI telah mempunyai mekanisme analisis pembiayaan yang tertuang dalam Memorandum Analisa Pembiayaan yang menganalisa kualitas dan kuantitas dari calon nasabah.

Dalam manual tersebut, LPEI perlu menghindari pemberian pembiayaan untuk proyek atau usaha yang secara nyata membahayakan lingkungan. Aspek-aspek yang dipertimbangkan antara lain:

a) Pendirian, perizinan, kewenangan dan *track record* perusahaan/nasabah;
b) Industri dan usaha nasabah;
c) Karakter manajamen;
d) Pemasaran;Teknis Produksi; dan
e) Aspek sosial dan AMDAL.

LPEI telah mengatur terkait *Industry Financing Reference* (IFR) yang mana didalamnya juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. IFR berfungsi sebagai salah satu alat untuk menyeleksi calon nasabah berdasarkan standar/*benchmark* pada masing-masing industri. Dengan penerapan IFR diharapkan dapat diperoleh nasabah yang berkualitas dan sesuai dengan *risk appetite* LPEI. Salah satu parameter dalam IFR berisi aspek lingkungan, yaitu kriteria standar aspek lingkungan pada setiap industri dan aspek *development* yaitu kriteria perkembangan dan dampak usaha calon nasabah terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.

Prudence and Sound Financing Principles

Indonesia Eximbank demonstrates full support for the implementation of Sustainable Finance in Indonesia through managing sustainable and environmentally friendly financing portfolios as stipulated in POJK 51/2017. As outlined in the Financing Operational Manual, Indonesia Eximbank has a financing analysis mechanism outlined in the Financing Analysis Memorandum that analyzes the quality and quantity of prospective customers.

In this manual, Indonesia Eximbank needs to avoid providing financing for projects or businesses that pose significant environmental risks. Considered aspects include:

a) Establishment, licensing, authority, and company/ customer track record;
b) Customer industry and business;
c) Management character;
d) Marketing; Production Technicalities; and
e) Social and Environmental Impact Assessment (AMDAL).

Indonesia Eximbank has established the Industry Financing Reference (IFR), which also considers environmental and social aspects. The IFR serves as a tool to select prospective customers based on standards/benchmarks in each industry. Through the implementation of the IFR, it is hoped that high-quality customers can be obtained who align with Indonesia Eximbank risk appetite. One parameter in the IFR contains environmental aspects, namely the standard criteria for environmental aspects in each industry, and development aspects, which include criteria for the development and impact of prospective customers' businesses on the Indonesian economy.

Berikut ini adalah kelompok nasabah LPEI yang teridentifikasi memenuhi kriteria KKUB:

Here are the customer groups identified by LPEI as meeting the KKUB criteria:

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) Sustainable Business Activities Category	Aktivitas Nasabah LPEI di KKUB Indonesia Eximbank Customer Activities at KKUB	Jumlah Outstanding Penyaluran Pembiayaan Tahun 2023 Total Outstanding Financing Distribution in 2023
Kegiatan UMKM berorientasi ekspor Export-oriented MSME activities	Jenis Kegiatan yang dijalankan industri beragam Type of activity performed: various industries	Rp 14,49 triliun | trillion

Pengungkapan Lain-Lain Terkait Kinerja Ekonomi

Pembahasan mengenai kinerja dan strategi yang dijalankan LPEI sepanjang tahun 2023 telah disampaikan secara lengkap pada bab Analisa dan Pembahasan Manajemen, pada laporan tahunan ini. Karena itu, pada bagian ini, kami hanya menyampaikan strategi dan pencapaian kinerja terkait penerapan keuangan berkelanjutan.

Other Disclosures Related to Economic Performance

The discussion regarding the performance and strategies implemented by Indonesia Eximbank throughout the year 2023 has been comprehensively presented in the Management Analysis and Discussion section of this annual report. Therefore, in this section, we only present the strategies and performance achievements related to the implementation of sustainable finance.

LPEI BAGI LINGKUNGAN HIDUP

INDONESIA EXIMBANK FOR THE ENVIRONMENT

Sektor keuangan memiliki peran penting dalam mendorong praktik keberlanjutan terutama dalam memastikan pembiayaan yang dialirkan kepada nasabah tidak berkontribusi negatif terhadap lingkungan sekitar. Oleh sebab itu implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) mulai digalakkan oleh OJK sejak 2017 seiring dengan terbitnya POJK 51/2017 tentang praktik Keuangan Berkelanjutan.

The financial sector plays a crucial role in promoting sustainability practices, especially in ensuring that financing provided to customers does not have negative impacts on the environment. Therefore, the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles has been promoted by the Financial Services Authority (OJK) since 2017, following the issuance of Regulation No. 51/2017 regarding sustainable finance practices.

Dewasa ini, pengintegrasian aspek ESG dalam berbisnis menjadi suatu kebutuhan mengingat krisis iklim yang tengah menyerang dunia semakin mendesak untuk ditangani sehingga diperlukan kolaborasi dengan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pemangku kebijakan, hingga swasta, termasuk para pelaku industri jasa keuangan di mana LPEI juga menjadi bagian di dalamnya.

Today, integrating ESG aspects into business operations has become a necessity, considering the pressing climate crisis that requires collaboration with various stakeholders, including governments, policymakers, and the private sector, including financial service providers like LPEI.

Dari semua pilar ESG, isu terkait lingkungan hidup terutama perubahan iklim menjadi salah satu yang disorot oleh masyarakat dunia mengingat dampaknya yang membahayakan kesehatan manusia dan mengakibatkan hilangnya 4% dari *output* ekonomi tahunan global pada tahun 2050 mendatang dan juga meningkatkan risiko operasional bisnis bagi para pelaku usaha.

Among all ESG pillars, environmental issues, especially climate change, have garnered significant attention globally due to their detrimental effects on human health and the projected loss of 4% of global annual economic output by 2050, as well as the increased operational risks for businesses.

Merespons tantangan *climate change* yang menjadi penyebab utama terjadinya pemanasan global, Indonesia berkomitmen untuk berjuang bersama dunia dalam mengatasi perubahan iklim melalui penandatanganan Perjanjian Paris sebagai kesepakatan global yang monumental. Selanjutnya, komitmen negara-negara dinyatakan melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk periode 2020-2030, ditambah aksi pra-2020. Komitmen Indonesia yang tertuang dalam NDC adalah menargetkan penurunan emisi dari 29% menjadi 31,89% dengan usaha sendiri, dan dari 41% menjadi 43,20% dengan bantuan internasional pada 2030. *Enhanced NDC* tersebut tentunya diselaraskan dengan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 serta visi untuk mencapai NZE pada tahun 2060.

In response to the challenge of climate change as the primary cause of global warming, Indonesia has committed to joining the global effort to address climate change through the signing of the Paris Agreement, a monumental global agreement. Subsequently, countries' commitments are outlined through Nationally Determined Contributions (NDCs) for the 2020-2030 period, supplemented by pre-2020 actions. Indonesia's NDC commitment aims to reduce emissions from 29% to 31.89% through domestic efforts and from 41% to 43.20% with international assistance by 2030. This enhanced NDC is aligned with the Long-Term Low Carbon and Climate Resilience Strategy 2050 and the vision to achieve Net Zero Emissions (NZE) by 2060.

Untuk mendukung pencapaian komitmen NZE tersebut, LPEI sebagai bagian dari industri keuangan berupaya untuk mengambil peran yang lebih besar dalam memitigasi risiko ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh degradasi lingkungan dan perubahan iklim. LPEI berusaha mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dalam bidang lingkungan dengan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasionalnya. Berbagai inisiatif kegiatan termasuk pengelolaan risiko dalam aspek lingkungan telah digariskan dalam RAKB LPEI tahun 2023, dengan tiga poin utama, yaitu pemberlakuan kebijakan pembiayaan, penjaminan dan penutupan pertanggungan risiko kegiatan ekspor yang ramah lingkungan; implementasi pendanaan ramah lingkungan; dan penerapan kebijakan operasional ramah lingkungan (*Green Office* LPEI).

To support the achievement of the NZE commitment, Indonesia Eximbank, as part of the financial industry, endeavors to play a larger role in mitigating the economic and social risks caused by environmental degradation and climate change. Indonesia Eximbank seeks to realize the Sustainable Development Goals (SDGs) in the environmental field by applying sustainability principles in every aspect of its operations. Various initiatives, including risk management in environmental aspects, have been outlined in Indonesia Eximbank 2023 Annual Business Plan (RAKB), with three main points: the implementation of environmentally friendly financing, guarantees, and risk coverage for export activities; the implementation of environmentally friendly funding; and the implementation of environmentally friendly operational policies (Indonesia Eximbank Green Office).

Kebijakan Pembiayaan, Penjaminan, dan Penutupan Pertanggungan Risiko Kegiatan Ekspor yang Ramah Lingkungan

LPEI berkomitmen untuk mewujudkan pemberian fasilitas pembiayaan, penjaminan dan penutupan asuransi ramah lingkungan melalui penerapan kebijakan ketentuan internal dan komitmen pengelolaan ESG yang telah diintegrasikan ke dalam proses penyediaan produk dan layanan keuangan kepada nasabah. Kesungguhan LPEI dalam menjalankan bisnis inti yang berorientasi pada lingkungan hidup ditunjukkan melalui eksistensi Kebijakan ESG yang sebelumnya dinamakan *Environmental and Social Management System* (ESMS) dan Manual Operasional ESG.

Environmental Financing, Guarantee, and Risk Coverage Policy for Environmentally Friendly Export Activities

Indonesia Eximbank is committed to providing environmentally friendly financing, guarantees, and insurance coverage through the implementation of internal regulations and ESG management commitments integrated into the process of providing financial products and services to customers. Indonesia Eximbank seriousness in conducting core business activities that are environmentally oriented is demonstrated through the existence of the ESG Policy, previously known as the Environmental and Social Management System (ESMS), and the ESG Operational Manual.

Kebijakan Operasional Ramah Lingkungan (*Green Office* LPEI)

LPEI secara aktif mengupayakan berlangsungnya kegiatan operasional yang lebih ramah lingkungan melalui Program *Green Office* LPEI atau yang kini disebut dengan istilah "ESG Kelembagaan". Program ini sejatinya bukanlah hal baru bagi LPEI karena sudah diimplementasikan sejak tahun 2012 sesuai arahan PDE No. 0024/PDE/04/2012 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai.

Dalam pelaksanaannya, Divisi SDM dan Umum bertindak sebagai unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana kantor, termasuk penghematan penggunaan energi listrik, air dan kertas. Dalam rangka turut serta mewujudkan program pelestarian lingkungan, Divisi SDM dan Umum melakukan himbauan secara berkala untuk menerapkan Program *Green Office*. Efektivitas dan efisiensi penggunaan energi dan material merupakan fokus dari program ini.

Sustainable Financing dan *Sustainable Funding*

LPEI bertekad menerapkan konsep Keuangan Berkelanjutan secara utuh sebagai wujud komitmen dukungannya terhadap upaya pencapaian tujuan keberlanjutan dalam SDGs, baik pada aspek lingkungan maupun pada aspek sosial. Upaya tersebut diwujudnyatakan dengan memperkuat integrasi aspek ESG yang telah dirintis selama ini dalam mempertimbangkan permohonan pembiayaan, penjaminan maupun penutupan asuransi risiko kegiatan ekspor impor produk dan jasa para nasabah.

Sebagaimana telah disampaikan dalam dokumen RAKB, LPEI menegaskan prioritas penyusunan, sosialisasi, implementasi sistem dan kebijakan ESG, serta rancangan Manual Operasional ESG. Melalui penerapan ESG yang menyatu dengan ketentuan internal serta komitmen pengelolaan ESG yang telah diintegrasikan ke dalam proses penyediaan produk dan layanan keuangan yang disediakan selama ini, LPEI akan dapat:

1. Memiliki Kebijakan Khusus Penerapan Aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Kelembagaan maupun Kegiatan Usaha.
2. Menetapkan klausul dan covenant aspek-aspek lingkungan, sosial dan tata kelola dalam proses asesmen atau due dilligent maupun dalam perjanjian pembiayaan, penjaminan dan penutupan asuransi ekspor – impor para nasabah.

Environmental-Friendly Operational Policy (Indonesia Eximbank Green Office)

Indonesia Eximbank actively strives for more environmentally friendly operational activities through the Indonesia Eximbank Green Office Program or now known as the "Institutional ESG." This program is not new to Indonesia Eximbank as it has been implemented since 2012 following the guidance of Decree No. 0024/PDE/04/2012 regarding the Management of Facilities and Infrastructure of the Indonesian Export Financing Institution to serve as guidelines for all employees.

In its implementation, the Human Resources and General Affairs Division is responsible for managing office facilities and infrastructure, including saving electricity, water, and paper consumption. In order to participate in environmental preservation programs, the Human Resources and General Affairs Division periodically issues recommendations for implementing the Green Office Program. The focus of this program is on the effectiveness and efficiency of energy and material usage.

Sustainable Financing and Sustainable Funding

Indonesia Eximbank is resolved to apply the concept of Sustainable Finance comprehensively, demonstrating its commitment to support the achievement of SDGs, encompassing both environmental and social aspects. The Institution strengthens the integration of environmental, social, and governance considerations, which have already been pioneered, in assessing applications for financing, guaranteeing, and closing risk insurance for its customers' import-export activities.

As stated in the RAKB document, Indonesia Eximbank highlights the importance of prioritizing the development, dissemination, and implementation of ESG systems and policies, including the drafting of an ESG Operational Manual. By integrating ESG commitments into the process of providing financial products and services, along with internal regulations, Indonesia Eximbank will be able to:

1. Have a Special Policy for the Application of Environmental, Social and Institutional Governance Aspects and Business Activities.
2. Establish clauses and covenants on environmental, social and governance aspects in the assessment process or due diligence, as well as in financing agreements, guarantees and closing of export-import insurance for customers.

3. Menerapkan proses *monitoring* ketaatan dan kepatuhan nasabah korporasi terhadap ketentuan dan *covenant* aspek lingkungan dan sosial.

4. Memiliki dan mengelola portofolio "Hijau dan *Sustainable*" yang selaras dengan tujuan keberlanjutan SDGs pada aspek lingkungan maupun sosial.

Dengan merintis dan memiliki portofolio "Hijau dan *Sustainable*", LPEI bercita-cita untuk menerbitkan "Obligasi Hijau atau *Green Bond*" guna mendukung tekad Lembaga untuk menjadi lembaga keuangan pendukung kegiatan ekspor dan impor yang beroperasi dengan menjunjung tinggi pencapaian tujuan keberlanjutan, yang juga berarti mendukung komitmen Pemerintah dalam memenuhi target-targetnya sebagaimana disampaikan dalam Perjanjian Paris.

Saat ini, LPEI telah memiliki portofolio syariah yang juga didukung dengan penerbitan Obligasi Syariah yang menyasar segmen nasabah korporasi maupun nasabah UKM yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Langkah konkret LPEI dalam menghadirkan *Sustainable Financing* dan *Sustainable Funding* diwujudkan melalui kepemilikan dan pengelolaan portofolio "Hijau dan *Sustainable*" yang diproses melalui penerapan ketentuan pemenuhan aspek ESG dan juga didukung dengan ketersediaan sumber dana "Hijau atau *Green Bond*" serta dikelola dengan menerapkan kebijakan *Green Office*.

Kerangka keberlanjutan LPEI berpedoman pada 8 prinsip Prinsip Keuangan Berkelanjutan yang diterbitkan OJK, yakni prinsip investasi yang bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, prinsip tata Kelola, prinsip komunikasi yang informatif, prinsip inklusif, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas serta prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Biaya Lingkungan Hidup Tahun 2023

Sehubungan dengan kegiatan usaha LPEI yang tidak bersentuhan langsung dengan aktivitas eksplorasi lingkungan hidup, maka Lembaga tidak mencatatkan adanya biaya lingkungan hidup.

3. Implement a process of monitoring the adherence and compliance of corporate customers with environmental and social aspects provisions and covenants.
4. Own and manage a "Green and Sustainable" portfolio that is aligned with SDGs sustainability goals on environmental and social aspects.

By pioneering and having a "Green and Sustainable" portfolio, Indonesia Eximbank aspires to issue "Green Bond" to support the Institution's determination to become a financial institution supporting export and import activities that operates by upholding the achievement of sustainability goals, which also means supporting the commitment of the Government of Indonesia to meet its targets as stated in the Paris Agreement.

Currently, Indonesia Eximbank has a sharia portfolio which is also supported by the issuance of Sharia Bonds, targeting corporate and SME customers who apply sharia principles in carrying out their business activities. Indonesia Eximbank's concrete steps in delivering Sustainable Financing and Sustainable Funding are realized through the ownership and management of "Green and Sustainable" portfolios which is processed through the implementation of provisions to fulfill ESG aspects and is also supported by the availability of "Green or Green Bond" funding sources and managed by implementing Green Office policies.

Indonesia Eximbak sustainability framework is guided by 8 principles of Sustainable Finance Principles issued by OJK, namely principles of responsible investment, principles of sustainable business strategies and practices, principles of social and environmental risk management, principles of governance, principles of informative communication, principles of inclusiveness, principles of priority leading sector development and principles of coordination and collaboration.

Environmental Costs in 2023

In connection with Indonesia Eximbank's business activities that are not in direct contact with environmental exploration activities, the Institute does not record any environmental costs.

Program *Green Office* LPEI & Penggunaan Material Ramah Lingkungan

Meskipun bisnis inti yang dijalankan LPEI tidak memberikan dampak signifikan bagi lingkungan, kami tetap melakukan pengelolaan risiko lingkungan untuk memastikan keberlangsungan usaha dan menjaga kelestarian lingkungan Indonesia. Dengan mempertimbangkan karakteristik bisnis LPEI sebagai Lembaga Keuangan khusus maka selain berfokus pada pengelolaan portofolio pendanaan yang berwawasan lingkungan, LPEI juga berusaha mengurangi dampak lingkungan dengan melakukan digitalisasi dan mendorong penggunaan material atau kemasan yang ramah lingkungan di area kantor.

Berbagai inisiatif telah dilakukan LPEI dalam rangka mewujudkan kantor ramah lingkungan *(eco-office*) dimana kami mendorong semua aktivitas kerja yang tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kerja, melalui perubahan perilaku keseharian seluruh pegawai.

Dengan mengadopsi pendekatan *green office lifestyle culture,* LPEI mengajak seluruh pegawai untuk memupuk kepedulian terhadap lingkungan dan mengubah kebiasaan sehari-hari agar lebih bertanggung jawab dalam menggunakan material atau kemasan yang tidak dapat didaur ulang. Untuk mengurangi timbulan sampah yang tidak dapat didaur ulang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), LPEI mewajibkan pegawai untuk menggunakan alat makan dan/atau minum pribadi dan menghindari penggunaan alat makan dan/atau minum sekali pakai, khususnya yang menggunakan kemasan tidak ramah lingkungan, serta menyediakan *pitcher* dan gelas minum untuk kegiatan *meeting*, atau pegawai dihimbau untuk membawa botol minum (*tumbler*) sendiri dalam setiap rapat dan kegiatan kantor.

Semangat dan tekad penuh LPEI dalam mewujudkan hadirnya kehidupan yang lebih berkualitas di Bumi tidak hanya digaungkan bagi kalangan internal, namun juga dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan eksternal. Dari sisi internal, LPEI berusaha memulai langkah baik untuk mewujudkan *green office* dengan berfokus pada 4 (empat) program utama, yakni *save paper, save energy, reduce waste, buy green, save water, reduce carbon footprint*, dan *green the event.* Sementara dari sisi eksternal, LPEI juga terlibat pada berbagai acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak luar terkait dukungan terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan.

Indonesia Eximbank Green Office Program & Use of Environmentally Friendly Materials

Although the core business conducted by Indonesia Eximbank does not significantly impact the environment, we still manage environmental risks to ensure business continuity and preserve the environment in Indonesia. Considering the characteristics of Indonesia Eximbank business as a Special Financial Institution, in addition to focusing on managing environmentally conscious funding portfolios, Indonesia Eximbank also strives to reduce environmental impact by digitizing and promoting the use of eco-friendly materials or packaging in office areas.

Various initiatives have been undertaken by Indonesia Eximbank to realize an eco-office where we promote all work activities not only oriented towards performance but also enhancing the quality of the environment, health, and comfort in the workplace through changes in the daily behavior of all employees.

By adopting a green office lifestyle culture approach, Indonesia Eximbank invites all employees to cultivate environmental awareness and change daily habits to be more responsible in using non-recyclable materials or packaging. To reduce non-recyclable waste in landfills, Indonesia Eximbank requires employees to use personal eating and/or drinking utensils and avoid using disposable eating and/or drinking utensils, especially those with environmentally unfriendly packaging. We also provide pitchers and drinking glasses for meetings, or employees are encouraged to bring their own drinking bottles (tumblers) to every meeting and office activity.

Indonesia Eximbank strong spirit and determination to create a higher quality of life on Earth are not only advocated for internally but also communicated with external stakeholders. Internally, Indonesia Eximbank strives to initiate positive steps to achieve a green office by focusing on four main programs: saving paper, saving energy, reducing waste, buying green, saving water, reducing carbon footprint, and greening events. Meanwhile, externally, Indonesia Eximbank is also involved in various events or activities organized by external parties related to supporting the achievement of sustainability goals.

Komitmen Lembaga untuk menjalankan praktik operasional yang ramah lingkungan juga diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan Program *Green Office* LPEI, mencakup:

1) Penerapan *Smart Spending* di Lingkungan LPEI yang disosialisasikan secara *online* melalui *email, screen saver* maupun media digital lainnya;
2) Memaksimalkan penggunaan *online training;*
3) Efisiensi penggunaan kertas dilakukan dengan penerapan *double side print*, tidak mencetak dokumen *draft* dan penggunaan *digital signature*, namun tetap memperhatikan aspek fungsi, peruntukan dan kerahasiaan dokumen;
4) Mengoptimalkan utilisasi ruang kantor dengan peluncuran program "XWoW" atau *Eximbank New Way of Working,* termasuk memberikan pilihan untuk bekerja secara *hybrid* bagi pegawai LPEI;
5) Efisiensi penggunaan listrik dilakukan dengan mematikan perangkat dan peralatan listrik seperti membatasi penggunaan peralatan listrik, komputer, printer dan alat elektronik lainnya apabila telah selesai bekerja/meninggalkan kantor, mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan;
6) Efisiensi penggunaan air dilakukan dengan memastikan keran air dalam kondisi mati apabila telah selesai digunakan.

Konsistensi LPEI dalam menjalankan kegiatan operasional ramah lingkungan membuahkan hasil dengan tidak adanya pengaduan terkait isu lingkungan serta tidak menerima denda dan sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan Lembaga terhadap Undang-Undang dan Peraturan terkait lingkungan. [307-1]

Digitalisasi untuk Meminimalkan Dampak Lingkungan Hidup

Sebagai bagian dari implementasi Program *Green Office*, Lembaga terus mengupayakan digitalisasi di internal agar senantiasa dapat memberikan dampak positif pada pencapaian kinerja ESG. Untuk mewujudkan hal itu, LPEI menerapkan teknologi digital untuk membantu pengurangan konsumsi kertas terait urusan kepersonaliaan maupun dalam proses administrasi kerja dan sistem operasional LPEI.

Dengan semangat keberlanjutan untuk menjaga hutan yang tetap lestari dan hijau, LPEI meyakini langkah digitalisasi merupakan jawaban bagi masa depan industri keuangan yang lebih baik dan kami telah berada selangkah di depan dalam pencapaian ESG. Langkah pasti LPEI dalam membangun digitalisasi ditunjukkan melalui pemanfaatan

The Institution's commitment to environmentally friendly operational activities is realized through the development and implementation of the Green Office Program, including:

1) Implementation of Smart Spending practices in the Indonesia Eximbank Environment, socialized online via email, screen saver and other digital media;
2) Maximize the use of online training;
3) The efficiency of paper consumption is carried out by applying double side print, not printing draft documents and the use of digital signatures, but still paying attention to aspects of function, designation and confidentiality of documents;
4) Optimizing office space utilization with the launch of the "XWoW" or Eximbank New Way of Working program, including providing the option to hybrid work for employees;
5) Efficient consumption of electricity is done by turning off electrical devices and equipment, such as limiting the use of electrical equipment, computers, printers and other electronic devices when finished working/leaving the office, including turning off lights in rooms that are not used;
6) Efficient consumption of water is done by ensuring that the faucet is turned off when it is no longer needed.

Consistency in carrying out environmentally friendly operational activities has resulted in the outcomes, Indonesia Eximbank has not received any complaint related to environmental issues and has not received fines or non-monetary sanctions for non-compliance with laws and regulations related to the environment. [GRI 307-1]

Digitalization to Reduce Environmental Impact

As part of the Green Office Program implementation, the institution continues to strive for internal digitalization to consistently deliver positive impacts on ESG performance. To achieve this, Indonesia Eximbank implements digital technology to assist in reducing paper consumption related to personnel matters as well as in the administrative and operational processes of Indonesia Eximbank.

With a sustainable spirit to maintain forests that remain sustainable and green, Indonesia Eximbank believes that digitalization is the answer to a better future for the financial industry, and we have taken a step ahead in achieving ESG goals. Indonesia Eximbank firm step in building digitalization is demonstrated through the utilization of digital platforms for HR services, such as

platform digital untuk layanan SDM, seperti HRIS (*Human Resource Information System*), aplikasi GreatDay, dan CBT (*Computer Based Training*) Kode Etik untuk *e-learning* dan lain-lain. LPEI juga secara berkala meningkatkan kapabilitas layanan dengan melaksanakan pemrosesan transaksi *end-to-end* secara *paperless* sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Pada tahun 2023, LPEI telah melakukan pembangunan *new data center*, dimana pembangunan *new data center* tersebut mengacu pada standar international *uptime institute Tier III* dan dibangun dengan konsep *smart* dan *green technology* seperti penggunaan *palm vein scanning* untuk *security access* pada *main room* serta penggunaan *motion sensor* dan pencahayaan LED untuk efisiensi penggunaan listrik pada ruangan *data center.* Dengan adanya dukungan *new data center* tersebut, LPEI merealisasikan berbagai inisiatif *green office* dengan menerapkan aktivitas berikut:

a) Pengurangan penggunaan kertas (*paperless policy*) untuk mendukung *environment* kerja yang ramah lingkungan melalui pengembangan sistem yang menggunakan konsep digital seperti *New Expense System, E-Learning, E-Sign* dan lainnya;
b) Penyediaan *infrastructure* dan *tools* pendukung konsep kerja *hybrid* (WFA), sehingga dapat secara signifikan mengurangi kebutuhan jumlah ruang kerja dan kebutuhan energi; dan
c) Inisiatif untuk penggunaan *technology cloud* yaitu *Infrastructure as a Service* (IaaS) dan *Software as a Service* (SaaS) untuk beberapa aplikasi seperti *e-Learning (X-Learn)* dan HRIS sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan penggunaan energi untuk operasional *data center* .
d) Implementasi teknologi *hyperconverged infrastructure* (HCI) pada perangkat keras di *Disaster Recovery Center* (DRC) yang lebih efisien dalam segi kebutuhan energi, panas, dan *space* area dalam mendukung skalabilitas operasional.

Penyaluran Pembiayaan (*Sustainable Financing*) pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan [FS8]

LPEI senantiasa beraspirasi untuk menjadi agen perubahan dalam pemulihan ekonomi dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang sepenuhnya mendukung langkah transisi energi di Indonesia. Sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan sebagai Lembaga pembiayaan ekspor impor, LPEI berkomitmen untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan sesuai arahan OJK melalui peningkatan penyaluran pembiayaan hijau untuk sektor-sektor yang berkelanjutan dan memenuhi kriteria Kegiatan Usaha

HRIS (Human Resource Information System), GreatDay application, and CBT (Computer Based Training) for the Code of Ethics for e-learning, among others. LPEI also regularly enhances service capabilities by conducting end-to-end transaction processing in a paperless manner according to customer needs.

In 2023, Indonesia Eximbank constructed a new data center, which followed international standards like the Uptime Institute Tier III and was built with smart and green technology concepts, such as the use of palm vein scanning for security access in the main room, and motion sensors and LED lighting for electricity efficiency in the data center rooms. With the support of this new data center, Indonesia Eximbank realized various green office initiatives by implementing the following activities:

a) Reducing paper consumption (paperless policy) to support an environmentally friendly work environment through the development of systems that use digital concepts, such as New Expense System, E-Learning, E-Sign and others.
b) Provision of infrastructure and tools supporting the hybrid work concept (WFA), to significantly reduce the need for the number of workspaces and energy needs.
c) Initiatives for the use of cloud technology are Infrastructure as a Service (IaaS) and Software as a Service (SaaS) for several applications, such as e-Learning (X-Learn) and HRIS, to reduce the need for energy use for data center operations.
d) Implementation of hyperconverged infrastructure (HCI) technology on hardware in Disaster Recovery Center (DRC) which is more efficient in terms of energy, heat, and space area requirements in supporting operational scalability.

Sustainable Financing for Environmentally Sound Business Activities [FS8]

Indonesia Eximbank consistently aspires to be an agent of change in economic recovery while fully considering sustainable aspects that support the energy transition in Indonesia. Aligned with its business domain as an export-import financing institution, Indonesia Eximbank is committed to supporting the implementation of Sustainable Finance principles as directed by the OJK through increased disbursement of green financing for sustainable sectors and those meeting the criteria of Environmentally Friendly Business Activities (KUBL) as stipulated in POJK

Berwawasan Lingkungan (KUBL) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam POJK 51/2017 serta juga berpedoman pada Kebijakan ESG Lembaga. Dengan berpegang pada pedoman internal yang ada, LPEI melakukan pemetaan, identifikasi, dan kajian terhadap kegiatan-kegiatan usaha nasabah yang berpotensi memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.

51/2017, and also guided by the Institution's ESG Policy. Adhering to internal guidelines, LPEI conducts mapping, identification, and assessment of customer business activities that may potentially have negative environmental and social impacts.

Pada tahun 2023, LPEI kembali menjalankan mandat penyaluran pembiayaan untuk sektor UMKM berorientasi ekspor, dengan uraian kinerja sebagai berikut:

In 2023, Indonesia Eximbank carried out the mandate to disburse financing to the export-oriented MSME sector, with the performance breakdown as follows:

Uraian Description	**Kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan** Environmental Business Activity Category	**Jumlah Penyaluran Pembiayaan** Total Loan Disbursement **(Rp triliun |** Rp trillion**)**		
		2023	**2022**	**2021**
Penyaluran dana: kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan Funds disbursement: credit/financing of sustainable business activities	Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Micro, Small, and Medium Enterprise Activities	14,49	14,74	14,41
	Jumlah | Total	**14,49**	**14,74**	**14,41**

Penghematan Energi Listrik dan BBM [302-1, 302- 2, 302-4]

Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, LPEI membutuhkan energi listrik yang sepenuhnya dipasok oleh PLN dan memerlukan BBM untuk mengoperasikan kendaraan operasional yang dipakai untuk mobilitas pegawai dalam menjalin interaksi tatap muka dengan para nasabah, maupun calon nasabah. Di sisi lain, energi listrik dibutuhkan untuk aktivasi peralatan elektronik kantor, pendingin ruangan (*air conditioner*/AC), penerangan, kebutuhan lift, mesin-mesin perkantoran, komputer, dan lainnya.

Electricity and Fuel Savings [302-1, 302- 2, 302-4]

In carrying out its daily operational activities, Indonesia Eximbank requires electricity supplied entirely by PLN and relies on fossil fuels for operating its operational vehicles used for employee mobility in face-to-face interactions with customers and potential customers. On the other hand, electricity is needed for activating office electronic equipment, room coolers (air conditioners/AC), lighting, elevator needs, office machinery, computers, and others.

LPEI menyadari bahwa penggunaan energi listrik dan BBM yang berlebihan berkontribusi terhadap peningkatan emisi energi di udara apalagi sumber energi yang digunakan masih mengandalkan bahan baku fossil. Maka dari itu sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab Lembaga dalam meminimalkan pelepasan jejak karbon sebagai akibat dari konsumsi energi selama proses operasional berlangsung, maka LPEI secara konsisten menerapkan inisiatif *Green Office* yang terangkum melalui berbagai upaya berikut:

Indonesia Eximbank is aware that excessive use of electricity and fossil fuels contributes to increased energy emissions in the air, especially since the energy sources used still rely on fossil fuels. Therefore, as a form of concern and responsibility of the Institution in minimizing carbon footprint emissions resulting from energy consumption during the operational process, Indonesia Eximbank consistently implements Green Office initiatives encapsulated through various efforts such as:

Penghematan Listrik
Electricity Savings

- Memberikan himbauan agar seluruh pegawai mematikan dan melepas peralatan elektronik pribadi saat pulang kantor;
- Menghimbau kepada pegawai yang terakhir pulang untuk mematikan lampu dan AC saat mereka telah selesai bertugas di Kantor;
- Menginstruksikan pegawai untuk mematikan lampu dan AC untuk area kerja yang sudah kosong;
- Penggunaan fasilitas rapat dengan video conference yang dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- Penggunaan fasilitas webinar untuk pelatihan/sosialisasi, dan lain sebagainya.

- Mandate all employees to turn off and remove personal electronic equipment when returning home from work.
- Appeal to the last employees to go home to turn off the lights and air conditioners when they have finished their duties in the Office.
- Instruct outsourced employees (Office Boy/Office Girl and Security) to turn off lights and air conditioners for work areas that are already vacant.
- Use of meeting facilities with video conferencing that is carried out effectively and efficiently.
- Use of webinar facilities for training/socialization, and etc.

Penghematan BBM
Fuel Saving

- Melakukan perawatan berkala terhadap seluruh kendaraan operasional;
- Melakukan uji pengendalian emisi secara berkala;
- Memastikan setiap kendaraan menggunakan bahan bakar sesuai dengan standar dan spesifikasinya; dan
- Menekan mobilitas dan mengoptimalkan telekonferensi

- Conducting periodic maintenance on all operational vehicles;
- Conducting periodic emission control tests;
- Ensuring each vehicle uses fuel in accordance with its standards and specifications; and
- Reducing mobility and optimizing teleconferencing.

Berikut ini adalah dokumentasi lengkap penggunaan listrik tahun 2023:

Tabel Konsumsi Energi [GRI 302-1, 302-3, 302-4]
Energy Consumption

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	Efisiensi Energi Tahun 2023 - 2022 (%) Energy Efficiency 2023 – 2022 (%)
Konsumsi Listrik Electricity Consumption	KWh	1.708.390	1.100.879	1.074.823	55,18%
	G Joule	6.150	3.963	3.869	55,18%
Total Konsumsi Energi Total Energy Consumption	G Joule	6.150	3.963	3.869	55,18%
Luas Ruangan	M^2	19.484	19.484	19.484	0,00%
Intensitas Konsumsi Energi Listrik Electrical Energy Consumption Intensity	GJoule/M^2	0,32	0,20	0,20	60,00%

Catatan | Note:
Luas Ruangan hanya mencantumkan luas ruangan di Kantor Pusat, lengkap dengan data konsumsi listrik PLN di Kantor Pusat
Room Size only lists the area of the room at the Head Office, complete with data on PLN electricity consumption at the Head Office

Pengelolaan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) [305-5]

LPEI berusaha mengelola emisi GRK secara optimal dengan melakukan berbagai upaya penghematan atau efisiensi penggunaan energi listrik dan BBM yang keduanya menghasilkan jejak emisi CO_2 atau Karbon dioksida atau Gas Rumah Kaca (GRK). Berikut ini perhitungan emisi di LPEI selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Greenhouse Gas (GHG) Emissions Management [305-5]

Indonesia Eximbank strives to manage GHG emissions optimally by making various efforts to save or efficiently use electricity and fuel, both of which result in CO2 emissions or Greenhouse Gas (GHG) emissions. Here are the calculations of emissions at Indonesia Eximbank over the past 3 (three) years:

Tabel Emisi CO_2 [GRI 305-1, 305-2, 305-4, 305-5]
Emission CO_2

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	Efisiensi Emisi Tahun 2023 - 2022 (%) Emission Efficiency 2023 - 2022 (%)
Emisi Tidak Langsung dari Listrik | Indirect Emissions from Electricity	Ton CO_2eq	1.486,30	954,07	931,48	55,79%
Luas Ruangan | Room Size	m^2	19.484	19.484	19.484	0,00%
Intensitas Emisi Konsumsi Listrik Electricity Consumption Emission Intensity	Ton CO_2eq/ m^2	0,08	0,05	0,05	60,00%

Catatan: | Note:
Hanya menampilkan emisi dari konsumsi Listrik Kantor Pusat.
Only displays emissions from Central Office Electricity consumption

Pada tahun 2023, LPEI mencatatkan peningkatan emisi GRK sekitar 60,00% dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menjadi sebesar 0,08 Ton CO_2eq/m^2. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan konsumsi listrik di kantor pusat karena aktivitas *Work From Office* (WFO) sudah berjalan kembali normal di masa pasca pandemi.

In 2023, Indonesia Eximbank recorded an increase in GHG emissions of around 60.00% compared to the previous year of 0.08 Ton CO_2eq/m^2. The increase is in line with the increase in electricity consumption at the head office because Work From Office (WFO) activities have returned to normal in the post-pandemic period.

Penghematan Kertas

Salah satu program prioritas keberlanjutan LPEI di bidang lingkungan hidup ditunjukkan melalui kebijakan pengurangan penggunaan kertas *(paperless)* untuk keperluan administrasi kantor, terlebih saat ini Lembaga sudah mulai menerapkan digitalisasi dan menggunakan *digital database* dalam hal penyimpanan data. Kami menaruh perhatian penuh akan hal ini mengingat dampak penggunaan kertas yang berlebihan akan meningkatkan angka penebangan pohon sebagai bahan baku kertas dan juga memperbanyak sampah kertas.

Paper Saving

One of Indonesia Eximbank priority sustainability programs in the field of environmental conservation is demonstrated through the policy of reducing paper usage (going paperless) for office administration purposes, especially now that the institution has begun to implement digitization and use digital databases for data storage. We pay full attention to this because the excessive use of paper increases tree logging for paper raw materials and also generates more paper waste.

Atas kesadaran tersebut, LPEI telah menerapkan sejumlah inisiatif penghematan kertas dalam proses kerja dalam rangka menanggulangi timbulan sampah kertas dan untuk menjaga kelestarian hutan, di antaranya:

With this awareness, Indonesia Eximbank has implemented several paper-saving initiatives in its workflow to address paper waste and to conserve forests, including:

- Memilah kertas yang masih layak pakai dan menyiapkan kotak penyimpanan di area mesin printer;
- Memberikan himbauan di area mesin printer untuk sebisa mungkin menggunakan kertas bekas layak pakai untuk mencetak dokumen draft;
- Memaksimalkan penggunaan *e-mail* dalam mensosialisasikan informasi dan kebijakan internal;
- Menerapkan kebijakan penggunaan kertas bekas atau kertas bolak-balik untuk keperluan administrasi kantor/penggunaan memo/sarana pertukaran informasi internal lainnya;
- Tidak mencetak dokumen yang tidak terlalu penting;
- Mengecek ulang sebelum dokumen dicetak sehingga terhindar dari kesalahan;
- Mengarsipkan dokumen secara digital untuk proposal-proposal pembiayaan, penjaminan maupun penutupan asuransi;
- Memberikan himbauan kepada internal untuk menggunakan dokumen digital, seperti pengiriman surat/undangan melalui surel/media daring;
- Mengurangi jumlah cetakan buku Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan; dan
- Pengembangan aplikasi digital untuk keperluan internal kantor.

- Sorting out paper that is still suitable for use and preparing storage boxes in the printer machine area.
- Provide an appeal in the printer area to use waste paper as much as possible to print draft documents.
- Maximize the use of e-mail in disseminating information and internal policies;
- Implementing a policy of using waste paper or paper back and forth for office administration purposes/use of memos/other means of internal information exchange;
- Not printing documents that are not too important;
- Double-checking before documents are printed to avoid errors;
- Digitally archiving documents for financing proposals, guarantees and insurance closures;
- Providing an internal appeal to use digital documents, such as sending letters/invitations via email/online media;
- Reducing the number of printed Annual Report and Sustainability Report books; and
- Development of digital applications for internal office purposes.

Dengan menjalankan seluruh inisiatif penghematan kertas secara konsisten serta berlanjutnya digitalisasi proses pada seluruh sistem kerja dan operasional Lembaga, maka pada tahun 2023 LPEI berhasil mengurangi angka pemakaian kertas baik dalam satuan rim maupun dalam bentuk penghematan pengadaan belanja kertas.

By consistently implementing all paper-saving initiatives and continuing the digitization process across all work systems and operations of the institution, in 2023, Indonesia Eximbank successfully reduced paper usage figures in terms of reams and achieved savings in paper procurement expenses.

Berikut ini adalah dokumentasi pemakaian kertas dan belanja kertas selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Here is the documentation of paper usage and paper procurement expenses over the past 3 (three) years:

Uraian Description	**Satuan** Unit	**2023**	**2022**	**2021**	**Penggunaan Kertas Tahun 2023 - 2022 (%)** Paper Usaga 2023 - 2022 (%)
Volume Penggunaan Kertas Paper Usage Volume	Lembar Sheet	1.005.022	842.375	190.523	16,18%

Pada tahun 2023, LPEI mencatatkan peningkatan pemakaian kertas hingga 16,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan aktivitas di kantor pusat karena aktivitas *Work From Office* (WFO) sudah berjalan kembali normal di masa pasca pandemi dengan tetap turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah bumi dari degradasi dan deforestasi hutan melalui inovasi paperless office dan digitalisasi.

Due to the consistency and full awareness of all Indonesia Eximbank employees towards the implementation of paper saving initiatives, Indonesia Eximbank has recorded a reduction in the volume of paper usage up to 57.65% by 2023. By adopting paperless office innovation and digitalization, Indonesia Eximbank also contributes to preserving the environment and preventing the earth from forest degradation and deforestation.

Efisiensi Air

LPEI memerlukan air untuk kepentingan domestik, seperti toilet, *pantry*, mushalla, mesin pendingin udara, kebersihan kantor, dan beberapa aktivitas lainnya. Kebutuhan pemakaian air oleh pegawai ataupun tamu di area kantor LPEI sama besarnya seperti

Water Efficiency

Indonesia Eximbank requires water for domestic purposes, such as toilets, pantries, prayer rooms, air conditioning units, office cleanliness, and various other activities. The water consumption needs of employees or guests in Indonesia Eximbank office area are as

konsumsi listrik dan air. Menyadari cadangan sumber air bersih yang kian terbatas akibat peningkatan suhu panas bumi setiap tahunnya, maka LPEI mendorong seluruh pegawai untuk menggunakan air secukupnya mengingat faktor perubahan iklim yang telah nyata-nyata mengakibatkan bencana kekeringan di beberapa wilayah.

Langkah LPEI dalam menjaga keberlangsungan ekosistem air di sekitar area operasional kantor diwujudkan melalui berbagai inisiatif seperti:

significant as electricity and water consumption. Recognizing the increasingly limited reserves of clean water sources due to the rising global temperatures each year, Indonesia Eximbank encourages all employees to use water sparingly, considering the climate change factor that has clearly resulted in drought disasters in several regions.

Indonesia Eximbank steps in maintaining the sustainability of the water ecosystem around the operational office area are realized through various initiatives such as:

- Menjalankan gerakan "gunakan air secukupnya;
- Melakukan pengecekan instalasi air secara berkala untuk mendeteksi kebocoran pipa atau saluran;
- Melakukan perbaikan dan penggantian instalasi air yang bocor; dan
- Menghimbau pegawai ataupun tamu gedung untuk selalu menutup keran dengan rapat.

- Implementing the "use water sparingly" movement;
- Checking water installations periodically to detect pipe or channel leaks;
- Repairing and replacing leaking water installations; and
- Encouraging employees or guests of the building to always close the faucet tightly.

Selama tahun pelaporan 2023, LPEI tidak melakukan penghitungan konsumsi air, mengingat konsumsi air menjadi bagian dari fasilitas penyewaan Gedung Prosperity Tower.

During the reporting year of 2023, Indonesia Eximbank did not calculate water consumption, as water consumption is part of the facilities provided by the Prosperity Tower building rental.

Pengelolaan Limbah

Dalam menjalankan operasional bisnis sehari-hari, LPEI tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) karena limbah utama yang dihasilkan berupa limbah kertas dan alat tulis kantor (ATK), seperti pulpen, kertas, printer, serta sampah organik dari sisa makanan. Upaya LPEI dalam mengurangi volume limbah diwujudkan melalui berbagai inisiatif mulai dari kampanye penghematan kertas, larangan penggunaan kemasan satu kali pakai di area kantor (plastik/styrofoam) dan dorongan untuk membawa *tumbler* minum kepada seluruh pegawai.

Waste Management

In carrying out day-to-day business operations, Indonesia Eximbank does not generate Hazardous and Toxic Waste (B3 waste) because the main waste generated consists of paper waste and office stationery (ATK), such as pens, paper, printers, and organic waste from leftover food. Indonesia Eximbank efforts to reduce waste volume are realized through various initiatives ranging from paper-saving campaigns, banning the use of single-use packaging in the office area (plastic/styrofoam), and encouraging employees to bring their own drink tumblers.

Sementara itu, untuk mengurangi limbah toner dari penggunaan printer, LPEI menerapkan kebijakan pembaharuan terhadap sistem printer yang digunakan dengan teknologi yang te*rupdate*, yang memungkinkan sistem isi ulang tinta toner.

Meanwhile, to reduce toner waste from printer use, Indonesia Eximbank implements a policy of updating the printer system used with updated technology, allowing for toner refill systems.

Pada tahun 2023, LPEI tidak melakukan penimbangan jumlah limbah, mengingat seluruh limbah dikelola oleh pemilik gedung. Selain itu, kami berpendapat limbah yang dihasilkan dalam proses bisnis LPEI tidak signifikan, karena hanya berupa limbah domestik seperti kertas, sisa makanan dan lain-lain. LPEI bekerjasama dengan Building Management Prosperity Tower dalam hal daur ulang sampah.

In 2023, Indonesia Eximbank did not weigh the amount of waste, considering all waste is managed by the building owner. Additionally, we believe that the waste generated in Indonesia Eximbank business processes is not significant, as it only consists of domestic waste such as paper, leftover food, and others. LPEI collaborates with the Building Management of Prosperity Tower with regard to waste recycling.

Keanekaragaman Hayati

Kantor pusat dan cabang-cabang LPEI berada di kota-kota besar sehingga tidak ada wilayah operasi yang termasuk maupun berdekatan dengan kawasan dilindungi dan/atau di dalam area konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan LPEI tidak memberikan dampak signifikan bagi kawasan yang dilindungi maupun kawasan konservasi beserta ekosistem yang ada di dalamnya.

Biodiversity

The headquarters and branches of Indonesia Eximbank are located in major cities, so there are no operational areas that are included or adjacent to protected areas and/or within conservation areas with high biodiversity. Therefore, Indonesia Eximbank activities do not have a significant impact on protected areas or conservation areas and their ecosystems.

Pengaduan terkait Masalah Lingkungan Hidup

Sampai saat ini, LPEI belum memiliki saluran pengaduan khusus untuk menangani permasalahan atau isu lingkungan yang timbul dari operasional. Akan tetapi, LPEI memastikan telah mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dalam setiap aktivitas yang dijalankan.

Pada tahun 2023, LPEI tidak menerima laporan pengaduan atas ketidakpatuhan terhadap regulasi di bidang lingkungan hidup.

Complaints related to Environmental Issues

Until now, Indonesia Eximbank has not established a specific complaint channel to address environmental issues arising from its operations. However, LPEI ensures that environmental aspects are integrated into every activity it undertakes.

In 2023, Indonesia Eximbank did not receive any complaints regarding non-compliance with environmental regulations.

Komitmen Pemberian Layanan Terbaik dan Setara kepada Semua Nasabah

Commitment to Providing the Best and Equal Service to All Customers

LPEI berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah lebih dari sekedar menjalankan kewajiban pemenuhan tanggung jawabnya. LPEI memastikan kehadirannya di tengah masyarakat membawa dampak positif bagi sosial dan secara spesifik membantu para pelaku UMKM khususnya yang berorientasi ekspor untuk dapat meningkatkan daya saing produk atau jasa yang dihasilkan ke pasar global.

Peran LPEI untuk meningkatkan kemampuan UKM diwujudkan dengan terus membantu para UMKM baik dari aspek finansial maupun non-finansial agar bisa naik kelas menjadi eksportir unggulan. Di LPEI, kami bekerja setiap hari untuk memastikan terbukanya akses bagi pelaku usaha ekspor dalam meningkatkan daya saing di tingkat global, melalui pembiayaan ekspor dan jasa konsultasi. Hal ini berarti bahwa semua pengusaha yang berorientasi ekspor dapat memanfaatkan layanan LPEI untuk mengembangkan usaha dan inovasi mereka. Artinya, mereka memiliki akses informasi yang adil dan lengkap yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Sementara terkait aktivitas pelayanan dan strategi pemasaran, LPEI memberikan arahan yang tegas kepada seluruh jajaran pegawai agar memberikan layanan yang maksimal saat berinteraksi dengan nasabah tanpa membeda-bedakan status sosial, suku, agama, ras, ataupun hal lainnya. Prinsip kesetaraan juga kami tunjukkan melalui penyediaan informasi yang lengkap, akurat, dan transparan mengenai produk dan/atau layanan LPEI melalui situs web: https://www.indonesiaeximbank.go.id/ atau dapat juga diperoleh dengan mengunjungi langsung kantor pusat maupun cabang terdekat.

Komitmen LPEI dalam memberikan layanan yang terbaik dan setara bagi nasabah juga mencakup upaya penanganan keluhan nasabah sesuai standar SLA (*Service Level Agreement*) yang berlaku di Lembaga. LPEI memastikan seluruh pengaduan yang disampaikan oleh nasabah senantiasa diproses dan ditangani serta ditindaklanjuti secara serius, sesuai kebijakan penanganan nasabah yang diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif (PDE), dimana saat ini terdapat 8 Standar Pedoman Produk LPEI dan 1 Standar Pedoman Produk Pembiayaan Ekspor Nasional.

Indonesia Eximbank is fully committed to providing the best service to all customers, going beyond its obligation to fulfill its responsibilities. Indonesia Eximbank ensures that its presence in the community brings positive impacts on society and specifically helps SMEs, especially those oriented towards exports, to enhance the competitiveness of their products or services in the global market.

Indonesia Eximbank role in enhancing the capabilities of SMEs is manifested by continuously assisting them financially and non-financially to upgrade to become leading exporters. At Indonesia Eximbank, we work every day to ensure access for export-oriented businesses to enhance competitiveness globally, through export financing and advisory services. This means that all export-oriented entrepreneurs can utilize Indonesia Eximbank services to develop their businesses and innovations. In other words, they have fair and comprehensive access to information tailored to their needs.

Regarding service activities and marketing strategies, Indonesia Eximbank provides clear guidance to all employees to deliver maximum service when interacting with customers without discrimination based on social status, ethnicity, religion, race, or any other factor. The principle of equality is also demonstrated through the provision of complete, accurate, and transparent information about Indonesia Eximbank products and/or services through the website: https://www.indonesiaeximbank.go.id/ or can also be obtained by visiting the headquarters or nearest branch.

Indonesia Eximbank commitment to providing the best and equal service to customers also includes efforts to handle customer complaints according to the applicable SLA (Service Level Agreement) standards in the institution. Indonesia Eximbank ensures that all customer complaints are processed, handled, and followed up seriously, following the customer handling policy regulated in the Executive Director Regulation (PDE), where currently there are 8 Standard Guidelines for Indonesia Eximbank Products and 1 Standard Guideline for National Export Financing Products.

Dengan menjalankan kegiatan usaha yang berfokus pada nasabah dan menitikberatkan strategi pengembangan kapasitas usaha atau penugasan umum beserta penugasan khusus ekspor, LPEI optimis dapat terus memperkuat eksistensinya dalam mendorong kinerja ekspor nasional baik melalui kegiatan menghasilkan devisa (*direct & indirect* ekspor), kegiatan menghemat devisa (substitusi impor), dan kegiatan meningkatkan kapasitas produksi nasional (penunjang ekspor) yang diberikan oleh LPEI kepada segmen korporasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta prinsip pembiayaan secara konvensional maupun Syariah.

By conducting business activities focusing on customers and emphasizing business capacity development strategies or general and specific export assignments, Indonesia Eximbank is optimistic about strengthening its existence in driving national export performance, both through earning foreign exchange activities (direct & indirect exports), saving foreign exchange activities (import substitution), and increasing national production capacity activities (export supporters) provided by Indonesia Eximbank to corporate segments and Small and Medium Enterprises (SMEs) as well as conventional and Sharia financing principles.

LPEI BAGI KARYAWAN: TUMBUH DAN BERKEMBANG BERSAMA PEGAWAI

INDONESIA EXIMBANK FOR EMPLOYEES: GROWING AND DEVELOPING TOGETHER WITH EMPLOYEES

LPEI menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor pertama dan utama yang berperan besar dalam mendukung pencapaian tujuan usaha dan keberlanjutan. Berkat eksistensi dan dukungan penuh yang diberikan oleh para pegawai berkompetensi unggul dan memiliki daya saing tinggi, LPEI dapat menjalankan peran strategisnya secara maksimal sebagai SMV Kemenkeu RI yang bertugas menyukseskan program ekspor nasional, serta juga mampu menciptakan nilai ekonomi yang positif dan berkelanjutan.

Indonesia Eximbank places Human Resources (HR) as the foremost and essential factor that significantly contributes to the achievement of business goals and sustainability. Thanks to the presence and full support provided by highly competent and competitive employees, Indonesia Eximbank can maximize its strategic role as the Ministry of Finance's SMV tasked with ensuring the success of the national export program, as well as creating positive and sustainable economic value.

Menyadari bahwa masa depan kelangsungan usaha LPEI bergantung erat pada SDM yang handal dan berkualitas, maka kami berkomitmen untuk mempertahankan *best talents* yang ada dengan memberikan pengalaman kerja terbaik dan setara kepada semua pegawai, meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta menjamin kesejahteraan pegawai. Dengan menerapkan strategi retensi pegawai yang tepat, LPEI berharap setiap individu dapat merasa lebih dihargai dan diakui atas kinerjanya, sehingga pada gilirannya berpotensi meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas mereka terhadap perusahaan.

Recognizing that the future sustainability of Indonesia Eximbank business depends heavily on reliable and high-quality human resources, we are committed to retaining the best talents by providing equal and excellent work experiences to all employees, enhancing competencies through education and training, and ensuring employee welfare. By implementing the right employee retention strategies, Indonesia Eximbank aims for each individual to feel more valued and recognized for their performance, thus potentially increasing job satisfaction and loyalty to the company.

Secara umum, tujuan utama pengelolaan SDM di LPEI adalah memberi kesempatan bagi para pegawai untuk berkembang sesuai potensi terbaik yang dimiliki, memberi ruang kepada mereka untuk mencatatkan kinerja terbaik untuk mendukung

Overall, the primary goal of HR management at Indonesia Eximbank is to provide opportunities for employees to develop according to their best potential, allowing them to contribute their best performance to support the development of quality business scales.

pengembangan skala usaha yang berkualitas. Agar strategi dan rencana pengelolaan SDM di LPEI senantiasa berjalan efektif dan terarah, LPEI telah menyusun dan memberlakukan sejumlah kebijakan khusus terkait praktik ketenagakerjaan, antara lain:

a. PDE No. 0001/PDE/03/2022 mengatur tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian LPEI;
b. PDE No. 0028/PDE/05/2019 mengatur tentang Penerimaan Pegawai LPEI;
c. PDE No. 0024/PDE/10/2022 mengatur tentang Mutasi Pegawai LPEI;
d. PDE No. 0023/PDE/07/2021 mengatur tentang Program Magang/Praktik Kerja, *Detasering* (*Secondment*) dan Pertukaran Pegawai LPEI;
e. PDE No. 0042/PDE/09/2019 mengatur tentang Manual Operasional Pakta Integritas;
f. PDE No. 0009/PDE/07/2022 mengatur tentang Waktu Kerja Pegawai LPEI;
g. PDE No. 0052/PDE/11/2019 mengatur tentang Golongan Jabatan;
h. PDE No. 0055/PDE/11/2019 mengatur tentang Remunerasi Pegawai LPEI dan KDE No. 0158/KDE/11/2019 mengatur tentang Penetapan Remunerasi Pegawai LPEI;
i. PDE No. 0019/PDE/09/2022 mengatur tentang Perjalanan Dinas Pegawai LPEI;
j. PDE No. 0014/PDE/05/2015 mengatur tentang Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai LPEI;
k. PDE No. 0028/PDE/12/2020 mengatur tentang Penegakan Disiplin dan Penentuan Sanksi Atas Pelanggaran; dan
l. PDE No. 0058.01/PDE/11/2019 mengatur tentang Pensiun Pegawai LPEI.

Mewujudkan Tempat Kerja yang Inklusif di Tengah Keberagaman [406-1]

LPEI senantiasa mempromosikan hadirnya lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua pegawai. Adapun keberagaman yang tercipta di tengah Lembaga diyakini sebagai sebuah warna dan kekuatan tersendiri yang memungkinkan terwujudnya kolaborasi ide untuk menciptakan inovasi produk dan layanan yang kreatif sehingga pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja LPEI.

Dengan semangat inklusif, LPEI mendorong seluruh pegawai agar memiliki sikap saling menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) masing-masing individu sehingga tercipta lingkungan kerja yang bebas diskriminasi dan *zero bullying*. Kami percaya bahwa setiap organisasi bertanggung jawab untuk menghormati HAM dan setiap pegawai memiliki kemampuan untuk

To ensure that HR management strategies and plans at Indonesia Eximbank are consistently effective and targeted, Indonesia Eximbank has developed and implemented several specific policies related to employment practices, including:

a. PDE No. 0001/PDE/03/2022 regulates the Institution Personnel System Policy;
b. PDE No. 0028/PDE/05/2019 regulates the Recruitment of Institution Employees;
c. PDE No. 0024/PDE/10/2022 regulates the Mutation of Institution Employees;
d. PDE No. 0023/PDE/07/2021 regulates the Internship/Work Practice Program, Detasering (Secondment) and Exchange of Institution Employees;
e. PDE No. 0042/PDE/09/2019 regulates the Operational Manual of the Integrity Pact;
f. PDE No. 0009/PDE/07/2022 regulates the Working Time of Institution Employees;
g. PDE No. 0052/PDE/11/2019 regulates Position Groups;
h. PDE No. 0055/PDE/11/2019 regulates the Remuneration of Institution Employees and KDE No. 0158/KDE/11/2019 regulates the Determination of Remuneration of Institution Employees;
i. PDE No. 0019/PDE/09/2022 regulates the Official Travel of Institution Employees;
j. PDE No. 0014/PDE/05/2015 regulates the Institution Employee Training and Development Program;
k. PDE No. 0028/PDE/12/2020 regulates Enforcement of Discipline and Determination of Sanctions for Violations; and
l. PDE No. 0058.01/PDE/11/2019 regulates the retirement of Indonesia Eximbank Employees.

Creating an Inclusive Workplace in the Midst of Diversity [406-1]

Indonesia Eximbank consistently promotes the presence of an inclusive, fair, and sustainable work environment for all employees. The diversity fostered within the institution is seen as a unique color and strength that enables collaboration of ideas to create innovative products and services, ultimately contributing to Indonesia Eximbank performance improvement.

With an inclusive spirit, Indonesia Eximbank encourages all employees to embrace an attitude of respecting differences and upholding the Human Rights of each individual, thus creating a discrimination-free and zero-bullying work environment. We believe that every organization is responsible for respecting

berkontribusi memberikan dampak positif terhadap HAM.

LPEI memastikan keberagaman di Lembaga terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari tidak adanya laporan terkait insiden, dan/atau tuntutan atas kasus diskriminasi atau *bullying* atau pelecehan yang dilayangkan oleh pegawai kepada LPEI selama pelaporan 2023.

Kesempatan Bekerja dan Berkarier yang Setara bagi Seluruh Karyawan

Merangkul Keberagaman Dengan Membuka Lapangan Kerja Yang Seluas-Luasnya Bagi Masyarakat

LPEI memperlakukan setiap pegawai dengan setara tanpa adanya tindakan diskriminasi suatu suku, ras, agama, ataupun gender dalam pengelolaan karyawan. Kami percaya bahwa dengan merangkul orang-orang dari berbagai latar belakang dan keragaman akan memperkuat organisasi LPEI dalam banyak hal.

Komitmen Lembaga untuk mendorong lingkungan kerja yang inklusif, atau yang kemudian dikenal sebagai *Diversity, Equity, dan Inclusivity* (DEI), terus berkembang selama beberapa tahun terakhir. Kami percaya bahwa organisasi yang menghargai diversitas dan inklusif didorong oleh keberadaan SDM yang memiliki sikap integritas dan profesionalisme tinggi serta mempunyai *mindset* terbuka untuk saling bekerja dalam merealisasikan target-target kinerja secara maksimal sehingga dapat diperoleh hasil bisnis yang lebih baik. Atas kesadaran akan hal ini, LPEI konsisten melakukan berbagai inisiatif untuk merajut dan membangun budaya kerja yang inklusif sebagai salah satu langkah penting untuk menciptakan tim yang kuat dan produktif.

Komitmen LPEI dalam membangun budaya kerja yang inklusif sudah dilakukan sejak tahap pencarian karyawan baru. Dalam menjaring talenta-talenta terbaik, LPEI memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat mengikuti proses rekrutmen karyawan yang diselenggarakan secara terbuka oleh Lembaga. Dengan berpegang pada prinsip inklusivitas, LPEI memiliki peluang dan kesempatan besar untuk mendapatkan kandidat karyawan terbaik yang memiliki kompetensi unggul dan berdaya saing tinggi.

Human Rights, and every employee has the ability to contribute positively to Human Rights.

Indonesia Eximbank ensures that diversity within the institution is well maintained. This is reflected in the absence of reports regarding incidents, claims of discrimination, bullying, or harassment filed by employees against LPEI during the reporting period of 2023.

Equal Employment and Career Opportunities for All Employees

Embracing Diversity by Providing Job Opportunities for the Community

Indonesia Eximbank treats every employee equally without discrimination based on ethnicity, race, religion, or gender in employee management. We believe that embracing people from various backgrounds and diversities will strengthen Indonesia Eximbank in many ways.

The Institution's commitment to promoting an inclusive work environment, or what is later known as Diversity, Equity, and Inclusivity (DEI), has been evolving over the past few years. We believe that organizations valuing diversity and inclusivity are driven by the presence of human resources with high integrity and professionalism, as well as an open mindset to work together to achieve performance targets optimally, resulting in better business outcomes. Recognizing this, Indonesia Eximbank consistently undertakes various initiatives to weave and build an inclusive work culture as a crucial step towards creating a strong and productive team.

Indonesia Eximbank commitment to building an inclusive work culture begins from the stage of recruiting new employees. In attracting the best talents, Indonesia Eximbank provides opportunities as widely as possible for the community to participate in the recruitment process conducted openly by the Institution. Adhering to the principle of inclusivity, Indonesia Eximbank has a significant opportunity to acquire the best candidates with excellent competencies and high competitiveness.

Dukungan terhadap Pengembangan Karier Pegawai dan Penguatan Pemimpin Wanita di Lembaga

Implementasi kebijakan kepegawaian diatur untuk memastikan objektivitas dan kesetaraan dalam pelaksanaannya. Seluruh kebijakan kepegawaian menginduk pada Peraturan Perusahaan sebagaimana PDE No. 0001/PDE/03/2022. Pada pelaksanaannya, prinsip kesetaraan tidak hanya berlaku pada tahapan rekrutmen karyawan, melainkan juga diintegrasikan pada praktik manajemen SDM sehingga dapat terwujud aktivitas pengelolaan pegawai yang bebas dari stigma dan diskriminasi, mulai dari rekrutmen, kesempatan menjajaki jenjang karier, hingga kompensasi.

Support for Employee Career Development and Strengthening Women Leaders in the Institution

The implementation of employment policies is regulated to ensure objectivity and equality in its execution. All employment policies are based on the Company Regulations as per PDE No. 0001/PDE/03/2022. In practice, the principle of equality not only applies to the employee recruitment stage but is also integrated into HR management practices to achieve stigma-free and discrimination-free employee management activities, from recruitment, career advancement opportunities to compensation.

LPEI memberikan kesempatan berharga bagi pertumbuhan profesional pegawai melalui program pengembangan karier yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja setiap individu dan bukan karena keberpihakan terhadap kelompok atau etnis tertentu. Melalui program ini, LPEI berupaya memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada setiap pegawai untuk terus tumbuh dan berkembang di tengah organisasi Lembaga.

Indonesia Eximbank provides valuable opportunities for employee professional growth through career development programs based on individual performance assessments rather than favoring specific groups or ethnicities. Through this program, Indonesia Eximbank endeavors to provide equal opportunities to all employees for continuous growth and development within the organization.

Dalam hal praktik kesetaraan gender, LPEI telah mengupayakan berbagai inisiatif kesetaraan peluang bagi perempuan yang tercermin dari konsistensi rasio keseimbangan gender terutama pada posisi *leaders* yang mencapai 33% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa LPEI mempromosikan kesetaraan dan keragaman gender dalam posisi kepemimpinan. Komitmen ini memastikan bahwa berbagai perspektif terwakili dalam proses pengambilan keputusan, yang berujung pada hasil bisnis yang lebih baik dan masa depan yang lebih berkelanjutan.

Regarding gender equality practices, Indonesia Eximbank has made various efforts to provide equal opportunities for women, as reflected in the consistent increase in the gender balance ratio, especially in leadership positions of 33% in 2023. This indicates that Indonesia Eximbank promotes gender equality and diversity in leadership positions. This commitment ensures that various perspectives are represented in decision-making processes, resulting in better business outcomes and a more sustainable future.

Menghadirkan Lingkungan Kerja yang Ramah bagi Disabilitas

LPEI memastikan setiap pegawai memiliki hak dan kesempatan yang setara tanpa adanya perlakuan diskriminasi, itulah sebabnya Lembaga terus mengupayakan lingkungan kerja yang inklusif bagi semua pegawainya, dan tentunya kesadaran ini dimulai dari para *Leaders* (level manajerial).

Creating a Disability-Friendly Work Environment

Indonesia Eximbank ensures that every employee has equal rights and opportunities without discrimination. Therefore, the Institution continues to strive for an inclusive work environment for all its employees, and this awareness starts from the Leaders (managerial level).

Selain menaruh *concern* pada aspek kesempatan gender, LPEI turut memastikan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan beberapa posisi khusus bagi pegawai *difable*. Kami berkomitmen untuk menghormati individualitas dan kontribusi unik yang diberikan dari setiap pegawai

In addition to addressing gender equality, Indonesia Eximbank also ensures inclusivity for people with disabilities by providing several specific positions for disabled employees. We are committed to respecting the individuality and unique contributions of each employee and ensuring that every employee

serta memastikan bahwa setiap pegawai berhak untuk bekerja sebagai diri mereka secara utuh dan autentik. Para *leaders* mendorong semua pegawai di bawahnya agar selalu memegang teguh sikap profesional dalam bekerja dan berkolaborasi dengan teman penyandang disabilitas.

has the right to work as their whole and authentic selves. Leaders encourage all employees under their supervision to uphold a professional attitude in working and collaborating with colleagues with disabilities.

Keterbukaan LPEI terhadap keberagaman latar belakang pegawai memungkinkan semua pihak untuk dapat meningkatkan potensi kariernya di organisasi.

Indonesia Eximbank openness to diversity in employee backgrounds allows everyone to enhance their career potential within the organization.

Profil Pegawai berdasarkan Gender

Per 31 Desember 2023, demografi pegawai LPEI menunjukkan bahwa representasi pegawai pria masih mendominasi sebagaimana tercermin dari komposisi 57,2% pria dan 42,8% perempuan. Selain menilik aspek gender, keberagaman lain yang dirajut dengan baik di Lembaga juga dapat dilihat dari distribusi pemeluk agama Islam (83%), Kristen Protestan (10%), Katholik (5%), Hindu (2%) dan Budha (1%), sementara jumlah pegawai penyandang disabilitas masih kurang dari 2% terhadap keseluruhan total pegawai.

Employee Profile based on Gender

As of 31 December 2023, the demographic composition of Indonesia Eximbank employees shows that male employees still dominate, with a composition of 57.2% men and 42.8% women. Besides gender aspects, other well-woven diversities in the Institution can also be seen from the distribution of Moeslem (83%), Protestant Christians (1%), Catholics (5%), Hindus (2%), and Buddhists (10%). Meanwhile, the number of employees with disabilities is still less than 2% of the total number of employees.

Komposisi Pegawai berdasarkan Gender [405-1]
Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin Gender	2023		2022	
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition
Laki-laki (L) Male	322	57,2%	327	59,6%
Perempuan (P) Female	241	42,8%	222	40,4%
Jumlah Total	**563**	**100,0%**	**549**	**100,0%**

Komposisi Jabatan Manajemen Puncak berdasarkan Umur & Gender [405-1]
Composition of Top Management Position by Age & Gender

Usia Age	2023				2022			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Composition	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Composition
31-40 tahun | years old	-	-	-	-	-	-	-	-
40 tahun | years old	7	3	10	100%	7	3	10	10,0%
Jumlah Total	**7**	**3**	**10**	**100%**	**7**	**3**	**10**	**100,0%**

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Jabatan dan Gender [2-8, 405-1]
Employee Composition by Level of Position and Gender

Level	2023				2022			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Composition	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Komposisi Composition
Senior Executive Vice President	4	2	6	1,1%	5	2	7	1,2%
Kepala Divisi/ Kepala Kantor Wilayah Head of Division/ Head of Regional Office	24	14	38	6,7%	29	15	44	8,01%
Kepala Departemen Head of Department	76	34	110	19,5%	78	35	113	20,5%
Eksekutif Executive	145	99	244	43,3%	146	87	232	42,2%
Pelaksana Managing Executive	73	92	165	29,3%	68	83	149	28,1%
Pegawai MPP MPP Employee	0	0	0	0,0%	1	0	1	0,01%
Jumlah Total	**322**	**241**	**563**	**100,0%**	**327**	**222**	**549**	**100,0%**

Komitmen LPEI untuk mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif dengan mengimplementasikan nilai inti DEI tampak pada komposisi jajaran manajemen puncak, dan komposisi pegawai menurut jenjang jabatan berikut. Sementara data demografi pegawai menurut usia, tingkat pendidikan, status ketenagakerjaan, lokasi kerja, masa kerja dan sebagainya dapat dilihat pada bagian "Profil Perusahaan". [405-1]

Indonesia Eximbank commitment to creating an inclusive work environment by implementing the core values of DEI is evident in the composition of the top management team, and the composition of employees according to job levels. Meanwhile, demographic data on employees by age, level of education, employment status, work location, length of service, and so forth can be seen in the "Company Profile" section. [405-1]

Kepatuhan terhadap Praktik Kerja tanpa Tenaga Kerja Anak Tenaga Kerja Paksa [F.19]

Sebagai sebuah entitas usaha yang pengelolaan bisnisnya berlandaskan pada praktik korporasi sehat, LPEI memastikan praktik ketenagakerjaan yang diterapkan di Lembaga senantiasa mematuhi ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta mengacu pada regulasi lainnya yang relevan.

Compliance with Labor Practices without Child Labor Forced Labor [F.19]

As a business entity whose business management is based on healthy corporate practices, Indonesia Eximbank ensures that the employment practices implemented in the institution always comply with the provisions of Law No. 13 of 2003 Article 77 concerning Employment in conjunction with Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation, and referring to other relevant regulations.

Dengan berpedoman pada regulasi yang ada, LPEI merumuskan dan menerapkan kebijakan internal terkait batas usia pelamar dan waktu bekerja bagi pegawai untuk menghindari terjadinya praktik tenaga kerja anak dan kerja paksa di lingkungan LPEI.

Guided by existing regulations, Indonesia Eximbank formulates and implements internal policies regarding the age limit for applicants and working hours for employees to avoid practices of child labor and forced labor within the institution.

Sebagaimana diatur dalam PDE No. 0028/PDE/05/2019 tentang Penerimaan Pegawai LPEI, khususnya pada Pasal 8 "Persyaratan Kandidat Pegawai", ditetapkan

As stipulated in PDE No. 0028/PDE/05/2019 on LPEI Employee Recruitment, specifically in Article 8 "Employee Candidate Requirements", it is stipulated

bahwa batas usia minimum pelamar atau kandidat pegawai LPEI adalah 21 tahun. Pada pasal tersebut juga dijelaskan lebih lanjut mengenai tata waktu bekerja, istirahat, dan hak cuti pegawai. Sampai hari ini, LPEI menerapkan jam kerja fleksibel bagi semua pegawai agar setiap individu bisa menentukan waktu terbaiknya untuk bekerja sehingga pekerjaan bisa selesai dengan optimal. Namun pada praktiknya, apabila ditemukan adanya pegawai yang karena suatu hal diharuskan bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan berhak atas kompensasi upah lembur sesuai dengan kebijakan yang berlaku di internal LPEI. Kebijakan mengenai bantuan lembur bagi pegawai telah diatur pada PDE No.0055/PDE/11/2019 tentang Remunerasi Pegawai pada pasal 35-37.

that the minimum age limit for applicants or candidates for Indonesia Eximbank employees is 21 years old. The article also further explains the working hours, breaks, and employee leave rights. To this day, Indonesia Eximbank implements flexible working hours for all employees so that each individual can determine the best time to work so that work can be completed optimally. However, in practice, if an employee is required to work beyond the specified working hours for any reason, they are entitled to overtime compensation in accordance with the applicable policies within Indonesia Eximbank. The policy regarding overtime assistance for employees has been regulated in PDE No. 0055/PDE/11/2019 concerning Employee Remuneration in articles 35-37.

Penerbitan aturan dan pedoman internal yang jelas mengenai jam kerja merupakan wujud komitmen dalam menghormati hak-hak pekerja. Dengan berpedoman pada regulasi yang ada, LPEI menjamin tidak ada pekerja anak ataupun praktik kerja paksa di lingkungan kerjanya.

The issuance of clear internal rules and guidelines regarding working hours is a manifestation of commitment to respecting workers' rights. Guided by existing regulations, Indonesia Eximbank ensures that there is no child labor or forced labor in its work environment.

Pemberian Tunjangan dan Remunerasi yang Adil bagi Semua Pegawai

LPEI mengapresiasi kinerja dan prestasi pegawai melalui penerapan sistem remunerasi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua pegawai dengan mengadopsi pendekatan *Merit Based* dan *Performance Based System,* yaitu penentuan upah dan bonus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, golongan pegawai *(personal grading),* kelompok jabatan *(job group),* golongan jabatan *(job grading),* masa kerja pegawai dan/atau masa memangku jabatan secara adil (*internally fair*), serta diterapkan secara wajar tanpa membedakan latar belakang politik, agama, ras, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, usia dan kondisi kesehatan.

Provision of Fair Benefits and Remuneration for All Employees

Indonesia Eximbank appreciates employee performance and achievements through the implementation of a remuneration system that upholds the principles of fairness and equality for all employees by adopting a Merit-Based and Performance-Based System approach. This entails determining wages and bonuses based on qualifications, competencies, performance, employee grade, job group, job grade, length of service, and/or tenure in a fair manner (internally fair), and applied reasonably without discriminating against political background, religion, race, origin, gender, marital status, age, and health conditions.

Penerapan kebijakan remunerasi yang kompetitif di LPEI bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan hidup para pegawai, meningkatkan motivasi dan keterikatan (*engagement*) pegawai, serta sebagai salah satu strategi untuk menarik minat calon karyawan dan mempertahankan pegawai loyal yang telah banyak memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Lembaga.

The implementation of a competitive remuneration policy at Indonesia Eximbank aims to help improve the welfare of employees, enhance motivation and engagement, and serve as one of the strategies to attract potential employees and retain loyal employees who have made significant contributions to the institution's progress.

Dasar kebijakan yang menjadi landasan dalam menentukan skema dan besaran paket remunerasi pegawai LPEI adalah regulasi internal berikut ini:

The policy basis that serves as the foundation for determining the scheme and amount of employee remuneration packages at Indonesia Eximbank includes the following internal regulations:

1) PDE No. 0001/03/2022 tentang Kebijakan Kepegawaian;
2) PDE No. 0055/PDE/11/2019 tentang Remunerasi Pegawai;
3) PDE No. 158/PDE/11/2019 tentang Penetapan Remunerasi Pegawai; dan
4) PDE No. 0056/PDE/11/2019 tentang Sistem Gaji Pokok Pegawai.

Sebagaimana diatur dalam kebijakan internal Lembaga, komponen remunerasi dan fasilitas bagi pegawai diberikan dalam bentuk kompensasi tetap, penghasilan lainnya, manfaat, dan fasilitas. Terdapat perbedaan signifikan dalam paket remunerasi yang diberikan kepada pegawai LPEI dengan pegawai *outsourcing* (Tenaga Alih Daya/"TAD"). Paket remunerasi pegawai LPEI di atas normatif yaitu 16 kali gaji *fixed* dalam setahun, sementara paket remunerasi pegawai *outsourcing* (tenaga alih daya) sesuai normatif adalah 13 kali gaji *fixed* dalam setahun. Hal ini dikarenakan pegawai TAD secara *de jure* adalah pegawai Koperasi LPEI sementara pegawai tetap adalah pegawai LPEI yang masing-masing mengikuti ketentuan remunerasi institusi yang menaunginya.

Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang berkinerja tinggi dan produktif, LPEI menerapkan kebijakan *performance rewards* dalam memberikan remunerasi pegawai. Namun demikian LPEI juga menyediakan skema remunerasi dan benefit lain yang berbentuk *variable pay* untuk mendukung pencapaian bisnis bagi pegawai tetap dan pegawai kontrak sebagaimana diilustrasikan dalam tabel berikut: [401-2]

1) PDE No. 0001/03/2022 concerning Personnel Policy;
2) PDE No. 0055/PDE/11/2019 concerning Employee Remuneration;
3) PDE No. 158/PDE/11/2019 concerning Determination of Employee Remuneration; and
4) PDE No. 0056/PDE/11/2019 concerning Employee Basic Salary System.

As stipulated in the institution's internal policy, remuneration components and facilities for employees are provided in the form of fixed compensation, other income, benefits, and facilities. There is a significant difference in the remuneration packages provided to Indonesia Eximbank employees compared to outsourced employees (Contracted Labor/"CL"). The normative remuneration package for Indonesia Eximbank employees is 16 times the fixed salary per year, while the normative remuneration package for outsourced employees (contracted labor) is 13 times the fixed salary per year. This is because CL employees de jure are employees of the Indonesia Eximbank Cooperative, while permanent employees are Indonesia Eximbank employees, each following the remuneration provisions of the institution they belong to.

In an effort to create a high-performance and productive work environment, Indonesia Eximbank implements performance rewards policies in remunerating employees. However, Indonesia Eximbank also provides remuneration and other benefit schemes in the form of variable pay to support business achievements for both permanent and contract employees, as illustrated in the following table: [401-2]

Rasio Perbandingan Standar Upah Karyawan Terendah terhadap UMR
Comparison Ratio of Lowest Employee Salary Standard to UMR

Wilayah Operasional Operational Area	**Provinsi** Daerah	**Rata-Rata UMR Tahun 2023** Average minimum wage in 2023	**Gaji Karyawan Golongan Terendah** Lowest Employee Salary			
			Tetap Permanent	**Rasio %** Ratio %	**Kontrak** Contract	**Rasio %** Ratio %
Jakarta	DKI Jakarta	Rp4.900.798	Rp7.500.000	1 : 1,53	Rp7.450.000	1 : 1,52
Medan	Sumatera Utara North Sumatra	Rp2.710.493	Rp13.833.082	1 : 5,10	Rp13.162.500	1 : 4,86
Surabaya	Jawa Timur East Java	Rp2.040.244	Rp13.104.713	1 : 6,42	Rp8.400.000	1 : 4,12
Makassar	Sulawesi Selatan South Sulawesi	Rp3.385.145	Rp14.186.998	1 : 4,19	Rp13.162.500	1 : 3,89
Surakarta	Jawa Tengah Central Java	Rp1.958.169	Rp13.392.062	1 : 6,84	Rp13.162.500	1 : 6,72
Balikpapan	Kalimantan Timur East Kalimantan	Rp3.251.702	Rp13.460.539	1 : 4,14	Rp13.162.500	1 : 4,05
Batam	Kepulauan Riau Riau Island	Rp3.279.194	Rp12.954.140	1 : 3,95	Rp13.162.500	1 : 4,01
Denpasar	Bali	Rp2.713.672	Rp13.224.986	1 : 4,87	-	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa LPEI mematuhi regulasi UMR dan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di masing-masing area operasional dengan memberikan besaran imbal jasa yang melebihi standar UMR baik bagi pegawai tetap ataupun pegawai kontrak pada posisi *entry level*. Sebagai wujud penerapan kesetaraan, sistem remunerasi LPEI juga memastikan tidak ada disparitas dalam hal pemberian remunerasi baik bagi pegawai laki-laki maupun perempuan. [405-2]

Based on the table above, it can be seen that Indonesia Eximbank complies with the regulations of the Regional Minimum Wage (UMR) and Provincial Minimum Wage (UMP) applicable in each operational area by providing remuneration amounts that exceed the UMR standards for both permanent and contract employees at entry-level positions. As a manifestation of equality, Indonesia Eximbank remuneration system also ensures there is no disparity in remuneration between male and female employees. [405-2]

Kebijakan remunerasi LPEI dikaji ulang secara berkala untuk memastikan remunerasi yang diterima para pegawai dan manajemen masih relevan dan berdaya saing jika dibandingkan dengan pasar. Hingga tahun 2023, kebijakan tersebut masih relevan dan belum perlu dilakukan perbaikan.

Indonesia Eximbank remuneration policy is periodically reviewed to ensure that the remuneration received by employees and management remains relevant and competitive compared to the market. Until the end of 2023, the policy remains relevant and does not require any adjustments.

Penyesuaian Remunerasi Tahun 2023

Pada tahun 2023, LPEI tidak melakukan penyesuaian tahunan terhadap gaji pokok pegawai karena skema remunerasi yang diberikan masih dinilai kompetitif di pasar tenaga kerja. Selain itu, LPEI juga tidak membagikan Jasa Produksi untuk tahun buku 2022 kepada para pegawai.

Remuneration Adjustment for 2023

In 2023, Indonesia Eximbank did not make annual adjustments to employees' base salaries because the remuneration scheme provided was still considered competitive in the labor market. Additionally, Indonesia Eximbank did not distribute Production Services for the 2022 fiscal year to its employees.

Akan tetapi sehubungan dengan adanya mutasi terhadap 28 pegawai di 2023, maka LPEI melakukan penyesuaian remunerasi akibat mutasi sesuai dengan PDE No. 0056/PDE/11/2019 tentang Sistem Gaji Pokok.

However, due to the mutation of 28 employees in 2023, Indonesia Eximbank made remuneration adjustments due to mutation in accordance with HRD Circular No. 0056/PDE/11/2019 concerning the Basic Salary System.

Pemenuhan Hak-Hak Karyawan dan Pemberian Tunjangan

LPEI memastikan keberadaannya sebagai entitas bisnis tidak hanya bertujuan untuk menciptakan nilai ekonomi yang sebesar-besarnya bagi pemegang saham, melainkan juga berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup para pegawai. Sebagai bentuk timbal balik atas kerja keras dan kinerja yang telah ditunjukkan oleh para pegawai, LPEI tidak hanya memastikan pemberian remunerasi berupa gaji pokok dan tunjangan keuangan yang melampaui standar UMP dan UMR, akan tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak normatif karyawan baik yang bersifat kewajiban ataupun hak lain-lain yang sifatnya di luar kewajiban.

Fulfillment of Employee Rights and Provision of Benefits

Indonesia Eximbank ensures that its existence as a business entity is not solely aimed at creating maximum economic value for shareholders, but also contributes positively to improving the quality of life and well-being of its employees. As a reciprocal gesture for the hard work and performance demonstrated by employees, Indonesia Eximbank not only ensures the provision of remuneration in the form of base salaries and financial allowances that exceed the UMP and UMR standards but also guarantees the fulfillment of normative rights of employees, both obligatory and other rights beyond obligations.

LPEI memberikan tunjangan non-keuangan dan fasilitas lainnya kepada pegawai untuk menjaga motivasi mereka dalam meningkatkan kinerja dan mempertahankan loyalitas talenta-talenta terbaik terhadap perusahaan, sehingga pada akhirnya juga berkontribusi positif dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas LPEI secara keseluruhan.

Indonesia Eximbank provides non-financial allowances and other facilities to employees to maintain their motivation in enhancing performance and retaining the loyalty of the best talents to the company, thereby ultimately contributing positively to improving the overall performance and productivity of Indonesia Eximbank.

Berikut ini adalah daftar tunjangan yang diberikan kepada pegawai LPEI baik yang berstatus pegawai tetap ataupun kontrak:

The following is a list of allowances provided to Indonesia Eximbank employees, whether they are permanent or contract employees:

Paket Remunerasi bagi Pegawai LPEI
Remuneration Package for Indonesia Eximbank Employees

Komponen Component	**Karyawan Tetap** Permanent Employee	**Karyawan Kontrak** Contract Employee
Upah Wages	**Upah Pokok + Tunjangan Tetap** Basic Salary + Fix Allowance	**Upah Pokok** Basic Salary
Tunjangan Tidak Tetap (Insentif Bulanan): Non-fixed Allowances (Monthly Incentive) Consist of:		
a) Tunjangan Frontline Frontline Allowance	✓	✓
b) Tunjangan Cuti Leave allowances	✓	✓
c) Upah Lembur & Makan Lembur Overtime Pay & Overtime Meal	✓	✓
d) Program Insentif Incentive Program	✓	✓
e) Tunjangan Haji dan Umrah Hajj and Umrah Allowance	✓	✓
f) Tunjangan daerah & penugasan Regional allowances & assignments	✓	✓
g) Santunan Pernikahan/Kelahiran/Kematian Marriage/ Birth/ Death Compensation	✓	✓
h) Bantuan Biaya Pendidikan Anak Child Education Fee Assistance	✓	✓
i) Kecelakaan Kerja Work Accidents	✓	✓
j) Asuransi Kematian di Tempat Kerja & Luar Tempat Kerja Workplace & Outside Workplace Death Insurance	✓	✓
k) Asuransi Kesehatan Bagi Karyawan Health Insurance for Employees	✓	✓
l) Asuransi Kesehatan bagi Pasangan Karyawan Health Insurance for Spouse of Employee	✓	✓
m) Asuransi Kesehatan bagi Anak Karyawan Health Insurance for Children of Employees	✓	✓
n) Hak Cuti | Leave Entitlement	✓	✓
o) Cuti Melahirkan | Maternity Leave	✓	✓
p) Cuti Haid | Menstrual Leave	✓	✓
q) Cuti karena Keguguran untuk Wanita Leave for Miscarriage for Women	✓	✓
r) Cuti untuk Pria karena Kelahiran Anak Paternity Leave	✓	✓
s) Cuti Ibadah | Religious Leave	✓	✓
t) Izin Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Gaji | Unpaid Leave	✓	x
u) Program Pembiayaan Karyawan untuk Rumah dan atau Kendaraan Employee Financing Program for Home and/or Vehicle	✓	x
v) Dana Pensiun | Pension Fund	✓	x
w) Pesangon | Severance	✓	x
Insentif Tahunan: Yearly Incentive:		
a) Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	✓	✓
b) Penghargaan loyalitas Loyalty rewards	✓	x

LPEI memastikan seluruh pegawai dapat menggunakan hak-nya untuk bisa memaanfatkan tunjangan dan fasilitas yang diberikan Lembaga sesuai dengan status jabatan masing-masing. LPEI tidak menerima adanya laporan terkait ketidaksesuaian praktik pengelolaan SDM selama periode pelaporan 2023.

Indonesia Eximbank ensures that all employees can exercise their rights to be able to utilize the benefits and facilities provided by the Institution in accordance with the status of their respective positions. LPEI did not receive any reports related to non-conformity of HR management practices during the 2023 reporting period.

Perlindungan terhadap Hak-Hak Karyawan Perempuan

Melalui Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0001/PDE/03/2022 tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI menunjukkan komitmen penuhnya dalam mendukung pengembangan karier pegawai perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender di tempat kerja dengan menerapkan sejumlah kebijakan atau inisiatif yang diharapkan dapat mendorong produktivitas pegawai perempuan dan meningkatkan keterlibatan mereka sebagai *leaders* di jajaran manajemen senior. Dukungan nyata LPEI terhadap pegawai perempuan setidaknya diwujudkan melalui berbagai inisiatif kebijakan berikut ini:

a) **Cuti Melahirkan** [401-3]
Hak cuti melahirkan ditetapkan dengan mengacu kepada UU 13/2003 dan disesuaikan dengan kebutuhan LPEI sehingga dituangkan dalam PDE 0009/PDE/07/2022 tentang Waktu Kerja Pegawai pada pasal 11. LPEI memberikan hak cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan kepada pegawai perempuan dengan membayarkan remunerasi dan tunjangan secara penuh, serta menjamin penempatan kembali di posisi kerja yang dimilikinya sebelum yang bersangkutan menjalani cuti melahirkan.

Sesuai dengan kebijakan yang berlaku di LPEI, cuti melahirkan tidak mengurangi hak cuti tahunan maupun hak cuti besar pegawai yang bersangkutan, namun pengambilan hak cuti besar dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah cuti melahirkan.

Selain memberikan hak cuti bagi pegawai perempuan, LPEI juga memberikan hak cuti melahirkan ayah kepada pegawai laki-laki untuk menemani istri bersalin atau keguguran selama 2 (dua) hari, tanpa dipotong gaji. Dengan menyediakan cuti ayah yang adil dan fleksibel, LPEI menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan dan kebutuhan karyawan.

Protection of the Rights of Female Employees

Through Executive Director Regulation Number 0001/PDE/03/2022 concerning the Indonesian Export Financing Agency's Personnel System Policy, Indonesia Eximbank demonstrates its full commitment to supporting the career development of female employees and achieving gender equality in the workplace by implementing a range of policies or initiatives aimed at promoting the productivity of female employees and enhancing their involvement as leaders in senior management. Indonesia Eximbank's tangible support for female employees is at least manifested through the following policy initiatives:

a) **Maternity Leave** [401-3]
Maternity leave entitlement is established with reference to Law No. 13/2003 and adjusted to Indonesia Eximbank's needs, as reflected in Regulation No. PDE 0009/PDE/07/2022 regarding Employee Working Hours, Article 11. Indonesia Eximbank provides three (3) months of maternity leave to female employees with full payment of remuneration and benefits, and guarantees their return to their pre-leave position.

In accordance with Indonesia Eximbank's policies, maternity leave does not diminish the entitlement to annual leave or other leave rights of the employee in question; however, the use of major leave entitlements may occur no sooner than 1 (one) year after maternity leave.

In addition to providing leave rights for female employees, Indonesia Eximbank also provides paternity leave rights to male employees to accompany their wives in labor or miscarriage for 2 (two) days, without deduction of salary. By providing fair and flexible paternity leave, Indonesia Eximbank shows its commitment to the welfare and needs of its employees.

Selama tahun 2023, sebanyak 20 pegawai perempuan mengajukan cuti melahirkan dan 20 orang di antaranya atau 100% pegawai yang mengajukan cuti sudah kembali bekerja seperti sediakala setelah periode cutinya selesai. Masih di tahun yang sama, sebanyak 19 pegawai laki-laki mengajukan cuti mendampingi istri melahirkan/ keguguran dan seluruhnya (100%) sudah kembali bekerja setelah masa cuti berakhir. (401-3)

Throughout 2023, a total of 20 female employees applied for maternity leave and 20 of them or 100% of the employees who applied for leave had returned to work as before after their leave period was over. In the same year, 19 male employees applied for leave to accompany their wives in childbirth/miscarriage and all of them (100%) returned to work after the leave period ended. (401-3)

b) Cuti Haid

Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU 13 tahun 2003, LPEI memberikan hak cuti selama dua hari kepada pegawai perempuan yang selama periode haid merasakan sakit yang parah .

b) Menstrual Leave

As stipulated in Article 81 paragraph (1) of Law 13 of 2003, Indonesia Eximbank provides two days of leave to female employees who are seriously ill during their menstrual period.

c) Cuti Keguguran

Peraturan Perusahaan Pasal 42 Ayat 3-5 mengatur bahwa pegawai perempuan di LPEI berhak atas cuti keguguran yang tidak disengaja (*abortus provocatus)* atau dengan alasan medis selama 1,5 bulan terhitung dari hari kandungannya gugur atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Pada tahun 2023, LPEI telah memberikan cuti keguguran kepada 3 (tiga) pe gawai perempuan dan seluruhnya (100%) kembali bekerja menempati posisi awalnya setelah periode cuti selesai.

c) Miscarriage Leave

Company Regulation Article 42 Paragraph 3-5 stipulates that female employees at Indonesia Eximbank are entitled to unintentional miscarriage leave (abortus provocatus) or for medical reasons for 1.5 months starting from the day the pregnancy falls or in accordance with the certificate of an obstetrician or midwife. In 2023, LPEI has provided miscarriage leave to 3 (three) female employees and all of them (100%) returned to work in their initial positions after the leave period ended.

Tahun Year	**Pegawai yang berhak mengambil cuti melahirkan** Employees who are entitled to take maternity leave	**Pegawai yang mengambil cuti melahirkan** Employees who took maternity leave	**Pegawai yang kembali bekerja setelah cuti** Employees who return to work after leave	**Pegawai yang tetap bekerja 1 tahun setelah selesai cuti** Employees who continue to work 1 year after completion of leave	**Tingkat rasio Pegawai kembali bekerja setelah cuti melahirkan** Employee return-to-work rate after maternity leave
2023	241	20	20	(semua pegawai yang sudah kembali bekerja, belum genap 1 tahun dari selesainya masa cuti) *(all employees who have returned to work, not yet 1 year after the completion of the leave period)*	100%
2022	222	12	12	12	100%
2021	229	23	23	23	100%

d) Ketersediaan Ruang Laktasi

LPEI melihat pentingnya ketersediaan ruang laktasi yang nyaman di tempat kerja sebagai bentuk dukungan bagi pegawai perempuan yang masih dalam masa menyusui. Dengan adanya fasilitas ini, kami berharap para pegawai perempuan yang bekerja di LPEI dapat menjaga keseimbangan peran sebagai ibu yang berkewajiban memberikan ASI kepada bayi-nya serta juga di saat yang bersamaan tetap dapat menjalankan *role* profesional sebagai pegawai.

d) Availability of Lactation Room

Indonesia Eximbank recognizes the importance of providing a comfortable lactation room in the workplace as a form of support for female employees who are still breastfeeding. With this facility in place, we hope that female employees working at Indonesia Eximbank can maintain a balance between their roles as mothers, obligated to provide breast milk to their babies, and simultaneously fulfill their professional roles as employees.

Membangun Hubungan Industrial yang Harmonis [2-30]

LPEI menekankan pentingnya menjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan dengan seluruh pegawai agar dinamika dan keberlangsungan usaha Lembaga tetap terjaga. Hubungan industrial yang dibangun di LPEI dilandasi oleh semangat para pihak untuk memberikan yang terbaik bagi pegawai maupun Lembaga.

Agar senantiasa tercipta suasana kerja yang kondusif, LPEI menanamkan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pegawai di lingkungan kerja. Hubungan industrial di LPEI dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip kesetaraan, kewajaran, rasa keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan. LPEI juga memberikan pemahaman mendalam terhadap harapan para pegawai dan menunjukkan komitmen penuh dalam mengeksekusi berbagai kesepakatan yang melandasi hubungan kerja sama dengan jajaran insan Lembaga.

Untuk memfasilitasi terjalinnya hubungan kerja yang baik, LPEI menetapkan Peraturan Perusahaan LPEI (secara internal disebut Peraturan Direktur Eksekutif tentang Kebijakan Sistem Kepegawaian) yang terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 284/PHIJSK-PK/PP/II/2020 tanggal 20 Februari 2020. Seluruh (100%) karyawan LPEI tercakup dalam Peraturan Perusahaan dimaksud.

Dalam Peraturan Perusahaan LPEI disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan terkait ketenagakerjaan atau sengketa hubungan kerja yang terjadi antara Lembaga dan pegawai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mengutamakan penyelesaian secara bipartit/internal perusahaan tanpa melibatkan pihak ketiga.

Dengan terjalinnya hubungan kemitraan yang harmonis dan saling meguntungkan antara Lembaga dan pegawai, LPEI berharap risiko perselisihan dan konflik terkait ketenagakerjaan dapat dikelola dengan baik. Upaya ini juga dilakukan untuk membangun kepercayaan yang berkelanjutan serta menciptakan *value* bagi pegawai LPEI.

Membangun Lingkungan Kerja yang Kondusif [407-1]

LPEI terus berupaya menghadirkan lingkungan kerja yang kondusif dengan menjalin komunikasi

Building Harmonious Industrial Relations [2-30]

Indonesia Eximbank emphasizes the importance of maintaining harmonious and sustainable industrial relations with all employees to ensure the dynamics and continuity of the institution's operations. The industrial relations established at Indonesia Eximbank are based on the commitment of all parties to provide the best for both employees and the institution.

To consistently create a conducive work environment, Indonesia Eximbank instills the principle of mutual respect for the rights and obligations of each employee in the workplace. Industrial relations at Indonesia Eximbank are conducted based on principles of equality, fairness, justice, and human values. Indonesia Eximbank also deeply understands the expectations of its employees and demonstrates full commitment to executing various agreements that underpin collaborative relationships with the institution's workforce.

To facilitate good working relationships, Indonesia Eximbank has established the Indonesia Eximbank Company Regulations (internally referred to as the Executive Director's Regulation on Personnel System Policy), which is registered and approved by the Indonesian Ministry of Manpower through Decree of the Director General of Industrial Relations and Social Security No. Kep. 284/PHIJSK-PK/PP/II/2020 dated February 20, 2020. All (100%) Indonesia Eximbank employees are covered by these Company Regulations.

The Indonesia Eximbank Company Regulations state that in the event of labor disputes or employment relationship disputes between the institution and employees, resolution shall be conducted through a process in accordance with legal provisions, prioritizing bipartite/internal company resolutions without involving third parties.

With the establishment of harmonious and mutually beneficial partnerships between the institution and its employees, Indonesia Eximbank hopes to effectively manage the risks of labor disputes and conflicts. These efforts are also made to build sustainable trust and create value for Indonesia Eximbank employees.

Building a Conducive Work Environment [407-1]

Indonesia Eximbank continues to strive to create a conducive work environment by fostering effective

timbal balik yang efektif bersama para pegawai, serta melalui penerapan hubungan industrial yang bermartabat. Berikut ini adalah sejumlah kebijakan dan inisiatif kegiatan yang secara konsisten dilakukan LPEI dalam rangka membangun hubungan industrial yang bermartabat pada kerangka *social co-creation*:

1. Menerapkan proses seleksi sesuai dengan budaya kerja LPEI, standar kompetensi, standar kesehatan dan standar remunerasi.
2. Welcoming Pegawai Baru melalui email dan memberikan informasi awal mengenai LPEI, bisnis LPEI, Buddy dan HRBP-nya.
3. Menginformasikan Pegawai Baru melalui *e-mail* HR Information.
4. Menyambut Pegawai Baru pada hari pertama *on-board*.
5. Memastikan ketersediaan fasilitas kerja di hari pertama.
6. Memberikan HR *Briefing session* agar Pegawai Baru memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan prosedur Kepegawaian serta bagaimana proses penilaian kinerja selama masa percobaan dan masa kontrak (bila ada) termasuk tips-tips selama masa transisi.
7. Memastikan *handover* Pegawai Baru kepada Buddy dan Atasannya berjalan dengan baik termasuk mengingatkan agar dapat membantu Pegawai Baru selama masa transisi.
8. Memastikan Pegawai Baru memiliki nomor kontak HRBP sebagai *first solution* atas masalah Kepegawaian.
9. Mendorong *Community Minded at Work* dengan memperkenalkan Pegawai Baru pada lingkungan kantor dan fasilitas kantor (termasuk *Gym Room* dan Komunitas *Hobby* Pegawai) serta memperkenalkan Pegawai Baru kepada Pegawai-pegawai yang ada.
10. Memastikan seluruh Pegawai telah menyelesaikan *New Hire Orientation Program*, menerima *certificate* Pakta Integritas dan Budaya Kerja yang dikelola oleh Tim HRD.
11. Memastikan Pegawai mengetahui *Whistle Blowing System* yang dikelola oleh Tim KPT.
12. Menyebarkan keterbukaan atas segala informasi terkait dengan Kepegawaian pada kanal-kanal informasi internal seperti *e-mail*, internal portal, Great Day dan WhatsApp Group.
13. Memastikan kesempatan terbuka bagi seluruh Pegawai untuk mendapatkan *self development* melalui program terstruktur (pelatihan dan pengembangan serta *Mentoring*) dan juga tidak

two-way communication with employees, as well as through the implementation of dignified industrial relations. The following are a number of policies and activity initiatives consistently undertaken by Indonesia Eximbank in order to build dignified industrial relations within the framework of social co-creation:

1. Implement selection process in accordance with Indonesia Eximbank corporate culture, competency standards, health standards and remuneration standards.
2. Welcoming New Employees via email and providing initial information about Indonesia Eximbank, Indonesia Eximbank business, their Buddy, and HRBP.
3. Informing New Employees via HR Information e-mail.
4. Welcoming New Employees on the first day on-board.
5. Ensuring the availability of workplace facilities on the first day.
6. Providing an HR Briefing session so that New Employees have knowledge and understanding of the Personnel processes and procedures, as well as how performance evaluations work during the probationary period and contract period (if applicable), including tips during the transition period.
7. Ensuring a smooth handover of New Employees to their Buddy and Supervisor, including reminding them to assist New Employees during the transition period.
8. Ensuring New Employees have the HRBP contact number as the first solution for personnel issues.
9. Encouraging Community Minded at Work by introducing New Employees to the office environment and facilities (including the Gym Room and Employee Hobby Communities) and introducing them to existing Employees.
10. Ensuring all Employees have completed the New Hire Orientation Program, received the Integrity Pact and Work Culture certificate managed by the HRD Team.
11. Ensuring Employees are aware of the Whistleblowing System managed by the KPT Team.
12. Disseminating openness regarding all personnel-related information through internal communication channels such as email, internal portal, Great Day, and WhatsApp Group.
13. Ensuring open opportunities for all Employees to undergo self-development through structured programs (training and development, as well as

terstruktur melalui program webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Tim TFO.

14. Memastikan Pegawai telah melengkapi Rencana Kinerja Individu-nya melalui metode 1 *on* 1 *session* atau diskusi dengan atasannya sehingga membangun keterbukaan dan komitmen kedua belah pihak.
15. Menyediakan retensi program terutama bagi Pegawai bertalenta atau yang berada di Position At Risk (*critical*).
16. Memberikan kesempatan terbuka bagi pegawai yang ingin meningkatkan kinerjanya melalui program *Performance Improvement Plan* dan *Mentoring* yang dikelola oleh Tim HRD. Dalam program ini, Pegawai memiliki kesempatan untuk *Speak Up* mengenai karir dan aspirasinya.
17. Memberikan kesempatan jalur karir melalui skema *promotion from within* (*promotion* dan *internal job posting*).
18. Mendorong terjadi Collaboration at Work melalui pembentukan *Task Force* dalam beberapa *project* lintas Divisi.
19. Selama pandemi, menerapkan *hybrid working arrangement* dimana Pegawai tetap bisa melakukan kerja produktif dari Rumah dan dari Kantor dengan pengaturan jadwal hari kerja sehingga Pegawai merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas.
20. Memberikan perhatian khusus bagi Pegawai yang terkonfirmasi positif Covid, yang sedang sakit atau yang sedang berduka.
21. Mendorong pegawai untuk berpartisipasi dalam penerapan *Green Office* seperti membawa tanaman di tempat kerja dan mengikuti lomba-lomba yang ada.
22. Menyelenggarakan *Employee Engagement Survey* agar bisa menangkap isu-isu sosial di lingkungan kerja, termasuk memperkuat peran HRBP sebagai *partner* bisnis dan pegawai.

mentoring) and unstructured programs such as webinars organized by the TFO Team.

14. Ensuring Employees have completed their Individual Performance Plan through 1-on-1 sessions or discussions with their supervisors to build openness and commitment from both parties.
15. Providing retention programs, especially for talented Employees or those in critical positions at risk.
16. Providing open opportunities for Employees who want to improve their performance through the Performance Improvement Plan and Mentoring programs managed by the HRD Team. In this program, Employees have the opportunity to Speak Up about their career and aspirations.
17. Providing career advancement opportunities through the promotion from within scheme (promotion and internal job posting).
18. Encouraging Collaboration at Work through the formation of Task Forces in cross-divisional projects.
19. During the pandemic, implementing a hybrid working arrangement where Employees can still work productively from home and from the office with scheduled workdays, so Employees feel safe and comfortable in their activities.
20. Providing special attention to Employees who have tested positive for Covid, are ill, or are grieving.
21. Encouraging Employees to participate in the implementation of Green Office practices such as bringing plants to the workplace and participating in competitions.
22. Conducting an Employee Engagement Survey to capture social issues in the workplace, including strengthening the role of HRBP as a business partner and employee.

2023

Buah dari komitmen dan konsistensi LPEI dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif tercermin dari nihil perkara atau sengketa Hubungan Industrial antara Lembaga dengan para pegawai.

The results of Indonesia Eximbank's commitment and consistency in creating a conducive work environment are reflected in the zero Industrial Relations cases or disputes between the Institution and its employees.

Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health Aspects

Komitmen Menghadirkan Lingkungan Kerja yang Sehat, Aman, dan Nyaman

Aspek kesehatan dan kesejahteraan pegawai diyakini menjadi salah satu komponen penting yang membentuk lingkungan kerja dan organisasi yang sehat. Karena itu, LPEI berkomitmen penuh untuk mematuhi ketentuan Pemerintah melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bagi para pegawai, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

LPEI berkeyakinan bahwa pegawai yang sehat secara mental dan fisik adalah kunci untuk mendukung efektivitas kegiatan operasional dan mendorong produktivitas kinerja Lembaga. Karena itu, LPEI senantiasa menempatkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian penting dari pengelolaan ketenagakerjaan guna memitigasi risiko operasional yang mungkin muncul dari sisi pengelolaan SDM. Pada prinsipnya, penerapan K3 di lingkup LPEI merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja/penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan dan defisiensi produktivitas kerja.

Untuk meminimalkan terjadinya angka kecelakaan kerja, LPEI menyiapkan sarana/prasarana keselamatan di area gedung kantor sebagai antisipasi dalam menghadapi kondisi darurat, seperti P3K, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), *hydrant, sprinkler*, dan lainnya. Khusus untuk gedung kantor pusat, LPEI juga telah menyediakan jalur evakuasi (pintu darurat, koridor, dan tangga darurat) yang mudah dipahami oleh pegawai dan para pengunjung untuk memudahkan proses evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat atau *force majeur*.

Selama tahun 2023, LPEI tidak mencatatkan adanya kecelakaan kerja yang terjadi baik di kantor pusat maupun cabang. Terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Lembaga di 2023.

Commitment to a Healthy, Safe, and Comfortable Work Environment

Health and employee welfare aspects are believed to be crucial components in shaping a healthy work environment and organization. Therefore, Indonesia Eximbank is committed to complying with Government regulations through Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety for employees, as well as Minister of Manpower Regulation No. PER.04/MEN/1987 concerning the Committee for Occupational Safety and Health and the Procedure for Appointing Occupational Safety Experts.

Indonesia Eximbank believes that employees who are mentally and physically healthy are key to supporting operational effectiveness and driving institutional performance productivity. Therefore, Indonesia Eximbank consistently places Occupational Safety and Health (OSH) as an integral part of workforce management to mitigate operational risks that may arise from human resource management aspects. In principle, the implementation of OSH within Indonesia Eximbank aims to create a healthy and safe work environment, thus reducing the probability of work accidents/illnesses due to negligence that may lead to demotivation and decreased work productivity.

To minimize the occurrence of work accidents, Indonesia Eximbank prepares safety facilities and infrastructure in office building areas as anticipation in facing emergency conditions, such as First Aid Kits (P3K), Fire Extinguishers (APAR), hydrants, sprinklers, and others. Specifically for the central office building, Indonesia Eximbank has also provided evacuation routes (emergency exits, corridors, and emergency stairs) that are easily understood by employees and visitors to facilitate the evacuation process in case of emergencies or force majeure.

Throughout 2023, Indonesia Eximbank did not record any work accidents occurring either at the central office or branches. The creation of a healthy, safe, and comfortable work environment is directly proportional to the institution's performance improvement in 2023.

Pembentukan P2K3 [403-1]

Hingga akhir 2023, LPEI belum membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sehingga tanggung jawab terkait pengelolaan dan pemenuhan aspek K3 Lembaga berada di bawah Divisi Sumber Daya Manusia.

Pembentukan P2K3 dirasa belum terlalu dibutuhkan karena mempertimbangkan lokasi kantor pusat LPEI yang berada di Gedung Prosperity sehingga kebijakan K3 LPEI terintegrasi dengan panduan *"Office Tower Safety Guide"* yang dikeluarkan oleh pihak K3/HSE pengelola Gedung Prosperity. Dalam pedoman K3 tersebut diatur secara jelas mengenai langkah-langkah antisipasi yang wajib dilakukan oleh pegawai saat berhadapan dengan situasi darurat di area Gedung Prosperity.

Agar semua program K3 yang tercantum dalam panduan dimaksud senantiasa dapat berjalan dengan baik, maka melalui Keputusan Direktur Eksekutif, LPEI telah menunjuk beberapa orang pegawai untuk menjadi petugas *Floor Warden* apabila terjadi keadaan darurat di Kantor Pusat LPEI Gedung Prosperity.

Program dan Kegiatan terkait Aspek K3 [403-5]

Sehubungan dengan lokasi Kantor Pusat LPEI yang berada di Gedung Prosperity, maka implementasi program dan langkah-langkah penanganan K3 di Kantor Pusat LPEI selalu mengikuti panduan *"Office Tower Safety Guide"* yang diterbitkan oleh Pihak Pengelola Gedung Prosperity. Namun, LPEI sebagai *risk taker* tetap memiliki pedoman K3 internal dan bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan perlengkapan K3 yang lengkap di area kantor, seperti, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Tabung Oksigen, *Medical Kit*, Obat-obatan, Kursi Roda yang dapat digunakan untuk penanganan di lingkungan kerja LPEI apabila terjadi kondisi darurat.

LPEI menyediakan sarana dan prasarana penunjang K3 serta memiliki kebijakan untuk mendukung praktik K3 secara optimal, antara lain:

1) Memperkuat *Disaster Recovery Center* (DRC) guna mengantisipasi jika terjadi bencana atau kondisi yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan operasional bisnis, sehingga keberlangsungan bisnis LPEI tetap terjaga.
2) Melakukan kegiatan latihan evakuasi secara berkala bersama-sama dengan building management guna mengantisipasi kondisi darurat/bencana, sehingga dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja.

Establishment of OSH Committee [403-1]

Until the end of 2023, Indonesia Eximbank has not established the Occupational Safety and Health Committee (P2K3), so the responsibilities related to managing and fulfilling the OSH aspects of the institution are under the Human Resources Division.

The establishment of P2K3 is considered unnecessary due to considering the location of Indonesia Eximbank central office in Prosperity Building, so Indonesia Eximbank OSH policies are integrated with the "Office Tower Safety Guide" guidelines issued by the K3/HSE management of the Prosperity Building. The K3 guidelines clearly stipulate the mandatory precautionary measures that employees must take when facing emergency situations in the Prosperity Building area.

To ensure that all OSH programs listed in the guidelines are consistently implemented, Indonesia Eximbank has appointed several employees as Floor Wardens through the Executive Director's Decision in case of emergency situations in the Central Office of Indonesia Eximbank, Prosperity Building.

Programs and Activities related to OSH Aspects [403-5]

Considering the location of Indonesia Eximbank Central Office in the Prosperity Building, the implementation of OSH programs and measures in the Central Office of Indonesia Eximbank always follows the guidelines of the "Office Tower Safety Guide" issued by the Prosperity Building Management. However, as a risk-taker, Indonesia Eximbank still has internal OSH guidelines and is responsible for ensuring the availability of complete OSH equipment in office areas, such as Fire Extinguishers (APAR), Oxygen Tanks, Medical Kits, Medications, and Wheelchairs for handling emergencies in the Indonesia Eximbank work environment.

Indonesia Eximbank provides facilities and infrastructure to support OSH practices optimally, including:

1) Strengthening the Disaster Recovery Center (DRC) to anticipate business operational disruptions due to disasters or conditions that may disrupt business operations, ensuring business continuity.
2) Conducting regular evacuation drills jointly with building management to anticipate emergency/disaster conditions, thus minimizing the risk of work accidents.

3) Menyediakan fasilitas ruangan khusus laktasi/ *nursery room* diperuntukkan bagi kenyamanan pegawai perempuan yang menyusui.
4) Menyediakan fasilitas perangkat medis antara lain kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), tabung oksigen, kursi roda dan obat-obatan umum untuk mengantisipasi kondisi darurat pegawai di lingkungan kerja LPEI.
5) Menerapkan langka pencegahan bahaya kebakaran di lingkungan kerja termasuk larangan merokok di tempat-tempat yang dilarang untuk merokok yang ditentukan oleh LPEI dan *building management*.
6) Memberikan dukungan kepada pegawai dalam meningkatkan kesehatan dengan memfasilitasi kegiatan olah raga.
7) Memberikan istirahat sakit tanpa mengurangi hak-hak pegawai.
8) Melakukan pelatihan rutin:
   a. Pelatihan tim tanggap darurat bencana;
   b. Simulasi tim tanggap darurat; dan
   c. Kampanye sadar dan siap melaksanakan *Business Continuity Plan* pada kondisi darurat bencana.

Pada tahun 2023, LPEI tidak mengadakan pelatihan *Emergency Response Team*. Namun sebagai gantinya, perwakilan dari LPEI ikut serta dalam kegiatan sosialisasi *Health, Safety and Environment* (HSE) dan mengikuti Evaluasi Pelaksanaan Latihan Evakuasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak Building Management yang diberikan kepada para *tenant* Gedung Prosperity termasuk LPEI.

Implementasi seluruh program dan inisiatif kegiatan terkait K3 merupakan bagian dari upaya pengendalian risiko operasional dan risiko reputasi yang terdampak oleh faktor internal dan eksternal. Melalui penerapan K3 yang ketat dan menyeluruh, LPEI mampu menjaga terciptanya lingkungan kerkja yang sehat.

Kesehatan Kerja [403-8]

LPEI meyakini bahwa faktor kesehatan merupakan salah satu aspek penentu produktivitas pegawai. Alasan inilah yang mendorong Lembaga untuk terus berupaya menyediakan tempat kerja yang layak, sehat, dan bebas dari penyakit. Dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan kepada pegawai dan keluarganya, LPEI mendaftarkan seluruh pegawai pada program BPJS Kesehatan dan juga menyediakan jasa asuransi kesehatan melalui kerja sama dengan PT Asuransi Astra Life, yang mana seluruh preminya menjadi tanggungan Lembaga.

3) Providing special lactation/nursery room facilities for the comfort of female employees who are breastfeeding.
4) Providing medical equipment facilities such as First Aid Kits (P3K), oxygen tanks, wheelchairs, and common medications to anticipate employee emergencies in the Indonesia Eximbank work environment.
5) Implementing fire hazard prevention measures in the workplace, including prohibiting smoking in designated non-smoking areas determined by Indonesia Eximbank and building management.
6) Supporting employees in improving their health by facilitating sports activities.
7) Providing sick leave without reducing employees' rights.
8) Conducting routine training:
   a. Emergency response team training;
   b. Emergency response team simulations; and
   c. Consciousness-raising campaigns and readiness to implement the Business Continuity Plan in emergency disaster conditions.

In 2023, Indonesia Eximbank did not conduct Emergency Response Team training. But instead, representatives from Indonesia Eximbank participated in Health, Safety and Environment (HSE) socialization activities and participated in the Evacuation Exercise Implementation Evaluation which was held on December 22, 2022. All of these activities are carried out by the Building Management which is given to the *tenants* of Prosperity Building including Indonesia Eximbank.

The implementation of all programs and initiatives related to OHS is part of efforts to control operational risks and reputational risks affected by internal and external factors. Through strict and comprehensive implementation of OHS, Indonesia Eximbank is able to maintain the creation of a healthy work environment.

Occupational Health [403-8]

Indonesia Eximbank believes that health factor is one of the determining aspects of employee productivity. This reason encourages the Institution to continuously strive to provide a workplace that is decent, healthy and free from disease. In order to provide health protection to employees and their families, Indonesia Eximbank registers all employees in the BPJS Health program and also provides health insurance services through cooperation with PT Asuransi Astra Life, where the entire premium is covered by the Institution.

Dengan adanya manfaat asuransi tersebut, pegawai beserta anggota keluarga intinya dapat menikmati manfaat kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan persalinan, kacamata, perawatan gigi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan medis berkala, serta pap smear, serta berhak atas penggantian biaya perawatan dan pengobatan atas penyakit yang diderita sesuai plafon asuransi yang didapatkan.

Selain itu, LPEI juga bekerja sama dengan klinik kesehatan untuk menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan tahunan kepada pegawai yang berusia 40 tahun ke atas, sementara bagi pegawai dengan usia di bawah 40 tahun wajib melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 2 tahun sekali.

Per 31 Desember 2023, seluruh (100%) karyawan tetap LPEI baik di kantor pusat maupun cabang sudah terdaftar pada program BPJS Kesehatan dan tercover pada program asuransi PT Asuransi Astra Life.

Komitmen terhadap Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai yang Berkesinambungan [404-1, 404-2]

Selain berusaha menjaring talenta-talenta terbaik melalui proses rekrutmen, LPEI juga mempersiapkan kaderisasi calon-calon pemimpin di masa depan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkesinambungan. LPEI menyadari bahwa peran penting pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan potensi serta kompetensi *soft skill* maupun *technical skill* pegawai telah menjadi sebuah kebutuhan.

Sebagai wujud dari nilai-nilai inti DEI dan prinsip kesetaraan, LPEI memastikan bahwa setiap pegawai di level jabatan apapun memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk dapat mengembangkan kompetensinya dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan potensi dari masing-masing pegawai dan disesuaikan dengan tujuan Lembaga.

Secara umum, program pendidikan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan LPEI berfokus untuk membangun kesadaran terhadap manajemen risiko dan tata kelola yang baik, penguatan pemahaman terhadap bisnis dan proses bisnis Lembaga, serta peningkatan kompetensi baik teknis maupun non-teknis yang sesuai dengan kebutuhan Lembaga.

With these insurance benefits, employees and their immediate family members can enjoy health benefits in the form of hospitalization, outpatient labor, eyeglasses, dental care, laboratory examinations, periodic medical examinations, and pap smears, and are entitled to reimbursement of care and treatment costs for diseases suffered according to the insurance coverage obtained.

In addition, Indonesia Eximbank also cooperates with health clinics to provide annual medical check-up services to employees above 40 years old, while employees below 40 years old are required to have a medical check-up every 2 years.

As of 31 December 2023, all (100%) permanent employees of Indonesia Eximbank both at the head office and branches have been registered with the BPJS Health program and covered by the insurance program of PT Asuransi Astra Life.

Commitment to Continuous Employee Training and Competency Development [404-1, 404-2]

In addition to seeking out the best talents through recruitment processes, Indonesia Eximbank also prepares the cadres for future leaders through various continuous training and competency development programs. Indonesia Eximbank recognizes the significant role of education and training in developing the potential and competencies, both soft skills and technical skills, of employees as a necessity.

As a manifestation of the core values of DEI and the principle of equality, Indonesia Eximbank ensures that every employee at any level has equal opportunities and access to develop their competencies, taking into account the potential development needs of each employee and tailored to the institution's objectives.

In general, the education and competency development programs organized by Indonesia Eximbank focus on building awareness of risk management and good governance, strengthening understanding of the institution's business and processes, and enhancing both technical and non-technical competencies according to the institution's needs.

Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan pegawai LPEI masih berlandaskan pada kerangka model sebagai berikut:

The implementation of Indonesia Eximbank employee training and development programs still follows the framework model as follows:

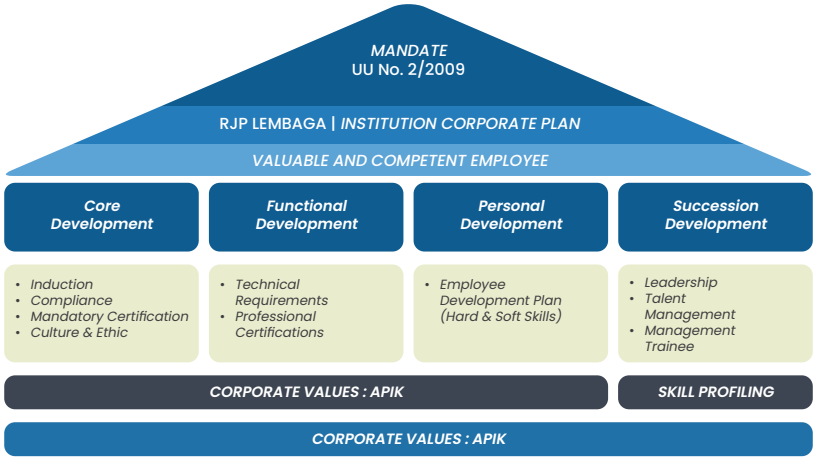

Core Development

Program yang mencakup kepatuhan Pegawai akan berdampak strategis terhadap pencapaian keputusan bisnis organisasi. Serta menjalankan praktik *Good Corporate Governance* yang baik seperti AML (AML/PPT), *Risk management*, budaya Lembaga dan Kode Etik.

Functional Development

Programs that include employee compliance will have a strategic impact on the achievement of the organization's business decisions. As well as carrying out good Good Corporate Governance practices such as AML (AML/CFT), Risk management, institution culture and others.

Personal Development

Program pelatihan keterampilan teknis adalah untuk mengembangkan kompetensi teknis termasuk pengetahuan dan keterampilan, meliputi pelaporan Lembaga, perkreditan/*treasury*, manajemen risiko, sosialisasi peraturan perbankan, audit, teknologi informasi, manajemen umum, manajemen perbankan, dan program keterampilan teknis lainnya seperti Pengetahuan umum Perbankan, dll.

Succession Development

Technical skills training programs are to develop technical competencies such as knowledge and skills, including institutional reporting, credit/ treasury, risk management, socialization of banking regulations, auditing, information technology, general management, banking management, and other technical skills programs such as general banking knowledge, etc.

Pada tahun 2023, kegiatan pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan LPEI dilakukan dengan metode *in-class* (baik *online* maupun *offline*), belajar mandiri (*self-paced learning/e-learning),* ataupun bimbingan (*coaching/mentoring*).

In 2023, the training and development activities organized by Indonesia Eximbank were conducted through various methods including in-class (both online and offline), self-paced learning (e-learning), and guidance (coaching/mentoring).

Sebanyak 593 pegawai telah mengikuti kegiatan pelatihan, meningkat 3,85% dari tahun sebelumnya sebanyak 571 orang. Dengan jumlah tersebut, maka di luar dari pegawai yang *on-board* pada akhir tahun 2023, dapat dikatakan seluruh (100%) pegawai telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan.

A total of 593 employees participated in the training activities, marking an increase of 3.85% compared to the previous year's 571 participants. With this number, it can be said that outside of the employees on-board by the end of 2023, all (100%) employees have had the opportunity to undergo training.

Rata-rata *mandays* pelatihan per pegawai pada tahun 2023 adalah 5,78. *Training mandays* selama 2023 menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan satu orang pegawai untuk mengikuti kegiatan pelatihan adalah 5,78 hari.

The average training mandays per employee in 2023 was 5.78. This indicates that the average time spent by one employee participating in training activities was 5.78 days throughout 2023.

Sepanjang tahun 2023, LPEI telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dengan rerata 5,78 jam per pegawai.

Throughout 2023, Indonesia Eximbank has organized training activities with an average of 5.78 hours per employee.

Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan bagi Pegawai Tahun 2023

Pelatihan bagi pegawai LPEI ada yang bersifat *mandatory* mencakup program yang mendukung pelaksanaan mandat serta memberikan dampak strategis dalam keberhasilan pencapaian tujuan Lembaga serta program dalam bentuk sertifikasi khusus atau sertifikasi profesi yang dipersyaratkan oleh regulator, dan program pelatihan lainnya yang wajib diikuti oleh pejabat atau kelompok jabatan tertentu.

Pelatihan yang bersifat *technical/ hardskill* mencakup pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas di suatu jabatan/kelompok jabatan tertentu. Selain pembekalan kemampuan teknis, pegawai juga dibekali dengan pelatihan *soft skill* yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan pengembangan perilaku Pegawai agar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Organisasi.

Fokus program pengembangan pada tahun 2023 antara lain adalah sebagai berikut:

1) Penguatan di *Three Lines of Defenses- building Risk knowledge and Awareness*, sebagai bagian dari upaya membangun budaya *risk awareness* yang kuat diberikan kepada pegawai melalui pelaksanaan Sertfikasi Manajemen Risiko dan *New Hire Orientation Program* bagi pegawai baru;
2) Penguatan *core competency* sebagai mandatory program melalui penguatan bidang *Government, Risk and Compliance;*
3) Penguatan *fuctional development* melalui:
   a) Penguatan *know your product* dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan peningkatan pengetahuan dalam bidang asuransi, penjaminan, *trade finance*, syariah serta jasa konsultasi;
   b) Program Lembaga untuk mencapai tujuan yang sangat penting melalui proses eksekusi menggunakan alat eksekusi Kerangka Kerja 4 Disiplin Eksekusi (4DX);
   c) Peningkatan keahlian melalui sertifikasi keahlian dibidang kerjanya masing-masing, antara lain sertifikasi pada *credit skill, trade finance,* syariah teknologi informasi, SPPUR, internal audit dan *human resources.*
4) Penguatan *personal development* melalui pelatihan *technical skill* dan *soft skill* berdasarkan *training need analysis* unit kerja dan *employee development plan.*

Training and Education Activities for Employees in 2023

Training for Indonesia Eximbank employees includes mandatory programs that support the implementation of mandates and have a strategic impact on the institution's goal achievement. These programs may take the form of specific certifications or professional certifications required by regulators, as well as other training programs mandatory for officials or specific job groups.

Technical/hardskill training aims to develop the technical competencies needed for specific job positions or job groups. In addition to technical skills, employees also receive soft skills training aimed at enhancing capabilities and developing behaviors to align with the qualifications required by the organization.

The focus of development programs in 2023 includes:

1) Strengthening in the Three Lines of Defenses - building Risk knowledge and Awareness, as part of efforts to cultivate a strong risk-aware culture provided to employees through Risk Management Certification and New Hire Orientation Programs for new employees;
2) Strengthening core competencies as mandatory programs through strengthening in the Government, Risk, and Compliance fields;
3) Strengthening functional development through:
   a) Strengthening product knowledge by conducting activities to enhance knowledge in insurance, guarantee, trade finance, sharia, and advisory services;
   b) Institution program to achieve highly important goals through execution processes using the 4 Disciplines of Execution (4DX) framework;
   c) Enhancement of expertise through certification in their respective fields of work, including certifications in credit skills, trade finance, sharia, information technology, SPPUR, internal audit, and human resources.
4) Strengthening personal development through technical and soft skills training based on the training needs analysis of work units and employee development plans.

Berikut ini adalah daftar realisasi kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai selama tahun 2023:

Below is a list of the training and development activities realized for employees during the year 2023:

Pilar Pillars	**Program**	**Frekuensi** Frequency	**Jumlah Peserta** Number of Partcipants
Core	Certification		
	- Sertifikasi Manajemen Risiko | Risk Management Certification	19	468
	- Sertifikasi SPPUR Trade Finance | SPPUR Trade Finance Certification	1	2
	- Sertifikasi Wajib Manajemen Risiko Bidang Penjaminan Mandatory Risk Management Certification in the Guarantee Sector	3	42
	Mandatory Training		
	- Sosialisasi dan kampanye Anti Korupsi Socialization and Anti-Corruption campaign	1	155
	- New Hire Orientation	3	22
Functional Development	Technical Skill Requirement		
	- Asuransi | Insurance	4	79
	- Jasa Konsultasi | Advisory Services	4	80
	- Syariah | Sharia	7	110
	- Closing Execution Gap with The 4 Disciplines of Execution Pegawai LPEI	5	184
	- Penjaminan | Guarantee	2	38
	Sertifikasi Profesi | Professional Certification		
	- Refreshment Sertifikasi Treasury | Treasury Certification Refresher	1	1
	- Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) - Tingkat Dasar Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program - Basic Level	1	1
	- Sertifikasi PROFESSIONAL SCRUM MASTER (PSM) | PROFESSIONAL SCRUM MASTER (PSM) Certification	2	5
	- Certificate for Documentary Credit Specialists (CDCS)	1	1
	- Certified IT Procurement Expert (CITPE)	1	1
	- Certified Information Systems Auditor (CISA)	1	1
	- Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG)	1	2
	Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) – Manager Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program - Manager	1	1
	- Certified Human Resources Program Executive	1	1
	- Certificate in International Trade and Finance (CITF)	1	2
	- Refreshment National Certification for Trainer (NCT)	1	1
	- Certified Sharia Banking	3	29
	- Certified Information Systems Security Professional (CISSP)	1	2
	- Certified Hogan Assessment	1	2
	- Certified Remuneration Manager	1	1
	- Certified Risk Management Professional	1	1
	- TOGAF 9.2 FOUNDATION & CERTIFIED (COMBINED LEVEL1& 2)	1	1
	- ITIL 4 Foundation	1	2
	- Pelatihan Brevet AB Terpadu untuk Persiapan Ujian Certified Tax Advisor Integrated AB Brevet Training for Certified Tax Advisor Exam Preparation	1	2
Personal Development	Technical Skill	88	2111
	Soft Skill	24	869

Selain pelaksanaan pelatihan secara *in-class,* pada tahun 2023 LPEI juga aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran secara *self-learning* dengan metode pembelajaran yang interaktif. LPEI mengembangkan *Learning Management System* (LMS) yang diberi nama XLearn sebagai platform yang memadai sebagai sarana pengembangan.

In addition to conducting in-class training sessions, in 2023 Indonesia Eximbank also actively implemented self-learning activities using interactive learning methods. Indonesia Eximbank developed a Learning Management System (LMS) named XLearn as an adequate platform for development.

Pada akhir tahun 2023, terdapat 108 modul tersedia di XLearn, yang terdiri dari 9 modul mandatory, 28 modul *technical skill,* 29 modul *soft skill,* 11 buah materi Library, 24 sesi *Podcast,* dan 7 buah artikel. Rata-rata *mandays* XLearn adalah 0,37, artinya rata-rata *Learner* menghabiskan 0,37 hari dalam setahun untuk mengakses informasi/ilmu melalui XLearn. Adapun detail utilisasi masing-masing menu adalah sebagai berikut:

By the end of 2023, there were 108 modules available on XLearn, consisting of 9 mandatory modules, 28 technical skill modules, 29 soft skill modules, 11 Library materials, 24 Podcast sessions, and 7 articles. The average XLearn mandays is 0.37, meaning learners spend an average of 0.37 days per year accessing information/knowledge through XLearn. The detailed utilization of each menu is as follows:

Pilar Pillar	**Jumlah Modul**	**Jumlah *Learner***	**Jumlah *Hours***
Mandatory	9	1.940	9.700
Technical	28	102	1.198
Soft	29	63	1.512
Others			
a. Library	11	55	371,25
b. Podcast	24	563	3378
c. Artikel	7	229	400,75

A. *Induction Program* (*New Hire Orientation*)

Selama tahun 2023, LPEI telah menyelenggarakan 3 kali program orientasi pegawai baru dengan jumlah peserta sebanyak 22 orang pegawai. Adapun modul yang diberikan dalam kegiatan orientasi pada dasarnya sama dengan yang diberikan di tahun sebelumnya, sebagai berikut:

A. Induction Program (New Hire Orientation)

Throughout 2023, Indonesia Eximbank conducted the New Hire Orientation program 3 times with a total of 22 participants. The modules offered during the orientation activities remained essentially unchanged from those provided in the previous year, as follows:

Pelatihan Training	**Penyelenggara** Organizer	**Tanggal** date	**Jumlah Peserta** Number of Participants
New Hire Orientation (Mei)	LPEI	4 Mei 23 4 May 2023	7
New Hire Orientation (Agustus)	LPEI	23 Agustus 23 23 August 2023	5
New Hire Orientation (Desember)	LPEI	13 Desember 23 13 December 2023	10

B. Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan

Dalam rangka menegakkan implementasi praktik GCG di LPEI, pegawai diberikan pembekalan pengetahuan terkait Kepatuhan dan Manajemen Risiko melalui program penyegaran Budaya Lembaga dan Kode Etik, program peningkatan

B. Risk Management and Corporate Governance

In order to uphold the implementation of GCG practices at Indonesia Eximbank, employees are provided with knowledge enhancement related to Compliance and Risk Management through a refreshment program on Institutional Culture and Code of Ethics, risk awareness enhancement

kesadaran risiko (*risk awareness*), serta pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Selama tahun 2023, pelaksanaan Kelas Persiapan dan Ujian serta Program Penyegaran (*refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

programs, and the implementation of Risk Management Certification.

Throughout 2023, the implementation of Preparation Classes and Exams as well as the Refreshment Program for Risk Management Certification is as follows:

	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7	Total
Sertifikasi dan Ujian Certification and Examination	4	-	-	-	4
Program Penyegaran Refreshment Program	169	265	27	3	464

C. Sertifikasi Profesional

Program sertifikasi perlu dilakukan untuk memastikan setiap pegawai telah memenuhi standar kompetensi profesional yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan meningkatkan daya saing pegawai.

Pada tahun 2023, sebanyak 89 pegawai LPEI telah mengikuti program sertifikasi dengan uraian sebagai berikut:

C. Professional Certification

Implementing a certification program is essential to ensure that every employee meets the necessary professional competency standards to effectively fulfill their duties and responsibilities while enhancing employee competitiveness.

In 2023, as many as 89 Indonesia Eximbank employees have participated in the certification program with the following description:

Program	Frekuensi Frequency	Jumlah Peserta Number of Participants
- Sertifikasi SPPUR Trade Finance | SPPUR Trade Finance Certification	1	2
- Sertifikasi Wajib Manajemen Risiko Bidang Penjaminan | Mandatory Risk Management Certification in the Guarantee Sector	3	42
- Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) - Tingkat Dasar	1	1
- Sertifikasi Sertifikasi PROFESSIONAL SCRUM MASTER (PSM) | Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program - Basic Level	2	3
- Certified IT Procurement Expert (CITPE)	1	1
- Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) – Manager | Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program - Manager	1	1
- Certified Human Resources Program Executive	1	1
- Certificate for Specialist in Demand Guarantee (CSDG)	1	2
- Refreshment National Certification for Trainer (NCT)	1	1
- Certified Sharia Banking	3	29
- Certified Remuneration Manager	1	1
– Certified Risk Management Professional	1	1
- Pelatihan Brevet AB Terpadu untuk Persiapan Ujian Certified Tax Advisor | Integrated Brevet AB Training for Certified Tax Advisor Exam Preparation	1	2
– Certified Human Capital Manager (CHCM)	1	1
– Certified Human Capital General Manager (CHCGM)	1	1

D. Peningkatan Kompetensi dalam rangka Pertumbuhan Bisnis

1) Sertifikasi *Credit Skill*

Sertifikasi *Credit Skill* merupakan sertifikasi *mandatory* bagi pegawai pada fungsi penjualan (*relationship manager*). Pada tahun 2023, LPEI bekerja sama dengan Moodys Analytics melaksanakan Sertifikasi *Credit Skill* yang terdiri dari 4 modul yaitu modul pertama *Basic Lending Fundamentals,* modul kedua *Financial Accounting for Lenders,* modul ketiga *Commercial Loans for Business/Small Business*, modul keempat *Managing Problem Loans*. Pada tahun 2023, sebayak 27 pegawai telah lulus Sertifikasi Credit Skill menyelesaikan 4 modul, dan 20 pegawai lainnya masih dalam proses penyelesaian yang dimulai pada bulan November 2023.

2) Pelatihan terkait Produk Mandat Lembaga

Pelatihan ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan *cross function competencies*, dimana seluruh pegawai diberikan pengetahuan tentang produk dan proses bisnisnya. Adapun tahun 2023, kegiatan pelatihannya adalah sebagai berikut:

D. Competency Enhancement for Business Growth

1) Credit Skill Certification

Credit Skill Certification is a mandatory certification for employees in sales functions (relationship managers). In 2023, LPEI collaborated with Moodys Analytics to conduct Credit Skill Certification consisting of 4 modules: the first module is Basic Lending Fundamentals, the second module is Financial Accounting for Lenders, the third module is Commercial Loans for Business/Small Business, and the fourth module is Managing Problem Loans. In 2023, a total of 27 employees have passed the Credit Skill Certification by completing all 4 modules, while another 20 employees are still in the process, which began in November 2023.

2) Training related to Institution's Mandated Products

This training is a continuation from the previous year aimed at enhancing cross-functional competencies, where all employees are provided with knowledge about the institution's products and business processes. The training activities in 2023 are as follows:

Training Produk Trainining Product	**Batch**	**Jumlah** Total
Asuransi | Insurance	4	79
Jasa Konsultasi | Advisory Services	4	80
Syariah | Sharia	7	110
Penjaminan | Guarantee	2	38

3) Pelatihan terkait Komoditas/Sektor Industri

Pelatihan ini bertujuan untuk pengembangan kapabilitas terkait komoditas dan sektor industri unggulan dari hulu ke hilir. Dalam pelaksanaannya, LPEI mengundang Narasumber ahli di bidangnya yang berasal dari badan pemerintahan serta pelaku industri. Selain kelas tatap muka, materi terkait komoditas/sektor industri juga disediakan di dalam *Learning Management System* (LMS) LPEI, yaitu XLearn, yang dapat diakses oleh seluruh pegawai LPEI. Berikut uraiannya:

3) Training related to Commodities/Industry Sectors

This training aims to develop capabilities related to key commodities and industry sectors from upstream to downstream. In its implementation, Indonesia Eximbank invites expert speakers in their respective fields from government bodies and industry players. In addition to face-to-face classes, materials related to commodities/industry sectors are also provided in Indonesia Eximbank Learning Management System (LMS), called XLearn, which can be accessed by all LPEI employees. Here are the details:

	Jumlah Peserta Number of Participants
Kopi | Coffee	15
Rumput Laut | Seaweed	50
Kopi (Xlearn)	7
Sawit (Xlearn)	17
Aqua Culture (Xlearn)	2

E. Program Pengembangan Manajemen Talenta dan Suksesi

Manajemen Talenta

Program yang ditujukan untuk pengembangan kepemimpinan dan mempersiapkan *future-ready leaders* melalui *Talent Pool* dan *Management Trainee,* dengan uraian sebagai berikut:

1. *Talent Pool*

Pada tahun 2023, 50 orang pegawai diidentifikasi sebagai Talent, yang terdiri dari 21 orang di Kelompok Jabatan Eksekutif dan 29 orang di Kelompok Jabatan Kepala Departemen. Para Talent diberikan rangkaian program pengembangan yang dinilai dapat memperkaya dan memperdalam baik pengetahuan maupun keterampilan mereka, yaitu:

a) *Personal Assessment*
Sebagai tahap awal, para Talent diberikan kesempatan untuk mengikuti *Personal Assessment* untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan mereka. *Assessment* dilakukan dengan menggunakan Gallup StrengthsFinder. Dengan mengetahui potensi *Strength*-nya maka para *Talent* dapat berlatih mengoptimalkan potensi tersebut terkait dengan peran mereka saat ini dan di masa yang akan datang.

b) Pendidikan formal
Training diberikan kepada *Talent* baik dari sisi *soft skill* seperti topik kepemimpinan, komunikasi, motivasi; maupun sisi *hard skill* seperti pengetahuan komoditas/sektor industri, dll. Selain itu, LPEI juga memberikan Beasiswa kepada 1 (satu) orang Pegawai yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2.

c) *Mentoring*
Tujuan dari kegiatan *mentoring* adalah agar *Talent* dapat memaksimalkan potensi, mengembangkan keterampilan, dan memperoleh *mindset* yang benar melalui pembelajaran yang diberikan oleh para Mentor. *Mentoring* Kepala Departemen

E. Talent Management and Succession Program

Talent Management

A program aimed at leadership development and preparing future-ready leaders through Talent Pool and Management Trainee, with the following descriptions:

1. Talent Pool

In 2023, 50 employees were identified as Talent, consisting of 21 individuals in the Executive Job Group and 29 individuals in the Department Head Job Group. These Talents are provided with a series of development programs aimed at enriching and deepening their knowledge and skills, namely:

a) Personal Assessment
As an initial step, Talents are given the opportunity to participate in Personal Assessment to identify their strengths. The assessment is conducted using Gallup StrengthsFinder. By knowing their potential strengths, Talents can practice optimizing these strengths related to their current and future roles.

b) Formal Education
Training is provided to Talents in both soft skills such as leadership, communication, motivation, and hard skills such as knowledge of commodities/industry sectors, etc. In addition, the company also provides scholarships to 1 employee pursuing their education to the Master's level.

c) Mentoring
The purpose of mentoring activities is to maximize potential, develop skills, and acquire the right mindset through learning provided by Mentors. Department Head mentoring is conducted by Executive Directors, Managing Directors, and Head

dilakukan oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan Head Of. Sementara untuk Eksekutif, *mentoring* dilakukan oleh pihak eksternal.

d) *Secondment*
   - *Secondment* Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI): sebanyak 13 orang *Talent* didaftarkan pada 5 subtema *Secondment* dari Kemenkeu RI;
   - *Secondment* SMV Kemenkeu: 2 orang Talent diikutsertakan pada *Secondment* dalam bentuk *workshop* di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

e) Studi Banding (*Benchmarking*)
   Dalam kegiatan ini Talent diberikan kesempatan untuk studi banding (*benchmarking*) kepada beberapa Eximbank/ECA (*Export Credit Agency*) lain untuk memperoleh *insights* mengenai *best practice* yang dilakukan dalam bidangnya masing-masing. Pada tahun 2023, sebanyak 5 (lima) orang Talent LPEI telah melakukan studi banding dengan Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand).

2. *Management Trainee*

a. Peserta *Leader for Tomorrow* (LFT) Angkatan ke-II pada tanggal 5 Januari 2023 memasuki tahap pengangkatan. Dalam proses ini, 1 orang peserta keluar dari program dikarenakan alasan performa dan 19 orang dinyatakan Lulus serta diangkat sebagai Pegawai. Para peserta LFT *Batch* II telah ditempatkan di berbagai unit kerja baik unit bisnis dan pendukung serta memasuki masa bakti selama 30 bulan sejak ditempatkan. Peserta LFT *Batch* II telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko *Level 1* dan Sertifikasi *General Banking Level 1.*

b. Pada tahun 2023, *Relationship Management Development Program* (RMDP) melanjutkan masa *On The Job Training* sampai dengan 1 Juni 2023 serta memasuki masa bakti pada tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 24 bulan ke depan. Peserta RMDP ditempatkan sebagai *Relationship Manager* baik pada bisnis korporasi, *commercial* dan SME di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah. Peserta RMDP telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko *Level 1* dan Sertifikasi *General Banking Level 1, serta dalam proses mengikuti* Sertifikasi *Credit Skill* dari *Moodys.*

Of. Meanwhile, for Executives, mentoring is conducted by external parties.

d) Secondment
   - Secondment to the Ministry of Finance: 13 Talents are registered for 5 Secondment subthemes from Ministry of Finance;
   - SMV Ministry of Finance Secondment: 2 Talents participate in Secondment in the form of workshops at PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) and PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

e) Benchmarking
   In this activity, Talents are given the opportunity to benchmark against several other Eximbanks/ECAs (Export Credit Agencies) to gain insights into best practices in their respective fields. In 2023, as many as 5 (five) LPEI Talents have conducted a comparative study with the Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand).

2. Management Trainee

a. Participants of the Leader for Tomorrow (LFT) Batch II on January 5, 2023, entered the appointment stage. In this process, 1 participant exited the program due to performance reasons, and 19 participants were declared Passed and appointed as Employees. The participants of LFT Batch II have been placed in various business and support units and have entered a service period of 30 months since placement. Participants of LFT Batch II already have Risk Management Level 1 Certification and General Banking Level 1 Certification.

b. In 2023, the Relationship Management Development Program (RMDP) continued the On-The-Job Training period until June 1, 2023, and entered the service period on July 17, 2023, for the next 24 months. RMDP participants are placed as Relationship Managers in corporate, commercial, and SME businesses at both the Head Office and Regional Offices. RMDP participants already have Risk Management Level 1 Certification and General Banking Level 1 Certification, and are in the process of obtaining Credit Skill Certification from Moody's.

c. Seluruh peserta *Management Trainee* baik LFT maupun RMDP setiap tahunnya mendapatkan series program untuk mengembangkan sisi kepemimpinan yang difokuskan kepada *Self Leadership* melalui sesi personal mentoring dari eksternal mentor, sesi penguatan Budaya Lembaga APIK, serta pengenalan *design thinking* untuk pengambilan keputusan.

3. ***Youth Talent***
LPEI juga memiliki *Youth Talent*, yaitu para pegawai muda yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin Lembaga di masa yang akan datang. Para *Youth Talent* dibekali dengan kemampuan *soft skill* berupa *Self-Leadership* sebagai langkah awal kepemimpinan. *Training* yang diberikan bertujuan untuk memperkuat Budaya Lembaga, yaitu APIK dalam masing-masing individu serta memperkenalkan konsep pengambilan keputusan.

c. All Management Trainee participants, both LFT and RMDP, receive a series of programs every year to develop leadership skills focused on Self-Leadership through personal mentoring sessions from external mentors, strengthening the Institution's APIK Culture, and introducing design thinking concepts for decision-making.

3. **Youth Talent**
Indonesia Eximbank also has Youth Talent, young employees who have the potential to become leaders of the Institution in the future. Youth Talent are equipped with soft skills in Self-Leadership as the initial step of leadership. The training provided aims to strengthen the Institution's Culture, namely APIK, in each individual, and introduce decision-making concepts.

Sebanyak **20 orang *Talent* LPEI** berpartisipasi sebagai relawan Pengajar dalam kegiatan **Kemenkeu Mengajar ke-8** yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI.

A total of 20 Indonesia Eximbank talents participated as teaching volunteers in the 8th Kemenkeu Mengajar activity organized by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

F. **Pelatihan Keuangan Berkelanjutan** [FS4]
Dalam rangka memperkuat pengintegrasian prinsip Keuangan Berkelanjutan pada semua proses operasional bisnis yang dijalankan, pada tahun 2023, LPEI telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan maupun seminar dengan topik aspek keuangan berkelanjutan, antara lain:
1. *"Sharing Session* Keuangan Berkelanjutan" diselenggarakan oleh Indonesia Eximbank dan diikuti oleh 449 peserta;
2. ESG Risk Management – *"Addressing Key Challenges in Climate Change "* diselenggarakan oleh Moody's dan diikuti oleh 36 peserta;
3. *ESG Credit Rating & ESG Factor Impact on Carbon-Intensive Commodity Issuers* diselenggarakan oleh Moody's dan diikuti oleh 135 peserta; dan

F. **Sustainable Finance Training** [FS4]
In order to strengthen the integration of Sustainable Finance principles in all business operational processes, in 2023, Indonesia Eximbank has organized training activities and seminars on the topic of sustainable finance aspects, among others:
1. "Sharing Session on Sustainable Finance" organized by Indonesia Eximbank and attended by 449 participants;
2. ESG Risk Management - "Addressing Key Challenges in Climate Change" was organized by Moody's and attended by 36 participants;
3. "ESG Credit Rating & ESG Factor Impact on Carbon-Intensive Commodity Issuers" organized by Moody's and attended by 135 participants; and

4. *HR Green Forum - Strategy to Manage People with ESG Basic - Challenges and Opportunity* diselenggarakan oleh Inti Pesan dan diikuti oleh 1 peserta.

Biaya Program Pelatihan dan Pengembangan SDM Tahun 2023

Anggaran tersedia untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan tahun 2023 adalah sebesar Rp13,9 miliar. Hingga akhir tahun 2023, penyerapan anggaran tersebut mencapai 103% atau senilai Rp14,5 miliar. Dilihat dari penyerapan anggaran terjadi pelampauan dari anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan *assessment* untuk menyesuaikan dengan Kamus Kompetensi terbaru sebagai bagian dari *project* transformasi organisasi, program *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko bagi seluruh pegawai sebagai penerapan penyetaraan sesuai dengan SEOJK No. 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum dimana pelaksanaan pelatihan penyegaran sertifikasi harus dilaksanakan setiap tahun. Keseluruhan program tersebut pada saat penyusunan anggaran 2023 tidak dianggarkan untuk dilaksanakan pada tahun 2023. Meskipun demikian, persentase realisasi pelatihan dan pengembangan apabila dibandingkan dengan realisasi total Biaya Tenaga Kerja (BTK) masih dalam kategori wajar yaitu sebesar 3% dari total BTK 2023.

Mekanisme Pengaduan Pegawai

LPEI menyediakan media komunikasi formal yang dapat digunakan oleh pegawai untuk menyampaikan segala bentuk pengaduan atau isu terkait penyimpangan praktik ketenagakerjaan yang terjadi di tempat kerja, yaitu melalui:

Sampai dengan akhir tahun 2023, tidak terdapat laporan ataupun kasus terkait pelanggaran kode etik, norma kesusilaan, ataupun pelecehan di lingkungan LPEI.

Tata Kelola SDM di LPEI

Rekrutmen dan *Turnover* Karyawan [401-1]

Dalam menghadapi situasi pasar yang terus berubah dan semakin menantang, Divisi Sumber Daya Manusia secara matang menyusun perencanaan kebutuhan

4. "HR Green Forum - Strategy to Manage People with ESG Basic - Challenges and Opportunity" organized by Inti Pesan and attended by 1 participant.

HR Training and Development Program Costs in 2023

The budget available for training and development activities in 2023 amounted to Rp13.9 billion. By the end of 2023, the absorption of this budget reached 103%, equivalent to Rp14.5 billion. Looking at the budget absorption, there was an overrun from the budget set in 2023. This was due to the implementation of assessments to align with the latest Competency Dictionary as part of the organizational transformation project, the Risk Management Certification Refreshment Program for all employees as part of the implementation of equalization according to SEOJK No. 28/SEOJK.03/2022 regarding Risk Management Certification for Human Resources of Commercial Banks, where the refreshment certification training must be conducted annually. All of these programs were not budgeted for implementation in 2023 during the budget preparation. However, despite this, the percentage of realization of training and development compared to the total Labor Costs (BTK) is still reasonable, amounting to 3% of the total BTK in 2023.

Employee Complaint Mechanism

Indonesia Eximbank provides formal communication media that can be used by employees to convey all forms of complaints or issues related to irregularities in labor practices that occur in the workplace, namely through:

Website: ayolaporlpei.kemenkeu.go.id
E-mail: gcg@indonesiaeximbank.go.id

Until the end of 2023, there were no reports or cases related to violations of the code of conduct, norms of decency, or harassment in the Indonesia Eximbank environment.

HR Governance at Indonesia Eximbank

Employee Recruitment and Turnover [401-1]

In facing the continuously changing and increasingly challenging market situation, the Human Resources Division meticulously plans the employee needs for

pegawai untuk tiap-tiap lini bisnis guna mendukung pencapaian target dan tujuan LPEI baik untuk periode jangka pendek maupun jangka panjang.

each line of business to support Indonesia Eximbank targets and goals, both for the short and long term.

Agar rencana kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi, LPEI berusaha mencari talenta-talenta terbaik dari eksternal maupun dari kandidat internal melalui proses rekrutmen yang dilakukan secara adil dan transparan dengan menganalisis kompetensi karyawan dan kebutuhan Lembaga. Proses rekrutmen pegawai yang dilakukan LPEI bertujuan untuk memastikan regenerasi pegawai dapat berlangsung secara berkesinambungan dan selaras dengan rencana pengembangan bisnis.

To ensure that the workforce needs are met, Indonesia Eximbank strives to find the best talents externally and internally through a fair and transparent recruitment process by analyzing employees' competencies and the institution's needs. The employee recruitment process conducted by Indonesia Eximbank aims to ensure the continuous regeneration of employees and align with the business development plans.

Dasar kebijakan penerimaan pegawai atau rekrutmen yang dilakukan selama tahun 2023 mengacu pada PDE No. 0028/PDE/05/2019 tentang Penerimaan Pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Secara garis besar, kegiatan pelaksanaan rekrutmen atau proses seleksi karyawan di lingkup LPEI dapat dijelaskan sebagai berikut:

The legal basis for the employee recruitment policy throughout 2023 refers to PDE No. 0028/PDE/05/2019 regarding the Recruitment of Employees of Indonesia Eximbank. In essence, the implementation of the recruitment process or employee selection process at Indonesia Eximbank can be explained as follows:

***Staffing* Pegawai**

Untuk memastikan bahwa LPEI memiliki jumlah, jenis, keterampilan, dan kompetensi yang tepat dari pegawai yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnisnya, maka Divisi Sumber Daya Manusia secara cermat menganalisis SDM yang dimiliki Lembaga dan menghitung perkiraan kebutuhan tenaga kerja baru untuk mendukung rencana bisnis dan tujuan organisasi. Dalam hal ini, Divisi Sumber Daya Manusia telah mempersiapkan rencana kebutuhan tenaga kerja yang terukur setiap tahunnya untuk membantu Lembaga menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan bisnis dengan cara yang optimal. Hal ini juga memungkinkan LPEI untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang mungkin mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja di masa depan.

Employee Staffing

To ensure that Indonesia Eximbank has the right number, types, skills, and competencies of employees needed to achieve its business goals, the Human Resources Division carefully analyzes the institution's workforce and calculates the estimated need for new employees to support business plans and organizational goals. In this regard, the Human Resources Division has prepared a measurable workforce planning each year to help the institution avoid labor shortages or surpluses, improve efficiency, and achieve business goals optimally. This also enables Indonesia Eximbank to anticipate changes in the business environment that may affect future workforce needs.

Perencanaan tenaga kerja *(staffing)* pada dasarnya merupakan bagian dari perencanaan organisasi. Tahapan *staffing* pegawai di LPEI, antara lain meliputi pemetaan kebutuhan pegawai, pencarian kandidat (*sourcing*), rekrutmen dan seleksi, hingga *on-boarding*.

Workforce planning is essentially part of organizational planning. The staffing stages of employees at Indonesia Eximbank include mapping out employee needs, candidate sourcing, recruitment and selection, to on-boarding.

A. Pemetaan Kebutuhan Pegawai

Strategi penambahan jumlah pegawai diperhitungkan secara komprehensif dengan mempertimbangkan prioritas pengisian serta beban kerja di masing-masing posisi. Pemetaan kebutuhan pegawai tidak hanya dilakukan

A. Mapping Employee Needs

The strategy for increasing the number of employees is comprehensively considered, taking into account priority filling and workload in each position. Employee needs mapping is not only done

terhadap fungsi yang bersifat *core* dan tidak dapat dialihdayakan, tetapi juga dilakukan kepada fungsi *non-core* yang dapat dialihdayakan.

Pada tahun 2023, jumlah tenaga kerja ditargetkan tidak mengalami peningkatan atau tetap sebesar 575 pegawai, namun dengan kualitas yang lebih baik. Dengan pertimbangan tersebut, maka alokasi distribusi jumlah pegawai perlu dilakukan dengan tepat dan memperhatikan skala prioritas, serta diselaraskan dengan program pengembangan kapabilitas pegawai.

B. Pencarian Kandidat (*Sourcing*)

Strategi pemenuhan kebutuhan pegawai dapat diperoleh dari kandidat eksternal maupun internal LPEI. Pengisian posisi dari *sourcing* internal dilakukan sebagai tindak lanjut atas implementasi manajemen talenta, maupun melalui mekanisme *internal job posting*. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan dari *sourcing* eksternal dilakukan melalui kolaborasi bersama tim Communication and Stakeholders Engagement yang memberikan dukungan dari sisi desain dan publikasi untuk memastikan bahwa informasi pengumuman lowongan kerja yang disampaikan kepada pihak eksternal telah sesuai dengan *corporate identity* LPEI.

Dalam upaya mendapatkan kandidat pegawai terbaik dari *sourcing* eksternal, LPEI terus mengupayakan pencarian pegawai baru dengan memperkuat hubungan bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai salah satu langkah strategis dalam mengelola sumber *sourcing* kandidat yang berkualitas selain mengandalkan pengelolaan *sourcing channels* yang masih berjalan, seperti LinkedIn, Jobstreet, Referral, alumni internship dan Tenaga Alih Daya (TAD).

C. Rekrutmen dan Seleksi Pegawai

Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pegawai di lingkup LPEI dilakukan secara terbuka dan mengedepankan prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan berkeadilan. Dalam merekrut pegawai baru, LPEI menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan mengedepankan asas non-diskriminatif dengan memberikan penilaian secara profesional dan objektif berdasarkan kompetensi yang dimiliki setiap kandidat. Proses rekrutmen yang dilakukan LPEI melalui beberapa tahapan dan sumber pemenuhan, yaitu sebagai berikut:

for core functions that cannot be outsourced but also for non-core functions that can be outsourced.

In 2023, the workforce was targeted to not increase or remain at 575 employees, but with better quality. With this consideration, the allocation and distribution of the number of employees need to be done accurately and consider scale priorities, as well as aligned with employee capability development programs.

B. Candidate Sourcing

The employee needs fulfillment strategy can be obtained from external or internal candidates of Indonesia Eximbank. Filling positions from internal sourcing is done as a follow-up to talent management implementation or through internal job posting mechanisms. Meanwhile, fulfillment of needs from external sourcing is done through collaboration with the Communication and Stakeholders Engagement team which provides support in design and publication to ensure that job vacancy announcements to external parties are in line with Indonesia Eximbank corporate identity.

To obtain the best employee candidates from external sourcing, Indonesia Eximbank continues to strengthen its relationship with the Education Fund Management Agency (LPDP) as one of the strategic steps in obtaining quality candidates, other than relying on ongoing sourcing channels management, such as LinkedIn, Jobstreet, Referral, alumni internship, and Outsourcing Employee .

C. Employee Recruitment and Selection

The implementation of employee recruitment and selection at Indonesia Eximbank is done openly and upholds the principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. In recruiting new employees, Indonesia Eximbank upholds the principles of equality and non-discrimination by providing professional and objective assessments based on the competencies of each candidate. The recruitment process carried out by Indonesia Eximbank goes through several stages and sources of fulfillment, as follows:

1. **Rekrutmen Eksternal**
   Rekrutmen eksternal merupakan proses pemenuhan pegawai melalui sumber eksternal (di luar LPEI), baik untuk menjawab kebutuhan *professional hire regular* maupun dari Tenaga Alih Daya (TAD) atau Peserta *Internship*. Proses seleksi pegawai dari *sourcing* eksternal dilakukan secara ketat dengan tujuan agar LPEI dapat memilih dan menyaring kandidat terbaik yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang ditetapkan.

   Adapun tahapan seleksi pegawai untuk kandidat yang nantinya akan mengisi posisi organik, antara lain meliputi wawancara *Human Resource (HR)* dan *User, assessment, medical test, employee checking* dan *offering*. Selama kegiatan seleksi berlangsung, *recruiter* melakukan koordinasi dan penjadwalan dengan Unit Kerja, Penyedia Jasa *Assessment*, Penyedia Jasa Tes Kesehatan, pihak pemberi referensi, *Screening* dari pelamar-pelamar yang masuk *(active candidates)* maupun *screening* dari kandidat-kandidat yang didekati secara langsung (*passive candidates*). Sementara untuk proses seleksi Tenaga Alih Daya (TAD) atau Staf Ahli, LPEI melakukan tahapan wawancara kandidat, proses pemesanan Perjanjian kepada tim HRS (Koperasi), baik untuk Perjanjian Kerja bagi TAD dan Perjanjian Kerja Sama bagi Staf Ahli.

   Divisi Sumber Daya Manusia memiliki data kompilasi seluruh posisi yang berhasil direkrut (sudah bergabung di hari pertama) untuk tahun buku 2023 berdasarkan proses seleksi baik dari permintaan tahun 2022 maupun dari tahun 2023.

2. **Rekrutmen Internal**
   Selain mencari kandidat terbaik dari luar organisasi, LPEI juga berusaha menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dari sumber internal melalui metode mutasi pegawai seperti namun tidak terbatas pada tiga cara, yaitu promosi, rotasi dan demosi. Strategi rekrutmen internal memiliki kelebihan dan keuntungan bagi Lembaga, di antaranya meningkatkan motivasi dan *engagement* pegawai, menghemat biaya rekrutmen, mempersingkat waktu perekrutan, dan tidak membutuhkan proses adaptasi.

1. **External Recruitment**
   External recruitment is the process of employee fulfillment through external sources (outside of Indonesia Eximbank), both to meet regular professional hire needs and from Temporary Workforce (TAD) or Internship Participants. The employee selection process from external sourcing is done strictly with the aim that Indonesia Eximbank can choose and screen the best candidates who meet the specified job qualifications.

   The selection stages for candidates who will fill organic positions include HR and User interviews, assessments, medical tests, employee checking, and offering. During the selection process, recruiters coordinate and schedule with Work Units, Assessment Service Providers, Health Test Service Providers, reference providers, Screening of applicants who enter (active candidates), and screening of directly approached candidates (passive candidates). Meanwhile, for the Temporary Workforce (TAD) or Expert Staff selection process, Indonesia Eximbank conducts candidate interviews, the Agreement ordering process to the HRS team (Cooperative), both for Work Agreements for TAD and Cooperation Work Agreements for Expert Staff.

   The Human Resources Division has compiled data on all positions that have been successfully recruited (joined on the first day) for the 2023 fiscal year based on the selection process from requests in 2022 and 2023.

2. **Internal Recruitment**
   In addition to seeking the best candidates from outside the organization, Indonesia Eximbank also strives to meet the challenges of workforce needs from internal sources through employee mutation methods such as, but not limited to, three ways, namely promotion, rotation, and demotion. Internal recruitment strategy has advantages and benefits for the institution, including increasing employee motivation and engagement, saving recruitment costs, shortening recruitment time, and not requiring adaptation processes.

Agar proses rekrutmen internal dapat berjalan efektif, LPEI selalu berupaya untuk menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya dengan tetap memperhatikan kebutuhan Lembaga. Untuk menjaga objektivitas terhadap penempatan pegawai, Divisi Sumber Daya Manusia meninjau kebijakan terkait mutasi pegawai secara berkala dan apabila diperlukan, dapat dilakukan penyempurnaan.

To ensure the effectiveness of the internal recruitment process, Indonesia Eximbank always strives to place employees according to their competencies while still paying attention to the institution's needs. To maintain objectivity in employee placement, the Human Resources Division periodically reviews policies related to employee mutation and, if necessary, can make improvements.

Pada tahun 2023 telah dilakukan *update* terhadap ketentuan mutasi pegawai agar kebijakan mutasi pegawai tetap relevan dengan kondisi LPEI saat ini, dan supaya keberlangsungan karier pegawai dapat terus terlaksana.

In 2023, an update was made to the employee mutation provisions so that the employee mutation policy remains relevant to Indonesia Eximbank current conditions, and so that employee career continuity can continue to be implemented.

Dalam mengisi setiap posisi *vacant* yang dimungkinkan berasal dari program promosi, LPEI terlebih dahulu berusaha mencari kandidat pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dari sumber *Talent Pool.* Akan tetapi, apabila selama proses pencarian tidak ditemukan adanya kandidat pegawai yang sesuai dengan kualifikasi dibutuhkan maka tim rekrutmen bekerja sama dengan tim HRBP melakukan pencarian melalui mekanisme *Internal Job Posting*.

In filling each possible vacant position through the promotion program, Indonesia Eximbank first tries to find employee candidates according to the needs from the Talent Pool source. However, if during the search process no employee candidates are found with the required qualifications, the recruitment team collaborates with the HRBP team to search through the Internal Job Posting mechanism.

Proses seleksi bagi kandidat internal dilakukan melalui tahapan penilaian, *interview*, maupun presentasi *business case* bagi pegawai yang menjadi kandidat internal pada posisi manajerial. Adaun seluruh keputusan seleksi bagi kandidat internal dilakukan melalui Komite Kepegawaian yang beranggotakan Head Of, Direktur Pelaksana, maupun Direktur Eksekutif sesuai dengan batas kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan mutasi.

The selection process for internal candidates is carried out through assessment, interviews, and business case presentations for employees who are internal candidates for managerial positions. All selection decisions for internal candidates are made by the Personnel Committee consisting of Heads Of, Executive Directors, and Executive Directors according to the authorized limits set in the mutation provisions.

Setelah kegiatan rekrutmen dan seleksi pegawai selesai dilakukan di 2023, LPEI juga mendapatkan calon pegawai yang telah memiliki pengalaman melalui program *Leader For Tomorrow* (LFT). Program LFT ini khusus dirancang sesuai kebutuhan dalam rangka mempersiapkan putra putri terbaik bangsa sebagai penerus pemimpin yang tangguh dan mempunyai nilai-nilai budaya LPEI.

After the employee recruitment and selection activities were completed in 2023, Indonesia Eximbank also obtained employee candidates who already had experience through the Leader For Tomorrow (LFT) program. This LFT program is specifically designed according to needs to prepare the best sons and daughters of the nation as future strong leaders with Indonesia Eximbank cultural values.

Hingga Desember 2023 terdapat kekosongan posisi struktural sebesar 8% . Untuk Oleh sebab itu, itu berbagai inisiatif perlu telah dilakukan oleh LPEI agar dapatguna mempertahankan pegawai

As of December 2023, there is a structural position vacancy of 8%. Therefore, various initiatives have been undertaken by Indonesia Eximbank to retain employees and curb turnover, as well as attract

(*retain*) dan menahan laju *turnover*, serta menarik (*attract*) talenta terbaik di pasar untuk dapatuntuk bergabung dan berkontribusi di LPEI. Karena itu, Sehubungan dengan inisiatif tersebut, LPEI telah merekrut sebanyak 60 pegawai baru pada di tahun 2023, meningkat 9,09% dari tahun sebelumnya sebanyak 53 orang. Jumlah Dengan dilakukannya rekrutmen pegawai baru, maka jumlah pegawai LPEI di akhir Desember 2023 tercatat sebanyak 563 orang, atau tercapai 102,6% dari target *manpower planning* tahun 2023 tersebut telah memenuhi target manpower planning tahun 2023 sebanyak 575 pegawai atau turun 6,48% dari 540 orang pegawai pada tahun sebelumnya.

the best talent in the market to join and contribute to Indonesia Eximbank. Hence, Indonesia Eximbank recruited 60 new employees in 2023, an increase of 9.09% from the previous year's 53 employees. With the recruitment of new employees, the number of Indonesia Eximbank employees at the end of December 2023 was recorded at 563 people, or 102.6% of the 2023 manpower planning target of 575 employees.

Dari jumlah pegawai baru yang diterima LPEI di 2023, sebanyak 51,67% merupakan pegawai laki-laki dan sisanya 48,33% adalah pegawai perempuan. Dengan rasio perbandingan yang tidak terlalu jauh antara penerimaan pegawai laki-laki dan perempuan tersebut, LPEI memastikan penyelenggaraan proses rekrutmen dan seleksi pegawai di lingkungan Lembaga senantiasa dilakukan secara adil dan transparan tanpa diskriminasi.

Of the total new employees recruited by Indonesia Eximbank in 2023, 51.67% were male employees and the remaining 48.33% were female employees. With a relatively close ratio between the recruitment of male and female employees, Indonesia Eximbank ensures that the employee recruitment and selection process in the institution is always conducted fairly and transparently without discrimination.

Selain merekrut kandidat eksternal, untuk memenuhi sebagian kebutuhan posisi jabatan yang kosong, LPEI juga mengangkat pegawai yang bersumber dari lulusan *Leaders for Tommorrow* (LFT) *Batch* ke-2 sebanyak 19 orang pada bulan Januari 2023 dan lulusan dari *Relationship Manager Development Program* sebanyak 20 orang pada bulan Juli 2023.

In addition to recruiting external candidates, to meet some of the vacant position needs, Indonesia Eximbank also appointed employees from the Leaders for Tomorrow (LFT) Batch 2 graduates as many as 19 people in January 2023 and graduates from the Relationship Manager Development Program as many as 20 people in July 2023.

Rekrutmen Menurut Usia dan Gender [401-1]
Recruitment by Age and Gender

Kelompok Usia Age	**2023**		**2022**	
	Laki-Laki Male	**Perempuan** Female	**Laki-Laki** Male	**Perempuan** Female
< 30 Tahun | Years old	24	26	12	10
30 - 50 Tahun | Years old	3	1	13	10
> 50 Tahun | Years old	4	2	5	3
Sub-Jumlah | Sub Total	31	29	20	33
Jumlah | Total	**60**		**53**	

Rekrutmen menurut Usia dan Gender Tahun 2023
Recruitment by Age and Gender in 2023

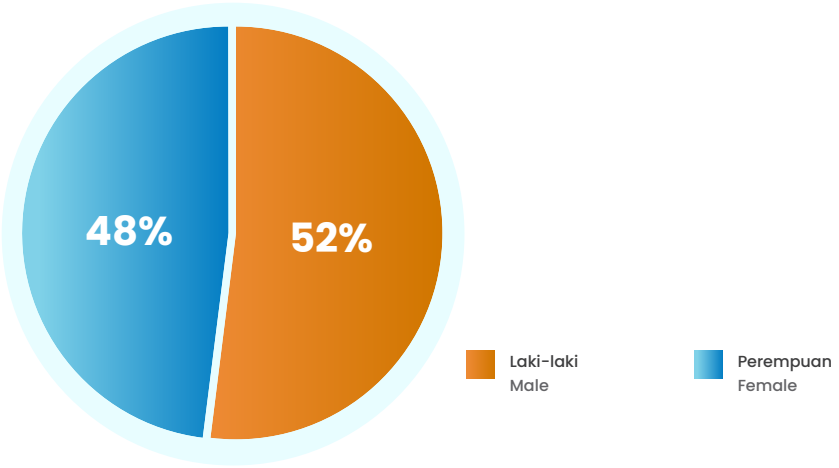

Berdasarkan data yang dicatat oleh Divisi Sumber Daya Manusia, sampai dengan akhir tahun 2023, LPEI mencatat sebanyak 46 orang pegawai meninggalkan Lembaga dengan berbagai alasan seperti mengundurkan diri, pensiun, ataupun meninggal dunia. Dengan memperhitungkan jumlah karyawan yang masuk dan keluar selama 2023, tingkat *turnover rate* pegawai relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Based on the data recorded by the Human Resources Division, until the end of 2023, Indonesia Eximbank recorded a total of 46 employees leaving the institution for various reasons such as resignation, retirement, or death. Taking into account the number of employees joining and leaving during 2023, the relative turnover rate of employees has decreased compared to the previous year as shown in the table below:

Turnover* menurut Usia dan *Gender [401-1]
Turn-over by Age and Gender – 2022 and 2023

Kelompok Usia Age	**2023**		**2022**	
	Laki-Laki Male	**Perempuan** Female	**Laki-Laki** Male	**Perempuan** Female
< 25 Tahun | Years old	0	0	0	0
25-30 tahun | Years old	4	3	5	8
31-35 tahun | Years old	8	3	9	6
36-40 tahun | Years old	9	1	4	4
41-45 tahun | Years old	4	1	7	3
46-50 tahun | Years old	2	0	3	1
≥ 51 tahun | Years old	10	1	14	7
Sub-Jumlah | Sub Total	37	9	20	33
Jumlah | Total	**46**		**71**	

Jumlah dan Alasan Pengunduran Diri [401-1]
Number and Reasons for Resignation

Alasan Reason	2023	2022
Kontrak Berakhir Contract Expired/Terminated	6	9
Mengundurkan Diri Resigned	38	43
Meninggal Dunia Passed-away	0	0
Pensiun Dini Early Retirement	1	18
Pensiun Karier Retirement Career	1	1
Jumlah | Total	**46**	**71**

Secara garis besar, tingkat *turnover* tahun 2023 adalah sebesar 8,37% atau turun 4,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun untuk menjaga kesehatan organisasi, maka fokus yang diutamakan adalah menekan *regretted turnover,* yaitu pegawai yang mengundurkan diri secara sukarela dan memiliki kinerja minimal 'BAIK'; dalam hal ini *regretted turnover* sebesar 6% atau turun sebesar 1,69% dari tahun lalu.

In broad terms, the turnover rate in 2023 was 8.37%, a decrease of 4.62% compared to the previous year. However, to maintain organizational health, the primary focus is on reducing regretted turnover, which refers to employees who voluntarily resign and have at least 'GOOD' performance; in this case, regretted turnover is 6%, a decrease of 1.69% from last year.

Inisiatif yang dilakukan untuk menurunkan angka tersebut yakni dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pegawai untuk mengisi posisi *vacant* melalui mekanisme *internal job posting,* program pengembangan pegawai (*learning*) dan keterlibatan dalam proyek-proyek internal, membuka kesempatan pengembangan karier melalui mutasi serta memberikan retensi kepada pegawai bertalenta.

Initiatives undertaken to reduce this figure include providing extensive opportunities for employees to fill vacant positions through internal job posting mechanisms, employee development programs (learning), and involvement in internal projects, offering career development opportunities through job rotation, and providing retention to talented employees.

Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier

Penilaian kinerja pegawai dilakukan secara objektif dengan sistem *balance scorecard* berdasarkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) setiap pegawai. LPEI memastikan proses evaluasi kinerja pegawai dilakukan secara *fair*, adil dan transparan. Aspek penilaian kinerja pegawai meliputi pencapaian sasaran individu, perilaku kerja dan kompetensi, serta faktor penambah dan faktor pengurang.

Performance Assessment and Career Development

Employee performance evaluations are conducted objectively using a balanced scorecard system based on each employee's Key Performance Indicators (KPIs). Indonesia Eximbank ensures that the employee performance evaluation process is carried out fairly, equitably, and transparently. Aspects of employee performance assessment include individual goal achievement, work behavior and competencies, as well as enhancing and detracting factors.

Pada tahun 2023, Kepala Divisi HRBP mengeluarkan Internal Memo kepada seluruh Kepala Unit Kerja untuk melakukan *Performance Review* tahun 2023 dengan berlandaskan pada peraturan internal berikut:

1. Peraturan Direktur Eksekutif No. 0051/PDE/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia beserta perubahannya pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0024/PDE/07/2018.

In 2023, the Head of the HRBP Division issued an Internal Memo to all Heads of Work Units to conduct the 2023 Performance Review based on the following internal regulations:

1. Executive Director Regulation No. 0051/PDE/2012 dated October 2, 2012, regarding the Performance Appraisal System of Employees of the Indonesian Export Financing Institution, along with its amendments in Executive Director Regulation No. 0024/PDE/07/2018.

2. Seiring dengan berubahnya *Corporate Values*, maka implementasi budaya kerja Lembaga yang baru mengacu pada PDE No. 0010/PDE/07/2022 tentang Nilai-Nilai Budaya LPEI, terdapat penyesuaian terhadap penilaian perilaku Pegawai yang tertuang di dalam form penilaian prestasi kerja Pegawai.

Penjelasan mengenai sistem manajemen kinerja dan pengembangan karier pegawai di LPEI, adalah sebagai berikut:

A. Manajemen Kinerja

Tinjauan kinerja merupakan kegiatan tahunan yang diterapkan bagi setiap pegawai. Pelaksanaan manajemen kinerja dilakukan secara *end to end* melalui *Human Resources Information System (HRIS),* mulai dari kegiatan perencanaan, *monitoring*, hingga evaluasi kinerja setiap pegawai. Data pencapaian kinerja kemudian dikombinasikan dengan data kompetensi pegawai untuk selanjutnya dikategorikan berdasarkan kategori *talent*-nya. Pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja tinggi akan diikutsertakan dalam *talent development program*, sementara pegawai yang masuk dalam kategori kinerja dan kompetensi rendah diikusertakan dalam *performance improvement program.*

Pada tahun 2023, Penilaian kinerja pegawai dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1) Pengisian evaluasi kinerja pegawai oleh *line manager;*
2) Diskusi *one on one* antara *line manager* dengan pegawai yang bersangkutan untuk menyepakati hasil kesepakatan;
3) Rekapitulasi data penilaian kinerja pegawai;
4) Kalibrasi level divisi berdasarkan skor pencapaian unit kerja;
5) Kalibrasi level direktorat berdasarkan skor pencapaian unit kerja;
6) Penetapan *rating* kinerja pegawai;

Seluruh pegawai aktif tertanggal 1 September 2023 dinilai pencapaian kinerjanya tanpa terkecuali (100%).

B. *Performance Review*

Performance review dilakukan sebagai sarana *coaching* dan *mentoring*, diskusi pencapaian kinerja setiap pegawai, dan rencana pengembangan pribadi pegawai. Hasil

2. Along with the change of Corporate Values, the implementation of the new Institution's work culture refers to PDE No. 0010/PDE/07/2022 regarding the Cultural Values of LPEI, there are adjustments to the assessment of Employee behavior contained in the Employee performance appraisal form.

An explanation regarding the performance management system and employee career development at Indonesia Eximbank is as follows:

A. Performance Management

Performance reviews are annual activities applied to every employee. The performance management implementation is carried out end to end through the Human Resources Information System (HRIS), starting from planning, monitoring, to evaluating the performance of each employee. Performance achievement data is then combined with employee competency data to categorize them based on their talent categories. Employees with high competencies and performance will be included in talent development programs, while those with low performance and competency will be included in performance improvement programs.

In 2023, Employee performance evaluations were conducted through several steps as follows:

1) Completion of employee performance evaluations by line managers;
2) One-on-one discussions between line managers and the respective employees to agree on the results;
3) Recapitulation of employee performance evaluation data;
4) Division-level calibration based on unit performance achievement scores;
5) Directorate-level calibration based on unit performance achievement scores;
6) Determination of employee performance ratings;

All active employees as of 1 September 2023, were evaluated for their performance achievements without exception (100%).

B. Performance Review

Performance reviews are conducted as a means of coaching and mentoring, discussing each employee's performance achievements, and planning the employee's personal development.

performance review digunakan sebagai landasan bagi manajemen dalam menentukan besaran jasa produksi, kenaikan gaji, kesempatan promosi, kesempatan memperolah pelatihan khusus, dan pinjaman pegawai. Adapun skema distribusi normal penilaian pegawai LPEI berdasarkan pencapaian kinerja lembaga adalah sebagai berikut:

The results of the performance review are used as a basis for management to determine the amount of production services, salary increases, promotion opportunities, opportunities for special training, and employee loans. The normal distribution scheme of Indonesia Eximbank employee assessments based on institution performance achievements is as follows:

Nilai Pencapaian Lembaga Institution Achievement Value	**Kurang Baik** Not Good	**Cukup Baik** Moderate	**Baik** Good	**Memuaskan** Satisfactory	**Istimewa** Exceptional
>100%	5%	10%	50%	30%	5%
80% < X < 100% *)	5%	20%	50%	20%	5%
70% < X < 80%	22%	52%	17%	5%	4%
< 70%	27%	56%	12%	3%	2%

Selanjutnya, Divisi Sumber Daya Manusia melakukan kalibrasi terhadap hasil penilaian kinerja pegawai sesuai dengan target Lembaga. Dari hasil kalibrasi tersebut, total *headcount* pegawai yang berhasil mengumpulkan nilai adalah sebanyak 519 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Furthermore, the Human Resources Division conducted a calibration of employee performance assessments in accordance with the Institution's targets. From the calibration results, the total headcount of employees who successfully collected scores amounted to 519 individuals, with the following details:

Sebaran Normal dan *Rating* Kinerja Akhir
Normal Distribution and Final Performance Rating

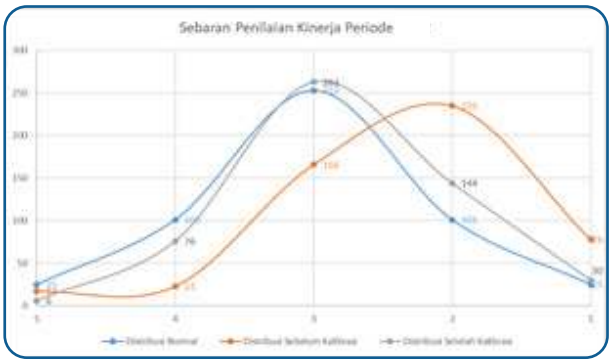

Kelompok PA	**Nilai** Range	**Jumlah** Total	**Persentase** Percentage
Istimewa (1)	>115	30	5%
Memuaskan (2)	105 ≤ X ≤ 115	144	28%
Baik (3)	95 ≤ X < 105	263	51%
Cukup (4)	85 ≤ X < 95	76	15%
Kurang (5)	< 85	6	1%
	Jumlah | Total	**519**	**100%**

Selama tahun 2023, seluruh pegawai (100%) telah dinilai kinerjanya dengan dukungan implementasi *Human Resources Information System*. [404-3]

Throughout 2023, all employees (100%) have been evaluated for their performance with the support of the Human Resources Information System implementation. [404-3]

Pengembangan Jenjang Karier

LPEI memberi kesempatan yang sama dan setara bagi setiap pegawai untuk mengembangkan karier masing-masing berdasarkan kompetensi yang dimiliki melalui sistem *Talent Management* yang telah diimplementasikan di seluruh organisasi untuk posisi-posisi struktural, dimana para pimpinan unit kerja mengidentifikasi talenta dari tiap pegawai di unit kerja masing-masing. Dalam pengembangan karier pegawai, LPEI juga secara konsisten menerapkan kebijakan yang adil (*fair*), memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai laki-laki maupun perempuan.

Proses pengembangan karier pegawai di LPEI salah satunya dilakukan melalui program mutasi baik berupa perubahan Kelompok Jabatan maupun perubahan Golongan Jabatan. Kebijakan mengenai mutasi pegawai telah diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia No. 0024/PDE/10/2022 tentang Mutasi Pegawai yang telah ditetapkan dan diberlakukan sejak 27 Oktober 2022. Pedoman ini mengatur kriteria dan mekanisme pergerakan karier pegawai, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap dengan ruang lingkup yang mencakup namun tidak terbatas pada rangkap jabatan, pejabat *alternate*, promosi, demosi, progresi, regresi, dan rotasi.

Program mutasi di lingkup LPEI bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan juga mendorong produktivitas Lembaga secara keseluruhan melalui penempatan individu yang tepat pada jabatan yang tepat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. Pelaksanaan mutasi merupakan salah satu upaya pengembangan karier pegawai dan strategi retensi untuk mempertahankan pegawai yang berkinerja tinggi.

Dalam menjalankan program mutasi, LPEI senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip kebutuhan organisasi, kinerja, dan kompetensi pegawai, kesesuaian terhadap kualifikasi jabatan yang mencakup pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, kepangkatan pegawai dan pendidikan khusus (sertifikasi), termasuk namun tidak terbatas pada keahlian khusus atau spesialisasi Jabatan, memperhatikan masa Jabatan Pegawai, dan yang terutama adalah implementasi manajemen talenta.

Career Path Development

Indonesia Eximbank provides equal opportunities for every employee to develop their careers based on their competencies through the Talent Management system implemented throughout the organization for structural positions, where unit leaders identify talents from each employee within their respective units. In career development, Indonesia Eximbank consistently applies fair policies, providing equal opportunities for both male and female employees.

Employee career development processes at Indonesia Eximbank include mutation programs, involving changes in Job Groups and Job Grades. Policies regarding employee mutations are outlined in Human Resources Standard Guidelines No. 0024/PDE/10/2022 regarding Employee Mutations, which have been established and enforced since 27 October 2022. These guidelines regulate the criteria and mechanisms for employee career movements, both temporary and permanent, covering but not limited to job transfers, alternate officials, promotions, demotions, progressions, regressions, and rotations.

Mutation programs within Indonesia Eximbank aim to enhance employee performance and overall institutional productivity by placing individuals with the right competencies and qualifications into suitable positions. Mutation implementation serves as a career development effort and retention strategy to retain high-performing employees.

In executing mutation programs, Indonesia Eximbank prioritizes organizational needs, employee performance, and competencies, considering job qualifications such as work experience, educational background, employee rank, and specialized education (certifications), including but not limited to specific job skills or specializations, tenure, and most importantly, talent management implementation.

Terdapat 2 (dua) jenis mutasi yang diterapkan di lingkungan LPEI, yakni:

1. Mutasi bersifat tetap dalam bentuk:
   a) Promosi, yaitu perubahan jabatan pegawai dari kelompok jabatan yang lebih rendah ke kelompok jabatan yang lebih tinggi;
   b) Progresi, yaitu perubahan golongan pegawai (*personal grading*) dari golongan pegawai yang lebih rendah ke golongan pegawai yang lebih tinggi;
   c) Demosi yaitu perubahan jabatan pegawai dari kelompok jabatan tang lebih tinggi ke kelompok jabatan yang lebih rendah;
   d) Regresi yaitu perubahan golongan pegawai (*personal grading*) dari golongan pegawai yang lebih tinggi ke golongan pegawai yang lebih rendah;
   e) Rotasi yaitu perubahan jabatan pegawai dalam kelompok jabatan yang sama.

Mutasi bersifat sementara diatur dengan tujuan untuk mengisi kekosongan jabatan yang disebabkan oleh kekosongan pemangku jabatan definitif karena berhalangan hadir oleh sebab tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada perjalanan dinas, cuti, mengikuti program pelatihan, maupun karena sakit.

Keputusan pelaksanaan mutasi dilakukan melalui matriks kewenangan mutasi yang dibuat berdasarkan kelompok jabatan dan dituangkan ke dalam Surat Keputusan dengan ketentuan:

1) Apabila kewenangan memutus mutasi berada pada Direktur Eksekutif dan/atau Dewan Direktur, Keputusan Mutasi akan dituangkan dalam Keputusan Direktur Eksekutif;
2) Apabila kewenangan memutus mutasi berada pada pejabat di bawah Direktur Eksekutif, Keputusan Mutasi akan dituangkan dalam Keputusan Direktur Pelaksana dengan tembusan kepada Direktur Eksekutif.

Selama 2023, LPEI telah memberikan kesempatan kepada sebanyak 82 pegawai untuk mengembangkan kariernya di Lembaga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 42% di antaranya merupakan pegawai perempuan.

Pensiun dan Persiapan Pensiun [201-3, 404-2]

Sebagai ungkapan apresiasi atas loyalitas dan kinerja yang telah diberikan pegawai bagi kemajuan Lembaga, kami memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan para pegawai, khususnya di hari tua mereka dengan memberikan pembekalan

There are two types of mutations applied within Indonesia Eximbank:

1. Permanent mutations in the form of:
   a) Promotions, involving changes in employee positions from lower job groups to higher job groups;
   b) Progressions, involving changes in employee grades from lower to higher grades;
   c) Demotions, involving changes in employee positions from higher job groups to lower job groups;
   d) Regressions, involving changes in employee grades from higher to lower grades;
   e) Rotations, involving changes in employee positions within the same job group.

Temporary mutations are regulated with the aim of filling vacant positions caused by the absence of definitive position holders due to specific reasons, including but not limited to official travel, leave, participation in training programs, or illness.

Decisions regarding mutation implementation are made through a mutation authority matrix based on job groups and documented in a Decision Letter with the following provisions:

1) If the mutation authority lies with the Executive Director and/or Board of Directors, the Mutation Decision will be documented in an Executive Director's Decision;
2) If the mutation authority lies with officials below the Executive Director, the Mutation Decision will be documented in an Executive Director's Decision with a copy to the Executive Director.

During 2023, Indonesia Eximbank has provided opportunities for 82 employees to develop their careers at Indonesia Eximbank. Of these, 42% are female employees.

Retirement and Retirement Preparation [201-3, 404-2]

As an expression of appreciation for the loyalty and performance demonstrated by employees towards the advancement of the Institution, we pay special attention to the well-being of our employees, particularly in their old age, by providing preparation

bagi pegawai yang akan memasuki masa pensiun. Program Masa Persiapan Pensiun diberikan minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan sebelum memasuki usia pensiun.

for those entering retirement. The Retirement Preparation Program is offered to employees at least 3 (three) months away from retirement and a maximum of 6 (six) months away from retirement.

Melalui program ini, LPEI memberikan pembekalan kepada pegawai yang akan memasuki usia pensiun agar mereka memiliki kesiapan mental dalam menghadapi perubahan yang terjadi setelah pensiun serta memberikan motivasi agar tetap optimis, memiliki paradigma yang positif sebagai pensiunan, serta dapat mengelola waktu yang tersedia untuk tetap hidup dengan semangat. Program ini merupakan program yang tidak mewajibkan pegawai untuk berada di lingkungan kerja namun tetap mendapatkan upah dan manfaat sebagai pegawai, yang dapat diambil oleh pegawai yang menginginkannya.

Through this program, Indonesia Eximbank provides preparation for employees approaching retirement age to ensure they have the mental readiness to face the changes that occur after retirement and to motivate them to remain optimistic, adopt a positive mindset as retirees, and effectively manage their time to live with enthusiasm. This program is optional for employees to be physically present in the workplace but still receive wages and benefits, which can be availed by employees who desire it.

Selama tahun 2023, tidak ada pegawai yang mengikuti program pelatihan persiapan masa pensiun. Adapun program pelatihan persiapan masa pensiun telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, dengan akumulasi peserta selama periode 2014 – 2021 adalah sejumlah 28 orang pegawai. [201-3, 404-2]

Throughout 2023, no employees participated in the retirement preparation training program. However, retirement preparation training programs have been conducted in recent years, with a total of 28 employees participating from 2014 to 2021. [201-3, 404-2]

Selain memberikan pelatihan menjelang pensiun, LPEI juga mengikutsertakan pegawai dalam program pensiun, yaitu program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, setiap pegawai akan mendapat manfaat (dana) pensiun saat memasuki usia purna bakti yang dapat mereka gunakan sebagai modal berwirausaha maupun melakukan kegiatan produktif lainnya di masa pensiunnya. Seluruh pegawai tetap didaftarkan program pensiun antara lain:

- Dana Pensiun yang dikelola DPLK
- BPJS Pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan

In addition to providing retirement preparation training, Indonesia Eximbank also enrolls employees in retirement programs, namely the Financial Institution Pension Fund (DPLK) and the Pension Guarantee Program (JP) of the Employment Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan). Thus, every employee will receive retirement benefits (funds) upon reaching retirement age, which they can use as capital for entrepreneurship or engage in other productive activities during retirement. All employees are registered for retirement programs, including:

- Pension Fund managed by DPLK
- Pension by BPJS Ketenagakerjaan

LPEI berkontribusi bagi pembayaran premi iuran program pensiun tersebut, dengan besaran sebagai berikut: [201-3]

Indonesia Eximbank contributes to the payment of premium contributions for these retirement programs, with the following amounts: [201-3]

Program Pensiun Retirement Program	**Iuran Lembaga** Institution Fees	**Iuran Pegawai** Employee Fees
BPJS Jaminan Pensiun Pension by BPJS Ketenagakerjaan	3% Gaji | Salary	0% Gaji | Salary
Iuran Dana Pensiun (DPLK) Pension Fund managed by DPLK	6% Gaji | Salary	4% Gaji | Salary

Digitalisasi Pengelolaan SDM

Digitalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menjadi salah satu proses penting yang harus dilakukan mengingat perkembangan teknologi informasi yang cukup masif selama dekade terakhir. Karena itu, LPEI mencoba beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan melakukan pembaharuan pada sistem kerja SDM menuju ke arah digitalisasi. Tonggak sejarah baru dalam *milestones* digitalisasi SDM di LPEI ditunjukkan melalui penggunaan HRIS Sunfish yang disediakan oleh PT Indodev Niaga Internet sejak akhir tahun 2019.

Pengembangan HRIS

Sepanjang tahun 2023, LPEI telah melakukan *enhancement* HRIS sebagai kelanjutan pembangunan otomasi sistem kepegawaian yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. *Enhancement* HRIS ini dilakukan karena adanya kebutuhan *improvement* dari Divisi HR Services & People Development dan Divisi HRBP & Recruitment pada aplikasi HRIS guna keperluan otomasi HR Processes termasuk pada penyempurnaan pencatatan jadwal masuk pegawai, baik pegawai yang bekerja dengan status WFO (*Work from Office*) maupun WFA (*Work from Anywhere*). Penyempurnaan juga dilakukan dengan integrasi penarikan laporan pada aplikasi *Learning Management System* (LMS) LPEI, perubahan *flow* akses pada pengisian *Performance Appraisal* tahunan, penyempurnaan laporan Laporan BTK (Biaya Tenaga Kerja) dan *reminder by e-mail* untuk pegawai yang tidak melakukan absensi selama 3 hari berturut-turut.

Adapun *enhancement* HRIS dimulai pada Januari 2023 dan go live pada bulan Maret 2023. Ruang lingkup *enhancement* HRIS tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Kustomisasi menu Time & Attendance, melakukan pilihan kepada pegawai untuk menentukan sendiri Employee Shift dan pembuatan reminder pop up by email untuk pegawai yang tidak melakukan absensi selama 3 hari berturut-turut;
2) Kustomisasi Laporan BTK pada modul Payroll;
3) Kustomisasi akses edit pada pengisian *Performance Planning Form* dan fungsi kontrol untuk setiap nilai *Performance Appraisal* yang sudah tersedia pada HRIS; dan
4) Sinkronisasi laporan pelatihan dengan aplikasi *Learning Management System*.

Digitalization of HR Management

The digitization of Human Resource Management (HRM) has become a crucial process considering the significant advancements in information technology over the past decade. Hence, Indonesia Eximbank endeavors to adapt to technological developments by modernizing its HRM system towards digitization. A new milestone in the digitalization of HRM at Indonesia Eximbank is marked by the adoption of the HRIS Sunfish provided by PT Indodev Niaga Internet since late 2019.

HRIS Development

Throughout 2023, Indonesia Eximbank has enhanced its HRIS as a continuation of the automation of the personnel system undertaken in the previous year. These enhancements were driven by the improvement needs of the HR Services & People Development Division and the HRBP & Recruitment Division in automating HR processes, including refining employee attendance recording, for both WFO (Work from Office) and WFA (Work from Anywhere) employees. Enhancements also include integrating report retrieval in the Indonesia Eximbank Learning Management System (LMS) application, modifying access flow in the annual Performance Appraisal form filling, refining Labor Cost Report (BTK) generation, and sending email reminders to employees who have not attended work for three consecutive days.

The HRIS enhancements commenced in January 2023 and went live in March 2023. The scope of HRIS enhancements in 2023 includes:

1) Customization of the Time & Attendance menu, allowing employees to determine their own Employee Shift and creating pop-up email reminders for employees who have not attended work for three consecutive days;
2) Customization of the BTK Report in the Payroll module;
3) Customization of edit access in the Performance Planning Form filling and control function for each Performance Appraisal score available in the HRIS; and
4) Synchronization of training reports with the Learning Management System application.

Sejak diselesaikannya enhancement HRIS dimaksud, dirasakan manfaat langsung oleh user/admin *user* karena memberikan percepatan terhadap *service level agreement* (SLA) proses HR, antara lain:

1) Pegawai dapat menentukan sendiri *Employee Shift* yang diharapkan sesuai dengan peraturan tentang Waktu Kerja yang berlaku saat ini. Jadwal ini juga sudah harus melalui persetujuan dari pimpinan unit kerja untuk kemudian dilakukan persetujuan final oleh HR;
2) Telah diperolehnya keakuratan dan kecepatan penarikan data laporan BTK;
3) Peningkatan kecepatan proses perubahan atau revisi hasil *Performance Appraisal* dari pegawai;
4) Pelatihan yang diikuti pegawai melalui aplikasi *Learning Management System* dapat terintegrasi dengan HRIS sehingga data laporan dapat ditarik secara real time; dan
5) Absensi pegawai menjadi terkontrol karena *reminder by e-mail* yang dikirimkan.

Penghargaan Pengelolaan SDM

Buah dari konsistensi dan komitmen LPEI dalam menjalankan sistem manajemen SDM secara profesional dengan mengedepankan prinsip kesetaraan bagi semua pegawai, pada tahun 2023, LPEI mendapatkan penghargaan dari One GML di ajang Stellar Workplace Award pada kategori "*Recognition in Employee Satisfaction*" dan "*Recognition in Employee Commitment*". Perolehan penghargaan ini menunjukkan bahwa LPEI telah berhasil memberikan tingkat kepuasan dan komitmen yang tinggi dari pegawai sepanjang 2023.

Strategi Pengembangan SDM Di Tahun 2023

Pada tahun 2023, strategi pengembangan SDM di LPEI berfokus pada 5 (lima) *key initiatives* berikut ini:

- *Organization transformation & strategic workforce planning*
- *Culture building & engagement & enablement*
- *Reskill & upskill employees* untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas
- *Performance & merit based reward system*
- *Increase productivity, while maintaining cost effectiveness*

Fokus Pengembangan SDM di Tahun 2023

Pada tahun 2023, Lembaga berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memperkuat kompetensi pegawai. Program-program yang dilaksanakan berfokus pada penguatan di *Three Lines of Defense – building Risk Knowledge and Awareness* sebagai bagian dari upaya menanamkan budaya sadar risiko yang kuat, penguatan *core competency* melalui

Since the completion of these HRIS enhancements, immediate benefits have been felt by users/admin users due to the acceleration of service level agreement (SLA) processes, including:

1) Employees can determine their own Employee Shift in line with current Working Time regulations. This schedule also requires approval from the unit's leadership before final approval by HR;
2) Improved accuracy and speed in retrieving BTK report data;
3) Increased speed in the process of changing or revising employee Performance Appraisal results;
4) Training attended by employees through the Learning Management System application can be integrated with HRIS, allowing real-time report data retrieval; and
5) Employee attendance is better managed due to e-mail reminders sent.

HR Management Award

As a result of Indonesia Eximbank consistency and commitment in running a professional HR management system by prioritizing the principle of equality for all employees, in 2023, Indonesia Eximbank received an award from One GML at the Stellar Workplace Award in the categories "Recognition in Employee Satisfaction" and "Recognition in Employee Commitment". The acquisition of this award shows that Indonesia Eximbank has succeeded in providing a high level of satisfaction and commitment from employees throughout 2023.

HR Development Strategy in 2023

In 2023, Indonesia Eximbank's HR development strategy focuses on the following 5 (five) key initiatives:

- Organizational transformation & strategic workforce planning
- Culture building & engagement & empowerment
- Reskill & upskill employees to enhance competencies and capabilities
- Performance & merit based reward system
- Improving productivity while maintaining cost effectiveness

HR Development Focus in 2023

In 2023, the Institute is committed to continuously improving and strengthening employee competencies. The programs implemented focus on strengthening the Three Lines of Defense - building Risk Knowledge and Awareness as part of efforts to instill a strong risk-aware culture, strengthening core competencies through mandatory programs, strengthening

mandatory program, penguatan kompetensi sesuai fungsi masing-masing jabatan misalnya tentang produk dan proses bisnis, serta sertifikasi profesi, serta penguatan pada personal development baik dari sisi *soft skill* maupun technical skill. Kegiatan pelatihan dan pengembangan tersebut dilakukan dengan cara *in-class* (baik *online* maupun *offline*), belajar mandiri (*self-paced learning/e-learning*), ataupun melalui bimbingan (*coaching/mentoring*).

competencies according to the functions of each position, for example on products and business processes, as well as professional certifications, and strengthening personal development both in terms of soft skills and technical skills. The training and development activities are conducted through in-class (both online and offline), self-paced learning (e-learning), or through coaching/mentoring.

Secara keseluruhan pelatihan dan pengembangan pegawai dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan terhadap kemampuan baru (*Re-skilling*) bagi pegawai sebagai bekal untuk suatu saat menempati posisi berbeda di Lembaga dan meningkatkan kemampuan yang sudah dimiliki Pegawai (*Up-skilling*). Hasil pengembangan dan pelatihan pegawai akan diintegrasikan dengan implementasi manajemen karir dan kinerja. Dengan adanya *Reskilling* dan *Upskilling* diharapkan Pegawai dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja lembaga dalam menjalankan mandat.

Overall, employee training and development is carried out with the aim of providing training on new skills (Re-skilling) for employees as a provision for one day occupying a different position in the Institution and improving the skills that employees already have (Up-skilling). The results of employee development and training will be integrated with the implementation of career and performance management. With Reskilling and Upskilling, employees are expected to contribute to improving the performance of the institution in carrying out its mandate.

Rencana Pengembangan SDM di Tahun 2024 M

Pada tahun 2024 mendatang, fokus pengembangan SDM LPEI adalah sebagai berikut:

1. Transformasi organisasi dan perencanaan tenaga kerja yang strategis.
2. Membangun budaya dan *engagement* dan *enablement*;
3. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas pegawai;
4. Pelaksanaan sistem *rewards* berbasis kinerja dan meritokrasi; dan
5. Meningkatkan produktivitas dengan tetap mempertahankan efektivitas biaya.

HR Development Plan in 2024

In 2024, the focus of Indonesia Eximbank's human resource development is as follows:

1. Organizational transformation and strategic workforce planning.
2. Develop a Culture of engagement and enablement;
3. Improving employee competencies and capabilities;
4. Implementation of performance-based rewards system and meritocracy; and
5. Improving productivity while maintaining cost effectiveness.

LPEI Bagi Masyarakat Sekitar
Indonesia Eximbank for the Surrounding Community

KOMITMEN, DASAR HUKUM, DAN KEBIJAKAN

Komitmen

Dalam menjalankan bisnis berkelanjutan, LPEI menyadari posisinya sebagai mitra Pemerintah dan agen perubahan yang menggerakkan roda perekonomian nasional terutama dari sisi aktivitas ekspor dan impor. Dalam menjalankan amanah besar tersebut sebagai SMV Kementerian Keuangan RI, LPEI berkomitmen untuk senantiasa memberikan dukungan menyeluruh melalui usahanya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengupayakan penyelarasan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sebagai Lembaga yang terus bertumbuh dan beroperasi di Indonesia, LPEI berkomitmen untuk membagikan pengaruh positif dan memastikan keberadaannya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat Indonesia. LPEI memandang bahwa pelibatan dengan pemangku kepentingan dapat menciptakan nilai bersama (*creating shared values)* dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, LPEI terus berusaha untuk menjalin kolaborasi dan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang telah dijalankan secara berkesinambungan ataupun lewat berbagai inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan TJSL serta program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat LPEI mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

COMMITMENT, LEGAL BASIS, AND POLICIES

Commitment

In conducting sustainable business operations, Indonesia Eximbank recognizes its position as a government partner and a catalyst for driving the national economy, particularly in terms of export and import activities. In fulfilling this significant mandate as a Financial Services Supporting Institution under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Indonesia Eximbank is committed to consistently providing comprehensive support through its efforts towards sustainable economic development, striving to align economic, social, and environmental interests.

As an institution that continues to grow and operate in Indonesia, Indonesia Eximbank is committed to exerting a positive influence and ensuring its presence is beneficial to stakeholders, especially the Indonesian society. Indonesia Eximbank perceives that engagement with stakeholders can create shared value in the long term. Therefore, Indonesia Eximbank continues to strive to foster collaboration and build harmonious relationships with the community through various empowerment programs that have been consistently implemented, as well as through various Social and Environmental Responsibility (SER) initiatives tailored to the development and needs of the community.

Legal Basis

The implementation of CSR activities and Indonesia Eximbank Community Development and Empowerment programs refer to several applicable regulations, as follows:

1) Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on Financial Sector Development and Strengthening;

2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 208/PMK.06/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lampiran Poin G. II. No. 72 mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial untuk mendukung keberlanjutan operasional LPEI;
3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.04/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 6 poin d dan Pasal 5 mengenai informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; dan

Kebijakan [2-24]

Selain mengacu pada regulasi di atas, LPEI juga memiliki Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang digunakan sebagai pedoman dan landasan dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan TJSL serta program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Di samping mengacu pada pedoman Kebijakan Keuangan Berkelanjutan, LPEI juga menaruh perhatian penuh terhadap aspek sosial dalam hal ini Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat, yang diwujudkan melalui Program Kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0004/PDD/06/2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Dana Program Kemitraan Eks PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

Program Kemitraan ini disalurkan dalam rangka pemberian pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap oleh Mitra Binaan guna meningkatkan produksi dan penjualan, serta membiayai pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan dalam rangka menunjang ekspor dan juga untuk melakukan kajian atau penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan.

2) Minister of Finance Regulation (PMK) No. 208/PMK.06/2021 dated December 30, 2021 regarding Governance Principles, Risk Management Principles, and Know Your Customer Principles for Indonesian Export Financing Institutions. Annex Point G. II. No. 72 concerning the implementation of social responsibility to support Indonesia Eximbank's operational sustainability;
3) Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.04/2015 dated June 26, 2015 regarding the Website of Issuers or Public Companies, Article 6 point d and Article 5 regarding Corporate Social Responsibility information;
4) Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 Concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies;
5) Financial Services Authority Regulation No. 9/POJK.05/2022 regarding the Supervision of Indonesia Eximbank.
6) Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) 16/SEOJK.04/2021 regarding the Form and Content of Issuers' or Public Companies' Annual Reports; and

Policies [2-24]

In addition to referring to the above regulations, Indonesia Eximbank also has Institutional ESG Policies used as guidelines and foundations in formulating and implementing CSR activities and Community Development and Empowerment programs. In addition to referring to the Institutional ESG Guidelines, Indonesia Eximbank also pays full attention to social aspects in Community Development and Empowerment, which are manifested through Partnership Programs as regulated in Board of Directors Regulation (PDD) No. 0004/PDD/06/2020 concerning the Management Policy of the Partnership Program Funds of Former PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

This Partnership Program is channeled in the form of loans to finance working capital and/or the purchase of fixed assets by Partner Institutions to increase production and sales, as well as to finance education, training, marketing, promotion, and other matters related to increasing the productivity of Partner Institutions to support exports and also to conduct studies or research related to partnership programs.

Visi
Vision

Corporate Social Responsibility LPEI
Indonesia Eximbank Corporate Social Responsibility

Turut berperan aktif dalam memajukan Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fundamental ekonomi berbasis ekspor sesuai dengan visi dan misi Lembaga.

Actively participate in promoting Indonesia through community empowerment and the development of export-based economic fundamentals in accordance with the vision and mission of the Institution.

Misi
Mission

Corporate Social Responsibility LPEI
Indonesia Eximbank Corporate Social Responsibility

1. **Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui *capacity building* guna menyejahterakan masyarakat Indonesia.**
2. **Meningkatkan sinergi antar Lembaga dalam memajukan ekonomi berbasis UKM berorientasi ekspor.**
3. **Menghantar pelaku UKM untuk melakukan ekspor.**

1. Improving skills and knowledge through capacity building to improve the welfare of the Indonesian society.
2. Increase synergy between institutions in promoting an export-oriented SME-based economy.
3. Drive SMEs to export.

DAMPAK OPERASI TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR

Kegiatan operasional LPEI secara langsung tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan ataupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebaliknya, melalui berbagai program pemberdayaan yang sudah kami rancang secara seksama baik untuk para pelaku UMKM maupun masyarakat, LPEI menilai keberadaannya telah berhasil memberikan kontribusi positif dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di area operasi serta juga meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia di pasar global.

IMPACT OF OPERATIONS ON SURROUNDING COMMUNITIES

Operational activities of Indonesia Eximbank directly do not have negative impacts on the environment or social livelihoods. On the contrary, through various empowerment programs meticulously designed for both MSMEs and the community, Indonesia Eximbank assesses that its presence has successfully contributed positively to supporting the improvement of community living standards in operational areas as well as enhancing the competitiveness and added value of Indonesian products in the global market.

Apabila ditelaah lebih lanjut, berbagai produk dan layanan jasa yang disediakan LPEI diyakini telah menghadirkan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat dan dunia usaha, di antaranya mencetak eksportir baru dan UMKM *scaling-up* untuk menjadi *bankable* melalui program CPNE dan *Marketing Handholding,* menghadirkan komunitas yang berorientasi ekspor melalui program Desa Devisa, memastikan terpenuhinya informasi, edukasi, pembiayaan dan *Community Development* Desa Devisa kepada para pelaku usaha khususnya UMKM termasuk komunitas yang memiliki produk unggulan berorientasi Ekspor melalui Rumah Ekspor, serta mendukung terciptanya aktivitas ekspor berkelanjutan melalui fasilitasi akses pembiayaan, penjaminan dan asuransi, dengan berkolaborasi bersama Lembaga Keuangan lainnya.

Upon closer examination, various products and services provided by Indonesia Eximbank are believed to have brought many benefits to the community and business world, including creating new exporters and scaling-up MSMEs to become bankable through the CPNE and Marketing Handholding programs, establishing export-oriented communities through the Go Export Village program, ensuring the fulfillment of information, education, financing, and Community Development for Go Export Village to business actors, especially MSMEs, including communities with export-oriented flagship products through Rumah Ekspor, and supporting the creation of sustainable export activities through facilitating access to financing, guarantees, and insurance, collaborating with other financial institutions.

Dampak positif lainnya yang dibagikan LPEI kepada masyarakat luas juga diwujudkan melalui pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program TJSL yang berfokus pada bidang sosial kemasyarakatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Another positive impact shared by Indonesia Eximbank with the wider community is manifested through active community involvement in supporting the implementation of TJSL programs focused on social and environmental preservation.

Kendati begitu, potensi dampak negatif terhadap lingkungan hidup atau risiko sosial lainnya tetap dapat muncul sewaktu-waktu terutama dari aktivitas pembiayaan yang dilakukan Lembaga. Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau yang tidak bertanggung jawab, LPEI telah menyusun mekanisme analisis pembiayaan yang tertuang dalam Memorandum Analisa Pembiayaan yang menganalisa kualitas dan kuantitas dari calon nasabah. Dalam manual tersebut, LPEI secara tegas menyatakan menghindari pemberian pembiayaan untuk proyek atau usaha yang secara nyata membahayakan lingkungan. LPEI juga mengatur terkait *Industry Financing Reference* (IFR) yang mana didalamnya juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

However, potential negative impacts on the environment or other social risks can still arise at any time, especially from the financing activities conducted by the Institution. To prevent problematic or irresponsible financing, Indonesia Eximbank has developed financing analysis mechanisms outlined in the Financing Analysis Memorandum that analyze the quality and quantity of prospective customers. In this manual, Indonesia Eximbank explicitly states its avoidance of financing for projects or businesses that pose real environmental hazards. Indonesia Eximbank also regulates the Industry Financing Reference (IFR), which also considers environmental and social aspects.

Dengan berpegang pada pedoman yang ada serta sebagai perwujudan atas penerapan praktik tata kelola yang baik, LPEI memastikan kegiatan operasionalnya tidak pernah membahayakan lingkungan sekitar ataupun membawa dampak negatif bagi masyarakat dan para pelaku UMKM yang tinggal di area operasional.

By adhering to existing guidelines and as an embodiment of the application of good governance practices, Indonesia Eximbank ensures that its operational activities never jeopardize the surrounding environment or have negative impacts on the community and MSMEs living in operational areas.

PENYUSUNAN PROGRAM TJSL

Perjalanan panjang LPEI dalam melewati berbagai tantangan di dunia bisnis menuju keberlangsungan usaha di masa depan tentu tidak akan bisa tercapai tanpa adanya dukungan dari para

DEVELOPMENT OF CSR PROGRAM

The long journey of Indonesia Eximbank in overcoming various challenges in the business world towards future sustainability would certainly not be achievable without the support of stakeholders, especially the

pemangku kepentingan, terutama masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Berangkat dari kesadaran akan hal ini, LPEI berkomitmen untuk menjaga ritme pertumbuhan bisnis yang solid dan berkesinambungan, namun juga diimbangi dengan pemberian manfaat positif terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pelaksanaan Program TJSL yang sejalan dengan pencapaian SDGs.

Untuk mewujudkan hal itu, LPEI menyelenggarakan program pelibatan dan pengembangan masyarakat di bawah payung program TJSL yang mengusung moto (*tagline*): "Sahabat Ekspor". Melalui program TJSL ini, LPEI mempersiapkan para pelaku UKM untuk menjadi eksportir yang tangguh dan beretika, serta senantiasa menjaga keseimbangan lingkungan melalui kepedulian terhadap pelestarian alam.

Dalam merumuskan program TJSL setiap tahunnya, LPEI berupaya semaksimal mungkin melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti komunitas mitra UKM binaan atau masyarakat, agar program yang dihadirkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, serta dapat memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sesuai dengan tujuan LPEI untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, LPEI memastikan telah merancang program-program sosial dan pemberdayaan yang tepat guna dan berkesinambungan serta berdampak jangka panjang. LPEI berkomitmen untuk bersinergi, bersatu, dan bergotong royong mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TJSL TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, program TJSL LPEI masih berfokus pada pengembangan Program Desa Devisa, yang berbasis *community development.* Melalui program ini, LPEI memberikan pendampingan dan pengembangan kapasitas kepada para pelaku usaha di wilayah yang memiliki produk unggulan berorientasi ekspor dengan tujuan untuk membawa produk lokal Indonesia mendunia. Program Desa Devisa merupakan implementasi dari tugas yang diamanatkan Pemerintah kepada LPEI untuk terus mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia.

Selain bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di kancah internasional, program Desa Devisa juga terbukti berhasil meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan bagi lebih dari lebih dari 80.234 (akumulasi) atau 63.836 (2023) penerima manfaat yang terkait dengan pengembangan komoditas dan program Desa Devisa.

community and the surrounding environment of the company. With awareness of this, Indonesia Eximbank is committed to maintaining a solid and sustainable business growth rhythm, balanced with providing positive benefits for improving the quality of life and welfare of the community through the implementation of the TJSL Program, which aligns with the achievement of SDGs.

To realize this, Indonesia Eximbank organizes community engagement and development programs under the umbrella of the TJSL program, which carries the motto (tagline): "Export Partners." Through this TJSL program, Indonesia Eximbank prepares MSMEs to become resilient and ethical exporters, while also maintaining environmental balance through concern for nature conservation.

In formulating the TJSL program each year, Indonesia Eximbank strives to involve all stakeholders as much as possible, such as partner MSME communities or the public, so that the programs presented are truly in line with needs and can provide benefits to the economy, society, and the environment. In line with Indonesia Eximbank goal to continue growing and developing together with the community, Indonesia Eximbank ensures that it has designed social and empowerment programs that are purposeful, sustainable, and have long-term impacts. Indonesia Eximbank is committed to synergizing, uniting, and collaborating to achieve the welfare of the surrounding community.

REALIZATION OF TJSL PROGRAMS AND ACTIVITIES IN 2023

Throughout 2023, Indonesia Eximbank TJSL program remained focused on the development of the Go Export Village Program, which is based on community development. Through this program, Indonesia Eximbank provides assistance and capacity building to business actors in areas that have export-oriented flagship products with the aim of bringing Indonesian local products to the global market. The Go Export Village Program is the implementation of the task entrusted by the Government to Indonesia Eximbank to continue driving Indonesia's export growth.

In addition to aiming to enhance the competitiveness of local products on the international stage, the Go Export Village program has also proven successful in improving the economic, social, and environmental livelihoods for more than 80,234 (accumulation) or 63,836 (2023) beneficiaries related with commodity development and the Go Export Village program.

Secara keseluruhan terdapat 3 (tiga) kelompok kegiatan TJSL yang dijalankan oleh LPEI, yaitu:

1. **Kegiatan berbasis *community development* yang berkaitan erat dengan dukungan pencapaian SDGs:**

Overall, there are three groups of TJSL activities conducted by Indonesia Eximbank:

1. **Community development-based activities closely related to supporting the achievement of SDGs:**

Program TJSL yang Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs Tahun 2023
TJSL Programs that Support the Achievement of SDGs Goals in 2023

Jenis Kegiatan Activity	**SDGs**	**Penjelasan** Explanation	**Capaian** Achievement
Desa Devisa Kacang Mete NTB	- Pemberdayaan perempuan - Pemberdayaan disabilitas	Cakupan 40 Desa dengan melibatkan 7.654 Petani Mete, Pendampingan dimulai pada November 2023	Telah mengirimkan sampel ke Selandia Baru dan Singapura.
Cashew Nut West Nusa Tenggara Go Export Village	- Women empowerment - Disability empowerment	Covering 40 Villages, involving 7,654 Cashew Farmers, Assistance started in November 2023	Sending samples to New Zealand and Singapore.
Desa Devisa Batik Madura	- Pemberdayaan perempuan	Cakupan 11 Desa dengan melibatkan 149 Pengrajin, Pendampingan dimulai pada Maret 2023	- Telah ekspor ke negara malaysia, Jepang, Korea, Amerika Serikat, Arab Saudi, Singapura, Thailand, Australia. - Penjualan ekspor tahun 2023 mencapai 70% dari total ekspor ± Rp3,9 Miliar
Madura Batik Go Export Village	- Women empowerment	Covering 11 villages involving 149 artisans, the asssitance began in March 2023.	- Exported to Malaysia, Japan, Korea, US, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, Australia. - Export in 2023 reached 70% of the total exports, approximately Rp3.9 billion.
Desa Devisa Gula Aren Pacitan	- Pemberdayaan perempuan	Cakupan 11 Desa dengan melibatkan +- 299 penderes dan perajin, Pendampingan dimulai pada Agustus 2023	Telah melakukan *indirect* ekspor ke Kanada.
Pacitan Aren Sugar Go Export Village	- Women Empowerment	Covering 11 villages involving approximately 299 tappers and artisans, mentoring began in August 2023.	Indirect exports to Canada have been conducted.
Desa Devisa Tenun NTT	- Pemberdayaan perempuan	Cakupan 31 Desa dengan melibatkan 522 Penenun, Pendampingan dimulai pada September 2023	Terdapat potensi ekspor ke negara Arab Saudi, UAE, dan Asia Tenggara.
East Nusa Tenggara Weaving Go Export Village	- Women Empowerment	Covering 31 villages involving 522 weavers, assistance began in September 2023.	There is potential for exports to Saudi Arabia, the UAE, and Southeast Asia.
Desa Devisa Kakao Kolaka Utara	- Pertumbuhan Ekonomi - Pengentasan Kemiskinan	Cakupan 100 Desa dengan melibatkan 4.651 petani, Pendampingan dimulai pada Agustus 2023	Telah melakukan *indirect* ekspor ke Jepang.
North Kolaka Cocoa Go Export Village	- Economic Growth - Poverty Alleviation	Covered 100 villages involving 4,651 farmers, assistance began in August 2023.	Indirect exports to Japan have been conducted.
Desa Devisa Kerajinan Hulu Sungai Utara Kalsel	- Ramah Lingkungan	Cakupan 8 Desa dengan melibatkan 160 pengrajin, Pendampingan dimulai pada September 2023	Telah melakukan *indirect* ekspor ke Jepang.
Hulu Sungai Utara South Kalimantan Craft Go Export Village	- Environmental Friendly	Covered 8 villages involving 160 artisans, assistance began in September 2023.	Indirect exports to Japan have been conducted.
Desa Devisa Bulu Mata Purworejo	- Pemberdayaan Perempuan	Cakupan 4 Desa dengan melibatkan 80 pengrajin, Pendampingan dimulai pada Februari 2023	Telah mengekspor 100% produknya ke Turki sebesar 50%, Amerika Serikat 30% dan lainnya sebesar 20%
Purworejo Eyelashes Go Export Village	- Women Empowerment	Covered 4 villages involving 80 artisans, mentoring began in February 2023.	Exported 100% of its products, 50%, to Turkey, 30% to the United States, and 20% to other countries.
Desa Devisa Kopi Bandung	- Pemberantasan Kemiskinan, - Pertumbuhan Ekonomi	Cakupan 35 Desa dengan melibatkan 2.442 petani, Pendampingan dimulai pada November 2023	Telah melakukan *indirect* ekspor ke Korea dan Jerman
Bandung Cofee Go Export Village	- Poverty Alleviation, - Economic Growth:	Covered 35 villages involving 2,442 farmers, assistance began in November 2023.	Indirect exports to Korea, and Germany have been conducted.

***SUCCESS STORY*:**

Desa Devisa Batik Aromaterapi Tembus Pasar Internasional

Batik Aromatherapy Go Export Village Penetrates International Market

LPEI terus menguatkan komitmennya untuk mewujudkan ekosistem ekspor yang berkelanjutan agar dapat berkontribusi lebih besar bagi peningkatan kinerja ekspor nasional. Bukti nyata atas komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui program Desa Devisa Batik Aromaterapi yang kini telah menaungi 149 pengrajin perempuan yang berasal dari 11 desa yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep.

Indonesia Eximbank continues to strengthen its commitment to realising a sustainable export ecosystem in order to contribute more to improving national export performance. One of the tangible proofs of this commitment is through the Go Export Village Batik Aromatherapy program, which now supports 149 craftswomen from 11 villages spread across Bangkalan, Pamekasan, and Sumenep districts.

Dalam mengembangkan Batik Aromaterapi, LPEI bekerja sama dengan UMKM lokal, yaitu PT SInar Madura (Al- Waritz) yang sudah sejak lama menjadi mitra binaan LPEI. Batik aromaterapi memiliki karakteristik unik karena dapat mengeluarkan aroma wangi-wangian rempah dan bunga yang berasal dari kain batiknya. Aroma wangi akan bertahan 1 bulan s/d 4 tahun meskipun sudah dicuci berulang-ulang.

In developing the Batik Aromatherapy program, Indonesia Eximbank collaborates with local MSMEs, namely PT SInar Madura (Al- Waritz) which has long been a fostered partner of Indonesia Eximbank. Batik aromatherapy has a unique characteristic because it can emit the fragrance of spices and flowers from the batik cloth. The fragrance will last 1 month to 4 years even after repeated washing.

Pada program Desa Devisa Batik Aromaterapi ini LPEI memberikan pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan kepada para pengrajin mulai dari pelatihan praktik mendesain batik gentong madura dan upaya peningkatan kapasitas produksi. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu para pengrajin agar dapat menghasilkan desain batik baru yang sesuai dengan selera pasar sehingga pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pengajin dari sebelumnya berpendapatan Rp300.000/bulan menjadi Rp1,25 juta/bulan. Sementara dari sisi kapasitas produksi, LPEI mendorong peningkatan produksi batik dari 400 lembar per hari menjadi 4.000 lembar per hari.

Through the Go Export Village Batik Aromatherapy program, Indonesia Eximbank provides comprehensive and sustainable support to the artisans, starting with practical training in the design of Maduranese batik gentong and efforts to increase production capacity. This support aims to help the artisans produce new batik designs that suit the market tastes, which in turn is expected to improve the welfare of the artisans from previously receiving Rp300,000/month to Rp1.25 million/month. Meanwhile, in terms of production capacity, Indonesia Eximbank encourages an increase in batik production from 400 pcs per day to 4,000 pcs per day.

Berkat dukungan LPEI melalui program Desa Devisa, produk batik aromaterapi yang dihasilkan oleh pengrajin lokal di Jawa Timur kini sudah didatangi banyak peminat dari berbagai negara, antara lain Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang.

Thanks to Indonesia Eximbank's support through the Go Export Village program, aromatherapy batik products produced by local artisans in East Java have now been visited by many enthusiasts from various countries, including the United States, Malaysia, Singapore, Korea, Japan.

2. Program TJSL yang Mendukung Kerangka ESG

LPEI terus berusaha mendorong keberlangsungan UMKM Indonesia agar senantiasa mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensinya sehingga produk-produk lokal yang dihasilkan dapat menembus pasar global. Untuk bisa mewujudkan cita-cita dan mimpi besar tersebut, LPEI telah melakukan sejumlah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor nasional melalui pemberdayaan kelompok UMKM, salah satunya melalui *Coaching Program for New Exporter* (CPNE) bagi para mitra binaan. Melalui program ini, LPEI memberikan berbagai jenis pelatihan yang komprehensif dan berjenjang selama satu tahun.

Pada tahun 2023, LPEI menyelenggarakan CPNE di berbagai wilayah Indonesia dan diikuti oleh ratusan peserta yang notabene adalah pelaku UMKM. Pada kesempatan tersebut, LPEI memberikan pengenalan atau menginformasikan hal-hal terkait sertifikasi ESG yang diminta oleh negara-negara tujuan ekspor. Dengan mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai aktivitas perdagangan dan regulasi yang berlaku di negara tujuan ekspor, LPEI berharap para peserta dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar produk-produk yang dimiliki dapat menembus pasar internasional dan dipastikan telah memenuhi syarat regulasi yang berlaku di negara tujuan masing-masing.

Berikut ini adalah daftar kegiatan CPNE yang telah diselenggarakan LPEI selama 2023:

2. CRS Programs Supporting the ESG Framework

Indonesia Eximbank continues to strive for the sustainability of Indonesian MSMEs to ensure they are constantly able to enhance their capacity and competence so that locally produced products can penetrate the global market. In order to realize this aspiration and grand vision, Indonesia Eximbank has undertaken several initiatives aimed at increasing national exports through the empowerment of MSME groups, one of which is the Coaching Program for New Exporters (CPNE) for partner beneficiaries. Through this program, Indonesia Eximbank provides various comprehensive and structured training sessions over one year.

In 2023, Indonesia Eximbank organized CPNE programs in various regions of Indonesia, attended by hundreds of participants who are predominantly MSME entrepreneurs. During these sessions, Indonesia Eximbank introduces or informs participants about ESG certifications required by export destination countries. By obtaining comprehensive information about trading activities and regulations in the export destination countries, Indonesia Eximbank hopes that participants can prepare themselves adequately so that their products can penetrate the international market and ensure compliance with the regulations of their respective destination countries.

Below is a list of CPNE activities conducted by Indonesia Eximbank throughout 2023:

Jenis Kegiatan Activity	**Aspek ESG** ESG Aspect	**Pelaksanaan** Implementation	**Capaian Peserta** Total Participant
CPNE Jawa Barat	Pengenalan sertifikasi ESG Introduction to ESG certification	29 Jan 13 Jun 27 Jul	100 Peserta Participants
CPNE Jawa Timur	Pengenalan sertifikasi ESG Introduction to ESG certification	06 Jun 15 Jul 07 Sep	100 Peserta Participants
CPNE Riau	Pengenalan sertifikasi ESG Introduction to ESG certification	29 Agt 23 Okt	100 Peserta Participants
CPNE Sumut	Pengenalan sertifikasi ESG Introduction to ESG certification	07 Feb 22 Mei 16 Nov	100 Peserta Participants

***SUCCESS STORY*:**

LPEI Bantu Eskpor Produk Sapu Glagah Asal Purbalingga Menembus Pasar Mancanegara

Indonesia Eximbank Helps Glagah Broom Products Export from Purbalingga to Penetrate Foreign Markets

CV Rahayung Pelangi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor industri manufaktur dan merupakan penghasil sapu glagah terbesar di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Pada tahun 2022, CV Rahayung Pelangi memantapkan langkahnya untuk go global dengan mengikuti kegiatan pelatihan CPNE yang secara intensif diselenggarakan oleh LPEI. Melalui program tersebut, LPEI memberikan bekal pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai pasar ekspor serta membagikan modul khusus guna membekali keterampilan untuk dapat menjadi eksportir baru.

Hasilnya, program CPNE berhasil membuka peluang bisnis besar bagi CV Rayung Pelangi yang kini telah mempekerjakan sebanyak 120 orang pekerja di workshop yang berlokasi di Purbalingga. Hingga akhir 2023, CV Rayung Pelangi telah mengekspor produk sapu glagah miliknya ke 3 (tiga) negara, yaitu sebanyak 30,73 ton atau setara USD56.243 ke negara Korea Selatan dan Vietnam, serta sebanyak 4,78 ton atau setara Rp172.470.000 ke Malaysia. Selain mengekspor ke ketiga negara tersebut, CV Rayung Pelangi juga melakukan ekspor tidak langsung ke Pakistan.

CV Rahayung Pelangi is a manufacturing company and the largest producer of glagah brooms based in Purbalingga Regency, Central Java.

In 2022, CV Rahayung Pelangi consolidated its steps to go global by participating in CPNE training activities intensively organised by Indonesia Eximbank. Through the program, Indonesia Eximbank provides extensive knowledge and insight into the export market and distributes specialist modules to equip new exporters with the skills they need.

As a result, the CPNE program has opened up great business opportunities for CV Rayung Pelangi, which now employs 120 workers in its workshop located in Purbalingga. By the end of 2023, CV Rayung Pelangi had exported its glagah broom products to 3 (three) countries, namely 30.73 tons or equivalent to USD56,243 to South Korea and Vietnam, and 4.78 tons or equivalent to Rp172,470,000 to Malaysia. In addition to exporting to these three countries, CV Rayung Pelangi also exports indirectly to Pakistan.

3. Program TJSL dalam Bentuk Pemberian Dukungan dan Bantuan Sosial

Sebagai entitas usaha yang menjunjung tinggi praktik tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha, LPEI menunjukkan komitmen dan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat melalui berbagai program pengembangan kemasyarakatan yang diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat, dan mampu menjawab isu-isu sosial serta risiko sosial yang timbul dari kegiatan usaha Lembaga.

Selain mengutamakan program-program pemberdayaan bagi komunitas, LPEI juga mengembangkan program TJSL filantropi yang bersifat sumbangan dana dengan sumber pendanaan yang berasal dari internal Lembaga. Kegiatan TJSL ini umumnya dilakukan melalui kolaborasi atau bekerja sama dengan Yayasan atau mitra LPEI, yang dikoordinasikan oleh Divisi Communication and Stakeholder Engagement.

Pada tahun 2023, LPEI telah melaksanakan sejumlah kegiatan TJSL dalam bentuk penyaluran bantuan sosial yang terdiri atas 4 (empat) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

3. TJSL Programs in the Form of Support and Social Assistance

As an entity that upholds good governance practices in conducting its business activities, Indonesia Eximbank demonstrates its commitment and social responsibility to society through various community development programs aimed at providing added value to communities and addressing social issues and risks arising from the institution's business activities.

In addition to prioritizing empowerment programs for communities, Indonesia Eximbank also develops philanthropic TJSL programs involving financial contributions from internal sources of the institution. These TJSL activities are generally carried out through collaboration or partnership with foundations or Indonesia Eximbank partners, coordinated by the Communication and Stakeholder Engagement Division.

In 2023, Indonesia Eximbank implemented several TJSL activities in the form of social assistance distribution, comprising 4 (four) initiatives, detailed as follows:

Program CSR – Dukungan dan Bantuan Sosial
CSR Program - Support and Social Assistance

Waktu Pelaksanaan Implementation Date	**Yayasan/Lembaga** Foundation/Organization	**Jenis Kegiatan** Activity	**Nominal** Amount	**Lokasi** Location
12 Januari 12 January	Kelompok Martabat Mangkubumi Martabat Mangkubumi Group	Dukungan Kegiatan Pelatihan Ekspor Petani Melon Support for Melon Farmer Export Training	Rp70.000.000	Tasikmalaya
2 Maret 2 March	Kelompok Pelaku Usaha Cirebon Cirebon Business Community Group	Dukungan Kegiatan Sosialisasi Ekspor Cirebon Support for Export Socialization in Cirebon	Rp10.000.000	Cirebon
29 Juni 29 June	Yayasan Masjid Al Amin	Qurban Sapi Cow Sacrifice	Rp30.305.000	Jakarta Pusat
29 Juni 29 June	Yayasan Guna Semesta Persada	Qurban Sapi Cow Sacrifice	Rp25.000.000	Sukabumi

INVESTASI SOSIAL TJSL TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, LPEI telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan program-program TJSL yang berorientasi pada pengembangan sosial kemasyarakatan. Realisasi penggunaan dana Lembaga untuk mendukung terlaksananya seluruh program TJSL tersebut dibukukan mencapai Rp1,68 miliar.

TJSL SOCIAL INVESTMENT 2023

Throughout 2023, Indonesia Eximbank has demonstrated its commitment to implementing TJSL programs oriented towards community development. The realization of the institution's funds to support the implementation of all these TJSL programs amounted to Rp1.68 billion.

Berikut ini adalah rincian jumlah investasi Sosial TJSL di bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan pengelompokkan kegiatannya:

The following is a breakdown of the Social Investment TJSL amounts in the field of Community Development based on the categorization of activities:

Realisasi Investasi Sosial
Social Investment Realization

Kelompok Kegiatan Activity Group	**Frekuensi Kegiatan** Activity Frequency	**Dana Investasi Sosial (Rp Juta)** Social Investment Fund (Rp Million)
Pelatihan *Community Development* Yang Mendukung SDGs Training on Community Development that Supports SDGs	8	996,6
Pelatihan TJSL dalam Rangka Mendukung ESG TJSL Training in Support of ESGs	11	545
Program TJSL Dukungan dan Bantuan Sosial CSR Social Support and Assistance Program	4	135,31
Total Dana Investasi Sosial Total Social Investment Fund	23	1.676,91

Mekanisme Pengaduan Masyarakat

LPEI memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang ingin mengajukan pertanyaan, permintaan informasi, klarifikasi, ataupun menyampaikan keluhan terhadap layanan yang dialaminya, melalui saluran pelaporan berikut ini:

1. Lisan: disampaikan langsung ke kantor LPEI atau menghubungi LPEI melalui nomor telepon kantor pusat/jaringan kantor lainnya yang diterima oleh resepsionis LPEI.
2. Tertulis: disampaikan melalui *e-mail* khusus pengaduan, disampaikan melalui menu Kontak pada *website* LPEI dan/atau disampaikan secara tertulis langsung ke kantor LPEI.
3. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK): nasabah juga dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi yang dikelola oleh OJK sesuai aturan OJK.

Semua laporan pengaduan dari masyarakat yang diterima Lembaga akan diinvestigasi dan ditindaklanjuti sesegera mungkin oleh unit-unit terkait.

Mechanism for Public Complaints

Indonesia Eximbank provides easy access to the community for those who wish to submit inquiries, request information, seek clarification, or lodge complaints regarding the services they have experienced, through the following reporting channels:

1. Oral: delivered directly to the Indonesia Eximbank office or contact Indonesia Eximbank through the telephone number of the head office/other office networks received by the Indonesia Eximbank receptionist.
2. Written: submitted through a special complaint e-mail, submitted through the Contact menu on the Indonesia Eximbank website and/or submitted in writing directly to the Indonesia Eximbank office.
3. Consumer Protection Portal Application (APPK): customers can also submit complaints through the application managed by OJK in accordance with OJK rules.

All complaints received from the public will be investigated and followed up promptly by the relevant units.

Tanggung Jawab Terhadap Produk, Layanan, dan Nasabah
Responsibility Towards Products, Services, and Customers

KOMITMEN, DASAR HUKUM, DAN KEBIJAKAN
[3-3] [OJK F.17]

LPEI senantiasa menempatkan nasabah sebagai pemangku kepentingan utama yang perlu dijaga kepercayaannya agar kegiatan operasional sehari-hari tetap dapat berlangsung secara efektif. Kepuasan nasabah menjadi salah satu tujuan yang hendak dicapai LPEI karena kami meyakini penerapan layanan yang ekselen merupakan kunci untuk mempertahankan keberlangsungan usaha dan mendukung kemajuan bisnis Lembaga di masa depan.

Sebagai wujud tanggung jawab Lembaga kepada nasabah, LPEI juga mengarahkan seluruh pegawai mulai dari tingkatan Manajemen hingga level staff di seluruh cabang, agar senantiasa memberikan pelayanan yang setara saat berinteraksi dengan nasabah serta bertanggung jawab untuk memberikan solusi yang tepat dan cepat atas setiap pertanyaan ataupun keluhan yang disampaikan oleh nasabah, sesuai dengan standar layanan LPEI yang telah dituangkan dalam Tata Cara Penanganan Pengaduan Nasabah.

Dasar Hukum dan Kebijakan [3-3]
Komitmen LPEI untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada nasabah termasuk dalam hal penanganan pengaduan nasabah berlandaskan pada sejumlah regulasi dan kebijakan internal yang berlaku di lingkungan LPEI, yaitu:

1) POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Nasabah di Sektor Jasa Keuangan;
2) POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
3) SEOJK No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Nasabah di Sektor Jasa Keuangan; dan
4) Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) No. 0005/PDE/05/2023 tentang Standar Pedoman Operasional Layanan Pengaduan Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Kebijakan atau ketentuan terkait produk diatur dalam PDE, dimana hingga akhir 2023, LPEI sudah memiliki 9 PDE terkait produk dan 1 Standar Pedoman Produk Pembiayaan Ekspor Nasional.

COMMITMENT, LEGAL BASIS, AND POLICIES
[3-3] [OJK F.17]

In its formal commitment, Indonesia Eximbank consistently places customers as the primary stakeholders whose trust needs to be maintained to ensure the effective continuation of daily operations. Customer satisfaction is one of the objectives Indonesia Eximbank aims to achieve because we believe that the implementation of excellent service is key to sustaining the institution's business and supporting its future growth.

As a manifestation of the institution's responsibility to its customers, Indonesia Eximbank directs all employees from management to staff levels in all branches to consistently provide equal service when interacting with customers and to be accountable for providing prompt and appropriate solutions to any inquiries or complaints raised by customers, in accordance with Indonesia Eximbank's service standards outlined in the Customer Complaint Handling Procedure.

Legal Basis and Policy [3-3]
Indonesia Eximbank commitment to always provide excellent service to customers, including in handling customer complaints, is based on several regulations and internal policies applicable within the Indonesia Eximbank environment, namely:

1) POJK No. 18/POJK.07/2018 regarding Customer Complaint Services in the Financial Services Sector;
2) POJK No. 6/POJK.07/2022 regarding Consumer Protection in the Financial Services Sector;
3) SEOJK No. 17/SEOJK.07/2018 regarding Guidelines for Implementing Customer Complaint Services in the Financial Services Sector;
4) Executive Director Regulation (PDE) No. 0005/PDE/05/2023 regarding the Standard Operating Guidelines for Customer Complaints of Indonesia Eximbank

Policies or provisions related to products are regulated in PDEs, where by the end of 2023, Indonesia Eximbank has already established 32 PDEs related to products and 1 National Export Financing Product Guidelines Standard.

INISIATIF STRATEGIS PENGEMBANGAN PRODUK DAN/ATAU JASA TAHUN 2023

Inisiatif Strategis Terkait Produk yang Berkelanjutan

Pada tahun 2023, LPEI telah menerapkan berbagai inisiatif strategis dalam rangka menjamin keamanan produk yang digunakan nasabah, antara lain:

- *Improvement* ketentuan produk dalam bentuk Standar Pedoman Produk (SPP), yakni SPP Pembiayaan, SPP Penjaminan, SPP Asuransi, SPP Penugasan Khusus dan SPP Tresuri.
- Pengembangan produk dalam bentuk SPP Trade Finance, SPP Pembiayaan Ekspor berdasarkan Prinsip Syariah (mencakup akad terkait fasilitas pembiayaan, *trade finance*, penjaminan dan asuransi) serta SPP Tata Kelola Devisa Hasil Ekspor (DHE).
- Penyempurnaan Buku Tarif.

Inisiatif Strategis terkait Layanan yang Berkelanjutan

Pada tahun 2023, LPEI juga telah melakukan berbagai kegiatan guna memperluas keterjangkauan layanan termasuk meningkatkan akses produk dan layanan secara lengkap sesuai ekspektasi nasabah, di antaranya:

- Publikasi melalui media sosial yang dimiliki LPEI, antara lain *website*, instagram, twitter, facebook, dan youtube yang dilakukan secara berkesinambungan.
- Publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- Sosialisasi kepada pelaku usaha melalui *corporate event* yang dilakukan oleh LPEI.
- Pameran-pameran yang diikuti oleh LPEI.
- Kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/ Perbankan/Lembaga Keuangan Non-Bank.

Edukasi Produk dan Jasa Layanan LPEI [FS16]

LPEI berperan aktif dalam mengadakan berbagai kegiatan edukasi kepada nasabah dengan tujuan untuk memperkenalkan produk-produk yang dimiliki dan ditawarkan Lembaga. Pelaksanaan kegiatan ini dikoordinasikan oleh Divisi Jasa Konsultasi. Beberapa kegiatan edukasi yang telah dijalankan selama 2023, di antaranya:

- *Coaching Program for New Exporter (capacity building)* secara *hybrid;*
- Program Desa Devisa (*community development*);
- *Business Matching;*
- Pameran Internasional;
- Penguatan kolaborasi dengan K/L dan SMV

STRATEGIC INITIATIVES FOR PRODUCT AND/OR SERVICE DEVELOPMENT IN 2023

Strategic Initiatives Related to Sustainable Products

In 2023, Indonesia Eximbank implemented various strategic initiatives to ensure the safety of products used by customers, including:

- Improvement of product provisions in the form of Standard Product Guidelines (SPP), namely Financing SPP, Guarantee SPP, Insurance SPP, National Interest Account SPP and Treasury SPP.
- Product development in the form of SPP Trade Finance, SPP Export Financing with Sharia Principles (covering contracts related to financing facilities, trade finance, guarantees and insurance) as well as SPP on Foreign Exchange Management (DHE).
- Refinement of the Tariff Book.

Strategic Initiatives related to Sustainable Services

In 2023, Indonesia Eximbank also conducted various activities to expand the accessibility of services, including enhancing access to products and services comprehensively as per customer expectations, including:

- Publication through social media owned by Indonesia Eximbank, including website, Instagram, Twitter, Facebook, and YouTube which is carried out continuously.
- Publication through mass media both print and electronic.
- Socialization to business actors through corporate events conducted by Indonesia Eximbank.
- Exhibitions participated by Indonesia Eximbank .
- Cooperation with Ministries/Institutions/Banks/ Non-Bank Financial Institutions.

Product and Service Education by Indonesia Eximbank [FS16]

Indonesia Eximbank actively conducts various educational activities for customers aimed at introducing the products offered by the Institution. The implementation of these activities is coordinated by the Consultation Services Division. Some of the educational activities carried out in 2023 include:

- *Coaching Program for New Exporter (capacity building)* in a hybrid manner;
- Go Export Village Program (*community development*);
- *Business Matching;*
- International Exhibition;
- Strengthening collaboration with ministries/ institutions and SMVs.

Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Nasabah

LPEI memastikan bahwa seluruh (100%) produk dan layanan yang diberikan kepada nasabah telah melalui proses evaluasi keamanan yang ketat dan komprehensif serta melibatkan banyak pihak, seperti Unit *Risk, Reviewer,* dan unit kerja lainnya yang relevan. Dalam mengembangkan suatu produk dan/atau layanan baru, ataupun dalam konteks perluasan kegiatan usaha, Lembaga juga selalu melibatkan peran Komite Pengembangan Produk untuk selanjutnya mendapatkan penetapan dari Direktur Eksekutif.

Mengacu pada SPO Penyusunan Peraturan di internal, LPEI berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi manajemen risiko dalam mengidentifikasi seluruh risiko yang melekat pada pengembangan produk atau perluasan kegiatan usaha, baik yang terkait dengan Lembaga maupun nasabah. Adapun kelompok-kelompok risiko relevan untuk dipertimbangkan pada tahap pengembangan produk dan/atau layanan baru, adalah sebagai berikut:

1) Kelompok risiko bisnis meliputi risiko asuransi dan risiko strategis;
2) Kelompok risiko finansial meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko investasi (khusus untuk produk Syariah) dan risiko imbal hasil (khusus untuk produk Syariah);
3) Kelompok risiko *governance* meliputi: risiko kepatuhan; risiko hukum; dan risiko reputasi; dan
4) Risiko relevan yang melekat pada produk dan aktivitas baru, wajib diungkapkan kepada nasabah LPEI yang dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh nasabah tersebut.

Sebagai wujud tanggung jawab Lembaga dalam memberikan jaminan keamanan kepada nasabah, LPEI memastikan selalu menjalankan seluruh tahapan mekanisme dan prosedur internal yang berlaku di internal terkait peluncuran produk dan/atau layanan baru, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama periode pelaporan 2023, LPEI tidak mencatatkan adanya insiden pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan yang disampaikan regulator, baik terkait pengembangan produk maupun terkait aspek sosial dan lingkungan. [419-1]

Dampak Produk dan/atau Layanan

Sebelum meluncurkan suatu produk dan/atau layanan, LPEI selalu mempertimbangkan dampak dan risikonya secara berimbang. LPEI selalu

Products/Services that Have Been Evaluated for Safety for Customers

Indonesia Eximbank ensures that all (100%) products and services provided to customers have undergone a rigorous and comprehensive safety evaluation process involving various parties, such as the Risk Unit, Reviewers, and other relevant work units. In developing a new product and/or service or in the context of expanding business activities, the institution also involves the Product Development Committee to obtain approval from the Executive Director.

Referring to the Internal Regulation Preparation Standard Operating Procedure (SPO), Indonesia Eximbank coordinates with the risk management unit to identify all risks associated with product development or business expansion, both related to the institution and customers. The relevant risk groups to be considered in the development of new products and/or services are as follows:

1) Business risk group includes insurance risk and strategic risk;
2) Financial risk group includes: credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, investment risk (specifically for Sharia products), and return on investment risk (specifically for Sharia products);
3) Governance risk group includes: compliance risk, legal risk, and reputation risk; and
4) Relevant risks inherent in new products and activities must be disclosed to Indonesia Eximbank customers, as documented in the documents signed by the customers.

As a manifestation of the institution's responsibility to provide security guarantees to customers, Indonesia Eximbank ensures that all internal mechanism and procedures related to the launch of new products and/or services are always implemented, guided by applicable laws and regulations.

During the reporting period of 2023, Indonesia Eximbank did not record any incidents of violations of regulations and laws communicated by regulators, whether related to product development or social and environmental aspects. [419-1]

Product and/or Service Impact

Before launching a product and/or service, Indonesia Eximbank always considers its impact and risks in a balanced manner. Indonesia Eximbank strives to

mengupayakan seluruh produk dan/atau layanan yang diluncurkan memiliki risiko ESG dan dampak negatif yang minimal dan sebaliknya mampu memberikan dampak positif yang maksimal serta berkelanjutan bagi nasabah.

ensure that all products and/or services launched have minimal negative risks and ESG impacts, while maximizing positive and sustainable impacts for customers.

Melalui berbagai produk dan jasa konsultasi yang diberikan secara berkelanjutan dan intensif, LPEI telah berkontribusi dalam mendorong pelaku UMKM menjadi eksportir yang berkapasitas dan berdaya saing global agar mampu membawa produk-produknya masuk ke mancanegara.

Through various sustainable and intensive consultancy products and services, Indonesia Eximbank has contributed to encouraging SMEs to become globally competitive exporters capable of bringing their products into foreign markets.

Hingga Desember 2023, LPEI telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada lebih dari 4.500 pelaku UMKM dan berhasil melahirkan hingga 613 eksportir baru yang telah sukses melakukan ekspor ke negara Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Kanada, Amerika Serikat bahkan hingga ke negara-negara di Asia Timur, Eropa, Timur Tengah dan Afrika.

As of December 2023, Indonesia Eximbank has provided training and assistance to more than 4,500 SMEs, of which became 613 new exporters who have successfully exported to countries such as Malaysia, Singapore, the People's Republic of China, Canada, the United States, and even to countries in East Asia, Europe, the Middle East, and Africa.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali

Pada tahun 2023, tidak ada produk dan/atau layanan baru yang diluncurkan LPEI yang mendapatkan pengaduan hingga kemudian ditarik kembali.

Number of Products Recalled

By 2023, no new products and/or services launched by Indonesia Eximbank will receive complaints and then be withdrawn.

Perlindungan terhadap Privasi Nasabah [418-1]

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat selama beberapa tahun terakhir, LPEI merasa perlu untuk mengelola risiko dan peluang yang timbul dari kecanggihan teknologi dan digitalisasi, khususnya terkait keamanan data dan perlindungan privasi nasabah dari kejahatan siber. Karena itu, LPEI senantiasa menempatkan aspek privasi nasabah sebagai prioritas utama dalam menjalankan bisnis.

Protection of Customer Privacy [418-1]

Given the rapid development of information technology in recent years, Indonesia Eximbank feels the need to manage the risks and opportunities arising from technological advancements and digitization, especially concerning data security and the protection of customer privacy from cybercrimes. Therefore, Indonesia Eximbank consistently prioritizes customer privacy aspects in conducting its business.

LPEI memiliki komitmen tinggi untuk menjaga keamanan data dan melindungi privasi nasabahnya sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan pemerintah. Upaya manajemen dalam memastikan keamanan data nasabah juga menjadi bagian dari komitmen LPEI dalam melindungi hak-hak nasabah.

Indonesia Eximbank is highly committed to ensuring data security and protecting the privacy of its customers in accordance with internal policies and government regulations. The management's efforts to ensure the security of customer data are also part of Indonesia Eximbank commitment to protecting customer rights.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama 2023, LPEI tidak menemukan adanya kasus pengaduan terkait kebocoran data nasabah. Selain itu, tidak ada pengaduan terkait penyalahgunaan data nasabah oleh pihak ketiga.

Based on monitoring and evaluation results throughout 2023, Indonesia Eximbank did not find any cases of complaints regarding customer data breaches. Additionally, there were no complaints related to the misuse of customer data by third parties.

Pengembangan Produk dan/atau Aktivitas Baru

Sejalan dengan kebutuhan para UMKM eksportir yang terus meningkat di tengah tuntutan tinggi pada pasar persaingan global, maka LPEI kembali melakukan inovasi pada sejumlah produk dan layanannya di 2023, antara lain :

- Produk *Trade Finance* yakni Auto Purchase LC/ SKBDN Intra LPEI dan *Approved Payable Financing*;
- Dukungan LPEI terhadap program/produk Penugasan Khusus.

Perluasan dan Pengembangan Produk

Selain berinovasi pada produk dan/atau layanan yang sudah ada, LPEI juga melanjutkan inisiatif perluasan program atas eksisting produk dan/atau pengembangan produk baru di antaranya:

- Penyempurnaan Ketentuan Produk sesuai kebutuhan
- Bisnis LPEI antara lain meliputi *Trade Finance*, Asuransi, prinsip syariah dan lainnya;
- Penyempurnaan dan/atau pengembangan produk baru untuk meningkatkan nilai jual antara lain produk pembiayaan, penjaminan, asuransi, Trade Finance, syariah sesuai kebutuhan Bisnis LPEI.
- Program Penugasan Khusus LPEI:
  a. PKE dalam rangka Mendukung Industri Alat Transportasi (sesuai KMK Nomor 406/ KMK.08/2021);
  b. PKE Pembiayaan dalam rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor (sesuai dengan KMK Nomor 409/ KMK.08/2021);
  c. PKE dalam rangka Pengembangan Infrastruktur Marina & Penunjang Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas (sesuai dengan KMK Nomor 272/KMK.08/2022);
  d. PKE dalam rangka Pengembangan Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika (sesuai dengan KMK 387/KMK.08/2022);
  e. PKE dalam rangka Mendukung Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (sesuai dengan KMK 145 Tahun 2023);
  f. PKE dalam rangka Perluasan Pasar ke Negara-negara di Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin dan Eropa Timur (sesuai dengan KMK 460 Tahun 2023);
  g. Program Penugasan Khusus Lainnya yang diamanatkan kepada LPEI sesuai ketentuan yang mendasari dalam tahun berjalan.

New Product and/or Activity Development

In line with the increasing needs of export-oriented SMEs amidst high demands in the global competitive market, Indonesia Eximbank has once again innovated several of its products and services in 2023, including:

- Trade Finance products namely Auto Purchase LC/ SKBDN Intra Indonesia Eximbank and Approved Payable Financing;
- Indonesia Eximbank support for National Interest Account programs/products.

Expansion and Product Development

In addition to innovating existing products and/or services, Indonesia Eximbank also continued initiatives to expand existing programs and/or develop new products, including:

- Improvement of Product Provisions as needed
- Indonesia Eximbank's business needs include Trade Finance, Insurance, sharia principles and others;
- Refinement and/or development of new products to increase selling value, among others financing products, guarantees, insurance, Trade Finance, sharia according to Indonesia Eximbank Business needs.
- Indonesia Eximbank National Interest Account:
  a. PKE in Support of Transportation Equipment Industry (in accordance with KMK Number 406/ KMK.08/2021);
  b. PKE Financing in order to support the export-oriented small and medium business sector (in accordance with KMK Number 409/ KMK.08/2021);
  c. PKE in the context of Marina Infrastructure Development & Tourism Support at Super Priority Tourism Destinations (in accordance with KMK Number 272/KMK.08/2022);
  d. PKE in the Context of Tourism Development of Mandalika Special Economic Zone (KEK) (in accordance with KMK 387/KMK.08/2022);
  e. PKE in Support of the Pharmaceutical and Medical Device Industry (in accordance with KMK 145 Year 2023);
  f. PKE in the Context of Market Expansion to Countries in Africa, South Asia, Middle East, Latin America and Eastern Europe (in accordance with KMK 460 of 2023);
  g. Other National Interest Account Programs mandated to Indonesia Eximbank in accordance with the underlying provisions in the current year.

Saluran Pengaduan Nasabah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, LPEI menerima dengan baik setiap keluhan, kritik, dan masukan dari para nasabah. Berkenaan dengan hal ini, LPEI telah menyediakan saluran khusus yang dapat dimanfaatkan nasabah dan juga masyarakat luas untuk menyampaikan keluhan terkait produk dan/atau layanan Lembaga, yaitu melalui:

Customer Complaint Channel

In order to improve the quality of service to customers, Indonesia Eximbank welcomes any complaints, criticisms, and inputs from customers. In this regard, Indonesia Eximbank has provided special channels that can be utilized by customers and also the wider community to submit complaints related to the products and/or services of the Institution, namely through:

E-mail :
corpsec@indonesiaeximbank.go.id

Telephone :
(021) 3950-3600

Corporate Secretary:
Prosperity Tower, Lantai 1 District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, Indonesia
Kode Pos 12190

Setiap laporan pengaduan yang diterima akan dipelajari dan ditelaah dengan teliti oleh unit-unit terkait agar dapat ditemukan solusi yang terbaik dan efektif bagi nasabah. Seluruh aduan yang masuk ke Lembaga juga dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam merancang pencegahan agar masalah tersebut tidak terulang di masa mendatang.

Each complaint report received will be carefully studied and examined by the relevant units in order to find the best and effective solution for the customer. All complaints submitted to the Institution are also used as evaluation material in designing prevention so that the problem does not recur in the future.

Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan

LPEI secara proaktif menyosialisasikan informasi mengenai produk dan layanan Lembaga melalui kanal komunikasi resmi yang tersedia, seperti informasi langsung oleh *relationship manager*, telepon, surat, *e-mail*, *website*, brosur, media sosial, dan media massa. Selain difungsikan sebagai *tools* pemasaran, seluruh *platform* tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk menyampaikan permohonan hingga mengajukan aduan terkait produk dan/atau layanan. LPEI berkomitmen akan menindaklanjuti dengan serius seluruh pengaduan yang masuk karena hal ini merupakan bagian dari kepatuhan LPEI terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Complaint Handling and Settlement Procedures

Indonesia Eximbank proactively disseminates information about its products and services through official communication channels such as direct information by relationship managers, telephone, mail, email, website, brochures, social media, and mass media. Besides serving as marketing tools, all these platforms can also be utilized by customers to submit requests and lodge complaints regarding products and/or services. Indonesia Eximbank is committed to seriously follow up on all incoming complaints as it is part of its compliance with applicable laws and regulations.

Saat ini LPEI sudah memiliki prosedur mengenai tata cara penanganan pengaduan nasabah yang ditetapkan melalui PDE No. 0005/PDE/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Layanan Pengaduan Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pihak yang bertanggung jawab atas penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah

Currently, Indonesia Eximbank has procedures regarding the handling of customer complaints established through PDE No. 0005/PDE/05/2023 dated May 19, 2023, concerning the Standard Operational Guidelines for Handling Customer Complaints at the Indonesian Export Financing Institution. The responsible parties for handling and resolving

adalah unit kerja yang membidangi fungsi komunikasi dan hubungan kelembagaan serta unit kerja yang memiliki fungsi untuk menindaklanjuti (menangani dan menyelesaikan) pengaduan nasabah sesuai dengan substansi pengaduan.

customer complaints are the units in charge of communication and institutional relations functions as well as the units responsible for following up (handling and resolving) customer complaints according to the substance of the complaint.

Pada prinsipnya, pengaduan nasabah dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan/atau tertulis. Pengaduan secara lisan dapat disampaikan langsung oleh nasabah ke kantor LPEI atau bisa juga dengan menghubungi nomor telepon kantor pusat atau jaringan kantor LPEI lainnya. Sementara pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui *email* khusus pengaduan, yaitu pengaduan@indonesiaeximbank.go.id.

In principle, customer complaints can be made verbally and/or in writing. Verbal complaints can be made directly by customers to Indonesia Eximbank offices or by contacting the central office telephone number or other Indonesia Eximbank office networks. Meanwhile, written complaints can be submitted through a specific complaint email, namely pengaduan@indonesiaeximbank.go.id.

Sesuai ketentuan OJK, para nasabah juga dapat menyampaikan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang dikelola oleh OJK.

According to OJK regulations, customers can also submit complaints through the Consumer Protection Portal Application (APPK) managed by OJK.

Berikut ini adalah tahapan penanganan pengaduan nasabah yang berlaku di lingkup LPEI:

The following are the stages of handling customer complaints applicable within Indonesia Eximbank:

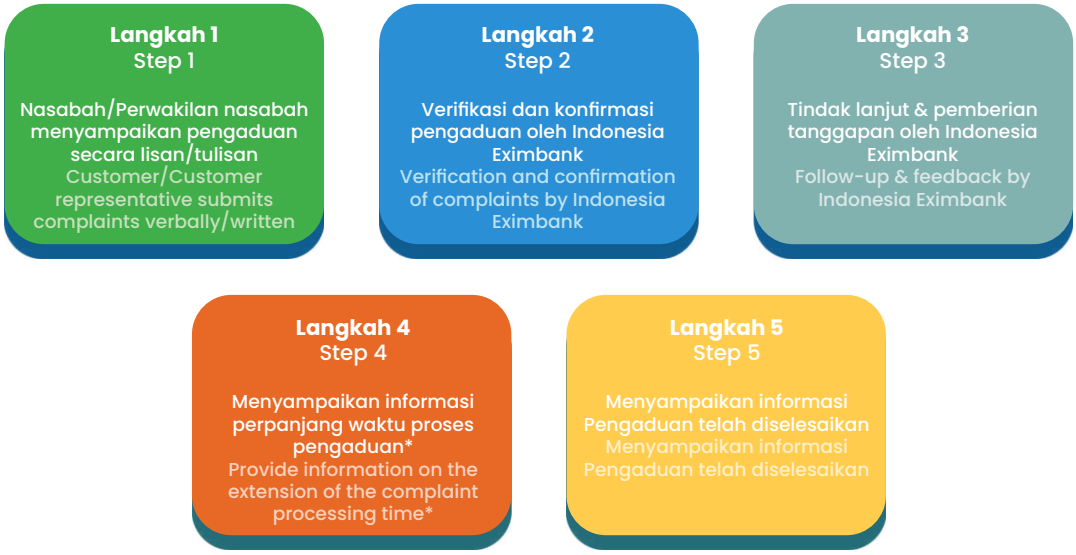

Keterangan:
1) Nasabah/Perwakilan nasabah menyampaikan pengaduan secara lisan/tulisan.
2) Verifikasi dan konfirmasi pengaduan oleh LPEI.
3) Tindak lanjut & pemberian tanggapan oleh LPEI.
4) Menyampaikan informasi perpanjangan waktu proses pengaduan.
5) Menyampaikan informasi pengaduan telah diselesaikan.

Explanation:
1) Customer/Customer representative submits complaint verbally/written.
2) Verification and confirmation of the complaint by Indonesia Eximbank.
3) Follow-up & response by Indonesia Eximbank.
4) Providing information on extending the complaint processing time.
5) Providing information that the complaint has been resolved.

Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjutnya di Tahun 2023

Berdasarkan catatan dari pengaduan yang masuk melalui APPK, pada tahun 2023, terdapat satu surat yang ditujukan kepada LPEI dan satu permintaan klarifikasi atas tanggapan pengaduan. Sehingga selama periode pelaporan 2023, LPEI menerima sebanyak 2 (dua) laporan pengaduan dari nasabah, dengan rincian sebagai berikut:

Number of Complaints and Follow-Up in 2023

Based on records from complaints received through the Complaint Handling Unit (APPK), in 2023, there was one letter addressed to Indonesia Eximbank and one request for clarification regarding the response to the complaint. Therefore, during the reporting period of 2023, Indonesia Eximbank received a total of 2 (two) complaints from customers, with the following details:

Keterangan Information	2023	2022
Pengaduan yang masuk | Incoming complaints	2	1
Status		
Terselesaikan | Resolved	2	1
Sedang dalam proses | In progress	0	0

Per 31 Desember 2023, seluruh laporan tersebut telah tertangani dan terselesaikan dengan baik. Pada tahun ini, LPEI juga tidak menerima adanya laporan pengaduan yang berkaitan dengan kebocoran kerahasiaan/privasi pelanggan dan hilangnya data nasabah.

As of December 31, 2023, all of these reports have been addressed and resolved satisfactorily. This year, Indonesia Eximbank also did not receive any complaints related to customer confidentiality/ privacy breaches and loss of customer data.

Keterbukaan Informasi Produk dan Jasa

LPEI menjamin kelayakan berbagai produk dan layanan yang disediakan, selain memastikan bahwa seluruh produk yang dipasarkan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang ditentukan oleh pihak regulator terkait. LPEI memastikan penyebarluasan informasi mengenai produk dan layanannya dapat diakses dengan mudah melalui situs LPEI, yaitu http://www. indonesiaeximbank. go.id/.

Pada laman web tersebut, LPEI menyajikan informasi yang jelas, transparan dan lengkap melalui pemberian nama produk dan layanan yang disediakan LPEI. Selain itu, seluruh kegiatan operasi dan usaha yang dijalankan diawasi oleh OJK dan patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, termasuk pemberian nama produk dan informasi produk serta jasa yang dimiliki.

Pada tahun 2023, tidak ditemukan pelanggaran terkait informasi produk dan jasa maupun komunikasi pemasaran, baik yang menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. [417-2, 417-3]

Disclosure of Product and Service Information

Indonesia Eximbank ensures the suitability of various products and services provided, in addition to ensuring that all marketed products comply with the provisions of laws and regulations determined by the relevant regulators. Indonesia Eximbank ensures that the dissemination of information about its products and services can be easily accessed through the Indonesia Eximbank website, namely http://www. indonesiaeximbank.go.id/.

On the website, Indonesia Eximbank presents transparent and complete information through the naming of products and services provided by Indonesia Eximbank. In addition, all operations and business activities carried out are supervised by OJK and comply with regulations issued by OJK, including product naming and information on products and services owned.

In 2023, no violations related to product and service information or marketing communications were found, either causing losses to customers or violating applicable regulations and laws. [417-2, 417-3]

Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan [419-1]

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI senantiasa tunduk terhadap peraturan dan

Compliance with Laws and Regulations [419-1]

In conducting its business activities, LPEI consistently complies with the regulations and laws applicable in

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik yang diterbitkan oleh OJK, Bank Indonesia maupun oleh Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga lainnya. Beberapa aspek kepatuhan yang menjadi prioritas LPEI, di antaranya:

1) Prinsip Kehati-hatian Sebagai salah satu pelaku industri jasa keuangan non-bank, LPEI menetapkan dan menerapkan kebijakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya dan program-program pelaksanaannya. Termasuk dalam hal ini adalah Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Penerapan Strategi Anti-Fraud, Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) dan peraturan pendukungnya;
2) Perkara yang Melibatkan Dewan Komisaris dan Dewan Direktur maupun Direktur Pelaksana Sepanjang tahun 2022 tidak ada perkara hukum yang melibatkan Dewan Komisaris, Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI; dan
3) Sanksi Regulator Selama tahun 2022 terdapat 2 sanksi administratif yang disampaikan kepada LPEI, yaitu 1 peringatan tertulis dan 1 sanksi denda dan telah selesai ditindaklanjuti pada kesempatan pertama.

Indonesia, whether issued by the OJK, Bank Indonesia, or by the Government through other Ministries and Institutions. Some compliance aspects that are prioritized by Indonesia Eximbank include:

1) Prudential Principles: As a non-bank financial services player, Indonesia Eximbank establishes and implements policies in applying prudential principles in its business activities and implementation programs. This includes the Institution's Code of Ethics and Work Culture, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program (AML CTF), Anti-Fraud Strategy Implementation, Whistleblowing Reporting System, and supporting regulations.

2) Cases Involving the Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Directors: Throughout the year 2022, there were no legal cases involving the Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Directors of Indonesia Eximbank.
3) Regulatory Sanctions: In 2022, there were 2 administrative sanctions imposed on Indonesia Eximbank, namely 1 written warning and 1 fine sanction, both of which have been addressed and resolved promptly.

Survei Kepuasan Nasabah

Pada tahun 2023, LPEI melakukan survei pemangku kepentingan sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan survei ini dapat dijadikan salah satu indikator untuk membantu Lembaga agar tetap fokus pada kebutuhan, keinginan dan juga termasuk mengidentifikasi masalah yang mungkin dialami oleh pemangku kepentingan dan mengetahui tingkat kepuasan pemangku kepentingan (debitur/nasabah/mitra binaan) yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan terhadap kegiatan usaha LPEI atas kualitas produk dan layanan jasa yang diberikan.

Secara keseluruhan hasil survei mendapatkan skor 4,61 dengan kategori Sangat Puas. Hal ini dapat diartikan bahwa debitur/nasabah/mitra binaan sebagai pemangku kepentingan memberikan penilaian sangat puas atas seluruh produk dan jasa serta kualitas layanan yang ditawarkan oleh LPEI.

Customer Satisfaction Survey

In 2023, Indonesia Eximbank conducted a stakeholder survey to comply with the Regulation of the Minister of Finance No. 208/PMK.06/2021 regarding Principles of Governance, Risk Management Principles, and Customer Due Diligence Principles. The purpose of this survey is to serve as one of the indicators to help the institution remain focused on the needs, desires, and also identify any issues stakeholders may experience, as well as to assess the satisfaction level of stakeholders (borrowers/customers/partners) who are directly or indirectly related to Indonesia Eximbank's business activities regarding the quality of products and services provided.

Overall, the survey results received a score of 4.61 with the category of Very Satisfied. This can be interpreted as stakeholders (borrowers/customers/partners) giving a very satisfied rating for all products, services, and the quality of services offered by Indonesia Eximbank.

Tanggapan Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya
Feedback on Previous Year's Report

LPEI mengucapkan terima kasih atas semua masukan mengenai Laporan Keberlanjutan tahun 2022. Kami merespons umpan balik dan hasil rekomendasi melalui pengungkapan informasi yang diminta sesuai dengan upaya dan kinerja kami selama 2022. LPEI akan terus meningkatkan kinerja melalui pengungkapan yang memadai di dalam Laporan Keberlanjutan tahun berikutnya.

Indonesia Eximbank would like to thank you for all your feedback on the 2022 Sustainability Report. We have responded to the feedback and recommendations through disclosure of the requested information in line with our efforts and performance during 2022. Indonesia Eximbank will continue to improve our performance through adequate disclosure in the following year's Sustainability Report.

Lampiran Umpan Balik
Feedback Form

PROFIL ANDA/YOUR PROFILE

Nama/Name :

Email/Email :

Telp/Hp/Phone/Cell phone :

GOLONGAN PEMANGKU KEPENTINGAN/STAKEHOLDER CATEGORY

Pemegang Saham/Shareholder	[ ]	Karyawan/Employee	[ ]
Nasabah/Customer	[ ]	Masyarakat/Society	[ ]
Investor/Investor	[ ]	Media/Media	[ ]
Pemerintah/Regulator/Government/Regulator	[ ]	Lain-lain, mohon sebutkan/Others, please specify.....	[ ]
Pemasok/Supplier			

Mohon berikan penilaian atas tingkat aspek material yang dinilai penting menurut anda bagi keberlanjutan LPEI (nilai 1=paling tidak penting s/d 5=paling penting).
Please rate the material aspects that you consider important for sustainability of LPEI (from 1=most important to 5=least important).

Kinerja Ekonomi Economic performance	[ ]	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	[ ]
Ketenagakerjaan Employment	[ ]	Keamanan Nasabah Customer Safety	[ ]
Program sosial masyarakat Social community program	[ ]	Lingkungan Environment	[ ]
Portofolio Produk Product Portfolio	[ ]	Lain-lain, sebutkan Others, please specify	[ ]

Pembaca bisa memberikan pertanyaan. kritik dan saran, atas laporan ini:
You may submit your inquiries, critics, and suggestions on this report:

.....

.....

.....

Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon agar lembar umpan balik ini dikirimkan kembali ke alamat:
Thank you for your participation. Please return this feedback form to:

Kantor Pusat/Head Office
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Prosperity Tower Lantai 1, District 8
Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 395 03600
Fax. (62-21) 395 03699

Laporan Keuangan

Financial Statement

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
Beserta Laporan Auditor Independen

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY

Consolidated Financial Statements
December 31, 2023 and 2022
For the Years Ended
With Independent Auditor's Report

Daftar Isi	**Halaman/ *Page***	***Table of Contents***
Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		***Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2023 and 2022***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	10	*Notes to the Consolidated Financial Statements*
Informasi Tambahan:		***Additional Information:***
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	Lampiran I/ *Appendix I*	*Statements of Financial Position of Parent Entity*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk	Lampiran II/ *Appendix II*	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income of Parent Entity*
Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	Lampiran III/ *Appendix III*	*Statements of Changes in Equity of Parent Entity*
Laporan Arus Kas Entitas Induk	Lampiran IV/ *Appendix IV*	*Statements of Cash Flows of Parent Entity*

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Prosperity Tower, Lantai 1
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : (62 21) 395 03600
Fax. : (62 21) 395 03699
www.indonesiaeximbank.go.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK

Nomor : BS.0105/CEO/03/2024

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Rijani Tirtoso
   Alamat Kantor : Prosperity Tower, Lantai 1, District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia

   Alamat Rumah : Manggarai Utara V D No.20 RT 005 RW 001 Manggarai, Tebet Jakarta Selatan

   Nomor Telepon : +6221 395 03600
   Jabatan : Direktur Eksekutif

2. Nama : Agus Windiarto
   Alamat Kantor : Prosperity Tower, Lantai 1, District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53 Jakarta 12190 – Indonesia

   Alamat Rumah : Jl. Daksa I No.2 Unit A2-1 RT 008 RW 001 Selong, Kebayoran Baru Jakarta 12190 - Indonesia

   Nomor Telepon : +6221 395 03600
   Jabatan : Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional & Teknologi Informasi

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank" atau "LPEI") dan Entitas Anak;

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF AND FOF THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2023 AND 2022 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND SUBSIDIARY

Number : BS.0105/CEO/03/2024

We, the undersigned:

1. *Name* : *Rijani Tirtoso*
   Office address : *Prosperity Tower, 1st Floor, Disctrict 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia*

   Residential address : *Manggarai Utara V D No. 20 RT 005 RW 001 Manggarai, Tebet Jakarta Selatan*

   Telephone : *+6221 395 03600*
   Title : *Executive Director*

2. *Name* : *Agus Windiarto*
   Office address : *Prosperity Tower, 1st Floor, Disctrict 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia*

   Residential address : *Jl. Daksa I No.2 Unit A2-1 RT 008 RW 001 Selong, Kebayoran Baru Jakarta 12190 - Indonesia*

   Telephone : *+6221 395 03600*
   Title : *Managing Director of Finance, Operation & Information Technology*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank" or "LPEI") and Subsidiary;*

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK

Nomor : BS.0105/CEO/03/2024

2. Laporan keuangan konsolidasian LPEI dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan penyajian wajar bertujuan khusus sebagai berikut:

   a. Untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang direstrukturisasi dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto sebesar tingkat suku bunga setelah direstrukturisasi;

      Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui surat Nomor S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan CKPN.

   b. Untuk unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian lainnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian LPEI dan Entitas Anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan konsolidasian LPEI dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intenal dalam LPEI dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF AND FOF THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2023 AND 2022 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND SUBSIDIARY

Number : BS.0105/CEO/03/2024

2. *The consolidated financial statements of LPEI and Subsidiaries for the years ended December 31, 2023 and 31, 2022 have been prepared and presented in accordance with fair presentation of special purpose financial reporting framework as follows:*

   a. *For the Allowance for Impairment Losses (CKPN) on restructured National Interest Account financing, calculated using the assumption of the discount rate that is equal to the interest rate after the restructuring;*

      Allowance for Impairment Losses (CKPN) of financing for National Interest Account given to PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) is calculated using the assumption of the discount rate determined by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through letter No. S-194/MK.08/2023 concerning the Determination of the Use of Discount Rates Assumption Based on Interest Rates After Restructuring in the Calculation of CKPN.

   b. *The other elements of the consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

3. a. *All information in the consolidated financial statements of LPEI and Subsidiary has been disclosed in a complete and truthful manner;*

   b. *The consolidated financial statements of LPEI and Subsidiary do not contain any material incorrect information or facts, nor do they omit material information or facts.*

4. *We are responsible for LPEI and Subsidiary's internal control system.*

This is our declaration, which has been made truthfully.

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF AND FOF THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2023 AND 2022 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND SUBSIDIARY

Nomor : BS.0105/CEO/03/2024

Number : BS.0105/CEO/03/2024

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of Board of Directors*

Jakarta, 28 Maret/*March 28, 2024*

Rijani Tirtoso
Direktur Eksekutif/
Executive Director

Agus Windiarto
Direktur Pelaksana
Keuangan, Operasional &
Teknologi Informasi
Managing Director
of Finance, Operation &
Information Technology

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : 00297/2.1030/AU.6/09/1298-3/1/III/2024

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

Pemegang Saham, Dewan Direktur, dan Direktur Pelaksana/
The Shareholder, Board of Directors, and Managing Directors

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") dan entitas anaknya, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dengan menggunakan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian seperti yang dijelaskan pada Catatan 2b atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dijabarkan pada Catatan 2b atas laporan keuangan konsolidasian terlampir

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap LPEI dan entitas anaknya berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, kami telah memenuhi tanggung jawab etika

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated changes in equity, and consolidated cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information and other explanatory information. The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the basis for preparation of the consolidated financial statements as described in Note 2b of the accompanying consolidated financial statements.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia and its subsidiary as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the basis for preparation of the consolidated financial statements as described in Note 2b to the accompanying consolidated financial statements.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of LPEI and its subsidiary in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Penekanan Atas Hal - hal

1. Basis Akuntansi

   Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 2b, 2p, dan 9h.14 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, yang menjelaskan tentang dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian LPEI dan entitas anaknya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian lainnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Sebagai akibatnya, laporan keuangan konsolidasian terlampir belum tentu cocok untuk tujuan lain.

   Catatan 9h.14 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir mengungkapkan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2023 apabila CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dihitung sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diperbandingkan dengan yang dihitung berdasarkan Surat Menteri Keuangan.

2. Kasus Hukum

   Kami membawa perhatian ke Catatan 45c atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan adanya informasi kasus hukum atas dugaan tindak pidana dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang melibatkan beberapa debitur LPEI.

Emphasis of Matters

1. *Basis of Accounting*

   As disclosed in Notes 2b, 2p, 9h.14 to the accompanying consolidated financial statements, which explains the basis for the preparation of LPEI and its subsidiary consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2023 prepared in accordance with the conditions set forth in the Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Number S-194/MK.08/2023 concerning the Determination of the Use of Discount Rates Assumptions Based on Interest Rates After Restructuring in the Calculation of Allowance for Impairment Losses (CKPN). CKPN for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk is calculated using the assumption of the discount rate set by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Meanwhile, other elements of the consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. As a result, the accompanying consolidated financial statements may not be suitable for other purposes.

   Note 9h.14 to the accompanying consolidated financial statements disclose the impact to the consolidated financial statements for the 2023 financial year if the CKPN for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk is calculated in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards compared to those calculated based on the Letter of the Minister of Finance.

2. *Legal Case*

   We draw attention to Note 45c to the accompanying consolidated financial statements which explains regarding information of legal case alleged unlawful acts in providing financing facilities involving several LPEI's debtors

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang melibatkan beberapa debitur LPEI tersebut masih dalam tahap pelaporan/penyelidikan awal maupun tahap penyidikan. Selain itu, terdapat ketidakpastian mengenai apakah terdapat kerugian keuangan dan non-keuangan lebih lanjut terhadap LPEI sebagai konsekuensi kasus tersebut. Manajemen telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi atas dampak keuangan maupun non-keuangan atas kasus hukum dugaan tindak pindana tersebut. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dampak dari proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebut belum dapat diperkirakan.

Until the issuance date of the consolidated financial statements, the process of legal case for alleged unlawful acts in providing financing facilities involving several LPEI's debtors both are still in the initial reporting/inquiry stage and investigation stage. In addition, there is uncertainty whether there will be further any financial and non-financial losses to LPEI as a consequence of this case. Management has prepared mitigation steps for the financial and non-financial impacts of this legal case for alleged unlawful acts. Until the issuance date of the consolidated financial statements, the impact of the legal case for alleged unlawful acts cannot be estimated accordingly.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Our opinion is not modified with respect to such matters.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Pembiayaan yang Diberikan, dan Pembiayaan dan Piutang Syariah

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 9 (Pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya) atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2023, total Pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya sebesar Rp73.823.211 juta dengan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp32.633.997 juta.

Allowance for Impairment Losses of Financing, and Sharia Financing and Receivables

As described in Notes 9 (Financing and receivables, Sharia financing and receivables and other receivables) to the financial statements as of December 31, 2023, the total loans amounted to Rp73,823,211 million with allowance for impairment losses of loans amounted to Rp32,633,997 million.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas Pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya ditentukan LPEI berdasarkan kerangka kerugian kredit ekspektasian ("KKE") sesuai dengan PSAK 71: Instrumen Keuangan, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2.p (Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan) atas laporan keuangan.

The allowance for impairment losses of Financing and receivables, Sharia financing and receivables and other receivables is determined by the LPEI based on the Expected Credit Losses ("ECL") framework under PSAK 71: Financial Instrument, as described in Notes 2.p (Allowance for impairment losses on financial assets) to the financial statements.

Kami fokus pada area ini karena signifikansi nilai tercatat atas pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya, yang mewakili 80,21% dari jumlah aset LPEI pada tanggal 31 Desember 2023 dan besarnya nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya tersebut nilainya signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian LPEI. Lebih lanjut, penentuan KKE membutuhkan pertimbangan manajemen yang subjektif dan melibatkan penggunaan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

We focused on this area as the total financing and receivables, Sharia financing and receivables and other receivables represents 80.21% of the total assets of LPEI as of December 31, 2023, and the allowance for impairment losses provided against the Financing and receivables, Sharia financing and receivables and other receivables were significant to the LPEI's consolidated financial statements. Furthermore, determining ECL involves subjective management judgement and is subject to a high degree of estimation uncertainty.

LPEI menghitung KKE untuk pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya yang tidak memburuk dan yang memburuk. Untuk pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya yang tidak memburuk dan yang memburuk, yang secara individual tidak dianggap signifikan, LPEI menghitung KKE secara kolektif menggunakan model KKE dengan beberapa asumsi utama, antara lain *probability of default, loss given default*, dan *exposure at default*, setelah memperhitungkan faktor masa depan dan informasi eksternal lainnya.

The LPEI calculated ECL for both non-impaired and impaired financing and receivables, sharia financing and receivables and other receivables. For non-impaired and impaired financing and receivables, sharia financing and receivables and other receivables which are not considered individually significant, LPEI assesses collective ECL using the ECL modelling approach that incorporates key assumptions, including probability of default, loss given default, and exposure at default, after considering forward-looking factors and other external information.

Untuk pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya yang memburuk, yang secara individual dianggap signifikan, LPEI menghitung KKE secara individual dengan menggunakan estimasi arus kas ekspektasian dari pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya, yang membutuhkan pertimbangan signifikan dalam mengestimasi probabilitas rata-rata tertimbang kerugian kredit, serta estimasi waktu dan jumlah pembayaran dari pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya.

For impaired financing and receivables, sharia financing and receivables and other receivables, which are considered individually significant, LPEI assesses individual ECL by estimating the expected cash flows obtained from the financing and receivables, sharia financing and receivables and other receivables, which requires significant judgement in estimating the weighted average probability of credit losses, and the timing and amount of the repayments against the financing and receivables, sharia financing and receivables and other receivables.

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

1. Kami memperoleh pemahaman atas pendekatan LPEI dalam mengidentifikasi pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai, dan melakukan pengujian, berdasarkan uji petik, kesesuaian dari klasifikasi kualitas kredit dengan menelaah dokumen kredit dari debitur-debitur yang menjadi sampel, serta membuat penilaian independen kami apakah ada peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai

We have performed the following audit procedures to address this key audit matters:

1. *We understood the LPEI's approach over the identification of financing and receivables, sharia financing and receivables and other receivables that have experienced a significant increase in credit risk or objective evidence of impairment, and tested, on a sample basis, the appropriateness of the credit quality classification by reviewing the credit files of those sampled debtors, and formed our own independent judgement as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*

2. Kami menilai kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai yang dihitung secara individual dengan menguji, berdasarkan uji petik, kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai yang dihitung oleh manajemen, dengan mengevaluasi kesesuaian estimasi probabilitas rata-rata tertimbang kerugian kredit yang diberikan, serta estimasi waktu dan jumlah pembayaran dari kredit yang diberikan, yang diterapkan oleh LPEI dalam mengestimasi arus kas ekspektasian dari kredit yang diberikan.
3. Kami menilai metodologi dan menguji asumsi permodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE kolektif, dengan bantuan pakar permodelan kredit kami. Kami menguji *probability of default, loss given default* dan *exposure at default*, yang mencakup (i) evaluasi prakiraan makroekonomi Indonesia dengan membandingkan prakiraan dengan informasi yang tersedia untuk umum tentang prospek makroekonomi Indonesia; dan (ii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam model dengan data aktual yang tersedia di LPEI.
4. Kami melakukan perhitungan ulang dan menguji, berdasarkan uji petik, akurasi perhitungan KKE yang dinilai secara kolektif dan individual.
5. Kami menilai kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang syariah berdasarkan persentase tertentu untuk masing-masing kualitas pembiayaan dan piutang syariah dan menguji keakuratan perhitungannya.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan 2023 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

2. *We assessed the adequacy of individual allowance for impairment losses by testing, on a sample basis, the adequacy of the allowance for impairment losses calculated by management, by evaluating the appropriateness of weighted average probability of credit losses, and the timing and amount of the repayments against the loans, which were applied by LPEI in estimating the expected cash flow obtained from the loans*
3. *We assessed the methodologies applied and tested the significant modelling assumptions used in collective ECL models, with assistance from our credit modelling expert. We tested probability of default, loss given default and exposure at default, which included (i) evaluating the forecasts of Indonesia macroeconomics by comparing forecasts with publicly available information on the Indonesia macroeconomic outlook; and (ii) testing the completeness and accuracy of data used in the model with the actual data available within the LPEI.*
4. *We recalculated and tested, on a sample basis, the accuracy of the collective and individual ECL calculation.*
5. *We assessed the adequacy of allowance for impairment losses of sharia financing and receivables based on specific percentage for each collectability and tested the accuracy of the calculation.*

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The 2023 annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan tahun 2023, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the 2023 annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Hal-hal lain

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 14/POJK.4/2022, LPEI sebagai emiten wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berkala berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2b atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, LPEI menyusun laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian seperti yang dijelaskan pada Catatan tersebut.

Other matters

Based on the Financial Services Authority Regulation No 14/POJK.4/2022, LPEI as an Issuer obliged to prepare periodic financial statement in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard as regulated in Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Company". As described in Note 2b to the accompanying consolidated financial statements, LPEI has prepared the consolidated financial statements as of December 31, 2023 and for the year then ended in accordance with the basis for preparation of the consolidated financial statement as described in the above Note.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian LPEI tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan LPEI (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the LPEI as of December 31, 2023 and for the year then ended, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of LPEI (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2023 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan sebagaimana dijelaskan diatas, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan LPEI dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi LPEI atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan konsolidasian LPEI.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with the basis for preparation as described above, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing LPEI ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate LPEI or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing LPEI consolidated financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, tetapi bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal LPEI.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi atas kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan LPEI untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan LPEI tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of LPEI internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on LPEI ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause LPEI to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam LPEI untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasian LPEI. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within LPEI to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of audit of LPEI consolidated financial statement. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine such matter that was of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and is therefore the key audit matter. We describe the matter in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Bimo Iman Santoso
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1298/
Public Accountant License Number: AP.1298

Jakarta, 28 Maret 2024/*March 28, 2024*

00297

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31*, 2023	2022	
ASET				***ASSETS***
Kas	2b,2f	85	38	*Cash*
				Current account
Giro pada Bank Indonesia	2a,2e,2f,2g,4,42	553	426	*with Bank Indonesia*
Giro pada bank	2a,2e,2f,2g			*Current accounts with banks*
Penugasan Umum	2ah,5,39,42	84,725	149,586	*General Assignment*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2)	(1)	*Allowance for impairment losses*
		84,723	149,585	
Penugasan Khusus		23,533	31,061	*National Interest Account*
Cadangan kerugian penurunan nilai		--	--	*Allowance for impairment losses*
		23,533	31,061	
		108,256	180,646	
Penempatan pada bank	2a,2e,2f,2h			*Placements with banks*
Penugasan Umum	2ah,6,39,42	1,432,644	2,180,664	*General Assignment*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(38)	(9)	*Allowance for impairment losses*
		1,432,606	2,180,655	
Penugasan Khusus		5,982,000	10,380,100	*National Interest Account*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(358)	(500)	*Allowance for impairment losses*
		5,981,642	10,379,600	
		7,414,248	12,560,255	
Efek-efek	2a,2e,2i,7,39,42	1,433,923	1,970,120	*Securities*
Tagihan derivatif	2a,2e,2k 2ah,3,8a,42	85	--	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya				***Financing and receivables, financing and sharia receivables and other receivables***
Pembiayaan dan piutang, dan pembiayaan dan piutang syariah				*Financing and receivables, and financing and sharia receivables*
Penugasan Umum				*General Assignment*
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	2a,2e,2l,2m 2ah,3,9,39,42	59,935,321	68,673,657	*Financing and Receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(27,665,053)	(15,548,824)	*Allowance for impairment losses*
		32,270,268	53,124,833	
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	2a,2e,2n,2o 2ah,3,9,39,42	9,937,139	11,469,720	*Financing and sharia receivables*
Cadangan penyisihan aset produktif		(4,906,231)	(2,285,350)	*Allowance for doubtful accounts*
		5,030,908	9,184,370	
Penugasan Khusus	2a,2e,2l,2m			*National Interest Account*
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	2ah,3,9,39,42	3,949,482	3,489,399	*Financing and receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(62,701)	(48,735)	*Allowance for impairment losses*
		3,886,781	3,440,664	
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	2a,2e,2n,2o 2ah,3,9,42	1,269	3,227	*Financing and sharia receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(12)	(40)	*Allowance for doubtful accounts*
		1,257	3,187	
Total - neto		41,189,214	65,753,054	*Total - net*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31*, 2023	2022	
ASET (lanjutan)				***ASSETS (continued)***
Piutang lainnya				***Other receivables***
Piutang pembiayaan garansi	2a,2e,2l,2m,2q 2ah,3,9i,42	3,161	325,532	*Guarantee financing receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(3,161)	(43,865)	*Allowance for impairment losses*
		--	281,667	
Pajak dibayar dimuka	2a,2ai,3,15a	--	865	*Prepaid tax*
Biaya dibayar dimuka	2a,2w,12	20,458	15,394	*Prepaid expenses*
Piutang asuransi dan penjaminan	2a,2q,2r,2ah,10a,42	75,059	288,989	*Insurance and guarantee receivables*
Aset reasuransi	2a,2s,2ah,10b, 42	2,933	3,544	*Reinsurance assets*
Tagihan akseptasi	2a,2e,2t			*Acceptances receivable*
Penugasan Umum	2ah,11,42	150,461	147,569	*General Assignment*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(604)	(231)	*Allowance for impairment losses*
		149,857	147,338	
Penugasan Khusus		3,391	3,592	*National Interest Account*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(18)	(13)	*Allowance for impairment losses*
		3,373	3,579	
		153,230	150,917	
Aset tetap				*Premises and equipment*
Harga perolehan	2a,2u,3,13,42	1,546,422	1,525,478	*Cost*
Akumulasi penyusutan		(631,787)	(527,643)	*Accumulated depreciation*
		914,635	997,835	
Aset pajak tangguhan - neto	2a,2ai,3,15d,42	--	1,552,978	*Deferred tax assets - net*
Aset lain-lain	2a,2m,2n,2v 14,42	36,600	59,024	*Other assets*
TOTAL ASET		**51,349,279**	**83,815,752**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December* 31, 2023	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	2a,2x,42	69,131	46,046	*Current liabilities*
Liabilitas devisa hasil ekspor	2a,2x,42	120,928	--	*Foreign exchange export proceeds liabilities*
Liabilitas akseptasi	2a,2e,2t			*Acceptances payable*
Penugasan Umum	2ah,11,42	150,461	147,569	*General Assignment*
Penugasan Khusus		3,391	3,592	*National Interest Account*
		153,852	151,161	
Utang pajak	2a,2ai,15b,42	16,279	11,267	*Taxes payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	2a,2y,2ah,16,39,42	21,992,750	25,311,700	*Debt securities issued*
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi		(11,437)	(21,028)	*Unamortized debt issuance cost*
		21,981,313	25,290,672	
Liabilitas derivatif	2a,2k,8b,42	1,477	56	*Derivatives payable*
Pinjaman yang diterima	2a,2e,2z 17,39,42	18,352,943	29,297,065	*Fund borrowings*
Utang asuransi	2a,2e,2r,42			*Insurance payable*
Penugasan Umum		5,453	6,306	*General Assignment*
Penugasan Khusus		81	--	*National Interest Account*
		5,534	6,306	
Utang penjaminan	2a,2e,2q,42			*Guarantee payable*
Penugasan Umum		1,667	706	*General Assignment*
Penugasan Khusus		16,760	61,009	*National Interest Account*
		18,427	61,715	
Liabilitas asuransi	2a,2e,2r,2ah			*Insurance liabilities*
Penugasan Umum	10c,42	6,474	7,961	*General Assignment*
Penugasan Khusus		198	--	*National Interest Account*
		6,672	7,961	
Estimasi klaim penjaminan	2a,2q,2ah			*Estimated guarantee claim*
Penugasan Umum	3,18b,42	5,347	9,414	*General Assignment*
Penugasan Khusus		443,564	469,243	*National Interest Account*
		448,911	478,657	
Liabilitas imbalan kerja	2a,2ag 3,29,39,42	142,522	144,514	*Liability for employee benefits*
Liabilitas sewa	2a,2u,19,42	5,337	5,553	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	2a,2u,2ah,20,42	1,264,486	1,446,534	*Other liabilities*
TOTAL LIABILITAS		**42,587,812**	**56,947,507**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Kontribusi modal Pemerintah				*Government capital contribution*
Penugasan Umum	2a,21	23,589,123	23,589,123	*General Assignment*
Penugasan Khusus	2a,21	14,013,308	14,013,308	*National Interest Account*
		37,602,431	**37,602,431**	
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak tangguhan	2a,7	(23,492)	(3,391)	*Unrealized loss of financial assets at fair value through other comprehensive income, net of deferred tax*
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	2a,2ag,29	150,248	122,598	*Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax*
Saldo laba				*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya:				*Appropriated:*
Cadangan umum	2a,22	322,161	322,161	*General reserve*
Cadangan tujuan	2a,22	758,235	758,235	*Specific reserve*
		1,080,396	1,080,396	
Belum ditentukan penggunaannya		(30,048,117)	(11,933,790)	*Unappropriated*
Kepentingan non-pengendali		1	1	*Non-controlling interest*
TOTAL EKUITAS		**8,761,467**	**26,868,245**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**51,349,279**	**83,815,752**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31*, 2023	2022	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				***INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS***
Pendapatan bunga dan usaha syariah				*Interest income and income from sharia*
Pendapatan bunga	2a,2ab,23			*Interest income*
Penugasan Umum		3,155,266	2,711,977	*General Assignment*
Penugasan Khusus		408,176	404,978	*National Interest Account*
		3,563,442	3,116,955	
Usaha syariah	2a,2ae,23			*Sharia*
Penugasan Umum		488,450	594,439	*General Assignment*
Penugasan Khusus		141	148	*National Interest Account*
		488,591	594,587	
Jumlah pendapatan bunga dan usaha syariah		4,052,033	3,711,542	*Total interest income and income from sharia*
Pendapatan usaha dari Ujrah	24	64	309	*Income from Ujrah*
Beban bunga	2a,2ab,2ae,25	(3,128,893)	(2,936,114)	*Interest expense*
PENDAPATAN BUNGA DAN USAHA SYARIAH - NETO		**923,204**	**775,737**	***INTEREST INCOME AND INCOME FROM SHARIA - NET***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan dari asuransi				*Income from insurance*
Pendapatan dari asuransi	2a,2af,10d	21,675	23,129	*Income from insurance*
Premi reasuransi	2a,2af,10d	(9,089)	(10,053)	*Reinsurance premiums*
Pendapatan dari asuransi - neto		12,586	13,076	*Income from insurance - net*
Penurunan/ (Kenaikan) pada liabilitas asuransi	2a,2r,2ad 10h	1,059	(1,444)	*Decrease/ (Increase) in insurance liabilities*
(Penurunan)/ Kenaikan pada aset reasuransi	2a,2s,2af,10g	(494)	903	*(Decrease)/ Increase in reinsurance assets*
Beban klaim asuransi dan lainnya	2a,2r,2af,10e	(933)	(994)	*Claim expense from insurance and other*
Pendapatan dari penjaminan	2a,2q,10f	90,527	115,552	*Income from guarantee*
Keuntungan/ (Kerugian) transaksi mata uang asing - neto	2a,2ah	6,828	(35,302)	*Gain/(Loss) on foreign exchange transactions - net*
Provisi dan komisi selain dari pembiayaan dan piutang	2a, 2ac	52,779	51,176	*Non financing and receivables related fees and commission*
Keuntungan penjualan efek - efek		12,139	--	*Gain on sale of securities*
Lain-lain		84,586	43,247	*Others*
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - NETO		**259,077**	**186,214**	***TOTAL OTHER OPERATING INCOME - NET***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31*, 2023	2022	
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	2a,2p,9,26	(16,932,394)	(2,107,596)	*Provision for impairment losses on financial assets*
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan	2a,2q,18b	2,994	(652)	*Provision for impairment losses on estimated guarantee claim*
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING EXPENSES***
Gaji dan tunjangan	2a,3,28	(482,289)	(468,623)	*Salaries and benefits*
Umum dan administrasi	2a,27	(299,239)	(270,380)	*General and administrative*
Lain-lain		(12,505)	(23,485)	*Others*
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		(794,033)	(762,488)	***TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES***
RUGI OPERASIONAL		(16,541,152)	(1,908,785)	***LOSS FROM OPERATIONS***
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - NETO		10,488	16,420	***NON-OPERATING INCOME - NET***
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK		(16,530,664)	(1,892,365)	***LOSS BEFORE TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK	2a,2ai,15c	(1,583,663)	(1,222,189)	***TAX EXPENSE***
RUGI TAHUN BERJALAN		**(18,114,327)**	**(3,114,554)**	***LOSS FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
PENGHASILAN/ (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				***OTHER COMPREHENSIVE GAIN/ (LOSS) TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS***
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto		(19,145)	(38,273)	*Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income- net*
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	2a,2ai,15d	(956)	8,420	*Tax related to components of other comprehensive income*
		(20,101)	(29,853)	
PENGHASILAN/ (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				***OTHER COMPREHENSIVE GAIN/ (LOSS) NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS***
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	2a,2ag,29	(3,991)	3,935	*Remeasurement of defined benefit obligation*
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	2a,2ai,15d	31,641	(866)	*Tax related to components of other comprehensive income*
		27,650	3,069	
PENGHASILAN/ (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK		7,549	(26,784)	***OTHER COMPREHENSIVE GAIN/ (LOSS) - NET OF TAX***
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**(18,106,778)**	**(3,141,338)**	***TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR***
Rugi Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada:				***Loss For The Year Attributable to:***
Pemilik entitas induk		(18,114,327)	(3,114,554)	*Equity holders of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		--	--	*Non-controlling interest*
Jumlah		**(18,114,327)**	**(3,114,554)**	***Total***
Jumlah Rugi Komprehensif yang diatribusikan kepada:				***Total Comprehensive Loss For the Year Attributable To :***
Pemilik entitas induk		(18,106,778)	(3,141,338)	*Equity holders of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		--	--	*Non-controlling interest*
Jumlah		**(18,106,778)**	**(3,141,338)**	***Total***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Kontribusi modal Pemerintah/ *Government capital contribution*	Keuntungan/(kerugian) Yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan/ *Unrealized gain/(loss) from increase in the fair value of financial assets in group at fair value through other comprehensive income net of deferred tax*	Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan/ *Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax*	Saldo laba/*Retained earnings*			Total/ *Total*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interest*	Total ekuitas/ *Total Equity*	
					Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*		Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*				
					Cadangan umum/ *General reserve*	Cadangan tujuan/ *Specific reserve*					
Saldo per 31 Desember 2021		**37,340,939**	**26,462**	**119,529**	**322,161**	**758,235**	**(8,446,949)**	**30,120,377**	**1**	**30,120,378**	***Balance as of December 31, 2021***
Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 pasal 20 ayat (2)	2a,21,22	--	--	--	(87,164)	--	--	(87,164)	--	(87,164)	*Impact of transitional adjustment on Government's not-tax revevue based on Law No.2 year 2009 article 20 paragraph 2*
Kapitalisasi Modal berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 pasal 20 ayat (2)	2a,21,22	261,492	--	--	(261,492)	--	--	--	--	--	*Capitalization based on Law No.2 year 2019 article 20 paragraph*
Bagian laba pemerintah	2a,22	--	--	--	--	--	(23,631)	(23,631)	--	(23,631)	*Government's profit share*
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	2a,21	--	--	--	348,656	--	(348,656)	--	--	--	*Allocation for general reserve and specific reserve*
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak tangguhan	2a,2i,7,15d	--	(29,853)	--	--	--	--	(29,853)	--	(29,853)	*Unrealized loss of financial assets at fair value through other comprehensive income- net of deferred tax*
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	2a,2ag,15d,29	--	--	3,069	--	--	--	3,069	--	3,069	*Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax*
Rugi tahun berjalan		--	--	--	--	--	(3,114,554)	(3,114,554)	--	(3,114,554)	*Loss for the year*
Saldo per 31 Desember 2022		**37,602,431**	**(3,391)**	**122,598**	**322,161**	**758,235**	**(11,933,790)**	**26,868,244**	**1**	**26,868,245**	***Balance as of December 31, 2022***
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak tangguhan	2a,2i,7,15d	--	(20,101)	--	--	--	--	**(20,101)**	--	**(20,101)**	*Unrealized loss of financial assets at fair value through other comprehensive income- net of deferred tax*
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	2a,2ag,15d,29	--	--	27,650	--	--	--	**27,650**	--	**27,650**	*Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax*
Rugi tahun berjalan		--	--	--	--	--	**(18,114,327)**	**(18,114,327)**	--	**(18,114,327)**	*Loss for the year*
Saldo per 31 Desember 2023		**37,602,431**	**(23,492)**	**150,248**	**322,161**	**758,235**	**(30,048,117)**	**8,761,466**	**1**	**8,761,467**	***Balance as of December 31, 2023***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31*, 2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga, provisi dan komisi		3,563,506	3,105,347	*Interest, fees and commissions received*
Pendapatan usaha syariah		488,591	594,896	*Sharia income*
Pendapatan operasional lainnya - neto		251,684	221,516	*Other operating income - net*
Klaim atas kelebihan pembayaran pajak		865	75,806	*Claims for tax refund*
Beban operasional lainnya - neto		(672,703)	(649,360)	*Other operating expenses - net*
Pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya		(3,215,023)	(2,301,480)	*Interest and other financing charges*
Pendapatan bukan operasional - neto		10,488	16,411	*Non-operating income - net*
Arus kas dari operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi		427,408	1,063,136	*Cash flows from operations before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi				*Changes in operating assets and liabilities*
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:				*(Increase)/decrease in operating assets:*
Tagihan derivatif		(85)	6	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang		6,441,424	(2,681,616)	*Financing and receivables*
Pembiayaan/piutang syariah		1,155,766	958,557	*Sharia financing/receivables*
Biaya dibayar dimuka		(5,329)	653	*Prepaid expenses*
Piutang asuransi dan penjaminan		534,894	(27,125)	*Insurance and guarantee receivables*
Aset reasuransi		117	(929)	*Reinsurance assets*
Tagihan akseptasi		(2,693)	310,295	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain		17,916	7,514	*Other assets*
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:				*Increase/(decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera		23,085	13,476	*Current liabilities*
Liabilitas devisa hasil ekspor		120,928	--	*Foreign exchange export proceeds liabilities*
Liabilitas akseptasi		2,691	(309,379)	*Acceptances payable*
Utang pajak		5,012	(1,683)	*Taxes payable*
Liabilitas derivatif		1,421	56	*Derivatives payable*
Utang asuransi		287	2,251	*Insurances payable*
Utang penjaminan		(43,288)	(648)	*Guarantee payable*
Liabilitas asuransi		(1,289)	1,571	*Insurance liabilities*
Estimasi klaim penjaminan		(26,752)	86,098	*Estimated guarantee claim*
Liabilitas imbalan kerja		--	(9,226)	*Liability for employee benefits*
Liabilitas lain-lain		(104,154)	215,048	*Other liabilities*
Kas neto diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi		**8,547,359**	**(371,945)**	***Net cash provided by/ (used in) operating activities***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW (Continued)
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31*, 2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset tetap		--	9	*Proceeds from sale of premises and equipment*
Pembelian efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya		--	(1,476,856)	*Purchase of marketable securities at fair value through other comprehensive income*
Perolehan aset tetap	2a,13	(22,559)	(11,549)	*Acquisitions of premises*
Penjualan efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya		517,053	28,513	*Selling of marketable securities at fair value through other comprehensive income*
Kas neto diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi		494,494	(1,459,883)	***Net cash provided by/ (used in) investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman yang diterima		29,298,758	70,215,181	*Proceeds from fund borrowings*
Pembayaran pinjaman yang diterima		(40,239,514)	(69,717,687)	*Payments of fund borrowings*
Pembayaran efek-efek utang yang diterbitkan yang jatuh tempo		(3,322,316)	(3,089,300)	*Payments for matured debt securities issued*
Pembayaran liabilitas sewa	19	(3,944)	(6,047)	*Payments of lease liability*
Pembayaran ke pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak	22	--	(87,164)	*Payments for government as Goverment non Tax Revenue*
Pembayaran bagian laba pemerintah	22	--	(23,631)	*Payments government's profit share*
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan		(14,267,016)	(2,708,648)	***Net cash used in financing activities***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas		6,828	(35,302)	*Foreign exchange effect related to cash and cash equivalents*
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(5,218,335)	(4,575,778)	***NET DECREASE IN CASH AND EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		12,741,875	17,317,653	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**7,523,540**	**12,741,875**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW (Continued)
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless orherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31*, 2023	2022	
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:				***COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:***
Kas		85	38	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2a,4	553	426	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	2a,5	108,258	180,647	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	2a,6	7,414,644	12,560,764	*Placements with banks - maturing within three months or less since the acquisition date*
Total kas dan setara kas		**7,523,540**	**12,741,875**	***Total cash and cash equivalents***

Tambahan informasi arus kas disajikan pada Catatan 43.

Additional information cashflow presented in Note 43

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum

1.a. Pendirian dan Pembentukan LPEI

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia didirikan dengan nama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) ("BEI") yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan. Pendirian Bank ditetapkan dengan akta No. 49 tanggal 25 Juni 1999 oleh notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-13130.HT.01.01-TH.99 tanggal 19 Juli 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1999, Tambahan No. 6652.

BEI memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/12/KEP.GBI/1999 tanggal 18 Agustus 1999 dan beroperasi secara komersial sejak tanggal 10 September 1999. Berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 2/6/KEP.DpG/2000 tanggal 24 April 2000, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Pada tanggal 21 September 2007, BEI telah mendapat izin usaha syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 9/1494/DPbs.

Pemegang saham telah menyetujui perubahan pasal 3 anggaran dasar BEI tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha BEI berdasarkan (i) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Mei 2003 yang diaktakan dengan akta No. 45 tanggal 21 Mei 2003 oleh notaris Imas Fatimah, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-11539.HT.01.04.TH.2003 tanggal 23 Mei 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 2 September 2003, Tambahan No. 7838.

1. General

1.a. Establishment and Formation of LPEI

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia was establish under the name PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) ("BEI") which established based on Government Regulation No. 37 of 1999 dated May 25, 1999, regarding the State Capital Participation of the Government of the Republic of Indonesia in the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Banking Sector. The establishment of the Bank was notarized under deed No. 49 dated June 25, 1999 of notary Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. The deed of establishment approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-13130.HT.01.01-TH.99 dated July 19, 1999 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated October 8, 1999, Supplement No. 6652.

BEI has a business license to conduct commercial banking activities based on the Decision Letter No. 1/12/KEP.GBI/1999 dated August 18, 1999 of the Governor of Bank Indonesia and started commercial operations on September 10, 1999. The Bank obtained its status as a foreign exchange bank based on the Decision Letter of the Deputy Governor of Bank Indonesia No. 2/6/KEP.DpG/2000 dated April 24, 2000.

On September 21, 2007, the BEI obtained its sharia business license from the Bank Indonesia through Decision Letter No. 9/1494/DPbs.

The stockholder approved the revision of article 3 of the BEI's Articles of Association concerning the BEI's objectives and scope of activities based on (i) Shareholder's Extraordinary General Meeting held on May 19, 2003 as provided in the deed No. 45 dated May 21, 2003 of notary Imas Fatimah, S.H., which was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-11539.HT.01.04.TH.2003 dated May 23, 2003 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 70 dated September 2, 2003, Supplement No. 7838.

1. Umum (lanjutan)

1.a. Pendirian dan Pembentukan LPEI (lanjutan)

Dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Maret 2007 yang diaktakan dengan Akta No. 15 tanggal 10 Mei 2007 oleh notaris Imas Fatimah, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-05624.HT.01.04-TH.2007 tanggal 21 Mei 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 31 Juli 2007, Tambahan No. 7655.

Di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2008, yang diaktakan dengan Akta No. 2 tanggal 1 Agustus 2008 oleh notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-73679.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2003, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar BEI, maksud dan tujuan BEI adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang pembiayaan perdagangan ekspor impor melalui pemberian pinjaman/pembiayaan, penjaminan dan/atau asuransi serta jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan perdagangan luar negeri, penerus pinjaman pemerintah, termasuk menghimpun dana pihak ketiga dalam bentuk giro, simpanan berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memperoleh pinjaman dan menerbitkan efek-efek, baik di dalam maupun di luar negeri, serta melaksanakan kegiatan perbankan syariah.

1. General (continued)

1.a. Establishment and Formation of LPEI (continued)

And (ii) Stockholder's Extraordinary General Meeting held on March 22, 2007 as provided in the Deed No. 15 dated May 10, 2007 of notary Imas Fatimah, S.H., which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. W7-05624.HT.01.04-TH.2007 dated May 21, 2007 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 61 dated July 31, 2007, Supplement No. 7655.

In the Stockholder's Extraordinary General Meeting held on July 18, 2008 as mentioned in Deed No. 2 dated August 1, 2008 of notary Sutjipto, S.H., M.Kn. which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-73679.AH.01.02.Year 2008 dated October 14, 2008, the stockholders approved the entire changes in the Bank's Articles of Association to conform with Law No. 19 Year 2003, Law No. 40 Year 2007 and Government Regulation No. 45 Year 2005.

According to article 3 of the BEI's Articles of Association, the BEI's objectives and scope are to execute and provide assistance to the government in the implementation of its policies and programs in the economic sector and in the national development in general, particularly in export and import trade financing through the disbursement/financing of trade financing and providing guarantees/insurance as well as providing consultations on foreign trade financing, the disbursement of two-step financing from the government, including collecting third-parties funds in the form of demand deposits, time deposits or other forms, obtaining borrowings and issuing securities in the local or foreign markets, and conducting sharia banking activities.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1.a. Pendirian dan Pembentukan LPEI (lanjutan)

Pada tanggal 12 Januari 2009, Gubernur Bank Indonesia telah mencabut izin usaha BEI sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan menegaskan bahwa dengan dicabutnya izin usaha BEI, maka seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) beralih kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang LPEI.

Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang LPEI Pasal 48 menyebutkan bahwa paling lama 9 (sembilan) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan, LPEI mulai beroperasi, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 336/KMK.06/2009 tanggal 24 Agustus 2009, Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa tanggal 1 September 2009 sebagai tanggal mulai beroperasinya LPEI. Pada saat mulai beroperasinya LPEI, maka BEI dinyatakan bubar dan seketika itu pula seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BEI dan pegawai BEI tersebut beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPEI dan pegawai LPEI.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BEI yang diaktakan No. 16 tanggal 31 Agustus 2009 oleh Notaris Ny. Anne Meyanne Alwie, S.H., pemegang saham memutuskan di antaranya:

- Mengalihkan seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BEI menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPEI.
- Mengalihkan semua pegawai BEI menjadi pegawai LPEI termasuk namun tidak terbatas pada masa kerja, penghargaan masa kerja, dan jasa produksi pegawai yang telah dibiayakan sampai dengan 31 Agustus 2009.
- Pembubaran BEI tanpa likuidasi.

1. General (continued)

1.a. Establishment and Formation of LPEI (continued)

On 12 January 2009, the Governor of Bank Indonesia revoked the BEI business license as a follow-up to the issuance of Law No. 2 of 2009 concerning the Indonesian Export Financing Institution and confirmed that with the revocation of the BEI business license, all assets and liabilities as well as legal rights and obligations of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) transferred to the Indonesian Export Financing Institution ("LPEI") as stipulated in Law No. 2 of 2009 dated January 12, 2009 concerning LPEI.

Law No. 2 Year 2009 dated January 12, 2009 about LPEI Article 48 states maximum of 9 (nine) months since the Law was promulgated, LPEI started to operate, so that based on Decree of the Financial Minister No. 336/KMK.06/2009 dated August 24, 2009, the Government of Republic of Indonesia decided that September 1, 2009 is the start of operation date of LPEI. When LPEI started to operate, the BEI was dissolved and effective immediately, all legal assets and liabilities as well as rights and obligations of BEI employees become the legal assets and liabilities, as well as the rights and obligations of employees of LPEI.

Based on the decision statement of the BEI Stockholder's Extraordinary General Meeting as mentioned in the deed No. 16 dated August 31, 2009 of notary Ms. Anne Meyanne Alwie, S.H., the stockholders decided among others to:

- *Transfer all the assets and liabilities, rights and obligations legal of the BEI to become the legal assets and liabilities and rights and obligations legal of LPEI.*
- *Transfer all of the BEI's employees to become employees of LPEI including but not limited to the working period, employee benefits and employee production service that had been expensed up to August 31, 2009.*
- *The Dissolve the BEI without liquidation.*

1. Umum (lanjutan)

1.a. Pendirian dan Pembentukan LPEI (lanjutan)

LPEI akan lebih berfokus dalam menjalankan kegiatan usaha berupa pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi dalam rangka ekspor. Keberadaan LPEI juga akan memberikan garansi atas berbagai risiko yang selama ini tidak diberikan oleh bank komersial. Pihak asing akan lebih mempunyai keyakinan atas LPEI karena LPEI merupakan bagian dari Pemerintah dan dibentuk berdasarkan atas undang-undang (*sovereign*). LPEI juga bisa mengatur *prudential norm*-nya sendiri. Selain itu, struktur organisasi LPEI yang menggunakan *One Board System* tentu akan bisa mengefektifkan pengambilan keputusan.

Kegiatan usaha LPEI adalah:

a. Memberikan pembiayaan konvensional maupun secara prinsip syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
b. Penjaminan yang meliputi: penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang/jasa di luar negeri, penjaminan bagi importir barang/jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan, penjaminan bagi bank yang menyediakan pembiayaan transaksi ekspor kepada eksportir Indonesia, serta penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor;
c. Asuransi ekspor yang meliputi asuransi atas risiko kegagalan ekspor, asuransi atas risiko kegagalan bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan perusahaan Indonesia di luar negeri, dan/atau asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor;
d. Bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank/lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

1. General (continued)

1.a. Establishment and Formation of LPEI (continued)

LPEI will be more focused on running the business activities of financing, guarantees, insurance, and consulting services in order to export. The presence of LPEI also will provide warranty for a variety of risk that has not been granted by commercial banks. Foreign parties will have more confidence in LPEI because LPEI is part of the Government and was formed based on law (sovereign). LPEI can also set the prudential norm of his own. In addition, the structure of LPEI use One Board System would be effective for decision making.

LPEI business activities are:

a. Provides local and international financing and receivable under the conventional and Syariah principles;
b. Guarantee that includes: underwriting for Indonesian exporters for payment received from the buyer of goods/services overseas, guarantee for importers of goods/services from Indonesia to overseas for the payment of which has been given, which provides a guarantee for bank financing on export transactions to Indonesian exporters, as well as guarantee in order to tender related to the implementation of the project in whole or in part which is supporting export activity;
c. Export insurances cover the risk of failure on export, failure to pay, the investment by insurance Indonesian companies abroad, and/or political risk insurance in a country's export destination;
d. Provides guidance and consulting services to banks, financial institutions, exporters, manufacturers of export goods, especially micro, small, medium, and cooperatives to help overcome the barriers faced by banks/financial institutions in providing financing to exporters with commercial potential and/or important to the economic development of Indonesia.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1.a. Pendirian dan Pembentukan LPEI (lanjutan)

Untuk membiayai kegiatan dalam melaksanakan Penugasan Umum, LPEI dapat memperoleh dana yang berasal dari:
a. Penerbitan surat berharga;
b. Pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang dari pemerintah Indonesia, pemerintah asing, lembaga multilateral, bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik di dalam maupun luar negeri;
c. Hibah;
d. Penempatan dana oleh Bank Indonesia.

Penugasan Khusus atau *National Interest Account* (NIA) adalah penugasan yang diberikan pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor.

Penugasan Khusus kepada LPEI bertujuan untuk membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial yang enggan atau tidak memiliki kemampuan dalam hal pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko, namun harus memenuhi kriteria meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan memiliki potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang.

1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE)

Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, LPEI dapat memberikan pembiayaan atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, namun dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional/Penugasan Khusus Ekspor (PKE). Penugasan khusus ini menjadi strategis karena bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, dan memiliki potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang.

1. General (continued)

1.a. Establishment and Formation of LPEI (continued)

To finance its activities in order to conduct the General Assignment, LPEI can obtain funds derived from:
a. Issuance of securities;
b. Short-term loan, medium-term, and/or long-term Indonesia government, foreign governments, multilateral institutions, banks and financial institutions and finance loans, both at domestic and abroad;
c. Grant;
d. Placement of funds by Bank Indonesia.

The Special Assignment or National Interest Account (NIA) was assigned from government to LPEI to provide export financing for transactions or projects that is difficult to be implemented commercially, but its required by the government to support the government policies or export program.

This NIA assignment to LPEI aims to help in providing finance to the area that is not accessible by banks or commercial financial institutions that are reluctant or do not have the capacity in terms of competitive financing and the ability to absorb risks, it must meet the criteria to enhance competitiveness and value-added indonesian products, support the growth of the domestic industry and has the potential for improvement and long-term export development.

1.b. National Interest Account (NIA)

Based on the mandate of Law No. 2 Year 2009, LPEI is able to provide financing for the transaction or project that is commercially difficult to implement, but is considered necessary by the Government to support a national export policy or program/National Interest Account (NIA). This special assignment becomes strategic because it aims to improve the competitiveness and value-added products of Indonesia, supporting the growth of the domestic industry, and has the potential for improvement and long-term export development.

1. Umum (lanjutan)

1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (lanjutan)

Kegiatan usaha LPEI dalam rangka Penugasan Khusus dapat diberikan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang meliputi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Di tahun 2015, LPEI telah mendapatkan penugasan PKE dari Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang ditetapkan tanggal 14 Juli 2015 yang telah dua kali diubah yaitu pada tahun 2017 dengan PMK No. 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2017 dan pada tahun 2021, dengan PMK No. 183/PMK.08/2021 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2021. Pelaksanaan atas mandat tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Pada tahun 2015, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 1156/KMK.08/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Produk Gerbong Penumpang Kereta Api. KMK No. 1231/KMK.08/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Mendukung Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tahun 2015 yang diubah berdasarkan KMK No. 167/KMK.08/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 1231/KMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Mendukung Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tahun 2015.

1. General (continued)

1.b. National Interest Account (NIA) (continued)

The business activities of LPEI in the framework of NIA can be administered either through conventional or based on sharia principles that include financing, guarantees and insurance to both legal entities and other entities including individuals who live inside or outside the territory of the Republic Indonesia.

In 2015, LPEI has obtained a NIA assignment from the Government through the Regulation of Minister of Finance (PMK) No. 134/PMK.08/2015 on National Interest Account Assignment To Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia issued on July 14, 2015 which has been amended twice In 2017, with PMK No. 198/PMK.08/2017 on National Interest Account Assignment to LPEI dated December 21, 2017 and In 2021, with PMK No. 183/PMK.08/2021 regarding National Interest Account Assignment to LPEI dated December 14, 2021. The implementation of the mandate is set out in Decree of the Minister of Finance (KMK).

In 2015, has been issued Decree of Minister of Finance (KMK) No. 1156/KMK.08/2015 dated November 13, 2015 on Special Assignment LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Product. KMK No. 1231/KMK.08/2015 dated December 8, 2015 on Special Assignment To LPEI Economic Policy Package To Support Government in 2015 which amended based on KMK No. 167/KMK.08/2016 dated March 8, 2016 on the Amendment to Decree of the Minister of Finance No. 1231/KMK.08/2015 on Special Assignment to LPEI to Support Government Economic Policy Package year 2015.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (lanjutan)

Pada tahun 2017, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 374/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Gerbong Penumpang Kereta Api yang ditetapkan tanggal 12 Mei 2017 dengan negara tujuan ke Bangladesh yang sudah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 513/KMK.08/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 374/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Kereta Penumpang dan Gerbong Barang Kereta Api dengan Negara tujuan ke Bangladesh dan Srilanka yang memiliki jangka waktu penugasan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan mempertimbangkan alokasi dana.

LPEI juga mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 649/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk menyediakan Pembiayaan Ekspor Pesawat Udara yang ditetapkan tanggal 5 September 2017 dengan negara tujuan ke Thailand, Nepal, Uni Emirat Arab, dan negara- negara di kawasan Afrika yang tidak diembargo Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 512/KMK.08/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 649/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Pesawat Udara yang memiliki jangka waktu penugasan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi dana.

1. General (continued)

1.b. National Interest Account (NIA) (continued)

In 2017, has been issued Decree of Minister of Finance (KMK) No. 374/KMK.08/2017 on Special Assignment LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Products dated on May 12, 2017 with Bangladesh and has been amended based on the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 513/KMK.08/2018 regarding changes of KMK No. 374/KMK.08/2017 on National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Financing for Export of Passenger Railway Carriages Products with Bangladesh and Srilangka as the country of destination and has term of assignment until December 31, 2020 taking into account the allocation of funds.

LPEI has obtained a special assignment from the Government through the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 649/KMK.08/2017 on Special Assignment LPEI to Provide Financing for Export of Aircrafts dated on September 5, 2017 with the countries of destination Thailand, Nepal, United Arab Emirates, and countries in the African region that are not in the embargo of the United Nations and have been amended based on Decree of Minister of Finance (KMK) No. 512/KMK.08/2018 regarding changes of KMK No. 649/KMK.08/2017 on National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Aircraft Export Financing which has an assignment period until December 31, 2020 taking into account the availability of fund allocation.

1. Umum (lanjutan)

1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (lanjutan)

Pada tahun 2019 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 01/KMK.08/2019 tanggal 2 Januari 2019 sebagai Addendum KMK No.787/KMK.08/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 685/KMK.08/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 387/KMK.08/2022 tanggal 23 September 2022 sebagai Addendum Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 685/KMK.08/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI dalam rangka Pengembangan Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Pada tahun 2020, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.372/KMK.08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dan telah diperbaharui berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 409/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 372/KMK.08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor, dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2025.

Pada tahun 2020, juga telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 428/KMK.08/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Mendukung Industri Penerbangan Indonesia, dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2021.

1. General (continued)

1.b. National Interest Account (NIA) (continued)

In 2019, has been issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 01/KMK.08/2019 dated January 2, 2019 regarding Changes of KMK No. 787/KMK.08/2017 dated November 6, 2017 on National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Financing Exports to Africa, South Asia, and the Middle East and issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 685/KMK.08/2019 dated August 27, 2019 and have been amended based on the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 387/KMK.08/2022 dated September 23, 2022 regarding changes of the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 685/KMK.08/2019 dated August 27, 2019 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to developing Mandalika Special Economic Zone Tourism.

In 2020, has been issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 372/KMK.08/2020 dated August 11, 2020 and has been updated based on the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 409/KMK.08/2021 dated September 21, 2021 revision of Decree of KMK No. 372/KMK.08/2020 dated August 11, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Supporting the Export Oriented Small and Medium Enterprises Sector, with a term of assignment period until December 31, 2025.

In 2020, also has been issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 428/KMK.08/2020 dated September 23, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Supporting the Indonesian Aviation Industry, with a term of assignment period until December 31, 2021.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (lanjutan)

Serta di 2020 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 526/KMK.08/2020 tanggal 18 November 2020 yang telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 410/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Perubahan Atas KMK No. 526/KMK.08/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Menyediakan Fasilitas *Trade Finance* dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2022.

Pada tahun 2021, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 406/KMK.08/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor dalam Rangka Mendukung Industri Alat Transportasi dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2026.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK/08/2021 tentang penugasan khusus kepada LPEI, perlu dibentuk komite penugasan khusus.

Dalam rangka pelaksanaan tugas komite, Ketua komite membentuk tim teknis, komite bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kementerian Keuangan.

Dalam rangka memperoleh masukan terkait kebijakan kementerian sektor sesuai surat keputusan Menteri Keuangan No. 191/KMK.08/2016, dibentuk kelompok advisori yang merupakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 66/KMK.08/2020, tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2020, masa kerja komite dan kelompok Advisori ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

1. General (continued)

1.b. National Interest Account (NIA) (continued)

In 2020, has been issued the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 526/KMK.08/2020 dated November 18, 2020 and has been amended based on the Decree of Minister of Finance (KMK) No. 410/KMK.08/2021 dated September 21, 2021 revision of KMK No. 526/KMK.08/2020 dated November 18, 2020 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Provide Trade Finance Facilities in Order to Support National Economic Recovery, with a term of assignment period until December 31, 2022.

In 2021, has been issued the Decree of the Minister of Finance (KMK) No. 406/KMK.08/2021 dated September 21, 2021 regarding Special Assignment to LPEI to Provide Export Financing in Order to Support the Transportation Equipment Industry with an assignment period until December 31, 2026.

According to Article 9 Minister of Finance Regulation No. 183/PMK/08/2021 on special assignment to the LPEI, committees for NIA need to be established.

In order to execute the task of the committee, the Chairman of the committee formed a technical team, the committee which is responsible and report on performance of its duties to the Ministry of Finance.

In order to obtain feedback regarding the appropriate sector ministry policy decision in accordance with the Minister of Finance decision No. 191/KMK.08/2016, Advisory Group comprising representatives of the Ministries/Non-ministries Government Organization has been formed.

Based on the decision of the Minister of Finance No. 66/KMK.08/2020, about establishing committess for NIA in 2020, the tenure of committees and Advisory Group is set for 12 (twelve) months from January 1, 2020 until December 31, 2020.

1. Umum (lanjutan)

1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 36/KMK.08/2021, tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2021, ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK.08/2021 tentang LPEI juga memuat tata cara pengajuan usul program ekspor nasional dari kementerian dan lembaga, sumber dana, denda, provisi penjaminan, premi asuransi, penggantian kerugian, pembentukan komite penugasan khusus ekspor, dan pembayaran.

Pada tahun 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 272/KMK.08/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Untuk Pengembangan Infrastruktur Marina dan Penunjang Pariwisata Pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan jangka penugasan sampai dengan 31 Desember 2024.

Kegiatan usaha LPEI dalam Penugasan Khusus:
a. Memberikan pembiayaan konvensional maupun secara prinsip syariah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
b. Penjaminan yang meliputi Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa diluar negeri, penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia;
c. Asuransi yang meliputi asuransi atas risiko gagal bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri, dan/atau asuransi risiko politik.

Untuk membiayai kegiatannya dalam rangka penugasan khusus, LPEI dapat memperoleh dana yang berasal dari:
a. Anggaran pendapatan dan belanja negara berupa penyertaan modal negara yang diakui dalam ekuitas LPEI sebagaimana penambahan modal dan/atau bentuk lain yang diatur dalam peraturan menteri;

1. General (continued)

1.b. National Interest Account (NIA) (continued)

Based on the decision of the Minister of Finance No. 36/KMK.08/2021, about establishing committess for NIA in 2021, the tenure of committees and Advisory Group is set for 12 (twelve) months from January 1, 2021 until December 31, 2021.

Minister of Finance Regulation No. 183/PMK.08/2021 on LPEI also includes procedure of filing a national export program proposals of ministries and agencies, sources of funds, fines, underwriting fees, insurance premiums, indemnities, committees, and special assignments export payments.

In 2022, the Decree of the Minister of Finance (KMK) No. 272/KMK.08/2022 dated July 5, 2022 regarding National Interest Account Assignment to LPEI to Developing Marina Infrastructure and Tourism Support in Super Priority Tourism Destinations with an assignment period until December 31, 2024.

LPEI's business activities in NIA include the following:
a. Provides conventional and sharia financing both domestic and overseas;

b. Guarantees for Indonesian exporters on payments received from the buyer of goods and/or services abroad, guarantee for banks that become partners in providing financing transactions that have been provided to the Indonesian exporters;
c. Insurance that cover against payment default, insurance on the investments made by the Indonesian company in overseas, and/or insurance on political risk.

To finance its activities in the framework of a special assignment (National Interest Account), LPEI can obtain funds from:
a. State budget of revenues and expenditures in the form of equity participation which is recognized in LPEI's equity as additional capital and/or other forms stipulated in the ministerial regulations;

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1.b. Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (lanjutan)

Untuk membiayai kegiatannya dalam rangka penugasan khusus, LPEI dapat memperoleh dana yang berasal dari: (lanjutan)

b. Bagian kapitalisasi modal LPEI untuk Dana Penugasan Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha pelaksanaan Penugasan Khusus Pemerintah kepada LPEI guna mendukung program ekspor nasional pada tanggal 31 Desember 2020, Negara Republik Indonesia telah menyetorkan penambahan penyertaan modal negara masing-masing sebesar Rp6.000.000 untuk LPEI. Modal tersebut sebesar Rp1.000.000 efektif diterima pada tanggal 18 Agustus 2020 dan Rp5.000.000 efektif diterima pada 30 Desember 2020.

Dana dalam rekening Penugasan Khusus hanya dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Penugasan Khusus. Pendanaan program Penugasan Khusus dibatasi paling banyak sebesar akumulasi dana Penugasan Khusus, setelah memperhitungkan seluruh biaya terkait. Biaya terkait program Penugasan Khusus meliputi biaya dana, cadangan kerugian penurunan nilai, dan biaya operasional lain yang dibebankan oleh LPEI.

1.c. Jaringan Kantor

Kantor LPEI berlokasi di Prosperity Tower, District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta - 12190. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, LPEI mempunyai tiga kantor wilayah yaitu Kantor Wilayah I yang membawahi Wilayah Jakarta, Kantor Cabang Medan, dan Kantor Pemasaran Batam; Kantor Wilayah II membawahi Kantor Cabang Surakarta dan Kantor Pemasaran Balikpapan; dan Kantor Wilayah III membawahi Kantor Cabang Makassar dan Kantor Pemasaran Denpasar.

1. General (continued)

1.b. National Interest Account (NIA) (continued)

To finance its activities in the framework of a special assignment (National Interest Account), LPEI can obtain funds from: (continued)
b. Part of capitalization of LPEI's equity for NIA stipulated in the requirements of law;
c. Other legitimate sources in accordance with the requirements of law.

In strengthening the capital structure and increase the capacity of business for the implementation of NIA to export financing to support export programs nationwide, December 31, 2020, the Republic of Indonesia has injected additional equity participation amounting to Rp6,000,000 to LPEI, respectively. The capital injection Rp1,000,000 was received on August 18, 2020 and Rp5,000,000 was received on December 30, 2020, respectively.

The funds available under NIA bank account can only be used for the implementation of NIA program. Financing for NIA program is limited to the accumulated funds of NIA, after taking into account all of the related costs. The cost of NIA includes cost of fund, allowance for impairment, and operational expense charge by LPEI.

1.c. Office Network

LPEI office is located at the Prosperity Tower, District 8, Jenderal Sudirman Street Lot 52-53, Jakarta - 12190. As of December 31, 2023 and 2022, LPEI has three regional offices which are Regional Office I covers Jakarta, Medan Branch, and Batam Marketing Office; Regional Office II covers Surakarta Branch Office and Balikpapan Marketing, and Office Regional Office III covers Makassar Branch and Denpasar Marketing Office.

1. Umum (lanjutan)

1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit dan Pegawai

Susunan Dewan Direktur LPEI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

1.d. Board of Directors, Managing Directors, Audit Committee and Employees

The composition of the Board of Directors of LPEI as of December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember / *December 31,*		
	2023	**2022**	
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif [1]	Rijani Tirtoso	Rijani Tirtoso	*Chairman of Board of Directors concurrently Executive Director* [1]
Anggota Dewan Direktur [2]	Kasan	Kasan	*Member of Board of Directors* [2]
Anggota Dewan Direktur [3]	Arus Gunawan	Arus Gunawan	*Member of Board of Directors* [3]
Anggota Dewan Direktur [4]	Suminto	Suminto	*Member of Board of Directors* [4]
Anggota Dewan Direktur [5]	--	Felia Salim	*Member of Board of Directors* [5]
Anggota Dewan Direktur [6]	D. James Rompas	D. James Rompas	*Member of Board of Directors* [6]
Anggota Dewan Direktur [7]	Yon Arsal	--	*Member of Board of Directors* [7]

1) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.06/2021 tentang Penetapan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 31 Desember 2021, menetapkan Rijani Tirtoso sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI berlaku efektif setelah 5 hari kerja sejak tanggal ditetapkan dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 menggantikan Daniel James Rompas yang telah menjabat sejak 23 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 933/KMK.06/2019.

2) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 274/KMK.06/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 5 Juni 2020, mengangkat Kasan sebagai anggota dewan direktur sejak 5 Juni 2020 dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 332 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 14 September 2023 mengangkat kembali Sdr. Kasan sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan masa jabatan 5 tahun.

1) Based on Decree of Minister of Finance No. 552/KMK.06/2021 regarding Appointment of the Chairman of the Board of Directors concurrently as Executive Director Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 31, 2021, appointed Rijani Tirtoso as Chairman of the Board of Directors and concurrently as Executive Director LPEI, effective after 5 working days from the date of appointment with a tenure up to August 31, 2024 replacing Daniel James Rompas who has served since December 23, 2019 based on the Decree of the Minister of Finance No. 933/KMK.06/2019.

2) Based on Decree of Minister of Finance No. 274/KMK.06/2020 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated June 5, 2020, Kasan was appointed as a member of the board of directors since June 5, 2020 for a tenure up to August 31, 2023. Based on Decree of Minister of Finance No. 332 Tahun 2023 regarding Reappointment of Members of the Board of Directors Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated September 14, 2023 reappointed Mr. Kasan as Member of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia with a term of office of 5 years.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)

3) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 530/KMK.06/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 19 November 2020, mengangkat Arus Gunawan sebagai anggota dewan direktur sejak 19 November 2020 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

4) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.06/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 14 Agustus 2018, mengangkat Suminto sebagai anggota dewan direktur sejak 1 September 2018 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 375 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 19 Oktober 2023 mengangkat kembali Suminto sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan masa jabatan 5 tahun.

5) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.06/2018 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 25 Juli 2018, mengangkat Felia Salim sebagai anggota dewan direktur sejak 25 Juli 2018 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

1. General (continued)

1.d. Board of Directors, Managing Directors, Audit Committee and Employees (continued)

3) Based on Decree of Minister of Finance No. 530/KMK.06/2020 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated November 19, 2020, Arus Gunawan was appointed as a member of the board of directors since November 19, 2020 for a tenure of 5 (five) years.

4) Based on Decree of Minister of Finance No. 554/KMK.06/2018 regarding Termination and Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated August 14, 2018, Suminto was appointed as a member of the board of directors since September 1, 2018 for a tenure of 5 (five) years. Based on Decree of Minister of Finance No. 375 Tahun 2023 regarding Reappointment of Members of the Board of Directors Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated October 19, 2023 reappointed Suminto as Member of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia with a term of office of 5 years.

5) Based on Decree of Minister of Finance No. 522/KMK.06/2018 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated July 25, 2018, Felia Salim was appointed as a member of the board of directors since July 25, 2018 for a tenure of 5 (five) years.

1. Umum (lanjutan)

1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)

6) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 934/KMK.06/2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 23 Desember 2019, mengangkat Rijani Tirtoso sebagai anggota dewan direktur sejak 23 Desember 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.06/2021 tentang Penetapan Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 31 Desember 2021, menetapkan Daniel James Rompas kembali menjadi anggota Dewan Direktur LPEI berlaku efektif setelah 5 hari kerja sejak tanggal ditetapkan dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.

7) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 155 tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 28 April 2023, mengangkat Yon Arsal sebagai anggota dewan direktur sejak 28 April 2023 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Susunan Direktur Pelaksana LPEI pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

1.d. Board of Directors, Managing Directors, Audit Committee and Employees (continued)

6) Based on Decree of Minister of Finance No. 934/KMK.06/2019 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 23, 2019, Rijani Tirtoso was appointed as a member of the board of directors since December 23, 2019 for a tenure up to December 23, 2024. Based on Decree of Minister of Finance No. 522/KMK.06/2021 regarding Appointment of the Chairman of the Board of Directors concurrently as Executive Director Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated December 31, 2021, appointed Daniel James Rompas return to being a member of the LPEI Board of Directors effective after 5 working days from the date of appointment with a tenure up to August 31, 2024.

7) Based on Decree of Minister of Finance No. 155 year 2023 regarding Appointment of Members of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated April 28, 2023, Yon Arsal was appointed as a member of the board of directors since April 28, 2023 for a tenure of 5 (five) years.

The Managing Directors of LPEI as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember / *December 31,*		
	2023	**2022**	
Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan [1)]	Dikdik Yustandi	Dikdik Yustandi	*Managing Director of Financing [1)]*
Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis [2)]	Maqin U. Norhadi	Maqin U. Norhadi	*Managing Director of Business Development [2)]*
Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional [3)]	Agus Windiarto	Agus Windiarto	*Managing Director of Finance & Operations [3)]*
Plt. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit [4)]	Agus Windiarto	Agus Windiarto	*Act. Managing Director of Risk & Credit Management [4)]*
Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan [5)]	Chesna F. Anwar	Chesna F. Anwar	*Managing Director of Institutional Relations [5)]*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)

1) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0010/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Dikdik Yustandi sebagai Direktur Pelaksana sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

2) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0004/KDD/04/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Maqin U. Norhadi sebagai Direktur Pelaksana dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

3) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0012/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Agus Windiarto sebagai Direktur Pelaksana sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

1. General (continued)

1.d. Board of Directors, Managing Directors, Audit Committee and Employees (continued)

1) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0010/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Dikdik Yustandi was assigned as Managing Director since September 1, 2019 for his term until August 31, 2024.

2) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0004/KDD/04/2021 dated April 12, 2021 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Maqin U. Norhadi was assigned as Managing Director for his term until August 31, 2024.

3) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0012/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Agus Windiarto was assigned as Managing Director since September 1, 2019 for his term until August 31, 2024.

1. Umum (lanjutan)

1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)

4) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0003/KDD/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Perangkapan Jabatan, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Direktur Pelaksana dan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0005/KDD/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Agus Windiarto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelaksana dan perangkapan jabatan Direktur Pelaksana bidang Manajemen Risiko & Kredit dengan masa jabatan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

5) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0014/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan Chesna Fizetty Anwar sebagai Direktur Pelaksana sejak 1 September 2019 dengan masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2024.

Peranan dan tanggung jawab pembidangan Manajemen LPEI berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif No.0055/KDE/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, berlaku tanggal 1 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

1.d. Board of Directors, Managing Directors, Audit Committee and Employees (continued)

4) Based on the Decree of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Eskpor Indonesia No. 0003/KDD/12/2022 dated December 13, 2022 concerning Concurrent Positions, Task Executor and Daily Executor of the Managing Director and Decree of the Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Eskpor Indonesia No. 0005/KDD/08/2023 dated March 6, 2023 concerning Extension of Task Executor of Managing Director Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, assigned Agus Windiarto as Acting Director (Plt) of Managing Director and concurrent positions as Managing Director of Credit & Risk Management with a term of office no later than December 31, 2023.

5) Based on Board of Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Letter No. 0014/KDD/08/2019 dated August 30, 2019 regarding Appointment of Managing Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Chesna Fizetty Anwar was assigned as Managing Director since September 1, 2019 for her term until August 31, 2024.

The roles and responsibilities of Management of LPEI based on the Board of Executive Directors Decision Letter No. 0055/KDE/10/2022 dated October 3, 2022 regarding Refinement of Organizational Structure of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, which came into force on October 1, 2022, are as follows:

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)

- Direktur Eksekutif membawahi Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan, Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis, Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan, Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit, Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional, *Head of* Kepatuhan, SDM, & Transformasi Lembaga, dan *Head of* Audit.
- Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan membawahi *Head of* Wilayah, Divisi BUMN, Divisi *Supplychain & Linkage*, Divisi Korporasi I, Divisi Korporasi II dan Pemegang Limit Individu.
- Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis membawahi, *Head of* Penjaminan & Asuransi, Divisi Syariah, Divisi *Trade Finance*, Divisi Program Investasi Pemerintah dan Divisi Penugasan Khusus.
- Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional membawahi *Head of* Operasional & TI, *Head of* Keuangan & Perencanaan Strategis, dan Divisi Pengadaan & Umum.
- Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit membawahi Divisi Analisa Risiko Kredit I, Divisi Analisa Risiko Kredit II, Divisi Kebijakan & Prosedur, Divisi Pengembangan Produk, Divisi Manajemen Risiko & Portfolio dan Pemegang Limit Individu.
- Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan membawahi Divisi Jasa Konsultasi, Divisi Institusi Finansial & Tresuri, Divisi Riset & Pengembangan, Divisi Komunikasi, Divisi Sekretariat Lembaga, Divisi Hukum, dan Fungsional Narasumber Lembaga.

1. General (continued)

1.d. Board of Directors, Managing Directors, Audit Committee and Employees (continued)

- *Executive Director is responsible for Managing Director of Financing, Managing Director of Business Development, Managing Director of Institutional Relations, Managing Director of Credit & Risk Management, Managing Director of Finance & Operations, Head of Compliance, SDM & Transformation Institution and Head of Audit.*
- *Director of Financing is responsible for Head of Region, State Owned Enterprise Division Supplychain & Linkage, Corporate I Division, Corporate II Division dan Individual Limit Holder.*
- *Director of Business Development is responsible for Head of Guarantee & Insurance, Sharia Division, Trade Finance Division, Government Investment Program Division, and Special Mandate Division.*
- *Director of Finance & Operations is responsible for Head of Operations & IT, Head of Finance & Strategic Planning, and Procurement and GA Division.*
- *Director of Credit & Risk Management is responsible for Credit Risk Analysis Division I, Credit Risk Analysis Division II, Policy & Procedures Division, Product Development Division, Risk & Portfolio Management Division and Individual Limit Holders.*
- *Director of Institutional Relations is responsible for Consultation Services Division, Financial & Treasury Institutions Division, Research & Development Division, Communications Division, Institutional Secretariat Division, Legal Division, and Institutional Resource Personnel Functions.*

1. Umum (lanjutan)

1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)

- *Head of* Penjaminan & Asuransi membawahi Divisi Penjaminan dan Divisi Asuransi.
- *Head of* Operasional & TI membawahi Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Operasional.
- *Head of* Keuangan & Perencanaan Strategis membawahi Divisi Keuangan, Divisi Strategi dan Perencanaan Lembaga, Divisi Manajemen Aset & Kewajiban, dan Fungsional Hubungan Investor & Internasional.
- *Head of* Kepatuhan, SDM & Transformasi Organisasi membawahi Divisi HRBP, Pengembangan Organisasi & Rekrutmen, Divisi *HR Service* & Pengembangan SDM, Divisi Transformasi & Budaya Lembaga, dan Divisi Kepatuhan.
- *Head of Audit* (Ketua SKAI) membawahi Divisi Reguler Audit dan Divisi Audit Khusus.
- *Head of* Wilayah membawahi Kantor Wilayah I, Kantor Wilayah II, Kantor Wilayah III, dan Fungsional *Special Mention.*

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur No. 0032/KDE/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 No. 0004/KDE/01/2022 tanggal 7 Januari 2022, susunan Komite Audit LPEI pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

1.d. Board of Directors, Managing Directors, Audit Committee and Employees (continued)

- *Head of Guarantee & Insurance is responsible for Guarantee Division and Insurance Division.*
- *Head of Operations & IT is responsible for Technology Information Division and Operations Division.*
- *Head of Finance & Strategic Planning is responsible for Finance Division, Strategic & Corporate Planning Division, Assets & Liabilities Management Division, and Investor & International Relationship Specialist.*
- *Head of Compliance, HR & TO is responsible for HRBP, OD & Recruitment Division, HR Services & People Development Division, Transformation Office & Culture Division, and Compliance Division.*
- *Head of Audit is responsible for Reguler Audit Divisio and Special Audit Division.*
- *Head of Region is responsible for Regional Office I, Regional Office II, Regional Office III, and Special Mention Specialist.*

Based on the Board of Directors' Decision Letter No. 0032/KDE/08/2023 dated August 25, 2023 and No. 0004/KDE/01/2022 dated January 7, 2022, the compositions of LPEI's Audit Committee as December 31, 2023 and 2022 are as follow:

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1.d. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)

1. General (continued)

1.d. Board of Directors, Managing Directors, Audit Committee and Employees (continued)

	31 Desember / *December 31,* 2023	2022	
Ketua	Arus Gunawan	Arus Gunawan	*Chairman*
Anggota	Yulida S. Marbun	Yulida S. Marbun	*Member*
Anggota	Peter Umar Abdilla A.	Peter Umar Abdilla A.	*Member*
Anggota	Yon Arsal	--	*Member*

Kepala Satuan Audit Internal LPEI pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah I Nyoman Gede Suarja.

LPEI's Head of Internal Audit as of December 31, 2023 and 2022 is I Nyoman Gede Suarja.

Berdasarkan Memorandum Prosedur No.MPO.0003/KDE/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan No.MPO.0035/CEO/07/2020 tanggal 1 Juli 2020, Sekretaris LPEI pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Chesna F. Anwar.

Based on the Memorandum of Procedure No.MPO.0003/KDE/01/2022 dated January 3, 2022 and No.MPO.0035/CEO/07/2020 dated July 1, 2020, LPEI's secretary as of December 31, 2023 and 2022 is Chesna F. Anwar.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Eksekutif No.0024.02/KDE/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 dan No.0044/KDE/07/2020 tanggal 27 Juli 2020, susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Based on the Executive Director Decision Letters No.0024.02/KDE/08/2023 dated August 1, 2023 and No.0044/KDE/07/2020 dated July 27, 2020, the composition of Sharia Supervisory Board as of December 31, 2023 and 2022 is as follows:

	31 Desember 2023 dan 2022 / *December 31, 2023 and 2022*	
Ketua	Kanny Hidaya	*Chairman*
Anggota	Yulizar D. Sanrego	*Member*

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui surat No. U-453/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.

The appointment of member of the Sharia Supervisory Board based on the recommendation of the National Sharia Board of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) by the letter No. U-453/DSN-MUI/XII/2012 dated December 12, 2012.

Jumlah pegawai tetap LPEI pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 521 dan 516 (tidak diaudit).

As of December 31, 2023 and 2022, LPEI had 521 dan 516 permanent employees, respectively (unaudited).

1. Umum (lanjutan)

1.e. Penawaran umum obligasi, penerbitan *Medium Term Notes* dan penawaran umum Sukuk Mudharabah

LPEI telah menerbitkan obligasi, *Medium Term Notes,* dan Sukuk Mudharabah sejak tahun 2003 sampai dengan 31 Desember 2023. Berikut adalah rincian obligasi, *Medium Term Notes* dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sampai 31 Desember 2023:

i. Obligasi

1. General (continued)

1.e. Public offerings of the bonds, issuance of Medium Term Notes and public offerings of the Sukuk Mudharabah

LPEI issued bonds, Medium Term Notes, and Sukuk Mudharabah from 2003 until December 31, 2023. Below are the details of bonds issued, Medium Term Notes and Sukuk Mudharabah which have not yet matured until December 31, 2023:

i. Bonds

Nama Obligasi	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Name of Bonds*
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap IV - 2017 Seri D	1,007,000	23 Februari/ *February 2024*	Tetap/*Fixed* - 9.20%	*IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds III - 2017 Series D*
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap IV - 2017 Seri E	1,266,000	23 Februari/ *February 2027*	Tetap/*Fixed* - 9.40%	*IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds III - 2017 Series E*
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap V - 2017 Seri C	1,706,000	15 Agustus/ *August 2024*	Tetap/*Fixed* - 8.25%	*IEB Phase V Shelf Registration Offering Bonds III - 2017 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB III Tahap VI - 2018 Seri C	206,000	14 Februari/ *February 2025*	Tetap/*Fixed* - 6.90%	*IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds III - 2018 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap I - 2018 Seri C	1,756,000	6 Juni/ *June 2025*	Tetap/*Fixed* - 8.30%	*IEB Phase I Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap II - 2018 Seri D	1,324,000	5 September / *September 2025*	Tetap/*Fixed* - 8.75%	*IEB Phase II Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series D*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap III - 2018 Seri D	380,000	8 November/ *November 2025*	Tetap/*Fixed* - 9.75%	*IEB Phase III Shelf Registration Offering Bonds IV - 2018 Series D*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri C	1,473,000	23 April/ *April 2024*	Tetap/*Fixed* - 8.90%	*IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri D	278,000	23 April/ *April 2026*	Tetap/*Fixed* - 9.25%	*IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series D*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri E	349,000	23 April/ *April 2029*	Tetap/*Fixed* - 9.50%	*IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series E*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap IV - 2019 Seri F	625,000	23 April/ *April 2034*	Tetap/*Fixed* - 9.80%	*IEB Phase IV Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series F*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap V - 2019 Seri C	315,000	9 Juli/ *July 2024*	Tetap/*Fixed* - 8.70%	*IEB Phase V Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1. *General (continued)*

1.e. Penawaran umum obligasi, penerbitan *Medium Term Notes* dan penawaran umum Sukuk Mudharabah (lanjutan)

1.e. *Public offerings of the bonds, issuance of Medium Term Notes and public offerings of the Sukuk Mudharabah (continued)*

i. Obligasi (lanjutan)

i. *Bonds (continued)*

Nama Obligasi	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Name of Bonds*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap V - 2019 Seri D	737,000	9 Juli/ *July 2026*	Tetap/*Fixed* - 9.20%	*IEB Phase V Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series D*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VI - 2019 Seri C	6,000	3 September/ *September 2024*	Tetap/*Fixed* - 8.10%	*IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VI - 2019 Seri D	714,500	3 September/ *September 2026*	Tetap/*Fixed* - 8.50%	*IEB Phase VI Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series D*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VII - 2019 Seri C	25,500	29 Oktober/ *October 2024*	Tetap/*Fixed* - 8.10%	*IEB Phase VII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VII - 2019 Seri D	112,000	29 Oktober/ *October 2026*	Tetap/*Fixed* - 8.50%	*IEB Phase VII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series D*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VII - 2019 Seri E	219,750	29 Oktober/ *October 2029*	Tetap/*Fixed* - 8.75%	*IEB Phase VII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series E*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VIII - 2019 Seri B	1,551,000	6 Desember/ *December 2024*	Tetap/*Fixed* - 7.90%	*IEB Phase VIII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series B*
Obligasi berkelanjutan IEB IV Tahap VIII - 2019 Seri C	22,500	6 Desember/ *December 2026*	Tetap/*Fixed* - 8.20%	*IEB Phase VIII Shelf Registration Offering Bonds IV - 2019 Series C*
Total ekuivalen Rp	**14,073,250**			***Total equivalent in Rp***

ii. *Medium term notes*

ii. *Medium term notes*

Nama *Medium Term Notes*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Name of Medium Term Notes*
Euro *Medium Term Note* (EMTN) Programme IEB - 2017 (USD500,000,000)	7,698,500	6 April/ *April 2024*	Tetap/*Fixed* 3.875%	*Euro Medium Term Note (EMTN) Programme - 2017 (USD500,000,000)*
Total ekuivalen Rp	**7,698,500**			***Total equivalent Rp***

iii. Sukuk mudharabah

iii. *Sukuk mudharabah*

Nama Sukuk Mudharabah	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Name of Sukuk Mudharabah*
Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018 Seri D	155,000	8 November/ *November 2025*	9.75%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series D*
Sukuk Mudharabah Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019 Seri C	66,000	23 April/ *April 2024*	8.90%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series C*
Total ekuivalen Rp	**221,000**			***Total equivalent Rp***

1. Umum (lanjutan)

1.e. Penawaran umum obligasi, penerbitan *Medium Term Notes* dan penawaran umum Sukuk Mudharabah (lanjutan)

iii. Sukuk mudharabah (lanjutan)

Seluruh penerbitan obligasi, penerbitan *Medium Term Notes* dan penerbitan Sukuk Mudharabah tersebut telah terdaftar berdasarkan surat terlampir:

i. Obligasi

1. General (continued)

1.e. Public offerings of the bonds, issuance of Medium Term Notes and public offerings of the Sukuk Mudharabah (continued)

iii. Sukuk mudharabah (continued)

All the offerings of the above bonds, issuance of the Medium Term Notes and the offering of the Sukuk Mudharabah have been registered based on letters as follows:

i. Bonds

Nama Obligasi/ ***Name of Bonds***	**Nomor surat/** ***Letter number***	**Tanggal/** ***Date***	**Tempat terdaftar/** ***Register***
Obligasi berkelanjutan IEB III, Tahap IV - 2017/ *IEB Phase IV Shelf - Registration Offering Bonds III - 2017*	S-01060/BEI.PP3/02-2017	24 Februari 2017/ *February 2017*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*
Obligasi berkelanjutan IEB III, Tahap V - 2017/ *IEB Phase V Shelf - Registration Offering Bonds III - 2017*	S-04415/BEI.PP3/08-2017	16 Agustus 2017/ *August 2017*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*
Obligasi berkelanjutan IEB III, *Tahap VI - 2018/ IEB Phase VI Shelf - Registration Offering Bonds III - 2018*	S-00929/BEI.PP3/02-2018	*15 Februari 2018/ February 2018*	*Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange*
Obligasi berkelanjutan IEB IV, *Tahap I - 2018/ IEB Phase I Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2018*	S-03393/BEI.PP3/06-2018	*7 Juni 2018/ June 2018*	*Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange*
Obligasi berkelanjutan IEB IV, *Tahap II - 2018/ IEB Phase II Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2018*	S-05154/BEI.PP3/09-2018	*6 September 2018/ September 2018*	*Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange*
Obligasi berkelanjutan IEB IV, *Tahap III - 2018/ IEB Phase III Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2018*	S-06570/BEI.PP3/11-2018	*9 November 2018/ November 2018*	*Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange*
Obligasi berkelanjutan IEB IV, *Tahap IV - 2019/ IEB Phase IV Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2019*	S-21441/BEI.PP3/04-2019	*24 April 2019/ April 2019*	*Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange*
Obligasi berkelanjutan IEB IV, *Tahap V - 2019/ IEB Phase V Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2019*	S-03751/BEI.PP3/07-2019	*10 Juli 2019/ July 2019*	*Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange*
Obligasi berkelanjutan IEB IV, *Tahap VI - 2019/ IEB Phase VI Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2019*	S-05189/BEI.PP3/09-2019	*4 September 2019/ September 2019*	*Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1.e. Penawaran umum obligasi, penerbitan *Medium Term Notes* dan penawaran umum Sukuk Mudharabah (lanjutan)

i. Obligasi (lanjutan)

Nama Obligasi/ *Name of Bonds*	Nomor surat/ *Letter number*	Tanggal/ *Date*	Tempat terdaftar/ *Register*
Obligasi berkelanjutan IEB IV, Tahap VII - 2019/ *IEB Phase VII Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2019*	S-06891/BEI.PP3/10-2019	30 Oktober 2019/ *October 2019*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*
Obligasi berkelanjutan IEB IV, Tahap VIII - 2019/ *IEB Phase VIII Shelf - Registration Offering Bonds IV - 2019*	S-07906/BEI.PP3/12-2019	9 Desember 2019/ *December 2019*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*

ii. *Medium term notes*

Nama Obligasi/ *Name of Bonds*	Nomor surat/ *Letter No.*	Tanggal/ *Date*	Tempat terdaftar/ *Register*
EMTN Program IEB - 2017/ *IEB EMTN Programme - 2017*	Ref:RMR/IR/THJ/ 2012040022	7 April 2017/ *April 2017*	Singapore Exchange Securities Trading

iii. Sukuk mudharabah

Nama Sukuk Mudharabah/ *Name of Sukuk Mudharabah*	Nomor surat/ *Letter number*	Tanggal/ *Date*	Tempat terdaftar/ *Register*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018/ *Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018*	S-06570/BEI.PP3/11-2018	9 November 2018/ *November 2018*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019/ *Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019*	S-21441/BEI.PP3/04-2019	24 April 2019/ *April 2019*	Bursa Efek Indonesia/ *Indonesia Stock Exchange*

1. General (continued)

1.e. Public offerings of the bonds, issuance of Medium Term Notes and public offerings of the Sukuk Mudharabah (continued)

i. Bonds (continued)

ii. Medium term notes

iii. Sukuk mudharabah

1.f. Entitas Anak

LPEI mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak berikut:

Nama Perusahaan/ *Company Name*	Kegiatan Usaha/ *Business Activity*	Tahun Mulai Beroperasi/ *Year Started Operations*	Persentasi Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* 31 Desember/ *December 31, 2023* dan/*and 2022*	Total Aset/ *Total Assets* 2023	2022
PT IEB Prima Aset	Jasa Konsultasi/ *Consulting Services*	2021	99.99%	31,232	41,343

1.f. Subsidiary

LPEI has direct ownership in the following Its subsidiary:

1. Umum (lanjutan)

1.f. Entitas Anak (lanjutan)

PT IEB Prima Aset (IEBPA)

IEBPA didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 154 tanggal 17 Desember 2021.

Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-1097/MK.06/2021 pada tanggal 6 Desember 2021, ruang lingkup IEBPA khususnya dalam rangka percepatan penanganan aset bermasalah dan perbaikan struktur neraca.

Pada bulan Desember 2021 LPEI memberikan setoran modal awal kepada IEBPA sebesar Rp49.999. Modal saham tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0081370.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021.

Kantor pusat IEBPA berlokasi di Prosperity Tower Lantai 33, District 8, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta – 12190.

Dasar Pembentukan PT IEB Prima Aset

Dalam rangka mengatasi tingginya angka aset bermasalah yang lebih komprehensif, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) telah mengkaji beberapa opsi yang tersedia. Berdasarkan kajian tersebut disimpulkan, pembentukan PT IEB Prima Aset, entitas anak, sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang mengelola aset bermasalah sebagai opsi yang paling efektif untuk mengatasi pembiayaan/piutang bermasalah LPEI. Kajian atas perlunya entitas anak dilakukan bersama dengan konsultan bisnis (Deloitte) dan konsultan hukum (Tumbuan and partner) termasuk memastikan bahwa pendirian entitas anak ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur LPEI.

1. General (continued)

1.f. Subsidiary (continued)

PT IEB Prima Aset (IEBPA)

IEBPA was established based on Notarial Deed No. 154 dated December 17, 2021.

In accordance with the Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-1097/MK.06/2021 dated December 6, 2021, the scope of IEBPA in particular in order to accelerate the handling of problematic assets and improvement of balance sheet structure.

In December 2021 LPEI provided an initial capital deposit to IEBPA of Rp49,999. The share capital has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0081370.AH.01.01.Year of 2021 dated on December 20, 2021.

IEBPA head office is located in Prosperity Tower 33rd Floor, District 8, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta – 12190.

Basis for Establishment of PT IEB Prima Aset

In order to more comprehensively address the high number of non-performing assets, the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) has reviewed several available options. Based on this study, it was concluded that the establishment of PT IEB Prima Aset, its subsidiary, as a Special Purpose Vehicle (SPV) which manages non-performing assets is the most effective option to overcome LPEI's non-performing financing/receivables. A study on the need for a its subsidiary is carried out together with a business consultant (Deloitte) and a legal consultant (Tumbuan and partners) including ensuring that the establishment of a its subsidiary does not conflict with the Law governing LPEI

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1.f. Entitas Anak (lanjutan)

Dasar Pembentukan PT IEB Prima Aset (lanjutan)

Landasan pembentukan entitas anak mengacu pada:

1. UU No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 14 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPEI berwenang: a. menetapkan skema Pembiayaan Ekspor Nasional; b. melakukan restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional; c. melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan d. melakukan penyertaan modal. (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat dilakukan pada badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas LPEI dengan persetujuan Menteri.

2. PP No. 43/2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional Pasal 16 ayat (2) Selain kegiatan menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat melaksanakan kegiatan berupa:
   a. menyediakan jasa konsultasi;
   b. melakukan restrukturisasi PEN;
   c. melakukan reasuransi;
   d. melakukan penyertaan modal; dan/atau
   e. melakukan kegiatan lain yang menunjang fungsi, tugas, dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 ayat (1) Penyertaan modal dilakukan dengan persetujuan Menteri, dan ayat (2) Penyertaan modal dapat dilakukan kepada badan hukum dalam negeri dan badan hukum luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. General (continued)

1.f. Subsidiary (continued)

Basis for Establishment of PT IEB Prima Asset (continued)

The establishment basis of a its subsidiary refers to:

1. Law No. 2 of 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Article 14 (1) In order to carry out the tasks as referred to in Article 13, LPEI is authorized to: a. establish a National Export Financing scheme; b. restructure the National Export Financing; c. carry out reinsurance of the implemented insurance as referred to in Article 8; and d. make equity participation. (2) Equity participation as referred to in paragraph (1) letter d may only be made to a legal entity or other entity required to carry out LPEI duties with the approval of Minister.

2. PP No. 43/2019 regarding Basic Policy of National Export Financing Article 16 paragraph (2) In addition to providing facilities as referred to in paragraph (1), LPEI may carry out activities in the form of:

a. provide consulting services;
b. carry out restructuring of PEN;
c. carry out reinsurance;
d. make equity participation; and/or
e. carry out other activities that support the functions, duties, and authorities of LPEI as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations. Article 25 paragraph (1) states that Equity participation is carried out with the approval of Minister, and paragraph (2) Equity participation may be made to domestic legal entities and foreign legal entities in accordance with the provisions of laws and regulations.

1. Umum (lanjutan)

1.f. Entitas Anak (lanjutan)

3. Selanjutnya, rencana pembentukan entitas anak ini telah dicantumkan pada RKAT LPEI tahun 2021 yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan No. S-121/MK.06/2021 pada tanggal 15 Februari 2021.

4. Dengan pertimbangan perlu segera dilakukan upaya penyelesaiaan kondisi NPL dan perbaikan kualitas aset, LPEI telah mendapat dukungan penuh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk pembentukan entitas anak seperti yang disampaikan melalui surat nomor: S-86/KN/2021 pada tanggal 17 Juni 2021. Pada surat tersebut juga dinyatakan bahwa mengacu pada amanat Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2009 tentang LPEI, dalam hal membentuk badan hukum dan melakukan penyertaan modal, maka agar mengajukan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

5. Menteri Keuangan melalui surat nomor: S-1097/MK/06/2021 pada tanggal 6 Desember 2021 menyetujui permohonan penyertaan modal oleh LPEI dalam rangka pembentukan entitas anak.

6. Entitas anak, yang selanjutnya disebut PT IEB Prima Aset berdiri pada tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT IEB Prima Aset disingkat PT IEBPA No. 154 tanggal 17 Desember 2021 dengan modal dasar Rp50.000 dengan jumlah saham beredar 50.000 lembar yang dimiliki oleh LPEI sebesar 49.999 lembar saham (99,99%) dan Koperasi Konsumen Pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar 1 lembar saham (0,01%). Pengesahan dari Menkumham tanggal 20 Desember 2021 dengan No. AHU-0081370.AH.01.01.Tahun 2021.

1. General (continued)

1.f. Subsidiary (continued)

3. Furthermore, the plan for the establishment of a its subsidiary has been included in the RKAT of LPEI 2021 which has received approval from Minister of Finance through the letter of Minister of Finance No. S-121/MK.06/2021 dated February 15, 2021.

4. Considering the need to immediately resolve the NPL condition and improve asset quality, LPEI has received full support from the Directorate General of State Assets (DJKN) for the establishment of a its subsidiary as submitted by the letter number: S-86/KN/2021 dated June 17, 2021. The letter also stated that referring to the mandate of Article 14 of Law No. 2 of 2009 concerning LPEI, in terms of establishing a legal entity and making equity participation, then to submit to Minister of Finance for approval and set forth in the Annual Work Plan and Budget.

5. Minister of Finance by the letter number: S-1097/MK/06/2021 dated December 6, 2021 approved the application for equity participation by LPEI in the context of establishing a its subsidiary.

6. The its subsidiary, hereinafter referred to as PT IEB Prima Aset was established on December 17, 2021 based on Deed of Establishment of the Limited Company PT IEB Prima Aset for the sake brevity as PT IEBPA No. 154 dated December 17, 2021 with the authorized capital of Rp50,000 with a total outstanding share of 50,000 The shares owned by LPEI is amounting to 49,999 shares (99.99%) and the Consumer Cooperative of Employees of the LPEI owns 1 share (0.01%). Ratification from Minister of Law and Human Rights was on December 20, 2021 with No. AHU-0081370.AH.01.01.Year 2021.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1.f. Entitas Anak (lanjutan)

7. Sesuai dengan Akta Pendirian PT IEBPA pada pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha, sebagaimana tercantum pada ayat 1 mengenai maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang konsultasi, termasuk konsultasi atas kegiatan yang berorientasi ekspor. Pada ayat 2 mengenai kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), meliputi: Bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan - masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
   b. Pemberian jasa hukum terkait aset; dan
   c. Kegiatan lain sesuai maksud dan tujuan LPEI.

1. General (continued)

1.f. Subsidiary (continued)

7. In accordance with the Deed of Etablishment of PT IEBPA Article 3 concerning Aim and Objective as well as Business Activities, as set forth in paragraph 1 the aim and objective of PT IEBPA is to engage in the field of consulting, including consulting on export-oriented activities. Paragraph 2 concerning the business activities include the following:
   a. Other Management Consulting Activities (KBLI 70209), including: Assistance with advice, guidance and business operations and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies; planning scheduling and controlling production. The provision of these business services may include advice, guidance and operational assistance for various management functions, management consulting for agronomists and agricultural economists in agriculture and the like, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget control procedures, providing advice and assistance to businesses and public services in planning, organizing, efficiency and control, management information and others. Including infrastructure investment study services;
   b. Provision of legal services related to assets; and
   c. Other activities according to the purposes and objectives of LPEI.

1. Umum (lanjutan)

1.f. Entitas Anak (lanjutan)

8. Sampai dengan 31 Desember 2023, PT IEBPA adalah sebagai konsultasi manajemen dan dalam kegiatannya tidak ada pengalihan aset dari LPEI ke PT IEBPA.

9. Pembentukan entitas anak sebagaimana diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

2.a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian LPEI tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang dijelaskan pada Catatan 2b di bawah ini.

2.b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasian LPEI dan Entitas Anaknya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan penyajian wajar bertujuan khusus sebagai berikut:

1. Untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang direstrukturisasi yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto sebesar tingkat suku bunga setelah direstrukturisasi.

   Per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, atas pembiayaan diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui surat Nomor S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan CKPN.

1. General (continued)

1.f. Subsidiary (continued)

8. Until December 31, 2023, PT IEBPA is a management consultancy and in its activities there is no transfer of assets from LPEI to PT IEBPA.

9. Establishment of a its subsidiary as above is in accordance with the applicable provisions.

2. Material Accounting Policies Information

2.a. Statement of compliances

LPEI's consolidated financial statements as of December 31, 2023 and for the year ended on that date have been prepared and presented in accordance with the basis for preparation of the financial statements as described in Note 2b below.

2.b. Basis of measurement and preparation of the financial statements

The consolidated financial statements of LPEI and its Subsidiary for the year ended December 31, 2023 and 2022 have been prepared and presented in accordance with fair presentation of special purpose financial reporting framework as follows:

1. For the Allowance for Impairment Losses (CKPN) on restructured National Interest Account financing which has received approval from Ministry of Finance is calculated using the assumed discount rate that is equal to the interest rate after the restructuring.

   As per December 31, 2023 and 2022, for financing that has been provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk is calculated using the assumption of the discount rate stipulated by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through letter No. S-194/MK.08/2023 concerning the Determination of the Use of Discount Rates Assumption Based on Interest Rates After Restructuring in the Calculation of CKPN.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

2. Untuk unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian lainnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"), dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terlampir dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 161/PMK.010/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI dan PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9/POJK.05/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengawasan LPEI.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 14/POJK.4/2022, LPEI sebagai emiten wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berkala berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Sebagaimana dijelaskan di atas, LPEI menyusun laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut hanya sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian seperti yang dijelaskan di atas.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.b. Basis of measurement and preparation of the financial statements (continued)

2. *The other elements of the consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement and Interpretation which published by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI"), and Regulations from the Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuers or Public Companies" included in the Appendix of the Decision of the Chairman of BAPEPAM - LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, Regulation of Financial Minister (PMK) No. 161/PMK.010/2010 regarding changes of No. 140/PMK.010/2009 regarding Development and Supervision of LPEI and PMK No. 58/PMK.06/2020 regarding Development and Supervision of LPEI, and Regulation of Financial Service Authority (POJK) No. 9/POJK.05/2022 dated June 23, 2022 regarding Supervision of LPEI.*

Based on the Financial Services Authority Regulation No 14/POJK.4/2022, LPEI as an Issuer obliged to prepare periodic financial statement in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard as regulated in Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Company". As described above, LPEI has prepared the consolidated financial statements as of December 31, 2023 and for the year then ended only in accordance with the basis for preparation of the consolidated financial statement as described above.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

Untuk unit syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip perbankan syariah, laporan keuangannya disajikan sesuai dengan PSAK 101 (Revisi 2022) "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102 (Revisi 2019) "Akuntansi Murabahah", PSAK 104 "Akuntansi Istishna", PSAK 105 "Akuntansi Mudharabah", PSAK 106 "Akuntansi Musyarakah", PSAK 107 (Revisi 2021) "Akuntansi Ijarah", PSAK 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk", PSAK 111 "Akuntansi Wa'd", dan Pedoman Akuntasi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank dan penempatan pada bank yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional. Angka-angka disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.b. Basis of measurement and preparation of the financial statements (continued)

The consolidated financial statements are prepared and presented based on business continuity assumptions and on an accrual basis, except for consolidated of cash flow statements. The basis for measurement in the preparation of these consolidated financial statements is the concept of historical value, unless accounting standards require fair value measurement.

For the sharia business unit which operates based on the shariah banking principles, the presentation of the financial statement is in accordance to PSAK 101 (Revised 2022) "Presentation of Sharia Financial Statements", PSAK 102 (Revised 2019) "Accounting for Murabahah", PSAK 104 "Accounting for Istishna'', PSAK 105 "Accounting for Mudharabah", PSAK 106 "Accounting for Musyarakah", PSAK 107 (Revised 2021) "Accounting for Ijarah", PSAK 110 (Revised 2020) "Sukuk Accounting", PSAK 111 "Wa'd Accounting", and Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI Revised 2013) established by Bank Indonesia and the Indonesian Institute of Accountants.

The consolidated statement of cash flows are prepared based on direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For purposes of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with banks and placements with banks maturing within 3 (three) months from the date of acquisition, provided they are not pledged as collateral for borrowings nor restricted.

The presentation currency used for the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah (Rp), which is LPEI's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the consolidated financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

LPEI menyajikan laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai tingkat likuiditas. Suatu analisis mengenai pemulihan (aset) atau penyelesaian (liabilitas) dalam dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan (lancar) dan lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan (tidak lancar) disajikan di dalam Catatan 42.

Termasuk di dalam laporan keuangan konsolidasian LPEI adalah penyajian aset, liabilitas, modal, laba dan rugi yang berasal dari Penugasan Khusus sesuai surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No. S-368/KN/2017 tanggal 16 Februari 2017.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.b. Basis of measurement and preparation of the financial statements (continued)

LPEI presents its consolidated statement of financial position based on liquidity level. An analysis regarding recovery (asset) or settlement (liability) within twelve (12) months after the reporting date (current) and more than twelve (12) months after the reporting date (non-current) is presented in Note 42.

Included in the consolidated financial statements of LPEI is the presentation of assets, liabilities, capital, profits and losses derived from Special Assignment accordance with the letter issued by the Directorate General of State No. S-368/KN/2017 dated February 16, 2017.

2.c. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan entitas yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh LPEI.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh LPEI, yakni terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana LPEI memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah LPEI mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian LPEI mencakup hasil usaha, arus kas, aset, dan liabilitas dari LPEI yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh LPEI. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana LPEI secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

2.c. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of entity whose majority shares are owned or controlled by the LPEI.

A its subsidiary is an entity controlled by the LPEI, is exposed, or has rights to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights that LPEI has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether LPEI controls another entity.

LPEI consolidated financial statements incorporate the results, cash flows, assets, and liabilities of LPEI which, directly and indirectly, is controlled by LPEI. Its subsidiary are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which LPEI effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.c. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup anak kehilangan pengendalian, maka Grup akan:
- Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.c. Consolidation principal (continued)

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All transactions, balances, income, expenses, and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.

Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a its subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the its subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If subsidiary Group loses control, so Group will:
- *Derecognise the assets (including goodwill) and liabilities of the its subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- *Derecognise the carrying amount of any non-controlling interests in the former its subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to non-controlling);*

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.c. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2.d. Standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Grup telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

- Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang material;
- Amandemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amandemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi dan penjelasannya;
- Amandemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang pajak tangguhan dari aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal;
- Amandemen PSAK 107: "Akuntansi Ijarah" tentang kebijakan penerapan untuk ijarah multijasa atas akad sewa.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.c. Consolidation principal (continued)

- *Recognise the fair value of the consideration received (if any) from the transaction, event, or circumstances that resulted in the loss of control;*
- *Recognise any investment retained in the former its subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- *Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other FAS, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the its subsidiary; and*

- *Recognise any resulting difference as a gain or loss in profit and loss attributable to the parent entity.*

2.d. Financial accounting standards effective in the current year

The Group have implemented accounting standards that are effective for financial statements beginning on or after January 1, 2023, relevant to consolidated financial statements, which are as follows:

- *Amendment of PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of Accounting Policy that revises the term "significant" to "material" and provide explanations regarding accounting policy considered material;*
- *Amendment of PSAK 16: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;*
- *Amendment of PSAK 25: "Accounting policies, changed in accounting estimated, and errors" regarding definition and explanation of accounting estimates;*
- *Amendment of PSAK 46: "Income Tax" regarding deffered tax related to assets and liabilities arising from a single transaction;*
- *Amendment of PSAK 107: "Ijarah Accounting" regarding implementation policies for ijarah on multiservice lease.*

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.d. Standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tahun berjalan (lanjutan)

Penerapan standar akuntansi baru ini tidak berdampak material terhadal laporan keuangan konsolidasian.

2.e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas anak lainnya);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.d. Financial accounting standards effective in the current year (continued)

Implementation of new accounting standards has no significant impact to the consolidated financial statements.

2.e. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under PSAK 7 regarding "Related Party Disclosures".

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   i. has control or joint control of the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiaries are related to the others);
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
viii. Entitas atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi, kecuali dengan personel manajemen kunci, dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan LPEI akan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional, maupun internasional.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 39.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.e. Transactions with related parties (continued)

v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity; or
viii. The entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transaction with related parties, except for key management personel is conducted under terms and conditions similar with third party transactions. The transactions to be conducted by LPEI will be in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.42/POJK.04/2020 about "Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions", when the transactions are conducted.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled, or significant influence by a government. Government refers to government agencies and similar bodies wheter local, national, or international.

All material transactions and balances with the related parties are disclosed in the relevant notes to consolidated financial statements and the details are presented in Note 39.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Grup menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan"

Aset keuangan Grup terdiri dari giro pada Bank Indonesia, giro pada bank, penempatan pada bank, efek-efek, tagihan derivatif, pembiayaan dan piutang syariah, piutang pembiayaan garansi, piutang asuransi dan penjaminan, tagihan akseptasi, dan aset lain-lain (bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan).

Liabilitas keuangan LPEI terdiri dari liabilitas segera, liabilitas akseptasi, efek-efek utang yang diterbitkan, liabilitas terkait dengan transaksi liabilitas derivatif, pinjaman yang diterima, utang asuransi, utang penjaminan, liabilitas sewa guna usaha, dan liabilitas lain-lain (bunga yang masih harus dibayar, tantiem, dan jasa produksi, kewajiban kepada penjamin ulang).

Pengujian SPPI
Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Grup menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah instrumen keuangan memenuhi pengujian SPPI (*Solely Payment of Principal and Interest)*.

Pokok pinjaman untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian pembiayaan biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Grup menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan, dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities

Group adopted PSAK 71, "Financial Instruments"

Group financial assets consist of current accounts with Bank Indonesia, current accounts with banks, placements with banks, securities, derivative receivables, financing and sharia receivables, guarantee financing receivables, insurance and guarantee receivables, acceptances receivable, and other assets (accrued interest receivables and refundable deposits).

LPEI's financial liabilities consist of current liabilities, acceptances payable, securities issued, derivative payables, debt, fund borrowings, insurance payables, guarantee payables, liability related to reverse repos, lease liabilities, and other liabilities (accrued interest payable, tantiem and accrued bonus, liabilities to reguarantor).

SPPI Test
As a first step of its classification process, Group assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test (*Solely Payment of Principal and Interest).*

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortisation of the premium/discount).

The most significant elements of interest within a lending arrangement are typically the consideration for the time value of money and financing risk. To make the SPPI assessment, Group applies judgement and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada FVPL.

Penilaian model bisnis
Grup menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Grup mengelola kelompok aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Grup tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumen nya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Grup.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(i) Classification

In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are SPPI on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured at FVPL.

Business model assessment
Group determines its business model at the level that best reflects how it manages Group of financial assets to achieve its business objective.

Group business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;*
- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular how the way those risks are managed;*
- *How managers of the business are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected);*
- *The expected frequency, value, and timing of sales, are also important aspects of Group assessment.*

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario *"worst case"* atau *"stress case"*. Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Grup tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Grup mengukur aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual.
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (SPPI).

b. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Grup mengukur aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Business model assessment (continued)

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realized in a way that is different from original expectations, Group does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.

Group classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:

a. Financial assets measured at amortized cost

Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:
- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows.*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

b. Financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI)

Group measures financial assets at FVOCI when both of the following conditions are met:

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

- Aset keuangan yang dikelola untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

c. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
Grup menerapkan kategori aset keuangan berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi jika tidak memenuhi kriteria sebagai biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari dua sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Grup untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki Grup untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

- *Financial assets are managed to collect the contractual cash flows and sell the assets; and*
- *The contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI).*

c. Financial assets measured at fair value through profit or loss.
Group applies the category of financial assets based on fair value through profit or loss if it does not meet the criteria as amortized cost or fair value through other comprehensive income.

Financial liabilities are classified into the following categories:

a. Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss consist of two sub-categories, financial liabilities classified as held for trading and financial liabilities designated by Group as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term, or if it is part of portfolio of identified financial instrument that are managed together pattern of short term profit taking.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

b. Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

b. Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities at amortized cost are financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon the recognition liability.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71 / *Category as defined by PSAK 71*		**Golongan (ditentukan oleh LPEI)/ *Class (as determined by LPEI)***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial assets at fair value through profit or loss*	Tagihan derivatif/*derivative receivables*
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial assets at amortised cost*	Giro pada Bank Indonesia/*Current accounts with Bank Indonesia*
		Giro pada bank-bank lain/*Current accounts with other banks*
		Penempatan pada bank Indonesia dan bank-bank lain/*Placements with Bank Indonesia and other banks*
		Tagihan akseptasi/*Acceptances receivables*
		Pembiayaan, piutang pembiayaan garansi, tagihan akseptasi/*Financing receivables, guarantee financing receivables, acceptances receivable*
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Financial assets at fair value through other comprehensive income*	Efek-efek/*Marketable securities*
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial liabilities at fair value through profit or loss*	Liabilitas derivatif/*Derivative payables*
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortised cost*	Liabilitas segera/*Obligation due immediately*
		Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali/*Securities sold under agreements to repurchase*
		Liabilitas akseptasi/*Acceptable payables*
		Efek-efek yang ditebitkan/*Marketable securities issued*
		Pinjaman yang diterima, utang asuransi, utang penjaminan, liabilitas sewa guna usaha/*Fund Borrowings, insurance payables, guarantee payables, lease liabilities*
		Liabilitas lain-lain/*Other liabilities*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode untuk menghitung biaya diamortisasi instrumen utang dan alokasi pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif yang mendiskonto penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya pada poin-poin yang dibayar atau diterima yang membentuk bagian integral dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) sepanjang umur ekonomis yang diharapkan dari instrumen utang, atau (jika lebih tepat) periode yang lebih singkat, dengan jumlah tercatat neto pada pengakuan awal.

(iii) Pengakuan awal

Grup pada awalnya mengakui kredit yang diberikan serta simpanan diukur pada nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (*regular*) diakui pada tanggal perdagangan dimana Grup memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Grup menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurang (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(ii) Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate exactly that discounts estimated future cash receipts (including all fees on points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the debt instrument, or (where appropriate) a shorter period, to the net carrying amount on the initial recognition.

(iii) Initial recognition

Group initially recognizes loans and deposits at fair value on the date of origination.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date at which Group commits to purchase or sell the asset.

All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trade date at which the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

At the first confession, a financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/minus (for financial instruments not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial asset or issue of financial liability.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iii) Pengakuan awal (lanjutan)

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

(iv) Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada (i) Biaya perolehan diamortisasi; (ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; atau (iii) Nilai wajar melalui laba rugi.

- Aset Keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menjumlahkan aset keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(iii) Initial recognition (continued)

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the financial instrument had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially.

Such transactions costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expenses for transaction costs related to financial liabilities.

(iv) Subsequent measurement

After initial recognition, the Group measures financial assets, according to the classification of financial assets at (i) Amortized cost; (ii) Fair value through other comprehensive income; or (iii) Fair value through profit or loss.

- *Financial Assets at amortized cost Financial assets at amortized cost are measured by adding up the financial assets measured at initial recognition minus principal payments, added or reduced by cumulative amortization using the effective interest method calculated from the difference between the initial value and the maturity value and adjusted for the allowance for losses.*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:

a) aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Grup menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sejak pengakuan awal.

b) aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Grup menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.

Grup dalam suatu periode pelaporan menghitung pendapatan bunga dengan menerapkan metode bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan, pada periode pelaporan selanjutnya, menghitung pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit dan perbaikan tersebut secara objektif dapat dikaitkan dengan suatu peristiwa yang terjadi setelah persyaratan yang tercantum dalam poin (b) paragraf di atas diterapkan (misalnya perbaikan peringkat kredit peminjam).

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(iv) Subsequent measurement (continued)

Interest income is calculated using the effective interest method by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of financial assets, except for:

a) financial assets purchased or originating from financial assets deteriorate. For these financial assets, Group applies an effective interest rate adjusted by credit for the amortized cost of the financial assets from initial recognition.

b) financial assets that are not purchased or that originate from financial assets deteriorate but subsequently become financial assets deteriorate. For these financial assets, Group applies an effective interest rate on the amortized cost of the financial assets in the next reporting period.

Group in a reporting period calculates interest income by applying the effective interest method on the acquisition cost of amortized financial assets, in the next reporting period, calculating interest income by applying an effective interest rate on the gross carrying amount if the credit risk of the financial instrument improves so that the financial assets no longer experience impairment of credit value and improvement can be objectively related to an event that occurs after the requirements listed in point (b) of the above paragraph are applied (for example an improvement in the borrower's credit rating).

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

- Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

  Keuntungan atau kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui dalam penghasilan komprehensif lain sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, kecuali:
  a. bunga yang dihitung menggunakan metode bunga efektif diakui dalam laba rugi, jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yang akan diakui dalam laba rugi jika aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
  b. keuntungan atau kerugian penurunan nilai; atau
  c. keuntungan atau kerugian selisih kurs.

  Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

  Khusus untuk aset keuangan berbentuk instrumen ekuitas, jumlah yang disajikan pada penghasilan komprehensif lainnya tidak selanjutnya dialihkan ke laba rugi. Akan tetapi, Grup dapat mengalihkan keuntungan atau kerugian kumulatif pada ekuitas.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
  Aset dinilai pada nilai wajar. Seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul akibat perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi, kecuali instrumen lindung nilai yang ditetapkan kedalam hubungan lindung nilai tertentu.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(iv) Subsequent measurement (continued)

- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

Gains or losses of financial assets measured at fair value through other comprehensive income are recognized in other comprehensive income until the financial assets are derecognized or reclassified, except:

a. interest calculated using the effective interest method is recognized in profit or loss, the amount recognized in profit or loss is equal to the amount to be recognized in profit or loss if the financial asset is measured at amortized cost;
b. impairment gains or losses; or
c. foreign exchange gains or losses.

When a financial asset is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Specifically for financial assets in the form of equity instruments, the amounts presented in other comprehensive income are not subsequently transferred to profit or loss. However, Group can transfer cumulative gains or losses on equity.

- Financial assets measured at fair value through profit or loss
Assets are valued at fair value. All gains and losses arising from changes in fair value are recognized in profit or loss, except for hedging instruments that are designated in certain hedging relationships.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

Grup menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan dalam bentuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Kebijakan akuntansi terkait pencadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dapat mengacu pada Catatan 2p.

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur liabilitas keuangan, yang diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut; (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan; (ii) Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

(v) Penghentian Pengakuan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau Grup mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Grup secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Grup diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(iv) Subsequent measurement (continued)

Group applies an impairment requirement for financial assets measured at amortized cost and financial assets in the form of debt instruments that are measured at fair value through other comprehensive income.

The accounting policy related to the allowance for impairment losses for financial asset can be seen on Note 2p.

After initial recognition, Group measures financial liabilities, are classified into the following categories at; (i) Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as financial liabilities such upon initial recognition and those classified as held for trading and; (ii) Other financial liabilities. Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

(v) Derecognition

Group derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any rights or liabilities in transferred financial assets that is created or retained by the Group is recognized as a separate asset or liability.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Dalam transaksi dimana Grup secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Grup menghentikan pengakuan aset tersebut jika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Grup tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Grup dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

a. Penghentian pengakuan atas modifikasi substansial atas syarat dan ketentuan
Jika modifikasi atas aset keuangan tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, maka Grup akan mencatat aset keuangan tersebut sebagai aset keuangan modifikasian pada tanggal modifikasi. Selisih jumlah tercatat bruto aset keuangan awal dengan nilai wajar aset modifikasian diakui di laba rugi. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas modifikasi tersebut.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(v) Derecognition (continued)

In transactions in which the Group neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Group derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Group continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

a. Derecognition due to substantial modification of terms and condition

If the modification of the financial asset does not result in the termination of recognition of the financial asset, Group will record the financial asset as the modified financial asset at the date of modification. The difference between the gross carrying amount of the initial financial assets and the fair value of the modified assets is recognized in profit or loss. The income or transaction costs incurred in connection with the modification event are recognized as part of the gain or loss on the modification.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Penghentian Pengakuan (lanjutan)

b. Penghentian pengakuan selain modifikasi substansial
Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dan antara (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Grup menghapusbukukan aset keuangan dan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Grup menentukan bahwa kemungkinan tertagihnya aset keuangan tersebut relatif kecil. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti kemungkinan tertagihnya piutang dari debitur, telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur. Jumlah hari lewat jatuh tempo yang digunakan untuk memicu penghapusan pembiayaan tanpa jaminan dalam portofolio ritel ditentukan berdasarkan pengalaman akun masa lalu yang menunjukkan ketika suatu akun mencapai jumlah hari lewat jatuh tempo tertentu, maka probabilitas pengembalian dari akun tersebut mendekati nol.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(v) Derecognition (continued)

b. Derecognition other than for substantial modification
Financial assets are derecognized if:

- *the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*
- *Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the cash flows in full without material delay to third parties under a 'pass-through' arrangement; and either (a) Group has transferred substantially all the risks and rewards of the assets, or (b) Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred the control of the asset.*

Group writes off a financial asset and any related impairment losses, when Group determines that the collectibility of financial assets is relatively remote. This decision is reached after considering information such as recoverability of the amount due from borrowers, the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset issuer such that the borrower/issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure. The days past due used to trigger write off of unsecured financing in retail portfolio are broadly driven by past experiences which shows that once an account reaches the certain number of days past due, the probability of recovery is almost zero.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Penghentian pengakuan (lanjutan)

Pembiayaan dan piutang atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pembiayaan dan piutang atau hubungan normal antara Grup dan debitur telah berakhir. Ketika pembiayaan dan piutang tidak dapat dilunasi, maka akan dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

Penerimaan kemudian atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada tahun berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass-through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Grup yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Melanjutkan keterlibatan yang diambil dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer adalah diukur dari nilai minimum tercatat awal dari aset dan jumlah maksimum pertimbangan bahwa Grup diminta untuk membayar kembali.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(v) Derecognition (continued)

Financing and receivables or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between Group and the borrowers has ceased to exist. When financing and receivables are deemed uncollectible, they are written off against the related allowance for impairment losses.

Subsequent recoveries from financing previously written off are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position dates.

When Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of Group continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that has taken the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that Group could be required to repay.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Penghentian pengakuan (lanjutan)

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru. Perbedaan antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dan imbalan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi.

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan dalam nilai wajar tidak diakui untuk aset yang dicatat berdasarkan perolehan diamortisasi;

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan dalam nilai wajar diakui dalam laba rugi untuk aset yang diklasifikasikan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

c. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain untuk aset yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas dan penghasilan komprehensif lain harus diakui pada laba rugi.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(v) Derecognition (continued)

Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged, cancelled, or has expired. Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference between the carrying value of the original financial liability and the consideration paid is recognized in profit or loss.

(vi) Income and expense recoginition

a. Gains and losses arising from changes in fair value are not recognized for assets recorded at amortized cost;

b. Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in the of profit and loss for assets classified in the group of financial assets measured at fair value through profit or loss;

c. Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in other comprehensive income for assets classified as fair value through other comprehensive income.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity and other comprehensive income are must recognized in the statement of profit or loss.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vii) Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki dilakukan jika adanya perubahan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Grup seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

Grup akan mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terkena dampak dari perubahan model bisnis. Perubahan tujuan model bisnis Grup harus berdampak sebelum tanggal reklasifikasi.

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah:
a. Perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar).
b. Hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan.
c. Pengalihan aset keuangan antara bagian dari Grup dengan model bisnis berbeda.

(viii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan di laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus jumlah keduanya dan terdapat intensi untuk diselesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(vii) Reclassification of financial assets

Reclassification of owned financial assets is made if there is a change in the business model for managing financial assets and is not allowed to reclassify financial liabilities.

Changes in the business model must have a significant impact on the Group operational activities, such as acquiring, releasing, or ending a line of business. In addition, it is necessary to prove these changes to external parties.

The Group will reclassify all financial assets affected by changes in business models. Changes in the objectives of the Group business model should take effect before the reclassification date.

What is not a change in the business model are:
a. Change in intention relating to a particular financial asset (even in situations of significant changes in market conditions).
b. The temporary loss of certain markets for financial assets.
c. Transfers of financial assets between parts of the Group with different business models.

(viii) Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, there is currently an enforceable legal rights to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(viii) Saling hapus (lanjutan)

Hak yang berkekuatan hukum berarti:
a. Tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang; dan
b. Hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini:
   i. kegiatan bisnis normal;
   ii. kondisi kegagalan usaha; dan
   iii. kondisi gagal bayar atau bangkrut.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(ix) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai.

(x) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai pasar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association* (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) dari Bloomberg dan Reuters pada tanggal pengukuran.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(viii) Offsetting (continued)

This means that the right to set off:
a. Must not be contingent on a future event; and
b. Must be legally enforceable in all of the following circumstances:
   i. the normal course of business;
   ii. the event of default; and
   iii. the event of insolvency or bankruptcy.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

(ix) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount and minus any reduction for impairment.

(x) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) or quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg and Reuters on the measurement date.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Selain itu, untuk tujuan pelaporan keuangan, pengukuran nilai wajar dikategorikan ke Level 1, 2 atau 3 berdasarkan tingkat *input* untuk pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi dan signifikansi *input* pada pengukuran nilai wajar secara keseluruhan, yang digambarkan sebagai berikut:

- Tingkat 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;
- Tingkat 2 adalah *input*, selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Tingkat 3 adalah *input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Grup menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Grup menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread,* Grup mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, Grup mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(x) Fair value measurement (continued)

In addition, for financial reporting purposes, fair value measurements are categorized into Level 1, 2 or 3 based on the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety, which are described as follows:

- *Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;*
- *Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, which are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and*
- *Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.*

If a market for a financial instrument is not active, Group establishes fair value using a valuation technique. Valuation techniques include using the recent arm's length transactions between knowledgeable and willing parties (if available), reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same and discounted cash flow analysis. Group uses its own credit risk spreads in determining the fair value for its derivative liabilities and all other liabilities for which it has elected the fair value option.

When Group credit spread widens, Group recognizes a gain on these liabilities because the value of the liabilities has decreased. When Group credit spread becomes narrow, Group recognizes a loss on these liabilities because the value of the liabilities has increased.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Grup menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. *Input* yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Grup menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over-the-counter, unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif. Beberapa input dari model ini tidak berasal dari data yang dapat diobservasi di pasar dan dengan demikian merupakan hasil estimasi berdasarkan asumsi tertentu.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Grup. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti model risk, risiko likuiditas dan risiko pembiayaan *counterparties*.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(x) Fair value measurement (continued)

Group uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

For more complex instruments, Group uses internally developed model which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over-the-counter market, unlisted debt securities (including those with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were or have become liquid. Some of the inputs to these models may not be market observable and are therefore estimated based on assumptions.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

The output of a valuation technique is an estimate or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that Group holds. Therefore, valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risks, liquidity risk and counterparties credit risk.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Data harga dan parameter yang digunakan di dalam prosedur pengukuran pada umumnya telah di-*review* dan disesuaikan, jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada Grup dan debitur ditentukan menggunakan nilai kini berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas pembiayaan dan piutang, likuiditas, dan biaya.

Aset keuangan, *long position*, liabilitas keuangan, dan *short position* diukur dengan harga penutupan. Dimana Grup memiliki posisi aset dan liabilitas yang risiko pasarnya saling hapus, maka dapat digunakan nilai tengah dari nilai pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka atau neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

(xi) Perbedaan hari pertama

Pada saat nilai transaksi berbeda dengan nilai wajar dari transaksi pasar lainnya yang dapat diobservasi saat ini atas instrumen yang sama atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan variabel data dari pasar yang dapat diobservasi.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(x) Fair value measurement (continued)

Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted, if necessary, particularly in view of the current market developments.

In cases when the fair value of unlisted equity instruments cannot be determined reliably, the instruments are carried at cost less impairment value. The fair values of financing and receivables as well as liability to Group and debtors are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, by cosidering quality of financing and receivables, liquidity, and costs.

Financial assets, long positions, financial liabilities, and short positions are measured at closing price. Where Group has assets and liabilities positions with off setting market risk, middle market prices are used to measure the off-setting risk positions and a bid or ask price adjustment is applied to the net open positions as appropriate.

(xi) Day 1 (one) difference

When the transaction price differs from the fair value of other observable current market transactions in the same instrument or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.f. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(xii) Perbedaan hari pertama (lanjutan)

Grup secara langsung mengakui perbedaan antara nilai transaksi dan nilai wajar ("1 hari" keuntungan atau kerugian) pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika nilai wajar ditentukan berdasarkan data yang tidak dapat diobservasi, maka perbedaan antara nilai transaksi dan nilai model hanya dapat diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat data menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut tidak diakui lagi.

2.g. Giro pada Bank Indonesia dan bank

Giro pada Bank Indonesia dan bank diklasifikasikan masing-masing sebagai biaya perolehan diamortisasi. Giro pada Bank Indonesia dan bank dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2.h. Penempatan pada bank

Penempatan pada bank adalah penanaman dana pada bank berupa penempatan pada pasar uang (*interbank call money*) dan deposito berjangka.

Penempatan pada bank diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Penempatan pada bank dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2.i. Efek-efek

Efek-efek terdiri atas efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, berupa Obligasi Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan obligasi korporasi.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.f. Financial assets and financial liabilities (continued)

(xii) Day 1 (one) difference (continued)

Group immediately recognizes the difference between the transaction price and fair value (a 'Day 1' profit or loss) in the statement of profit or loss and Other comprehensive income. In cases where fair value is determined using data which is not observable, the difference between the transaction price and model value is only recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the inputs become observable or when the instrument is derecognized.

2.g. Current accounts with Bank Indonesia and banks

Current accounts with Bank Indonesia and banks are classified as amortized cost. The current accounts with Bank Indonesia and banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

2.h. Placements with banks

Placements with banks represent funds in banks in the form of interbank call money and time deposits.

Placements with banks are classified as amortized cost. The placements with banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

2.i. Securities

Securities consist of securities traded on the stock exchanges and in the money market, in the form of bonds of the Republic of Indonesia, Certificates of Bank Indonesia (SBI), and corporate bonds.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.i. Efek-efek (lanjutan)

Efek-efek pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

Setelah pengakuan awal, efek-efek diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Penilaian efek-efek didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:
1. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain.
2. Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs diakui pada laba rugi.

2.j. Sukuk

Surat berharga syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

LPEI menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:
1) Sukuk diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi), yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo menggunakan metode garis lurus.
2) Sukuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yang bersangkutan.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.i. Securities (continued)

Securities are initially measured at fair value.

After the initial recognition, the securities are classified as fair value through other comprehensive income.

The valuation of securities is stated based on the classification as follows:
1. *Gains and losses from changes in fair value are recognized directly in the statement of profit or loss other comprehensive income.*
2. *Interest income is recognized in profit or loss using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses are recognized in profit or loss.*

2.j. Sukuk

Sharia securities is a proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in sharia money market and/or sharia capital market, such as sharia bonds (sukuk) and other securities based on syariah principles.

LPEI defined the classification of investment in marketable securities, especially sukuk, based on business model in accordance with PSAK 110 (Revised 2020) on "Accounting for Sukuk" as follows:

1) Sukuk measured at cost are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity using straight line method.

2) Sukuk measured at fair value through profit and loss are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.j. Sukuk (lanjutan)

3) Sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo menggunakan metode garis lurus.

2.k. Instrumen keuangan derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, LPEI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing dan *swap* mata uang asing untuk mengelola eksposur pada risiko pasar, seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs Reuters pada tanggal pelaporan laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker *(quoted price)* atas instrumen lain yang memiliki karakteristik atau model penentuan harga serupa.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker *(quoted price)* atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

2.l. Tagihan wesel ekspor

Tagihan wesel ekspor diklasifikasikan dan disajikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Tagihan wesel ekspor adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan secara diskonto dan dijaminkan oleh LPEI. Tagihan wesel ekspor dicatat pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.j. Sukuk (continued)

3) Sukuk measured at fair value through other comprehensive income. Securities are presented at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity using straight line method.

2.k. Derivative financial instruments

In the normal course of business, LPEI enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts and foreign currency swaps to manage exposures on market risks, such as currency risk and interest rate risk.

All derivative instruments are recognized in the statement of financial position at fair value. The fair value is based on market rate, Reuters exchange rate at statement of financial position date, discounted cash flows, price valuation or broker quoted price on other instruments with similar characteristics or price model.

The fair value of derivative instruments are determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics.

2.l. Export bills receivable

Export bills receivable are classified and presented as amortized cost. Export bills receivable are negotiated export bills discounted and negotiated by LPEI. Export bills receivable are stated at amortized cost less allowance for impairment losses.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.m. Pembiayaan dan piutang

Pembiayaan dan piutang yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan.

Pembiayaan dan piutang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Pembiayaan dan piutang yang diberikan pada awalnya diukur menggunakan metode EIR dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi diukur dengan memperhitungkan diskonto atau premi yang timbul pada saat akuisisi serta biaya/*fee* transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Cadangan kerugian atas penurunan nilai dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan kerugian kredit ekpektasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2p.

2.n. Pembiayaan dan piutang berdasarkan prinsip syariah

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara LPEI dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Pembiayaan/ piutang tersebut meliputi piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah.

Piutang murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga pembelian dan margin yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual dan dibuat secara eksplisit (dinyatakan dalam akad pembiayaan). Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, LPEI melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari debitur.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.m. Financing and receivables

Financing and receivables represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents there of, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period, and matured trade finance facilities.

Financing and receivables are classified as amortized cost.

Financing and receivables provided are measured at amortized cost using EIR method less allowance for impairment losses. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and cost/fee that are an integral part of the EIR. The amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Allowance for impairment losses is carried out using the expected credit loss calculation method as disclosed in Note 2p.

2.n. Sharia financing and receivables

Sharia financing/receivables are receivables from providing funds or other similar forms of receivables arising from transactions carried out based on the sale and purchase arrangements and profit sharing between LPEI and borrowers for a certain period of time. The financing/receivables consist of murabahah receivables and musyarakah financing.

Murabahah receivable is a transaction carried out based on sales and purchase agreement whereby the price and the profit margin are agreed by the buyer and seller and are disclosed explicitly (stated on the financing agreement). Murabahah may or may not be carried out based on a certain order to purchase goods. Under Murabahah, based on a certain order, the purchase will be realized by LPEI after the order is received.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.n. Pembiayaan dan piutang berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan hasil penelaahan oleh manajemen terhadap tingkat kolektibilitasnya pada setiap akhir tahun.

2.o. Pinjaman qardh

Pinjaman qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman qardh dapat disertai dengan wakalah.

Wakalah digunakan dalam hal nasabah mewakilkan kepada LPEI untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen nasabah dan menagih piutang kepada *buyer*. Atas jasa tersebut, LPEI dapat memperoleh ujrah yang diakui secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.n. Sharia financing and receivables (continued)

Murabahah receivable is initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition are measured at amortized cost using the effective interest rate method less any allowance for impairment losses.

Musyarakah financing is a partnership contract between fund owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct business through partnership. All parties share profits based on a predetermined ratio, while the loss will be distributed proportionately based on the capital contribution. At statement of financial position date, musyarakah financing is stated at the outstanding balance of the financing less allowance for possible losses based on the management's review on the musyarakah financing collectibility at the end of the year.

2.o. Funds of qardh

Funds of qardh are borrowing funds without an agreed commitment of benefits where the borrower is obligated to repay the principal simultaneously or in installments in certain periods. Funds of qardh can be combined with wakalah.

Wakalah is used in the event that the customer represents LPEI to manage customer documents and collect receivables from the buyer. For these services, LPEI can obtain ujrah which is recognized proportionally during the period.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.o. Pinjaman qardh (lanjutan)

Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi cadangan kerugian. LPEI menetapkan cadangan kerugian qardh berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo.

2.p. Cadangan kerugian penurunan nilai

Aset keuangan

LPEI mencatat cadangan kerugian kredit ekpektasian (*expected credit loss*) atas instrumen keuangan sesuai dengan PSAK 71 sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang berupa instrumen utang yang diklasifikasikan dalam biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

   a. Penurunan nilai atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan, dan disajikan di dalam laba rugi sebagai "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".
   b. Penurunan nilai atas aset keuangan (di luar instrumen ekuitas) yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan sebagai "*unrealized gain or loss",* (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian) dan diakui di laba rugi sebagai "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.o. Funds of qardh (continued)

Funds of qardh are recognized at the amount lent at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognized as revenue upon realization. Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for possible losses. LPEI provides allowance for possible losses on qardh based on the review of quality of the individual outstanding balances.

2.p. Allowance for impairment losses

Financial asset

LPEI recognize the allowance for expected credit loss for all financial instruments in accordance with PSAK 71 as follows:

1. *Financial assets in the form of debt instruments that are classified as amortized cost or fair value through other comprehensive income.*

   a. Impairment loss for financial asset under the classification of amortized cost are recognized as a deduction from the asset's carrying value and is presented as "allowance for impairment losses" in profit or loss.

   b. Allowance for impairment of financial assets (other than equity instruments) under the classification of fair value through other comprehensive income are recognized as addition to other comprehensive income in the statement of financial position as "unrealized gain or loss", (which will consolidated value of a financial asset in the financial statement) and recognized in profit or loss as "Allowance for impairment losses".

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.p. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

2. Komitmen pinjaman atau kelonggaran tarik yang sifatnya tidak dapat dibatalkan (*commited*)
   a. Penurunan nilai atas komitmen pinjaman diakui sebagai provisi pada komponen liabilitas bank yang dicatat secara terpisah dari aset pinjaman yang terkait sebagai "Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian Komitmen Pinjaman", kecuali LPEI tidak dapat mengidentifikasi secara terpisah.
   b. Dalam kondisi tersebut, penurunan nilai atas komitmen pinjaman dan aset pinjaman diakui bersama sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan.

3. Kontrak penjaminan keuangan yang termasuk dalam PSAK 71 dan tidak diukur dalam nilai wajar melalui laba rugi.

Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada investasi instrumen ekuitas.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

LPEI mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
i. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
ii. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

LPEI mengevaluasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan atau terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.p. Allowance for impairment losses (continued)

Financial asset (continued)

2. Commited loan commitment or undisbursed loan (commited)
   a. Impairment loss for loan commitments are recognized as provision in liabilty separate from its related loan asset as "Expected Credit Loss Provision on Loan Commitments", unless an event has caused LPEI to not be able to identify both components separately.
   b. In such condition, impairment loss for loan commitment and financial asset are recognized together as deduction to a financial asset carrying value in the statement of financial position.

3. Financial guarantee contracts included in PSAK 71 and not measured at fair value through profit or loss.

There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments.

Allowance for impairment losses on financial assets

LPEI measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses:
i. Debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and
ii. Other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

LPEI evaluates whether there is significant increase in credit risk or objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.p. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Dalam mengevaluasi hal tersebut, LPEI menetapkan kriteria berikut:

1. Tahap 1
   Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terjadinya seluruh hal berikut, yaitu:
   a. Tidak terdapat tunggakan lebih dari 30 hari;
   b. Instrumen keuangan memiliki peringkat kolektabilitas 1 atau 2; dan
   c. Tidak direstrukturisasi (berdasarkan informasi *flag* restrukturisasi di sistem).

   Pada tahap ini, LPEI akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.
2. Tahap 2
   Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terdapat tunggakan antara 31 hari sampai dengan 89 hari atau terdapat indikasi lain yang menunjukan adanya kenaikan resiko kredit sejak pengakuan.

   Pada tahapan ini, LPEI akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*lifetime*).
3. Tahap 3
   Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, aset keuangan mengalami penurunan nilai yang dapat dibuktikan dengan terjadinya salah satu dari 3 (tiga) hal berikut, yaitu:
   a. Terdapat tunggakan lebih dari 89 hari; atau
   b. Instrumen keuangan memiliki peringkat kolektibilitas 3, 4, atau 5; atau
   c. Terdapat restrukturisasi atas aset keuangan (berdasarkan informasi *flag* restrukturisasi di sistem).

   Pada tahap ini, LPEI akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.p. Allowance for impairment losses (continued)

In assessing those matters, LPEI applies the criteria as follows:

1. Stage 1
At the evaluation date, credit risk on financial instruments does not increase significantly since initial recognition, which can be proven by the occurrence of all of the following, namely:

a. Does not have past due obligation not more than 30 days;
b. The financial instrument has a collectability rating 1 or 2; and
c. Not restructured (based on restructuring flag information in the system).

At this stage, LPEI will measure the allowance for impairment losses for the financial instrument at the amount of an expected 12 months credit loss.

2. Stage 2
At the evaluation date, credit risk on financial instruments has increased significantly since initial recognition, when the is past due obligation of 31 days to 89 days or there are other indications indicating an increase in credit risk since recognition.

At this stage, LPEI will measure the allowance for impairment losses for the financial instrument at the amount of the expected credit losses over its lifetime.

3. Stage 3
At the evaluation date, there is objective evidence that the financial asset is impaired, which can be proven by the occurrence of one of 3 (three) the following:
a. Past day obligation for more than 89 days has occured; or
b. The financial instrument has a collectability rating of 3, 4, or 5; or
c. Restructured financial instrument (based on restructuring flag information in the system).

At this stage, LPEI will measure the allowance for losses for financial instruments at the amount of the expected credit losses over their lifetime.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.p. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

i. Penilaian secara individual

1) Kriteria individual
LPEI mengevaluasi penurunan nilai secara individual jika LPEI memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya secara individual dan aset keuangan memiliki kriteria sebagai berikut:
a. Aset keuangan dikategorikan sebagai *non-performing financing*; atau
b. Aset keuangan yang mengalami restrukturisasi; atau
c. Terdapat bukti objektif penurunan nilai.

LPEI juga dapat menetapkan aset keuangan untuk dievaluasi secara individual meskipun aset keuangan dimaksud belum memiliki kriteria untuk dievaluasi secara individual, apabila dinilai oleh manajemen akan menghasilkan kerugian kredit ekspektasi yang lebih akurat apabila dinilai secara individual.

2) Evaluasi penurunan nilai
Evaluasi penurunan nilai secara individual didasarkan pada konsep estimasi jumlah probabilitas tertimbang kerugian aset keuangan. Konsep tersebut menggunakan pembobotan masing-masing dari 3 (tiga) skenario yaitu skenario optimis, skenario moderat, dan skenario pesimis. Setiap skenario menghasilkan nilai kini arus kas yang didiskontokan menggunakan EIR, dimana arus kas tersebut didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan *experienced credit judgement*.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.p. Allowance for impairment losses (continued)

Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

i. Individual assessment

1) Individual criteria
LPEI evaluates impairment individually if LPEI has reasonable and supportable information to measure the lifetime expected credit losses on an individual instrument and the financial assets have the following criteria:

a. The financial asset is categorized as non-performing financing; or
b. The financial asset is restructured; or

c. There is objective evidence that the financial asset is impaired.

LPEI can also assign certain financial assets to be evaluated individually even though the said criteria has not been met, if the management has determined that the individual method will result in a more accurate expected credit loss.

2) Impairment evaluation
Individual impairment evaluation is based on the concept of an estimated weighted probability of loss of financial assets. This concept uses the weighting of each of the 3 (three) scenarios, namely optimistic scenario, moderate scenario, and pessimistic scenario. Each scenario results in fair value of cashflow discounted using EIR, where the cashflow is based on readily available information and experienced credit judgement.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.p. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

2) Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Dalam membuat estimasi *recoverable amount* pada arus kas, metode individual didasarkan pada 2 (dua) konsep yaitu:
(1) *Discounted Cashflow* berdasarkan estimasi arus kas masa depan; dan
(2) *Expected Collateral* berdasarkan estimasi penjualan agunan dengan mempertimbangkan nilai wajar dan jangka waktu penjualan agunan di masa depan. Selisih estimasi jumlah probabilitas tertimbang dengan jumlah *outstanding* aset keuangan mencerminkan jumlah kerugian kredit ekspektasian secara individual.

Untuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang direstrukturisasi yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dihitung menggunakan asumsi tingkat diskonto sebesar tingkat suku bunga setelah direstrukturisasi.

Per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 LPEI menghitung CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, menggunakan metode arus kas yang didiskontokan dengan tingkat diskonto sebesar tingkat suku bunga setelah restrukturisasi, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan CKPN.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.p. Allowance for impairment losses (continued)

2) Impairment evaluation (continued)

In estimating cashflow based on recoverable amount, the individual method is based on 2 (two) concept, consisting of:
(1) The Discounted Cashflow which is based on estimated future cashflow; and
(2) The Expected Collateral which is based on estimated sale of collateral taking into consideration the fair value of the collateral and length of sale in the future.The difference between the estimated weighted average amount against the financial asset oustanding reflects the individual expected credit loss.

For the Allowance for Impairment Losses (CKPN) on restructured National Interest Account financing which has received approval from Ministry of Finance is calculated using the assumed of the discount rate that is equal to the interest rate after the restructuring.

As of December 31, 2023 and 2022 LPEI calculate the CKPN on financing for National Interest Account given to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, using the discounted cash flow method with a discount rate equal to the interest rate after restructuring according to the Letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Number S-194/MK.08/2023 concerning Determination of the Use of Discount Rates Assumption Based on Interest Rates After Restructuring in Calculation of CKPN.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.p. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

ii. Penilaian secara kolektif

1) Kriteria kolektif
LPEI mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif jika aset keuangan memiliki kesamaan dalam karakteristik risiko kredit aset keuangan dengan tujuan untuk memfasilitasi analisis yang didesain untuk memungkinkan peningkatan risiko kredit secara signifikan dapat diidentifikasi tepat waktu. LPEI mengevaluasi pencadangan secara kolektif untuk aset keuangan yang memiliki hari tunggakan kurang dari 90 hari untuk dan bukan merupakan *non-performing financing*.

Secara garis besar, seluruh portofolio pembiayaan yang evaluasi penurunan nilainya tidak dihitung menggunakan metode individual, akan dievaluasi menggunakan metode kolektif.

2) Evaluasi penurunan nilai
Evaluasi penurunan nilai secara kolektif didasarkan pada konsep *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD), dan *exposure at default* (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.

a. *Probability of default* (PD)
Probability of default mencerminkan estimasi kemungkinan suatu debitur gagal bayar pada rentang waktu tertentu.

PD dihitung untuk setiap *bucket* pada setiap segmen yang telah ditetapkan melalui kesamaan karakterikstik risiko kredit.

Dalam menghasilkan PD, LPEI menggunakan 3 tahapan perhitungan, yaitu: (1) PD *through the cycle*; (2) PD *forward looking;* dan (3) PD *point in time* melalui proses *scaling*.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.p. Allowance for impairment losses (continued)

ii. Collective assessment

1) Collective criteria
LPEI evaluates impairment collectively if the financial assets share the same credit risk characteristics of the financial assets with the aim of facilitation analysis designed which allows a significant increase in credit risk to be identified in a timely manner. LPEI evaluates the financial assets collectively if the financial asset has past due obligation of less than 90 days and is not categorized as non-performing financing.

In general, all financing portfolios for which impairment evaluation is not calculated using the individual method will be evaluated using the collective method.

2) Impairment evaluation
The evaluation of collective impairment is based on the concepts of probability of default (PD), loss given default (LGD), and exposure at default (EAD) which take into account past, current, and future information.

a. Probability of default (PD)
Probability of default reflects the estimated probability of a debtor defaulting over a certain period of time.

PD is calculated for each bucket in each segment that reflects similarity in credit risk characteristic.

In calculating the PD, LPEI uses 3 calculation phases, namely: (1) PD through the cycle; (2) PD forward looking; and (3) PD point in time through a scaling process.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.p. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

a. *Probability of default* (PD) (lanjutan)

Dalam 3 tahapan ini, LPEI menggunakan metode vasicek, *roll rate transition matrix*, dan pendekatan lainnya yang lebih sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan regulator.

Metode vasicek adalah metode penentuan PD menggunakan formula korelasi aset yang telah ditentukan oleh *Basel Committee* digunakan untuk aset keuangan yang termasuk dalam portofolio tresuri, di antaranya giro pada Bank Indonesia dan Bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain, serta efek-efek.

Metode *roll rate transition matrix* menggunakan transisi historis *bucket* PD. *Bucket* PD yang digunakan dalam perhitungan historis adalah sebagai berikut:

1. *Bucket* 1: 0 *day past due* (DPD)
2. *Bucket* 2: 1 – 30 DPD
3. *Bucket* 3: 31 – 60 DPD
4. *Bucket* 4: 61 – 89 DPD
5. *Bucket* 5: > 89 DPD, atau restrukturisasi aset keuangan (*flag* restukturisasi), atau berada di kolektibilitas 3, 4, atau 5.

PD dilakukan *forward looking macroeconomic adjustment* untuk menentukan *forward looking PD* berdasarkan hubungan historis antara makroekonomi dengan nilai PD LPEI.

b. *Loss given default* (LGD)
Loss given default (LGD) merupakan estimasi kerugian dengan menghitung *recovery* yang didapatkan setelah debitur tersebut *default*. *Recovery date* dihitung mempertimbangkan *time value of money* dari pengembalian kewajiban yang telah *default*. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung *time value of money* adalah *effective interest rate* (EIR).

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.p. Allowance for impairment losses (continued)

a. Probability of default (PD) (continued)

In these 3 stages, LPEI uses the vasicek method, roll rate transition matrix, and other approaches that is deemed more appropriate and is not contradictory with the regulation.

The vasicek method is a method of determining PD using the asset correlation formula that has been determined by the Basel Committee, is used for financial assets that are included in treasury portfolios, namely current accounts with Bank Indonesia and other Banks, placement with Bank Indonesia and other Banks, and securities.

The roll rate transition matrix method uses the historical transition bucket PD. PD buckets used in historical calculations are as follows:

1. *Bucket 1: 0 day past due (DPD)*
2. *Bucket 2: 1 – 30 DPD*
3. *Bucket 3: 31 – 60 DPD*
4. *Bucket 4: 61 – 89 DPD*
5. *Bucket 5: > 89 DPD, or restructured financial assets (restructuring flag), or has a collectability rating of 3, 4, or 5.*

A forward looking macroeconomic adjustment is made to the PD to determine the forward looking PD based on the historical relationship between the macroeconomic and LPEI PD value.

b. Loss given default (LGD)
Loss given default (LGD) is the estimated loss by calculating the recoverable amount through collateral after the debtor has defaulted. The recovery date is calculated by considering the time value of money from the repayment of the defaulted obligation. The interest rate used to calculate the time value of money is the effective interest rate (EIR).

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.p. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

LGD dihitung dengan mempertimbangkan *forward looking adjustment* berdasarkan hubungan historis antara makroekonomi dengan nilai LGD LPEI. Jika tidak terdapat hubungan antara makroekonomi dengan nilai LGD LPEI, maka LPEI dapat tidak menggunakan *forward looking* dalam penentuan nilai LGD.

c. *Exposure at default* (EAD)
Dalam menentukan nilai EAD dari setiap debitur, LPEI mempertimbangkan *expected lifetime*. EAD menggambarkan *exposure* yang akan ditanggung LPEI jika terdapat debitur yang *default.*

Expected lifetime adalah pendekatan yang mempelajari *behaviour* dari tingkat penyelesaian fasilitas (lunas atau *write off*) debitur dibandingkan dengan jadwal penyelesaian fasilitas.

d. *Expected credit loss* (ECL)
Secara umum, formula untuk menghitung ECL secara kolektif adalah perkalian antara PD, LGD, dan EAD.

Dalam menghitung besarnya cadangan kerugian penurunan nilai kolektif, LPEI menggunakan nilai *outstanding* aset keuangan dari yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai masing-masing *stage* sesuai pada karakteristik *staging*. Metode perhitungan pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:
- Tahap 1: kerugian kredit ekspektasian 12 bulan
- Tahap 2: kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya
- Tahap 3: kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.p. Allowance for impairment losses (continued)

LGD is calculated by considering forward looking adjustments based on the historical relationship between macroeconomics and the LPEI LGD value. If there is no macroeconomic relationship with the LPEI LGD value, then the LPEI may not use forward looking in determining the LGD value.

c. Exposure at default (EAD)
In determining the EAD value of each debtor, LPEI considers the expected lifetime. EAD describes the exposure that will be borne by LPEI if a debtor has defaulted.

The expected lifetime is an approach that studies the behavior of the debtor's facility settlement rate (paid off or writen off) compared to the facility completion schedule.

d. Expected credit loss (ECL)
In general, the formula for calculating ECL collectively is the multiplication of PD, LGD, and EAD.

In calculating the amount of collective impairment loss, LPEI uses the outstanding value of collectively assessed financial assets.

The impairment loss is calculated based on the criteria of respective stages according to the criteria stated above. The calculation method for respective stages are as follows:

- *Stage 1: 12-months expected credit loss (ECL)*
- *Stage 2: Lifetime ECL*
- *Stage 3: Lifetime ECL*

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.p. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah porsi aset keuangan yang mungkin akan *default* dalam 12 bulan ke depan.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah ekspektasi kerugian yang merupakan hasil dari kejadian *default* selama umur aset keuangan atau sesuai dengan sisa tenor fasilitas.

Faktor diskonto yang digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian adalah suku bunga efektif (EIR).

Probabilitas rata-rata tertimbang *(probability weighted)* dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan LPEI yang mencakup skenario optimis, normal, dan pesimis.

Total rata-rata tertimbang *(weighted)* atas estimasi *cashflow* dimaksud menjadi pengurang atas nilai tercatat aset keuangan, yang dimana selisihnya akan menjadi cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Estimasi dan asumsi yang digunakan untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan dan piutang berdasarkan PSAK 71 diungkapkan dalam Catatan 3b.2.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara kolektif dan individual dihitung berdasarkan PSAK 102 “Akuntansi Murabahah” dan ISAK 102 “Penurunan Nilai Piutang Murabahah”.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.p. Allowance for impairment losses (continued)

The 12 months ECL is the portion of the financial asset possibly defaulting within the next 12 months.

The ECL lifetime is the expected credit loss that result from default events over the expected life of the financial asset or according to the remaining tenor of the facility.

The discount factor used to calculate ECL is effective interest rate (EIR).

The probability weighted calculation of ECL is determined by LPEI which consists of optimistic, normal, and pessimistic scenarios.

The total weighted cash flow estimation is deducted from the financial asset’s carrying amount, where the difference between the weighted average cashflow estimation to the carrying value of the financial asset will result in the impairment loss of the financial assets.

The estimates and assumptions used to calculate allowance for impairment losses on financing and receivables based on PSAK 71 are disclosed in Note 3b.2.

Allowance for impairment losses on murabahah receivables that are assessed collectively and individually is calculated based on PSAK 102 “Murabahah Accounting” and ISAK 102 “Impairment of Murabahah Receivables”.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.p. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

i. Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.

ii. Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, LPEI menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.p. Allowance for impairment losses (continued)

Restructured Financial Assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:

i. If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.

ii. If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.

Deteriorating Financial Assets

At each reporting date, LPEI assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.p. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Aset Keuangan yang Memburuk (lanjutan)

Bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi kredit, atau tagihan oleh LPEI dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur atau penerbit akan dinyatakan pailit, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or Originated Credit Impaired Financial Assets* - POCI)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan komitmen pinjaman, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

2.p. Allowance for impairment losses (continued)

Deteriorating Financial Assets (continued)

Objective evidence that financial assets are impaired can include default or delinquency by a debtor, restructuring of a loan, or receivable by LPEI on terms that the LPEI would not otherwise consider if the debtor is not experiencing financial difficulties, indications that a borrower or issuer will enter bankruptcy, the disappearance of an active market for a security due to financial difficulties, or other observable data relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of borrowers or issuers in the group, or economic conditions that correlate with defaults in the group.

Credit-impaired Financial Assets (Purchased or originated credit impaired financial assets – POCI)

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:

i. Financial assets measured at amortized cost and loan commitments, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.p. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian dalam Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)

ii. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian, penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbukukan dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapusbukukan setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Aset keuangan syariah

Untuk aset keuangan unit usaha Pembiayaan Syariah, kecuali transaksi murabahah, LPEI Syariah menerapkan POJK No. 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan

LPEI menerapkan PSAK 48 “Penurunan Nilai Aset”, yang menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan LPEI agar aset dicatat tidak melebihi jumlah aset yang dapat dipulihkan.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.p. Allowance for impairment losses (continued)

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position (continued)

ii. Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written-off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

Recoveries of written-off financial assets are recognized as operational income other than interest income.

Sharia financial assets

For the financial assets of the business unit that is engaged in Sharia Financing, except for Murabahah transactions, LPEI Sharia applies POJK No. 9/POJK.05/2022 on Supervising and Monitoring of LPEI for determination of impairment loss.

Allowance for impairment losses on non-financial assets

LPEI applied PSAK 48 “Impairment of Asset”, that states the procedures applicable for LPEI so that the amount of assets recorded do not exceed the assets recoverable amount.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.p. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan (lanjutan)

PSAK ini juga yang menentukan kapan LPEI membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Pada setiap tanggal pelaporan, LPEI melakukan penilaian apakah terdapat indikasi bahwa aset non-keuangan mungkin mengalami penurunan nilai. Ketika sebuah indikator penurunan nilai ada atau ketika sebuah pengujian penurunan nilai tahunan untuk aset diperlukan, LPEI membuat estimasi resmi atas jumlah terpulihkan.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset (atau unit penghasil kas) setelah dikurangi besarnya biaya pelepasan dibandingkan dengan nilai pakainya, dan ditentukan untuk aset individu, kecuali aset tersebut menghasilkan arus kas masuk yang tidak tergantung lagi dari aset yang lain atau kumpulan aset, yang dalam hal jumlah terpulihkan dinilai sebagai bagian dari unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat suatu aset (atau unit penghasil kas) melebihi jumlah terpulihkan, maka aset (atau unit penghasil kas) tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan.

Dalam menilai nilai pakai suatu aset, estimasi terhadap arus kas dipulihkan di masa depan akan didiskontokan menjadi nilai kini dengan menggunakan tingkat suku bunga diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar terhadap nilai waktu dari uang *(time value of money)* dan risiko spesifik aset (atau unit penghasil kas) tersebut.

Kerugian penurunan nilai akan dibebankan pada tahun yang bersangkutan, kecuali aset tersebut telah dicatat sebesar jumlah yang direvaluasi, dalam hal ini kerugian penurunan nilai tersebut akan dibebankan langsung ke dalam selisih penilaian kembali aset bersangkutan.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.p. Allowance for impairment losses (continued)

Allowance for impairment losses on non-financial assets (continued)

The PSAK also states that when LPEI is able to offset the loss from impairment and the disclosures needed.

At each reporting date, LPEI assesses whether there is any indication that its non-financial assets may be impaired. When an indicator of impairment exists or when an annual impairment testing for an asset is required, LPEI makes a formal estimate of recoverable amount.

Recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs of disposal and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets, in which case the recoverable amount is assessed as part of the CGU to which it belongs. Where the carrying amount of an asset (or CGU) exceeds its recoverable amount, the asset (or CGU) is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use of assets, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assesments of the time value of money and the risks specific to the asset (or CGU).

An impairment loss is charged to operations on the year in which it arises, unless the asset is carried at a revalued amount, in which case the impairment loss is charged to the revaluation increment of the said asset.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.p. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan (lanjutan)

Penelaahan dilakukan pada setiap tanggal pelaporan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa pengakuan kerugian penurunan nilai sebelumnya mungkin tidak lagi ada atau telah menurun. Apabila terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan akan diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui akan dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset sejak kerugian penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, nilai tercatat aset akan ditingkatkan sejumlah nilai terpulihkan.

Perhitungan cadangan klaim atas aktivitas penjaminan telah dihitung sesuai dengan Peraturan Direktur Eksekutif No. 0036/PDE/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang perhitungan cadangan klaim atas aktivitas penjaminan dan telah berdasarkan perhitungan aktuaris.

2.q. Kontrak penjaminan

Kontrak penjaminan yang memenuhi definisi kontrak penjaminan keuangan yang tercantum dalam PSAK 71 dicatat dalam kontrak penjaminan keuangan berdasarkan PSAK 71.

Kontrak penjaminan yang tidak memenuhi definisi kontrak penjaminan keuangan dalam PSAK 71, dicatat berdasarkan PSAK 57.

Piutang yang timbul dari proses penyelesaian klaim dari kontrak garansi dengan menggunakan akta pengakuan utang dicatat sebagai aset keuangan apabila memenuhi definisi aset keuangan sesuai PSAK 71 jika probabilitas ketertagihan tinggi.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.p. Allowance for impairment losses (continued)

Allowance for impairment losses on non-financial assets (continued)

An assesment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The calculation of estimated guarantee claim was calculated based on Regulation of Director Executive No. 0036/PDE/12/2015 dated December 29, 2015 regarding the calculation of estimated guarantee claim and based on actuary calculation.

2.q. Guarantee contracts

Guarantee contracts that meets the definition of financial guarantee contracts laid out in PSAK 71 is recorded as financial guarantee contract based on PSAK 71.

Guarantee contracts that do not meet the definition of financial guarantee contracts under PSAK 71, are recorded for under PSAK 57.

Receivables resulting from guarantee contracts claim which is settled with debentures are recorded as financial assets if they meet the definition of financial asset following PSAK 71 if estimated that the likelihood of collection is high.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.q. Kontrak penjaminan (lanjutan)

Liabilitas yang timbul dari kontrak penjaminan keuangan diakui sebesar nilai wajar pada saat pengakuan awal. Jika kontrak jaminan keuangan diterbitkan untuk pihak yang tidak berelasi dalam suatu transaksi yang wajar *(arm's length transaction*) yang berdiri sendiri, nilai wajarnya pada saat dimulainya transaksi kemungkinan sama dengan *guarantee fee* yang diterima, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya. Setelah pengakuan awal, jumlah di dalam liabilitas kontrak jaminan keuangan diukur pada jumlah yang lebih tinggi antara jumlah yang diakui provisi dan jumlah yang diakui pada saat pengakuan awal dikurangi amortisasi kumulatif (jika sesuai).

Liabilitas yang timbul atas suatu klaim yang telah disetujui namun belum dibayarkan akan dicatat sebagai utang klaim. Pendapatan *fee* kontrak penjaminan keuangan diakui sebagai pendapatan selama periode penjaminan.

2.r. Piutang asuransi, liabilitas asuransi, dan utang asuransi

Piutang asuransi merupakan tagihan premi kepada tertanggung/agen/broker dan perusahaan asuransi *(ceding company)* pada tanggal pelaporan keuangan.

Liabilitas asuransi meliputi estimasi klaim, dan premi belum merupakan pendapatan, serta pendapatan premi ditangguhkan. Estimasi klaim adalah estimasi jumlah kewajiban yang menjadi tanggungan sehubungan dengan klaim yang dilaporkan masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan (IBNR).

Cadangan yang terkait dengan klaim dilaporkan masih dalam proses penyelesaian menunjukkan biaya akhir atas klaim yang dilaporkan, namun belum disetujui pada tanggal pelaporan.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.q. Guarantee contracts (continued)

Liabilities arising from financial guarantee contracts are recognized at fair value at initial recognition. If the financial guarantee contract was issued to an unrelated party in a stand-alone arm's length transaction, its fair value at inception is likely to guarantee fee received, unless there is evidence to the contrary. After initial recognition, the amount of financial guarantee contract liabilities are measured at the higher of the provision amount recognized and amount initially recognized less cumulative amortization (when appropriate).

Liabilities incurred on claims approved but have not been paid are recorded as claims payable. Guarantee fees from financial guarantee contracts are recognized as revenue over the period of the guarantee.

2.r. Insurance receivables, insurance liabilities, and insurance payables

Insurance receivables represent premium charges due from the insured/agent/broker and insurer (ceding company) as of the reporting date.

Insurance liabilities include estimated claims, and unearned premiums, and deferred premium income. Estimated claims are based on the estimated ultimate cost of all claims incurred but not settled, including claims incurred but not reported (IBNR).

Reserves associated with claims reported but have not been settled represents the ultimate cost of claims that were reported, but is yet to be approved as of the reporting date.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.r. Piutang asuransi, liabilitas asuransi, dan utang asuransi (lanjutan)

IBNR adalah bagian dari klaim dimana kejadian yang diasuransikan telah terjadi namun asuradur belum memperoleh pemberitahuan atas klaim. Walaupun asuradur belum diberitahu mengenai klaim tersebut sebelum akhir tahun buku, pencadangan biaya atas klaim tersebut diperlukan untuk memenuhi konsep kehati-hatian dan konsep penandingan *(matching concept).*

Utang asuransi terdiri dari utang premi reasuransi, utang komisi, dan utang klaim.

Utang premi termasuk di antaranya adalah:
- Kewajiban pembayaran premi kepada reasuradur, sebagai akibat adanya transaksi reasuransi yang dilakukan dengan pihak reasuradur.
- Kewajiban pembayaran premi kepada koasuransi.

Utang klaim merupakan klaim yang telah disetujui namun belum dibayarkan kepada tertanggung dari transaksi asuransi langsung atau koasuransi.

Utang klaim diakui saat klaim disetujui untuk dibayar.

Utang klaim dihentikan pengakuannya saat kewajiban telah berakhir, dilepaskan, atau dibatalkan.

2.s. Aset reasuransi

Aset reasuransi adalah nilai hak kontraktual neto cedant dalam perjanjian reasuransi. Aset reasuransi terdiri dari estimasi penggantian reasuransi atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, estimasi penggantian reasuransi atas klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, porsi reasuransi atas liabilitas premi asuransi, dan porsi reasuransi atas klaim yang disetujui untuk dibayar (piutang reasuransi). Aset reasuransi diukur secara konsisten dengan jumlah yang terkait dengan asuransi yang mendasari sesuai dengan jangka waktu kontrak reasuransi.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.r. Insurance receivables, insurance liabilities, and insurance payables (continued)

IBNR is the element of claims where the insured event has occurred but where the insurer has yet to be notified of a claim. Although the insurer has not yet been notified of these claims before the end of the financial year, the cost of these claims are provided to comply with both the prudence and the matching concept.

Insurance payables consist of reinsurance premium payables, commission payables, and claims payables.

Premium payables includes:
- *Premium payment obligations to the reinsurer, as a result of reinsurance transactions with reinsurers.*
- *Premium payment obligations due to coinsurers.*

Claims payable is represents claims agreed but have not been paid to the insured arising from either direct insurance or coinsurance.

Claims payable is recognized when the claim is approved for payment.

Claims payable is derecognized when the obligation expires, is discharged, or cancelled.

2.s. Reinsurance assets

Reinsurance assets is a cedant's net contractual rights under a reinsurance contract. Reinsurance assets is consist of estimated reinsurance reimbursement for claims that are still in the process of completion, estimated reinsurance reimbursement for claims incurred but not yet reported, the portion of reinsurance premiums on liability insurance, and reinsurance portion of claims approved for payment (reinsurance receivables). Reinsurance assets are measured consistently with the amounts associated with the underlying insurance in accordance with the terms of the reinsurance contract.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.s. Aset reasuransi (lanjutan)

Setiap tanggal pelaporan, LPEI mengevaluasi apakah aset reasuransi mengalami penurunan nilai. Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika terdapat bukti objektif yang menunjukkan adanya kemungkinan besar LPEI tidak mendapatkan jumlah yang tertagih kepada reasuradur. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2.t. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2.u. Aset tetap, Aset Hak Guna, dan Liabilitas Sewa

Aset Tetap

Harga perolehan awal atas aset tetap terdiri dari harga beli dan semua biaya langsung yang dapat diatribusikan untuk membuat aset dalam kondisi siap pakai dan berlokasi di tempat yang digunakan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu dikapitalisasi sebagai biaya penggantian atas jumlah tercatat *(carrying amount)* aset tetap sebagai suatu penggantian, jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan aset ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.s. Reinsurance assets (continued)

At each reporting date, LPEI assesses whether reinsurance assets are impaired. Reinsurance assets are impaired if objective evidence is available to suggest that it is probable that LPEI will not be able to collect the amounts due from reinsurers. The impairment loss is recognized as an expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

2.t. Acceptances receivable and payable

Acceptances receivable and payable are stated at amortized cost. Acceptances receivable is stated net of allowance for impairment losses.

2.u. Fixed assets, Right-of-Use-Assets, and Lease Liability

Fixed Assets

The initial cost of premises and equipment consists of its purchase price and any directly attributable costs of bringing the asset to its working condition and location for its intended use. Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition. Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss.

When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalized as part of the replacement cost of the asset's carrying amount if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income upon occurrence.

At each statement of financial position date, the assets' residual values, useful lives, and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.u. Aset tetap, Aset Hak Guna, dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut.

	Tahun/ Years	Persentase/ Percentage	
Gedung	20	5%	Building
Peralatan dan perlengkapan kantor	5	20%	Office furniture and fixtures
Kendaraan bermotor	5	20%	Motor vehicles

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat pekerjaan aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

LPEI mengakui liabilitas sewa, sebagai pembayaran sewa yang tersisa termasuk atas opsi perpanjangan dimana perpanjangan hampir dapat dipastikan, didiskontokan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.u. Fixed assets, Right-of-Use-Assets, and Lease Liability (continued)

Fixed Assets (continued)

Depreciation is calculated on a straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows.

Construction in progress is stated at cost. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate premises and equipment account when the construction is substantially completed and the asset constructed is ready for its intended use.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use.

When premises and equipment are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in statement of profit or loss.

Right-of-use-Assets and Lease Liabilities

LPEI recognized a lease liability, being the remaining lease payments including extensions options where renewal is reasonably certain, discounted using the incremental borrowing rate at the date of initial application. Meanwhile, rights of use assets include the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, recovery costs, and lease payments made on or before the start date of the lease, less rental incentives received.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.u. Aset tetap, Aset Hak Guna, dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Beban keuangan dicatat dalam laba rugi. Aset hak guna (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa LPEI akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

2.v. Aset yang diambil alih

Aset yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh LPEI, baik melalui pelelangan, maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada LPEI dan diselesaikan melalui penjualan. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan. LPEI memiliki kebijakan untuk selalu berusaha menjual AYDA untuk menyelesaikan sisa kewajiban debitur.

AYDA diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi *(net realisable value)*, yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

LPEI membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas AYDA berdasarkan kualitas atas aset, yaitu:

1) 15% (lima belas persen) untuk kualitas kurang lancar, yaitu dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;

2) 50% (lima puluh persen) untuk kualitas aset diragukan, yaitu dimiliki lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;

3) 100% untuk kualitas aset macet, yaitu dimiliki lebih dari 5 tahun.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.u. Fixed Assets, Right-of-Use-Assets, and Lease Liability (continued)

Right-of-use-Assets and Lease Liabilities (continued)

Finance expense is recorded in profit or loss. Right of used assets (presented under fixed assets) are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term, if there is no reasonable certainty that LPEI will obtain ownership by the end of the lease term.

2.v. Foreclosed Assets

Foreclosed assets represent assets acquired by LPEI, both from auction and non-auction based on voluntary transfer by the debtors or based on debtors' approval to sell the collateral where the debtors could not fulfill their obligations to LPEI and is settled through a sale. Foreclosed assets represent loan collateral acquired in settlement of loans. LPEI has policy to sell foreclosed assets to settle debtors' liabilities.

Foreclosed assets are recognised at their net realisable value. Net realisable value is the fair value of the foreclosed assets less estimated cost of liquidating the foreclosed assets.

The allowance for impairment made on foreclosed assets is based on its asset quality:

1) 15% (fifteen percent) for substandard assets, which are owned for more than 1 (one) year up to 3 (three) years;

2) 50% (fifty percent) for doubtful assets, which are owned for more than 3 (three) years up to 5 (five) years;

3) 100% (one hundred percent) for non performing assests, which are owned for more than 5 (five) years.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.v. Aset yang diambil alih (lanjutan)

Biaya pemeliharaan atas AYDA yang terjadi setelah pengambilalihan atau akuisisi aset dibebankan sebagai laba/rugi pada saat terjadinya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset yang diambil alih diakui sebagai laba/rugi periode berjalan.

2.w. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka, diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

2.x. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas LPEI kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan.

2.y. Efek-efek utang yang diterbitkan

Efek-efek utang yang diterbitkan terdiri dari surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh LPEI berupa obligasi yang diperdagangkan di pasar modal. Obligasi yang diterbitkan disajikan sebesar nilai tercatat dengan biaya perolehan yang belum diamortisasi.

Beban yang berkaitan dengan penerbitan obligasi diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

2.z. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari bank atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.v. Foreclosed Assets (continued)

Maintenance costs of foreclosed assets subsequent to the foreclosure or acquisition of the assets are charged as current year profit/loss as incurred. Gains or losses from sale of foreclosed assets are charged as current period profit/loss as incurred.

2.w. Prepaid expenses

Prepaid expenses, are amortized over its benefited periods using the straight-line method.

2.x. Current liabilities

Current liabilities represent LPEI's obligations to outside parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Current Liabilities are recorded at amortized cost. This account is classified as financial liabilities.

2.y. Debt securities issued

Debt securities issued consist of obligations of LPEI in the form of bonds traded in the capital market. Bonds are stated at their carrying value, net of unamortized cost.

Expenses related to bonds issuance are recognized as discount, directly deducted from the net proceeds of the bonds issuance and amortized over the term of the bonds using the effective interest method.

2.z. Fund borrowings

Fund borrowings are funds received from banks or other parties with repayment obligation based on the borrowing agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.z. Pinjaman yang diterima (lanjutan)

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2.aa. Provisi

Provisi diakui jika LPEI memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, provisi tidak diakui.

2.ab. Pendapatan dan beban bunga

Sebelum terjadinya penurunan nilai (tahap 1 dan 2), pendapatan bunga dihitung menggunakan metode EIR yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (tahap 3 atau POCI) dilakukan dengan menerapkan EIR atas jumlah tercatat neto aset keuangan, yaitu jumlah *outstanding* setelah dikurangi dengan kerugian akibat penurunan nilai untuk:

a. Aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk (POCI)
   Untuk aset keuangan tersebut, LPEI menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit *(risk adjusted effective interest rate)* atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.z. Fund borrowings (continued)

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2.aa. Provision

Provisions are recognized when LPEI has current liability (both legal or constructive) as a result of past events with high profitability of settlement by outflow of resources with economic benefits and a reliable estimate of the amount of liability can be made.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If there is no probable outflow of resources to settle these liabilities, provision is not recognized.

2.ab. Interest income and expense

Prior to impairment (stage 1 and 2), interest income is calculated using the EIR method, namely by applying an effective interest rate on the gross carrying amount of financial assets except for financial assets purchased or originating from credit impaired financial assets.

Interest income on impaired financial assets (stage 3 or POCI) is calculated by applying EIR to the net carrying amount of financial assets, namely the outstanding amount after deducting losses due to impairment for:

a. Financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets (POCI)
   For these financial assets, LPEI applies an effective interest rate that is adjusted to credit risk (risk adjusted effective interest rate) on the amortized cost of financial assets since initial disclosure.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.ab. Pendapatan dan beban bunga

b. Tahap 3
Untuk aset keuangan tersebut, LPEI menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan di periode pelaporan, yaitu nilai yang telah dikurangi kerugian akibat penurunan nilai.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan niai (*stage 3* atau POCI) dilakukan dengan menerapkan EIR atas jumlah tercatat neto aset keuangan, yaitu jumlah *outstanding* setelah dikurangi dengan kerugian akibat penurunan nilai.

Pendapatan bunga selanjutnya diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa depan dalam pengukuran kerugian penurunan nilai atau yang disebut dengan *unwinding interest.*

2.ac. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan dan piutang, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan ini mencakup provisi dan komisi.

Pendapatan atau komponen pendapatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

2.ad. Pendapatan asuransi lainnya

LPEI mengakui pendapatan asuransi seperti komisi yang diperoleh dari transaksi reasuransi dan pendapatan lainnya sebagai pendapatan asuransi lainnya.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.ab. Interest income and expense

b. Stage 3
For these financial assets, LPEI applies an effective interest rate on the amortized cost of financial assets in the reporting period, namely the value that has been reduced by losses due to impairment.

Interest income on impaired financial assets (stage 3 or POCI) is calculated by applying EIR to the net carrying amount of financial assets, namely the outstanding amount after deducting losses due to impairment.

Interest income is subsequently recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in measuring impairment losses or what is known as unwinding interest.

2.ac. Fees and commission income

Fees and commissions directly related to financing and receivables activities, or fees and commissions income which relate to a specific period are amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of profit or loss and other comprehensive income. These fees include provision and commission.

Fees or component of fees that are not linked to loan financing activities or to a certain period and/or in regards to a service performed, is directly recognized as income when performance obligations are met and is accounted as other operational income.

2.ad. Other insurance income

LPEI recognized insurance income such as commission received from reinsurance transaction and other income as other insurance income.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.ae. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah

Pendapatan usaha syariah merupakan pendapatan margin murabahah, dan pembiayaan musyarakah serta aset produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual kecuali untuk pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Beban bonus secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

Pendapatan margin murabahah diakui menggunakan metode suku bunga efektif dengan mempertimbangkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan/piutang syariah dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada debitur penyimpan dana dan LPEI dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana debitur dan LPEI yang dipakai dalam piutang murabahah dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk debitur tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah sebagai "shahibul maal" dan LPEI sebagai "mudharib" sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang memakai dana LPEI, seluruhnya menjadi milik LPEI.

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan/piutang syariah dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada debitur penyimpan dana dan LPEI dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana debitur dan LPEI yang dipakai dalam piutang murabahah dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.ae. Sharia profit sharing income and bonus expenses

Sharia income represents margin income from murabahah, and musyarakah financing and other earning assets which are recognized on an accrual basis except for income derived from profit sharing. Sharia bonus expenses consist of bonus distribution and profit-sharing to fund owners which are recognized on an accrual basis.

Murabahah margin is recognized using the effective interest rate method taking into consideration directly attributable transaction costs.

Total margin income and profit sharing on the sharia financing/receivables transactions and from other earning assets to be distributed to debtors of fund owners and LPEI are computed based on the proportion of funds from the debtors and LPEI used to finance the murabahah receivables and mudharabah and musyarakah financing and other earning assets.

The total available margin and profit sharing are distributed to debtors as "shahibul maal" (owner of funds) and to LPEI as "mudharib" (fund manager) in accordance with a pre-determined ratio (nisbah).

Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which use LPEI's funds belong to LPEI as a whole.

Total margin income and profit sharing on the sharia financing/receivables transactions and from other earning assets to be distributed to debtors of fund owners and LPEI are computed based on the proportion of funds from the debtors and LPEI used to finance the murabahah receivables and mudharabah and musyarakah financing and other earning assets.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.af. Pengakuan pendapatan dan beban asuransi pendapatan premi

Premi yang diterima dari kontrak asuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Premi dari polis bersama diakui sebesar pada bagian kepemilikan premi LPEI.

Premi yang diterima dari kontrak jangka pendek asuransi ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan secara individual ke masa pertanggungan.

Bagian tahun berjalan atas premi dari kontrak jangka panjang asuransi dicatat dengan cara yang sama seperti yang diterima untuk jangka pendek. Bagian premi tahun-tahun berikutnya ditangguhkan.

Beban klaim

Klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim penjaminan, klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Jumlah klaim dalam proses penyelesaian (estimasi klaim) ditentukan berdasarkan estimasi kerugian dari klaim masih dalam proses di tanggal pelaporan, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Perubahan estimasi klaim diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode terjadinya perubahan. Kenaikan (penurunan) estimasi klaim adalah selisih antara estimasi klaim tahun berjalan dan tahun lalu.

Beban klaim menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim reasuransi, dan kenaikan (penurunan) estimasi klaim. Klaim reasuransi disajikan sebagai pengurang klaim bruto.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.af. Insurance revenue and expense recognition premium income

Premium received from insurance contracts are recognized as income during the policy period (contracts) in proportion to the insurance coverage provided. Premiums from coinsurance policy is recognized based on LPEI's proportionate share of the premium.

Premium received from short-term insurance contracts are deferred and recognized as income on an individual basis over the coverage period.

Current portion of premium received from long-term insurance contracts are accounted for in the same manner as those received for short-term insurance contract. Portion for following years is deferred.

Claim expenses

Claims consist of settled claims, guarantee claims, outstanding claims including claims incurred but not yet reported, and claim settlement expenses. Claims are recognized as expenses when the liabilities to cover claims have been incurred. Subrogated rights are recognized as deduction from claim expenses upon realization.

Claims in process (estimated claims) are computed based on estimated loss from claims that are still in process at reporting date, including claims incurred but not yet reported. Changes in estimated claims are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income at the time of change. Increase (decrease) in estimated claims represents the difference between the balance of estimated claims in the current year and prior year.

Claim expenses represent gross claims, reinsurance claims, and increase (decrease) in estimated claims. Reinsurance claims are presented as deduction from gross claims.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.af. Pengakuan pendapatan dan beban asuransi Pendapatan premi (lanjutan)

Beban klaim (lanjutan)

Estimasi klaim yang diperkirakan akan diselesaikan lebih dari satu tahun setelah akhir periode harus memperhitungkan pengaruh nilai waktu uang. Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim sebagai hasil dari proses penelaahan lebih lanjut diakui berdasarkan perbedaan antara periode berjalan dan periode kewajiban klaim sebelumnya.

2.ag. Program dana pensiun dan imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek
Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus, dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti
Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah iuran pensiun yang akan diterima oleh pegawai pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

LPEI menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh pegawai tetap. Kontribusi LPEI adalah sebesar 6%, sedangkan kontribusi pegawai adalah sebesar 4% yang dihitung berdasarkan penghasilan dasar bulanan pegawai. Kontribusi LPEI terhadap dana pensiun dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.af. Insurance revenue and expense recognition Premium income (continued)

Claim expenses (continued)

Estimated claims that are expected to be settled for more than one year after the end of the period must take into account the effect of time value of money. Changes in the estimated claims liabilities as a result of further review process are recognized based on the the difference between the current period and the prior period claims liability.

2.ag. Pension plan and employee benefits

Short-term employee benefits
Short-term employee benefit such a wages, social security contribution, short-term leave, bonuses, and other non-monetary benefit are recognized over the service rendered. Short-term employee benefit is measured using undiscounted amount.

Defined contribution pension
A defined contribution pension plan is a pension plan program where the pension amount to be received by employees at the time of retirement, usually depends on one or more factors such as age, years of service, and compensation.

LPEI has a defined benefit pension plan covering all of its permanent employees. LPEI and the employees' contributions are computed at 6% and 4%, respectively, of the employees' monthly basic salaries. LPEI's contributions to the retirement plan are recognized as expense when incurred.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.ag. Program dana pensiun dan imbalan kerja (lanjutan)

Program pensiun Imbalan pasti
Manfaat program pensiun imbalan pasti ditentukan secara aktuaria menggunakan Metode Kredit Unit Proyeksi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya, terdiri atas:
(i) Keuntungan dan kerugian aktuarial;
(ii) Imbal hasil atas aset program tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset);
(iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau *curtailment* program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya
Imbalan kerja jangka panjang lainnya dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan yang digunakan dalam perhitungan imbalan pascakerja program imbalan pasti, yaitu dengan menggunakan metode projected *unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini, kecuali untuk pengukuran kembali yang diakui pada laba rugi

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.ag. Pension plan and employee benefits (continued)

Defined benefit pension
Defined benefit pension plan are actuarially determined using the Projected Unit Credit Method.

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income and not reclassified to profit or loss in subsequent periods, consist of:
(i) Actuarial gains and losses;
(ii) Return on plan assets excluding amounts that included in net interest on liabilities (assets);
(iii) The changes in the impact of the asset ceiling, excluding amounts that included in net interest on liabilities (assets).

All past service costs are recognised at the earlier of when the amendment or curtailment occurs, and when the related restructuring or termination costs are recognized, as a result, unvested past service cost can no longer be deferred and recognised over the future vesting period.

Other long-term employee benefits
Other long-term employee benefits is calculated using the same methodology as used in calculating post-employment benefits for defined benefit plans, which is using the projected unit credit method and discounted to their present value, except for remeasurements which are recognised in profit or loss.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.ah. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam nilai Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs *Spot Reuters* pada pukul 16.00 WIB. *Reuters* adalah salah satu sumber kurs penutupan yang diakui oleh Bank Indonesia dan PSAK.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.ah. Foreign currency transactions and balances

Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah at the exchange rates prevailing at the time of the transaction. At financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Rupiah at the Reuters' spot exchange rates at 04.00 PM (West Indonesian local time). Reuters is one of the recognized sources of closing rate by Bank of Indonesia and PSAK.

Exchange gains and losses arising from transactions denominated in foreign currencies and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss for the current year.

The foreign currency gains or losses on monetary assets and liabilities are the difference between amortized cost in rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest rate and payments during the year, and the amortized cost in foreign currency translated into rupiah using the exchange rate at the end of the year.

As of December 31, 2023 and 2022, the exchange rates used are as follows:

	31 Desember / *December 31,*		
	2023	**2022**	
Dolar Amerika Serikat	15,397	15,568	*United States Dollars*
Euro Eropa	17,038	16,582	*European Euro*
100 Yen Jepang	10,888	11,781	*100 Japanese Yen*
Dolar Singapura	11,676	11,593	*Singapore Dollars*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.ai. Pajak Penghasilan

Pajak kini merupakan estimasi utang atau pengembalian pajak yang dihitung atas laba atau rugi kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan termasuk penyesuaian yang dibuat untuk penyisihan pajak tahun sebelumnya, baik untuk merekonsiliasi pajak penghasilan dengan pajak yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang muncul dari pemeriksaan pajak.

Utang atau restitusi pajak kini diukur menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan kompleksitas peraturan pajak.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas, kecuali perbedaan yang dikenakan pajak final. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan pada periode aset atau liabilitas tersebut direalisasi atau diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan-peraturan pajak) yang berlaku atau secara substansi telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.ai. Income Tax

Current tax is the expected tax payable or refundable on taxable income or loss for the year using tax rates substantively enacted as of the reporting date and includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assesments.

Current tax payable or refundable is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases, except those differences that are subject to final tax. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences while deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to be applied to the period when the assets or liabilities are realized or settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at statements of financial position date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rate are credited or charged to current year profit or loss, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.ai. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus di laporan keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Pajak penghasilan tangguhan dihitung dengan menggunakan metode posisi keuangan, terhadap semua perbedaan temporer pada tanggal laporan posisi keuangan antara aset dan liabilitas menurut pajak dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan.

2.aj. Informasi segmen

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana LPEI terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana LPEI beroperasi.

LPEI menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari LPEI:
a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b) hasil operasinya dikaji ulang secara *regular* oleh pengambil keputusan operasional LPEI untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

LPEI hanya beroperasi dalam usaha perbankan konvensional dan syariah dan hanya beroperasi di Indonesia tanpa cabang. Sehingga, LPEI tidak menyajikan informasi pelaporan segmen berdasarkan wilayah geografis operasi.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.ai. Income Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are presented on a mutually deleted basis in the financial statements, except for deferred tax assets and liabilities for different entities according to the current presentation of tax assets and liabilities.

Deferred income tax is calculated using the financial position method, on all temporary differences at the statement of financial position date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.

2.aj. Segment information

Segment information is disclosed to enable users of financial statement to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which LPEI is involved in and the economic environment where LPEI operates.

LPEI determines and presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

An operating segment is a component of LPEI:
a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

b) whose operating results are reviewed regularly by the LPEI's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and

c) for which discrete financial information is available.

LPEI only operates in the the business of conventional banking and sharia and only operates in Indonesia without any branches. Therefore, LPEI cannot present reporting information segment by the operation geographical area.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

2.aj. Informasi Segmen (lanjutan)

Pendapatan, beban, hasil, aset, dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

2. Material Accounting Policies Information (continued)

2.aj. Segment Information (continued)

Income, costs, outcome, assets, and liabilities segment include ítems that directly attributable to a certain segment and also matters that can be allocated with the basis appropriate to specified segment.

3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Akuntansi Signifikan

a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan

1. Usaha yang berkelanjutan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi LPEI, manajemen telah menggunakan pertimbangan dan estimasi dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan LPEI untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa LPEI memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan LPEI untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

2. Nilai wajar atas instrumen keuangan

Apabila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika statistik.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates, and Assumptions

a. Significant accounting judgments

1. Going concern

In the process of implementing LPEI's accounting policies, management has exercised judgments and estimates in determining the amounts recognized in the financial statements.

The management has assessed LPEI's ability to continue as a going concern and believes that LPEI has the resources to continue its business in the future. In addition, management was not aware of any material uncertainty which may cast significant doubt to LPEI's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on a going concern basis.

2. Fair value of financial instruments

If the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the financial position is not available in an active market, the fair value is determined using various valuation techniques including the use of statistical mathematical model.

3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2. Nilai wajar atas instrumen keuangan (lanjutan)

Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang dapat diobservasi. Bila data pasar yang dapat diobservasi tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi yang diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan seperti model umpan balik likuiditas dan volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto jangka panjang, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

3. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

LPEI menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi LPEI seperti diungkapkan pada Catatan 2f.

4. Klasifikasi produk asuransi dan penjaminan

Produk LPEI berupa "Penjaminan Indonesia Eximbank" dan "Penjaminan Kepabeanan" dicatat sesuai dengan ketentuan di PSAK 57 karena produk-produk tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai kontrak penjaminan keuangan berdasarkan PSAK 71 dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai kontrak asuransi berdasarkan PSAK 62 disebabkan tidak terdapat risiko asuransi yang signifikan.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates, and Assumptions (continued)

a. Significant accounting judgments (continued)

2. Fair value of financial instruments (continued)

The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. Considerations include considerations such as liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment, and the level of default assumption.

3. Classification of financial assets and liabilities

LPEI specifies certain classification of assets and liabilities with consideration whether the definition specified by the PSAK 71 is fulfilled. Therefore, financial assets and liabilities have been recognized in accordance with the accounting policies of LPEI stated in Note 2f.

4. Classification of insurance products and guarantees

LPEI's "Indonesia Eximbank Guarantee" and "Customs Guarantee" products are accounted for in accordance with PSAK 57 as they are not financial guarantee contract under PSAK 71 and do not qualify as insurance contract under PSAK 62 due to the lack of significant insurance risk.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

4. Klasifikasi produk asuransi dan penjaminan (lanjutan)

"Asuransi Proteksi Piutang Dagang" dicatat sesuai dengan ketentuan di PSAK 28 dan PSAK 62 karena merupakan kontrak asuransi dan LPEI telah mencatat produk tersebut sebagai kontrak asuransi dan memiliki intensi meneruskan perlakuan tersebut.

5. Penilaian mata uang fungsional

Manajemen menggunakan pertimbangan-nya untuk menentukan mata uang fungsional LPEI yang dapat merepresentasikan secara benar efek ekonomi dari transaksi yang mendasarinya, peristiwa, dan kondisi yang relevan dengan LPEI.

Dalam pembuatan pertimbangan tersebut, LPEI memperhatikan hal-hal berikut:
a. mata uang yang sangat mempengaruhi harga jual untuk instrumen keuangan dan jasa-jasa (ini sering kali menjadi mata uang yang digunakan, yaitu mata uang dimana harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa didenominasi dan direalisasikan);
b. mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
c. mata uang dimana penerimaan dari kegiatan operasi biasanya didapatkan.

6. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan

Pandemi Global Virus Corona (Covid-19) menimbulkan ketidakpastian ekonomi global dan domestik serta secara signifikan memengaruhi pertimbangan LPEI dalam menyusun laporan keuangan dan berdampak pada penerapan PSAK 71 instrumen keuangan.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates, and Assumptions (continued)

a. Significant accounting judgments (continued)

4. Classification of insurance products and guarantees (continued)

"Accounts Receivable Protection Insurance" is recorded in accordance with PSAK 28 and PSAK 62 because it is an insurance contract and LPEI has recorded the product as insurance contract and intended to continue such accounting treatment.

5. Assesment of functional currency

The management uses its judgment to determine LPEI's functional currency which faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events, and conditions that are relevant to LPEI.

In making this judgment, LPEI considers the following:
a. the currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);
b. the currency in which funds from financing activities are generated; and
c. the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

6. Impact of Covid-19 Pandemic on the adoption of PSAK 71 Financial Instruments

The Global Corona Virus pandemic (Covid-19) raises global and domestic economic uncertainties and significantly influences LPEI's considerations in preparing financial statements and has an impact on the adoption of PSAK 71 financial instruments.

3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

a. Pertimbangan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

6. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan (lanjutan)

Mengacu pada POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 serta panduan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia tentang dampak pandemi Covid-19 maka LPEI:

- Mengidentifikasi debitur-debitur yang selama ini berkinerja baik namun menurun kinerjanya karena terdampak Covid-19.
- Menerapkan skema restrukturisasi mengacu pada hasil asesmen yang akurat disesuaikan dengan profil debitur dengan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan hanya diberikan pada debitur-debitur yang benar-benar terdampak Covid-19.
- Melakukan identifikasi dan *monitoring* secara berkelanjutan serta berjaga-jaga untuk tetap melakukan pembentukan CKPN apabila debitur-debitur yang telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi tersebut berkinerja baik pada awalnya, diperkirakan menurun karena terdampak Covid-19, dan tidak dapat pulih pasca restrukturisasi atau dampak Covid-19 berakhir.

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates, and Assumptions (continued)

a. Significant accounting judgments (continued)

6. Impact of Covid-19 Pandemic on the adoption of PSAK 71 Financial Instruments (continued)

Referring to POJK No. 17/POJK.03/2021 concerning the Second Amendment to the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 and guidelines for the Financial Accounting Standards Board – Indonesian Institute of Accountants regarding the impact of the Covid-19 pandemic, LPEI:

- *Identifying debtors who have been performing well but have decreased their performance due to Covid-19.*
- *Implementing a restructuring scheme refers to the results of the assessment which are accurately adjusted to the debtor profile with a period of maximum of 1 (one) year and is only given to debtors who are truly affected by Covid-19.*
- *Identifying and monitoring on an ongoing basis as well as being prepared to continue forming the CKPN if debtors who have obtained the restructuring facility perform well initially, are expected to decrease due to Covid-19 impact, and cannot recover after the restructuring or Covid-19 damage ends.*

b. Estimates and assumptions

Future main assumption and main source of other uncertainty estimates on the reporting date which might have significant risk of material adjustment to the recorded asset and liabilities for the coming period are disclosed below.

3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

LPEI mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali LPEI. Perubahan tersebut dicerminkan dalam estimasi dan asumsi terkait pada saat terjadinya.

1. Metode penyusutan dan masa manfaat aset tetap

Untuk kepentingan perhitungan penyusutan, nilai sisa untuk semua aset tetap, kecuali ada catatan lain untuk aset tertentu, harus lebih besar dari Rp1 (nilai penuh). LPEI melakukan peninjauan kembali atas nilai sisa, umur manfaat, dan metode penyusutan yang ditetapkan untuk setiap aset tetap minimum pada setiap akhir tahun buku. Taksiran masa manfaat dari aset tetap diungkapkan dalam Catatan 2u.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis untuk gedung dan peralatan dan perabotan, masing-masing adalah 20 tahun dan 5 tahun.

Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana LPEI menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Lihat Catatan 13 untuk nilai buku atas aset tetap LPEI pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates, and Assumptions (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

LPEI based its assumptions and estimates on the provided parameter during the preparation of financial statements. The assumptions and situations regarding the future development may change due to market changes or circumstances beyond the control of LPEI. Such changes are reflected in the estimates and assumptions when they occur.

1. Depreciation method and useful lives of premises and equipment

For depreciation calculation purposes, the residual value for all fixed assets, unless there is another note for a particular asset, must be greater than Rp1 (full value). LPEI reviews the residual value, useful life, and depreciation method set for each minimum fixed asset at the end of each financial year. The estimated useful life of fixed assets is disclosed in Note 2u.

Fixed asset are depreciated using the straight-line method based on the economic useful life. Management estimates that the useful life of building and premises and equipment, are 20 years and 5 years, respectively.

This is the expected average useful life in the industry where LPEI operates. Changes in the level of usage and technology development may affect the economic useful life and also the residual value of the assets and therefore, and future depreciation costs may be revised. Refer to Note 13 for book value of LPEI's premises and equipment as of December 31, 2023 and 2022.

3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

2. Cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang

Evaluasi atas kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan di Catatan 2p.

Komponen cadangan kerugian penurunan nilai debitur tertentu dalam total cadangan kerugian penurunan nilai berlaku pada tagihan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai tunai arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas ini, manajemen membuat pertimbangan mengenai kondisi keuangan dari debitur dan nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diterima dengan lebih dari satu skenario. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kinerjanya dan strategi penyelesaiannya serta estimasi arus kas yang dinilai dapat diperoleh kembali secara independen disetujui oleh Departemen Analisis Risiko dan Kredit *Reviewer*.

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat pada portofolio tagihan dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai tagihan dalam portofolio tersebut, namun penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menentukan perlunya membentuk cadangan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit, dan faktor-faktor ekonomi.

Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter *input* yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates, and Assumptions (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

2. Allowance for impairment losses on financing and receivables

Financial assets accounted for at amortized cost are evaluated for impairment on a basis described in Note 2p.

The specific counterparty component of the total allowances for impairment applies to claims evaluated individually for impairment and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral received in more than one scenario. Impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimate of cash flows considered recoverable are independently approved by the Risk Analysis and Credit Reviewer Department.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of claims with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired claims, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective loan loss allowances, management considers factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations, and economic factors.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.

3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

3. Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Ketepatan dari cadangan ini tergantung pada seberapa tepat estimasi arus kas masa depan untuk menentukan cadangan individual serta asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja serta imbalan jangka panjang lainnya, tergantung pada pemilihan asumsi-asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaria untuk menghitung estimasi tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri pegawai tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan LPEI langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Sementara, LPEI berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Lihat Catatan 29 untuk nilai tercatat atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada 31 Desember 2023 dan 2022.

4. Penurunan nilai efek-efek ekuitas yang diakui pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

LPEI menelaah aset keuangan mereka pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan PSAK 71 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit dari aset keuangan tidak pada nilai wajar melalui laba rugi. PSAK 71 menggabungkan informasi *forward-looking* dan historis, terkini dan yang diperkirakan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates, and Assumptions (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

3. Post-employement benefit and other long term employee benefits

The accuracy of the allowances depends on how well the estimated future cash flows are determined for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

The determination liabilities post employement benefit and also other long term employee benefits depend on the assumptions used by the actuary in calculating the estimation. Those assumptions include discount rate, annual salary increases rate, annual resignation rate, level of disability, retirement age, and mortality rate. Difference in the actual result and assumption of LPEI is recognized in the profit or loss by the time of occurrence. While, LPEI believes that the assumptions are fair and appropriate, there could be a significant difference between the actual result or change in estimation on the pension and employee benefit and net employee benefit expense. See Note 29 for carrying amount of estimated liabilities on employee benefit as of December 31, 2023 and 2022.

4. Impairment of equity securities classifies as fair value through other comprehensive income

LPEI review their financial assets at fair value through other comprehensive income under PSAK 71 which required to recognise the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss. PSAK 71 incorporates forward-looking and historical, current and forecasted information into expected credit loss estimation.

3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

4. Penurunan nilai efek-efek ekuitas yang diakui pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Dalam melakukan peninjauan penurunan nilai, penilaian manajemen berikut diperlukan:

i. Penentuan apakah aset mengalami penurunan nilai berdasarkan indikator tertentu seperti kesulitan keuangan debitur dan penurunan kualitas kredit; dan
ii. Penentuan umur kredit ekspektasian yang mencerminkan:
   a. Jumlah yang tidak bisa dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi kemungkinan dari berbagai hasil;
   b. Nilai waktu dari uang; dan
   c. Informasi yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada tanggal pelaporan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Nilai tercatat efek-efek ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta cadangan kerugian penurunan nilai diungkapkan dalam Catatan 7.

5. Penurunan nilai aset non-keuangan

Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset, LPEI mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

1. terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
2. perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset;
3. terdapat bukti bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau lebih buruk dari yang diharapkan;
4. arus kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari arus kas taksiran, sebelum perhitungkan diskonto.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates, and Assumptions (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

4. Impairment of equity securities classifies as fair value through other comprehensive income (continued)

In carrying out the impairment review, the following management's judgements are required:

i. Determination whether the assets is impaired based on certain indicators such as financial difficulties of the debtor's and deterioration of the credit quality of the debtor's; and
ii. Determination of expected credit life that reflect:
   a. An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;
   b. The time value of money; and
   c. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions.

The carrying value of fair value through other comprehensive income equity securities and allowance for impairment losses are disclosed in Note 7.

5. Impairment of non-financial assets

In assessing the possibility of impairment of non-financial assets, LPEI considers these factors:

1. evidence of obsolescence or physical damage on assets;
2. significant changes which might negatively affect the use of the assets;
3. evidence that the assets economical performance is worse than expected;
4. the cash flow which is materially less than expected cash flow, before any discount.

3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

6. Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

LPEI menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Mengacu kepada Catatan 15d tentang aset pajak tangguhan.

7. Estimasi Klaim Penjaminan

Pada setiap tanggal pelaporan, LPEI menelaah kewajibannya atas potensi klaim atas risiko-risiko yang ditanggung LPEI dalam perjanjian penjaminan untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. LPEI mencatat estimasi klaim penjaminan berdasarkan metode tertentu sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Hasil aktual yang berbeda dari hasil perhitungan LPEI akan dibebankan ke laba rugi tahun berjalan. Sementara LPEI berkeyakinan bahwa hasil perhitungan tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual akan dapat memengaruhi secara material laba ruginya.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates, and Assumptions (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

6. Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

LPEI reviews their deferred tax assets at each statement of financial position date and reduce the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Refer to Note 15d for the deferred tax assets.

7. Estimated Guarantee Claim

At each reporting date, LPEI assess its for potential claim on risks covered by the LPEI under guarantee agreements to determine whether such liabilities should be recognised in the financial statements. LPEI records estimated guarantee claim based on a certain method based on accounting standards in Indonesia. Actual results that differ from LPEI's calculation result will be charged to profit or loss for the year. While LPEI believes that its calculation results are reasonable and appropriate, significant differences in the actual results may materially affect its profit and loss.

3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Akuntansi Signifikan (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

8. Liabilitas Asuransi

LPEI mencatat liabilitas asuransi berdasarkan metode perhitungan tertentu yang berlaku umum di Indonesia. Asumsi utama yang mendasari metode tersebut adalah pengalaman klaim masa lalu LPEI. Hasil aktual yang berbeda dari hasil perhitungan LPEI akan dibebankan ke laba rugi tahun berjalan. Sementara LPEI berkeyakinan bahwa hasil perhitungan tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual akan dapat mempengaruhi secara material laba ruginya.

9. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak LPEI sebagai penyewa

LPEI menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu yang tidak dapat dibatalkan bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika cukup wajar untuk dilakukan.

LPEI memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. LPEI menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta atau keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, LPEI menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signfikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan memengaruhi apakah *lessee* cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

3. Significant Accounting Judgments, Estimates, and Assumptions (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

8. Insurance Liabilities

LPEI records insurance liabilities based on a certain calculation method which generally applied in Indonesia. The main assumption underlying this method is LPEI's past claim experience. Actual results that differ from LPEI's calculation result will be charged to profit or loss for the year. While LPEI believes that its calculation results are reasonable and appropriate, significant differences in the actual results may materially affect its profit and loss.

9. Determining the term of the contract with the option of contract extension and termination LPEI as lessee

The LPEI determines the lease term as the term that cannot be canceled together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be implemented, or any period covered by the option to terminate the lease if it is reasonable to do so.

LPEI has several rental contracts that include options for extension and termination of the lease term. LPEI applies an assessment in evaluating whether it can be ascertained if it will use the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts or circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, LPEI reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

4. Giro pada Bank Indonesia / *4. Current Account with Bank Indonesia*

	31 Desember / *December 31,* 2023	2022	
Rupiah	553	426	*Rupiah*
Total	**553**	**426**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, LPEI memiliki saldo giro pada Bank Indonesia untuk keperluan transfer dana *Real Time Gross Settlement (RTGS)*.

As of December 31, 2023 and 2022, LPEI has current account with Bank Indonesia for Real Time Gross Settlement (RTGS) transfer of funds.

5. Giro pada Bank / *5. Current Accounts with Banks*

a. Berdasarkan *counterparties* dan mata uang / *a. By counterparties and currencies*

	31 Desember/ *December 31, 2023*		31 Desember/ *December 31, 2022*		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	
Rupiah					***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 39)					***Related parties (Note 39)***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		21,781		31,921	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		2,700		8,629	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		1,993		2,230	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		807		724	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		21		2	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
		27,302		43,506	
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Bank Jabar Banten Syariah		516		512	*PT Bank Jabar Banten Syariah*
PT Bank Central Asia Tbk		100		100	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk		6		9	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		--		1	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
		27,924		44,128	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollars***
Pihak berelasi (Catatan 39)					***Related parties (Note 39)***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,963,305	30,229	1,862,355	28,992	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	529,843	8,158	712,633	11,094	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	301,942	4,649	167,531	2,608	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
		43,036		42,694	

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

5. Giro pada Bank (lanjutan)

a. Berdasarkan *counterparties* dan mata uang (lanjutan)

5. Current Accounts with Banks (continued)

a. By counterparties and currencies (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2023*		31 Desember/ *December 31, 2022*		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollars***
Pihak ketiga					***Third parties***
Standard Chartered Bank, New York	1,220,562	18,793	4,818,307	75,009	*Standard Chartered Bank, New York*
JP Morgan Chase Bank	865,558	13,327	852,241	13,267	*JP Morgan Chase bank*
PT Bank KB Bukopin Tbk	118,335	1,822	118,330	1,842	*PT Bank KB Bukopin Tbk*
Citibank, N.A, Jakarta	9,352	144	--	--	*Citibank, N.A, Jakarta*
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta	9,223	142	9,375	146	*The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta*
PT Bank ICBC Indonesia	5,845	90	9,228	144	*PT Bank ICBC Indonesia*
PT Bank Central Asia Tbk	4,741	73	5,866	91	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	844	13	4,758	74	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	585	9	950	15	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
The HSBC Ltd, New York	--	--	771	12	*The HSBC Ltd, New York*
		34,413		90,600	
Euro Eropa					***European Euro***
Pihak berelasi (Catatan 39)					***Related party (Note 39)***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	528	9	640	11	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Pihak ketiga					***Third parties***
Commerzbank Aktiengesellschaft	145,378	2,477	179,922	2,983	*Commerzbank Aktiengesellschaft*
Citibank, N.A, Jakarta	411	7	386	6	*Citibank, N.A, Jakarta*
		2,484		2,989	
Yen Jepang					***Japanese Yen***
Pihak berelasi (Catatan 39)					***Related party (Note 39)***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	110,218	12	120,500	14	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Pihak ketiga					***Third parties***
Citibank, N.A, Jakarta	1,313,433	143	1,314,254	155	*Citibank, N.A, Jakarta*
		143		155	
Dolar Singapura					***Singapore Dollar***
Pihak ketiga					***Third party***
Overseas-Chinese Banking Corporation Bank (OCBC) Ltd., Singapura	20,296	237	4,850	56	*Overseas-Chinese Banking Corporation Bank (OCBC) Ltd., Singapore*
		80,334		136,519	
		108,258		180,647	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2)		(1)	***Allowance for impairment losses***
Total		**108,256**		**180,646**	***Total***

Termasuk dalam giro pada bank adalah giro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pihak berelasi (Catatan 39) sehubungan dengan Penugasan Khusus. Pemanfaatan jumlah tersebut dibatasi untuk Program NIA, sebesar Rp23.533 dan Rp31.061 masing-masing per 31 Desember 2023 dan 2022.

Included in current accounts with banks is current account in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. a related party (Note 39) in relation with National Interest Account. The utilization of such amount is restricted for NIA Program, amounting to Rp23,533 and Rp31,061 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

5. Giro pada Bank (lanjutan) / *5. Current Accounts with Banks (continued)*

b. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai / *a. By collectibility and allowance for impairment losses*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

The movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember / *December 31, 2023*				
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	180,647	--	--	180,647	*Beginning balance*
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--	*Transfer within stages*
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	(72,003)	--	--	(72,003)	*Net remeasurement of carrying value*
Aset baru	114	--	--	114	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(13)	--	--	(13)	*Asset derecognized or repaid*
Penyesuaian mata uang asing	(487)	--	--	(487)	*Foreign exchange adjustment*
Saldo akhir	**108,258**	**--**	**--**	**108,258**	***Ending balance***

	31 Desember / *December 31, 2022*				
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	674,115	--	--	674,115	*Beginning balance*
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--	*Transfer within stages*
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	--	--	--	--	*Net remeasurement of carrying value*
Aset baru	162,937	--	--	162,937	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(662,271)	--	--	(662,271)	*Asset derecognized or repaid*
Penyesuaian mata uang asing	5,866	--	--	5,866	*Foreign exchange adjustment*
Saldo akhir	**180,647**	**--**	**--**	**180,647**	***Ending balance***

Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk terhadap saldo giro pada bank lain, sebagai berikut:

Allowance for impairment losses is provided for balance of current account with other bank, as follows:

	31 Desember / *December 31, 2023*				
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	1	--	--	1	*Beginning balance*
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Perpindahan antar tahapan	--	--	--	--	*Transfer within stages*
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	1	--	--	1	*Net remeasurement of carrying value*
Aset baru	--	--	--	--	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	--	--	--	--	*Asset derecognized or repaid*
Total pembalikan tahun berjalan	1	--	--	1	*Total reverse current year*
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--	--	*Foreign exchange adjustment*
Saldo akhir	**2**	**--**	**--**	**2**	***Ending balance***

5. Giro pada Bank (lanjutan)

b. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

5. Current Accounts with Banks (continued)

b. By collectibility and allowance for impairment losses (continued)

	31 Desember / *December 31, 2022*				
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	9	--	--	9	*Beginning balance*
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Perpindahan antar tahapan					*Transfer within stages*
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	--	--	--	--	*Net remeasurement of carrying value*
Aset baru	1	--	--	1	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(10)	--	--	(10)	*Asset derecognized or repaid*
Total pembalikan tahun berjalan	(9)	--	--	(9)	*Total reverse current year*
Penyesuaian mata uang asing	1	--	--	1	*Foreign exchange adjustment*
Saldo akhir	**1**	**--**	**--**	**1**	***Ending balance***

LPEI melakukan penilaian giro pada bank secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi dan analisis kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan pengalaman historis dan penilaian kredit termasuk informasi masa depan.

LPEI assesses current accounts with banks collectively by considering qualitative and quantitative information and analysis, based on historical experience and credit assessments including future information.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible placement with banks.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 32.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets are disclosed in Note 32.

c. Kisaran tingkat suku bunga per tahun untuk giro pada bank

c. The range of annual interest rates for current accounts with banks

	31 Desember / *December 31*,		
	2023	2022	
Rupiah	0.00% - 1.90%	0.00% - 2.00%	*Rupiah*

Giro pada bank dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Euro Eropa, Yen Jepang, dan Dolar Singapura tidak memperoleh bunga.

The current accounts with banks denominated in United States Dollar, European Euro, Japanese Yen, and Singapore Dollar do not bear interest.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

5. Giro pada Bank (lanjutan)

d. Giro pada bank yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat giro pada bank yang digunakan sebagai jaminan pada 31 Desember 2023 dan 2022.

5. Current Accounts with Banks (continued)

d. Current accounts with banks pledged as collateral

There were no current accounts with banks pledged as collateral as of December 31, 2023 and 2022.

6. Penempatan pada Bank

a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan *counterparties*

6. Placements with Banks

a. By currencies, type, and counterparties

	31 Desember/ *December 31, 2023*		31 Desember/ *December 31, 2022*		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	
Rupiah					***Rupiah***
Deposito berjangka					***Time deposit***
Pihak berelasi (Catatan 39)					***Related parties (Note 39)***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		1,007,000		3,556,100	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		30,000		1,324,000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		--		40,727	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
		1,037,000		4,920,827	
Pihak ketiga					***Third parties***
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk		2,726,000		3,750,000	*PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk*
PT Bank DKI		1,499,000		950,000	*PT Bank DKI*
PT Bank Mega Tbk		950,000		800,000	*PT Bank Mega Tbk*
PT BPD Jambi		250,000		--	*PT BPD Jambi*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		100,000		--	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk		52,000		194,000	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
		5,577,000		5,694,000	
		6,614,000		10,614,827	
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollars***
Deposito berjangka					***Time deposit***
Pihak berelasi (Catatan 39)					***Related party (Note 39)***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	--	2,000,000	31,135	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
		--		31,135	
Pihak ketiga					***Third parties***
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	--	36,000,000	560,430	*PT Bank CIMB NIaga Tbk*
PT Bank UOB Indonesia	--	--	30,000,000	467,025	*PT Bank UOB Indonesia*
		--		1,027,455	
Call Money					***Call Money***
Pihak ketiga					***Third party***
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	52,000,000	800,644	57,000,000	887,347	*Banco Bilbao Vizcaya Argentaria*
		800,644		887,347	
		800,644		1,945,937	
		7,414,644		12,560,764	
Cadangan kerugian penurunan nilai		(396)		(509)	***Allowance for impairment losses***
Total		**7,414,248**		**12,560,255**	***Total***

6. Penempatan pada Bank (lanjutan) / 6. Placements with Banks (continued)

a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan *counterparties* (lanjutan) / a. By currencies, type, and counterparties (continued)

Termasuk dalam penempatan pada bank merupakan penempatan sehubungan dengan Penugasan Khusus. Berikut adalah rincian pada 31 Desember 2023 dan 2022:

Included in placements with banks is placement in relations with National Interest Account. The details as of December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember / *December 31,*		
	2023	**2022**	
Program NIA			***NIA Program***
Deposito berjangka			***Time deposit***
Pihak berelasi (Catatan 39)			***Related parties (Note 39)***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,007,000	3,556,100	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	1,324,000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
	1,007,000	4,880,100	
Pihak ketiga			***Third parties***
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	2,726,000	3,750,000	*PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk*
PT Bank DKI	1,499,000	950,000	*PT Bank DKI*
PT Bank Mega Tbk	500,000	800,000	*PT Bank Mega Tbk*
PT BPD Jawa Timur Tbk	250,000	--	*PT BPD Jawa Timur Tbk*
	4,975,000	5,500,000	
	5,982,000	10,380,100	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(358)	(500)	*Allowance for impairment losses*
Total	**5,981,642**	**10,379,600**	***Total***

b. Berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo / b. By remaining period to maturity

Klasifikasi jangka waktu penempatan pada bank berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The details of placements with banks classified as to remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember / *December 31,*		
	2023	**2022**	
Rupiah			***Rupiah***
Sampai dengan 1 bulan	6,614,000	10,614,827	*Up to 1 month*
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollars***
Sampai dengan 1 bulan	800,644	1,945,937	*Up to 1 month*
	7,414,644	12,560,764	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(396)	(509)	*Allowance for impairment losses*
Total	**7,414,248**	**12,560,255**	***Total***

6. Penempatan pada Bank (lanjutan) / *Placements with Banks (continued)*

c. Kisaran tingkat suku bunga per tahun untuk penempatan pada bank / *The range of annual interest rates for placement with banks*

	31 Desember / *December 31,* 2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
Deposito berjangka	5.50% - 7.60%	3.50% - 6.50%	*Time deposit*
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Deposito berjangka	--	3.00 - 3.60%	*Time deposit*
Call Money	5.32%	4.32%	*Call Money*

d. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai / *By collectibility and allowance for impairment losses*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

The movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*				
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	12,560,764	--	--	12,560,764	*Beginning balance*
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Perpindahan antar tahapan					*Transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--	--	*Net remeasurement of carrying value*
Aset baru	6,315,364	--	--	6,315,364	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(11,461,447)	--	--	(11,461,447)	*Asset derecognized or repaid*
Penyesuaian mata uang asing	(37)	--	--	(37)	*Foreign exchange adjustment*
Saldo akhir	**7,414,644**	**--**	**--**	**7,414,644**	***Ending balance***

	31 Desember/ *December 31, 2022*				
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	16,641,155	--	--	16,641,155	*Beginning balance*
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Perpindahan antar tahapan					*Transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--	--	*Net remeasurement of carrying value*
Aset baru	12,520,038	--	--	12,520,038	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(16,601,155)	--	--	(16,601,155)	*Asset derecognized or repaid*
Penyesuaian mata uang asing	726	--	--	726	*Foreign exchange adjustment*
Saldo akhir	**12,560,764**	**--**	**--**	**12,560,764**	***Ending balance***

6. Penempatan pada Bank (lanjutan)

d. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk terhadap saldo penempatan pada bank, sebagai berikut:

6. Placements with Banks (continued)

d. By collectibility and allowance for impairment losses (continued)

Allowance for impairment losses is provided for balance of placement with banks, as follows:

	31 Desember/*December 31, 2023*				
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	509	--	--	509	*Beginning balance*
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Perpindahan antar tahapan					*Transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--	--	*Net remeasurement of carrying value*
Aset baru	396	--	--	396	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(509)	--	--	(509)	*Asset derecognized or repaid*
Total pembalikan tahun berjalan	(113)	--	--	(113)	*Total reverse current year*
Penyesuaian mata uang asing	--	--	--	--	*Foreign exchange adjustment*
Saldo akhir	**396**	**--**	**--**	**396**	***Ending balance***

	31 Desember/*December 31, 2022*				
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	2,209	--	--	2,209	*Beginning balance*
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Perubahan ke tahap 2	--	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Perubahan ke tahap 3	--	--	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Perpindahan antar tahapan					*Transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	--	--	--	--	*Net remeasurement of carrying value*
Aset baru	509	--	--	509	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(2,296)	--	--	(2,296)	*Asset derecognized or repaid*
Total pembalikan tahun berjalan	(1,787)	--	--	(1,787)	*Total reverse current year*
Penyesuaian mata uang asing	87	--	--	87	*Foreign exchange adjustment*
Saldo akhir	**509**	**--**	**--**	**509**	***Ending balance***

LPEI melakukan penilaian terhadap penempatan pada bank secara kolektif dengan menggunakan informasi dan analisis kualitatif dan kuantitatif berdasarkan pengalaman historis dan penilaian kredit termasuk informasi masa depan.

LPEI evaluates bank placements collectively using qualitative and quantitative information and analysis based on historical experience and credit assessment including future information.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible placement with banks.

6. Penempatan pada Bank (lanjutan) / *Placements with Banks (continued)*

d. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan) / *By collectibility and allowance for impairment losses (continued)*

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 32.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 32.

e. Penempatan pada bank yang digunakan sebagai jaminan / *Placements with banks pledged as collateral*

Tidak terdapat penempatan pada bank yang digunakan sebagai jaminan pada 31 Desember 2023 dan 2022.

There are no placements with banks pledged as collateral as of December 31, 2023 and 2022.

7. Efek-Efek / *Securities*

a. Berdasarkan mata uang, tujuan, dan jenis / *By currency, purpose, and type*

	31 Desember/ *December 31, 2023*		31 Desember/ *December 31, 2022*		
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Pihak berelasi (Catatan 39)					***Related parties (Note 39)***
Rupiah					***Rupiah***
Green Bond	720,000	712,944	720,000	728,784	*Green Bond*
FR0081	191,548	190,000	252,130	251,961	*FR0081*
FR0070	95,578	95,314	98,367	97,945	*FR0070*
FR0077	59,890	59,717	71,147	71,592	*FR0077*
FR0056	52,579	52,357	53,429	53,327	*FR0056*
FR0084	51,012	50,648	51,453	51,256	*FR0084*
FR0086	9,848	9,870	39,153	39,164	*FR0086*
FR0059	--	--	212,309	214,668	*FR0059*
FR0078	--	--	36,807	37,713	*FR0078*
FR0080	--	--	34,664	35,802	*FR0080*
FR0082	--	--	29,240	30,061	*FR0082*
FR0083	--	--	19,920	20,593	*FR0083*
FR0064	--	--	19,181	19,547	*FR0064*
FR0063	--	--	9,929	10,002	*FR0063*
	1,180,455	1,170,850	1,647,729	1,662,415	
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollar***
Indon 29 *New*	61,948	57,743	62,693	57,209	*Indon 29 New*
Indon 25	46,236	45,731	46,791	46,061	*Indon 25*
Indon 27 *New*	46,110	45,030	46,600	45,068	*Indon 27 New*
Indon 28 *New*	38,422	37,695	38,834	38,107	*Indon 28 New*
Indon 49 *New*	38,280	32,116	38,699	29,917	*Indon 49 New*
Indon 28	30,566	29,476	30,852	29,500	*Indon 28*
Indois 24 *New*	15,398	15,282	15,568	15,374	*Indois 24 New*
Indon 23 *New*	--	--	46,701	46,469	*Indon 23 New*
	276,960	263,073	326,738	307,705	
Total	**1,457,415**	**1,433,923**	**1,974,467**	**1,970,120**	***Total***

7. Efek-Efek (lanjutan) / *7. Securities (continued)*

a. Berdasarkan mata uang, tujuan, dan jenis (lanjutan) / *a. By currency, purpose, and type (continued)*

Efek-efek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Securities based on currencies are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*		31 Desember/ *December 31, 2022*		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Pihak berelasi (Catatan 39)					***Related party (Note 39)***
Rupiah					***Rupiah***
Obligasi Pemerintah	--	457,906	--	933,631	*Government Bonds*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	712,944	--	728,784	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	--	1,170,850	--	1,662,415	
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollar***
Obligasi Pemerintah	17,085,977	263,073	19,765,861	307,705	*Government Bonds*
Total	**17,085,977**	**1,433,923**	**19,765,861**	**1,970,120**	***Total***

Mutasi keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan/(penurunan) nilai wajar efek-efek dicatat sebagai bagian komponen ekuitas, sehingga LPEI mengakui keuntungan/(kerugian) tahun berjalan atas perubahan nilai wajar efek-efek, sedangkan penyesuaian reklasifikasi atas keuntungan/(kerugian) sudah termasuk dalam laba rugi.

Movements of unrealized gains/(losses) resulting from the increase/(decrease) in fair value of marketable securities is recorded as part of the equity component, and LPEI recognized current year gain/(losses) from changes in fair value of marketable securities, whreas reclassification adjustment on gains/(losses) are included in profit or loss.

	31 Desember / *December 31,*		
	2023	**2022**	
Saldo Awal	(3,391)	26,462	*Beginning balance*
Perubahan nilai wajar	(16,221)	(38,275)	*Changes in fair value*
Perubahan nilai wajar yang di reklasifikasi ke laba rugi	(2,924)	2	*Changes in fair value reclassifed to profit or loss*
Dampak pajak tangguhan	(956)	8,420	*Deferred tax impact*
Saldo Akhir	**(23,492)**	**(3,391)**	**Ending Balance**

Harga pasar efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya berkisar antara 83,44%-104,72% dan 76,87%-107,75% dari nilai nominal masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The market values of the fair value through other comprehensive income securities as of December 31, 2023 and 2022 ranged from 83.44%-104.72% and 76.87%-107.75% respectively, of the nominal amount.

7. Efek-Efek (lanjutan)

7. Securities (continued)

b. Berdasarkan penerbit, jatuh tempo, dan suku bunga

b. Based on issuer, maturity, and interest rate

	31 Desember/ *December 31, 2023*			
Penerbit	**Jenis/ *Types***	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date***	**Suku bunga kontrak per tahun/ *Contractual interest rate per annum***	***Issuer***
Pemerintah Negara Republik Indonesia				***The Government of the Republic of Indonesia***
FR0056	Obligasi/*Bond*	15 September/ *September 15, 2026*	8.375% tetap/*fixed*	*FR0056*
FR0070	Obligasi/*Bond*	15 Maret/ *March 15, 2024*	8.375% tetap/*fixed*	*FR0070*
FR0077	Obligasi/*Bond*	15 Mei/ *May 15, 2024*	8.125% tetap/*fixed*	*FR0077*
FR0081	Obligasi/*Bond*	15 Juni/ *June 15, 2025*	6.50% tetap/*fixed*	*FR0081*
FR0084	Obligasi/*Bond*	15 Februari/ *February 15, 2026*	7.25% tetap/*fixed*	*FR0084*
FR0086	Obligasi/*Bond*	15 April/ *April 15, 2026*	5.50% tetap/*fixed*	*FR0086*
Indois 24 *New*	Obligasi/*Bond*	20 Agustus/ *August 20, 2024*	3.90% tetap/*fixed*	*Indois 24 New*
Indon 25	Obligasi/*Bond*	15 Januari/ *January 15, 2025*	4.125% tetap/*fixed*	*Indon 25*
Indon 28	Obligasi/*Bond*	11 Januari/ *January 11, 2028*	3.50% tetap/*fixed*	*Indon 28*
Indon 27 *New*	Obligasi/*Bond*	18 Juli/ *July 18, 2027*	3.85% tetap/*fixed*	*Indon 27 New*
Indon 28 *New*	Obligasi/*Bond*	24 April/ *April 24, 2028*	4.10% tetap/*fixed*	*Indon 28 New*
Indon 29 *New*	Obligasi/*Bond*	18 September/ *September 18, 2029*	3.40% tetap/*fixed*	*Indon 29 New*
Indon 49 *New*	Obligasi/*Bond*	30 Oktober/ *October 30, 2049*	3.70% tetap/*fixed*	*Indon 49 New*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				***PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk***
Green Bond	Obligasi/*Bond*	21 Juni/ *June 21, 2025*	6.35% tetap/*fixed*	*Green Bond*

7. Efek-Efek (lanjutan)

7. Securities (continued)

b. Berdasarkan penerbit, jatuh tempo, dan suku bunga (lanjutan)

b. Based on issuer, maturity, and interest rate (continued)

Penerbit	Jenis/ *Types*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku bunga kontrak per tahun/ *Contractual interest rate per annum*	*Issuer*
		31 Desember/ *December 31, 2022*		
Pemerintah Negara Republik Indonesia (lanjutan)				***The Government of the Republic of Indonesia (continued)***
FR0056	Obligasi/*Bond*	15 September/ *September 15, 2026*	8.375% tetap/*fixed*	*FR0056*
FR0059	Obligasi/*Bond*	15 Mei/ *May 15, 2027*	7.00% tetap/*fixed*	*FR0059*
FR0063	Obligasi/*Bond*	15 Mei/ *May 15, 2023*	5.625% tetap/*fixed*	*FR0063*
FR0064	Obligasi/*Bond*	15 Mei/ *May 15, 2028*	6.125% tetap/*fixed*	*FR0064*
FR0070	Obligasi/*Bond*	15 Maret/ *March 15, 2024*	8.375% tetap/*fixed*	*FR0070*
FR0077	Obligasi/*Bond*	15 Mei/ *May 15, 2024*	8.125% tetap/*fixed*	*FR0077*
FR0078	Obligasi/*Bond*	15 Mei/ *May 15, 2029*	8.25% tetap/*fixed*	*FR0078*
FR0080	Obligasi/*Bond*	15 Juni/ *June 15, 2035*	7.50% tetap/*fixed*	*FR0080*
FR0081	Obligasi/*Bond*	15 Juni/ *June 15, 2025*	6.50% tetap/*fixed*	*FR0081*
FR0082	Obligasi/*Bond*	15 September/ *September 15, 2030*	7.00% tetap/*fixed*	*FR0082*
FR0083	Obligasi/*Bond*	15 April/ *April 15, 2040*	7.50% tetap/*fixed*	*FR0083*
FR0084	Obligasi/*Bond*	15 Februari/ *February 15, 2026*	7.25% tetap/*fixed*	*FR0084*
FR0086	Obligasi/*Bond*	15 April/ *April 15, 2026*	5.50% tetap/*fixed*	*FR0086*
Indois 24 *New*	Obligasi/*Bond*	20 Agustus/ *August 20, 2024*	3.90% tetap/*fixed*	*Indois 24 New*
Indon 23 *New*	Obligasi/*Bond*	11 Januari/ *January 11, 2023*	2.95% tetap/*fixed*	*Indon 23 New*
Indon 25	Obligasi/*Bond*	15 Januari/ *January 15, 2025*	4.125% tetap/*fixed*	*Indon 25*
Indon 28	Obligasi/*Bond*	11 Januari/ *January 11, 2028*	3.50% tetap/*fixed*	*Indon 28*
Indon 27 *New*	Obligasi/*Bond*	18 Juli/ *July 18, 2027*	3.85% tetap/*fixed*	*Indon 27 New*
Indon 28 *New*	Obligasi/*Bond*	24 April/ *April 24, 2028*	4.10% tetap/*fixed*	*Indon 28 New*
Indon 29 *New*	Obligasi/*Bond*	18 September/ *September 18, 2029*	3.40% tetap/*fixed*	*Indon 29 New*
Indon 49 *New*	Obligasi/*Bond*	30 Oktober/ *October 30, 2049*	3.70% tetap/*fixed*	*Indon 49 New*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				***PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk***
Green Bond	Obligasi/*Bond*	21 Juni/ *June 21, 2025*	6.35% tetap/*fixed*	*Green Bond*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek (lanjutan) / *7. Securities (continued)*

c. Berdasarkan peringkat / *c. By Rating*

Efek-efek yang dimiliki oleh LPEI pada 31 Desember 2023 dan 2022 memiliki peringkat sebagai berikut:

Securities held by LPEI as of December 31, 2023 and 2022 were rated as follows:

	Lembaga Pemeringkat/ Rating Agencies	Peringkat/Rating 31 Desember/December 31, 2023	2022	
Efek pemerintah	S&P	BBB	BBB	*Government Securities*
Green Bond BNI	Pefindo	idAAA	idAAA	*Green Bond BNI*

d. Berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

Klasifikasi jangka waktu efek-efek berdasarkan periode sisa umur jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The details of securities classified as to remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2023	2022	
Sampai dengan 5 tahun	1,344,064	1,701,171	*Up to 5 years*
Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	57,743	182,637	*More than 5 to 10 years*
Lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun	32,116	86,312	*More than 10 to 15 years*
Total	**1,433,923**	**1,970,120**	***Total***

e. Berdasarkan efek Pemerintah dan bukan Pemerintah / *c. By Government and non-Government securities*

Efek-efek yang dimiliki oleh LPEI pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Securities held by LPEI as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2023	2022	
Efek pemerintah	720,979	1,241,336	*Government securities*
Bukan efek pemerintah	712,944	728,784	*Non government securities*
Total	**1,433,923**	**1,970,120**	***Total***

f. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai / *f. By collectibility and allowance for impairment losses*

Seluruh efek-efek pada 31 Desember 2023 dan 2022 tidak mengalami penurunan nilai dan tergolong lancar.

All securities as of December 31, 2023 and 2022 are not impaired and are classified as current.

Cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah nihil.

Allowance for impairment losses on marketable securities as of December 31, 2023 and 2022 are nil, respectively.

7. Efek-Efek (lanjutan)

f. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 32.

g. Efek-efek yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat efek-efek yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

8. Tagihan dan Liabilitas Derivatif

LPEI menghadapi risiko pasar atas perubahan nilai tukar mata uang dan menggunakan instrumen derivatif untuk mengelola risiko tersebut. LPEI melakukan transaksi derivatif berupa kontrak berjangka mata uang asing *(forward* dan *swap)* dengan beberapa *counterparties* yang memungkinkan LPEI atau pihak lain untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Perjanjian *swap* mata uang merupakan kontrak antara dua pihak untuk pertukaran arus kas berdasarkan nilai nosional dan nilai tukar yang ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan, kontrak berjangka *forward* mata uang asing merupakan perjanjian untuk menjual sejumlah mata uang tertentu kepada pihak lain atau untuk membeli sejumlah mata uang tertentu dari pihak lain pada suatu tanggal di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Transaksi derivatif tersebut menimbulkan risiko pasar dan risiko kredit. Risiko pasar dari transaksi derivatif timbul sebagai akibat dari adanya fluktuasi nilai instrumen derivatif yang disebabkan adanya fluktuasi kurs mata uang asing, sedangkan risiko kredit timbul dalam hal pihak lain tidak dapat memenuhi liabilitasnya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kepada LPEI.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat instrumen derivatif LPEI yang memenuhi syarat sebagai transaksi lindung nilai untuk keperluan akuntansi. Oleh sebab itu, seluruh keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar dari transaksi derivatif ini diakui dalam laba rugi.

7. Securities (continued)

f. By collectibility and allowance for impairment losses (continued)

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets is disclosed in Note 32.

g. Securities pledged as collateral

There are no securities pledged as collateral as of December 31, 2023 and 2022.

8. Derivative Receivables and Payables

LPEI faces market risk with respect to changes in foreign currency exchange rates and thus, LPEI uses derivative instruments to manage this risk. LPEI enters into derivative transactions in the form of foreign currency forward contracts (forward and swap) with certain counterparties that allow LPEI to reduce the risk of fluctuations in foreign currency exchange rates.

Currency swap contract is a contract between two parties to exchange series of cash flows based on a predetermined notional value and exchange value. While, foreign currency forward contract is a covenant to sell a certain amount of currencies to other parties or to buy a certain amount of currencies from other parties in the future at a predetermined price.

Such derivative transactions result in market risk and credit risk. Market risk from derivative transactions arises as a result of fluctuation in the value of derivative instruments due to foreign currency fluctuation, while credit risk arises when the other parties fail to fulfill their obligations stated in the contracts with LPEI.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no derivatives which qualify as hedging instruments for accounting purposes. Therefore, all gains or losses resulting from fair value changes from these derivative transactions are recognized in profit or loss.

8. Tagihan dan Liabilitas Derivatif (lanjutan)

8. Derivative Receivables and Payables (continued)

a. Tagihan derivatif

Rincian tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Derivative receivables

The derivative receivables details as of December 31, 2023 is as follows:

31 Desember 2023	Nilai nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Tanggal efektif/ *Effective date*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity date*	Nilai wajar tagihan derivatif/ *Fair value of derivative receivables*	*December 31, 2023*
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollars***
***Swap* Beli**					***Swap Bought***
Pihak ketiga					*Third parties*
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	5,517	27 Desember/ *December 27, 2023*	29 Januari/ *January 29, 2024*	85	*PT Bank CIMB Niaga, Tbk*
Total tagihan derivatif				**85**	***Total derivative receivables***

Pada tanggal 31 Desember 2022, LPEI tidak memiliki tagihan derivatif.

As of December 31, 2022, there is no derivatives receivables.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dan mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 32.

Information with respect to classification of not impaired and impaired financial assets are disclosed in Note 32.

b. Liabilitas derivatif

Rincian liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

b. Derivative payables

The derivative payables details as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

31 Desember 2023	Nilai nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Tanggal efektif/ *Effective date*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity date*	Nilai wajar liabilitas derivatif/ *Fair value of derivative payables*	*December 31, 2023*
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollars***
***Swap* Beli**					***Swap Bought***
Pihak ketiga					*Third party*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	25,000,000	27 Desember/ *December 27, 2023*	3 Januari/ *January 3, 2024*	339	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	25,000,000	27 Desember/ *December 27, 2023*	3 Januari/ *January 3, 2024*	339	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
				678	
Forward Beli					***Forward Bought***
MUFG Bank, LTD	20,000,000	28 Desember/ *December 28, 2023*	3 Januari/ *January 3, 2024*	266	*MUFG Bank, LTD*
MUFG Bank, LTD	25,000,000	28 Desember/ *December 28, 2023*	4 Januari/ *January 4, 2024*	333	*MUFG Bank, LTD*
MUFG Bank, LTD	15,000,000	28 Desember/ *December 28, 2023*	3 Januari/ *January 3, 2024*	200	*MUFG Bank, LTD*
				799	
Total liabilitas derivatif				**1,477**	***Total derivatives liabilities***

8. Tagihan dan Liabilitas Derivatif (lanjutan)

8. Derivative Receivables and Payables (continued)

b. Liabilitas derivatif (lanjutan)

b. Derivative payables (continued)

31 Desember 2022	Nilai nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Tanggal efektif/ *Effective date*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity date*	Nilai wajar liabilitas derivatif/ *Fair value of derivative payables*	*December 31, 2022*
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollars***
***Swap* Beli**					***Swap Bought***
Pihak ketiga					*Third party*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	30,000,000	27 Desember/ *December 27, 2023*	29 Januari/ *January 29, 2024*	56	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Total liabilitas derivatif				**56**	***Total derivatives liabilities***

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables

a. Berdasarkan jenis, mata uang, dan kolektibilitas

a. By type, currency, and collectability

Informasi mengenai Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya berdasarkan jenis dan mata uang adalah sebagai berikut:

Information related Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables based on type and currency are as follows:

31 Desember 2023	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	*December 31, 2023*
Rupiah							***Rupiah***
Modal kerja	6,841,945	1,865,767	2,028,908	3,538,386	7,908,085	22,183,091	*Working capital*
Investasi	15,147,894	2,048,629	1,067,564	563,520	5,042,412	23,870,019	*Investment*
Konsumsi	126,223	--	--	--	--	126,223	*Consumption*
	22,116,062	3,914,396	3,096,472	4,101,906	12,950,497	46,179,333	
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollars***
Modal kerja	4,702,527	2,530,625	2,914,732	1,190,489	3,590,798	14,929,171	*Working capital*
Investasi	7,172,323	1,289,480	1,056,887	--	3,196,017	12,714,707	*Investment*
	11,874,850	3,820,105	3,971,619	1,190,489	6,786,815	27,643,878	
Total	33,990,912	7,734,501	7,068,091	5,292,395	19,737,312	73,823,211	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(738,014)	(3,150,258)	(4,972,408)	(4,036,005)	(19,737,312)	(32,633,997)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**33,252,898**	**4,584,243**	**2,095,683**	**1,256,390**	**--**	**41,189,214**	***Net***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis, mata uang, dan kolektibilitas (lanjutan)

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

a. By type, currency, and collectability (continued)

31 Desember 2022 / *December 31, 2022*	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah							***Rupiah***
Modal kerja	9,180,562	6,533,593	1,694,445	518,775	6,852,919	24,780,294	*Working capital*
Investasi	14,803,227	4,170,982	1,374,570	--	3,532,873	23,881,652	*Investment*
Konsumsi	137,544	--	--	--	--	137,544	*Consumption*
	24,121,333	10,704,575	3,069,015	518,775	10,385,792	48,799,490	
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollars***
Modal kerja	8,445,060	5,568,390	770,600	1,354,804	3,039,649	19,178,503	*Working capital*
Investasi	9,103,616	3,433,977	1,110,227	73,078	1,937,112	15,658,010	*Investment*
	17,548,676	9,002,367	1,880,827	1,427,882	4,976,761	34,836,513	
Total	41,670,009	19,706,942	4,949,842	1,946,657	15,362,553	83,636,003	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(524,562)	(3,786,963)	(1,629,374)	(785,287)	(11,156,763)	(17,882,949)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**41,145,447**	**15,919,979**	**3,320,468**	**1,161,370**	**4,205,790**	**65,753,054**	***Net***

Informasi mengenai Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

Information related Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables based on collectability are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*		31 Desember/ *December 31, 2022*		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Cadangan/ *Allowance*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Cadangan/ *Allowance*	
Individual	40,204,658	27,767,424	46,027,319	15,828,240	*Individual*
Kolektif:					*Collective:*
Lancar	24,360,623	300,512	27,570,104	334,610	*Current*
Dalam perhatian khusus	--	--	168,935	2,424	*Special mention*
Syariah:					*Sharia*
Lancar	3,495,425	34,954	4,409,681	44,097	*Current*
Dalam perhatian khusus	1,246,165	14,767	2,042,840	6,892	*Special mention*
Kurang lancar	--	--	617,580	97,393	*Substandard*
Diragukan	--	--	274,150	41,251	*Doubtful*
Macet	4,516,340	4,516,340	2,525,394	1,528,042	*Loss*
Total	**73,823,211**	**32,633,997**	**83,636,003**	**17,882,949**	***Total***

b. Berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas

b. By currency, economic sector, and collectability

Perincian pembiayaan dan piutang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Financing and receivables based on currencies are as follows:

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

b. Berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas (lanjutan)

b. By currency, economic sector, and collectability (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2023*		31 Desember/ *December 31, 2022*		
	Jumlah nasional Mata uang asing/ *Notional amont Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	Jumlah nasional Mata uang asing/ *Notional amont Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah	
Rupiah	--	46,179,333	--	48,799,490	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1,795,406,764	27,643,878	2,237,771,810	34,836,513	*United States Dollar*
Total		73,823,211		83,636,003	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(32,633,997)		(17,882,949)	*Allowance for Impairment Losses*
Neto		**41,189,214**		**65,753,054**	***Net***

Perincian pembiayaan dan piutang berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

Financing and receivables based on sector are as follows:

31 Desember 2023	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	*Total*	*December 31, 2023*
Rupiah							***Rupiah***
Perindustrian	6,744,491	1,537,908	2,525,998	2,886,123	6,879,784	20,574,304	*Manufacturing*
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	6,295,878	778,104	268,804	542,213	3,450,484	11,335,483	*Agriculture, haunting and agriculture services*
Konstruksi	1,023,191	750,056	--	--	68,175	1,841,422	*Construction*
Listrik, gas dan air	375,663	--	--	429,295	--	804,958	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	3,104,592	551,687	--	--	225,375	3,881,654	*Transportation, warehousing and communication*
Perdagangan, restoran dan hotel	856,754	2,987	11,070	244,275	932,246	2,047,332	*Trading, restaurants and hotels*
Jasa dunia usaha	2,362,906	--	--	--	441,647	2,804,553	*Business services*
Pertambangan	1,226,365	293,654	149,650	--	942,984	2,612,653	*Mining*
Jasa-jasa sosial/masyarakat	--	--	16,572	--	9,802	26,374	*Social, services/society*
Lain-lain	126,222	--	124,378	--	--	250,600	*Others*
	22,116,062	3,914,396	3,096,472	4,101,906	12,950,497	46,179,333	
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollars***
Perindustrian	6,329,215	1,369,345	1,765,913	509,878	5,842,827	15,817,178	*Manufacturing*
Pertambangan	2,994,838	1,477,770	1,809,847	--	454,807	6,737,262	*Mining*
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	515,731	931,969	176,985	246,171	34,624	1,905,480	*Agriculture, haunting and agriculture services*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	602,667	--	--	--	304,597	907,264	*Transportation, warehousing and communication*
Konstruksi	174,198	41,021	--	--	--	215,219	*Construction*
Perdagangan, restoran dan hotel	495,965	--	218,874	434,440	142,260	1,291,539	*Trading, restaurants and hotels*
Jasa dunia usaha	190,661	--	--	--	--	190,661	*Business services*
Listrik, gas dan air	376,097	--	--	--	--	376,097	*Electricity, gas and water*
Jasa-jasa sosial/masyarakat	--	--	--	--	7,700	7,700	*Social, services/society*
Lain-lain	195,478	--	--	--	--	195,478	*Others*
	11,874,850	3,820,105	3,971,619	1,190,489	6,786,815	27,643,878	
Total	33,990,912	7,734,501	7,068,091	5,292,395	19,737,312	73,823,211	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(738,014)	(3,150,258)	(4,972,408)	(4,036,005)	(19,737,312)	(32,633,997)	*Allowance for Impairment Losses*
Neto	**33,252,898**	**4,584,243**	**2,095,683**	**1,256,390**	**--**	**41,189,214**	***Net***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

b. Berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas (lanjutan)

b. By currency, economic sector, and collectability (continued)

31 Desember 2022	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	*Total*	*December 31, 2022*
Rupiah							***Rupiah***
Perindustrian	6,441,120	7,718,277	2,353,090	274,149	4,449,440	21,236,076	*Manufacturing*
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	5,470,001	1,374,305	548,777	--	3,126,938	10,520,021	*Agriculture, haunting and agriculture services*
Konstruksi	2,013,991	17,441	--	--	68,175	2,099,607	*Construction*
Listrik, gas dan air	873,294	434,818	--	--	--	1,308,112	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	3,244,521	563,476	126,004	--	162,700	4,096,701	*Transportation, warehousing and communication*
Perdagangan, restoran dan hotel	475,081	--	41,144	244,626	1,093,669	1,854,520	*Trading, restaurants and hotels*
Jasa dunia usaha	2,096,272	--	--	--	444,168	2,540,440	*Business services*
Pertambangan	3,236,822	469,861	--	--	1,030,902	4,737,585	*Mining*
Jasa-jasa sosial/masyarakat	130,919	--	--	--	9,800	140,719	*Social, services/society*
Lain-lain	139,312	126,397	--	--	--	265,709	*Others*
	24,121,333	10,704,575	3,069,015	518,775	10,385,792	48,799,490	
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollars***
Perindustrian	8,131,027	4,694,461	1,854,393	988,467	2,339,112	18,007,460	*Manufacturing*
Pertambangan	4,329,602	2,594,238	--	--	495,512	7,419,352	*Mining*
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	1,550,353	1,177,144	26,434	--	653,363	3,407,294	*Agriculture, haunting and agriculture services*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	459,759	409,111	--	--	314,197	1,183,067	*Transportation, warehousing and communication*
Konstruksi	834,078	41,681	--	--	342,750	1,218,509	*Construction*
Perdagangan, restoran dan hotel	734,585	85,732	--	439,415	145,024	1,404,756	*Trading, restaurants and hotels*
Jasa dunia usaha	312,893	--	--	--	679,019	991,912	*Business services*
Listrik, gas dan air	947,401	--	--	--	--	947,401	*Electricity, gas and water*
Jasa-jasa sosial/masyarakat	248,978	--	--	--	7,784	256,762	*Social, services/society*
	17,548,676	9,002,367	1,880,827	1,427,882	4,976,761	34,836,513	
Total	41,670,009	19,706,942	4,949,842	1,946,657	15,362,553	83,636,003	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(524,562)	(3,786,963)	(1,629,374)	(785,287)	(11,156,763)	(17,882,949)	*Allowance for Impairment Losses*
Neto	**41,145,447**	**15,919,979**	**3,320,468**	**1,161,370**	**4,205,790**	**65,753,054**	***Net***

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, lain-lain termasuk pembiayaan kepada karyawan.

As of December 31, 2023 and 2022, others include employee financing.

c. Berdasarkan pihak-pihak, jenis dan mata uang

c. By parties, type and currency

	31 Desember / *December 31*,		
	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 39)			*Related parties (Note 39)*
Modal kerja	3,242,925	7,073,007	*Working capital*
Investasi	6,419,887	6,455,970	*Investment*
Konsumsi	11,487	9,263	*Consumption*
	9,674,299	13,538,240	
Pihak ketiga			*Third parties*
Modal kerja	18,940,166	17,707,287	*Working capital*
Investasi	17,450,132	17,425,682	*Investment*
Konsumsi	114,736	128,281	*Consumption*
	36,505,034	35,261,250	
Total Rupiah	46,179,333	48,799,490	*Total Rupiah*

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

c. Berdasarkan pihak-pihak, jenis dan mata uang (lanjutan)

c. By parties, type and currency (continued)

	31 Desember / *December 31*,		
	2023	2022	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Pihak berelasi (Catatan 39)			*Related parties (Note 39)*
Modal kerja	442,825	323,920	*Working capital*
Investasi	395,107	904,646	*Investment*
	837,932	1,228,566	
Pihak ketiga			*Third parties*
Modal kerja	14,486,346	18,854,583	*Working capital*
Investasi	12,319,600	14,753,364	*Investment*
	26,805,946	33,607,947	
Total Dolar Amerika Serikat	27,643,878	34,836,513	*Total United States Dollar*
Total	73,823,211	83,636,003	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(32,633,997)	(17,882,949)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**41,189,214**	**65,753,054**	***Net***

d. Berdasarkan jangka waktu

d. By time period

	31 Desember / *December 31*,		
	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
Sampai dengan 1 tahun	6,884,333	7,553,023	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	2,459,546	4,790,712	*More than 1 up to 3 years*
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	5,896,174	6,768,753	*More than 3 up to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	30,939,280	29,687,002	*More than 5 years*
	46,179,333	48,799,490	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollars***
Sampai dengan 1 tahun	4,737,340	7,077,343	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	2,295,479	2,733,428	*More than 1 up to 3 years*
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	5,650,323	6,704,902	*More than 3 up to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	14,960,736	18,320,840	*More than 5 years*
	27,643,878	34,836,513	
Total	73,823,211	83,636,003	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(32,633,997)	(17,882,949)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**41,189,214**	**65,753,054**	***Net***

e. Berdasarkan periode sisa jatuh tempo

e. By remaining period to maturity

	31 Desember / *December 31*,		
	2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
Sampai dengan 1 tahun	11,009,358	12,179,107	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	4,131,004	7,314,575	*More than 1 up to 3 years*
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	8,360,918	7,973,338	*More than 3 up to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	22,678,053	21,332,470	*More than 5 years*
	46,179,333	48,799,490	

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

e. Berdasarkan periode sisa jatuh tempo (lanjutan)

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

e. By remaining period to maturity (continued)

	31 Desember / *December 31*,		
	2023	2022	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollars***
Sampai dengan 1 tahun	7,797,148	11,559,971	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	3,284,353	4,987,651	*More than 1 up to 3 years*
Lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun	8,662,826	6,701,866	*More than 3 up to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	7,899,551	11,587,025	*More than 5 years*
	27,643,878	34,836,513	
Total	73,823,211	83,636,003	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(32,633,997)	(17,882,949)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**41,189,214**	**65,753,054**	***Net***

f. Pembiayaan dan piutang syariah

Rincian pembiayaan dan piutang syariah pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

f. Sharia financing and receivables

As of December 31, 2023 and 2022, the details of sharia financing and receivables are as follows:

	31 Desember / *December 31*,		
	2023	2022	
Piutang *Murabahah*	680,478	1,603,302	*Murabahah receivables*
Pembiayaan *Musyarakah*	9,257,930	9,866,174	*Musyarakah financing*
Qardh	--	3,471	*Qardh*
Total	9,938,408	11,472,947	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,906,243)	(2,285,390)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**5,032,165**	**9,187,557**	***Net***

g. Pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus

LPEI memiliki Penugasan Khusus untuk melakukan pembiayaan ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 183/PMK.08/2021 yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2021 dan mencabut (PMK) No. 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus LPEI. Rincian pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

g. Financing and receivables National Interest Account

LPEI has National Interest Account (NIA) for export financing according to PMK No. 183/PMK.08/2021 dated December 14, 2021 and revoked PMK No. 198/PMK.08/2017 regarding NIA for LPEI. As of December 31, 2023 and 2022, the details of NIA financing and receivables, are as follows:

	31 Desember / *December 31*,		
	2023	2022	
Pembiayaan dan piutang konvensional	3,949,482	3,489,399	*Financing and receivables conventional*
Pembiayaan dan piutang syariah	1,269	3,227	*Financing and receivables sharia*
Total	3,950,751	3,492,626	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(62,713)	(48,775)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**3,888,038**	**3,443,851**	***Net***

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

g. Pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus (lanjutan)

Kolektibilitas pada seluruh pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

g. Financing and receivables National Interest Account (continued)

The collectibility for all of NIA financing and receivables as of December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Lancar	3,928,791	3,485,629	*Current*
Dalam perhatian khusus	10,891	--	*Special mention*
Kurang lancar	11,069	6,997	*Substandard*
Jumlah	3,950,751	3,492,626	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(62,713)	(48,775)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**3,888,038**	**3,443,851**	***Net***

Rincian pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus berdasarkan jenis dan mata uang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The details of NIA financing and receivables by type and currency as of December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember / *December 31*,		
	2023	**2022**	
Rupiah			***Rupiah***
Modal kerja	1,800,755	1,581,643	*Working capital*
Investasi	1,518,352	1,325,651	*Investment*
	3,319,107	2,907,294	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollars***
Modal kerja	631,644	585,332	*Working capital*
Total	3,950,751	3,492,626	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(62,713)	(48,775)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**3,888,038**	**3,443,851**	***Net***

Rincian pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus berdasarkan mata uang dan sektor ekonomi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The details of NIA financing and receivables by currency and economic sectors as of December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Rupiah			***Rupiah***
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	90,776	92,012	*Agriculture, hunting, and agriculture services*
Perdagangan, restoran dan hotel	75,284	58,260	*Trading, restaurants and hotel*
Perindustrian	709,304	654,719	*Industry*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	994,418	994,943	*Transportation, warehousing, and communication*
Jasa dunia usaha	1,449,325	1,107,360	*Business services*
	3,319,107	2,907,294	

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

g. Pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus (lanjutan)

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

g. Financing and receivables National Interest Account (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023	2022	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	85,271	35,625	*Agriculture, hunting, and agriculture services*
Perdagangan, restoran dan hotel	92,819	186,009	*Trading, restaurants and hotel*
Perindustrian	310,127	342,014	*Industry*
Konstruksi	143,427	21,684	*Construction*
	631,644	585,332	
Total	3,950,751	3,492,626	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(62,713)	(48,775)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**3,888,038**	**3,443,851**	***Net***

Suku bunga yang digunakan untuk seluruh pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus berkisar antara 0,10%-6,43% dan 0,10%-9,50% pada 31 Desember 2023 dan 2022. Seluruh pembiayaan dan piutang Penugasan Khusus yang diberikan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai dengan menggunakan metode individual dan kolektif.

Interest rate for all NIA financing and receivables ranged from 0.10%-6.43% and 0.10%-9.50%, as of December 31, 2023 and 2022, respectively. Allowance method for impairment losses for NIA financing and receivables are individual and collective.

h. Informasi signifikan lainnya

1. Kisaran suku bunga per tahun untuk pembiayaan dan piutang dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

h. Other significant information

1. *Range of annual interest rates for financing and receivables in Rupiah and United States Dollars are as follows:*

	31 Desember / *December 31* , 2023	2022	
Suku bunga kontrak			***Contractual interest rate***
Rupiah	0.00% - 14.00%	0.00% - 14.50%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0.00% - 11.09%	0.00% - 10.75%	*United States Dollars*
Suku bunga efektif			***Effective interest rate***
Rupiah	0.00% - 17.85%	0.00% - 23.57%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0.00% - 21.18%	0.00% - 20.09%	*United States Dollars*

2. Pembiayaan dan piutang dijamin dengan surat sanggup *(promissory note*), agunan yang diikat dengan hak tanggungan, piutang dagang, dan persediaan yang diikat secara fidusia ("*cessie*") dan jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh LPEI.

2. *Financing and receivables are secured by promissory notes, registered mortgages, trade receivables, and inventories pledged under a fiduciary transfer of ownership ("cessie") and by other guarantees generally accepted by LPEI.*

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

3. Jumlah pembiayaan dan piutang dalam bentuk sindikasi adalah sebesar Rp18.791.744 dan Rp22.214.901 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Keikutsertaan LPEI berkisar antara 3,33% sampai dengan 60,00% dan 4,17% sampai dengan 65,77% dari jumlah pembiayaan dan piutang sindikasi, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Risiko atas pembiayaan dan piutang sindikasi ditanggung secara proporsional di antara bank-bank yang berpartisipasi.

4. Pinjaman pegawai adalah pinjaman yang diberikan kepada pegawai dengan tingkat bunga sebesar 0% dan 4% per tahun yang ditujukan untuk pembelian rumah, kendaraan, dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun. Jumlah pinjaman pegawai adalah sebesar Rp126.223 dan Rp137.544 masing-masing pada 31 Desember 2023 dan 2022. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan.

   Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) diamortisasi sepanjang jangka waktu pembiayaan dengan menggunakan *Effective Interest Rate* (EIR).

   Besarnya biaya tersebut pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.621 dan Rp5.622 dibukukan sebagai bagian dari beban gaji dan tunjangan.

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

h. Other significant information(continued)

3. Total syndicated financing and receivables amounted to Rp18,791,744 and Rp22,214,901, as of December 31, 2023 and 2022, respectively. LPEI's share in syndicated financing and receivables ranged from 3.33% to 60,00% and 4.17% to 65.77% of the total syndicated financing and receivables as of December 31, 2023 and 2022, respectively. Risks from syndicated financing and receivables are shared proportionately among the participating banks.

4. Loans to employees which carry interest rates of 0% and 4% per annum are intended for the acquisition of houses, vehicles, and other necessities with terms ranging from 1 (one) year to 20 (twenty) years. Total loan to employees amounted to Rp126,223 and Rp137,544 as of December 31, 2023 and 2022, respectively. The loan principal and interest payments are collected through monthly payroll deductions.

The difference between the employee loan's interest rates and the Base Lending Rate (BLR) is amortized over of the term of the loan using Effective Interest Rate (EIR).

For the years ended December 31, 2023 and 2022, amortization of the difference amounted to Rp1,621 and Rp5,622, respectively, which is recorded as part of salaries and benefit expenses.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

5. Sebagai dampak dari penurunan modal LPEI pada laporan keuangan 31 Desember 2023, terdapat pelampauan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) sesuai POJK no. 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 93 ayat 1.

   Terkait dengan hal tersebut, LPEI telah melaporkan kepada OJK dan mempersiapkan beberapa rencana penyelesaian atas pelampauan BMPP tersebut dalam waktu 12 (dua belas) bulan, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   Pada 31 Desember 2022, tidak terdapat pemberian pembiayaan dan piutang, baik kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga, yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPP.

6. Perubahan nilai tercatat bruto pembiayaan yang diberikan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

5. As a result of the decrease in LPEI's capital in the financial statement as of December 31, 2023, there was an excess of Legal Lending Limit (LLL) in accordance with POJK no. 9/POJK.05/2022 concerning Supervision of Indonesian Export Financing Institutions Article 93 paragraph 1.

In this regard, LPEI has reported to the OJK and prepared several resolution plans for the LLL exceedance within 12 (twelve) months, namely in accordance with applicable regulations.

As of December 31, 2022, there were no financing and receivables, either to related parties or third parties, that breached or exceeded the LLL requirement.

6. The change in gross carrying amount on loans during the year are as follow:

	31 Desember/December *31, 2023*					
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	Syariah/ *Sharia*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	35,585,215	155,462	36,422,379	11,472,947	83,636,003	*Balance, beginning of the year*
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Perubahan ke tahap 2	(1,556,775)	1,556,775	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Perubahan ke tahap 3	(609,690)	--	609,690	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Total perpindahan antar tahapan	33,418,750	1,712,237	37,032,069	11,472,947	83,636,003	*Total transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(2,240,853)	(88,334)	(604,008)	(492,502)	(3,425,697)	*Net remeasurement of carrying value*
Aset baru	15,764,241	222,093	6,118,074	2,467,169	24,571,577	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(18,077,287)	(155,460)	(7,172,940)	(3,122,317)	(28,528,004)	*Asset derecognized or repaid*
Penghapusbukuan	--	--	(1,802,483)	(378,774)	(2,181,257)	*Write-offs*
Penyesuaian mata uang asing	(65,673)	(12,452)	(163,171)	(8,115)	(249,411)	*Foreign exchange adjustment*
Saldo akhir	**28,799,178**	**1,678,084**	**33,407,541**	**9,938,408**	**73,823,211**	***Ending balance***

	31 Desember/*December 31, 2022*					
	Tahap/ *Stage 1*	Tahap/ *Stage 2*	Tahap/ *Stage 3*	Syariah/ *Sharia*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	39,366,913	307,212	31,857,533	12,431,504	83,963,162	*Balance, beginning of the year*
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Perubahan ke tahap 2	(86,808)	86,808	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Perubahan ke tahap 3	(3,663,691)	(76,658)	3,740,349	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Total perpindahan antar tahapan	(3,750,499)	10,150	3,740,349	--	--	*Total transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(5,120,080)	(178,148)	1,374,192	(284,153)	(4,208,189)	*Net remeasurement of carrying value*
Aset baru	19,526,043	--	800,202	1,132,898	21,459,143	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(15,163,881)	--	(1,577)	(2,033,609)	(17,199,067)	*Asset derecognized or repaid*
Penghapusbukuan	--	--	(2,677,039)	--	(2,677,039)	*Write-offs*
Penyesuaian mata uang asing	726,719	16,248	1,328,719	226,307	2,297,993	*Foreign exchange adjustment*
Saldo akhir	**35,585,215**	**155,462**	**36,422,379**	**11,472,947**	**83,636,003**	***Ending balance***

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Analisis atas perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

The changes in the allowance for impairment losses on financing and receivables are as follows:

	31 Desember/December *31, 2023*					
	Tahap/ *Stage 1*	**Tahap/ *Stage 2***	**Tahap/ *Stage 3***	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	748,063	9,531	14,839,964	2,285,391	17,882,949	*Beginning balance*
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Perubahan ke tahap 2	(186,328)	186,328	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Perubahan ke tahap 3	(73,991)	--	73,991	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Total perpindahan antar tahapan	(260,319)	186,328	73,991	--	--	*Total transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(23,738)	478,336	12,001,528	2,669,222	15,125,348	*Net remeasurement of carrying value*
Aset baru	198,514	70,632	2,751,133	484,983	3,505,262	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(252,158)	(9,531)	(1,249,349)	(152,922)	(1,663,960)	*Asset derecognized or repaid*
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	(77,382)	539,437	13,503,312	3,001,283	16,966,650	*Total (reverse)/addition current year*
Penghapusbukuan	--	--	(1,802,483)	(378,774)	(2,181,257)	*Write-offs*
Penyesuaian mata uang asing	(1,161)	(323)	(31,204)	(1,657)	(34,345)	*Foreign exchange adjustment*
Saldo akhir	**409,201**	**734,973**	**26,583,580**	**4,906,243**	**32,633,997**	***Ending balance***

	31 Desember/*December* 31, 2022					
	Tahap/ *Stage 1*	**Tahap/ *Stage 2***	**Tahap/ *Stage 3***	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	1,429,066	51,595	13,771,318	2,696,204	17,948,183	*Beginning Balance*
- Perubahan ke tahap 1	--	--	--	--	--	*Transfer to stage 1 -*
- Perubahan ke tahap 2	(96)	96	--	--	--	*Transfer to stage 2 -*
- Perubahan ke tahap 3	(203,624)	(29,514)	233,138	--	--	*Transfer to stage 3 -*
Total perpindahan antar tahapan	(203,720)	(29,418)	233,138	--	--	*Total transfer within stages*
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(305,780)	(13,290)	2,678,247	(477,460)	1,881,717	*Net remeasurement of carrying value*
Aset baru	153,047	--	300,911	13,307	467,265	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya/dilunasi	(339,521)	--	(1,424)	(23,053)	(363,998)	*Asset derecognized or repaid*
Total (pembalikan)/pembentukan tahun berjalan	(492,254)	(13,290)	2,977,734	(487,206)	1,984,984	*Total (reverse)/addition current year*
Penghapusbukuan	--	--	(2,677,039)	--	(2,677,039)	*Write-offs*
Penyesuaian mata uang asing	14,971	644	534,813	76,393	626,821	*Foreign exchange adjustment*
Saldo akhir	**748,063**	**9,531**	**14,839,964**	**2,285,391**	**17,882,949**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah, dan piutang lainnya.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from on uncollectible financing and receivables, financing and receivables sharia, and other receivable.

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi dari cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan dan piutang berdasarkan kelompok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

The table below shows the reconciliation of allowance for impairment losses for financing and receivables by class for the years ended December 31, 2023 and 2022:

	31 Desember/ *December 31, 2023*				
	Modal Kerja/ *Working Capital*	**Investasi/ *Investment***	**Konsumsi/ *Consumption***	**Total**	
Saldo awal per 1 Januari	11,347,475	6,535,014	460	17,882,949	*Beginning balance as of January 1*
Pembentukan penyisihan tahun berjalan (Catatan 26)	11,300,106	5,665,708	836	16,966,650	*Provision for impairment losses during the year (Note 26)*
Penghapusbukuan	(1,768,745)	(412,512)	--	(2,181,257)	*Written-off*
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	(11,801)	(22,544)	--	(34,345)	*Foreign exchange translation adjustment*
Saldo per 31 Desember 2023	**20,867,035**	**11,765,666**	**1,296**	**32,633,997**	***Balance as of December 31, 2023***
Mengalami penurunan nilai secara individual	19,143,319	8,624,105	--	27,767,424	*Individual impairment*
Mengalami penurunan nilai secara kolektif	58,511	240,705	1,296	300,512	*Collective impairment*
Syariah	1,665,205	2,900,856	--	4,566,061	*Sharia*
Saldo per 31 Desember 2023	**20,867,035**	**11,765,666**	**1,296**	**32,633,997**	***Balance as of December 31, 2023***
Jumlah bruto dari pembiayaan yang mengalami penurunan nilai secara individu	**25,449,014**	**14,755,644**	--	**40,204,658**	***Gross amount of financing determined to be individually impaired***

	31 Desember/ *December 31, 2022*				
	Modal Kerja/ *Working Capital*	**Investasi/ *Investment***	**Konsumsi/ *Consumption***	**Total**	
Saldo awal per 1 Januari	12,392,015	5,556,006	162	17,948,183	*Beginning balance as of January 1*
Pembentukan penyisihan tahun berjalan (Catatan 26)	1,087,853	896,833	298	1,984,984	*Provision for impairment losses during the year (Note 26)*
Penghapusbukuan	(2,539,543)	(137,496)	--	(2,677,039)	*Written-off*
Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	407,150	219,671	--	626,821	*Foreign exchange translation adjustment*
Saldo per 31 Desember 2022	**11,347,475**	**6,535,014**	**460**	**17,882,949**	***Balance as of December 31, 2022***
Mengalami penurunan nilai secara individual	10,531,048	5,297,192	--	15,828,240	*Individual impairment*
Mengalami penurunan nilai secara kolektif	816,427	1,237,822	460	2,054,709	*Collective impairment*
Saldo per 31 Desember 2022	**11,347,475**	**6,535,014**	**460**	**17,882,949**	***Balance as of December 31, 2022***
Jumlah bruto dari pembiayaan yang mengalami penurunan nilai secara individu	**29,435,314**	**16,592,004**	--	**46,027,318**	***Gross amount of financing determined to be individually impaired***

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

7. Jumlah pembiayaan dan piutang yang mengalami penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp40.204.658 dan Rp46.027.319 yang terdiri dari pembiayaan dan piutang dalam Rupiah masing-masing sebesar Rp25.143.199 dan Rp29.426.349 dan pembiayaan dan piutang dalam Dolar Amerika Serikat masing-masing sebesar Rp15.061.459 dan Rp16.600.970. LPEI telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang yang mengalami penurunan nilai/bermasalah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp27.767.424 dan Rp15.828.240.

8. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pembiayaan dan piutang yang direstrukturisasi oleh LPEI adalah Rp42.886.446 dan Rp48.417.257 serta cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan dan piutang tersebut, telah dibentuk oleh LPEI masing-masing sebesar Rp29.800.151 dan Rp14.304.164. Skema restrukturisasi kredit meliputi perpanjangan dan penjadwalan kembali jangka waktu kredit, penurunan suku bunga kredit dan skema restrukturisasi lain.

a. Pembiayaan dan piutang yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

7. As of December 31, 2023 and 2022, gross carrying amounts of total impaired financing and receivables amounted to Rp40,204,658 and Rp46,027,319, respectively, which consist of financing and receivables in Rupiah of Rp25,143,199 and Rp29,426,349, respectively, and financing and receivables in United States Dollars of Rp15.061.459 and Rp16,600,970, respectively. LPEI has provided allowance forimpairment losses on the impaired/non-performing financing and receivables amounting to Rp27,767,424 and Rp15,828,240 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

8. As of December 31, 2023 and 2022, the outstanding balance of financing and receivables which are restructured amounted to Rp42,886,446 and Rp48,417,257, respectively, and the related allowance for impairment losses provided by LPEI amounted to Rp29,800,151 and Rp14,304,164, respectively. Financing restructuring involves extension and rescheduling of loan maturity date, reduction of interest rate and other restructuring scheme.

a. Restructured financing and receivables by collectibility are as follows:

	31 Desember / *December 31*,		
	2023	**2022**	
Lancar	5,971,951	10,873,571	*Current*
Dalam perhatian khusus	6,985,581	19,706,941	*Special mention*
Kurang lancar	6,907,793	4,923,408	*Substandard*
Diragukan	5,292,395	1,946,657	*Doubtful*
Macet	17,728,726	10,966,680	*Loss*
Total	42,886,446	48,417,257	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(29,800,151)	(14,304,164)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**13,086,295**	**34,113,093**	***Net***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

b. Pembiayaan dan piutang yang direstrukturisasi berdasarkan jenis dan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

b. Restructured financing and receivables by type and collectibility are as follows:

31 Desember 2023 / *December 31, 2023*	Lancar / *Current*	Dalam perhatian khusus / *Special mention*	Kurang lancar / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total	
Modal kerja	1,839,083	3,647,473	4,784,013	4,728,875	9,624,103	24,623,547	*Working capital*
Investasi	4,132,868	3,338,108	2,123,780	563,520	8,104,623	18,262,899	*Investment*
Total	5,971,951	6,985,581	6,907,793	5,292,395	17,728,726	42,886,446	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(334,368)	(2,817,579)	(4,883,473)	(4,036,005)	(17,728,726)	(29,800,151)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**5,637,583**	**4,168,002**	**2,024,320**	**1,256,390**	--	**13,086,295**	***Net***

31 Desember 2022 / *December 31, 2022*	Lancar / *Current*	Dalam perhatian khusus / *Special mention*	Kurang lancar / *Substandard*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total	
Modal kerja	3,309,016	12,101,983	2,438,612	1,873,579	6,660,477	26,383,667	*Working capital*
Investasi	7,564,555	7,604,958	2,484,796	73,078	4,306,203	22,033,590	*Investment*
Total	10,873,571	19,706,941	4,923,408	1,946,657	10,966,680	48,417,257	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(210,807)	(3,786,963)	(1,612,073)	(785,287)	(7,909,034)	(14,304,164)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**10,662,764**	**15,919,978**	**3,311,335**	**1,161,370**	**3,057,646**	**34,113,093**	***Net***

9. Per tanggal 23 Juni 2022, OJK telah menerbitkan POJK No. 9 tahun 2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang menggantikan POJK No. 40 tahun 2015.

Dimana berdasarkan Pasal 55 No. 3, LPEI wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa membaik dengan menjaga agar nilai pembiayaan bermasalah berada pada level yang terkendali.

Rasio pembiayaan dan piutang yang diklasifikasikan NPF/NPL adalah sebagai berikut:

9. As of June 23, 2022, OJK has issued POJK No. 9 of 2022 concerning Supervision of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia which replaces POJK No. 40 of 2015.

Where based on Article 55 No. 3, LPEI is obliged to assess, monitor, and take the necessary steps so that asset quality always improves by keeping the value of non-performing financing at a controlled level.

Financing and receivables ratios classified as NPF/NPL are as follows:

	31 Desember / *December 31*, 2023	2022	
Rasio NPF bruto	43.48%	26.61%	*Gross NPF ratio*
Rasio NPF neto	4.54%	10.39%	*Net NPF ratio*

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Per 31 Desember 2023 dan 2022, ikhtisar pembiayaan dan piutang bermasalah berdasarkan sektor ekonomi dan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan PMK No. 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI adalah sebagai berikut:

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, a summary of non-performing financing and receivables based on economic sector and related allowance for impairment losses based on PMK No. 58/PMK.06/2020 regarding Development and Supervision of LPEI, is as follows:

31 Desember 2023 / ***December 31, 2023***

	Pembiayaan dan piutang bermasalah/ *Non-performing financing and receivables*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Rupiah			***Rupiah***
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	4,261,501	4,058,990	*Agriculture, hunting, and agriculture services*
Perdagangan, restoran dan hotel	1,187,592	1,157,460	*Trading, restaurants and hotel*
Perindustrian	12,291,905	10,653,341	*Industry*
Pertambangan	1,092,634	1,078,213	*Mining*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	225,375	225,375	*Transportation, warehousing, and communication*
Konstruksi	68,175	68,175	*Construction*
Jasa dunia usaha	441,647	441,647	*Business services*
Jasa-jasa sosial/masyarakat	26,372	19,299	*Social services/society*
Listrik, Gas, dan Air	429,295	353,081	*Electricity, gas and water*
Lain-lain	124,379	59,493	*Others*
	20,148,875	18,115,074	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	457,780	379,712	*Agriculture, hunting, and agriculture services*
Perdagangan, restoran dan hotel	795,575	678,357	*Trading, restaurants and hotel*
Perindustrian	8,118,618	7,316,374	*Industry*
Pertambangan	2,264,654	1,943,912	*Mining*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	304,597	304,597	*Transportation, warehousing, dan communication*
Jasa-jasa sosial/masyarakat	7,699	7,699	*Social services/society*
	11,948,923	10,630,651	
Total	**32,097,798**	**28,745,725**	***Total***

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

h. Other significant information (continued)

31 Desember 2022 / ***December 31, 2022***

	Pembiayaan dan piutang bermasalah/ *Non-performing financing and receivables*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Rupiah			***Rupiah***
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	3,675,715	1,953,395	*Agriculture, hunting, and agriculture services*
Perdagangan, restoran dan hotel	1,379,439	951,435	*Trading, restaurants and hotel*
Perindustrian	7,076,679	4,053,294	*Industry*
Pertambangan	1,030,902	753,691	*Mining*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	288,704	135,506	*Transportation, warehousing, and communication*
Konstruksi	68,175	37,439	*Construction*
Jasa dunia usaha	444,168	432,644	*Business services*
Jasa-jasa sosial/masyarakat	9,800	2,549	*Social services/society*
	13,973,582	8,319,953	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian	679,797	510,647	*Agriculture, hunting, and agriculture services*
Perdagangan, restoran dan hotel	584,439	320,993	*Trading, restaurants and hotel*
Perindustrian	5,181,972	2,834,990	*Industry*
Pertambangan	495,512	332,508	*Mining*
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	314,197	225,956	*Transportation, warehousing, dan communication*
Konstruksi	342,750	342,750	*Construction*
Jasa dunia usaha	679,019	679,019	*Business services*
Jasa-jasa sosial/masyarakat	7,784	4,608	*Social services/society*
	8,285,470	5,251,471	
Total	**22,259,052**	**13,571,424**	***Total***

10. Penghapusbukuan kredit macet

Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, LPEI melaksanakan penghapusbukuan kredit macet masing-masing sebesar Rp2.181.257 dan Rp2.677.039. Adapun kriteria debitur yang dapat dihapusbukukan meliputi:

a. Fasilitas kredit telah digolongkan macet;
b. Fasilitas kredit telah dibentuk dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 100% (seratus persen) dari pokok kredit macetnya;
c. Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan penyelamatan, namun tidak berhasil;

10. Writing off bad loans

For the years ending December 31, 2023 and 2022, LPEI has written off bad loans amounting to Rp2,181,257 and Rp2,677,039, respectively. The criteria for debtors that can be written off include:

a. The credit facility has been classified as loss;
b. The credit facility has been established with an Allowance for Impairment Losses (CKPN) of 100% (one hundred percent) of the principal for bad loans;
c. Several attempts at collection and rescue have been made, but to no avail;

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

d. Usaha debitur sudah tidak memiliki prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar; dan
e. Hapus buku dilakukan terhadap seluruh kewajiban kreditnya, termasuk yang berasal dari *non-cash loan* sehingga penghapusbukan tidak boleh dilakukan pada sebagian kreditnya (*partial write-off*).

11. Kredit yang dihapusbukukan dicatat di ekstra-komtabel. LPEI terus melakukan usaha-usaha penagihan atas kredit yang telah dihapusbukukan. Kredit ekstra-komtabel ini tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Ikhtisar mutasi kredit ekstra-komtabel untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

d. The debtor's business has no prospects or the debtor's performance is poor or there is no ability to pay; and
e. Write-offs are carried out on all of its credit obligations, including those originating from non-cash loans so that write-offs may not be made on a portion of its credit (partial write-off).

11. Write-off credits are recorded in the extra-committable. LPEI continues to make efforts to collect written-off loans. These extra-comtable credits are not presented in the consolidated statements of financial position. The summary of movements of extra-comtable credit for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/*December 31*		
	2023	***2022***	
Saldo awal per 1 Januari	2,791,496	37,800	*Beginning balance as of January 1*
Penghapusbukuan tahun berjalan	2,181,257	2,677,039	*Written-off current year*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan (*cash recoveries*)	(73,593)	(32,010)	*Receipt of credit that has been Written-off*
Lain-lain	(75,408)	108,667	*Others*
Saldo akhir	**4,823,752**	**2,791,496**	***Ending balance***

Lain-lain merupakan selisih kurs karena penjabaran mata uang asing, pencatatan kembali aset yang telah dihapusbuku dan lainnya.

12. Rasio pembiayaan dan piutang usaha kecil dan menengah terhadap total pembiayaan dan piutang LPEI yang mana tidak termasuk pembiayaan yang merupakan Penugasan Khusus pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar 18,37% dan 17,17%.

Others represent exchange differences due to translation of foreign currencies, re-recording of assets that have been written off and others.

12. The ratio of small medium enterprises financing and receivables to total financingand receivables of LPEI, which does not include loan under National Interest Account as of December 31, 2023 and 2022, are 18.37% and 17.17%, respectively.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

13. LPEI memiliki pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp77.457 dan Rp87.756. Fasilitas KURBE merupakan bentuk pembiayaan yang disediakan oleh LPEI untuk para pelaku usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor. KURBE diluncurkan untuk membantu para pelaku bisnis mikro, kecil, dan UMKM yang berorientasi ekspor dalam memperoleh akses pendanaan yang murah. LPEI telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan KURBE per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp73.488 dan Rp65.911.

14. Pembiayaan kepada PT Garuda Indonesia Airlines Tbk

    Berdasarkan ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang No. 02 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung program Ekspor nasional atas biaya Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait dengan penugasan khusus pelaksanaan program Ekspor nasional diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PMK No. 198/2017) yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan PMK 183/PMK.08/2021 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PMK No 183/2021).

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

13. LPEI has financing under Credit Export related to SME (KURBE) as of December 31, 2023 and 2022, amounting to Rp77,457 and Rp87,756, respectively. KURBE facility is a form of financing provided by LPEI for micro, small, and medium enterprises (SMEs) which are export-oriented. KURBE is launched to help the export-oriented micro, small, and SMEs in gaining access to low cost financing. LPEI has provided allowance for impairment losses on financing to KURBE amounting to Rp73,488 and Rp65,911, as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

14. Financing to PT Garuda Indonesia Airlines Tbk

Based on the provision of Article 18 of Law No. 02 Year 2009 of concerning Indonesian Export Financing Agency, LPEI may carry out special assignments from the Government to support the national Export program at the Government's expense. Further provisions regarding matters related to special assignments for the implementation of the national Export program are regulated by Regulation of Minister of Finance Number 198/PMK.08/2017 concerning Special Assignments to the Indonesian Export Financing Institution (Regulation of Minister of Finance No. 198/2017) which currently has been revoked and substituted with PMK 183/PMK.08/2021 concerning Special Assignment to the Indonesian Export Financing Institution (Regulation of Minister of Finance No 183/2021).

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Melalui PP No. 44 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI menerima PMN sebesar Rp2,5 triliun dengan alokasi Rp1,5 triliun untuk melaksanakan Penugasan Umum (peningkatan kapasitas usaha) dan Rp1 triliun untuk melaksanakan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) melalui Surat nomor S-427/MBU/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 menyampaikan usulan Program PKE Industri Penerbangan dan Komite PKE yang terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian sebagai anggota tetap melakukan penilaian melalui beberapa Rapat Teknis dan melaksanakan Rapat Pleno untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan atas usulan program PKE Industri Penerbangan yang telah disampaikan oleh KBUMN.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 428/KMK/08/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk mendukung Industri Penerbangan Indonesia, LPEI ditugaskan untuk menyediakan pembiayaan ekspor dengan alokasi Dana Penugasan Khusus (DPK) sebesar Rp1 triliun sesuai ketentuan pelaksanaan yang tercantum dalam KMK tersebut. Adapun jangka waktu penugasan atas PKE Industri Penerbangan ini telah berakhir di 31 Desember 2021.

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

Through Government Regulation No. 44 Year 2019 regarding Additional State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Equity of the Indonesian Export Financing Institution, LPEI receives State Equity Participation in the amount of Rp2.5 trillion with the allocation of Rp1.5 trillion to carry out General Assignment (increasing of business capacity) and Rp1 trillion to carry out the Export Special Assignment (PKE) program.

Ministry of State-Owned Enterprises by the Letter number S-427/MBU/06/2020 dated June 26, 2020 conveyed the proposed PKE Program for Aviation Industry and PKE Committee consisting of representatives of Ministry of Finance, Ministry of Trade, and Ministry of Industry as permanent members to conduct an assessment through several Technical Meetings and carry out Plenary Meetings to prepare recommendations that will be submitted to the Minister of Finance on the proposed PKE program for Aviation Industry that has been submitted by Ministry of State-Owned Enterprises.

Through Decree of Minister of Finance number 428/KMK/08/2020 dated September 23, 2020 concerning Special Assignment to LPEI to support the Indonesian Aviation Industry, LPEI is assigned to provide export financing with with the allocation of the Special Assignment Fund of Rp1 trillion in accordance with the implementation provisions contained in the Decree of Minister of Finance. The assignment period for this Aviation Industry PKE has ended on December 31, 2021.

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) melalui Surat nomor GARUDA/JKDZ/24610/2020 tanggal 25 September 2020 menyampaikan permohonan pembiayaan modal kerja PKE kepada LPEI. Terhadap permohonan GIAA tersebut, LPEI melakukan evaluasi pembiayaan berdasarkan *Feasibility Study* (FS) yang disusun oleh pihak independen.

LPEI dan GIAA melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor nomor 19 tanggal 6 Oktober 2020 di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito di Jakarta, dengan limit pembiayaan sebesar Rp1 triliun dan tujuan penggunaan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMKE) PKE sebagai berikut: (i) Tujuan Pembayaran Sewa Pesawat, (ii) Tujuan Pembayaran *Grounding Notice*, (iii) Tujuan Pembayaran *Direct Cost*, seperti : (1) biaya bahan bakar untuk Rute Penerbangan Internasional atau pengisian bahan bakar di luar wilayah Republik Indonesia; (2) biaya perawatan pesawat; (3) biaya sewa pesawat kepada *Lessor*; dan (4) biaya pelayanan pesawat dan bandara atas Rute Penerbangan Internasional.

Per 27 Juni 2022, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutus Homologasi atas PKPU dan Restrukturisasi GIAA berdasarkan Putusan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Juni 2022 antara GIAA dengan Para Kreditornya; dan menghukum GIAA dan seluruh krediturnya serta pihak–pihak yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Juni 2022 untuk tunduk dan mematuhi, serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut.

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) by the Letter number GARUDA/JKDZ/24610/2020 dated September 25, 2020 submitted an application for PKE working capital financing to LPEI. With respect to the GIAA application, LPEI conducted a financing evaluation based on the Feasibility Study (FS) prepared by an independent party.

LPEI and GIAA signed the Deed of Export Working Capital Credit Agreement number 19 dated October 6, 2020 before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito in Jakarta, with a financing limit of Rp1 trillion and the purpose of using the Working Capital Credit of National Interest Account facility for past-due payments to lessors in order to reduce rental costs or other benefits, payments to lessors for revocation of aircraft grounding notices as well as direct costs financing for costs operational as follows: (1) fuel costs for international routes or refueling outside the territory of the Republic of Indonesia; (2) aircraft maintenance costs; (3) aircraft rental cost to the Lessor; (4) aircraft and airport service fees for international flight routes.

As of June 27, 2022, the Central Jakarta Commercial Court has decided on the Homologation of PKPU and GIAA Restructuring based on Decision No. 425/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst by stating san and legally binding Settlement Agreement dated June 27, 2022 between GIAA and its Creditors; and punish GIAA and all of its creditors as well as the parties mentioned in the Settlement Agreement dated June 27, 2022 to comply with, comply with, and implement the contents of the Settlement Agreement.

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Per 31 Desember 2023, GIAA memiliki Fasilitas KMKE PKE dengan pembiayaan sebesar Rp994.418 sesuai dengan tujuan penggunaan dan melaksanakan kegiatan monitoring pemenuhan *covenant* debitur. LPEI telah melakukan kegiatan monitoring baik *onsite* dengan melakukan *site* visit ke lokasi usaha dan *offsite* berupa penyampaian laporan-laporan kepada Komite PKE.

Pelaksanaan pemberian KMKE PKE kepada GIAA pada tahun 2020 tersebut telah sesuai dengan PMK No. 198/2017 (yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan PMK No. 183/2021) dan ketentuan dalam KMK nomor 428/KMK/08/2020.

Per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 LPEI menghitung CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menggunakan metode arus kas yang didiskontokan dengan tingkat diskonto sebesar 0,1% (tingkat suku bunga setelah restrukturisasi) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-194/MK.08/2023 tentang Penetapan Penggunaan Asumsi Tingkat Diskonto Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Setelah Restrukturisasi Dalam Perhitungan CKPN.

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

As of December 31, 2023, GIAA has the Working Capital Credit of National Interest Account Facility with outstanding in the amount of Rp994,418 in accordance with the intended use and carried out monitoring activities for the fulfillment of debtor covenants. LPEI has carried out monitoring activities both onsite by conducting site visits to business locations and offsite in the form of submitting reports to the National Interest Account Committee.

The implementation of the granting of the Working Capital Credit of National Interest Account to GIAA in 2020 was in accordance with Regulation of Minister of Finance No. 198/2017 (which has now been revoked and substituted with Regulation of Minister of Finance No. 183/2021) and the provisions in Decree of Minister of Finance number 428/KMK/08/2020.

As of December 31, 2023 and 2022, LPEI calculate CKPN on financing for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk using the discounted cash flow method at a discount rate of 0.1% (interest rate after restructuring) based on a Letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Number S-194/MK.08/2023 concerning Determination of the Use of Discount Rates Assumption Based on Interest Rates After Restructuring in the Calculation of CKPN.

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

h. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah 3,94% (tingkat suku bunga sebelum restrukturisasi).

Perbandingan hasil perhitungan CKPN atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

h. Other significant information (continued)

According to the Indonesian Financial Accounting Standards, the discount rate assumption used in calculating the Allowance for Impairment Losses on financing for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk is 3.94% (interest rate before restructuring).

Comparison of the results of CKPN calculation on financing for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as of December 31, 2023 and 2022 based on the Letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia and Indonesian Financial Accounting Standards is as follows:

	2023		2022	
Keterangan/*Description*	Perhitungan CKPN berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia/ *Calculation of CKPN based on the Letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia*	Perhitungan CKPN berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia / *Calculation of CKPN based on the Indonesian Financial Accounting Standards*	Perhitungan CKPN berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia/ *Calculation of CKPN based on the Letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia*	Perhitungan CKPN berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia / *Calculation of CKPN based on the Indonesian Financial Accounting Standards*
Metode / *Methodology*	Arus kas yang didiskontokan / *Discounted cash flow*	Arus kas yang didiskontokan / *Discounted cash flow*	Arus kas yang didiskontokan / *Discounted cash flow*	Arus kas yang didiskontokan / *Discounted cash flow*
Asumsi tingkat diskonto / *Discount rate assumptions*	0.10%	3.94%	0.10%	3.94%
Laporan posisi keuangan/ *Statements of financial position*				
Jumlah/ *Total* CKPN	8,302	542,816	10,413	558,839
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain/ *Statement of profit or loss and other comprehensive income*				
(Pemulihan) Pembentukan beban CKPN / *(Recovery of) Provision of CKPN expense*	(2,111)	(16,023)	(359,308)	189,118

Per 31 Desember 2023 dan 2022, LPEI mengakui CKPN pada laporan posisi keuangan konsolidasian atas pembiayaan dalam rangka Penugasan Khusus yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp8.302 dan Rp10.413.

As of December 31, 2023 and 2022, LPEI recognised CKPN on the statement of consolidated financial position on financing for National Interest Account provided to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp8,302 and Rp10,413, respectively.

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah dan Piutang Lainnya (lanjutan)

i. Piutang Pembiayaan Garansi

Piutang pembiayaan garansi adalah pembayaran klaim oleh LPEI kepada PT Pertamina (Persero) atas *Refund Guarantee* sebesar USD22.654.767, dimana LPEI bertindak sebagai penjamin atas Bank Garansi yang diterbitkan untuk nasabah Konsorsium PT Anggrek Hitam dan PT High Speed Shipyard ("HSS") sebesar USD22.665.347 yang diterbitkan dari tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018. Konsorsium HSS telah gagal melaksanakan pekerjaan atas penyelesaian pembuatan kapal yang dipesan oleh PT Pertamina (Persero) secara tepat waktu, yaitu melewati tenggat waktu maksimal penyelesaian yang telah disepakati bersama pada tanggal 31 Juli 2018.

Pembayaran klaim kepada PT Pertamina (Persero) tersebut di atas berasal dari porsi retensi (yang menjadi bagian) LPEI atas klaim sebesar USD6.089.430, serta cash collateral sebesar USD1.743.757, dan sisanya ditanggung oleh Penjamin Ulang (Reguarantor), yaitu konsorsium PT Asuransi Central Asia, Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Asuransi Kredit Indonesia melalui skema penjaminan ulang dan kontra-bank garansi sebesar USD14.684.563.

Sehubungan dengan *recovery* atas klaim yang telah dibayarkan LPEI tersebut. HSS telah menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang sebesar USD20.911.010 kepada LPEI pada tanggal 5 November 2018 dengan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019 yang diperpanjang sampai 25 Mei 2024.

9. Financing and Receivables, and Financing and Sharia Receivables and Other Receivables (continued)

i. Guarantee Financing Receivables

Guarantee financing receivables are claims payments by LPEI to PT Pertamina (Persero) for a Refund Guarantee of USD22,654,767 where LPEI acts as guarantor of Bank Guarantees issued to Consortium customers PT Anggrek Hitam and PT High Speed Shipyard ("HSS") amounting USD22,665,347 issued from November 1, 2017 to August 24, 2018. The HSS Consortium has failed to carry out work on the completion of shipbuilding ordered by PT Pertamina (Persero) on time, i.e past the maximum agreed deadline for completion on July 31, 2018.

The payment of claims to PT Pertamina (Persero) above originates from the own retention portion (which is part of) LPEI claims amounting to USD6,089,430, and cash collateral amounting to USD1,743,757, and the balance reinsured by the Reinsurer (Reguarantor), namely PT Asuransi Central Asia Consortium, Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, and PT Asuransi Kredit Indonesia through a re-guarantee scheme and counter-bank aguarantee amounting to USD14,684,563.

Due to the recovery of claims that was paid by LPEI, HSS has signed a Debt Recognition Agreement amounting to USD20,911,010 with LPEI on November 5, 2018, with maturity date on September 30, 2019 which has been extended up to May 25, 2024.

9. Pembiayaan dan Piutang, Pembiayaan dan Piutang Syariah, dan Piutang Lainnya (lanjutan)

i. Piutang Pembiayaan Garansi (lanjutan)

Sesuai perjanjian kerjasama penutupan asuransi dan perjanjian pembagian pertanggungan penjaminan atas pembayaran yang diterima oleh LPEI dari HSS, LPEI akan mengembalikannya kepada para Penjamin Ulang sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh masing-masing Penjamin Ulang. LPEI mencatat liabilitas kepada Penjamin Ulang sebesar USD8.243 dan USD14.684.562 (bilangan penuh) atau ekuivalen dengan Rp126.931.790 (nilai penuh) dan Rp228.602 (dalam jutaan Rupiah) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 atas porsi risiko yang ditanggung oleh Penjamin Ulang tersebut.

9. Financing and Receivables, Sharia Financing and Receivables, and Other Receivables (continued)

i. Guarantee Financing Receivables (continued)

Referring to co-insurance agreement and co-guarantee agreement for payments received by LPEI from HSS, LPEI will share it to the Re-guarantor a portion of the risk covered by each Re-guarantor. LPEI records the reinsurance liability to the Re-Guarantee amounting to USD8,243 and USD14,684,562 (full amount) or equivalent with Rp126,931,790 (full amount) and with Rp228,602 (in million Rupiah) for the portion of the risk borne by the Reinsurer as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

10. Asuransi dan Penjaminan

a. Piutang asuransi dan penjaminan

10. Insurance and Guarantee

a. Insurance and guarantee receivables

	31 Desember / *December 31,*		
	2023	**2022**	
Rupiah			***Rupiah***
Piutang proteksi piutang dagang	494	194	*Trade receivable protection receivables*
Piutang asuransi kegagalan ekspor	67	65	*Export failure insurance receivables*
Piutang asuransi properti	--	13	*Property insurance receivables*
	561	272	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Piutang penjaminan-PEN	7,408	6,974	*Guarantee receivables - PEN*
Piutang proteksi piutang dagang	116	103	*Trade receivable protection receivables*
Piutang asuransi properti	--	3	*Export failure insurance receivables*
	7,524	7,080	
Total - neto	**8,085**	**7,352**	***Total - net***
Penjaminan			***Bank Guarantee***
Rupiah			***Rupiah***
Piutang penjaminan-PEN	66,974	281,637	*Guarantee receivables - PEN*
Subtotal	**66,974**	**281,637**	***Subtotal***
Total	**75,059**	**288,989**	***Total***

10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan) / *10. Insurance and Guarantee (continued)*

b. Aset reasuransi / *b. Reinsurance assets*

	31 Desember/*December 31,* 2023	2022	
Premi yang belum diakui sebagai pendapatan			***Unearned premium income***
Rupiah			***Rupiah***
Proteksi piutang dagang	104	111	*Trade receivable protection*
Asuransi kegagalan ekspor	14	31	*Failure on export insurance*
Mata uang asing			***Foreign currency***
Proteksi piutang dagang	2,114	2,353	*Trade receivable protection*
Asuransi kegagalan ekspor	17	--	*Failure on export insurance*
	2,249	2,495	
Estimasi klaim reasuransi			***Estimated reinsurance claim***
Rupiah			***Rupiah***
Proteksi piutang dagang	13	67	*Trade receivable protection*
Asuransi kegagalan ekspor	6	48	*Failure on export insurance*
Mata uang asing			***Foreign currency***
Proteksi piutang dagang	644	934	*Trade receivable protection*
Asuransi kegagalan ekspor	21	--	*Failure on export insurance*
	684	1,049	
Total	**2,933**	**3,544**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa estimasi klaim asuransi yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset reasuransi tersebut.

Management believes that the estimated reinsurance claims provided is adequate to cover losses on the reinsurance assets.

c. Liabilitas asuransi / *c. Insurance liabilities*

	31 Desember / *December 31,* 2023	2022	
Premi yang belum diakui sebagai pendapatan			***Unearned premium income***
Rupiah			*Rupiah*
Proteksi piutang dagang	194	210	*Trade receivable protection*
Asuransi kegagalan ekspor	27	60	*Failure on export insurance*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Proteksi piutang dagang	4,198	4,677	*Trade receivable protection*
Asuransi kegagalan ekspor	34	96	*Failure on export insurance*
	4,453	5,043	
Estimasi klaim asuransi			***Estimated insurance claim***
Rupiah			*Rupiah*
Proteksi piutang dagang	19	200	*Trade receivable protection*
Asuransi kegagalan ekspor	36	43	*Failure on export insurance*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Proteksi piutang dagang	2,117	2,563	*Trade receivable protection*
Asuransi kegagalan ekspor	47	112	*Failure on export insurance*
	2,219	2,918	
Total	**6,672**	**7,961**	***Total***

10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan) / *10. Insurance and Guarantee (continued)*

d. Pendapatan asuransi - neto / *d. Income from insurance – net*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pendapatan asuransi - bruto			*Income from insurance - gross*
Rupiah			*Rupiah*
Pendapatan premi bruto	1,069	1,854	*Gross written premiums*
Pendapatan komisi	138	308	*Commission income*
Pendapatan asuransi lainnya	--	99	*Other insurance income*
	1,207	2,261	
Mata uang asing			*Foreign currency*
Pendapatan premi bruto	16,859	17,193	*Gross written premiums*
Pendapatan komisi	2,545	2,649	*Commission income*
Pendapatan asuransi lainnya	1,064	1,026	*Other insurance income*
	20,468	20,868	
	21,675	23,129	
Premi reasuransi			*Reinsurance premiums*
Rupiah			*Rupiah*
Premi reasuransi	(555)	(1,187)	*Reinsurance premiums*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Premi reasuransi	(8,534)	(8,866)	*Reinsurance premiums*
	(9,089)	(10,053)	
Pendapatan dari asuransi - neto	**12,586**	**13,076**	***Income from insurance - net***

e. Beban klaim bruto asuransi dan beban asuransi lainnya / *e. Gross claim expense from insurance and other insurance expenses*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Beban klaim			***Claim expense***
Rupiah			***Rupiah***
Klaim reasuransi	--	1	*Reinsurance claims*
	--	1	
Beban asuransi lainnya			***Other insurance expense***
Rupiah	(124)	(104)	*Rupiah*
Mata uang asing	(809)	(891)	*Foreign currency*
Subtotal beban asuransi lainnya	(933)	(995)	*Subtotal Other insurance expense*
Beban klaim asuransi dan lainnya	**(933)**	**(994)**	***Claim and other insurance expense***

f. Pendapatan penjaminan / *f. Income from guarantee*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Rupiah	39,235	51,017	*Rupiah*
Mata uang asing	51,292	64,535	*Foreign currency*
Total	**90,527**	**115,552**	***Total***

10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan) / *10. Insurance and Guarantee (continued)*

g. (Penurunan)/kenaikan pada aset reasuransi - neto / *g. (Decrease)/increase in reinsurance assets – net*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Rupiah	(52)	(54)	*Rupiah*
Mata uang asing	(442)	957	*Foreign currency*
Total	**(494)**	**903**	***Total***

h. Penurunan/(kenaikan) pada liabilitas asuransi / *h. Decrease/(increase) in insurance liabilities*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Rupiah	237	177	*Rupiah*
Mata uang asing	822	(1,621)	*Foreign currency*
Total	**1,059**	**(1,444)**	***Total***

i. Informasi signifikan lainnya / *i. Other significant information*

Program Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional

Dampak dari Pandemi Covid-19 yang muncul di Indonesia sejak bulan Maret 2020 membuat Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (UU No. 2/2020). Pasal 11 Lampiran UU No. 2/2020 mengatur bahwa salah satu program yang dapat dilakukan untuk pemulihan ekonomi nasional adalah kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan Pemerintah.

Government Guarantee Program in the Context of National Economic Recovery

The impact of the Covid-19 Pandemic that has emerged in Indonesia since March 2020 has made the Government stipulated a Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability which has been approved by the House of Representatives (DPR) to be later ratified as Law No. 2 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law (Law No. 2/2020). Article 11 of Attachment to Law No. 2/2020 stipulates that one of the programs that can be carried out for national economic recovery is a guarantee activity with a scheme set by the Government.

10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)

i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Program Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (lanjutan)

Skema penjaminan sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 2/2020 pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP No. 23/2020) yang telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 23/2020 (PP No. 43/2020), dimana Pasal 18 ayat (1) PP No. 43/2020 mengatur bahwa dalam pelaksanaan penjaminan oleh Pemerintah, Pemerintah dapat menugaskan LPEI dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk melakukan Penjaminan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penjaminan sebagaimana dimaksud pada PP No. 43/2020 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan (PMK No. 98/2020) yang telah diubah kedua kali dengan PMK No. 27/PMK.08/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 (PMK No. 27/2022). Pasal 6 PMK No 98/2020 mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah, Menteri menugaskan LPEI untuk memberikan Penjaminan Pemerintah serta dapat menugaskan LPEI untuk melakukan Penjaminan Bersama dengan PT PII. Saat ini LPEI dan PT PII melalui PMK No. 27/PMK.08/2022 yang merupakan addendum dari PMK No. 98/PMK.08/2020 ditunjuk kembali menjadi badan usaha penjaminan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional sampai dengan Desember 2022.

10. Insurance and Guarantee (continued)

i. Other significant information (continued)

Government Guarantee Program in the Context of National Economic Recovery (continued)

The implementation of the guarantee scheme as stated in Law No. 2/2020 is further regulated in Government Regulation No. 23 of 2020 concerning Implementation of the National Economic Recovery Program in order to Support State Financial Policy for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and Saving the National Economy (Government Regulation No. 23/2020) which has been amended by Government Regulation No. 43 of 2020 concerning Amendment to Government Regulation No. 23/2020 (Government Regulation No. 43/2020), where Article 18 paragraph (1) of Government Regulation No. 43/2020 regulates that in the implementation of guarantee by Government, the Government may assign LPEI and/or PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) to carry out Guarantee.

Further provision regarding Guarantee Procedures as referred to in Government Regulation No. 43/2020 is regulated by Regulation of Minister of Finance No. 98/PMK.08/2020 regarding Government Guarantee Procedures for Corporate Business Players through Guarantee Business Entity (Regulation of Minister of Finance No. 98/2020) which has been amended two times by PMK No. 27/PMK.08/2022 *concerning the Second Amendment to the Minister of Finance Regulation of Minister of Finance No. 98/2020 (Regulation of Minister of Finance No 27/2022). Article 6 of Regulation of Minister of Finance No 98/2020 regulates that in order to implement Government Guarantee, the Minister assigns LPEI to provide Government Guarantee and may assign LPEI to cary out Joint Guarantee with PT PII. Currently LPEI and PT PII throught PMK No. 27/PMK.08/2022 which was addendum from PMK No. 98/PMK.08/2020 were reappointed to support the National Economic Recovery program until December 2022.*

10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)

i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Program Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (lanjutan)

Penugasan atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah tersebut kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 599/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada LPEI dalam Melaksanakan Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program PEN (KMK No. 599/2020).

Berdasarkan KMK No. 599/2020 tersebut, LPEI ditugaskan untuk memberikan penjaminan pemerintah kepada pelaku usaha dengan kriteria yang memenuhi strategi pembiayaan ekspor nasional. LPEI dapat memberikan penjaminan kepada pelaku usaha yang kriteria pelaku usahanya tidak dapat dijamin LPEI secara sendiri dan/atau kapasitas penjaminan LPEI mendekati batas maksimal sesuai peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan penjaminan bersama dengan PT PII, dengan ketentuan LPEI menanggung porsi retensi paling tinggi sebesar 49%. Pada pelaksanaannya atas Penjaminan bersama, LPEI menanggung porsi retensi sebesar 20%.

Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah oleh LPEI, pasal 11 PMK No. 98/2020 mengatur bahwa Pemerintah melalui Menteri dapat memberikan dukungan berupa *loss limit,* Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) *loss limit*. Dukungan berupa *loss limit* ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan Penjaminan Pemerintah pada kondisi tertentu yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah melalui Menteri dan LPEI.

10. Insurance and Guarantee (continued)

i. Other significant information (continued)

Government Guarantee Program in the Context of National Economic Recovery (continued)

The assignment for the implementation of Government Guarantee is then stipulated in Decree of Minister of Finance No. 599/KMK.08/2020 concerning Assignment to LPEI in Implementing Government Guarantees for Corporate Business Players in the Implementation of PEN Program (KMK No. 599/2020).

Based on the KMK No. 599/2020, LPEI assigned to provide government guarantee to business players with with criteria that meet the national export financing strategy. LPEI may provide guarantees to business players whose criteria for business actors cannot be guaranteed by LPEI itself and/or guarantee capacity of LPEI approaching the maximum limit in accordance with the laws and regulations by way of joint guarantee with PT PII, provided that LPEI bears the highest retention portion of 49%. In the implementation of Joint Guarantee, LPEI bears the retention portion of 20%.

In the context of implementing Government Guarantees by LPEI, Article 11 of PMK No. 98/2020 stipulates that the Government through Minister may provide support in the form of loss limits, State Equity Participation (PMN), and Payment Guarantee Service Fees (IJP) loss limits. Support in the form of loss limits is intended to limit the risk of LPEI in carrying out Government Guarantee assignments under certain conditions stipulated in the cooperation agreement between the Government through Minister and LPEI.

10. Asuransi dan Penjaminan (lanjutan)

i. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Program Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (lanjutan)

Lebih lanjut dukungan *loss limit* diatur dalam perjanjian kerjasama No. PRJ-291/PR/2020 dan 314/PKS/07/2020 antara Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) dengan LPEI bahwa dukungan *loss limit* diberikan dengan *threshold loss limit* sebesar 85% dari akumulasi IJP yang diterima.

Sebagai Penjamin dalam pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, LPEI telah menerima PMN sebesar Rp5.000.000. Penyertaan modal negara ini merupakan bagian dari dana penugasan khusus dalam melaksanakan penugasan Penjaminan Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha penjaminan LPEI dan sebagai likuiditas yang dapat digunakan untuk pembayaran ketika terjadi klaim. Tujuan penggunaan PMN tersebut akan ditetapkan kembali ketika pertanggungan Penjaminan Pemerintah telah berakhir. Pelaksanaan program Penjaminan Pemerintah berakhir pada tanggal 17 Desember 2022 dengan masa pertanggungan Penjaminan Pemerintah akan berlangsung sampai dengan tanggal 16 Desember 2025.

10. Insurance and Guarantee (continued)

i. Other significant information (continued)

Government Guarantee Program in the Context of National Economic Recovery (continued)

Furthermore, loss limit support is regulated in the cooperation agreement No. PRJ-291/PR/2020 and 314/PKS/07/2020 between the Ministry of Finance through the Director General of Risk Financing Management (DJPPR) and LPEI that loss limit support is provided with a threshold loss limit of 85% of accumulated IJP received.

As a guarantor in the implementation of government guarantees, LPEI has received a PMN in the amount of Rp5,000,000. This state equity participation is part of the special assignment fund in carrying out Government Guarantee assignments with the aim of increasing the LPEI guarantee business capacity and as liquidity that can be used for payments when claims occur. The purpose of using the State Equity Participation will be redefined when the Government Guarantee coverage has ended. The implementation of the Government Guarantee program ends on December 17, 2022 with the period of coverage of the Government Guarantee will last until December 16, 2025.

	31 Desember/*December 31*		
	2023	***2022***	
Outstanding Penjaminan			*Guarantee Outstanding*
Penjaminan Sendiri oleh LPEI	2,078,965	2,291,574	*Self-Guarantee by LPEI*
Penjaminan bersama PT PII	1,073,970	1,405,675	*Joint Guarantee with PT PII*
Total	**3,152,935**	**3,697,249**	***Total***

Program Penjaminan Pemerintah yang dilakukan oleh LPEI, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Government Guarantee Program implemented out by LPEI, is in accordance with applicable regulations.

11. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi / *Acceptances Receivable and Payable*

a. Berdasarkan mata uang, jatuh tempo, dan hubungan / *By currency, maturity, and relationship*

Perincian tagihan dan liabilitas akseptasi berdasarkan mata uang, jatuh tempo, dan hubungan adalah sebagai berikut:

Acceptance's receivable and payable based on currencies, maturity, and relationship are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*		31 Desember/ *December 31, 2022*		
	Tagihan akseptasi/ *Acceptances receivable*	Liabilitas akseptasi/ *Acceptances payable*	Tagihan akseptasi/ *Acceptances receivable*	Liabilitas akseptasi/ *Acceptances payable*	
Rupiah					***Rupiah***
Pihak ketiga					*Third parties*
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	7,599	7,599	--	--	*More than 1 up to 3 months*
Lebih dari 3 sampai 6 bulan	--	--	3,425	3,425	*More than 3 up to 6 months*
	7,599	7,599	3,425	3,425	
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollars***
Pihak ketiga					*Third parties*
Sampai dengan 1 bulan	--	--	3,592	3,592	*Up to 1 month*
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	42,719	42,719	80,031	80,031	*More than 1 up to 3 months*
Lebih dari 3 sampai 6 bulan	103,534	103,534	64,113	64,113	*More than 3 up to 6 months*
	146,253	146,253	147,736	147,736	
Total	153,852	153,852	151,161	151,161	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(622)	--	(244)	--	*Allowance for impairment losses*
Neto	**153,230**	**153,852**	**150,917**	**151,161**	***Net***

Perincian tagihan akseptasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Acceptances receivable based on currencies are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*		31 Desember/ *December 31, 2022*		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional Amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional Amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	
Rupiah		7,599		3,425	***Rupiah***
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	9,498,803	146,253	9,490,006	147,736	*United States Dollar*
Total		153,852		151,161	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai		(622)		(244)	*Allowance for impairment losses*
Neto		**153,230**		**150,917**	***Net***

11. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (lanjutan) / *11. Acceptances Receivable and Payable (continued)*

b. Tagihan dan liabilitas akseptasi Penugasan Khusus

Tagihan dan liabilitas akseptasi Penugasan Khusus per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah Rp3.391 dan Rp3.592.

b. Acceptances receivable and payable - National Interest Account

Acceptances receivable and payable - National Interest Account as of December 31, 2023 and 2022, are Rp3,391 and Rp3,592, respectively.

c. Berdasarkan kolektibilitas dan cadangan kerugian penurunan nilai

Seluruh tagihan akseptasi yang dimiliki LPEI diklasifikasikan lancar dan tahap 1 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Manajemen LPEI berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai tagihan akseptasi.

c. By collectibility and allowance for impairment losses

As of December 31, 2023 and 2022, all LPEI acceptances receivable are classified as current and stage 1.

LPEI management believes that the allowance for impairment losses provided is adequate to cover any possible impairment on acceptance receivables.

12. Biaya Dibayar Dimuka / *12. Prepaid Expenses*

	31 Desember / *December 31,* 2023	2022	
Asuransi	11,537	7,617	*Insurance*
Sistem	7,723	6,846	*System*
Sewa	174	72	*Rent*
Profesional	397	351	*Professional*
Telekomunikasi	325	243	*Telecommunication*
Keanggotaan	302	265	*Membership*
Total	**20,458**	**15,394**	***Total***

13. Aset Tetap / *13. Premises and Equipment*

	31 Desember/ *December 31, 2023*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Cost***
Pemilikan langsung						***Acquisition***
Gedung	1,148,616	--	--	--	1,148,616	*Building*
Peralatan dan perlengkapan kantor	334,105	993	--	31,822	366,920	*Office furnitures and fixtures*
Kendaraan bermotor	7,351	--	--	--	7,351	*Motor vehicles*
	1,490,072	993	--	31,822	1,522,887	

13. Aset Tetap (lanjutan) / *13. Premises and Equipment (continued)*

	31 Desember/ *December 31, 2023*					
	Saldo awal/ ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	
Aset dalam penyelesaian	16,548	17,732	(1,615)	(31,822)	843	*Construction in progress*
Aset hak guna						***Right of use asset***
Gedung	13,967	3,834	--	--	17,801	*Building*
Kendaraan bermotor	4,891	--	--	--	4,891	*Motor vehicles*
Total	1,525,478	22,559	(1,615)	--	1,546,422	*Total*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Gedung	244,081	58,980	--	--	303,061	*Building*
Peralatan dan perlengkapan kantor	269,439	39,099	--	--	308,538	*Office furnitures and fixtures*
Kendaraan bermotor	2,190	1,440	--	--	3,630	*Motor vehicles*
	515,710	99,519	--	--	615,229	
Aset hak guna						***Right of use asset***
Gedung	8,610	3,588	--	--	12,198	*Building*
Kendaraan bermotor	3,323	1,037	--	--	4,360	*Motor vehicles*
	527,643	104,144	--	--	631,787	
Nilai buku	**997,835**				**914,635**	***Book value***

	31 Desember/ *December 31, 2022*					
	Saldo awal/ ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deductions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	
Harga perolehan						***Cost***
Pemilikan langsung						***Acquisition***
Gedung	1,148,616	--	--	--	1,148,616	*Building*
Peralatan dan perlengkapan kantor	307,661	2,676	(60)	23,828	334,105	*Office furnitures and fixtures*
Kendaraan bermotor	7,351	--	--	--	7,351	*Motor vehicles*
	1,463,628	2,676	(60)	23,828	1,490,072	
Aset dalam penyelesaian	39,554	4,208	(3,386)	(23,828)	16,548	*Construction in progress*
Aset hak guna						***Right of use asset***
Gedung	16,177	5,851	(8,061)	--	13,967	*Building*
Kendaraan bermotor	5,828	405	(1,342)	--	4,891	*Motor vehicles*
Total	1,525,187	13,140	(12,849)	--	1,525,478	*Total*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Gedung	186,650 #	57,431	--	--	244,081	*Building*
Peralatan dan perlengkapan kantor	223,749 #	45,750	(60)	--	269,439	*Office furnitures and fixtures*
Kendaraan bermotor	744 #	1,446	--	--	2,190	*Motor vehicles*
	411,143	104,627	(60)	--	515,710	
Aset hak guna						***Right of use asset***
Gedung	8,367	3,842	(3,599)	--	8,610	*Building*
Kendaraan bermotor	2,252	1,071	--	--	3,323	*Motor vehicles*
	421,762	109,540	(3,659)	--	527,643	
Nilai buku	**1,103,425**				**997,835**	***Book value***

13. Aset Tetap (lanjutan) / *13. Premises and Equipment (continued)*

Beban penyusutan yang dibebankan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, adalah masing-masing sebesar Rp104.144 dan Rp109.540 (Catatan 27).

The depreciation expense for the years ended December 31, 2023 and 2022, amounted to Rp104,144 and Rp109,540, respectively (Note 27).

Rincian aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Details of construction in progress as of December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*			
	Total	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion*	
Aset dalam penyelesaian	843	10.00%	April/ *April* 2025	*Construction in progress*

	31 Desember/ *December 31, 2022*			
	Total	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion*	
Aset dalam penyelesaian	16,548	95.97%	Juni/ *June* 2023	*Construction in progress*

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp274.363 dan Rp114.750.

As of December 31, 2023 and 2022, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and are still in use amounted to Rp274,363 and Rp114,750.

Selama tahun 2023 dan 2022, LPEI telah melakukan penjualan aset tetap dengan harga perolehan masing-masing sebesar Nihil dan Rp60.

During the year 2023 and 2022, LPEI has sold fixed asset with acquisition cost amounting to Nil and Rp60.

Aset tetap diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan pihak ketiga. Pada 31 Desember 2023 dan 2022, LPEI menggunakan PT Asuransi Central Asia dengan nilai pertanggunan sebesar Rp6.540 dan Rp7.315, PT BRI Insurance sebesar Rp50 dan PT Askrindo dengan nilai pertanggungan sebesar Rp147.149. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Premises and equipment are covered by insurance against fire and other risks under certain package policies issued by third parties. As of December 31, 2023 and 2022, LPEI has obtained insurance coverage from PT Asuransi Central Asia with sum insured amounting to Rp6,540 and Rp7,315, PT BRI Insurance amounting to Rp50 and PT Askrindo with sum insured amounting to Rp147,149. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover losses arising from insured premises and equipment.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Based on Management's assessment, there are no events or changes in circumstances which may indicate any impairment in the value of premises and equipment as of December 31, 2023 and 2022.

13. Aset Tetap (lanjutan)

LPEI menyewa beberapa aset termasuk gedung kantor, rumah dinas, dan kendaraan. Rata-rata masa sewa berdasarkan kontrak yang dimiliki LPEI adalah 2,5 tahun. Pada 31 Desember 2023 dan 2022, LPEI memiliki sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset bernilai rendah sebesar Rp19.030 dan Rp22.829 yang dicatat sebagai beban umum dan administrasi. LPEI menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa bernilai rendah untuk sewa tersebut.

13. Premises and Equipment (continued)

LPEI leases several assets including office buildings, official houses, and vehicles. The average lease period based on the contracts held by LPEI is 2.5 years. As of December 31, 2023 and 2022, LPEI also has certain leases with lease terms of 12 months or less and leases of low value assets amounting Rp19,030 and Rp22,829 which are recorded as general and administrative expenses. LPEI applies exemptions a license for short term leases and low value leases for these leases.

14. Aset Lain-lain

14. Other Assets

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Rupiah			***Rupiah***
Bunga yang masih akan diterima:			*Accrued interest receivable:*
Penempatan pada bank	5,808	21,151	*Placements with banks*
Efek-efek	7,557	11,804	*Securities*
Uang muka	7,606	9,098	*Advances*
Agunan yang diambil alih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp149.806 pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp149.399 pada 31 Desember 2022	2,305	2,712	*Foreclosed assets, net of allowance for impairment losses of Rp149,806 as of December 31, 2023 and Rp149,399 as of December 31, 2022*
Uang jaminan	878	880	*Refundable deposits*
Lain-lain	2,845	5,349	*Others*
	26,999	50,994	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bunga yang masih akan diterima:			*Accrued interest receivable:*
Penempatan pada bank	355	418	*Placements with banks*
Efek-efek	3,545	4,235	*Securities*
Uang muka	800	--	*Advances*
Lain-lain	4,901	3,377	*Others*
	9,601	8,030	
Total	**36,600**	**59,024**	***Total***

Termasuk di dalam lain-lain adalah dana talangan masing-masing sebesar Rp12.312 dan Rp13.409 pada 31 Desember 2023 dan 2022. CKPN masing-masing sebesar Rp12.312 dan Rp8.003 pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Include in others is bailout amounting to Rp12,312 and Rp13,409 as od December 31, 2023 and 2022. CKPN amounting to Rp12,312 and Rp8,003 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

15. Perpajakan

15. Taxes

a. Pajak di bayar di muka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Pajak penghasilan badan			***Corporate income tax***
Tahun 2021	--	865	*Year 2021*
Total	**--**	**865**	***Total***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Perpajakan (lanjutan)

Pada tahun 2022 terdapat saldo pajak dibayar di muka sebesar Rp865. Pada tanggal 4 Mei 2023, pajak dibayar di muka Rp865 telah dikembalikan kepada LPEI oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pemeriksaan Pajak (lihat catatan 15 e.4)

15. Taxes (continued)

In 2022 prepaid tax balance is Rp865,- On May 4, 2023, prepaid tax has been returned to LPEI by Directorate General of Taxes through Tax Audit.(notes 15 e.4)

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember/*December 31*		
	2023	2022	
LPEI			***LPEI***
PPh Pasal 21	5,445	5,988	*Income Tax Article 21*
PPh Pasal 22	1	1	*Income Tax Article 22*
PPh Pasal 23	624	154	*Income Tax Article 23*
PPh Pasal 26	8,012	4,769	*Income Tax Article 26*
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2,173	353	*Value Added Tax (VAT)*
PPh Pasal 4(2)	24	2	*Income Tax Article 4(2)*
Total	**16,279**	**11,267**	***Total***

c. Beban pajak / *c. Tax expense*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	2022	
Pajak tangguhan	(1,583,663)	(1,222,189)	*Deferred tax*
Beban pajak	**(1,583,663)**	**(1,222,189)**	***Tax expense***

Rekonsiliasi antara (rugi)/laba sebelum beban pajak, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

A reconciliation between (loss)/profit before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the period ended December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	2022	
Rugi sebelum beban pajak	(16,530,664)	(1,892,365)	*Loss before tax expense*
Perbedaan waktu:			*Timing differences:*
Penyisihan/(pembalikan) cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif untuk pembiayaan dan piutang dan pembiayaan/piutang syariah	2,902,193	(956,499)	*Provision for/(reversal of) impairment losses on earning assets for financing and receivables and sharia financing/receivables*
Penyisihan imbalan kerja	(5,983)	(9,226)	*Provision for employee benefits*
Penyusutan aset tetap	7,151	10,269	*Depreciation of premises and equipment*
Estimasi klaim asuransi	(698)	297	*Estimated insurance claim*
Estimasi klaim penjaminan	(3,083)	651	*Estimated guarantee claim*
Penyisihan/cadangan kerugian piutang pembiayaan garansi	(40,703)	3,705	*Provision for/allowance for impairment guarantee financing receivables*
Penyisihan/cadangan kerugian piutang tresuri	(112)	(1,665)	*Provision for/allowance for impairment treasury*
Penyisihan/cadangan kerugian piutang akseptasi	378	(1,707)	*Provision for/allowance for impairment acceptance*
Penyisihan/cadangan kerugian aset lain-lain	4,308	--	*Provision for/allowance for other impairment lossess*
Penyisihan/cadangan kerugian penurunan nilai AYDA	407	126,989	*Provision for/allowance for losses on foreclosed assets*
Penyesuaian atas liabilitas sewa	3,943	--	*Adjustment on lease liabilities*
Penyesuaian atas aset hak guna	(4,625)	--	*Adjustment on right-of-use asset*
	2,863,176	(827,186)	

15. Perpajakan (lanjutan) / *15. Taxes (continued)*

c. Beban pajak (lanjutan) / *c. Tax expense (continued)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Perbedaan tetap:			*Permanent differences:*
Hubungan masyarakat	6,354	3,719	*Public relationship*
Jamuan dan representasi	3,323	1,014	*Representation and entertainment*
Kenikmatan pegawai	1,769	26,603	*Employees' benefits in kind*
Aktivitas karyawan	583	387	*Employee activities*
Lain-lain	7,396	16,553	*Others*
	19,425	48,276	
Penghasilan yang sudah dikenakan pajak final	(297,481)	(299,464)	*Income subject to final tax*
Rugi fiskal	(13,945,544)	(2,970,739)	*Fiscal loss*
Akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya			*Accumulated prior year's fiscal loss*
Tahun 2019	(4,740,685)	(4,740,685)	*Year 2019*
Tahun 2020	(334,775)	(334,775)	*Year 2020*
Tahun 2022	(2,970,739)	--	*Year 2022*
Akumulasi rugi fiskal	**(21,991,743)**	**(8,046,199)**	***Accumulated fiscal loss***

Pada tahun 2023 terdapat penambahan aset pajak tangguhan berupa penyesuaian atas liabilitas sewa dan penyesuaian aset sewa guna usaha berdasarkan amandemen PSAK 46 yang berlaku 1 Januari 2023 paragraf 98 L.

In 2023 there will be additional deferred tax assets in the form of adjustments to lease liabilities and adjustments to leased assets based on amendments to PSAK 46 which came into effect on January 1, 2023 paragraph 98 L.

Pajak atas laba sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang mungkin muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba dalam jumlah sebagai berikut:

The tax on profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Rugi sebelum beban pajak	(16,530,664)	(1,892,365)	*Loss before tax expense*
Beban pajak penghasilan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	3,636,746	416,320	*Corporate income tax based on the prevailing tax rate*
Pengaruh pajak atas beda tetap pada tarif pajak yang berlaku	61,172	55,261	*Effect of tax on permanent differences with prevailing tax rate*
Penyisihan atas aset pajak tangguhan	(5,281,581)	(1,693,770)	*Allowance for deferred tax assets*
Beban pajak	**(1,583,663)**	**(1,222,189)**	***Tax expense***

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2022 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan LPEI kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). LPEI telah melaporkan SPT tahun 2022 kepada KPP pada tanggal 18 April 2023.

Estimated taxable income in 2022 is consistent with Annual Tax Return (SPT) for corporate income tax reported by LPEI to Tax Office (KPP). LPEI has reported its SPT fiscal year 2022 to the tax office on April 18, 2023.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

15. Perpajakan (lanjutan) / *15. Taxes (continued)*

d. Aset (liabilitas) pajak tangguhan neto / *d. Deferred tax asset (liabilities) net*

	31 Desember/ *December 31, 2023*				
	1 Januari/ *January 1*	Dibebankan ke laporan laba rugi/ *Charged to profit or loss*	Dikreditkan ke laporan (rugi) penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive (loss) income*	31 Desember/ *December 31*	
Liabilitas atas imbalan kerja	31,794	(1,316)	878	31,356	*Liability for employee benefits*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	1,465,643	638,483	--	2,104,126	*Allowance for impairment losses on earning assets*
Estimasi klaim penjaminan	2,107	(678)	--	1,429	*Estimated guarantee claim*
Laba yang belum direalisasi atau efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual - neto	955	--	4,212	5,167	*Unrealized gain on available-for-sale securities - net*
Estimasi klaim asuransi	642	(153)	--	489	*Estimated insurance claim*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain - lain	1,761	948	--	2,709	*Allowance for impairment losses on other receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang garansi	9,650	(8,955)	--	695	*Allowance for impairment losses on guarantee receivables*
Aset tetap	7,392	1,573	--	8,965	*Premises and equipment*
Cadangan kerugian penurunan nilai tresuri	112	(25)	--	87	*Allowance for impairment losses on treasury*
Cadangan kerugian penurunan nilai akseptasi	54	83	--	137	*Allowance for impairment losses on acceptacy*
Cadangan kerugian penurunan nilai AYDA	32,868	89	--	32,957	*Allowance for impairment losses on AYDA*
Penyesuaian atas liabilitas sewa	--	868	--	868	*Adjustment on lease liabilities*
Penyesuaian atas aset hak guna	--	(1,017)	--	(1,017)	*Adjustment on right-of-use asset*
Jumlah	**1,552,978**	**629,900**	**5,090**	**2,187,968**	***Total***
Penyisihan atas pajak tangguhan	**--**	**(2,213,563)**	**25,595**	**(2,187,968)**	***Allowance for deferred tax***
Neto	**1,552,978**	**(1,583,663)**	**30,685**	**--**	***Net***

	31 Desember/ *December 31, 2022*				
	1 Januari/ *January 1*	Dibebankan ke laporan laba rugi/ *Charged to profit or loss*	Dikreditkan ke laporan (rugi) penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive (loss) income*	31 Desember/ *December 31*	
Liabilitas atas imbalan kerja	34,689	(2,029)	(866)	31,794	*Liability for employee benefits*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	1,676,073	(210,430)	--	1,465,643	*Allowance for impairment losses on earning assets*
Estimasi klaim penjaminan	1,964	143	--	2,107	*Estimated guarantee claim*
Laba yang belum direalisasi atau efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual - neto	(7,465)	--	8,420	955	*Unrealized gain on available-for-sale securities - net*
Estimasi klaim asuransi	577	65	--	642	*Estimated insurance claim*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain - lain	1,761	--	--	1,761	*Allowance for impairment losses on other receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang garansi	8,835	815	--	9,650	*Allowance for impairment losses on guarantee receivables*
Aset tetap	5,132	2,260	--	7,392	*Premises and equipment*
Rugi fiskal	1,040,210	(1,040,210)	--	--	*Fiscal loss*
Cadangan kerugian penurunan nilai tresuri	487	(375)	--	112	*Allowance for impairment losses on treasury*
Cadangan kerugian penurunan nilai akseptasi	420	(366)	--	54	*Allowance for impairment losses on acceptacy*
Cadangan kerugian penurunan nilai AYDA	4,930	27,938	--	32,868	*Allowance for impairment losses on AYDA*
Neto	**2,767,613**	**(1,222,189)**	**7,554**	**1,552,978**	***Net***

Pada akhir tahun 2023 Manajemen melakukan penilaian kembali Aset Pajak Tangguhan dan membentuk penyisihan atas aset pajak tangguhan sebesar (Rp2.187.968).

At the end of 2023, Management reassessed Deferred Tax Aset recoverability and established Allowance for Deferrred Tax Asets (Rp2,187,968).

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak

1. Surat keputusan DJP PPh 25/29 tahun pajak 2010

LPEI mengajukan permohonan restitusi lebih bayar tahun pajak 2010 sebesar Rp124.075. Dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 00013/406/10/093/12 tanggal 26 April 2012, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan pengembalian kepada LPEI sebesar Rp52.240.

Selisih antara permohonan restitusi lebih bayar tahun pajak 2010 dengan SKP disebabkan karena koreksi cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan dan piutang tahun pajak 2010 sebesar Rp71.835.

LPEI telah mengajukan permohonan keberatan dan banding sebesar Rp71.835 terkait cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan dan piutang yang diperbolehkan untuk dibiayakan.

Pada tanggal 30 Maret 2015, LPEI menerima Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa pajak PPh Badan Tahun 2010 No. Put.59987/PP/M.IVB/15/2015 yang diumumkan tanggal 5 Maret 2015. Pengadilan Pajak Republik Indonesia mengabulkan seluruhnya permohonan banding LPEI atas SKPLB PPh Badan Tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut:

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment

Claims for tax refund

1. DGT decision letter Income Tax Article 25/29 fiscal year 2010

LPEI submitted the overpayment tax refund for fiscal year 2010 amounting to Rp124,075. In the Tax Assesment overpaid Letter No. 00013/406/10/093/12 dated April 26, 2012, the Directorate General of Taxation has decided the tax refund to LPEI amounting to Rp52,240.

The difference in the overpayment of tax refund for fiscal year 2010 with SKP is due to the correction of allowance of impairment losses financing and receivables in fiscal year 2010 amounting to Rp71,835.

LPEI has filed the tax objection and tax appeal amounting to Rp71,835 regarding the correction of allowance of impairment losses financing and receivables.

On March 30, 2015, LPEI has received copies of the Tax Court decision on corporate income tax year 2010 No. Put.59987/PP/M.IVB/15/2015 which was pronounced on March 5, 2015. Tax Court Republic of Indonesia granted the appeal of LPEI entirely on corporate income tax disputes in 2010, with details as follows:

Nomor Surat / *Letter Number*	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan/ *Tax Assesment Letter canceled by Tax Court*	Dana yang dikembalikan/ *Tax Refund*	Nomor keputusan pengadilan pajak/ *Tax Court Decision Number*
Put.59987/PP/M.IVB/15/2015	SKPLB PPh Badan Tahun 2010 Nomor 00013/406/10/093/12	75,508	Put.59987/PP/M.IVB/15/2015

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak

1. Surat keputusan DJP PPh 25/29 tahun pajak 2010 (lanjutan)

Pada tanggal 27 April 2015, LPEI telah menerima pengembalian dana dari kas negara sehubungan Putusan Pengadilan Pajak atas SKPLB PPh Badan tahun 2010 sebesar Rp75.508 (sebelumnya LPEI mencatat klaim atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp71.835). Selisih sebesar Rp3.673, diakui sebagai penghasilan lain-lain.

Pada tanggal 1 Juli 2016, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPh Badan tahun 2010 yang terdiri dari:

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund

1. DGT decision letter Income Tax Article 25/29 fiscal year 2010 (continued)

On April 27, 2015, LPEI has received a refund from the state treasury in respect of the Tax Court Decision on overpayment of 2010 Corporate Income Tax amounting to Rp75,508 (previously LPEI recorded Tax Return Claim amounting to Rp71,835). The difference of Rp3,673, has been recognized as other income.

On July 1, 2016, LPEI has received a letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Cases of Corporate Income Tax 2010 submitted by Directorat General of Taxes are:

Nomor Surat / *Letter Number*	**No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ *No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation***	**Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh *Pengadilan Pajak/Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court***	**Nomor keputusan pengadilan pajak/ *Tax Court Decision Number***
MPK-2119T/PAN.Wk/2016	S- 3566/PJ.07/2015	SKPLB PPh tahun 2010 No. 00013/406/10/093/12	59990/PP/M.IVB/16/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali yang dikirimkan melalui Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juli 2016.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan 31 Desember 2023, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Putusan Pengadilan Pajak PPh Badan tahun 2010.

In connection with the Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on July 28, 2016.

Until the date of completion of the financial statement as of December 31, 2023, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Case of Corporate Income Tax 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

2. Surat keputusan DJP PPN tahun pajak 2010

Pada tanggal 26 April 2012, LPEI telah menerima beberapa SKP dan STP PPN dengan total seluruhnya sebesar Rp34.283 dengan rincian sebagai berikut:

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

2. DGT decision letter VAT fiscal year 2010

On April 26, 2012, LPEI has received several TALs and TCL of VAT amounting to Rp34,283 as follows:

	Pokok/ *Principal* (Rp)	**Denda/ *Penalty* (Rp)**	
Tahun pajak 2010			*Fiscal year 2010*
SKP PPN Masa Januari 2010			*TAL PPN January 2010*
No. 00068/207/10/093/12	7,201	3,457	*No. 00068/207/10/093/12*
SKP PPN Masa Februari 2010			*TAL PPN February 2010*
No. 00069/207/10/093/12	5,433	2,608	*No. 00069/207/10/093/12*
SKP PPN Masa Maret 2010			*TAL PPN March 2010*
No. 00070/207/10/093/12	7,772	3,731	*No. 00070/207/10/093/12*
STP PPN Masa Januari 2010			*TCL PPN January 2010*
No. 00037/107/10/093/12	--	1,440	*No. 00037/107/10/093/12*
STP PPN Masa Februari 2010			*TCL PPN February 2010*
No. 00038/107/10/093/12	--	1,087	*No. 00038/107/10/093/12*
STP PPN Masa Maret 2010			*TCL PPN March 2010*
No. 00039/107/10/093/12	--	1,554	*No. 00039/107/10/093/12*
Total	**20,406**	**13,877**	***Total***

LPEI mengajukan keberatan dan banding atas penetapan SKPKB PPN tahun pajak 2010, karena atas pendapatan bunga dari pemberian pinjaman kepada debitur tidak terutang PPN sesuai UU PPN No. 18 tahun 2000.

LPEI appealed against the assesment of underpayment of VAT in fiscal year 2010, because the interest income from financing and receivables to debtors is not subject to VAT according to VAT Law No. 18 year 2000.

Pada tanggal 30 Maret 2015, LPEI menerima Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa pajak PPN masa pajak Januari 2010, Februari 2010, dan Maret 2010 dengan putusan mengabulkan seluruhnya permohonan banding LPEI atas SKPKB PPN masa Januari sampai dengan Maret 2010 dengan rincian sebagai berikut:

On March 30, 2015, LPEI has received the Tax Court decision on the dispute for VAT tax period in January 2010, February 2010, and March 2010 with the decision to approve entirely the appeal of LPEI on the tax Assesment over the period from January to March 2010 with the following details:

Nomor keputusan Pengadilan pajak	**Surat Ketetapan yang dibatalkan/ *Tax Assesment Letter canceled by Tax Court***	**Dana yang dikembalikan/ *Tax Refund***	**Nomor keputusan pengadilan pajak/*Tax court decision number***
	SKPKB PPN Masa Januari 2010		
59988/PP/M.IVB/16/2014	No. 00068/207/10/093/12	10,658	*59988/PP/M.IVB/16/2014*
	SKPKB PPN Masa Februari 2010		
59989/PP/M.IVB/16/2014	No. 00069/207/10/093/12	8,041	*59989/PP/M.IVB/16/2014*
	SKPKB PPN Masa Maret 2010		
59990/PP/M.IVB/16/2014	No. 00070/207/10/093/12	11,503	*59990/PP/M.IVB/16/2014*
Total		**30,202**	***Total***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

2. Surat keputusan DJP PPN tahun pajak 2010 (lanjutan)

Pada tanggal 27 April 2015, LPEI telah menerima pengembalian dana dari kas negara sehubungan pembatalan SKPKB PPN masa Januari sampai dengan Maret 2010 sebesar Rp30.202.

Sehubungan perkara sengketa pajak PPN masa Januari 2010, Februari 2010, dan Maret 2010 telah dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan pasal 34 Putusan Menteri Keuangan nomor PMK. 8/PMK.03/2013 maka, atas STP PPN secara otomatis akan dibatalkan secara jabatan oleh Kantor Pajak.

Pada tanggal 17 September 2015, LPEI menerima Surat Keputusan Pembatalan STP secara jabatan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan rincian sebagai berikut:

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

2. DGT decision letter VAT fiscal year 2010 (continued)

On April 27, 2015, the LPEI has received a refund from the state treasury in respect of the cancellation of SKPKB VAT the tax Assesment period from January to March 2010 amounting to Rp30,202.

In respect of past VAT tax dispute case in January 2010, February 2010, and March 2010 had been granted entirely by the Tax Court, then in accordance with article 34 of Decision of the Minister of Finance number PMK.8/PMK.03/2013, the sanction (STP) of Value Added Tax automatically canceled by the office of the Tax Office.

On September 17, 2015, LPEI has received a Letter of Cancellation of STP from Directorate General of Taxation with the following details:

Nomor Surat / *Letter Number*	Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan Pengadilan Pajak/ *(Tax Assesment Letter canceled by Tax Court)*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	*Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number*
Kep 1673/WPJ.19/2015 Tanggal 15-0902015	STP PPN Masa Januari 2010 No. 00037/107/10/093/12	1,440	*59988/PP/M.IVB/16/2014*
Kep-1674/WPJ.19/2015 Tanggal 15-09-2015	STP PPN Masa Februari 2010 No. 00038/107/10/093/12	1,087	*59989/PP/M.IVB/16/2014*
Kep-1675/WPJ.19/2015 Tanggal 15-09-2015	STP PPN Masa Maret 2010 No. 00039/107/10/093/12	1,554	*59990/PP/M.IVB/16/2014*
		4,081	

Pada tanggal 1 Juli 2016, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN tahun 2010 yang terdiri dari:

On July 1, 2016, LPEI has received a letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on tax dispute case in 2010 of VAT. The Judicial Review from Directorate General of Tax consists of:

Nomor Surat / *Letter Number*	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ *No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation*	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/ ***Tax Assesment** Letter cancelled by Tax Court*	*Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax court decision Number*
MPK-2116T/PAN.Wk/2016	S- 3563/PJ.07/2015	SKPKB PPN Masa Maret 2010 No. 00070/207/10/093/12	*59987/PP/M.IVB/15/2015*

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

2. Surat keputusan DJP PPN tahun pajak 2010 (lanjutan)

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang dikirimkan melalui Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juli 2016. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak atas kasus sengketa pajak PPh Badan dan PPN tahun 2010 yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tanggal 4 September 2017, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN Masa Pajak Februari 2010.

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

2. DGT decision letter VAT fiscal year 2010 (continued)

In connection with the above Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on July 28, 2016. Until the date of the finalization of this financial statements, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on tax dispute case of Corporate Income Tax and VAT in 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.

On September 4, 2017, LPEI has received letter from the Tax Court about Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Cases of VAT for Period February 2010.

Nomor Surat / *Letter Number*	No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ *No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation*	Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/ *Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court*	*Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number*
MPK-2118/PAN/2017	S- 3573/PJ.07/2015	SKPKB PPN Masa Februari 2010 No. 00069/207/10/093/12	59989/PP/M.IVB/16/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019.

Pada tanggal 20 Mei 2021, LPEI menerima Putusan Mahkamah Agung No. 477/B/PK/Pjk/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang memutuskan menolak Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak No. Put-59989/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak Februari 2010.

In connection with the Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on February 25, 2019.

On May 20, 2021, LPEI received Indonesia Supreme Court Decision No. 477/B/PK/Pjk/2021 dated March 18, 2021 and the Supreme Court has decided to refuse Judicial Review Directorate General of Taxation No. Put- 59989/PP/M.IVB/16/2015 dated March 5, 2015 regarding Tax Assesments Letter of VAT for the period Februari 2010.

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

2. Surat keputusan DJP PPN tahun pajak 2010 (lanjutan)

Pada tanggal 28 Januari 2019, LPEI menerima surat dari Pengadilan Pajak tentang Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali atas perkara sengketa pajak PPN Masa Pajak Januari 2010.

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

2. DGT decision letter VAT fiscal year 2010 (continued)

On January 28, 2019, LPEI received a letter from the Tax Court regarding the Notice of Review Application and Submission of Review Memory on the January 2010 VAT tax dispute case.

Nomor Surat / *Letter Number*	**No. Surat Peninjauan Kembali Direktorat Pajak/ *No. Judicial Review Letter of Directorate General of Taxation***	**Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak/*Tax Assesment Letter cancelled by Tax Court***	***Nomor keputusan pengadilan pajak/ Tax Court Decision Number***
MPK-2117/PAN.Wk/2019	S- 3574/PJ.07/2015	SKPKB PPN Masa Januari 2010 No. 00068/207/10/093/12	59988/PP/M.IVB/16/2015

Sehubungan dengan Surat Peninjauan Kembali diatas, LPEI telah memberikan jawaban berupa Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019.

In connection with the Judicial Review Letter, LPEI has provided an answer in the form of a Counter Memorandum which was submitted to the Supreme Court through the Tax Court on February 25, 2019.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, LPEI belum menerima Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas Putusan Pengadilan Pajak terhadap sengketa PPN Masa Januari dan Maret 2010.

Until the date of completion of the consolidated financial statements, LPEI has not received the Supreme Court Decision of the Judicial Review of Tax Court Decision on Tax Dispute Case of VAT January and March 2010 proposed by the Directorate General of Taxes.

3. Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan Tahun 2020

SPT Tahunan PPh badan tahun 2020 yang dilaporkan LPEI adalah SPT Lebih Bayar PPh Badan.

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 29 Desember 2021, LPEI menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak untuk seluruh jenis pajak tahun pajak 2020 dari Direktorat Jenderal Pajak.

3. The Result of 2020 Corporate Income Tax

Annual notification letter of corporate income tax year 2020 corporate income tax return reported by LPEI is an overpayment of corporate income tax.

Based on these, on December 29, 2021, LPEI received Tax Audit Letter for all types of tax for the 2020 tax year from the Directorate General of Taxes.

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

3. Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan Tahun 2020 (lanjutan)

Melalui Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tanggal 18 Mei 2022, Direktorat Jenderal Pajak mengabulkan permohonan lebih bayar LPEI tahun Pajak 2020 sebesar Rp75.806. Namun demikian pengembalian atas lebih bayar tersebut dikurangi dengan pembayaran kurang bayar pajak PPh pasal 22, pasal 23, final pasal 4 ayat (2) dan PPN Barang dan Jasa atas barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dengan jumlah pengurangan total Rp93 sehingga jumlah uang yang dikembalikan ke LPEI adalah sebesar Rp75.713. Sedangkan hasil pemeriksaan pajak tahun 2020 atas PPh pasal 21, 21 Final, 26, dan PPN Pemungut adalah SKP Nihil.

Pada tanggal 24 Juni 2022, LPEI menerima transfer dari kas negara atas pengembalian pajak PPh Badan tahun 2020 sebesar Rp75.713 setelah dikurangi utang pajak yang belum dibayar.

Hasil Pemeriksaan pajak PPh Badan Tahun 2020 dan Rugi fiskal tahun 2020 yang diakui Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

3. The Result of 2020 Corporate Income Tax (continued)

Based on the Tax Overpayment Assesment Letter dated May 18, 2022, The Directorate General of Taxation approved LPEI's Claim 2020 for the tax overpayment amounting Rp75,806. However, the tax overpayment was offset by the underpayment of income tax article 22, article 23, article final 4(2) and VAT on taxable intangible goods and services out of custom area with a total reduction of Rp93 so the amount transferred to LPEI Rp75,713. Whereas the results of 2020 tax audits article 21, 21 Final, 26, and VAT Collecting Tax are Zero Tax Assesment Letter.

On June 24, 2022, LPEI received transfer from Government Treasury for 2020 Corporate Income Tax refund amounting to Rp75,713 after deducting the unpaid tax debt.

The result of 2020 Tax Overpayment Assesment Letter Corporate Income Tax and 2020 Fiscal Loss recognized by Directorate General of Taxation as follow:

	Pengembalian Pajak/ *Tax Return*	**Rugi Fiskal/ *Fiscal Loss***	
Tahun Pajak 2020			*Fiscal Year 2020*
SKPLB PPh Badan			*TAL Tax Return*
No. 00037/406/20/093/22	75,806	(334,775)	*No. 00037/406/20/093/22*
Total	**75,806**	**(334,775)**	***Total***

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

4. Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan Tahun 2021

Pada tanggal 25 Agustus 2022, LPEI menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dengan No:S-881/KPP.1904/2022 untuk seluruh jenis pajak tahun pajak 2021 dari Direktorat Jenderal Pajak.

Melalui Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tanggal 04 April 2023, Direktorat Jenderal Pajak mengabulkan permohonan lebih bayar LPEI tahun Pajak 2021 sebesar Rp865. Namun demikian pengembalian atas lebih bayar tersebut dikurangi dengan pembayaran kurang bayar pajak, pasal 23, PPN Pemungut, PPN Barang dan Jasa atas barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean & pajak lain-lain dengan jumlah pengurangan total Rp57 sehingga jumlah uang yang dikembalikan ke LPEI adalah sebesar Rp808. Sedangkan hasil pemeriksaan pajak tahun 2020 atas PPh pasal 21, 21 Final, 22, 26 dan 4 ayat (2) adalah SKP Nihil.

Pada tanggal 04 Mei 2023, LPEI menerima transfer dari kas negara atas pengembalian pajak PPh Badan tahun 2020 sebesar Rp808 setelah dikurangi utang pajak yang belum dibayar.

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

4. The Result of 2021 Corporate Income Tax

On August 25, 2022, LPEI received Tax Audit Letter for all types of tax No: S-881/KPP.1904/2022 for the 2021 tax year from from the Directorate General of Taxes.

Based on the Tax Overpayment Assesment Letter dated April 04, 2023, The Directorate General of Taxation approved LPEI's Claim 2021 for the tax overpayment amounting Rp865. However, the tax overpayment was offset by the underpayment of income tax article 23, VAT Collecting Tax, VAT on taxable intangible goods and services out of custom area and other taxes with a total reduction of Rp57 so the amount transferred to LPEI Rp808. Whereas the results of 2020 tax audits article 21, 21 Final, 22, 26, and final 4(2) are Zero Tax Assesment Letter.

On May 04, 2023, LPEI received transfer from Government Treasury for 2020 Corporate Income Tax refund amounting to Rp808 after deducting the unpaid tax debt.

15. Perpajakan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Klaim atas kelebihan pembayaran pajak (lanjutan)

4. Hasil Pemeriksaan Pajak PPh Badan Tahun 2021 (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan pajak PPh Badan Tahun 2021 dan Laba fiskal tahun 2021 yang diakui Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

15. Taxes (continued)

e. Tax assesment (continued)

Claims for tax refund (continued)

4. The Result of 2021 Corporate Income Tax (lanjutan)

The result of 2021 Tax Overpayment Assesment Letter Corporate Income Tax and 2021 Fiscal Gain recognized by Directorate General of Taxation as follow:

	Pengembalian Pajak/ *Tax Return*	**Laba Fiskal/ *Fiscal Gain***	
Tahun Pajak 2021			*Fiscal Year 2021*
SKPLB PPh Badan			*TAL Tax Return*
No. 00010/406/21/093/23	865	342,362	*No. 00010/406/21/093/23*
Total	**865**	**342,362**	***Total***

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan

Rincian efek-efek utang yang diterbitkan berdasarkan tempat terdaftar adalah sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued

The details of debt securities issued based on listed country location are as follows:

	31 Desember / *December 31,*		
	2023	**2022**	
Dalam Negeri			***Domestic***
Rupiah	14,285,686	17,514,428	*Rupiah*
Luar negeri			***Overseas***
Dolar Amerika Serikat	7,695,627	7,776,244	*United States Dolar*
Total	**21,981,313**	**25,290,672**	***Total***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan) / *16. Debt Securities Issued (continued)*

Rincian efek-efek utang yang diterbitkan berdasarkan jenis dan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of debt securities issued based on type and currency are as follows:

	31 Desember / *December 31,*		
	2023	**2022**	
Nilai nominal			*Nominal value*
Rupiah			***Rupiah***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III - 2016			*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016*
Seri D	--	1,038,000	*Series D*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV - 2017			*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017*
Seri D	1,007,000	1,007,000	*Series D*
Seri E	1,266,000	1,266,000	*Series E*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V - 2017			*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017*
Seri C	1,706,000	1,786,000	*Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI - 2018			*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018*
Seri B	--	1,650,000	*Series B*
Seri C	206,000	206,000	*Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I - 2018			*Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018*
Seri B	--	35,000	*Series B*
Seri C	1,756,000	1,756,000	*Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II - 2018			*Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018*
Seri C	--	275,700	*Series C*
Seri D	1,324,000	1,324,000	*Series D*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III - 2018			*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018*
Seri C	--	28,000	*Series C*
Seri D	380,000	380,000	*Series D*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV - 2019			*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019*
Seri C	1,473,000	1,523,000	*Series C*
Seri D	278,000	278,000	*Series D*
Seri E	349,000	349,000	*Series E*
Seri F	625,000	625,000	*Series F*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V - 2019			*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019*
Seri C	315,000	330,000	*Series C*
Seri D	737,000	737,000	*Series D*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI - 2019			*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019*
Seri C	6,000	6,000	*Series C*
Seri D	714,500	714,500	*Series D*

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan) / *16. Debt Securities Issued (continued)*

	31 Desember / *December 31,* 2023	2022	
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII - 2019			*Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019*
Seri C	25,500	25,500	*Series C*
Seri D	112,000	112,000	*Series D*
Seri E	219,750	219,750	*Series E*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII - 2019			*Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019*
Seri B	1,551,000	1,551,000	*Series B*
Seri C	22,500	22,500	*Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020	--	48,000	*Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020*
	14,073,250	17,292,950	
Dikurangi:			*Less:*
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(8,564)	(13,522)	*Unamortized bonds issuance cost*
	(8,564)	(13,522)	
	14,064,686	17,279,428	
Sukuk Mudharabah			*Sukuk Mudharabah*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018			*Sukuk Mudharabah Phase II Shelf Registration Offering I - 2018*
Seri C	--	14,000	*Series C*
Seri D	155,000	155,000	*Series D*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019			*Sukuk Mudharabah Phase III Shelf Registration Offering I - 2019*
Seri C	66,000	66,000	*Series C*
	221,000	235,000	
Total Rupiah	**14,285,686**	**17,514,428**	***Total Rupiah***
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollars***
Obligasi berkelanjutan			*Continuous bonds*
EMTN Program IEB - 2017 (USD500.000.000)	7,698,500	7,783,750	*IEB EMTN Programme - 2017 (USD500,000,000)*
Diskonto obligasi yang belum diamortisasi	(1,221)	(2,742)	*Unamortized bonds discount*
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(1,652)	(4,764)	*Unamortized bonds issuance cost*
	(2,873)	(7,506)	
Total Dolar Amerika Serikat	**7,695,627**	**7,776,244**	***Total United States Dollars***
Neto	**21,981,313**	**25,290,672**	***Net***

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan) / *16. Debt Securities Issued (continued)*

Rincian efek-efek utang yang diterbitkan berdasarkan pihak-pihak: / *The details of debt securities issued based on parties:*

	31 Desember / *December 31,* 2023	2022	
Pihak berelasi (Catatan 39)			*Related parties (Note 39)*
Obligasi	3,990,000	4,967,000	*Bonds*
Sukuk Mudharabah	75,000	75,000	*Sukuk Mudharabah*
	4,065,000	5,042,000	
Pihak ketiga			*Third parties*
Obligasi	10,083,250	12,325,950	*Bonds*
Sukuk Mudharabah	146,000	160,000	*Sukuk Mudharabah*
European Medium Term Notes (EMTN)	7,698,500	7,783,750	*European Medium Term Notes (EMTN)*
	17,927,750	20,269,700	
Total	21,992,750	25,311,700	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Diskonto obligasi yang belum diamortisasi	(1,221)	(2,742)	*Unamortized bonds discount*
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(10,216)	(18,286)	*Unamortized bonds issuance cost*
	(11,437)	(21,028)	
Neto	**21,981,313**	**25,290,672**	***Net***

a. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 / *a. Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016*

Pada bulan November 2016, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.532.000 dengan rincian sebagai berikut: / *In November 2016, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 with a face value of Rp2,532,000, with details as follows:*

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III - 2016				***Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri A	672,000	2 Desember/ *December* 2017	7.15% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri B	540,000	22 November/ *November* 2019	7.85% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri C	282,000	22 November/ *November* 2021	8.20% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri D	1,038,000	22 November/ *November* 2023	8.50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 Series D*

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

a. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 (lanjutan)

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 November 2016. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D telah jatuh tempo dan dilunasi masing-masing pada tanggal 2 Desember 2017, 22 November 2019, 22 November 2021 dan 22 November 2023.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III – 2016 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 sebesar Rp4.093 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III 2016 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

16. Debt Securities Issued (continued)

a. Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 (continued)

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on November 23, 2016. Interest is payable quarterly starting on February 22, 2017.

Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 Series A, B, C, and D were fully paid upon maturity on December 2, 2017, November 22, 2019, November 22, 2021, and November 22, 2023, respectively.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III - 2016 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 were used to III-2016 finance earning productive assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 amounting to Rp4,093 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering III 2016 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

b. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017

Pada bulan Februari 2017, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp5.221.000, dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

b. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017

In February 2017, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 with a face value of Rp5,221,000, with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV - 2017				***Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri A	861,000	3 Maret/ *March* 2018	7.40% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri B	1,339,000	23 Februari/ *February* 2020	8.40% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri C	748,000	23 Februari/ *February* 2022	8.90% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri D	1,007,000	23 Februari/ *February* 2024	9.20% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series D*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri E	1,266,000	23 Februari/ *February* 2027	9.40% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III - 2017 Series E*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2017. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 23 Mei 2017.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on February 24, 2017. Interest is payable quarterly starting on May 23, 2017.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 Seri A, B, dan C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 Maret 2018, 23 Februari 2020, dan 23 Februari 2022.

Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on March 3, 2018, February 23, 2020, and February 23, 2022, respectively.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

b. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 (lanjutan)

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 sebesar Rp6.556 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV 2017 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

c. *Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank 2017*

Pada bulan April 2017, LPEI menerbitkan *Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank* – 2017 dengan nilai nominal sebesar USD500.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

b. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 (continued)

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 amounting to Rp6,556 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering III 2017 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

c. Indonesia Eximbank Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme 2017

In April 2017, LPEI issued the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme 2017 with a face value of USD500,000,000 with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Euro Medium Term Note (EMTN) *Programme Indonesia Eximbank* 2017 (nilai penuh)	USD500,000,000	6 April/ *April* 2024	3.875% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme - 2017 (full amount)*

EMTN *Programme Indonesia Eximbank* – 2017 ini merupakan bagian dari *Euro Medium Term Note (EMTN) Programme* dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar USD1.500.000.000.

The Indonesia Eximbank EMTN Programme – 2017 is part of the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme with fixed interest rate and targeted funds to be raised amounted to USD1,500,000,000.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

***c. Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank 2017* (lanjutan)**

Jadwal pembayaran bunga adalah semesteran dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017. EMTN *Programme Indonesia Eximbank* – 2017 tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited. Penerbitan EMTN Indonesia Eximbank – 2017 telah dinyatakan efektif mulai tanggal 7 April 2017.

Bertindak sebagai wali amanat EMTN *Programme* Indonesia Eximbank 2017 adalah *The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited*. Bertindak sebagai *Join Lead Managers (JLM)* emisi *Euro Medium Term Note (EMTN) Programme Indonesia Eximbank* 2017 adalah The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited, Overseas Chinese Banking Corporation, dan Mitsubishi UFJ Securities International. Penerimaan neto dari penerbitan EMTN *Programme* Indonesia Eximbank 2017 digunakan untuk membayar utang yang telah ada, pembiayaan operasional dan produktif, dan untuk kegunaan umum LPEI.

LPEI mencatat beban emisi EMTN *Programme Indonesia Eximbank*-2017 sebesar USD1.405.097 dan diskonto sebesar USD860.000 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi EMTN *Programme Indonesia Eximbank* – 2017 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, EMTN *Programme Indonesia Eximbank* 2017 memiliki peringkat "BBB" dari Fitch dan "Baa2" dari *Moody's Investor Inc*.

16. Debt Securities Issued (continued)

c. Indonesia Eximbank Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme 2017 (continued)

Interest is payable semi-annually starting on October 6, 2017. The Indonesia Eximbank EMTN Programme-2017 is listed in the Singapore Exchange Securities Trading Limited. The offering of the Indonesia Eximbank EMTN Programme – 2017 was declared effective since April 7, 2017.

The trustee for the Indonesia Eximbank EMTN -2017 are The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited. The Join Lead Managers (JLM) for the Indonesia Eximbank Euro Medium Term Note (EMTN) Programme – 2017 are The Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited, Overseas Chinese Banking Corporation, and Mitsubishi UFJ Securities International. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank EMTN Programme – 2017 were used to refinance existing debt, finance its operations and earning assets, and for its general LPEI purposes.

LPEI recorded the issuance cost and discount on Indonesia Eximbank EMTN Programme 2017 amounting to USD1,405,097 and USD860,000, respectively, as a deduction from the proceeds of the Indonesia EMTN Programme – 2017 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

As of December 31, 2023 and 2022 Indonesia Eximbank EMTN Programme 2017 were rated "BBB" by Fitch and "Baa2" by Moody's Investor Inc.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

d. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017

Pada bulan Agustus 2017, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp3.222.000 dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

d. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017

In August 2017, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 with a face value of Rp3,222,000 with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V - 2017				***Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri A	1,000,000	15 Agustus/ *August* 2020	7.60% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri B	436,000	15 Agustus/ *August* 2022	7.90% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri C	1,706,000	15 Agustus/ *August* 2024	8.25% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 Series C*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2017. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 15 November 2017.

These bonds are listed on Indonesia Stock Exchange on August 16, 2017. Interest is payable quarterly starting on November 15, 2017.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri A dan B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 Agustus 2020 dan 15 Agustus 2022.

Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 Series A and B were fully paid upon maturity on August 15, 2020 and August 15, 2022, respectively.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

d. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 (lanjutan)

Pada tanggal 9 Oktober 2023, 6 November 2023, dan 4 Desember 2023 telah dilakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk disimpan kemudian dapat dijual kembali atas Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 Seri C masing-masing sebesar Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000. Dengan selesainya penyelesaian atas pembelian kembali Obligasi tersebut, maka tidak ada perubahan nilai Obligasi yang tercatat pada penitipan kolektif di KSEI Rp1.786.000.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V-2017 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 sebesar Rp4.333 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V 2017 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

16. Debt Securities Issued (continued)

d. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 (continued)

On October 9, 2023, November 6, 2023, and December 4, 2023, buybacks were carried out with the aim of saving and then reselling the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 Series C amounting to Rp50,000, Rp20,000, Rp10,000, respectively. With the completion of the settlement of the Bond buyback, there will be no change in the value of the Bonds recorded in collective custody at KSEI Rp1,786,000.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III - 2017 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 amounting to Rp4,333 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering III 2017 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

e. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018

Pada bulan Februari 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.466.000 dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

e. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018

In February 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 with a face value of Rp2,466,000 with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI - 2018				***Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri A	610,000	14 Februari/ *February* 2021	6.35% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri B	1,650,000	14 Februari/ *February* 2023	6.70% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri C	206,000	14 Februari/ *February* 2025	6.90% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III - 2018 Series C*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering III targeted funds to be raised amounting to Rp24,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Februari 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 14 Mei 2018.

These bonds are listed on Indonesia Stock Exchange on February 15, 2018. Interest is payable quarterly starting on May 14, 2018.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 Seri A dan B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 14 Februari 2021 dan 14 Februari 2023.

Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 Series A and B were fully paid upon maturity on February 14, 2021 and February 14, 2023, respectively.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

e. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 (lanjutan)

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 sebesar Rp3.783 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Selama periode efektif PUB III, LPEI telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Tahap VI dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp21.772.000 adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp2.228.000 dari total target dana yang dihimpun sebesar Rp24.000.000. Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, LPEI telah mengumumkan Penghentian PUB III pada Laman resmi LPEI dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Februari 2018.

f. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018

Pada bulan Juni 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.729.000 dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

e. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 (continued)

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 amounting to Rp3,783 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering III 2018 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

During the Shelf Registration Offering Bond III period, LPEI has issued Bond Phase I to Phase VI with total funds raised amounting to Rp21,772,000, the deficiency of the target amount of funds raised is Rp2,228,000 from target funds amounting to Rp24,000,000. In order to comply with OJK Regulation No. 36/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Shelf Registration Offering of Debt Securities and/or Sukuk, LPEI announced Discontinuation of Shelf Registration Offering Bond III on LPEI's official Website and Indonesian Stock Exchange's (IDX) official Website LPEI on February 28, 2018.

f. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018

In June 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 with a face value of Rp2,729,000 with details as follows:

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

f. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 (lanjutan)

16. Debt Securities Issued (continued)

f. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 (continued)

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I - 2018				***Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri A	938,000	6 Juni/ *June* 2021	7.50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri B	35,000	6 Juni/ *June* 2023	7.70% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri C	1,756,000	6 Juni/ *June* 2025	8.30% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juni 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 September 2018.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on June 7, 2018. Interest is payable quarterly starting on September 6, 2018.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 Seri A dan B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 6 Juni 2021 dan 6 Juni 2023.

Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 Series A and B were fully paid upon maturity on June 6, 2021 and June 6, 2023.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 sebesar Rp4.749, yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 amounting to Rp4,749, as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering IV 2018 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

g. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018

Pada bulan September 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.514.100 dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

g. Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018

In September 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 with a face value of Rp2,514,100 with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II - 2018				***Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri A	724,400	15 September/ *September* 2019	7.00% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri B	190,000	5 September/ *September* 2021	7.50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri C	275,700	5 September / *September* 2023	8.40% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri D	1,324,000	5 September / *September 2025*	8.75% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV - 2018 Series D*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that is planned to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 September 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 5 Desember 2018.

These bonds are listed on Indonesia Stock Exchange on September 6, 2018. Interest is payable quarterly starting on December 5, 2018.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 Seri A, Seri B, dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 September 2019, 5 September 2021, dan 5 September 2023.

Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on September 15, 2019, September 5, 2021, and September 5, 2023, respectively.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

g. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 (lanjutan)

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 sebesar Rp3.912 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

h. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018

Pada bulan November 2018, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.004.000 dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

g. Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 (continued)

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 amounting to Rp3,912 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase II Shelf Registration Offering IV 2018 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

h. Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018

In November 2018, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 with a face value of Rp1,004,000 with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III - 2018				***Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri A	515,000	18 November/ *November* 2019	8.25% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri B	81,000	8 November/ *November* 2021	8.75% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri C	28,000	8 November/ *November* 2023	9.25% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri D	380,000	8 November/ *November* 2025	9.75% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV - 2018 Series D*

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

h. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 (lanjutan)

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 November 2018. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 Seri A, Seri B, dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 November 2019, 8 November 2021, dan 8 November 2023.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 sebesar Rp2.996 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III 2018 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

i. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018

Pada bulan November 2018, LPEI menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap II Tahun 2018 (“Sukuk Mudharabah Berkelanjutan”) sebesar Rp630.500, dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

h. Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 (continued)

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed on Indonesia Stock Exchange on November 9, 2018. Interest is payable quarterly starting on February 8, 2019.

Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on November 18, 2019, November 8, 2021, and November 8, 2023 respectively.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 amounting to Rp2,996 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase III Shelf Registration Offering IV 2018 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

i. Indonesia Eximbank Phase II Shelf Sukuk Mudharabah I 2018

On November 2018, LPEI issued Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II Year 2018 (“Shelf Sukuk Mudharabah”) amounting to Rp630,500, with detail as follows:

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

16. Debt Securities Issued (continued)

i. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 (lanjutan)

i. Indonesia Eximbank Phase II Shelf Sukuk Mudharabah I 2018 (continued)

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II - 2018				***Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018***
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri A	211,500	18 November/ *November 2019*	8.25%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series A*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri B	250,000	8 November/ *November 2021*	8.75%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series B*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri C	14,000	8 November/ *November 2023*	9.25%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series C*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri D	155,000	8 November/ *November 2025*	9.75%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II - 2018 Series D*

Penerimaan dana dari penerbitan Sukuk Mudharabah ini digunakan untuk pemberian pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.

The fund received from Sukuk Mudharabah issuance will be used to finance earning assets in the form of export financing with sharia principles.

Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 43,42% dengan indikatif bagi hasil setara 8,25% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 46,05% dengan indikatif bagi hasil setara 8,75% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 8 November 2018. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 48,68% dengan indikatif bagi hasil setara 9,25% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 8 November 2018. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri D adalah sebesar 51,32% dengan indikatif bagi hasil setara 9,75% per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 8 November 2018. Sukuk Mudharabah ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series A at 43.42% with profit sharing indicative equivalent at 8.25% per annum, with 370 days calendar tenor since Issuance Date. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series B at 46.05% with profit sharing indicative equivalent at 8.75% per annum, with 3 (three) years tenor since Issuance Date in November 8, 2018. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series C at 48.68% with profit sharing indicative equivalent at 9.25% per annum, with 5 (five) years tenor since Issuance Date in November 8, 2018. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series D at 51.32% with profit sharing indicative equivalent at 9.75% per annum with 7 (seven) years tenor since Issuance Date in November 8, 2018. This Sukuk Mudharabah is listed at Indonesian Stock Exchange.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

i. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 (lanjutan)

Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama Sukuk Mudharabah seri A, B, C, dan D akan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah terakhir pada tanggal jatuh tempo pokok masing-masing Sukuk Mudharabah yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 2018 Seri A, Seri B, dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 November 2019, 8 November 2021, dan 8 November 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, Pefindo memberikan peringkat "idAAA(sy)".

Sukuk Mudharabah tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI, baik barang bergerak, maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah, sebelum dilunasinya dana Sukuk Mudharabah dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap II Tahun 2018.

16. Debt Securities Issued (continued)

i. Indonesia Eximbank Phase II Shelf Sukuk Mudharabah I 2018 (continued)

The profit sharing income is paid quarterly based on profit sharing income payment date of Sukuk Mudharabah. The first profit sharing income payment of Sukuk Mudharabah Series A, B, C, and D will be paid on February 8, 2019, while the last profit sharing income payment on due date of each Sukuk Mudharabah and also the repayment date of Sukuk Mudharabah principal.

Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II 2018 Series A, B, and C were fully paid upon maturity on November 18, 2019, November 8, 2021, and November 8, 2023 respectively.

As of December 31, 2023 and 2022, Sukuk Mudharabah is rated as "idAAA(sy)" by Pefindo.

Sukuk Mudharabah are not guaranteed with specific guarantee, but guaranteed with all assets of the LPEI, whether present or future fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

During the validity period of Sukuk Mudharabah and prior to the redemption of all principal and profit sharing income of Sukuk Mudharabah, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase II – 2018.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

16. Debt Securities Issued (continued)

j. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019

j. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019

Pada bulan April 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp3.857.000 dengan rincian sebagai berikut:

In April 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp3,857,000 with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV - 2019				***Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri A	147,000	03 Mei/ *May* 2020	7.35% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri B	935,000	23 April/ *April* 2022	8.40% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri C	1,473,000	23 April/ *April* 2024	8.90% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri D	278,000	23 April/ *April* 2026	9.25% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri E	349,000	23 April/ *April* 2029	9.50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series E*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 Seri F	625,000	23 April/ *April* 2034	9.80% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV - 2019 Series F*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 April 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on April 24, 2019. Interest is payable quarterly starting on July 23, 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV – 2019 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 Mei 2020 dan 23 April 2022.

Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV – 2019 Series A and B were fully paid upon maturity on May 3, 2020, and April, 23, 2022, respectively.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

j. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 (lanjutan)

Pada tanggal 18 Oktober 2019 dan 14 November 2023 telah dilakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk disimpan kemudian dapat dijual kembali atas Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun – 2019 Seri C masing-masing sebesar Rp35.000 dan Rp15.000. Dengan selesainya penyelesaian atas pembelian kembali Obligasi tersebut, maka tidak ada perubahan nilai Obligasi yang tercatat pada penitipan kolektif di KSEI Rp1.523.000.

Bertindak sebagai wali amanat obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 sebesar Rp7.525 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

k. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019

Pada bulan April 2019, LPEI menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap III Tahun 2019 (“Sukuk Mudharabah”) sebesar Rp441.000, dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

j. Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

On October 18, 2019 and November 14, 2023, buybacks were carried out with the aim of saving and then reselling the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 Series C amounting to Rp35,000 and Rp15,000 respectively. With the completion of the settlement of the Bond buyback, there will be no change in the value of the Bonds recorded in collective custody at KSEI Rp1,523,000.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp7,525 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase IV Shelf Registration Offering IV 2019 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

k. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III 2019

On April 2019, LPEI issued Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III 2019 (“Sukuk Mudharabah”) amounting to Rp441,000, with detail as follows:

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

k. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 (lanjutan)

16. Debt Securities Issued (continued)

k. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III 2019 (continued)

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III - 2019				***Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019***
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri A	230,000	03 Mei/ *May 2020*	7.35%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series A*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri B	145,000	23 April/ *April 2022*	8.40%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series B*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri C	66,000	23 April/ *April 2024*	8.90%	*Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III - 2019 Series C*

Penerimaan dana dari penerbitan Sukuk Mudharabah ini digunakan untuk pemberian pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor berdasarkan prinsip syariah.

The fund received from Sukuk Mudharabah issuance will be used to finance earning assets in the form of export financing with sharia principles.

Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 38,68% dengan indikatif bagi hasil setara 7,35% per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 44,21% dengan indikatif bagi hasil setara 8,40% per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 23 April 2019. Nisbah pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 46,84% dengan indikatif bagi hasil setara 8,90% per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 23 April 2019. Sukuk Mudharabah ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series A at 38.68% with profit sharing indicative equivalent at 7.35% per annum, with 370 days calendar tenor since Issuance Date. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series B at 44.21% with profit sharing indicative equivalent at 8.40% per annum with 3 (three) years tenor since Issuance Date in April 23, 2019. Customer's nisbah of Sukuk Mudharabah Series C at 46.84% with profit sharing indicative equivalent at 8.90% per annum, with 5 (five) years tenor since Issuance Date in April 23, 2019. This Shelf Sukuk Mudharabah is listed at Indonesian Stock Exchange.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

k. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 (lanjutan)

Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran pendapatan bagi hasil pertama Sukuk Mudharabah berkelanjutan seri A, B, dan C akan dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah berkelanjutan terakhir pada tanggal jatuh tempo pokok maisng-masing Sukuk Mudharabah yang juga merupakan tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III 2019 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 Mei 2020 dan 23 April 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, Pefindo memberikan peringkat "idAAA(sy)".

Sukuk Mudharabah tersebut tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya dana Sukuk Mudharabah dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Tahap III Tahun 2019.

16. Debt Securities Issued (continued)

k. Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III 2019 (continued)

The profit sharing income is paid quarterly based on profit sharing income payment date of Sukuk Mudharabah. The first profit sharing income payment of Shelf Sukuk Mudharabah Series A, B, and C will be paid on July 23, 2019, while the last profit sharing income payment on due date of each Shelf Sukuk Mudharabah and also the repayment date of Sukuk Mudharabah principal.

Shelf Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III 2019 Series A and B were fully paid upon maturity on May 3, 2020, and April, 23, 2022, respectively.

As of December 31, 2023 and 2022, Sukuk Mudharabah is rated as "idAAA(sy)" by Pefindo.

Sukuk Mudharabah are not guaranteed with specific guarantee, but guaranteed with all assets of the LPEI, whether present or future fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

During the validity period of Sukuk Mudharabah and prior to the redemption of all principal and profit sharing income of Sukuk Mudharabah, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Self Sukuk Mudharabah I Indonesia Eximbank Phase III – 2019.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

I. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019

Pada bulan Juli 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp2.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

I. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019

In July 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp2,000,000 with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V - 2019				***Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri A	312,000	19 Juli/ *July* 2020	7.45% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri B	621,000	9 Juli/ *July* 2022	8.45% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri C	330,000	9 Juli/ *July* 2024	8.70% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri D	737,000	9 Juli/ *July* 2026	9.20% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2019.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on July 10, 2019. Interest is payable quarterly starting on October 9, 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 19 Juli 2020, dan 9 Juli 2022.

Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 Series A and B was fully paid upon maturity on July 19, 2020, and July 9, 2022, respectively.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

l. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 (lanjutan)

Pada tanggal 9 Juli 2023 telah dilakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk disimpan kemudian dapat dijual kembali atas Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 Seri C sebesar Rp15.000. Dengan selesainya penyelesaian atas pembelian kembali Obligasi tersebut, maka tidak ada perubahan nilai Obligasi yang tercatat pada penitipan kolektif di KSEI Rp330.000.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 sebesar Rp3.594 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

m. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019

Pada bulan September 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.018.500 dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

l. Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

On July 9, 2023, a repurchase was carried out with the aim of saving and then reselling the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 Series C amounting to Rp15,000. With the completion of the settlement of the Bond buyback, there will be no change in the value of the Bonds recorded in collective custody at KSEI Rp330,000.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp3,594 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase V Shelf Registration Offering IV 2019 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

m. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019

In September 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp1,018,500 with details as follows:

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

16. Debt Securities Issued (continued)

m. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 (lanjutan)

m. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI - 2019				***Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri A	283,000	13 September/ *September* 2020	7.00% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri B	15,000	3 September/ *September* 2022	7.80% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri C	6,000	3 September/ *September* 2024	8.10% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri D	714,500	3 September / *September* 2026	8.50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 September 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 3 Desember 2019.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on September 4, 2019. Interest is payable quarterly starting on December 3, 2019.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 13 September 2020 dan 3 September 2022.

Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 Series A and B were fully paid upon maturity on September 13, 2020 and September 3, 2022, respectively.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

m. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 (lanjutan)

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 sebesar Rp3.040 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

n. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019

Pada bulan Oktober 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.058.550, dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

m. Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp3,040 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VI Shelf Registration Offering IV 2019 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

n. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019

In October 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp1,058,550, with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII - 2019				***Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri A	600,000	9 November/ *November* 2020	7.00% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri B	101,300	29 Oktober/ *October* 2022	7.80% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri C	25,500	29 Oktober/ *October* 2024	8.10% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri D	112,000	29 Oktober/ *October* 2026	8.50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series D*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri E	219,750	29 Oktober/ *October* 2029	8.75% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series E*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

n. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 (lanjutan)

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 9 November 2020 dan 29 Oktober 2022.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 sebesar Rp4.238 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VII 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

o. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019

Pada bulan Desember 2019, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.661.500 dengan rincian sebagai berikut:

16. Debt Securities Issued (continued)

n. Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on October 30, 2019. The interest payment is quarterly and the first payment was made on January 29, 2020.

Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 Series A and B were fully paid upon maturity on November 9, 2020, and October 29, 2022, respectively.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp4,238 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VII Shelf Registration Offering IV 2019 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

o. Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019

In December 2019, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 with a face value of Rp1,661,500 with details as follows:

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

o. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 (lanjutan)

16. Debt Securities Issued (continued)

o. Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII - 2019				***Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri A	88,000	6 Desember/ *December* 2022	7.50% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series A*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri B	1,551,000	6 Desember/ *December* 2024	7.90% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series B*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri C	22,500	6 Desember/ *December* 2026	8.20% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV - 2019 Series C*

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering IV with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp26,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Desember 2019. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 Maret 2020.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on December 9, 2019. The interest payment schedule is quarterly and the first payment was made on March 6, 2020.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 Seri A telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 6 Desember 2022.

Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 Series A was fully paid upon maturity on December 6, 2022.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII – 2019 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 were used to finance earning assets in the form of export financing.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

o. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 (lanjutan)

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 sebesar Rp3.323, yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII 2019 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

Selama periode efektif PUB Obligasi IV dan PUB Sukuk Mudharabah I, LPEI telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Tahap VIII serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Tahap IV dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp17.564.150, adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp14.435.850 dari total target dana yang dihimpun sebesar Rp32.000.000. Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, LPEI telah mengumumkan Penghentian PUB Obligasi IV dan PUB Sukuk Mudharabah I pada laman resmi LPEI dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020.

16. Debt Securities Issued (continued)

o. Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 (continued)

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 amounting to Rp3,323 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase VIII Shelf Registration Offering IV 2019 and over the term of the bonds using the effective interest rate method.

During the Shelf Registration Offering Bond IV and Sukuk Mudharabah I period, LPEI has issued Bond Phase I to Phase VIII and Shelf Sukuk Mudharabah Phase I to Phase IV with total funds raised amounting to Rp17,564,150, the deficiency of the target amount of funds raised is Rp14,435,850 from target funds amounting to Rp32,000,000. In order to comply with FSA Regulation No. 36/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Shelf Registration Offering of Debt Securities and/or Sukuk, LPEI announced Discontinuation of Shelf Registration Offering Bond IV and Sukuk Mudharabah I on LPEI's official website and Indonesia Stock Exchange official Website on March 27, 2020.

p. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020

Pada bulan Juli 2020, LPEI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp48.000 dengan rincian sebagai berikut:

p. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020

In July 2020, LPEI issued Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 with a face value of Rp48,000 with details as follows:

Seri/*Series*	Jumlah nominal/ *Nominal amount* Rp	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity Date*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	*Obligasi/ Bonds*
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020				***Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020***
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I - 2020	48,000	8 Juli/ *July 2023*	7.60% tetap/*fixed*	*Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V - 2020*

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

p. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 (lanjutan)

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V dengan tingkat suku bunga tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp22.000.000, yang direncanakan untuk dikeluarkan secara penuh selama 2 tahun.

Obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juli 2020. Jadwal pembayaran bunga adalah triwulanan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 8 Juli 2023.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penerimaan neto dari penerbitan obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 digunakan untuk pembiayaan produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

LPEI mencatat beban emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 sebesar Rp905 yang dikurangkan langsung dari hasil emisi Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode suku bunga efektif.

16. Debt Securities Issued (continued)

p. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 (continued)

These bonds are part of Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering V with fixed interest rate and targeted fund to be raised of Rp22,000,000, that plan to be fully issued within 2 years.

These bonds are listed in Indonesia Stock Exchange on July 9, 2020. The interest payment schedule is quarterly and the first payment was made on October 8, 2020.

Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 was fully paid upon maturity on July 8, 2023.

The trustee for the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The net proceeds from the issuance of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 were used to finance earning assets in the form of export financing.

LPEI recorded the issuance cost on Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 amounting to Rp905 as a deduction from the proceeds of the Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

p. Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap I 2020 (lanjutan)

Selama periode efektif PUB Obligasi V dan PUB Sukuk Mudharabah II, LPEI telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap I dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp148.000, adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun adalah sebesar Rp23.852.000 dari total target dana yang dihimpun sebesar Rp24.000.000. Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, LPEI telah mengumumkan berakhirnya PUB Obligasi V dan PUB Sukuk Mudharabah II pada laman resmi LPEI dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022.

Sebelum dilunasinya semua pokok obligasi, bunga obligasi dan biaya lain yang harus ditanggung oleh LPEI berkenaan dengan seluruh Obligasi, LPEI berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank memiliki peringkat "idAAA" berdasarkan PT Pefindo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Obligasi-obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan LPEI, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur LPEI lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Debt Securities Issued (continued)

p. Indonesia Eximbank Phase I Shelf Registration Offering V 2020 (continued)

During the Shelf Registration Offering Bond V and Sukuk Mudharabah II period, LPEI has issued Bond Phase I and Shelf Sukuk Mudharabah Phase I with total funds raised amounting to Rp148,000, the deficiency of the target amount of funds raised is Rp23,852,000 from target funds amounting to Rp24,000,000. In order to comply with FSA Regulation No. 36/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Shelf Registration Offering of Debt Securities and/or Sukuk, LPEI has announced the end of Shelf Registration Offering Bond V and Sukuk Mudharabah II on LPEI's official website and Indonesia Stock Exchange's official website on June 30, 2022.

Before settlement of all the principal and interest on all LPEI Bonds ("Bonds") and other charges payable by LPEI in connection with the issuance of Bonds, LPEI agreed to maintain and/or comply with all terms stated in the trustee agreement as out lined in the Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering.

Indonesia Eximbank Shelf Registration Offering were rated "idAAA" by PT Pefindo as of December 31, 2023 and 2022.

The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all of LPEI's fixed and non-fixed assets, both existing and will exist in the future, in compliance with the regulations of Indonesian Civil Law Articles 1131 and 1132.

These bonds are not guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia.

The bondholders' right is paripassu without preference offer other LPEI creditors' rights in compliance with prevailing regulations.

16. Efek-Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan) / *16. Debt Securities Issued (continued)*

Persyaratan dan kondisi pembatasan / ***Terms and required covenants***

Per tanggal 23 Juni 2022, OJK telah menerbitkan POJK No. 9 tahun 2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang menggantikan POJK No. 40 tahun 2015.

As of June 23, 2022, OJK has issued POJK No. 9 of 2022 concerning Supervision of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia which replaces POJK No. 40 of 2015.

Dimana berdasarkan Pasal 55 No. 3, LPEI wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa membaik dengan menjaga agar nilai pembiayaan bermasalah berada pada level yang terkendali.

Where based on Article 55 No. 3, LPEI is obliged to assess, monitor, and take the necessary steps so that asset quality always improves by keeping the value of non-performing financing at a controlled level.

17. Pinjaman yang Diterima / *17. Fund Borrowings*

	31 Desember / *December 31,* 2023	2022	
Pinjaman			*Borrowings*
Sindikasi	4,576,529	8,474,260	*Syndicated*
Bilateral	12,298,134	19,329,517	*Bilateral*
Pinjaman Syirkah	1,478,280	1,493,288	*Syirkah Fund*
Total	**18,352,943**	**29,297,065**	***Total***

Di bawah ini adalah rincian pinjaman yang diterima berdasarkan pemberi pinjaman:

Below are the details of fund borrowings based on the lenders:

Pinjaman Sindikasi / ***Borrowings - Syndicated***

	31 Desember/ *December 31, 2023*				
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount*)	**Ekuivalen/ *Equivalent* Rupiah**	**Tanggal efektif/ *Effective date***	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date***	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollar***
Pihak ketiga					*Third parties*
Facility agent					*Facility agent*
SMBC SGP	248,282,279	3,822,802	20 September/ *September 20, 2022*	19 September/ *September 19, 2025*	*SMBC SGP*
SMBC SGP	48,952,878	753,727	16 November/ *November 16, 2022*	15 November/ *November 15, 2024*	*SMBC SGP*
Total		**4,576,529**			***Total***

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan) / *17. Fund Borrowings (continued)*

Pinjaman Sindikasi (lanjutan) / *Borrowings - Syndicated (continued)*

	31 Desember/ *December 31, 2022*				
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount*)	**Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah***	**Tanggal efektif/ *Effective date***	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date***	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollar***
Pihak ketiga					*Third parties*
Facility agent					*facility agent*
Commerzbank	99,280,127	1,545,543	20 Mei/ *May 20, 2021*	20 Mei/ *May 20, 2024*	*Commerzbank*
SMBC SGP	247,300,674	3,849,853	20 September/ *September 20, 2022*	19 September/ *September 19, 2025*	*SMBC SGP*
SMBC SGP	197,775,079	3,078,864	16 November/ *November 16, 2022*	15 November/ *November 15, 2024*	*SMBC SGP*
Total		**8,474,260**			***Total***

Pinjaman Bilateral / *Borrowings – Bilateral*

	31 Desember/ *December 31, 2023*				
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	**Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah***	**Tanggal efektif/ *Effective date***	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date***	
Rupiah					***Rupiah***
Pihak ketiga					*Third parties*
PT Bank UOB Indonesia		500,000	29 Desember/ *December 29, 2023*	3 Januari/ *January 3, 2024*	*PT Bank UOB Indonesia*
Total mata uang Rupiah		**500,000**			***Total Rupiah***
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollar***
Pihak ketiga					*Third parties*
PT Bank ICBC Indonesia	148,784,735	2,290,839	29 September/ *September 29, 2020*	29 September/ *September 29, 2025*	*PT Bank ICBC Indonesia*
PT Bank ICBC Indonesia	99,124,122	1,526,214	19 November/ *November 19, 2020*	19 November/ *November 19, 2025*	*PT Bank ICBC Indonesia*
		3,817,053			
PT Bank UOB Indonesia	35,000,000	538,895	28 Desember/ *December 28, 2023*	3 Januari/ *January 3, 2024*	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	60,000,000	923,820	27 Desember/ *December 27, 2023*	29 Januari/ *January 29, 2024*	*PT Bank CIMB NiagaTbk*
Standard Chartered Bank, Jakarta	100,000,000	1,539,700	19 Oktober/ *October 19, 2023*	18 Oktober/ *October 18, 2024*	*Standard Chartered Bank, Jakarta*
Standard Chartered Bank, Jakarta	75,000,000	1,154,775	27 Desember/ *December 27, 2023*	29 Januari/ *January 29, 2024*	*Standard Chartered Bank, Jakarta*
Standard Chartered Bank, Jakarta	50,000,000	769,850	27 Desember/ *December 27, 2023*	3 Januari/ *January 3, 2024*	*Standard Chartered Bank, Jakarta*
Standard Chartered Bank, Jakarta	50,000,000	769,850	28 Desember/ *December 28, 2023*	4 Januari/ *January 4, 2024*	*Standard Chartered Bank, Jakarta*
		4,234,175			

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan) / *17. Fund Borrowings (continued)*

Pinjaman Bilateral (lanjutan) / *Borrowings – Bilateral (continued)*

	31 Desember/ *December 31, 2023*				
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Tanggal efektif/ *Effective date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	
PT Bank Central Asia Tbk	35,000,000	538,895	15 November/ *November 15, 2023*	15 Februari/ *February 15 2024*	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50,000,000	769,850	16 November/ *November 16, 2023*	16 Februari/ *February 16, 2024*	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	10,000,000	153,970	13 Desember/ *December 13, 2023*	12 Januari/ *January 12, 2024*	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
		923,820			
PT Bank Mizuho Indonesia	30,000,000	461,910	27 Desember/ *December 27, 2023*	26 Januari/ *January 26, 2024*	*PT Bank Mizuho Indonesia*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	20,000,000	307,940	20 November/ *November 20, 2023*	20 Februari/ *February 20, 2024*	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
Total Dolar Amerika Serikat		**11,746,508**			***Total United States Dollar***
Euro Eropa					***European Euro***
Pihak berelasi (Catatan 39)					*Related parties (Note 39)*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	575,428	9,804	4 Juli/ *July 4, 2008*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	721,318	12,290	23 Desember/ *December 23, 2010*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	433,138	7,380	30 Desember/ *December 30, 2010*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	737,223	12,561	9 Maret/ *March 9, 2011*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	562,893	9,591	4 Mei/ *May 4, 2011*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Total Euro Eropa		**51,626**			***Total European Euro***
Total Pinjaman Bilateral		**12,298,134**			***Total Bilateral Borrowings***

	31 Desember/ *December 31, 2022*				
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Tanggal efektif/ *Effective date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	
Rupiah					***Rupiah***
Pihak ketiga					*Third parties*
PT Bank Central Asia Tbk		2,000,000	21 September/ *September 21, 2021*	21 September/ *September 21, 2023*	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk		1,000,000	28 Desember/ *December 28, 2022*	4 Januari/ *January 4, 2023*	*PT Bank Central Asia Tbk*
		3,000,000			

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan) / *17. Fund Borrowings (continued)*

Pinjaman Bilateral (lanjutan) / *Borrowings – Bilateral (continued)*

	31 Desember/ *December 31, 2022*				
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	**Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah***	**Tanggal efektif/ *Effective date***	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date***	
PT Bank ANZ Indonesia		150,000	28 Desember/ *December 28, 2022*	4 Januari/ *January 4, 2023*	*PT Bank ANZ Indonesia*
PT Bank UOB Indonesia		2,500,000	29 Desember/ *December 29, 2022*	5 Januari/ *January 5, 2023*	*PT Bank UOB Indonesia*
Total mata uang Rupiah		**5,650,000**			***Total Rupiah***
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat					***United States Dollar***
Pihak ketiga					*Third parties*
PT Bank ICBC Indonesia	148,154,801	2,306,400	29 September/ *September 29, 2020*	29 September/ *September 29, 2025*	*PT Bank ICBC Indonesia*
PT Bank ICBC Indonesia	129,146,501	2,010,488	19 November/ *November 19, 2020*	17 November/ *November 17, 2023*	*PT Bank ICBC Indonesia*
PT Bank ICBC Indonesia	98,705,889	1,536,604	19 November/ *November 19, 2020*	19 November/ *November 19, 2025*	*PT Bank ICBC Indonesia*
		5,853,492			
China Eximbank	199,337,597	3,103,188	21 Oktober/ *October 21, 2020*	21 Oktober/ *October 21, 2023*	*China Eximbank*
Standard Chartered Bank, Jakarta	100,000,000	1,556,750	20 Mei/ *May 20, 2022*	19 Mei/ *May 19, 2023*	*Standard Chartered Bank, Jakarta*
Standard Chartered Bank, Jakarta	199,994,033	3,113,407	22 Juni/ *June 22, 2022*	22 Juni/ *June 22, 2023*	*Standard Chartered Bank, Jakarta*
		4,670,157			
Total Dolar Amerika Serikat		**13,626,837**			***Total United States Dollar***
Euro Eropa					***European Euro***
Pihak berelasi (Catatan 39)					*Related parties (Note 39)*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	603,344	10,004	4 Juli/ *July 4, 2008*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	756,313	12,541	23 Desember/ *December 23, 2010*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	454,151	7,531	30 Desember/ *December 30, 2010*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	772,989	12,817	9 Maret/ *March 9, 2011*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	590,202	9,787	4 Mei/ *May 4, 2011*	30 Juni/ *June 30, 2044*	*Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
Total Euro Eropa		**52,680**			***Total European Euro***
Total mata uang asing		**13,679,517**			***Total foreign currency***
Total Pinjaman Bilateral		**19,329,517**			***Total Bilateral Borrowings***

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

17. *Fund Borrowings (continued)*

Pinjaman Syirkah

Syirkah Fund

	31 Desember/ *December 31, 2023*				
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Tanggal efektif/ *Effective date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	
Rupiah					***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 39)					*Related party (Note 39)*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		1,478,280	27 Juni/ *June 27, 2022*	27 Juni/ *June 27, 2024*	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
		1,478,280			

	31 Desember/ *December 31, 2022*				
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	Ekuivalen/ *Equivalent Rupiah*	Tanggal efektif/ *Effective date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	
Rupiah					***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 39)					*Related party (Note 39)*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		1,493,288	27 Juni/ *June 27, 2022*	27 Juni/ *June 27, 2024*	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
		1,493,288			

Pinjaman Sindikasi

Di bawah ini adalah rincian masing-masing fasilitas pinjaman yang diperoleh:

a. Commerzbank AG

Pada tanggal 16 Agustus 2022, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman sindikasi dari bank-bank asing sebesar USD450.000.000 yang terbagi menjadi Tranche A sebesar USD200.000.000 dan Tranche B sebesar USD250.000.000. Bank yang bertindak sebagai *facility agent* adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura (SMBC SGP).

Borrowings Syndicated

Below are the details of each loan facility obtained:

a. Commerzbank AG

On August 16, 2022, LPEI signed a syndicated loan facility amounting to USD450,000,000 with foreign banks which was divided into Tranche A amounting USD200,000,000 and Tranche B amounting USD250,000,000. Bank acting as the facility agent is Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (SMBC SGP).

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

b. Pinjaman sindikasi dengan *facility agent* Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (SMBC SGP)

Pada tanggal 16 November 2022, LPEI melakukan penarikan Tranche A sebesar USD200.000.000 yang telah dilunasi lebih awal sebagian pada tanggal 16 November 2023 dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2024, dengan rincian per tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

17. Fund Borrowings (continued)

b. Syndicated loan with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch as facility agent (SMBC SGP)

On November 16, 2022, LPEI has withdrawal Tranche A amounted to USD200,000,00, that has been partially prepaid on November 16, 2023 and will be matured on November 15, 2024 with the details as of December 31, 2023 are as follows:

Tranche A / *Tranche A*

Komposisi sindikasi	Jumlah fasilitas/ *Facility amount* (USD)	*Composition of the syndicate*
Bank peserta:		*Participant banks:*
Australia and New Zealand Banking Group Limited		*Australia and New Zealand Banking Group Limited*
Singapore Branch	11,005,231	*Singapore Branch*
United Overseas Bank Limited	11,005,232	*United Overseas Bank Limited*
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Singapore Branch	3,333,333	*Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Singapore Branch*
Fubon Bank (Hong Kong) Limited	2,222,222	*Fubon Bank (Hong Kong) Limited*
The Chiba Bank, Ltd., (Incorporated In Japan	1,100,000	*The Chiba Bank, Ltd., (Incorporated In Japan*
With Limited Liability) Hong Kong Branch		*With Limited Liability) Hong Kong Branch*
The Export- Import Bank of The Republic of China	1,430,000	*The Export- Import Bank of The Republic of China*
AfrAsia Bank Limited	1,668,750	*AfrAsia Bank Limited*
The Korea Development Bank, Singapore Branch	4,400,000	*The Korea Development Bank, Singapore Branch*
The Bank of Yokohama, Ltd. Singapore Branch	2,500,000	*The Bank of Yokohama, Ltd. Singapore Branch*
The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd Singapore Branch	330,000	*The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd Singapore Branch*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation		*Sumitomo Mitsui Banking Corporation*
Singapore Branch	11,005,232	*Singapore Branch*
	50,000,000	

Tranche B / *Tranche B*

Komposisi sindikasi	Jumlah fasilitas/ *Facility amount* (USD)	*Composition of the syndicate*
Bank peserta:		*Participant banks:*
The Chiba Bank, Ltd., (Incorporated In Japan		*The Chiba Bank, Ltd., (Incorporated In Japan*
With Limited Liability) Hong Kong Branch	5,600,000	*With Limited Liability) Hong Kong Branch*
The Export- Import Bank of The Republic		*The Export- Import Bank of The Republic*
of China	7,280,000	*of China*
AfrAsia Bank Limited	8,325,000	*AfrAsia Bank Limited*
The Korea Development Bank, Singapore Branch	22,400,000	*The Korea Development Bank, Singapore Branch*
The Bank of Yokohama, Ltd. Singapore Branch	20,000,000	*The Bank of Yokohama, Ltd. Singapore Branch*
The Hachijuni Bank, Ltd.	30,000,000	*The Hachijuni Bank, Ltd.*
The Shanghai Commercial & Savings		*The Shanghai Commercial & Savings*
Bank Ltd Singapore Branch	1,680,000	*Bank Ltd Singapore Branch*
Australia and New Zealand Banking Group Limited		*Australia and New Zealand Banking Group Limited*
Singapore Branch	42,312,408	*Singapore Branch*
United Overseas Bank Limited	7,312,407	*United Overseas Bank Limited*
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.		*Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.*
Singapore Branch	36,666,667	*Singapore Branch*
The Joyo Bank, Ltd.	10,000,000	*The Joyo Bank, Ltd.*
The Shizuoka Bank, Ltd. Singapore Branch	10,000,000	*The Shizuoka Bank, Ltd. Singapore Branch*
Industrial Bank of Korea, London Branch	5,000,000	*Industrial Bank of Korea, London Branch*
KEXIM Bank (UK) Limited	10,000,000	*KEXIM Bank (UK) Limited*
Fubon Bank (Hong Kong) Limited	11,111,111	*Fubon Bank (Hong Kong) Limited*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation		*Sumitomo Mitsui Banking Corporation*
Singapore Branch	22,312,407	*Singapore Branch*
	250,000,000	

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

b. Pinjaman sindikasi dengan *facility agent* Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (SMBC SGP) (lanjutan)

Tingkat kisaran suku bunga sebesar margin tertentu ditambah dengan referensi suku bunga tertentu untuk *Tranche* A dan B pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pinjaman Bilateral

c. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan-Perjanjian Penerusan Pinjaman atas Fasilitas Kredit dari *Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)*

LPEI memperoleh fasilitas kredit dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1169/DP3/2004 tanggal 30 Juni 2004. Pinjaman ini berasal dari *Kreditanslat fur Wiederaufbau (KfW)* melalui Pemerintah dengan jumlah maksimum sebesar EUR4.500.000 yang digunakan untuk pembiayaan efisiensi industri dan kontrol fase II terhadap polusi di Indonesia. Jangka waktu pinjaman adalah empat puluh tahun sampai dengan 30 Juni 2044, termasuk masa tenggang sepuluh tahun atas pembayaran pokok. Tingkat suku bunga tetap per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, LPEI memiliki saldo pinjaman masing-masing sebesar EUR3.030.000 dan EUR3.177.000.

Tidak terdapat aset yang dijaminkan oleh LPEI atas seluruh pinjaman yang diterima di atas.

d. China Eximbank

Pada tanggal 25 September 2020, LPEI menandatangani perjanjian fasilitas dengan China Eximbank sebesar USD200.000.000.

17. Fund Borrowings (continued)

b. Syndicated loan with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch as facility agent (SMBC SGP) (continued)

The interest rate range is a certain margin plus a certain interest rate reference for Tranche A and B as of December 31, 2023 and 2022.

Borrowings Bilateral

c. Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance Its subsidiary Loan Agreement on Credit Facility from Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)

LPEI obtained a credit facility from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance based on Its subsidiary Loan Agreement No. SLA-1169/DP3/2004 dated June 30, 2004. This loan was granted by Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) through the Government with a maximum amount of EUR4,500,000 that is intended to be used for financing industrial efficiency and pollution control phase II in Indonesia. The facility has a term of fourty years up to June 30, 2044, including a grace period of ten years for the principal payments. The loan has a fixed interest rate

As of December 31, 2023 and 2022, LPEI has a total outstanding borrowings of EUR3,030,000 and EUR3,177,000, respectively.

There are no assets pledged as collateral by LPEI for all of the above fund borrowings.

d. China Eximbank

On September 25, 2020, LPEI signed a Facility Agreement from China Eximbank amounting to USD200,000,000.

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

d. China Eximbank (lanjutan)

Pada tanggal 21 Oktober 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD200.000.000 dari China Eximbank, dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR (3 bulan) ditambah margin tertentu dan dan telah dilunasi pada tanggal 21 Oktober 2023.

e. PT Bank ICBC Indonesia

Pada tanggal 24 September 2020, LPEI menandatangani fasilitas pinjaman *Bilateral Committed Loan Credit* dengan PT Bank ICBC Indonesia sebesar USD380.000.000.

Pada tanggal 29 September 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD150.000.000 dari PT Bank ICBC Indonesia dengan tingkat suku bunga saat ini sebesar SOFR (3 bulan) ditambah margin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 September 2025.

Pada tanggal 19 November 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD100.000.000 dari PT Bank ICBC Indonesia dengan tingkat suku bunga saat ini sebesar SOFR (3 bulan) ditambah margin tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 November 2025.

Pada tanggal 19 November 2020, LPEI melakukan penarikan sebesar USD130.000.000 dari PT Bank ICBC Indonesia dengan tingkat suku bunga saat ini sebesar SOFR (3 bulan) ditambah margin tertentu dan dan telah dilunasi pada tanggal 17 November 2023.

f. Standard Chartered Bank Indonesia

Pada tanggal 28 April 2022, LPEI menandatangani perjanjian fasilitas dengan Standard Chartered Bank Indonesia sebesar USD300.000.000.

Pada tanggal 20 Mei 2022, LPEI melakukan penarikan sebesar USD100.000.000 dari Standard Chartered Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga Term SOFR (3 bulan) ditambah margin tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 19 Mei 2023.

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Bilateral (continued)

d. China Eximbank (continued)

On October 21, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD200,000,000 from China Eximbank, which bear interest rate at LIBOR (3 months) plus a certain margin and has been repaid on October 21, 2023.

e. PT Bank ICBC Indonesia

On September 24, 2020, LPEI signed a Bilateral Committed Loan Credit from PT Bank ICBC Indonesia amounting to USD380,000,000.

On September 29, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD150,000,000 from PT Bank ICBC Indonesia, which bear interest rate at SOFR (3 months) plus a certain margin and will be mature on September 29, 2025.

On November 19, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD100,000,000 from PT Bank ICBC Indonesia, which bear interest rate at SOFR (3 months) plus a certain margin and will be mature on November 19, 2025.

On November 19, 2020, LPEI has withdrawal amounted to USD130,000,000 from PT Bank ICBC Indonesia, which bear interest rate at SOFR (3 months) plus a certain margin and has been repaid on November 17, 2023.

f. Standard Chartered Bank Indonesia

On April 28, 2022, LPEI signed a Facility Agreement from Standard Chartered Bank Indonesia amounting to USD300,000,000.

On May 20, 2022, LPEI has withdrawal amounted to USD100,000,000 from Standard Chartered Bank Indonesia which bear interest rate at Term SOFR (3 months) plus certain margin and has been repaid on May 19, 2023.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

f. Standard Chartered Bank Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 22 Juni 2022, LPEI melakukan penarikan sebesar USD200.000.000 dari Standard Chartered Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga Term SOFR (3 bulan) ditambah margin tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 22 Juni 2023.

Pada tanggal 23 Juni 2023, LPEI menandatangani perjanjian fasilitas dengan Standard Chartered Bank Indonesia sebesar USD300.000.000. Pada tanggal 14 Desember 2023, LPEI menandatangani perjanjian perubahan dengan Standard Chartered Bank Indonesia.

Pada tanggal 19 Oktober 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD100.000.000 dari Standard Chartered Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2024.

Pada tanggal 27 Desember 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD50.000.000 dari Standard Chartered Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2024.

Pada tanggal 27 Desember 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD75.000.000 dari Standard Chartered Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2024.

Pada tanggal 28 Desember 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD50.000.000 dari Standard Chartered Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2024.

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Bilateral (continued)

f. Standard Chartered Bank Indonesia (continued)

On June 22, 2022, LPEI has withdrawal amounted to USD200,000,000 from Standard Chartered Bank Indonesia which bear interest rate at Term SOFR (3 months) plus certain margin and has been repaid on June 22, 2023.

On June 23, 2023, LPEI signed a Facility Agreement from Standard Chartered Bank Indonesia amounting to USD300,000,000. On December 14, 2023, LPEI signed an Amendment Agreement from Standard Chartered Bank Indonesia.

On October 19, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD100,000,000 from Standard Chartered Bank Indonesia which bear interest rate at a certain margin and will be matured on October 18, 2024.

On December 27, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD50,000,000 from Standard Chartered Bank Indonesia which bear interest rate at a certain margin and will be matured on January 3, 2024.

On December 27, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD75,000,000 from Standard Chartered Bank Indonesia which bear interest rate at a certain margin and will be matured on January 29, 2024.

On December 28, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD50,000,000 from Standard Chartered Bank Indonesia which bear interest rate at a certain margin and will be matured on January 4, 2024.

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

g. PT ANZ Indonesia

Pada tanggal 10 Juni 2022, LPEI menandatangani perjanjian fasilitas dengan PT Bank ANZ Indonesia sebesar USD50.000.000.

Pada tanggal 28 Desember 2022, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp150.000 dari PT ANZ Indonesia, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 4 Januari 2023.

Pada tanggal 15 Mei 2023, LPEI menandatangani perubahan perjanjian fasilitas dengan PT Bank ANZ Indonesia sebesar USD50.000.000.

h. PT Bank Danamon Indonesia

Pada tanggal 20 Maret 2023 LPEI mendapatkan perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp1.075.000 dan sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 16 November 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD50.000.000 dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2024.

Pada tanggal 13 Desember 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD10.000.000 dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2024.

i. PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 22 Juni 2021 LPEI menandatangani Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp3.000.000.

Pada tanggal 21 September 2021, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp2.000.000 dari PT Bank Central Asia Tbk, dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR (tiga bulan) ditambah margin tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 21 September 2023.

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Bilateral (continued)

g. PT ANZ Indonesia

On June 10, 2022, LPEI signed a Facility Agreement from PT Bank ANZ Indonesia amounting to USD50,000,000.

On December 28, 2022, LPEI has withdrawal amounted to Rp150,000 from PT ANZ Indonesia, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on January 4, 2023.

On May 15, 2023, LPEI signed an Amendment of Facility Agreement from PT Bank ANZ Indonesia amounting to USD50,000,000.

h. PT Bank Danamon Indonesia

On March, 20, 2023 LPEI obtained an extension on the Credit Agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk amounting to Rp1,075,000 and Rp1,500,000.

On November 16, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD50,000,000 from PT Bank Danamon Indonesia Tbk which bear interest rate at a certain margin and will be matured on February 16, 2024.

On December 13, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD10,000,000 from PT Bank Danamon Indonesia Tbk which bear interest rate at a certain margin and will be matured on January 12, 2024.

i. PT Bank Central Asia Tbk

On June, 22, 2021 LPEI signed an Amendment of Credit Agreement with PT Bank Central Asia Tbk amounting toRp3,000,000.

On September 21, 2021, LPEI has withdrawal amounted to Rp2,000,000, from PT Bank Central Asia Tbk, which bear interest rate at JIBOR (three months) plus a certain margin and has been repaid on September 21, 2023.

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

i. PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 25 Juli 2022 LPEI menandatangani Perubahan Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp1.500.000, Rp500.000, Rp1.000.000 dan Rp1.500.000.

Pada tanggal 1 Desember 2022 LPEI menandatangi Perubahan Perjanjian atas Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk dengan total sebesar Rp6.500.000.

Pada tanggal 28 Desember 2022, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000 dari PT Bank Central Asia Tbk, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 4 Januari 2023.

Pada tanggal 22 Desember 2022 LPEI menandatangi Perubahan Perjanjian atas Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk dengan total sebesar Rp6.500.000.

Pada tanggal 15 November 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD35.000.000 dari PT Bank Central Asia Tbk, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2024.

j. PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 23 September 2022 LPEI menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit dengan PT Bank UOB Indonesia sebesar Rp2.500.000.

Pada tanggal 29 Desember 2022, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp2.500.000 dari PT Bank UOB Indonesia, dengan tingkat suku bunga tertentu dan telah dilunasi pada tanggal 5 Januari 2023.

Pada tanggal 18 September 2023 LPEI menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit dengan PT Bank UOB Indonesia sebesar Rp2.500.000.

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Bilateral (continued)

i. PT Bank Central Asia Tbk (continued)

On July 25, 2022 LPEI signed an Amendment of Credit Agreement with PT Bank Central Asia Tbk amounting Rp1,500,000, Rp500,000, Rp1,000,000 and Rp1,500,000.

On December 1, 2022 LPEI signed an Amendment of Credit Agreement with PT Bank Central Asia Tbk amounting to Rp6,500,000.

On December 28, 2022, LPEI has withdrawal amounted to Rp1,000,000 from PT Bank Central Asia Tbk, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on January 4, 2023.

On December 22, 2022 LPEI signed an Amendment of Credit Agreement with PT Bank Central Asia Tbk amounting to Rp6.500.000.

On November 15, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD35,000,000 from PT Bank Central Asia Tbk, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on February 15, 2024.

j. PT Bank UOB Indonesia

On September 23, 2022 LPEI signed an Amendment of Credit Agreement with PT Bank UOB Indonesia amounting Rp2,500,000.

On December 29, 2022, LPEI has withdrawal amounted to Rp2,500,000 from PT Bank UOB Indonesia, which bear interest rate at a certain margin and has been repaid on January 5, 2023.

On September 18, 2023 LPEI signed an Amendment of Credit Agreement with PT Bank UOB Indonesia amounting Rp2,500,000.

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

j. PT Bank UOB Indonesia Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 28 Desember 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD35.000.000 dari PT Bank UOB Indonesia, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2024.

Pada tanggal 29 Desember 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar Rp500.000 dari PT Bank UOB Indonesia, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2024

k. PT Bank Pan Indonesia Tbk

Pada tanggal 23 Mei 2022, LPEI menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp1.000.000. Pada tanggal 31 Agustus 2023, LPEI menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Pada tanggal 20 November 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD20.000.000 dari PT Bank Pan Indonesia Tbk, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2024.

l. PT Bank Mizuho Indonesia

Pada tanggal 14 November 2023, LPEI menandatangani Perubahan Perjanjian dengan PT Bank Mizuho Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD30.000.000 dari PT Bank Mizuho Indonesia, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2024.

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Bilateral (continued)

j. PT Bank UOB Indonesia Tbk (continued)

On December 28, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD35,000,000 from PT Bank UOB Indonesia, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on January 3, 2024.

On December 29, 2023, LPEI has withdrawal amounted to Rp500,000 from PT Bank UOB Indonesia, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on January 3, 2024

k. PT Bank Pan Indonesia Tbk

On May 23, 2022 LPEI signed a Facility Agreement from PT Bank Pan Indonesia Tbk amounting to Rp1,000,000. On August 31, 2023, LPEI signed an Amendment of Facility Agreement from PT Bank Pan Indonesia Tbk.

On November 20, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD20,000,000 from PT Bank Pan Indonesia Tbk, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on February 20, 2024.

l. PT Bank Mizuho Indonesia

On November 14, 2023, LPEI signed an Amendment Agreement from PT Bank Mizuho Indonesia.

On December 27, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD30,000,000 from PT Bank Mizuho Indonesia, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on Januari 26, 2024.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Bilateral (lanjutan)

m. PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 21 Desember 2023, LPEI menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit *interchangeable* Fasilitas Pinjaman Musyarakah dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp1.000.000.

Pada tanggal 27 Desember 2023, LPEI melakukan penarikan sebesar USD60.000.000 dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, dengan tingkat suku bunga tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2024.

Pinjaman Syirkah

n. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pada tanggal 31 Maret 2022, LPEI telah menandatangani perjanjian kredit *uncommitted* dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp3.000.000.

Pada tanggal 27 Juni 2022, LPEI melakukan penarikan pinjaman dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp1.500.000, dengan tingkat margin bagi hasil tertentu dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2024.

Berikut ini merupakan persyaratan penting terkait dengan pinjaman yang diterima:

- Tidak dapat melakukan penggabungan, konsolidasi atau rekonstruksi.
- Tidak dapat membuat/mengizinkan tetap berlakunya segala jaminan (sekuritas) atas seluruh atau sebagian dari aset-aset dan pendapatannya.
- Tidak akan menjual, mengalihkan bahkan melepaskan setiap aset-aset dengan ketentuan dapat disewa atau dibeli kembali.
- Tidak dapat menjual, mengalihkan bahkan melepaskan piutang berdasarkan ketentuan tanpa alih.
- Tidak dapat mengajukan perubahan apapun terhadap dokumen-dokumen konstitusional (termasuk untuk menghindari keraguan).

17. Fund Borrowings (continued)

Borrowings Bilateral (continued)

m. PT Bank CIMB Niaga Tbk

On December 21, 2023, LPEI signed a Credit Facility interchangeable with Musyarakah Facility Agreement from PT Bank CIMB Niaga Tbk amounting to Rp1.000.000.

On December 27, 2023, LPEI has withdrawal amounted to USD60,000,000 from PT Bank CIMB Niaga Tbk, which bear interest rate at a certain margin and will be matured on January 29, 2024.

Syirkah Fund

n. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

On March 31, 2022, LPEI signed a uncommitted credit agreement with PT Bank Syariah Indonesia Tbk amounting Rp3,000,000.

On June 27, 2022, LPEI has withdrawal borrowing from PT Bank Syariah Indonesia Tbk amounted to Rp1,500,000, which bear profit sharing margin at a certain margin and will be mature on June 27, 2024.

Below are significant covenant of the borrowings:

- *Cannot carry out a reconstruction.*
- *Cannot create or allow the validity of all guarantees over all or part of its assets and income.*
- *Cannot sell, transfer or even dispose of its assets provided on condition that can be rented or repurchased.*
- *Cannot sell, transfer or even dispose of its receivables based on non-transfer provisions.*
- *Cannot propose any changes to constitutional documents (including for avoidance of doubt).*

17. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

Pinjaman Syirkah (lanjutan)

Berikut ini merupakan persyaratan penting terkait dengan pinjaman yang diterima: (lanjutan)

- Tidak dapat mempergunakan dana Fasilitas Kredit menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan
- Tidak akan mengadakan perjanjian apapun yang mungkin memiliki dampak yang merugikan secara materil atau mengakibatkan pelanggaran terhadap segala dokumen pembiayaan oleh Debitur.
- Tidak dapat membuat atau mengadakan pengumuman apapun, siaran pers atau publikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian yang menjadikan referensi atas pihak pembiayaan.

- Memastikan bahwa modal yang dimiliki tidak kurang dari Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah)
- *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 10,5% (sepuluh koma lima persen).
- Rasio *Non Performing Loan* (NPF) maksimum 5% (lima persen).

- Rasio *Financing to Asset* minimum 75% (tujuh puluh lima persen).
- *Gearing Ratio* maksimal 20x

17. Fund Borrowings (continued)

Syirkah Fund (continued)

Below are significant covenant of the borrowings: (continued)

- *Cannot use credit facility funds in violation of provisions*

- *Will not enter into any agreement or obligation that may have a material adverse impact or whose implementation result in a violation of any provision of the financing documents by the debtor.*
- *Cannot make or provide any announcements, press releases or other publications in connection with the Agreement in any way related to the Facility or which reference towards financing parties.*
- *Ensure that the Capital owned is not less than Rp4,000,000,000,000 (four trillion Rupiah).*
- *Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum 10,5% (ten point five percent)*
- *Not Performing Financing (NPF) Ratio Creditor are a maximum of 5% (five percent).*
- *The Financing to Asset Ratio is at least 75% (seventy-five percent).*
- *Maximum Gearing Ratio is 20x*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

18. Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi / *Estimated Losses on Commitments and Contingencies*

a. Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi / *The estimated losses on commitments and contingencies*

	31 Desember/ *December 31, 2023*						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ Special *mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	*Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 39)							*Related parties (Note 39)*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	592,565	--	--	--	--	592,565	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	409,571	--	--	--	--	409,571	*Bank guarantee*
Penjaminan kredit - PEN	--	1,000,000	--	--	--	1,000,000	*Credit guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	8,968	--	--	--	--	8,968	*Outstanding irrevocable L/C*
	1,011,104	1,000,000	--	--	--	2,011,104	
Pihak ketiga							*Third parties*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,164,486	--	--	--	61,562	1,226,048	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	1,267,782	--	--	--	--	1,267,782	*Bank guarantee*
Penjaminan kredit - PEN	1,306,100	--	--	--	--	1,306,100	*Credit guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	810	--	--	--	--	810	*Outstanding irrevocable L/C*
	3,739,178	--	--	--	61,562	3,800,740	
Total mata uang Rupiah	4,750,282	1,000,000	--	--	61,562	5,811,844	*Total Indonesia Rupiah*
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollars***
Pihak berelasi (Catatan 39)							*Related parties (Note 39)*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	781,271	--	--	--	--	781,271	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	1,374,394	--	--	--	--	1,374,394	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	73,944	--	--	--	--	73,944	*Outstanding irrevocable L/C*
	2,229,609	--	--	--	--	2,229,609	
Pihak ketiga							*Third parties*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,735,314	--	31	--	530	1,735,875	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	4,486,470	--	--	--	--	4,486,470	*Bank guarantee*
Penjaminan Kredit - PEN	846,835	--	--	--	--	846,835	*Credit Guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	35,342	--	--	--	--	35,342	*Outstanding irrevocable L/C*
	7,103,961	--	31	--	530	7,104,522	
Sub Total	9,333,570	--	31	--	530	9,334,131	*Sub Total*
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Yen Jepang							***Japanese Yen***
Pihak ketiga							*Third parties*
Bank garansi	14,503	--	--	--	--	14,503	*Bank guarantee*
Sub Total	14,503	--	--	--	--	14,503	*Sub Total*
Euro Eropa							***European Euro***
Pihak berelasi (Catatan 39)							*Related parties (Note 39)*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	6,592	--	--	--	--	6,592	*Outstanding irrevocable L/C*
	6,592	--	--	--	--	6,592	
Pihak ketiga							*Third parties*
Bank garansi	189,486	--	--	--	--	189,486	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	--	--	--	--	*Outstanding irrevocable L/C*
	189,486	--	--	--	--	189,486	
Sub Total	196,078	--	--	--	--	196,078	*Sub Total*
Total mata uang asing	9,544,151	--	31	--	530	9,544,712	*Total foreign currencies*
Total	**14,294,433**	**1,000,000**	**31**	**--**	**62,092**	**15,356,556**	***Total***

18. Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

a. Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

18. Estimated Losses on Commitments and Contingencies (continued)

a. The estimated losses on commitments and contingencies (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2022*						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ Special *mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	*Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 39)							*Related parties (Note 39)*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,031,216	--	--	--	--	1,031,216	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	368,830	--	--	--	--	368,830	*Bank guarantee*
Penjaminan kredit - PEN	--	1,000,000	--	--	--	1,000,000	*Credit guarantee - PEN*
	1,400,046	1,000,000	--	--	--	2,400,046	
Pihak ketiga							*Third parties*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	560,234	3,598	958	--	58,079	622,869	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	1,014,606	5,214	--	--	--	1,019,820	*Bank guarantee*
Penjaminan kredit - PEN	1,786,550	--	--	--	--	1,786,550	*Credit guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	4,727	--	--	--	--	4,727	*Outstanding irrevocable L/C*
	3,366,117	8,812	958	--	58,079	3,433,966	
Total mata uang Rupiah	4,766,163	1,008,812	958	--	58,079	5,834,012	*Total Indonesia Rupiah*
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat							***United States Dollars***
Pihak berelasi (Catatan 39)							*Related parties (Note 39)*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	257,807	--	--	--	--	257,807	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	99,088	1,074,158	--	--	--	1,173,246	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	43,806	--	--	--	--	43,806	*Outstanding irrevocable L/C*
	400,701	1,074,158	--	--	--	1,474,859	
Pihak ketiga							*Third parties*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,167,744	25,256	--	--	536	1,193,536	*Unused loan facilities to debtors*
Bank garansi	5,963,898	--	--	--	--	5,963,898	*Bank guarantee*
Penjaminan Kredit - PEN	910,699	--	--	--	--	910,699	*Credit Guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	334,381	--	--	--	--	334,381	*Outstanding irrevocable L/C*
	8,376,722	25,256	--	--	536	8,402,514	
Sub Total	8,777,423	1,099,414	--	--	536	9,877,373	*Sub Total*
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Yen Jepang							***Japanese Yen***
Pihak ketiga							*Third parties*
Bank garansi	20,605	--	--	--	--	20,605	*Bank guarantee*
Sub Total	20,605	--	--	--	--	20,605	*Sub Total*
Euro Eropa							***European Euro***
Pihak berelasi (Catatan 39)							*Related parties (Note 39)*
Bank garansi	750	--	--	--	--	750	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	11,167	--	--	--	--	11,167	*Outstanding irrevocable L/C*
	11,917	--	--	--	--	11,917	
Pihak ketiga							*Third parties*
Bank garansi	184,408	--	--	--	--	184,408	*Bank guarantee*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	990	--	--	--	--	990	*Outstanding irrevocable L/C*
	185,398	--	--	--	--	185,398	
Sub Total	197,315	--	--	--	--	197,315	*Sub Total*
Total mata uang asing	8,995,343	1,099,414	--	--	536	10,095,293	*Total foreign currencies*
Total	**13,761,506**	**2,108,226**	**958**	**--**	**58,615**	**15,929,305**	***Total***

18. Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

b. Perubahan estimasi klaim penjaminan

Perubahan estimasi klaim penjaminan adalah sebagai berikut:

18. Estimated Losses on Commitments and Contingencies (continued)

b. Changes in estimated guarantee claims

The changes in estimated guarantee claims are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31, 2023*			
	Rupiah	Mata uang asing/ *Foreign currencies*	Total	
Saldo awal	473,170	5,487	478,657	*Beginning balance*
Pengurangan tahun berjalan penjaminan	(2,504)	(490)	(2,994)	*Deduction during the year of guarantee*
Pembentukan cadangan *stop loss* penjaminan - PEN	(26,663)	--	(26,663)	*Addition stop loss guarantee - PEN*
Selisih kurs penjabaran tahun berjalan	--	(89)	(89)	*Foreign currency translation during the year*
Saldo akhir	**444,003**	**4,908**	**448,911**	***Ending balance***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31, 2022*			
	Rupiah	Mata uang asing/ *Foreign currencies*	Total	
Saldo awal	387,871	4,688	392,559	Beginning balance
Pembentukan tahun berjalan penjaminan	(146)	798	652	*Addition during the year of guarantee*
Pembentukan cadangan *stop loss* penjaminan - PEN	85,445	--	85,445	*Addition stop loss guarantee - PEN*
Selisih kurs penjabaran tahun berjalan	--	1	1	*Foreign currency translation during the year*
Saldo akhir	**473,170**	**5,487**	**478,657**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa estimasi klaim penjaminan yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian klaim penjaminan.

Management believes that the estimated guarantee claims as provided is adequate to cover losses on guarantee claim.

19. Liabilitas Sewa

Rincian liabilitas sewa berdasarkan jatuh tempo pembayaran pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

19. Lease Liabilities

Detail of lease liabilities based on maturity payment as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember / *December 31,*		
	2023	2022	
Rincian liabilitas sewa berdasarkan jatuh tempo			*Detail of lease liabilities based on maturity*
Sampai dengan 1 tahun	2,961	2,921	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun	2,376	2,632	*More than 1 up to 3 years*
Total	**5,337**	**5,553**	***Total***

19. Liabilitas Sewa (lanjutan) / *19. Lease Liabilities (continued)*

Semua liabilitas utang sewa didenominasi dalam Rupiah yang dibayar setiap bulan dalam suatu jumlah tetap.

All the lease liabilities are denominated in Rupiah, payable every month at fixed amounts.

Berikut adalah rincian liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Following is the details of lease liabilities as of December 31, 2023 and 2022:

Rincian liabilitas sewa	Saldo awal 1 Januari 2023/ *Beginning balance January 1, 2023*	Penambahan liabilitas sewa/ *Additions of lease liabilities*	(Pengurangan) liabilitas sewa/ *(Deduction) of lease liabilities*	Beban bunga liabilitas sewa/ *Interest expense of lease liabilities*	Pembayaran sewa/ *Payments of lease liabilities*	Saldo, 31 Desember 2023 *Balance, December 31, 2023*	*Detail of lease liabilities*
Kendaraan bermotor	1,801	--	--	61	(1,264)	598	*Vehicles*
Bangunan	3,752	3,388	--	279	(2,680)	4,739	*Building*
Total	**5,553**	**3,388**	**--**	**340**	**(3,944)**	**5,337**	***Total***

Rincian liabilitas sewa	Saldo awal 1 Januari 2022/ *Beginning balance January 1, 2022*	Penambahan liabilitas sewa/ *Additions of lease liabilities*	(Pengurangan) liabilitas sewa/ *(Deduction) of lease liabilities*	Beban bunga liabilitas sewa/ *Interest expense of lease liabilities*	Pembayaran sewa/ *Payments of lease liabilities*	Saldo, 31 Desember 2022/ *Balance, December 31, 2022*	*Detail of lease liabilities*
Kendaraan bermotor	3,886	336	(1,342)	165	(1,244)	1,801	*Vehicles*
Bangunan	7,094	1,255	--	206	(4,803)	3,752	*Building*
Total	**10,980**	**1,591**	**(1,342)**	**371**	**(6,047)**	**5,553**	***Total***

20. Liabilitas Lain-lain / *20. Other Liabilities*

	31 Desember / *December 31,* 2023	2022	
Rupiah			***Rupiah***
Bunga yang masih harus dibayar	153,486	188,618	*Accrued interest payable*
Rekening penampungan	258,163	184,055	*Suspense accounts*
Jaminan atas pembukaan L/C dan bank garansi	10,697	72,169	*Collateral for L/C and bank guarantee opening*
Tantiem dan jasa poduksi	24,936	16,701	*Tantiem and accrued bonus*
Lain-lain	174,761	100,386	*Others*
	622,043	561,929	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Jaminan atas pembukaan L/C dan bank garansi	292,064	370,406	*Collateral for L/C and bank guarantee opening*
Bunga yang masih harus dibayar	127,438	178,436	*Accrued interest payable*
Rekening penampungan	152,912	101,527	*Suspense accounts*
Lain-lain	70,029	234,236	*Others*
	642,443	884,605	
Total	**1,264,486**	**1,446,534**	***Total***

Termasuk dalam rekening penampungan adalah rekening yang digunakan oleh debitur untuk melakukan pembayaran pokok kembali maupun bunga atas pembiayaan dan piutang.

The suspense accounts include accounts used by debtors for the repayment of principal and interest of financing and receivables.

21. Kontribusi Modal Pemerintah

Berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa modal awal LPEI berasal dari seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). Selanjutnya, berdasarkan pasal 19 ayat (2) dari undang-undang di atas, dinyatakan bahwa modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Berdasarkan surat Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-139/SJ.3/2010 tanggal 3 Februari 2010 perihal Permintaan Tinjauan Hukum Terkait Penerapan Modal Awal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa saldo laba yang ditahan termasuk dalam pengertian seluruh kekayaan negara yang tertanam di PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

Dengan demikian, modal saham dan saldo laba direklasifikasikan sebagai Kontribusi Modal Pemerintah yang sebelumnya dalam bentuk modal saham, cadangan umum, cadangan tujuan, dan belum ditentukan penggunaannya masing-masing sebesar Rp3.000.000, Rp1.088.094, Rp140.470, dan Rp93.022.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4.000.000. Dalam hal modal LPEI berkurang dari Rp4.000.000, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku. Penambahan modal LPEI untuk menutup kekurangan modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada tanggal 22 Desember 2010, LPEI menerima kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar Rp2.000.000. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI menjadi sebesar Rp6.321.586.

21. Government Capital Contribution

Based on the explanation on article 19 paragraph (1) Law No. 2 of Year 2009 dated January 12, 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, it was stated that LPEI's initial capital is composed of all shares of the state's treasury in PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). Furthermore, based on article 19 paragraph (2) of above mentioned law, the paid up capital as specified in paragraph (1) here of, shall be the state's treasury and is separated and undivided into shares. Based on the letter of the Head of Legal Department of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-139/SJ.3/2010 dated February 3, 2010 regarding Request for Legal Review Related Legal to the Initial Capital of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, retained earnings included all state's treasury in PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

Therefore, the share capital and retained earnings were reclassified as Government Contributed Capital which were previously in the form of capital stocks, general reserve, specific reserve, and unappropriated retained earnings amounting to Rp3,000,000, Rp1,088,094, Rp140,470, and Rp93,022, respectively.

Based on Law No. 2 of Year 2009 dated January 12, 2009 regarding Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPEI's initial capital shall be at least Rp4,000,000. In the event that LPEI's capital becomes less than Rp4,000,000, the Government shall cover such deficiency from the State Budget based on the applicable mechanism. LPEI's additional capital to cover such capital deficiency shall be determined by Government Regulation.

On December 22, 2010, LPEI received the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia which amounted to Rp2,000,000. Therefore, as of December 31, 2013 and 2012, the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia in LPEI amounted to Rp6,321,586.

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan, Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, perencanaan investasi pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satunya adalah penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN/Lembaga dan untuk tahun anggaran 2014. LPEI telah melakukan permohonan PMN sebesar Rp1.000.000. Permohonan tersebut telah masuk ke dalam nota APBN tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1.000.000.

Berdasarkan perencanaan pemerintah, maka pada tanggal 30 Desember 2014, LPEI menerima kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar Rp1.000.000.

Untuk memperkuat struktur permodalan dan berdasarkan pada UU No. 2 tahun 2009, atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan telah melebihi 25% dari modal, 75% telah dilakukan kapitalisasi modal sebesar Rp54.370 dan 25% sebagai penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp18.123. LPEI telah menyetorkan ke Pemerintah Negara Republik Indonesia sebesar Rp18.123 pada bulan Agustus 2014.

Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2014, kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI menjadi sebesar Rp7.375.956.

21. Government Capital Contribution (continued)

Based on the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 247/PMK.02/2012 on Procedures for Planning, Determination, Allocation, and Implementation Document Legalization of State General Treasury, the government plans to increase the Capital Participation of the Government of the Republic of Indonesia (PMN) to State Owned Company/Institutions for the year 2014. Hence, LPEI has made a request for PMN amounting to Rp1,000,000. The request has been incorporated in APBN year 2014.

Based on Government Regulation No. 86 year 2014 dated October 17, 2014 regarding the Capital Contribution from the State's Treasury into The Capital of LPEI, stated that the Republic of Indonesia increased its capital of the state amounting to Rp1,000,000.

Based on the above government plan on December 30, 2014, LPEI received the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp1,000,000.

To strengthen the capital structure and based on Law No. 2 of 2009, the excess of the general reserve and the reserve accumulation of interest has exceeded 25% of the capital, 75% has been capitalized amounting to Rp54,370 and 25% as non-tax revenue amounting to Rp18,123. LPEI has deposited to the Government of the Republic of Indonesia at Rp18,123 in August 2014.

Therefore, as of December 31, 2014, the contributed capital from the Government of the Republic of Indonesia in LPEI amounted to Rp7,375,956.

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1.000.000. Penambahan penyertaan modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 26 November 2015.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1154/KMK.06/2015 tanggal 12 November 2015, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2013 dan 2014, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2013 dan 2014 sebesar Rp554.586 dan Rp798.046.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp4.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp2.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2.000.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 31 Desember 2016.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan LPEI berdasarkan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.06/2015, ditetapkan bahwa dalam hal akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan telah melebihi 25% dari modal awal LPEI, kelebihannya 75% digunakan untuk kapitalisasi modal, dan 25% sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

21. Government Capital Contribution (continued)

Based on Government Regulation No. 67 year 2015 dated August 20, 2015 regarding the Capital Contribution from the state's treasury into the capital of Indonesia Eximbank, stated that the Republic of Indonesia increased its capital of the state amounting to Rp1,000,000. This increase in capital was received and recorded effectively by LPEI on November 26, 2015.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1154/KMK.06/2015 dated November 12, 2015, on the Establishment of Share Capitalization for Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia from surplus in year 2013 and 2014, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2013 and 2014 surplus amounting to Rp554,586 and Rp798,046.

Based on Government Regulation No. 81 year 2016 dated December 30, 2016 regarding Government of Indonesia's capital contribution to Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp4,000,000. The increase in capital is composed of Rp2,000,000 to increase LPEI's business capacity and Rp2,000,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 31, 2016.

In order to strengthen LPEI's capital structure, pursuant to Article 20 paragraph (2) of Law No. 2 of 2009 dated January 12, 2009 of LPEI and Ministry of Finance No. 260/PMK.06/2015, if the accumulated general and specific reserves has exceeded 25% of the initial capital of LPEI, the excess of 75% is used for the capitalization of capital, and 25% as non-Tax Revenue.

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 463/KMK.06/2016 tanggal 15 Juni 2016, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2015, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2015 sebesar Rp963.600.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp3.200.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp1.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp2.200.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 30 Desember 2017.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 788/KMK.06/2017 tanggal 6 November 2017, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2016, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2016 sebesar Rp951.998.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 620/KMK.06/2018 tanggal 24 September 2018, tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berasal dari surplus tahun 2017, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2017 sebesar Rp686.211.

21. Government Capital Contribution (continued)

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 463/KMK.06/2016 dated June 15, 2016, on the Establishment of Share Capitalization for LPEI derived from surplus in year 2015, the Ministry of Finance set share Capitalization from LPEI 2015 surplus amounting to Rp963,600.

Based on Government Regulation No. 55 year 2017 dated December 28, 2017 regarding Government of Indonesia's Capital Contribution to LPEI, stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp3,200,000. The increase in capital is composed of Rp1,000,000 to increase LPEI's business capacity and Rp2,200,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 30, 2017.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 788/KMK.06/2017 dated November 6, 2017, on the Establishment of Share Capitalization for Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia derived from surplus in year 2016, the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2016 surplus amounting to Rp951,998.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 620/KMK.06/2018 dated September 24, 2018, on the Establishment of Share Capitalization for LPEI derived from surplus in year 2017, the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2017 surplus amounting to Rp686,211.

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp2.500.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp1.500.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp1.000.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 28 Juni 2019.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-838/MK.06/2019 tanggal 22 November 2019, tentang Pertanggungjawaban Laporan Keuangan LPEI Tahun 2018 dan Penetapan Penggunaan Surplus Usaha Tahun 2018, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2018 sebesar Rp115.879.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp4.000.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan Rp1.000.000 untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal Rp4.000.000 tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 12 Agustus 2020 dan Rp1.000.000 tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI tanggal 18 Agustus 2020.

21. Government Capital Contribution (continued)

Based on Government Regulation No. 44 year 2019 dated June 26, 2019 regarding Government of Indonesia's capital Contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp2,500,000. The increase in capital is composed of Rp1,500,000 to increase LPEI's business capacity and Rp1,000,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on June 28, 2019.

According to the Letter of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-838/MK.06/2019 dated November 22, 2019, on Accountability of LPEI Financial Report of 2018, Determination of Business from Surplus in Year 2018, the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2018 surplus amounted to Rp115,879.

Based on Government Regulation No. 40 year 2020 dated July 21, 2020 regarding Government of Indonesia's Capital Contribution to LPEI, stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp5,000,000. The increase in capital is composed of Rp4,000,000 to increase LPEI's business capacity and Rp1,000,000 to carry out National Interest Account. The capital injection amounting Rp4,000,000 was received and recorded by LPEI effective on August 12, 2020 and Rp1,000,000 was received and recorded by LPEI effective on August 18, 2020.

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud digunakan untuk Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI tanggal 30 Desember 2020.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-688/MK.06/2021 tanggal 3 Agustus 2021, tentang Pertanggungjawaban Laporan Keuangan LPEI Tahun 2020, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2020 sebesar Rp194.663.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 117 tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp5.000.000. Penambahan penyertaan modal dimaksud terdiri dari Rp2.500.000 digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha LPEI dan sebesar Rp2.500.000 digunakan untuk melaksanakan Penugasan Khusus. Modal tersebut efektif diterima dan dibukukan oleh LPEI pada tanggal 29 Desember 2021 dan tanggal 30 Desember 2021.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-688/MK.06/2021, dinyatakan bahwa atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan berdasarkan surplus tahun buku 2020, terdapat PNBP yang harus disetorkan ke kas negara sebesar Rp 64.888 dan Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari Surplus tahun buku 2020 sebesar Rp194.663. LPEI telah menyetorkan PNBP tersebut pada bulan Agustus 2021.

21. Government Capital Contribution (continued)

Based on Government Regulation No. 78 year 2020 dated December 30, 2020 regarding Government of Indonesia's Capital Contribution to LPEI, stated that the Government of Indonesia increased its capital contribution by Rp5,000,000. The increase in capital is to carry Implementation of The National Economic Recovery Program. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 30, 2020.

According to the Letter of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. S-688/MK.06/2021 dated August 3, 2021, on Accountability of LPEI Financial Report of 2020, the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2020 surplus amounted to Rp194,663.

Based on Government Regulation No. 117 year 2021 dated December 15, 2021 regarding Government of Indonesia's Capital Contribution to LPEI stated that the Government of Indonesia increased its Capital Contribution by Rp5,000,000. The increase in capital is composed of Rp2,500,000 to increase LPEI's business capacity and Rp2,500,000 to carry out National Interest Account. The capital injection was received and recorded by LPEI effective on December 29, 2021 and December 30, 2021.

Based on the Letter of the Minister of Finance No. S-688/MK.06/2021, regarding the excess accumulated general and specific reserves based on surplus of year 2020, there are non-tax revenues to be deposited into the state treasury amounting to Rp64,888 and the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2020 surplus amounted to Rp194,663. LPEI has deposited the non-tax revenues in August 2021.

21. Kontribusi Modal Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-662/MK.06/2022 dinyatakan bahwa atas kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan berdasarkan surplus tahun buku 2021, terdapat PNBP yang harus disetorkan ke kas negara sebesar Rp87.164 dan Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal LPEI yang berasal dari surplus tahun buku 2021 sebesar Rp261.492. LPEI telah menyetorkan PNBP tersebut pada bulan Agustus 2022.

Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 kontribusi modal dari Pemerintah Negara Republik Indonesia pada LPEI adalah sebesar Rp37.602.431.

21. Government Capital Contribution (continued)

Based on the Letter of the Minister of Finance No. S-662/MK.06/2022 regarding the excess accumulated general and specific reserves based on surplus of year 2021, there are non-tax revenues to be deposited into the state treasury amounting to Rp87,164. and the Ministry of Finance set Share Capitalization from LPEI 2021 surplus amounted to Rp261,492. LPEI has deposited the non-tax revenues in August 2022.

Therefore as of December 31, 2023 and 2022, the capital contribution from the Government of the Republic of Indonesia in LPEI amounted to Rp37,602,431.

22. Pembagian Laba Tahun Berjalan

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.06/2015, surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kegiatan digunakan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, dan bagian laba Pemerintah. Persentase alokasi surplus ditetapkan sebagai cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari surplus dan jasa produksi dan tantiem serta bagian laba Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari surplus. Besarnya persentase untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, serta bagian laba Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-662/MK.06/2022 tanggal 14 Agustus 2022, Menteri Keuangan menetapkan penggunaan surplus usaha LPEI tahun buku 2021 sebesar Rp387.396 untuk alokasi cadangan umum dan tujuan sebesar Rp348.656, jasa produksi sebesar Rp15.108, dan bagian laba Pemerintah sebesar Rp23.631.

Jasa produksi, tantiem, dan bagian laba Pemerintah tahun buku 2021 telah dibayarkan pada bulan Agustus 2022.

22. Distribution of Income for the Current Year

According to article 21 of Republic of Indonesia Law No. 2 Year 2009 regarding LPEI and Regulation of the Minister of Finance No. 260/PMK.06/2015, the surplus gained by LPEI in 1 (one) year operation shall be used for general reserve, special purpose reserve, performance bonus and tantiem, and the Government's profit share. The surplus allocation percentage shall be determined as follows: general reserve and special purpose reserve shall be 90% (ninety percent) of the surplus and performance bonus and tantiem and the Government's profit share shall be 10% (ten percent) of the surplus. The percentage amount for general reserve, special purpose reserve, performance bonus and tantiem, including Government's profit share shall be determined by the Ministry of Finance.

According to the Letter of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-662/MK.06/2022 dated August 14, 2022, the Ministry of Finance determined the business surplus for the year ended 2021 amounting to Rp387,396 for the allocation of general and special purpose reserve amounting to Rp348,656, bonus amounting to Rp15,108, and Government's profit share amounting to Rp23,631.

Bonus, tantiem, and Government's profit share for 2021 were paid in August 2022.

23. Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah / *23. Interest Income and Income From Sharia*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Penugasan Umum			***General Assignment***
Pembiayaan dan piutang			*Financing and receivables*
Modal kerja	1,298,830	1,225,072	*Working capital*
Investasi	1,656,597	1,422,521	*Investment*
Konsumsi	10,595	9,906	*Consumption*
Pendapatan Usaha Syariah	488,450	594,439	*Income from sharia*
Penempatan pada bank			*Placements with banks*
Deposito berjangka	26,405	11,879	*Time deposit*
Call money	141,862	15,950	*Call money*
Efek-efek	18,860	25,967	*Securities*
Giro pada bank	2,117	682	*Current accounts with banks*
	3,643,716	3,306,416	
Penugasan Khusus			***National Interest Account***
Deposito berjangka	212,983	268,294	*Time deposit*
Pembiayaan dan piutang			*Financing and receivables*
Modal kerja	43,054	33,385	*Working capital*
Investasi	65,567	60,108	*Investment*
Pendapatan Usaha Syariah	141	148	*Income from sharia*
Efek-efek	83,971	42,830	*Securities*
Giro pada bank	2,601	361	*Current account with banks*
	408,317	405,126	
Total	**4,052,033**	**3,711,542**	***Total***

Berikut adalah rincian pendapatan bunga berdasarkan klasifikasi aset keuangan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Following is the details of interest income according to the classification of financial assets for years ended December 31, 2023 and 2022:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Biaya perolehan diamortisasi			*Amortised cost*
Pembiayaan dan piutang	3,562,626	3,345,579	*Financing and receivables*
Penempatan pada bank	381,250	296,123	*Placements with banks*
Giro pada bank	4,732	1,043	*Current accounts with banks*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			*Fair value through other comprehensive income*
Efek-efek	103,425	68,797	*Securities*
Total	**4,052,033**	**3,711,542**	***Total***

24. Pendapatan Usaha Dari Ujrah

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pendapatan usaha dari ujrah adalah sebesar Rp64 dan Rp309.

24. Income From Ujrah

For the years ended December 31, 2023 and 2022, income from ujrah were amounted to Rp64 and Rp309, respectively.

25. Beban Bunga

Akun ini merupakan beban bunga atas:

25. Interest Expense

Interest expense was derived from:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Rupiah			***Rupiah***
Efek-efek utang yang diterbitkan	1,357,630	1,573,687	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	85,662	238,206	*Fund borrowing*
	1,443,292	1,811,893	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Efek-efek utang yang diterbitkan	332,475	325,016	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	1,353,126	799,205	*Fund borrowing*
	1,685,601	1,124,221	
Total	**3,128,893**	**2,936,114**	***Total***

26. Pembentukan (Pembalikan) Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non Keuangan

26. Provision (Reversal) for Impairment Losses on Financial Assets and Non Financial Asset

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Giro pada bank (Catatan 5b)	1	(9)	*Current accounts with banks (Note 5b)*
Penempatan pada bank (Catatan 6d)	(113)	(1,786)	*Placements with banks (Note 6d)*
Pembiayaan dan piutang, dan Pembiayaan dan piutang syariah (Catatan 9h)	16,966,650	1,984,984	*Financing and receivables and sharia financing and receivables (Note 9h)*
Tagihan akseptasi (Catatan 11c)	380	(2,582)	*Acceptance receivables (Note 11c)*
Piutang pembiayaan garansi (Catatan 9i)	(39,297)	--	*Guarantee financing receivables (Note 9i)*
Piutang lainnya	4,366	--	*Other receivables*
Agunan yang diambil alih (Catatan 14)	407	126,989	*Foreclosed assets (Note 14)*
Total	**16,932,394**	**2,107,596**	***Total***

27. Beban Umum dan Administrasi / *27. General and Administrative Expenses*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	104,144	109,540	*Depreciation of premises and equipment (Note 13)*
Jasa profesional	97,699	74,861	*Professional services*
Perbaikan dan pemeliharaan	20,644	17,252	*Repairs and maintenance*
Sewa	19,030	22,829	*Rent*
Iklan dan promosi	12,214	6,885	*Advertising and promotions*
Perjalanan dinas	12,177	8,838	*Travelling*
Komunikasi	9,642	10,058	*Communications*
Corporate social responsibilities	6,727	2,975	*Corporate social responsibilities*
Biaya berlangganan	3,489	2,581	*Subscription cost*
Listrik dan air	3,238	3,265	*Electricity and water*
Kegiatan perusahaan	1,706	1,299	*Corporate activities*
Percetakan dan perlengkapan kantor	1,395	1,813	*Printing and office supplies*
Aktivitas pegawai	586	387	*Employee activities*
Lain-lain	6,548	7,797	*Others*
Total	**299,239**	**270,380**	***Total***

Termasuk dalam lain-lain adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk transportasi, beban bunga atas liabilitas sewa, donasi, asuransi atas kendaraan dinas, dan bea materai.

Included in others are expenses disbursed for transportation, interest expense of lease liabilities, donation, insurance on official vehicles, and stamp duty.

28. Beban Gaji dan Tunjangan / *28. Salaries and Benefits*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Beban gaji dan tunjangan	262,599	263,163	*Salaries and benefits expenses*
Manfaat lain-lain	91,736	69,757	*Other benefits*
Tunjangan hari raya	38,713	36,753	*Religion holiday benefits*
Tunjangan kesehatan	26,930	21,314	*Medical allowance*
Asuransi	17,123	19,707	*Insurance*
Pendidikan dan pelatihan	14,824	18,557	*Training and education*
Imbalan kerja (Catatan 29)	2,032	10,407	*Employee benefits (Note 29)*
Lain-lain	28,332	28,965	*Others*
Total	**482,289**	**468,623**	***Total***

Termasuk di dalam beban gaji dan tunjangan adalah beban atas perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) sebesar Rp1.621 dan Rp5.622 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 9h).

Included in salaries and benefits expenses is the amount expensed arising from the difference between the employee loan's interest rates and the Base Lending Rate (BLR) which amounted to Rp1,621 and Rp5,622 for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 9h).

Termasuk dalam lain-lain adalah honorarium atas staf ahli Dewan Direktur.

Included in others are honorarium for technical assistance of the Board of Directors.

28. Beban Gaji dan Tunjangan (lanjutan)

Rincian gaji, tunjangan, serta jasa produksi dan tantiem atas Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah, untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

28. Salaries and Benefits (continued)

The details of salaries, allowances, and bonuses and tantiem of the Boards of Directors, Managing Directors, Audit Committee, and Sharia Supervisory Board, for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*					
	Jumlah Pegawai/ Number of *Employees*	Gaji/ *Salaries*	Tunjangan/ *Allowances*	Bonus dan Tantiem/ Bonuses and *Tantiem*	*Total*	
Dewan Direktur	5	5,448	6,797	--	12,245	*Board of Directors*
Direktur Pelaksana	5	9,709	13,829	--	23,538	*Managing Directors*
Komite Audit	2	768	49	--	817	*Audit Committee*
Komite Pemantau Risiko	2	726	46	--	772	*Risk Management Committee*
Dewan Pengawas Syariah	2	693	43	--	736	*Sharia Supervisory Board*
Wakil Ketua Eksekutif Senior	5	6,760	14,229	--	20,989	*Senior Executive Vice President*
Total	**21**	**24,104**	**34,993**	**--**	**59,097**	***Total***

	31 Desember/ *December 31, 2022*					
	Jumlah Pegawai/ Number of *Employees*	Gaji/ *Salaries*	Tunjangan/ *Allowances*	Bonus dan Tantiem/ Bonuses and *Tantiem*	*Total*	
Dewan Direktur	5	5,293	6,117	--	11,410	*Board of Directors*
Direktur Pelaksana	6	11,591	14,304	--	25,895	*Managing Directors*
Komite Audit	2	760	51	--	811	*Audit Committee*
Komite Pemantau Risiko	2	750	50	--	800	*Risk Management Committee*
Dewan Pengawas Syariah	2	683	45	--	728	*Sharia Supervisory Board*
Wakil Ketua Eksekutif Senior	6	6,693	10,365	838	17,896	*Senior Executive Vice President*
Total	**23**	**25,770**	**30,932**	**838**	**57,540**	***Total***

29. Liabilitas Imbalan Kerja

Berdasarkan kebijakan LPEI, pegawai memperoleh tunjangan dan manfaat selain gaji berupa tunjangan hari raya (THR), penggantian biaya pengobatan, tunjangan kematian, tunjangan cuti, masa persiapan pensiun, penghargaan masa bakti, dana pensiun, jasa produksi, asuransi, dan manfaat lainnya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

29. Liability For Employee Benefits

Under LPEI's policy, in addition to salaries, the employees are entitled to allowances and benefits, which are religion holiday benefits (THR), medical reimbursements, death allowances, leave allowances, pension preparation period, long service award, pension plan, bonus, insurance, and other benefits based on Job Creation Law No. 11/2020.

29. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Pensiun iuran pasti
LPEI menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh pegawai tetapnya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia. Jumlah kontribusi LPEI untuk dana pensiun adalah sebesar 6,00% dari gaji pokok pegawai yang disajikan sebagai bagian dari "beban gaji dan tunjangan" dalam laba rugi. Jumlah kontribusi LPEI adalah sebesar Rp6.092 dan Rp6.031 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Pensiun manfaat pasti
LPEI menyiapkan penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020 dan Peraturan Pemerintah RI No.35/2021 yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta imbalan kerja atas *long-service award.*

LPEI memberikan imbalan tersebut mana yang lebih tinggi antara Peraturan Perusahaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020.

Liabilitas imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal tertanggal 11 Januari 2024 dan 9 Januari 2023, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022:

Penyisihan imbalan kerja
Penyisihan imbalan kerja terdiri dari:

29. Liability For Employee Benefits (continued)

Defined contribution plan
LPEI implements a defined contribution plan covering all of their permanent employees, which is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia. LPEI's contribution to the pension plan retirement fund is 6.00% of the employees' basic salaries and is presented as part of "salaries and benefits" in profit or loss. LPEI's contributions were amounted to Rp6,092 and Rp6,031 for the years ended December 31, 2023 and 2022.

Defined benefit plan
LPEI has provided allowance for employee long-service and post-employement benefits in accordance with Job Creation Law No.11/2020 and Government Regulation of The Republic of Indonesia No.35/2021 which include severance fee, service pay benefits, and compensation fees as well as employee benefit long-service award.

LPEI has provided the benefits whichever is higher between Collective Labor Agreement with Job Creation Law No.11/2020.

Liability for employee benefits is computed by an independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal dated January 11, 2024 and January 9, 2023 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively:

Provision for employee benefits
The provision for employee benefits consist of:

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Program imbalan pascakerja	80,562	63,403	*Post-employment benefit plan*
Imbalan jangka panjang lainnya	58,805	79,381	*Other long-term employee benefit*
Program PKWT	3,155	1,730	*PKWT Program*
Saldo akhir	**142,522**	**144,514**	***Ending balance***

Program imbalan pascakerja terdiri dari program pesangon dan program kesehatan pensiun. Program imbalan jangka panjang lainnya terdiri dari program masa persiapan pensiun, program penghargaan masa kerja, dan program cuti besar berimbalan.

Post-employment benefit plan consist of severance cost and pension healthcare. Other long-term employee benefit consist of period prior to pension, long service pay, and long service leave.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

29. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan) / *Liability For Employee Benefits (continued)*

Penyisihan imbalan kerja (lanjutan) / *Provision for employee benefits (continued)*

Beban yang diakui di laba rugi untuk imbalan kerja adalah:

The expense recognized in the profit or loss for the employee benefits are as follows:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	2022	
Program imbalan pascakerja	15,163	1,822	*Post-employment benefit plan*
Imbalan jangka panjang lainnya	(15,579)	7,848	*Other long-term employee benefit*
Program PKWT	2,448	737	*PKWT program*
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi	**2,032**	**10,407**	***Expense recognized in the statement of profit or loss***

Beban yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan klasifikasi akun adalah sebagai berikut:

The expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income based on account classification are as follows:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	2022	
Beban gaji dan tunjangan (Catatan 28)	2,032	10,407	*Salaries and benefits expense (Note 28)*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - kerugian/(laba) aktuaria	3,991	(3,935)	*Remeasurement of liability for employee benefits - actuarial loss/(gains)*
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	**6,023**	**6,472**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income***

Program imbalan pascakerja / *Post-employment benefit plan*

Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaris:

The following are the significant items disclosed in the actuarial reports:

	31 Desember/*December 31*		
	2023	2022	
Tingkat diskonto pertahun	6.90%	7.40%	*Annual discount rates*
Tingkat kenaikan			*Increase rates*
Gaji per tahun	4.00%	4.00%	*Annual salary*
Tingkat pengunduran diri pertahun untuk pegawai dibawah usia 30 tahun dan akan menurun menjadi 0% pada umur 46 tahun	3.50%	3.50%	*Annual resignation rates for employee before the age of 30 and will decrease until 0% at the age of 46*
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019	*Mortality rate*
Usia pensiun	56 tahun/*years*	56 tahun/*years*	*Retirement age*
Ekspektasi sisa masa kerja rata-rata karyawan (tahun)	12.82	17.35	*Average remaining working periods (years)*

29. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan) / *29. Liability For Employee Benefits (continued)*

Program imbalan pascakerja (lanjutan) / *Post-employment benefit plan (continued)*

a. Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk imbalan pascakerja adalah sebagai berikut: / *a. Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for post-employment benefit plan follows:*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Biaya jasa kini dan jasa lalu	11,112	(716)	*Current and past service cost*
Biaya bunga	4,618	5,496	*Interest cost*
Beban pesangon	(567)	13,085	*Termination cost*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria	--	(8,241)	*Actuarial (gain)/loss*
Dampak IFRIC	--	(7,802)	*IFRIC Impact*
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian	**15,163**	**1,822**	***Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss***
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - neto:			*Remeasurement of the net liability for employee benefits:*
Keuntungan aktuaria dari perubahan asumsi keuangan	3,834	772	*Actuarial gains from changes in financial assumption*
Keuntungan aktuaria dari penyesuaian sebelumnya	157	(4,707)	*Actuarial gains from experience adjustments*
Keuntungan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	3,991	(3,935)	*Gain recognized in other comprehensive income*
Total beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	**19,154**	**(2,113)**	***Total expense recognized in the the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income***

b. Perubahan cadangan penyisihan adalah sebagai berikut: / *b. The movements in the allowance are as follows:*

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Saldo awal	63,403	80,613	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan	15,163	1,822	*Addition during the year*
Nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain	3,991	(3,935)	*Amount recognized in other comprehensive income*
Pembayaran tahun berjalan	(1,995)	(15,097)	*Payment during the year*
Saldo akhir	**80,562**	**63,403**	***Ending balance***

c. Perubahan nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut: / *c. The movements for the present value of employee benefit are as follows:*

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Saldo awal tahun	63,403	80,613	*Balance at beginning of the year*
Biaya jasa kini	11,112	10,126	*Current service cost*
(Kurtailmen)/ *Settlement*	(567)	(8,242)	*(Curtailement)/ Settlement*
Biaya jasa lalu	--	(10,842)	*Past service cost*
Biaya bunga	4,618	5,497	*Interest cost*
Dampak IFRIC	--	(7,802)	*IFRIC Impact*
Beban pesangon	--	13,085	*Termination Cost*
Pembayaran tahun berjalan	(1,995)	(15,097)	*Payment during the year*
Pengukuran kembali kerugian aktuaria:			*Remeasurement of actuarial losses:*
Keuntungan aktuaria dari perubahan asumsi keuangan	3,834	772	*Actuarial gain from changes in financial assumption*
Keuntungan aktuaria dari penyesuaian sebelumnya	157	(4,707)	*Actuarial gain from experience adjustments*
Saldo akhir tahun nilai kini liabilitas imbalan kerja	**80,562**	**63,403**	***Ending balance present value of employee benefit liabilities***

29. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Program imbalan pascakerja (lanjutan)

d. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto (tidak diaudit):

31 Desember/ *December 31, 2023*			
Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ *Impact to present value of employee benefit obligation***	**Perubahan Persentase/ *Percentage Change***	**Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ *Impact to current service cost***
-1%	8,019	-1%	52
+1%	(6,889)	+1%	(40)

31 Desember/ *December 31, 2022*			
Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ *Impact to present value of employee benefit obligation***	**Perubahan Persentase/ *Percentage Change***	**Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ *Impact to current service cost***
-1%	6,516	-1%	1,316
+1%	(5,597)	+1%	(885)

e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat kenaikan gaji (tidak diaudit)

31 Desember/ *December 31, 2023*			
Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ *Impact to present value of employee benefit obligation***	**Perubahan Persentase/ *Percentage Change***	**Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ *Impact to current service cost***
-1%	(6,982)	-1%	(44)
+1%	7,963	+1%	56

31 Desember/ *December 31, 2022*			
Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ *Impact to present value of employee benefit obligation***	**Perubahan Persentase/ *Percentage Change***	**Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ *Impact to current service cost***
-1%	(7,897)	-1%	(1,285)
+1%	9,063	+1%	1,780

29. *Liability for Employee Benefits (continued)*

Post-employment benefit plan (continued)

d. Sensitivity analysis for discount rate risk (unaudited):

e. Sensitivity analysis for salary increase risk (unaudited)

29. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Program imbalan pascakerja (lanjutan)

e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat kenaikan gaji (tidak diaudit) (lanjutan)

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

Imbalan jangka panjang lainnya
Imbalan jangka panjang lainnya terdiri dari *Long-Service Award (LSA*), masa persiapan pensiun, pemberian logam mulia, dan *long leave (LL).*

Asumsi-asumsi yang digunakan oleh aktuaris dalam perhitungan imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

29. Liability for Employee Benefits (continued)

Post-employment benefit plan (continued)

e. Sensitivity analysis for salary increase risk (unaudited) (continued)

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermorse, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the statement of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

Other long-term benefits
Other long-term benefits consist of Long-Service Award (LSA), pre-retirement period, gold granting, and long leave (LL).

The assumptions used by the actuary for other long-term benefits calculation are as follows:

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Tingkat diskonto pertahun	6.90%	7.40%	*Annual discount rates*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	4.00%	4.00%	*Annual salary increase rates*
Tingkat pengunduran diri pertahun untuk pegawai dibawah usia 30 tahun dan akan menurun menjadi 0% pada umur 46 tahun	3.50%	3.50%	*Annual resignation rates for employee before the age of 30 and will decrease until 0% at the age of 46*
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019	*Mortality rate*
Usia pensiun	56 tahun/*years*	56 tahun/*years*	*Retirement age*
Ekspektasi sisa masa kerja rata-rata karyawan (tahun)	11.73	11.73	*Average remaining working period (years)*

29. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan) / *29. Liability For Employee Benefits (continued)*

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan) / *Other long-term benefits (continued)*

a. Beban imbalan jangka panjang lainnya yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut: / *a. Other long term benefit plan expense recognized in profit or loss are as follows:*

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Biaya jasa:			*Service cost:*
Biaya jasa kini dan jasa lalu	6,026	11,699	*Current and past service cost*
Pengukuran kembali imbalan jangka panjang lainnya	(27,249)	(9,198)	*Remeasurement of other long term benefit*
Beban bunga neto pada liabilitas imbalan yang ditetapkan	5,644	5,347	*Net interest on net defined benefit liability*
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi	**(15,579)**	**7,848**	***Expense recognized in the statement of profit or loss***

b. Perubahan penyisihan adalah sebagai berikut: / *b. The movements in the provision are as follows:*

	31 Desember/December 31		
	2023	**2022**	
Saldo awal	79,381	75,749	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan	(15,579)	7,848	*Addition during the year*
Pembayaran tahun berjalan	(4,997)	(4,216)	*Payments during the year*
Saldo akhir	**58,805**	**79,381**	***Ending balance***

c. Perubahan nilai kini liabilitas imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut: / *c. The movements for the present value of other long term benefit plan are as follows:*

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Saldo awal tahun	79,381	75,749	*Balance at beginning of the year*
Biaya jasa kini	6,026	11,699	*Current service cost*
Biaya bunga	5,644	5,347	*Interest cost*
Beban kurtailmen	(36,184)	(5,149)	*Curtailment cost*
Pembayaran tahun berjalan	(4,997)	(4,216)	*Payments during the year*
Keuntungan aktuaria dari perubahan asumsi keuangan	1,752	(304)	*Actuarial gains from changes in financial assumptions*
Keuntungan aktuaria dari *experience adjustment*	7,183	(3,745)	*Actuarial gains from experience adjustment*
Saldo akhir tahun nilai kini liabilitas imbalan jangka panjang lainnya	**58,805**	**79,381**	***Ending balance present value of other long term benefit***

29. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

29. Liability For Employee Benefits (continued)

Other long-term benefits (continued)

d. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto (tidak diaudit)

Tabel berikut menunjukan analisa sensitivitas atas nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini dengan asumsi perubahan atas tingkat diskonto:

d. Sensitivity analysis for discount rate risk (unaudited)

The tables below show the sensitivity analysis ofthe present value of employee benefit liabilities and current service cost in the assumed changes in the discount rate:

31 Desember/ *December 31, 2023*			
Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ *Impact to present value of employee benefit obligation***	**Perubahan Persentase/ *Percentage Change***	**Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ *Impact to current service cost***
-1%	3,804	-1%	44
1%	(3,413)	1%	(38)

31 Desember/ *December 31, 2022*			
Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ *Impact to present value of employee benefit obligation***	**Perubahan Persentase/ *Percentage Change***	**Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ *Impact to current service cost***
-1%	6,315	-1%	1,032
1%	(5,543)	1%	(768)

e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko kenaikan gaji (tidak diaudit):

e. Sensitivity analysis for salary increase risk (unaudited):

31 Desember/ *December 31, 2023*			
Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ *Impact to present value of employee benefit obligation***	**Perubahan Persentase/ *Percentage Change***	**Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ *Impact to current service cost***
-1%	(3,972)	-1%	(44)
1%	4,397	1%	51

31 Desember/ *December 31, 2022*			
Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ *Impact to present value of employee benefit obligation***	**Perubahan Persentase/ *Percentage Change***	**Pengaruh terhadap biaya jasa kini/ *Impact to current service cost***
-1%	(5,762)	-1%	(822)
1%	6,466	1%	1,080

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

29. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko kenaikan gaji (tidak diaudit):

Jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

29. Liability For Employee Benefits (continued)

Other long-term benefits (continued)

e. Sensitivity analysis for salary increase risk (unaudited):

The maturity of the obligation for employee benefits as of December 31, 2023 and 2022 is as follows:

	31 Desember/*December 31, 2023*						
	Jumlah Pembayaran Manfaat Pensiun/*Amount Benefit Payment for Pension*	Jumlah Pembayaran Manfaat MPP/*Amount Benefit Payment for MPP*	Pembayaran Manfaat OLTEB/*Amount of Benefit Payment for OLTEB*	Pembayaran Manfaat Kesehatan/*Amount of Benefit Payment for Healthcare*	Pembayaran Manfaat PKWT/*Amount of Benefit Payment for PKWT*	Total	
Di bawah 1 tahun	4,206	--	9,391	117	2,709	16,423	*Below 1 year*
Antara 1 - 2 tahun	12,158	--	6,413	145	1,463	20,179	*Within 1 - 2 years*
Antara 2 - 3 tahun	3,572	--	9,647	303	216	13,738	*Within 2 - 3 years*
Antara 3 - 4 tahun	11,253	--	6,337	386	--	17,976	*Within 3 - 4 years*
Antara 4 - 5 tahun	12,530	--	8,055	604	--	21,189	*Within 4 - 5 years*
Di atas 5 tahun	434,369	--	183,607	223,845	--	841,821	*Up 5 years*

	31 Desember/*December 31, 2022*						
	Jumlah Pembayaran Manfaat Pensiun/*Amount Benefit Payment for Pension*	Pembayaran Manfaat OLTEB/*Amount of Benefit Payment for OLTEB*	Pembayaran Manfaat OLTEB/*Amount of Benefit Payment for OLTEB*	Pembayaran Manfaat Kesehatan/*Amount of Benefit Payment for Healthcare*	Pembayaran Manfaat PKWT/*Amount of Benefit Payment for PKWT*	Total	
Di bawah 1 tahun	1,721	933	4,521	196	1,811	9,182	*Below 1 year*
Antara 1 - 2 tahun	4,142	3,980	8,492	108	335	17,057	*Within 1 - 2 years*
Antara 2 - 3 tahun	11,771	4,862	6,594	138	93	23,458	*Within 2 - 3 years*
Antara 3 - 4 tahun	4,476	3,574	9,342	289	--	17,681	*Within 3 - 4 years*
Antara 4 - 5 tahun	10,695	5,402	6,047	395	--	22,539	*Within 4 - 5 years*
Di atas 5 tahun	431,092	268,334	169,178	200,947	--	1,069,551	*Up 5 years*

Rata-rata durasi dari liabilitas imbalan pasca-kerja adalah 12,82 dan 17,35 tahun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The average of duration of the obligation for post employment benefits is 12.82 and 17.35 for the years as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

30. Komitmen dan Kontinjensi

30. Commitments and Contingencies

Komitmen dan kontinjensi LPEI adalah sebagai berikut:

LPEI's commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/*December 31*		
	2023	2022	
KOMITMEN			***COMMITMENTS***
Liabilitas komitmen			***Commitment liabilities***
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 39)			*Related parties (Note 39)*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	592,565	1,031,216	*Unused loan facilities to debtors*
Penerbitan *L/C* yang tidak dapat dibatalkan	8,968	--	*Outstanding irrevocable L/C*
	601,533	1,031,216	
Pihak ketiga			*Third parties*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,226,048	622,869	*Unused loan facilities to debtors*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	810	4,727	*Outstanding irrevocable L/C*
	1,226,858	627,596	
Total Rupiah	1,828,391	1,658,812	*Total Rupiah*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

30. Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan) / *30. Commitments and Contingencies (continued)*

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pihak berelasi (Catatan 39)			*Related parties (Note 39)*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	781,271	257,807	*Unused loan facilities to debtors*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	80,536	54,973	*Outstanding irrevocable L/C*
	861,807	312,780	
Pihak ketiga			*Third parties*
Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan	1,735,875	1,193,536	*Unused loan facilities to debtors*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	35,342	335,371	*Outstanding irrevocable L/C*
	1,771,217	1,528,907	
Total mata uang asing	2,633,024	1,841,687	*Total foreign currencies*
Total liabilitas komitmen	**4,461,415**	**3,500,499**	***Total commitment liabilities***
Komitmen	**(4,461,415)**	**(3,500,499)**	***Commitments***
KONTINJENSI			***CONTINGENCIES***
Tagihan kontinjensi			***Contingent receivables***
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 39)			*Related parties (Note 39)*
Pendapatan bunga kredit bermasalah	167,252	238,804	*Interest income on non-performing loans*
Pihak ketiga			*Third parties*
Pendapatan bunga kredit bermasalah	5,085,766	4,776,499	*Interest income on non-performing loans*
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pihak berelasi (Catatan 39)			*Related parties (Note 39)*
Pendapatan bunga kredit bermasalah	160,340	152,762	*Interest income on non-performing loans*
Pihak ketiga			*Third parties*
Pendapatan bunga kredit bermasalah	2,485,215	2,228,920	*Interest income on non-performing loans*
Total tagihan kontinjensi	**7,898,573**	**7,396,985**	***Total contingent receivables***
Liabilitas kontinjensi			***Contingent liabilities***
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi (Catatan 39)			*Related parties (Note 39)*
Penjaminan Kredit - PEN	1,000,000	1,000,000	*Credit Guarantee - PEN*
Asuransi kegagalan ekspor	300,000	400,000	*Failure on export insurance*
Bank garansi	409,571	368,830	*Bank guarantee*
	1,709,571	1,768,830	
Pihak ketiga			*Third parties*
Penjaminan Kredit - PEN	1,306,100	1,786,550	*Credit Guarantee - PEN*
Bank garansi	1,267,782	1,019,820	*Bank guarantee*
Proteksi piutang dagang	219,077	221,380	*Receivable protection*
Asuransi kegagalan ekspor	680,000	649,769	*Failure on export insurance*
	3,472,959	3,677,519	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pihak berelasi (Catatan 39)			*Related parties (Note 39)*
Bank garansi	1,374,394	1,173,996	*Bank guarantee*
Proteksi piutang dagang	44,189	26,776	*Receivable protection*
Asuransi kegagalan ekspor	--	420,323	*Failure on export insurance*
Pihak ketiga			*Third parties*
Bank garansi	4,690,459	6,168,911	*Bank guarantee*
Asuransi kegagalan ekspor	5,353,538	10,511,176	*Failure on export insurance*
Proteksi piutang dagang	5,163,212	4,553,277	*Receivable protection*
Penjaminan Kredit - PEN	846,835	910,699	*Credit Guarantee - PEN*
	17,472,627	23,765,158	
Total liabilitas kontinjensi	**22,655,157**	**29,211,507**	***Total contingent liabilities***
Kontinjensi - neto	**(14,756,584)**	**(21,814,522)**	***Contingencies - net***

31. Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko dilakukan berdasarkan Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI dengan mencakup pemenuhan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat. Penerapan ini dilaksanakan melalui (i) implementasi manajemen risiko pada setiap aktivitas operasional sehingga manajemen risiko mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas operasionalnya dan (ii) pengelolaan permodalan agar mampu menyerap risiko yang dihadapi LPEI.

Pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI, bentuk penerapannya paling kurang mencakup:

1. Pengawasan aktif Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah;
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Sasaran Penerapan Manajemen Risiko LPEI adalah untuk memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan LPEI dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko yang antara lain berfungsi sebagai penyaring dan pemberi peringatan dini *(early warning system)* Lembaga dalam melaksanakan kegiatan usaha.

LPEI menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, criteria, kompleksitas, serta kemampuan mengelola risiko yang baik yang diharapkan tidak hanya meningkatkan *stakeholder value*, tetapi juga memberikan gambaran mengenai potensi kerugian yang mungkin dihadapi di masa mendatang, memelihara tingkat *risk-adjusted-return* yang optimal dan membantu dalam proses pengambilan keputusan usaha secara tepat.

31. Risk Management

LPEI implements risk management in accordance with Article 17 Law No. 2 Year 2009 about LPEI which encompasses the fulfillment of capital adequacy, active supervision, and compliance of market discipline against inherent risk. This implementation is realized in the form of (i) risk management implementation in each operational activity so that risk management becomes an inseparable part of every operational activity and (ii) capital management in order to be able to absorb risks that LPEI faces.

The process and system of effective risk management are being carried out in accordance to the Regulation of the Indonesia Financial Services Authority (POJK) No. 9/POJK.05/2022 regarding LPEI Supervision, in which the forms of application at the very least include:

1. *Active monitoring by the Executive Directors, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board;*
2. *Adequacy of Risk Management policies, procedures, and determination of Risk limits;*
3. *Adequacy of the Risk identification, measurement, control and monitoring processes, as well as the Risk Management information system; and*
4. *Comprehensive internal control system..*

The target of LPEI Risk Management Implementation is to maintain and/or improve the health status of LPEI by applying the precautionary principle and risk management which, among other things. Function as a filter and early warning system for institutions in carrying out business activities.

LPEI applied effective risk management which aligned with target, policy, criteria, complexity, and good risk mitigation, which expected to increase stakeholder value and provide a good prediction of potential loss in the upcoming future. This also expected to maintain optimum risk-adjusted-return and also helping on making a good decision.

31. Manajemen Risiko (lanjutan)

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha, risiko yang dihadapi LPEI juga berkembang secara luas, antara lain mencakup risiko kredit, risiko asuransi, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko investasi serta risiko imbal hasil khusus untuk Unit Usaha Syariah. Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan dibanding jenis risiko lainnya. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LPEI, termasuk di dalamnya risiko penjaminan.

Pada tahun 2023, LPEI tengah berproses dalam memperkuat implementasi kebijakan manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan penerapan kerangka manajemen risiko yang sesuai dengan POJK No. 9/POJK.05/2022, khususnya pada cakupan jenis risiko, *Risk Appetite Statement*, pengkinian *three lines model*, alat dan metodologi pengukuran, menjalankan *Early Warning Detection* berkala terhadap portofolio pembiayaan yang berpotensi mengalami pemburukan, melakukan pengkinian *Industry Financing Reference* dan *Portfolio Guideline*, hingga inisiatif pengembangan Manajemen Risiko Operasional dalam rangka mendukung *Enterprise Risk Management Framework*. Pengelolaan risiko juga termasuk pengelolaan risiko penugasan khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 183/PMK.08/2021 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI.

Penerapan manajemen risiko dicerminkan dari hasil penilaian profil risiko LPEI yang mencakup penilaian risiko inheren, yaitu penilaian atas risiko yang melekat *(inherent)* pada pelaksanaan kegiatan usaha LPEI, yang mencakup pembiayaan, penjaminan dan asuransi, dan penilaian atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang mencakup seluruh pilar-pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penggabungan penilaian risiko inheren dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko akan menghasilkan Profil Risiko secara komposit. Profil risiko LPEI merupakan salah satu faktor penilaian Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Direktur Eksekutif No. 0009/PDE/07/2023 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI.

31. Risk Management (continued)

In line with the development of business activities, LPEI also deal with higher risk. These risks include credit risk, insurance risk, liquidity risk, market risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, and investment risk as well as risk of return specifically for Sharia Business Units. Credit risk is the most significant among others. Credit risk is a risk that occur because of the failure of the debtor to pay its liabilities, including guarantee risk.

In 2023, LPEI is in the process of strengthening the implementation of risk management policies, and the implementation of a risk management framework in accordance with POJK No. 9/POJK.05/2022, especially in the scope of risk types, Risk Appetite Statement, updating three lines models, measurement tools and methodologies, running periodic Early Warning Detection of financing portfolios that have the potential to experience aggravation, updating the Industry Financing Reference and Portfolio Guidelines, to initiatives to develop Operational Risk Management in order to support the Enterprise Risk Management Framework. Risk management also includes risk management of special assignments through the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 183/PMK.08/2021 concerning Special Assignments to LPEI.

Risk management implementation is also reflected in LPEI risk profile assessment that consist of inherent risk assessment in the implementation of LPEI business activities. Activity that include financing activity, guarantee and insurance, and an assessment of the Quality of Implementation of Risk Management (KPMR) which includes all pillars of risk management implementation in accordance with the Financial Services Authority Regulations. The result of inherent risk assessment and risk control management implementation quality assessment will produce a composite Risk Profile. The LPEI's risk profile which is one of the factors in Risk Based LPEI Rating as stipulated in the Regulation of the Executive Directors No. 0009/PDE/07/2023 *concerning Risk Based LPEI Rating Assessment.*

31. Manajemen Risiko (lanjutan)

Dalam kerangka manajemen risiko terpadu *(enterprise risk management*), LPEI menerapkan konsep *three lines of defense*, yakni:

- Lini pertama (*First line)* merupakan unit kerja yang berada pada setiap *risk taking function)* yang mana merupakan unit kerja pemilik risiko (risk owners) yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pencapaian kegiatan usaha dan pelaksanaan mandat LPEI serta unit kerja yang merupakan pendukung langsung dari unit kerja pemilik risiko (risk owner) tersebut. Lini pertama melakukan *self-assurance* berupa menerapkan budaya kepatuhan dan budaya peduli risiko pada setiap kegiatan yang dilakukan.
- Lini kedua (*Second line)* merupakan fungsi Manajemen Risiko yang fokus pada pengembangan metodologi terkait manajemen risiko, termasuk di dalamnya fungsi Analisa Risiko Bisnis sebagai *four eyes principles* pada level transaksi, dan fungsi Kepatuhan. Lini kedua memiliki peran antara lain pemantauan, pemberian advis, pengujian, analisis, pengaturan dan pelaporan tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.
- Lini ketiga *(Third line)* merupakan Audit Function yang berfungsi melakukan audit terhadap pelaksanaan kegiatan di seluruh unit kerja termasuk berfungsi untuk melakukan penilaian secara independen atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian internal di LPEI. Lini ketiga memiliki peran antara lain memberikan *assurance* dan melakukan evaluasi yang independen dan obyektif terhadap pengendalian internal, penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

LPEI secara secara berkala melakukan kajian dan *backtesting* pada beberapa alat pengukuran risiko, yaitu pelaksanaan *Stress Testing* secara berkala, *backtesting* terhadap *forward looking model* PD yang telah diimplementasikan saat ini serta permodelan kembali atas komponen historis dan *forward looking* untuk perhitungan ECL (PD, LGD dan EAD) untuk mengakomodasi potensi dampak perubahan makro ekonomi.

31. Risk Management (continued)

In the organizational structure to enterprise risk management. LPEI has implemented the concept of three lines of defense:

- *The first line (First line) are unit that is in each risk taking function which is a unit that is a risk owner who is directly responsible for achieving business activities and carrying out the mandate of LPEI as well as units that support the the risk owner. The first line performs self-assurance in the form of implementing risk and compliance culture in every activity carried out.*
- *The second line (Second line) is a Risk Management function that focuses on the development of methodologies related to risk management, including the Business Risk Analysis function as four eyes principles at the transaction level, and the Compliance function. The second line has roles including monitoring, providing advice, testing, analysis, regulation and reporting on matters relating to risk management and compliance.*
- *The third line (Third line) is the Audit Function which audit the implementation of activities in all units, including carry out independent assessments of the effectiveness of the implementation of Risk Management and internal control at LPEI. The third line has roles including providing assurance and conducting independent and objective evaluations of internal control, implementation of governance and risk management.*

LPEI periodically conducted studies and back-testing processes on several risk measurement tools, including conducting Stress Testing practices regularly, back-testing on the current forward looking PD model, and re-modeling of the historical and forward looking ECL components (i.e., PD, LGD and EAD) to accommodate potential impact of macro economic changes.

32. Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LPEI, termasuk di dalamnya risiko penjaminan. Jenis risiko ini merupakan risiko terbesar yang dihadapi LPEI. LPEI menerapkan manajemen risiko kredit melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko kredit baik secara individual maupun secara portofolio. Pembiayaan posisi 31 Desember 2023 memiliki rasio NPF *Gross* sebesar 43,48% meningkat terhadap posisi 31 Desember 2022 sebelumnya yang sebesar 26,61%. Rasio NPF *Net* posisi 31 Desember 2023 sebesar 4,54% atau menurun dibandingkan posisi 31 Desember 2022 yang sebesar 10,39%. Pengelolaan risiko kredit di antaranya dilakukan dengan pengelolaan limit pada batasan eksposur risiko yang dapat diterima untuk individu debitur, pengelolaan limit pada batasan geografis tertentu, pengelolaan limit konsentrasi per industri, dan sektor ekonomi tertentu. Penetapan limit juga dilakukan melalui penggolongan risiko kredit (*rating*) per individual debitur. *Rating* risiko kredit dikinikan secara berkala untuk memperkirakan *potential loss* sebagai risiko kredit akibat ekspansi pembiayaan dan penentuan tindak lanjut perbaikan. Penerapan manajemen risiko kredit tidak hanya ditujukan untuk memenuhi ketentuan regulator, namun merupakan suatu tuntutan manajemen untuk menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit pada tingkat *risk and return* yang optimum dan sesuai dengan praktik di lembaga keuangan, sehingga diharapkan mampu mendorong kegiatan usaha LPEI.

Proses analisa dan persetujuan pembiayaan diawali dengan proses pengenalan calon debitur melalui penilaian tingkat risiko masing-masing calon debitur dengan menggunakan IEB *Credit Risk Rating System* untuk pembiayaan korporasi. Hasil *rating* dimaksud dipergunakan pula untuk penerapan *risk-based pricing* dalam *Asset Liabilities Committee (ALCO).*

32. Credit Risk

Credit risk is defined as the risk of the inability of debtors or counterparties to fulfill their obligation to LPEI (counterparties default). This type of risk is the biggest risk which is faced by LPEI. LPEI implements credit risk management through the stages of identification, measurement, control, and monitoring of credit risk either individually or as portfolio. As of December 31, 2023, LPEI has a Gross NPF ratio of 43.48%, which showed an increase from December 31, 2022, 26.61%. Net NPF ratio as of December 31, 2023 was 4.54%, also decreasing compared to that as of December 31, 2022, 10.39%. Credit risk management implemented by managing risk exposure at acceptable limit for individual debtors, specific geographic boundaries, concentration limit per industry, and economic sectors. Set-up limit is also done through the classification of credit risk (rating) per individual debtor. Credit risk ratings are periodically updated to estimate potential losses (as credit risk) as a result of financing expansion and determining follow-up improvement. Credit risk management is not only intended to comply with regulator, but also Management's intention to implement credit risk management system at the optimum risk and return and commonly practiced in financial institutions, so that is expected to encourage LPEI's business activities.

Loan analysis and approval process begins with the introduction of the applicants through risk evaluation of each prospective debtor by using the IEB Credit Risk Rating System for corporate funding. Rating result is also used by the Asset Liabilities Committee (ALCO) to set risk-based pricing.

32. Risiko Kredit (lanjutan)

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh unit bisnis telah mempertimbangkan dan memperhatikan risiko kredit sejak pembiayaan dimaksud diberikan sampai dengan pelunasannya. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap kualitas pembiayaan untuk mencegah terjadinya *Non-Performing Financing (NPF)* termasuk memantau ada atau tidaknya bukti obyektif penurunan nilai serta perhitungan besarnya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) baik secara kolektif maupun secara individual.

Melalui penerapan *Early Warning Detection* (EWD) terhadap kondisi perkembangan debitur, maka pengelolaan risiko kredit yang efektif dapat meminimalkan risiko terjadinya kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal untuk mendukung pembiayaan ekspor nasional.

Pengelolaan risiko kredit di LPEI dimaksudkan agar kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik secara tingkat individual maupun portofolio pembiayaan secara keseluruhan dapat dikelola seminimal mungkin. Pengelolaan risiko kredit ini juga dilakukan LPEI dalam upaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundangan-undangan termasuk Peraturan Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

a. Analisis eksposur maksimum risiko kredit dengan mempertimbangkan dampak keuangan dari agunan dan peningkatan kredit lainnya.

   Nilai tercatat aset keuangan LPEI selain pembiayaan dan piutang merupakan eksposur maksimum risiko kredit per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

32. Credit Risk (continued)

In granting its financing, the business unit has considered credit risk since loan being drawdowned up until the said facility is settled. Monitoring of loan quality is conducted periodically to prevent non-performing Financing (NPF), including to monitor any objective evidence of impairment, as well as to calculate the allowance for impairment losses, both collectively and individually.

Through the implementation of Early Warning Detection (EWD) in monitoring debtors, LPEI could enhance the effectiveness of credit risk management and eventually minimize potential loss as well as optimize capital utilization to support national export programme.

The purpose of LPEI's credit risk management is to manage the possible losses on loan and other financial contracts default at minimum level, both as individual and as loan portofolio. Besides, credit risk management also intended to comply with regulations including the Regulation of the Minister of Finance and Financial Services Authority.

a. Analysis of maximum exposure to credit risk considering the financial effect of collateral and other credit enhancement.

   As of December 31, 2023 and 2022, the carrying value of LPEI's financial assets other than financing and receivables represents the maximum exposure to credit risk.

32. Risiko Kredit (lanjutan)

b. Analisis eksposur maksimum risiko kredit dengan mempertimbangkan dampak keuangan dari agunan dan peningkatan kredit lainnya. (lanjutan)

Pembiayaan dan piutang LPEI dijamin dengan agunan (misalnya piutang, persediaan, mesin, dan lain-lain). LPEI menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa depan untuk tujuan penurunan jika pembiayaan dan piutang bersifat *collateral dependent* dan penyitaan agunan kemungkinan besar terjadi berdasarkan perjanjian.

Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud yang diserahkan oleh nasabah dan/atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada LPEI sebagai *second way out* guna menjamin pelunasan utang nasabah, apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addendumnya. Objek agunan yang dibiayai berupa:

- Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan.
- Fungsi agunan berupa objek yang dibiayai tersebut tidak hanya sebagai bukti penggunaan pembiayaan, keseriusan/ kesungguhan debitur atau calon debitur, tetapi juga sebagai faktor pengurang risiko pembiayaan dikemudian hari jika fasilitas pembiayaan yang diberikan tersebut mengalami macet.

Untuk meminimalkan risiko, LPEI mengutamakan untuk memperoleh aset tetap sebagai agunan.

Manajemen meyakini kemampuan LPEI untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari pembiayaan dan piutang berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- LPEI telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses pembiayaan dan piutang yang mencakup seluruh aspek pemberian pembiayaan dan piutang yang dilakukan. Setiap pemberian pembiayaan dan piutang harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.

32. Credit Risk (continued)

a. Analysis of maximum exposure to credit risk considering the financial effect of collateral and other credit enhancement. (continued)

LPEI's financing and receivables are secured by collateral (e.g. receivables, inventories, machineries, and etc.). LPEI uses the fair value of collateral as a basis of future cash flows for impairment purposes if financing and receivables are collateral dependent and foreclosure of collateral is most likely to occur based on the agreement.

Collateral is the right and power over tangible and/or intangible assets submitted by the debtor and the owner or a third party as collateral to LPEI as a second way out to ensure repayment of a debt of the debtor, if financing cannot be paid based on receipt of the financing agreement time or its addendum. Object of financed collateral is follows:

- *Moveable and immoveable goods funded by financing.*
- *Function of object collateral not only asevidence of financing, seriousness/ earnestness debtor, but also as a risk-reducing financing in the future if the financing facilities cannot be paid.*

To minimize the risk, LPEI prioritizes to acquire fixed assets as collateral.

Management believes on LPEI's ability to control and sustain minimal exposure on credit risk of LPEI resulting from its financing and receivables based on the following:

- *LPEI has written financing and receivables policy and manual procedures that covers all aspects of LPEI's lending activities. At all times, the financing and receivables must adhere to the requirements of LPEI's policy.*

32. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Analisis eksposur maksimum risiko kredit dengan mempertimbangkan dampak keuangan dari agunan dan peningkatan kredit lainnya. (lanjutan)

Manajemen meyakini kemampuan LPEI untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari pembiayaan dan piutang berdasarkan hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

- LPEI telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "*early warning system*" dan pemantauan yang disiplin.
- Seluruh pembiayaan dan piutang diberikan dengan agunan, kecuali untuk jenis pembiayaan dan piutang tertentu seperti fasilitas antar bank (pinjaman yang diberikan).

b. Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

1) Sektor geografis, neto cadangan kerugian penurunan nilai

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit LPEI pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung pembiayaan dan piutang lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

32. Credit Risk (continued)

a. Analysis of maximum exposure to credit risk considering the financial effect of collateral and other credit enhancement. (continued)

Management believes on LPEI's ability to control and sustain minimal exposure on credit risk of LPEI resulting from its financing and receivables based on the following: (continued)

- *LPEI has an early problem detection system through "early warning system" and a disciplined monitoring practice.*
- *All financing and receivables are secured by collateral, except for certain financing and receivables such as interbank financing (i.e. loan).*

b. Concentration of financial assets risk with credit risk exposure

1) Geographical sectors, net of allowance for impairment losses

The following tables provide details of LPEI's credit exposures at their carrying amounts (without taking into account any collateral held or other financing and receivables support), categorized by geographical region as of December 31, 2023 and 2022:

	31 Desember/ *December 31, 2023*									
	Dalam Negeri/*Domestic*									
	DKI Jakarta	Jawa Barat/ *West Java*	Jawa Tengah/ *Central Java*	Jawa Timur/ *East Java*	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ *East Indonesia*	Luar Negeri/ *Overseas*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	553	--	--	--	--	--	--	--	553	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	72,905	516	--	--	--	--	--	34,835	108,256	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	3,637,838	2,725,819	--	249,955	--	--	--	800,636	7,414,248	*Placements with banks*
Efek-efek	1,433,923	--	--	--	--	--	--	--	1,433,923	*Securities*
Tagihan derivatif	85	--	--	--	--	--	--	--	85	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang										*Financing and receivables*
Modal kerja	5,485,071	2,261,063	1,571,902	3,524,655	1,312,460	1,000,086	982,164	107,829	16,245,230	*Working capital*
Investasi	10,989,816	1,211,120	325,543	611,351	5,618,884	3,454,835	2,607,507	--	24,819,056	*Investment*
Konsumsi	124,928	--	--	--	--	--	--	--	124,928	*Consumption*
Piutang asuransi dan penjaminan	75,059	--	--	--	--	--	--	--	75,059	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	93,673	37,714	3,373	17,238	--	--	--	1,232	153,230	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain neto *)	18,143	--	--	--	--	--	--	--	18,143	*Other assets - net *)*
Neto	**21,931,994**	**6,236,232**	**1,900,818**	**4,403,199**	**6,931,344**	**4,454,921**	**3,589,671**	**944,532**	**50,392,711**	***Net***

	31 Desember/ *December 31, 2022*								
	Dalam Negeri/*Domestic*								
	DKI Jakarta	Jawa Barat/ *West Java*	Jawa Tengah/ *Central Java*	Jawa Timur/ *East Java*	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ *East Indonesia*	Luar Negeri/ *Overseas*	*Total*	
Giro pada Bank Indonesia	426	--	--	--	--	--	--	--	426	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	88,818	512	--	--	--	--	--	91,316	180,646	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	7,923,192	3,749,725	--	--	--	--	--	887,338	12,560,255	*Placements with banks*
Efek-efek	1,970,120	--	--	--	--	--	--	--	1,970,120	*Securities*
Pembiayaan dan piutang										*Financing and receivables*
Modal kerja	12,072,218	3,659,303	4,528,160	7,941,506	1,935,572	1,132,726	1,163,310	--	32,432,795	*Working capital*
Investasi	16,378,594	3,342,222	789,274	1,870,148	4,690,822	4,027,930	1,956,994	127,191	33,183,175	*Investment*
Konsumsi	134,340	2,744	--	--	--	--	--	--	137,084	*Consumption*
Piutang pembiayaan garansi	281,667	--	--	--	--	--	--	--	281,667	*Guarantee financing receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	288,989	--	--	--	--	--	--	--	288,989	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	122,739	2,156	3,578	22,444	--	--	--	--	150,917	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain neto *)	38,485	--	--	--	--	--	--	--	38,485	*Other assets - net *)*
Neto	**39,299,588**	**10,756,662**	**5,321,012**	**9,834,098**	**6,626,394**	**5,160,656**	**3,120,304**	**1,105,845**	**81,224,559**	***Net***

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) *Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*

32. Risiko Kredit (lanjutan)

b. Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

1) Sektor geografis, neto cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif *gross* adalah sebagai berikut:

32. Credit Risk (continued)

b. Concentration of financial assets risk with credit risk exposure (continued)

1) Geographical sectors, net of allowance for impairment losses (continued)

Credit risk exposure related to gross administrative accounts items are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*									
	Dalam Negeri/*Domestic*									
	DKI Jakarta	Jawa Barat/ *West Java*	Jawa Tengah/ *Central Java*	Jawa Timur/ *East Java*	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ *East Indonesia*	Luar Negeri/ *Overseas*	Total	
Bank garansi	4,729,922	1,589,384	53,740	134,212	890,008	98,119	105,169	141,652	7,742,206	*Bank guarantee*
Penjaminan Kredit PEN	1,207,840	410,940	--	1,410,955	5,000	25,000	93,200	--	3,152,935	*Credit Guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	89,759	1,710	34,187	--	--	--	--	125,656	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**5,937,762**	**2,090,083**	**55,450**	**1,579,354**	**895,008**	**123,119**	**198,369**	**141,652**	**11,020,797**	***Total***
Estimasi klaim Penjaminan									(448,911)	*Estimated Guarantee claim*
Total									**10,571,886**	***Total***

	31 Desember/ *December 31, 2022*									
	Dalam Negeri/*Domestic*									
	DKI Jakarta	Jawa Barat/ *West Java*	Jawa Tengah/ *Central Java*	Jawa Timur/ *East Java*	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur/ *East Indonesia*	Luar Negeri/ *Overseas*	Total	
Bank garansi	5,140,784	2,415,477	2,498	93,260	926,774	9,543	--	143,221	8,731,557	*Bank guarantee*
Penjaminan Kredit PEN	1,211,250	714,350	--	1,597,999	5,000	25,000	143,650	--	3,697,249	*Credit Guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	255,014	77,479	4,309	58,269	--	--	--	--	395,071	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**6,607,048**	**3,207,306**	**6,807**	**1,749,528**	**931,774**	**34,543**	**143,650**	**143,221**	**12,823,877**	***Total***
Estimasi klaim Penjaminan									(478,657)	*Estimated Guarantee claim*
Total									**12,345,220**	***Total***

2) Jenis *counterparties*
Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur risiko kredit LPEI pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung pembiayaan dan piutang lainnya), yang dikategorikan berdasarkan jenis *counterparties* pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

2) Type of counterparties
The following tables provide the details of LPEI's credit risk exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or financing and receivables support), as categorized based on type of counterparties as of December 31, 2023 and 2022:

	31 Desember/ *December 31, 2023*						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies*	Perseorangan/ *Individuals*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	553	--	--	--	--	553	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	--	108,256	--	--	--	108,256	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	--	7,414,248	--	--	--	7,414,248	*Placements with banks*
Efek-efek	720,979	712,944	--	--	--	1,433,923	*Securities*
Tagihan derivatif	--	85	--	--	--	85	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang							*Financing and receivables*
Modal kerja	2,736,968	--	30	13,484,801	23,431	16,245,230	*Working capital*
Investasi	6,365,814	--	65,750	18,386,621	871	24,819,056	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	--	124,928	124,928	*Consumption*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	75,059	--	75,059	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	--	--	--	153,230	--	153,230	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain *)	--	--	--	18,143	--	18,143	*Other assets *)*
Neto	**9,824,314**	**8,235,533**	**65,780**	**32,117,854**	**149,230**	**50,392,711**	***Net***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan) / *32. Credit Risk (continued)*

b. Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan) / *b. Concentration of financial assets risk with credit risk exposure (continued)*

2) Jenis *counterparties* (lanjutan) / *2) Type of counterparties (continued)*

	31 Desember/ *December 31, 2022*						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies*	Perseorangan/ *Individuals*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	426	--	--	--	--	426	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	--	180,646	--	--	--	180,646	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	--	12,560,255	--	--	--	12,560,255	*Placements with banks*
Efek-efek	1,970,120	--	--	--	--	1,970,120	*Securities*
Pembiayaan dan piutang							*Financing and receivables*
Modal kerja	7,172,705	--	21,361	25,197,798	40,931	32,432,795	*Working capital*
Investasi	7,193,950	--	73,454	25,914,615	1,156	33,183,175	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	--	137,084	137,084	*Consumption*
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	281,667	--	281,667	*Guarantee financing receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	288,989	--	288,989	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	--	--	--	150,917	--	150,917	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain *)	--	--	--	38,485	--	38,485	*Other assets *)*
Neto	**16,337,201**	**12,740,901**	**94,815**	**51,872,471**	**179,171**	**81,224,559**	***Net***

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) *Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur risiko kredit LPEI yang dikategorikan berdasarkan jenis *counterparties* terhadap komitmen dan kontinjensi:

The following tables provide the details of LPEI's credit risk exposure as categorized based on type of counterparties to commitments and contingencies:

	31 Desember/ *December 31, 2023*						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies*	Perseorangan/ *Individuals*	Total	
Bank garansi	--	--	--	7,742,206	--	7,742,206	*Bank Guarantee*
Penjaminan Kredit PEN	--	--	--	3,152,935	--	3,152,935	*Credit Guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	--	125,656	--	125,656	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	--	--	--	**11,020,797**	--	**11,020,797**	***Total***
Estimasi klaim penjaminan						(448,911)	*Estimated guarantee claim*
Neto						**10,571,886**	***Net***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan) / 32. *Credit Risk (continued)*

b. Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan) / *b. Concentration of financial assets risk with credit risk exposure (continued)*

2) Jenis *counterparties* (lanjutan) / *2) Type of counterparties (continued)*

	31 Desember/ *December 31, 2022*						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies*	Perseorangan/ *Individuals*	Total	
Bank garansi	--	--	--	8,731,557	--	8,731,557	*Bank Guarantee*
Penjaminan Kredit PEN	--	--	--	3,697,249	--	3,697,249	*Credit Guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	--	395,071	--	395,071	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	--	--	--	**12,823,877**	--	**12,823,877**	***Total***
Estimasi klaim penjaminan						(478,657)	*Estimated guarantee claim*
Neto						**12,345,220**	***Net***

3) Sektor industri / *3) Industrial sectors*

Tabel di bawah menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri:

The following tables provide details of LPEI's credit exposures at their carrying amounts as categorized by industrial sectors:

	31 Desember/ *December 31, 2023*										
	Industri tekstil/ *Textile industry*	Industri minyak kelapa sawit mentah/ *Crude palm oil industry*	Industri tanaman perkebunan-kelapa sawit/ *Palm oil - plantation industry*	Pengangkutan umum-laut/ *General transport sea*	Industri crumb rubber/ *Crumb rubber industry*	Pengangkutan umum udara/ *General transport air*	Industri perabot/ *Furniture industry*	Industri logam dasar/ *Basic metal industry*	Pertambangan batubara/ *Coal mining*	Lainnya/ *Others*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	553	553	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	--	108,256	108,256	*Current accounts with banks*
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,414,248	7,414,248	*Placements with banks*
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,433,923	1,433,923	*Securities*
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85	85	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang												*Financing and receivables*
Pembiayaan												*Financing*
Modal kerja	1,803,713	1,138,727	983,779	59,364	--	986,115	255,351	182,313	838,947	9,996,921	16,245,230	*Working capital*
Investasi	414,905	2,307,447	5,260,112	988,806	1,182,240	984,598	62,482	538,587	3,251,713	9,828,166	24,819,056	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	124,928	124,928	*Consumption*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,059	75,059	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	3,373	--	--	--	--	--	--	--	--	149,857	153,230	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain - neto *)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,143	18,143	*Other assets - net *)*
Neto	**2,221,991**	**3,446,174**	**6,243,891**	**1,048,170**	**1,182,240**	**1,970,713**	**317,833**	**720,900**	**4,090,660**	**29,150,139**	**50,392,711**	***Net***

	31 Desember/ *December 31, 2022*										
	Industri tekstil/ *Textile industry*	Industri minyak kelapa sawit mentah/ *Crude palm oil industry*	Industri tanaman perkebunan-kelapa sawit/ *Palm oil - plantation industry*	Pengangkutan umum-laut/ *General transport sea*	Industri crumb rubber/ *Crumb rubber industry*	Pengangkutan umum udara/ *General transport air*	Industri perabot/ *Furniture industry*	Industri logam dasar/ *Basic metal industry*	Pertambangan batubara/ *Coal mining*	Lainnya/ *Others*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	426	426	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180,646	180,646	*Current accounts with banks*
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,560,255	12,560,255	*Placements with banks*
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,970,120	1,970,120	*Securities*
Pembiayaan dan piutang												*Financing and receivables*
Pembiayaan												*Financing*
Modal kerja	4,099,698	1,912,549	1,454,079	77,753	252,140	984,529	595,027	1,091,453	1,219,050	20,746,517	32,432,795	*Working capital*
Investasi	803,002	1,802,146	6,510,926	1,575,036	79,902	1,150,742	37,481	1,495,696	3,095,032	16,633,212	33,183,175	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	137,084	137,084	*Consumption*
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	281,667	281,667	*Guarantee financing receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	288,989	288,989	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	3,578	--	--	--	--	--	--	--	--	147,339	150,917	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain - neto *)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,485	38,485	*Other assets - net *)*
Neto	**4,906,278**	**3,714,695**	**7,965,005**	**1,652,789**	**332,042**	**2,135,271**	**632,508**	**2,587,149**	**4,314,082**	**52,984,740**	**81,224,559**	***Net***

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) *Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan) / *32. Credit Risk (continued)*

b. Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan) / *b. Concentration of financial assets risk with credit risk exposure (continued)*

3) Sektor industri (lanjutan) / *3) Industrial sectors (continued)*

Tabel di bawah menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri terhadap rekening administrative:

The following tables provide details of LPEI's credit exposures at their carrying amounts as categorized by industrial sectors to administrative accounts items:

	31 Desember/ *December 31, 2023*											
	Industri tekstil/ *Textile industry*	Industri minyak kelapa sawit mentah/ Crude *palm oil industry*	Industri tanaman perkebunan-kelapa sawit/ *Palm oil - plantation industry*	Pengang-kutan umum-laut/ *General transport sea*	Industri crumb rubber/ *Crumb rubber industry*	Pengang-kutan umum udara/ *General transport air*	Industri perabot/ *Furniture industry*	Industri logam dasar/ *Basic metal industry*	Pertam-bangan batubara/ *Coal mining*	Lainnya/ *Others*	Total	
Bank garansi	--	--	--	985,745	--	54,480	6,300	718,774	109,319	5,867,588	7,742,206	*Bank guarantee*
Penjaminan Kredit PEN	--	--	153,970	--	--	--	--	100,000	--	2,898,965	3,152,935	*Credit Guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	1,316	--	--	--	--	--	--	124,340	125,656	*Current account Outstanding Irrevocable L/C*
Total	**--**	**--**	**155,286**	**985,745**	**--**	**54,480**	**6,300**	**818,774**	**109,319**	**8,890,893**	**11,020,797**	***Total***
Estimasi klaim penjaminan											(448,911)	*Estimated guarantee claim*
Neto											**10,571,886**	***Net***

	31 Desember/ *December 31, 2022*											
	Industri tekstil/ *Textile industry*	Industri minyak kelapa sawit mentah/ Crude *palm oil industry*	Industri tanaman perkebunan-kelapa sawit/ *Palm oil - plantation industry*	Pengang-kutan umum-laut/ *General transport sea*	Industri crumb rubber/ *Crumb rubber industry*	Pengang-kutan umum udara/ *General transport air*	Industri perabot/ *Furniture industry*	Industri logam dasar/ *Basic metal industry*	Pertam-bangan batubara/ *Coal mining*	Lainnya/ *Others*	Total	
Bank garansi	--	--	--	1,582,024	--	3,141	--	1,821,952	289,587	5,034,853	8,731,557	*Bank guarantee*
Penjaminan Kredit PEN	54,486	--	155,675	--	--	--	--	100,000	--	3,387,088	3,697,249	*Credit Guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	4,309	--	--	--	--	247,880	--	142,882	395,071	*Current account Outstanding Irrevocable L/C*
Total	**54,486**	**--**	**159,984**	**1,582,024**	**--**	**3,141**	**--**	**2,169,832**	**289,587**	**8,564,823**	**12,823,877**	***Total***
Estimasi klaim penjaminan											(478,657)	*Estimated guarantee claim*
Neto											**12,345,220**	***Net***

4) Sektor ekonomi / *4) Economic sectors*

Tabel berikut ini menyajikan rincian eksposur risiko kredit berdasarkan sektor ekonomi:

The following tables provide details of LPEI's credit risk exposures by economic sectors:

	31 Desember/ *December 31, 2023*									
	Perindustrian/ *Industry*	Pertanian/ *Agriculture*	Jasa dunia Usaha/ *Business services*	Pengang-kutan/ *Transportation*	Pertam-bangan/ *Mining*	Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurant and hotels*	Konstruksi/ *Construction*	Lainnya/ *Others*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	--	553	553	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	108,256	108,256	*Current accounts with banks*
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	7,414,248	7,414,248	*Placements with Banks*
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	--	1,433,923	1,433,923	*Securities*
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	85	85	*Derivative receivable*
Pembiayaan dan piutang										*Financing and receivables*
Pembiayaan										*Financing*
Modal kerja	8,015,707	1,683,851	364,974	1,046,164	1,707,374	1,098,511	1,548,744	779,905	16,245,230	*Working Capital*
Investasi	7,525,880	6,727,944	2,258,029	2,737,830	4,606,075	230,169	15,114	718,015	24,819,056	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	--	124,928	124,928	*Consumption*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	--	75,059	75,059	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	58,325	--	--	--	--	--	--	94,905	153,230	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain neto *)	--	--	--	--	--	--	--	18,143	18,143	*Other assets - net *)*
Neto	**15,599,912**	**8,411,795**	**2,623,003**	**3,783,994**	**6,313,449**	**1,328,680**	**1,563,858**	**10,768,020**	**50,392,711**	*Net*

32. Risiko Kredit (lanjutan)

32. Credit Risk (continued)

4) Sektor ekonomi (lanjutan)

4) Economic sectors (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2022*									
	Perindustrian/ *Industry*	Pertanian/ *Agriculture*	Jasa dunia Usaha/ *Business services*	Pengang-kutan/ *Transportation*	Pertam-bangan/ *Mining*	Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurant and hotels*	Konstruksi/ *Construction*	Lainnya/ *Others*	Total	
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	--	--	--	426	426	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	180,646	180,646	*Current accounts with banks*
Penempatan pada Bank	--	--	--	--	--	--	--	12,560,255	12,560,255	*Placements with Banks*
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	--	1,970,120	1,970,120	*Securities*
Pembiayaan dan piutang Pembiayaan										*Financing and receivables Financing*
Modal kerja	17,167,072	2,850,470	583,392	1,140,240	6,435,642	1,647,359	1,788,836	819,784	32,432,795	*Working Capital*
Investasi	12,017,092	8,310,916	1,787,745	3,410,736	5,962,575	310,738	1,013,630	369,743	33,183,175	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	--	--	--	--	137,084	137,084	*Consumption*
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	--	--	--	281,667	281,667	*Guarantee financing Receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	--	--	--	288,989	288,989	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	28,178	--	--	--	--	--	--	122,739	150,917	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain neto *)	--	--	--	--	--	--	--	38,485	38,485	*Other assets - net *)*
Neto	**29,212,342**	**11,161,386**	**2,371,137**	**4,550,976**	**12,398,217**	**1,958,097**	**2,802,466**	**16,769,938**	**81,224,559**	*Net*

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) *Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*

Tabel berikut ini menyajikan rincian eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif berdasarkan sektor ekonomi terhadap rekening administratif:

The following tables provide details of LPEI's credit risk exposures relating to administrative accounts items by economic sectors to administrative accounts:

	31 Desember/ *December 31, 2023*									
	Perindustrian/ *Industry*	Pertanian/ *Agriculture*	Jasa dunia Usaha/ *Business services*	Pengang-kutan/ *Transportation*	Pertam-bangan/ *Mining*	Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurant and hotels*	Konstruksi/ *Construction*	Lainnya/ *Others*	Total	
Bank garansi	339,845	--	2,176,759	1,185,101	950,304	474,792	892,707	1,722,698	7,742,206	*Bank guarantee*
Penjaminan Kredit PEN	1,721,895	--	310,000	--	--	417,100	--	703,940	3,152,935	*Credit Guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	116,688	--	8,968	--	--	--	--	--	125,656	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**2,178,428**	**--**	**2,495,727**	**1,185,101**	**950,304**	**891,892**	**892,707**	**2,426,638**	**11,020,797**	***Total***
Estimasi klaim Penjaminan									(448,911)	*Estimated Guarantee claim*
Total									**10,571,886**	***Total***

	31 Desember/ *December 31, 2022*									
	Perindustrian/ *Industry*	Pertanian/ *Agriculture*	Jasa dunia Usaha/ *Business services*	Pengang-kutan/ *Transportation*	Pertam-bangan/ *Mining*	Perdagangan, restoran, dan hotel/ *Trading, restaurant, and hotels*	Konstruksi/ *Construction*	Lainnya/ *Others*	Total	
Bank garansi	1,158,895	--	2,290,541	1,730,749	1,160,069	530,086	445,304	1,415,913	8,731,557	*Bank guarantee*
Penjaminan Kredit PEN	1,782,349	300,000	340,000	--	--	437,100	--	837,800	3,697,249	*Credit Guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	349,864	--	--	--	--	44,217	--	990	395,071	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**3,291,108**	**300,000**	**2,630,541**	**1,730,749**	**1,160,069**	**1,011,403**	**445,304**	**2,254,703**	**12,823,877**	***Total***
Estimasi klaim Penjaminan									(478,657)	*Estimated Guarantee claim*
Total									**12,345,220**	***Total***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan) / 32. Credit Risk (continued)

5) Kualitas kredit dari aset keuangan / *5) Credit quality of financial assets*

Informasi kualitas kredit dari aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The information on the credit quality of neither past due nor impaired financial assets as of December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2023*							
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*				Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Total	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*	Tingkat sub standar/ *Sub-standard grade*	Tidak diperingkat/ *Unrated*				
Giro pada Bank Indonesia	--	553	--	--	--	--	553	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	86,020	22,236	--	--	--	--	108,256	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	6,513,612	900,636	--	--	--	--	7,414,248	*Placements with banks*
Efek-efek	--	1,433,923	--	--	--	--	1,433,923	*Securities*
Tagihan derivatif	--	85	--	--	--	--	85	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang								*Financing and receivables*
Pembiayaan								*Financing*
Modal kerja	1,498,962	7,415,865	99,803	676,346	248,558	6,305,696	16,245,230	*Working capital*
Investasi	2,123,056	9,213,564	1,226,091	6,123,129	1,678	6,131,538	24,819,056	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	124,928	--	--	124,928	*Consumption*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	75,059	--	--	75,059	*Financing guarantee Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	--	153,230	--	--	--	--	153,230	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain - neto *)	--	--	--	18,143	--	--	18,143	*Other assets - net *)*
Neto	**10,221,650**	**19,140,092**	**1,325,894**	**7,017,605**	**250,236**	**12,437,234**	**50,392,711**	*Net*

	31 Desember/ *December 31, 2022*							
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*				Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Total	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*	Tingkat sub standar/ *Sub-standard grade*	Tidak diperingkat/ *Unrated*				
Giro pada Bank Indonesia	--	426	--	--	--	--	426	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	102,112	78,534	--	--	--	--	180,646	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	11,672,917	887,338	--	--	--	--	12,560,255	*Placements with banks*
Efek-efek	--	1,970,120	--	--	--	--	1,970,120	*Securities*
Pembiayaan dan piutang								*Financing and receivables*
Pembiayaan								*Financing*
Modal kerja	375,098	10,521,768	741,338	1,570,797	62,209	19,161,585	32,432,795	*Working capital*
Investasi	1,104,127	8,313,353	1,552,463	9,285,816	901,703	12,025,713	33,183,175	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	137,084	--	--	137,084	*Consumption*
Piutang penjaminan garansi	--	--	--	281,667	--	--	281,667	*Financing guarantee receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	288,989	--	--	288,989	*Insurance and guarantee receivables*
Tagihan akseptasi	--	150,917	--	--	--	--	150,917	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain - neto *)	--	--	--	38,485	--	--	38,485	*Other assets - net *)*
Neto	**13,254,254**	**21,922,456**	**2,293,801**	**11,602,838**	**963,912**	**31,187,298**	**81,224,559**	***Net***

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.

*) *Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*

32. Risiko Kredit (lanjutan)

5) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Kualitas kredit aset keuangan LPEI dinilai dan dikelola berdasarkan peringkat eksternal dan internal.

Kualitas kredit dimonitor dengan menggunakan sistem peringkat IEB *Credit Rating System*. Sistem peringkat dinilai dan diperbarui secara berkala dan peringkat risiko debitur individual divalidasi untuk menjaga akurasi dan konsistensi peringkat risiko. Kualitas kredit berdasarkan sistem peringkat IEB Credit *Rating System* dinilai sebagai berikut:

- Tingkat tinggi

Luar biasa
Debitur diberi peringkat luar biasa (nilai 'AAA') jika memiliki *debt service capacity* yang sangat kuat. Debitur 'AAA' dinilai dapat memiliki sebuah kualitas *outlook* kualitas kredit yang tinggi dalam segala kondisi ekonomi. 'AAA' adalah peringkat tertinggi yang diberikan kepada debitur berdasarkan IEB *Credit Rating System*.

- Tingkat standar

Kuat
Debitur yang diberi peringkat kuat (nilai 'AA') adalah debitur yang dianggap memiliki *debt service capacity* yang sangat kuat dan probabilitas yang rendah pinjamannya akan gagal bayar. Terdapat perbedaan yang kecil antara debitur dengan peringkat 'AA' dan debitur dengan nilai tertinggi.

Baik
Debitur yang diberi peringkat baik (nilai 'A') adalah debitur yang dianggap memiliki *debt service capacity* yang kuat. Walaupun probabilitas gagal bayar rendah, debitur dengan peringkat 'A' dinilai lebih rentan terhadap efek yang merugikan perubahan kondisi ekonomi.

32. Credit Risk (continued)

5) Credit quality of financial assets (continued)

The credit quality of LPEI's financial assets is assessed and managed using external and internal ratings.

The credit quality is monitored using IEB Credit Rating System. The rating system is assessed and updated regularly and individual borrower risk rating is validated to maintain accuracy and consistency of risk rating. The credit quality and the corresponding IEB Credit Rating System grade are as follows:

- *High grade*

Outstanding
A debtor given an outstanding outlook (rated 'AAA') if it has an extremely strong debt service capacity. 'AAA' rated debtors are viewed to possess a high credit quality outlook under all economic conditions. 'AAA' is the highest rating provided to a borrower under the IEB Credit Rating System.

- *Standard grade*

Strong
A debtor given a strong outlook (rated 'AA') is deemed to have a very strong debt service capacity and a low probability of going into default. An 'AA' rated debtor differs from the highest rated debtors in a small degree.

Good
A debtor given a good outlook (rated 'A') is deemed to have a strong debt service capacity. While the probability of default is low, 'A' rated debtors are more susceptible to the adverse effects of changes in economic conditions.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

32. Risiko Kredit (lanjutan)

5) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Rata-rata
Debitur yang diberi peringkat rata-rata (nilai 'BBB') adalah debitur yang dianggap memiliki *debt service capacity* yang memadai. Namun, kondisi ekonomi yang buruk atau perubahan keadaan yang akan cenderung membuat *debt service capacity* melemah.

- Tingkat sub standar

Dapat diterima
Debitur diberi peringkat rata-rata (nilai 'BB') adalah debitur yang dalam jangka pendek dianggap lebih tidak rentan daripada debitur pada peringkat yang lebih rendah lain. Namun, debitur ini menghadapi ketidakpastian yang besar dan terpapar kondisi bisnis yang rugi, kondisi keuangan, atau kondisi ekonomi yang dapat menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya.

Risiko tinggi
Debitur diberi peringkat berisiko tinggi (nilai 'BB-' sampai 'B+') adalah debitur yang dianggap kurang rentan daripada debitur dengan peringkat yang lebih rendah lain. Namun, kondisi bisnis yang merugikan, kondisi keuangan, atau kondisi ekonomi kemungkinan akan menurunkan kemampuan debitur atau menurunkan kesediaan debitur untuk memenuhi komitmen keuangannya.

Dalam perhatian
Eksposur kredit bagi debitur diberi peringkat dalam perhatian (nilai 'B') adalah debitur yang untuk sementara waktu dianggap tidak berisiko tetapi kinerja debitur telah melemah dan kecuali tren berubah, dapat menyebabkan kerugian.

32. Credit Risk (continued)

5) Credit quality of financial assets (continued)

Average
A debtor given an average outlook (rated 'BBB') is deemed to have an adequate debt service capacity. However, adverse economic conditions or changing circumstances are more likely to lead to a weakened debt service capacity.

- *Sub-standard grade*

Acceptable
A debtor given an acceptable outlook (rated 'BB') is deemed to be less vulnerable in the near term than other lower rated debtors. However, it faces major ongoing uncertainties and exposure to adverse business, financial, or economic conditions which could lead to the debtor being unable to meet its financial obligations.

High risk
A borrower given a high risk outlook (rated 'BB-' to 'B+') is deemed to be less vulnerable than lower rated debtors. However, adverse business, financial, or economic conditions will likely impair the debtors capacity or willingness to meet its financial commitments.

Watch list
Credit exposures for a debtor given a watch list outlook (rated 'B') is deemed to be not at risk for the moment but the debtor's performance has already weakened and unless present trends are reversed, could lead to losses.

32. Risiko Kredit (lanjutan)

5) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

- Tidak diperingkat

Aset keuangan yang tidak diperingkat adalah aset yang tidak dinilai dengan Sistem Penilaian IEB atau *provider* peringkat kredit eksternal.

Transaksi tresuri
Untuk memastikan kualitas portofolio investasi LPEI, LPEI menggunakan peringkat kredit eksternal.

6) Efek-efek

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh efek-efek tidak mengalami penurunan nilai dan tergolong lancar sehingga tidak terdapat pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai terkait akun tersebut.

7) Pembiayaan, piutang, dan piutang pembiayaan garansi

Aset keuangan yang signifikan dianalisa berdasarkan bukti objektif secara individual per debitur. Selanjutnya nasabah signifikan yang memiliki bukti objektif penurunan nilai dan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan secara individual berdasarkan arus kas masing-masing debitur, sedangkan debitur yang tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif.

32. Credit Risk (continued)

5) Credit quality of financial assets (continued)

- *Unrated*

Unrated financial assets are those who have not been assessed under the IEB Rating System or by external rating agencies.

Treasury transaction
To ensure the quality of LPEI's investment portfolio, LPEI uses the credit risk rating of external provider.

6) Securities

As of December 31, 2023 and 2022, all securities are not impaired and are classified as current and there is no allowance for impairment losses related to this account.

7) Financing, receivables, and guarantee financing receivables

Individually significant financial asset is analyzed if objective evidence of impairment exist. For significant debtors with objective evidence of impairment and the allowance for impairment losses is calculated individually based on the cash flow while for debtors with no objective evidence of impairment dan the allowance for impairment losses is calculated collectively.

32. Risiko Kredit (lanjutan) / *32. Credit Risk (continued)*

7) Pembiayaan, piutang dan piutang pembiayaan garansi (lanjutan) / *Financing, receivables, and guarantee financing receivables (continued)*

Ikhtisar pembiayaan dan piutang yang diberikan dan piutang pembiayaan garansi adalah sebagai berikut: / *Financing and receivables and guarantee financing receivables are summarized are as follows:*

	31 Desember/ *December 31, 2023*				
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*			
		Individual	Kolektif/ *Collective*	Total	
Rupiah					***Rupiah***
Perindustrian	4,279,212	4,567,581	--	8,846,793	*Manufacturing*
Pertanian	5,104,040	1,914,602	--	7,018,642	*Agriculture*
Jasa dunia usaha	2,435,182	--	--	2,435,182	*Business services*
Perdagangan, restoran dan hotel	853,884	25,716	--	879,600	*Trading, restaurants and hotels*
Pengangkutan	1,893,552	1,403,873	--	3,297,425	*Transportation*
Konstruksi	976,936	477,955	--	1,454,891	*Construction*
Pertambangan	1,546,152	259,216	--	1,805,368	*Mining*
Lain-lain	135,183	71,959	--	207,142	*Others*
Total Rupiah	**17,224,141**	**8,720,902**	--	**25,945,043**	***Total Rupiah***
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Perindustrian	4,710,470	1,984,323	--	6,694,793	*Manufacturing*
Pertanian	1,299,000	94,153	--	1,393,153	*Agriculture*
Jasa dunia usaha	187,821	--	--	187,821	*Business services*
Perdagangan, restoran dan hotel	284,595	164,485	--	449,080	*Trading, restaurants and hotels*
Pengangkutan	278,187	208,382	--	486,569	*Transportation*
Konstruksi	102,026	6,941	--	108,967	*Construction*
Pertambangan	3,422,775	1,085,307	--	4,508,082	*Mining*
Lain-lain	1,242,965	172,741	--	1,415,706	*Others*
Total mata uang asing	**11,527,839**	**3,716,332**	--	**15,244,171**	***Total foreign currencies***
Total	**28,751,980**	**12,437,234**	--	**41,189,214**	***Total***

	31 Desember/ *December 31, 2022*				
	Tidak mengalami penurunan nilai/ *Not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*			
		Individual	Kolektif/ *Collective*	Total	
Rupiah					***Rupiah***
Perindustrian	4,506,053	10,866,264	125,861	15,498,178	*Manufacturing*
Pertanian	4,362,813	3,456,798	630,326	8,449,937	*Agriculture*
Jasa dunia usaha	2,047,177	17,318	--	2,064,495	*Business services*
Perdagangan, restoran dan hotel	496,000	414,663	--	910,663	*Trading, restaurants and hotels*
Pengangkutan	2,207,234	1,484,192	--	3,691,426	*Transportation*
Konstruksi	1,955,170	53,270	--	2,008,440	*Construction*
Pertambangan	1,080,662	3,830,249	163,682	5,074,593	*Mining*
Lain-lain	249,118	139,899	--	389,017	*Others*
Total Rupiah	**16,904,227**	**20,262,653**	**919,869**	**38,086,749**	***Total Rupiah***
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Perindustrian	7,254,066	6,431,919	--	13,685,985	*Manufacturing*
Pertanian	2,369,548	341,902	--	2,711,450	*Agriculture*
Jasa dunia usaha	306,642	--	--	306,642	*Business services*
Perdagangan, restoran dan hotel	702,575	344,859	--	1,047,434	*Trading, restaurants and hotels*
Pengangkutan	358,366	501,184	--	859,550	*Transportation*
Konstruksi	760,797	33,230	--	794,027	*Construction*
Pertambangan	5,110,868	2,135,272	77,483	7,323,623	*Mining*
Lain-lain	798,667	138,927	--	937,594	*Others*
Total mata uang asing	**17,661,529**	**9,927,293**	**77,483**	**27,666,305**	***Total foreign currencies***
Total	**34,565,756**	**30,189,946**	**997,352**	**65,753,054**	***Total***

32. Risiko Kredit (lanjutan) / 32. *Credit Risk (continued)*

8) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

8) The aging analysis of past due but not impaired loans as of December 31, 2023 and 2022:

	31 Desember/ *December 31, 2023*			
	Kurang dari 30 hari/ *Less than 30 days*	**30 sampai 90 hari/ *30 to 90 days***	**Total**	
Modal kerja	248,558	--	248,558	*Working capital*
Investasi	1,678	--	1,678	*Investment*
Neto	**250,236**	**--**	**250,236**	***Net***

	31 Desember/ *December 31, 2022*			
	Kurang dari 30 hari/ *Less than 30 days*	**30 sampai 90 hari/ *30 to 90 days***	**Total**	
Modal kerja	4,703	57,506	62,209	*Working capital*
Investasi	732,965	168,738	901,703	*Investment*
Neto	**737,668**	**226,244**	**963,912**	***Net***

9) Komitmen dan Kontinjensi / *9) Commitments and contingencies*

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	***2022***	
Rupiah			***Rupiah***
Bank garansi	1,677,354	1,388,650	*Bank guarantee*
Penjaminan Kredit PEN	2,306,100	2,786,550	*Credit Guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	9,760	4,727	*Outstanding irrevocable L/C*
	3,993,214	4,179,927	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bank garansi	6,064,852	7,342,907	*Bank guarantee*
Penjaminan Kredit PEN	846,835	910,699	*Credit Guarantee - PEN*
Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan	115,896	390,344	*Outstanding irrevocable L/C*
	7,027,583	8,643,950	
Total	**11,020,797**	**12,823,877**	***Total***

33. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan LPEI untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LPEI. LPEI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Untuk membatasi risiko ini, manajemen telah mengatur diversifikasi sumber dana selain dasar modal intinya, mengelola aset yang terkait likuiditas dan memonitor arus kas dan likuiditas masa depan setiap hari. Hal ini menggabungkan penilaian atas arus kas yang masa depan dan ketersediaan jaminan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk mengamankan dana tambahan jika diperlukan.

LPEI telah merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi perbedaan jatuh tempo antara aset dan liabilitas, di antaranya:

- Menjaga stabilitas dan kontinuitas sumber dan dengan melakukan pengelolaan Aset-Liabilitas secara hati-hati dan terencana.
- Menjaga ketersediaan fasilitas pinjaman *money market line* dari berbagai bank, baik di dalam maupun di luar negeri.

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual berdasarkan *Undiscounted Cash flows*

Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi LPEI di masa mendatang diukur melalui *Liquidity Gap Analysis*, yang merupakan proyeksi kelebihan atau kekurangan likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di LPEI.

33. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk resulting from LPEI's inability to meet maturing liabilities from cash flow funding sources and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting LPEI's activities and financial condition. LPEI manages liquidity risk to fulfill every financial obligation that has been agreed in a timely manner and can maintain an adequate and optimal level of liquidity.

To limit this risk, management has arranged diversified funding sources in addition to its core capital base, manages assets with liquidity in mind, and monitors future cash flows and liquidity on a daily basis. This incorporates an assessment of expected cash flows and the availability of high-grade collateral which could be used to secure additional funding if required.

LPEI has planned step to overcome the maturity gap between assets and liabilities, among others by:

- *Maintaining the stability and continuity of funding sources by managing the Assets-Liabilities carefully and proper planning.*
- *Maintaining the sufficiency of money market line credit facility from several banks, either on-shore or off-shore.*

Analysis of Assets and Liabilities by Remaining Contractual Maturity based on the Undiscounted Cash flows

The potential liquidity risk that LPEI may be exposed in the future is measured through Liquidity Gap Analysis, which is the projection of excess or shortage of liquidity base on maturity of assets and liabilities, after taking into account the need for business expansion. This information is also used as a base consideration when planning and managing liquidity as well as business expansion plan. By implementing effective liquidity management, it is expected to minimize liquidity risk at LPEI.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

33. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual berdasarkan *Undiscounted Cash flows* (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan-neto dalam skala waktu tertentu *(maturity bucket)* berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo *(remaining maturity)*.

33. Liquidity Risk (continued)

Analysis of Assets and Liabilities by Remaining Contractual Maturity based on the Undiscounted Cash flows (continued)

The tables below present the mapping of net financial assets and liabilities undiscounted cash flows in a specific timescale (maturity bucket) based on remaining period until maturity.

	31 Desember/*December 31, 2023*								
	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1-3 bulan/ *More than 1-3 months*	Lebih dari 3-6 bulan/ *More than 3-6 months*	Lebih dari 6-12 bulan/ *More than 6-12 months*	Lebih dari 1-3 tahun/ *More than 1-3 years*	Lebih dari 3-5 tahun/ *More than 3-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	*Total*	
Aset Keuangan									***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	553	--	--	--	--	--	--	553	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	108,256	--	--	--	--	--	--	108,256	*Current accounts with Bank*
Penempatan pada Bank	7,414,644	29,886	--	--	--	--	--	7,444,530	*Placements with Bank*
Efek-efek	4,763	151,228	121,013	137,475	1,165,772	146,707	236,065	1,963,023	*Securities*
Tagihan akseptasi	50,867	55,178	47,839	--	--	--	--	153,884	*Acceptances receivable*
Tagihan derivatif	85	--	--	--	--	--	--	85	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang									*Financing and receivables*
Modal Kerja	5,109,195	2,019,590	2,720,015	1,219,418	1,766,462	3,385,595	10,392,162	26,612,437	*Working Capital*
Investasi	397,645	1,968	448,590	236,413	3,360,252	6,653,984	21,351,996	32,450,848	*Investment*
Konsumsi	38,249	74,618	414	1,058	5,306	21,791	179,452	320,888	*Consumption*
Piutang asuransi dan penjaminan	75,059	--	--	--	--	--	--	75,059	*Insurance and guarantee receivables*
Aset lain-lain - neto *)	18,143	--	--	--	--	--	--	18,143	*Other assets *)*
Sub total	13,217,459	2,332,468	3,337,871	1,594,364	6,297,792	10,208,077	32,159,675	69,147,706	*Sub total*
Liabilitas Keuangan									***Financial Liabilities***
Liabilitas segera	69,132	--	--	--	--	--	--	69,132	*Current liabilities*
Liabilitas Devisa Hasil Ekspor	39,247	81690.	--	--	--	--	--	120,937	*Foreign exchange export proceeds liabilities*
Liabilitas akseptasi	50,867	55,178	47,839	--	--	--	--	153,884	*Acceptances payable*
Liabilitas derivatif	1,477	--	--	--	--	--	--	1,477	*Derivatives payable*
Efek-efek hutang yang Diterbitkan	383,114	1,780,316	10,256,829	5,180,551	9,059,382	2,175,065	2,570,839	31,406,096	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	5,272,615	1,616,657	1,478,280	2,303,415	7,795,127	--	111,545	18,577,639	*Fund borrowings*
Utang asuransi dan penjaminan	23,961	--	--	--	--	--	--	23,961	*Insurance and guarantee payables*
Liabilitas asuransi	6,672	--	--	--	--	--	--	6,672	*Insurance liabilities*
Liabilitas lain-lain**	305,987	--	--	--	--	--	--	305,987	*Other liabilities***
Sub total	6,153,072	3,533,841	11,782,948	7,483,966	16,854,509	2,175,065	2,682,384	50,665,785	*Sub total*
Maturity gap	**7,064,387**	**(1,201,373)**	**(8,445,077)**	**(5,889,602)**	**(10,556,717)**	**8,033,012**	**29,477,291**	**18,481,921**	***Maturity gap***

	31 Desember/*December 31, 2022*								
	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1-3 bulan/ *More than 1-3 months*	Lebih dari 3-6 bulan/ *More than 3-6 months*	Lebih dari 6-12 bulan/ *More than 6-12 months*	Lebih dari 1-3 tahun/ *More than 1-3 years*	Lebih dari 3-5 tahun/ *More than 3-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	*Total*	
Aset Keuangan									***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	426	--	--	--	--	--	--	426	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	180,646	--	--	--	--	--	--	180,646	*Current accounts with Bank*
Penempatan pada Bank	12,520,005	--	--	--	--	--	--	12,520,005	*Placements with Bank*
Efek-efek	51,165	19,967	57,085	71,877	620,813	509,388	583,684	1,913,979	*Securities*
Tagihan akseptasi	47,141	88,077	15,549	--	--	--	--	150,767	*Acceptances receivable*
Pembiayaan dan piutang									*Financing and receivables*
Modal Kerja	7,978,436	4,549,725	4,913,120	3,165,498	5,878,321	4,972,164	19,558,609	51,015,873	*Working Capital*
Investasi	1,524,326	334,942	388,581	1,438,620	6,820,794	16,979,853	25,076,921	52,564,037	*Investment*
Konsumsi	19	105	144	675	5,214	17,998	196,428	220,583	*Consumption*
Piutang asuransi dan penjaminan	288,989	--	--	--	--	--	--	288,989	*Insurance and guarantee receivables*
Aset lain-lain - neto *)	38,485	--	--	--	--	--	--	38,485	*Other assets *)*
Sub total	22,629,638	4,992,816	5,374,479	4,676,670	13,325,142	22,479,403	45,415,642	118,893,790	*Sub total*
Liabilitas Keuangan									***Financial Liabilities***
Liabilitas segera	46,024	--	--	--	--	--	--	46,024	*Current liabilities*
Liabilitas akseptasi	47,141	88,077	15,549	--	--	--	--	150,767	*Acceptances payable*
Liabilitas derivatif	56	--	--	--	--	--	--	56	*Derivatives payable*
Efek-efek hutang yang Diterbitkan	392,517	2,640,529	1,715,905	4,320,397	23,888,840	4,831,964	3,025,372	40,815,524	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	3,650,000	--	4,660,262	7,122,809	14,325,505	--	121,143	29,879,719	*Fund borrowings*
Utang asuransi dan penjaminan	68,021	--	--	--	--	--	--	68,021	*Insurance and guarantee payables*
Liabilitas asuransi	7,961	--	--	--	--	--	--	7,961	*Insurance liabilities*
Liabilitas lain-lain**	612,357	--	--	--	--	--	--	612,357	*Other liabilities***
Sub total	4,824,077	2,728,606	6,391,716	11,443,206	38,214,345	4,831,964	3,146,515	71,580,429	*Sub total*
Maturity gap	**17,805,561**	**2,264,210**	**-1,017,237**	**-6,766,536**	**-24,889,203**	**17,647,439**	**42,269,127**	**47,313,361**	***Maturity gap***

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.
**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

*) *Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*
**) *Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability or reguarantor.*

33. Risiko Likuiditas (lanjutan) / *33. Liquidity Risk (continued)*

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual berdasarkan *Undiscounted Cash flows* (lanjutan) / *Analysis of Assets and Liabilities by Remaining Contractual Maturity based on the Undiscounted Cash flows (continued)*

	31 Desember/December 31, 2023								
	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1-3 bulan/ *More than 1-3 months*	Lebih dari 3-6 bulan/ *More than 3-6 months*	Lebih dari 6-12 bulan/ *More than 6-12 months*	Lebih dari 1-3 tahun/ *More than 1-3 years*	Lebih dari 3-5 tahun/ *More than 3-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	*Total*	
Liabilitas komitmen dan kontinjensi									*Commitment and contingent liabilities*
Bank garansi	795,422	266,963	2,043,428	1,791,794	4,503,820	1,253,214	423,066	11,077,707	*Bank guarantee*
Penerbit LC yang tidak dibatalkan	5,034	68,550	6,319	740	45,349	--	--	125,992	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**800,456**	**335,513**	**2,049,747**	**1,792,534**	**4,549,169**	**1,253,214**	**423,066**	**11,203,699**	***Total***

	31 Desember/*December 31, 2022*								
	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1-3 bulan/ *More than 1-3 months*	Lebih dari 3-6 bulan/ *More than 3-6 months*	Lebih dari 6-12 bulan/ *More than 6-12 months*	Lebih dari 1-3 tahun/ *More than 1-3 years*	Lebih dari 3-5 tahun/ *More than 3-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	*Total*	
Liabilitas komitmen dan kontinjensi									*Commitment and contingent liabilities*
Bank garansi	424,491	1,492,938	1,810,456	1,949,664	4,545,641	1,594,274	806,288	12,623,752	*Bank guarantee*
Penerbit LC yang tidak dibatalkan	75,924	250,614	--	65,269	2,916	--	--	394,723	*Outstanding irrevocable L/C*
Total	**500,415**	**1,743,552**	**1,810,456**	**2,014,933**	**4,548,557**	**1,594,274**	**806,288**	**13,018,475**	***Total***

Untuk aset keuangan, analisis pengelompokan jatuh tempo didasarkan pada sisa periode dari akhir periode pelaporan ke tanggal jatuh tempo kontraktual atau jika lebih awal tanggal perkiraan aset akan direalisasi.

For financial assets, the analysis into maturity buckets is based on the remaining period from the end of the reporting period to the contractual maturity date or if earlier the expected date the assets will be realized.

Untuk liabilitas keuangan, analisis jatuh tempo didasarkan pada tanggal yang lebih awal dimana LPEI disyaratkan untuk membayar.

For financial liabilities, the maturity analysis is based on the earliest date on which LPEI may be required to pay.

Termasuk di tabel di atas adalah arus kas bunga dan pokok. Sepanjang bunga adalah suku bunga mengambang, jumlah yang tidak didiskonto diperoleh dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskonto ditranslasi dengan kurva nilai tukar *forward* yang relevan pada akhir periode pelaporan.

The tables above include both interest and principal cash flows. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted amount is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. For foreign currency denominated financial instruments, the undiscounted amount is translated by the relevant forward exchange curve at the end of the reporting period.

Tabel selanjutnya menyajikan mengenai pemetaan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam skala waktu tertentu (*maturity bucket*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*).

The following tables present the mapping of commitment and contingent liabilities in a specific timescale (maturity bucket) based on remaining maturity.

Sebagai upaya LPEI dalam penyelesaian kredit bermasalah, LPEI telah membukukan penambahan cadangan kerugian penurunan nilai yang terefleksi pada Laporan Keuangan tahun 2023. Kerugian yang terjadi sebagai dampak penambahan cadangan kerugian adalah komponen *non-cash* yang tidak berdampak langsung pada likuiditas.

As LPEI's efforts to resolve bad loans, LPEI has recorded additional reserves for impairment losses which are reflected in the 2023 Financial Report. Losses that occur as a result of additional loss reserves are non-cash components that do not have a direct impact on liquidity.

34. Risiko Pasar

Manajemen telah memberikan penjelasan bahwa dukungan likuiditas telah diperoleh dari Pemerintah dan Perbankan baik dalam bentuk pinjaman jangka pendek maupun jangka menengah.

Risiko pasar merupakan risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas dan/atau rekening administratif termasuk Transaksi Derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Eksposur risiko pasar pada LPEI hanya pada *banking book* karena LPEI tidak melakukan transaksional pada *trading book*, sedangkan trading hanya dilaksanakan dalam rangka lindung nilai (*hedging*) dan bersifat *natural hedge*.

LPEI telah memiliki sistem aplikasi treasuri untuk mengukur risiko pasar (*Opics Plus*) yang merupakan sistem terintegrasi, dan digunakan oleh *front office*, *middle office,* dan *back office* untuk fungsi portofolio *treasury*. Saat ini penggunaan sistem ini belum dioptimalkan karena masih terkendala ketersediaan data dan terbatas pada portofolio *treasury*.

Selain melakukan *monitoring* eksposur risiko instrumen, LPEI juga melakukan monitoring limit risiko pasar dan limit transaksi khusus untuk transaksi *banking book* antara lain limit nominal transaksi *dealer* dan limit *counterpart*. *Monitoring* dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu.

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan nilai tukar mata uang dan perubahan suku bunga.

(i) Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya gap posisi valuta asing yang dimiliki LPEI yang tercermin dalam Posisi Devisa Neto (PDN) LPEI baik secara keseluruhan ataupun laporan posisi keuangan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* dan *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

34. Market Risk

Management has explained that liquidity support has been obtained from the Government and Banking in the form of short-term and medium-term loans.

Market risk is risk to the position of assets, liabilities, equity and/or administrative accounts including Derivative Transactions due to changes in overall market conditions. Market risk exposure to LPEI is only in the banking book because LPEI does not make transactions on the trading book, while trading is only carried out in the context of hedging and is a natural hedge.

LPEI has a treasury application system to measure market risk (Opics Plus) which is an integrated system, and is used by front office, middle office, and back office for treasury portfolios functions. Currently the use of this system is yet to be optimized because it is still constrained by data availability and is limited to treasury portfolios.

In addition to monitoring instrument risk exposure, LPEI also monitors market risk limits and transaction limits specifically for banking book transactions, including nominal limits for dealer transactions and counterparty limits. Monitoring is carried out on a daily basis so as to accelerate the provision of up-to-date information that supports decision-making by line officials and management in a timely manner.

Included in the market risk is the risk of the changes of financial instruments price due to the changes in market factors, such as exchange rate and interest rate changes.

(i) Currency risk

Exchange rate risk is the risk of foreign exchange positions gap held by LPEI and reflected in Net Open Position (NOP) either on or off balance sheet. Included in the NOP is trading book and banking book.

34. Risiko Pasar (lanjutan) / *34. Market Risk (continued)*

(i) Risiko nilai tukar (lanjutan) / *(i) Currency risk (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.05/2022.

As of December 31, 2023 and 2022, the calculation of Net Open Position (NOP) is based on the Regulation of the Financial Services Authority No. 9/POJK.05/2022.

PDN untuk laporan posisi keuangan adalah selisih neto jumlah aset dan jumlah liabilitas dalam setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

The NOP for the statement of financial position is the net difference of total assets and total liabilities in each foreign currency which are stated in Rupiah.

PDN secara keseluruhan adalah penjumlahan nilai absolut dari selisih neto antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih neto dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing, yang dinyatakan dalam Rupiah.

The overall NOP is the total of the absolute values of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency which are stated in Rupiah.

Berdasarkan peraturan tersebut, LPEI wajib memelihara rasio PDN secara keseluruhan dan laporan posisi keuangan setinggi-tingginya sebesar 20% dari modal.

Based on the regulation, LPEI has to maintain the overall NOP at a maximum of 20% of the total capital.

Berikut ini adalah Posisi Devisa Neto LPEI:

The following is LPEI's Net Open Position:

	31 Desember/December 31, 2023			
	Aset/ ***Assets***	**Kewajiban/** ***Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/** ***Net Open Position***	
Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)				***Overall (Statement of Financial Position and Administrative Accounts)***
Dolar Amerika Serikat	24,024,592	25,103,058	1,078,466	*United States Dollars*
Euro Eropa	63,610	63,860	250	*European Euro*
Yen Jepang	156	126	30	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	237	1	236	*Singapore Dollars*
Total			1,078,982	
Laporan Posisi keuangan				***Statement of Financial Position***
Dolar Amerika Serikat	22,221,620	24,939,319	2,717,699	*United States Dollars*
Euro Eropa	2,494	57,267	54,773	*European Euro*
Yen Jepang	156	126	30	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	237	1	236	*Singapore Dollars*
Total			2,772,738	*Total*
Modal (Catatan 38)			8,923,975	*Capital (Note 38)*
Rasio Posisi Devisa Neto (Laporan posisi keuangan)			**31.07%**	***Net Open Position Ratio (Statement of financial position)***
Rasio Posisi Devisa Neto Keseluruhan			**12.09%**	***Overall Net Open Position Ratio***

34. Risiko Pasar (lanjutan) / *34. Market Risk (continued)*

(i) Risiko nilai tukar (lanjutan) / *(i) Currency risk (continued)*

	31 Desember/December 31, 2022			
	Aset/ *Assets*	Kewajiban/ *Liabilities*	Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position*	
Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)				***Overall (Statement of Financial Position and Administrative Accounts)***
Dolar Amerika Serikat	30,883,186	31,354,495	471,309	*United States Dollars*
Euro Eropa	64,902	66,044	1,142	*European Euro*
Yen Jepang	169	147	22	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	56	1	55	*Singapore Dollars*
Total			472,528	*Total*
Laporan Posisi keuangan				***Statement of Financial Position***
Dolar Amerika Serikat	30,505,000	30,926,506	421,506	*United States Dollars*
Euro Eropa	3,000	53,887	50,887	*European Euro*
Yen Jepang	169	147	22	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	56	1	55	*Singapore Dollars*
Total			472,470	*Total*
Modal (Catatan 38)			27,229,719	*Capital (Note 38)*
Rasio Posisi Devisa Neto (Laporan posisi keuangan)			**1.74%**	***Net Open Position Ratio (Statement of financial position)***
Rasio Posisi Devisa Neto Keseluruhan			**1.74%**	***Overall Net Open Position Ratio***

Tabel berikut ini menunjukkan rincian sensitivitas perubahan eksposur LPEI atas perubahan nilai tukar mata uang asing. Analisis sensitivitas hanya termasuk pos moneter yang didenominasi dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode atas perubahan nilai tukar mata uang asing yang relevan. Persentase kenaikan dan penurunan menunjukkan penilaian LPEI atas perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar mata uang asing setelah memperhatikan kondisi ekonomi saat ini.

The following tables detail the sensitivity of LPEI's exposure to changes in foreign exchange rate. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a change in the relevant foreign currency rates. The percentage increase or decrease represents LPEI's assesment of the reasonably possible change in the relevant foreign exchange rates after considering the current economic conditions.

	31 Desember/December 31, 2023								
	USD		EUR		JPY		SGD		
	0.63%	-0.63%	1.97%	-1.97%	5.82%	-5.82%	2.13%	-2.13%	
Aset Keuangan									***Financial Assets***
Giro pada bank	348	(348)	49	(49)	9	(9)	5	(5)	*Current accounts with banks*
Efek-efek	1,576	(1,576)	--	--	--	--	--	--	*Securities*
Tagihan akseptasi	897	(897)	--	--	--	--	--	--	*Acceptances receivable*
Pembiayaan dan piutang	164,372	(164,372)	--	--	--	--	--	--	*Financing and receivables*
Piutang asuransi	46	(46)	--	--	--	--	--	--	*Insurance receivables*
Aset reasuransi	16	(16)	--	--	--	--	--	--	*Reinsurance assets*
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	--	--	--	--	*Guarantee financing receivables*
Aset lain-lain - bersih *)	13	(13)	--	--	--	--	--	--	*Other assets - net *)*
Total - neto	**167,268**	**(167,268)**	**49**	**(49)**	**9**	**(9)**	**5**	**(5)**	***Total - net***
Liabilitas Keuangan									***Financial Liabilities***
Liabilitas devisa hasil ekspor	(759)	759	--	--	--	--	--	--	*Foreign exchange export proceeds liabilities*
Liabilitas akseptasi	(897)	897	--	--	--	--	--	--	*Acceptances payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	(48,739)	48,739	--	--	--	--	--	--	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	(102,859)	102,859	(1,015)	1,015	--	--	--	--	*Fund borrowings*
Liabilitas asuransi	(34)	34	--	--	--	--	--	--	*Insurance liabilities*
Liabilitas lain-lain - bersih **)	(1,862)	1,862	(19)	19	(7)	7	--	--	*Other liabilities-net **)*
Total - neto	**(155,150)**	**155,150**	**(1,034)**	**1,034**	**(7)**	**7**	**--**	**--**	***Total - net***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

34. Risiko Pasar (lanjutan) / *34. Market Risk (continued)*

(i) Risiko nilai tukar (lanjutan) / *(i) Currency risk (continued)*

	31 Desember/December 31, 2022								
	USD		EUR		JPY		SGD		
	1.90% 0	-1.90% 0	3.39% 0	-3.39% 0	3.70% 0	-3.70% 0	2.34% 0	-2.34%	
Aset Keuangan									***Financial Assets***
Giro pada bank	555	(555)	92	(92)	10	(10)	1	(1)	*Current accounts with banks*
Efek-efek	1,651	(1,651)	--	--	--	--	--	--	*Securities*
Tagihan akseptasi	763	(763)	--	--	--	--	--	--	*Acceptances receivable*
Tagihan derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang	174,959	(174,959)	--	--	--	--	--	--	*Financing and receivables*
Piutang asuransi	37	(37)	0	--	--	--	--	--	*Insurance receivables*
Aset reasuransi	18	(18)	0	--	--	--	--	--	*Reinsurance assets*
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	--	--	--	--	*Guarantee financing receivables*
Aset lain-lain - bersih *)	18	(18)	--	--	--	--	--	--	*Other assets - net *)*
Total - neto	**178,001**	**(178,001)**	**92**	**(92)**	**10**	**(10)**	**1**	**(1)**	*Total - net*
Liabilitas Keuangan									***Financial Liabilities***
Liabilitas akseptasi	(763)	763	--	--	--	--	--	--	*Acceptances payable*
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	--	--	--	--	*Derivatives payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	-- (41,544)	-- 41,544	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	(122,319)	122,319	(1,639)	1,639	--	--	--	--	*Fund borrowings*
Liabilitas asuransi	(31)	31	--	--	--	--	--	--	*Insurance liabilities*
Liabilitas lain-lain - bersih **)	(1,318)	1,318	(3)	3	(8)	8	--	--	*Other liabilities-net **)*
Total - neto	**(165,975)**	**165,975**	**(1,642)**	**1,642**	**(8)**	**8**	**--**	**--**	***Total - net***

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.
**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

**) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*
***) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to reguarantor.*

(ii) Risiko suku bunga

LPEI terekspos risiko tingkat suku bunga karena meminjamkan dananya atas dasar bunga tetap dan mengambang. LPEI menerapkan kebijakan pengelolaan aset dan liabilitas untuk memastikan eksposur atas fluktuasi suku bunga dalam batasan yang dapat diterima.

Tabel berikut ini merangkum perbedaan sensitivitas tingkat suku bunga LPEI. Tabel menunjukkan penyesuaian nilai kontraktual untuk setiap kategori aset liabilitas dan item rekening administratif pada pembukuan LPEI. Posisi negatif *gap (short position)* muncul ketika liabilitas menyesuaikan nilai lebih cepat atau pada proporsi yang lebih besar daripada aset sepanjang periode dan cenderung menghasilkan pendapatan bunga neto di dalam lingkungan tingkat suku bunga menurun. Posisi positif gap *(long position)* muncul ketika aset menyesuaikan nilai lebih cepat atau berada pada proporsi yang lebih besar daripada liabilitas sepanjang periode dan cenderung menghasilkan pendapatan bunga neto di dalam lingkungan tingkat suku bunga meningkat.

(ii) Interest rate risk

LPEI is exposed to interest rate risk because it borrows funds at both fixed and floating interest rates. LPEI follows a prudent policy on managing its assets and liabilities to ensure that exposure to fluctuations in interest rates are kept within acceptable limits.

The following tables summarize the interest rate sensitivity gap of LPEI. The tables show the contractual repricing for each category of asset liability and administrative accounts items in LPEI's book. A liability (or negative) gap position exists when liabilities reprice more quickly or in greater proportion than assets during a given period and tends to benefit net interest income in a declining interest rate environment. An asset (or positive) gap position exists when assets reprice more quickly or in greater proportion than liabilities during a given period and tends to benefit net interest income in a rising interest rate environment.

34. Risiko Pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

Syarat penyesuaian nilai kontraktual tidak merefleksikan dampak potensial dari pembayaran kembali awal atau penarikan. Posisi dapat tidak merepresentasikan posisi pada periode tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan besar pada posisi dapat dibuat saat terjadi perubahan potensi pasar. Sebagai tambahan, variasi signifikan pada sensitivitas tingkat suku bunga dapat muncul pada periode penyesuaian nilai dan di antara mata uang dimana LPEI memiliki posisi tingkat suku bunga.

34. Market Risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

Contractual repricing terms do not reflect the potential impact of early repayment or withdrawal. Positions may not be reflective of those in subsequent periods. changes in positions can be made promptly as market outlooks change. In addition, significant variations in interest rate sensitivity may exist within the repricing periods presented and among the currencies in which LPEI has interest rate positions.

	31 Desember/December 31, 2023						
	Suku bunga mengambang/*Floating interest rate*						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ *More than 3 months but less than 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*	Tidak dikenakan bunga/ *Non-interest bearing*	*Total*	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	553	553	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	599	--	--	107,657	--	108,256	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	--	--	--	7,414,248	--	7,414,248	*Placements with banks*
Efek-efek	--	--	--	1,433,923	--	1,433,923	*Securities*
Tagihan derivatif	--	--	--	--	85	85	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang							*Financing and receivables*
Modal kerja	6,886,068	3,894,882	5,464,280	--	--	16,245,230	*Working capital*
Investasi	28,112	340,328	24,450,616	--	--	24,819,056	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	118,747	6,181	124,928	*Consumption*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	75,059	75,059	*Insurance and guaranteee receivables*
Tagihan akseptasi	--	--	--	--	153,230	153,230	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain *)	--	--	--	--	18,143	18,143	*Other assets *)*
Total aset keuangan	6,914,779	4,235,210	29,914,896	9,074,575	253,251	50,392,711	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Liabilitas segera	--	--	--	--	69,132	69,132	*Current liabilities*
Liabilitas Devisa Hasil Ekspor	--	--	--	--	120,928	120,928	*Foreign exchange export proceeds liabilities*
Liabilitas akseptasi	--	--	--	--	153,852	153,852	*Acceptances payable*
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	1,477	1,477	*Derivatives payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	--	--	21,981,313	--	21,981,313	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	6,889,755	3,771,707	7,691,481	--	--	18,352,943	*Fund borrowings*
Utang asuransi	--	--	--	--	5,534	5,534	*Insurance payable*
Utang penjaminan	--	--	--	--	18,427	18,427	*Guarantee payable*
Liabilitas lain-lain **)	--	--	--	--	305,987	305,987	*Other liabilities**)*
Total liabilitas keuangan	6,889,755	3,771,707	7,691,481	21,981,313	675,337	41,009,593	*Total financial liabilities*
Interest Gap	**25,024**	**463,503**	**22,223,415**	**(12,906,738)**	**(422,086)**	**9,383,118**	***Interest Gap***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

34. Risiko Pasar (lanjutan) / *34. Market Risk (continued)*

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan) / *(ii) Interest rate risk (continued)*

	31 Desember/*December 31, 2022*						
	Suku bunga mengambang/*Floating interest rate*						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ *More than 3 months but less than 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*	Tidak dikenakan bunga/ *Non-interest bearing*	*Total*	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	--	--	--	--	426	426	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	180,646	--	--	--	--	180,646	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	--	--	--	12,560,255	--	12,560,255	*Placements with banks*
Efek-efek	--	--	--	1,970,120	--	1,970,120	*Securities*
Pembiayaan dan piutang							*Financing and receivables*
Modal kerja	9,086,681	7,594,662	15,751,452	--	--	32,432,795	*Working capital*
Investasi	662,746	1,596,207	30,924,222	--	--	33,183,175	*Investment*
Konsumsi	--	--	--	131,487	5,597	137,084	*Consumption*
Piutang pembiayaan garansi	--	--	--	--	281,667	281,667	*Guarantee financing receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	--	--	--	--	288,989	288,989	*Insurance and guaranteee receivables*
Tagihan akseptasi	--	--	--	--	150,917	150,917	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain *)	--	--	--	--	38,485	38,485	*Other assets *)*
Total aset keuangan	9,930,073	9,190,869	46,675,674	14,661,862	766,081	81,224,559	*Total financial assets*
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Liabilitas segera	--	--	--	--	46,046	46,046	*Current liabilities*
Liabilitas akseptasi	--	--	--	--	151,161	151,161	*Acceptances payable*
Liabilitas derivatif	--	--	--	--	56	56	*Derivatives payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	--	--	25,290,672	--	25,290,672	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	--	--	--	29,297,065	--	29,297,065	*Fund borrowings*
Utang asuransi	--	--	--	--	6,306	6,306	*Insurance payable*
Utang penjaminan	--	--	--	--	61,715	61,715	*Guarantee payable*
Liabilitas lain-lain **)	--	--	--	--	612,357	612,357	*Other liabilities**)*
Total liabilitas keuangan	--	--	--	54,587,737	877,641	55,465,378	*Total financial liabilities*

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.
**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

**) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*
***) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to reguarantor.*

Tabel di bawah ini menunjukkan suku bunga efektif dari mata uang utama untuk instrumen keuangan moneter yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

The tables below summarize the effectiveinterest rate by major currencies for monetary financial instruments not carried at fair valuethrough profit or loss.

	31 Desember/December 31, 2023				
	Suku Bunga Efektif/ *Effective Interest Rate*		Suku Bunga Kontraktual/ *Contractual Interest Rate*		
	Rupiah %	Mata uang asing/ *Foreign Currency* %	Rupiah %	Mata uang asing/ *Foreign Currency* %	
ASET					***ASSETS***
Giro pada bank	0.00 - 0.00	0.00 - 0.00	0.00 - 0.00	0.00 - 0.00	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	5.70 - 7.60	5.32	5.70 - 7.60	5.32	*Placements with banks*
Efek-efek	5.50 - 8.38	3.40 - 4.13	5.50 - 8.38	3.40 - 4.13	*Securities*
Pembiayaan dan piutang	0.00 - 14.00	0.00 - 11.09	0.00 - 14.00	0.00 - 11.09	*Financing and receivables*
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Efek-efek utang yang diterbitkan	6.90 - 9.80	3.88	6.90 - 9.80	3.88	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	4.75 - 5.35	1.25 - 6.58	4.75 - 5.35	1.25 - 6.58	*Fund borrowings*

34. Risiko Pasar (lanjutan) / *34. Market Risk (continued)*

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan) / *(ii) Interest rate risk (continued)*

	31 Desember/*December 31, 2022*				
	Suku Bunga Efektif/ *Effective Interest Rate*		Suku Bunga Kontraktual/ *Contractual Interest Rate*		
	Rupiah %	Mata uang asing/ *Foreign Currency* %	Rupiah %	Mata uang asing/ *Foreign Currency* %	
ASET					***ASSETS***
Giro pada bank	0.00 - 0.00	0.00 - 0.00	0.00 - 0.00	0.00 - 0.00	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	3.50 - 6.50	3.00 - 4.32	3.50 - 6.50	3.00 - 4.32	*Placements with banks*
Efek-efek	5.50 - 8.38	2.95 - 4.13	5.50 - 8.38	2.95 - 4.13	*Securities*
Pembiayaan dan piutang	0.00 - 14.50	0.00 - 10.75	0.00 - 14.50	0.00 - 10.75	*Financing and receivables*
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Efek-efek utang yang diterbitkan	6.70 - 9.80	3.88	6.70 - 9.80	3.88	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	4.65 - 5.78	1.25 - 4.91	4.65 - 5.78	1.25 - 4.91	*Fund borrowings*

Tabel selanjutnya menunjukkan rincian sensitivitas laba dan ekuitas LPEI terhadap perubahan tingkat suku bunga. Analisis disusun dengan menggunakan asumsi atas saldo instrumen keuangan dengan bunga mengambang pada tanggal pelaporan telah beredar sepanjang tahun, dengan memperhatikan pergerakan aktual atas pokok selama tahun berjalan. Basis poin kenaikan dan penurunan menunjukkan penilaian manajemen atas perubahan yang mungkin terjadi atas suku bunga yang relevan setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

The following tables detail the sensitivity of LPEI's profit and equity to changes in interest rate. The analysis is prepared assuming the amount of floating rate financial instrument outstanding at the reporting date was outstanding for the whole year, taking into account actual principal movements during the year. The basis point increase and decrease represents the management's assesment of the reasonably possible change in the relevant interest rates after considering the current economic conditions.

Tingkat sensitivitas yang digunakan untuk menganalisis kemungkinan perubahan suku bunga yang berdampak pada keuntungan dan kerugian portofolio banking book. Pada analisa sensitivitas menggunakan asumsi perubahan suku bunga untuk *portofolio banking book* dengan basis IDR+/50bp, USD+/-117bp, EUR +/-147bp, JPY +/-45bp dan SGD +/-88bp pada tanggal 31 Desember 2023 dan IDR+/47bp, USD+/-148bp, EUR +/-250bp, JPY +/-44bp dan SGD +/-108bp pada tanggal 31 Desember 2022.

The level of sensitivity that is used to analyze possible changes in interest rates which affect the profit and loss portfolio of banking book. Sensitivity analysis using assumptions of interest rates changes for banking book portfolio with base IDR+/50bp, USD+/-117bp, EUR +/-147bp, JPY +/-45bp and SGD +/-88bp as of December 31, 2023 and IDR+/47bp, USD+/-148bp, EUR +/-250bp, JPY +/-44bp and SGD +/-108bp as of December 31, 2022.

	31 Desember/December 31, 2023										
	Efek pada laba rugi/ *Impact to profit or loss*						Efek pada laba rugi komprehensif/ *Impact to statement on profit or loss and other comprehensive income*				
	IDR		IDR		Lain-lain/*Others*		IDR		USD		
	+50bp	-50bp	+117bp	-117bp			+50bp	-50bp	+117bp	-117bp	
Aset Keuangan											***Financial Assets***
Penempatan pada bank	28,664	(28,664)	12,410	(12,410)	70	(70)	--	--	--	--	*Placements with banks*
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	(22,345)	23,032	(1,694,660)	1,951,743	*Securities*
Pembiayaan dan piutang	223,932	(223,932)	320,597	(320,597)	--	--	--	--	--	--	*Financing and receivables*
Neto	**252,596**	**(252,596)**	**333,007**	**(333,007)**	**70**	**(70)**	**(22,345)**	**23,032**	**(1,694,660)**	**1,951,743**	***Net***

34. Risiko Pasar (lanjutan) / *34. Market Risk (continued)*

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan) / *(ii) Interest rate risk (continued)*

	31 Desember/*December 31, 2022*						
	Efek pada laba rugi/ *Impact to profit or loss*						
	IDR		USD		Lain-lain/*Others*		
	+30bp	-30bp	+78 bp	-78bp			
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Penempatan pada bank	71,904	(71,904)	36,276	(36,276)	564	(564)	*Placements with banks*
Efek-efek	(39,581)	41,231	(2,242,682)	2,674,495	--	--	*Securities*
Pembiayaan dan piutang	235,281	(235,281)	537,207	(537,207)	--	--	*Financing and receivables*
Neto	**267,604**	**(265,954)**	**(1,669,199)**	**2,101,012**	**564**	**(564)**	***Net***

35. Risiko Operasional / *35. Operational Risk*

Identifikasi dan analisa risiko operasional dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat (*inherent*) pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses dan sistem informasi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi dan permodalan LPEI. Kerangka kerja identifikasi risiko operasional berdasarkan faktor-faktor penyebab (*causes*), kejadian (*event*) dan akibat (*impact*).

Operational risk is identified and analyzed through risk factor inherent in all business activities, products, process, and information system, either external or internal factor, that might cause negative impact on objectives and equity of LPEI. The framework of operational risk identification is based on cause, event, and impact.

Secara rutin telah dilakukan proses identifikasi Risiko Operasional secara umum melalui penilaian profil risiko triwulanan. Telah dilakukan pula pengkinian *risk register* yang telah mengacu pada struktur organisasi terbaru, dan dilakukan identifikasi risiko-risiko lain pada unit kerja secara berkala.

Identification of Operational Risk in general has been carried out through the quarterly assessment of risk profile. Risk register referring to the latest organizational structure has also been updated, along with the identification of other risks in each working unit periodically.

Proses pengukuran risiko operasional selain dilakukan secara manual dan telah mulai dilakukan *Risk Control and Self Assessment* (RCSA) sehingga lebih persisi dalam mengukur risiko operasional pada masing-masing divisi dan proses operasional. Pengukuran RCSA dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Saat ini LPEI mulai melakukan pengukuran RCSA secara kualitatif. Kedepannya RCSA akan dilakukan secara kuantitatif untuk mengukur seberapa besar dampak dan kemungkinan kejadian operasional sehingga dapat dibangun mitigasi yang lebih baik dan tepat. Untuk kemudian dilakukan mitigasi agar dapat menurunkan risiko operasional lembaga melalui peningkatan tata kelola atas seluruh proses transaksi yang berjalan.

The process of measuring operational risk is not only done manually and has begun to carry out Risk Control and Self Assessment (RCSA) so that it is more precise in measuring operational risks in each division and operational process. RCSA measurements are carried out qualitatively and quantitatively. Currently, LPEI has begun to measure RCSA qualitatively. In the future, RCSA will be carried out quantitatively to measure how much impact and possibility of operational events so that better and appropriate mitigation can be built. Mitigation is then carried out in order to reduce the operational risk of the institution through improved governance of the entire transaction process.

36. Risiko Asuransi

Risiko utama yang dihadapi LPEI dalam kontrak asuransi adalah klaim aktual dan pembayaran manfaat atau waktu terkait dengan hal tersebut, berbeda dengan yang diperkirakan. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi klaim, besarnya klaim, manfaat klaim yang dibayarkan dan perkembangan selanjutnya atas klaim jangka panjang. Oleh karena itu, tujuan LPEI adalah untuk memastikan terdapat cadangan yang cukup untuk menyelesaikan liabilitas tersebut.

Aktivitas pengelolaan risiko asuransi LPEI dilakukan pada tingkat transaksi dan portofolio. Pada tingkatan transaksi, LPEI membuat batasan risiko atas jumlah yang diasuransikan. Pada tingkatan portofolio, LPEI memastikan bahwa strategi besarnya asuransi dalam sektor ekonomi/industri merefleksikan seluruh struktur ekonomi/ industri nasional. Sebagai tambahan, LPEI juga mengalihkan risiko asuransi kepada pihak lain melalui reasuransi atau koasuransi.

36. Insurance Risk

The principal risk that LPEI faces under insurance contracts is that the actual claims and benefit payments or the timing thereof, differ from expectations. This is influenced by the frequency of claims, severity of claims, actual benefits paid and subsequent development of long-term claims. Therefore, LPEI's objective is to ensure that sufficient reserves are available to cover these liabilities.

LPEI's insurance risk management activities are carried out on a transaction and portfolio level. At the transaction level, LPEI establishes risk limits on the the insured amount. At the portfolio level, LPEI ensures that insurance coverage strategy in the economic/industry sector reflects the overall national economic/ industry structure. Additionally, LPEI also transfers insurance risk to other parties through the use of reinsurance or coinsurance.

37. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

37. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The tables below summarize the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities. The fair values disclosed are based on relevant information available and not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after this date.

37. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

37. *Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)*

	31 Desember/ *December 31, 2023*		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	553	553	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	108,256	108,256	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	7,414,248	7,414,248	*Placements with banks*
Efek-efek	1,433,923	1,433,923	*Securities*
Tagihan akseptasi	153,230	153,230	*Acceptances receivable*
Tagihan derivatif	85	85	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang			*Financing and receivables*
Modal kerja	37,112,264	17,968,946	*Working capital*
Investasi	36,584,723	27,058,429	*Investment*
Konsumsi	126,223	95,898	*Consumption*
Piutang asuransi	75,059	75,059	*Insurance receivables*
Aset lain-lain*)	18,143	18,143	*Other assets*)*
	83,026,707	**54,326,770**	
Liabilitas Keuangan			*Financial Liabilities*
Liabilitas segera	69,132	69,132	*Current liabilities*
Liabilitas Devisa Hasil Ekspor	120,928	120,928	*Foreign exchange export proceeds liabilities*
Liabilitas akseptasi	153,852	153,852	*Acceptances payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	21,992,750	20,350,979	*Debt securities issued*
Liabilitas derivatif	1,477	1,477	*Derivatives payables*
Pinjaman yang diterima	18,352,943	30,710,003	*Fund borrowings*
Utang asuransi	5,534	5,534	*Insurance payable*
Utang penjaminan	18,427	18,427	*Guarantee payable*
Liabilitas lain-lain**)	305,987	305,987	*Other liabilities**)*
	41,021,030	**51,736,319**	

37. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

37. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2022*		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	426	426	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	180,647	180,647	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	12,560,764	12,560,764	*Placements with banks*
Efek-efek	1,970,120	1,970,120	*Securities*
Tagihan akseptasi	151,161	151,161	*Acceptances receivable*
Pembiayaan dan piutang			*Financing and receivables*
Modal kerja	43,958,797	33,427,749	*Working capital*
Investasi	39,539,662	33,193,413	*Investment*
Konsumsi	137,544	127,061	*Consumption*
Piutang asuransi	288,989	288,989	*Insurance receivables*
Aset lain-lain*)	38,485	38,485	*Other assets*)*
	98,826,595	**81,938,815**	
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Liabilitas segera	46,046	46,046	*Current liabilities*
Liabilitas akseptasi	151,161	151,161	*Acceptances payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	25,290,672	22,585,908	*Debt securities issued*
Liabilitas derivatif	56	56	*Derivatives payables*
Pinjaman yang diterima	29,297,065	34,613,657	*Fund borrowings*
Utang asuransi	6,306	6,306	*Insurance payable*
Utang penjaminan	61,715	61,715	*Guarantee payable*
Liabilitas lain-lain**)	612,357	612,357	*Other liabilities***)
	55,465,378	**58,077,206**	

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan uang jaminan.
**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

**) Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*
***) Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to reguarantor.*

Metode dan asumsi yang digunakan oleh LPEI dalam mengestimasi nilai wajar dari instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

(i) Nilai tercatat dari giro pada Bank Indonesia, giro pada bank, penempatan pada bank dengan suku bunga tetap, kas, piutang pembiayaan garansi, tagihan dan liabilitas akseptasi, piutang asuransi, aset reasuransi, utang asuransi, utang penjaminan, liabilitas asuransi dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun.

The methods and assumptions used by LPEI in estimating the fair value of the financial instruments are as follows:

(i) The carrying value of fixed rate current accounts with Bank Indonesia, current accounts withbanks, fixed rates placements with banks, cash, guarantee financing receivable, acceptances receivables and payable, insurances receivable, reinsurance assets, insurances payable, guarantee payable, insurance liabilities and other assets were the reasonable approximation of its fair values since the maturity is below one year.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

37. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(ii) Pembiayaan dan piutang LPEI secara umum terdiri dari pembiayaan dan piutang yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap. Pembiayaan dan piutang yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari pembiayaan dan piutang yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh LPEI. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

(iii) Nilai wajar atas instrumen derivatif yang didapatkan dari teknik penilaian dengan menggunakan masukan yang dapat diamati di pasar terutama adalah suku bunga dan nilai tukar mata uang asing.

(iv) Estimasi nilai wajar liabilitas segera adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

(v) Nilai wajar untuk efek-efek ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek *(dealer).* Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

(vi) Nilai wajar agregat untuk efek-efek utang yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima dengan tingkat bunga tetap didasarkan pada arus kas diskonto model yang menggunakan kurva *yield* terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya. Untuk efek-efek utang yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima dengan suku bunga mengambang nilai tercatat mendekati nilai wajarnya.

LPEI menggunakan hierarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

(i) Tingkat 1: nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga pasar aktif *(unadjusted)* di pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;

37. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

(ii) Financing and receivables of LPEI generally consists of financing and receivables granted ata floating rate and fixed rate. Financing and receivables granted are stated at carrying amount. The fair value of financing and credit extended show discounted value of the estimated future cash flows expected to be received by LPEI. These discounted cash flows use market rates to determine fair value.

(iii) The fair values of derivative instruments are obtained from valuation techniques by usinginputs that can be observed in the market such as interest rate and foreign currency exchange rate.

(iv) The estimated fair values of current liabilities are the amounts repayable on demand.

(v) The fair values of securities are based on the market prices (broker)/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

(vi) The aggregate fair values for debt securities issued and fund borrowings with fixed interestrate are based on discounted cash flow model using current yield curve appropriate for the remaining term to maturity. For debt securities issued and fund borrowings with floating interest rate the carrying value approximates its fair value.

LPEI adopts the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments:

(i) Level 1: fair values derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

37. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(ii) Tingkat 2: pengukuran nilai wajar diperoleh dari input selain dari kuotasi harga pasar yang termasuk dalam Tingkat yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) maupun tidak langsung (diperoleh dari harga);

(iii) Tingkat 3: pengukuran nilai wajar diperoleh dari teknik valuasi yang di dalamnya terdapat input untuk aset dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).

Tabel berikut menunjukan suatu analisa instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan hierarki:

37. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

(ii) Level 2: fair value measurements derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices);

(iii) Level 3: fair value measurements derived from valuation techniques that include inputs for theasset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The following table shows an analysis of financial instruments recorded at fair value by level of the hierarchy:

	31 Desember/ *December 31, 2023*			
	Tingkat/ *Level 1*	**Tingkat/ *Level 2***	**Tingkat/ *Level 3***	
Aset yang diukur pada nilai wajar				*Assets measured at fair value*
Tersedia untuk dijual				*Available-for-sale*
Efek-efek	1,433,923	--	--	*Securities*
Aset keuangan pada FVTPL				*Financial assets at FVTPL*
Tagihan derivatif	--	85	--	*Derivatives receivable*
	1,433,923	85	--	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				*Assets for which fair value are disclosed*
Giro pada				*Current account with*
Bank Indonesia	--	553	--	*Bank Indonesia*
Giro pada bank	--	108,258	--	*Currenct account with bank*
Penempatan pada bank	--	7,414,644	--	*Placement with bank*
Tagihan akseptasi	--	153,852	--	*Acceptances receivable*
Pembiayaan dan piutang				*Financing and receivables*
Modal kerja	--	11,663,250	6,305,696	*Working capital*
Investasi	--	20,926,891	6,131,538	*Investment*
Konsumsi	--	95,898	--	*Consumption*
Piutang asuransi	--	75,059	--	*Insurance receivables*
Aset lain-lain*)	--	18,143	--	*Other assets*)*
	--	40,456,548	12,437,234	
Total	**1,433,923**	**40,456,633**	**12,437,234**	***Total***
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar				*Liabilities measured at fair value*
Liabilitas derivatif	--	1,477	--	*Derivatives payable*
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan				*Liabilities for which fair value are disclosed*
Liabilitas segera	--	69,132	--	*Current liabilities*
Liabilitas akseptasi	--	153,852	--	*Acceptances payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	20,350,979	--	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	--	30,710,003	--	*Fund borrowings*
Utang asuransi	--	5,534	--	*Insurance payable*
Utang penjaminan	--	18,427	--	*Guarantess payable*
Liabilitas lain-lain**)	--	305,987	--	*Other liabilities**)*
	--	51,613,914	--	
Total	--	**51,615,391**	--	***Total***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

37. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

37. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2022*			
	Tingkat/ *Level 1*	**Tingkat/ *Level 2***	**Tingkat/ *Level 3***	
Aset yang diukur pada nilai wajar				*Assets measured at fair value*
Tersedia untuk dijual				*Available-for-sale*
Efek-efek	1,970,120	--	--	*Securities*
	1,970,120	--	--	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				*Assets for which fair value are disclosed*
Giro pada				*Current account with*
Bank Indonesia	--	426	--	*Bank Indonesia*
Giro pada bank	--	180,647	--	*Currenct account with bank*
Penempatan pada bank	--	12,560,764	--	*Placement with bank*
Pembiayaan dan piutang	--	151,161	--	*Financing and receivables*
Modal kerja				*Working capital*
Investasi	--	14,523,483	18,904,266	*Investment*
Konsumsi	--	21,898,600	11,294,813	*Consumption*
Piutang asuransi	--	127,061	--	*Insurance receivables*
Tagihan akseptasi	--	288,989	--	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain*)	--	38,485	--	*Other assets*)*
	--	49,769,616	30,199,079	
Total	**1,970,120**	**49,769,616**	**30,199,079**	***Total***
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar				*Liabilities measured at fair value*
Liabilitas derivatif	--	56	--	*Derivatives payable*
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan				*Liabilities for which fair value are disclosed*
Liabilitas segera	--	46,046	--	*Current liabilities*
Liabilitas akseptasi	--	151,161	--	*Acceptances payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	--	22,585,908	--	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	--	34,613,657	--	*Fund borrowings*
Utang asuransi	--	6,306	--	*Insurance payable*
Utang penjaminan	--	61,715	--	*Guarantess payable*
Liabilitas lain-lain**)	--	612,357	--	*Other liabilities**)*
	--	58,077,150	--	
Total	--	**58,077,206**	--	***Total***

*) Aset keuangan dalam "aset lain-lain" terdiri dari bunga yang masih akan diterima, dan uang jaminan.
**) Liabilitas keuangan dalam "liabilitas lain-lain" terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, tantiem dan jasa produksi dan kewajiban kepada penjamin ulang.

*) *Financial assets under "other assets" consist of accrued interest receivables and refundable deposits.*
**) *Financial liabilities under "other liabilities" consist of accrued interest payable, tantiem and accrued bonus and liability to reguarantor.*

Tidak terdapat perpindahan level untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

There were no transfers between levels for the years ended December 31, 2023 and 2022.

38. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Manajemen modal
Tujuan utama dari kebijakan LPEI atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan LPEI memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi ekspansi usaha LPEI dan memenuhi ketentuan kecukupan permodalan oleh regulator. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) merupakan rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

38. Minimum Required Capital Adequacy Ratio

Capital management
The main purpose of LPEI's policy on capital management policies is to ensure that LPEI has strong capital to support expansive business strategy and to comply with provisions from the regulator. The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of capital of risk weight asset (RWA).

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
ATMR (tanpa memperhitungkan risiko pasar dan operasional)	48,571,877	82,799,897	*Risk Weighted Assets (RWA) (without market and operational risk charge)*
ATMR (dengan memperhitungkan risiko pasar dan operasional)	50,082,730	83,272,425	*RWA (considering market and operatinal risk charge)*
Modal			*Capital*
Modal inti	8,611,218	26,745,646	*Core capital*
Modal pelengkap	343,385	524,562	*Supplementary capital*
Penyertaan Modal	(30,628)	(40,490)	*Equity Investment*
Total modal	**8,923,975**	**27,229,718**	***Total capital***
Rasio KPMM (tanpa memperhitungkan risiko pasar dan operasional)	18.37%	32.89%	*CAR (without market and operational risk charge)*
Rasio KPMM (dengan memperhitungkan risiko pasar dan operasional)	17.82%	32.70%	*CAR (considering market and operational risk charge)*

Perhitungan rasio KPMM LPEI (entitas induk) pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan pada Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.05/2023 dan pada tanggal 31 Desember 2022 didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.010/2009.

The CAR calculation of LPEI (parent only) as of December 31, 2023 is based on OJK Circular Letter No.5/SEOJK.05/2023 and as of December 31, 2022 is based on Minister of Finance Regulation No. 140/PMK.010/2009.

Pada tanggal 31 Desember 2023, berdasarkan profil risiko LPEI triwulan III 2023, KPMM minimum ditetapkan sebesar 10% sampai dengan kurang dari 11% dan pada 31 Desember 2022 KPMM minimum ditetapkan sebesar 8%.

As of December 31, 2023, based on LPEI's risk profile third quarter of 2023, minimum CAR is set at 10% up to less than 11% and as of December 31, 2022 minimum CAR is set at 8%

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, LPEI telah memenuhi ketentuan rasio KPMM.

As of December 31, 2023 and 2022, LPEI has complied with the required capital adequacy ratio.

38. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (lanjutan)

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum LPEI secara konsolidasian dengan memperhitungkan risiko kredit, pasar dan operasional pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 17,88% dan 32,74%

38. Minimum Required Capital Adequacy Ratio (continued)

LPEI's minimum capital adequacy ratio on a consolidated basis as at December 31, 2023 and 2022 after considering credit, market and operational risk is 17.88% and 32.74%.

39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan normal usaha, LPEI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

39. Information of Transaction With Related Parties

In the normal course of business, LPEI enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the terms and conditions agreed by the parties.

Pihak berelasi/*Related parties*	Sifat dari hubungan/*Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/*Nature of transactions*
1. Personel manajemen kunci/ *Key management personnel*	Dewan direktur, direktur pelaksana, komite audit, dewan pengawas syariah dan kepala divisi/*Board of directors, managing directors, audit committee, sharia supervisory board and head of divisions*	Pembiayaan dan piutang dan penyisihan imbalan kerja/ *Financing and receivables, provision for employee benefits*
2. Kementerian Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ *Government of the Republic Indonesia Through the Ministry of Finance*	Pemilik/ *Owner*	Efek-efek dan pinjaman yang diterima/*Securities and fund borrowings*
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank dan penempatan pada bank /*Current account with banks and placements with banks*
4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank, penempatan pada bank dan efek-efek /*Current account with banks, placements with banks and securities*
5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank, penempatan pada bank dan *pinjaman yang diterima/ Current account with banks, placements with banks and fund borrowings*
6. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank, Penempatan pada bank/ *Current account with banks and placements with banks*
7.PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Giro pada bank, pinjaman yang diterima/ *Current account with banks and fund borrowings*
8.PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/ *Financing and receivables*
9.PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

39. Information of Transaction With Related Parties (continued)

Pihak berelasi/*Related parties*	Sifat dari hubungan/*Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/*Nature of transactions*
10. PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
11. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
12.PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
13. PT PAL Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
14. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
15. PT Pindad (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
16. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
17. Pengembangan Pariwisata Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
18. PT Nindya Karya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
19. INKA Multi Solusi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
20. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*

39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

39. Information of Transaction With Related Parties (continued)

Pihak berelasi/*Related parties*	Sifat dari hubungan/*Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/*Nature of transactions*
21. PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
22. PT Angkasa Pura II (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
23. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
24. PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
25. PT Petro Jordan Abadi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
26. PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
27. PT Permodalan Nasional Madani	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
28. PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
29. PT Jasamarga Manado Bitung	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
30. PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*

39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

39. Information of Transaction With Related Parties (continued)

Pihak berelasi/*Related parties*	Sifat dari hubungan/*Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/*Nature of transactions*
31. PT Indah Karya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
32. PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
33. PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
34. Perkebunan Perumahan Presisi Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*
35. PT Sinergi Gula Nusantara	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (RI)/ *Controlling through the Government of the Republic of Indonesia*	Pembiayaan dan piutang/*Financing and receivables*

ASET

a. Giro pada bank (Catatan 5a)

ASSETS

a. Current accounts with banks (Note 5a)

	31 Desember/*December 31*		
	2023	2022	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	26,430	34,529	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	32,929	37,621	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8,986	11,843	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	1,993	2,230	*PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	21	2	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Total	**70,359**	**86,225**	***Total***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan) / *39. Information of Transaction With Related Parties (continued)*

ASET (lanjutan) / *ASSETS (continued)*

b. Penempatan pada bank (Catatan 6a) / *b. Placements with Banks (Note 6a)*

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,007,000	3,587,235	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	30,000	1,324,000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	40,726	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Total	**1,037,000**	**4,951,961**	***Total***

c. Efek-efek (Catatan 7a) / *c. Securities (Note 7a)*

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia	720,979	1,241,336	*The Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	712,944	728,784	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Total	**1,433,923**	**1,970,120**	***Total***

d. Pembiayaan dan piutang (Catatan 9c) / *d. Financing and receivables (Note 9c)*

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	1,472,422	801,164	*PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)*
Pengembangan Pariwisata Indonesia	1,349,246	1,106,186	*Pengembangan Pariwisata Indonesia*
PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	1,115,087	--	*PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)*
PT Angkasa Pura II (Persero)	998,478	1,173,592	*PT Angkasa Pura II (Persero)*
PT Garuda Indonesia (Persero)	994,418	994,942	*PT Garuda Indonesia (Persero)*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	965,632	1,157,165	*PT Krakatau Steel Persero (Tbk)*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	734,000	752,722	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	375,663	1,344,642	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	475,410	478,683	*PT Jasamarga Balikpapan Samarinda*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	315,760	314,848	*PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*
PT PAL Indonesia (Persero)	303,359	310,753	*PT PAL Indonesia (Persero)*
PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	296,026	--	*PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk*
PT Sinergi Gula Nusantara	255,450	--	*PT Sinergi Gula Nusantara*
PT Jasamarga Manado Bitung	238,722	240,433	*PT Jasamarga Manado Bitung*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	201,683	252,993	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Petro Jordan Abadi	141,171	174,138	*PT Petro Jordan Abadi*
PT Inka Multi Solusi	111,048	42,795	*PT Inka Multi Solusi*
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	36,974	14,581	*PT Dirgantara Indonesia (Persero)*
PT Indah Karya (Persero)	20,991	20,991	*PT Indah Karya (Persero)*
PT Indonesia Ferry Property	99,204	--	*PT Indonesia Ferry Property*
PT Pertamina (Persero)	--	3,012,181	*PT Pertamina (Persero)*
PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	--	558,225	*PT Perkebunan Nusantara V (Persero)*
PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	--	513,368	*PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)*
PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	--	343,893	*PT Perkebunan Nusantara I (Persero)*
PT Jasamarga Ngawi Kertasono Kediri	--	280,032	*PT Jasamarga Ngawi Kertasono Kediri*
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	--	110,517	*PT Permodalan Nasional Madani (Persero)*
PT Pindad (Persero)	--	51,994	*PT Pindad (Persero)*
PT Nusantara Turbin dan Propulsi	--	2,665	*PT Nusantara Turbin dan Propulsi*
Personel manajemen kunci	11,487	9,264	*Key management personnel*
Total	10,512,231	14,062,767	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1,301,009)	(388,762)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**9,211,222**	**13,674,005**	***Net***

39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

39. Information of Transaction With Related Parties (continued)

LIABILITAS

LIABILITIES

e. Pinjaman yang diterima (Catatan 17)

e. Fund borrowings (Note 17)

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1,478,280	1,493,288	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Pengendalian melalui Pemerintah RI			*Controlling through the Government of Republic of Indonesia*
Kementerian keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia	51,626	52,680	*Government of the Republic Indonesia through Ministry of Finance*
Total	**1,529,906**	**1,545,968**	***Total***

f. Penyisihan imbalan kerja

f. Provision for employee benefits

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Personel manajemen kunci	33,837	40,533	*Key management personnel*

g. Fasilitas pinjaman kepada debitur yang belum digunakan (Catatan 30)

g. Unused loan facilities to debtors (Note 30)

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Entitas dan lembaga Pemerintah	1,373,836	1,289,023	*Government entities and institutions*

h. Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan (Catatan 30)

h. Outstanding irrevocable L/C (Note 30)

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Entitas dan lembaga Pemerintah	89,504	54,973	*Government entities and institutions*

i. Pendapatan Bunga Kredit Bermasalah (Catatan 30)

i. Interest income on non-performing loans (Note 30)

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Entitas dan lembaga Pemerintah	327,592	391,566	*Government entities and institutions*

j. Bank garansi (Catatan 30)

j. Bank guarantee (Note 30)

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Entitas dan lembaga Pemerintah	1,783,965	1,542,826	*Government entities and institutions*

k. Proteksi piutang dagang (Catatan 30)

k. Receivable protection (Note 30)

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Entitas dan lembaga Pemerintah	44,189	26,776	*Government entities and institutions*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

LIABILITAS (lanjutan)

I. Efek-efek utang yang diterbitkan (Catatan 16)

39. Information of Transaction With Related Parties (continued)

LIABILITIES (continued)

I. Debt securities issued (Note 16)

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Entitas dan lembaga Pemerintah	4,065,000	5,042,000	*Government entities and institutions*

Suku bunga untuk pembiayaan dan piutang dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Interest rate for financing and receivables in Rupiah and United States Dollar with related parties are as follow:

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Suku bunga kontrak			***Contractual interest rate***
Rupiah	0.10% - 10.30%	0.00% - 10.30%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	4.00% - 8.20%	4.00% - 7.49%	*United States Dollar*
Suku bunga efektif			***Effective interest rate***
Rupiah	0.00% - 10.80%	0.00% - 10.35%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	4.00% - 8.78%	5.46% - 7.47%	*United States Dollar*

Persentase saldo dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas LPEI adalah sebagai berikut:

Percentage of balances with related parties to total assets and liabilities of LPEI are as follows:

	31 Desember/*December 31*		
	2023	**2022**	
Aset			***Asset***
Giro pada bank	0.10%	0.10%	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	1.54%	5.91%	*Placements with banks*
Efek-efek	2.12%	2.35%	*Securities*
Pembiayaan dan piutang	13.61%	16.78%	*Financing and receivables*
Total	**17.37%**	**25.14%**	***Total***
Liabilitas			***Liabilities***
Pinjaman yang diterima	3.59%	2.71%	*Fund borrowings*
Penyisihan imbalan kerja	0.08%	0.07%	*Liability for employee benefits*
Efek-efek utang yang diterbitkan	9.55%	8.85%	*Debt securities issued*
Total	**13.22%**	**11.64%**	***Total***

39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

m. Informasi signifikan lainnya

Pelaksanaan Program Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dampak dari Pandemi Covid-19 yang muncul di Indonesia sejak bulan Maret 2020 membuat Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (UU No 2/2020).

Salah satu program pemulihan ekonomi nasional yakni melalui Program Investasi Pemerintah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 Lampiran UU No 2/2020 pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP No 23/2020) yang telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 23/2020 (PP No 43/2020).

39. Information of Transaction With Related Parties (continued)

m. Other significant information

Implementation of Government Investment Program in the Context of the National Economic Recovery Program.

The impact of the Covid-19 Pandemic that has emerged in Indonesia since March 2020 has made the Government stipulated Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability which has been approved by the House of Representatives (DPR) to be later ratified as Law No. 2 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law (Law No 2/2020).

One of the national economic recovery programs is through the Government Investment Program as stated in Article 11 of Attachment of Law No. 2/2020 whose implementation is further regulated in Government Regulation No. 23 of 2020 concerning Implementation of the National Economic Recovery Program in order to Support State Financial Policy for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and Saving the National Economy (Government Regulation No 23/2020) which has been amended by Government Regulation No. 43 of 2020 concerning Amendment to Government Regulation No. 23/2020 (Government Regulation No 43/2020).

39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

m. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada PP 43/2020 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK No.118/2020) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK No. 189/2021).

Penugasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah tersebut kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.06/2020 tentang Penugasan Kepada LPEI sebagai Pelaksana Investasi untuk Melaksanakan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (KMK No. 545/2020).

Pada 28 Desember 2020, telah ditandatangani Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan dan LPEI tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. PRJ-16/KN/2020 dan No.595/PKS/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 (Perjanjian Pelaksanaan Investasi) serta Perjanjian Pemberian Dana Investasi Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam Bentuk Pinjaman Subordinasi dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional No. 75 tanggal 28 Desember 2020 antara LPEI dengan PTPN, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta (Perjanjian Pemberian Dana Investasi).

39. Information of Transaction With Related Parties (continued)

m. Other significant information (continued)

Further provisions regarding Government Investment Procedures as referred to in PP 43/2020 are regulated by Regulation of Minister of Finance No. 118/PMK.06/2020 concerning Government Investments in the Context of the National Economic Recovery Program (PMK No.118/2020) and Regulation of Minister of Finance Number 189/PMK.06/2021 concerning to amendment to Regulation of Minister of Finance No 118/PMK.06/2020 concerning Government Investmens in the Context of the National Economic Recovery Program (PMK No. 189/2021).

The assignment for the implementation of Government Investment was then stipulated in the Decree of Minister of Finance No. 545/KMK.06/2020 concerning Assignment to LPEI as Investment Executor to Implement Government Investment in the Framework of the National Economic Recovery Program for the Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (KMK No. 545/2020).

On December 28, 2020, an Investment Implementation Agreement was signed between the Ministry of Finance and LPEI regarding the Implementation of Government Investments in the Context of the National Economic Recovery Program to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. PRJ-16/KN/2020 and No. 595/PKS/12/2020 dated December 28, 2020 (Investment Implementation Agreement) and the Investment Fund Provision Agreement by the Government of the Republic of Indonesia to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in the form of a subordinated loan in the context of the National Economic Recovery Program No. 75 dated December 28, 2020 between LPEI and PTPN, which was made before Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta (Investment Fund Provision Agreement).

39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

m. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Serta Perjanjian Pemberian Dana Investasi Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam Bentuk Pinjaman Subordinasi dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional No. 75 tanggal 28 Desember 2020 antara LPEI dengan PTPN, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta (Perjanjian Pemberian Dana Investasi) yang telah diubah melalui Perubahan Perjanjian Pemberian Dana Investasi Pemerintah Republik Indonesia Kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam Bentuk Pinjaman Subordinasi dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional No. 21 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta (Perubahan Perjanjian Pemberian Dana Investasi).

Berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Investasi dan Perjanjian Pemberian Dana Investasi, limit Investasi Pemerintah PEN (IP PEN) kepada PTPN sebesar Rp4.000.000 yang digunakan untuk membiayai kegiatan belanja modal perkebunan dan pabrik serta modal kerja untuk komoditas sawit dan tebu. Jangka waktu pemberian IP PEN ditetapkan selama 10 tahun atau sampai dengan tahun 2030 termasuk *grace period* selama 7 tahun.

Di tahun 2023, LPEI selaku Pelaksana Investasi telah melakukan kegiatan penyaluran dana IP PEN sebesar Rp3.999.999 termasuk melaksanakan kegiatan *monitoring* baik *onsite* dengan melakukan *site visit* ke lokasi perkebunan dan pabrik PTPN yang dibiayai IP PEN, serta *monitoring offsite* yang telah dilaporkan kepada Pemberi Investasi antara lain: Laporan Bulanan, Laporan Tengah Tahun, Laporan Tahunan, dan Laporan realisasi pencapaian *Key Achievement Indicator*.

39. Information of Transaction With Related Parties (continued)

m. Other significant information (continued)

And the Investment Fund Provision Agreement by the Government of the Republic of Indonesia to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in the form of a subordinated loan in the context of the National Economic Recovery Program No. 75 dated December 28, 2020 between LPEI and PTPN, which was made before Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta (Investment Fund Provision Agreement) that already changed by an Amandment of Investment Fund Provision Agreement by the Government of the Republic of Indonesia to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in the form of a subordinated loan in the context of the National Economic Recovery Program No. 21 dated October 25, 2023 between LPEI and PTPN, which was made before Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta (Investment Fund Provision Agreement Amandment).

Based on the Investment Implementation Agreement and the Investment Fund Provision Agreement, the limit of Government Investment PEN (IP PEN) to PTPN is in the amount of Rp4,000,000 which is used to finance capital expenditures for plantations and factories as well as working capital for oil palm and sugar cane commodities. The period of granting of the IP PEN is set for 10 years or up to 2030 including a grace period of 7 years.

In 2023, LPEI as the Investment Executor has carried out the distribution of IP PEN funds of Rp3,999,999 including carrying out monitoring activities both onsite by conducting site visits to PTPN plantation and mill locations financed by IP PEN, as well as offsite monitoring that has been reported to the Investment Provider, among others: Monthly Reports, Mid-Year Reports, Annual Reports, and Key Achievement Indicator realization reports.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

39. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

m. Informasi signifikan lainnya (lanjutan)

Pelaksanaan kegiatan penyaluran dana dan *monitoring* IP PEN selama tahun 2023 dan 2022 telah sesuai dengan ketentuan di dalam PMK No. 118/PMK/2020, PMK No.189/PMK.06/2021, KMK No.545/KMK.06/2020, Perjanjian Pelaksanaan Investasi, dan Perjanjian Pemberian Dana Investasi.

39. Information of Transaction With Related Parties (continued)

m. Other significant information (continued)

Implementation of fund distribution activities and monitoring of IP PEN during 2023 and 2022 has complied with the provisions in Regulation of Minister PMK of Finance No. 118/PMK/2020, Regulation of Minister of Finance No. 189/PMK.06/2021, KMK No.545/KMK.06/2020, the Investment Implementation Agreement, and the Investment Fund Provision Agreement.

40. Informasi Tambahan

Rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap total aset produktif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 29,18% dan 14,87%.

40. Additional Information

As of December 31, 2023 and 2022, the non-performing assets to total earning assets ratios were 29.18% and 14.87%, respectively.

41. Informasi Segmen Usaha

Informasi segmen berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

41. Business Segment Information

Segment information based on business type is as follows:

	31 Desember/*December 31, 2023*							
	Penugasan Umum/ *General Assignment*		Penugasan Khusus/ *National Interest Account*					
	Konvensional/ *Conventional*	Syariah/ *Sharia*	Konvensional/ *Conventional*	Syariah/ *Sharia*	Entitas anak/ *Subsidiary*	Eliminasi/ *Elimination*	*Total*	
Pendapatan segmen	3,153,922	488,513	408,176	141	1,345	--	4,052,097	*Segment income*
Beban segmen	(2,604,887)	(524,006)	--	--	--	--	(3,128,893)	*Segment expenses*
Pendapatan segmen - neto	549,035	(35,493)	408,176	141	1,345	--	923,204	*Segment income - net*
Pendapatan operasional lainnya	208,463	6,155	44,458	--	--	--	259,076	*Other operating income*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(13,920,444)	(2,997,999)	(13,979)	28	--	--	(16,932,394)	*Provision for impairment losses on financial assets*
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan	4,006	--	(1,012)	--	--	--	2,994	*Provision for impairment Losses on estimated guarantee claim*
Beban operasional lainnya	(765,280)	(8,971)	(8,594)	--	(11,187)	--	(794,032)	*Other operating expenses*
Rugi operasional	(13,924,220)	(3,036,308)	429,049	169	(9,842)	--	(16,541,152)	*Loss from operations*
Pendapatan bukan operasional - neto	(50)	78	599	--	--	9,861	10,488	*Non-operating income - net*
Pendapatan (Beban) pajak							(1,583,663)	*Tax Income (expense)*
Rugi tahun berjalan							(18,114,327)	*Loss for the year*
Aset	**35,231,615**	**5,047,668**	**15,968,370**	**1,257**	**31,232**	**(4,930,863)**	**51,349,279**	***Assets***
Liabilitas	**40,577,099**	**6,124,427**	**815,060**	**1,088**	**603**	**(4,930,465)**	**42,587,812**	***Liabilities***

	31 Desember/*December 31, 2022*							
	Penugasan Umum/ *General Assignment*		Penugasan Khusus/ *National Interest Account*					
	Konvensional/ *Conventional*	Syariah/ *Sharia*	Konvensional/ *Conventional*	Syariah/ *Sharia*	Entitas anak/ *Subsidiary*	Eliminasi/ *Elimination*	*Total*	
Pendapatan segmen	2,711,128	594,748	404,978	148	849	--	3,711,851	*Segment income*
Beban segmen	(2,396,842)	(539,272)	--	--	--	--	(2,936,114)	*Segment expenses*
Pendapatan segmen - neto	314,286	55,476	404,978	148	849	--	775,737	*Segment income - net*
Pendapatan operasional lainnya	(296,383)	425,938	56,659	--	--	--	186,214	*Other operating income*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(2,947,166)	487,246	352,324	--	--	--	(2,107,596)	*Provision for impairment losses on financial assets*
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan	(488)	--	(164)	--	--	--	(652)	*Provision for impairment Losses on estimated guarantee claim*
Beban operasional lainnya	(734,277)	(8,703)	(9,146)	--	(10,362)	--	(762,488)	*Other operating expenses*
Rugi operasional	(3,664,028)	959,957	804,651	148	(9,513)	--	(1,908,785)	*Loss from operations*
Pendapatan bukan operasional - neto	6,654	--	253	--	--	9,513	16,420	*Non-operating income - net*
Pendapatan (Beban) pajak							(1,222,189)	*Tax Income (expense)*
Rugi tahun berjalan							(3,114,554)	*Loss for the year*
Aset	**58,997,445**	**9,187,863**	**15,627,317**	**3,187**	**41,343**	**(41,403)**	**83,815,752**	***Assets***
Liabilitas	**49,843,106**	**6,427,906**	**673,499**	**3,057**	**852**	**(913)**	**56,947,507**	***Liabilities***

42. Analisis Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas / *42. Maturity Analysis of Assets and Liabilities*

	31 Desember/ *December 31, 2023*			31 Desember/ *December 31, 2022*			
	Jatuh tempo dalam satu tahun/ *One year And below*	Jatuh tempo lebih dari satu tahun/ *Due beyond one year*	Total	Jatuh tempo dalam satu tahun/ *One year And below*	Jatuh tempo lebih dari satu tahun/ *Due beyond one year*	Total	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Giro pada Bank Indonesia	553	--	553	426	--	426	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank	108,258	--	108,258	180,647	--	180,647	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank	7,414,644	--	7,414,644	12,560,764	--	12,560,764	*Placements with banks*
Efek-efek	170,312	1,263,611	1,433,923	56,471	1,913,649	1,970,120	*Securities*
Tagihan akseptasi	153,852	--	153,852	151,161	--	151,161	*Acceptances receivable*
Tagihan derivatif	85	--	85	--	--	--	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang syariah	18,806,506	55,016,705	73,823,211	23,739,078	59,896,924	83,636,002	*Financing and sharia receivables*
Piutang pembiayaan garansi lainnya	3,161	--	3,161	325,532	--	325,532	*Other guarantee receivables*
Piutang asuransi dan penjaminan	75,059	--	75,059	288,989	--	288,989	*Insurance and guarantee receivables*
Aset lain-lain	18,142	--	18,142	41,202	--	41,202	*Other assets*
Total aset keuangan	26,750,572	56,280,316	83,030,888	37,344,270	61,810,573	99,154,843	*Total financial assets*
Aset Non Keuangan							***Non-financial Assets***
Kas	85	--	85	38	--	38	*Cash*
Biaya dibayar dimuka	--	20,458	20,458	--	15,128	15,128	*Prepaid expenses*
Klaim atas kelebihan pembayaran Pajak	--	--	--	--	865	865	*Claim for tax refund*
Aset pajak tangguhan-neto	--	--	--	--	1,552,978	1,552,978	*Deferred tax assets-net*
Aset tetap	--	1,546,422	1,546,422	--	1,525,478	1,525,478	*Premises and equipment*
Aset reasuransi	2,933	--	2,933	3,543	--	3,543	*Reinsurance assets*
Aset lain-lain	18,458	--	18,458	18,091	--	18,091	*Other assets*
Total aset non keuangan	21,476	1,566,880	1,588,356	21,672	3,094,449	3,116,121	*Total non-financial assets*
	26,772,048	57,847,196	84,619,244	37,365,942	64,905,022	102,270,964	
Akumulasi penyusutan			(631,787)			(527,643)	*Accumulated depreciation*
Cadangan kerugian penurunan nilai			(32,638,178)			(17,927,568)	*Allowance for impairment losses*
Total			**51,349,279**			**83,815,753**	***Total***
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilties***
Liabilitas segera	69,131	--	69,131	46,046	--	46,046	*Current liabilities*
Liabilitas Devisa Hasil Ekspor	120,928	--	120,928	--	--	--	*Foreign exchange export proceeds liabilities*
Efek-efek utang yang diterbitkan	13,843,494	8,137,819	21,981,313	3,087,899	22,202,773	25,290,672	*Debt securities issued*
Pinjaman yang diterima	10,661,462	7,691,481	18,352,943	15,433,833	13,863,232	29,297,065	*Fund borrowings*
Liabilitas akseptasi	153,852	--	153,852	151,161	--	151,161	*Acceptances payable*
Liabilitas derivatif	1,477	--	1,477	56	--	56	*Derivatives payable*
Utang asuransi	5,534	--	5,534	6,306	--	6,306	*Insurance payable*
Utang penjaminan	18,427	--	18,427	61,715	--	61,715	*Guarantee payable*
Liabilitas sewa guna usaha	2,961	2,376	5,337	2,921	2,632	5,553	*Lease payable*
Liabilitas lain-lain	305,988	--	305,988	612,357	--	612,357	*Other liabilities*
Total liabilitas keuangan	25,183,254	15,831,676	41,014,930	19,402,294	36,068,637	55,470,931	*Total financial liabilities*
Liabilitas Non Keuangan							***Non-financial Liabilitiies***
Utang pajak	16,279	--	16,279	11,267	--	11,267	*Taxes payable*
Penyisihan imbalan kerja	--	142,522	142,522	--	144,514	144,514	*Provision for employee benefits*
Estimasi klaim	448,911	--	448,911	478,657	--	478,657	*Estimated claims*
Liabilitas asuransi	6,672	--	6,672	7,961	--	7,961	*Insurances liabilities*
Liabilitas lain-lain	958,498	--	958,498	834,177	--	834,177	*Other liabilities*
Total liabilitas non keuangan	1,430,360	142,522	1,572,882	1,332,062	144,514	1,476,576	*Total non-financial liabilities*
Total	**26,613,614**	**15,974,198**	**42,587,812**	**20,734,356**	**36,213,151**	**56,947,507**	***Total***

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

43. Tambahan Informasi Arus Kas

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

43. Additional Cash Flow Information

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2022	Arus kas/*Cash flow*		Perubahan Non Kas/ *Non Cash Changes*		31 Desember/ *December 31,* 2023	
		Penerimaan/ *Receipt*	Pembayaran/ *Payment*	Pergerakan Kurs Mata Uang *Asing/ Foreign Exchange Rate*	Lain-lain/ *Others*		
Rupiah							***Rupiah***
Liabilitas sewa	5,553	--	(3,944)	340	3,388	5,337	*Lease liabilities*
Pinjaman yang diterima	29,297,065	29,298,758	(40,239,514)	--	--	18,356,309	*Fund borrowing*
Efek-efek yang diterbitkan	25,290,672	--	(3,322,316)	--	9,591	21,977,947	*Debt securities issued*
Total	**54,593,290**	**29,298,758**	**(43,565,774)**	**340**	**12,979**	**40,339,593**	***Total***

	31 Desember/ *December 31,* 2021	Arus kas/*Cash flow*		Perubahan Non Kas/ *Non Cash Changes*		31 Desember/ *December 31,* 2022	
		Penerimaan/ *Receipt*	Pembayaran/ *Payment*	Pergerakan Kurs Mata Uang *Asing/ Foreign Exchange Rate*	Lain-lain/ *Others*		
Rupiah							***Rupiah***
Liabilitas sewa	10,980	--	(6,047)	--	620	5,553	*Lease liabilities*
Pinjaman yang diterima	28,799,571	70,215,181	(69,717,687)	--	--	29,297,065	*Fund borrowing*
Efek-efek yang diterbitkan	27,712,389	--	(3,089,300)	657,500	10,083	25,290,672	*Debt securities issued*
Total	**56,522,940**	**70,215,181**	**(72,813,034)**	**657,500**	**10,703**	**54,593,290**	***Total***

44. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Amandemen dan revisi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang Dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa–Balik;
- Amendemen PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang pengaturan pembiayaan pemasok;
- Revisi PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah; dan
- Revisi PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

44. Accounting Standards and Standard Interpretations which Has Issued But Not Yet Effective

Amendment and revised to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2024, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements related to Non-Current Liabilities with Covenants;*
- *Amendments PSAK 73: Lease Liability in a Sale and Leaseback;*
- *Amendments PSAK 2: Statement of Cash Flows and PSAK 60: Financial Instrument: Disclosure regarding supplier finance agreement*
- *Revised PSAK 101: Presentation of Shariah Financial Statements; and*
- *Revised PSAK 109: Accounting of Zakah, Infaq, and Sadaqah.*

44. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif;
- Amendemen PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang kekurangan ketertukaran.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 74: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 2: Laporan Arus Kas
- PSAK 13: Properti Investasi
- PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 16: Aset Tetap
- PSAK 19: Aset Takberwujud
- PSAK 22: Kombinasi Bisnis
- PSAK 24: Imbalan Kerja
- PSAK 48: Penurunan Nilai Aset
- PSAK 50: Instrumen Keuangan Penyajian
- PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
- PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 71: Instrumen Keuangan
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasi ini diotorisasi, LPEI masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

DSAK-IAI juga mengesahkan perubahan penomoran PSAK dan ISAK yang berlaku efektif 1 Januari 2024, dimana perubahan ini tidak memengaruhi substansi pengaturan dalam masing-masing PSAK dan ISAK tersebut.

44. Accounting Standards and Standard Interpretations which Has Issued But Not Yet Effective (continued)

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- *PSAK 74: Insurance Contract;*
- *Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information;*
- *Amendments PSAK 10: Foreign Exchange Rate regarding lack of exchangeability.*

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 74: Insurance Contracts, as follows:

- *PSAK 1: Presentation of Financial Statements*
- *PSAK 2: Statement of Cash Flows*
- *PSAK 13: Investment Property*
- *PSAK 15: Investment in Associated Entities and Joint Ventures*
- *PSAK 16: Fixed Assets*
- *PSAK 19: Intangible Assets*
- *PSAK 22: Business Combinations*
- *PSAK 24: Employee Benefits*
- *PSAK 48: Impairment of Asset*
- *PSAK 50: Financial Instruments: Presentation*
- *PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*
- *PSAK 58: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*
- *PSAK 60: Financial Instruments: Disclosures*
- *PSAK 71: Financial Instruments*
- *PSAK 72: Income from Contracts with Customers*

Until the date of the consolidated financial statements is authorized, the LPEI is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

DSAK-IAI also ratified changes to the numbering pf PSAK and ISAK which will be effective on January 1, 2024. This change does not affect the substance of the requirement in each PSAK and ISAK.

45. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

a. Jaringan Kantor

Kantor LPEI berlokasi di Prosperity Tower, District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta - 12190. Pada tanggal 31 Desember 2023, LPEI mempunyai tiga kantor wilayah yaitu Kantor Wilayah I; Kantor Wilayah II membawahi Kantor Cabang Balikpapan; dan Kantor Wilayah III membawahi Kantor Cabang Makassar dan Kantor Cabang Denpasar. LPEI juga memiliki Kantor Area Medan yang membawahi Kantor Cabang Batam.

b. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit dan Pegawai

Susunan Direktur Pelaksana LPEI setelah tanggal neraca 31 Desember 2023 sesuai dengan Surat Keputsan Dewan Direktur Lambaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0001/KDD/02/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Pelaksana Lembaga pembiayaan Ekspor Indonesia, masa jabatan Agus Windiarto selaku pejabat Plt. Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2024. Dan sesuai dengan Surat keputusan Dewan Direktur No. 0002/KDD/03/2024 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tanggal 14 Maret 2024 menetapkan Sam Malee sebagai Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sejak 14 Maret 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024.

Peranan dan tanggung jawab pembidangan Manajemen LPEI berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif No.0001/PDE/01/2024 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang mulai berlaku tanggal 1 Februari 2024 adalah sebagai berikut:

45. Events After Reporting Date

a. Office Network

LPEI office is located at the Prosperity Tower, District 8, Jenderal Sudirman Street Lot 52-53, Jakarta - 12190. As of December 31, 2023, LPEI has three Regional Offices, namely Regional Office I; Regional Office II oversees the Balikpapan Branch Office; and Regional Office III oversees the Makassar Branch Office and Denpasar Branch Office. LPEI also has a Medan Area Office which oversees the Batam Branch Office.

b. Board of Directors, Managing Directors, Audit Committee and Employees

The Managing Directors of LPEI after balance sheet date December 31, 2023 is in accordance with the Decree of the Board of Directors of the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0001/KDD/02/2024 regarding concerning Extension of the Term of Office of the Acting Managing Director of the Indonesian Export Financing Institution, Agus Windiarto's term of office as Plt. Managing Director for Risk & Credit Management extended until March 31, 2024. And in accordance with Decree of the Board of Director of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No. 0002/KDD/03/2024 regarding Appointment of Managing Directors of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dated March 14, 2024, Sam Malee was assigned as a Managing Directors since March 14, 2024 until August 31, 2024.

The roles and responsibilities of Management of LPEI based on the Board of Executive Directors Decision Letter No. 0001/PDE/01/2024 regarding the Guidelines and Work Procedures of the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, which came into force on February 1, 2024, are as follows:

45. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (lanjutan)

b. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)

- Direktur Eksekutif membawahi Direktur Pelaksana Bisnis, Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis, Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit, Direktur Pelaksana Manajemen Keuangan, Operasional & Teknologi Informasi, Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia, *Head of* Kepatuhan, SDM, & Transformasi Organisasi, dan *Subject Matter Experts*.
- Direktur Pelaksana Bisnis membawahi Divisi Bisnis I, II, III dan IV, Ekosistem Bisnis, Eksekutif Bisnis, Pusat Layanan Pembiayaan Perdagangan, Fungsional Risiko Operasional dan Kepatuhan dan *Chief of* Wilayah.
- Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis membawahi Divisi Penugasan Khusus Ekspor, Pembiayaan Perdagangan dan Pembiayaan, Divisi Penjaminan & Asuransi, Divisi Jasa Konsultasi, Unit Usaha Syariah, Proyek Khusus, dan Intelejen Pasar & Manajemen Prospek.
- Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit membawahi Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kebijakan, Prosedur & Produk, dan Eksekutif Analisa Risiko.
- Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi membawahi Divisi Operasional, Divisi Teknologi Infoemasi, Ekonom dan *Chief of* Keuangan, Tresuri, & Strategi.
- Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya manusia membawahi Divisi Sekretariat Lembaga dan Hubungan Kelembagaan, Divisi Pengadaan & Umum, Penugasan Umum, Divisi Hukum dan *Chief of* SDM, Hukum & Kepatuhan.
- Chief of Wilayah membawahi Kantor Wilayah I, II dan II dan Kantor Area Medan.

45. Events After Reporting Date (continued)

b. Board of Directors, Managing Directors, Audit Committee and Employees (continued)

- *Executive Director is responsible for Managing Director of Business, Managing Director of Business Development, Managing Director of Credit & Risk Management, Managing Director of Finance, Operational & IT and Managing Director of Corporate Secretary, Compliance & Human Capital, Chief of Compliance, HR & Organization Transformation, and Subject Matter Experts.*
- *Managing Director of Business is responsible for Business Division I, II, III and IV, Business Ecosystem, Executive Business Officer, Trade Services Center, Designated Compliance & Risk Operations and Chief of Region.*
- *Managing Director of Business Development is responsible for NIA, Trade Finance & Financing Division, Guarantee & Insurance Division, Advisory Services Division, Sharia Unit, Special Projects and Market Intelligence & Lead Management.*
- *Managing Director of Credit & Risk Management is responsible for Risk Management, Policy, Procedure & Product Division and Chief of Business Risk.*
- *Managing Director of Finance, Operations & IT is responsible for Operating Division, Inforrmation Technology Division, Economist, and Chief of Finance, Treasury & Strategy.*
- *Managing Director of Corporate Secretary, Compliance & Human Capital is responsible for Corporate Secretary & Stakeholder Engagement Division, Procurement & GA Division, Special Assignment and Chief of Human Capital, Legal, & Compliance.*
- *Chief of Region is responsible for Regional Office I, II and III and Medan Area Office.*

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

45. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (lanjutan)

b. Dewan Direktur, Direktur Pelaksana, Komite Audit dan Pegawai (lanjutan)

- Chief of Risiko Bisnis membawahi Eksekutif Analisa Risiko.
- Chief of SDM, Hukum & Kepatuhan membawahi Divisi Hukum dan Kepatuhan dan Divisi Sumber Daya Manusia.
- *Chief of* Keuangan, Tresuri, & Strategi membawahi Divisi Perencanaan Strategi & Transformasi, Divisi Pendanaan & Tresuri, Divisi Keuangan dan Manajemen Neraca.
- *Chief of* Audit Internal membawahi Divisi Audit Umum, Divisi Audit Khusus dan Manajemen Mutu & Metodologi.

c. Kasus Hukum

Terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian yaitu adanya informasi kasus hukum atas dugaan tindak pidana dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang melibatkan beberapa debitur LPEI, baik yang masih dalam tahap pelaporan/penyelidikan awal maupun tahap penyidikan oleh institusi penegak hukum Indonesia. Namun demikian, mengingat kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebut diindikasikan bukan merupakan tindak pidana korporasi, maka dampak hukum akan tertuju kepada pertanggungjawaban perorangan dan bukan kepada Lembaga (LPEI). Berdasarkan premis tersebut dan mengingat pembiayaan kepada debitur yang terkait dengan kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebut sudah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara memadai, sehingga manajemen berpendapat bahwa kasus hukum yang sedang dihadapi LPEI dipandang tidak akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian LPEI 31 Desember 2023.

45. Events After Reporting Date (continued)

b. Board of Directors, Managing Directors, Audit Committee and Employees (continued)

- *Chief of Business Risk is responsible for Executive Risk Officer.*
- *Chief of HC, Legal & Compliance is responsible for Legal & Compliance Division and Human Capital Division.*
- *Chief of Finance, Treasury & Strategy is responsible for Strategic Planning & Transformation Division, Funding & Treasury Division, Finance Division and Balance Sheet Management.*
- *Chief of Internal Audit is responsible for Regular Audit Division, Special Audit Division and QA & Methodology.*

c. Legal Case

There were important subsequent event, regarding information of legal case alleged unlawful acts in providing financing facilities involving several LPEI's debtors, both are still in the initial reporting/inquiry stage and the investigation stage at Indonesian law enforcement agencies. However, considering that the legal case is related to alleged unlawful acts committed by individual persons, the legal impact will be directed at individual persons and not at the Institution as a separate legal entity. Based on this premise and considering that adequate allowance for impairment losses have been provided for the financing to debtors related to legal case of alleged unlawful acts, management believes that the legal case currently being faced by LPEI is deemed not to have a material impact on LPEI's consolidated financial statements as of December 31, 2023.

45. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (lanjutan)

c. Kasus Hukum (lanjutan)

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang melibatkan beberapa debitur LPEI tersebut masih dalam tahap pelaporan/penyelidikan awal maupun tahap penyidikan. Selain itu, terdapat ketidakpastian mengenai apakah terdapat kerugian keuangan dan non-keuangan lebih lanjut terhadap LPEI sebagai konsekuensi kasus tersebut. Manajemen telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi atas dampak keuangan maupun non-keuangan atas kasus hukum dugaan tindak pindana tersebut. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dampak dari proses kasus hukum atas dugaan tindak pidana tersebut belum dapat diperkirakan.

45. Events After Reporting Date (continued)

c. Legal Case (continued)

Until the issuance date of the consolidated financial statements, the process of legal case for alleged unlawful acts in providing financing facilities involving several LPEI's debtors both are still in the initial reporting/inquiry stage and investigation stage. In addition, there is uncertainty whether there will be further any financial and non-financial losses to LPEI as a consequence of this case. Management has prepared mitigation steps for the financial and non-financial impacts of this legal case for alleged unlawful acts. Until the issuance date of the consolidated financial statements, the impact of the legal case for alleged unlawful acts cannot be estimated accordingly.

46. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan konsolidasian LPEI disusun menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2023, LPEI memiliki saldo defisit sebesar Rp28.967.721 (2022: Rp10.853.394) dan perolehan rugi tahun berjalan sebesar Rp18.114.327 (2022: Rp3.114.554).

Dalam menghadapi kondisi tersebut, LPEI telah merumuskan strategi utama yang akan dilakukan dalam penyehatan keuangan, antara lain:

a. LPEI telah melakukan perbaikan fondasi melalui penguatan *governance*, *risk and compliance*, serta perbaikan infrastruktur dan sumber daya manusia. Hal ini diharapkan agar dapat menopang arah strategi bisnis kedepan dengan kolaborasi dan inovasi dengan ekosistem ekspor.

b. Percepatan perbaikan kualitas aset dilakukan melalui hapus buku, *collection, recovery*, upaya hukum, kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Selain itu peran PT IPA sebagai anak perusahaan akan terus dioptimalkan efektivitasnya dalam memperbaiki kualitas aset LPEI.

46. Going Concern

The consolidated financial statements of LPEI is prepared by using the going concern basis of accounting.

On December 31, 2023, LPEI has a deficit amounting to Rp28,967,721 (2022: Rp10,853,394) and net loss amounting to Rp18,114,327 (2022: Rp3,114,554).

To address these condition, LPEI has formulated main strategies that will be implemented in financial restructuring, as follow:

a. LPEI has carried out foundation improvements through strengthening governance, risk and compliance, as well as improving infrastructure and human resources. This is expected that can support the direction of future business strategies through collaboration and innovation with the export ecosystem.

b. Accelerated improvement in asset quality is carried out through write-offs, collection, recovery, legal action, collaboration with law enforcement officers. Apart from that, PT IPA's role as a subsidiary will continue to optimize its effectiveness in improving LPEI's asset quality.

46. Kelangsungan Usaha (lanjutan)

c. Pemerintah telah memberikan dukungan dengan menganggarkan PMN dan pinjaman Pemerintah untuk pengembangan bisnis dan likuiditas LPEI.

46. Going Concern (continued)

c. The Government has provided support by budgeting PMN and Government loans for LPEI's business development and liquidity.

47. Informasi Keuangan Tambahan

Informasi keuangan LPEI (entitas induk) yang terdapat dalam lampiran, yang terdiri dari laporan posisi keuangan 31 Desember 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (secara kolektif yang disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir.

47. Additional Financial Information

The accompanying financial information of LPEI (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2023 and 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended December 31, 2023 and 2022 (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and related directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements.

48. Penyelesaian Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh manajemen pada tanggal 28 Maret 2024.

48. Completion of The Financial Statements

The management is responsible for the preparation of financial statements which are completed and authorized for issue on March 28, 2024.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

Attachment I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	31 Desember / *December 31,*		
	2023	**2022**	
ASET			***ASSETS***
Kas	85	38	*Cash*
			Current account
Giro pada Bank Indonesia	553	426	*with Bank Indonesia*
Giro pada bank			*Current accounts with banks*
Penugasan Umum	84,285	148,974	*General Assignment*
Cadangan kerugian			*Allowance for*
penurunan nilai	(2)	(1)	*impairment losses*
	84,283	148,973	
Penugasan Khusus	23,533	31,061	*National Interest Account*
Cadangan kerugian			*Allowance for*
penurunan nilai	--	--	*impairment losses*
	23,533	31,061	
	107,816	180,034	
Penempatan pada bank			*Placements with banks*
Penugasan Umum	1,402,644	2,139,938	*General Assignment*
Cadangan kerugian			*Allowance for*
penurunan nilai	(38)	(9)	*impairment losses*
	1,402,606	2,139,929	
Penugasan Khusus	5,982,000	10,380,100	*National Interest Account*
Cadangan kerugian			*Allowance for*
penurunan nilai	(358)	(500)	*impairment losses*
	5,981,642	10,379,600	
	7,384,248	12,519,529	
Efek-efek	1,433,923	1,970,120	*Securities*
Tagihan derivatif	85	--	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang,			*Financing and receivables,*
pembiayaan dan piutang syariah			*financing and sharia receivables*
dan piutang lainnya			*and other receivables*
Pembiayaan dan piutang, dan			*Financing and receivables, and*
pembiayaan dan piutang syariah			*financing and sharia receivables*
Penugasan Umum			*General Assignment*
Pembiayaan dan piutang			
yang diberikan	59,935,321	68,673,657	*Financing and Receivables*
Cadangan kerugian			*Allowance for*
penurunan nilai	(27,665,053)	(15,548,824)	*impairment losses*
	32,270,268	53,124,833	
Pembiayaan dan piutang			*Financing and*
syariah yang diberikan	9,937,139	11,469,720	*sharia receivables*
Cadangan penyisihan			*Allowance for*
aset produktif	(4,906,231)	(2,285,350)	*doubtful accounts*
	5,030,908	9,184,370	
Penugasan Khusus			*National Interest Account*
Pembiayaan dan piutang			
yang diberikan	3,949,482	3,489,399	*Financing and receivables*
Cadangan kerugian			*Allowance for*
penurunan nilai	(62,701)	(48,735)	*impairment losses*
	3,886,781	3,440,664	

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

Attachment I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	31 Desember / *December 31,* 2023	2022	
ASET (lanjutan)			***ASSETS (continued)***
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	1,269	3,227	*Financing and sharia receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(12)	(40)	*Allowance for doubtful accounts*
	1,257	3,187	
Total - neto	41,189,214	65,753,054	*Total - net*
Piutang lainnya			***Other receivables***
Piutang pembiayaan garansi	3,161	325,532	*Guarantee financing receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,161)	(43,865)	*Allowance for impairment losses*
	--	281,667	
Pajak dibayar dimuka	--	865	*Prepaid tax*
Biaya dibayar dimuka	19,936	15,394	*Prepaid expenses*
Piutang asuransi dan penjaminan	75,059	288,989	*Insurance and guarantee receivables*
Aset reasuransi	2,933	3,544	*Reinsurance assets*
Tagihan akseptasi			*Acceptances receivable*
Penugasan Umum	150,461	147,569	*General Assignment*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(604)	(231)	*Allowance for impairment losses*
	149,857	147,338	
Penugasan Khusus	3,391	3,592	*National Interest Account*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18)	(13)	*Allowance for impairment losses*
	3,373	3,579	
	153,230	150,917	
Penyertaan saham - neto	30,628	40,490	*Equity investment - net*
Aset tetap			*Premises and equipment*
Harga perolehan	1,546,408	1,525,478	*Cost*
Akumulasi penyusutan	(631,786)	(527,643)	*Accumulated depreciation*
	914,622	997,835	
Aset pajak tangguhan - neto	--	1,552,978	*Deferred tax assets - net*
Aset lain-lain	37,090	59,933	*Other assets*
TOTAL ASET	**51,349,422**	**83,815,813**	***TOTAL ASSETS***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

Attachment I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	31 Desember / *December 31,*		
	2023	**2022**	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Liabilitas segera	69,131	46,046	*Current liabilities*
Liabilitas devisa hasil ekspor	120,928	--	*Foreign exchange export proceeds liabilities*
Liabilitas akseptasi			*Acceptances payable*
Penugasan Umum	150,461	147,569	*General Assignment*
Penugusan Khusus	3,391	3,592	*National Interest Account*
	153,852	151,161	
Utang pajak	16,279	11,267	*Taxes payable*
Efek-efek utang yang diterbitkan	21,992,750	25,311,700	*Debt securities issued*
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(11,437)	(21,028)	*Unamortized debt issuance cost*
	21,981,313	25,290,672	
Liabilitas derivatif	1,477	56	*Derivatives payable*
Pinjaman yang diterima	18,352,943	29,297,065	*Fund borrowings*
Utang asuransi			*Insurance payable*
Penugasan Umum	5,453	6,306	*General Assignment*
Penugusan Khusus	81	--	*National Interest Account*
	5,534	6,306	
Utang penjaminan			*Guarantee payable*
Penugasan Umum	1,667	706	*General Assignment*
Penugusan Khusus	16,760	61,009	*National Interest Account*
	18,427	61,715	
Liabilitas asuransi			*Insurance liabilities*
Penugasan Umum	6,474	7,961	*General Assignment*
Penugusan Khusus	198	--	*National Interest Account*
	6,672	7,961	
Estimasi klaim penjaminan			*Estimated guarantee claim*
Penugasan Umum	5,347	9,414	*General Assignment*
Penugusan Khusus	443,564	469,243	*National Interest Account*
	448,911	478,657	
Liabilitas imbalan kerja	142,522	144,514	*Liability for employee benefits*
Liabilitas sewa	5,337	5,553	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	1,264,630	1,446,596	*Other liabilities*
TOTAL LIABILITAS	**42,587,956**	**56,947,569**	***TOTAL LIABILITIES***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

Attachment I
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	31 Desember / *December 31,*		
	2023	**2022**	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)			***LIABILITIES AND EQUITY (continued)***
EKUITAS			***EQUITY***
Kontribusi modal Pemerintah			*Government capital contribution*
Penugasan Umum	23,589,123	23,589,123	*General Assignment*
Penugasan Khusus	14,013,308	14,013,308	*National Interest Account*
	37,602,431	37,602,431	
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak tangguhan	(23,492)	(3,391)	*Unrealized loss of financial assets at fair value through other comprehensive income, net of deferred tax*
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	150,248	122,598	*Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax*
Saldo laba			*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya:			*Appropriated:*
Cadangan umum	322,161	322,161	*General reserve*
Cadangan tujuan	758,235	758,235	*Specific reserve*
	1,080,396	1,080,396	
Belum ditentukan penggunaannya	(30,048,117)	(11,933,790)	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS	**8,761,466**	**26,868,244**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**51,349,422**	**83,815,813**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran II
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

Attachment II
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	31 Desember / *December 31*,		
	2023	**2022**	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			***INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS***
Pendapatan bunga dan usaha syariah			*Interest income and income from sharia*
Pendapatan bunga			*Interest income*
Penugasan Umum	3,153,922	2,711,128	*General Assignment*
Penugasan Khusus	408,176	404,978	*National Interest Account*
	3,562,098	3,116,106	
Usaha syariah			*Income from sharia*
Penugasan Umum	488,450	594,439	*General Assignment*
Penugasan Khusus	141	148	*National Interest Account*
	488,591	594,587	
Total pendapatan bunga dan usaha syariah	4,050,689	3,710,693	*Total interest income and income from sharia*
Pendapatan usaha dari Ujrah	64	309	*Income from Ujrah*
Beban bunga	(3,128,893)	(2,936,114)	*Interest expense*
PENDAPATAN BUNGA DAN USAHA SYARIAH - NETO	**921,860**	**774,888**	***INTEREST INCOME AND INCOME FROM SHARIA - NET***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA			***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan dari asuransi			*Income from insurance*
Pendapatan dari asuransi	21,675	23,129	*Income from insurance*
Premi reasuransi	(9,089)	(10,053)	*Reinsurance premiums*
Pendapatan dari asuransi - neto	12,586	13,076	*Income from insurance - net*
Penurunan/ (Kenaikan) pada liabilitas asuransi	1,059	(1,444)	*Decrease/ (Increase) in insurance liabilities*
(Penurunan)/ Kenaikan pada aset reasuransi	(494)	903	*(Decrease)/ Increase in reinsurance assets*
Beban klaim asuransi dan lainnya	(933)	(994)	*Claim expense from insurance and other*
Pendapatan dari penjaminan	90,527	115,552	*Income from guarantee*
Keuntungan/(kerugian) transaksi mata uang asing - neto	6,828	(35,302)	*Gain/(loss) on foreign exchange transactions - net*
Provisi dan komisi selain dari pembiayaan dan piutang	52,779	51,176	*Non financing and receivables related fees and commission*
Keuntungan penjualan efek - efek	12,139	--	*Gain on sale of securities*
Lain-lain	84,585	43,247	*Others*
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - NETO	**259,076**	**186,214**	***TOTAL OTHER OPERATING INCOME - NET***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran II
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Attachment II
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless orherwise stated)

	31 Desember / *December 31*,		
	2023	**2022**	
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(16,932,394)	(2,107,596)	*Provision for impairment losses on financial assets*
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan	2,994	(652)	*Provision for impairment losses on estimated guarantee claim*
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			***OTHER OPERATING EXPENSES***
Gaji dan tunjangan	(471,598)	(458,842)	*Salaries and benefits*
Umum dan administrasi	(298,743)	(269,823)	*General and administrative*
Lain-lain	(12,486)	(23,461)	*Others*
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(782,827)	(752,126)	***TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES***
RUGI OPERASIONAL	(16,531,291)	(1,899,272)	***LOSS FROM OPERATIONS***
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - NETO	627	6,907	***NON-OPERATING INCOME - NET***
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK	(16,530,664)	(1,892,365)	***LOSS BEFORE TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK	(1,583,663)	(1,222,189)	***TAX EXPENSE***
RUGI TAHUN BERJALAN	**(18,114,327)**	**(3,114,554)**	***LOSS FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS***
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	(19,145)	(38,273)	*Changes in fair value of financial assets fair value through other comprehensive income- net*
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	(956)	8,420	*Tax related to components of other comprehensive income*
	(20,101)	(29,853)	

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

Lampiran II
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

Attachment II
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	31 Desember / *December 31*,		
	2023	**2022**	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS***
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	(3,991)	3,935	*Remeasurement of defined benefit obligation*
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	31,641	(866)	*Tax related to components of other comprehensive income*
	27,650	3,069	
PENGHASILAN/ (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK	7,549	(26,784)	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME/ (LOSS) - NET OF TAX***
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(18,106,778)**	**(3,141,338)**	***TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR***

LAMPIRAN III
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT III
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah unless orherwise stated)

	Kontribusi modal Pemerintah/ *Government capital contribution*	Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak tangguhan/ *Unrealized gain/(loss) from increase in the fair value of financial assets in group at fair value through other comprehensive income net of deferred tax*	Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan/ *Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax*	Saldo laba/*Retained earnings*				
				Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*		Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Total ekuitas/ *Total Equity*	
				Cadangan umum/ *General reserve*	Cadangan tujuan/ *Specific reserve*			
Saldo per 31 Desember 2021	**37,340,939**	**26,462**	**119,529**	**322,161**	**758,235**	**(8,446,949)**	**30,120,377**	***Balance as of December 31, 2021***
Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 pasal 20 ayat (2)	--	--	--	(87,164)	--	--	(87,164)	*Impact of transitional adjustment on Government's not-tax revevue based on Law No.2 year 2009 article 20 paragraph 2*
Kapitalisasi Modal berdasarkan UU No. 2 tahun 2009 pasal 20 ayat (2)	261,492	--	--	(261,492)	--	--	--	*Capitalization based on Law No.2 year 2019 article 20 paragraph*
Bagian laba pemerintah	--	--	--	--	--	(23,631)	(23,631)	*Government's profit share*
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	--	--	--	348,656	--	(348,656)	--	*Allocation for general reserve and specific reserve*
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak tangguhan	--	(29,853)	--	--	--	--	(29,853)	*Unrealized loss of financial assets at fair value through other comprehensive income- net of deferred tax*
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	--	--	3,069	--	--	--	3,069	*Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax*
Rugi tahun berjalan	--	--	--	--	--	(3,114,554)	(3,114,554)	*Loss for the year*
Saldo per 31 Desember 2022	**37,602,431**	**(3,391)**	**122,598**	**322,161**	**758,235**	**(11,933,790)**	**26,868,244**	***Balance as of December 31, 2022***
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak tangguhan	--	(20,101)	--	--	--	--	(20,101)	*Unrealized loss of financial assets at fair value through other comprehensive income- net of deferred tax*
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	--	--	27,650	--	--	--	27,650	*Remeasurement of defined benefit obligation, net of deferred tax*
Rugi tahun berjalan	--	--	--	--	--	(18,114,327)	(18,114,327)	*Loss for the year*
Saldo per 31 Desember 2023	**37,602,431**	**(23,492)**	**150,248**	**322,161**	**758,235**	**(30,048,117)**	**8,761,466**	***Balance as of December 31, 2023***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

LAMPIRAN IV
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT IV
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF CASH FLOW
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	31 Desember / *December 31*,		
	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	3,562,705	3,104,498	*Interest, fees and commissions received*
Pendapatan usaha syariah	488,049	594,896	*Sharia income*
Pendapatan operasional lainnya - neto	251,682	221,516	*Other operating income - net*
Pembayaran pajak penghasilan badan - neto	865	75,806	*Payments of corporate income tax - net*
Beban operasional lainnya - neto	(682,757)	(638,998)	*Other operating expenses - net*
Pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya	(3,156,317)	(2,301,480)	*Interest and other financing charges*
Pendapatan bukan operasional - neto	627	6,898	*Non-operating income - net*
Arus kas dari operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	464,854	1,063,136	*Cash flows from operations before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi			*Changes in operating assets and liabilities*
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:			*(Increase)/decrease in operating assets:*
Tagihan derivatif	(85)	6	*Derivatives receivable*
Pembiayaan dan piutang	6,441,424	(2,681,616)	*Financing and receivables*
Pembiayaan/piutang syariah	1,155,766	958,557	*Sharia financing/receivables*
Biaya dibayar dimuka	(4,505)	653	*Prepaid expenses*
Piutang asuransi dan penjaminan	534,894	(27,125)	*Insurance and guarantee receivables*
Aset reasuransi	117	(929)	*Reinsurance assets*
Tagihan akseptasi	(2,693)	310,295	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain	18,034	6,601	*Other assets*
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:			*Increase/(decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera	23,085	13,476	*Current liabilities*
Liabilitas devisa hasil ekspor	120,928	--	*Foreign exchange export proceeds liabilities*
Liabilitas akseptasi	2,691	(309,379)	*Acceptances payable*
Utang pajak	5,012	(1,683)	*Taxes payable*
Liabilitas derivatif	1,421	56	*Derivatives payable*
Utang asuransi	287	2,251	*Insurances payable*
Utang penjaminan	(43,288)	(648)	*Guarantee payable*
Liabilitas asuransi	(1,289)	1,571	*Insurance liabilities*
Estimasi klaim penjaminan	(26,752)	86,098	*Estimated guarantee claim*
Liabilitas imbalan kerja	(5,983)	(9,226)	*Liability for employee benefits*
Liabilitas lain-lain	(144,954)	215,112	*Other liabilities*
Kas neto diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	8,538,964	(372,794)	***Net cash provided by/ (used in) operating activities***

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*

LAMPIRAN IV
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT IV
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(PARENT ENTITY)
STATEMENTS OF CASH FLOW (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in million Rupiah
unless orherwise stated)

	31 Desember / *December 31*,		
	2023	**2022**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset tetap	--	9	*Proceeds from sale of premises and equipment*
Pembelian efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya	--	(1,476,856)	*Purchase of marketable securities at fair value through other comprehensive income*
Penyertaan saham	9,862	9,513	*Equity investment*
Penjualan efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya	517,052	28,513	*Selling of marketable securities at fair value through other comprehensive income*
Perolehan aset tetap	(13,126)	(11,549)	*Acquisitions of premises and equipment*
Kas neto diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi	513,788	(1,450,370)	***Net cash provided by/ (used in) investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman yang diterima	29,298,758	70,215,181	*Proceeds from fund borrowings*
Pembayaran pinjaman yang diterima	(40,239,514)	(69,717,687)	*Payments of fund borrowings*
Pembayaran efek-efek utang yang diterbitkan yang jatuh tempo	(3,322,316)	(3,089,300)	*Payments for matured debt securities issued*
Pembayaran liabilitas sewa	(3,944)	(6,047)	*Payments of lease liability*
Pembayaran ke pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak	--	(87,164)	*Payments for government as Goverment non Tax Revenue*
Pembayaran bagian laba pemerintah	--	(23,631)	*Payments government's profit share*
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(14,267,016)	(2,708,648)	***Net cash used in financing activities***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	6,828	(35,302)	*Foreign exchange effect related to cash and cash equivalents*
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(5,207,436)	(4,567,114)	***NET DECREASE IN CASH AND EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	12,700,537	17,267,651	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**7,493,101**	**12,700,537**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:			***COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:***
Kas	85	38	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	553	426	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank	107,818	180,035	*Current accounts with banks*
Penempatan pada bank - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	7,384,645	12,520,038	*Placements with banks - maturing within three months or less since the acquisition date*
Total kas dan setara kas	**7,493,101**	**12,700,537**	***Total cash and cash equivalents***

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

Laporan Tahunan | Annual Report
2023

Harmoni

HADIRKAN SEMANGAT KOLABORASI MEMBANGUN NEGERI
Spirit of Collaboration in Advancing the Nation

Indonesia Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Prosperity Tower Lantai 1, District 8,
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Tel. (62-21) 395 03600
Fax. (62-21) 395 03699
E-mail: corpsec@indonesiaeximbank.go.id

www.indonesiaeximbank.go.id